PLN
Nusantara Power

LEADING THE ENERGY TRANSITION TOWARDS SUSTAINABLE FUTURE

Memimpin Transisi Energi Menuju
Masa Depan Berkelanjutan

2023

Laporan Tahunan
Annual Report

Tema dan Kesinambungan Tema
Themes and Its Continuity

LEADING THE ENERGY TRANSITION TOWARDS SUSTAINABLE FUTURE

Memimpin Transisi Energi Menuju Masa Depan Berkelanjutan

Tahun 2023 menandai tonggak sejarah bagi PLN Nusantara Power (PLN NP) dalam memimpin perubahan menuju masa depan energi yang berkelanjutan. Sebagai bagian dari struktur Holding Sub Holding (HSH) PLN Group, PLN NP memperkuat komitmen untuk menjadi pelopor dalam mengarahkan perubahan positif dalam industri energi dengan fokus utama pada transisi energi yang berkelanjutan sebagai respon untuk menangani dampak perubahan iklim yang saat ini terus menjadi isu prioritas global. Dengan statusnya yang baru sebagai Sub Holding pembangkitan, PLN NP telah meningkatkan kapasitas dan jumlah pembangkitannya, mencapai 16,25 GW yang tersebar di seluruh Indonesia. Melalui program strategis korporat, Perusahaan membidik untuk menjawab tantangan dan isu strategis, mengoptimalkan portofolio bisnis, dan mendukung agenda transisi energi nasional. Tren global menuju dekarbonisasi, digitalisasi, dan desentralisasi memandu langkah-langkah PLN NP dalam bergerak ke arah energi baru dan berkelanjutan. Melalui upaya-upaya ini, perusahaan berusaha untuk mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan efisiensi energi, sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mencapai karbon netral atau Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060.

Dengan memanfaatkan peluang inovasi dan meningkatkan kompetitivitas perusahaan di pasar energi global yang semakin berorientasi pada energi terbarukan, PLN NP berkomitmen untuk memimpin pengembangan dan peningkatan penggunaan energi terbarukan melalui peningkatan kapasitas Hydro & Solar PV, peningkatan persentase co-firing biomassa di PLTU dan penerapan program dieselisasi di seluruh Indonesia. Kemitraan strategis dengan berbagai pihak juga terus dilakukan untuk membantu mempercepat transisi energi dan memastikan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dengan menerapkan prinsip Environment, Social, dan Governance (ESG) dalam setiap aspek operasionalnya. Sejalan dengan hal tersebut, PLN NP berkesad untuk menjadi Perusahaan pembangkitan yang terdepan dan terpercaya untuk energi berkelanjutan di Indonesia dan luar negeri. Dengan demikian, PLN NP tidak hanya menjadi agen perubahan dalam energi berkelanjutan, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.

Melalui komitmen dan langkah besar yang dilakukan dalam memimpin transisi energi melalui portofolio bisnis yang terus berkembang dan berfokus pada pembangunan pembangkit EBT dan dieselisasi, PLN NP yakin akan semantiasa menyediakan solusi energi ramah lingkungan bagi masa depan berkelanjutan yang lebih baik dan menjadikan energi bersih sebagai standar utama dalam industri tenaga listrik. Semangat memimpin transisi energi menuju masa depan yang berkelanjutan, menjadikan PLN NP berada di garis depan perubahan positif dalam industri energi, membawa Indonesia menuju era energi yang lebih bersih, efisien dan berkelanjutan.

2023 marks a milestone for PLN Nusantara Power in leading the change towards a sustainable energy future. As part of the PLN Group Holding Sub Holding (HSH) structure, PLN Nusantara Power strengthens the commitment to being a pioneer in directing positive change in the energy industry with a main focus on a sustainable energy transition as a response to dealing with the impacts of climate change which currently continues to be a priority global issue. With its new status as a generation Sub Holding, PLN Nusantara Power increased generation capacity and amount, reaching 16.25 GW spread all over Indonesia. Through corporate strategic programs, the Company purposes to overcome the strategic challenges and issues, optimize its business portfolio, and support the national energy transition agenda. Global trends towards decarbonization, digitalization and decentralization guide PLN Nusantara Power steps in moving towards the new and sustainable energy. Through these efforts, the Company purposes to reduce environmental impact and increase energy efficiency, in line with the government commitment to achieving carbon neutrality or Net Zero Emissions (NZE) by 2060.

By taking advantage of innovation opportunities and increasing company competitiveness in a global energy market that is increasingly oriented towards renewable energy, PLN Nusantara Power is committed to leading the development and increase in the use of renewable energy through increasing Hydro & Solar PV capacity, increasing the percentage of biomass co-firing in CFPP as well as implementing de-dieselization programs throughout Indonesia. PLN NP also keeps applying strategic partnerships with various parties to assist the acceleration of energy transition and ensure the sustainable business growth by implementing Environment, Social and Governance (ESG) principles in every operational aspect. In line with this, PLN Nusantara Power is determined to become the leading and trusted generation company for sustainable energy in Indonesia and abroad. In this way, PLN Nusantara Power is not only an agent of change in sustainable energy, but also socially and environmentally responsible.

Through the commitment and substantial steps taken in leading the energy transition through a business portfolio that continues to grow and focuses on building renewable energy plants and dieselization, PLN Nusantara Power is confident to always provide environmentally friendly energy solutions for a better sustainable future and also provide clean energy to be the standard major in the electric power industry. Currently PLN Nusantara Power is at the forefront of positive change in the energy industry, the spirit of leading the energy transition towards a sustainable future, that brings Indonesia towards a cleaner, more efficient and sustainable energy era.

Perubahan iklim membawa tantangan baru sekaligus peluang baru bagi PLN Nusantara Power (PLN NP). PLN NP telah mengadakan komitmennya untuk melakukan transisi energi menuju karbon netral (Net Zero Emission-NZE) sebagaimana dituangkan dalam penyusunan roadmap transisi energi.

Pembentukan Subsidiary Generation Company (Genco) merubah struktur dan tanggung jawab PLN NP menjadi lebih fokus dalam mendukung upaya transisi energi dan lebih jauh meningkatkan keunggulan operasional dan optimalisasi portofolio pencadangan listrik yang andal dan terjangkau. Disamping itu, menjadikan PLN NP menjadi lebih agile dalam mengambil keputusan dan streamlining proses bisnis karena terdapat pemisahan yang jelas antara peran strategis dan operasional. Melalui percepatan transisi energi, PLN NP optimis mampu memberikan value creation terbaik dan mencapai visi menjadikan perusahaan pembangkitan tenaga listrik terdepan dan terpercaya dalam bisnis energi berkelanjutan di Asia Tenggara berkapasitas 22,7 GW.

Climate change results in new challenges and also new opportunities for PLN Nusantara Power (PLN NP). PLN NP has continued its commitment for energy transition towards carbon neutral (Net Zero Emission-NZE) as explained in the formulation of the energy transition roadmap.

The formation of the Subsidiary Generation Company (Genco) changed the structure and responsibilities of PLN NP to be more focused on supporting energy transition efforts and further enhancing operational excellence and optimizing the portfolio of reliable and affordable electricity supply. Furthermore, it also turns PLN NP to be more agile in making decisions and streamlining business processes since the strategic and operational roles are clearly separated. Through accelerating the energy transition, PLN NP is optimistic to be able to provide the best value creation and achieve its vision of becoming a leading and trusted power generation company in the sustainable energy business in Southeast Asia with a capacity of 22,7 GW.

'Sinergi' dan 'Energi' menjadi kata kunci yang akan membawa PJB memperkuat kolaborasi dengan segenap pemangku kepentingan dalam mendukung pengembangan energi hijau dan bersih, maksudnya bagi PJB untuk Go to Market dengan memperluas peluang potensi bisnis "Beyond KWh" baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

'Synergy' and 'Energy' are keywords that will bring PJB to strengthen collaboration with all stakeholders in supporting green and clean energy development. It's time for PJB to Go to Market by expanding "Beyond Kwh" business potential opportunities both domestically and abroad.

Kami telah melakukan transformasi untuk menjaga agility dan semangat adaptasi yang berkesinambungan dengan mengoptimalkan core competency dan human yang menjunjung tinggi prinsip tata kelola, kepatuhan dan pengelolaan risiko yang baik. Dengan melakukan segala sesuatu dengan baik, lebih baik dan lebih baik lagi untuk menjadi yang terbaik, telah siap dapat mewujudkan aspirasi visi PJB untuk menjadi perusahaan energi terpercaya, tangguh, dan terbaik di Indonesia maupun regional.

We already transformed in order to maintain agility and spirit of sustainable adaptation by optimizing core competencies and innovation upholding the principles of good governance, compliance and risk management. By performing everything well, better and even better to be the best in the future, it will be able to realize PJB's vision aspirations to become a trusted, leading, and best energy company in Indonesia and regionally.

Kami terus membangun kolaborasi dengan berbagai pihak guna mendorong portofolio bisnis yang semakin besar. Selain itu, juga mengembangkan bisnis untuk membangun horizon bisnis baru mewujudkan bisnis pembangkitan terintegrasi dalam mendukung keberlangsungan korporasi dalam jangka panjang. Kami berupaya untuk terus meningkatkan nilai Perusahaan, baik bagi pemegang saham maupun segenap pemangku kepentingan lainnya.

We continue to build collaboration with various parties to drive a larger business portfolio. Furthermore, we also develop business to build new business horizon to realize an integrated generation business to support long-term corporate sustainability. We strive to continuously increase the Company values, both for the shareholders and all other stakeholders.

Daftar Isi
Table of Contents

Pendahuluan
Introduction

2 Tema dan Keterkaitannya Tema
Themes and Its Continuity

6 Daftar Isi
Table of Contents

10 Keunggulan PLN Nusantara Power
Advantages of PLN Nusantara Power 2023

13 Akselerasi Transformasi PLN NP Pasca HGH
PLN NP Transformation Acceleration in Post-HGH

16 Komitmen PLN NP dalam Mendukung Percepatan Transisi Energi
PLN NP's Commitment to Supporting the Acceleration of Energy Transition

20 Ringkasan Kinerja Utama 2023 PLN NP2023
Key Performance Summary of PLN NP

23 Prestasi dan Penghargaan PLN Nusantara Power
PLN Nusantara Power Achievements and Awards

31 Sertifikasi Tahun 2023
Certification of 2023

35 Ikhtisar Data Keuangan Penting
Important Financial Data Highlights

43 Ikhtisar Saham
Share Highlights

45 Ikhtisar Obligasi
Bond Highlights

43 Aksi Korporasi
Corporate Actions

44 Peristiwa Penting 2023
2023 Significant Events

49 Sekilas
Sekilas

Laporan Kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan
Report to Shareholders and Stakeholders

54 Laporan Dewan Komisaris
Report from the Board of Commissioners

70 Laporan Direksi
Report from the Board of Directors

94 Surat Pernyataan Dewan Komisaris Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2023 PT PLN Nusantara Power
Statement From Board of Commissioners on Accountability Over Annual Report 2023 PT PLN Nusantara Power

95 Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2023 PT PLN Nusantara Power
Statement From Board of Commissioners on Accountability Over Annual Report 2023 PT PLN Nusantara Power

96 Surat Pernyataan Dewan Komisaris Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2023 PT PLN Nusantara Power
Statement From Board of Commissioners on Accountability Over Annual Report 2023 PT PLN Nusantara Power

Profil Perusahaan
Company Profile

100 Identitas Perusahaan
Company Identity

102 Riwayat Singkat Perusahaan
Brief Company History

106 Bidang Usaha
Business Line

108 Produk dan Jasa
Products and Services

119 Skema Penyalaran Tenaga Listrik
Scheme of Electricity Transmission

121 Visi dan Misi Perusahaan dalam Mendukung Energi Berkelanjutan
Company Vision and Mission in Supporting Sustainable Energy

125 Budaya Perusahaan
Corporate Culture

126 Struktur Organisasi
Organization Structure

128 Perubahan Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi
Changes in the Composition of the Board of Commissioners and Directors

130 Profil Dewan Komisaris
Profile of the Board of Commissioner

136 Profil Direksi
Profile of the Board of Director

142 Jumlah dan Komposisi SDM
HR Number and Composition

146 Pengembangan Kompetensi SDM
HR Competency Development

155 Struktur dan Komposisi Pemegang Saham
Shareholders Structure and Composition

157 Kronologis Pencatatan Saham
Chronology of Share Listing

158 Kronologis Pencatatan Efek Lainnya
Chronology of Other Securities Listing

159 Struktur Grup PLN Nusantara Power
Group Structure of PLN Nusantara Power

164 Profil dan Kilas Kinerja Entitas Anak, Cucu-Cucu, Asosiasi dan Ventura Bersama
Profile and Performance Overview of Subsidiaries, Second Tier Subsidiaries, Associations and Joint Ventures

176 Wilayah Operasional
Operational Area

179 Alamat Kantor Pusat, Kantor Perwakilan dan Unit Usaha
Address of Head Office, Representative Office and Business Unit

182 Keanggotaan Asosiasi
Association Membership

183 Lembaga dan Profesi Penunjang
Supporting Institutions and Professions

185 Informasi pada Situs Web Perusahaan
Information on the Company Website

Tinjauan Pendukung Bisnis
Business Support Overview

190 Sumber Daya Manusia
Human Resources

207 Teknologi Informasi
Information Technology

214 PLN Nusantara Power Integrated Management System (PLN NP-IMS)
PLN Nusantara Power Integrated Management System (PLN NP-IMS)

220 Manajemen Aset
Assets Management

226 Pengembangan Usaha
Business Development

Analisis Dan Pembahasan Manajemen
Management Discussion and Analysis

232 Analisis Industri
Industry Analysis

238 Analisis Operasi Per Segmen Usaha
Operational Analysis per Business Segment

268 Profitabilitas Per Segmen
Profitability by Segment

270 Analisis Kinerja Keuangan
Financial Performance Analysis

270 Analisis Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Analysis of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

277 Analisis Posisi Keuangan
Financial Position Analysis

295 Analisis Arus Kas
Cash Flows Analysis

299 Dampak Perubahan Harga terhadap Pendapatan dan Laba Perusahaan
Impact of Price Changes on Company Revenue and Profit

300 Tingkat Kemampuan Membayar Utang dan Kolektibilitas Piutang, serta Rasio Keuangan Lainnya
Solvency, Receivables Collectibility, and Other Financial Ratios

309 Struktur Modal
Capital Structure

311 Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal
Material Commitments for Capital Goods Investment

318 Realisasi Investasi Barang Modal
Realization of Capital Goods Investment

322 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Perusahaan Tahun 2023 dan Proyeksi Tahun 2024
Comparison between Target and Realization of Company Performance in 2023 and Projection for 2024

332 Kebijakan Dividen
Dividend Policy

334 Kontribusi kepada Negara
Contribution to the State

336 Realisasi Dana Penawaran Umum
Realization of Public Offering Proceeds

336 Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi/ Berelasi
Information on Material Transactions Containing Conflict of Interest and/or Transactions with Affiliated/ Related Parties

344 Informasi Material Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi, dan Restrukturisasi Utang/Modal Material
Information on Investment, Expansion, Divestment, Acquisition, and Debt/Capital Restructuring

349 Perubahan Kebijakan Akuntansi
Changes in Accounting Policy

351 Perubahan Peraturan dan Dampaknya terhadap Perusahaan
Regulatory Changes and the Impacts on the Company

361 Key Performance Indicator
Key Performance Indicator

364 Aspek Pemasaran dan Pangsa Pasar
Marketing and Market Share Aspect

367 Prospek Usaha
Business Prospect

375 Informasi dan Fakta Material setelah Tanggal Laporan Akuntan
Material Information and Facts after the Accountant's Report Date

375 Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian luar Biasa dan Jarang Terjadi
Financial Information Containing Extraordinary and Rare Events

Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance

378 Membangun Tata Kelola Berkelanjutan
Building Sustainable Governance

425 Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders

424 Dewan Komisaris
Board of Commissioners

453 Direksi
Board of Director

434 Nominasi dan Remuneras Direksi dan Dewan Komisaris
Nomination and Remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners

484 Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary of the Board of Commissioners

487 Komite Audit
Audit Committee

495 Komite Nominasi dan Remuneras
Nomination and Remuneration Committee

506 Komite Investasi dan Manajemen Risiko
Investment and Risk Management Committee

515 Komite Lain
Other Committees

516 Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

523 Unit Audit Internal
Internal Audit Unit

540 Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System

545 Manajemen Risiko
Risk Management

567 Kode Etik Perusahaan
Code of Conduct

578 Kebijakan Anti Korupsi
Anti-Corruption Policy

584 Whistleblowing System
Whistleblowing System

591 Perkara Hukum dan Sanksi yang Dikenakan kepada Perusahaan
Legal Cases and Sanctions Imposed on the Company

593 Pengadaan Barang dan Jasa
Procurement of Goods and Services

598 Data dan Informasi Perusahaan
Company Data and Information

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Social and Environmental Responsibility

606 Strategi Keberlanjutan
Sustainability Strategy

612 Kinerja Keberlanjutan Aspek Ekonomi
Economic Sustainability Performance

616 Kinerja Keberlanjutan Aspek Lingkungan
Environmental Sustainability Performance

627 Kinerja Sosial
Social Performance

628 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan
Social Performance on Community Development

634 Kinerja Sosial Aspek Pelanggan
Social Performance on Customer Aspect

639 Kinerja Sosial Aspek Ketenagakerjaan
Social Performance on Employment Aspects

649 Laporan Keberlanjutan
Sustainability Report

Laporan Keuangan Audit
Audited Financial Statements

653 Laporan Keuangan Audit
Audited Financial Statements

Keunggulan PLN Nusantara Power 2023

Advantages of PLN Nusantara Power 2023

Pionir di Bursa Karbon Indonesia:
PLTGU Muara Karang menjadi pembangkit berbahan bakar gas pertama di Indonesia yang masuk ke bursa karbon

Pioneer in the Indonesian Carbon Exchange: Muara Karang CCPP is the first gas-fired power plant in Indonesia to participate in the carbon exchange

Pioneer dalam mengimplementasikan Co-firing di Indonesia melalui PLTU Paiton

Pioneer in implementing Co-Firing in Indonesia through Paiton CFPP

Expertise dalam pengelolaan pembangkit: Memiliki Tata Kelola dan Aset manajemen Pembangkit Listrik

Expertise in power plant management: Having the Power Plant Governance and Asset management

Implementasi digitalisasi pembangkit listrik (i-core)

Implementation of power plant digitalization (i-core)

Project Green Hydrogen pertama di Indonesia yang berada di UP Muara Karang

The first Green Hydrogen Project in Indonesia at Muara Karang UP

Akselerasi Transformasi PLN NP Pasca HSH

PLN NP Transformation Acceleration in Post-HSH

Tahun 2023, PLN NP memasuki babak baru dalam transformasi yang membawa perubahan besar, yakni menjadi Subholding Generation Company terbesar ini Asia Tenggara. Melalui transformasi, PLN NP bergerak dan bekerja secara lebih efektif dan efisien, lincah, serta tangkas untuk mencapai tujuan perusahaan dan mampu membukukan Aset sebesar Rp245,46 Triliun. PLN NP bertujuan tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat kapasitas finansial, tetapi juga mempercepat transisi menuju energi yang lebih berkelanjutan, selaras dengan visi pemerintah dan kebutuhan strategis nasional.

In 2023, PLN NP got into a new chapter in transformation that will bring substantial changes to becoming the largest Subholding Generation Company in Southeast Asia. Through this transformation, PLN NP moves and works more effectively and efficiently, agile, and directed to achieve company goals and is able to book Assets of Rp245.46 Trillion. PLN NP seeks to not only increase operational efficiency and strengthen financial capacity, but also accelerate the transition to more sustainable energy, in line with the government vision and national strategic needs.

PJB

Otonom dalam beberapa aspek operasional, tetapi masih terintegrasi dengan struktur organisasi kesatuhukum PLN.
Autonomy in some operational aspects, but still integrated with overall organizational structure of PLN.

SDM unggul berjumlah 1,034 pegawai dengan kompetensi mumpuni di industri pembangkitan.
Superior human resources totalling 1,034 employees with strong competencies in the generation industry.

Keputusan strategis harus disetujui oleh manajemen pusat PLN, yang mencakup kebijakan energi, investasi, dan pengembangan proyek.
Strategic decisions must be approved by PLN central management, covering energy policy, investment and project development.

Memiliki aset pembangkitan dengan daya mampu netto sebesar 11,020 MW di Pulau Jawa Bali.
Having generation assets with a net capacity of 11,020 MW on the Java and Bali Islands.

Sepanjang 2021, PLN NP berhasil menyelesaikan berbagai tantangan perusahaan sebelumnya di bidang *Operational Excellence, Business Excellence, Innovation, and Sustainability*.

PLN NP, sebagai Subholding Pembangkitan terbesar se-Asia Tenggara ini berkelad untuk menjalanjo babak transformasi yang lebih besar dan menantang. Tentu, tekad untuk memperkuat aset-aset, menggali potensi yang belum terjamah, dan meningkatkan kinerja menuju standar dunia sangat kuat. PLN NP juga telah merumuskan strategi "Strengthening the Base, Expanding the Business," untuk menjadi pembangkitan yang terdepan dan terpercaya dalam menyediakan energi berkelanjutan di Indonesia dan di seluruh dunia.

Sebelum menjadi Subholding, terdapat beberapa perbedaan signifikan yang mempengaruhi PLN NP dari segi struktur organisasi, fokus bisnis, dan strategi operasional.

Throughout 2021, PLN NP successfully completed various previous company challenges in the areas of Operational Excellence, Business Excellence, Innovation, and Sustainability.

PLN NP, as the largest generation subholding in Southeast Asia, is determined to enter a bigger and more challenging transformation phase. Of course, the determination to strengthen assets, explore untapped potential, and improve performance towards world standards is very strong. PLN NP has also formulated a strategy of "Strengthening the Base, Expanding the Business," to become a leading and trusted generator in providing sustainable energy in Indonesia and around the world.

Prior to becoming a Subholding, there were several significant differences affecting PLN NP in terms of organizational structure, business focus, and operational strategy.

PLN Nusantara Power

Memiliki otonomi lebih besar dalam pengambilan keputusan operasional dan strategis di bidang energi, terutama terkait dengan unit bisnis dan anak perusahaan di bawahnya
Having greater autonomy in making operational and strategic decisions in the energy sector, especially in relation to business units and subsidiary companies.

Tambahan SDM menjadi 4.995 pegawai yang terus mengembangkan kompetensi guna memastikan efektivitas transisi menjadi Subholding pembangkitan
Additional human resources by 4,995 employees who continue to develop competencies to ensure the effectiveness of the transition to a generation sub-holding.

Tantangan dalam pemenuhan implementasi operational excellence di unit pembangkit yang tersebar di seluruh Indonesia
Challenges in evenly implementing operational excellence in power plant units spread all over Indonesia.

Keputusan strategis yang lebih independen terkait dengan investasi, pengembangan proyek, dan strategi pertumbuhan jangka panjang.
More independent strategic decisions related to investment, project development and long-term growth strategies.

Lebih agile dalam pengembangan usaha pembangkitan dengan total investasi kapasitas pembangkit mencapai 7035 MW
More agile in developing the generation business with a total investment in power plant capacity reaching 7035 MW.

Memiliki aset pembangkitan dengan daya mampu netto sebesar 18.573 MW yang tersebar di seluruh Indonesia
Having generation assets with a net capacity of 18,573 MW spread all over Indonesia.

Implementasi Holding Sub-Holding bagi PLN NP merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Akselerasi transformasi PLN NP merupakan langkah penting dalam upaya Perusahaan untuk meningkatkan kinerja dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis dan teknologi. Berbagai strategi dan inisiatif bisa menjadi bagian dari akselerasi transformasi ini, seperti:

1. Penguatan struktur organisasi, optimalisasi skema alih SDM, pengelolaan sistem SDM yang terintegrasi, pemetaan dan pengembangan talenta, hingga strategi integrasi budaya. Selain itu, fokus juga diberikan pada integrasi data dan pengembangan HRIS, peningkatan hubungan industrial, efisiensi pengelolaan tenaga alih daya, dan penguatan kompetensi karyawan.
2. Penerapan "Integrated Change Management" untuk mendukung komunikasi efektif dan transisi yang mulus dan meminimalkan resistensi terhadap perubahan, meningkatkan penerimaan dan partisipasi karyawan, serta memastikan bahwa perubahan organisasional berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif.
3. Merancang program regulasi yang komprehensif untuk memastikan kelancaran transisi dan memperkuat struktur organisasi dan operasional. Program ini mencakup pengelolaan dokumen perizinan yang efisien, untuk mengatasi masalah penyimpanan dan pencarian dokumen penting, memastikan kelancaran operasional dan kepatuhan terhadap regulasi. Pentingnya program ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan memvalidasi legalitas aset demi menghindari risiko hukum.

Implementation of Holding Sub-Holding for PLN NP is a strategic step to increase operational efficiency and effectiveness. PLN NP transformation acceleration is an important step in the Company's efforts to improve performance and adapt to changes in the business and technological environment. Various strategies and initiatives can be part of this transformation acceleration, such as:

1. Strengthening organizational structure, optimizing HR transfer schemes, managing integrated HR systems, talent mapping and development, and cultural integration strategies. Apart from that, focus is also given to data integration and HRIS development, improving industrial relations, efficient management of outsourced personnel, and strengthening employee competence.
2. Implementation of "Integrated Change Management" to support effective communication and smooth transitions and minimize resistance to change, increase employee acceptance and participation, and ensure that organizational changes run smoothly and achieve the desired goals effectively.
3. Designing a comprehensive regulatory program to ensure a smooth transition and strengthen organizational and operational structures. This program includes efficient management of licensing documents, to overcome the problem of storing and searching for important documents, ensuring smooth operations and compliance with regulations. The importance of this program lies in the urgent need to identify, document and validate the legality of assets to avoid legal risks.

4. Melaksanakan program keuangan yang cermat dan terstruktur, berfokus untuk memastikan keberlanjutan operasional dan keuangan selama dan pasca-transisi. Program ini mencakup adaptasi proses pengadaan untuk memastikan kesesuaian barang dan spesifikasi, pengalihan hutang besar dan integrasi sistem untuk mendukung kesiapan operasional, serta pengamanan pembayaran pengalihan hutang dan pembiayaan operasional yang efektif.
5. Assessment dan penyiapan infrastruktur finansial memastikan transisi halus ke sistem baru, diikuti dengan sosialisasi dan pelatihan internal untuk mengedukasi untuknit baru tentang proses keuangan, pembayaran, dan perpajakan.
6. Membangun kemitraan strategis dengan pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi perusahaan:
   - Pengembangan kemitraan strategis melalui pemilihan mitra yang memiliki nilai-nilai yang sejalan dan komitmen terhadap tujuan transformasi perusahaan, seperti keberlanjutan, inovasi teknologi, atau pengembangan kapasitas manusia.
   - Kolaborasi untuk inovasi dan pengembangan teknologi.
   - Meningkatkan hubungan dengan komunitas lokal di sekitar lokasi operasional Perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang berkelanjutan.
7. Mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam strategi bisnis untuk memastikan operasi yang bertanggung jawab secara lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan.

4. Implementation of a careful and structured financial program, aimed at ensuring smooth operations and finances during and post-transition. This program includes adaptation of procurement processes to ensure conformity of goods and specifications, transfer of large debts and system integration to support operational readiness, as well as securing payment of debt transfers and effective operational financing.
5. Assessment and preparation of financial infrastructure ensures a smooth transition to the new system, followed by intensive outreach and training to educate new units about financial, payment and taxation processes.
6. Building strategic partnerships with stakeholders to support the Company transformation:
   - Development of strategic partnerships through selecting partners who have aligned values and commitment to the Company transformation goals, such as sustainability, technological innovation, or human capacity development.
   - Collaboration for innovation and technology development.
   - Improving relations with local communities around the Company's operational locations through sustainable corporate social responsibility (CSR) programs.
7. Integrating Environmental, Social, and Governance (ESG) principles in business strategy to ensure environmentally, socially and corporate governance-responsible operations.

Wilayah Operasional (sebelum IPO-I)
Operational Area (After IPO)

35 Tahun 2023 PLN NP Mengelola Pembangkit dengan Total Kapasitas sebesar
In 2023 PLN NP Managed Power Plants with Total Capacity

25.772 MW

Unit Pembangkit yang dimiliki *Owned Power Plant Units*	**18.573*** MW
Unit Jaya O&M *O&M Services Unit*	**164** MW
Kapasitas sewa pada IPP/UVC *Chartering in IPP/UVC*	**7.035** MW

* Data tanpa 1 (satu) di Pulau IPP tanggung Pulau Timur 1 (satu) di IPP tanggung Kapuatan

Komitmen PLN NP Dalam Mendukung Percepatan Transisi Energi

PLTS Terapung Cirata, Persembahan PLN NP Dukung Transisi Energi

Cirata Floating SPP, PLN NP's Dedication in Supporting Energy Transition

PLN NP memantapkan diri sebagai subholding pembangkit listrik terbesar di Asia Tenggara. Hal ini ditunjukan dengan capaian prestasi dan kinerja sepanjang tahun 2021, dimana capaian kinerja ini juga menjadi capaian terbaik di sepanjang sejarah PLN NP, terutama dalam upaya mendorong transisi energi di Indonesia. Capaian yang telah dilakukan oleh PLN NP, di antaranya menyelesaikan proyek pembangkit listrik, yakni PLTS Terapung Cirata yang memiliki kapasitas 145 MWac atau setara 192 MWp untuk mendukung utilisasi energi baru dan terbarukan serta mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengurangi emisi karbon.

Pada tanggal 10 November 2023, PLTS Terapung Cirata berhasil mencapai Commercial Operation Date dan berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan beban di Sistem Kelistrikan Jawa-Bali dengan energi bersih dan terbarukan. Dengan total cakupan di area Waduk mencapai 250 Ha, PLTS Cirata ini terdiri dari 10 pulau dimana masing-masing pulau memiliki kapasitas 15,2 MWp. Installed capacity Pembangkit mencapai 145 MWac atau setara 192 MWp. Produksi Listrik direncanakan akan mencapai 250 - 300 GWh per tahun sehingga diproyeksikan dapat menguranggi CO_2 sebesar 50.000 ton per tahun.

Pengembangan PLTS Terapung Cirata merupakan wujud komitmen PLN Nusantara Power dalam mendukung peningkatan bauran energi baru terbarukan dalam memenuhi kebutuhan energi listrik di Indonesia yang diharapkan mencapai 23% di tahun 2025. PLTS Terapung Cirata merupakan proyek PLTS Terapung pertama dan terbesar yang dilaksanakan oleh PLN Grup sehingga dapat menjadi role model bagi pengembangan proyek keanggaplistrikan selanjutnya yang berbasis EBT di Indonesia dan sejalan dengan komitmen melaksanakan transisi energi menuju Net Zero Emission (NZE) tahun 2060.

PLN NP confirms the Company as the largest power plant subholding in Southeast Asia. This is demonstrated by the achievements and performance throughout 2021, where these performance achievements are also the best achievement in the history of PLN NP, especially in efforts to encourage energy transition in Indonesia. PLN NP's achievements include completing a power plant project, namely the Cirata Floating SPP has a capacity of 145 MWac or equivalent to 192 MWp to support the utilization of new and renewable energy as well as reducing dependence on fossil fuels and reducing carbon emissions.

On November 10, 2023, the Cirata Floating SPP successfully reached the Commercial Operation Date and contributed to meeting load needs in the Java-Bali Electricity System with clean and renewable energy. With total coverage in the reservoir area reaching 250 Ha, Cirata SPP consists of 10 islands, with each capacity of 15,2 MWp. The installed capacity of the plant reaches 145 MWac or equivalent to 192 MWp. Electricity production is planned to reach 250 – 300 GWh per year so it is projected to reduce CO_2 by 50,000 tons per year.

PLN Nusantara Power actualizes its commitment through Cirata Floating SPP development to supporting the increase in the mix of new and renewable energy to meet the electricity needs in Indonesia which is planned to reach 23% by 2025. Cirata Floating PLTS is the first and largest Floating SPP project implemented by the PLN Group thus it can become a role model for the development of further renewable energy-based electricity projects in Indonesia and in line with the commitment for energy transition towards Net Zero Emission (NZE) by 2060.

PLN NP's Commitment to Supporting the Acceleration of Energy Transition

Green Energy Movement, PLN NP Wujudkan Indonesia Lebih Hijau

Green Energy Movement, PLN NP Actualizes Indonesia Greener

PLN NP subholding pembangkitan terbesar di Asia Tenggara berkomitmen menghadirkan energi hijau di Indonesia. Melalui berbagai inovasi seperti co-firing dan proyek energi baru terbarukan (EBT) bertema Green Energy Movement (GEM), PLN NP mendorong percepatan transisi energi di Indonesia untuk terwujudnya Nusantara lebih hijau.

Salah satu capaian PLN NP ini ditunjukkan melalui produksi energi bersih yang berasal dari co-firing sepanjang tahun 2021, sebesar 631,62 GWh atau setara dengan reduksi emisi karbon sebesar 631.291,79 MT. Hingga kini, PLN NP telah melaksanakan co-firing secara kontinyu di 33 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), di seluruh Indonesia. Hal ini selaras dengan semangat dunia dalam menurunkan suhu bumi dan tertuang pada Paris Agreement. PLN NP berkontribusi melalui Green Energy Movement.

Green Energy Movement diwujudkan tak hanya melalui co-firing pada PLTU yang telah beroperasi, namun juga keseriusan PLN NP membangun pembangkit listrik yang ramah lingkungan seperti PLTS, PLTA, dan juga PLTB. Di tahun 2021, PLN NP telah berhasil menyelesaikan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata yang mampu menghindarkan sebesar 214.000 ton CO_2 setiap tahunnya dan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia.

Kami juga senantiasa mendukung pembangunan smart city di Ibu Kota Negara (IKN) melalui penyediaan listrik bersih yang berasal dari PLTS IKN 50 MW. Tahun 2023, telah menyelesaikan 10 MW tahap pertama. Pembangunan PLTS 50 MW ini merupakan bagian dari rencana PLN NP untuk mengembangkan energi baru dan terbarukan (EBT) di IKN Nusantara. Pemerintah Indonesia sendiri menargetkan IKN Nusantara dapat menggunakan EBT sebesar 80% dari total kebutuhan listriknya pada tahun 2045. Melalui PLTS IKN, PLN NP akan mampu menghindarkan 104,8 ton emisi CO_2 setiap tahunnya.

PLN NP, the largest power plant sub-holding in Southeast Asia, is committed to bringing green energy to Indonesia. Through various innovations such as co-firing and new renewable energy (NRE) projects with the theme Green Energy Movement (GEM), PLN NP is encouraging the acceleration of the energy transition in Indonesia to create a greener archipelago.

PLN NP demonstrated one of its achievements through the production of clean energy originating from co-firing throughout 2021, amounting to 631.62 GWh or the equivalent of reducing carbon emissions by 631.291.79MT. To date, PLN NP has carried out continuous co-firing at 33 steam power plants (CFPP), throughout Indonesia. This is in line with the world's spirit of reducing the earth temperature and is stated in the Paris Agreement. PLN NP contributes through the Green Energy Movement.

The Green Energy Movement is realized not only through co-firing of the operating CFPPs, but also PLN NP sincerely in building environmentally friendly power plants such as SPP, HPP and also WPP. In 2022, PLN NP successfully completed one of the National Strategic Projects (PSN) for the Cirata Floating Solar Power Plant (SPP) which is able to avoid 214,000 tons of CO_2 every year and is the pride of the Indonesian nation.

We also continue to support the development of smart city in the National Capital City (IKN) by providing clean electricity from the 50 MW IKN SPP. In 2023, the first 10 MW phase will be completed. The construction of the 50 MW SPP is part of PLN NP's plan to develop new and renewable energy (NRE) in IKN Nusantara. The Indonesian government is targeting IKN Nusantara to be able to use NRE for 80% of its total electricity needs by 2045. Through IKN SPP, PLN NP will be able to avoid 104.8 tons of CO_2 emissions every year.

Jalin Kemitraan, Langkah Agresif PLN NP dalam Transisi Energi

Establishing Partnerships, PLN NP's Aggressive Action in the Energy Transition

Kemitraan PLN Nusantara Power pada tahun 2023 untuk mendukung percepatan transisi energi menuju PLN NP berkelanjutan diantaranya memperkuat kemitraan strategis dengan pemerintah, institusi akademis, industri baik dalam maupun luar negeri, dan organisasi masyarakat untuk mendukung transformasi energi yang berkelanjutan. Kemitraan ini akan mendukung pertukaran pengetahuan, teknologi, dan sumber daya untuk mempercepat implementasi solusi berkelanjutan dan memperluas dampak positif mereka.

Salah satu bentuk kemitraan PLN NP yaitu dengan menggandeng perusahaan asal Jepang Mitsubishi Heavy Industries (MHI) sebagai sebagai salah satu upaya mempercepat transisi energi hijau melalui ko-firing PLTU. Upaya tersebut telah direalisasikan melalui penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan MHI di Tokyo, Jepang dalam gelaran forum investasi energi baru terbarukan (EBT) Japan RE Invest Indonesia 2023. Kerja sama ini menjadi langkah lanjutan PLN NP dalam mewujudkan co-firing mencapai 50% pada PLTU Paiton yang berkapasitas 2x400 MW. Jalinan kerja sama dengan MHI ini menjadi penanda keseriusan PLN NP dalam mendorong co-firing dalam implementasi yang lebih besar, sehingga ke depan dapat mewujudkan 100% biomassa firing pada PLTU Paiton.

Selain dengan MHI, sebelumnya PLN NP sendiri juga telah menjalin kerja sama dengan dua perusahaan asal Jepang lainnya untuk mengembangkan energi bersih pada unit pembangkit. Di antaranya dengan Sumitomo Heavy Industries (SHI), Mitsubishi, serta Ishikawajima-Harima Heavy Industries (IHI Corporation). Kerja sama dengan SHI melingkupi kajian pada mesin pembangkit boiler tipe CFB pada PLTU Paiton, Sementara, kerja sama dengan IHI meliputi pengembangan co-firing amonia.

Tahun 2023, PLN NP juga telah menyelesaikan pekerjaan Major Inspection (MI) atau Inspeksi Utama GTG 150 MW Combined Cycle Power Plant, Chandpur, Bangladesh. Penyelesaian proyek dilakukan oleh 10 orang yang terdiri dari manajer proyek dan 9 mitraja hanya dalam waktu 45 hari. Kemitraan ini menandai langkah progresif PLN NP dalam mencapai target transisi energi.

In 2023, PLN Nusantara Power is committed to supporting the acceleration of the energy transition towards a sustainable PLN NP, including strengthening strategic partnerships with the government, academic institutions, industry both domestic and foreign, and community organizations to support sustainable energy transformation. This partnership will support the exchange of knowledge, technology and resources to accelerate the implementation of sustainable solutions and expand their positive impact.

One of PLN NP partnerships is by collaborating with the Japanese company, Mitsubishi Heavy Industries (MHI) as the effort to accelerate the green energy transition through Co-firing CFPP innovation. This effort was actualized through the signing of a memorandum of understanding (MoU) with MHI in Tokyo, Japan at the Japan RE Invest Indonesia 2023 New Renewable Energy (NRE) investment forum. This collaboration is a further step for PLN NP in realizing co-firing reaching 50% at Paiton CFPP with a capacity of 2x400 MW. This collaboration with MHI is a sign of PLN NP sincerity in encouraging co-firing in greater implementation so as to be able to realize 100% biomass firing at Paiton CFPP in the future.

More than MHI, previously PLN NP also collaborated with two other Japanese companies to develop clean energy in generating units. These include Sumitomo Heavy Industries (SHI), Mitsubishi, and Ishikawajima-Harima Heavy Industries (IHI Corporation). The collaboration with SHI includes a study of the CFB type boiler power plant machine at Paiton CFPP. Meanwhile, collaboration with IHI includes the development of ammonia co-firing.

In 2023, PLN NP also completed the Major Inspection (MI) work or Main Inspection of the GTG 150 MW Combined Cycle Power Plant at Chandpur, Bangladesh. The project was completed by 10 persons consisting of a project manager and 9 engineers in just 45 days. This partnership marks a progressive step for PLN NP in achieving energy transition targets.

100% EBT, PLN NP Pionirkan *Green Hydrogen Plant*

100% EBT, PLN NP Makes Green Hydrogen Plant as Pioneer

Hidrogen hijau (Green hydrogen) merupakan salah satu fokus utama dalam strategi energi berkanekan dan berkelanjutan, yang diproduksi menggunakan sumber energi terbarukan, seperti tenaga surya atau tenaga angin, dalam proses elektrolisis air. Proses ini tidak menghasilkan emisi karbon, sehingga menjadi salah satu solusi mengurangi dampak perubahan iklim.

PLN NP senantiasa melakukan inovasi dalam transformasi energi global dan memainkan peran kunci dalam menggerakkan industri hydrogen berskala di Indonesia. Sepanjang tahun 2023, PLN NP telah mampu memproduksi 51 ton green hydrogen yang diproduksi melalui Green Hydrogen Plant (GHP) pertama di Indonesia yang berlokasi di kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Muara Karang.

Selain untuk pendingin mesin pembangkit, green hydrogen juga bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, antara lain untuk industri pupuk, industri bahan kimia, co-firing pembangkit, hingga untuk Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV). Saat Covid-19 lalu, PLN NP juga melakukan inovasi dengan menghasilkan oksigen untuk memenuhi kebutuhan medis yang tinggi. Saat itu, PLTGU Muara Karang mampu menghasilkan sekitar 1 ton per hari.

Hadirnya GHP merupakan game changer terhadap tantangan transisi energi dan menunjukkan komitmen PLN NP mendukung upaya pemerintah dalam mengakselerasi peta jalan strategi hidrogen nasional. Kedepannya, penggunaan green hydrogen sebagai bahan bakar alternatif akan dibutuhkan banyak industri.

Green hydrogen is one of the main focuses in renewable and sustainable energy strategies, which is produced using renewable energy sources, such as solar power or wind power, in the water electrolysis process. This process produces no carbon emissions, so it is one solution to reduce the impact of climate change.

PLN NP keeps innovating in global energy transformation and plays a key role in driving the clean hydrogen industry in Indonesia. Throughout 2023, PLN NP is currently able to produce 51 tons of green hydrogen which is produced through the first Green Hydrogen Plant (GHP) in Indonesia which is located in the Muara Karang Steam Gas Power Plant (CCPP) area.

Apart from cooling the power plant engines, green hydrogen can also be used for various purposes, including for the fertilizer industry, chemical industry, co-firing the power plants, and even for Fuel Cell Electric Vehicles (FCEV). During Covid-19, PLN NP also innovated by producing oxygen to meet the high medical needs. At that time, Muara Karang CCPP was able to produce around 1 ton per day.

GHP presence is a game changer for the challenges of the energy transition and shows PLN NP commitment to supporting the government efforts to accelerate the national hydrogen strategy roadmap. In the future, the use of green hydrogen as an alternative fuel will be needed by many industries.

Ringkasan Kinerja Utama 2023 PLN NP

2023 Key Performance Summary of PLN NP

PLN NP berhasil mencetak Laba Rp13,67 trilun. Laba ini merupakan prestasi PLN NP karena melampaui target sebesar 167,01% dari Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP) tahun 2023 sebesar Rp8,18 triliun. PLN NP juga menjelma menjadi salah satu kontributor Laba Investasi terbesar di seluruh PLN Group. Pertumbuhan kinerja keuangan PLN NP ini sejalan dengan pertumbuhan Aset Perusahaan yang mengalami kenaikan Rp343,46 Triliun atau 99,19% dari target RKAP 2023 sebesar Rp346,26 Triliun.

PLN NP managed to record profit of Rp13,67 trillion. This profit is an achievement for PLN NP since it succeeded the target by 167,01% of the 2023 Annual Budget and Operational Plan (RKAP) of Rp8,18 trillion. PLN NP has also become one of the largest contributors to investment profit in the entire PLN Group. Financial performance growth of PLN NP is in line with the growth of the Company's Assets, which increased by Rp343,46 trillion or 99,19% of the 2023 RKAP target of Rp346,26 trillion.

Penjualan Energi Listrik
Sales of Electrical Energy

63.179 GWh

285,72%

Pendapatan Usaha
Operating Revenues

Rp90,38

Triliun Trillion

18,90%

- Penjualan Tenaga Listrik sebesar Rp87,85 Triliun;
- Jasa O&M sebesar Rp0,57 Triliun;
- Jasa EPC sebesar Rp80,04 Miliar.
- Electricity Sales amounted to Rp87,85 Trillion;
- O&M Services amounted to Rp0,57 Trillion;
- EPC services amounted to Rp80,04 Billion.

Kapasitas Pembangkit
Power Plant Capacity

18.573

GWh

Produksi Energi Listrik
Electrical Energy Production

66.846 GWh

291,73%

Laba Bersih
Net Profit

Rp13,67

Triliun Trillion

149,83%

Jumlah Aset
Total assets

Rp343,46

Triliun Trillion

3,27%

Kontribusi kepada Negara
Contribution to the State

Rp4.039,66

Miliar Billion

228,59%

Value Creation

Rp604,95
Miliar Billion

Pencapaian KPI Tahun 2023
KPI Achievement in 2023

103,51
meningkat dari tahun 2022
Increased from 2022

Skor Assessment GCG
GCG Assessment Score

Parameter SUMH
SUMH Parameter

94,884 Sangat Baik Very Good
Skor tertinggi di PLN Grup
Highest Score in PLN Group

Parameter ASEAN CG Scorecard dari ACMF
ASEAN CG Scorecard Parameter from ACMF

86,55 ASEAN Capital Markets Forum

Realisasi Biaya CSR
Realization of CSR Costs

Rp51,153
Miliar Billion

Pemanfaatan FABA
FABA Utilization

1.258.884,84 Ton
Kontribusi dari 30 Unit PLTU
Contribution from 30
CFPP Units

Jumlah Karyawan
Number of Employees

4.985 Karyawan Employees
Karyawan Milenial (usia 31-40)
Millennial employees (aged 31-40)
72,76%

Pengembangan SDM
HR Development

- Biaya Pengembangan Rp1,1 Miliar;
- Jumlah Pelatihan 617 Batch;
- Jumlah Peserta 11.904 Karyawan;
- Development Costs of Rp1,1 Billion;
- Total Training 617 Batches;
- Number of Participants 11,904 Employees.

Pengelolaan K3L

HSE Management

6 PROPER Emas

7 PROPER Hijau

49 PROPER Biru

Juara 2 Video PROPER Emas 2023

Employee Engagement Survey (EES)

80,85

Sangat Engage

Very Engage

Culture Health Index (CHI)

19,90%

Minor Issues

Pionir PLTS di IKN

SPP pioneer at IKN

Membangun **PLTS 50 MW** dengan sistem kelistrikan yang andal dan berbasis pada energi rendah lingkungan.

Building a 50 MW SPP with a reliable electricity system and based on environmentally friendly energy.

Pionir dan Trader Terbesar Di Bursa Karbon

Pioneer and Largest Trader on the Carbon Exchange

- Carbon Trading 2.995.500 ton CO_2e
- Realized Sold GHK 34.681.500 ton CO_2e
- Carbon Trading 2.995.500 ton CO_2e
- GHG Emission Reduction 3.090.167 ton CO_2e

Prestasi dan Penghargaan PLN Nusantara Power

PLN Nusantara Power Achievements and Awards

Penghargaan Internasional

International Awards

28 April 2023
April 28, 2023

PLN NP melalui PLTU Jawa 7 meraih penghargaan bergengsi dari pemerintahan Tiongkok yakni proyek Teknik Berkualitas Nasional Tiongkok atas prestasi di bidang desain, konstruksi, engineering, operasi, keuangan serta HSSE (Health, Safety, Security, and Environment).

Through Java 7 CFPP, PLN NP won a prestigious award from the Chinese government, namely the Chinese National Quality Engineering project for achievements in the fields of design, construction, engineering, operations, finance and HSSE (Health, Safety, Security and Environment).

1 Juli 2023
July 1, 2023

Asia Responsible Enterprise Awards 2023

PLN NP meraih penghargaan CSR Internasional Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) atas program binaan PLN Peduli by PLN Nusantara Power Unit Pembangkit (UP) Muara Karang, Genting Nusantara.

Asia Responsible Enterprise Awards 2023

PLN NP won the Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) International CSR award for the PLN Peduli, Genting Nusantara program, by PLN Nusantara Power's Muara Karang (Ui).

6 November 2023
November 6, 2023

Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2023

PLN NP meraih peringkat Platinum dalam ajang Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2023.

Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2023

PLN NP meraih peringkat Platinum dalam ajang Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2023.

Penghargaan Nasional
National Awards

1 Februari 2023
February 1, 2023

***Silver Award & Bronze* dalam CSR & PDB Award 2023**

PLN NP meraih *Silver Award* & Bronze kategori *Silver Award* melalui PLTU Tanjung atas keberhasilannya membina Taman Bunga Impian Dhura menuju wisata desa berdaya dan bersinergi dengan pemerintah Daerah serta kategori Bronze untuk PLTU Ciata.

Silver Award & Bronze CSR & PDB Award 2023

PLN NP won the Silver Award & Bronze Category Silver Award through Tanjung CFPP for the success in developing the Dhura Dream Flower Garden towards empowered village tourism and in synergy with the Regional Government as well as the Bronze category for Ciata CFPP.

23 Februari 2023
February 23, 2023

PLN NP membagaikan penghargaan *The Best Environmentally Concerned Company* pada helatan Indonesia *Best Electricity Award* (BEA) 2023.

PLN NP received the *Best Environmentally Concerned Company* award at the 2023 Indonesia Best Electricity Award (BEA).

17 Maret 2023
March 17, 2023

PLN NP meraih penghargaan Silver Winner dalam ajang Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2023.

PLN NP won the Silver Winner award at the 2023 Public Relations Indonesia Awards (PRIA).

21 Maret 2023
March 21, 2023

PLN NP mendapat Peringkat Gold dalam kategori *Greenship Existing Building* oleh Green Building Council Indonesia.

PLN NP received a Gold Rating in the Greenship Existing Building category by the Green Building Council Indonesia.

31 Mei 2023
May 31, 2023

Penghargaan 2nd Top Digital PR Award 2023

PLN NP won the 2nd Top Digital PR Award 2023

7 Juni 2023
June 7, 2023

Top CSR Award 2023
- 5 penghargaan bintang 4
- 4 penghargaan bintang 3

PLN NP won Top CSR Award 2023
- 5 units Asia awards
- 4 units Star awards

22 Juni 2023
June 22, 2023

76 Penghargaan pada K3 Awards 2023
- 40 unit Penghargaan Zero Accident
- 12 unit Penghargaan OHMS
- 17 unit Penghargaan Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19
- 7 unit Penghargaan Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS

76 Awards at the 2023 OHS Awards
- 40 units Zero Accident Awards
- 12 units of OHSMS Awards
- 17 units of Covid-19 Prevention and Management Awards
- 7 units of HIV AIDS Prevention and Control Awards

23 Juni 2023
June 23, 2023

UP Muara Karang berhasil meraih penghargaan Energy Management Insight Award di ajang Energy Management Leadership Awards 2023.

Muara Karang GU successfully won the Energy Management Insight Award at the 2023 Energy Management Leadership Awards.

25 Juli 2022
July 25, 2022

CSR Outlook Award 2022

- UP Pacitan - pemenang dalam kategori "Best Creating Shared Value"
- UP Indramayu - pemenang dalam kategori "Best Practice in Environment"

CSR Outlook Award 2022

- Pacitan SU - Winner in the "Best Creating Shared Value" category
- Indramayu GU - Winner in the "Best Practice in Environment" category

4 Agustus 2022
August 4, 2022

Juara 1 dalam ajang SDG Innovation Accelerator for Young Professionals Award 2022.

1st place in the 2022 SDG Innovation Accelerator for Young Professionals Award.

14 Agustus 2022
August 14, 2022

PLN NP meraih 7 Penghargaan Environmental and Social Innovation Award (ENSIA) 2022:

- 4 PLATINUM pada kategori Efisiensi Energi, 3R Limbah Padat Non B3, Efisiensi Air dan Penurunan Beban Pencemaran, serta Perlindungan Keanekaragaman Hayati.
- 2 GOLD pada kategori Pengurangan Limbah B3 dan Inovasi Sosial meraih
- 1 SILVER pada kategori Penurunan Emisi.

PLN NP won 7 Environmental and Social Innovation Awards (ENSIA) 2022:

- 4 PLATINUM in the categories of Energy Efficiency, 3R Non-B3 Solid Waste, Water Efficiency and Reducing Pollution Loads, as well as Biodiversity Protection.
- 2 GOLD in the B3 Waste Reduction and Social Innovation category
- 1 SILVER in the Emission Reduction category.

20 Agustus 2022
August 20, 2022

PLN NP meraih 4 penghargaan Governance, Risk, & Compliance (GRC) & Performance Excellence Award 2022:
- The Best GRC for Corporate Governance & Compliance 2022
- The Best Ceo for GRC Excellence 2022
- The Best Chief Financial Officer 2022
- The Best GRC For Corporate Operation 2022

PLN NP won the Governance, Risk, & Compliance (GRC) & Performance Excellence Awards 2022:
- The Best GRC for Corporate Governance & Compliance 2022
- The Best CEO for GRC Excellence 2022
- The Best Chief Financial Officer 2022
- The Best GRC For Corporate Operation 2022

13 September 2022
September 13, 2022

PLN NP meraih penghargaan Indonesia Energy & Engineering (IEE) Series 2022.

PLN NP won the Indonesia Energy & Engineering (IEE) Series 2022 awards.

3 - 4 Oktober 2022
October 3 – 4, 2022

PLN NP meraih 8 Penghargaan dalam kegiatan Learning, Innovation, Knowledge & Exhibition (LIKE) PLN 2022.

PLN NP won 8 awards in the 2022 PLN Learning, Innovation, Knowledge & Exhibition (LIKE) activities.

6 Oktober 2022
October 6, 2022

PLN NP meraih 12 penghargaan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) di Subroto Award 2022 melalui PLTU Teluk Ballikpapan, PLTA Kota Panjang, PLTU Tarahan, PLTU Bellburg, PLTU Pontianak Unit 1 dan 2, PLTU Tidore, PLTU Maleo, PLTA Sutami, PLTA Tulungagung, PLTA Renun, PLTA Batutegi, dan PLTA Bakaru melalui beberapa kategori.

PLN NP won 12 Electricity Safety (K2) awards at the 2022 Subroto Award through Teluk Ballikpapan CFPP, Kota Panjang HPP, Tarahan CFPP, Bellburg CFPP, Units 1 and 2 Pontianak CFPP, Tidore CFPP, Maleo CFPP, Sutami HPP, Tulungagung HPP, Renun HPP, Batutegi HPP, and Bakaru HPP through several categories.

24 Oktober 2023
October 24, 2023

PLN NP meraih penghargaan Festival Program Kampung Iklim (ProKlim) 2023.

PLN NP won the 2023 Climate Village Program Festival (ProKlim) awards.

27 Oktober 2023
October 27, 2023

PLN NP meraih 5 penghargaan dalam Culture & Green Festival PLN Group 2023.

PLN NP won 5 awards in Culture & Green Festival PLN Group 2023.

14 November 2023
November 14, 2023

PLN NP meraih penghargaan Renewable Energy & Sustainability Project of the Year dalam Power Energy Awards 2023.

PLN NP won the Renewable Energy & Sustainability Project of the Year in Power Energy Awards 2023.

22 November 2023
November 22, 2023

PLN NP Juara 3 dalam kategori Non Go Publik Non Keuangan untuk ajang Annual Report Award 2023.

PLN NP won 3rd place in the Non-Go Public, Non-Financial category for the 2023 Annual Report Award.

4 Desember 2023
December 4, 2023

10 (sepuluh) penghargaan bagi PLN NP dalam ISDA 2023 terdiri dari 5 penghargaan Platinum, 1 penghargaan Gold, 3 penghargaan Silver, 1 penghargaan Indonesia CSR Award (ICA) dan 2 penghargaan lainnya didapatkan PLN NP secara korporat.

10 (ten) awards for PLN NP in ISDA 2023 consisting of 5 Platinum awards, 1 Gold award, 3 Silver awards, 1 Indonesia CSR Awards (ICA) and 2 other awards received by PLN NP corporately.

1 Desember 2023
December 1, 2023

PLN NP Juara Teladan 2 di ajang Naker Award 2023 kategori Olimpiade Pengupahan Berbasis Produktivitas (OPBP).

PLN NP Won the 2nd Exemplary Champion in the 2023 Naker Award event in the Productivity Based Wages (OPBP) Olympiad category.

20 Desember 2023
December 20, 2023

PLN NP mendapatkan 14 penghargaan dalam ajang PROPER 2023:

- 6 PROPER Emas
- 7 PROPER Hijau
- 49 PROPER Biru
- Juara 2 video PROPER Emas 2023

PLN NP received 14 awards at the PROPER 2023 event:

- 6 Gold PROPER
- 7 Green PROPER
- 49 Blue PROPER
- 2nd place in the 2023 Gold PROPER video

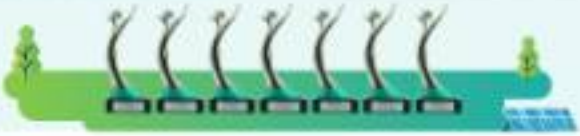

Sertifikasi Tahun 2023
Certification of 2023

Sertifikasi PLN NP yang masa berlakunya sampai saat ini
Currently Valid PLN NP Certification

No	Ruang Lingkup Sertifikasi Scope of Certification	Nomor Sertifikat Certificate Number	Lingkup Scope	Penerbit Sertifikasi Certifier	Masa Berlaku Validity Period
1	SNI ISO 37001:2016 – Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) SNI ISO 37001:2016 – Anti-Bribery Management System (SMAP)	0003-AR	Seluruh Proses Bisnis di Kantor Pusat PT PLN Nusantara Power All Business Processes at PT PLN Nusantara Power Head Office	PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi PT PLN (Persero) Certification Center	30 Desember 2022 – 30 Desember 2026 December 30, 2022 – December 30, 2026
2	SNI ISO 37001:2016 – Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) SNI ISO 37001:2016 – Anti-Bribery Management System (SMAP)	0002-AR	Proses Bisnis Pengelolaan Pembangkitan Tenaga Listrik di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Muara Karang Business Process for Managing Electrical Power Plant at Muara Karang Generating Unit, PT PLN Nusantara Power	PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi PT PLN (Persero) Certification Center	29 Desember 2022 – 28 Desember 2026 December 29, 2022 – December 28, 2026
3	ISO 21001:2018 – Educational Organizations Management System (EOMS) ISO 21001:2018 – Educational Organizations Management System (EOMS)	EOMS 757114	Educational Organizations Management System (UP Academy)	BSI	5 Oktober 2021 – 4 Oktober 2024 October 5, 2021 – October 4, 2024
4	ISO 22301:2019 – Business Continuity Management System (BCMS) ISO 22301:2019 – Business Continuity Management System (BCMS)	BCMS 752115	Penyediaan Pembangkitan Tenaga Listrik dan Segala Layanan termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas, Pembangkit Listrik Tenaga Air, dan Operasi & Pemeliharaan Kantor Pusat serta Unit Pembangkitan Gresik, Muara Karang, Muara Tawar, Paiton, Cirata dan Brantas. Provision of Power Generation and All Services including Thermal Power Plant, Hydro Power Plant, and Operation & Maintenance of Head Office as well as Gresik, Muara Karang, Muara Tawar, Paiton, Cirata and Brantas Generating Units	BSI	19 Desember 2019 – 15 September 2025 December 19, 2019 – September 15, 2025

No.	Ruang Lingkup Sertifikasi Scope of Certification	Nomor Sertifikasi Certificate Number	Lingkup Scope	Pemberi Sertifikasi Certifier	Masa Berlaku Validity Period
2.	ISO 27001:2017 – Information Security Management System – ISO/IEC 27001:2013 ISO 27001:2017 – Information Security Management System – ISO/IEC 27001:2013	IS 701631	Pengelolaan keamanan informasi dalam penyediaan fasilitas Data Center Information Security Management in providing Data Center Facilities	ISO	08 Januari 2022 – 09 Januari 2025 January 8, 2022 – January 9, 2025
3.	ISO 55001:2014 – Asset Management System (AMS) ISO 55001:2014 – Asset Management System (AMS)	AMS 639514	Pengelolaan Manajemen Aset Kantor Pusat dan Unit Pembangkitan Gresik, Muara Karang, Muara Tawar, Paiton, Cilacap dan Bisnis Management of Headquarter Asset Management and Gresik, Muara Karang, Muara Tawar, Paiton, Cilacap and Bisnis Generating Units	ISO	05 Maret 2021 – 04 Maret 2024 March 5, 2021 – March 4, 2024
4.	ISO 14001:2015 – Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015 – Environmental Management System	00778-1	Pengelolaan Produksi Tenaga Listrik oleh Pembangkit Tenaga Termal, Pembangkit Listrik Tenaga Air, dan Jasa Operasi & Pemeliharaan serta Pengelolaan Pelayanan Induk di Kantor Pusat, Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan (UPDK), dan Unit Pelaksana Pembangkitan (UPK) Management of Electric Power Production by Thermal Power Plants, Hydroelectric Power Plants, and Operation & Maintenance Services as well as Management of Reservoir Services at the Head Office, Generation Control Implementation Unit (UPDK), and Power Generation Implementation Unit (UPK)	PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi PT PLN (Persero) Certification Center	27 Desember 2023 – 26 Desember 2026 December 27, 2023 – December 26, 2026
5.	ISO 9001:2015 – Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 – Quality Management System	00077-11	Pengelolaan Produksi Tenaga Listrik oleh Pembangkit Tenaga Termal, Pembangkit Listrik Tenaga Air, dan Jasa Operasi & Pemeliharaan serta Pengelolaan Pelayanan Induk di Kantor Pusat, Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan (UPDK), dan Unit Pelaksana Pembangkitan (UPK) Management of Electric Power Production by Thermal Power Plants, Hydroelectric Power Plants, and Operation & Maintenance Services as well as Management of Reservoir Services at the Head Office, Generation Control Implementation Unit (UPDK), and Power Generation Implementation Unit (UPK)	PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi PT PLN (Persero) Certification Center	27 Desember 2023 – 26 Desember 2026 December 27, 2023 – December 26, 2026
6.	ISO 45001:2018 – Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ISO 45001:2018 – Occupational Health and Safety Management System	00077-6	Pengelolaan Produksi Tenaga Listrik oleh Pembangkit Tenaga Termal, Pembangkit Listrik Tenaga Air, dan Jasa Operasi & Pemeliharaan serta Pengelolaan Pelayanan Induk di Kantor Pusat, Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan (UPDK), dan Unit Pelaksana Pembangkitan (UPK) Management of Electric Power Production by Thermal Power Plants, Hydroelectric Power Plant, and Operation & Maintenance Services and Management of Reservoir Services at the Head Office, Generation Control Implementation Unit (UPDK), and Power Generation Implementation Unit (UPK)	PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi	27 Desember 2023 – 26 Desember 2026 December 27, 2023 – December 26, 2026

Sertifikasi PLN NP yang masa berlakunya sampai dengan 2023

PLN NP certification which is valid until 2023

No	Ruang Lingkup Sertifikasi Scope of Certification	Nomor Sertifikat Certificate Number	Lingkup Scope	Penerbit Sertifikasi Certifier	Masa Berlaku Validity Period
1	ISO 9001:2015 – Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 – Quality Management System	PT 430001	Pengelolaan Produksi Tenaga Listrik oleh Pembangkit Tenaga Termal, Pembangkit Listrik Tenaga Air, dan Jasa Operasi & Pemeliharaan, Kantor Pusat serta Unit Pembangkitan Gresik, Muara Karang, Muara Tawar, Paiton, Cilacap, Bekasi, Indramayu, Rembang, Pacitan dan Tanjung Awar-awar Management of Electric Power Production by Thermal Power Plants, Hydroelectric Power Plants, and Operation & Maintenance Services, Head Office and Generating Units of Gresik, Muara Karang, Muara Tawar, Paiton, Cilacap, Bekasi, Indramayu, Rembang, Pacitan and Tanjung Awar-awar	BSI	8 November 2020 – 07 November 2023, November 8, 2020 – November 7, 2023
2	ISO 14001:2015 – Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015 – Environmental Management System	EMS 000992	Pengelolaan Produksi Tenaga Listrik oleh Pembangkit Tenaga Termal, Pembangkit Listrik Tenaga Air, dan Jasa Operasi & Pemeliharaan, Kantor Pusat serta Unit Pembangkitan Gresik, Muara Karang, Muara Tawar, Paiton, Cilacap, Bekasi, Indramayu, Rembang, Pacitan dan Tanjung Awar-awar, Ketim Teluk, Tersapan, Arun, Pulang Pisau Management of Electric Power Production by Thermal Power Plants, Hydroelectric Power Plants, and Operation & Maintenance Services, Head Office and Generating Units of Gresik, Muara Karang, Muara Tawar, Paiton, Cilacap, Bekasi, Indramayu, Rembang, Pacitan, Tanjung Awar-awar, Ketim Teluk, Tersapan, ARUN, and Pulang Pisau.	BSI	11 Agustus 2020 – 07 November 2023, August 11, 2020 – November 7, 2023

No.	Ruang Lingkup Sertifikasi Scope of Certification	Nomor Sertifikat Certificate Number	Lingkup Scope	Penerbit Sertifikasi Certifier	Masa Berlaku Validity Period
3	ISO 20000-1:2018 – IT Service Management System ISO/IEC 20000-1:2018. ISO 20000-1:2018 – IT Service Management System ISO/IEC 20000-1:2018.	[illegible]	Sistem Manajemen layanan PLN NP untuk mendukung penyediaan layanan Dnet dan SIT Ellipse kepada pengguna internal sesuai dengan katalog layanan terkini. PLN NP service management system to support the provision of Dnet and SIT Ellipse services to internal users according to the latest service catalogue.	[illegible]	22 November 2020 – 21 November 2021 November 22, 2020 – November 21, 2023
4	ISO 37001:2016 – Anti-Bribery Management System – ISO 37001:2016. ISO 37001:2016 – Anti-Bribery Management System – ISO 37001:2016.	[illegible]	Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada Seluruh Proses Bisnis Pembangkit Listrik di Kantor Pusat. Anti-Bribery Management System in All Power Plant Business Processes at Head Office.	[illegible]	4 Agustus 2020 – 3 Agustus 2023 August 4, 2020 – August 3, 2023
5	ISO 45001:2018 – Occupational Health & Safety Management System ISO 45001:2018 – Occupational Health & Safety Management System ISO 45001:2018.	[illegible]	Pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi, Pembangkit Listrik Tenaga Air dan Jasa Operator & Pemeliharaan di Kantor Pusat, Unit Pembangkitan Dieng, Muara Karang, Muara Tawar, Pelton, Cirata, Brantas, Indramayu, Rembang, Pacitan dan Tanjung Awar-awar. Management of Electric Power Production by Thermal Power Plants, Hydroelectric Power Plants, and Operation & Maintenance Services, Head Office and Generating Units of Dieng, Muara Karang, Muara Tawar, Pelton, Cirata, Brantas, Indramayu, Rembang, Pacitan and Tanjung Awar-awar.	[illegible]	22 November 2020 – 21 November 2023 November 22, 2020 – November 21, 2023
6	ISO 50001:2018 – Energy Management System ISO 50001:2018. ISO 50001:2018 – Energy Management System ISO 50001:2018.	[illegible]	Pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi, Pembangkit Listrik Tenaga Air dan Jasa Operator & Pemeliharaan di Kantor Pusat, Unit Pembangkitan Dieng, Muara Karang, Muara Tawar, Pelton, Cirata, Brantas, Indramayu, Rembang, Pacitan dan Tanjung Awar-awar. Management of Electric Power Production by Thermal Power Plants, Hydroelectric Power Plants, and Operation & Maintenance Services, Head Office and Generating Units of Dieng, Muara Karang, Muara Tawar, Pelton, Cirata, Brantas, Indramayu, Rembang, Pacitan and Tanjung Awar-awar.	[illegible]	6 November 2020 – 7 November 2023 November 6, 2020 – November 7, 2023
7	Integrated Management Registration PAS 99:2012. Integrated Management Registration PAS 99:2012.	[illegible]	Pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi, Pembangkit Listrik Tenaga Air dan Jasa Operator & Pemeliharaan dan Pengelolaan Jasa reservoir sesuai ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO/IEC 20000-1:2018, ISO 50001:2018, ISO 55001:2014, ISO/IEC 27001:2013, ISO 31301:2019, ISO 27001:2013 & ISO 37001:2016 untuk Kantor Pusat dan Unit Pembangkitan Dieng, Muara Karang, Muara Tawar, Pelton, Cirata, Brantas, Indramayu, Rembang, Pacitan, Tanjung Awar-Awar, UHBC, Kaliori Tegal, Tanjungan, Arun, dan Kulang Riau. Management of Geothermal Power Plants, Hydro Power Plants, and Operator Services & Maintenance and Management of Reservoir Services according to ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO/IEC 20000-1:2018, ISO 50001:2018, ISO 55001:2014, ISO/IEC 27001:2013, ISO 31301:2019, ISO 27001:2013 & ISO 37001:2016, for Head Office and Generating Units Dieng, Muara Karang, Muara Tawar, Pelton, Cirata, Brantas, Indramayu, Rembang, Pacitan, Tanjung Awar-Awar, UHBC, Kaliori Tegal, Tanjungan, Arun, and Kulang Riau.	[illegible]	6 November 2020 – 7 November 2023 November 6, 2020 – November 7, 2023

Ikhtisar Data Keuangan Penting
Important Financial Data Highlights

Posisi Keuangan (Rp juta)
Financial Position (Rp million)

Uraian *Description*	2019	2020	2021*)	2022*)	2023
Aset Lancar *Current Assets*	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	48.843.318
Aset Tidak Lancar *Non-current Assets*	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	294.377.850
Jumlah Aset *Total Assets*	171.223.365	175.561.020	230.454.559	232.591.691	343.461.168
Liabilitas Jangka Pendek *Current Liabilities*	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11.109.047
Liabilitas Jangka Panjang *Non-current Liabilities*	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	23.499.297
Jumlah Liabilitas *Total Liabilities*	9.450.270	10.246.069	28.035.255	30.763.888	34.608.344
Jumlah Ekuitas *Total Equity*	161.773.095	165.314.951	202.419.304	201.829.803	308.860.824
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas *Total Liabilities and Equity*	171.223.365	175.561.020	230.454.559	232.591.691	343.461.168
Investasi pada Entitas Asosiasi/Ventura Bersama *Investment in Associates/Joint Ventures*	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	13.694.224

*) Disajikan kembali *Restated*

Jumlah Aset (Rp juta)
Total Assets (Rp million)

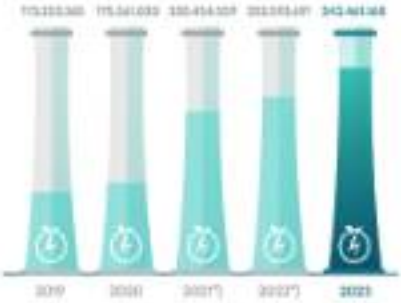

Liabilitas Jangka Pendek (Rp juta)
Current Liabilities (Rp million)

Liabilitas Jangka Panjang (Rp juta)
Non-current Liabilities (Rp million)

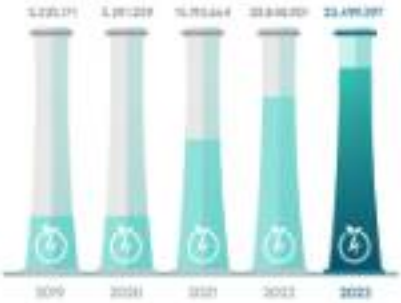

Jumlah Liabilitas (Rp juta)
Total Liabilities (Rp million)

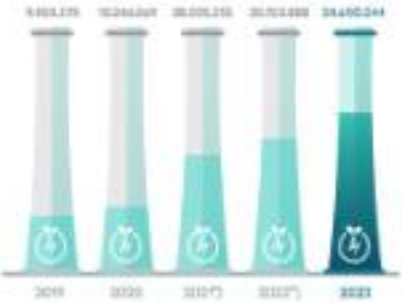

Investasi pada Entitas Asosiasi/Ventura Bersama (Rp juta)
Investment in Associates/Joint Ventures (Rp million)

Laba Rugi Komprehensif (Rp juta)
Comprehensive Profit Or Loss (Rp million)

Uraian Description	2019	2020	2021	2022*	2023
Pendapatan Usaha Revenue	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	**90.275.607**
Penjualan Tenaga Listrik Sales of Electricity	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	**[illegible]**
Jasa Operasi & Pemeliharaan Operation & Maintenance Services	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	**[illegible]**
Konstruksi Construction	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	**[illegible]**
Lainnya Others	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	**[illegible]**
Beban Usaha Operating Expenses	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	**(76.008.286)**
Laba Usaha Operating Income	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	**[illegible]**
Pos Keuangan dan Lain-lain (Bersih) Financial Items and Others (Net)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	**[illegible]**
Beban Pajak Tax Expense	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	**(2.725.866)**
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**
Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain Tahun Berjalan setelah Pajak Other Comprehensive Income/(Loss) for the Year after Tax	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	**[illegible]**
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan **Comprehensive Income for the Year**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**
Laba Tahun Berjalan Diatribusikan kepada Profit for the Year Attributable to:					
Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	**[illegible]**
Kepentingan Non-Pengendali Non-controlling Interests	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	**[illegible]**
Penghasilan Komprehensif Diatribusikan kepada Comprehensive Income Attributable to:					
Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	**[illegible]**
Kepentingan Non-Pengendali Non-controlling Interests	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	**[illegible]**
Laba Per Saham Dasar (Rp Penuh) Basic Earnings per Share (Full Rp)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	**[illegible]**

*Disajikan kembali Restated

Pendapatan Usaha (Rp juta)
Revenue (Rp million)

Beban Usaha (Rp juta)
Operating Expenses (Rp million)

Laba Usaha (Rp juta)
Operating Income (Rp million)

Laba Tahun Berjalan (Rp juta)
Profit for the Year (Rp million)

Laba Per Saham Dasar (Rp juta)
Basic Earnings per Share (Rp million)

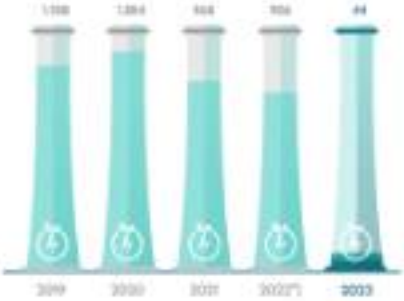

Informasi Arus Kas (Rp juta)
Information On Cash Flows (Rp million)

Uraian Description	2019	2020	2021	2022*)	2023
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi Net Cash Provided by Operating Activities	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi Net Cash Used in Investing Activities	(2.523.554)	(1.371.476)	(304.356)	(1.986.039)	(1.476.403)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities	1.480.894	[illegible]	(679.503)	(296.954)	(748.644)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	(3.105.899)
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pengaruh Perubahan Kurs Mata Uang Asing Effect of Changes in Foreign Currency	(2.299)	15.568	[illegible]	[illegible]	(9.205)
Jumlah Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Total Cash and Cash Equivalents at the End of the Year	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

*) Disajikan kembali (Restated)

Rasio Keuangan
Financial Ratios

Uraian Description	2019	2020	2021	2022*)	2023
Rasio Profitabilitas Profitability Ratio					
Rasio Laba (Rugi) terhadap Aset (%) Return on Assets (%)	3,84	4,36	1,76	5,64	**3,98**
Rasio Laba (Rugi) terhadap Ekuitas (%) Return on Equity (%)	4,06	4,63	1,92	1,81	**4,43**
Rasio Laba (Rugi) terhadap Investasi (%) Return on Investment (%)	3,83	3,66	6,79	6,48	**3,99**
Rasio Laba (Rugi) terhadap Penjualan (%) Profit (Loss) to Revenue Ratio (%)	16,36	20,33	8,09	24,20	**8,35**
Rasio Pertumbuhan Penjualan (%) Sales Growth Ratio (%)	(9,48)	(13,60)	15,96	(13,48)	**283,73**
Rasio Likuiditas Liquidity Ratio					
Rasio Lancar (%) Current Ratio (%)	565,42	439,33	254,85	348,44	**440,35**
Rasio Kas (%) Cash Ratio (%)	36,37	73,86	49,89	84,49	**57,99**
Rasio Cepat (%) Quick Ratio (%)	529,15	408,30	239,57	301,13	**401,38**
Rasio Solvabilitas Solvency Ratio					
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (%) Debt to Equity Ratio (%)	5,73	6,20	8,27	10,19	**11,23**
Rasio Liabilitas terhadap Total Aset (%) Debt to Assets Ratio (%)	5,46	5,84	8,48	9,75	**10,07**
Rasio Aktivitas Activity Ratio					
Collection Period (hari) Collection Period (days)	703	703	793	784	**714**
Perputaran Total Aset (%) Total Assets Turnover (%)	0,23	0,17	0,21	0,16	**0,25**

*) Disajikan kembali (Restated)

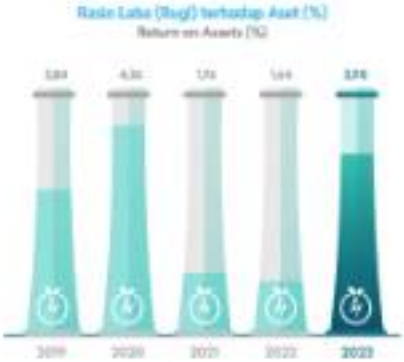

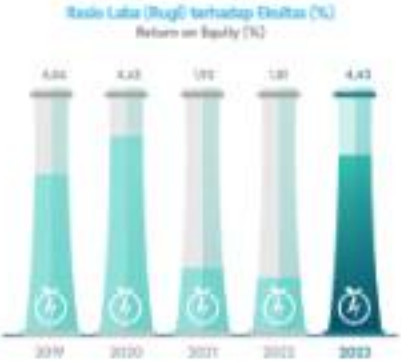

Rasio Lancar (%)
Current Ratio (%)

Rasio Kas (%)
Cash Ratio (%)

Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (%)
Debt to Equity Ratio (%)

Rasio Liabilitas terhadap Total Asset (%)
Debt to Assets Ratio (%)

***Collection Period* (hari)**
Collection Period (day)

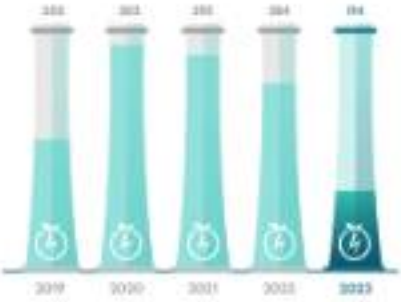

Perputaran Total Asset (%)
Total Assets Turnover (%)

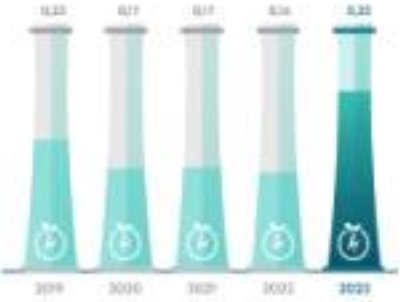

Ikhtisar Kinerja Operasional
Operational Performance Highlights

Uraian Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Produksi Energi Listrik (GWh) Electricity Production (GWh)	33.303	33.816	36.641	33.064	**66.846**
Penjualan Energi Listrik (GWh) Electricity Sales (GWh)	32.404	32.117	35.848	36.379	**63.179**
EAF Pembangkit Batubara (%) EAF of Coal Power Plant (%)	85,39	84,25	85,17	85,08	**84,85**
EAF Pembangkit Non Batubara (%) EAF of Non-coal Power Plant (%)	95,03	94,66	95,21	95,16	**94,72**
EFOR Pembangkit Batubara (%) FOR of Coal Power Plant (%)	1,78	1,51	0,92	0,47	**1,75**
EFOR Pembangkit Non Batubara (%) EFOR of Non-coal Power Plant (%)	0,79	0,95	2,51	0,49	**2,93**
NPHR Pembangkit Batubara (kcal/kWh) NPHR of Coal Power Plant (kcal/kWh)	3.037,58	2.302,94	2.346,89	2.397,22	**2.064,73**
NPHR Pembangkit Non Batubara (kcal/kWh) NPHR of Non-coal Power Plant (kcal/kWh)	2.399,03	2.470,68	2.365,77	2.264,30	**2.343,64**
SOF Pembangkit Batubara (jam/unit) SOF of Coal Power Plant (times/unit)	1,80	1,50	1,50	1,50	**1,81**
SOF Pembangkit Non Batubara (jam/unit) SOF of Non-coal Power Plant (times/unit)	1,21	1,64	0,88	1,67	**1,38**
SOF Pembangkit Batubara (%) SOF of Coal Power Plant (%)	8,71	4,83	3,88	8,47	**9,71**
SOF Pembangkit Non Batubara (%) SOF Pembangkit Non Batubara (%)	4,37	3,59	2,57	4,35	**3,33**
Jumlah Daya Mampu Neto (MW) Total Net Dependable Capacity (MW)	70.997	70.664	70.866	71.035	**70.856**
Jumlah Karyawan (orang) Number of Employees (person)	3.666	3.725	3.071	3.024	**4.703**
Skor Assessment CCG (skor) CCG Assessment Score (score)	94,45	95,03	95,67	94,42	**94,83**
Skor KPI KPI Score	99,17	99,79	96,11	102,69	**102,31**

Produksi Energi Listrik (GWh)
Electricity Production (GWh)

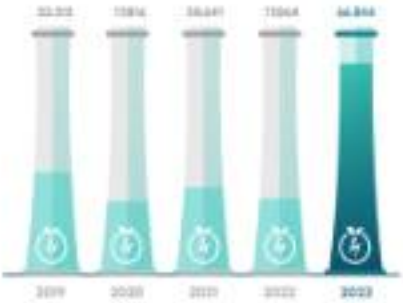

Penjualan Energi Listrik (GWh)
Electricity Sales (GWh)

EAF Pembangkit Batubara (%)
EAF of Coal Power Plant (%)

EFOR Pembangkit Batubara(%)
EFOR of Coal Power Plant (%)

NPHR Pembangkit Batubara (kcal/KWh)
NPHR of Coal Power Plant (kcal/KWh)

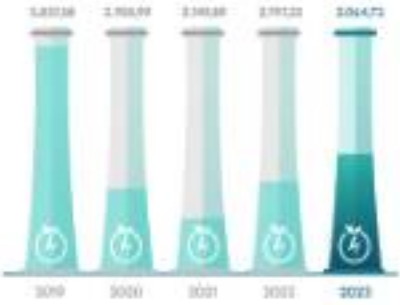

SdOF Pembangkit Batubara (kali/unit)
SdOF of Coal Power Plant (times/unit)

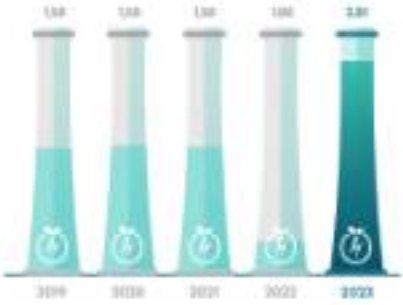

SOF Pembangkit Batubara (%)
SOF of Coal Power Plant (%)

EAF Pembangkit Non Batubara(%)
EAF of Non-coal Power Plant (%)

EFOR Pembangkit Non Batubara (%)
EFOR of Non-coal Power Plant (%)

NPHR Pembangkit Non Batubara (kcal/KWh)
NPHR of Non-coal Power Plant (kcal/KWh)

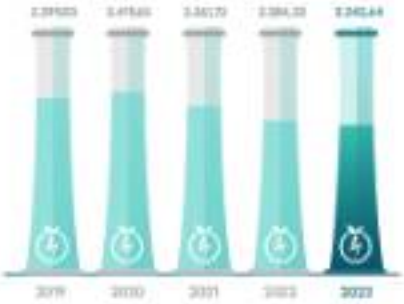

SOEF Pembangkit Non Batubara (kali/unit)
SOEF of Non-coal Power Plant (times/unit)

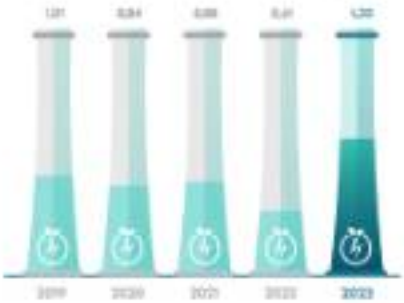

SOF Pembangkit Non Batubara (%)
SOF of Non-coal power Plant (%)

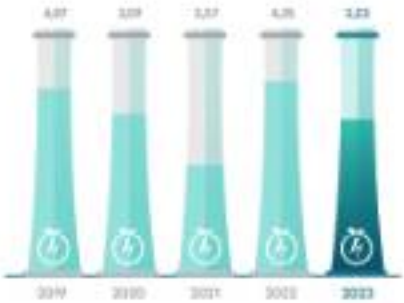

Jumlah Daya Mampu Neto (MW)
Total Net Dependable Capacity (MW)

Jumlah Karyawan (orang)
Number of Employees (person)

Ikhtisar Saham
Share Highlights

Sampai dengan akhir tahun 2023, PLN NP tidak melakukan perdagangan saham sehingga tidak ada informasi harga saham tertinggi, harga saham terendah dan harga saham penutupan serta volume saham yang diperdagangkan.

Until the end of 2023, PLN NP did not conduct share trading, so there is no information on the highest share price, lowest share price, and closing share price as well as the volume of shares traded.

Ikhtisar Obligasi
Bond Highlights

Sampai dengan akhir tahun 2023, PLN NP tidak menerbitkan obligasi, sukuk dan obligasi konversi sehingga tidak ada informasi terkait dengan jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar, tingkat bunga/imbalan, tanggal jatuh tempo dan peringkat obligasi/sukuk.

Until the end of 2023, PLN NP did not issue bonds, sukuk, and convertible bonds so there is no information related to the number of outstanding bonds/sukuk/convertible bonds, interest rates/yields, maturity dates, and bonds/sukuk ratings.

Aksi Korporasi
Corporate Actions

Pada tahun 2023, PLN NP tidak melakukan aksi korporasi terkait dengan aktivitas yang berpengaruh terhadap jumlah saham beredar, di antaranya pemecahan saham, penggabungan saham, dividen saham, saham bonus dan perubahan nilai nominal saham.

In 2023, PLN NP did not undertake any Corporate Actions related to activities affecting the number of outstanding shares, including stock splits, stock mergers, stock dividends, bonus shares, and changes in the nominal value of shares.

Peristiwa Penting 2023
2023 Significant Events

16 Januari 2023
January 16, 2023

Peresmian fasilitas Fire Service Training Center (FSTC) berstandar NFPA (National Fire Protection Association) di Pelton.
Inauguration of the NFPA (National Fire Protection Association) standard Fire Service Training Center (FSTC) facility in Pelton.

4 Februari 2023
February 4, 2023

Penandatanganan perjanjian kerjasama antara PLN NP dengan PLN Pusharla untuk penyediaan komponen listrik unit pembangkit listrik di lingkungan PLN NP.
The signing of a cooperation agreement between PLN NP with PLN Pusharla for the supply of electricity components for power generation units within PLN Nusantara Power.

22 Februari 2023
February 22, 2023

Peluncuran Perdagangan Karbon sebagai upaya merealisasikan komitmen pengurangan emisi gas rumah kaca.
Launching Carbon Trading as an effort to realize greenhouse gas emission reduction commitments.

3 Maret 2023
March 3, 2023

Penandatanganan perjanjian kerjasama antara PLN NP dengan Mitsubishi Heavy Industries (MHI) untuk percepatan transisi energi hijau melalui inovasi Co-firing PLTU.
The signing of a cooperation agreement between PLN NP and Mitsubishi Heavy Industries (MHI) to accelerate the green energy transition through co-firing PLTU innovation.

30 Maret 2023
March 30, 2023

Akuisisi Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Sengkang milik PT Energi Sengkang (PES) di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan.
Acquisition of PT Energi Sengkang's (PES) Sengkang Gas and Steam Power Plant (SPP) in Wajo Regency, South Sulawesi.

13 April 2023
April 13, 2023

Penyaluran Dana CSR sebesar Rp4,2 miliar melalui program Berbuat Ramadhan.
Distribution of CSR funds amounting to Rp4.2 billion through the Ramadan Blessing program.

16 April 2023
April 16, 2023

Penandatanganan perjanjian kerjasama antara PLN NP dengan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (UNUSA) untuk Pengembangan Pendidikan Bersama.
The signing of a cooperation agreement between PLN NP and Surabaya Nahdlatul Ulama University (UNUSA) for Joint Education Development.

17 April 2023
April 17, 2023

Penandatanganan perjanjian kerjasama antara PLN NP dengan PT PLN Batam, PT Energi Baru TBS dan PLN NP dalam membangun Indonesia dengan berwawasan pengelolaan lingkungan yang apik.
The signing of a cooperation agreement between PLN NP and PT PLN Batam, PT Energi Baru TBS and PLN NP in building Indonesia based on slick environmental management.

15-17 Mei 2023
May 15-17, 2023

Pelaksanaan SPKI PLN NP 2023 untuk mendorong pertumbuhan PLN NP sekaligus mendorong inovasi dari power people untuk mewujudkan NZE.
The implementation of SPKI PLN NP 2023 is to encourage the growth of PLN NP while encouraging innovation from power people to realize NZE.

19 Mei 2023
May 19, 2023

Penandatanganan perjanjian kerjasama antara PLN NP dengan PT PLN dengan Fakultas Teknik Universitas Udayana (Unud) untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
The signing of a cooperation agreement between PLN NP and the Faculty of Engineering of Udayana University (Unud) to improve the quality of human resources (HR).

01 Juni 2023
June 01, 2023

Coastal Clean Up (CCU) oleh UP Paiton di Pantai Grinting.
Coastal Clean Up (CCU) by UP Paiton at Grinting Beach.

29 Juni 2023
June 29, 2023

Penyaluran 10.900 paket daging kurban oleh PLN NP dengan total nominal mencapai Rp4,5 miliar.
The distribution of 10.900 qurban meat packages by PLN NP with a total nominal value of Rp4,5 billion.

4 Juli 2024
July 4, 2024

Penyaluran Bantuan Korban Gempa Bantul melalui Unit Pembangkitan (UP) Paciran.
Distribution of Aid for Bantul Earthquake Victims through Paciran Generating Unit (UP).

11 Juli 2024
July 11, 2024

Penandatanganan Pekerjaan Jasa Operasi dan Pemeliharaan (PLTMG) di Ternate dan Flores.
Signing of Operation and Maintenance Services for GEPP in Ternate and Flores.

26 Juli 2024
July 26, 2024

Penyaluran Rp1,2 Miliar oleh PLN NP untuk cegah Stunting Anak.
Distribution of Rp1,2 Billion by PLN NP to prevent Child Stunting.

29 Juli 2024
July 29, 2024

Penanaman 100.000 pohon mangrove oleh PLN NP yang dilakukan melalui Unit Pembangkitan (UP) Indramayu bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Planting 100,000 mangrove trees by PLN NP through the Indramayu Generating Unit (UP) together with the West Java Provincial Government.

30 Agustus 2024
August 30, 2024

PLN NP melalui UP Muara Karang bekerjasama dengan Kementerian LHK melakukan konservasi lahan kritis di area hulu Jakarta dengan total penanaman 6,000 pohon.
PLN NP through Muara Karang UP collaborated with the Ministry of Environment and Forestry to conserve critical land in the upstream area of Jakarta with a total planting of 6,000 trees.

5 – 6 September 2024
September 5-6, 2024

Penanaman 100.000 pohon mangrove oleh PLN NP yang dilakukan melalui Unit Pembangkitan (UP) Indramayu bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Planting 100,000 mangrove trees by PLN NP through the Indramayu Generating Unit (UP) together with the West Java Provincial Government.

8 September 2023
September 8, 2023

Peluncuran Nusantara electronic boat (e-Boat) yang merupakan hasil karya Power People yang akan mendukung kegiatan operasi dan pemeliharaan PLTS Apung Cirata 192 MWp.
The launch of the Nusantara electronic boat (e-Boat), a product of Power People, which will support the operation and maintenance of the 192 MWp Cirata floating SPP.

11 – 13 September 2023
September 11-13, 2023

Pagelaran NP Connect 2023 untuk menciptakan peluang baru bagi jalinan kolaborasi, sinergi dan kerjasama dengan jumlah partisipan sebanyak 117 exhibitor dari 113 perusahaan.
NP Connect 2023 to create new opportunities for collaboration, synergy and cooperation with 117 exhibitors from 113 companies.

20 September 2023
September 20-21, 2023

PLN NP meraih empat penghargaan sekaligus dalam ajang Governance, Risk, & Compliance (GRC) & Performance Excellence Award.
PLN NP won four awards at once in the Governance, Risk, & Compliance (GRC) & Performance Excellence Award event.

9 Oktober 2023
October 9, 2023

Peresmian Green Hydrogen Plant pertama di Indonesia.
Inauguration of the first Green Hydrogen Plant in Indonesia.

2 November 2023
November 2, 2023

Pelaksanaan Batu Pertama (Groundbreaking) PLTS IKN.
Groundbreaking of IKN SPP.

9 November 2023
November 9, 2023

Peresmian Operasi PLTS Terapung Cirata berkapasitas 192 MWp.
Inauguration of Operation of Cirata Floating SPP with a Capacity of 192 MWp.

9 November 2022
November 9, 2022

Penandatanganan perjanjian kerjasama antara PLN NP dengan perusahaan asal China, Powerchina International Group Limited (Powerchina) dalam upaya mengakselerasi pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia.
The signing of a cooperation agreement between PLN NP and a Chinese company, Powerchina International Group Limited (Powerchina) in an effort to accelerate the development of New Renewable Energy (NRE) in Indonesia.

27 November 2022
November 27, 2022

PLN NP sukses meraih Juara 3 di ajang Annual Report Award (ARA) 2022 dalam kategori " Non Co.Public Non Keuangan.
PLN NP successfully won 3rd place in the Annual Report Award (ARA) 2022 in the "Non Co.Public Non Financial" category.

5 Desember 2022
December 5, 2022

Penandatanganan perjanjian kerjasama antara PLN NP dengan PT Pembangkitan Jawa Bali Masdar Solar Energi (PNGE) untuk ekspansi PLTS Terapung Cirata Jawa Barat.
The signing of a cooperation agreement between PLN NP and PT Pembangkitan Jawa Bali Masdar Solar Energi (PNGE) for the expansion of Cirata Floating Solar Power Plant in West Java.

5 Desember 2022
December 5, 2022

Penandatanganan nota kesepahaman antara PLN NP dan PT Bukit Asam untuk pemanfaatan FABA.
Signing of a memorandum of understanding between PLN NP and PT Bukit Asam for FABA utilization.

30 Desember 2022
December 30, 2022

PLN NP membukukan 14 penghargaan Proper 2022 meliputi 6 PROPER Emas, juara 3 video PROPER Emas 2022, dan 7 PROPER Hijau.
PLN NP won 14 PROPER 2022 awards including 6 Gold Propers, 3rd place in the 2022 Gold Proper video, and 7 Green Propers.

29 Desember 2022
December 29, 2022

PLN NP meraih kontrak bersama Jasa Operation & Maintenance Expert Services Combined Cycle Power Plant (CCPP) Bibiyana Sebesar 400 MW milik Bangladesh Power Development Board di Habiganj, Bangladesh.
PLN NP won a cooperation contract for Operation & Maintenance Expert Services for the 400 MW South Bibiyana Combined Cycle Power Plant (CCPP) owned by the Bangladesh Power Development Board in Habiganj, Bangladesh.

Testimoni
Testimonial

Jokowi
Presiden Republik Indonesia
President of the Republic of Indonesia

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata, memiliki kapasitas 192 megawatt peak (MWp). Hal ini merupakan sejarah bagi Indonesia karena mimpi besar untuk membangun pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam skala besar bisa tercapai dan kita berhasil membangun salah satu pembangkit listrik tenaga surya terapung yang terbesar di Asia Tenggara dan nomor 3 di dunia.

Cirata floating Solar Power Plant (SPP) has a maximum capacity of 192 megawatts (MWp). This is history for Indonesia since the substantial dream of building a New Renewable Energy (NRE) power plant on a large scale was achieved and we succeeded in building one of the largest floating solar power plants in Southeast Asia and number 3 in the world.

Retno Marsudi
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia
Minister of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia

28 tahun lamanya PLN Nusantara Power tiada henti berinovasi, terus tumbuh dan berkembang. Tentu tanpa meninggalkan tanggung jawab sosial perusahaan demi terwujudnya kemandirian masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup. Saya turut bangga dan mengapresiasi kinerja PLN NP dalam menajukan negeri melalui energi listrik. Kementerian Luar Negeri pun siap bersinergi mewujudkan visi menjadi perusahaan energi listrik terbesar di Asia Tenggara. Go *Beyond Power, Energizing The Future*.

For 28 years, PLN Nusantara Power has continuously innovated, keeping at the growth and development. Certainly without abandoning corporate social responsibility in order to realize community independence and environmental sustainability. I am also proud and appreciate PLN NP performance in advancing the country through electrical energy. The Ministry of Foreign Affairs is also ready to work together to realize the vision of becoming the largest electrical energy company in Southeast Asia. Go Beyond Power, Energizing The Future.

Erick Thohir

Menteri BUMN Republik Indonesia

Minister of SOE of the Republic of Indonesia

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sudah dilakukan di beberapa titik di IKN Nusantara dengan kapasitas energi mencapai 50 Megawatt. Agustus tahun 2024 akan jadi 80 megawatt. IKN akan jadi kota pertama di Indonesia yang punya listrik hijau secara 100 persen. Selain di IKN Nusantara, Indonesia juga memiliki PLTS di Cirata. PLTS terapung tersebut bahkan menjadi PLTS terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas 142 megawatt.

Construction of Solar Power Plants (SPP) has been carried out at several points in IKN Nusantara with an energy capacity of up to 50 Megawatts. In August 2024 it will be 80 megawatts. IKN will be the first city in Indonesia to have 100 percent green electricity. Apart from IKN Nusantara, Indonesia also has SPP in Cirata. This floating SPP is even the largest SPP in Southeast Asia with a capacity of 142 megawatts.

Arifin Tasrif

Menteri ESDM

Minister of Energy and Mineral Resources

PLTS Terapung Cirata yang digadang sebagai PLTS Terapung terbesar di Asia Tenggara (ASEAN) dan terbesar nomor tiga dunia ini "cuma memakan" lahan waduk seluas 200 hektare. Total permukaan yang bisa dimanfaatkan dari waduk tersebut adalah 20%. Nantinya kami akan mendorong pemanfaatan waduk tersebut untuk PLTS terapung hingga mencapai lima kali lipat dari kapasitas terpasang saat ini 192 MWp. Jadi kalau 20%, bisa 5 kali lagi.

Cirata Floating SPP, which is predicted to be the largest floating SPP in Southeast Asia (ASEAN) and the third largest in the world, "only takes up" 200 hectares of reservoir land. The total surface that can be utilized from the reservoir is 20%. Later we will encourage the use of these reservoirs for floating SPP up to five times the current installed capacity of 192 MWp. So if it's 20%, it could be 5 more times.

Darmawan Prasodjo

Direktur Utama PT PLN (Persero)
President Director of PT PLN (Persero)

Pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTGU) Blok 3 Muara Karang milik PLN Nusantara Power akan memimpin langkah pembangkit PLN masuk ke bursa karbon. PLTGU ini telah memiliki SPE gas rumah kaca (GRK) dari Kementerian LHK dan tercatat berhasil menurunkan karbon dioksida setara hampir 1 juta ton di tahun 2022 dan telah menggunakan 100% bahan bakar gas yang telah diregasifikasi dari LNG pada *Floating Storage and Regasification Unit (FSRU)* dengan menggunakan suplai LNG serta dilengkapi dengan teknologi gas turbin terbaru dan paling efisien yang menggunakan metode *Combine Cycle*.

PLN Nusantara Power's Muara Karang Block 3 steam gas power plant (CCPP) will lead PLN's power plant steps to enter the carbon exchange. This CCPP has a greenhouse gas (GHG) SPE from the Ministry of Environment and Forestry and has been recorded as successful in reducing carbon dioxide equivalent to almost 1 million tons in 2022 and has used 100% gas fuel that has been regasified from LNG in the Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) using an LNG supply and equipped with the latest and most efficient gas turbine technology using the Combine Cycle method.

Arsal Ismail

Direktur Utama PT Bukit Asam
President Director of PT Bukit Asam

Kerja sama antara PLN NP dengan PTBA akan memanfaatkan FABA dari PLTU sebagai material backfilling yang mampu menetralisir air asam bekas tambang milik PTBA. Kolaborasi ini akan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, di mana FABA dimanfaatkan sebagai material NAF (*Non Acid Forming*) penetralisir air asam pada bekas tambang. Potensi penyerapan FABA dari PLTU Bukit Asam 4x65 MW selama periode pemanfaatan 3 tahun mencapai 400 ribu ton. Sinergi ini sejalan dengan visi PTBA menjadi perusahaan energi kelas dunia yang peduli lingkungan.

The collaboration between PLN NP and PTBA in leveraging FABA from CFPP as a backfilling material is capable to neutralize waste mine acid water of PTBA. This collaboration will be mutually beneficial for both parties, where FABA is used as a NAF (Non Acid Forming) material to neutralize acid water in former mines. The potential absorption of FABA from Bukit Asam 4x65 MW CFPP during the 3 year utilization period reaches 400 thousand tons. This synergy is in line with PTBA vision of becoming a world-class energy company that cares about the environment.

Laporan Kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan

Report to Shareholders and Stakeholders

Laporan Dewan Komisaris
Report from the Board of Commissioners

Evy Haryadi
Komisaris Utama
President Commissioner

Dewan Komisaris mengapresiasi keberhasilan PLN NP menyelesaikan proyek pembangkit listrik, yakni PLTS Terapung Cirata 192 MWp untuk mendukung utilisasi energi baru dan terbarukan serta mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengurangi emisi karbon serta menjadi Pionir dan Trader terbesar di Bursa Karbon. Hal ini mengindikasikan keberhasilan Direksi dalam menjalankan roda Perusahaan.

The Board of Commissioners appreciates PLN NP success in completing a power plant project, namely the 192 MWp Cirata Floating Solar Power Plant to support the utilization of new and renewable energy as well as reduce dependence on fossil fuels, reduce carbon emissions as well as becoming the largest Pioneer and Trader in the Carbon Exchange. It signifies the Board of Directors success in running the Company.

Pemegang Saham dan Para Pemangku Kepentingan yang Kami Hormati,

Dear Shareholders and Stakeholders,

Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya, sehingga mampu melaksanakan pengelolaan PLN NP dengan baik selama tahun buku 2023 dengan pencapaian kinerja yang sangat baik.

Pada kesempatan ini, izinkan kami mewakili jajaran Dewan Komisaris untuk menyampaikan laporan pengawasan di sepanjang tahun 2023. Seluruh tugas dan tanggung jawab telah dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa kegiatan operasional Perseroan telah mengacu kepada rencana kerja yang telah ditetapkan, dikelola secara profesional, sesuai dengan kepentingan Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lainnya. Melalui laporan ini, kami menyampaikan hasil dari tugas pengawasan dan penilaian kinerja Direksi selama tahun 2023, serta pandangan atas prospek usaha yang disusun oleh Direksi dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

Greetings to all of us. Praise be to the God Almighty, due to the grace granted, so that we were able to carry out PLN NP management well during the 2023 financial year with excellent performance achievements.

On this occasion, kindly allow us on behalf of the Board of Commissioners to submit a supervisory report throughout 2023. We performed the entire duties and responsibilities based on the Company's Articles of Association as well as laws and regulations. The Board of Commissioners ensures that the Company's operational activities have referred to the established work plan, managed professionally, following the interests of Shareholders and other stakeholders. Through this report, we present the results of our supervisory duties and assessment of the performance of the Board of Directors during 2023, our views on the business prospects prepared by the Board of Directors, as well as the implementation of good corporate governance (GCG).

Kondisi Makroekonomi 2023

Macroeconomic Conditions in 2023

Tahun 2023, masih diwarnai ketidakpastian, perlambatan ekonomi global di kisaran 3% (2022: 3,3%), akibat dari peningkatan tensi geopolitik yang mempengaruhi tingkat penawaran dan permintaan dunia, serta dinamika negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Tiongkok yang masih bergulat dengan masalah inflasi dan kenaikan suku bunga. Dampak nyata dari hal tersebut adalah lonjakan harga komoditas, khususnya komoditas energi. Dengan dijatuhkannya sanksi kepada Rusia, maka pasokan energi ke negara-negara Eropa mengalami hambatan. Beberapa negara bahkan telah menyatakan bahwa mereka mengalami krisis energi. Lonjakan harga komoditas energi juga telah membuat tingkat inflasi di banyak negara melambung tinggi.

Uncertainty was still being the characteristic of 2023, with the global economy slowed down at around 3% (2022: 3.3%), as a result of the increased geopolitical tensions affecting the world supply and demand, and the dynamics of the developed countries such as the United States and China still grappling with inflation and the rising interest rates. The then brought obvious impact, namely the surge in commodity prices, particularly energy commodities. With the imposition of sanctions on Russia, the supply of energy to European countries has been hampered. Some countries even declared that they are experiencing an energy crisis. The surge in energy commodity prices also caused inflation rates in many countries to soar.

Meskipun demikian, perekonomian Indonesia tahun 2023 bertumbuh lebih di posisi 5,05%, walau sedikit melambat dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 5,31%. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi didorong oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor. Inflasi tahun 2023 tertambat di angka 2,61%, jauh di bawah inflasi tahun 2022 yang sebesar 5,51%. Kondisi ekonomi domestik yang positif mendorong tingkat mobilitas masyarakat dan industri yang berujung pada peningkatan kebutuhan energi nasional, termasuk Energi Baru Terbarukan (EBT), meski porsinya masih sangat kecil. Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), bauran EBT hingga akhir tahun 2023 adalah 13%, dengan target bauran 17-19% di tahun 2025.

Never-theless, Indonesia's economy in 2023 grew strongly at 5.05%, although slightly slower than in 2022 which amounted to 5.31%. According to the Central Bureau of Statistics (BPS), economic growth was driven by strengthening household consumption, investment, and exports. Inflation in 2023 was controlled at 2.61%, far below the figure of 5.51% in 2022. Positive domestic economic conditions encourage the level of community and industrial mobility which leads to an increase in national energy needs, including the New Renewable Energy (NRE), despite the portion is still very small. According to the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM), the NRE mix by the end of 2023 was 13.1%, with a target mix of 17-19% in 2025.

Bauran EBT yang belum optimal terutama terjadi karena harga yang belum bersaing dengan energi berbasis fosil, mengingat Indonesia belum menerapkan pajak karbon atau pajak yang dikenakan terhadap pembakaran bahan bakar berbasis fosil. Dengan demikian harga EBT masih lebih mahal dibandingkan bahan bakar fosil. Permasalahan lainnya, teknologi dan rantai pasok EBT belum berkembang di Indonesia.

Non-optimal mix of renewable energy mainly occurs due to uncompetitive prices with fossil-based energy, considering that Indonesia has not yet implemented a carbon tax or tax imposed on the burning of fossil-based fuels. Therefore, NRE price is still more expensive than fossil fuels. Another issue is that the technology and supply chain of NRE have not yet developed in Indonesia.

Namun demikian, kami optimis pemerintah akan terus mendorong peningkatan bauran EBT, termasuk energi hijau, untuk mendukung ketahanan energi dalam mencapai target net emisi atau Net Zero Emission (NZE) Indonesia dan dunia di tahun 2060. Energi hijau akan menjadi salah satu andalan energi hijau domestik, mengingat potensi sumber daya yang sangat besar di Indonesia.

However, we are optimistic that the government will continue to encourage an increase in the renewable energy mix, including the green energy, to support energy security in achieving Net Zero Emission (NZE) target by Indonesia and the world by 2060. Green energy will become one of the mainstays of domestic green energy, given the enormous resource potential in Indonesia.

Penilaian Terhadap Kinerja Direksi dan Dasar Penilaiannya

Performance Assessment of the Board of Directors and Basis the Assessment

Dalam memberikan penilaian terhadap kinerja Direksi, Dewan Komisaris mempertimbangkan beberapa aspek dalam menilai kinerja Direksi, seperti pencapaian realisasi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan parameter Kontrak Manajemen atau Key Performance Indicators (KPI). Selain itu, penerapan tata kelola, keberlanjutan, serta kepatuhan terhadap hukum juga menjadi aspek penting yang kami pertimbangkan.

In assessing the Board of Directors performance, the Board of Commissioners considers several aspects, such as the achievement of the realization of the Company's Annual Budget and Operational Plan (ABOP) and the parameters of the Management Contract or Key Performance Indicators (KPI). Also, we consider the implementation of governance, sustainability, and compliance with the law as important aspects.

Dewan Komisaris meniliai, Direksi telah mengelola Perusahaan dengan baik di tahun 2023. Dewan Komisaris mengapresiasi keberhasilan PLN NP menyelesaikan proyek pembangkit listrik, yakni PLTS Terapung Cirata 192 MWp untuk mendukung utilisasi energi baru dan terbarukan serta mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengurangi emisi karbon serta menjadi Pionir dan Trader terbesar di Bursa karbon. Hal ini mengindikasikan keberhasilan Direksi dalam mengelola roda Perusahaan.

The Board of Commissioners assessed that the Board of Directors managed the Company well in 2023. The Board of Commissioners appreciates PLN NP success in completing a power plant project, namely the 192 MWp Cirata Floating Solar Power Plant to support the utilization of new and renewable energy as well as reduce dependence on fossil fuels, reduce carbon emissions as well as becoming the largest Pioneer and Trader in the Carbon Exchange. It signifies the Board of Directors success in running the Company.

Kami menilai Direksi telah melaksanakan pengelolaan kegiatan secara baik sesuai dengan rencana bisnis yang telah ditetapkan. Pengelolaan dilakukan dengan penuh tanggung jawab memenuhi amanah dari pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini merupakan pencapaian yang sangat baik sebagai langkah awal sinergi seluruh fungsi PLN NP. Kami berpendapat bahwa Direksi telah mampu memjembar kegiat pelaksanaan integrasi dalam pembentukan subholding. Ke depan, PLN NP diharapkan terus mampu menghadapi berbagai tantangan dan dapat melakukan transformasi korporasi dengan pasar baru. Kami berharap kinerja PLN NP dapat terus meningkat dan bersinergi agar seluruh fungsi mampu berkembang bersama secara berkelanjutan.

We assess that the Board of Directors managed the activities well following the established business plan. PLN NP carries out the management with full responsibility to fulfill the mandate by the shareholders and other stakeholders. This is an excellent achievement as the first step in synergizing all functions of PLN NP. We believe that the Board of Directors has been able to carry out the task of implementing integration in the formation of the Sub-Holding. Going forward, PLN NP is expected to continue to be able to face various challenges and transform the corporate with the new roles. We hope that PLN NP performance can continue to improve and synergize so that all functions are able to develop together in a sustainable manner.

Dewan Komisaris menilai kinerja Direksi dalam mengelola PLN NP selama tahun 2022 tercermin dari capaian tingkat capaian kinerja Perusahaan dengan skor 103,51. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris dilakukan melalui reviu kinerja keuangan maupun operasional secara berkala sesuai dengan RKAP 2022, KPI Perusahaan 2022, serta selaras dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) termasuk isu penting terkait di bidang ekonomi, lingkungan, sosial maupun perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui rapat maupun penyampaian laporan kinerja Perusahaan oleh Direksi. Berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja operasional PLN NP, Dewan Komisaris menyampaikan agar Direksi dapat terus memperkuat landasan kinerja secara bottom line dengan optimalisasi potensi yang mendorong meningkatnya sinergi usaha di lingkungan PLN NP grup sehingga mencetakan pertumbuhan kinerja berkelanjutan. Direksi juga telah melakukan langkah yang diperlukan dalam menjalankan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2020-2024.

The Board of Commissioners assessed the performance of the Board of Directors in managing PLN NP during 2022 as reflected in the achievement of the Company performance level with a score of 103.51. Supervisory function by the Board of Commissioners is implemented through periodic reviews of financial and operational performance based on the 2022 RKAP, 2022 Company KPIs, and in line with the Company's Long Term Plan (LTP) including important issues related to economic, environmental, social as well as changes in applicable laws and regulations through meetings and submission of Company performance reports by the Board of Directors. Based on the evaluation results of PLN NP's operational performance, the Board of Commissioners conveyed that the Board of Directors can continue to strengthen the bottom line performance foundation by optimizing the potential that encourages increased business synergy within the PLN NP group so as to create sustainable performance growth. The Board of Directors also undertakes the necessary steps in implementing the Company's Long Term Plan (LTP) 2020-2024.

Produksi tenaga listrik di tahun 2022 jauh lebih tinggi dari tahun 2022, hal ini dipengaruhi oleh adanya penambahan unit pembangkit dan peningkatan kapasitas pembangkit yang dikelola oleh PLN NP peningkatan produksi listrik sebesar 46,846.00 GWh, meningkat 29,17% dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar 170643,31 GWh. Dari jumlah produksi tersebut, terdapat tenaga listrik yang digunakan untuk aktivitas operasional unit pembangkit. Dimana jumlah pemakaian sendiri pada tahun 2023 untuk Unit Pembangkitan Batubara adalah sebesar 2,912,59 GWh atau 39,9%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 sebesar 144,79 GWh atau 7,88%. Peningkatan ini dipengaruhi oleh adanya penambahan unit pembangkit dengan kapasitas dibawah 100 MW yang menyumbang rasio Pemakaian Sendiri (PS) lebih tinggi. Adapun jumlah pemakaian sendiri untuk Unit Pembangkitan Non Batubara dan Gas adalah sebesar 74,59 GWh atau 2,48%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 sebesar 104,55 GWh atau 1,65%. Hal ini dipengaruhi oleh adanya penambahan unit pembangkit berbahan PLTD yang menyumbang rasio Pemakaian Sendiri (PS) lebih tinggi.

Electricity production in 2022 is much higher than in 2021, influenced by the addition of generating units and increase in generating capacity managed by PLN NP increasing electricity production by 46,846.00 GWh, an increase of 29.17% compared to 2021 which amounted to 170643.31 GWh. From the amount of production, there was electricity used for operational activities of the generating unit. Where the amount of self-use in 2023 for the Coal Generating Unit was 2,912.59 GWh or 39%, higher than in 2022 by 144.79 GWh or 7.88%. The increase was influenced by the addition of generating units with a capacity below 100 MW which had a higher Self-Use (PS) ratio. The amount of self-use for Non-Coal and Gas Generating Units was 74.59 GWh or 2.48%, higher than in 2022 by 104.55 GWh or 1.65%. It was influenced by the addition of generating units, especially DEPP, which has a higher Self-Use (PS) ratio.

Sejalan dengan hal tersebut, Penjualan Tenaga Listrik juga mengalami peningkatan sebesar 63.078,60 GWh, meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 16.379,48 GWh. Peningkatan tersebut tersebut dipengaruhi oleh adanya penambahan unit pembangkit dan peningkatan kapasitas pembangkit yang dikelola oleh PLN NP. Adapun rincian penjualan tersebut terdiri dari penjualan tenaga listrik unit pembangkitan batubara (PLTU) sebesar 33.615,22 GWh dan penjualan tenaga listrik unit pembangkitan gas dan non batubara (non PLTU) sebesar 29.543,37 GWh. Dewan Komisaris senantiasa memberi nasihat dan arahan kepada Direksi untuk terus memaksimalkan produksi dan penjualan listrik untuk mempercepat target *Net Zero Emission*. Selain itu, agar kinerja keuangan Perusahaan juga dapat terus meningkat.

In line with this, Electricity Sales also increased by 63.078,60 GWh, an increase compared to 2021 of 16.379,48 GWh. The increase was mainly influenced by the addition of generating units and the increase in power plant capacity managed by PLN NP. Sales details consist of electricity sales from coal power plants (CFPP) amounting to 33.615,22 GWh and electricity sales from gas and non-coal power plants (non-CFPP) amounting to 29.543,37 GWh. The Board of Commissioners keeps providing advice and direction to the Board of Directors to continue maximizing electricity production and sales to accelerate the Net Zero Emission target. Moreover, to encourage the Company's financial performance to be also able to continue to improve.

Dari segi keuangan, Pendapatan Usaha PLN NP tahun 2023 adalah sebesar Rp90,37 triliun meningkat 18,9% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp76 triliun. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh kenaikan jumlah KWh jual yang melebihi target pada tahun 2023 untuk memenuhi kebutuhan sistem.

From a financial perspective, PLN NP's operating revenue in 2023 amounted to Rp90,37 trillion, an increase of 18,9% compared to Rp76 trillion in 2022. The increase was influenced by an increase in the number of KWh sold that exceeded the target in 2023 to meet system needs.

Adapun Beban Usaha PLN NP tahun 2023 adalah sebesar Rp76 triliun meningkat 9,64% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp69,37 triliun. Peningkatan tersebut tersebut dipengaruhi oleh kenaikan penggunaan bahan bakar seiring dengan adanya peningkatan produksi KWh. Dengan capaian tersebut, PLN NP mampu membukukan Laba Usaha sebesar Rp14,37 triliun meningkat 116,61% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp6,63 triliun. Hal ini dipengaruhi oleh kenaikan jumlah KWh jual yang melebihi target pada tahun 2023 untuk memenuhi kebutuhan sistem serta efisiensi penggunaan bahan bakar.

PLN NP's operating expenses in 2023 amounted to Rp76 trillion, an increase of 9,64% compared to Rp69,37 trillion in 2022. The increase was mainly influenced by an increase in fuel usage along with an increase in KWh production. With these achievements, PLN NP was able to record an operating profit of Rp14,37 trillion, an increase of 116,61% compared to 2022 of Rp6,63 trillion. This was influenced by an increase in the number of KWh sold that exceeded the target in 2023 to meet system needs and efficient use of fuel.

Transformasi yang dijalankan PLN Holding juga berperan besar dalam mendorong kinerja NP menjadi semakin agile dan efisien. Pertumbuhan kinerja keuangan PLN NP sejalan dengan pertumbuhan aset perusahaan. Tercatat, Aset PLN NP tahun 2023 sebesar Rp343,46 triliun meningkat sebesar 3,27% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp332,60 triliun. Peningkatan tersebut tersebut dipengaruhi oleh peningkatan jumlah piutang usaha. Peningkatan piutang usaha terjadi karena jumlah pencairan piutang melalui penerimaan kas dari tagihan Penjualan Tenaga Listrik yang lebih rendah di tahun 2023. Saldo kas PNP masih dianggap mencukupi untuk kebutuhan operasional sejalan dengan kebijakan manajemen kas terpusat PLN (Optimasi *Cash Management* PLN Holding).

Transformation by PLN holding Company has also played a major role in driving PLN NP performance to become more agile and efficient. PLN NP financial performance growth is in line with asset growth of the Company. It was recorded that PLN NP's assets in 2023 amounted to Rp343,46 trillion, an increase of 3,27% compared to 2022 of Rp332,60 trillion. The increase was mainly influenced by an increase in the amount of trade receivables. The increase in trade receivables occurred due to the lower amount of receivables disbursement through cash receipts from Electricity Sales bills in 2023. PLN NP cash balance is still considered sufficient for operational needs in line with the centralized cash management policy by PLN (PLN Holding Cash Management Optimization).

Tersebut jumlah Liabilitas PLN NP tahun 2022 adalah sebesar Rp34,40 triliun meningkat 12,47% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp30,76 triliun. Peningkatan tersebut tersebut dipengaruhi oleh penambahan Liabilitas Imbalan Kerja karena penyesuaian imbalan kerja jatuh tempo oleh aktuaris dan penambahan Liabilitas Pajak Tangguhan yang menyesuaikan perbedaan temporer. Sementara itu, jumlah Ekuitas PLN NP tahun 2022 adalah sebesar sebesar Rp308,86 triliun meningkat 3,33% dibandingkan 2021 adalah sebesar Rp301,83 triliun. Peningkatan ekuitas sebagian besar disebabkan oleh peningkatan laba di tahun 2022 dan selisih kurs karena penjabaran Laporan Keuangan. Dewan Komisaris menyampaikan arahan kepada Direksi untuk fokus menerapkan strategi dan kebijakan cost leadership program dengan menjaga struktur beban usaha Perusahaan.

Dewan Komisaris meminta agar Direksi senantiasa melakukan pengembangan usaha dengan tetap mengedepankan aspek pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku maupun prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Strategi peningkatan efisiensi operasional dengan menjaga tingkat biaya bahan bakar, menjaga security dan keandalan pembangkit, optimasi utilisasi pembangkit dan menjaga level BPP yang ditetapkan oleh Pemegang Saham. Selain itu, Direksi perlu terus meningkatkan pertumbuhan revenue non untuk mengoptimalkan pendanaan pengembangan usaha, meningkatkan strategi partnership dan pemasaran produk serta kesiapan dukungan sumber daya manusia sejalan dengan peningkatan utilisasi pembangkit dan resources PLN NP dalam meraih pendapatan pada segmen usaha beyond kWh.

Tidak lupa Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada Direksi beserta jajaran manajemen di bawahnya atas berbagai prestasi yang diperoleh PLN NP sepanjang tahun 2023. Sejumlah penghargaan dan prestasi baik internasional maupun nasional yang diperoleh diantaranya adalah Asia Responsible Enterprise Awards (AREA), meraih predikat Platinum di ajang Asia Sustainability Reporting Rating (ASRAT), 10 penghargaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Zero Accident, penghargaan Subroto Award 2023, 13 penghargaan dalam ajang Indonesian Sustainable Development Award (ISDA), 7 penghargaan dalam ajang Indonesia Safety Excellence Awards (ISEA) dan penghargaan 6 (tiga) PROPER Emas, 7 PROPER Hijau serta 49 PROPER Biru dan 2 Video PROPER Emas, serta penghargaan dalam bidang tata kelola dan transparansi Perusahaan dalam ajang Governance, Risk, & Compliance (GRC) & Performance Excellence Award 2023 dan Annual Report Award dll.

PLN NP's total liabilities in 2022 amounted to Rp34.40 trillion, an increase of 12.47% compared to Rp30.76 trillion in 2021. The increase was mainly influenced by the addition of Employee Benefits Liabilities due to the adjustment of employee benefits due by actuaries and the addition of Deferred Tax Liabilities that adjust temporary differences. Meanwhile, the total Equity of PLN NP in 2022 amounted to Rp308.86 trillion, an increase of 3.33% compared to 2021 which amounted to Rp301.83 trillion. The increase in equity was largely due to profit increase in 2022 and foreign exchange differences due to the translation of Financial Statements. The Board of Commissioners directed the Board of Directors to focus on implementing cost leadership program strategies and policies by maintaining the Company's operating expenses structure.

The Board of Commissioners requests the Board of Directors to keep performing business development while prioritizing aspects of risk management, compliance with applicable regulations and principles of good corporate governance. Strategies to improve operational efficiency by maintaining fuel cost levels, maintaining power plant security and reliability, optimizing power plant utilization and maintaining BPP levels set by the Shareholders. Furthermore, the Board of Directors needs to continue to increase revenue non growth to optimize business development funding, improve strategic partnerships and product marketing as well as readiness of human resources support in line with the increase in plant utilization and PLN NP resources in achieving revenue in the beyond kWh business segment.

The Board of Commissioners expresses appreciation to the Board of Directors and the management under it for various achievements obtained by PLN NP throughout 2023. Several international and national awards and achievements obtained include the Asia Responsible Enterprise Awards (AREA), winning the Platinum title at the Asia Sustainability Reporting Rating (ASRAT) event, 10 Occupational Health and Safety (OHS) Zero Accident awards, the Subroto Award 2023, 13 awards in the Indonesian Sustainable Development Award (ISDA), 7 awards in the Indonesia Safety Excellence Awards (ISEA) and 6 (three) Gold PROPER awards, 7 Green PROPERs and 49 Blue PROPERs and 2 Gold PROPER Videos, as well as awards in the field of corporate governance and transparency in the Governance, Risk, & Performance Compliance (GRC), Performance Excellence Award 2023, Annual Report Award etc.

Tata Cara dan Frekuensi Pemberian Nasihat Kepada Direksi

Procedures and Frequency of Providing Advice to the Board of Directors

Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan fungsinya dalam hal pengawasan atas pengelolaan operasional dan usaha yang dilakukan Direksi, Konsep hubungan antara Dewan Komisaris dan Direksi dilaksakan dalam perspektif sinergi dan kemitraan yang strategis.

Dewan Komisaris senantiasa memberikan bimbingan, nasihat, arahan dan pandangan strategis kepada Direksi berdasarkan pengalaman, pengetahuan industri, dan keahlian Dewan Komisaris dalam berbagai aspek operasional maupun keuangan serta pengembangan usaha Perusahaan, termasuk pengembangan Anak Perusahaan maupun Perusahaan Afiliasi, realisasi energi rinis dan security of supply energi primer, realisasi pemeliharaan unit pembangkit serta aspek K3L di seluruh unit pembangkit untuk menjaga zero accident dan tingkat PROPER, hal ini membantu Direksi dalam menghadapi tantangan bisnis yang kompleks dan memanfaatkan peluang yang ada. Selain itu juga memastikan bahwa keputusan-keputusan strategis dan operasional yang diambil oleh Direksi sesuai dengan tujuan dan kebijakan perusahaan, serta berpotensi untuk menghasilkan nilai jangka panjang bagi perusahaan dan Pemegang Saham.

Dewan Komisaris telah memberikan arahan kepada Direksi baik secara formal dalam rapat, maupun secara informal serta melalui kunjungan kerja ke unit bisnis PLN NP bersama dengan Komite Dewan Komisaris. Dewan Komisaris secara rutin melakukan kunjungan ke Unit Pembangkit maupun Anak Perusahaan guna mendapat informasi secara langsung mengenai operasional Unit/Anak Perusahaan tersebut. Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris telah melakukan kunjungan sebanyak 20 (dua puluh) kali. Selain itu, Dewan Komisaris telah mengadakan rapat internal sebanyak 12 (dua belas) kali dan Rapat Pengawasan bersama dengan Direksi sebanyak 12 (dua belas)kali. Agenda rapat internal Dewan Komisaris meliputi tindak lanjut tugas Dewan Komisaris, Laporan Manajemen dan Kinerja, progress proyek maupun penugasan. Adapun agenda rapat pengawasan meliputi Laporan Manajemen dan Kinerja, maupun tindak lanjut rapat sebelumnya. Materi yang akan dibahas dalam rapat pengawasan/konsultasi terlebih dahulu dikaji dalam Rapat Internal Dewan Komisaris maupun Rapat Komite berdasarkan laporan-laporan yang disusun oleh Manajemen.

Disamping itu, Dewan Komisaris juga memberikan saran, rekomendasi dan masukan yang disampaikan dalam Rapat Dewan Komisaris yang dihadiri oleh Direksi maupun dalam Rapat Pengawasan. Secara berkala, Dewan Komisaris melakukan evaluasi atas pencapaian RKAP 2023 melalui telaah terhadap Laporan Kinerja bulanan dan Laporan Manajemen Triwulanan maupun pembahasan kinerja dalam Rapat Pengawasan bersama Direksi dan jajaran manajemen di bawahnya setiap 1 bulan sekali.

The Board of Commissioners carries out its duties and functions in terms of supervising the operational and business management carried out by the Board of Directors. The concept of the relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors is carried out in the perspective of synergy and strategic partnership.

The Board of Commissioners continuously provide guidance, advice, direction and strategic views to the Board of Directors based on the Board of Commissioners experience, industry knowledge and expertise in various operational and financial aspects and business development of the Company, including the development of Subsidiaries and Affiliated Companies, realization of energy rins and security of supply of primary energy, realization of maintenance of generating units and HSE aspects in all generating units to maintain zero accident and PROPER levels. These assist the Board of Directors in facing complex business challenges and capitalizing on opportunities. It also ensures that strategic and operational decisions taken by the Board of Directors are in line with the Company's objectives and policies, and have the potential to generate long-term value for the Company and Shareholders.

The Board of Commissioners provides direction to the Board of Directors both formally in meetings, informally and through working visits to PLN NP business units together with the Board of Commissioners Committee. The Board of Commissioners routinely conducts visits to the Generating Units and Subsidiaries to obtain firsthand information regarding operations by the Units/Subsidiaries. In 2023, the Board of Commissioners held 20 (twenty) visits. The Board of Commissioners also held 12 (twelve) internal meetings and 12 (twelve) joint Supervisory Meetings with the Board of Directors. The Board of Commissioners internal meeting agenda included follow-up on the duties of the Board of Commissioners, Management and Performance Reports, project progress and assignments. The supervisory meeting agenda includes Management and Performance Reports, as well as follow-up to the previous meeting. The materials to be discussed in the supervisory/consultation meetings are first reviewed in the Internal Meetings of the Board of Commissioners and Committee Meetings based on reports drafted by the Management.

Furthermore, the Board of Commissioners also provides advice, recommendations and input delivered in the Board of Commissioners Meeting attended by the Board of Directors as well as in the Supervisory Meeting. The Board of Commissioners periodically evaluates the achievement of the 2023 RKAP through a review of the Monthly Performance Report and Quarterly Management Report as well as performance discussions in the Supervisory Meeting with the Board of Directors and lower management once every 1 month.

Pandangan atas Prospek Usaha yang Disusun Oleh Direksi

Outlook on Business Prospects Prepared by the Board of Directors

Dengan pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan sebesar 3,1% pada tahun 2024, akan berdampak positif terhadap permintaan tenaga listrik. Dengan pertumbuhan ekonomi global maka permintaan energi dari sektor industri untuk menjalankan mesin-mesin produksi dan proses manufaktur juga akan meningkat. Kebijakan energi dan regulasi pemerintah juga mempengaruhi cara produksi dan konsumsi energi. Perubahan dalam kebijakan energi yang mendorong penggunaan energi terbarukan atau efisiensi energi juga dapat mempengaruhi permintaan tenaga listrik.

With global economic growth estimated at 3.1% in 2024, it will bring positive impact on electricity demand. With global economic growth, energy demand from the industrial sector to run production machinery and manufacturing processes will also increase. Energy policies and government regulations also affect the way energy is produced and consumed. Changes in energy policies that encourage the use of renewable energy or energy efficiency can also affect electricity demand.

Berdasarkan RUPTL 2021-2030, rencana penambahan kapasitas pembangkit untuk seluruh Indonesia adalah sebanyak 40,6 GW atau rata-rata mencapai 4 GW per tahun. Penambahan kapasitas tersebut didominasi oleh EBT (31,6%) dengan porsi hidro (15,8%) sebagai teknologi yang paling tepat untuk memenuhi target 23% EBT pada tahun 2025 sebagaimana yang tercantum dalam RUPTL. Porsi batubara sebesar 34% dalam kapasitas tambahan hanya berasal dari *on-going* project. Guna memperoleh peluang tersebut, Dewan Komisaris berpendapat bahwa PLN NP perlu terus meningkatkan peran dan kontribusi dalam mencapai bauran energi nasional di tahun 2025.

Based on the 2021-2030 RUPTL, the planned addition of power plant capacity for all of Indonesia is 40.6 GW or an average of 4 GW per year. The new capacity addition will be dominated by renewable energy (31.6%) with hydro (15.8%) as the most appropriate technology to meet the 23% renewable energy target by 2025 as stated in the RUPTL. Coal portion of 34% in additional capacity only consists of ongoing projects. In order to optimize these opportunities, the Board of Commissioners is of the opinion that PLN NP needs to continue to increase its role and contribution in achieving national energy mix in 2025.

Dewan Komisaris, mendukung prospek usaha yang telah disusun oleh Direksi berdasarkan asumsi yang realistis. Tanggapan ini kami sampaikan setelah mempertimbangkan beberapa hal atas peluang usaha di masa depan. Pengembangan usaha di bidang pembangkitan akan menjadi hal mendasar bagi keberlanjutan yang mendorong percepatan transisi energi di dalam negeri guna mencapai target Net Zero Emission pada 2060. Kami berharap Sebisa strategi yang telah ditetapkan Direksi perlu dievaluasi secara berkala dan selalu mengelola risiko yang muncul timbul dengan efektif, mengevaluasi proses bisnis dengan memperhatikan kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan demi tercapainya pertumbuhan yang berkelanjutan.

The Board of Commissioners supports the business outlook prepared by the Board of Directors based on realistic assumptions. We make this comment after considering the opportunities for future business opportunities. Business development in the generation sector will be fundamental to sustainability that drives the acceleration of energy transition in the country to achieve the Net Zero Emission target by 2060. We expect that the strategy set by the Board of Directors needs to be evaluated regularly and always manage risks that may arise effectively, evaluate business processes with attention to health, safety, and the environment in order to achieve sustainable growth.

Pandangan Atas Implementasi Tata Kelola Perusahaan

A View on the Implementation of Corporate Governance

Penerapan GCG di PLN NP tidak hanya untuk memenuhi peraturan dan Perundang-undangan berlaku saja, namun harus mampu menyusunkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan berkelanjutan yang dilandasi etika bisnis. Dewan Komisaris memastikan kelengkapan organ utama tata kelola perusahaan telah didukung perangkat sistem dan kebijakan yang memadai agar dapat berjalan dengan baik, yang mencakup organ RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi.

GCG implementation in PLNNP is not only to comply with applicable laws and regulations, but also to be able to realize GCG principles consistently and sustainably based on business ethics. The Board of Commissioners ensures that the main organs of corporate governance are supported by adequate systems and policies to run well, which include the GMS, Board of Commissioners and Board of Directors.

Dewan Komisaris terus berupaya memantau penerapan GCG yang menjadi komitmen bersama dengan Direksi. Pengawasan terhadap implementasi GCG dilakukan untuk memastikan seluruh prinsip-prinsip GCG telah diimplementasikan di setiap tingkatan dan jenjang organisasi Perusahaan. Upaya yang telah dilakukan diantaranya senantiasa melakukan proses perbaikan, penyempurnaan, penghimpun dan kaji ulang secara berkelanjutan sesuai dengan perubahan regulasi, perkembangan kegiatan usaha dan kompleksitas kegiatan operasional Perusahaan, melakukan penandatanganan Pakta Integritas dan Pernyataan Tidak Memiliki Benturan Kepentingan dan Pernyataan Kepemilikan Saham yang dilakukan secara berkala. Selain itu, Dewan Komisaris juga membidang upaya Direksi dalam memantau sejauh mana implementasi GCG dilangsukan di PLN NP dengan melakukan self assessment, mengacu kepada parameter yang dikembangkan oleh Kementerian BUMN sesuai dengan Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance). Self Assessment terhadap penerapan GCG pada PLN NP ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi penerapan GCG dikaitkan dengan ketentuan yang berlaku dan praktik-praktik terbaik (best practices) penerapan GCG, sehingga area-area yang memerlukan perbaikan/penyempurnaan dapat diidentifikasi. Hasil penilaian tersebut menunjukkan pencapaian skor sebesar 94,88% dengan klasifikasi kualitas penerapan GCG "Sangat Baik".

Selain mengawasi pengawasan atas kebijakan pengelolaan PLN NP, Dewan Komisaris juga memberikan nasihat kepada Direksi atas aktivitas operasional yang dijalankan Direksi beserta jajarannya dalam rangka mengelolaan kegiatan pengunaan PLN NP. Pemberian nasihat kepada Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala dilakukan melalui rapat gabungan yang dihadiri oleh Dewan Komisaris, Direksi beserta pejabat-pejabat di bawah Direksi. Dewan Komisaris mengadakan rapat dengan Direksi yang dilaksanakan minimal 1(satu) bulan sekali, untuk membahas kinerja bulanan, perkembangan bisnis dan portofolio, dan isu-isu operasional PLN NP. Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat internal sebanyak 12 kali serta rapat pengawasan sebanyak 12 kali dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris dalam rapat internal sebesar 87,71% dan rapat gabungan sebesar 95,95%.

Terkait pengawasan manajemen risiko, Dewan Komisaris telah memastikan penerapan manajemen risiko sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko PLN NP. Dewan Komisaris secara aktif memantau kualitas penerapan manajemen risiko dari beberapa aspek diantaranya tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko dan kecukupan sistem informasi manajemen serta kecukupan sistem pengendalian internal. Dewan Komisaris memandang bahwa pengelolaan risiko telah dilibatkan untuk mengawal target RKAP 2023, KPI Perusahaan dan IUPP dapat tercapai secara optimal sekaligus meningkatkan shareholders value.

The Board of Commissioners keeps monitoring GCG implementation, which is a joint commitment with the Board of Directors. GCG implementation is supervised to ensure that all GCG principles have been implemented at every level and organization level of the Company. PLN NP strives for efforts, including by always carrying out a process of continuous improvement, refinement, updating and review following changes in regulations, the development of business activities and the complexity of the Company's operational activities, signing the Integrity Pact and Statement of No Conflict of Interest and Statement of Share Ownership which are carried out periodically. Furthermore, the Board of Commissioners also supports the Board of Directors efforts in monitoring the extent to which GCG is implemented in PLN NP by conducting a self-assessment, referring to the parameters developed by the Ministry of SOEs based on the Decree by the Secretary of the Minister of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance. Self Assessment of GCG implementation in PLN NP is conducted to obtain an overview of the condition of GCG implementation in relation to the applicable provisions and best practices of GCG implementation, so that areas that require improvement can be identified. The results of the assessment show the achievement of a score of 94,88% with a classification of the quality of GCG implementation of "Very Good".

Apart from supervising PLN NP management policies, the Board of Commissioners also provides advice to the Board of Directors on operational activities carried out by the Board of Directors and their staff in the context of carrying out PLN NP management activities. Providing advice to the Board of Directors is carried out by the Board of Commissioners periodically through joint meetings attended by the Board of Commissioners, the Board of Directors and officials under the Board of Directors. The Board of Commissioners holds meetings with the Board of Directors at least once a month, to discuss monthly performance, business and portfolio developments, and operational issues of PLN NP. Throughout 2023, the Board of Commissioners held 12 internal meetings and 12 supervisory meetings with the attendance rate of each member of the Board of Commissioners in internal meetings amounting to 87,71% and joint meetings amounting to 95,95%.

Regarding risk management supervision, the Board of Commissioners ensures the implementation of risk management according to the characteristics, complexity and risk profile of PLN NP. The Board of Commissioners actively monitor the quality of risk management implementation from several aspects including risk governance, risk management framework, risk management processes and the adequacy of management information systems and the adequacy of internal control systems. The Board of Commissioners views that risk management has been focused on overseeing the 2023 RKAP target, Company KPIs and IUPP can be achieved optimally while increasing the shareholders value.

Dewan Komisaris secara berkala melakukan monitoring terhadap 15 (lima belas) risiko utama Perusahaan dibantu oleh Komite Investasi dan Manajemen Risiko, termasuk monitoring terhadap rencana mitigasi risiko tersebut guna menghindari kerugian dan mengoptimalkan hasil yang diharapkan. Adapun sistem pengendalian internal dan audit internal, telah dijalankan dengan tujuan menciptakan proses bisnis yang bertanggung jawab. Perusahaan juga telah menerapkan proses audit independen oleh akuntan publik atas laporan keuangan agar independensi akuntan publik terjaga dan terhindar dari benturan kepentingan. Mekanisme penunjukan akuntan publik dilakukan hingga mendapatkan persetujuan pemegang saham dalam RUPS, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas. Laporan keuangan yang telah diaudit dan mendapatkan opini dari akuntan publik akan menjadi laporan dasar yang dapat menggambarkan kinerja PLN NP telah sesuai dengan standar pelaporan keuangan yang berlaku di Indonesia.

The Board of Commissioners regularly monitors the Company's 15 (fifteen) main risks with the assistance of the Investment and Risk Management Committee, including monitoring of the risk mitigation plan to avoid losses and optimize the targeted results. The Company also implements the internal control system and internal audit with the purpose of creating responsible business processes. The Company has also implemented an independent audit process by a public accountant on the financial statements in order to maintain the independence of the public accountant and avoid conflicts of interest. The mechanism for appointing a public accountant is carried out until obtaining shareholder approval in the GMS, as stipulated in Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. Financial statements audited and obtained an opinion from a public accountant will be a basis report that can reflect PLN NP performance according to applicable financial reporting standards in Indonesia.

Penguatan integritas bisnis juga terus dilakukan, terutama terkait pencegahan korupsi, gratifikasi dan benturan kepentingan melalui berbagai pelatihan maupun kampanye. Pedoman dalam mencegah dan mendeteksi berbagai potensi tindakan penyuapan yaitu Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) mengacu standar internasional ISO 37001:2016. Dewan Komisaris senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pengawasan terhadap jalannya Perusahaan, serta bekerja sama secara harmonis dengan jajaran Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris memandang bahwa berbagai upaya penguatan implementasi GCG perlu terus dilakukan, termasuk bekerjasama dan melakukan sinergi dengan berbagai instansi guna mendapatkan masukan tata kelola perusahaan di PLN NP maupun di lingkungan PLN NP secara group.

The Company also continuously strengthens its business integrity, especially related to the prevention of corruption, gratification and conflict of interest through various trainings and campaigns. Guidelines in preventing and detecting various potential acts of bribery, namely the Anti-Bribery Management System (SMAP) referring to the international standard ISO 37001 :2016. The Board of Commissioners always strives to improve the quality of its supervisory duties over the running of the Company, and works harmoniously with the Board of Directors as stipulated in the Company's Articles of Association as well as the prevailing laws and regulations. The Board of Commissioners considers that various efforts to strengthen GCG implementation need to be carried out continuously, including cooperating and synergizing with various agencies to obtain input on corporate governance in PLN NP and within PLN NP as a group.

Pandangan Atas Penerapan Kebijakan *Whistleblowing System* (WBS)

View on the Implementation of Whistleblowing System (WBS) Policy

Dewan Komisaris menilai bahwa penerapan WBS adalah bagian dari sistem pengendalian internal PLN NP dalam mencegah praktik penyimpangan dan kecurangan seperti korupsi, suap, gratifikasi, pencurian serta praktik kecurangan dan pelanggaran hukum lainnya. Dewan Komisaris memahami bahwa penyelesaian pelaporan pelanggaran yang dilakukan oleh stakeholder adalah merupakan salah satu bentuk peningkatan perlindungan stakeholder dalam rangka menjamin hak-haknya dalam berhubungan dengan PLN NP. Oleh karenanya Dewan Komisaris sangat mendukung diimplementasikannya mekanisme WBS. Pelaporan yang dipantau dari mekanisme ini wajib mendapatkan perhatian dan tindak lanjut, termasuk pengenaan hukuman yang tepat agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran dan juga bagi mereka yang berniat melakukan hal tersebut.

The Board of Commissioners considers that WBS implementation is part of PLN NP's internal control system in preventing irregularities and fraud practices such as corruption, bribery, gratuities, theft and other fraudulent practices and violations of the law. The Board of Commissioners understands that the settlement of reporting violations committed by stakeholders is actualization of increasing the stakeholders protection in order to guarantee their rights in dealing with PLN NP. Therefore, the Board of Commissioners strongly supports the implementation of WBS mechanism. Reports obtained from this mechanism are required to receive attention and follow-up, including the imposition of appropriate penalties in order to provide a deterrent effect for violators and also for those who intend to do so.

Menurut pandangan kami, pengelola WBS di lingkungan PLN NP telah dilaksanakan dengan tepat dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Disamping itu, kami juga menilai Tim Penanganan Pengaduan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam mengelola dan menindaklanjuti setiap adanya laporan pelanggaran yang masuk hingga tuntas. Dewan Komisaris bertanggung jawab jika pengaduan yang masuk melibatkan Direksi sebagai pihak terlapor. Langkah-langkah khusus akan diterapkan jika terdapat pengaduan tersebut. Dewan Komisaris memiliki peran besar untuk dapat menelaah, memantau serta melaporkan hasil pemeriksaan untuk dilaporkan kepada pemegang saham. Sepanjang tahun 2023, pengaduan yang masuk melalui berjumlah: 4 (empat) pengaduan. Pengaduan yang masuk ke tahap tindak lanjut berdasarkan hasil verifikasi sebanyak 2 (dua) laporan pelanggaran.

In our view, WBS management within PLN NP has been carried out appropriately and in line with the applicable regulations. In addition, we also assess that the Complaint Handling Team has carried out its duties well in managing and following up any incoming violation reports to completion. The Board of Commissioners is responsible in case the incoming complaint involves the Board of Directors as the reported party. Special measures will be implemented in the event of such complaints. The Board of Commissioners has a major role to be able to review, map and report the results of the investigation to be reported to the shareholders. Throughout 2023, there were 4 (four) incoming complaints. Incoming complaints that entered the follow-up stage based on the verification results were 2 (two) violation reports.

Penilaian Kinerja Komite Dewan Komisaris

Performance Assessment for the Board of Commissioners Committee

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam energi, Dewan Komisaris senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential) melalui pengawasan dan pemberian arahan untuk meningkatkan aspek tata kelola perusahaan. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Dewan Komisaris dibantu oleh Organ Dewan Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit, Komite Investasi & Manajemen Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Sekretaris Dewan Komisaris. Pelaksanaan tugas komite-komite di bawah Dewan Komisaris berpedoman pada Piagam Komite dan Program Kerja masing-masing komite yang telah disusun. Komite di bawah Dewan Komisaris juga secara berkala melakukan telaah Piagam Komite disesuaikan dengan ketentuan terbaru.

As a company engaged in energy, the Board of Commissioners always prioritizes prudential principles through supervision and direction to improve aspects of corporate governance. In carrying out its functions and duties, the Board of Commissioners is assisted by the Board of Commissioners Committee, namely the Audit Committee, Investment & Risk Management Committee, Nomination and Remuneration Committee and Secretary to the Board of Commissioners. Duties implementation of the committees under the Board of Commissioners is guided by the prepared Committee Charter and Work Program of each committee. The Committees under the Board of Commissioners also periodically review the Committee Charter based on the latest provisions.

Komite Audit

Audit Committee

Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas pengendalian internal yang dijalankan oleh audit internal maupun auditor eksternal serta memastikan kebenaran dan kewajaran laporan keuangan serta informasi keuangan lainnya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Selama tahun 2023 Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali, diantaranya membahas (1) telaah laporan keuangan Perusahaan, (2) telaah program kerja audit tahunan, (3) evaluasi kinerja operasi dan investasi, (4) pembahasan Internal Control Over Financial Report (ICoFR), (5) kecukupan pemeriksaan oleh auditor internal maupun eksternal serta (6) tindak lanjut arahan RUPS dan Dewan Komisaris.

The Audit Committee is tasked with assisting the Board of Commissioners in ensuring the effectiveness of internal controls carried out by internal audit and external auditors as well as ensuring the accuracy and reliability of financial statements and other financial information based on the applicable accounting standards. During the year, the Audit Committee held 12 (twelve) meetings, including discussing (1) review of the Company's financial statements, (2) review of the annual audit work program, (3) evaluation of operating and investment performance, (4) discussion of the Internal Control Over Financial Report (ICoFR), (5) adequacy of audit by internal and external auditors and (6) follow-up of GMS and Board of Commissioners directives.

Komite Audit melakukan evaluasi atas Laporan Kegiatan Pengawasan Intern (LKPI) dan Laporan Hasil Audit (LHA) dari Satuan Pengawasan Intern (SPI) pada Unit-unit dan Subdit di Kantor Pusat setiap 3 (tiga) bulan sekali atau triwulanan, serta temuan-temuan penting atas temuan berulang beserta monitoring tindak lanjut atas hasil audit tersebut. Selanjut temuan, catatan dan rekomendasi dari hasil pelaksanaan kegiatan, telaahan dan analisa Komite Audit selama tahun 2023 telah dikomunikasikan dan didiskusikan dengan Manajemen, Satuan Pengawasan Internal (SPI) dan auditor eksternal, serta telah dilaporkan kepada Dewan Komisaris untuk perbaikan dan tindak lanjut oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

The Audit Committee evaluates the Internal Audit Activity Report (LKPI) and Audit Report (LHA) from the Internal Audit Unit (SKI) in the Units and Sub-Directorates at the Headquarter every 3 (three) months or quarterly, and looks at important findings or recurring findings along with monitoring follow-up on the audit results. All findings, notes and recommendations from the implementation of activities, reviews and analysis of the Audit Committee during 2023 had been communicated and discussed with Management, Internal Audit Unit (SKI) and external auditors, and had been reported to the Board of Commissioners for improvement and follow-up by the interested parties.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi, pemahaman dan keterampilan dalam menjalankan tugas secara efektif, tahun 2023 anggota Komite Audit telah mengikuti sejumlah pengembangan diantaranya Seminar Nusantara Power Connect 2023 "Strengthening The Base, Expanding The Business", CG Methodology and Environmental and Social Management Systems, BLMI GRC Masterclass - Pemeringkatan & Penerbitan Efek Bersifat Utang & Sukuk (EBUS) dan BLMI GRC Masterclass - Pre IPO dan Post IPO.

In order to improve competence, understanding and skills in carrying out their duties effectively, the Audit Committee members participated in several developments in 2023, including Nusantara Power Connect 2023 Seminar "Strengthening The Base, Expanding The Business", CG Methodology and Environmental and Social Management Systems, BLMI GRC Masterclass – Rating & Issuance of Debt Securities (EBUS) and BLMI GRC Masterclass –Pre IPO and Post IPO.

Guna memastikan dan mendorong efektifitas pelaksanaan tugas Komite Audit, Dewan Komisaris melakukan penilaian atas kinerja Komite Audit yang mencakup pelaksanaan tugas, kontribusi dan pelaporan kepada Dewan Komisaris. Skor hasil penilaian kinerja Komite Audit tahun 2023 mencapai 8,98.

To ensure and encourage the effective implementation of the Audit Committee's duties, the Board of Commissioners assesses the Audit Committee performance, which includes the implementation of duties, contributions and reporting to the Board of Commissioners. The score of the Audit Committee performance assessment in 2023 reached 8,98.

Komite Investasi dan Manajemen Risiko
Investment and Risk Management Committee

Dewan Komisaris membentuk Komite Investasi dan Manajemen Risiko untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab fungsi pengawasan. Komite Investasi dan Manajemen Risiko melakukan pengawasan, telaah dan memberikan masukan atas hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan kebijakan dan strategi Perusahaan dan sisi risiko maupun investasi. Komite Investasi dan Manajemen Risiko bertanggungjawab untuk menilai dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas kebijakan dan strategi PLN NP dalam pengelolaan risiko berdasarkan kerangka *Enterprise Risk Management* (ERM) maupun kepatuhan termasuk analisa risiko dan kepatuhan pada kegiatan investasi.

The Board of Commissioners established the Investment and Risk Management Committee to support the implementation of the duties and responsibilities of the supervisory function. The Investment and Risk Management Committee supervises, reviews and provides input on matters related to the supervision of the Company's policies and strategies in terms of risk and investment. The Investment and Risk Management Committee is responsible for assessing and providing input to the Board of Commissioners on PLN NP policies and strategies in risk management based on the Enterprise Risk Management (ERM) framework and compliance, including risk analysis and compliance in investment activities.

Selama tahun 2023, Komite Investasi dan Manajemen Risiko dan Kepatuhan telah melaksanakan rapat sebanyak 10 (dua belas) kali diantaranya membahas bahasa (1) review implementasi ERM dalam *Risk Profile* 2023 dan *Maturity Level* ERM, (2) evaluasi manajemen portofolio dan investasi meliputi evaluasi RJPP/RKAP Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi, (3) evaluasi pengembangan usaha, (4) IT Master Plan, (5) pembahasan kebijakan, strategi dan implementasi Penugasan PT PLN serta (6) Monitoring dan Review Pengendalian Intern, dll.

During 2023, the Investment and Risk Management and Compliance Committee held 10 (twelve) meetings, including discussing (1) review of ERM implementation in Risk Profile 2023 and ERM Maturity Level, (2) evaluation of portfolio management and investment including evaluation of RJPP/RKAP of Subsidiaries and Affiliated Companies, (3) evaluation of business development, (4) IT Master Plan, (5) discussion of policies, strategies and implementation of PT PLN Assignment and (6) Monitoring and Review of Internal Control, etc.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi, pemahaman dan keterampilan dalam menjalankan tugas secara efektif, tahun 2022 anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko telah mengikuti sejumlah pengembangan diantaranya: Seminar Nusantara Power Connect 2022 *"Strengthening The Base, Expanding The Business"*, CG Methodology and Environmental and Social Management Systems, dan Leadership Development Program.

Guna memastikan dan memfasilitasi efektifitas pelaksanaan tugas Komite Audit, Dewan Komisaris melakukan penilaian atas kinerja Komite Audit yang mencakup pelaksanaan tugas, kontribusi dan pelaporan kepada Dewan Komisaris. Skor hasil penilaian kinerja Komite Audit tahun 2022 mencapai 8,98.

In order to improve competence, understanding and skills in performing duties effectively, the Investment and Risk Management Committee members participated in a number of developments in 2022, including: Nusantara Power Connect 2022 Seminar "Strengthening The Base, Expanding The Business", CG Methodology and Environmental and Social Management Systems, and Leadership Development Program.

To ensure and encourage effective implementation of the Investment and Risk Management Committee's duties, the Board of Commissioners assesses the Investment and Risk Management Committee performance, which includes the implementation of duties, contributions and reporting to the Board of Commissioners. The score of the Investment and Risk Management Committee performance assessment in 2022 reached 8,98.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Nomination and Remuneration Committee

Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas membantu Dewan Komisaris untuk mengevaluasi, memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas usulan-usulan Direksi dalam hal program pengembangan organisasi, nominasi pejabat satu tingkat di bawah Direksi, remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi termasuk kesesuaiannya dengan kebijakan PT PLN (Persero) jika diperlukan. Selama tahun 2022, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan 24 (dua puluh empat) kali rapat dengan membahas diantaranya (1) usulan wakil PLN NP pada Anak Perusahaan, (2) Integrated Management System (IMS – 2.0) dan Pengembangan Teknologi Informasi, (3) pencapaian target OCB dan HCB, (4) Program Bidang SDM dan Organisasi, (5) Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola IT terkait IT Master Plan, dan (6) pembahasan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris dll.

The Nomination and Remuneration Committee is in charge of assisting the Board of Commissioners to evaluate, provide input and recommendations to the Board of Commissioners on the proposals of the Board of Directors in terms of organizational development programs, nomination of officials one level below the Board of Directors, remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors including its suitability with PT PLN (Persero) policies, if necessary. During the year, the Nomination and Remuneration Committee held 24 (twenty-four) meetings to discuss, among others, (1) proposal of PLN NP representatives in subsidiaries, (2) Integrated Management System (IMS – 2.0) and Information Technology Development, (3) achievement of OCB and HCB targets, (4) HR and Organizational Programs, (5) Monitoring and Evaluation of IT Governance related to IT Master Plan, and (6) discussion of remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners, etc.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi, pemahaman dan keterampilan dalam menjalankan tugas secara efektif, tahun 2022 anggota Komite Nominasi dan Remunerasi telah mengikuti sejumlah pengembangan diantaranya: Seminar Nusantara Power Connect 2022 *"Strengthening The Base, Expanding The Business"*.

Guna memastikan dan memfasilitasi efektifitas pelaksanaan tugas Komite Audit, Dewan Komisaris melakukan penilaian atas kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi yang mencakup pelaksanaan tugas, kontribusi dan pelaporan kepada Dewan Komisaris. Skor hasil penilaian kinerja Komite Audit tahun 2022 mencapai 8,97.

In order to improve competence, understanding and skills in carrying out their duties effectively, in 2022 members of the Nomination and Remuneration Committee have participated in a number of developments including: Nusantara Power Connect 2022 Seminar "Strengthening The Base, Expanding The Business".

To ensure and encourage the effective implementation of the Nomination and Remuneration Committee's duties, the Board of Commissioners assesses the performance of the Nomination and Remuneration Committee which includes the implementation of duties, contributions and reporting to the Board of Commissioners. The score of the Nomination and Remuneration Committee performance assessment in 2022 reached 8,97.

Dewan Komisaris menilai bahwa selama tahun 2022, Komite-komite telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan cukup efektif. Dewan Komisaris mengapresiasi atas kinerja dan pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan oleh seluruh komite. Dukungan dari komite menjadi dasar bagi Dewan Komisaris untuk dapat memberikan masukan secara formal kepada Direksi untuk terus meningkatkan pengelolaan Perusahaan.

The Board of Commissioners considers that during the year, the Committees ran their duties and responsibilities quite effectively. The Board of Commissioners expresses its appreciation for the performance and execution of duties demonstrated by all committees. The support from the committees is the basis for the Board of Commissioners to be able to provide formal input to the Board of Directors to continuously improve the Company management.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Changes in the Composition of the Board of Commissioners

Selama tahun 2023, terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris. Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) tanggal 16 Juni 2023 terjadi pemberhentian dengan hormat Sdr. Juman Pavada Mulajulu dan mengangkat Sdri. Ida Nuryatin Finahari sebagai Komisaris. Dengan demikian komposisi Dewan Komisaris saat ini adalah sebagai berikut:

During 2023, there were changes in the composition of the Board of Commissioners. Based on the Shareholders' Resolution outside the General Meeting of Shareholders (Circular) dated June 16, 2023, Mr. Juman Pavada Mulajulu was honorably dismissed and Ms. Ida Nuryatin Finahari was appointed as Commissioner. Thus, the current composition of the Board of Commissioners is as follows:

Susunan Dewan Komisaris PLN NP Periode 01 Januari 2023 – 16 Juni 2023

Composition of PLN NP's Board of Commissioners for the Period of January 01, 2023 - June 16, 2023

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Bagus Pundhito	Komisaris (Independen) Commissioner (Independent)	Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT PLN Tanggal 30 Desember 2021 Resolution of the Circular GMS on the Appointment of PT PLN's Board of Commissioners Members dated December 30, 2021
Emi Ariesna Wardana	Komisaris (Independen) Commissioner (Independent)	Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT PLN Tanggal 30 Desember 2021 Resolution of the Circular GMS on the Appointment of PT PLN's Board of Commissioners Members dated December 30, 2021
Juman P. Mulajulu[1]	Komisaris Commissioner	Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT PLN Tanggal 11 Maret 2019 jo. Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT PLN Tanggal 12 November 2020. Circular GMS Resolution on the Dismissal and Appointment of PT PLN's Board of Commissioners Members dated March 11, 2019 jo. Resolution of the Circular GMS on the Dismissal and Appointment of PT PLN's Board of Commissioners Members dated November 12, 2020.
Hendra Iwakhyudi	Komisaris Commissioner	Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT PLN Tanggal 19 Desember 2017 jo. Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT PLN Tanggal 12 November 2020. Circular GMS Resolution on the Dismissal and Appointment of PT PLN's Board of Commissioners Members dated December 19, 2017 jo. Circular GMS Resolution on the Dismissal and Appointment of PT PLN's Board of Commissioners Members dated November 12, 2020.
Ramelly	Komisaris Commissioner	Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT PLN tanggal 14 Desember 2022. Resolution of the Circular GMS on the Dismissal and Appointment of PT PLN's Board of Commissioners Members dated December 14, 2022.

[1] RUPS Sirkuler tanggal 16 Juni 2023 memberhentikan dengan hormat Sdr. Juman P. Mulajulu sebagai Komisaris sekaligus mengangkat dan diteskepkan kepada Ida Nuryatin Finahari sebagai Komisaris.

[1] GMS Circular dated June 16, 2023, honorably dismissed Mr. Juman P. Mulajulu as Commissioner and appointed Ms. Ida Nuryatin Finahari as Commissioner.

Susunan Dewan Komisaris PLN NP Periode 16 Juni 2023 – 31 Desember 2023
Composition of PLN NP's Board of Commissioners for the Period of June 16, 2023 - December 31, 2023

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Evy Haryadi	Komisaris (Independen) Commissioner (Independent)	Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT PJB Tanggal 21 September 2022 Resolution of the Circular GMS on the Dismissal and Appointment of PT PJB's Board of Commissioners Members dated September 21, 2022.
Bagus Purdiatno	Komisaris (Independen) Commissioner (Independent)	Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT PJB Tanggal 30 Desember 2021. Resolution of the Circular GMS on the Appointment of PT PJB's Board of Commissioners Members dated December 30, 2021.
Emir Krenna Wardana	Komisaris Commissioner	Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT PJB Tanggal 30 Desember 2021. Resolution of the Circular GMS on the Appointment of PT PJB's Board of Commissioners Members dated December 30, 2021.
Hendra Iswahyudi	Komisaris Commissioner	Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT PJB Tanggal 19 Desember 2017 jo. Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT PJB Tanggal 13 November 2020. Circular GMS Resolution on the Dismissal and Appointment of PT PJB's Board of Commissioners Members dated December 19, 2017 jo. Circular GMS Resolution on the Dismissal and Appointment of PT PJB's Board of Commissioners Members dated November 13, 2020.
Benedy	Komisaris Commissioner	Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT PJB tanggal 14 Desember 2020. Resolution of the Circular GMS on the Dismissal and Appointment of PT PJB's Board of Commissioners Members dated December 14, 2020.
Ida Nuryatin Finahari[1]	Komisaris Commissioner	Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT PLN Nusantara Power tanggal 16 Juni 2023. Resolution of the Circular GMS on the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT PLN Nusantara Power dated June 16, 2023.

[1] RUPS Sirkuler tanggal 16 Juni 2023, memberhentikan dengan hormat Ibu Jumen P. Hutapea sebagai Komisaris serta mengangkat dan memberikan Ibu Ida Nuryatin Finahari sebagai Komisaris.

[1] RUPS Circular dated June 16, 2023, respectfully dismissed Ms. Jumen P. Hutapea as Commissioner and appointed and assigned Ms. Ida Nuryatin Finahari as Commissioner.

Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ibu Jumen P. Hutapea atas kontribusi dan dedikasi yang telah diberikan selama menjabat sebagai Dewan Komisaris PLN NP dan mengucapkan selamat bergabung kepada Ibu Ida Nuryatin Finah sebagai anggota Dewan Komisaris baru. Dengan komposisi ini, Dewan Komisaris berkomitmen akan terus meningkatkan soliditas internal bersama-sama dengan segenap jajaran manajemen PLN NP.

The Board of Commissioners would like to express its gratitude and highest appreciation to Ms. Jumen P. Hutapea for her contribution and dedication during his tenure as a member of the PLN NP Board of Commissioners and congratulate Ms. Ida Nuryatin Finah as a new member of the Board of Commissioners. With this composition, the Board of Commissioners is committed to continuing to improve internal solidity together with all levels of PLN NP management.

Setelah tahun buku 2023, pada saat penyusunan Laporan Tahunan ini dilaksanakan, tidaklah perubahan komposisi Dewan Komisaris.

After the 2023 financial year, at the time of the preparation of this Annual Report, there were no changes in the composition of the Board of Commissioners.

Apresiasi
Letter of Appreciation

Atas nama Dewan Komisaris, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Pemegang Saham, Direksi, Senior Leaders dan semua karyawan PLN NP atas kerja keras dan dedikasi yang telah diberikan dalam mendukung kegiatan usaha Perusahaan. Kami juga ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemegang Saham atas dukungan dan kepercayaan mereka terhadap masa depan PLN NP serta seluruh mitra atas dukungan yang terus diberikan.

On behalf of the Board of Commissioners, we would like to thank the Shareholders, Board of Directors, Senior Leaders and all employees of PLN NP for their hard work and dedication in supporting the Company's business activities. We would also like to express our highest appreciation to the Shareholders for their support and trust in the future of PLN NP as well as all partners for their continuous support.

Dewan Komisaris mengajak seluruh jajaran PLN NP agar tidak berpuas diri dengan capaian yang berhasil diraih di tahun 2023. Dewan Komisaris berharap agar seluruh jajaran terus berbenah, meningkatkan kompetensi dan mengoptimalkan berbagai peluang yang ada serta mengatasi berbagai tantangan dalam meningkatkan nilai Perusahaan untuk mengoptimalkan peluang positif, guna mewujudkan aspirasi menjadi Perusahaan yang terdepan dan terpercaya sebagai Perusahaan Energi yang tumbuh Berkelanjutan.

The Board of Commissioners invites the entire levels of PLN NP not to be complacent with the achievements made in 2023. The Board of Commissioners expects that all levels continue to improve, increase competence and optimize various opportunities that exist and overcome various challenges in increasing the value of the Company to optimize positive opportunities, in order to realize the aspiration to become a leading and trusted Company as an Energy Company that grows Sustainably.

Demikianlah laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris tahun 2023 ini disampaikan.

Thus the report on the supervisory duties of the Board of Commissioners in 2023 is submitted.

Surabaya, 31 Mei 2024
Surabaya, May 31, 2024

Atas Nama Direksi
On Behalf of the Board of Directors

Evy Haryadi

Komisaris Utama
President Commissioner

Laporan Direksi
Report from the Board of Directors

Ruby Firmansyah
Direktur Utama
President Director

PLN NP menutup tahun 2022 dengan catatan kinerja yang memuaskan dengan membukukan Laba Tahun Berjalan PLN NP sebesar Rp13,67 triliun meningkat 149,83% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp5,47 triliun. Capaian laba ini tidak terlepas dari kerja keras dan kerja cerdas dari seluruh insan PLN NP yang berpengaruh terhadap peningkatan kinerja keuangan. Tak hanya itu, PLN NP juga menjelma menjadi salah satu kontributor laba investasi terbesar di seluruh PLN Group.

PLN NP closed 2022 with a satisfactory performance by recording Current Year Profit of Rp13,67 trillion, an increase of 149,83% compared to 2022 of Rp5,47 trillion. This profit achievement is inseparable from the hard work and smart work of all PLN NP personnel which bring effect on improving financial performance. Furthermore, PLN NP has also become one of the largest contributors to investment profits throughout the PLN Group.

Pemegang Saham dan Para Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Dear Shareholders and Stakeholders,

Puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan dapat mendedikasikan tenaga dan pemikiran kita untuk memajukan perusahaan dalam usaha untuk menyediakan energi listrik yang handal, efisien dan ramah lingkungan.

Tahun 2023 merupakan lembaran baru bagi PT PLN Nusantara Power (PLN NP). Transformasi PLN NP menjadi struktur Holding Sub Holding meningkatkan kapasitas dan jumlah pembangkit menjadi 16,25 GW tersebar di seluruh Indonesia menjadi tantangan bagi PLN NP. Kondisi aging dan hidden capacity pada sebagian pembangkit yang dikelola memaksa PLN NP untuk melakukan program pemulihan pembangkit melalui LTPSA, Overhaul (Coal Handling Facility, Balance Of Plant (BOP)), RLA, aging management, Digitalisasi Aset Pembangkit, dan Program Penyelesaian Hidden Capacity Pembangkit.

PLN NP melalui Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Muara Karang menjadi PLTGU pertama yang melantai ke Bursa Karbon Indonesia (IDX Carbon) pada Oktober 2023 dengan mendaftarkan Indonesia Technology Based Solution dengan Kapasitas 317 MW yang berhasil mencetak 900.000 Ton CO_2 guna mendukung upaya perusahaan dan industri dalam mengurangi emisi karbon, serta mendorong pencapaian target net emisi atau Net Zero Emission (NZE) Indonesia di 2060. Sepanjang tahun 2023 PLN NP telah melakukan berbagai langkah ekspansi untuk memaksimalkan aset yang kami miliki, menciptakan pengembangan nilai (value creation) dari bisnis yang telah berjalan, serta menciptakan potensi bisnis produk-produk turunan seperti green hydrogen.

Praise be to Allah SWT, the Almighty God, for the Grace on all of us, so that as of now we are still given the blessing of health and able to dedicate our energy and thoughts to advance the Company in an effort to provide reliable, efficient and environmentally friendly electrical energy.

2023 is a new chapter for PT PLN Nusantara Power (PLN NP). PLN NP transformation into a Sub-Holding structure increasing the capacity and number of plants to 16,25 GW spread throughout Indonesia is a challenge for PLN NP. The aging condition and hidden capacity in some of the managed power plants drove PLN NP to carry out a power plant strengthening program through the following: LTPSA, Overhaul (Coal Handling Facility, Balance Of Plant (BOP)), RLA, aging management, Digitalization of Power Plant Assets, and Hidden Capacity Power Plant Restructuring Program.

Through Muara Karang Gas and Steam Power Plant (GCPP), became the first GCPP to be listed on the Indonesia Carbon Exchange (IDX Carbon) in October 2023 by registering the Indonesia Technology Based Solution with a capacity of 317 MW which succeeded in pocking 900,000 tons of CO_2. PLN NP supports the efforts of companies and industries in reducing carbon emissions, and encouraging the achievement of Indonesia's Net Zero Emission (NZE) target in 2060. Throughout 2023, PLN NP has taken various expansion steps to maximize assets, increase value creation from the existing businesses, and create business potential for derivative products such as green hydrogen.

Hasilnya, PLN NP menutup tahun 2023 dengan catatan kinerja yang memuaskan dengan membukukan Laba Tahun Berjalan PLN NP sebesar Rp0,67 triliun meningkat 149,83% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp0,47 triliun. Capaian laba ini tidak terlepas dari kerja keras dan kerja cerdas dari seluruh insan PLN NP yang berpengaruh terhadap peningkatan kinerja keuangan. Tak hanya itu, PLN NP juga mengalami menjadi salah satu kontributor laba investasi terbesar di seluruh PLN Group.

As a result, PLN NP closed 2023 with a satisfactory performance by recording Current Year Profit of Rp0,67 trillion, an increase of 149,83% compared to 2022 of Rp0,47 trillion. The profit achievement is inseparable from the hard work and smart work of all PLN NP personnel which bring effect on improving financial performance. More than that, PLN NP has also become one of the largest contributors to investment profits throughout the PLN Group.

Tinjauan Makroekonomi 2023

2023 Macroeconomic Outlook

Hingga akhir tahun 2023, kondisi perekonomian global masih diliputi ketidakpastian. Risiko dan ketidakpastian global ini didorong dinamika negara-negara maju yang berdampak ke global. Amerika Serikat masih dihadapkan pada inflasi yang berada di atas target, tingginya rasio bunga, peningkatan tekanan fiskal, dan tergerusnya excess saving yang membayangi pemulihan ekonomi. Sementara itu, negara maju lainnya yakni Tiongkok masih bergulat dengan pemulihan ekonomi pasca COVID-19 dan Eropa yang kondisi ekonominya melemah dengan defisit fiskal yang meningkat diiringi oleh core inflation yang masih tinggi.

As of the end of 2023, global economic conditions were still surrounded by uncertainty. These global risks and uncertainties are triggered by the dynamics of developed countries that have a global impact. The United States is still faced with above-target inflation, high interest rates, increased fiscal pressure, and erosion of excess savings that overshadow the economic downturn. Meanwhile, other developed countries, namely China, are still grappling with the post-COVID-19 economic downturn and Europe, whose economic conditions are weakening with an increasing fiscal deficit accompanied by high core inflation.

Selain masalah ekonomi, kondisi geopolitik juga menyebabkan risiko yang makin tinggi. Perang di Ukraina maupun di Timur Tengah, tentunya Palestina yang tidak menunjukkan tanda-tanda berakhir menimbulkan downside risk terhadap prospek pertumbuhan ekonomi. Sentimen global juga akan berpengaruh sehingga menimbulkan volatilitas di sektor keuangan dan prospek dari perang yang belum berakhir dan bahkan mungkin akan melebar berpotensi menimbulkan tekanan proteksionisme dan melemahkan perdagangan global. Pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2023 diprediksi turun oleh IMF menjadi hanya 3% dan oleh Bank Dunia hanya 2,1%. Inflasi juga diprediksi mencapai level 5,8%, lebih tinggi dibandingkan periode sebelum pandemi. Sebagian besar negara berkembang, termasuk Indonesia, cukup adaptif dan agile menghadapi tekanan inflasi dan kelatnya kebijakan moneter. Indonesia masih termasuk negara yang memiliki kinerja pertumbuhan ekonomi tertinggi di lingkungan ASEAN dan di lingkungan G20 yaitu di 5%.

Apart from economic issues, geopolitical conditions also show higher risks. The war in Ukraine and in the Middle East, especially Palestine, which shows no sign of ending, poses a downside risk to the prospects of economic growth. Global sentiment will also be influential, causing volatility in the financial sector and the prospect of a war that has not ended and may even widen has the potential to create protectionist pressures and weaken the global trade. The IMF and the World Bank predicted the world economic growth in 2023 to fall by only 3% and 2.1%, respectively. Inflation is also predicted to reach 5.8%, higher than the pre-pandemic period. Most developing countries, including Indonesia, are quite adaptive and agile in facing inflationary pressures and tight monetary policy. Indonesia is still among the countries that have the highest economic growth performance within the ASEAN and the G20 at 5%.

Di sisi lain prospek pertumbuhan global diperkirakan masih akan lemah, di mana meskipun inflasi mengalami moderasi atau penurunan, namun belum serta merta menurunkan suku bunga yang melonjak cukup tinggi dalam 18 bulan terakhir. Adanya tren penurunan leading economic indicator (LEI) secara persisten pada berbagai negara utama di dunia, khususnya Amerika Serikat (AS), China, dan Uni Eropa. Seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi global yang masih dinamis dan fluktuatif, terdapat tiga tantangan utama yang perlu diwaspada. Pertama, tren inflasi global yang secara historis masih cukup tinggi. Kedua, kondisi geopolitik yang masih tak menentu, yang bisa memicu kembali

On the other hand, the global growth outlook is expected to remain weak, where despite inflation has moderated or declined, it has not necessarily reduced interest rates that have jumped quite high in the last 18 months. There is a persistent downward trend in leading economic indicators (LEI) in various major countries in the world, especially the United States (US), China, and the European Union. As the pace of global economic growth remains dynamic and volatile, there are three main challenges to watch out for. First, the historically high trend of global inflation. Second, uncertain geopolitical conditions, which could trigger disruptions in the supply chain of primary goods and energy commodities, which

dibarengi rantai pasokan barang kebutuhan primer dan komoditas energi, sehingga dapat berdampak pada kenaikan inflasi global. Ketiga, pemulihan ekonomi China yang lebih rendah dari perkiraan sebelumnya akibat aktivitas industri dan permintaan konsumen yang melambat. Kombinasi dari berbagai tantangan tersebut diperkirakan akan masih berdampak pada perekonomian global di tahun 2024.

Dari sisi domestik, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah perlambatan ekonomi global. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2023 tumbuh sebesar 5,04% (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 4,94% (yoy). Hal ini didopang oleh kuatnya konsumsi domestik dan akselerasi investasi, seiring dengan berlanjutnya berbagai proyek strategis nasional pasca pandemi. Tetap solidnya pertumbuhan ekonomi nasional, juga didukung oleh terjaga inflasi yang terkendali, sehingga daya beli masyarakat dapat tetap terjaga. Inflasi domestik tercatat menurun pada tahun 2023 sebesar 2,61%, dari tahun sebelumnya sekitar 5,51%. Dari pasar finansial, nilai kurs Rupiah terhadap US Dolar tetap terjaga dan mencatat apresiasi sebesar 1,1% sepanjang tahun 2023. Kinerja Rupiah relatif lebih baik dibandingkan dengan beberapa mata uang negara peers seperti Peso Filipina, Rupee India, dan Ringgit Malaysia.

Tetap kuatnya kondisi perekonomian nasional, juga tercermin dari sisi kegiatan manufaktur, terlihat 69,2% negara berada di zona kontraksi seperti AS, Eropa, Jerman, Perancis, Inggris, Italia, Jepang, Korea Selatan, Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Sementara 30% lainnya berada di zona ekspansi termasuk Indonesia. Hal ini menunjukkan Indonesia berada di dalam zona ekspansi yang sudah bertahan semenjak pandemi berakhir dan termasuk di dalam kategori ekonomi dan kegiatan manufakturnya resilient atau tetap tosa bertahan positif dan ekspansif.

Berbagai tantangan perekonomian global tersebut pada akhirnya menuntut penguatan kerja sama internasional baik skala regional maupun multilateral. Kerjasama multilateral yang lebih kuat sangat penting untuk menjaga pertumbuhan dari aturan berbasis aturan multilateral dan untuk memitigasi perubahan iklim dengan membatasi emisi dan meningkatkan investasi hijau. Di sisi lain kebijakan penawaran juga dapat mengatasi faktor struktural utama yang menghambat pertumbuhan ekonomi, membantu membangun ketahanan ekonomi, dan meringankan tekanan harga. Dibutuhkan dorongan terpadu untuk investasi di sepanjang rantai pasokan dan teknologi energi hijau yang akan mendukung keamanan energi serta membantu mempercepat kemajuan transisi energi hijau.

could lead to higher global inflation. Third, lower-than-expected economic recovery in China due to slowing industrial activity and consumer demand. Combination of these challenges is expected to continue to impact the global economy in 2024.

In terms of domestic, Indonesia's economic growth remained strong amid the global economic slowdown. Data from the Central Statistics Agency (BPS) showed that economic growth in the fourth quarter of 2023 grew by 5.04% (yoy), an increase compared to growth in the previous quarter of 4.94% (yoy). This was supported by strong domestic consumption and accelerated investment, along with the continuation of various national strategic projects after the pandemic. Solid growth of the national economy is also supported by a controlled inflation rate, so that people's purchasing power can be maintained. Domestic inflation was recorded to decline in 2023 by 2.61%, from the previous year of around 5.51%. From the financial market, the Rupiah exchange rate against the US Dollar was maintained and recorded an appreciation of 1.1% throughout 2023. The Rupiah performance is relatively better compared to some of its peers such as Philippine Peso, Indian Rupee, and Malaysian Ringgit.

Strong condition of the national economy also continues as reflected in terms of manufacturing activities, as 69.2% of countries are in the contraction zone such as the US, Europe, Germany, France, UK, Italy, Japan, South Korea, Thailand, Malaysia, and Vietnam. While the other 30% are in the expansion zone, including Indonesia. It shows that Indonesia has been in the expansion zone since the end of the pandemic and is categorized as a resilient economy and manufacturing activity.

These global economic challenges ultimately require the strengthening of international cooperation at both regional and multilateral scales. Stronger multilateral cooperation is essential to maintain the growth of the rules-based multilateral system and to mitigate climate change by limiting emissions and increasing green investment. In terms of supply policies, on the other hand, can also address key structural factors that constrain the economic growth, help build economic resilience, and ease price pressures. A concerted push for investment along the supply chain of green energy technologies is needed that will support energy security and help accelerate progress on the green energy transition.

Analisis Atas Pencapaian Kinerja 2023

Analysis of 2023 Performance Achievement

Tahun 2023, PLN NP memasuki babak baru dalam transformasi yang membawa perubahan besar, yakni menjadi Subholding Generation Company terbesar se-Asia Tenggara. Melalui transformasi, PLN NP bergerak dan bekerja secara lebih efektif dan efisien, lincah, serta terarah untuk mencapai tujuan Perusahaan. PLN NP bertujuan tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional dan mempertajam kapasitas finansial, tetapi juga mempercepat transisi menuju energi yang lebih berkelanjutan, selaras dengan visi pemerintah dan kebutuhan strategis nasional. Pembentukan Subholding Generation Company mengubah struktur dan tanggung jawab PLN NP menjadi lebih fokus dalam mendukung upaya transisi energi dan lebih jauh meningkatkan keunggulan operasional dan optimalisasi portofolio penyediaan listrik yang handal dan terjangkau.

In 2023, PLN NP started a new chapter in transformation that brought great changes, namely becoming the largest Sub-Holding Generation Company in the Southeast Asia. Through transformation, PLN NP moves and works more effectively and efficiently, agile and directed to achieve the Company's goals. PLN NP seeks not only to improve operational efficiency and strengthen financial capacity, but also to accelerate the transition to more sustainable energy, in line with the government vision and national strategic needs. The establishment of the Generation Company Sub-Holding changes the structure and responsibilities of PLN NP to be more focused in supporting energy transition efforts and further enhancing operational excellence and optimizing the portfolio of reliable and affordable electricity provision.

Strategi dan Kebijakan Perusahaan

Company Strategy and Policy

Setelah dilaksanakan legal and state untuk program holding-subholding ketenagalistrikan, PLN NP akan menangani pembangkit dengan total kapasitas 18,26 GW pada tahun 2023. Dengan modal kompetensi pada bidang pembangkitan, PLN NP melakukan implementasi manajemen aset baik dengan melaksanakan asset wellness, digitalisasi, efisiensi pembangkit dan mendukung program green seperti co-firing untuk seluruh pembangkit yang dimiliki dan dikelola oleh PLN NP. Selain itu, pengembangan bisnis beyond kWh akan terus dikembangkan dalam rangka meningkatkan nilai tambah Perusahaan.

After the legal and state for the electricity Sub-Holding program, PLN NP handled power plants with a total capacity of 18.26 GW by 2023. With competence capital in the field of generation, PLN NP implements good asset management by implementing asset wellness, digitization, plant efficiency and supporting green programs such as co-firing for all power plants owned and managed by PLN NP. Furthermore, business development beyond kWh will continue to be developed in order to increase the Company's added value.

Di sisi lain pengembangan portofolio PLN NP ke depan harus dapat menjamin keberhasilan & sustainabilitas korporasi di masa mendatang melalui strategi korporat untuk mendukung value creation & sustainability dari portofolio bisnis PLN NP. Dukungan tersebut dilakukan melalui implementasi streamline subsidiary.

On the other hand, the development of PLN NP portfolio in the future must ensure the success and sustainability of the corporation in the future through a corporate strategy to support value creation and business portfolio sustainability of PLN NP. The Company supports them through the implementation of streamline subsidiary.

Dalam menjawab dan mengoptimalkan tantangan dan isu strategis tersebut, Direksi telah menyusun program-program strategis sebagai arah dan koridor program kerja Perusahaan agar dapat mencapai target perusahaan dengan merujuk pada peta bisnis Perusahaan, green RUPTL 2021-2030, pemenuhan bauran EBT 23% pada tahun 2025 dan mendukung komitmen pemerintah menuju karbon netral di tahun 2060. Program kerja strategis PLN NP sebagaimana tertuang dalam RKAP 2023 yang telah disahkan oleh Pemegang Saham, antara lain:

In answering and optimizing these challenges and strategic issues, the Board of Directors compiled strategic programs as the direction and corridor of the Company's work program in order to achieve the Company's targets by referring to the Company's business line map, the 2021-2030 green RUPTL, fulfilling the 23% NRE mix in 2025 and supporting the government commitment towards carbon neutral in 2060. PLN NP's strategic work program as stated in the 2023 ABOP which was approved by the Shareholders, including:

Area Bisnis 1: Business Area 1:	Area Bisnis 2: Business Area 2:	Area Bisnis 3: Business Area 3:	Area Bisnis 4: Business Area 4:
Maximizing kWh from Existing Generation Assets	Expanding MW Capacity	Growing Sales of Current Portfolios: Customer Segments (1) Kick Money (2) Beyond PLN, (3) Beyond Indonesia	Innovating New Portfolios : Products & Services

Melalui penerapan strategi Area Bisnis 1 (Maximizing kWh from Existing Generation Assets) pada unit-unit pembangkit baru dari PLN Persero, PLN NP meningkatkan efisiensi dan inovasi dalam skala besar, mempercepat transisi energi Indonesia ke arah yang lebih hijau dan berkelanjutan, mengoptimalkan kinerja dan nilai tambah untuk stakeholder. Langkah strategis ini memperkokoh posisi PLN NP sebagai pemimpin di sektor pembangkitan energi, baik di Indonesia maupun internasional, menunjukkan komitmennya dalam menciptakan nilai melalui produksi energi yang berkelanjutan.

Through the implementation of Business Area 1 (Maximizing kWh from the Existing Generation Assets), strategy on new generation units from PLN Persero, PLN NP improves efficiency and innovation at scale, advancing Indonesia's energy transition to a greener and more sustainable direction, strengthening performance and adding value for stakeholders. This strategic move strengthens PLN NP's position as a leader in the energy generation sector, both in Indonesia and internationally, demonstrating its commitment to creating value through sustainable energy production.

Strategi Area Bisnis 2: Expanding MW Capacity merupakan salah satu pilar utama dalam strategi PLN NP yang mengejar penambahan kapasitas megawatt (MW) melalui beberapa inisiatif strategis, menghilangkan komitmen PLN NP untuk tidak hanya memperkuat infrastruktur pembangkitan energi tetapi juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan industri di Indonesia. Dengan keberadaan unit-unit pembangkit baru hasil limpahan PLN Persero, PLN NP berada dalam posisi yang unik untuk meningkatkan kapasitasnya secara signifikan, mendemonstrasikan kemampuan adaptasinya dalam memenuhi permintaan energi yang terus berkembang dan mengimplementasikan proyek-proyek strategis yang akan berkontribusi pada pencapaian target kapasitas. Dengan mengintegrasikan unit-unit pembangkit baru hasil limpahan PLN Persero, PLN NP tidak hanya memperkuat posisinya dalam industri energi tetapi juga secara proaktif menyikapi tantangan dan peluang dalam elemen value creation. Keterlibatan dalam proyek-proyek strategis, seperti pengembangan kawasan industri terintegrasi dan akuisisi pembangkit, menunjukkan kemampuan adaptasi dan komitmen PLN NP dalam mendukung visi Indonesia untuk membangun infrastruktur energi yang berkelanjutan dan kompetitif di tingkat global. Implementasi strategi ini secara keseluruhan berkontribusi pada penciptaan nilai jangka panjang bagi stakeholder, mendukung transisi energi yang bersih, dan memperkuat kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan energi yang terus meningkat.

Business Area Strategy 2: Expanding MW Capacity is one of the key pillars in PLN NP strategy that targets the addition of megawatt (MW) capacity through several strategic initiatives, indicating PLN NP's commitment to not only strengthening the energy generation, but also to supporting economic and industrial growth in Indonesia. With the presence of new generation units spilled over from PLN Persero, PLN NP is in a unique position to significantly increase its capacity, demonstrate its adaptability to meet growing energy demand and implement strategic projects that will contribute to the achievement of capacity targets. By integrating the new generation units spilled over from PLN Persero, PLN NP is not only strengthening its position in the energy industry, but also proactively addressing the challenges and opportunities in the value creation elements. Involvement in strategic projects, such as the development of integrated industrial estates and the acquisition of power plants, demonstrates PLN NP adaptability and commitment in supporting Indonesia's vision to build a sustainable and globally competitive energy infrastructure. This implementation as a whole contributes to the long-term value creation for the stakeholders, supports a clean energy transition, and strengthens production capacity to meet the growing energy demand.

Strategi Area Bisnis 3: Growing Sales of Current Portfolios mengganggambarkan upaya untuk memperluas penjualan portofolio jasa dan produk ke segmen customer yang lebih luas, yang termasuk dalam kategori "Technical Skills-based Business Beyond kWh". Mencakup tidak hanya layanan kepada grup PLN tetapi juga kepada pelanggan di luar PLN dan bahkan menjangkau pasar internasional, Area bisnis ini mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dan ekspansif, memanfaatkan keahlian teknis dan kemampuan operasional PLN NP untuk menawarkan solusi yang berkaitan dengan energi dan utilitas lainnya. Keberadaan aset-aset dari PLN setelah memperluas cakupan layanan yang dapat ditawarkan oleh PLN NP, memungkinkan untuk mengakses segmen pasar baru dan menciptakan peluang bisnis baru baik di dalam maupun di luar Indonesia. Hal ini tidak hanya memperkuat posisi PLN NP sebagai pemain utama di industri energi tetapi juga menegaskan peranannya dalam mendorong inovasi, keberlanjutan, dan pengembangan kapasitas teknis di sektor ini.

Business Area Strategy 3: Growing Sales of Current Portfolios underscores efforts to expand sales of the service and product portfolio to a wider customer segment, which concluded under the category of "Technical Skills-based Business Beyond kWh". This includes not only services to the PLN group but also to customers outside PLN and even reaching out to international markets. This business area adopts a more inclusive and expansive approach, leveraging technical expertise and operational capabilities by PLN NP to offer solutions related to energy and other utilities. The presence of PLN assets further expands the scope of services that PLN NP can offer, allowing it to access new market segments and create new business opportunities both within and outside Indonesia. This not only strengthens PLN NP's position as a major player in the energy industry but also confirms its role in driving innovation, sustainability, and technical capacity building in the sector.

Strategi Area Bisnis 4. *Innovating New Portfolios: Products & Services.* Sebagai bagian dari strategi "*Technical Skills-based Business Beyond kWh*" PLN NP menekankan pentingnya inovasi dalam pengembangan portofolio produk dan layanan baru. Fokus area ini adalah menciptakan solusi yang berkelanjutan dan efisien untuk memenuhi kebutuhan energi masa depan, serta menyediakan layanan yang menambah nilai bagi konsumen dan industri melalui Inovasi *Green and Clean Energy*, Inovasi Konsumen Tegangan Tinggi, Inovasi Manufaktur dan Inovasi Infrastruktur Energi Primer. PLN NP berkomitmen untuk menjadi pemimpin dalam inovasi energi, mendukung keberlanjutan lingkungan, dan memberikan nilai tambah kepada pelanggan dan masyarakat secara lebih luas. Inisiatif ini bukan hanya tentang memperkenalkan produk dan layanan baru, tetapi juga tentang mendefinisi masa depan energi di Indonesia dan di luar negeri, memastikan bahwa transisi energi berkelanjutan dapat tercapai melalui kolaborasi, inovasi, dan komitmen bersama.

Beberapa langkah strategis yang dilakukan PLN NP dalam mencapai tujuan strategis tersebut, antara lain:

1. Power Plant melalui program:
   a. Peningkatan penjualan tenaga listrik melalui pengembangan *Add On* Muara Tawar Blok 2 (700 MW) yang sudah COD pada tahun 2022 dan *Add On* Muara Tawar Blok 3 (250 MW) & Blok 4 (250 MW) yang COD pada tahun 2023 dan penambahan aset pembangkit PLN NP dalam rangka implementasi *Holding-Subholding* yaitu sebesar 23,712 MW (tinggal wave 3 pada tahun 2024). Keikutsertaan dalam kepemilikan saham IPP melalui pembangunan PLTS Cinta Dayaeliat MS (MWac atau setara 192 MWp) sebesar 51% saham yang COD 2023, PLTU Sumbagsel 1 (300 MW) sebesar 10% saham dengan target COD tahun 2024 dan PLTA Batang Toru (510 MW) sebesar 25% saham dengan target COD tahun 2025;
   b. Pengembangan pembangkit EBT yang tercantum dalam green RUPTL 2021-2030 baik melalui skema kepemilikan sendiri (PLN NPTL), *majority shares* maupun *minority shares* dengan inisiasi sebesar 1,933,5 MW di tahun 2022-2028 dari rencana 8,7 GW sampai dengan tahun 2030.

2. Power Solutions melalui Program:
   a. Peningkatan pangsa pasar dalam bidang Jasa O&M pembangkit di semua regional;
   b. Bisnis Jasa *Engineering Procurement Construction* (EPC) melalui PT Rekayasa Elektrika;
   c. Peningkatan Jasa *Maintenance Repair Overhaul* (MRO) di pasar nasional maupun internasional;
   d. Penyediaan *Spare Part* untuk lingkungan PLN Grup maupun pembangkit IPP;
   e. Jasa layanan *Digital Power Plant* melalui Sistem Optimasi Keharidalan & Efisiensi Unit Pembangkit Terintegrasi (SOKET);
   f. Penyediaan layanan *ancillary services* melalui Power Quality (DRUPS).

Innovating New Portfolios: Products & Services. As part of PLN NP's "Technical Skills-based Business Beyond kWh" strategy, the Company emphasizes the importance of innovation in the development of new product and service portfolios. This area focuses on creating sustainable and efficient solutions to meet the future energy needs, as well as providing services that add value to the consumers and industries, including Green and Clean Energy Innovation, High Voltage Consumer Innovation, Manufacturing Innovation and Primary Energy Infrastructure Innovation. PLN NP is committed to being a leader in energy innovation, supporting environmental sustainability, and providing added value to the customers and society more broadly. The initiative is not just about introducing new products and services, but also about redefining the future of energy in Indonesia and abroad, ensuring that a sustainable energy transition can be achieved through collaboration, innovation and shared commitment.

In achieving these strategic objectives, PLN NP applies the following strategic steps:

1. Power Plant through the program:
   a. Improvement of electric power sales through the development of Muara Tawar Add On Block 2 (700 MW) which already COD in 2022 and Muara Tawar Add On Block 3 (250 MW) & Block 4 (250 MW) which COD in 2023 and the addition of PLN NP's power plant assets in the framework of the implementation of Holding-Subholding which amounted to 23,712 MW (up to wave 3 post 2024). Participation in IPP share ownership through the construction of Cinta Solar Power Plant (capacity of MS MWac or equivalent to 192 MWp) with 51% share with COD 2023, Southern Sumatera CFPP 1 (300 MW) with 10% share with COD target in 2024 and Batang Toru Hydropower Plant (510 MW) with 25% share with COD target in 2025;
   b. The development of NRE power plants listed in the 2021-2030 green RUPTL both through self-ownership schemes (PLN NPTL), majority shares and minority shares with an initiation of 1,933.5 MW in 2022-2028 from the planned 8,7 GW until 2030.

2. Power Solutions through the following programs:
   a. Improvement of market share in power plant O&M services in all regions;
   b. Engineering Procurement Construction (EPC) Services business through PT Rekayasa Elektrika;
   c. Improvement of Maintenance Repair Overhaul (MRO) services in national and international markets;
   d. Provision of Spare Parts for PLN Group environment and IPP power plants;
   e. Digital Power Plant services through the Integrated Generating Unit Reliability & Efficiency Optimization System (SOKET);
   f. Provision of ancillary services through Power Quality (DRUPS).

3. *Beyond Power* melalui program:
   a. Jasa Konsultan Teknik & Engineering melalui Enterprise Asset Management (EAM) di lingkungan PLN Group;
   b. Jasa total solutions industry & utility melalui Penyediaan EPC untuk PV Rooftop di industri dan SPKLU;
   c. Pengembangan bisnis non-core melalui pemanfaatan idle asset.

3. Beyond Power through the following programs:
   a. Technical & Engineering Consultant Services through Enterprise Asset Management (EAM) within PLN Group;
   b. Total solutions industry & utility services through EPC Provision for PV Rooftop in industry and SPKLU;
   c. Non-core business development through idle asset utilization.

Proses yang Dilakukan Direksi untuk Memastikan Implementasi Strategi

Processes Conducted by the Board of Directors to Ensure Strategy Implementation

Proses ini mencerminkan peran strategis dan pengawasan yang dilakukan oleh Direksi dalam mengelola dan mengarahkan Perusahaan ke arah pencapaian tujuan jangka panjang dan menjaga keberlanjutan perusahaan. Direksi PLN NP memastikan implementasi strategi mencakup langkah-langkah perumusan strategi, pengkomunikasian visi Perusahaan, pengawasan dan pengelolaan risiko, penataan SDM, mendorong adanya inovasi, dan serta memastikan bahwa strategi perusahaan mendukung komitmen terhadap keberlanjutan.

This process reflects the strategic and supervisory role performed by the Board of Directors in managing and directing the Company towards achieving the long-term goals and maintaining the sustainability of the Company. PLN NP's Board of Directors ensures that strategy implementation includes the steps of strategy formulation, communicating the Company's vision, monitoring and managing risks, structuring human resources, encouraging innovation, and ensuring that the Company's strategy supports its commitment to sustainability.

Dalam merumuskan strategi, Direksi bersama jajaran manajemen senior dan tim strategis merumuskan strategi jangka panjang dan periodik perusahaan yang sejalan dengan visi, misi, dan tujuan perusahaan serta mempertimbangkan kondisi pasar dan lingkungan yang relevan. Selanjutnya visi dan strategi perusahaan disosialisasikan kepada semua tingkatan organisasi secara jelas dan terbuka untuk memastikan bahwa seluruh insan PLN NP memahami dan mendukung tujuan strategis Perusahaan.

In formulating the strategy, the Board of Directors together with senior management and the strategic team formulate the Company's long and short-term strategies that are in line with the Company's vision, mission and objectives as well as considering relevant market and environmental conditions. Furthermore, the Company socializes its vision and strategy to all levels of the organization in a clear and open manner to ensure that all PLN NP people understand and support the Company's strategic goals.

Direksi juga berperan penting dalam mengawasi pelaksanaan strategi dan mengelola risiko yang terkait, termasuk memastikan bahwa telah dilakukan identifikasi risiko dan mitigasinya dikelola secara efektif untuk mendukung pencapaian tujuan strategis. Direksi terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pengalokasian sumber daya perusahaan, termasuk investasi dalam infrastruktur, teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung implementasi strategi.

The Board of Directors also plays an important role in overseeing the implementation of the strategy and managing associated risks, including ensuring that risks are identified and mitigations are effectively managed to support the achievement of strategic objectives. The Board of Directors is involved in making decisions regarding the allocation of the Company resources, including investments in infrastructure, technology and human resources development required to support strategy implementation.

Selain itu, Direksi berperan penting dalam mendorong adanya inovasi untuk meningkatkan daya saing PLN NP dan memastikan bahwa strategi Perusahaan mendukung komitmen terhadap keberlanjutan, termasuk pengurangan emisi karbon dan implementasi praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.

Also, the Board of Directors plays a key role in driving innovation to improve PLN NP competitiveness and ensuring that the Company's strategy supports its commitment to sustainability, including the reduction of carbon emissions and the implementation of socially and environmentally responsible business practices.

Peranan Direksi dalam Perumusan Strategi dan Kebijakan Strategis

The Role of the Board of Directors in Formulating Strategic Strategies and Policies

Dalam memastikan implementasi strategi dan kebijakan strategis Perusahaan terlaksana dengan baik, Direksi melakukan penjabaran yang diperlukan sebagaimana yang tertuang dalam RKAP dan RJPP untuk memastikan implementasi strategi dan kebijakan strategis berada dalam jalur yang tepat. Kesesuaian strategi tersebut, diharapkan dapat mendorong terciptanya kinerja pembangkit yang efisien guna mewujudkan pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan.

In ensuring the Company's strategic strategies and policies is well implemented, the Board of Directors conducts the necessary elaboration as stated in the ABOP and RJPP to ensure the implementation of strategic strategies and policies is on the right track. The overall strategy is expected to encourage the creation of excellent power plant performance in order to realize sustainable revenue growth.

Perbandingan Hasil Kinerja dengan Target 2023

Comparison of Performance Results with 2023 Target

Penerapan strategi dan kebijakan strategis PLN NP yang adaptif telah mampu mempertahankan kinerja operasional dan keuangan PLN NP tetap positif, meskipun dihadapi berbagai tantangan. Sepanjang tahun 2023 PLN NP berupaya untuk merealisasikan target yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP 2023). Sampai dengan 31 Desember 2023, secara umum kinerja yang dibukukan PLN NP berhasil mencapai target yang positif, dengan rincian sebagai berikut:

PLN NP implements the adaptive strategic strategies and policies that are generating the capability to maintain PLN NP's positive operational and financial performance, despite the Company is in the middle of various challenges. Throughout 2023, PLN NP strived to realize the established targets as stated in the Company's 2023 Annual Budget and Operational Plan (ABOP). As of December 31, 2023, in general, the performance recorded by PLN NP managed to achieve positive targets, with the following details:

Tingkat Kinerja Perusahaan

Company Performance Level

Penilaian tingkat kinerja kesehatan PLN NP yang dilakukan berdasarkan Kriteria Penilaian yang ditetapkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) RKAP Tahun 2023 melalui Kontrak Manajemen/Key Performance Indicators (KPI) tahun 2023. Realisasi KPI Kontrak Manajemen sampai dengan Desember 2023, mencapai skor 103,51 dari bobot 100, meningkat dibanding tahun sebelumnya di posisi 102,88%. Capaian tersebut diperoleh dari 6 aspek yaitu: (1) *Economic and Social Value* (38,42); (2) *Business Model Innovation* (17,78); (3) *Technology Leadership* (15,18); (4) *Energize Investment* (10,33); (5) *Unleash Talent* (8,80); (6) *Compliance* (0,00). Secara umum, realisasi indikator kinerja Manajemen tersebut masuk dalam kategori BAIK, namun apabila dibandingkan dengan target KPI 2023, ada beberapa hal yang perlu perhatian antara lain: EFOR Non PLTU Jawa Bali, EFOR PLTU Luar Jawa Bali, EAF PLTU Jawa Bali, Pendapatan dari luar PLN Group, Share of EBT Production, EPC Project Completion dan Pengendalian penggunaan Anggaran Investasi sesuai RKAP 2023.

PLN NP scorecard performance level was assessed based on the Assessment Criteria set at the General Meeting of Shareholders (GMS) for 2023 ABOP through the Management Contract/ Key Performance Indicators (KPI) in 2023. The realization of the Management Contract KPI until December 2023, reached a score of 103.51 out of a weight of 100, an increase compared to the previous year in the position of 102.88%. The achievement was obtained from 6 aspects, namely (1) Economic and Social Value (38.42); (2) Business Model Innovation (17.78); (3) Technology Leadership (15.18); (4) Energize Investment (10.33); (5) Unleash Talent (8.80); (6) Compliance (0.00). In general, the realization of the Management performance indicators is in the GOOD category, but when compared to the KPI 2023 target, there are several things need improvement, including: Java Bali Non-CFPP EFOR, Outside Java Bali CFPP EFOR, Java Bali CFPP EAF, Revenue from outside PLN Group, Share of NRE Production, EPC Project Completion and Control of the use of the Investment Budget following the 2023 ABOP.

Kinerja Keuangan
Financial Performance

Realisasi total aset mencapai Rp343,46 Triliun atau 99,99% dari target RKAP 2023 sebesar Rp346,26 triliun, meningkat sebesar 3,27% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp332,60 triliun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan jumlah piutang usaha. Peningkatan piutang usaha terjadi karena jumlah pencatan piutang melalui pelunasan kas dari tagihan Penjualan Tenaga Listrik yang lebih rendah di tahun 2023. Saldo kas PNP masih dianggap mencukupi untuk kebutuhan operasional sejalan dengan kebijakan manajemen kas terpusat PLN (Optimasi Cash Management/PLN Holding).

Realisasi Laba Bersih sampai dengan akhir tahun 2023 sebesar Rp15,67 triliun dengan pencapaian 167,01% dari target RKAP 2023 sebesar Rp8,18 triliun. Pencapaian ini didukung oleh adanya pencapaian laba Penjualan Tenaga Listrik yang lebih baik, serta keberhasilan portofolio investasi perusahaan yang memberikan kontribusi laba asosiasi yang tinggi terutama dari investasi di PLTU Cikarap (IPP) & PLTU Jawa 7 (IUPTBL). PLN NP menjadi salah satu kontributor terbesar kinerja keuangan PLN secara holding. Transformasi yang dijalankan PLN holding juga berperan besar dalam mendorong kinerja NP menjadi semakin agile dan efisien.

Adapun realisasi Beban Usaha sampai dengan akhir tahun 2023 sebesar Rp76,07 triliun atau 95,13% dari target RKAP 2023 sebesar Rp79,90 triliun. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh kenaikan penggunaan bahan bakar seiring dengan adanya peningkatan produksi KWh.

Pendapatan Usaha PLN NP tahun 2023 sebesar Rp90,38 triliun atau mencapai Rp100,92 % dari target RKAP tahun 2023 sebesar Rp89,55 triliun. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh kenaikan jumlah KWh jual yang melebihi target pada tahun 2023 untuk memenuhi kebutuhan sistem. Kontribusi terbesar terhadap pendapatan usaha berasal dari penjualan tenaga listrik untuk sistem Jawa Bali. Kontribusi berasal dari masing-masing segmen terhadap pendapatan usaha yaitu penjualan tenaga listrik sebesar 97,21%, jasa operasi dan pemeliharaan sebesar 1,29%, konstruksi sebesar 1,20%, dan pendapatan lainnya sebesar 0,30%. Adapun Realisasi Imbalan kepada Pemegang Saham (ROE) sampai dengan tahun 2023 sebesar 4,42% atau 171,48% dari target RKAP 2023 sebesar 2,55%.

The realization of total assets reached Rp343,46 trillion or 99.99% of the 2023 ABCP target of Rp346,26 trillion, an increase of 3.27% compared to 2022 of Rp332,60 trillion. The increase was mainly influenced by an increase in the amount of trade receivables. The increase in trade receivables occurred due to the lower amount of receivables disbursement through cash receipts from Electricity Sales bills in 2023. PNP's cash balance is still considered sufficient for the operational needs in line with PLN's centralized cash management policy (PLN Holding Cash Management Optimization).

As of the end of 2023, realization of Net Income amounted to Rp15,67 trillion with an achievement of 167.01% of the 2023 ABCP target of Rp8,18 trillion. This achievement was supported by the achievement of better Electricity Sales profit, as well as the success of the Company's investment portfolio which contributed high associate profits, especially from investments in Cikarap CFPP (IPP) & Java 7 (IUPTBL). PLN NP became one of the largest contributors to PLN financial performance as a holding. The transformation by PLN holding also plays a major role in driving PLN NP performance to become more agile and efficient.

The realization of Operating Expenses until the end of 2023 amounted to Rp76,07 trillion or 95.13% of the 2023 ABCP target of Rp79,90 trillion. The increase was mainly influenced by the increase in fuel usage in line with the increase in KWh production.

PLN NP's operating revenue in 2023 amounted to Rp90,38 trillion or reached Rp100,92% of the 2023 ABCP target of Rp89,55 trillion. The increase was influenced by the increase in the number of KWh sold which exceeded the target in 2023 to meet the system needs. The largest contribution to operating revenues came from the sale of electricity for the Java Bali system. Contributions from each segment to operating income were sales of electricity by 97.21%, operation and maintenance services by 1.29%, construction by 1.20%, and other income by 0.30%. The Realization of Return to Shareholders (ROE) until 2023 was 4.42% or 171.48% of the 2023 ABCP target of 2.55%.

Kinerja Operasional

Operational Performance

Realisasi produksi energi listrik PLN NP kumulatif tahun 2023 adalah sebesar 66,846 GWh, meningkat 10,5% dari RKAP 2023 sebesar 58,915 GWh. Produksi tenaga listrik di tahun 2023 jauh lebih tinggi dari tahun 2022, hal ini dipengaruhi oleh adanya penambahan unit pembangkit dan peningkatan kapasitas pembangkit yang dikelola oleh PLN NP. Terdapat pemakaian sendiri tenaga listrik yang digunakan untuk aktivitas operasional unit pembangkit, yaitu sebesar 2,917,19 GWh atau 199% untuk Unit Pembangkitan Batubara. Pemakaian sendiri tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 sebesar 344,79 GWh atau 188% yang dipengaruhi oleh adanya penambahan unit pembangkit dengan kapasitas dibawah 100 MW yang mempunyai rasio Pemakaian Sendiri (PS) lebih tinggi. Adapun jumlah pemakaian sendiri untuk Unit Pembangkitan Non Batubara dan Gas adalah sebesar 746,59 GWh atau 2,48%. Pemakaian sendiri tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 sebesar 204,55 GWh atau 164% yang terutama dipengaruhi oleh adanya penambahan unit pembangkit terutama PLTD yang mempunyai rasio Pemakaian Sendiri (PS) lebih tinggi.

In 2023, PLN NP realized cumulative electric energy production amounted to 66,846 GWh, an increase of 10.5% from the 2023 ABCP of 58,915 GWh. Electricity production in 2023 was much higher than in 2022, which was influenced by the addition of generating units and the increase in power plant capacity managed by PLN NP. There is self-use of electricity used for operational activities of the generating unit, which amounted to 2,917.19 GWh or 199% for the Coal Generating Unit. The self-use is higher than in 2022 by 344.79 GWh or 188% which was influenced by the addition of generating units with a capacity below 100 MW which have a higher Self-Use (PS) ratio. The amount of self-use for Non-Coal and Gas Generating Units is 746.59 GWh or 2.48%. The self-use is higher than in 2022 by 204.55 GWh or 164%, which was mainly influenced by the addition of generating units, especially DEPP which has a higher Self-Use (PS) ratio.

Adapun realisasi penjualan energi listrik PLN NP kumulatif tahun 2023 adalah 63,179 GWh atau mencapai 110,8% dari target RKAP 2023 sebesar 56,5 GWh. Penjualan meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 16,376,48 GWh. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh adanya penambahan unit pembangkit dan peningkatan kapasitas pembangkit yang dikelola oleh PLN NP. Sementara itu, penjualan tenaga listrik unit pembangkitan batubara (PLTU) PLN NP sebesar 33,815,22 GWh meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 4,790,61 GWh. Sedangkan penjualan tenaga listrik unit pembangkitan gas dan non batubara (non PLTU) PLN NP pada tahun 2023 adalah 29,363,37 GWh meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 11,954,18 GWh.

The realization of PLN NP's cumulative electrical energy sales in 2023 was 63,179 GWh or reached 110.8% of the 2023 ABCP target of 56.5 GWh. Sales increased compared to 2022 by 16,376.48 GWh. The increase was mainly influenced by the addition of generating units and the increase in generating capacity managed by PLN NP. Meanwhile, sales of electricity from PLN NP's coal generation unit (CFPP) amounted to 33,815.22 GWh, an increase compared to 2022 of 4,790.61 GWh. While sales of gas and non-coal generation units (non CFPP) of PLN NP in 2023 were 29,363.37 GWh, an increase compared to 2022 of 11,954.18 GWh.

Kesiapan dan Keandalan Pembangkit

Power Plant Readiness and Reliability

Keandalan dan kesiapan pembangkit-pembangkit PLN NP ditunjukkan melalui indikator operasional sebagai berikut:

a. Realisasi Equivalent Availability Factor (EAF) Pembangkit Direktorat Batubara adalah 84,85% atau mencapai 97,89% dari target RKAP 2023 sebesar 86,68%, sedikit menurun dibandingkan tahun 2021 sebesar 91,08%. Penurunan ini disebabkan karena perbedaan tipe pemeliharaan periodik per mesin pembangkit untuk pembangkit pasca Holding Subholding. Sedangkan EAF Pembangkit Direktorat Gas adalah 94,73% atau mencapai 100,13% dari target RKAP 2023 sebesar 94,60%, sedikit menurun dibandingkan tahun 2022 sebesar 95,98%. Penurunan ini diakenakan peningkatan jumlah gangguan pada unit pembangkit pasca Holding Subholding.

PLN NP's power plants reliability and readiness are indicated through the following operational indicators:

a. The realization of the Equivalent Availability Factor (EAF) of the Coal Directorate Power Plant was 84.85% or reached 97.89% of the 2023 ABCP target of 86.68%, a slight decrease compared to 2021 of 91.08%. This decrease was due to differences in the type of periodic maintenance per generating machine for post Sub-Holding Holding plants. While the EAF of the Gas Directorate Power Plant was 94.73% or reached 100.13% of the 2023 ABCP target of 94.60%, a slight decrease compared to 2022 of 95.98%. This decrease was due to an increase in the number of disturbances in the post Holding Sub-Holding generating unit.

b. Realisasi Equivalent Forced Outage Rate (EFOR) Pembangkit Direktorat Batubara adalah 3,15% atau mencapai 110,23% dari target RKAP 2023 sebesar 3,51%, meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 0,47%. Adapun EFOR Pembangkit Direktorat Gas adalah 2,93% atau mencapai 104,62% dari target RKAP 2023 sebesar 3,07%, meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 0,41%. Peningkatan nilai EFOR tersebut tersebut disebabkan oleh adanya penyelesaian chronic problem unit pembangkit Holding Subholding.

c. Realisasi Sudden Outage Factor (SdOF) Pembangkit Direktorat Batubara adalah 2023 adalah 3,89 kali/unit atau mencapai 93,21% dari target RKAP 2023 sebesar 4,33 kali/unit, meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 10 kali/unit. Adapun SdOF Pembangkit Direktorat Gas adalah 1,30 kali/unit atau mencapai 101,62% dari target RKAP 2023 sebesar 1,90 kali/unit, meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 0,61 kali/unit. Peningkatan dipengaruhi oleh adanya peningkatan jumlah pembangkit pasca Holding Subholding yang dikelola oleh PLN NP.

d. Realisasi Net Plant Heat Rate (NPHR) Pembangkit Direktorat Batubara adalah 2023 adalah 3.064,79 kCal/kWh atau mencapai 101,03% dari target RKAP 2023 sebesar 3.096,60 kCal/kWh, meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 1.797,23 kCal/kWh. Peningkatan heat rate tersebut tersebut disebabkan oleh penambahan unit pembangkit pasca Holding Subholding yang mayoritas memiliki kapasitas pembangkit relatif kecil (dibawah 100 MW). Adapun NPHR Pembangkit Direktorat Gas adalah 2.244 kCal/kWh atau mencapai 104,51% dari RKAP 2023 sebesar 2.350 kCal/kWh, sedikit menurun dibandingkan tahun 2022 sebesar 2.284,23 kCal/kWh. Penurunan heat rate tersebut tersebut disebabkan oleh pengoperasian PLTU Gas di Jawa lebih rendah daripada tahun 2021.

e. Realisasi Scheduled Outage Factor (SOF) Pembangkit Direktorat Batubara adalah 2023 adalah 1,7% atau mencapai 83,04% dari target RKAP 2023 sebesar 10,01%, meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 8,47%. Peningkatan tersebut tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan tipe pemeliharaan periodik per mesin pembangkit untuk pembangkit pasca Holding Subholding. Sedangkan SOF Pembangkit Direktorat Gas adalah 2,52% atau mencapai 106,29% dari dari target RKAP 2023 sebesar 2,77%, menurun dibandingkan tahun 2022 sebesar 4,35%. Penurunan ini dipengaruhi oleh penundaan pemeliharaan periodik karena belum tercapainya running hour.

PLN NP juga menyediakan Jasa Operation and Maintenance (O&M) sebagai bentuk pengembangan Perusahaan dan memanfaatkan potensi yang dimiliki secara maksimal. Bidang usaha jasa O&M dilakukan oleh PLN NP secara langsung (wilayah Jawa dan luar Jawa) maupun melalui anak perusahaan dan perusahaan patungan. Realisasi pendapatan jasa O&M tahun 2023 mencapai Rp17,7 Triliun atau 88,97% dari RKAP 2023 sebesar Rp19,9 Triliun.

b. The realization of the Equivalent Forced Outage Rate (EFOR) of the Coal Directorate Power Plant was 3.15% or reached 110.23% of the 2023 ABOP target of 3.51%, an increase compared to 2022 by 0.47%. The EFOR of the Gas Directorate Power Plant was 2.93% or reached 104.62% of the 2023 ABOP target of 3.07%, an increase compared to 2022 by 0.41%. The increase in the EFOR value was mainly due to the completion of the chronic issue of the Holding Sub-Holding generating unit.

c. The realization of the Sudden Outage Factor (SdOF) of the Coal Directorate Power Plant in 2023 was 3.89 times/unit or reached 93.21% of the 2023 ABOP target of 4.33 times/unit, an increase compared to 2022 of 10 times/unit. The SdOF of Gas Directorate Power Plants was 1.30 times/unit or reached 101.62% of the 2023 ABOP target of 1.90 times/unit, an increase compared to 2022 of 0.61 times/unit. The increase was influenced by an increase in the number of post-Holding Sub-Holding power plants managed by PLN NP.

d. The Coal Directorate's Net Plant Heat Rate (NPHR) realization in 2023 was 3.064.79 kCal/kWh or reached 101.03% of the 2023 ABOP target of 3.096.60 kCal/kWh, an increase compared to 2022 of 1.797.23 kCal/kWh. The increase in heat rate was mainly due to the addition of post Sub-Holding Holding generating units, the majority of which have relatively small power plant capacity (below 100 MW). The NPHR of the Gas Directorate Plant was 2.244 kCal/kWh or reached 104.51% of the 2023 ABOP of 2.350 kCal/kWh, a slight decrease compared to 2022 of 2.284.23 kCal/kWh. The decrease in heat rate was mainly due to the lower operation of gas power plants in Java than in 2021.

e. The realization of Scheduled Outage Factor (SOF) of Coal Directorate Power Plants in 2023 was 1.7% or reached 83.04% of the 2023 ABOP target of 10.01%, an increase compared to 2022 of 8.47%. The increase was mainly influenced by a change in the type of periodic maintenance per generating machine for post Sub-Holding Holding power plants. Meanwhile, the SOF of the Gas Directorate Power Plant was 2.52% or reached 106.29% of the 2023 ABOP target of 2.77%, decreased compared to 2022 by 4.35%. This decrease was influenced by delays in periodic maintenance due to the unachieved running hours.

PLN NP also provides Operation and Maintenance (O&M) Services as the Company development and maximizes its potential. PLN NP directly performs O&M services business (Java and outside Java) as well as through subsidiaries and joint ventures. The realization of O&M service revenue in 2023 reached Rp17 Trillion or 88.97% of the 2023 ABOP of Rp19,9 Trillion.

Selain itu, PLN NP menyediakan jasa Engineering, Procurement and Construction (EPC) melalui salah satu Anak Perusahaannya yaitu PT Sekuaiaya Elektrika (SE). Jasa EPC yang dilakukan oleh PLN NP berupa lingkup kerja pembangunan pembangkit baru, khususnya di luar Pulau Jawa yang didukung tenaga profesional dan kemampuan dalam penguasaan teknologi pembangkitan, serta pembangunan jaringan Transmisi dan Distribusi (T&D) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Realisasi pendapatan jasa EPC sampai tahun 2023 adalah Rp40,51 miliar atau 45,37% dari RKAP 2023 sebesar Rp1,12 Triliun. Terdapat 3 proyek EPC yang dikelola oleh PT PLN Nusantara Power Construction (PLN NPC) dengan total kapasitas 54 MW antara lain PLTU Timika, PLTU Bima, dan PLTU Solibi.

Furthermore, PLN NP provides Engineering, Procurement and Construction (EPC) services through one of its subsidiaries, PT Sekuaiaya Elektrika (SE). PLN NP conducts the EPC services consisting of the construction of new power plants, especially outside Java, supported by professionals and capabilities in mastering generation technology, as well as the construction of Transmission and Distribution (T&D) networks spread throughout Indonesia. The realization of EPC service revenue until 2023 is Rp40,51 billion or 45.37% of the 2023 ABCP of Rp1,12 Trillion. There are 3 EPC projects managed by PT PLN Nusantara Power Construction (PLN NPC) with a total capacity of with a total capacity of 54 MW including Timika CFPP, Bima CFPP and Solibi CFPP.

Adapun realisasi pendapatan *beyond* kWh tahun 2023 adalah Rp432,24 miliar atau 7,0% dari RKAP 2023. Pendapatan *beyond* kWh terdiri dari pendapatan pekerjaan MRO PLN NPS sebesar Rp288,84 miliar, Layanan Suku Cadang sebesar Rp28,3 miliar, Pekerjaan EPC/Rootop sebesar Rp60,56 miliar dan pekerjaan lainnya Rp64,76 miliar.

The realization of revenue beyond kWh in 2023 was Rp432,24 billion or 7.0% of the 2023 ABCP. Revenue beyond kWh consists of PLN NPS MRO work revenue of Rp288,84 billion, Spare Parts Service of Rp28,3 billion, EPC/Rooftop work of Rp60,56 billion and other work of Rp64,76 billion.

Disamping itu, PLN NP juga mengembangkan Business Solution di bawah Bidang *Business Development – Generation Derivatives* yang berfungsi untuk memastikan penyusunan dan pengembangan strategi bisnis, manajemen produk dan *marketing integrated* serta sales dan kontrak dalam mendukung pengembangan bisnis derivatif pembangkit. Selama tahun 2023 jasa antara lain MRO (*Maintenance, Repair and Overhaul*), Non MRO (*Maintenance, Repair and Overhaul*) dan PLTU.

In addition, PLN NP also develops Business Solutions under the Business Development – Generation Derivatives Division which functions to ensure business strategy planning and development, product management and integrated marketing as well as sales and contracts in supporting the development of the generation derivatives business. During 2023, the Company conducts, among others: MRO (Maintenance, Repair and Overhaul), Non MRO (Maintenance, Repair and Overhaul) and SPP.

Dalam pengelolaan kinerja K3L tercapai zero accident, sedangkan prestasi untuk kinerja pengelolaan lingkungan PLN NP berhasil meraih 6 PROPER Emas, meningkat dari tahun lalu yang hanya sebanyak 5 unit, 7 PROPER Hijau dan 49 PROPER Biru serta meraih juara 2 nilai PROPER Emas. Kami terus berupaya meningkatkan pengelolaan Pembangkit dengan standar kelas dunia mengacu pada PKI SE maupun sertifikasi ISO 55001:2014, agar keamanan dan keandalan pembangkit dapat terus dijaga.

In the management of K3L performance, zero accident was achieved, while in terms of achievement for environmental management performance, PLN NP won 6 Gold PROPER, an increase from last year which was only 5 units, 7 Green PROPER and 49 Blue PROPER and won 2nd place in the Gold PROPER rides. We continue to strive to improve power plant management with the world-class standards referring to SAF SE and ISO 55001 2014 certification, so as to be able to maintain power plants safety and reliability.

Kendala yang Dihadapi dan Langkah Penyelesaiannya
Obstacles Faced and Steps to Resolve them

Sepanjang tahun 2023 Perusahaan memiliki sejumlah kendala dan tantangan, yang dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal, diantaranya adalah meningkatnya harga energi primer yang belum diimbangi dengan tarif dasar listrik, hadirnya pemain baru di bidang energi listrik, dampak teknologi, dan tren di industri kelistrikan global 3DE (Decarbonization, Decentralization, Digitalization and Electrification). Digitalisasi menjadi keharusan untuk mendorong pengelolaan bisnis pembangkit listrik dapat dijalankan lebih efisien. Disamping itu, kondisi pembangkit eksisting yang sudah

Throughout 2023, the Company faced several obstacles and challenges, which are influenced by external and internal factors, including increasing primary energy prices that have not been matched by the basic electricity tariff, the presence of new players in the field of electrical energy, technological disruption, and trends in the global electricity industry 3DE (Decarbonization, Decentralization, Digitization and Electrification). Digitization is a necessity to encourage the management of the power plant business to be carried out more efficiently. In addition, the

hus memotivasi inovasi agar dapat efisien, menurunnya pangsa pasar segmen usaha penjualan tenaga listrik, regulasi lingkungan dan dampak pandemi Covid-19 yang masih terjadi menjadi kendala lain yang dihadapi PLN NP. Oleh karena, PLN NP dituntut untuk beradaptasi mencoba keunggulan kompetitif dan berinovasi dalam melaksanakan peranannya sebagai sub holding pembangkitan PLN.

condition of existing plants that are old demands innovation in order to be efficient, the declining market share of the electricity sales business segment, environmental regulations and the impact of the Covid-19 pandemic that is still happening are other obstacles faced by PLN NP. Therefore, PLN NP is required to adapt to create competitive advantages and innovate in carrying out its role as a PLN generation sub holding.

Berbagai langkah dijalankan PLN NP dalam mengatasi kendala-kendala di atas antara lain pertama, mempertahankan dan meningkatkan bisnis inti dengan berfokus pada optimalisasi kinerja pembangkit, peningkatan fungsi fast response, pemanfaatan lahan tak terpakai dan menyelesaikan proyek yang sedang dikembangkan yang akan mempengaruhi keamanan pasokan listrik, BPP listrik, serta kesiapsiagaan kerja dan keandalan pembangkit. Kedua, PLN melakukan inovasi dan pengembangan usaha, bisnis jasa O&M, produk beyond kWh, antara lain HRD, biomass, co-firing, rooftop solar PV dan EAM yang akan menjadi potensi bisnis baru. Ketiga, PLN NP melakukan inisiasi pengembangan bisnis, berkolaborasi dengan mitra bisnis yang kompeten, seperti water treatment, digital light house, efisiensi dan manajemen industri, virtual power plant dan sebagainya. Strategi tersebut akan menjadi siklus yang terus mengalir guna mewujudkan pertumbuhan kinerja PLN NP secara berkelanjutan.

PLN NP undertakes various steps in overcoming the above constraints, including first, maintaining and improving the core business by focusing on optimizing power plant performance, improving fast response functions, utilizing the unused land and completing projects under development that will affect the security of electricity supply, electricity BPP, as well as work safety and plant reliability. Second, PLN NP invests and develops business, O&M services business, products beyond kWh including HRD, biomass, co-firing, rooftop solar PV and EAM which will become new business potential. Third, PLN NP initiates business development, collaborates with competent business partners, such as water treatment, digital light house, industrial efficiency and management, virtual power plant and so on. These strategies will be the continuous cycle to realize sustainable growth of PLN NP performance.

Dalam rangka menjaga keamanan pasokan energi primer berperan penting dalam menjaga kelangsungan operasional pembangkit, untuk itulah PLN NP berupaya memastikan transportasi dan logistik batubara dan gas sebagai energi primer pembangkit dapat terus terjaga pasokannya. PLN NP bersama dengan pemangku kepentingan terkait melakukan komunikasi dan koordinasi untuk memperbaiki sistem logistik dan infrastruktur untuk memastikan kebutuhan batu bara terpenuhi dan mencari solusi permanen agar krisis pasokan batubara tidak terjadi lagi. Dalam jangka panjang, PJB berkomitmen untuk menggantikan batu bara dengan energi baru terbarukan, sehingga PLN NP sejalan dengan road map pengembangan pembangkit hijau dan renewable energy.

In order to maintain the security of primary energy supply, it plays an important role in maintaining the continuity of power plant operations, for the reason PLN NP strives to ensure that the transportation and logistics of coal and gas as the primary energy of the power plant can continue to be maintained. PLN NP together with relevant stakeholders communicate and coordinate to improve the logistics system and infrastructure to ensure coal needs are met and find permanent solutions so that the coal supply crisis will not occur again. In the long term, PLN NP is committed to replacing coal with the renewable energy, so that PLN NP is in line with the road map for developing green and renewable energy power plants.

Dalam hal keterbatasan pendanaan, PLN NP mengembangkan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai mitra strategis yang kompeten, baik dari dalam maupun luar negeri. PLN NP juga berupaya memanfaatkan peluang PLN menjadi pembangkit sendiri yakni melalui akuisisi atau pengalihan aset pembangkit PLN ke PLN NP. Tantangan lain yang dihadapi tidak lain adalah peningkatan kompetensi SDM secara berkesinambungan untuk menjadi yang terdepan dan terpercaya sebagai perusahaan dalam bidang energi, serta melakukan kerjasama strategis dengan berbagai perguruan tinggi dalam penyediaan tenaga kerja terampil dengan keahlian teknis pembangkit.

In terms of funding limitations, PLN NP develops synergies and collaborations with various competent strategic partners, both from within and outside the country. PLN NP also seeks to utilize PLN reversibles into its own power plants, namely through the acquisition or transfer of PLN's power plant assets to PLN NP. Another challenge faced by PLN NP is the continuous improvement of human resource competencies to become a leading and trusted company in the energy sector, as well as strategic cooperation with various universities in providing skilled labor with technical expertise in power plants.

Pengelolaan SDM Secara Berkelanjutan

Continuous HR Management

PLN NP memandang memandang bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pencapaian visi dan misi Perusahaan. Keberhasilan untuk meraih target Perusahaan, baik dalam jangka maupun jangka panjang, membutuhkan dukungan kompetensi karyawan yang mumpuni, sehingga berdampak positif pada kinerja Perusahaan. Karena itulah, PLN NP melakukan pengelolaan karyawan secara baik yang dilakukan sejak dari rekrutmen. Selain itu, secara konsisten dan berkesinambungan meningkatkan kompetensi karyawan dengan mempertimbangkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dan arah pengembangan bisnis Perusahaan dalam jangka panjang. Dengan demikian, kebijakan yang diambil dilakukan pada peningkatan kemampuan leadership, peningkatan kapabilitas organisasi, membangun strategi kompetensi dan produktivitas untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi menjadi hal yang terus diampumakan.

PLN NP views that Human Resources (HR) is an integral part in achieving the Company's vision and mission. Success in achieving the Company's targets, both in the short and long term, requires the support of qualified employee competencies, so that it brings positive impact on the Company performance. Therefore, PLN NP applies the good employee management starting from recruitment. In addition, the Company consistently and continuously improves employee competencies by considering the Company's Annual Budget and Operational Plan as well as direction by the Company's business development in the long term. Thus, the policies taken are focused on improving leadership capabilities, increasing organizational capabilities, building competency and productivity strategies to overcome the gaps that occur into things that continue to be refined.

PLN NP memiliki program talent management sebagai usaha Perusahaan dalam usaha penjajaan resource baik secara kapasitas dan kapabilitas untuk menjalankan organisasi. Program tersebut secara terdiri dari talent Acquisition, talent Classification, talent Development, talent Mobility, talent Retention dan talent Evaluation. Pada tahap talent Acquisition dan talent Mobility, talent dipersiapkan melalui program kaderisasi. Kader akan melalui serangkaian penugasan dan evaluasi sebelum dinyatakan mampu untuk naik atau mengisi jabatan tertentu. Tahun 2023, ketersediaan kader di PLN NP berdasarkan level Manajemen Atas sebanyak 13, Manajemen Menengah 141, Manajemen Dasar 443, dan Supervisi Atas sebanyak 1326.

PLN NP has a talent management program as the Company's effort to prepare resources both in capacity and capability to run the organization. The program consists of talent Acquisition, talent Classification, talent Development, talent Mobility, talent Retention and talent Evaluation. At the talent Acquisition and talent Mobility stages, talents are prepared through a regeneration program. Cadres will go through a series of assignments and evaluations prior to being declared capable of moving up or filling certain positions. In 2023, the availability of cadres in PLN NP based on the level of Upper Management is 13, Middle Management is 141, Basic Management is 443, and Upper Supervisor is 1326.

Penguatan sistem SDM dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian target perusahaan melalui penyusunan kebijakan yang terintegrasi dengan holding dan monitoring realisasi biaya kepegawaian. PLN Academy telah menyusun berbagai program pelatihan dan pengembangan karyawan yang tujuan untuk meningkatkan kualitas dan kapabilitas karyawan sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Jenis program pelatihan meliputi Leadership, Pelatihan Teknis dan Non Teknis, Sertifikasi dan Workshop. Selama tahun 2023, realisasi biaya pengembangan SDM adalah sebesar Rp141 miliar dengan jumlah pelatihan 417 batch yang diikuti 11908 karyawan.

PLN NP strengthens the HR system in the context to support the achievement of the Company targets through the preparation of policies that are integrated with holding and monitoring the realization of personnel costs. PLN Academy has compiled various training and employee development programs with the purpose of improving the quality and capability of employees so as to ultimately increase the Company productivity. The types of training programs include Leadership, Technical and Non-Technical Training, Certification and Workshop. During 2023, the realization of HR development costs amounted to Rp141 billion with a total of 417 training batches participated by 11908 employees.

Pengembangan skill dan kompetensi karyawan masih terus ditingkatkan sejalan dengan pertumbuhan bisnis PLN NP, terkait dengan intellectual challenge, leadership, dan entrepreneurial challenge. Direksi optimis bahwa peningkatan pengetahuan dan keterampilan karyawan PLN NP akan dapat mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing SDM di era kompetisi regional seperti saat ini.

PLN NP continuously develops the employee skills and competencies in line with the Company's business growth, related to intellectual challenge, leadership, and entrepreneurial challenge. The Board of Directors is optimistic that increasing the knowledge and skills of PLN NP employees will be able to encourage the increased productivity and also the competitiveness of human resources in the current era of regional competition.

Guna memastikan bahwa seluruh karyawan berkontribusi secara maksimal terhadap kemajuan Perusahaan, PLN NP telah mengukur keterikatan karyawan terhadap Perusahaan secara berkala melalui Employee Engagement Survey tahun 2022 dengan skor 80.88 (Sangat Engage). Sedangkan hasil Survey Culture Health Index (CHI) tahun 2023, entropi budaya di PLN Nusantara Power berada pada tentang Minor Issues, yakni sebesar 19.90%.

To ensure that all employees contribute maximally to the Company's progress, PLN NP measured employee engagement with the Company periodically through the Employee Engagement Survey in 2022 with a score of 80.88 (Very Engaged). While the results of the Culture Health Index (CHI) Survey in 2023, cultural entropy at PLN Nusantara Power is in the Minor Issues range, which is 19.90%.

Sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko

Internal Control and Risk Management System

Kami menyadari sepenuhnya bahwa kinerja PLN NP terkait erat dengan pengelolaan risiko yang tidak lepas dari penerapan sistem pengendalian internal yang menjadi bagian dari tata kelola perusahaan. Pengendalian internal dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa Perusahaan dikelola dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi bisnis, memastikan kewandalan laporan keuangan, menjaga aset Perusahaan serta menjaga kepatuhan terhadap hukum dan peraturan atas kegiatan bisnis Perusahaan. Peran Audit Internal menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan pengendalian, pengawasan dan mitigasi atas risiko usaha. Bekerjasama dengan Komite Audit di bawah Dewan Komisaris, Audit Internal memiliki peran penting dalam memberikan evaluasi yang strategis bagi pengembangan PLN NP ke depan. Sedangkan sistem pengendalian internal merupakan suatu proses yang melibatkan seluruh komponen di dalam PLN NP mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, jajaran manajemen Perusahaan, sampai dengan segenap karyawan di seluruh tingkatan dan organisasi.

We are fully aware that PLN NP performance is closely related to risk management, which is inseparable from the implementation of an internal control system that is part of corporate governance. Internal control is designed to provide reasonable assurance that the Company is managed in order to achieve the objectives set, improve business effectiveness and efficiency, ensure the reliability of financial statements, safeguard the Company's assets and maintain compliance with laws and regulations on the Company's business activities. The role of Internal Audit is an integral part of the management of control, supervision and mitigation of business risks. In cooperation with the Audit Committee under the Board of Commissioners, Internal Audit has an important role in providing strategic evaluation for the future development of PLN NP. Meanwhile, the internal control system is a process that involves all components within PLN NP, starting from the Board of Commissioners, Board of Directors, Company management, to all employees at all levels and organizations.

Sistem pengendalian internal PLN NP mengacu pada prinsip-prinsip COSO (*Committee of Sponsoring Organizations*)-*Internal Control Integrated Framework*. Direksi PLN NP menerapkan sistem pengendalian internal melalui penerapan kebijakan dan prosedur perusahaan secara konsisten, baik terkait dengan kegiatan usaha perusahaan, manajemen risiko, penerapan strategis yang akurat, pembagian tugas dan pendelegasian wewenang yang jelas, serta kebijakan akuntansi yang memadai. Sedangkan Dewan Komisaris mengawasi kecukupan dan kewajaran dalam penyusunan laporan keuangan, pengelolaan risiko dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian yang dibantu oleh Komite Audit. PLN NP menerapkan proses audit independen oleh akuntan publik atas laporan keuangan agar independensinya terjaga dan terhindar dari benturan kepentingan. Laporan keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku 2023 memperoleh opini dari akuntan publik menjadi laporan dasar yang dapat mencerminkan kinerja PLN NP telah sesuai dengan standar pelaporan keuangan yang berlaku di Indonesia.

PLN NP's internal control system refers to the principles of COSO (Committee of Sponsoring Organizations)-Internal Control-Integrated Framework. PLN NP's Board of Directors implements the internal control system through consistent application of the Company policies and procedures, both related to the Company's business activities, risk management, accurate strategic planning, clear division of duties and delegation of authority, and adequate accounting policies. Meanwhile, the Board of Commissioners oversees the adequacy and fairness in the preparation of financial statements, risk management with due regard to prudential principles, assisted by the Audit Committee. PLN NP implements an independent audit process by a public accountant on financial statements to maintain independence and avoid conflicts of interest. The audited financial statements for the 2023 fiscal year obtained an opinion from a public accountant to be a basic report that can reflect the performance of PLN NP in accordance with applicable financial reporting standards in Indonesia.

Sejalan dengan itu, PLN NP berkomitmen mengimplementasikan manajemen risiko secara efektif dalam pelaksanaan setiap program kerja atau proyek di tingkat korporat maupun unit bisnis. Dengan wilayah operasi yang luas dan volume usaha yang terus meningkat, maka PLN NP menerapkan pola pengelolaan risiko secara terpadu untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan eksposur risiko di seluruh lini organisasi. Implementasi manajemen risiko sebagai salah satu pilar GCG dilakukan untuk memastikan dan memberi jaminan yang wajar bahwa dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, PLN NP telah melakukan identifikasi risiko, mengelola dan melakukan upaya mitigasi risiko sesuai dengan ISO 31000:2018 (Risk Management Guidelines).

In line with this, PLN NP is committed to implementing risk management effectively in the implementation of every work program or project at the corporate and business unit levels. With a large operating area and increasing business volume, PLN NP implements an integrated risk management pattern to identify, measure, monitor and control risk exposure in all lines of the organization. The implementation of risk management as one of the pillars of GCG is carried out to ensure and provide reasonable assurance that in achieving the set goals, PLN NP has identified, managed and mitigated risks according to ISO 31000:2018 (Risk Management Guidelines).

Tahun 2023, PLN NP menelaah kembali seluruh risiko utama yang tergambar dalam Profil Risiko tahun 2022. Beberapa risiko sudah menurun tingkat risikonya dan sesuai dengan risk appetite, namun demikian masih ada beberapa risiko yang belum sesuai dengan risk appetite sehingga muncul kembali dalam Profil Risiko tahun 2023. Di tahun 2023, risiko utama PT PLN NP berjumlah 15 risiko utama yang dapat menghambat pencapaian sasaran di tahun 2023. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan dengan Profil Risiko tahun 2022 yang berjumlah 13, hal ini dikarenakan ada pemecahan dan pendetailan risiko dari risiko tahun 2022.

In 2023, PLN NP reviewed all the main risks described in the 2022 Risk Profile. Some risks decreased their risk level and are in line with the risk appetite, however there are still some risks that are not in line with the risk appetite so that they reappear in the 2023 Risk Profile. In 2023, the main risks of PT PLN NP amounted to 15 main risks that could hinder the goals achievement in 2023. This number is more than the Risk Profile in 2022 which amounted to 13, caused by the breakdown and detailing of the 2023 risks.

Tahun 2023 telah dilakukan Assessment MLEIM PLN NP Semester 2. Tahun 2023 dengan kriteria PLN, dengan nilai validasi 4,29 di atas target Semester 2 sebesar 4,2. Assessment Maturity Level EIM pada unit pengelolaan PLN NP dilakukan satu semester sekali oleh assessor yang ditunjuk oleh bidang kinerja korporat. Penilaian maturity level EIM baik oleh perusahaan maupun unit akan dilaksanakan di akhir tahun 2023. Hasil assessment maturity level EIM menunjukan bahwa tingkat kematangan sistem manajemen risiko Perusahaan:

1. Budaya sadar risiko cukup melekat pada risk owner, hal ini ditandai dengan upaya dilakukannya pengelolaan risiko.
2. Manajemen risiko telah menjadi dasar dalam pengambilan keputusan.
3. Manajemen risiko telah menjadi bagian dari seluruh proses bisnis Perusahaan.

In 2023, PLN NP made assessment using PLN criteria, with a validation value of 4.29 above the Semester 2 target of 4.2. The EIM Maturity Level Assessment in units managed by PLN NP is carried out once a semester by assessors appointed by the corporate performance sector. The EIM maturity level assessment for both subsidiaries and units was assessed at the end of 2023. The results of the EIM maturity level assessment show the following maturity level of the Company's risk management system:

1. The risk awareness culture is quite inherent in the risk owner, this is indicated by efforts to manage risks.
2. Risk management has become the basis for decision making.
3. Risk management has become part of all Company business processes.

Dalam menghadapi arah perubahan bisnis yang penuh tantangan, PLN NP telah menerapkan kebijakan manajemen risiko terintegrasi melalui Peraturan Direksi tentang Penerapan GRC dan Risk Appetite Statement (RAS). Kebijakan GRC memuat ketentuan-ketentuan dalam proses pengambilan keputusan. PLN NP memiliki kerangka 'Three Lines Model' yaitu sistem pengendalian yang dirancang melalui pembagian peran dan tanggung jawab menjadi 3 (tiga) lini dalam organisasi dengan melibatkan pemilik proses yang menerapkan kebijakan manajemen risiko (lini pertama), unit risk & compliance yang mengawasi dan memantau proses penerapan risiko (second line), dan fungsi audit evaluasi efektivitas sistem pengendalian yang dilakukan oleh first line dan second line (third line).

In facing the challenging direction of business change, PLN NP has implemented an integrated risk management policy through the Board of Directors Regulation on GRC Implementation and Risk Appetite Statement (RAS). The GRC policy contains provisions in the decision making process. PLN NP has a Three Lines Model framework, which is a control system designed through the division of roles and responsibilities into 3 (three) lines in the organization by involving process owners who implement risk management policies (first line), risk & compliance units that review and monitor the risk implementation process (second line), and audit functions to evaluate the effectiveness of the control system carried out by the first line and second line (third line).

Komitmen Menjaga Kualitas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Berkelanjutan

Commitment to Maintaining the Quality of Sustainable Corporate Governance Implementation

Prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau saat ini lebih dikenal dengan istilah "Governance" dibentuk pada 5 (lima) prinsip yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran (fairness) serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Organ Perusahaan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi telah menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan Undang-undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perusahaan. Hubungan kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris maupun dengan Pemegang Saham/RUPS dilakukan berdasarkan mekanisme check and balances. Penerapan prinsip tata kelola dilakukan manfaat memdorong pengelolaan Perusahaan lebih akuntabel, menciptakan nilai tambah bagi Perusahaan dan mengembangkan citra positif Perusahaan dalam jangka panjang. Untuk itu, GCG perlu diimplementasikan sedemikian rupa agar menjadi penunjang dalam proses bisnis di Perusahaan.

The principles of good corporate governance or currently better known as "Governance" are based on 5 (five) principles which include the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness as well as compliance with the applicable laws and regulations. The Company's organs consisting of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners and the Board of Directors have carried out their respective functions, duties and responsibilities according to the Limited Liability Company Law and the Company's Articles of Association. Working relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as the Shareholders/GMS is based on a checks and balances mechanism. The implementation of governance principles is expected to encourage more accountable management of the Company, create added value for the Company and develop a positive image of the Company in the long term. For the reason, GCG needs to be implemented in such a way as to support the business processes in the Company.

PLN NP meyakini bahwa pencapaian kinerja yang baik dapat terus dipertahankan secara sustainable dalam jangka panjang dan berbagai prospek bisnis yang hendak direalisasi dapat terwujud, jika perusahaan dapat melaksanakan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dengan baik dan benar. PLN NP terus berupaya mengimplementasikan GCG sejalan dengan ketentuan dan best practices terus berkembang dimana prinsip-prinsip GCG dijiwai oleh empat pilar governance korporat yaitu perilaku beretika, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan yang merupakan pengembangan sesuai dengan perkembangan terkini dari nilai dasar Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Fairness. Penerapan GCG diharapkan dapat menekan biaya dan memperkuat sistem manajemen risiko dan kepatuhan terhadap hukum, mendorong pertumbuhan nilai Perusahaan yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan kepercayaan para investor dan pemangku kepentingan.

PLN NP believes that the achievement of good performance can be maintained sustainably in the long term and various business prospects to be achieved can be realized, if the Company can consistently implement GCG principles properly and correctly. PLN NP keeps striving to implement GCG in line with the provisions and best practices continuously to develop where the principles of GCG are according to the four pillars of corporate governance, namely: ethical behavior, accountability, transparency, and sustainability which are developments following the latest developments of the basic values of Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness. GCG implementation is expected to reduce costs and strengthen risk management systems and compliance with the law, encourage the values growth of the Company in line with the principles of sustainable development, as well as increase the trust by the investors and stakeholders.

Pengembangan GCG yang selaras dengan best practices secara berkesinambungan serta implementasi GCG secara konsisten tidak hanya dapat memberikan perlindungan yang memadai dan perlakuan yang adil kepada para seluruh pemegang saham, pengelola, dan pemangku kepentingan lainnya, namun lebih dari itu mendorong PLN NP untuk menciptakan nilai bagi perusahaan (shareholder value) secara maksimal. Dalam mendukung pengukuhan penerapan GCG, PLN NP berkomitmen melakukan pencegahan tindak korupsi untuk meminimalisir adanya risiko fraud dan permasalahan hukum yang dapat menimbulkan inefisiensi dalam pengelolaan Perusahaan serta menjaga reputasi Perusahaan dimata pelanggan, mitra bisnis ataupun Pemegang Saham. Untuk itu, PLN NP telah memiliki instrumen kebijakan anti korupsi yang dituangkan dalam Standar Etika Perusahaan

GCG development that is aligned with best practices on an ongoing basis and consistent implementation of GCG is not only able to provide adequate protection and fair treatment to all shareholders, managers, and other stakeholders, but moreover encourage PLN NP to create maximum the shareholders value. In supporting the strengthening of GCG implementation, PLN NP is committed to preventing corruption to minimize the risk of fraud and legal issues that may lead into inefficiencies in the management of the Company and maintain the Company's reputation for the customers, business partners or shareholders. For the reason, PLN NP has an anti-corruption policy instrument as outlined in the Corporate Ethics Standards and is derived as well as implemented through the Anti Fraud Policy Program, Conflict of Interest Policy, ISO 37001 2016 Anti-Bribery Management System (SMAP),

serta dituruskan dan dijalankan melalui Program Kebijakan Anti Fraud, Kebijakan Benturan Kepentingan, Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016, Pengendalian Gratifikasi dan memenuhi kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan telah disosialisasikan kepada seluruh Dewan Komisaris, Direksi dan insan seluruh PLN NP.

Gratification Control and compliance with the State Organizer's Asset Report (LHKPN) and also has been socialized to the entire Board of Commissioners, Directors and all PLN NP people.

Sejalan dengan perkembangan regulasi GCG di BUMN, maka PLN NP mulai mengadopsi ketentuan GCG baru antara lain merujuk pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Setiap tahun, PLN NP melakukan penilaian terhadap penerapan GCG di Perusahaan, namun dengan dicabutnya parameter penilaian GCG BUMN yang menjadi standar implementasi GCG di Perusahaan dan belum terbitnya parameter pengganti tersebut penilaian GCG dilakukan secara self-assessment untuk memantau tindak lanjut atas temuan penilaian GCG sebelumnya berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN dan memperoleh skor sebesar 94,88% dengan klasifikasi "Sangat Baik". Capaian ini menjadi yang tertinggi di lingkungan PLN Group. Sebagai bagian dari masyarakat global dan memastikan penerapan GCG, PLN NP secara berkala melakukan penilaian dan asesmen sesuai dengan standar ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) dan meraih skor sebesar 86,55. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tingkat kepatuhan PLN NP termasuk dalam predikat "Good". Dengan melakukan penilaian dan asesmen GCG sesuai dengan standar ACGS, PLN NP bersepaya untuk membangun reputasi yang kuat sebagai entitas bisnis yang berkualitas dan berintegritas, serta dapat bersaing dalam skala global dengan memenuhi standar tata kelola perusahaan yang tinggi. Secara berkelanjutan, PLN NP berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil assessment yang menjadi area of improvement GCG demi kualitas implementasi GCG yang lebih baik di masa mendatang.

In line with the development of GCG regulations in SOEs, PLN NP began to adopt new GCG provisions, among others referring to the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises. Every year, PLN NP conducts an assessment of GCG implementation in the Company, but with the revocation of the SOE GCG assessment parameters which became the standard for GCG implementation in the Company and the issuance of replacement parameters, the GCG assessment is carried out by self-assessment to monitor follow-up on the findings of the previous GCG assessment based on the Decree by the Secretary of the Ministry of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs and received a score of 94.88% with a classification of "Very Good". This achievement is the highest within the PLN Group. As part of the global community and to ensure GCG implementation, PLN NP periodically conducts assessments based on the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) standard and achieved a score of 86.55. It shows that PLN NP compliance level performance is in the "Good" predicate. By conducting GCG assessments and evaluation according to ACGS standards, PLN NP strives to build a strong reputation as a business entity with quality and integrity, and capable to compete on a global scale by meeting high standards of corporate governance. PLN NP is gradually and continuously committed to following up on any recommendations from the assessment results that become areas of improvement for better quality GCG implementation in the future.

Terkait dengan implementasi kebijakan WBS, PLN NP telah mengatur dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 004.K/021/DIR/2020 dan No. 0016/DK-PJB/2020, sebagai salah satu sarana bagi karyawan, pelanggan, mitra dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan adanya indikasi pelanggaran terkait dengan kode etik, kebijakan Perusahaan maupun potensi indikasi fraud. Komite WBS bertugas menerima laporan yang masuk dan melakukan review serta mengevaluasi kecukupan bukti pendukung atas laporan yang disampaikan untuk memastikan ada/tidaknya indikasi kerugian Perusahaan. Sepanjang tahun 2023, pengaduan yang masuk melalui ke Komite WBS (berjumlah 4 (empat) pengaduan. Pengaduan yang masuk ke tahap tindak lanjut berdasarkan hasil verifikasi sebanyak 2 (dua) laporan pelanggaran.

Regarding the implementation of the WBS policy, PLN NP has regulated in the Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors No. 004.K/021/DIR/2020 and No. 0016/DK-PJB/2020, as facility for the employees, customers, partners and other stakeholders to submit report in case of indications of violations related to the code of conducts, Company policies or potential fraud. The WBS Committee is tasked with receiving incoming reports, reviewing and analyzing the adequacy of supporting evidence for the reports submitted to ensure the presence/absence of indications of losses to the Company. Throughout 2023, there were 4 (four) complaints submitted to the WBS Committee. There were were 2 (two) reports of violations complaints continued to the follow-up stage based on the verification results.

Prospek Usaha Perusahaan
Company Business Prospects

Komposisi produksi listrik per jenis energi primer di Jawa, Madura, dan Bali diproyeksikan pada tahun 2030 akan menjadi 66,7% batubara, 17,1% gas (termasuk LNG), 4,6% tenaga air, 6,6% panas bumi, 0,2% BBM, dan 4,8% EBT lainnya. Porsi pembangkit EBT di Jawa, Madura, dan Bali akan meningkat dari 8,1% tahun 2021 menjadi 16,1% di tahun 2030. Dengan target pemerintah pembangunan energi terbarukan untuk memacu bauran energi nasional mencapai 23% pada tahun 2025, PLN NP menargetkan untuk menjadi operator solar PV yang terbesar di Indonesia, menjadi leader dalam biomass co-firing hingga 5% fuel mix, menjadi operator wind terbesar di Indonesia dan pemain terkemuka di bidang battery storage solution.

Composition of electricity production per type of primary energy in Java, Madura, and Bali projected in 2030 to be 66.7% coal, 17% gas (including LNG), 4.6% hydropower, 6.6% geothermal, 0.2% fuel, and 4.8% other NRE. The share of renewable energy generation in Java, Madura, and Bali will increase from 8.1% in 2021 to 16.1% in 2030. With the government target of renewable energy development to achieve a national energy mix towards 23% by 2025, PLN NP targets to become the largest solar PV operator in Indonesia, a leader in biomass co-firing up to 5% fuel mix, the largest wind operator in Indonesia and a leading player in battery storage solutions.

Dalam menjawab dan mengoptimalkan tantangan kedepan perlu dituangkan dalam program-program strategis arah dan koridor program kerja Perusahaan dengan mengacu pada peta lini bisnis, green RUPTL 2021-2030, pemenuhan bauran EBT 23% pada tahun 2025 dan mendukung komitmen Pemerintah menuju karbon netral di tahun 2060. Selain itu untuk mendukung monitoring terhadap Program Environmental, Social, dan Governance (ESG) maka setiap program dituangkan juga kesesuaiannya dengan program ESG.

1. Penguatan pembangkit eksisting dan Holding Subholding melalui program peningkatan keandalan dan efisiensi pembangkit: LTPSA, Overhaul (Coal Handling Facility, Balance of Plant), Remaining Life Assessment, Aging Management, dan Digitalisasi Aset Pembangkit (3-Product Responsibility).
2. Peningkatan persentase cofiring dan kajian konversi PLTU Batubara menuju 100% biomassa dalam rangka peningkatan Capacity Factor (CF) (2-Renewable Capacity atau GHG Emission).
3. Potensi Pengembangan usaha dari Green RUPTL 2021-2030 dan mendukung kebijakan Pemerintah terkait EBT.

In answering and optimizing future challenges, it is necessary to outline strategic programs in the direction and corridor of the Company's work program by referring to the business line map, green RUPTL 2021-2030, fulfilling the 23% NRE mix in 2025 and supporting the Government commitment to carbon neutral in 2060. In addition, to support monitoring of the Environmental, Social and Governance (ESG) Program, each program is also paired with the ESG program.

1. Strengthening of the existing power plants and Holding Sub-Holding through a program to improve power plant reliability and efficiency: LTPSA, Overhaul (Coal Handling Facility, Balance of Plant), Remaining Life Assessment, Aging Management, and Digitalization of Power Plant Assets (3-Product Responsibility).
2. Improving the cofiring percentage and studying on conversion of coal power plant into 100% biomass in order to increase Capacity Factor (CF) (2-Renewable Capacity or GHG Emission).
3. Potential business development from Green RUPTL 2021-2030 and support Government policies related to NRE.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

PLN NP menyadari bahwa dalam menjalankan bisnisnya, Perusahaan tetap dapat mengelola potensi dampak negatif terhadap lingkungan, masyarakat sekitar, mitra bisnis sejalan dengan pendekatan triple bottom line, yang meliputi profit, people dan planet. Untuk itu, PLN NP berkomitmen untuk menerapkan strategi keberlanjutan dalam setiap lini bisnis Perusahaan dengan menerapkan pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada tujuan berkelanjutan/TPB (Sustainable Development Goals/SDGs). PLN NP memandang dengan menerapkan strategi keberlanjutan dalam setiap lini bisnis dapat memberikan kepastian lebih kepada pemangku kepentingan Perusahaan. Komitmen PLN NP dalam strategi keberlanjutan dituangkan dengan menerapkan berbagai kebijakan strategis terkait keberlanjutan dan terus dievaluasi secara berkala untuk mengikuti perkembangan kondisi lingkungan dan bisnis PLN NP.

PLN NP ensures that in running its business, the Company can still manage potential negative impacts on the environment, surrounding communities, and business partners in line with the triple bottom line approach, which includes profit, people and planet. To that end, PLN NP is committed to implementing sustainability strategies in each of the Company's core businesses by implementing sustainable development that is oriented towards the Sustainable Development Goals (SDGs). PLN NP views that implementing sustainability strategies in each core business can provide more trust to the Company's stakeholders. PLN NP's commitment in sustainability strategy is proven by designing various strategic policies related to sustainability and continues to be evaluated regularly to keep up with the development of environmental conditions and business of PLN NP.

Melalui program CSR, PLN NP berkomitmen untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar, serta berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan di Indonesia dalam pemenuhan agenda pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang telah dicanangkan oleh Pemerintah. Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, PLN NP melaksanakan program pengembangan masyarakat (*community development*) bagi masyarakat di sekitar unit kerja perusahaan.

Through the CSR program, PLN NP's committed to bringing positive impact on the community and the surrounding environment, as well as contributing to sustainable development in Indonesia in fulfilling the Sustainable Development Goals (SDGs) launched by the Government. As the corporate social responsibility, PLN NP implements community development programs for communities around the Company's work units.

Alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp 65,593 miliar yang terbagi pada 6 tipologi: yaitu pemberdayaan, pengembangan kapasitas, infrastruktur, bantuan sosial, kejadian luar biasa dan CSV. CSV merupakan tipologi tambahan yang mengklasifikasikan sebuah program yang memiliki *alignment* dengan bisnis perusahaan. Realisasi dana CSR tahun 2022 mencapai Rp51,563 Miliar atau 78% dari RKAP 2022 sebesar Rp65,593 Miliar, yang terbagi menjadi 6 bidang, yaitu (1) pemberdayaan, (2) pengembangan kapasitas, (3) infrastruktur, (4) bantuan sosial, (5) kejadian luar biasa dan CSV. Realisasi dana CSR 2022 didominasi oleh bidang pengembangan kapasitas sebesar 34,40%; diikuti dengan CSR bidang pemberdayaan sebesar 27,89%, CSR bidang infrastruktur sebesar 15,76%, bantuan sosial sebesar 9,49%, implementasi CSV sebesar 8,27% dan kejadian luar biasa sebesar 4,03%.

2022 budget allocation amounted to Rp65,593 billion which is divided into 6 typologies, namely empowerment, capacity building, infrastructure, social assistance, extraordinary events and CSV. CSV is an additional typology that classifies a program that has alignment with the Company business. The realization of CSR funds in 2022 reached Rp51,563 billion or 78% of the 2022 RKAP of Rp65,593 billion, which is divided into 6 fields, namely (1) empowerment, (2) capacity building, (3) infrastructure, (4) social assistance, (5) extraordinary events and CSV. The realization of CSR funds in 2022 was dominated by the capacity building sector at 34.40%, followed by CSR in the empowerment sector at 27.89%, CSR in the infrastructure sector at 15.76%, social assistance at 9.49%, CSV implementation at 8.27% and extraordinary events at 4.03%.

Selain itu, PLN NP berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan merupakan wujud pengelolaan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan operasional sebagai penyedia tenaga listrik. Kebijakan Sistem Manajemen PLN NP mengatur bahwa penggunaan sumber daya energi dan sumber daya alam dalam kegiatan operasional dan pemeliharaan Unit pembangkit dilakukan secara efisien dengan mematuhi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta ISO 14001 tentang Sistem Manajemen Lingkungan. PLN NP berhasil menanamkan budaya pengelolaan lingkungan dan bertanggung jawab terhadap masyarakat melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Dalam pengelolaan kinerja lingkungan, PLN NP berhasil meraih penghargaan meliputi 6 PROPER Emas, juara 2 video PROPER Emas 2022, 7 PROPER Hijau dan 49 PROPER Biru. Raihan prestasi ini menjadikan PLN NP sebagai perusahaan pembangkit listrik pertama yang berhasil meraih penghargaan PROPER selama 7 tahun berturut-turut sejak 2017. Pencapaian ini merupakan wujud nyata dari PLN NP untuk memperkuat komitmen dalam implementasi *Environmental Social Governance* (ESG) dan *Sustainability Development Goals* (SDGs) demi keberlanjutan bisnis perusahaan.

In addition, PLN NP contributes to the environmental conservation as a form of managing the impacts arising from operational activities as a provider of electricity. PLN NP has the Management System policy that stipulates the use of energy resources and natural resources in operational activities and maintenance of generating units is carried out efficiently by complying with Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and ISO 14001 concerning Environmental Management Systems. PLN NP succeeded in instilling a culture of environmental management and being responsible for the community through the Social and Environmental Responsibility (CSR) program. In managing environmental performance, PLN NP has won awards including 6 Gold PROPERs, 2nd place in the 2022 Gold PROPER video, 7 Green PROPERs and 49 Blue PROPERs. This achievement makes PLN NP the first power generation company to win the PROPER award for 7 consecutive years since 2017. This achievement is a tangible manifestation of PLN NP to strengthen its commitment in implementing Environmental Social Governance (ESG) and Sustainability Development Goals (SDGs) for business sustainability of the Company.

Komitmen dan konsistensi PLN NP dalam penerapan CSR telah diakui secara nasional maupun internasional, diantaranya dengan diperolehnya banyak penghargaan CSR, antara lain *Asia Sustainability Reporting Rating* (ASRRAT) 2022 meraih Predikat Platinum. Capaian predikat Platinum di ASRRAT 2022, menunjukkan konsistensi kinerja PLN NP untuk menerapkan prinsip keberlanjutan serta transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam setiap proses bisnisnya.

PLN NP's commitment and consistency in the CSR implementation has been recognized nationally and internationally, including by obtaining a lot of CSR awards, including the Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2022 Platinum Predicate. The achievement of the Platinum predicate in ASRRAT 2022, shows the consistency of PLN NP performance in applying the principles of sustainability and corporate transparency and accountability in every business process.

Perubahan Komposisi Direksi

Changes in the Composition of the Board of Directors

Selama tahun 2023, terdapat perubahan komposisi anggota Direksi. Berdasarkan keputusan RUPS Sirkuler tanggal 3 Agustus 2023, mengangkat dan menetapkan Sdr. Komang Permita menggantikan Sdr. M. Yusy Nonal A. sebagai Direktur Operasi Pembangkit Gas. Dengan demikian komposisi Direksi adalah sebagai berikut:

During 2023, there were changes in the composition of the Board of Directors. Based on the resolution of the Circular GMS dated August 3, 2023, Mr. Komang Permita was selected and appointed to replace Mr. M. Yusy Nonal A. as Director of Gas Power Plant Operations. Therefore, the composition of the Board of Directors is as follows:

Susunan Direksi PLN NP Periode 1 Januari 2023 – 3 Agustus 2023

PLN NP Board of Directors Composition for the Period of January 1, 2023 – August 3, 2023

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Ruly Firmansyah	Direktur Utama President Director	Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pengangkatan Anggota Direksi PT PJB tanggal 21 September 2023. Resolution of the Circular GMS on the Appointment of Members of the Board of Directors of PT PJB dated September 21, 2023.
Muhammad Reza	Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga Director of Business Development and Commerce	Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pengangkatan Anggota Direksi PT PJB tanggal 21 September 2023. Resolution of the Circular GMS on the Appointment of Members of the Board of Directors of PT PJB dated September 21, 2023.
M. Yusy Nonal A.[1]	Direktur Operasi Pembangkit Gas Director of Gas Power Plant Operations	Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris PT PJB tanggal 21 April 2021. Resolution of the Circular GMS on the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners of PT PJB dated April 21, 2021.
Rachmawan Indarto	Direktur Operasi Pembangkit Batu Bara Director of Coal Power Plant Operations	Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi tanggal 15 Juli 2020 jo. Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi tanggal 12 November 2020. Resolution of the Circular GMS on the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors dated July 15, 2020 jo. Resolution of the Circular GMS on the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors dated November 12, 2020.
Dwi Hartono	Direktur Keuangan Director of Finance	Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pengangkatan Anggota Direksi PT PJB tanggal 21 September 2023. Resolution of the Circular GMS on the Appointment of Members of the Board of Directors of PT PJB dated September 21, 2023.
Kanyasan Aji	Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi Director of Human Capital Management and Administration	Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi tanggal 12 Juni 2020 jo. Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi tanggal 12 November 2020. Resolution of the Circular GMS on the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors dated June 12, 2020 jo. Resolution of the Circular GMS on the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors dated November 12, 2020.

[1] RUPS Sirkuler tanggal 3 Agustus 2023, memberhentikan dengan hormat Sdr. M. Yusy Nonal A. sebagai Direktur Operasi Pembangkit Gas, mengangkat dan menetapkan Sdr. Komang Permita sebagai Direktur Operasi Pembangkit Gas.

[1] GMS Circular dated August 3, 2023, respectfully dismissed Mr. M. Yusy Nonal A. as Director of Gas Power Plant Operations, appointed and appointed Mr. Komang Permita as Director of Gas Power Plant Operations.

Susunan Direksi PLN NP Periode 3 Agustus – 31 Desember 2023

PLN NP Board of Directors Composition Period August 3 - December 31, 2023

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Suly Firmansyah	Direktur Utama President Director	Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pengangkatan Anggota Direksi PT PLN tanggal 21 September 2023. Resolution of the Circular GMS on the Appointment of Members of the Board of Directors of PT PLN dated September 21, 2023.
Muhamad Reza	Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga Director of Business Development and Commerce	Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pengangkatan Anggota Direksi PT PLN tanggal 21 September 2023. Resolution of the Circular GMS on the Appointment of Members of the Board of Directors of PT PLN dated September 21, 2023.
Rachmanow Indarto	Direktur Operasi Pembangkit Batu Bara Director of Coal Power Plant Operations	Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi tanggal 15 Juli 2020 jo. Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi tanggal 13 November 2020. Resolution of the Circular GMS on the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors dated July 15, 2020 jo. Resolution of the Circular GMS on the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors dated November 13, 2020.
Dwi Hartono	Direktur Keuangan Director of Finance	Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pengangkatan Anggota Direksi PT PLN tanggal 21 September 2023. Resolution of the Circular GMS on the Appointment of Members of the Board of Directors of PT PLN dated September 21, 2023.
Kanyaman Ali	Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi Director of Human Capital Management and Administration	Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi tanggal 12 Juni 2020 jo. Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi tanggal 12 November 2020. Resolution of the Circular GMS on the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors dated June 12, 2020 jo. Resolution of the Circular GMS on the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors dated November 12, 2020.
Komang Pernita*	Direktur Operasi Pembangkit Gas Director of Gas Power Plant Operations	Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi tanggal 3 Agustus 2023. Resolution of the Circular GMS on the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors dated August 3, 2023.

* RUPS Sirkuler tanggal 3 Agustus 2023 memberhentikan dengan hormat Sdr. M. Yusuf Nouval A. selaku Direktur Operasi Pembangkit Gas, menggantikan dan mengangkat Sdr. Komang Pernita selaku Direktur Operasi Pembangkit Gas.

* GMS Circular dated August 3, 2023, respectfully dismissed Mr. M. Yusuf Nouval A. as Director of Gas Power Plant Operations, appointed and appointed Mr. Komang Pernita as Director of Gas Power Plant Operations.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Sdr. M. Yusuf Nouval A. atas dedikasi dan kontribusi luar biasa selama menjabat sebagai Direktur di PLN NP. Kerja kerasnya telah membawa PLN NP meraih prestasi yang gemilang. Kami juga mengucapkan selamat datang di PLN NP, kepada Sdr. Komang Pernita. Kami sangat bersemangat untuk bekerja bersama dengan Saudara dalam memimpin PLN NP ke masa depan. Dengan pengalaman yang dimiliki, kami yakin PLN NP akan mencapai lebih banyak pencapaian dan kesuksesan, serta membawa manfaat besar bagi Perusahaan dan seluruh pemangku kepentingan. Kami berharap bahwa dengan sinergi antar Direksi, kami dapat menghadapi tantangan masa depan, khususnya dalam mengembangkan portofolio bisnis yang berfokus pada energi baru terbarukan. Semoga kolaborasi ini tidak hanya memperkuat posisi PLN NP di pasar, tetapi juga memberikan dampak positif yang signifikan bagi industri energi dan masyarakat secara luas.

Setelah periode Laporan Tahunan ini berakhir hingga disahkannya laporan ini, tidak terdapat pergantian dan perubahan susunan Direksi Perusahaan.

We would like to thank Mr. M. Yusuf Nouval A. for his dedication and outstanding contribution during his tenure as Director at PLN NP. His hard work has brought PLN NP to great achievements. We would also like to welcome Ms. Komang Pernita to PLN NP. We are excited to work together with you in leading PLN NP into the future. With your experience, we are confident that PLN NP is going to achieve more accomplishments and successes, and bring great benefits to the Company and all stakeholders. We hope that with the synergy among the Boards of Directors, we are able to face the challenges ahead, particularly in developing a business portfolio that focuses on new renewable energy. May this collaboration not only strengthen PLN NP's position in the market, but also bring significant positive impacts to the energy industry and society at large.

After the period of this Annual Report ended until the ratification of this report, there were no changes and alterations in the composition of the Company's Board of Directors.

Apresiasi
Letter of Appreciation

Kami mengakhiri laporan tahunan ini dengan penuh rasa syukur atas pencapaian yang telah diraih sepanjang tahun 2023. Terima kasih kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris atas arahan yang diberikan dan kerjasama yang telah terjalin selama ini. Tidak lupa penghargaan dan ucapan terima kasih kepada mitra bisnis dan segenap pemangku kepentingan lainnya atas kepercayaan, kontribusi dan dukungan yang telah diberikan. Dan kepada seluruh karyawan yang terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan sehingga PLN NP dapat memberikan kontribusi positif bagi seluruh pemangku kepentingan. Kami berharap dapat terus menghadirkan value creation, mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan, serta menjawab tantangan global dalam menyediakan akses energi yang terjangkau dan ramah lingkungan bagi kepentingan masyarakat hingga pelosok negeri, pengembangan portofolio bisnis yang lebih luas, termasuk di bidang energi baru dan terbarukan.

We end this annual report with gratitude for the achievements reached throughout 2023. Thank you to the Shareholders and Board of Commissioners for the direction given and the cooperation that has been established so far. Not to forget, the appreciation and gratitude for business partners and all other stakeholders for their trust, contribution and support. And to the entire employees who continue to innovate and adapt to the changes so that PLN NP is able to make a positive contribution to all stakeholders. We expect to keep presenting value creation, encouraging sustainable growth, and answering global challenges in providing access to affordable and environmentally friendly energy for the benefit of the community to remote areas of the country, developing a broader business portfolio, especially in the field of new and renewable energy.

Surabaya, 31 Mei 2024
Surabaya, May 31, 2024

Atas Nama Direksi
On Behalf of the Board of Directors

Ruly Firmansyah

Direktur Utama
President Director

Surat Pernyataan Dewan Komisaris Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2023 PT PLN Nusantara Power

Statement from Board of Commissioners on Accountability Over Annual Report 2023 PT PLN Nusantara Power

Laporan Tahunan 2023 PT PLN Nusantara Power menyajikan informasi mengenai Kinerja Perusahaan, penerapan Tata Kelola Perusahaan, pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan informasi lainnya yang relevan dan signifikan bagi para pemangku kepentingan.

Kami, segenap Dewan Komisaris PT PLN Nusantara Power yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan 2023 PT PLN Nusantara Power.

PT PLN Nusantara Power Annual Report 2023 presents information on the Company's performance, implementation of corporate governance, implementation of corporate social responsibility, Financial Statements for the period ended on December 31, 2023, and other information relevant and significant for the stakeholders.

We, the undersigned, the entire Board of Commissioners of PT PLN Nusantara Power, declare full accountability for the accuracy of the content of PT PLN Nusantara Power Annual Report 2023.

Surabaya, 31 Mei 2024
Surabaya, May 31, 2024

Evy Haryadi
Komisaris Utama
President Commissioner

Ida Nuryatin Finahari
Komisaris
Commissioner

Kenedy
Komisaris
Commissioner

Hendra Iswahyudi
Komisaris
Commissioner

Emir Kresna Wardana
Komisaris
Commissioner

Bagus Puruhito
Komisaris
Commissioner

Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2023 PT PLN Nusantara Power

Statement from Board of Commissioners on Accountability Over Annual Report 2023 PT PLN Nusantara Power

Laporan Tahunan 2023 PT PLN Nusantara Power menyajikan informasi mengenai Kinerja Perusahaan, penerapan Tata Kelola Perusahaan, pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan informasi lainnya yang relevan dan signifikan bagi para pemangku kepentingan.

Kami, segenap Direksi PT PLN Nusantara Power yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan 2023 PT PLN Nusantara Power.

PT PLN Nusantara Power Annual Report 2023 presents information on the Company's performance, implementation of corporate governance, implementation of corporate social responsibility, Financial Statements for the period ended on December 31, 2023, and other information relevant and significant for the stakeholders.

We, the undersigned, the entire Board of Directors of PT PLN Nusantara Power, declare full accountability for the accuracy of the content of PT PLN Nusantara Power Annual Report 2023.

Surabaya, 31 Mei 2024
Surabaya, May 31, 2024

Ruly Firmansyah
Direktur Utama
President Director

Rachmanoe Indarto
Direktur Operasi Pembangkit Batubara
Director of Operation Coal Power Plant

Komang Parmita
Direktur Operasi Pembangkit Gas
Director of Operation Gas Power Plant

Muhamad Reza
Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga
Director of Business Development and Commerce

Karyawan Aji
Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi
Director of Human Capital Management and Administration

Dwi Hartono
Direktur Keuangan
Director of Finance

Pernyataan Direksi Tentang Kecukupan Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Manajemen Risiko PT PLN Nusantara Power

Statement of the Board of Directors Regarding the Adequacy of the Internal Control System and Risk Management System of PT PLN Nusantara Power

Atas nama Direksi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama: Ruly Firmansyah
   Jabatan: Direktur Utama
   Alamat Kantor: Jl. TB Simatupang Kav 18 – Jakarta Selatan
   Alamat Domisili: Jl. Legoso Raya No.66, Tangerang Selatan

2. Nama: Dwi Hartono
   Jabatan: Direktur Keuangan
   Alamat Kantor: Jl. TB Simatupang Kav 18 – Jakarta Selatan
   Alamat Domisili: Jl. P Tanabata Blok A2 No 13, Bekasi

Menyatakan bahwa:

Sehubungan dengan tanggung jawab terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian PT PLN Nusantara Power dan Entitas Anak Perusahaan untuk tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2023, yang ditandatangani pada tanggal 5 April 2024, dalam kaitannya dengan integritas laporan keuangan telah disusun dengan memadikan penerapan dan kecukupan sistem pengendalian internal dan sistem manajemen risiko Perusahaan secara efektif dan efisien pada seluruh aspek yang material.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

On behalf of the Board of Directors, we the undersigned:

1. Name: Ruly Firmansyah
   Position: Direktur Utama
   Office Address: Jl. TB Simatupang Kav 18 – Jakarta Selatan
   Address of Domicile: Jl. Legoso Raya No.66, Tangerang Selatan

2. Name: Dwi Hartono
   Position: Director of Finance
   Office Address: Jl. TB Simatupang Kav 18 – Jakarta Selatan
   Address of Domicile: Jl. P Tanabata Blok A2 No 13, Bekasi

Declare that:

The statement of The Board of Directors regarding the responsibility for the Consolidated Financial Statements of PT PLN Nusantara Power and Subsidiaries as at December 31, 2022 and December 31, 2023, which we signed on April 5, 2024, in relation to the integrity of the financial statements has been prepared by ensuring the implementation and adequacy of the Company's internal control system and risk management system effectively and efficiently in all material aspects.

The declaration has been made truthfully.

Atas Nama Direksi
On Behalf of the Board of Directors

Surabaya, 31 Mei 2024
Surabaya, May 31, 2024

Ruly Firmansyah
Direktur Utama
President Director

Dwi Hartono
Direktur Keuangan
Director of Finance

Profil Perusahaan

Company Profile

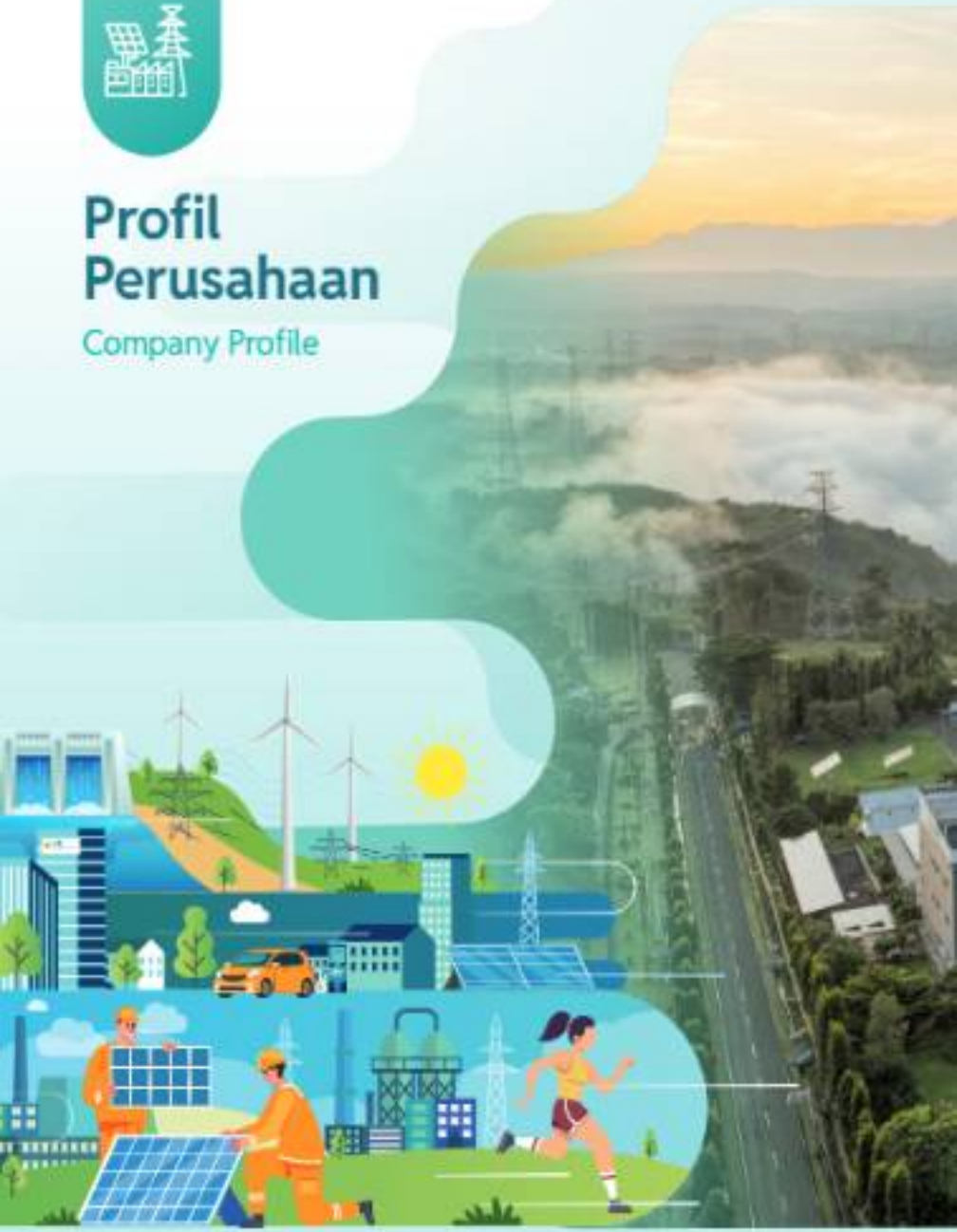

Identitas Perusahaan
Company Identity

PLN Nusantara Power

Manfaatkan momentum dan peluang transformasi Perusahaan menjadi *Subholding* PLN Persero, seiring dengan proses transisi energi dan berkontribusi pada rantai pasok global.

Leveraging the momentum and opportunity of the Company transformation into a PLN Persero Sub-holding, in line with the energy transition process and contributing to the global supply chain.

Nama Perusahaan PT PLN Nusantara Power	**Company Name** PT PLN Nusantara Power
Tanggal Pendirian 3 Oktober 1995	**Date of Establishment** October 3, 1995
Bidang Usaha 1. Pembangkitan tenaga listrik; 2. Konstruksi bangunan elektrikal; 3. Pemasangan peralatan tenaga listrikan; 4. Pemeliharaan dan/atau pengoperasian peralatan tenaga listrikan; 5. Perdagangan dan/atau kegiatan usaha pendukung dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahan, termasuk memberikan penugasan kepada Anak Perusahaan Tertentu.	**Business Line** 1. Electric Power Plant; 2. Electrical Building Construction; 3. Installation of electricity equipment; 4. Maintenance and/or operation of electrical equipment; 5. Trading and/or supporting business activities to optimize the utilization of resources owned by the Company, including delegating assignments to the Subsidiaries.
Bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas	**Corporation** Limited Company
Status Perusahaan *Subholding* PT PLN (Persero)	**Company Status** Sub holding of PT PLN (Persero)
Dasar Hukum Pendirian 1. Akta Pendirian PT PLN Pembangkitan Jawa-Bali I, No. 16 tanggal 3 Oktober 1995. 2. Akta Perubahan Nama menjadi PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa Bali, oleh Notaris Henny Singgih dengan Akta No. 9 tanggal 3 Agustus 2000. 3. Akta Perubahan Nama menjadi PT Pembangkitan Jawa-Bali, oleh Notaris Henny Singgih dengan Akta No. 24 tanggal 20 Februari 2001. 4. Akta Perubahan Nama menjadi PT PLN Nusantara Power oleh Notaris Muhammad Hanafi, SH dengan Akta No. 70 tanggal 30 Desember 2020.	**Legal Basis of Establishment** 1. Deed of Establishment of PT PLN Pembangkitan Jawa-Bali I, No. 16 on October 10, 1995. 2. Deed of Name Change to PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa Bali, by Notary Henny Singgih with Deed No. 9 on August 3, 2000. 3. Deed of Name Change to PT Pembangkitan Jawa-Bali, by Notary Henny Singgih with Deed No. 24 on February 20, 2001. 4. Deed of Name Change to PT PLN Nusantara Power by Notary Muhammad Hanafi, SH with Deed No. 70 on December 30, 2020.
Pemegang Saham 1. PT PLN (Persero) sebanyak 1 Saham Seri 1 dan 308.510.499.999 Saham Seri 2 (99,99%) dan 2. Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) sebanyak 1 Saham Seri 2 (0,01%)	**Shareholders** 1. PT PLN (Persero) has 1 Series 1 Share and 308.510.499.999 Series 2 Shares (99,99%) and 2. Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) 1 Series 2 Share (0,01%).
Modal Dasar Rp6.000.996.000.000	**Authorized Capital** Rp6.000.996.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Rp154.255.249.000.000	**Issued and Fully Deposited Capital** Rp154.255.249.000.000
Jumlah Karyawan 4.995 karyawan per 31 Desember 2020.	**Number of Employees** 4,995 employees as of December 31, 2020.

Kantor Pusat
Jl. Ketintang Baru, No.11, Surabaya 60231 – Indonesia
(+62-31) 828 2980 (Hunting)
(+62-31) 828 2983
info@plnnusantarapower.co.id

Headquarters
Jl. Ketintang Baru, No.11, Surabaya 60231 – Indonesia
(+62-31) 828 2980 (Hunting)
(+62-31) 828 2983
info@plnnusantarapower.co.id

Kantor Strategis Jakarta
Gedung 18 Office Park Lantai 3
Jl. TB Simatupang Kav 18 – Jakarta Selatan
-
perwakilan@plnnusantarapower.co.id

Jakarta Strategic Office
Gedung 18 Office Park 3rd Floor
Jl. TB Simatupang Kav 18 – Jakarta Selatan
-
perwakilan@plnnusantarapower.co.id

Contact Center
(+62-31) 828 2980 (Hunting)
(+62-31) 828 2983
www.facebook.com/plnnusantarapower
@pln_np
@plnnusantarapower

Contact Center
(+62-31) 828 2980 (Hunting)
(+62-31) 828 2983
www.facebook.com/plnnusantarapower
@pln_np
@plnnusantarapower

Website
www.plnnusantarapower.co.id

Website
www.plnnusantarapower.co.id

Wilayah Kerja
- 15 (lima belas) Unit Pembangkitan (UP);
- 5 (lima) Unit Pelaksana Pembangkitan (UPK);
- 13 (dua belas) Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan (UPDK);
- 1 (satu) Unit Pembangkit Baru (PLTU Cirebon);
- 6 (enam) Unit PLTU dan 1 (satu) Unit PLTD;
- 7 (tujuh) Unit Bisnis Jasa Operasi dan Pemeliharaan;
- 1 (satu) Unit Maintenance, Repair & Overhaul (MRO);
- 3 (tiga) Unit Pelaksana Proyek;
- kepemilikan saham pada 9 (sembilan) Unit Pembangkit Independent Power Producer (IPP); dan
- kepemilikan saham pada Perusahaan Operasi dan Pemeliharaan untuk mengelola 1 (satu) unit pembangkit PLN.

Working Area
- 15 (fifteen) Existing Generation Units (GU);
- 5 (five) Generation Operating Unit (GOU);
- 13 (twelve) Generation Control Unit (GCU);
- 1 (one) Research Generating Unit (Cirebon PP);
- 6 (six) units of CTPP and 1 (one) unit of DPP;
- 7 (seven) Operation and Maintenance Service Business Units (OMSBU);
- 1 (one) Maintenance, Repair & Overhaul (MRO) unit;
- 3 (ten) Project implementation Units;
- Share ownership in 9 (nine) Independent Power Producer (IPP) Generation Units; and
- Share ownership in the Operation and Maintenance Company to manage 1 (one) PLN generation unit.

Anak Perusahaan
- PT PLN Nusantara Power Services (PLN NPS);
- PT PLN Nusantara Power Construction (PLN NPC);
- PT PLN Nusantara Renewables (PLN NR);
- PT Prima Layanan Nagya Solu Cadang (PLNSC);
- PT Navigat Innovative Indonesia (NII).

Subsidiaries
- PT PLN Nusantara Power Services (PLN NPS);
- PT PLN Nusantara Power Construction (PLN NPC);
- PT PLN Nusantara Renewables (PLN NR);
- PT Prima Layanan Nagya Solu Cadang (PLNSC);
- PT Navigat Innovative Indonesia (NII).

Riwayat Singkat Perusahaan
Brief Company History

Kontribusi PLN NP di industri pembangkit listrik nasional semakin kuat pasca transformasi dan penetapan Perusahaan menjadi Subholding PLN.

PLN NP's contribution to the national power plant industry is getting stronger after the transformation and establishment of the Company into a PLN Sub holding.

Sekilas Pendirian Perusahaan
Company Establishment at A Glance

PT PLN Nusantara Power selanjutnya disingkat "PLN NP atau Perusahaan", memiliki sejarah yang cukup panjang di dunia pembangkit listrik nasional. Sejarah berdirinya PLN NP tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang PT PLN (Persero) yang selanjutnya disingkat "PLN". Pendirian Perusahaan berawal dari restrukturisasi yang dilakukan PLN pada tahun 1961, dengan melakukan pemisahan unit sesuai fungsinya, yaitu Unit PLN Distribusi dan Unit PLN Pembangkitan serta Unit PLN Penyaluran. Pada tanggal 3 Oktober 1995, PLN melakukan restrukturisasi khusus bidang pembangkitan dengan mendirikan 2 (dua) Anak Perusahaan, yaitu PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali I yang berkantor pusat di Jakarta (sekarang PT PLN Indonesia Power) dan PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II (sekarang PT PLN Nusantara Power) yang berkantor pusat di Surabaya.

Pendirian Perusahaan telah disahkan notaris yaitu berdasarkan Akta Notaris No. 16 tanggal 3 Oktober 1995, dari Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-10495-HT.01.01.Th.95 tanggal 3 Oktober 1995 serta diumumkan dalam Berita Negara No. 9299 tanggal 10 November 1995, Tambahan No. 90.

Anggaran Dasar Perusahaan terakhir diubah berdasarkan Akta Notaris No. 70 tanggal 30 Desember 2022, dari Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta, untuk mengubah nama Perusahaan yang semula bernama PT Pembangkitan Jawa-Bali menjadi PT PLN Nusantara Power. Akta perubahan ini telah dilaporkan dan disetujui di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-0000005.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 1 Januari 2023.

PT PLN Nusantara Power, hereinafter abbreviated as "PLN NP or the Company", has a long history in the world of national power plants. The history of the establishment of PLN NP cannot be separated from the long history of PT PLN (Persero), hereinafter abbreviated as "PLN". The establishment of the Company began with the restructuring of PLN in 1961 by separating units according to their functions, namely the PLN Distribution Unit and the PLN Electric Power Generator Unit, as well as the PLN Distribution Unit. On October 3, 1995, PLN restructured particularly in the electric power generation sector by establishing 2 (two) Subsidiaries, namely PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali I headquartered in Jakarta (now PT PLN Indonesia Power) and PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II (now PT PLN Nusantara Power) headquartered in Surabaya.

The Company establishment was legalized by the notary, namely based on Notarial Deed No. 16 dated October 3, 1995, of Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notary in Jakarta. This deed of establishment was ratified by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in Decree No. C2-10495-HT.01.01.Th.95 dated October 3, 1995, and announced in the State Gazette No.9299 dated November 10, 1995, Supplement No. 90.

The Company's Articles of Association were last amended based on Notarial Deed No. 70 dated December 30, 2022, from Muhammad Hanafi, S.H., Notary in Jakarta, to change the Company's name from PT Pembangkitan Jawa-Bali to PT PLN Nusantara Power. This amendment deed was received and recorded at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with its Decree No. AHU-0000005.AH.01.02.TAHUN 2023 dated January 1, 2023.

Keterangan Perubahan Nama Perusahaan
Description of Change in Company Name

Sejak didirikan pada tanggal Oktober 1995, Perusahaan telah merubah namanya sebanyak 3 (tiga) kali.

Since its establishment in October 1995, the Company had changed its name 3 (three) times.

Jejak Langkah Perusahaan
Company's Milestones

1995
- Berdiri dengan nama PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali I yang memiliki aset 3 unit pembangkitan dengan total kapasitas 5,048 MW.
Established under the name PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali I which has assets of 3 electric power generation units with a total capacity of 5,048 MW.
- Berbasis Computerized Maintenance Management System (CMMS).
Based on Computerized Maintenance Management System (CMMS).

Awal Mula
Beginning
1995

Stable Growth
2000 - 2010

2000
Perubahan nama menjadi PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa Bali.
The name changed to PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa Bali.

2001
- Perubahan nama menjadi PT Pembangkitan Jawa - Bali.
The name changed to PT Pembangkitan Jawa - Bali.
- Pendirian anak perusahaan PT PJB Services dengan bidang usaha O&M pembangkit.
Established a subsidiary, PT PJB Services, with the business field of power plant O&M.

2002
Penyertaan saham di PT Rekadaya Elektrika, bergerak di bidang jasa Engineering, Procurement and Construction (EPC) pembangkit listrik.
Share investment in PT Rekadaya Elektrika, engaged in Engineering, Procurement and Construction (EPC) services for power plants.

2004-2006
Penyertaan saham untuk pengembangan pembangkit di anak perusahaan.
Share investment for power plant development in a number of companies.

2009
Pendirian Unit Bisnis Jasa O&M (UBJOM).
Established O&M Service Business Unit (OMSBU).

Operational Excellence
2011 - 2015

2012
Implementasi Manajemen Aset PAS 55 pertama di Asia Pacific.
Implementation of the first PAS 55 Asset Management in Asia Pacific.

2013
Raih sertifikasi PAS 55 di seluruh unit pembangkit.
Achieved PAS 55 certification in all generating units.

2014
Integrasi sistem manajemen K3L (HSE) dan kinerja excellen tertinggi di Indonesia.
Integration of the K3L (HSE) management system and highest performance excellence in Indonesia.

2015
Pendirian anak perusahaan, PT K3L Indonesia.
Establishment of subsidiary, PT K3L Indonesia.

2020

- Co-Use Commercialization of Co-firing in 3 Pembangkit (PLTU Pelabuhan 1-3, PLTU Belitung dan PLTU Paiton)
- Paiton PT IUE Investindo, PT Pembangkit Jawa Bali Investasi (Dana dari PT IUE) Master Solar Energy
- Co-Use Commercialization of Co-firing in 3 Plants (Paiton 1-2 CFPP, Belitung CFPP and Paiton CFPP)
- Establishment of PT IUE Investindo, PT Pembangkit Jawa Bali Investasi (Dana and PT IUE) Master Solar Energy.

2021

- Pelunasan IUE Access
- COD PLTGU Muara Karang Blok 3
- Financial Close Pembangunan Proyek PLTU Tanjung Chera 500 MWe
- Penerimaan PLTU Bawean
- Launch of IUE Access
- COD of Muara Karang Block 3 CCPP
- Financial Close of Funding Chera 145 MWe Floating SPP Project
- Inauguration of Bawean SPP

2022

- Penataan status menjadi subsidiaries PT PLN (Persero)
- Penataan nama menjadi PT PLN Nusantara Power
- COD PLTGU Add On Muara Tawar Blok 3 (250 MW)
- Rencana pembangunan PLTU Jababeka (2x 7 MW) dan PLTU Banyuglihar (2x 30 MW)
- Change in status to PT PLN (Persero) subsidiaries
- Change in name to PT PLN Nusantara Power
- COD of Muara Tawar Block 3 Add On CCPP (350 MW)
- Relocation of Jababeka (2x 7 MW) and Banyuglihar (2x 30 MW)

2023

- Muaratim PLTGU Sengkang 135 MW
- Pilot dan fasilitasi dalam perdagangan karbon di IDX Carbon dengan dengan hampir 1 juta ton CO_2 yang diperdagangkan.
- PLTGU Muara Karang menjadi unit pembangkit berbasis minyak gas pertama di Indonesia yang memperoleh Certificate Pengurangan Emisi (CER) Gas Rumah Kaca (GRK).
- Pilot dan pemanfaatan Green Hydrogen Plant of Indonesia.
- Groundbreaking Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) MW terbapatkan 50 MW oleh Presiden RI.
- Peresmian PLTS Tanjung Chera 192 MWp oleh Presiden RI.
- Perubahan nama Anak Perusahaan PLN NP yaitu:
  - PT IUE Services (PT IUES) menjadi PT PLN Nusantara Power Services (PLN NPS).
  - PT Bekaduya Daimitra (PT BE) menjadi PT PLN Nusantara Power Construction (PLN NPC).
  - PT IUE Investasi (PT IUEI) menjadi PT PLN Nusantara Renewables (PLN NR).
- Penataan PT Nusantara Sumbawa Solar Energy (NSSE) yaitu JVC untuk proyek PLTS 200 (50 MW).
- Acquisition of 20 MW Sengkang CCPP.
- Pioneer and largest carbon trading on the IDX Carbon with nearly one million tons of CO_2 traded.
- Muara Karang CCPP became the first gas-fired power plant unit in Indonesia to obtain a Green House Gas (GHG) Emission Reduction Certificate (CER).
- Pioneer and inauguration of Green Hydrogen Plant in Indonesia.
- Groundbreaking of 100 Solar Power Plant (SPP) with a capacity of 50 MW by the President of Indonesia.
- Inauguration of the 192 MWp Cirata Floating SPP by the President of Indonesia.
- Change of name of PLN NP Subsidiary, namely:
  - PT IUE Services (PT IUES) to PT PLN Nusantara Power Services (PLN NPS).
  - PT Bekaduya Daimitra (PT BE) to PT PLN Nusantara Power Construction (PLN NPC).
  - PT IUE Investasi (PT IUEI) to PT PLN Nusantara Renewables (PLN NR).
- Establishment of PT Nusantara Sumbawa Solar Energy (NSSE), a JVC for the 50 MW 100 SPP project.

Corporate Transformation I

2016 - 2020

2016

Pendirian Unit Bisnis Jasa O&M (UBJOM).
Established O&M Services Business Unit (UBJOM).

2017

Proyek Green PLTU Paiton.
Good Proper for Paiton CFPP.

2018

Raih Brand Industry Leader Bastrige Excellence Framework pertama di Indonesia.
Achieved the first Industry Leader Bastrige Excellence Framework Brand in Indonesia.

2019

Commercial Operation Date (COD) PLTU Jawa 7 Unit 1 1,000 MW sebagai pembangkit berbasis uap pertama di Indonesia dengan teknology boiler ultra super critical.
Commercial Operation Date (COD) at 1 Units of 1,000 MW Java CFPP as the largest and first power plant in Indonesia with ultra super critical boiler technology.

Corporate Transformation II

2020 - 2024

Bidang Usaha
Business Line

PLN NP mengarahkan fokus pada pengembangan bisnis berbasis pembangkitan yang menjadi inti kompetensi Perusahaan, serta mengembangkan bisnis berbasis keahlian teknis Beyond kWh.

PLN NP focuses on the development of generation-based businesses as the Company's core competencies as well as the development of businesses based on technical expertise Beyond kWh.

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar
Business Activities Based on Articles of Association

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah untuk menyelenggarakan usaha ketenagalistrikan berdasarkan prinsip industri dan niaga yang sehat yang mencakup aktivitas-aktivitas sebagai berikut:

1. Pembangkitan tenaga listrik;
2. Konstruksi bangunan elektrikal;
3. Pemasangan peralatan ketenagalistrikan;
4. Pemeliharaan dan/atau pengoperasian peralatan ketenagalistrikan;
5. Pendelegasian dan/atau kegiatan usaha pendukung dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan termasuk memberikan penugasan kepada anak perusahaan.

According to with Chapter 3 of the Company's Articles of Association, the Company's activities has the scope to carry out electricity business based on sound industrial and commercial principles, including the following activities:

1. Power plant;
2. Electrical building construction;
3. Electricity equipment installation;
4. Maintenance and/or operation of electrical equipment;
5. Trading and/or supporting business activities to optimize the utilization of resources owned by the Company, including delegating assignments to the Subsidiaries.

Kegiatan Usaha yang Dijalankan Saat Ini
Current Business Activities

Kegiatan usaha PLN NP yang dijalankan saat ini adalah:

1. Penyediaan tenaga listrik dengan keandalan yang baik melalui mekanisme Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) dengan PT PLN (Persero) sebagai single buyer.
2. Kegiatan usaha lainnya yang berkaitan dengan usaha Perusahaan dalam rangka memanfaatkan secara maksimal potensi yang dimiliki PLN NP guna meningkatkan revenue dari lini bisnis asset light (beyond kWh). Usaha lainnya ini adalah untuk menuju Integrated Power Company, baik dilakukan langsung oleh PLN NP maupun melalui Anak Perusahaan, Perusahaan Asosiasi maupun perusahaan afiliasi mencakup bidang usaha berikut:
   a. Pembangkit tenaga listrik melalui kepemilikan dalam Independent Power Producer (IPP);
   b. Jasa Operation and Maintenance (O&M) pembangkit termasuk jasa penunjangnya;
   c. Jasa Maintenance, Repair & Overhaul (MRO) pembangkit;
   d. Jasa Technical Supporting (TS) assessment pembangkit;
   e. Penyedia material cadang pembangkit (stockist);
   f. Jasa Engineering, Procurement and Construction (EPC) pembangkit, transmisi dan gardu induk;

Currently, PLN NP carries out the following business activities:

1. Electricity provision with good reliability through Power Purchase Agreement (PPA) mechanism with PT PLN (Persero) as the single buyer.
2. Other business activities related to the Company business activities in order to fully utilize PLN NP's potential to increase revenue from the asset light (beyond kWh) business line. These other activities is to achieve an Integrated Power Company, either directly carried out by PLN NP or through the Subsidiaries, Associated Companies, and Affiliates, including the following business fields:
   a. Power Plant through ownership in Independent Power Producer (IPP);
   b. Operation and Maintenance (O&M) services for Power Plant, including the supporting services;
   c. Maintenance, Repair & Overhaul (MRO) Services of Power Plant;
   d. Technical Supporting (TS) assessment and overhaul services for Power Plant;
   e. Providers of Power Plant spare part (stockist);
   f. Engineering, Procurement and Construction (EPC) services for power plants, transmission and substations;

g. Jasa Enterprise Asset Management (EAM);
h. Pendanaan/investasi di bidang pembangkitan;
i. Jasa konsultasi ketenagalistrikan; dan
j. Jasa penyediaan tenaga kerja (LOM) untuk O&M pembangkit listrik.

g. Enterprise Asset Management (EAM) services;
h. Funding/investment in the field of generation;
i. Electricity consulting services; and
j. Labor supply services (HR) for O&M of power plants.

Uraian Segmen Usaha

Business Segment Description

Segmen usaha utama PLN NP dibedakan berdasarkan pelanggannya, yang terbagi menjadi 2 (dua), yakni (1) segmen usaha penjualan tenaga listrik dan (2) segmen usaha bisnis lainnya. Pelanggan pada segmen usaha penjualan tenaga listrik terdiri dari pelanggan *grid* dan pelanggan *embedded*. Adapun pelanggan pada segmen usaha bisnis lainnya terdiri dari pelanggan jasa Operasi dan Pemeliharaan (O&M), jasa *Engineering, Procurement and Construction* (EPC), jasa *Enterprise Asset Management* (EAM) dan Jasa Lainnya pada pembangkit milik PT PLN (Persero) maupun pembangkit IPP.

PLN NP divides main business segment based on customers into 2 (two), namely (1) electricity sales business segment and (2) other business segments. Customers in the electricity sales and purchase business segment consist of grid customers and embedded customers. Customers in other business segments consist of Operations and Maintenance (O&M) customers, Engineering, Procurement and Construction (EPC) services, Enterprise Asset Management (EAM) services, and Other Services at power plants of PT PLN (Persero) and IPP Power Plant.

Indikator kinerja pada segmen usaha penjualan tenaga listrik adalah kinerja pembangkit, produksi dan penjualan tenaga listrik. Sedangkan indikator kinerja pada segmen usaha bisnis lainnya berbeda-beda sesuai dengan jenis dari jasa masing-masing. Secara keseluruhan, Direksi menggunakan ukuran pendapatan yang diperoleh untuk menilai kinerja seluruh segmen operasi yang ada.

Performance indicators on the electricity business sales segment are on the power plant performance, production and sales. Meanwhile performance indicators for other business segments are different following each service type. Overall, the Board of Directors uses the measure of revenue earned to assess performance of all existing operation segments.

Produk dan Jasa
Products and Services

Sebagai salah satu Subholding PLN, Perusahaan dan Entitas Anak menyediakan solusi bisnis yang secara bersama-sama mendukung peningkatan perluasan cakupan pasar dan pencapaian visi misi Perusahaan.

As one of PLN's Subholdings, the Company and Subsidiaries provide business solutions that jointly support the increasing expansion of market coverage and achieving the Company's vision and mission.

Produk utama PLN NP adalah kesiapan operasi Unit Pembangkit dan tenaga listrik yang dihasilkan oleh Unit Pembangkit melalui mekanisme saluran transmisi langsung kepada pelanggan berdasarkan kontrak jual beli yang dinyatakan dengan Equivalent Availability Factor (EAF) Declare.

PLN NP memiliki segmen usaha utama sebagai penyedia tenaga listrik serta penyediaan jasa operasi dan pemeliharaan (Operation and Maintenance/ O&M) pembangkit dengan mengelola pembangkit milik sendiri maupun pihak lain yang tersebar di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Papua yang terdiri dari:

1. 15 (lima belas) Unit Pembangkitan (UP);
2. 5 (lima) Unit Pelaksana Pembangkitan;
3. 12 (dua belas) Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan (UPDK);
4. 1 (satu) Unit Pembangkit Elsak (PLTS Cirata 1 MW);
5. 6 (enam) Unit PLTU;
6. 7 (tujuh) Unit Bisnis Jasa Operasi dan Pemeliharaan;
7. Kepemilikan saham pada 9 (sembilan) Unit Pembangkit Independent Power Producer (IPP); dan
8. Kepemilikan saham pada Perusahaan Operasi dan Pemeliharaan untuk mengelola 1 (satu) unit pembangkit PLN.

Selain itu juga terdapat beberapa bisnis pendukung lainnya yang dilaksanakan oleh PLN NP maupun Entitas Anak. Profil dan Kinerja Entitas yang tergabung dalam Grup PLN NP disajikan berikutnya pada bagian Profil dan Kinerja Entitas Anak, Cucu Cucu, Asosiasi dan Ventura Bersama dalam Laporan Tahunan ini.

Secara singkat, klasifikasi produk dan jasa Perusahaan disajikan sebagai berikut:

PLN NP's main product is the operational readiness of the Generating Unit and the electric power produced by the Generating Unit through a direct transmission channel mechanism to the customers based on sales and purchase contract which is stated by the Equivalent Availability Factor (EAF) Declare.

PLN NP has the main business segment as a provider of electricity as well as providing operation and maintenance (O&M) services for power plants by managing its own power plants and those of other parties spread across Java, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, West Nusa Tenggara (NTB), East Nusa Tenggara (NTT), and Papua consisting of:

1. 15 (fifteen) Generation Units (UP);
2. 5 (five) Generation Operating Unit (UPDK);
3. 12 (twelve) Generation Control Unit (UPDK);
4. 1 (one) Research Generating Unit (PLTS Cirata 1MW);
5. 6 (six) CFPP units;
6. 7 (seven) Operation & Maintenance Services Business Unit (OMSBU);
7. Share ownership in 9 (nine) Independent Power Producer (IPP) Generation Units; and
8. Share ownership in the Operation and Maintenance Company to manage 1 (one) PLN generating unit.

Moreover, there are also several other supporting businesses carried out by PLN NP and Subsidiaries. The profile and performance of the entities that are members of the PLN NP Group are presented next in the Profile and Performance of Subsidiaries, Second to Third-Tier Subsidiaries, Associates and Joint Ventures section in the Annual Report.

Briefly, the classification of the Company's products and services is described as follows:

Pembangkit Tenaga Listrik
(Power Plant)

Unit Bisnis Jasa Operasi dan Pemeliharaan (UBJOM)
(Operation and Maintenance Services Business Unit (OMSBU))

Jasa Pembangunan Pembangkit Baru (Engineering, Procurement and Construction/EPC)
(New Plant Development Services Engineering, Procurement and Construction (EPC))

Bisnis Pendukung Lainnya
(Other Supporting Business)

Investasi Pembangkitan
(Generation Investment)

Pengelola Aset/Unit Pusing Pembangkit (Operator)
(Asset Being Annuller (Operator))

Pembangkit Tenaga Listrik
Power plant

Usaha pembangkitan tenaga listrik dilakukan melalui pengelolaan Unit Pembangkitan (UP) Milik Sendiri. Unit Pembangkitan milik sendiri dengan total kapasitas terpasang sebesar 16,573 MW dan 1 Unit Pembangkit Riset (PLTS Cinta 1 MW) yang tersebar di seluruh Indonesia.

PLN NP carries out electricity generation business through the management of its own Generation Unit (UP). The Company's Generation Unit with a total installed capacity of 16,573 MW and 1 Research Generation Unit (1 MW Cinta SPP) spread across Indonesia.

Tabel Unit Pembangkitan yang dimiliki dan dikelola PLN NP
Table of Generation Units owned and managed by PLN NP

No.	Unit Pembangkitan Generation Unit	Kapasitas Terpasang (MW) Installed Capacity (MW)	Bahan Bakar Fuel	Lokasi Location
Unit Pembangkitan (UP) Generation Unit (UP)				
1	UP Muara Karang Muara Karang GU	2,177	Gas/BBM Gas/Fuel	Jakarta Jakarta
2	UP Muara Tawar Muara Tawar GU	2,700	Gas/BBM Gas/Fuel	Jawa Barat West Java
3	UP Gresik Gresik GU	1,232	Gas/BBM Gas/Fuel	Jawa Timur East Java
4	UP Brantas Brantas GU	360	Air Water	Jawa Timur East Java
5	UP Cirata Cirata GU	1,008	Air Water	Jawa Barat West Java
6	UP Arun Arun GU	474	Gas Gas	Aceh Aceh
7	UP Paiton Paiton GU	1,860	Batubara Coal	Jawa Timur East Java
8	UP Tenayan Tenayan GU	230	Batubara Coal	Riau Riau
9	UP Indramayu Indramayu GU	990	Batubara Coal	Jawa Barat West Java
10	UP Rembang Rembang GU	630	Batubara Coal	Jawa Tengah Central Java
11	UP TJ Awar-Awar TJ Awar-Awar GU	700	Batubara Coal	Jawa Timur East Java
12	UP Pacitan Pacitan GU	630	Batubara Coal	Jawa Timur East Java
13	UP Kaltim Teluk Kaltim Teluk GU	220	Batubara Coal	Kalimantan Timur East Kalimantan
14	UP Pulang Pisau Pulang Pisau GU	120	Batubara Coal	Kalimantan Tengah Central Kalimantan
15	UP Sengkang Sengkang GU	275	Gas Gas	Sulawesi Selatan South Sulawesi

No.	Unit Pembangkitan Generation Unit	Kapasitas Terpasang (MW) Installed Capacity (MW)	Bahan Bakar Fuel	Lokasi Location
16.	PLTU Tembilahan Tembilahan CFPP	14	Batubara Coal	Riau Riau
17.	PLTU Ketapang Ketapang CFPP	20	Batubara Coal	Kalimantan Barat West Kalimantan
18.	PLTU Bandan (1-2) Bandan (1-2) CFPP	24	Batubara Coal	Sulawesi Tenggara Southeast Sulawesi
19.	PLTU Amurang Amurang CFPP	50	Batubara Coal	Sulawesi Utara North Sulawesi
20.	PLTU Anggrek Anggrek CFPP	55	Batubara Coal	Gorontalo Gorontalo
21.	PLTU Ampana Ampana CFPP	7	Batubara Coal	Sulawesi Tengah Central Sulawesi
22.	PLTS Cirata (Rated 1 MW) Cirata SPP (1 MW Rated)	1	Tenaga Surya Solar	Jawa Barat West Java
23.	PLTD Suppa	65	Diesel Diesel	Sulawesi Selatan South Sulawesi
Unit Pelaksana Pembangkitan (UPK) Generation Operating Unit (GOU)				
1.	UPK Nagan Raya Nagan Raya GOU	220	Batubara Coal	Aceh Aceh
2.	UPK Bukit Asam Bukit Asam GOU	260	Batubara Coal	Sumatera Selatan South Sumatera
3.	UPK Sebalang Sebalang GOU	2713	Batubara/Gas Coal/Gas	Lampung Lampung
4.	UPK Tarahan Tarahan GOU	310	Batubara Coal	Lampung Lampung
5.	UPK Punagaya Punagaya GOU	141,25	Batubara Coal	Sulawesi Selatan South Sulawesi
Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan (UPDK) Generation Control Unit (GCU)				
1.	UPDK Belawan Belawan GCU	1275,60	Gas/Diesel Gas/Diesel	Sumatera Utara North Sumatera
2.	UPDK Pekanbaru Pekanbaru GCU	220,70	Gas/Hydro/Diesel Gas/Hydro/Diesel	Riau Riau
3.	UPDK Palangkaraya Palangkaraya GCU	155,68	Gas Gas	Kalimantan Tengah Central Kalimantan
4.	UPDK Kapuas Kapuas GCU	167,23	Gas/Diesel Gas/Diesel	Kalimantan Barat West Kalimantan
5.	UPDK Balikpapan Balikpapan GCU	56,50	Diesel Diesel	Kalimantan Timur East Kalimantan
6.	UPDK Tarakan Tarakan GCU	83,57	Gas/Diesel Gas/Diesel	Kalimantan Utara North Kalimantan
7.	UPDK Kendari Kendari GCU	95,37	Hydro/Diesel Hydro/Diesel	Sulawesi Tenggara Southeast Sulawesi
8.	UPDK Minahasa Minahasa GCU	370,87	Hydro/Diesel Hydro/Diesel	Sulawesi Utara North Sulawesi
9.	UPDK Gorontalo Gorontalo GCU	156,08	Gas/Diesel Gas/Diesel	Gorontalo Gorontalo
10.	UPDK Bandar Lampung Bandar Lampung GCU	358,01	Gas/Hydro/Diesel Gas/Hydro/Diesel	Lampung Lampung
11.	UPDK Pandan Pandan GCU	129,80	Hydro Hydro	Sumatera Utara North Sumatera
12.	UPDK Bakaru Bakaru GCU	211,23	Hydro/Diesel Hydro/Diesel	Sulawesi Selatan South Sulawesi

Unit Bisnis Jasa Operation & Maintenance Pembangkit (UBJOM)

Operation & Maintenance Services Business Unit (OMS&U)

Pelayanan jasa operasi dan pemeliharaan (O&M) dilakukan dengan mekanisme penyampaian langsung ke pelanggan berdasarkan Kontrak Jasa O&M. Jasa O&M dilakukan langsung oleh PLN NP maupun melalui Entitas Anak (PT PJB Services) dan Ventura Bersama (PT Kamtop PJB).

Operation and maintenance (O&M) services are carried out using a direct delivery mechanism to the customers based on an O&M Service Contract. O&M services are provided directly by PLN NP or through Subsidiaries (PT PJB Services) and Joint Venture (PT Kamtop PJB).

Total kapasitas pembangkit yang dikelola PLN NP melalui jasa O&M sebesar 164 MW pada 7 (tujuh) lokasi. Selain itu, PLN NP juga mengelola Jasa O&M pada unit pembangkit IPP (terdapat kepemilikan saham PLN NP) sebesar 400 MW yang tersebar di 2 (dua) lokasi.

The total power plant capacity managed by PLN NP through O&M services is 164 MW at 7 (seven) locations. PLN NP also manages O&M services for IPP generating units (with PLN NP share ownership) of 400 MW spread across 2 (two) locations.

Tabel Unit Bisnis Jasa O&M PLN NP
Table of PLN NP O&M Services Business Unit

No.	Unit Pembangkitan Generation Unit	Kapasitas Terpasang (MW) Installed Capacity (MW)	Bahan Bakar Fuel	Lokasi Location
1.	PLTU Bangka Bangka CFPP	2x30	Batubara Coal	Bangka Belitung
2.	PLTU Belitung Baru Belitung Baru CFPP	2x16,5	Batubara Coal	Bangka Belitung
3.	PLTU Bolok Bolok CFPP	2x16,5	Batubara Coal	Nusa Tenggara Timur East Nusa Tenggara
4.	PLTU Bambar Unit 3 Bambar Unit 3 CFPP	1x10	Batubara Coal	Sulawesi Tenggara Southeast Sulawesi
5.	PLTU Ketapang Ketapang CFPP	2x10	Batubara Coal	Kalimantan Barat West Kalimantan
6.	PLTU Ropa Ropa CFPP	2x7	Batubara Coal	Nusa Tenggara Timur East Nusa Tenggara
7.	PLTU Tidore Tidore CFPP	2x7	Batubara Coal	Maluku Utara North Maluku

Jasa Pembangunan Pembangkit Baru (*Engineering, Procurement and Construction*/ EPC)

New Power Plant Construction Services (Engineering, Procurement and Construction/ EPC)

PLN NP melaksanakan jasa pembangunan pembangkit baru (Engineering Procurement and Construction/ EPC) melalui Entitas Anak yaitu PT PLN NPC yang tersebar di 3 (tiga) lokasi sebagai berikut:

PLN NP carries out new plant construction services (Engineering Procurement and Construction / EPC) through its Subsidiary, namely PT PLN NPC, which is spread across 3 (three) locations as follows:

Tabel Unit Pembangkitan EPC PLN NP
PLN NP EPC Generation Unit Table

No.	Unit Pembangkitan Generation Unit	Kapasitas Terpasang (MW) Installed Capacity (MW)	Bahan Bakar Fuel	Lokasi Location
1.	PLTU Timika (Jayapura) Timika CFPP (Jayapura)	4x7	Batubara Coal	Papua
2.	PLTU Bima Bima CFPP	3x50	Batubara Coal	Nusa Tenggara Barat West Nusa Tenggara
3.	PLTU Sofifi Sofifi CFPP	3x3	Batubara Coal	Maluku Utara North Maluku

Penyedia Material Cadang Pembangkit (*Stockist*)

Power Plant Spare Part Provider (Stockist)

Bidang usaha jasa stockist saat ini dikelola langsung oleh Entitas Anak yaitu PT PLN Suku Cadang, untuk melayani kebutuhan suku cadang pembangkitan, penyediaan services, dan dukungan retrofit kepada Pelanggan PLTU dan Pelanggan Non-PLTU di seluruh Indonesia yang berasal dari PT PLN (Persero), PLN Nusantara Power, PLN Indonesia Power, dan IPP serta termasuk memberikan dukungan kepada Energi Baru Terbarukan (EBT).

Stockist services business sector is currently managed directly by the Subsidiary, namely PT PLN Suku Cadang, to serve the needs of power plants spare parts, provision of services and retrofit support to CFPP customers and non-CFPP customers throughout Indonesia originating from PT PLN (Persero), PLN Nusantara Power, PLN Indonesia Power, and IPP and also provide support for New Renewable Energy (NRE).

Pelanggan *Stockist* PLTU

CFPP Stockist Customers

Tabel Pelanggan *Stockist* PLTU
CFPP Stockist Customer Table

No.	Unit Pembangkitan Generation Unit	Kapasitas Terpasang (MW) Installed Capacity (MW)	Bahan Bakar Fuel	Lokasi Location
PLTU Regional Sumatera Sumatera Regional CFPP				
1.	PLTU Pangkalan Susu Pangkalan Susu CFPP	2x200	Batubara Coal	Sumatera Utara North Sumatera
2.	PLTU Bangka (Air Anyir #3) Bangka CFPP (Air Anyir #3)	2x30	Batubara Coal	Bangka Belitung Bangka Belitung
3.	PLTU Tenayan Tenayan CFPP	1x100	Batubara Coal	Pekanbaru, Riau Pekanbaru, Riau
4.	PLTU Tembilahan Tembilahan CFPP	2x7	Batubara Coal	Riau Riau
5.	PLTU Belitung Baru Belitung Baru CFPP	2x16,5	Batubara Coal	Bangka Belitung Bangka Belitung
6.	PLTU Banjarsari Banjarsari CFPP	2x110	Batubara Coal	Sumatera Selatan South Sumatera
7.	PLTU Nagan Raya Nagan Raya CFPP	220	Batubara Coal	Aceh Aceh
8.	PLTU Teluk Sirih Teluk Sirih CFPP	1x112	Batubara Coal	Sumatera Barat West Sumatera
9.	PLTU Labuhan Angin Labuhan Angin CFPP	1x115	Batubara Coal	Sumatera Utara North Sumatera
PLTU Regional Kalimantan Kalimantan Regional CFPP				
10.	PLTU Kaltim Teluk Kaltim Teluk CFPP	1x110	Batubara Coal	Kalimantan Timur East Kalimantan
11.	PLTU Pulang Pisau Pulang Pisau CFPP	2x60	Batubara Coal	Kalimantan Tengah Central Kalimantan
12.	PLTU Ketapang Ketapang CFPP	2x10	Batubara Coal	Kalimantan Barat West Kalimantan
13.	PLTU Sanggau Sanggau CFPP	2x7	Batubara Coal	Kalimantan Barat West Kalimantan
14.	PLTU Sintang Sintang CFPP	2x7	Batubara Coal	Kalimantan Barat West Kalimantan
15.	PLTU Kalbar-1 Kalbar-1 CFPP	2x50	Batubara Coal	Kalimantan Barat West Kalimantan

No.	Unit Pembangkitan Generation Unit	Kapasitas Terpasang (MW) Installed Capacity (MW)	Bahan Bakar Fuel	Lokasi Location
PLTU Regional Jawa Java Regional CFPP				
16.	PLTU Suralaya 8 Suralaya 8 CFPP	1x625	Batubara Coal	Jawa Barat West Java
17.	PLTU Labuan Labuan CFPP	2x300	Batubara Coal	Banten Banten
18.	PLTU Pelabuhan Ratu Pelabuhan Ratu CFPP	3x350	Batubara Coal	Jawa Barat West Java
19.	PLTU Adipala Adipala CFPP	2x660	Batubara Coal	Jawa Tengah Central Java
20.	PLTU Lontar Lontar CFPP	3x315	Batubara Coal	Jawa Barat West Java
21.	PLTU Indramayu Indramayu CFPP	3x330	Batubara Coal	Jawa Barat West Java
22.	PLTU Paiton Paiton CFPP	2x315	Batubara Coal	Jawa Timur East Java
23.	PLTU Paiton 1-2 Paiton 1-2 CFPP	2x400	Batubara Coal	Jawa Timur East Java
24.	PLTU Paiton 9 Paiton 9 CFPP	1x660	Batubara Coal	Jawa Timur East Java
25.	PLTU Rembang Rembang CFPP	2x315	Batubara Coal	Jawa Tengah Central Java
26.	PLTU Tanjung Awar-awar Tanjung Awar-awar CFPP	2x350	Batubara Coal	Jawa Timur East Java
27.	PLTU Tanjung Jati B 1-2 Tanjung Jati B 1-2 CFPP	2 x 660	Batubara Coal	Jawa Tengah Central Java
28.	PLTU Tanjung Jati B 3-4 Tanjung Jati B 3-4 CFPP	2x660	Batubara Coal	Jawa Tengah Central Java
29.	PLTU Jawa 7 Jawa 7 CFPP	2x1000	Batubara Coal	Banten Banten
30.	PLTU Cilacap Cilacap CFPP	2x300	Batubara Coal	Jawa Tengah Central Java
PLTU Regional Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua Regional CFPP				
31.	PLTU Jeranjang Jeranjang CFPP	1x25	Batubara Coal	Nusa Tenggara Barat West Nusa Tenggara
32.	PLTU Ropa Ropa CFPP	2x7	Batubara Coal	Nusa Tenggara Timur East Nusa Tenggara
33.	PLTU Bolok Bolok CFPP	2x16,5	Batubara Coal	Nusa Tenggara Timur East Nusa Tenggara
34.	PLTU Sumbawa Barat Sumbawa Barat CFPP	1x7	Batubara Coal	Nusa Tenggara Barat West Nusa Tenggara
35.	PLTU Barru Barru CFPP	1x50	Batubara Coal	Sulawesi Selatan South Sulawesi
36.	PLTU Kendari Unit 1 & 2 Kendari Unit 1 & 2 CFPP	2x20	Batubara Coal	Sulawesi Tenggara Southeast Sulawesi
37.	Holtekamp Holtekamp	2x50	Batubara Coal	Papua Papua
38.	PLTU Punagaya Punagaya CFPP	2x12,25	Batubara Coal	Sulawesi Selatan South Sulawesi
39.	PLTU Bima Bima CFPP	2x10	Batubara Coal	Nusa Tenggara Barat West Nusa Tenggara

Tabel Pelanggan Blackbid Non-PLTU
Table of Non-CFPP Blackbid Customers

No.	Unit Pembangkitan Generation Unit	Kapasitas Terpasang (MW) Installed Capacity (MW)	Bahan Bakar Fuel	Lokasi Location
PLTMG & PLTGU PLTMG & CCPP				
1.	PLTMG Aceh Aceh MGPP	40+	Gas Gas	Aceh Aceh
2.	PLTGU Belawan Belawan CCPP	870,88	Gas Gas	Sumatera Utara North Sumatera
3.	PLTGU Muara Karang Muara Karang CCPP	2,177	Gas/BBM Gas/Fuel	Jakarta Jakarta
4.	PLTGU Muara Tawar Muara Tawar CCPP	2,703	Gas/BBM Gas/Fuel	Jawa Barat West Java
5.	PLTGU Priok Priok CCPP	1,162	Gas Gas	Jakarta Jakarta
6.	PLTGU Semarang Semarang CCPP	1,124	Gas Gas	Jawa Tengah Central Java
7.	PLTGU Grati Grati CCPP	959	Gas Gas	Jawa Timur East Java
8.	PLTMG Gunung Salak Gunung Salak MGPP	3x6	Gas Gas	Kalimantan Utara North Kalimantan
PLTA, PLTP & PLTS HPP, GPP & SPP				
9.	PLTA Asahan-1 Asahan-1 HPP	2x90	Air Water	Sumatera Utara North Sumatera
10.	PLTA Batu Batu HPP	3x40	Air Water	Lampung Lampung
11.	PLTA Cirata Cirata HPP	1,008	Air Water	Jawa Barat West Java
12.	PLTP Kamojang Kamojang GPP	140	Geothermal Geothermal	Jawa Barat West Java
13.	PLTA Brantas Brantas HPP	282	Air Water	Jawa Timur East Java
14.	PLTA Mrica Mrica HPP	3x60	Air Water	Jawa Tengah Central Java
15.	PLTA Saguling Saguling HPP	700	Air Water	Jawa Timur East Java
16.	PLTS Bali Bali SPP	3,5	Tenaga Surya Solar	Bali Bali
17.	PLTS Mesah Mesah SPP	5,00 kwp	Tenaga Surya Solar	Nusa Tenggara Timur East Nusa Tenggara
18.	PLTS Temajuk Temajuk SPP	371 kwp	Tenaga Surya Solar	Kalimantan Barat West Kalimantan

Pelanggan *Non-Power Plant*

Non-Power Plant Stockist Customers

No.	Unit/Perusahaan Unit/Company
1.	PJB Academy PJB Academy
2.	PLN NP UNRO PLN NP UNRO
3.	Indonesia Power MSU Indonesia Power MSU
4.	Halayora Power Indo Halayora Power Indo

No.	Unit/Perusahaan Unit/Company
5.	Sahara Adhiguna Sahara Adhiguna
6.	PLN Puertil PLN Puertil
7.	PLN Pusharlis PLN Pusharlis
8.	Bantar Prima Sentosa Bantar Prima Sentosa

Investasi Pembangkitan

Generation Investment

Usaha Kepemilikan Saham di Perusahaan O&M

Share Ownership Business in O&M Companies

PLN NP memiliki perusahaan patungan, yakni PT Kontpu PJB yang melakukan jasa O&M pada unit pembangkit milik PT PLN (Persero) di Tanjung Jati B #3 dan #4 dengan kapasitas 2x660 MW.

PLN NP has a joint venture company, namely PT Kontpu PJB which provides O&M services on generating units owned by PT PLN (Persero) in Tanjung Jati B #3 and #4 with a capacity of 2x660 MW.

Usaha Kepemilikan *Independent Power Producer* (IPP)

Independent Power Producer (IPP) Ownership Business

PLN NP mengembangkan pembangkit IPP melalui perusahaan patungan sebesar 5,715 MW sebagai berikut:

PLN NP is developing IPP plants through a joint venture of 5,715 MW as follows:

Tabel Unit Pembangkitan IPP PLN NP

Table of IPP PLN NP Generation Units

No.	Unit Pembangkitan Generation Unit	Kapasitas Terpasang (MW) Installed Capacity (MW)	Bahan Bakar Fuel	Lokasi Location
Pembangkit IPP Beroperasi (4,455 MW) IPP Plant in Operation (4,455 MW)				
1.	PLTA Asahan Asahan HPP	2x90	Tenaga air Hydropower	Sumatera Utara North Sumatera
2.	PLTU Benjaran Benjaran CFPP	2x110	Batubara Coal	Sumatera Utara North Sumatera
3.	PLTU Jawa 7 Unit 1 dan 2 Java 7 Unit 1 dan 2 CFPP	3x1000	Batubara Coal	Banten Banten
4.	PLTU Cilacap Unit #1 dan #2 Cilacap CFPP Unit #1 dan #2	2x300	Batubara Coal	Jawa Tengah Central Java
	PLTU Cilacap Unit #3 (Ekspansi 1) Cilacap CFPP Unit #3 (Expansi 1)	1x660	Batubara Coal	Jawa Tengah Central Java
	PLTU Cilacap Ekspansi 2 Cilacap CFPP Expansi 2	1x1000	Batubara Coal	Jawa Tengah Central Java
5.	PLTU Mamuju Mamuju CFPP	2x25	Batubara Coal	Sulawesi Barat West Sulawesi
6.	PLTS Tanjung Cintaka Tanjung Cintaka SPP	145	Tenaga Surya Solar	Jawa Barat West Java
Dalam Tahap Pengerjaan (840 MW) Under Development Stage (840 MW)				
7.	PLTA Batang Toru Batang Toru HPP	4x210	Tenaga air Hydropower	Sumatera Utara North Sumatera
8.	PLTU Sumbagsel 1 Sumbagsel 1 CFPP	2x150	Batubara Coal	Sumatera Selatan South Sumatera
9.	PLTS IKN IKN SPP	50 MW	Tenaga Surya Solar	Kalimantan Timur East Kalimantan

Bisnis Pendukung Lainnya
Other Supporting Businesses

Usaha Jasa *Enterprise Asset Management* (EAM)
Enterprise Asset Management (EAM) Services Business

EAM merupakan segmen usaha bisnis PLN NP dengan kegiatan mengelola aset Perusahaan agar memberikan kontribusi yang optimal melalui penerapan tata kelola aset yang disesuaikan dengan kebutuhan proses bisnis pada suatu Unit Kerja. Hal tersebut merupakan penciptaan nilai tambah dalam proses bisnis pembangkit tenaga listrik dan jasa pendukung lainnya.

Pada tahun 2021, PLN NP telah melakukan implementasi EAM di sejumlah unit IPP, antara lain: EAM Pilar Operasi di PT Geo Dipa Energi.

EAM is a business segment of the PLN NP business with activities to manage Company assets to provide optimal contributions through the implementation of asset management that is tailored to the needs of business processes in a Work Unit. This is the creation of added value in the business process of power plant and other supporting services.

In 2021, PLN NP implemented EAM in several IPP units, including: EAM Pillar Operations at PT Geo Dipa Energi.

Usaha Jasa *Maintenance, Repair, and Overhaul* (MRO)
Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) Services Business

Jasa MRO pembangkit merupakan pekerjaan pemeliharaan unit pembangkit sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mengembalikan kondisi pembangkit kepada performa terbaiknya.

Pada tahun 2021, PLN NP melaksanakan jasa MRO diantaranya adalah: Jasa Remaining Life Assessment (RLA), Non Destructive Test (NDT), dan jasa lainnya di PT IGP; Jasa Overhaul Unit #2 di KOJE; Jasa AirFlow Straightener, Tuning DEH, di PT Pharmanaya Energi; Jasa Supervisi MRO di PLTA Semangka; serta Pekerjaan Performance Test dan Special Tools Service untuk PT Lestari Banten Energi.

MRO generator services are maintenance work on generating units according to needs in order to restore the condition of the generator to its best performance.

In 2021, PLN NP provided MRO services, including: Remaining Life Assessment (RLA), Non Destructive Test (NDT) services and other services at PT IGP; Unit #2 Overhaul Services at KOJE; Airflow Straightener Services, Tuning DEH, at PT Pharmanaya Energi; MRO Supervision Services at the Semangka HPP; as well as Performance Test and Special Tools Service work for PT Lestari Banten Energi.

Usaha Optimalisasi Aset
Asset Optimization Efforts

Kegiatan usaha ini bertujuan untuk mengoptimalkan aset yang ada di area unit milik PLN NP agar memiliki nilai guna dan memberikan pemasukan terhadap pendapatan Non-Core PLN NP. Kegiatan usaha yang dilakukan antara lain adalah pemanfaatan aset, pemanfaatan lahan atau bangunan, fasilitas pendukung, serta tools yang dimiliki Perusahaan.

Pada tahun 2021, kegiatan usaha optimalisasi aset yang dilakukan antara lain: Pemanfaatan FABA, Pemanfaatan Air Demin, Pengelolaan Objek Wisata PLTA Tulungagung, Pemanfaat Wadah Cinta untuk PLTS Apung, Sewa Lahan untuk ATM, serta penggunaan dan pemanfaatan aset lainnya.

The business activity purposes to optimize the existing assets in PLN NP's unit area so as to have the use value and provide income for PLN NP's non-core income. Business activities carried out include asset utilization, land or building utilization, supporting facilities and tools owned by the Company.

In 2021, asset optimization business activities carried out include: Utilization of FABA, Utilization of Demin Water, Management of the Tulungagung Hydroelectric Power Tourist Attraction, Utilization of the Cinta Reservoir for Floating SPP, Land Rental for ATM, as well as use and utilization of other assets.

Laboratorium Kalibrasi
Calibration Laboratory

Laboratorium terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk mengkalibrasi dan mengefisiensikan biaya pemeliharaan peralatan pembangkit listrik.

Pada tahun 2023, kegiatan usaha laboratorium kalibrasi yang dilakukan antara lain: Jasa kalibrasi tool pada KITB, PLN Indonesia Power dan perusahaan pembangkit lainnya.

The laboratory is accredited by the National Accreditation Committee (KAN) to calibrate and streamline maintenance costs for power generation equipment.

In 2023, the calibration laboratory business activities carried out included: Tool calibration services for KITB, PLN Indonesia Power and other power plant companies.

Jasa Lainnya
Other Services

Selain itu di tahun 2023, PLN NP juga melakukan bisnis pendukung lainnya yaitu Jasa Konsultasi Implementasi ISO 9001:2015 di PT BPI.

Apart from that, PLN NP also undertook other supporting businesses, namely ISO 9001:2015 Implementation Consultation Services at PT BPI in 2023.

Skema Penyaluran Tenaga Listrik
Scheme of Electricity Transmission

PLN NP merupakan salah satu anak perusahaan PLN (Persero) yang bertransformasi menjadi subholding PLN sebagai Generation Company 1. Berperan pada lini pembangkitan, PLN NP memastikan keandalan pasokan (security of supply) energi listrik dalam mendukung PLN (Persero) menjaga ketahanan energi dalam negeri.

PLN NP is a subsidiary of PLN (Persero) which has been transformed into PLN subholding as Generation Company 1. Taking a role in the generation line, PLN NP ensures the reliability of supply (security of supply) of electrical energy in supporting PLN (Persero) in maintaining domestic energy security.

Bisnis ketenagalistrikan secara umum mencakup 3 (tiga) lini yaitu pembangkitan (produksi), transmisi dan distribusi tenaga listrik. Posisi PLN NP dalam rantai pasok bisnis ketenagalistrikan adalah pada lini pembangkitan sebagai penyedia tenaga listrik. Selanjutnya tenaga listrik disalurkan (transmisi) melalui Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sistem Jawa-Bali dan didistribusikan kepada pelanggan industri maupun rumah tangga oleh PLN (Persero).

Generally, electricity business includes 3 (three) lines, namely generation (production), transmission and distribution of electricity. PLN NP portion in the electricity business supply chain is in the generation line as a provider of electricity. Furthermore, electric power is distributed (transmission) through the Java-Bali High Voltage Air Line (SUTT) system and distributed to the industrial and household customers by PLN (Persero).

PT PLN Nusantara Power

PT PLN (Persero)

Kontribusi Grup PLN NP Sebagai *Generation Company* 1 pada Penyediaan Tenaga Listrik Nasional

PLN NP Group Contribution as Generation Company 1 to National Electric Power Supply

Grup PLN NP mengintegrasikan pengelolaan organisasi sistem pembangkitan untuk menciptakan nilai creation yang berkelanjutan melalui aspirasi Visi untuk menjadi Terdepan dan Terpercaya dalam Bisnis Energi Berkelanjutan di Asia Tenggara. Lingkup sinergi usaha Grup PLN NP mencakup bidang rekayasa teknik (EPC), pengelolaan pembangkit yang milik sendiri, pembangkit yang dikelola maupun berupa investasi, penyediaan jasa operasi dan pemeliharaan pembangkit, pendanaan, penyediaan SDM untuk jasa operasi dan pemeliharaan, dan juga penyediaan suku cadang pembangkit.

PLN NP Group integrates organizational management of generation systems to realize sustainable value creation through the Vision aspiration to become the Leading and Most Trusted in Sustainable Energy Business in Southeast Asia. PLN NP Group has business synergy covering engineering (EPC), management of own power plants, power plants that are managed or in the form of investments, providing power plant operation and maintenance services, funding, provision of human resources for operation and maintenance services, and also the supply of power plant spare parts.

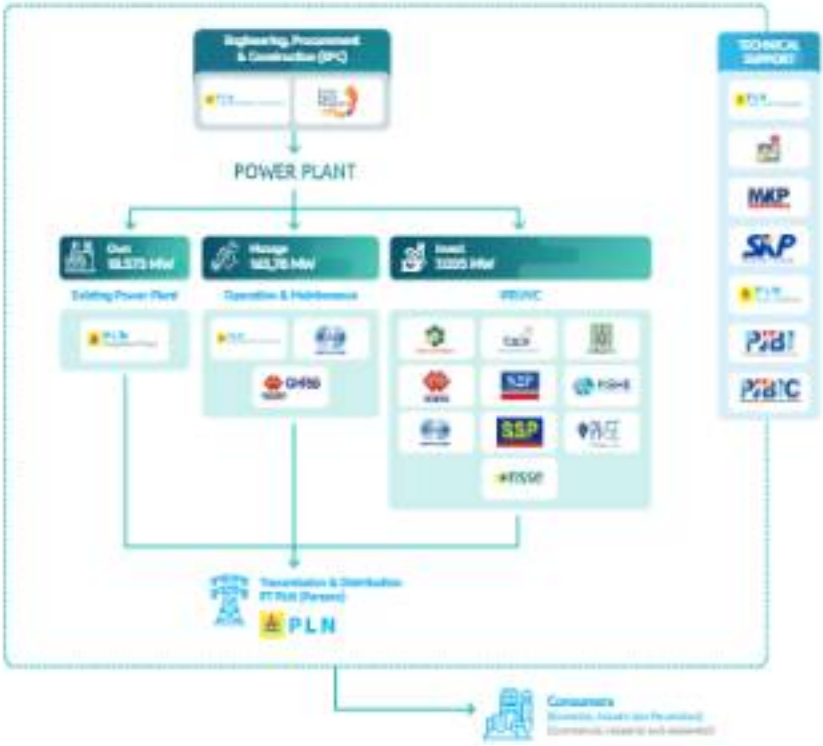

Visi dan Misi Perusahaan dalam Mendukung Energi Berkelanjutan

Company Vision and Mission in Supporting Sustainable Energy

PLN NP menetapkan Visi dan Misi sebagai pedoman dalam arah pengembangan dan posisi bisnis yang akan dicapai demi mendukung tersedianya energi yang berkelanjutan.

PLN NP established Vision and Mission as guidelines in the context to direct the development and business position to be achieved in order to support the availability of sustainable energy.

Dasar Pengesahan Visi dan Misi

Ratification Basis of Vision and Mission

Visi dan Misi Perusahaan dituangkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Periode Tahun 2020-2024 pada tanggal 30 Juli 2020 dan Keputusan Rapat Direksi di Luar Rapat No. 030/DIR/2020.

The Company established Vision and Mission set out in the Company's Long Term Plan (RJPP) for the 2020-2024 period on July 30, 2020 and the Decision of the Board of Directors' Meeting Outside the Meeting No. 030/DIR/2020.

Visi
Vision

Menjadi Perusahaan Terdepan dan Terpercaya dalam Bisnis Energi Berkelanjutan di Asia Tenggara

To be the trusted leading company in sustainable energy of South East Asia

Makna Visi:

1. **Perusahaan Terdepan dan Terpercaya**, bermakna bahwa PLN NP merupakan perusahaan pionir yang menjalankan dan mengembangkan usahanya sesuai dengan tata kelola perusahaan kelas dunia dengan indikator operasional dan finansial terbaik di Asia Tenggara sehingga meningkatkan kredibilitas Perusahaan untuk menjadi pilihan utama dalam melakukan bisnis.
2. **Bisnis Energi**, bermakna bahwa PLN NP memiliki kompetensi di bidang pembangkitan fosil dan energi terbarukan sesuai tren global mendalang dengan pengembangan usaha yang meliputi penjualan tenaga listrik, investasi bidang energi, dan jasa-jasa lainnya.
3. **Berkelanjutan**, bermakna bahwa PLN NP bergerak dan berkembang secara terus menerus dengan menjalankan bisnis eksisting, membangun dan mengembangkan bisnis baru serta berinovasi untuk meningkatkan profit dan value Perusahaan bagi stakeholders.

Vision Definition :

1. **Trusted Leading Company** can be defined that PLN NP is the pioneer company running and developing its business based on the worldclass corporate governance with the best operational and financial indicators in Southeast Asia, to increase the Company credibility to be the primary choice for partners in running business.
2. **Energy Business** can be defined that PLN NP has competence in the field of fossil generation and renewable energy following the upcoming global trend with business development, including selling electricity, investing in energy, and other services.
3. **Sustainable** can be defined that PLN NP moves and develops continuously by running the existing businesses, building and developing new businesses, as well as innovating to increase the Company's profit and values for the stakeholders.

Misi
Mission

- **Menjalankan bisnis energi yang inovatif dan kolaboratif, tumbuh dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan**
  To perform an innovative and collaborative, sustainably growing and environmentally friendly energy business.
- **Menjaga tingkat kinerja tertinggi untuk memberikan nilai tambah bagi Stakeholder**
  To maintain the highest performance to provide added-values for the stakeholders.
- **Menarik minat dan mengembangkan talenta terbaik serta menjalankan organisasi yang agile dan adaptif**
  To attract interest and develop the best talent, as well as to run an agile and adaptive organisation.

Makna Misi

1. **Menjalankan bisnis energi yang inovatif dan kolaboratif, tumbuh dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan** artinya PLN NP berfokus pada bisnis energi yang tidak terbatas pada pembangkitan heavy asset, melainkan asset light dan energi inovatif lainnya untuk mencapai diversifikasi usaha sehingga dapat meningkatkan nilai pertumbuhan Perusahaan secara berkelanjutan. PLN NP juga turut berpartisipasi aktif membentuk kerjasama dengan perusahaan lain melalui skema penugasan maupun JPP sesuai kaidah tata kelola perusahaan yang baik dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.
2. **Menjaga tingkat kinerja tertinggi untuk memberikan nilai tambah bagi stakeholder** artinya dalam menjalankan bisnisnya, PLN NP berkomitmen untuk menjaga tingkat kinerja tertinggi baik dari sisi operasional maupun finansial sehingga mendukung pemegang saham dalam memberikan value creation yang optimal.
3. **Menarik minat dan mengembangkan talenta terbaik serta menjalankan organisasi yang agile dan adaptif** artinya PLN NP berfokus dalam pengembangan kapabilitas dan kompetensi karyawan sesuai strategi pengembangan usaha dari aspek pengembangan bisnis, teknologi, sampai dengan semua pendukung penting yang harus dimiliki oleh PLN NP. Diharapkan menghasilkan talenta terbaik sehingga PLN NP menjadi Perusahaan yang dikenal serta organisasi yang terus agile dan adaptif.

Mission Definition

1. To conduct an innovative and collaborative, sustainably growing and environmentally-friendly energy business means that PLN NP focuses on the energy business that is not limited to heavy asset generation, but light assets and other innovative energies to achieve business diversification to sustainably increase the Company growth value. PLN NP also actively participates in collaborating with other companies through assignment schemes and JPP following the good corporate governance principles and environmental sustainability oriented.
2. To maintain the highest performance to provide added value for the stakeholders means that in running business, PLN NP is committed to maintaining the highest performance level either from operational or financial perspective to support the shareholders in providing optimal value creation.
3. To attract interest and develop the best talent, and to perform an agile and adaptive organisation means that PLN NP focuses on developing capabilities and competencies of employees based on business development strategy of the Company from the aspects of business development up to the whole important supporters that PLN NP is required to have. It is expected to generate the best talents so as to ultimately make PLN NP the interested company and organisation remaining agile and adaptive.

Pada tahun 2024 (periode penyusunan laporan), PLN NP telah me-review dan menetapkan visi misi baru yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Periode Tahun 2024-2028 pada tanggal 24 Oktober 2022 dan Keputusan Rapat Direksi di Luar Rapat No. 015.b/DR/2023.

In 2024 (the report preparation period), PLN NP reviewed and established a new vision and mission as stated in the Company's Long Term Plan (RJPP) for the 2024-2028 period on October 24, 2022 and the Board of Directors' Meeting Decision Outside the Meeting No. 015.b/DR/2023.

Visi
Vision

Menjadi perusahaan pembangkitan yang terdepan dan terpercaya untuk energi berkelanjutan di Indonesia dan luar negeri

To be a leading and trusted generation company for sustainable energy in Indonesia and beyond

Makna Visi:

1. **Perusahaan Terdepan dan Terpercaya**, mengandung pengertian bahwa PLN NP merupakan perusahaan pionir yang memperbaiki dan mengembangkan usahanya secara dengan tata kelola perusahaan kelas dunia dengan indikator operasional dan finansial terbaik di Asia Tenggara sehingga meningkatkan kredibilitas Perusahaan untuk menjadi pilihan utama bagi partner dalam melakukan bisnis.
2. **Berkelanjutan**, mengandung pengertian bahwa bisnis PLN NP bergerak dan berkembang secara terus menerus dengan menjalankan bisnis eksisting, membangun dan mengembangkan bisnis baru serta berinovasi untuk meningkatkan profit dan value Perusahaan bagi stakeholders.
3. **Indonesia dan luar negeri**, mengandung pengertian bahwa PLN NP berencana untuk go international dan menjajaki target market yang lebih luas untuk memanfaatkan keahlian saat ini maupun potensi yang akan datang, dan secara ambisius mendapatkan peluang internasional untuk pertumbuhan korporasi.

Vision Definition:

1. **Leading and Trusted Company** means that PLN NP is a pioneer company that runs and develops business following the world-class corporate governance with the best operational and financial indicators in Southeast Asia so as to increase the Company credibility as the main choice for partners in running business.
2. **Sustainable** means that PLN NP continuously moves and develops business by running the existing businesses, building and developing new businesses and innovating to increase the Company's profits and value for the stakeholders.
3. **Indonesia and beyond** means that PLN NP plans to go international and explore a wider target market to utilize current expertise and future potential, as well as to ambitiously obtain international opportunities for corporate growth.

Misi
Mission

- **Menjaga Kinerja Pembangkit Listrik yang Unggul Sebagai Kompetensi Inti**
  To Maintain an Excellent Power Plant Performance as a Core Competency
- **Membangun Bisnis Inovatif yang terdepan untuk melakukan Diversifikasi dan Pertumbuhan yang Berkelanjutan**
  To Build a Leading Innovative Business for Diversification and Sustainable Growth
- **Mengakselerasi Portofolio Bisnis EBT untuk Mendukung Tercapainya Net Emisi Karbon**
  To accelerate NRE Business Portfolio to Support the Achievement of Zero Carbon Emissions
- **Mengakuisisi dan Membangun Talenta Terbaik untuk Menjalankan Organisasi yang Responsif dan Adaptif**
  To Acquire and Build the Best Talent to Run a Responsive and Adaptive Organization

Makna Misi

1. **Menjaga Kinerja Pembangkit Listrik yang Unggul Sebagai Kompetensi Inti** artinya PLN NP berfokus pada mempertahankan performa yang unggul dalam operasi pembangkitan daya, memastikan penyediaan energi yang andal dan efisien kepada pelanggan.
2. **Membangun Bisnis Inovatif yang terdepan untuk melakukan Diversifikasi dan Pertumbuhan yang Berkelanjutan** artinya dalam menjalankan bisnisnya, Perusahaan berhasrat untuk mengembangkan bisnis inovatif yang dapat menghadapi tantangan pasar yang berubah, membuka peluang baru, dan memastikan pertumbuhan jangka panjang.
3. **Mengakselerasi Portofolio Bisnis EBT Untuk Mendukung Tercapainya Net Emisi Karbon** artinya Upaya PLN NP diarahkan pada percepatan investasi dan pengembangan sumber energi terbarukan, untuk mendukung komitmen tercapainya Net Emisi Karbon, mengurangi dampak lingkungan, dan memanfaatkan pasar energi hijau.
4. **Mengakuisisi dan Membangun Talenta Terbaik Untuk Menjalankan Organisasi yang Responsif dan Adaptif** artinya Memastikan PLN NP dapat menarik, mengembangkan, dan mempertahankan bakat terbaik dalam industri, serta menciptakan organisasi yang responsif dan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan bisnis.

Mission Definition

1. To Maintain an Excellent Power Plant Performance as a Core Competency means that PLN NP focuses on maintaining superior performance in power plant operations, as well as ensures the reliable and efficient energy supply to the customers.
2. To Building a leading Innovative Business for Diversification and Sustainable Growth means that in running its business, the Company purposes to develop innovative business that is capable to face changing market challenges, open new opportunities and ensure the long-term growth.
3. To Accelerate NRE Business Portfolio to Support the Achievement of Zero Carbon Emissions means that PLN NP efforts are directed at accelerating investment and development of renewable energy sources, to support the commitment to achieving Zero Carbon Emissions, reducing environmental impacts, and utilizing the green energy market.
4. To Acquire and Build the Best Talent to Run a Responsive and Adaptive Organization means ensuring PLN NP is capable to attract, develop and retain the best talent in the industry, as well as create responsive organization that is able to adapt quickly to changes in the business environment.

Budaya Perusahaan
Corporate Culture

Budaya Perusahaan diartikan sebagai Core Values menjadi pondasi dalam membentuk perilaku insan PLN NP. Sebagai Anak Perusahaan BUMN, PLN NP menjadikan AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) sebagai core values di Perusahaan yang diadopsi sejak tanggal 9 November 2020. Core Values AKHLAK terdiri atas 6 (enam) nilai dengan panduan perilaku yang terdiri atas 18 (delapan belas) perilaku utama.

Corporate Culture is defined as Core Values imply the foundation in establishing the behavior of PLN NP people. As a Subsidiary of an SOE, PLN NP has made AKHLAK (Trustworthy, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, Collaborative) a core value in the Company which was adopted since November 9, 2020. The AKHLAK Core Values consist of 6 (six) values with behavioural guidelines consisting of an 18 (eighteen) major behaviours.

AKHLAK

Core Values	Definisi Definition	Panduan Perilaku Code of Conduct
A Amanah Trustworthy	Memegang teguh kepercayaan yang diberikan Upholding the trust given	- Memenuhi janji dan komitmen - Bertanggung jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan - Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika - Keeping promises and commitments - Being responsible for the tasks, decisions, and actions taken - Upholding the moral and ethical values
K Kompeten Competent	Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas Continuing to learn and develop capabilities	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik - Improving self-competence to respond to ever-changing challenges - Helping others in learning - Completing tasks with the highest quality
H Harmonis Harmonious	Saling peduli dan menghargai perbedaan Caring for each other and respecting differences	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka membantu orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif - Respecting everyone regardless of background - Willing to help others - Building conducive work environment
L Loyal	Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara Dedicated and prioritizing the interest of the nation and state	- Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan negara - Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar - Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika - Maintaining the good reputation of fellow employees, leaders, SOEs, and the State - Willing to sacrifice to achieve a greater goal - Adhering the leadership as long as it is not against the law and ethics
A Adaptif Adaptive	Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan Keep innovating and being enthusiastic in driving or facing changes	- Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik - Terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi - Bertindak proaktif - Quickly adapting to be better - Continuously making improvements to keep up with technological developments - Acting proactively
K Kolaboratif Collaborative	Membangun kerja sama yang sinergis Building Synergistic Cooperation	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama - Providing opportunities for various parties to contribute - Open in working together to generate added value - Mobilizing the use of various resources for common goals

Struktur Organisasi
Organization Structure

Struktur Organisasi yang berlaku di akhir tahun 2023 adalah Struktur Organisasi yang mengacu pada Peraturan Direksi No. 040.01/010/DIR/2022 tanggal 2 Desember 2022. Adapun skema struktur organisasi PLN NP adalah sebagai berikut:

The Organizational Structure that applies at the end of 2023 is the Organizational Structure that refers to the Board of Directors Regulation No. 040.01/010/DIR/2022 dated December 2, 2022. The scheme of PLN NP organizational structure is as follows:

Ruly Firmansyah
Direktur Utama
President Director

Kusnang Permita
Direktur Operasi
Operations Dir.
Director of Operations
Asset Plant

Yudhy Bhagaskara
Vice President SDM
Planning and Control II

I Putu Sudiartha
Vice President SDM
Planning and Control I

Hendra Santoso
Vice President SDM
Planning and Control (HR)

Widiko
Vice President Power
Generation Reliability II

Hutabrja
Vice President Limited
Management Re Capacity
Relation II

Wiranata Widja Wibowo
Vice President Primary
Energy Planning & Control II

General Manager/Senior Manager/
Manager Unit Perencanaan
General Manager/Senior Manager/
Accounting Unit Manager

Senior Manager/Manager Unit Pelaksana
Pengendalian Perencanaan
Senior Manager/Manager of Plant Control
Implementation Unit

General Manager Unit Pemeliharaan
Repair and Overhaul
General Manager Unit Pemeliharaan/Repair
and Overhaul

Muhamad Reza
Direktur Pengembangan Bisnis
dan Niaga
Director of Business
Development and Commerce

–
Vice President Corporate
Planning and Investment

Siti Maslahah
Vice President Portfolio
Management and
Exploration

Yessy Sulistiriana
Vice President Business
Development Promotion

Adi Ayriyanto Wibiyo
Vice President Business
Generation Development

Judi Rahmana
Vice President Corporate
Performance

Ziad Hartono
Direktur Keuangan
Director of Finance

Lusiana Sawe
Vice President Corporate
Finance

Nikan Jalali Nugraheni
Vice President Finance
and Tax

Mohammad Sazwar Jamali Sari
Vice President Accounting
and Revenue

Abdul Hakim
Vice President Information
Technology and Digital

Karyawan AJ
Direktur Manajemen Human
Capital dan Administrasi
Director of Human Capital
Management and Administration

Indarto Purbo Utomo
Vice President Human
Capital Strategy

Siti Ghoiriah
Vice President Human
Capital Development

Ela Widiyanto
Vice President Human
Capital Services

Ika Safitri
Vice President SKDM

Bambang Hendrayanto
Vice President General
Affairs

Dandi Yusti Pentesti
Senior Manager Unit Hukum Bisnis*)
Senior Manager Unit Hukum Bisnis*)

Harjono
Manajer Bidang Proyek
Manager Head
Head of Project
Management Unit

Bilu Manurung
Vice President
Pre Construction

Hermana Dwi Gunajati
Vice President
Construction Control

Dagum Hendrawan
Vice President
Project Management Office

Senior Manager Unit Pelaksana Proyek
Senior Manager of Project Implementation
Unit

*) Berkoordinasi dengan Direktur Utama PT PLN (Persero) Pusat
*) Coordinating to Director of PT PLN (Persero) Pusat

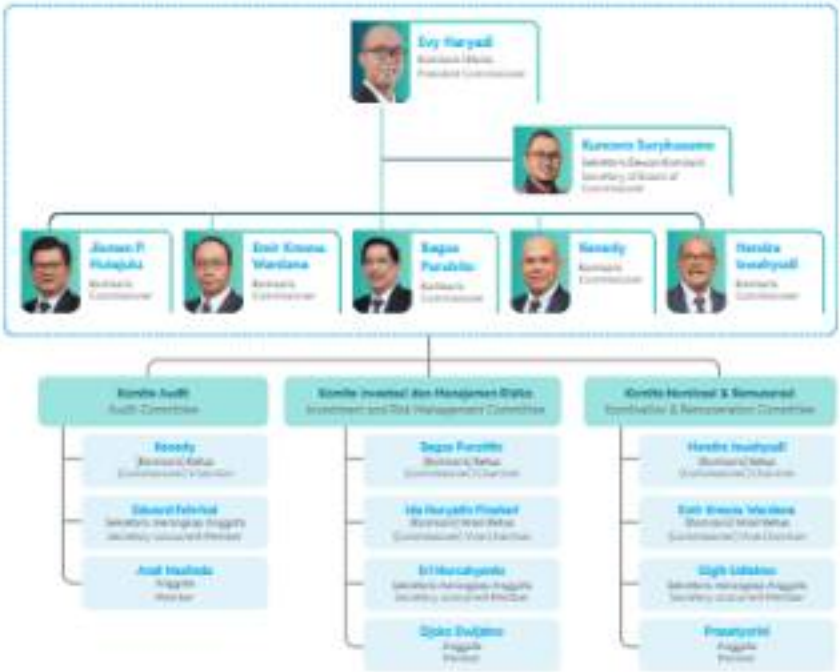

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Changes in the Composition of the Board of Commissioners and Directors

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi di sepanjang Tahun Buku 2023

Changes in the Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors during the Fiscal Year 2023

Sepanjang tahun 2023, terdapat 1 (satu) kali perubahan komposisi Dewan Komisaris. Sesuai dengan keputusan RUPS tanggal 14 Desember 2022, yang dituangkan melalui Akta Notaris No. 2 tanggal 4 Januari 2023 terdapat pengangkatan Sdr. Kennedy sebagai Komisaris. Serta sesuai dengan keputusan RUPS tanggal 16 Juni 2023, terdapat pengangkatan Sdri. Ida Nuryatin Finahari sebagai Komisaris. Dengan demikian kronologi perubahan komposisi Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Throughout 2023, there was 1 (one) change in the composition of the Board of Commissioners. In accordance with the resolution of the GMS dated 14 December 2022, which was notarized through Notarial Deed No. 2 dated 4 January 2023, there was an appointment of Mr. Kennedy as Commissioner. And in accordance with the resolution of the GMS dated 16 June 2023, there was an appointment of Ms. Ida Nuryatin Finahari as Commissioner. Thus the chronology of changes in the composition of the Board of Commissioners is as follows:

Tabel Kronologis Perubahan Komposisi Dewan Komisaris
Table of Changes Chronology in the Composition of the Board of Commissioners

Komposisi Dewan Komisaris Periode 1 Januari 2023 – 16 Juni 2023 Composition of the Board of Commissioners for January 1, 2023 – June 16, 2023		Komposisi Dewan Komisaris Periode 16 Juni 2023 – Saat Ini Composition of the Board of Commissioners for June 16, 2023 – Present	
Jabatan Position	Nama Name	Jabatan Position	Nama Name
Komisaris Utama President Commissioner	Evy Haryadi	Komisaris Utama President Commissioner	Evy Haryadi
Komisaris Commissioner	Yanedy	Komisaris Commissioner	Yanedy
Komisaris Commissioner	Jaman P. Hutapea	Komisaris Commissioner	Ida Nuryato Finahari
Komisaris Commissioner	Heroika Isyahyuti	Komisaris Commissioner	Heroika Isyahyuti
Komisaris Commissioner	Erist Kleopa Wardana	Komisaris Commissioner	Erist Kleopa Wardana
Komisaris Commissioner	Bagus Purubito	Komisaris Commissioner	Bagus Purubito

Komposisi Direksi sepanjang tahun 2023 juga mengalami 1 (satu) kali perubahan. Sesuai dengan keputusan RUPS tanggal 3 Agustus 2023, terdapat pengangkatan Sdr. Komang Pernita sebagai Direksi. Dengan demikian kronologis perubahan komposisi Direksi adalah sebagai berikut:

Throughout 2023, the composition of the Board of Directors also 1 (one) time changed. Following the GMS decision on August 3, 2023, Mr. Komang Pernita was appointed as Director. Thus, the chronology of changes in the composition of the Board of Directors is as follows:

Tabel Kronologis Perubahan Komposisi Direksi
Table of Changes Chronology in the Composition of the Board of Directors

Komposisi Direksi Periode 1 Januari 2023 – 3 Agustus 2023 Composition of the Board of Directors for January 1, 2023 – August 3, 2023		Komposisi Direksi Periode 3 Agustus 2023 – Saat Ini Composition of the Board of Directors for August 3, 2023 – Present	
Jabatan Position	Nama Name	Jabatan Position	Nama Name
Direktur Utama President Director	Ruly Firmansyah	Direktur Utama President Director	Ruly Firmansyah
Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi Director of Human Capital Management and Administration	Karyawan Aji	Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi Director of Human Capital Management and Administration	Karyawan Aji
Direktur Pengembangan dan Niaga Director of Business Development and Commerce	Muhamad Reza	Direktur Pengembangan dan Niaga Director of Business Development and Commerce	Muhamad Reza
Direktur Keuangan Director of Finance	Dwi Hartono	Direktur Keuangan Director of Finance	Dwi Hartono
Direktur Operasi Pembangkit Gas Director of Operation Gas Power Plant	M. Yusuf Hasan A.	Direktur Operasi Pembangkit Gas Director of Operation Gas Power Plant	Komang Pernita
Direktur Operasi Pembangkit Batubara Director of Operation Coal Power Plant	Rachmanze Indarto	Direktur Operasi Pembangkit Batubara Director of Operation Coal Power Plant	Rachmanze Indarto

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi setelah Tahun Buku 2023
Changes in the Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors after Fiscal Year 2023

Setelah tahun buku 2024 sampai dengan diterbitkannya Laporan Tahunan ini, tidak terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi.

After the fiscal year 2024 until the issuance of the Annual Report, there were no changes in the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors.

Profil Dewan Komisaris
Profile of the Board of Commissioner

Evy Haryadi

Komisaris Utama President Commissioner
(2022 – saat ini) (2022 – present)

Warga Negara Indonesia, berusia 54 tahun. Lahir di Jakarta, 19 Desember 1969. Berdomisili di Jakarta. Meraih gelar Sarjana Elektro dari Institut Teknologi Bandung (1992) dan gelar Master of Electrical Engineering dari Waseda University (1999).

Indonesian citizen, 54 years old. Born in Jakarta, December 19. Well Domiciled in Jakarta. He obtained a Bachelor's degree in Electrical Engineering from the Bandung Institute of Technology (1992) and a Master of Electrical Engineering from Waseda University (1999).

Dasar Hukum Penunjukkan sebagai Dewan Komisaris
Diangkat sebagai Komisaris Utama melalui Keputusan Pemegang Saham secara Sirkuler tanggal 21 September 2022.

Riwayat Jabatan
Bekerja di PLN sejak tahun 1995, bahwa memulai karirnya sebagai staff perencanaan pengusahaan Kantor Induk pada PT PLN Wilayah XI. Selaku pernah memegang beberapa posisi penting antara lain General Manager Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali (2013 – 2015), General Manager Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan (2017 – 2019), General Manager Unit Induk Pusat Pengatur Beban Jawa, Madura dan Bali (2019 – 2021), Kepala Satuan Pusat Keunggulan PT PLN (Persero) (2021) dan Direktur Perencanaan Korporat PT PLN (Persero) (2021 - 2022).

Rangkap Jabatan
Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PT PLN (Persero) (2022 – saat ini).

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Legal Basis for Appointment as the Board of Commissioners
Appointed as President Commissioner through a Circular Shareholder Decree dated September 21, 2022.

Position History
Working at PLN since 1995, he started his career as business planning staff at PT PLN Region XI Headquarter. He held several important positions, including General Manager of the Distribution and Load Control Center for Java and Bali (2013 – 2015), General Manager of the Electricity Research and Development Center (2017 – 2019), General Manager of the Main Unit for the Center for Load Control for Java, Madura and Bali (2019 – 2021), Head of PT PLN (Persero) Center of Excellence Unit (2021) and Director of Corporate Planning at PT PLN (Persero) (2021 - 2022).

Concurrent Position
Director of Transmission and System Planning at PT PLN (Persero) (2022 - present).

Affiliation
Having no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, nor with the Majority and Controlling Shareholders.

Kenedy

Komisaris Independen Independent Commissioner
(2021 – saat ini) (2021 – present)

Warga Negara Indonesia, berusia 59 tahun. Lahir di Cirebon, 12 November 1964. Berdomisili di Jakarta. Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Tanjungpura (2001) dan gelar Master of Management dari Universitas Winaya Mukti (2004).

Indonesian citizen, 59 years old. Born in Cirebon, November 12, 1964. Domiciled in Jakarta. He obtained a Bachelor of Laws degree from Tanjungpura University (2001) and a Master of Management degree from Winaya Mukti University (2004).

Dasar Hukum Penunjukkan sebagai Dewan Komisaris
Diangkat sebagai Komisaris melalui Keputusan Pemegang Saham secara Sirkuler tanggal 14 Desember 2022.

Legal Basis for Appointment as the Board of Commissioners
Appointed as Commissioner through Circular Shareholder Decree dated December 14, 2022.

Riwayat Jabatan
Memulai karir di Kepolisian Republik Indonesia dengan pangkat terakhir Inspektur Jenderal Polisi (IRJEN POL) Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN). Berbagai jabatan di Kepolisian pernah didudukinya di antaranya menempati posisi sebagai Kasat Serse Polresta Pekanbaru (1994), Wakapolres Pontianak (2005), Kapolres Deli Serdang (2005), Wakapolsek Pekanbaru (2007), Direktorat Polda Bali (2016), KA BNNP Sulawesi Barat (2019), KA Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Riau (2020), dan Direktur Intelijen Deputi Pemberantasan BNN (2021). Selain itu beliau juga pernah mendapat penugasan luar negeri diantaranya, London Metropolitan Police – Counter Terrorism Exercise dan Bilateral Cooperation Conference di Kuba, Argentina, Panama dan Ekuador.

Position History
Starting his career in the Republic of Indonesia Police with the final rank of Inspector General of Police (IRJEN POL) Deputy for Eradication of the National Narcotics Agency (BNN). He held various positions in the Polri, including positions as Head of Police Serse Pekanbaru Police (1994), Deputy Chief of Police of Pontianak (2005), Chief of Deli Serdang Police (2005), Deputy Chief of Police of Pekanbaru (2007), Directorate Polda Bali (2016), Chairman of BNNP West Sulawesi (2019), Chairman of the Riau Provincial National Narcotics Agency (BNNP) (2020), and BNN Deputy Director of Intelligence for Eradication (2021). Moreover, he also received overseas assignments including, London Metropolitan Police – Counter Terrorism Exercise and Bilateral Cooperation Conference in Cuba, Argentina, Panama and Ecuador.

Rangkap Jabatan
Ketua Komite Audit PLN NP (2021 – saat ini).

Concurrent Position
Chairman of the Audit Committee at PLN NP (2021 – present).

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Affiliation
Having no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, nor with the Majority and Controlling Shareholders.

Ida Nuryatin Finahari

Komisaris Independen
(2020 – saat ini) (2020 –present)

Warga Negara Indonesia, berusia 56 tahun. Lahir di Kediri, 8 Januari 1968. Berdomisili di Jakarta. Meraih gelar Sarjana Teknik Kimia dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (1990) dan gelar Master of Engineering di bidang Applied Chemistry dari Tokyo University of Agriculture and Technology (2003).

Indonesian citizen, 56 years old. Born in Kediri, January 8, 1968. Domiciled in Jakarta. She obtained a Bachelor's degree in Chemical Engineering from the Sepuluh Nopember Institute of Technology Surabaya (1990) and a Master of Engineering degree in Applied Chemistry from Tokyo University of Agriculture and Technology (2003).

Dasar Hukum Pencalonan sebagai Dewan Komisaris
Diangkat sebagai Komisaris melalui Keputusan Pemegang Saham secara Sirkuler tanggal 16 Juni 2020.

Riwayat Jabatan
Memulai karir di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan memiliki berbagai posisi penting antara lain sebagai Kepala Subdirektorat Penyiapan Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan (2015 - 2017), Direktur Konservasi Energi (2017 - 2018), Direktur Panas Bumi (2018 - 2021), dan Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan (2021 - 2023).

Rangkap Jabatan
- Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (2022 - saat ini).
- Wakil Ketua Komite Investasi dan Manajemen Risiko PLN NP (2022 - saat ini).

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan anggota Direksi, namun memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Legal Basis for Appointment as the Board of Commissioners
Appointed as Commissioner through a Circular Shareholder Decree dated June 16, 2020.

Position History
Started her career at the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) and held various important positions, including Head of Sub-directorate for Preparation of Various New Energy and Renewable Energy (2015 - 2017), Director of Energy Conservation (2017 - 2018), Director of Geothermal (2018 - 2021), and Director of Electricity Business Development (2021 - 2023).

Concurrent Position
- Secretary of the Directorate General of Electricity (2022 - present).
- Deputy Chair of the PLN NP Investment and Risk Management Committee (2022 - present).

Affiliation
Having no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, nor with the Majority and Controlling Shareholders.

Hendra Iswahyudi

Komisaris Commissioner
(2017 – saat ini) (2017 – present)

Warga Negara Indonesia, berusia 55 tahun. Lahir di Banyuwangi, 30 November 1968. Bertempat tinggal di Jakarta. Meraih gelar Sarjana Teknik Fisika dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (1993), Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia (2003) dan Doktor Ilmu Ekonomi dari Universitas Indonesia (2013). Beliau memiliki sertifikasi *Certified in Risk Governance Professional* (CRGP).

Indonesian citizen, 55 years old. Born in Banyuwangi, November 30, 1968. Domiciled in Jakarta. He obtained a Bachelor's degree in Physics Engineering from the Sepuluh Nopember Institute of Technology (1993), a Master's Degree in Planning and Public Policy from the University of Indonesia (2003) and a Doctorate in Economics from the University of Indonesia (2013). He has Certified in Risk Governance Professional (CRGP) certification.

Dasar Hukum Pengangkatan sebagai Dewan Komisaris

Selebumnya diangkat sebagai PN. Komisaris pertama kali melalui Rapat Umum Pemegang Saham secara Sirkuler tanggal 11 Desember 2017 dan diangkat kembali secara definitif sebagai Komisaris melalui Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler tanggal 12 November 2020.

Legal Basis for Appointment as the Board of Commissioners

Appointed as Acting Commissioner for the first time through a Circular General Meeting of Shareholders on December 11, 2017 and was definitively reappointed as Commissioner through a Circular Shareholder Decree on November 12, 2020.

Riwayat Jabatan

Memulai karir di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan sejak tahun 1996 dan pernah menduduki jabatan penting antara lain sebagai Kepala Bagian Rencana dan Laporan (2011 - 2016), Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (2016 – 2017), dan Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan (2017 - 2019).

Position History

Started his career at the Directorate General of Electricity, Directorate of Electricity Business Development since 1996 and held important positions, including Head of the Plans and Reports Section (2011 - 2016), Director of Planning and Development of New, Renewable Energy Infrastructure and Energy Conservation (2016 - 2017), and Director of Electricity Business Development (2017 - 2019).

Rangkap Jabatan

- Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Energi baru Terbarukan dan Konservasi Energi (2021 – saat ini).
- Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi PLN NP (2022 – saat ini).

Concurrent Position

- Director of Planning and Development of New Renewable Energy Infrastructure and Energy Conservation (2021 – present).
- Chairman of the PLN NP Nomination and Remuneration Committee (2022 - present).

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan anggota Direksi, namun memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Affiliation

Having no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, nor with the Majority and Controlling Shareholders.

Emir Kresna Wardana

Komisaris Commissioner
(2020 – saat ini) (2020 – present)

Warga Negara Indonesia, berusia 43 tahun. Lahir di Malang, 27 November 1980. Berdomisili di Jakarta. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Informatika dari Sekolah Tinggi Informatika & Komputer Indonesia (2004) dan gelar Pascasarjana bidang Ilmu Komunikasi dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2020).

Indonesian citizen, 43 years old. Born in Malang, November 27, 1980. Domiciled in Jakarta. He obtained a Bachelor's degree in Informatics Engineering from the Indonesian College of Informatics & Computers (2004) and a Postgraduate degree in Communication Science from the Muhammadiyah University of North Sumatera (2020).

Dasar Hukum Pengangkatan sebagai Dewan Komisaris
Diangkat sebagai Komisaris melalui Keputusan Pemegang Saham secara Sirkular tanggal 30 Desember 2021.

Riwayat Jabatan
Memulai karir di Sony BMG sebagai Talent, Arranger & Composer (2005 – 2008) dan Manager General Affair PT Sinergi Sara Pratama Energy (2011 – 2012) serta pernah memegang jabatan penting antara lain sebagai Tenaga Ahli Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) (2012 – 2014), Tenaga Ahli Komisi I DPR RI (2014 – 2015), Staf Khusus I Sekretaris Kabinet RI (2015 – saat ini), Komisaris PT Patra Jasa (2018 – 2020).

Rangkap Jabatan
- Staf Khusus I Sekretaris Kabinet Republik Indonesia (2015 – saat ini).
- Wakil Ketua Komite Nominasi dan Remuneraci PLN NP (2022 – saat ini).

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Legal Basis for Appointment as the Board of Commissioners
Appointed as Commissioner through a Circular Shareholder Decree dated December 30, 2021.

Position History
Started his career at Sony BMG as Talent, Arranger & Composer (2005 – 2008) and General Affairs Manager of PT Sinergi Sara Pratama Energy (2011 – 2012) as well as held important positions, including as Expert Staff for Deputy Chair of the Indonesian House of Representatives (DPR RI) (2012 – 2014), Expert Staff for Commission I DPR RI (2014 – 2015), Special Staff I to the Cabinet Secretary of the Republic of Indonesia (2015 – present), Commissioner of PT Patra Jasa (2018 – 2020).

Concurrent Position
- Special Staff I to the Cabinet Secretary of the Republic of Indonesia (2015 – present).
- Deputy Chair of the PLN NP Nomination and Remuneration Committee (2022 – present).

Affiliation
Having no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, nor with the Majority and Controlling Shareholders.

Bagus Puruhito

Komisaris Independen Independent Commissioner
(2021 – saat ini) (2021 – present)

Warga Negara Indonesia, 61 tahun. Lahir di Purwokerto, 3 Oktober 1962. Berdomisili di Jakarta. Meraih gelar Sarjana di bidang Manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen IMMI Jakarta (2002) dan Pascasarjana di bidang Manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen IMMI Jakarta (2014).

Indonesian citizen, 61 years old. Born in Purwokerto, October 3, 1962. Domiciled in Jakarta. He obtained a Bachelor's degree in Management from the IMMI Jakarta College of Management (2002) and a Postgraduate degree in Management from the IMMI Jakarta College of Management (2014).

Dasar Hukum Pengangkatan sebagai Dewan Komisaris
Diangkat sebagai Komisaris melalui Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler tanggal 30 Desember 2021.

Riwayat Jabatan
Mengawali karir di TNI Angkatan Udara (TI) sejak tahun 2000 di Lanud Hasanuddin dan memiliki pengalaman profesional antara lain sebagai Danlanud Halim Perdanakusuma (2009), Komandan Komando Pendidikan Angkatan Udara (2015), Pangkoa Komando Operasi Angkatan Udara I (2016) dan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara (2019), Wakil Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) (2019) dan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) (2019 – 2021).

Rangkap Jabatan
Ketua Komite Investasi dan Manajemen Risiko PLN NP (2022 – saat ini).

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Legal Basis for Appointment as the Board of Commissioners
Appointed as Commissioner through Circular Shareholder Decree dated December 30, 2021.

Position History
He started his career in the Indonesian Air Force since 2000 at Hasanuddin Air Base and has professional experiences, including as Commander of Halim Perdanakusuma (2009), Commander of the Air Force Education Command (2015), Commander of Air Force Operations Command I (2016) and Deputy Chief of Staff of the Indonesian Armed Forces Air Force (2019), Deputy Governor of the National Resilience Institute (Lemhanas) (2019), and Head of the National Search and Rescue Agency (Basarnas) (2019 – 2021).

Concurrent Position
Chairman of the Investment and Risk Management Committee at PLN NP (2022 – present).

Affiliation
Having no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, nor with the Majority and Controlling Shareholders.

Profil Direksi
Profile of the Board of Director

Ruly Firmansyah

Direktur Utama President Director

(2022 – saat ini) (2022 – present)

Warga Negara Indonesia, berusia 60 tahun. Lahir di Jakarta, 13 Maret 1964. Berdomisili di Jakarta. Meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Indonesia (1990) dan Master of Business Management dari dari Institut Teknologi Bandung (2002). Beliau memiliki sertifikasi *Qualified Risk Governance Professional* (QRGP).

Indonesian citizen, 60 years old. Born in Jakarta, March 13, 1964. Domiciled in Jakarta. He obtained a Bachelor's degree in Electrical Engineering from the University of Indonesia (1990) and a Master of Business Management from the Bandung Institute of Technology (2002). He has Qualified Risk Governance Professional (QRGP) certification.

Dasar Hukum Pengangkatan sebagai Direksi

Diangkat sebagai Direktur Utama melalui RUPS secara Sirkuler tanggal 21 September 2022.

Riwayat Jabatan

Bekerja di PT PLN (Persero) sejak tahun 1995, beliau memulai karirnya pada bidang pemeliharaan listrik PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II. Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama PLN NP, beliau pernah memegang beberapa posisi penting antara lain General Manager Unit Pembangkitan Muara Tawar (2020 – 2021), Kepala Satuan Pengadaan PT PLN (2019), General Manager PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan (2012 – 2015), Executive Vice President Pengembangan Regional Kalimantan PT PLN (Persero) (2016 – 2018), dan terakhir menjabat sebagai Direktur Utama pada PT Pelayanan Listrik Nusantara (2019 – 2022).

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan, baik di PLN NP maupun di perusahaan lain.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Legal Basis for Appointment as the Board of Directors

Appointed as President Director through a Circular GMS date September 21, 2022.

Position History

Working at PT PLN (Persero) since 1995, he started his career in the field of electrical maintenance at PT PLN Pembangkitan Jawa-Bali II. Prior to serving as President Director of PLN NP, he held several important positions including General Manager of the Muara Tawar Power Plant (2020 – 2021), Head of Procurement Unit at PT PLN (2019), General Manager at Southern Sumatra Generation Unit of PT PLN (Persero) (2012 – 2015), Executive Vice President for Kalimantan Regional Development at PT PLN (Persero) (2016 – 2018), and most recently served as President Director at PT Pelayanan Listrik Nusantara (2019 – 2022).

Concurrent Position

Having no Concurrent Position, either at PLN NP or at another company.

Affiliation

Having no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, nor with the Majority and Controlling Shareholders.

Karyawan Aji

Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi
Director of Human Capital Management and Administration
(2020 – saat ini) (2020 – present)

Warga Negara Indonesia, berusia 57 tahun. Lahir di Yogyakarta, 1 Mei 1967 Berdomisili di Jakarta. Meraih gelar Sarjana Teknik Nuklir dari Universitas Gadjah Mada (1992) dan Master di bidang Kelistrikan dari Curtin University of Technology Perth (2009). Beliau memiliki sertifikasi *Certified Risk Governance Professional* (CRGP) dan Insinyur Profesional Utama.

Indonesian citizen, 57 years old. Born in Yogyakarta, May 1, 1967. Domiciled in Jakarta. He obtained a Bachelor's degree in Nuclear Engineering from Gadjah Mada University (1992) and a Master's degree in Electrical Engineering from Curtin University of Technology Perth (2009). He holds Certified Risk Governance Professional (CRGP) and Principal Professional Engineer certifications.

Dasar Hukum Penunjukan sebagai Direksi
Diangkat sebagai Direktur SDM dan Administrasi melalui RUPS secara Sirkuler tanggal 12 November 2020 dan diteguhkan sebagai Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi melalui RUPS secara Sirkuler tanggal 21 September 2021.

Riwayat Jabatan
Memulai karir di PT PLN (Persero) sejak tahun 1994 dan pernah menduduki jabatan strategis di antaranya Executive Vice President Talent Development PT PLN (Persero) (2018 – 2020), Kepala Divisi Pengembangan Talenta PT PLN (Persero) (2018), Kepala Divisi Pengembangan Organisasi PT PLN (Persero) (2017 - 2018), General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat (2016 - 2017), dan Manager Engineering PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B.

Rangkap Jabatan
Tidak memiliki rangkap jabatan, baik di PLN NP maupun di perusahaan lain.

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Legal Basis for Appointment as the Board of Directors
Appointed as Director of Human Capital and Administration through a Circular GMS on November 12, 2020 and appointed as Director of Human Capital Management and Administration through a Circular GMS on September 21, 2021.

Position History
Started his career at PT PLN (Persero) since 1994 and held strategic positions, including Executive Vice President Talent Development at PT PLN (Persero) (2018 – 2020), Head of Talent Development Division at PT PLN (Persero) (2018), Head of Organization Development Division at PT PLN (Persero) (2017 - 2018), West Nusa Tenggara Region General Manager at PT PLN (Persero) (2016 - 2017), and Engineering Manager at Tanjung Jati B Power Plant at PT PLN (Persero).

Concurrent Position
Having no Concurrent Position, either at PLN NP or at another company.

Affiliation
Having no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, nor with the Majority and Controlling Shareholders.

Muhamad Reza

Direktur Pengembangan dan Niaga

Director of Development and Commerce

(2022 – saat ini) (2022 – sprsent)

Warga Negara Indonesia, berusia 49 tahun. Lahir di Bandung, 4 November 1974. Berdomisili di Jakarta. Memperoleh gelar Sarjana Electrical Engineering dari Institut Teknologi Bandung (1997), Magister of Electrical Engineering dari Delft University of Technology di Netherlands (2000) dan Doctor of Philosophy Electrical Power Systems dari Delft University of Technology di Netherlands (2006). Beliau memiliki sertifikasi *Qualified Risk Governance Professional* (QRGP).

Indonesian citizen, 49 years old. Born in Bandung, November 4, 1974. Domiciled in Jakarta. He obtained a Bachelor's degree in Electrical Engineering from the Bandung Institute of Technology (1997), a Master of Electrical Engineering from Delft University of Technology in the Netherlands (2000) and a Doctor of Philosophy in Electrical Power Systems from Delft University of Technology in the Netherlands (2006). He holds Qualified Risk Governance Professional (QRGP) certification.

Dasar Hukum Pengangkatan sebagai Direksi

Diangkat sebagai Direktur melalui RUPS secara Sirkuler tanggal 21 September 2022.

Riwayat Jabatan

Pernah menjabat sebagai Direktur Enjiniring di PT PLN Enjiniring pada (2021 – 2022), Technical Expert, Business Development & Business Line Manager Power System, Advisory & Advanced Analytics di PT Trectebel Engineering Indonesia (2019 – 2021) dan sebagai Business Development Manager, Power System Specialist & Country Representative di Tractebel International (2016 – 2019).

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan, baik di PLN NP maupun di perusahaan lain.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Legal Basis for Appointment as the Board of Directors

Appointed as Director through a Circular GMS on September 21, 2022.

Position History

Previously served as Director of Engineering at PT PLN Enjiniring (2021 – 2022), Technical Expert, Business Development & Business Line Manager Power System, Advisory & Advanced Analytics at PT Tractebel Engineering Indonesia (2019 – 2021) and as Business Development Manager, Power System Specialist & Country Representative at Tractebel International (2016 – 2019).

Concurrent Position

Having no Concurrent Position, either at PLN NP or at another company.

Affiliation

Having no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, nor with the Majority and Controlling Shareholders.

Dwi Hartono

Direktur Keuangan Director of Finance

(2022 – sekarang) (2022 – present)

Warga Negara Indonesia, berusia 48 tahun. Lahir di Wonogiri, 13 November 1975. Berdomisili di Jakarta. Memperoleh gelar Sarjana Sarjana Mesin dari Universitas Gadjah Mada (1999) dan Master di Bidang Kelistrikan di Delft University of Technology, Netherlands (2011). Beliau memiliki sertifikasi *Qualified Chief Risk Officer* (QCRO).

Indonesian citizen, 48 years old. Born in Wonogiri, November 13, 1975. Domiciled in Jakarta. He obtained a Bachelor's degree in Engineering from Gadjah Mada University (1999) and a Master's degree in Electrical Engineering at Delft University of Technology, Netherlands (2011). He holds Qualified Chief Risk Officer (QCRO) certification.

Dasar Hukum Pengangkatan sebagai Direksi

Diangkat sebagai Direktur melalui RUPS secara Sirkuler tanggal 21 September 2022.

Riwayat Jabatan

Memulai karir sebagai Teknisi Utama Mesin di PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (2003). Beliau pernah menjabat sebagai EVP Manajemen Keuangan Aset PT PLN (Persero) (2021 – 2022), Direktur Operasi PT PJB Investasi pada tahun (2017 – 2021) dan Deputi Manajer Perencanaan IPP PT PLN (Persero) (2015 – 2017).

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan, baik di PLN NP maupun di perusahaan lain.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Legal Basis for Appointment as the Board of Directors

Appointed as Director through a Circular GMS on September 21, 2022.

Position History

Started his career as a Major Machine Technician at PT PLN (Persero) South Kalimantan and Central Kalimantan Region (2003). He previously served as EVP of Asset Financial Management at PT PLN (Persero) (2021 - 2022), Director of Operations at PT PJB Investasi in (2017 - 2021) and Deputy IPP Planning Manager at PT PLN (Persero) (2015 - 2017).

Concurrent Position

Having no Concurrent Position, either at PLN NP or at another company.

Affiliation

Having no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, nor with the Majority and Controlling Shareholders.

Komang Parmita

Direktur Operasi Pembangkit Gas
Director of Operation Gas Power Plant
(2020 - sekarang) (2020 - present)

Warga Negara Indonesia, berusia 53 tahun. Lahir di Singaraja, 23 Mei 1970. Berdomisili di Tangerang. Memperoleh gelar Sarjana Mesin dari Universitas Brawijaya (1993) dan gelar Pascasarjana bidang Teknik Lainnya dari Curtin University of Technology (2008). Beliau memiliki sertifikasi *Certified Risk Governance Professional* (CRGP).

Indonesian citizen, 53 years old. Born in Singaraja, May 23, 1970. Domiciled in Tangerang. He obtained a Bachelor's degree in Engineering from Brawijaya University (1993) and a Postgraduate degree in Other Engineering from Curtin University of Technology (2008). He holds Certified Risk Governance Professional (CRGP) certification.

Dasar Hukum Pengangkatan sebagai Direksi
Diangkat sebagai Direktur melalui RUPS secara Sirkuler tanggal 3 Agustus 2020.

Riwayat Jabatan
Mengawali karir di PT PLN (Persero) sejak tahun 1995 dan memiliki berbagai posisi penting antara lain sebagai Manajer UPK PLTU Lampung (2010), Manajer Produksi PT PLN (Persero) Unit Pembangkitan Jawa Bali (2014-2016), Manajer Senior Pengelolaan Pembangkit Regional Jawa Bagian Tengah PT PLN (Persero) (2016-2018), General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B (2018-2019), Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali (2021-2022), dan Executive Vice President Health, Safety, Security & Environment PT PLN (Persero) (2019 - 2022).

Rangkap Jabatan
Tidak memiliki rangkap jabatan, baik di PLN NP maupun di perusahaan lain.

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Legal Basis for Appointment as the Board of Directors
Appointed as Director through e-Circular GMS on August 3, 2020.

Position History
Started his career at PT PLN (Persero) since 1995 and held various important positions, including as Manager of UPK Lampung CFPP (2010), Production Manager at PT Pembangkitan Jawa Bali (Persero) (2014-2016), Senior Manager of Java Regional Power Plant Management Central Section at PT PLN (Persero) (2016-2018), General Manager at Tanjung Jati B Power Plant Main Unit at PT PLN (Persero) (2018-2019), Commissioner at PT Pembangkitan Jawa Bali (2021-2022), and Executive Vice President Health, Safety, Security & Environment at PT PLN (Persero) (2019 - 2022).

Concurrent Position
Having no Concurrent Position, either at PLN NP or at another company.

Affiliation
Having no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, nor with the Majority and Controlling Shareholders.

Rachmanoe Indarto

Direktur Operasi Pembangkit Batubara

Director of Operation Coal Power Plant

(2020 – sekarang) (2020 – present)

Warga Negara Indonesia, berusia 54 tahun. Lahir di Trenggalek, 10 November 1969. Bertempat tinggal di Surabaya. Meraih gelar Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Brawijaya (1993) dan Master di Bidang Manajemen dari ITB Bandung (2003). Beliau memiliki sertifikasi *Certified Risk Governance Professional* (CRGP).

Indonesian citizen, 54 years old. Born in Trenggalek, November 10, 1969. Domiciled in Surabaya. He obtained a Bachelor's degree in Mechanical Engineering from Brawijaya University (1993) and a Master's degree in Management from ITB Bandung (2003). He holds Risk Governance Professional (CRGP) certification.

Dasar Hukum Pengangkatan sebagai Direksi

Diangkat sebagai Direktur Operasi-2 melalui RUPS secara Sirkuler tanggal 12 November 2020 dan diangkatkan sebagai Direktur Operasi Pembangkit Batubara melalui RUPS secara Sirkuler tanggal 21 September 2020.

Riwayat Jabatan

Memulai karir di PLN NP sejak tahun 1997 dan ditugaskan sebagai AM II Keandalan Operasi PLTU/G-PLTGU. Pernah memduduki jabatan penting antara lain sebagai General Manager UP Sumbagsel (2019 - 2020), General Manager Unit Pembangkitan Gresik (2015 - 2016), General Manager Unit Pembangkitan Paiton (2013 - 2015), General Manager PLTU Paiton (2011 - 2012), Manajer Perencanaan Korporat (2010 - 2011), dan Operasi & Pemeliharaan PLTU & PLTG (2002 - 2003).

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan, baik di PLN NP maupun di perusahaan lain.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Legal Basis for Appointment as the Board of Directors

Appointed as Director of Operations-2 through a Circular GMS on November 12, 2020 and appointed as Director of Coal Power Plant Operations through a Circular GMS on September 21, 2020.

Position History

Started his career at PLN NP in 1997 and was assigned as AM II CFPP/CCPP Operations Reliability. He held important positions, including General Manager of Southern Sumatera Generation Unit (2019 - 2020), General Manager of Gresik Generation Unit (2015 - 2016), General Manager of Paiton Generation Unit (2013 - 2015), General Manager of Paiton CFPP (2011 - 2012), Manager Corporate Planning (2010 - 2011), and Maintenance Specialist for CFPP & CCPP (2002 - 2003).

Concurrent Position

Having no Concurrent Position, either at PLN NP or at another company.

Affiliation

Having no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, nor with the Majority and Controlling Shareholders.

Jumlah dan Komposisi SDM
HR Number and Composition

Keberlanjutan bisnis Perusahaan ditopang dengan kecukupan SDM yang memadai, untuk memastikan efektivitas proses kerja dan regenerasi organisasi dalam mendukung eksekusi program strategis PLN NP.

Adequate human resources supports business sustainability of the Company, to assure the effectiveness of work processes and organizational regeneration in supporting strategic programs execution of PLN NP

Jumlah Karyawan PLN NP per 31 Desember 2023 adalah sebanyak 4.985 karyawan, jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 sebanyak 3.034 karyawan. Kenaikan jumlah tersebut terutama disebabkan penambahan karyawan pasca transformasi Holding Subholding PLN Grup. Karyawan aktif PLN NP didominasi oleh Karyawan yang berada pada usia 31 sampai dengan 35 tahun dengan jumlah sebanyak 1.698 orang atau sebesar 34% dan latar belakang pendidikan S1 sebanyak 2.422 orang atau sebesar 48,81% dari jumlah karyawan.

Total PLN NP employees as of December 31, 2023 was 4,985 employees, this number is higher than in 2022 of 3,034 employees. The increase in this number was mainly due to the addition of employees after the Company transformation into PLN Group Holding Subholding. PLN NP has active employees dominated by employees aged 31 to 35 years with a total of 1,698 employees or 34% and 2,422 employees with a bachelor's educational background or 48.81% of the total number of employees.

Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021-2023 (orang)
Table of Number of Employees by Gender in 2021-2023 (person)

Jenis Kelamin Gender	2021	2022	2023	Perubahan Changes in 2022-2023
Laki-laki Male	2.667	2.643	4.412	1.769
Perempuan Female	404	391	573	182
Jumlah Total	**3.071**	**3.034**	**4.985**	**1.951**

Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenjang Jabatan Tahun 2021-2023 (orang)
Table of Total Employees by Position Level in 2021-2023 (person)

Jenjang Jabatan Position Level	2021	2022	2023	Perubahan Changes in 2022-2023
Senior Specialist	17	22	48	26
Specialist	27	37	139	102
Kepakaran Expertise	88	148	8	(140)
Generalist 3	474	525	765	240
Generalist 2	1.403	1.384	2.027	643
Generalist 1	243	270	790	520
Manajemen Atas Upper Management	2	2	7	6
Manajemen Menengah Middle Management	56	83	85	3
Manajemen Dasar Basic Management	155	141	187	46
Generalist 3 Struktural Structural Generalist 3	417	379	490	111
Generalist 2 Struktural Structural Generalist 2	90	67	434	277
Jumlah Total	**3.071**	**3.034**	**4.985**	**1.951**

Jumlah Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021-2023 (orang)
Table of Total Employees by Education Level in 2021-2023 (Person)

Tingkat Pendidikan Education Level	2021	2022	2023	Perubahan Changes in 2022-2023
Strata 3 Doctor's Degree	1	1	2	1
Strata 2 Magister's Degree	[illegible]	[illegible]	333	11
Strata 1 Bachelor's Degree	1,703	1,695	2,423	728
Sarjana Muda Fresh Graduates	575	572	1,116	544
Diploma Diploma	25	27	120	93
SMA Senior High School	499	480	1,117	637
SMP Junior High School	-	-	3	3
Jumlah Total	3,071	3,034	4,193	1,159

Jumlah Karyawan Berdasarkan Rentang Usia Tahun 2021-2023 (orang)
Table of Total Employees by Age Range in 2021-2023 (Person)

Rentang Usia Age Range	2021	2022	2023	Perubahan Changes in 2022-2023
< 26 tahun years old	106	81	107	26
26 - 30 tahun years old	881	716	1,115	409
31 - 35 tahun years old	771	913	1,699	786
36 - 40 tahun years old	423	443	705	262
41 - 45 tahun years old	175	336	409	73
46 - 50 tahun years old	306	305	291	(14)
51 - 56 tahun years old	299	340	658	318
Jumlah Total	3,071	3,034	4,193	1,159

Jumlah Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2021-2023 (orang)
Table of Total Employees by Employment Status in 2021-2023 (Person)

Status Kepegawaian Employment Status	2021	2022	2023	Perubahan Changes in 2022-2023
Karyawan Tetap Permanent Employee	3,071	3,034	4,193	1,159
On the Job Training	-	-	86	86
Jumlah Total	3,071	3,034	4,279	1,245

Jumlah Karyawan Berdasarkan Wilayah Kerja Tahun 2021-2023 (orang)
Table of Total Employees by Working Area in 2021-2023 (Person)

Wilayah Kerja Working Area	2021			2022			2023			Perubahan Changes in 2023-2022
	L M	P F	Total	L M	P F	Total	L M	P F	Total	
Kantor Pusat Headquarter	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
UP Gresik Gresik (G)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
UP Muara Karang Muara Karang (G)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
UP Tahun UP Tahun (G)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
UP Ciara UP Ciara (G)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
UP Bramo Bramo (G)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
UP Muara Tawar Muara Tawar (G)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Unit HMO (UHMO)* HMO Unit (UHMO)*	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
UP Indonesia Indonesia (G)	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]
UP Paiton** Paiton (G)**	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
UP Rembang Rembang (G)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-
UP Pacitan Pacitan (G)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-
UP Tanjung Awar-Awar Tanjung Awar-Awar (G)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-
UP Luar Jawa 2*** Outside Java 2 (G)***	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
UP Kaltim Teluk Kaltim Teluk (G)	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-
UP Senayan Senayan (G)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]
UP Pulang Pisau Pulang Pisau (G)	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]
UP Aceh Aceh (G)	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-
Unit Pengembangan**** Development Unit****	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
Unit Pelaksana Proyek 1 (UPP-1) Project Implementation Unit 1 (UPP-1)	-	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]
Unit Pelaksana Proyek 2 (UPP-2) Project Implementation Unit 2 (UPP-2)	-	-	-	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]
PLN Academy	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-
UP Sambelia Sambelia (G)	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-
UP Sengkang Sengkang (G)	-	-	-	-	-	-	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]
UPDK Bekasi Bekasi (GC)	-	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
UPDK Balikpapan Balikpapan (GC)	-	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
UPDK Bandar Lampung Bandar Lampung (GC)	-	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
UPDK Batuaji UPDK Batuaji (GC)	-	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
UPDK Gunungsitoli Gunungsitoli (GC)	-	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
UPDK Kupang Kupang (GC)	-	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
UPDK Bandari Bandari (GC)	-	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
UPDK Minahasa Minahasa (GC)	-	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
UPDK Palangkaraya Palangkaraya (GC)	-	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
UPDK Pandan Pandan (GC)	-	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Wilayah Kerja Working Area	2021			2022			2023			Perubahan Changes in 2021-2023
	L M	P F	Total	L M	P F	Total	L M	P F	Total	
UPDK Pekanbaru Pekanbaru (DCU)	-	-	-	-	-	-	108	35	143	143
UPDK Tarakan Tarakan (DCL)	-	-	-	-	-	-	27	1	28	28
UPK Bukit Asam Bukit Asam (DDU)	-	-	-	-	-	-	101	9	110	110
UPK Nagan Raya Nagan Raya (UDU)	-	-	-	-	-	-	107	4	111	111
UPK Purwakarta Purwakarta (DZU)	-	-	-	-	-	-	119	1	120	120
UPK Sebalang Sebalang (DDU)	-	-	-	-	-	-	116	10	126	126
UPK Tanahair Tanahair (DZU)	-	-	-	-	-	-	99	14	113	113
Tugas Karya ke PLN Work Assignment to PLN	77	10	87	35	12	47	46	16	62	15
Tugas Karya ke TUEC Work Assignment to TUEC	33	4	37	19	4	23	33	3	37	(4)
Tugas Karya ke AIP PK Lain Work Assignment to AIP/Other PK	111	14	125	99	16	114	99	16	115	(1)
Jumlah Total	**3.447**	**624**	**3.071**	**3.445**	**394**	**3.839**	**4.412**	**573**	**4.985**	**1.911**

Catatan:
L (Laki-laki), P (Perempuan)

* Mulai dikelompokkan pada tahun 2022, yaitu penggabungan UPHT dan UPHB (unsur lainnya)

** Mulai dikelompokkan pada tahun 2022, yaitu penggabungan UP Pulau Bai dan UBLK (UP Pulau Bai)

*** UBLK PH (eks Jawa 1) telah dikelompokkan pada tahun 2020

**** Hasil Pengelompokkan telah dikelompokkan pada tahun 2020

Notes:
M (Male), F (Female)

* Has been recognized in 2022, which was the merger of HPHB and HPHBA (other elements)

** Has been recognized in 2022, which was the merger of Pulau Bai and Pulau Bai (UP PB)

*** Unit PH (Java 1) has been recognized in 2020

**** Development Unit has recognized in 2020

Pengembangan Kompetensi SDM
HR Competency Development

Penguatan Kompetensi Inti dan Pendukung bagi SDM sangat diperlukan guna mengoptimalkan kinerja, menjaga ketahanan Perusahaan dalam menghadapi perubahan dan merebut peluang pengembangan bisnis untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan.

Strengthening Core and Supporting Competencies for HR is highly necessary for the Company to optimizing performance, maintaining resilience in facing changes, as well as seizing business development opportunities to create sustainable value.

Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris, Direksi, Sekretaris Perusahaan, dan Kepala Satuan Pengawasan Internal
Competency Development for the Board of Commissioners, the Board of Directors, Corporate Secretary and Head of Internal Audit Unit

Pengembangan kompetensi dilakukan dalam rangka update knowledge terkait perkembangan bisnis maupun memperdalam pemahaman tentang kompetensi tertentu yang relevan dengan bisnis Perusahaan. PLN NP memfasilitasi Dewan Komisaris, Direksi, Sekretaris Perusahaan, dan Kepala Satuan Pengawasan Internal untuk mendapatkan program pengembangan sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung pelaksanaan tugas masing-masing. Sepanjang tahun 2023, telah dilaksanakan program pengembangan sebagai berikut:

PLN NP holds competency development in the context of updating knowledge related to business developments and deepening understanding of certain competencies that are relevant to the Company business. PLN NP facilitates the Board of Commissioners, Board of Directors, Corporate Secretary and Head of the Internal Audit Unit to obtain development programs following their needs to support the implementation of their respective duties. Throughout 2023, the Company held the following development programs:

Program Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris
Competency Development Program for the Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan dan Masa Jabatan Position and Term of Office	Pelatihan/Seminar/ Workshop/Narasumber Training/Seminary/ Workshop/Resources	Waktu Pelaksanaan Date	Penyelenggara dan Lokasi Organizer and Location
Fx Haryadi	Komisaris Utama President Commissioner	Seminar Nusantara Power Connect 2023 'Strengthening The Base, Expanding The Business' Nusantara Power Connect Seminar 2023 'Strengthening the Base, Expanding the Business'	11-12 September 2023 September 11-12, 2023	PJKHP, Jakarta PJKHP, Jakarta
Bagus Puruhito	Komisaris Commissioner	Seminar Nusantara Power Connect 2023 'Strengthening The Base, Expanding The Business' Nusantara Power Connect Seminar 2023 'Strengthening the Base, Expanding the Business'	11-12 September 2023 September 11-12, 2023	PJKHP, Jakarta PJKHP, Jakarta
Tirto Venesia Indriana	Komisaris Commissioner	Seminar Nusantara Power Connect 2023 'Strengthening The Base, Expanding The Business' Nusantara Power Connect Seminar 2023 'Strengthening the Base, Expanding the Business'	11-12 September 2023 September 11-12, 2023	PJKHP, Jakarta PJKHP, Jakarta
Hendra Iwahyudi	Komisaris Commissioner	Seminar Nusantara Power Connect 2023 'Strengthening The Base, Expanding The Business' Nusantara Power Connect Seminar 2023 'Strengthening the Base, Expanding the Business'	11-12 September 2023 September 11-12, 2023	PJKHP, Jakarta PJKHP, Jakarta
Kenedy	Komisaris Commissioner	Seminar Nusantara Power Connect 2023 'Strengthening The Base, Expanding The Business' Nusantara Power Connect Seminar 2023 'Strengthening the Base, Expanding the Business'	11-12 September 2023 September 11-12, 2023	PJKHP, Jakarta PJKHP, Jakarta
		Workshop profil Perusahaan dan SDG workshop Company profile and SDG workshop	17 Januari 2023 January 17, 2023	PJKHP, Online PJKHP, Online

Nama Name	Jabatan dan Masa Jabatan Position and Term of Office	Pelatihan/Seminar/ Workshop/Narasumber Training/Seminars/ Workshop/Resources	Waktu Pelaksanaan Date	Penyelenggara dan Lokasi Organizer and Location
Ida Nurjadin Thoifah	Komisaris Commissioner	Workshop profil Perusahaan dan GCG Company profile and GCG workshop	16 Juli 2022 July 16, 2022	PLN NP, Online PLN NP, Online
		Leadership Development Program Leadership Development Program	4 Agustus, 20-21 Oktober 2022 August 4, October 20-21, 2022	Kemenenergi (ESDM), Jakarta Ministry of Energy and Mineral Resources, Jakarta
		Seminar Nusantara Power Connect 2022 "Strengthening The Base, Expanding The Business" Nusantara Power Connect Seminar 2022 "Strengthening the Base, Expanding the Business"	15-17 September 2022 September 15-17, 2022	PLN NP, Jakarta PLN NP, Jakarta

Program Pengembangan Kompetensi Direksi
Competency Development Program for the Board of Directors

Nama Name	Jabatan dan Masa Jabatan Position and Term of Office	Pelatihan/Seminar/ Workshop/Narasumber Training/Seminars/ Workshop/Resources	Waktu Pelaksanaan Date	Penyelenggara dan Lokasi Organizer and Location
Budy Firmansyah	Direktur Utama President Director	Pelatihan Public Speaking Public Speaking Training	November 2022 November 2022	EIB Academy EIB Academy
Bachtiarsyah Indarto	Direktur Operasi Pembangkit Batubara Director of Coal Power Plant Operations	1. Pelatihan Public Speaking 2. Sertifikasi Certified Risk Governance Professional (CRGP) 1. Public Speaking Training 2. Certified Risk Governance Professional (CRGP) Certification	1. November 2022 2. Juli 2022 1. November 2022 2. July 2022	1. EIB Academy 2. BNSP 1. EIB Academy 2. BNSP
Aziyawan Aji	Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi Director of Human Capital Management and Administration	1. Pelatihan Public Speaking 2. Sertifikasi Certified Risk Governance Professional (CRGP) 3. School of Chief Human Resource Officer (CHRO) Program 1. Public Speaking Training 2. Certified Risk Governance Professional (CRGP) Certification 3. School of Chief Human Resource Officer (CHRO) Program	1. 10 November 2022 2. 4 Juli 2022 3. 26 September - 28 Desember 2022 1. November 10, 2022 2. July 4, 2022 3. September 26 - December 28, 2022	1. EIB Academy 2. BNSP 3. IHCO 1. EIB Academy 2. BNSP 3. IHCO
Dwi Hartono	Direktur Keuangan Director of Finance	1. Pelatihan Public Speaking 2. International Leadership Program Level Red 1. Public Speaking Training 2. International Leadership Program Level Zero	1. 10 November 2022 2. 8-10 November 2022 1. November 10, 2022 2. November 8-10, 2022	EIB Academy EIB Academy
Muhammad Reza	Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga Director of Business and Commerce Development	1. Pelatihan Public Speaking 2. CBDO Innovation School CDI/CIRT 3 1. Public Speaking Training 2. CBDO Innovation School CDI/CIRT 3	1. 10 November 2022 2. 31 Maret - 6 April 2022 1. November 10, 2022 2. March 31 - April 6, 2022	1. EIB Academy 2. IHCO 1. EIB Academy 2. IHCO
Romeng Pamtiko	Direktur Operasi Pembangkit Batubara Director of Gas Power Plant Operations	Pelatihan Public Speaking Public Speaking Training	10 November 2022 November 10, 2022	EIB Academy EIB Academy

Program Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan
Competency Development Program for Corporate Secretary

Nama Name	Pelatihan/Seminar/Workshop/Narasumber Training/Seminars/Workshop/Resources	Waktu Pelaksanaan Date	Penyelenggara dan Lokasi Organizer and Location
Tri Mery Purwanti	Pelatihan Public Speaking Public Speaking Training	10 November 2022 November 10, 2022	EIB Academy EIB Academy

Program Pengembangan Kompetensi Kepala Satuan Pengawasan Internal
Competency Development Program for the Head of Internal Audit Unit

Nama Name	Pelatihan/Seminar/ Workshop/Narasumber Training/Seminar/ Workshop/Resources	Waktu Pelaksanaan Date	Penyelenggara dan Lokasi Organizer and Location
Ditcom Sanaji Sidoarjo	Pelatihan Audit Internal Report Internal Audit Report Training	9-10 Oktober 2023 October 9-10, 2023	PJB Academy PJB Academy
Ditcom Sanaji Sidoarjo	Pelatihan Public Speaking Public Speaking Training	12 November 2023 November 12, 2023	PJB Academy PJB Academy

Pengembangan Kompetensi untuk Karyawan
Competency Development for Employees

Pengembangan Kompetensi SDM merupakan bagian dari Nawa Karsa Direksi SDM sebagai manifestasi dari komitmen PLN NP dalam mengutamakan pengembangan karyawan dan keberlangsungan organisasi. PLN NP memandang pentingnya penguatan kompetensi sebagai fondasi utama untuk menjamin kelancaran operasional dan peningkatan kinerja unit-unit pembangkit listrik yang telah diintegrasikan. Program Pengembangan Kompetensi Human Capital yang dikoreksi oleh PLN NP disusun dengan cermat melalui analisis kebutuhan pelatihan (Training Need Analysis/TNA) yang komprehensif, menjadi pada penyusunan Competency Based Training (CBT), Performance Based Training (PBT), dan Program Pembelajaran Strategis.

HR Competency Development is priority of the HR Directorate as manifestation of PLN NP commitment to prioritizing employee development and organizational sustainability. PLN NP views the importance of strengthening competence as the main foundation for ensuring smooth operations and improving the performance of integrated power plant units. PLN NP carefully prepared the Human Capital Competency Development Program through a comprehensive training needs analysis (TNA), leading to the preparation of Competency Based Training (CBT), Performance Based Training (PBT), and Strategic Learning Programs.

Kesetaraan dan Kesempatan yang Sama dalam Pendidikan dan Pelatihan
Equality and Equal Opportunities in Education and Training

Perusahaan memastikan bahwa karyawan di semua wilayah operasional unit pembangkit yang terintegrasi memiliki keahlian dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengoperasikan dan mengembangkan bisnis yang dijalankan. PLN NP menjunjungkan prinsip kesetaraan dan kesempatan kesempatan yang sama dalam pengembangan kompetensi seluruh karyawan tanpa memandang gender, suku, agama dan ras (SARA) maupun level jabatan. Komitmen ini tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama antara PLN NP dengan Serikat Kerja serta kebijakan Human Capital Management System, terutama aspek pendidikan dan pelatihan karyawan. Untuk informasi lebih lengkap tentang pengelolaan Sumber Daya Manusia secara menyeluruh, dapat dilihat pada Bab Tinjauan Pendukung Bisnis bagian Sumber Daya Manusia dalam Laporan Tahunan ini.

The Company ensures that employees in all operational areas of the integrated power plant units have the skills and knowledge necessary to operate and develop the business being run. PLN NP prioritizes the principles of equality and equal opportunities in developing the competencies of the entire employees regardless of gender, ethnicity, religion and race (SARA) or position level. This commitment is contained in the Collective Labor Agreement between PLN NP and the Labor Union as well as the Human Capital Management System policy, especially aspects of employee education and training. For more complete information regarding overall Human Resources management, it is available at the Business Support Overview chapter in the Human Resources section of this Annual Report.

Anggaran Pengembangan Kompetensi untuk Karyawan
Competency Development Budget for Employees

Perusahaan telah merealisasikan anggaran untuk pengembangan kompetensi karyawan tahun 2023 sebesar Rp96,7 miliar, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp81,29 miliar. Peningkatan ini terutama karena pada tahun 2023 terdapat penambahan unit pasca HGM sehingga pembelajaran yang diperlukan semakin meningkat.

The Company realized budget for employee competency development in 2023 of Rp96,7 billion, an increase compared to 2022 of Rp81,29 billion. This increase is mainly due to there are additional units post HGM so the learning required has increased.

Grafik Realisasi Anggaran Pendidikan dan Pelatihan Karyawan Tahun 2021-2023 (Rp miliar)
Graph of Employee Education and Training Budget Realization for 2021-2023 (Rp billion)

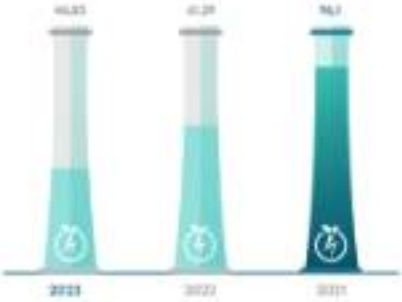

Rencana dan Realisasi Pengembangan Kompetensi Karyawan 2023
Plans and Realization of Employee Competency Development in 2023

Realisasi atas rencana program pengembangan karyawan telah mencapai target yang ditetapkan. Berikut ini disajikan realisasi sepanjang tahun 2023 terkait pengembangan kompetensi karyawan:

Realization of the employee competency development program plan achieved the targets set. The following is a presentation of the realization throughout 2023 regarding employee competency development:

Tabel Rencana Pengembangan Kompetensi Karyawan Tahun 2023
Table of Employee Competency Development Plan for 2023

Jenis Pengembangan Kompetensi Types of Competency Development	Jumlah Batch Number of Batches		Jumlah Peserta Number of Participants	
	Target Target	Realisasi Realization	Target Target	Realisasi Realization
Pelatihan Teknis Technical Training	219	247	5,202	5,724
Pelatihan Non Teknis Non-Technical Training	120	112	3,997	3,567
Sertifikasi Teknis Engineering Certification	105	114	3,017	3,444
Sertifikasi Non Teknis Non-Technical Certification	44	52	681	387
Workshop Workshops	-	10	-	143
FGD FGD	-	1	-	20
Jumlah Total	**488**	**537**	**12,423**	**13,916**

Diklat Penjenjangan
Upgrading Training

Seluruh karyawan harus mengikuti Diklat Penjenjangan yang bersifat mandatory sebagai persyaratan kenaikan level atau penyesuaian level kompetensi dengan tanggung jawab pekerjaan. Hal tersebut berlaku bagi seluruh Anak Perusahaan yang telah menerapkan sistem pembinaan karir dan kompetensi PT PLN (Persero), yaitu Leadership Development Program (LDP) merupakan diklat bagi karyawan yang dipersyaratkan menduduki jabatan struktural dengan persyaratan kelayakan kompetensi jabatan di atas level kompetensinya, terdiri dari level LDP-IV untuk Level Supervisor Atas, LDP-III untuk Level Manajemen Dasar, LDP-II untuk Level Manajemen Menengah dan LDP-I untuk Level Manajemen Atas.

All employees is required to take mandatory upgrading training as a requirement for level advancement or equalization of competency levels with job responsibilities. The policy applies to all Subsidiaries that have ratified PT PLN (Persero)'s career and competency development system, namely the Leadership Development Program (LDP) as training for employees who are expected to occupy structural positions with job competency requirements above their competency level, consisting of the LDP level IV for Upper Supervisor Level, LDP-III for Basic Management Level, LDP-II for Middle Management Level and LDP-I for Upper Management Level.

Realisasi Diklat Penjenjangan sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

The realization of Upgrading Education and Training throughout 2023 is as follows:

Program Pengembangan Kompetensi Kepala Satuan Pengawasan Internal
Table of Upgrading Training in 2023

Jenis Diklat Penjenjangan Types of Upgrading Training	Jumlah Peserta Total Participants	Dalam Proses In the Training Process	Lulus Passed the Training
LDP - I	7	2	5
LDP - II	13	6	7
LDP - III	34	19	15
LDP - IV	63	51	12

Program Pendidikan Formal
Formal Education Program

Sebagai Subholding PLN, Karyawan PLN NP dapat mengikuti Pengembangan Kompetensi PLN (PLN Persero) yang salah satunya adalah Program Pendidikan Formal. PLN (Persero) membuka kesempatan bagi seluruh Karyawan Grup PLN yang memiliki keinginan dan komitmen untuk mengembangkan kompetensi melalui pendidikan formal khususnya pada jenjang Magister maupun Doktoral melalui program pendidikan formal PLN dan luar PLN, baik dalam Negeri melalui skema Program Belajar Jarak Jauh (PBLJ) maupun luar Negeri melalui skema Program Tugas Belajar (PTB). Pada tahun 2023, terdapat 108 (Seratus Dua Puluh Delapan) karyawan PLN NP yang telah ditetapkan sebagai Peserta Program Pendidikan Formal Grup PLN di beberapa lembaga Pendidikan antara lain:

As a PLN Sub-holding, PLN NP Employees are able to take part in PLN (PLN Persero) competency development, including the Formal Education Program. PLN (Persero) opens opportunities for all PLN Group Employees who have an interest and desire to develop competence through formal education, especially at Masters and Doctoral levels through formal PLN and Outside PLN education programs, both domestically through the Distance Learning Program (PBLJ) scheme and Abroad through the Study Assignment Program (PTB) scheme. In 2023, there was 108 (One Hundred and Twenty Eight) PLN NP employees designated as PLN Group Formal Education Program Participants in several Educational Institutions, including:

Tabel Program Pendidikan Formal Grup PLN Tahun 2023
Table of PLN Group Formal Education Program for 2023

No.	Lembaga Pendidikan Educational Institutions	Jurusan Major	Jumlah Karyawan Total Employees
1.	Australian National University	Master of Entrepreneurship and Innovation	1
2.	Australian National University	Master of Energy Change	1
3.	Cardiff University	Master of Sustainable Energy & Environment	1
4.	Delft University of Technology	PhD of Climate Change	1
5.	Imperial College London	Master of Environmental Engineering	1
6.	Institut Teknologi Bandung Bandung Institute of Technology	Magister Logistik Master in Logistics	2
7.	Institut Teknologi Bandung Bandung Institute of Technology	Magister Sains Komputasi Master of Computational Science	1
8.	Institut Teknologi Bandung Bandung Institute of Technology	Magister Teknik dan Manajemen Industri Master of Industrial Engineering and Management	1
9.	Institut Teknologi Bandung Bandung Institute of Technology	Magister Teknik Elektro Master of Electrical Engineering	5
10.	Institut Teknologi Bandung Bandung Institute of Technology	Magister Teknik Fisika Master of Engineering Physics	4
11.	Institut Teknologi Bandung Bandung Institute of Technology	Magister Teknik Geothermal Master in Geothermal Engineering	10
12.	Institut Teknologi Bandung Bandung Institute of Technology	Magister Teknik Kimia Master of Chemical Engineering	14
13.	Institut Teknologi Bandung Bandung Institute of Technology	Magister Teknik Lingkungan Master of Environmental Engineering	1

No.	Lembaga Pendidikan Educational Institutions	Jurusan Major	Jumlah Karyawan Total Employees
14.	Institut Teknologi Bandung Bandung Institute of Technology	Magister Teknik Mesin Master of Mechanical Engineering	15
15.	Institut Teknologi Sepuluh Nopember Sepuluh Nopember Institute of Technology	Magister Teknik Elektro Master of Electrical Engineering	1
16.	Institut Teknologi Sepuluh Nopember Sepuluh Nopember Institute of Technology	Magister Teknik Industri Master of Industrial Engineering	1
17.	Institut Teknologi Sepuluh Nopember Sepuluh Nopember Institute of Technology	Magister Teknik Lingkungan Master of Environmental Engineering	3
18.	Institut Teknologi Sepuluh Nopember Sepuluh Nopember Institute of Technology	Magister Teknik Mesin Master of Mechanical Engineering	4
19.	KTH Royal Institute of Technology	Master of Renewable and Sustainable Energy Engineering	1
20.	Ku Leuven & KTH Royal Institute of Technology	MSc Energy for Smart Cities	1
21.	Macquarie University	Master of Applied Finance	1
22.	Monash University	Master of Data Science	2
23.	The University of Edinburgh	MSc Finance	1
24.	The University of Edinburgh	MSc Sustainable Energy System	1
25.	The University of Melbourne	Master of Energy System	1
26.	The University of Melbourne	Master of Marketing Communication	1
27.	The University of New South Wales	Master of Renewable Energy	1
28.	The University of Queensland	Master of Business	1
29.	The University of Queensland	Master of Engineering	1
30.	The University of Queensland	Master of Sustainable Energy	1
31.	The University of Southampton	Doctor of Philosophy PhD in Engineering and The Environment	1
32.	The University of Sydney	Master of Sustainability	1
33.	The University of Western Australia	Master of Business Analytics	1
34.	The University of Western Australia	Master of Renewable and Future Energy	1
35.	Tokyo University	Master of Energy Science and Engineering	1
36.	Unitec	Master of Electrical Engineering	1
37.	Universitas Gadjah Mada Gadjah Mada University	Magister Teknik Elektro Master of Electrical Engineering	4
38.	Universitas Gadjah Mada Gadjah Mada University	Magister Teknik Sistem Master of Systems Engineering	3
39.	Universitas Gadjah Mada Gadjah Mada University	Magister Teknologi Informasi Master of Information Technology	3
40.	Universitas Indonesia University of Indonesia	Magister Teknik Kimia Master of Chemical Engineering	3
41.	Universitas Indonesia University of Indonesia	Magister Teknik Mesin Master of Mechanical Engineering	4
42.	Universitas Indonesia University of Indonesia	Magister Teknik Sistem Energi Master of Energy Systems Engineering	4
43.	University of Auckland	Master of Energy	2
44.	University of Leeds	MSc Energy and Environment	1
45.	University of Leeds	Master of Science in Energy & Environment	1
46.	University of Oxford	Master of Business Administration	1
47.	University of South Wales	Master in Renewable Energy	1
48.	University of Southampton	MSc Sustainable Energy Technologies	1
49.	University of Technology Sydney	Master of Engineering Electrical Energy System	1

Program Magang
Internship Program

Perusahaan juga menjalankan Program Magang yang dilaksanakan dalam 2 (dua) bentuk yaitu (1) sebagai reward bagi peserta scholarship agar dapat mengembangkan diri sesuai tujuan PLN NP dalam membentuk SDM unggul dan (2) diinisiasi oleh PLN NP sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.

The Company also holds Internship Program which is implemented in 2 (two) forms, namely (1) as a reward for scholarship participants so that they can develop themselves following PLN NP goals in building superior human resources and (2) initiated by PLN NP according to the Company needs.

Program magang yang dilaksanakan selama tahun 2023 adalah Program GREEN (Integration Renewable Energy Internship) sebanyak 3 (tiga) batch dengan jumlah peserta 24 (dua puluh empat) orang yang berlokasi di PLTS Terapung MS Mw Cirata. Melalui Program GREEN (Integration Renewable Energy Internship) diharapkan mendapatkan skill dan knowledge end-to-end PLTS sebagai bagian dari persiapan future competency karyawan.

During 2023, the Company held internship program, including the GREEN Program (Integration Renewable Energy Internship) in 3 (three) batches with a total of 24 (twenty four) participants located at the MS MW of Cirata Floating SPP. Through the GREEN (Integration Renewable Energy Internship) Program, it is expected that the participants are going to obtain end-to-end SPP skills and knowledge as part of preparing future employee competency.

Program Benchmarking
Benchmarking Program

Program benchmarking dilaksanakan dengan melakukan kunjungan langsung ke perusahaan terkait untuk mendapatkan experience secara langsung sehingga dapat diimplementasikan di PLN NP dalam rangka pengembangan dan mendukung kegiatan bisnis yang dijalankan. Pada tahun 2023, kegiatan benchmarking on-site dilakukan dengan mengunjungi Perusahaan lain diantaranya:

The Company holds the benchmarking program through direct visits to the related companies to obtain direct experience so as to be able to be implemented at PLN NP in the context of developing and supporting business activities carried out. In 2023, on-site benchmarking activities were held by visiting other companies, including:

Tabel Program Benchmarking PLN NP ke Perusahaan Lain Tahun 2023
Table of Benchmarking Program to Other Companies in 2023

No	Nama Perusahaan Company Name	Tema Theme	Jumlah Peserta dari PLN NP Total Participants from PLN NP
1.	Huawei Shenzhen China	Pembelajaran International International Learning	1
2.	Isle of Grain Rochester UK	In-Person Co-Sea Jinjiner Grain CCGT Power Station Facility	1
3.	Tenaga Nasional Berhad Malaysia	Grid Connected Photovoltaic System	2
4.	J-Power (EDCO) Power Plant Japang	Pembelajaran LDP (LDP Learning)	1
5.	Hyundai Samsung	Masterclass ESG in Digital Era	2
6.	Green Power Denmark	Renewable Energy	17
7.	Tepco Repow	Individual Talent Development Program	1

Selain itu, PLN NP juga menjadi tujuan benchmarking oleh Perusahaan lain. Adapun kunjungan dari Perusahaan lain sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Furthermore, PLN NP is also a benchmarking target for other companies. The visits from other companies throughout 2023 are as follows:

Tabel Program Benchmarking Perusahaan Lain ke PLN NP Tahun 2023
Table of Benchmarking Programs for Other Companies to PLN NP in 2023

No	Nama Perusahaan Company name	Tema Theme	Tanggal pelaksanaan Implementation date
1.	GD POWER Development Co. Ltd	Renewable Energy Project Visit in China	8 – 11 Agustus 2023 August 8 – 11, 2023
2.	PT SBS	Aplikasi e-Procurement	25 Mei 2023 May 25, 2023
3.	Petrokimia Gresik	Penanganan Pelanggaran Disiplin Rekanan Handling Partner Disciplinary Violations	24 Oktober 2023 October 24, 2023

No.	Nama Perusahaan Company name	Tema Theme	Tanggal pelaksanaan Implementation date
4.	PLN UIPSB Kalimantan	Integrated Management System di PLN NP	10 Maret 2020 March 10, 2020
5.	IGOWY	Green Hydrogen Plant	16 November 2020 November 16, 2020
6.	PT Avina Energi International	Green Hydrogen Plant	23 November 2020 November 23, 2020
7.	PT WALUM	Studi Banding PLTA dan PLTS Terapung Cirata Comparative Study of Cirata Floating HPP and SPP	25 November 2020 November 25, 2020
8.	PT ALTRA	Studi Banding PLTS Terapung Cirata Comparative Study of Cirata Floating SPP	30 November 2020 November 30, 2020

Program Sertifikasi
Certification Program

Perusahaan menjalankan Program Sertifikasi tidak hanya untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran yang menyebutkan bahwa tiap pekerja di bidang pembangkit wajib memiliki sertifikasi, namun juga untuk dapat memberikan kepastian yang memadai tentang kualitas SDM dalam menjalankan proses bisnis untuk memastikan keberlangsungan Perusahaan. Sertifikasi merupakan pengakuan terhadap kompetensi seorang profesional yang telah memenuhi standar profesi pada bidangnya masing-masing. PLN NP bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi yang kredibel untuk melakukan pendampingan dan sertifikasi keinsinyuran bagi karyawan PLN NP agar dapat diakui sebagai anggota Persatuan Insinyur Indonesia (PII) serta dapat meningkatkan kinerja Perusahaan.

The Company carries out the Certification Program not only to fulfill the provisions of Law no. 11 of 2014 concerning Engineering which states that workers in the power plant sector are required to have certification, but also to be able to provide adequate confidence regarding the quality of human resources in performing business processes to ensure the Company sustainability. Certification is recognition of the competence of a professional who has met professional standards in their respective fields. PLN NP collaborates with a credible Certification Institute to provide engineering assistance and certification for PLN NP employees so that they are able to be recognized as members of the Indonesian Engineers Association (PII) and able to improve the Company performance.

Tabel Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Tahun 2021-2023
Table of Implementation of Electrical Engineering Personnel Competency Certification for 2021-2023

Jenis Sertifikasi Type of Certification	Jumlah Karyawan yang Disertifikasi Total Certified Employees		
	2021	2022	2023
Core Competence			
- Sertifikasi PHE (Kelas A, B, C & D) - PHE Certification (Class A, B, C & D)	180	171	229
- Sertifikasi K3 (Listrik, Umum, Kimia, Ketinggian, Ruang Terbatas) - OHS Certification (Electricity, General, Chemical, Altitude, Confined Space)	110	79	250
- Sertifikasi Operator Boiler - Boiler Operator Certification	-	-	32
Supporting Competence			
- Sertifikasi Process Safety - Process Safety Certification	-	24	-
- Process Safety Certification Management (PSM) - Process Safety Certification Management (PSM)	-	-	-
- Sertifikasi Manajemen Pelatihan – SKDP - Training Management Certification – SKDP	31	-	-
- Sertifikasi Training for Trainer - Training Certification for Trainers	103	14	50
- CISPR	-	-	-
- Sertifikasi Auditor SHE3 - SHE3 Auditor Certification	43	7	30

Perusahaan juga mengikuti program sertifikasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (DJK) yang diwajibkan oleh pemerintah bagi perusahaan yang bergerak di bidang usaha ketenagalistrikan serta melakukan sertifikasi bagi seluruh karyawan di bidang teknik mengacu pada Peraturan Menteri ESDM No. 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan. Jumlah karyawan yang memperoleh Sertifikasi dari DJK pada tahun 2023 adalah sebanyak 944 karyawan, yaitu tercapai 107% dari target yang ditetapkan sebanyak 394 karyawan.

The Company also participates in the Directorate General of Electricity (DJK) certification program which is required by the government for companies operating in the electricity business sector and carries out certification for all employees in the technical field referring to the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 46 of 2017 concerning Standardization of Competency of Electrical Engineering Personnel. The number of employees who obtained Certification from DJK in 2023 was 944 employees, where it was 107% achieved of the target set of 394 employees.

Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi

Evaluation of the Implementation of Competency Development

PLN NP melakukan assessment Human Capital Readiness (HCR) sebagai salah satu indikator efektivitas program pengembangan kompetensi yang dijalankan. Selain itu, PLN NP senantiasa melakukan evaluasi secara berkesinambungan guna mendapatkan tanggapan, masukan dan penyempurnaan kegiatan pengembangan kompetensi untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas karyawan. Perusahaan melakukan perbaikan kualitas program pengembangan kompetensi khususnya terkait aspek-aspek sebagai berikut:

1. Pengoptimalan pelaksanaan pembelajaran sesuai jadwal yang ditetapkan dalam Kalender Akademik 2023.
2. Refreshment materi pembelajaran menyesuaikan dengan kondisi teknologi saat ini dan tujuan perusahaan.
3. Prioritasi program pemenuhan sertifikasi karyawan pasca HGN.

PLN NP carries out a Human Capital Readiness (HCR) assessment as an indicator of the effectiveness of the competency development program being implemented. Moreover, PLN NP always continuously evaluates it to obtain responses, input and improvements to competency development activities to increase employee effectiveness and productivity. The Company is improving the quality of competency development programs, especially regarding the following aspects:

1. Optimizing the implementation of learning according to the schedule set out in the 2023 Academic Calendar.
2. Refreshment of learning materials adapts to current technological conditions and the Company goals.
3. Prioritization of post-HGN employee certification fulfillment programs.

Rencana Pengembangan Kompetensi Karyawan Tahun 2024

Employee Competency Development Plan for 2024

Program pengembangan kompetensi dilakukan secara berkesinambungan untuk memastikan kecukupan atas SDM berkualitas yang dimiliki Perusahaan. Pada tahun 2024, PLN NP merencanakan kegiatan pengembangan kompetensi karyawan sebagai berikut:

Competency development programs are carried out on an ongoing basis to ensure the Company has sufficient quality human resources. In 2024, PLN NP plans the following employee competency development activities:

Tabel Rencana Pengembangan Kompetensi Karyawan Tahun 2024
Table of Employee Competency Development Plan for 2024

Jenis Pengembangan Kompetensi Types of Competency Development	Jumlah Judul Number of Titles	Target Peserta Target Participants
Program Pelatihan dan Sertifikasi Teknik Engineering Training and Certification Program	56	2.080
Program Pelatihan dan Sertifikasi Non Teknik Non Technical Training and Certification Program	136	4.500
Workshop Workshops	117	-
ES/PGS/CoP ES/PGS/CoP	90	-
Jumlah Total	**399**	**6.580**

Struktur dan Komposisi Pemegang Saham
Shareholders Structure and Composition

Anggaran Dasar pasal 4 menyebutkan, modal dasar Perusahaan ditetapkan sebesar Rp17.020.996.000.000,- (enam ratus tujuh belas triliun dua puluh sembilan ratus sembilan puluh enam juta Rupiah) terbagi dalam 1.234.041.992.000 saham, terdiri atas 1 Saham Seri 1 dan 1.234.041.991.999 Saham Seri 2, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp500,- (lima ratus Rupiah). Modal tersebut telah ditempatkan dengan komposisi sebagai berikut:

1. PT PLN (Persero) sebanyak 1 Saham Seri 1 dan 308.510.497.998 Saham Seri 2 dengan nilai nominal sebesar Rp154.255.248.999.500,- (seratus lima puluh empat triliun dua ratus lima puluh lima miliar dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah);
2. Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) sebanyak 1 Saham Seri 2 dengan nilai nominal sebesar Rp500,- (lima ratus Rupiah).

Article 4 of the Articles of Association states that the Company's authorized capital is set at Rp17.020.996.000.000 (six hundred seventeen trillion twenty billion nine hundred ninety-six million Rupiah) divided into 1.234.041.992.000 shares, consisting of 1 Series 1 share and 1.234.041.991.999 Series 2 Shares, each share with a nominal value of Rp500,- (five hundred Rupiah). The Company places the capital in the following composition:

1. PT PLN (Persero) with 1 Series 1 Share and 308.510.497.998 Series 2 Shares with a nominal value of Rp154.255.248.999.500,- (one hundred fifty four trillion two hundred fifty five billion two hundred forty eight million nine hundred ninety nine thousand five hundred Rupiah);
2. Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) of 1 Series 2 Share with a nominal value of Rp500 (five hundred Rupiah).

Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali
Information on Major and Controlling Shareholders

Pemegang Saham utama dan pengendali adalah pemilik saham mayoritas dan memiliki peran untuk mengendalikan kebijakan yang akan diambil oleh manajemen Perusahaan. Pemegang saham PLN NP yaitu PT PLN (Persero) dengan kepemilikan saham sebesar 99,99% dan YPK PLN dengan kepemilikan saham sebesar 0,01%. Pemegang saham mayoritas PLN NP adalah PT PLN (Persero) dengan kepemilikan sebesar 99,99% dengan kepemilikan atas 1 Saham Seri 1 dan 308.510.497.998 Saham Seri 2, sehingga Pemegang Saham Utama dan Pengendali PLN NP adalah PT PLN (Persero). Direktur Utama PT PLN (Persero) merupakan representasi pemegang saham utama dan pengendali, dimana secara teknis hubungan dengan pemegang saham berada di bawah Sekretaris Perusahaan PT PLN (Persero).

Major and controlling shareholders are the majority share owners and take a role in controlling the policies that will be taken by the Company management. PLN NP shareholders are PT PLN (Persero) with the share ownership of 99,99% and YPK PLN with share ownership of 0,01%. The majority shareholder of PLN NP is PT PLN (Persero) with ownership of 99,99%, consisting of 1 Series 1 Share and 308.510.497.998 Series 2 Shares, so that the Major and Controlling Shareholder of PLN NP is PT PLN (Persero). PT PLN (Persero)'s President Director represents the major and controlling shareholder, where technically the relationship with the shareholders is under the Corporate Secretary of PT PLN (Persero).

Komposisi Pemegang Saham
The Shareholders Composition

Komposisi Pemegang Saham dengan persentase kepemilikan 5% atau lebih atas saham PLN NP Januari sampai dengan Desember tahun 2023 adalah sebagai berikut:

The following is shareholders composition with an ownership percentage of 5% or more of PLN NP shares from January to December 2023:

Komposisi Pemegang Saham
The Shareholders Composition

Pemegang Saham Shareholders	Kepemilikan (%) Ownership (%)
Pemegang Saham dengan kepemilikan 5% atau lebih / Shareholders with ownership of 5% or more:	
• PT PLN (Persero)	[illegible]
Pemegang Saham dengan kepemilikan kurang dari 5% / Shareholders with ownership of 5% or less:	
• Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) • Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero)	0,01%
Jumlah / Total	**100,00%**

Kepemilikan Saham PLN NP periode Januari sampai dengan Desember tahun 2023 seluruhnya dimiliki oleh institusi lokal yaitu PT PLN (Persero) dan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) yang seluruhnya berkedudukan di Indonesia dengan klasifikasi sebagai berikut:

PLN NP Share Ownership for the period January to December 2023 is entirely owned by local institutions, namely PT PLN (Persero) and Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero), all of which are domiciled in Indonesia with the following classification:

Jumlah Pemegang Saham Berdasarkan Klasifikasi
Total Shareholders by Classification

Status Pemilik Owner Status	Jumlah Pemegang Saham Total Shareholders	Jumlah Saham Total Shares	Persentase (%) Percentage (%)
Individu Lokal Local Individuals	0	0	0,00%
Individu Asing Foreign Individuals	0	0	0,00%
Institusi Lokal Local Institutions	2	1.234.041.992.000	100,00%
Institusi Asing Foreign Institutions	0	0	0,00%
Jumlah / Total	**2**	**1.234.041.992.000**	**100,00%**

Aksi Korporasi
Corporate Action

Sampai dengan 31 Desember 2023, tidak terdapat aksi korporasi yang dilakukan oleh PLN NP sehingga menyebabkan terjadinya perubahan pada saham. Oleh karena itu, tidak terdapat informasi tanggal pelaksanaan aksi korporasi, jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi serta harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi.

As of December 31 2023, PLN NP carried no corporate actions out that resulted in changes to shares. Therefore, there is no information on the date of the corporate action, the number of shares outstanding before and after the corporate action and the share price before and after the corporate action.

Kepemilikan Saham oleh Direksi dan Dewan Komisaris
Share Ownership by the Board of Directors and Board of Commissioners

Seluruh Direksi dan Dewan Komisaris PLN NP yang menjabat sepanjang tahun 2023 tidak memiliki saham baik secara langsung maupun tidak langsung di Perusahaan. Sehingga tidak terdapat informasi mengenai persentase kepemilikan saham termasuk pemegang saham yang tercatat dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

The entire Board of PLN NP's Directors and Board of Commissioners who served throughout 2023 do not own shares either directly or indirectly in the Company. Thus, there is no information regarding the percentage of share ownership, including shareholders registered in the shareholder register for the purposes of indirect ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners.

Kepemilikan Saham oleh Masyarakat
Share Ownership by Public

Sampai dengan akhir tahun 2023, PLN NP tidak mencatatkan sahamnya di bursa saham, baik di Bursa Efek Indonesia (BEI) maupun di bursa saham lainnya. Sehingga tidak terdapat informasi pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan 5%, lebih dari 5% atau kurang dari 5%.

As of the end of 2023, PLN NP did not list its shares on the stock exchange, either on the Indonesia Stock Exchange (BEI) or on other stock exchanges. Thus, there is no information on public shareholders with ownership of 5%, more than 5% or less than 5%.

Kronologis Pencatatan Saham
Chronology of Share Listing

Sampai dengan akhir tahun 2023, PLN NP belum pernah melakukan pencatatan saham di bursa, sehingga tidak terdapat informasi terkait kronologis pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek dimana saham dicatatkan, termasuk pencatatan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham; pelaksanaan efek konversi; pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal.

As of the end of 2023, PLN NP has never listed shares on the stock exchange, thus there is no information regarding the chronology of share listing, number of shares, nominal value and offering price from the beginning of the listing to the end of the financial year as well as the name of the stock exchange where the shares are listed, including stock split, reverse stock, stock dividends, bonus shares, and changes in the nominal value of shares; implementation of conversion effects; implementation of capital additions and reductions.

Kronologis Pencatatan Efek Lainnya
Chronology of Other Securities Listing

Pencatatan di Bursa Karbon Indonesia
Listing on the Indonesian Carbon Exchange

Saat Bursa Karbon diluncurkan, PLN NP menjadi trader terbesar dan pioneer di bursa karbon Indonesia dengan SPE-GRK sebanyak 900.000 ton CO_2.

When the Carbon Exchange was launched, PLN NP became the largest trader and pioneer in the Indonesian carbon exchange with SPE-GRK of 900,000 tons of CO_2.

Pada tanggal 23 Oktober 2023, PLN NP telah listing dan melakukan perdagangan karbon di Bursa Karbon Indonesia PT Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai upaya mendukung pemerintah dalam penurunan emisi dan mengakselerasi transisi energi menuju Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060. Pada tahun 2023, PLN NP listing di bursa karbon melalui PLTGU Muara Karang Blok 3. Sampai dengan akhir tahun 2023, jumlah nilai karbon Sertifikat Pengurangan Emisi - Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) yang ditransaksikan adalah sebanyak 900.000 ton CO_2 dengan jumlah transaksi 11.041 ton CO_2. Pihak yg bertransaksi yaitu 5 existing buyer (PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk., PT MNC Sekuritas, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank OCBC NISP, Tbk, dan PT Jawa Power).

On October 23 2023, PLN NP listed and traded carbon on the Indonesian Carbon Exchange of PT Bursa Efek Indonesia (BEI) as an effort to support the government in reducing emissions and accelerating the energy transition towards Net Zero Emission (NZE) in 2060. In 2023, PLN NP was listed on the carbon exchange through Block 3 Muara Karang (CCPP). Until the end of 2023, the total carbon value of Emission Reduction Certificates - Greenhouse Gases (SPE-GRK) being exchanged was 900,000 tons of CO_2, with a total transaction of 11,041 tons of CO_2. The parties to the transaction were 5 existing buyers (PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk., PT MNC Sekuritas, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank OCBC NISP, Tbk, and PT Jawa Power).

Rencana Pencatatan di Bursa Karbon Indonesia ke Depan
Rencana Pencatatan di Bursa Karbon Indonesia ke Depan

Setelah sukses melantai di bursa karbon dan menjadi trader terbesar melalui PLTGU Muara Karang pada tahun 2023, PLN NP akan menambah portofolio dengan dua pembangkit EBT lainnya. Dua pembangkit EBT yang sedang dipersiapkan adalah Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Muara Tawar dan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Arun. Dua pembangkit ini akan segera melantai di tahun ini dengan total karbon CO_2 yang ditransaksikan mencapai angka estimasi 225.000 ton CO_2/tahun. Upaya meningkatkan volume karbon ini menjadi komitmen PLN NP dalam mendukung dekarbonisasi guna mengejar NZE pada tahun 2060 atau lebih cepat.

After successfully listing on the carbon exchange and becoming the largest trader through PLTGU Muara Karang in 2023, PLN NP will add to its portfolio with two other EBT plants. The two EBT plants being prepared are Muara Tawar Gas and Steam Power Plant (PLTGU) and Arun Gas Engine Power Plant (PLTMG). These two plants will soon be listed this year with total CO_2 carbon burned reaching an estimated 225,000 tons of CO_2/year. This effort to increase carbon volume is PLN NP's commitment to support decarbonization towards NZE by 2060 or sooner.

Struktur Grup PLN Nusantara Power

Group Structure of PLN Nusantara Power

Portofolio Perusahaan terus dioptimalkan guna memperluas kontribusi Grup PLN NP dengan diversifikasi bisnis ketenagalistrikan yang terintegrasi dalam rangka mendukung ketahanan energi nasional khususnya untuk mempercepat transisi energi di Indonesia.

The Company continues to optimize its portfolio in order to expand PLN NP Group contribution by diversifying its integrated electricity business in order to support national energy security especially to accelerate the energy transition in Indonesia.

Kemampuan mengelola dan mengembangkan portofolio yang dimiliki Perusahaan menjadi modal utama PLN NP dalam menjalankan amanat PT PLN (Persero) untuk memimpin Subholding Generation Company I membangun industri ketenagalistrikan Nasional. Struktur Grup PLN NP sebagai Subholding Generation Company dari PT PLN (Persero) memiliki 5 (lima) Entitas Anak, 4 (empat) Cucu-Cicit Perusahaan, dan 11 perusahaan asosiasi baik kepemilikan secara oleh PLN NP maupun Anak Perusahaan.

The ability to manage and develop the Company's portfolio is PLN NP major capital in carrying out mandate by PT PLN (Persero) to lead the Sub-holding Power Plant Company I in building the National electricity industry. PLN NP Group Structure as a Sub-holding Power Plant Company of PT PLN (Persero) has 5 (five) Subsidiaries, 4 (four) Second-Tier Companies, 2 and 11 associated companies both owned by PLN NP and its subsidiaries.

Entitas Anak merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh PLN NP, memiliki kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasionalnya untuk memperoleh manfaat dari aktivitas entitas tersebut. Sedangkan untuk Entitas Cucu-Cicit adalah perusahaan yang dikendalikan oleh PLN NP melalui Entitas Anak dengan kepemilikan mayoritas dan terkonsolidasi keuangan terhadap Entitas Cucu-Cicit.

A Subsidiary is a company controlled by PLN NP, has the power to regulate its financial and operational policies to obtain benefits from the entity's activities. Meanwhile, the Second/Third-Tier Subsidiary is controlled by PLN NP through a Subsidiary with majority and consolidated financial ownership of the Second/Third-Tier Subsidiary.

Entitas Asosiasi merupakan perusahaan dimana PLN NP dan entitas anak mempunyai pengaruh yang signifikan, dan bukan merupakan entitas anak ataupun bagian partisipasi dalam ventura bersama. Definisi "Pengaruh Signifikan" adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional investee tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut. Entitas Patungan merupakan perusahaan bersama dimana para pihak mempunyai bagian partisipasi dan diatur oleh persetujuan untuk berbagi pengendalian atas suatu aktivitas. Pada Entitas Patungan, keputusan keuangan dan operasional strategis terkait dengan aktivitasnya, dipersyaratkan secara konsensus dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian. Struktur Grup PLN NP tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Associated Entity is a company in which PLN NP and its subsidiaries have significant influence, and is not a subsidiary or participating part in a joint venture. "Significant Influence" means the power to participate in an investee's financial and operational policy decisions, but not to control or joint control over those policies. A Joint Venture Entity is when the parties have a participating interest and are governed by an agreement to share control over an activity. In a Joint Venture, strategic financial and operational decisions related to its activities are required by consensus of all parties sharing control. The structure of PLN NP Group in 2023 can be described as follows:

Struktur Grup
Group Structure

5 Anak Perusahaan
Subsidiary

11 Perusahaan Asosiasi
Associated Company

4 Perusahaan Cucu-cicit
Second to Third-Tier Company

Pemerintah Republik Indonesia
Government of Republic of Indonesia
100%

PT PLN (Persero)
99,99%

PLN

PLN Nusantara Power Services
99,00%
PT PLN Nusantara Power Services
Operation & Maintenance Services

PLN Nusantara Power Construction
99,00%
PT PLN Nusantara Power Construction
OHC

PLN Sulu Cebong
51%
PT Prima Layanan Wage Sulu Cebong
Spareparts Provider

PLN Nusantara Renewables
99,99%
PT PLN Nusantara Renewables
Investment

MKP
92,00%
PT Mitra Karya Prima

99,99%
PT Prima Power Nusantara

10,00%
PT Behind Days Manaju

PJBI
99,99%
PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi

SGFSB
30,00%
PT Shen Hua Gas Fuel PJB

PJBIC
99,99%
PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi Cilacap

PMSE
51,00%
PT PJB Master Solar Energi

YPK PLN
Yayasan Pendidikan & Kesejahteraan (YPK) PLN
0,01%
72,98%
bpi
29,99%
S2P
49,00%
26,69%
KPJB
49,00%
OHPJB
30,00%
NSHE
25,00%
SSP
10,00%
nsse
51%

Entitas Anak, Cucu-Cicit, Asosiasi dan Ventura Bersama

Subsidiaries, Second-Tier Subsidiary, Associations and Joint Ventures

Berikut disajikan daftar Entitas Anak, Cucu-Cicit, dan Asosiasi yang tergabung dalam Grup PLN NP sampai dengan tahun 2023.

The following is a list of Subsidiaries, Second-Tier Subsidiaries, and Associations that are members of the PLN NP Group until 2023.

Tabel Daftar Entitas Anak, Cucu-Cicit, Asosiasi dan Ventura Bersama

Table List of Subsidiaries, Second-Tier Subsidiary, Associations and Joint Ventures

No.	Nama Perusahaan Company name	Tanggal Pendirian Established Date	Status Operasi Operation Status	Kepemilikan Saham PLN NP PLN NP Share Ownership		Bidang Usaha Business Fields
				Penyertaan Modal Equity Capital	Persentase Percentage	
Entitas Anak Subsidiaries						
1.	PT PLN Nusantara Power Services (PLN NPS)	30 Maret 2021 March 30, 2021	Beroperasi Operating	Rp[illegible] miliar Rp[illegible] billion	99,00%	Jasa operasi dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik dan pembangunan/pemasangan peralatan ketenagalistrikan Operation and maintenance services for power plants and construction (installation) of electrical equipment
2.	PT PLN Nusantara Power Construction (PLN NPK)	22 October 2020 October 22, 2020	Beroperasi Operating	Rp[illegible] miliar Rp[illegible] billion	99,00%	Engineering, pengadaan dan konstruksi, dan operasi dan pemeliharaan sektor ketenagalistrikan Engineering, procurement and construction, and operation and maintenance of the electricity sector
3.	PT Haniger Innovative Indonesia (HII)	31 October 2003 October 31, 2003	Beroperasi Operating	Rp[illegible] miliar Rp[illegible] billion	72,99%	Perdagangan, konstruksi, pertambangan dan pertanian Trading, construction, mining and agriculture
4.	PT PLN Nusantara Renewables (PLN NR)	18 December 2015 December 18, 2015	Beroperasi Operating	Rp[illegible] trillion Rp[illegible] trillion	99,99%	Investasi ketenagalistrikan Electricity investment
5.	PT Prima Layanan Niaga Suko Cadang (PLNSC)	16 Juni 2017 June 16, 2017	Beroperasi Operating	Rp[illegible] miliar Rp[illegible] billion	51,00%	Perdagangan barang dan jasa, engineering, rental peralatan, dan konsultasi di bidang ketenagalistrikan Trading in goods and services, engineering, supply chain, and consulting in the electricity sector
Entitas Cucu-Cicit Second to Third-Tier Subsidiary						
1.	PT Mitra Karya Prima (MKP)	23 September 2004 September 23, 2004	Beroperasi Operating	Rp[illegible] miliar Rp[illegible] billion	51,00%	Jasa Tenaker
2.	PT Prima Power Nusantara (PPN)	16 Juni 2016 June 16, 2016	Beroperasi Operating	Rp[illegible] miliar Rp[illegible] billion	99,99%	Engineering, pengadaan dan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sektor ketenagalistrikan Engineering, procurement and construction, operation and maintenance of the electricity sector
3.	PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PJBI Investasi)	7 Juli 2020 July 7, 2020	Beroperasi Operating	Rp[illegible] miliar Rp[illegible] billion	99,99%	Penempatan investasi di pengadaan listrik Investment placement in electricity procurement

No.	Nama Perusahaan Company name	Tanggal Pendirian Established Date	Status Operasi Operating Status	Kepemilikan Saham PLN NP PLN NP Share Ownership		Bidang Usaha Business fields
				Penyertaan Modal Equity Capital	Persentase Percentage	
4.	PT Pembangkit Jawa Bali Investasi (PJBI)	7 Juli 2020 July 7, 2020	Beroperasi Operating	Rp[illegible] miliar Rp[illegible] billion	[illegible]%	Pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal Financing in the form of capital participation
Entitas Asosiasi / Associated Entities						
1.	PT Sumber Segara Primadaya (SSP)	12 Mei 2011 May 12, 2011	Beroperasi Operating	Rp[illegible] miliar Rp[illegible] billion	[illegible]%	Pembangkit listrik tenaga uap Coal Fired Power Plant
2.	PT Sumbagselenergi Sakti Pesaki (SS Pesaki)	6 Juni 2018 June 6, 2018	Tahap Pengembangan Development Stage	Rp[illegible] miliar Rp[illegible] billion	15,00%	Pembangkit listrik tenaga uap Coal Fired Power Plant
3.	PT Bajradaya Sentralusa (BDSN)	30 Oktober 1995 October 30, 1995	Beroperasi Operating	Rp[illegible] miliar Rp[illegible] billion	[illegible]%	Pembangkit listrik tenaga air Hydroelectric Power Plant
4.	PT Bukit Pembangkit Innovative (BPI)	28 Agustus 2008 August 28, 2008	Beroperasi Operating	Rp[illegible] miliar Rp[illegible] billion	[illegible]%	Pembangkit listrik tenaga uap Coal Fired Power Plant
5.	PT Kiniko Pembangkitan Jawa Bali (PJB)	30 September 2010 September 30, 2010	Beroperasi Operating	Rp[illegible] miliar Rp[illegible] billion	[illegible]%	Operasi dan pemeliharaan Operation and maintenance
6.	PT Reshid Daya Mandiri (RDM)	21 Februari 2011 February 21, 2011	Beroperasi Operating	Rp[illegible] miliar Rp[illegible] billion	10,0%	Pembangkit listrik tenaga uap Coal Fired Power Plant
7.	PT Shentua Guo Hua Pembangkitan Jawa Bali (SGHJB)	15 Januari 2014 January 15, 2014	Beroperasi Operating	Rp[illegible] miliar Rp[illegible] billion	[illegible]%	Pembangkit listrik tenaga uap Coal Fired Power Plant
8.	PT Guo Hua Taribar Pembangkitan Jawa Bali (GHTJB)	22 September 2016 September 22, 2016	Beroperasi Operating	Rp[illegible] miliar Rp[illegible] billion	[illegible]%	Operasi dan pemeliharaan Operation and maintenance
9.	PT Pembangkitan Jawa Bali Masdar Solar Energi (PMSE)	7 Juli 2020 July 7, 2020	Beroperasi Operating	Rp[illegible] miliar Rp[illegible] billion	[illegible]%	Pembangkit listrik tenaga surya Solar Power Plant
10.	PT North Sumatera Hydro Energi (NSHE)	30 April 2008 April 30, 2008	Tahap Pengembangan Development Stage	[illegible]	[illegible]%	Pembangkit listrik tenaga air Hydroelectric Power Plant
11.	PT Nusantara Sembcorp Solar Energi (NSSE)	31 Desember 2021 December 31, 2021	Tahap Inisiasi Initiation Stage	-	[illegible]%	Pembangkit listrik tenaga surya Solar Power Plant

Profil dan Kilas Kinerja Entitas Anak, Cucu-Cicit, dan Asosiasi

Profile and Performance Overview of Subsidiaries, Second-Tier Subsidiaries, and Associations

Grup PLN NP semakin terintegrasi, dengan dukungan seluruh entitas yang bernaung di dalamnya menjadikan proses bisnis semakin efisien, berdaya saing dan berkelanjutan dalam merebut peluang perluasan usaha di industri ketenagalistrikan di masa mendatang.

PLN NP Group is technology integrated, with the support of all entities under its umbrella, making business processes more efficient, competitive and sustainable in seizing business expansion opportunities in the electricity industry in the future.

Profil dan Kilas Kinerja Entitas Anak

Profile and Performance Overview of Subsidiaries

PT PLN Nusantara Power Services (PLN NPS)

PLN Nusantara Power Services

PLN NPS merupakan entitas anak PLN NP yang bergerak di bidang penyediaan jasa operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik, pengadaan peralatan ketenagalistrikan, dan pembangunan atau pemasangan peralatan energi listrik. PJBS didirikan pada tanggal 30 Maret 2001 dengan persentase kepemilikan saham oleh PLN NP sebesar 99,00%.

PLN NPS is a subsidiary of PLN NP which operates in the field of providing operation and maintenance services for power plants, procurement of electrical equipment, and construction or installation of electrical energy equipment. PJBS was established on March 30, 2001 with a percentage of share ownership by PLN NP of 99.00%.

Alamat Kantor Pusat / Head Office Address	Alamat Kantor Perwakilan / Representative Office Address
Jl. Raya Juanda No. 17 Sidoarjo 61252 (P. (+62-31) 8548391, (+62-31) 8557909 info@pln-npservices.com www.pln-npservices.com	Jl. Tebet Utara VI dA, Tebet Timur Jakarta Selatan 12810

Kinerja Keuangan Tahun 2021-2023 (Rp miliar) Financial Performance in 2021-2023 (Rp billion)

Uraian Description	2021	2022	2023
Jumlah Aset Total Assets	1,[illegible],[illegible]	1,[illegible],[illegible]	1,774,69
Pendapatan Usaha Revenues	1,[illegible],[illegible]	2,[illegible],[illegible]	2,[illegible],55
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	[illegible]	[illegible]	154,54

PT PLN Nusantara Power Construction (PLN NPC)

PLN Nusantara Power Construction

PLN NPC merupakan entitas anak PLN NP yang bergerak di bidang Engineering, Procurement and Construction (EPC) sektor ketenagalistrikan yang melaksanakan pembangunan pembangkitan, serta fasilitas transmisi dan distribusi. PLN NPC berdiri sejak 20 Oktober 2000 dengan nama PT Delta Rekadaya Mandiri yang kemudian berganti nama menjadi PT Rekadaya Elektrika pada 29 September 2022 setelah PLN NP masuk sebagai pemegang saham dengan persentase kepemilikan saham oleh PLN NP sebesar 99,00%.

PLN NPC is a subsidiary of PLN NP which operates in the field of Engineering, Procurement and Construction (EPC) in the electricity sector which carries out the power plant construction, as well as its transmission and distribution facilities. PLN NPC was established on October 20, 2000 under the name PT Delta Rekadaya Mandiri which later changed its name to PT Rekadaya Elektrika on September 29, 2022 after PLN NP got into it as a shareholder with a percentage of share ownership by PLN NP of 99.00%.

Alamat Kantor Pusat / **Head Office Address**

Gedung 18 Office Park,
Jl. TB Simatupang No.18, RT.2/RW.1, Kebagusan, Kec. Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12520

(+62 21) 2787 1818
info@plnnpc.com
www.plnnpc.com

Kinerja Keuangan Tahun 2021-2023 (Rp miliar) / **Financial Performance in 2021-2023 (Rp billion)**

Uraian Description	2021	2022	2023
Jumlah Aset Total Assets	1.403,09	1.910,51	2.179,91
Pendapatan Usaha Revenues	869,64	1.706,35	1.956,50
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	2,16	4,74	[illegible]

PT Navigat Innovative Indonesia (NII)

NII merupakan entitas anak PLN NP yang bergerak di bidang perdagangan, konstruksi dan pertambangan. NII didirikan pada 21 Oktober 2002 dan PLN NP masuk menjadi pemegang saham NII sejak 13 Januari 2012. Kegiatan usaha NII saat ini berupa penyertaan saham sebesar 11,10% di PT Bukit Pembangkit Innovative (BPI) selaku pengembang IPP PLTU Banjarsari 2x110 MW serta pengembangan beberapa proyek pembangkit di wilayah Sumatera. Persentase kepemilikan saham NII oleh PLN NP adalah sebesar 72,97%.

NII is a subsidiary of PLN NP which operates in the fields of trading, construction and mining. NII was established on October 21, 2002 and PLN NP has become a shareholder of NII since January 13, 2012. NII has current business activities consist of 11.10% share investment in PT Bukit Pembangkit Innovative (BPI) as the developer of the 2x110 MW Banjarsari IPP CFPP as well as the development of several power plant project in the Sumatera region. The percentage of NII share ownership by PLN NP is 72.97%.

Alamat Kantor Pusat / **Head Office Address**

Jl. Kebintang Baru No. 11, Surabaya 60231

(+62 31) 8283 180
(+62 31) 8283 181

Kinerja Keuangan Tahun 2021-2023 (Rp miliar) / **Financial Performance in 2021-2023 (Rp billion)**

Uraian Description	2021	2022	2023
Jumlah Aset Total Assets	394,81	405,49	512,34
Pendapatan Usaha Revenues	1[illegible]9	513,7	23,34
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	1[illegible]9	513,7	23,34

PT PLN Nusantara Renewables (PLN NR)

PLN Nusantara Renewables

PT PLN Nusantara Renewables (PLN NR) merupakan entitas anak PLN NP yang berfokus pada investasi berbiskan dalam ekosistem bisnis kelistrikan terintegrasi guna mengoptimasi daya guna energi baru dan terbarukan dengan investasi hijau. PLN NR didirikan pada tanggal 18 Desember 2015 dengan persentase kepemilikan oleh PLN NP sebesar 99,99%.

PT PLN Nusantara Renewables (PLN NR) is a subsidiary of PLN NP which focuses on electricity investment in an integrated electricity business ecosystem to optimize the usability of new and renewable energy with green investment. PLN NR was established on December 18, 2015 with a percentage of ownership by PLN NP of 99,99%.

Alamat Kantor Pusat Head Office Address

18 Office Park, 19th Floor
Jl. TB Simatupang, No. 18, Jakarta Selatan 12520

(+62 21) 7824 1313
info@plnnr.com
www.plnnr.com

Alamat Kantor Perwakilan Representative Office Address

PT PLN Nusantara Power
D Building, 7th Floor
Jl. Ketintang Baru, No. 11, Surabaya 60231

Kinerja Keuangan Tahun 2021-2023 (Rp miliar) Financial Performance in 2021-2023 (Rp billion)

Uraian Description	2021	2022	2023
Jumlah Aset Total Assets	6.480,49	8.000,68	**8.703,69**
Pendapatan Usaha Revenues	558,26	892,78	**796,75**
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	149,69	1.030,27	**790,26**

PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang (PLNSC)

PLN Suku Cadang

PLNSC merupakan entitas anak PLN NP yang bergerak di bidang penyediaan spare parts pembangkit dari pabrikan, reverse engineering, standardisasi dan product catalogue database. PLNSC didirikan pada tanggal 16 Juni 2017 dengan persentase kepemilikan saham oleh PLN NP sebesar 51,00%.

PLNSC is a subsidiary of PLN NP which is engaged in providing generator spare parts from manufacturers, reverse engineering, standardization and product catalog database. PLNSC was established on June 16, 2017 with a percentage of share ownership by PLN NP of 51,00%.

Alamat Kantor Pusat Head Office Address

Recapital Building, 7th and 3th Floor
Jl. Adityawarman No. 55 Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12160

(+62 21) 7246164
contact@plnsc.co.id
www.plnsc.co.id

Kinerja Keuangan Tahun 2021-2023 (Rp miliar) Financial Performance in 2021-2023 (Rp billion)

Uraian Description	2021	2022	2023
Jumlah Aset Total Assets	392,33	426,44	**779,25**
Pendapatan Usaha Revenues	340,84	934,31	**887,98**
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	11,66	30,69	**39,26**

Profil dan Kilas Kinerja Entitas Cucu-Cicit
Profile and Performance Overview of the Second to Third-Tier Subsidiaries

PT Mitra Karya Prima (MKP)

MKP merupakan entitas anak dari PJBS yang bergerak di bidang penyediaan tenaga kerja atau SDM untuk O&M pembangkit listrik. MKP didirikan pada tanggal 23 September 2004 dengan persentase kepemilikan saham PJBS sebesar 92,00%.

MKP is a subsidiary of PJBS which is engaged in providing labor or human resources for power plant O&M. MKP was established on September 23, 2004 with a PJBS share ownership percentage of 92.00%.

Alamat Kantor Pusat / Head Office Address

Juanda Business Center (JBC), Blok A, No. 4, 5 & 6,
Jl. Raya Juanda No. 1, Sukarejo 41153

(+62 21) 8548595
(+62 21) 8548596
info@mitrakaryaprima.com
www.mitrakaryaprima.com

Kinerja Keuangan Tahun 2021-2023 (Rp miliar) / Financial Performance in 2021-2023 (Rp billion)

Uraian / Description	2021	2022	2023
Jumlah Aset / Total Assets	152,67	167,00	204,03
Pendapatan Usaha / Revenues	243,84	298,03	342,79
Laba Rugi Bersih Tahun Berjalan / Net Profit (Loss) for the Year	24,47	21,60	31,20

PT Prima Power Nusantara (PPN)

PPN merupakan entitas anak dari PLN NPC yang bergerak di bidang Engineering, Procurement and Construction (EPC) sektor ketenagalistrikan yang melaksanakan pembangunan pembangkitan, serta fasilitas transmisi dan distribusi. PPN didirikan pada 16 Juni 2016 dan pada tanggal 28 Juli 2022, PLN NPC mengakuisisi PPN dengan persentase kepemilikan saham oleh PLN NPC sebesar 99,99%.

PPN is a subsidiary of PLN NPC which operates in the Engineering, Procurement and Construction (EPC) sector in the electricity sector which carries out the power plant construction, as well as transmission and distribution facilities. PPN was established on June 16, 2016 and on July 28, 2022, PLN NPC acquired PPN with a share ownership percentage by 99.99%.

Alamat Kantor Pusat / Head Office Address

Jl. Cipulasi Raya, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

Kinerja Keuangan Tahun 2021-2023 (Rp miliar) / Financial Performance in 2021-2023 (Rp billion)

Uraian / Description	2021	2022	2023
Jumlah Aset / Total Assets	242,39	193,11	199,99
Pendapatan Usaha / Revenues	324,20	343,53	105,36
Laba Rugi Bersih Tahun Berjalan / Net Profit (Loss) for the Year	10,25	4,64	0,89

PT Pembangkitan Jawa Bali Investindo (PJB Investindo)

PJB Investindo merupakan entitas anak dari PLN NR yang bergerak di bidang pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dan usaha pengadaan listrik. PJB Investindo didirikan pada tanggal 7 Juli 2020 dengan persentase kepemilikan saham oleh PLN NR sebesar 99,999%.

PJB Investindo is a subsidiary of PLN NR which operates in the financing sector in the form of capital participation and electricity procurement. PJB Investindo was established on July 7, 2020 with a percentage of share ownership by PLN NR of 99,999%.

Alamat Kantor Pusat Head Office Address

18 Office Park, 19th Floor
Jl. TB Simatupang, No. 18, Jakarta Selatan 12520

Kinerja Keuangan Tahun 2021-2023 (Rp miliar) Financial Performance in 2021-2023 (Rp billion)

Uraian Description	2021	2022	2023
Jumlah Aset Total Assets	33,75	102,16	347,17
Pendapatan Usaha Revenues	(17,04)	14,38	30,99
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	(18,47)	14,38	34,66

PT Pembangkit Jawa Bali Konstruksi Cerdas (PJBIC)

PJBIC merupakan entitas anak dari PLN NR yang bergerak di bidang pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dan usaha pengadaan listrik. PJBIC didirikan pada tanggal 7 Juli 2020 dengan persentase kepemilikan saham oleh PLN NR sebesar 99,999%.

PJBIC is a subsidiary of PLN NR which operates in the financing sector in the form of capital participation and electricity procurement. PJBIC was established on July 7, 2020 with a percentage of share ownership by PLN NR of 99,999%.

Alamat Kantor Pusat Head Office Address

18 Office Park, 19th Floor
Jl. TB Simatupang, No. 18, Jakarta Selatan 12520

Kinerja Keuangan Tahun 2021-2023 (Rp miliar) Financial Performance in 2021-2023 (Rp billion)

Uraian Description	2021	2022	2023
Jumlah Aset Total Assets	33,75	102,01	347,17
Pendapatan Usaha Revenues	3,04	68,53	30,99
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	(17,04)	65,89	34,73

Profil dan Kilas Kinerja Entitas Asosiasi
Profile and Performance of Associated Entities

PT Sumber Segara Primadaya (S2P)

S2P merupakan entitas asosiasi PLN NP dengan persentase kepemilikan saham sebesar 49,00%. S2P bergerak di bidang penyediaan tenaga listrik (IPP) dengan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga uap Cilacap 3x300 MW yang beroperasi komersial pada 3 September 2006, Unit 3 dengan kapasitas 1x660 MW yang beroperasi komersial pada 16 Juni 2016, dan Unit 3A dengan kapasitas 1x1000 MW yang beroperasi komersial pada tanggal 9 November 2019.

S2P is an associated entity of PLN NP with a share ownership percentage of 49.00%. S2P is engaged in the field of electricity supply (IPP) by operating the 3x300 MW Cilacap steam power plant which started operating commercially since September 3, 2006, Unit 3 with a capacity of 1x660 MW which started operating commercially since June 16, 2016, and Unit 3A with a capacity of 1x1000 MW which started operating commercially since November 9, 2019.

Alamat Kantor Pusat Head Office Address	Alamat Kantor PLTU Cilacap Cilacap CFPP Office Address
Gedung Treasury Tower, Lt. 39, S1.B0 Lot. 28 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, 12190 (+62 21) 2912 6888 (+62 21) 2912 6888 jakarta@saprimadaya.co.id www.saprimadaya.co.id	Jl. Lingkar Timur Karang Kandri, Kecamatan Kesugihan, Cilacap (+62 282) 538888 (+62 282) 538883 cilacap@saprimadaya.co.id

Kinerja Keuangan Tahun 2021-2023 (Rp miliar) Financial Performance in 2021-2023 (Rp billion)

Uraian Description	2021	2022	2023
Jumlah Aset Total Assets	23.973,98	25.361,34	**25.378,71**
Pendapatan Usaha Revenues	12.151,68	11.111,93	**12.440,91**
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	1.253,04	834,16	**1.875,64**

PT Sumbagselenergi Sakti Pewali (SSPewali)

SSPewali merupakan entitas asosiasi PLN NP sebagai IPP PLTU MT Sumbagsel 1 2x150 MW yang didirikan pada tanggal 6 Juni 2018 dengan persentase kepemilikan saham PLN NP sebesar 10,00%. Sampai dengan akhir tahun 2023, SSPewali masih dalam tahap pengembangan.

SSPewali is an associated entity of PLN NP as 2x150 MW Southern Sumatera IPP CFPP MT which was established on June 6, 2018 with a PLN NP share ownership percentage of 10.00%. As of the end of 2023, SSPewali is still in the development stage.

Alamat Kantor Pusat Head Office Address	Alamat Unit Unit Address
KYK Building, Jalan Cideng Barat No. 35-37, Jakarta Pusat	Kec. Semendang Aji, Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan

Kinerja Keuangan Tahun 2021-2023 (Rp miliar) Financial Performance in 2021-2023 (Rp billion)

Uraian Description	2021	2022	2023
Jumlah Aset Total Assets	1.198,12	1.459,29	**1.490,80**
Pendapatan Usaha Revenues	-	-	-
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	(5,70)	12,67	**(26,39)**

PT Bajradaya Sentramusa (BDSN)

BAJRADAYA

BDSN merupakan entitas ventura bersama PLN NP yang bergerak di bidang penyediaan tenaga listrik IPP) mengoperasikan PLTA Asahan-I 2x90 MW. BDSN didirikan pada tanggal 30 Oktober 1995 dan PLN NP masuk sebagai pemegang saham pada tanggal 30 November 1996 dengan persentase kepemilikan saham oleh PLN NP sebesar 26,67%.

BDSN is a joint venture entity with PLN NP which operates in the field of providing electricity, Independent Power Producer (IPP) operates the 2x90 MW Asahan-I HPP. BDSN was established on October 30, 1995 and PLN NP entered as a shareholder on November 30, 1996 with a percentage of share ownership by PLN NP of 26,67%.

Alamat Kantor Pusat / **Head Office Address**

Jl. Wijaya III No. 5 Kebayoran Baru, Jakarta 12160

(+62 21) 7202 107
bdsn.hq@bajradaya.com
www.bajradaya.com

Kinerja Keuangan Tahun 2021-2023 (USD) / Financial Performance in 2021-2023 (USD)

Uraian / Description	2021	2022	2023
Jumlah Aset / Total Assets	427.895,89	457.057.364	443.216.391
Pendapatan Usaha / Revenues	46.835,40	43.091.346	45.476.833
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Net Profit (Loss) for the Year	33.823,42	16.438.292	20.341.924

PT Bukit Pembangkit Innovative (BPI)

bpi

BPI merupakan entitas ventura bersama PLN NP yang bergerak di bidang penyediaan tenaga listrik IPP dengan mengoperasikan PLTU Banjarsari 2x110 MW di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. BPI didirikan pada tanggal 18 Agustus 2006 dengan persentase kepemilikan saham PLN NP sebesar 29,15%.

BPI is a joint venture entity with PLN NP which operates in the field of providing IPP electricity by operating the 2x110 MW Banjarsari CFPP in Lahat Regency, South Sumatera. BPI was established on August 18, 2006 with a share ownership percentage of PLN NP of 29,15%.

Alamat Kantor Pusat / **Head Office Address**

Gedung Surveyor Indonesia Building, Lt. 17, Suite 1703
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 56 Jakarta 12950
(+62 21) 5213 463/ 5213 470,
(+62 21) 5210 726
secretary@bpi-ppi.com
www.bpi-ppi.com

Alamat Kantor PLTU Banjarsari / **Banjarsari CFPP Office Address**

Jl. Lintas Tengah Sumatera, Desa Siah Pulau & Desa Gunung Kembang

Kinerja Keuangan Tahun 2021-2023 (USD) / Financial Performance in 2021-2023 (USD)

Uraian / Description	2021	2022	2023
Jumlah Aset / Total Assets	302.738,90	252.736.641	244.222.391
Pendapatan Usaha / Revenues	72.737,55	79.520.302	69.266.754
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Net Profit (Loss) for the Year	29.039,83	21.232.436	10.904.534

PT Kompo Pembangkitan Jawa Bali (KPJB)

KPJB merupakan entitas ventura bersama PLN NP yang bergerak di bidang jasa O&M, coal handling, jetty dan port management pada PLTU Tanjung Jati B Unit 3 & 4 yang berkapasitas 2x660 MW. KPJB didirikan pada tanggal 30 September 2010 dengan persentase kepemilikan saham PLN NP sebesar 49,00%.

KPJB is a joint venture entity with PLN NP which operates in the field of O&M, coal handling, jetty and port management services at Tanjung Jati B CFPP Units 3 & 4 with a capacity of 2x660 MW. KPJB was established on September 30, 2010 with a share ownership percentage of PLN NP of 49.00%.

Alamat Kantor Pusat / Head Office Address

PLTU Tanjung Jati B Jawa Bali Unit 3 & 4, Desa Tubanan, Kec. Kembang, Kab. Jepara, Jawa Tengah

(+62 291) 4270 493
(+62 291) 4270 601
www.kpjb.co.id

Kinerja Keuangan Tahun 2021-2023 (Rp miliar) / Financial Performance in 2021-2023 (Rp billion)

Uraian / Description	2021	2022	2023
Jumlah Aset / Total Assets	1512,71	1164,77	999,94
Pendapatan Usaha / Revenues	338,88	333,19	232,90
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Net Profit (Loss) for the Year	14,74	44,09	13,92

PT Rekind Daya Mamuju (RDM)

REKIND DAYA MAMUJU

RDM merupakan entitas ventura bersama dari PLN NPC dengan persentase kepemilikan saham sebesar 10,00%. RDM didirikan pada tanggal 21 Februari 2013 dengan bidang usaha sebagai pengelola PLTU Mamuju 2x25 MW yang telah COD sejak tanggal 19 September 2018.

RDM is a joint venture entity from PLN NPC with a share ownership percentage of 10.00%. RDM was established on February 21, 2013 with the business sector as manager of 2x25 MW Mamuju CFPP which has been COD since September 19, 2018.

Alamat Kantor Pusat / Head Office Address

Gedung Nusina Lt. 4
Jl. MT. Haryono Kav 37 Jakarta Selatan, Jakarta 10330
(+62 21) 8378 9152 / 8378 5941
(+62 21) 8397 678
info@rdm.co.id
www.rdm.co.id

Alamat Kantor PLTU Mamuju / Mamuju CFPP Office Address

Dusun Talaba, Desa Belang-Belang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat

Kinerja Keuangan Tahun 2021-2023 (USD) / Financial Performance in 2021-2023 (USD)

Uraian / Description	2021	2022	2023
Jumlah Aset / Total Assets	19.604.700	17.221.839	15.450.371
Pendapatan Usaha / Revenues	16.162.849	21.405.791	17.498.334
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Net Profit (Loss) for the Year	(4.205.871)	(1.601.647)	(4.746.410)

PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali (SGPJB)

SGPJB

SGPJB merupakan entitas ventura bersama PLN NI yang didirikan pada tanggal 13 Januari 2016 dengan persentase kepemilikan saham oleh PLN NI sebesar 35,00%. Bidang usaha SGPJB adalah pengelola PLTU yaitu IPP PLTU Jawa 7 2x1000 MW yang telah COD sejak tahun 2019.	SGPJB is a joint venture entity with PLN NI which was established on January 13, 2016 with a share ownership percentage of PLN NI of 35.00%. SGPJB has business line in managing CFPP, namely 2x1000 MW IPP Jawa 7 CFPP which has been COD since 2019.
Alamat Kantor Pusat Head Office Address	**Alamat Unit** Unit Address
APL Tower Lt. 39 Jl. Letjen S. Parman Kav. 28, Jakarta Barat	Kramatwatu, Kabupaten Serang, Banten

Kinerja Keuangan Tahun 2021-2023 (USD) Financial Performance in 2021-2023 (USD)

Uraian Description	2021	2022	2023
Jumlah Aset Total Assets	2.256.136.334	2.252.759.576	**2.585.071.320**
Pendapatan Usaha Revenues	593.248.703	635.475.147	**658.103.051**
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	154.370.662	160.957.884	**121.234.736**

PT Guohua Taidian Pembangkitan Jawa Bali (GHPJB)

GHPJB

GHPJB merupakan entitas ventura bersama PLN NI sebagai Jasa O&M Pembangkit PLTU Jawa 7 2x1000 MW yang didirikan pada tanggal 23 September 2016 dengan persentase kepemilikan saham oleh PLN NI sebesar 35,00%.	GHPJB is a joint venture entity with PLN NI as an O&M Service for the 2x1000 MW Jawa 7 CFPP which was established on September 23, 2016 with a percentage of share ownership by PLN NI of 35.00%.
Alamat Kantor Pusat Head Office Address	**Alamat Unit** Unit Address
APL Tower Lt. 39 Jl. Letjen S. Parman Kav. 28, Jakarta Barat	Cilegon, Banten

Kinerja Keuangan Tahun 2021-2023 (USD) Financial Performance in 2021-2023 (USD)

Uraian Description	2021	2022	2023
Jumlah Aset Total Assets	3.186.551	2.938.235	**2.689.571**
Pendapatan Usaha Revenues	16.540.835	14.551.067	**12.430.564**
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	89.498	67.269	**72.956**

PT Pembangkitan Jawa Bali Masdar Solar Energi (PMSE)

PMSE merupakan entitas ventura bersama PLN NR sebagai IPP PLTS Cirata yang berkapasitas 145 MWac atau setara 192 MWp yang didirikan pada tanggal 7 Juli 2020 dengan persentase kepemilikan saham PLN NR sebesar 51,00% yang telah COD sejak tanggal 13 November 2021.

PMSE is a joint venture entity with PLN NR as capacity of 145 MWac or equivalent to 192 MWp IPP Cirata IPP which was established on July 7, 2020 with a PLN NR share ownership percentage of 51.00% which has been COD since November 13, 2021.

Alamat Kantor Pusat Head Office Address	Alamat Unit Unit Address
Menara Bidakara 2 Lt. 8 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Kav 71-73 Jakarta Selatan (+62 21) 8370 8380	Waduk Cirata, Kab. Bandung Barat, Jawa Barat

Kinerja Keuangan Tahun 2021-2023 (USD) Financial Performance in 2021-2023 (USD)

Uraian Description	2021	2022	2023
Jumlah Aset Total Assets	41.331.219	92.894.972	141.078.403
Pendapatan Usaha Revenues	26.770.084	9.651.491	88.260.229
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	(1.066.141)	4.032.787	5.154.260

PT North Sumatera Hulu Energy (NSHE)

NSHE merupakan ventura bersama PLN NR sebagai IPP PLTA Batang Toru 4x125 MW yang didirikan pada tanggal 30 April 2008 dengan persentase kepemilikan saham oleh PLN NR sebesar 25,00%. Sampai dengan akhir tahun 2023, NSHE sedang dalam tahap pengembangan.

NSHE is a joint venture with PLN NR as 4x125 MW IPP Batang Toru HPP which was established on April 30, 2008 with a percentage of share ownership by PLN NR of 25.00%. As of the end of 2023, NSHE is in the development stage.

Alamat Kantor Pusat Head Office Address	Alamat Unit Unit Address
Jl. Dermawangsa VII No. 7 Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara

Kinerja Keuangan Tahun 2021-2023 (USD) Financial Performance in 2021-2023 (USD)

Uraian Description	2021	2022	2023
Jumlah Aset Total Assets	[illegible]	[illegible]	949.942.336
Pendapatan Usaha Revenues	16.492.977	134.676.595	286.415.583
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	15.167.212	27.898.778	36.374.785

PT Nusantara Sembcorp Solar Energi (NSSE)

NSSE merupakan ventura bersama PLN NI sebagai IPP PLTS 80N 50 MW yang didirikan pada tanggal 31 Desember 2023 dengan persentase kepemilikan saham oleh PLN NI sebesar 51.00%. Sampai dengan akhir tahun 2023, NSSE sedang dalam tahap inisiasi.	NSSE is a joint venture with PLN NI as IPP PLTS 80N 50 MW which was established on December 31, 2023 with a percentage of share ownership by PLN NI of 51.00%. As of the end of 2023, NSSE is in the initiation stage.
Alamat Kantor Pusat Head Office Address	**Alamat Unit** Unit Address
18 Office Park, 19th Floor Jl. TB Simatupang, No. 18, Jakarta Selatan 12530	Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur

Kinerja Keuangan Tahun 2021-2023 (USD) Financial Performance in 2021-2023 (USD)

Uraian Description	2021	2022	2023
Jumlah Aset Total Assets	-	-	-
Pendapatan Usaha Revenues	-	-	-
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	-	-	-

Wilayah Operasional
Operational Area

PLN NP senantiasa mengabdikan diri bagi bangsa Indonesia dalam mendorong perkembangan perekonomian nasional dengan menyediakan energi listrik yang bermutu tinggi, andal dan ramah lingkungan serta melakukan inovasi untuk terus tumbuh dan berkembang dengan berbagai bidang usaha ketenagalistrikan demi terwujudnya ketahanan energi listrik nasional.

PLN NP always dedicates itself to the Indonesian nation in encouraging the development of national economy by providing high quality, reliable and environmentally friendly electrical energy as well innovation to continue to grow and develop in various electricity business fields in order to realize national electrical energy security.

Total Kapasitas
Total Capacity

18.573* MW
Unit Pembangkit Dimiliki dan Dikelola
Owned and Managed Power Generation Unit

164 MW
Unit Jasa O&M
O&M Service Unit

* Kapasitas 1.320,0 MW di Mobile IPP Bangkang
* Kapasitas 1.320,0 MW Bangkang Sisi Kepulauan

Kepemilikan Saham IPP/JVC
Share Ownership in IPP/JVC

4.855 MW
Beroperasi
Operating

860 MW
Konstruksi
In Construction

Unit Pembangkit Dimiliki dan Dikelola PLN NP (16,173 MW)
Generating Units Owned and Managed by PLN NP (16,173 MW)

1. UP Gil Tenggan (200 MW)
2. UP Gil Indramayu (990 MW)
3. UP Gil Rembang (630 MW)
4. UP Gil Tj. Awar-Awar (700 MW)
5. UP Gil Perlan (630 MW)
6. UP Gil Paiton (1,660 MW)
7. UP Gil Kaltim Teluk (230 MW)
8. UP Gil Pulang Pisau (100 MW)
9. UPK GCU Nagan Raya (220 MW)
10. UPK GCU Bukit Asam (260 MW)
11. UPK GCU Sebangka (355,5 MW)
12. UPK GCU Tarahan (200 MW)
13. UPK GCU Punagaya (247 MW)
14. PLTU CFPP Tanjungbalai
15. PLTU CFPP Ketapang (30 MW)
16. PLTU CFPP Nil Tanjung (24 MW)
17. PLTU CFPP Kotaraing (50 MW)
18. PLTU CFPP Anggrek (55 MW)
19. PLTU CFPP Ampana (7 MW)

1. UP Gil Cilacap (1,000 MW)
2. UP Gil Bhankar (28,5 MW)
3. UPDK GCU Pandan (1,015 MW)
4. UPDK GCU Bandar Lampung (700 MW)
5. UPDK GCU Bakaru (141 MW)

1. UP Gil Arun (420 MW)
2. UP Gil Muara Karang (2,177 MW)
3. UP Gil Muara Tawar (2,910 MW)
4. UP Gil Grissik (2,231 MW)
5. UP Gil Sengkang (275 MW)
6. UPDK GCU Belawan (1,278 MW)
7. UPDK GCU Pekanbaru (106 MW)
8. UPDK GCU Palembang-ex (156 MW)
9. UPDK GCU Kapuas (1,075 MW)
10. UPDK GCU Balikpapan (56,5 MW)
11. UPDK GCU Tanjung (84 MW)
12. UPDK GCU Bandar (90 MW)
13. UPDK GCU Minahasa (74 MW)
14. UPDK GCU Gorontalo (142 MW)

1. PLTD GIPP Suppa (55 MW)

1. PLTG GPP Cirata* (5 MW)

Unit Jasa O&M (164 MW)
O&M Services Unit (164 MW)

1. PLTU CFPP Bulok (32 MW)
2. PLTU CFPP Rona (74 MW)
3. PLTU CFPP Tidore (14 MW)
4. PLTU CFPP Bandar #3 (53 MW)
5. PLTU CFPP Bengkio (Air Anyir) (10 MW)
6. PLTU CFPP Belitung (Suge) (10 MW)
7. PLTU CFPP Sambelia (100 MW)
8. PLTU CFPP Anggrek (55 MW)
9. PLTU CFPP Ampana (7 MW)

Unit Pendukung
Support Unit

1. Unit Maintenance, Repair & Overhaul (UMROH)
2. Unit Pelaksana Proyek I (UPP I)
   Project Implementation Unit I (PIU I)
3. Unit Pelaksana Proyek 2 (UPP 2)
   Project Implementation Unit 2 (PIU 2)

Keterangan Information
Unit Pembangkit (UP) ownership (UP)
Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan (UPDK) generation control unit (GCU)
Unit Pelaksana Pembangkitan (UPK) generation operating unit (GCU)
Unit Pelaksana Proyek (UPP) Project implementation unit (PIU)
* Mewakili Pusat Pikir

Kepemilikan Saham di IPP
Share Ownership in IPP

Beroperasi (4,203 MW)
Operate (4,203 MW)

1. **ASAHAN**
   PLTA UPP Asahan (Sumut) (Sumut/NP 46,0 MW)
   *Terintegrasi Jawa (MW) mengacu O&M Services
2. **BANJARSARI**
   PLTU Batubara (CFPP Jambi) MW
   Operasi Sejak PLN NP (26 Oct)
   *Terintegrasi Jawa (MW) mengacu O&M Services
3. **JAWA 7 (UNIT 1&2), SERANG**
   PLTU Batubara (CFPP Jawa Barat) MW
   Operasi Sejak PLN NP (2016)
4. **CILACAP**
   PLTU Batubara (CFPP Jawa Tengah) MW
   Breakdown Operasi 1: (2022) MW
   Breakdown Operasi 2: (2023) MW
   Operasi Sejak PLN NP (2016)
5. **HAMKUJI**
   PLTU Batubara (CFPP Jawa Barat) MW
   Operasi Sejak PLN NP (2016)

Pengembangan Konstruksi (360 MW)
Construction Development (360 MW)

1. **CIRATA FLOATING PV**
   PLTS Unit FLOAT MW (Bendungan Publik – Waduk)
   Operasi Sejak PLN NP (2021)
2. **BATANG TORU**
   PLTA UPP Batang Toru (Sumut) Sejak PLN NP (2021)
   *Unit Pembangkitan
   - Unit PT: (2021-2022)
   - Unit PT: (2021-2022)
   - Unit PT: (2021-2022)
   - Unit PT: (2021-2022)
2. **SUMBAGSEL**
   PLTU Batubara (CFPP Jambi) MW
   Operasi Sejak PLN NP (2021)
3. **PLTS IBN**
   PLTS UPP (2021) MW
   Operasi Sejak PLN NP (2021)

Kepemilikan Saham di Perusahaan O&M
Share Ownership in O&M Companies

1. **TANJUNG JATI**
   BP3 & IP4
   PLTU Batubara (CFPP Jawa) MW
   Jawa O&M Services sejak 2018 – (2)
   PLN NP (Jangka Panjang)
   O&M Services mengacu BPPB – (2) PLN NP (Jangka Panjang)

Alamat Kantor Pusat, Kantor Perwakilan dan Unit Usaha

Address of Head Office, Representative Office and Business Unit

Alamat Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan

Address of Headquarter and Representative Offices

Alamat Kantor Pusat
Head Office Address

Jl. Ketintang Baru No. 11
Surabaya 60231, Indonesia
(P: (+62 31) 828 3100 (Hunting)
(+62 31) 828 3000
info@plnnusantarapower.co.id

Kantor Strategis Jakarta
Jakarta Strategic Office

Gedung 18 Office Park, Lantai 1,
Jl. Sinabung, Kav 18
Jakarta Selatan - Indonesia
perwakilanjkt1@plnnusantarapower.co.id

Alamat Unit Usaha

Business Unit Address

Unit Pembangkitan (UP) Generation Unit (GU)

Unit Pembangkitan Gresik Gresik Generation Unit Jl. Harsono Tahir, Gresik 61112 (+62 31) 3981510, 3981540 (+62 31) 3981518 upgrk@plnnusantarapower.co.id	**Unit Pembangkitan Muara Karang** Muara Karang Generation Unit Jl. Raya Pluit Karang Ayu No. 31 Jakarta Utara 14450 (+62 21) 6600054, 6692984 (+62 21) 6692806 upmk@plnnusantarapower.co.id	**Unit Pembangkitan Muara Tawar** Muara Tawar Generation Unit Jl. PLTGU Muara Tawar No. 1, Ds. Segara Jaya, Kec. Tarumajaya, Jawa Barat 17318 (+62 21) 8894 0202 (+62 21) 8894 0212 upmtw@plnnusantarapower.co.id
Unit Pembangkitan Cilacap Cilacap Generation Unit Dn. Cadas Sari, Kec. Tegal Mulyo, Pelindu, Kutawaluya 41152 (+62 264) 370846, 370918 (+62 264) 370819 upcpc@plnnusantarapower.co.id	**Unit Pembangkitan Bratas** Bratas Generation Unit Jl. Rawasi Rahmat No. 171, Karangpakem Sumberpucung, Malang 65163 (+62 341) 385145, 385146 (+62 341) 385147 upbrs@plnnusantarapower.co.id	**Unit Pembangkitan Paiton** Paiton Generation Unit Jl. Raya Surabaya - Situbondo KM 142, Kec. Paiton, Kab. Probolinggo 67291 (+62 335) 774208 (+62 335) 771819 upptn@plnnusantarapower.co.id
Unit Pembangkitan Rembang Rembang Generation Unit Jalan Raya Semarang-Surabaya Km. 330, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang 59173 (+62 295) 4512792, (+62 295) 4512791 (+62 295) 4512790 uprb@plnnusantarapower.co.id	**Unit Pembangkitan Indramayu** Indramayu Generation Unit Desa Sumur Adem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu 45357 (+62 234) 5612234 (+62 234) 5612236 upid@plnnusantarapower.co.id	**Unit Pembangkitan Pacitan** Pacitan Generation Unit Jl. Raya Pacitan - Trenggalek KM 30, Desa Sukoreno, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan (+62 357) 5170444 (+62 357) 5170445 upcpn@plnnusantarapower.co.id
Unit Pembangkitan Tanjung Awar-awar Tanjung Awar-awar Generation Unit Jl. Tanjung Awar-awar, Desa Wedung, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban 62352, Jawa Timur (+62 356) 330330 (+62 356) 329090 uptaa@plnnusantarapower.co.id	**Unit Pembangkitan Arun** Arun Generation Unit Jl. Medan Banda Aceh Desa 1.2, Desa Meuria Paloh Blang, Muara Satu Lhokseumawe, Aceh (+62 645) 8082555 upar@plnnusantarapower.co.id secretariat.pjbarun@gmail.com	**Unit Pembangkitan Tenayan** Tenayan Generation Unit Simpang Baling, Jl. Kingsnad KM 8 Km 1, Kelurahan Industri Tenayan, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau 28285 (+62 811) 7085777 7082777 uptry@plnnusantarapower.co.id secretariat.pjbtenayan@gmail.com
Unit Pembangkitan Teluk Balikpapan Teluk Balikpapan Generation Unit Jl. PLTU No. 1 Kawasan Industri Kariangau KM. 12, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan (+62 542) 8520818 uptbl@plnnusantarapower.co.id secretariat.pjbtbl@gmail.com	**Unit Pembangkitan Pulang Pisau** Pulang Pisau Generation Unit Jl. Trans Kalimantan, Desa Bunto, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau (+62 536) 3537 337 uppp@plnnusantarapower.co.id	**Unit Pembangkitan Sengkang** Sengkang Generation Unit Jalan PLTGU Sengkang, Desa Nella, Kecamatan Panreana, Kabupaten Wajo, 90911 (+62 481) 22228 upsng@plnnusantarapower.co.id

PLTU Kalseng
Kalseng CFPP
Sulsel Bangun Dalam, Dalsis Pesam, Kalseng, Kalimantan Barat 78513

PLTU Kendari (Nil Tanasa) 1-2
Kendari (Nil Tanasa) 1-2 CFPP
Desa Nil Tanasa, Kecamatan Lalonggasumeeto, Kabupaten Kendari, Sulawesi Tenggara 93126

PLTU Amurang
Amurang CFPP
Jl. Raya Trans Sulawesi, Amurang – Tawang, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara 95854

PLTU Anggrek
Anggrek CFPP
Gorontalo, Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Gorontalo 96425

PLTU Ampana
Ampana CFPP
Jl. Trans Sulawesi, Sabu, Ampana Tete, Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah

PLTU Tembilahan
Tembilahan CFPP
Sungai Perak, Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir

PLTD Supa
Supa DFP
Jl. Pembuka, Lingkungan Karatakalu, Kel. Tellumpanua, Kec. Supa, Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan 91315
(+62 421 [illegible])
[illegible]@gmail.com

Unit Pelaksana Pembangkitan (UPK) Generation Operational Unit (GOU)

UPK Nagan Raya
Nagan Raya GOU
Jl. Meulaboh – Tapak Tuan KM. 8,5 Desa Suak Puntong, Nagan Raya 23682
upkr@pln.co.id

UPK Bukit Asam
Bukit Asam GOU
Jl. Tanjung Raya, Lawang Kidul Sumatera Selatan, Tanjungenim, Sumatera Selatan, Indonesia 31711
upba@pln.co.id

UPK Sebalang
Sebalang GOU
Jl. Lintas Sumatera KM. 17 Dusun Sebalang Desa Tanjung Ran Kec. Kalibung Kab. Lampung Selatan 35452
upsb@pln.co.id

UPK Punagaya
Punagaya GOU
Desa Punagaya, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto Sulawesi Selatan
(+62 413 [illegible])
upnu@pln.co.id

UPK Teratai
Teratai GOU
Jalan Lintas Sumatera KM. 15 Desa Rangai Tri Tunggal Kec. Kalibung, Lampung Selatan 35210
(+62 721 [illegible])
upth@pln.co.id

Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan (UPDK) Generation Control Executor Unit (UPDK)

UPDK Belawan
Belawan GOU
Jl. Pulau Sinaung No. 1, Belawan Pulau Sinaung, Medan Kota Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara 20456
updbw@pln.co.id

UPDK Pekanbaru
Pekanbaru GOU
Jl. Tanjung Datuk No. 76, Padang, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau 28155
(+62 761) 41855
updpb@pln.co.id

UPDK Palangkaraya
Palangkaraya GOU
Jl. Ahmad Yani KM. 4,5, Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70238
(+62 511) 3352023
updpl@pln.co.id

UPDK Kapuas
Kapuas GOU
Jl. Adi Sucipto No. 1, Kelurahan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat
updkp@pln.co.id

UPDK Balikpapan
Balikpapan GOU
Jl. P.T. No. 1, Kel. Mentawir, Kelurahan Klir, Balikpapan Bar., Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76119
(+62 542) 8828966
updbp@pln.co.id

UPDK Tarakan
Tarakan GOU
Jl. P. Diponegoro No. 1, Sebengkok, Tarakan Tengah, Tarakan, Kalimantan Timur, Indonesia 77119
(+62 412) 1211122
updtr@pln.co.id

UPDK Kendari
Kendari GOU
Jl. Chairil Anwar No. 113, Mekongga, Kec. Wua-Wua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93118
updkd@pln.co.id

UPDK Minahasa
Minahasa GOU
Jalan KH. Lapian, Lasem, Tondano Timur, Kab. Minahasa, Sulawesi Utara
updmh@pln.co.id

UPDK Gorontalo
Gorontalo GOU
Jl. Prof. DR. Jhon Aryo Katili, Pagayaman, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, Gorontalo 96138
updgo@pln.co.id

UPDK Ambon
Ambon GOU
Jl. Prof. M. Hatta Ir. Sibulan Terpadu, Tulehu Ambon, Nusanulf Tengah, Nusanulf, Sumatera Utara, Indonesia 23616
updam@pln.co.id

UPDK Bandar Lampung
Bandar Lampung GOU
Jl. Radin Gunawan (Km. 6, Kedaton, Bandar Lampung 35144
(+62 721) 704384, 701154
(+62 721) 704456
updbl@pln.co.id

UPDK Balaraja
Balaraja GOU
Jl. H.M. Amjad No. 77, Bukit Indah, Kec. Soreang, Kota Pandeglang, Sulawesi Selatan 91113
(+62 435) 35588
updbl@pln.co.id

Unit Pendukung Supporting Unit

Unit Maintenance Repair & Overhaul (UMRO)
Unit Maintenance Repair & Overhaul (UMRO)
Jl. Raya Pluit Selatan Ayu No. 01, Jakarta Utara, 14450
(+62 21) 6630044, 6630045
(+62 21) 6613980
umro@plnnusantarapower.co.id

Unit Bisnis Jasa Operasi & Pemeliharaan (O&M) Operation & Maintenance Services Business Unit (OMSBU)

PLTU Bolok
Bolok CFPP
Kawasan Industri Bolok Desa Bolok, Kecamatan Alak, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur 85351

PLTU Ropa
Ropa CFPP
Jl. Trans Utara, Dusun Ropa, Desa Kalusundu, Kecamatan Mauponda, Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur 86253

PLTU Tidore
Tidore CFPP
Desa Rum Balibunga, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara

PLTU Kendari (Ulu Tenggo) 3
Kendari (Ulu Tenggo) 3 CFPP
Desa Ulu Tenggo, Kecamatan Latoma, Kabupaten Kendari, Sulawesi Tenggara 93126

PLTU Banjarbaru
Banjarbaru CFPP
Jl. Untar, Timur Desa Air Anyir, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar - Banjar Baru, Kode Pos 70719

PLTU Bintang Bara
Bintang Bara CFPP
Desa Pengantungan, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung, 33453

PLTU Sintang
Sintang CFPP
Lebuhan Pandan, Sintang, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat 83616

Kepemilikan Saham di Independent Power Producer (IPP)/JVC Share Ownership in the Independent Power Producer (IPP)/JVC

PLTA Asahan
Asahan HPP
Kompleks PT Bajradaya Sentosa, Simangkuk, Desa Tanjung Setia, Kecamatan Pematokan, Pomalaa, Kabupaten Tolo Sentosa, Sulawesi Utara

PLTU Banjarsari
Banjarsari CFPP
Jl. Lintas Tengah Sumatera, Desa Sinar Pulau Ilir Dusun Kembang, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Indonesia

PLTU Jawa 7
Jawa 7 CFPP
Kantor Proyek PLTU Jawa 7
Jl. Raya Tojiwangan, Desa Tanara, Kecamatan Kramatwatu, Serang, Banten 42161

PLTU Cilacap
Cilacap CFPP
Jl. Lingkar Timur Kawasan Kandri, Kecamatan Kesugihan, Cilacap
(+62 282) 535843
(+62 282) 535843

PLTU Mamuju
Mamuju CFPP
Salang-Balang, Kalukku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat 91561

PLTA Batang Toru
Batang Toru CFPP
Desa Gojong, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara

PLTU Tanjung Cinta
Cinta Floating SPP
Desa Calas Jati, Kecamatan Tegal Ulu, Pemali, Purwakarta 41163
(+62 264) 270840, 270838
(+62 264) 270839

PLTU MT Sumbagsel 1
MT Sumbagsel 1 CFPP
Kebun Agung, Semendang Aji, Ogan Komering Ulu Regency, South Sumatera 32162

Kepemilikan Saham di Perusahaan O&M Share Ownership in O&M Company

Tanjung Jati B #3 and #4
Tanjung Jati B #3 and #4
Desa Tubanan, Kecamatan Kembang, Tahunan, Tubanan, Kembang, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59453
(+62 291) 777201
(+62 291) 4370602

Keanggotaan Asosiasi
Association Membership

Perusahaan tergabung dalam beberapa organisasi atau asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional. Daftar keanggotaan organisasi atau asosiasi PLN NP sampai dengan akhir tahun 2023 adalah sebagai berikut:

The Company is part of several industrial organizations or associations both on national and international scale. The list of PLN NP organizations or associations membership until the end of 2023 is as follows:

Tabel Keanggotaan Asosiasi
Table of Association Membership

Nama Asosiasi/ Organisasi Name of Associations/ Organization	Deskripsi Organisasi Organization Description	Posisi Perusahaan dalam Organisasi Company Position in the Organization	Lingkup Scope
The Heads of ASEAN Power Utilities (HAPUA) The Heads of ASEAN Power Utilities (HAPUA)	Organisasi yang terdiri dari Perusahaan Pemasok/ Penyedia Energi Listrik di negara-negara ASEAN yang terdiri dari 5 Working Groups An organization consisting of Electrical Energy Supplies/Provider Companies in ASEAN countries consisting of 5 Working Groups.	Anggota Member	Internasional International
Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia Indonesian Electricity Society	Organisasi yang terdiri dari Perusahaan Pemasok/ Penyedia Energi Listrik yang berfokus pada pengembangan energi baru terbarukan nasional.An organization consisting of Electrical Energy Supplies/ Provider Companies that focuses on developing new and renewable national energy.	Anggota Member	Nasional National
CIGRE Indonesia – National Committee CIGRE Indonesia – National Committee	Organisasi non profit yang bertujuan fokus membahas isu yang berhubungan dengan pengembangan, operasi dan manajemen tentang sistem kelistrikan termasuk juga desain, konstruksi, dan pemeliharaan atau dalam rangka pengelolaan sistem kelistrikan dunia. A non-profit organization purposed to focus on discussing issues related to the development, operation and management of electrical systems, including design, construction and maintenance or in the context of managing the world's electrical system.	Anggota Member	Nasional – Internasional National – International
Asosiasi Perusahaan Penyedia Listrik Nasional (APPLIN) Association of National Electricity Supply Companies (APPLIN)	Asosiasi Penyedia Listrik Nasional yang menaungi perusahaan penyedia listrik di Indonesia. National Electricity Supplies Association which oversees electricity supply companies in Indonesia.	Pendiri dan Anggota Founder and Member	Nasional National
Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN Indonesia) Indonesian Chamber of Commerce and Industry (KADIN Indonesia)	Organisasi pengusaha Indonesia yang bergerak di bidang perekonomian...jaringan bisnis bisnis nasional yang luas menjadi daya tarik dan strategis untuk kegiatan bisnis, perdagangan dan investasi. Indonesian business organization operating in the economic sector. KADIN extensive business contact network is attractive and strategic for business, trade and investment activities.	Anggota Member	Nasional National

Lembaga dan Profesi Penunjang
Supporting Institutions and Professions

Sepanjang tahun 2023, PLN NP menggunakan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) serta lembaga dan/atau profesi penunjang lainnya sebagai berikut:

Throughout 2023, PLN NP used services of public accountants (PA) and public accounting firms (PAF) as well as other supporting institutions and/or professions as follows:

Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik
Public Accounting Firm and Public Accountant

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (PwC Indonesia) Public Accounting firm		
Akuntan Publik Public Accountant	Yanto, S.E., Ak., M.Ak., CPA (No. AP.0249)	
Alamat Address	WTC 3 Jl. Jend. Sudirman Kav. 79-81, Jakarta 12910 - Indonesia (+62 21) 5099 2901/ 5997 931 (+62 21) 5290 5555/ 5290 5050 www.pwc.com/id	
Periode Penugasan Assignment Period	- Tahun ke-4 untuk Kantor Akuntan Publik - Tahun ke-4 untuk Akuntan Publik	- 4th year for Public Accounting Firm - 4th Year for Public Accountants
Lingkup Jasa Audit Scope of Audit Services	Audit laporan keuangan Perusahaan tahun buku 2023	Audit of the Company's financial statements for the 2023 financial year
Biaya Audit Audit Fees	Rp5,748,316,000	Rp5,748,316,000
Jasa Non-Audit Non-Audit Services	-	-
Biaya Non-Audit Non-Audit Fees	-	-

Notaris
Notary

Shahnaz Annas, S.H.
Jl. Fatmawati No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 (+62 21) 7221 077 (+62 21) 7221 000

Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)
Public Appraisal Services Office (PASO)

KJPP Hultsajo Sambang Purwanto Rosak Usaotao dan Rekan PASO Hultsajo Sambang Purwanto Rosak Usaotao and Partners
Kindo Office Square A3, Jl. Gunung Tiga Raya No. 101 Jakarta Selatan, 12160 (+62 21) 7918 4334 (+62 21) 7918 4387 pusat@ktpo.com www.kjpp-ktpo.com

Konsultan Bisnis
Business Consultant

PT Mckinsey Indonesia

Wisma GKBI Lantai 45, Jl. Jend. Sudirman, Jakarta 10210, Indonesia
(+62 21) 5795400

KPMG Siddharta Advisory

20th Floor Wisma GKBI 28, Jl. Jend. Sudirman, Jakarta 10210, Indonesia
(+62 21) 5912 333/ 2988

Trisakti Sustainability Center

Universitas Trisakti - Kampus A, Jl Kyai Tapa No. 1 Grogol, Gedung Suaner Thayib (M) Lantai 10, Jakarta Barat - 11440, Indonesia
(+62 21) 5663232

KJPP Irick, Riksmadi & Rekan

Ruko Simphony Blok H6-7 No.8 Harapan Indah - Bekasi, Jawa Barat, Indonesia, 17214
(+62 21) 29444861

Jasa Penyedia Regulasi
Regulatory Provider Services

Hukum Online

AD Premier 9th Floor, Jl. TB Simatupang No. 5 Pasar Rebo, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510, DKI Jakarta, Indonesia
(+62 21) 22708910
(+62 21) 22708909

Kantor Konsultan Hukum
Legal Consultant Firm

Nali'A Muntoro Law Office

District 8 - Property Tower 30th Floor Unit E, SCBD Lot 28 Jalan Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190
(+62 21) 5020 0807

UMBRA Partnership

Telkom Landmark Tower, Tower 2, 49th Floor Jakarta
(+62 21) 5083 0999

AHRP Law Firm

World Capital, Jl. Mega Kuningan Barat Kav.3 Tower 19th Floor Kuningan, Dan Kuningan, Setiabudi, South Jakarta City, Jakarta 12950
(+62 21) 5291795

Universitas Brawijaya
Brawijaya University

Jl. Veteran No. 10-11, Penawangsari, Ker. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145
(+62 21) 22708910
(+62 21) 22708909

Informasi pada Situs *Web* Perusahaan
Information on the Company Website

Situs web merupakan salah satu saluran resmi bagi Publik termasuk Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lainnya untuk dapat mengakses informasi Perusahaan serta sarana bagi PLN NP dalam membangun citra positif melalui pemenuhan aspek transparansi untuk memberikan nilai yang lebih luas dan berkelanjutan.

Website is one of the official channels for public, including for the shareholders and other stakeholders, to be able to access Company information as well as as facility the PLN NP to build positive image through fulfilling transparency aspects to provide the wider and more sustainable values.

Perusahaan memanfaatkan Situs web sebagai media informasi online untuk memperluas jangkauan PLN NP sebagai Perusahaan pembangkit listrik terintegrasi yang menyediakan energi listrik bermutu tinggi, andal dan ramah lingkungan serta menawarkan berbagai macam jasa ketenagalistrikan. Situs web resmi PLN NP menyajikan berbagai informasi terkini, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sejalan dengan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi bagi publik.

The Company utilizes website as media for online information to expand PLN NP reach as an integrated power plant company that provides high quality, reliable and environmentally friendly electrical energy and offers a variety of electricity services. Official PLN NP website presents various up-to-date, accurate and accountable information in line with the principles of transparency and openness of information to the public.

Situs web resmi PLN NP dapat diakses pada tautan www.plnnusantarapower.co.id yang tersedia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris serta memuat informasi antara lain sebagai berikut:

1. **Informasi terkait Profil Perusahaan**, memuat informasi terkait dengan Tentang Kami, Struktur Organisasi, Lini Bisnis, PLN NP Group, Perjalanan PLN NP, Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Penghargaan, Sertifikasi, Budaya Kerja, Manajemen Risiko, Pencapaian serta UKI & CSR.
2. **Informasi terkait Tata Kelola Perusahaan**, menyajikan berbagai informasi terkait dengan Whistle Blowing System, Anti Penyuapan, PLN NP Berdiri, Pedoman Kerja Direksi dan Dekom, Tata Kelola Perusahaan, ISJPS, Penilaian Tata Kelola Perusahaan, Pedoman Pengadaan, dan Piagam Audit Internal.
3. **Informasi Pengadaan**, menu ini berisikan pilihan informasi terkait dengan Info Pendaftaran CSMS, Pendaftaran CSMS, E-Procurement dan Registrasi Daftar Penyedia Perusahaan (DPP).
4. **Informasi terkait Investor**, menyajikan berbagai informasi terkait dengan PLN NP Carbon Trading, Expression Of Interest (EoI), Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan, Publikasi Posisi Keuangan, Ikhtisar Data Keuangan, Laporan Keuangan Tahunan, dan Statistik Perusahaan.
5. **Informasi tentang Media**, memuat informasi terkait dengan Majalah PLN NP, Sapotar PLN NP, dan Press Release.
6. **Informasi terkait Kontak**, menu ini berisikan pilihan informasi terkait dengan Alamat Kami dan Feedback Sponsorship.

The official PLN NP website can be accessed at the link www.plnnusantarapower.co.id which is available in Indonesian and English and contains the following information:

1. **Information related to the Company Profile**, contains information related to About Us, Organizational Structure, Business Lines, PLN NP Group, PLN NP Journey, Shareholders, Board of Commissioners, Directors, Awards, Certifications, Work Culture, Risk Management, Achievements and UKI & CSR.
2. **Information related to Corporate Governance**, presenting various information related to the Whistle Blowing System, Anti-Bribery, PLN NP Berdiri, Board Manual, Corporate Governance, GMS, Corporate Governance Assessment, Procurement Guidelines, and Internal Audit Charter.
3. **Procurement Information**, contains information options related to CSMS Registration Info, CSMS Registration, E-Procurement and Company Provider List (DPP) Registration.
4. **Information related to Investors**, presenting various information related to PLN NP Carbon Trading, Expression of Interest (EoI), Annual Report, Sustainability Report, Financial Position Publication, Financial Data Overview, Annual Financial Statement and Company Statistics.
5. **Information regarding Media**, contains information related to PLN NP Magazine, About PLN NP, and Press Releases.
6. **Information related to Contact**, contains information options related to Our Address and Sponsorship Feedback.

Tinjauan Pendukung Bisnis

Business Support Overview

Sumber Daya Manusia
Human Resources

SDM merupakan aset yang paling penting bagi suatu organisasi karena mereka yang menggerakkan semua aktivitas dan menciptakan nilai tambah bagi Perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk mengelola SDM dengan baik agar dapat mencapai tujuan bisnisnya dengan efektif dan efisien. Melalui pengelolaan SDM yang terintegrasi menjadi salah satu langkah untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dan andal dengan kontribusi yang maksimal.

HR is the most important asset for an organization because it drives all activities and creates added value for the Company. Therefore, it is crucial for organizations to manage HR well to achieve their business goals effectively and efficiently. Integrated HR management is one of the steps to produce qualified and reliable HR with maximum contribution.

Fungsi Pengelola Sumber Daya Manusia
Human Resources Management Function

Tahun 2023, fungsi yang mengelola SDM di lingkungan PLN NP diatur dalam Peraturan Direksi PT Pembangkitan Jawa-Bali No. 0045/P09/DIR/2023 tentang Peraturan Pelaksana Susunan Organisasi dan Formasi Tenaga Kerja pada Direktorat Manajemen Human Capital dan Administrasi PT Pembangkitan Jawa-Bali. Dalam mengelola SDM, Direktorat Manajemen Human Capital dan Administrasi terdiri dari Bidang Human Capital Strategy, Bidang Human Capital Development dan Bidang Human Capital Services. Selain pengelolaan SDM, Direktorat Manajemen Human Capital dan Administrasi juga membawahi Bidang Health, Safety, Security and Environment.

In 2023, the function that manages HR within PLN NP is regulated in the Regulation of the Board of Directors of PT Pembangkitan Jawa-Bali No. 0045/P09/DIR/2023 concerning Regulations for Implementing the Organizational Structure and Manpower Formation at the Directorate of Human Capital Management and Administration of PT Pembangkitan Jawa-Bali. In managing HR, the Directorate of Human Capital Management and Administration consists of the Human Capital Strategy Division, Human Capital Development Division, and Human Capital Services Division. In addition to HR management, the Directorate of Human Capital Management and Administration also oversees the Health, Safety, Security, and Environment Division.

Tata Kelola Sumber Daya Manusia
Human Resources Governance

Dengan adanya kebijakan HSM, pengelolaan SDM di PT PLN Nusantara Power mengacu pada Peraturan Direksi No. 0088.P/09/DIR/2021 tentang Kebijakan Strategis Human Experience Management System (HXMS) menggantikan Peraturan Direksi No. 009/P09/DIR/2020 tentang Human Capital Management System (HCMS).

With the HSM policy, HR management at PT PLN Nusantara Power refers to Board of Directors Regulation No. 0088/P09/DIR/2021 concerning Human Experience Management System (HXMS) Strategic Policy replacing Board of Directors Regulation No. 009/P09/DIR/2020 concerning Human Capital Management System (HCMS).

Adapun sasaran dari kebijakan KKMS meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Tepat Ukuran (Right Size)
   a. Strategi dan Tata Kelola Tenaga Kerja;
   b. Manajemen Proses Bisnis;
   c. Manajemen Organisasi;
   d. Manajemen Budaya dan Perubahan; dan
   e. Employee Value Proposition
2. Tepat Kompetensi (Right Skill)
   a. Manajemen Sumber Tenaga Kerja;
   b. Manajemen Akuisisi Karyawan;
   c. Manajemen Talenta dan Karyawan; dan
   d. Manajemen Pengembangan Karyawan.
3. Tepat Pembiayaan (Right Spend)
   a. Manajemen Kinerja Karyawan;
   b. Manajemen Penghargaan Karyawan;
   c. Manajemen Hubungan Industrial; dan
   d. Manajemen Pemutusan Hubungan Kerja.
4. Tepat Sistem Informasi (Right System)
   a. Sistem Informasi Tenaga Kerja; dan
   b. Manajemen Administrasi dan Pelayanan Karyawan.

The objectives of the KKMS policy include the following:

1. Right Size
   a. Workforce Strategy and Governance;
   b. Business Process Management;
   c. Organization Management;
   d. Culture and Change Management; and
   e. Employee Value Proposition.
2. Right Skill
   a. Workforce Source Management;
   b. Employee Acquisition Management;
   c. Talent and Employee Management; and
   d. Employee Development Management.
3. Right Spend
   a. Employee Performance Management;
   b. Employee Reward Management;
   c. Industrial Relations Management; and
   d. Termination of Employment Management.
4. Right System
   a. Workforce Information System; and
   b. Employee Administration and Services Management.

Program Strategis Pengelolaan SDM Tahun 2023

Strategic Program for HR Management in 2023

Sembilan program strategis penyiapan fundamental pengelolaan Human Capital dalam rangka Subholding Pembangkit, yang diadsit dengan NRMR KARSA Direktorat SDM adalah sebagai berikut:

1. Struktur Organisasi: Implementasi Struktur Organisasi Subholding (End State);
2. Skema Alih SDM: Menyiapkan Proses Alih SDM (Penugasan Karyawan PLN ke Subholding);
3. Pengelolaan Sistem SDM: Menyiapkan Sistem Pengelolaan SDM Subholding;
4. Talent Map: Integrasi talent PLN NP dan PLN dalam penyiapan kebutuhan resource sesuai organisasi;
5. Culture: Implementasi Culture Integration;
6. Integrasi Data: Integrasi Data dan Pengembangan Human Resource Integrated System (Pasca Subholding);
7. Hubungan Industrial: Pentingkatan Hubungan Industrial yang Harmonis (Pasca Subholding);
8. Tenaga Alih Daya: Skema Pengelolaan Tenaga Alih Daya (Pasca Subholding);
9. Kompetensi: Penguatan Kompetensi Inti dan Pendukung Pengelolaan Pembangkitan menuju transformasi transisi energi.

The nine strategic programs to prepare the fundamentals of Human Capital management in the context of the Power Plant Sub-holding called NRMR KARSA of the Directorate of HR are as follows:

1. Organizational Structure: Implementation of Sub-holding Organizational Structure (End-State);
2. HR Transfer Scheme: Preparing the HR Transfer Process (Assignment of PLN Employees to Sub-holding);
3. HR Management System: Setting up the Sub-holding HR Management System;
4. Talent Map: Integration of PLN NP and PLN talents in filling resource needs according to the organization;
5. Culture: Implementation of Culture Integration;
6. Data Integration: Data Integration and Human Resource Integrated System Development (Post Sub-holding);
7. Industrial Relations: Improvement of Harmonious Industrial Relations (Post Sub-holding);
8. Outsourcing: Outsourcing Management Scheme (Post Sub-holding);
9. Competence: Strengthening the Core and Supporting Competencies of the Electric Power Generation Management towards the transformation of energy transition.

Program Penguatan SDM Tahun 2023

HR Strengthening Program in 2023

Realisasi program Penguatan Sistem SDM yang dilakukan sampai dengan akhir 2023 adalah penyusunan Juklak PLN NP dengan tahap sebagai berikut:

1. Pada tanggal 13-15 Maret dilakukan pertemuan antara Tim Juklak Manajemen dengan Tim Serikat Pekerja untuk membahas peraturan antara lain: Fasilitas Kacamata, Peraturan Pelaksana Cuti dan Ketentuan Masuk Kerja, Perjalanan Dinas Project, Penghargaan Karyawan yang Berhenti Bekerja.
2. Pada tanggal 10-12 Mei 2023 telah dilaksanakan pertemuan antara Tim Juklak Manajemen dengan Tim Serikat Pekerja untuk membahas peraturan antara lain: Role Model & Pembinaan Khusus Karyawan, Bantuan Pendidikan Bagi Anak Yatim, Rekruitmen Karyawan PKWT, Bantuan Pinjaman Pembelian/Pemeliharaan Rumah.
3. Menindaklanjuti arahan Pemegang Saham PT PLN Nusantara Power dalam Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkular): "Pemegang Saham menyetujui Perusahan untuk merevisi seluruh peraturan terkait Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan sistem SDM yang berlaku di PLN Holding", pada tanggal 30 Mei 2023 telah dilaporkan progress pelaksanaan ratifikasi kepada Direktur Legal dan Manajemen Human Capital PT PLN (Persero).
4. Telah diterbitkan dan disosialisasikan Peraturan Direksi No. 0014.P/019/DIR/2023 tentang Bantuan Pinjaman Pembelian atau Pemeliharaan Rumah Karyawan.
5. Telah diterbitkan Peraturan Direksi No. 0016.P/019/DIR/2023 tentang Peraturan Operasional Bantuan Pendidikan Bagi Anak Yatim/ Piatu/ Yatim Piatu Karyawan yang Meninggal Dunia atau Uzur.
6. Telah diterbitkan Peraturan Direksi No. 0021.P/019/DIR/2023 tentang Peraturan Operasional Pejabat Pengganti Sementara.
7. Telah diterbitkan Edaran Direksi No. 00013.E/012/DIR/2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Proyek.
8. Pada tanggal 19-21 Desember 2023 telah dilaksanakan pertemuan dengan melibatkan Tim Juklak PKB untuk membahas konsep ketentuan antara lain: Manajemen Talenta, Manajemen Penghargaan, dan Manajemen Kinerja.

The realization of the HR System Strengthening program carried out until the end of 2023 is the preparation of PLN NP's Implementation Guidelines with the following stages:

1. On March 13-15, a meeting was held between the Management Guidelines Team and the Trade Union Team to discuss regulations including: Eyeglass Facilities, Regulations for Implementing Leave and Conditions of Entry to Work, Project Official Travel, and Rewards for Employees who Resign.
2. On May 10-12, 2023, a meeting was held between the Management Guidelines Team and the Trade Union Team to discuss regulations including: Role Model & Special Employee Development, Educational Assistance for Orphans, Recruitment of Fixed-term Employees, and Housing Ownership/Maintenance Loan Assistance.
3. Following up on the directive of the Shareholders of PT PLN Nusantara Power in the Resolution of Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders (Circular): "Shareholders approved the Company to ratify all regulations related to Human Resources (HR) in accordance with the HR system applicable in PLN Holding" on May 30, 2023, the progress of ratification was reported to the Director of Legal and Human Capital Management of PT PLN (Persero).
4. Issued and socialized Board of Directors Regulation No. 0014.P/019/DIR/2023 concerning Loan Assistance for the Purchase or Maintenance of Employee Houses.
5. Board of Directors Regulation No. 0016.P/019/DIR/2023 concerning Operational Regulations for Educational Assistance for Paternal Orphans/Maternal Orphans/Orphans of Employees who Passed Away or Elderly has been issued.
6. Board of Directors Regulation No. 0021.P/019/DIR/2023 on Operational Regulations for Temporary Substitute Officers has been issued.
7. Board of Directors' Circular No. 00013.E/012/DIR/2023 on Guidelines for Project Official Travel has been issued.
8. On December 19-21, 2023, a meeting was held involving the PKB Guidelines Team to discuss the concept of provisions, among others: Talent Management, Reward Management, and Performance Management.

Jumlah dan Komposisi Sumber Daya Manusia
Number and Composition of Human Resources

Jumlah SDM pada tahun 2023 adalah sebanyak 4,985 karyawan. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2022 sebanyak 3,034 karyawan. Perusahaan secara berkala melakukan review terhadap kecukupan jumlah SDM melalui manpower planning.

The number of HR in 2023 was 4,985 employees. This number increased compared to 3,034 employees in 2022. The Company periodically reviews the adequacy of the number of HR through manpower planning.

Komposisi karyawan berdasarkan tingkat pendidikan, jenjang jabatan, kelompok usia, dan jenis kelamin telah dijelaskan sebelumnya pada bagian Profil Perusahaan sub bab Profil SDM dalam Laporan Tahunan ini.

The composition of employees based on education level, position level, age group, and gender has been described previously in the Company Profile section of the HR Profile sub-chapter in this Annual Report.

Realisasi Rekrutmen Sumber Daya Manusia
Realization of Human Resources Recruitment

Sebagai salah satu upaya untuk mendukung kecukupan SDM, PLN NP melaksanakan rekrutmen baik dari sumber internal maupun eksternal perusahaan. Rekrutmen karyawan disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan dengan memperhatikan kompetensi jabatan dan formasi tenaga kerja agar mampu menciptakan talenta unggul, berbaya saing dan memiliki adaptabilitas terhadap perusahaan dan kebutuhan organisasi.

As one of the efforts to support the adequacy of HR, PLN NP recruits from both internal and external sources. Employee recruitment is adjusted to the needs of the Company by taking into account the competence of positions and workforce formations to be able to create superior talent, be competitive, and have adaptability to the Company and organizational needs.

Dalam pelaksanaan rekrutmen, PLN NP menerapkan strategi sebagai berikut:

1. *Buy*, yaitu memanfaatkan talenta dari pasar tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan kapabilitas yang dibutuhkan.
2. *Build*, yaitu memanfaatkan peningkatan kapabilitas tenaga kerja yang ada agar mampu memiliki kompetensi yang dibutuhkan saat ini atau masa depan.
3. *Borrow*, yaitu memanfaatkan kapabilitas yang dimiliki pihak ketiga untuk dikembangkan secara internal/*transfer of knowledge*.
4. *Bind*, yaitu memanfaatkan program retensi untuk top talent dan outsource (memanfaatkan pihak ketiga untuk kolaborasi alih daya).

In implementing recruitment, PLN NP implements the following strategies:

1. Buy, namely utilizing talents from the labor market that have the required competencies and capabilities.
2. Build, namely utilizing the improvement of the existing workforce's capabilities to be able to have the current or future required competencies.
3. Borrow, namely utilizing capabilities owned by third parties to be developed internally/transfer of knowledge.
4. Bind, namely utilizing retention programs for top talent and outsourcing (utilizing third parties for outsourcing collaboration).

Joint Recruitment PLN Grup
Joint Recruitment of PLN Group

Dalam rangka penyiapan Sumber Daya Manusia terkait pengisian gap/kebutuhan tenaga kerja, pengisian penggantian proyeksi karyawan pensiun dan adanya pengembangan bisnis Perusahaan, maka dilakukan proses rekrutmen sebagai pemenuhan kebutuhan Karyawan. Rekrutmen yang dilakukan pada tahun 2023 melalui mekanisme *Joint Recruitment* adalah sebagai berikut:

In order to prepare Human Resources related to filling the Workforce Formation gap, filling the replacement of projected retired employees, and developing the Company's business, a recruitment process is carried out to fulfill employee needs. Recruitment carried out in 2023 through the Joint Recruitment mechanism is as follows:

1. Melanjutkan arahan dari PT PLN (Persero), telah dilaksanakan tahapan seleksi wawancara dan kesehatan bagi karyawan rehire PT PLN (Persero) pada bulan Februari 2023. Pengangkatan sebagai karyawan PLN NP dilaksanakan melalui ceremony penyerahan Surat Keputusan yang dilanjutkan dengan pengarahan teknis kepada 3 (tiga) karyawan rehire pada tanggal 1 Maret 2023. Saat ini penempatan karyawan rehire berada di Kantor Pusat dan di UPDK Kapuas.
2. Pada tanggal 15 Mei 2023, telah dilaksanakan penandatanganan kontrak Prajabatan dengan 30 Siswa OJT Angkatan 80 PT PLN (Persero), hasil rekruitmen Direct Shopping dengan Universitas yang bekerjasama dengan PT PLN (Persero). Pada bulan Agustus siswa telah dimobilisasi ke Unit/Bidang Penempatan sesuai dengan proyeksi jabatannya. Telah dilaksanakan evaluasi akhir tahap 1 di bulan Desember dan hasilnya sudah dilaporkan kepada DIVHTD dan PUSDIKLAT di Holding. Proyeksi pengangkatan di Januari 2024.
3. Pada tanggal 18 September 2023 telah dilaksanakan penandatanganan kontrak Prajabatan Angkatan 81 PT PLN (Persero) dengan 47 Siswa jenjang D3/S1 hasil Rekruitmen Bersama BUMN Tahun 2023. Siswa sedang menjalani prajabatan sejak tanggal 7 Desember 2023 sesuai dengan proyeksi jabatannya.
4. Pada tanggal 6 November 2023 telah dilaksanakan pengikatan dan tanda tangan kontrak prajabatan dengan 1 (satu) siswa prajabatan Angkatan 83 rekruitmen Diaspora jenjang S1. Siswa mulai dilat kedisiplinan pada tanggal 30 November 2023.
5. Pada bulan November dilaksanakan rekruitment pro hire terbatas untuk penjaran posisi fungsional ahli di Direktorat Pengembangan Bisnis dan Niaga. Sejak 1 Desember 2023 telah dilaksanakan penandatanganan kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) bagi 1 karyawan prohire PKWT dengan jabatan Senior Specialist Business Development Generation.

1. Following up on direct hire from PT PLN (Persero), the interview and health selection stages for PT PLN (Persero) rehire employees were carried out in February 2023. Appointment as an employee of PLN NP was carried out through a ceremony of handing over a decree followed by a technical briefing to 3 (three) rehire employees on March 1, 2023. The placement of rehire employees is currently at the Head Office and at the Kapuas UPDK.
2. On May 15, 2023, a Pre-Service contract was signed with 30 OJT Batch 80 students of PT PLN (Persero), the result of Direct Shopping recruitment with the University in collaboration with PT PLN (Persero). In August, students were mobilized to the Placement Unit/Division in accordance with their projected positions. The final evaluation of phase 1 was carried out in December, and the results have been reported to DIVHTD and PUSDIKLAT in Holding. The projected appointment is in January 2024.
3. On September 18, 2023, the signing of the Pre-service contract for Batch 81 of PT PLN (Persero) was carried out with 47 D3/S1 level students from the SOE Joint Recruitment in 2023. Students are undergoing pre-service since December 7, 2023, in accordance with their projected positions.
4. On November 6, 2023, an explanation and signing of the pre-service contract was carried out with 1(one) pre-service student of Batch 83 of Diaspora recruitment for undergraduate level. Students began disciplinary training on November 30, 2023.
5. In November, a limited pro-hire recruitment was carried out to fill a functional expert position at Directorate of Business Development and Commerce. Since December 1, 2023, a Fixed-term Employment Agreement (PKWT) contract has been signed to 1 PKWT prohire employee with the Senior Specialist Business Development Generation position.

Pendidikan dan Pembelajaran Sumber Daya Manusia
Human Resources Education and Learning

Selama tahun 2023, pelaksanaan Pendidikan dan Pembelajaran adalah sebanyak 817 kegiatan termasuk pelatihan, sertifikasi, workshop, dan *Peer Group Discussion*, dengan jumlah peserta yang dikuotakan sebanyak 11.906 karyawan. Seluruh karyawan memiliki kesempatan yang sama dalam ikut serta dalam pembelajaran dan pendidikan. Namun dalam pelaksanaannya tetap disesuaikan dengan bidang jabatan, tingkat kebutuhan dan kemampuan Perusahaan saat ini.

Pendidikan dan pelatihan SDM secara lebih lengkap telah diuraikan sebelumnya pada bagian Profil Perusahaan sub bab Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal.

During 2023, there were 817 Education and Learning activities, including training, certification, workshops, and Peer Group Discussions, with a total of 11,906 employees participating. All employees have the same opportunity to participate in learning and education. However, the implementation is still adjusted to the field of position, the level of need, and the current capabilities of the Company.

More complete HR education and training has been described previously in the Company Profile section of the Education and Training chapter of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit.

PJB Academy

PJB Academy

PJB Academy, berdiri seiring dengan proses transformasi PJB Group berdasarkan Surat Keputusan Direksi PJB No. 041 tanggal 1 Juli 2016. Terbentuknya PJB Academy dilatarbelakang oleh perlunya untuk membangun dan memperkuat kembali kejayaan PJB dalam kesemilangan, yaitu kompetensi Operation & Maintenance (O&M) serta Manajemen Aset Pembangkitan sebagai modal utama untuk memberikan pelayanan terbaik kepada stakeholder, sementara di sisi lain, untuk menjamin keberlangsungan dan pertumbuhan korporasi, maka PJB harus berkembang maju dalam competitive market, seiring dengan dinamika bisnis kelistrikan di Indonesia yang utamanya sebagai dampak multiplier effect dari proyek 35 GW.

PJB Academy was established along with the transformation process of PJB Group based on the Decree of the Board of Directors No. 041 dated July 1, 2016. The establishment of PJB Academy is motivated by the need to build and re-strengthen PJB's glory in balance, namely the competence of Operation & Maintenance (O&M) as well as Electric Power Generator Asset Management as the main capital to provide the best service to stakeholders, while on the other hand, to ensure sustainability and corporate growth, PJB NP must develop forward in the competitive market, along with the dynamics of the electricity business in Indonesia, mainly as a multiplier effect of the 35 GW project.

PJB Academy mendapatkan International Certificate dari PEARSON Assured UK sebagai pengakuan bahwa perangkat pembelajaran di PJB Academy sudah berstandar kelas dunia dan menjadi rujukan best practice. Hal ini berarti kualitas proses pembelajaran PJB Academy sudah memenuhi standar Internasional PEARSON Assured UK.

PJB Academy received an International Certificate from PEARSON Assured UK as an acknowledgment that the learning tools in PJB Academy are world-class standards and became a reference for best practice. This means that the quality of PJB Academy's learning process has met the international standards of PEARSON Assured UK.

Namun, di tahun 2023 telah diterbitkan Peraturan Direksi No. 0032/P19/DIR/2023 tentang Pembubaran Organisasi Unit PJB Academy pada tanggal 29 Desember 2023.

However, in 2023, the Board of Directors Regulation No. 0032/P19/DIR/2023 on the Dissolution of PJB Academy Unit Organization was issued on December 29, 2023.

Sistem Manajemen Kinerja Sumber Daya Manusia

Human Resources Performance Management System

Sistem Manajemen Kinerja Karyawan (SMKK) PLN NP menggunakan sistem online yang terbagi dalam beberapa periode untuk memastikan terjadinya komunikasi, diskusi, dan bimbingan yang efektif dari atasan kepada para staf. Pelaksanaan SMKK mengacu pada prinsip fokus, terukur, transparan, dan objektif. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, SMKK dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan, yaitu tahapan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja karyawan.

PLN NP's Employee Performance Management System (SMKK) uses an online system divided into several periods to ensure effective communication, discussion, and guidance from superiors to staff. SMKK implementation refers to the principles of focus, measurability, transparency, and objectivity. Based on these principles, SMKK is divided into 3 (three) stages, namely the planning, monitoring, and evaluation stages of employee performance.

Perencanaan
Planning
Pemantauan
Monitoring
Evaluasi
Evaluation
Sistem Manajamen Kinerja
Performance Management System
Karyawan Employee
Melakukan pengisian Sasaran Kinerja Perorangan (SKP) di SIMKK
Fill in the Individual Performance Targets (SKP) in SIMKK.
Atasan Supervisor
Melakukan komunikasi tentang KPI yang melekat di bawahan (target, kurun waktu, dll)
Communicating KPI that is inherent in subordinate (targets, period of time, etc.)
1
Perencanaan SKP
IPT Planning
2
Approval SKP
IPT Approval
3
Pemantauan (Monitoring & Review)
Monitoring (Monitoring & Review)
4
Pengisian Kuesioner Kompetensi
Filling out the Competence Questionnaire
5
Pengisian Pencapaian SKP
Filling out the IPT Achievement
6
Approval pencapaian Target
Approval of Target Achievement
Atasan Supervisor
Melakukan Approval terhadap SKP bawahannya melalui SIMKK.
Approving the subordinate's IPT through SIMKK.
Atasan Supervisor
Melakukan komunikasi terhadap progress pencapaian KPI bawahannya
Communicating KPI achievement progress of the subordinate
Karyawan Employee
Melakukan komunikasi tentang progress KPI yang dilaksanakan (kendala yang dihadapi, status pencapaian, dll.)
Communicating KPI progress (challenges faced, status of achievement, etc.)
Atasan Supervisor
Atasan melakukan pengisian Kuesioner kompetensi bawahannya melalui SIMKK
Supervisor fills out competence questionnaire of its subordinate through SIMKK.
Karyawan Employee
Melakukan pengisian realisasi SKP dan PDP Lain di SIMKK.
Filling out the realization of IPT and other PDPs in SIMKK
Atasan Supervisor
Melakukan Approval pencapaian target SKP masing-masing bawahannya.
Approving the IPT Target achievement of each subordinate.

1. **Perencanaan**
   Kesepakatan antara Atasan dan Bawahan terkait pekerjaan dan target yang harus diselesaikan.
2. **Pemantauan**
   Atasan memantau progres pencapaian target bawahannya dan melakukan kegiatan coaching/mentoring/counseling.
3. **Evaluasi**
   Atasan melakukan pengukuran nilai capaian kinerja perorangan dan kompetensi individu karyawan.

PLN NP melakukanakan penilaian kinerja terhadap karyawan pada setiap semester yang dilakukan oleh Bidang Human Capital Services.

1. **Planning**
   Agreement between Superior and Subordinates related to work and targets to be completed.
2. **Monitoring**
   Superiors monitor the progress of their subordinates' target achievement and conduct coaching/mentoring/counseling activities.
3. **Evaluation**
   Superiors measure the value of individual performance targets and individual competencies of employees.

PLN NP carries out performance assessments of employees every semester conducted by the Human Capital Services Department.

Survei Karyawan
Employee Survey

Survei yang dilaksanakan oleh PLN NP adalah survei untuk mengetahui tingkat keterikatan dan tingkat kesehatan budaya Perusahaan. Keterikatan karyawan diukur melalui Employee Engagement Survey dan tingkat kesehatan budaya Perusahaan dilakukan melalui Survey Culture Health Index. Pada Desember 2023, telah dilakukan penyusunan laporan hasil Employee Engagement Survey dan Survey Culture Health Index PLN Nusantara Power tahun 2023.

The survey conducted by PLN NP is a survey to determine the level of engagement and the level of health of the Company's culture. Employee engagement is measured through the Employee Engagement Survey, and the level of health of the Company's culture is conducted through the Culture Health Index Survey. In December 2023, a report on the results of the Employee Engagement Survey and the Culture Health Index Survey of PLN Nusantara Power in 2023 was compiled.

Indeks Keterikatan Kerja Karyawan
Employee Job Engagement Index

Employee Engagement Survey (EES) sebesar **80,85 (Sangat Engage)**, dimensi tertinggi di PLN NP adalah Teamwork & Relationship yaitu dengan skor 82,28 dan yang perlu menjadi perhatian atau area for improvement yaitu pada dimensi Work Conditions dengan skor 79,43.

Employee Engagement Survey (EES) of **80.85 (Very Engaged)**, the highest dimension in PLN NP is Teamwork & Relationship with a score of 82.28, and the area for improvement is the Work Conditions dimension with a score of 79.43.

Grafik Skor EES tahun 2023
Chart of EES Score in 2023

Indeks Tingkat Kesehatan Budaya Perusahaan
Corporate Culture Health Index

Berdasarkan hasil Survey Culture Health Index (CHI) tahun 2023, entropi budaya di PLN Nusantara Power berada pada rentang Minor Issues, yaitu sebesar 19,90%.

Based on the results of the Culture Health Index (CHI) Survey in 2023, cultural entropy at PLN Nusantara Power is in the Minor Issues range of 19,90%.

Grafik Entropi Budaya tahun 2023
Chart of Cultural Entropy in 2023

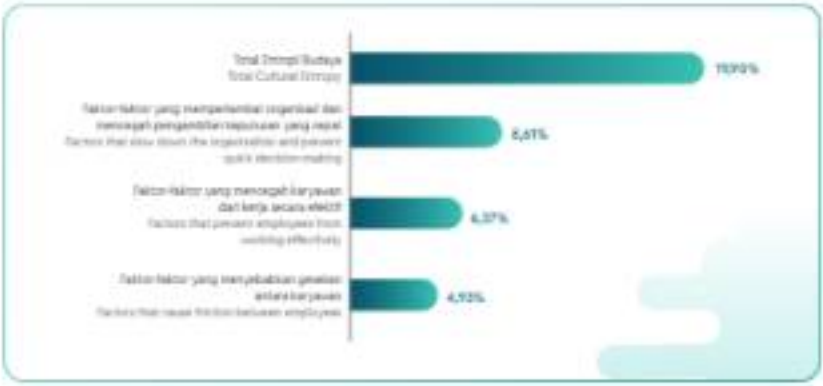

Sebagaimana ditunjukkan pada grafik di atas, ada 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi entropi budaya, di antaranya faktor-faktor yang memperlambat organisasi dan menunda pengambilan keputusan yang cepat sebesar 8,41%, faktor-faktor yang menunda karyawan dari bekerja secara efektif sebesar 6,37%, dan faktor-faktor yang menyebabkan gesekan antara karyawan sebesar 4,93%.

As shown in the chart above, there are 3 (three) factors that affect cultural entropy, including factors that slow down the organization and prevent quick decision-making at 8.41%, factors that prevent employees from working effectively at 6.37%, and factors that cause friction between employees at 4.93%.

Pengembangan Karir dan *Talent Management*

Career Development and Talent Management

PLN NP telah melakukan ratifikasi kebijakan jalur karir melalui manajemen talenta yang merujuk pada Peraturan Direksi No. 0015.P/019/DIR/2021 tentang Peraturan Operasional Sistem Manajemen Talenta dan Karyawan. Manajemen talenta dapat diikuti oleh karyawan yang memiliki kompetensi dan potensi terbaik tanpa membedakan gender ataupun faktor-faktor lain seperti suku, agama, dan antar golongan.

PLN NP has ratified the career path policy through talent management, which refers to the Board of Directors Regulation No. 0015.P/019/DIR/2021 concerning Operational Regulations for Talent and Employee Management Systems. Talent management can be participated by employees who have the best competence and potential without distinguishing gender or other factors such as ethnicity, religion, and interpreus.

Suksesi Jabatan

Job Succession

Suksesi jabatan merupakan rangkaian proses pemetaan, pengidentifikasian, pembinaan dan pengembangan kompetensi dan karir karyawan dalam mengisi Jabatan yang dibutuhkan Perusahaan. Suksesi jabatan dalam manajemen talenta ini dilakukan untuk pengisian Jabatan Struktural dan Fungsional Ahli/Expertise di Perusahaan yang dilakukan secara rutin setiap tahunnya. Adapun rangkaian proses dalam manajemen talenta terdiri atas:

1. Identifikasi posisi kunci,
2. Akuisisi talenta,
3. Klasifikasi talenta,
4. Pengembangan talenta,
5. Mobilisasi talenta,
6. Retensi talenta,
7. Pengukuran kesiapan talenta.

Job succession is a series of processes for tracking, identifying, fostering, and developing employees' competencies and careers in filling positions needed by the Company. Job succession in talent management is focused on filling Structural and Functional Expert/ Expertise Positions in the Company, which is carried out regularly every year. The series of processes in talent management consists of:

1. Key position identification,
2. Talent acquisition,
3. Talent classification,
4. Talent development,
5. Talent mobilization,
6. Talent retention,
7. Measurement of talent readiness.

Dalam tahap identifikasi posisi kunci mempertimbangkan kriteria dampak dan keunikan keahlian yang dikualifikasikan menjadi empat yaitu posisi kunci 1, posisi kunci 2, posisi kunci 3 dan posisi kunci 4 sesuai dengan syarat suksesi jabatan. Selanjutnya akuisisi talenta dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, seleksi dan memetakan talenta ke dalam kelompok talent pool untuk dikualifikasikan melalui penetapan PLN talent profile ke dalam 9 Box HAV dengan pendekatan capacity dan performance.

In the key position identification stage, the criteria of impact and uniqueness of expertise are considered, which are classified into four, namely key position 1, key position 2, key position 3, and key position 4, in accordance with the requirements of the job succession. Furthermore, talent acquisition is carried out through a series of processes to identify, select, and map talents into talent pool groups to be classified through the PLN talent profiles determination into nine HAV Boxes with capacity and performance approaches.

Kedua pendekatan tersebut berdasarkan:

1. Penilaian kompetensi yang diperoleh dari hasil penggabungan,
2. History talent (riwayat jabatan, jenjang jabatan, kriteria talenta),
3. Nilai kinerja,
4. Usulan diklat penjenjangan.

Both approaches are based on:

1. Competency assessment obtained from the merging results,
2. Talent history (position history, position level, talent criteria),
3. Performance score,
4. Proposed in-service training.

Gambar HAV 9-Box Model
Figure HAV 9-Box Model

Para Talent yang telah dikelompokkan dalam HAV 9-Box Model selanjutnya dilakukan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan talent agar sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan Perusahaan sehingga dapat memberikan kontribusi maksimal saat menduduki jabatannya. Pembinaan Talent menggunakan metode pengembangan yang berfokus pada 2 (dua) ranah kompetensi yaitu soft competency dan hard competency. Program pembinaan talent yang terdapat di PLN NP adalah sebagai berikut:

1. Pembelajaran,
2. Pendidikan formal,
3. Knowledge Management,
4. Mentoring,
5. Coaching,
6. Benchmarking,
7. Magang pada institusi di luar Perusahaan,
8. Shadowing,
9. Penugasan pada tim strategik,
10. Penugasan pada jabatan.

Talents who have been grouped in the HAV 9-Box Model are then coached to improve their abilities to match the competencies needed by the Company so that they can make maximum contributions when they occupy their positions. Talent coaching uses a development method that focuses on 2 (two) domains of competence, namely soft and hard competencies. The talent development program in PLN NP is as follows:

1. Learning,
2. Formal education,
3. Knowledge Management,
4. Mentoring,
5. Coaching,
6. Benchmarking,
7. Internships at institutions outside the Company,
8. Shadowing,
9. Assignment to strategic teams,
10. Assignment to positions.

Di samping melaksanakan pembinaan, PLN NP juga melakukan retensi talent guna memastikan talent yang terpilih tetap bekerja dalam Perusahaan dan berkinerja sesuai dengan yang diharapkan yang terdiri dari 2 (dua) aspek yaitu enablement dan engagement.

Pada tahap Talent Acquisition dan Talent Mobility, talent dipersiapkan melalui program kaderisasi. Kader akan melalui serangkaian penugasan dan evaluasi sebelum dinyatakan mampu untuk naik atau menduduki jabatan tertentu. Sampai dengan tahun 2023, ketersediaan talent untuk jabatan struktural tersedia dalam tabel di bawah ini.

In addition to coaching, PLN NP also conducts talent retention to ensure that selected talents continue to work in the Company and perform as expected, consisting of 2 (two) aspects, namely enablement and engagement.

At the talent Acquisition and talent Mobility stages, talents are prepared through a cadre program. Cadres will undergo a series of assignments and evaluations before being declared capable of promotion or filling certain positions. Until 2023, the availability of talent for Structural positions is provided in the table below.

Tabel Pemenuhan Jabatan Struktural
Table of Structural Position Fulfillment

Deskripsi Description	Jumlah Talent Total Talent	Jumlah Formasi Total Formation
Manajemen Atas Top Management	13	7
Manajemen Tengah Middle Management	147	57
Manajemen Dasar Basic Management	463	193
Supervisor Atas Top Supervisor	1,316	404

Selain itu, sebagai bentuk integrasi PLN Group, PLN NP memberikan penugasan dan menerima Karyawan melalui Sistem Tugas Karya. Berikut jumlah Karyawan tugas karya masuk PLN NP dan tugas karya keluar PLN NP pada tahun 2023.

In addition, as a form of PLN Group integration, PLN NP assigns and accepts Employees through the Work Assignment System. The following is the number of PLN NP incoming work assignments and outgoing work assignments Employees in 2023.

Grafik Jumlah Karyawan Karya Keluar (orang)
Chart of Total Outgoing Work Assignment Employees (person)

Grafik Jumlah Karyawan Karya Masuk (orang)
Chart of Total Incoming Work Assignment Employees (person)

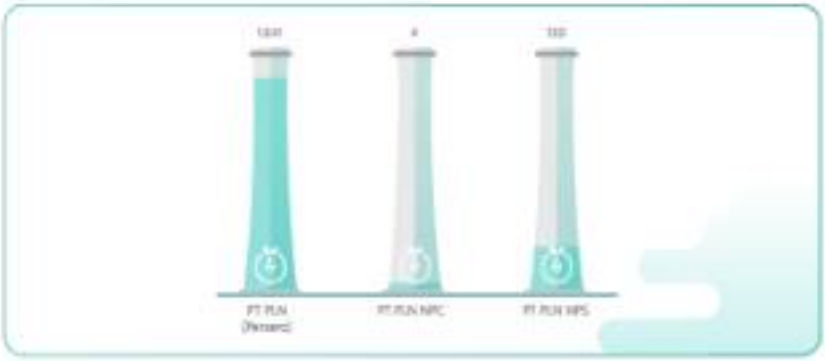

Special Assignment Program (SIGAP)

Special Assignment Program (SIGAP)

Special Assignment Program (SIGAP) merupakan program penyiapan multi kompetensi dengan menggunakan lintpkap jabatan dengan melibatkan coach dan fasilitator serta check point untuk memastikan ketercapaian penyelesaian proyek ataupun sasaran pembelajaran melalui real life experience dengan coach yang ahli di bidangnya. Sejalan dengan kebutuhan strategis perusahaan dan pengembangan soft skill bagi talenta terbaik di PLN NP, maka dibuka kembali pendaftaran bagi karyawan untuk bergabung pada program ini. Pada bulan Juni 2022, jumlah pendaftar untuk SIGAP adalah sebanyak 98 karyawan.

The Special Assignment Program (SIGAP) is a multi-competency preparation program using multiple positions by involving coaches and facilitators as well as checkpoints to ensure the achievement of project completion or learning objectives through real-life experience with coaches who are experts in their fields. In line with the Company's strategic needs and the development of soft skills for the best talents in PLN NP, the Company reopened registration for employees to join this program. In June 2022, the number of applicants for SIGAP was 98 employees.

Remunerasi Sumber Daya Manusia

Human Resources Remuneration

PLN NP senantiasa menginplementasikan strategi remunerasi yang kompetitif di industri tenaga listrik guna menarik, memotivasi individu-individu terbaik yang dimiliki Perusahaan. PLN NP memiliki kebijakan remunerasi yang berlandaskan pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2022-2024 No. PT PLN (Persero) 001/K/021/DIR/2022; No. SP PLN (Persero) 003/K/SP-DPP/2022.

Dalam PKB, komponen kebijakan remunerasi di PLN NP terdapat istilah Kompensasi dan Sistem Remunerasi. SP. Kompensasi merupakan imbalan yang diberikan oleh Perusahaan kepada Karyawan dalam bentuk uang yang diberikan pada kurun waktu tertentu (bulanan, semesteran, tahunan, triwulan, dan lainnya).

PLN NP always implements a competitive remuneration strategy in the electricity industry to attract and motivate the best individuals owned by the Company. PLN NP has a remuneration policy based on the Collective Labor Agreement (CLA) for the period 2022 - 2024 No. PT PLN (Persero) 001/K/021/DIR/2022; No. SP PLN (Persero) 003/K/SP-DPP/2022.

In the CLA, the nomenclature of the remuneration policy in PLN NP contains the terms Compensation and SP Remuneration System. Compensation is a reward provided by the Company to employees in the form of money given at a certain period (monthly, semi-annually, annually, 6-yearly, and others). While the SP

Sementara Sistem Remuneras SP adalah sistem remuneras sebagai Kompensasi atas kompetensi individu, tanggung jawab dalam Jabatan, dan prestasi kerja yang diberikan kepada Karyawan dalam bentuk *Pay for Person*, *Pay for Position*, dan *Pay for Performance*. PLN NP menetapkan besaran remuneras Karyawan dengan merujuk pada Peraturan dan Keputusan Direksi Perusahaan.

Remuneration System is a remuneration system as Compensation for individual competence, responsibility in Position, and work performance given to Employees in the form of Pay for Person, Pay for Position, and Pay for Performance. PLN NP determines the amount of employee remuneration by referring to the Regulations and Decisions of the Company's Board of Directors.

Pada tahun 2022 telah diterbitkan Peraturan Direksi terkait Human Experience Management System (HXMS) dan Peraturan Direksi terkait Sistem Manajemen Penghargaan Karyawan sesuai arahan Pemegang Saham untuk melaksanakan sinkronisasi dan ratifikasi dalam rangka mendukung talent mobility. Pada tahun 2023 kebijakan HXMS dan beberapa turunannya telah selesai diratifikasi melalui:

1. Peraturan Direksi PJB No.0088/I/019/DIR/2023 tentang Kebijakan Strategi Human Experience Management System;
2. Peraturan Direksi PJB No. 0089/I/019/DIR/2023 tentang Peraturan Pelaksana Sistem Manajemen Penghargaan Karyawan;
3. Peraturan Direksi PJB No. 0044A/I/020/DIR/2023 tentang Penetapan Tarif Penghargaan Karyawan;
4. Peraturan Direksi PLN NP No. 0006/I/019/DIR/2023 tentang Fasilitas Kacamata.

In 2022, the Board of Directors Regulation related to the Human Experience Management System (HXMS) and the Board of Directors Regulation related to the Employee Reward Management System were issued in accordance with the directives of the Shareholders to carry out synchronization and ratification to support talent mobility. In 2023, the HXMS policy and some of its derivatives have been ratified through:

1. PJB's Board of Directors Regulation No.0088/I/019/DIR/2023 on Strategy Policy of the Human Experience Management System;
2. PJB's Board of Directors Regulation No. 0089/I/019/DIR/2023 on Implementation Regulation of the Employee Reward Management System;
3. PJB's Board of Directors Regulation No. 0044A/I/020/DIR/2023 on Employee Reward Tariff Determination;
4. PLN NP's Board of Directors Regulation No. 0006/I/019/DIR/2023 on Eyeglasses Facilities.

Sejalan dengan kebijakan HXMS serta Peraturan Direksi No. 0089/I/019/DIR/2023 tentang Peraturan Pelaksana Sistem Manajemen Penghargaan Karyawan PT Pembangkitan Jawa Bali, terdapat 3 (tiga) jenis remuneras yang diterakan sebagai berikut:

1. *Pay for Person* (P1)
   Tarif Grade (*Pay for Person*) adalah kompensasi tetap yang diberikan Perusahaan kepada Karyawan dengan mempertimbangan kompetensi, kinerja tertentu, termasuk pertimbangan faktor tanggungan istri/suami, dan anak.
2. *Pay for Position* (P2)
   Tunjangan Posisi (*Pay for Position*) adalah kompensasi yang diberikan Perusahaan kepada karyawan dalam bentuk tunjangan tidak tetap dengan mempertimbangkan faktor tanggung jawab jabatan, lokasi pekerjaan, kekhususan pekerjaan dengan mempertimbangkan kehadiran karyawan.
3. *Pay for Performance* (P3)
   Pay for Performance adalah Kompensasi atas prestasi kerja Karyawan berdasarkan hasil kinerja yang dicapai, baik kinerja individu atau secara kelompok yang merupakan kontribusi nyata dan terukur.

In line with the HXMS policy as well as Board of Directors Regulation No. 0089/I/019/DIR/2023 on Implementation Regulation of the Employee Reward Management System of PT Pembangkitan Jawa Bali, there are 3 (three) types of remuneration described as follows:

1. Pay for Person (P1)
   Grade Tariff (Pay for Person) is a fixed compensation provided by the Company to employees by considering competence and certain performance, including consideration of wife/husband and child dependency factors.
2. Pay for Position (P2)
   Position Allowance (Pay for Position) is compensation provided by the Company to employees in the form of non permanent allowances by considering the factors of position responsibility, job location, and job specificity by considering employee attendance.
3. Pay for Performance (P3)
   Pay for Performance is compensation for employee performance based on the results of the performance achieved, either individual or group performance, which is a concrete and measurable contribution.

PLN NP menerapkan kebijakan sistem remuneras dengan berpedoman pada konsep *Merit System* Perusahaan juga selalu memastikan telah mentaati seluruh aturan yang berlaku yang terkait dengan sistem remuneras. Terkait dengan remuneras, PLN NP senantiasa berupaya agar tidak terjadi gap remuneras terlalu tinggi.

PLN NP implements a remuneration system policy based on the Merit System concept. The Company also continuously ensures that it has complied with all applicable rules related to the remuneration system. In relation to remuneration, PLN NP always strives to avoid an excessive remuneration gap.

Penerapan *Reward and Punishment*

Reward and Punishment Implementation

Bentuk penghargaan yang diberikan kepada karyawan dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu: penghargaan ekstrinsik dan intrinsik. Penghargaan ekstrinsik diberikan dalam bentuk kompensasi dan manfaat karyawan. Untuk Kompensasi Karyawan terdiri dari:

1. Kompensasi tetap, berupa *Pay for Person* (PT) atau Tunjangan Grade.
2. Kompensasi tidak tetap yang terdiri atas:
   a. Kompensasi Jangka Pendek terdiri dari *Pay for Position* (PT) atau Tunjangan Posisi, *Pay for Performance* (PE), Insentif Kinerja/Bonus, Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Cuti Tahunan.
   b. Kompensasi Jangka Panjang, terdiri dari Tunjangan Cuti Besar, Penghargaan Kesetiaan Kerja, Pesangon, Kompensasi selama Masa Persiapan Pensiun, dan hal lain yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja Bersama.

Untuk manfaat Karyawan terdiri atas:

1. Manfaat Umum yang terdiri atas jaminan sosial (Kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiunan dan kematian), hak cuti, pemeliharaan Kesehatan, pakaian dinas, bantuan akomodasi terkait mutasi, bantuan kematian/pemakaman, dan hal lain yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja Bersama.
2. Manfaat Khusus (Perquisite) yang terdiri yang terdiri atas bantuan/fasilitas kendaraan, bantuan/fasilitas perumahan, bantuan/fasilitas alat dan ruang kerja, tenaga pengemanan, keanggotaan profesi, kartu kredit korporat, dan keanggotaan klub tertentu sesuai dengan kebutuhan.

The form of rewards provided to employees can be divided into 2 (two) types, namely extrinsic and intrinsic rewards. Extrinsic awards are provided in the form of compensation and employee benefits. Employee Compensation consists of:

1. Fixed compensation, in the form of *Pay for Person* (PT) or Grade Allowance.
2. Non-fixed compensation consisting of:
   a. Short-term Compensation consists of *Pay for Position* (PT) or Position Allowance, *Pay for Performance* (PE), Bonus, Religious Holiday Allowance, and Annual Leave Allowance.
   b. Long-term Compensation, consisting of Grand Leave Allowance, Work Loyalty Award, Severance Pay, Compensation during the Retirement Preparation Period, and other matters agreed upon in the Collective Labor Agreement.

Employee benefits consist of:

1. General Benefits consist of social security (health, work accident, old age, pension, and life), leave entitlement, health care, official clothing, accommodation assistance related to mutation, death/funeral assistance, and other matters agreed in the Collective Labor Agreement.
2. Perquisites consist of vehicle assistance/facilities, housing assistance/facilities, tools and workspace assistance/facilities, security personnel, professional membership, corporate credit cards, and membership in certain clubs as required.

Dari penghargaan Intrinsik yang diberikan dalam bentuk non tunai yang bermakna bagi individu karyawan yang diberikan berupa:

1. Program Pembelajaran dan Sertifikasi Kompetensi/Profesi, yang merupakan kesempatan yang diberikan kepada Karyawan yang telah memberi kontribusi nyata kepada Perusahaan dan memenuhi kriteria talenta tertentu.
2. Program Keseimbangan Hidup, merupakan penghargaan kepada Karyawan untuk menciptakan keseimbangan antara kehidupan pekerjaan dan kehidupan di luar pekerjaan berupa kegiatan dalam bentuk peningkatan kesejahteraan spiritual, fisik dan mental untuk memotivasi Karyawan agar mendapat kinerja yang excellence.
3. Bantuan hukum berupa pembelaan atas tuntutan hukum dari pihak lain terkait tugas dan tanggung jawab di perusahaan.
4. Pengakuan (Recognition) merupakan program pengakuan sosial yang diberikan kepada Karyawan yang telah mendapatkan penghargaan Direksi.
5. Kesempatan untuk melakukan sesuatu yang membuat Karyawan bangga (privilege), diberikan kepada Karyawan yang telah memberikan prestasi dan kontribusi ekstra dalam mendukung pencapaian kinerja Perusahaan dan atau citra Perusahaan.

And intrinsic awards provided in the form of non-cash awards that are meaningful to individual Employees provided in the form of:

1. Competency/Profession Learning and Certification Program, which is an opportunity provided to Employees who have made a real contribution to the Company and meet certain talent criteria.
2. Life Balance Program, is a reward for Employees to create a balance between work life and life outside work in the form of activities to improve spiritual, physical, and mental well-being to motivate employees to obtain excellent performance.
3. Legal assistance, in the form of defense of legal claims from other parties related to the duties and responsibilities implementation in the Company.
4. Recognition, is a social recognition program provided to Employees who have received the Board of Directors' award.
5. Opportunity to conduct something that makes Employees proud (privilege), provided to employees who have made extra achievements and contributions in supporting the achievement of the Company's performance and/or the Company's image.

Bentuk pemberian penghargaan kepada karyawan dalam bentuk:
1. Pendidikan Formal,
2. Sertifikasi,
3. Penghargaan Kesetiaan Kerja (ersituan),
4. Bantuan Pinjaman Pemilikan Rumah Karyawan (BPPR),
5. Penghargaan Pensiun.

Forms of rewarding employees include:
1. Formal Education,
2. Certification,
3. Work Loyalty Award (8-yearly),
4. Employee Home Ownership Loan Assistance (BPPR),
5. Retirement Reward.

Hingga akhir tahun 2023, terdapat 1.157 karyawan yang mendapatkan reward berupa 126 Pendidikan formal, 440 Sertifikasi, 93 penghargaan ersituan, 323 BPPR dan 33 penghargaan pensiun.

Until the end of 2023, 1,157 employees received rewards in the form of 126 formal education, 440 certifications, 93 8-yearly rewards, 323 BPPR, and 33 retirement rewards.

Sedangkan bentuk-bentuk sanksi yang diberikan dapat berupa:
1. Sanksi Pokok:
   - Peringatan Tertulis,
   - Pemotongan Tunjangan Posisi (TP),
   - Penurunan Grade,
   - Penurunan kriteria talenta, dan/atau
   - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
2. Sanksi Tambahan:
   - Demosi, dan/atau
   - Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Meanwhile, the forms of sanctions imposed can be in the form of:
1. Principal Sanctions:
   - Written Warning,
   - Deduction of Position Allowance (TP),
   - Grade Demotion,
   - Decreased talent criteria, and/or
   - Termination of Employment (PHK).
2. Additional Sanctions:
   - Demotion, and/or
   - Claims for Compensation (TGR).

Hingga akhir tahun 2023, terdapat 4 karyawan yang mendapatkan sanksi/punishment berupa 3 sanksi disiplin sedang/fundamental dan 1 sanksi disiplin ringan/administrasi.

Until the end of 2023, 4 employees received sanctions/punishments in the form of 3 medium/fundamental disciplinary sanctions and 1 light/administrative disciplinary sanction.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Occupational Health and Safety (OHS)

Aspek kesehatan dan keselamatan kerja bagi karyawan merupakan bagian yang sangat vital di bidang usaha Perusahaan. PLN NP memandang bahwa kesehatan dan keselamatan kerja bagi karyawan merupakan aspek penting yang berpengaruh terhadap keberlangsungan aktivitas operasional Perusahaan. Tingkat kesehatan dan keselamatan karyawan memiliki dampak yang signifikan terhadap performa dan hasil kerja karyawan, serta berdampak terhadap hubungan karyawan dengan karyawan lain. Uraian lebih lanjut mengenai K3 akan dijelaskan di Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah, namun menjadi bagian dari Laporan Tahunan ini.

The aspect of occupational health and safety for employees is a very vital part of the Company's business. PLN NP considers that occupational health and safety for employees is an important aspect that affects the sustainability of the Company's operational activities. The level of occupational health and safety of employees has a significant impact on employee performance and work results, as well as impacting employee relations with other employees. Further description of OHS will be explained in the Sustainability Report, which is presented separately but is part of this Annual Report.

Hubungan Industrial

Industrial Relations

Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan hubungan industrial adalah menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, kondusif dan berkeadilan di perusahaan. Sedangkan serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela

Industrial relations is a system of relationships formed between actors in the production process of goods and/or services consisting of elements of employers, workers/laborers, and government based on the values of Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The purpose of industrial relations is to realize harmonious, dynamic, conducive, and equitable industrial relations in the Company. Meanwhile, trade unions/labor unions are organizations established from, by, and for workers/laborers both in the Company and outside the Company, which are free, open, independent, democratic, and responsible to fight for, defend, and protect the rights and interests of workers/laborers

serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. PKB antara PLN NP dengan Serikat Pekerja yang berlaku di tahun 2022 adalah PKB 2022-2024 No. PT. PLN 0001K/021/DIR/2022, No. SP PLN 0031K/SP-OPY/2022. Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruhnya mempunyai fungsi:

1. Menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya;
2. Menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi;
3. Menyalurkan aspirasi secara demokratis;
4. Mengembangkan keterampilan, dan keahliannya;
5. Ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.

Dalam rangka membutuhkan terciptanya Hubungan Industrial yang harmonis dan kondusif, maka secara rutin dilakukan pertemuan berkala dengan Serikat Pekerja untuk membahas permasalahan-permasalahan aktual terkait hubungan ketenagakerjaan. Pembahasan permasalahan tersebut mengacu pada ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Pembahasan ini dilakukan oleh Tim Juklak PKB yang bertugas untuk menginventarisir dan merumuskan peraturan-peraturan yang merupakan turunan dari Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Beberapa Surat Keputusan yang telah dihasilkan oleh Tim Juklak PKB dan selama tahun 2023 untuk mengatur beberapa hal yang berkaitan dengan Hubungan Industrial adalah sebagai berikut:

1. Edaran Direksi No. 0002.E/012/DIR/2023 tanggal 5 Januari 2023 tentang Pemeliharaan Kesehatan Bagi Karyawan Tugas Kerja PT PLN (Persero).
3. Peraturan Direksi No. 0008/P/019/DIR/2023 tanggal 18 April 2023 tentang Fasilitas Kacamata.
3. Keputusan Direksi No. 0019.K/030/DIR/2023 tanggal 25 Mei 2023 tentang Pembentukan Komite Talenta.
4. Peraturan Direksi No. 0014/P/019/DIR/2023 tanggal 13 Juli 2023 tentang Peraturan Operasional Bantuan Pinjaman Pembelian atau Pemeliharaan Rumah Karyawan.
5. Keputusan Direksi No. 0036.K/030/DIR/2023 tanggal 23 Agustus 2023 tentang Pakaian Dinas Harian Karyawan PT PLN NP.
6. Peraturan Direksi No. 0018/P/019/DIR/2023 tanggal 05 September 2023 tentang Peraturan Operasional Bantuan Pendidikan bagi Anak Yatim/Piatu/Yatim Piatu Karyawan yang Meninggal Dunia atau Uzur.
7. Peraturan Direksi No. 0021/P/019/DIR/2023 tanggal 27 September 2023 tentang Peraturan Operasional Pejabat Pengganti Sementara.
8. Edaran Direksi No. 0011.E/012/DIR/2023 tanggal 29 September 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Proyek.
9. Peraturan Direksi No. 0023/P/019/DIR/2023 tanggal 9 Oktober 2023 tentang Peraturan Operasional Cuti, Izin dan Ketentuan Masuk Kerja Karyawan.
10. Edaran Direksi No. 0016.E/012/DIR/2023 tanggal 20 Oktober 2023 tentang Petunjuk Teknis Pembinaan Person Grade di Masa Transisi.

and improve the welfare of workers/laborers and their families. The CLA between PLN NP and the Labor Union that is valid in 2022 is CLA 2022-2024 No. PT PLN 0001K/021/DIR/2022, No. SP PLN 0031K/SP-OPY/2022. In implementing industrial relations, workers/laborers and their trade unions have the following functions:

1. Carrying out work in accordance with their obligations;
2. Maintaining order for the continuity of production;
3. Channeling aspirations in a democratic manner;
4. Developing their skills and expertise;
5. Participating in advancing the Company and fighting for the welfare of members and their families.

In order to support the creation of harmonious and conducive Industrial Relations, regular meetings are held with the Labor Union to discuss actual issues related to labor relations. The discussion of these issues refers to the prevailing provisions and legislations. This discussion is carried out by the CLA Guidelines Team, which is in charge of inventorying and formulating regulations that are derivatives of the Collective Labor Agreement (CLA). Several Decrees that have been produced by the CLA Guidelines Team during 2023 to regulate several matters related to Industrial Relations are as follows:

1. Circular of the Board of Directors No. 0002.E/012/DIR/2023 dated January 5, 2023, concerning Health Maintenance for Employees of PT PLN (Persero).
2. Board of Directors Regulation No. 0008/P/019/DIR/2023 dated April 18, 2023, concerning Glasses Facilities.
3. Board of Directors Decree No. 0019.K/030/DIR/2023 dated May 25, 2023, on the Establishment of Talent Committee.
4. Board of Directors Regulation No. 0014/P/019/DIR/2023 dated July 13, 2023, concerning Operational Regulations for Loan Assistance for the Purchase or Maintenance of Employee Houses.
5. Board of Directors Decree No. 0036.K/030/DIR/2023 dated August 23, 2023, concerning Daily Official Clothing for Employees of PT PLN NP.
6. Board of Directors Regulation No. 0018/P/019/DIR/2023 dated September 5, 2023, concerning Operational Regulations for Educational Assistance for Paternal Orphans/Maternal Orphans/Orphans of Employees who Passed Away or Elderly.
7. Board of Directors Regulation No. 0021/P/019/DIR/2023 dated September 27, 2023, concerning Operational Regulations for Temporary Substitute Officers.
8. Circular of Board of Directors No. 0011.E/012/DIR/2023 dated September 29, 2023, concerning Guidelines for Project Official Travel.
9. Circular of Board of Directors No. 0023/P/019/DIR/2023 dated October 9, 2023, regarding Operational Regulations for Leave, Permits, and Conditions of Entry to Work for Employees.
10. Circular of Board of Directors No. 0016.E/012/DIR/2023 dated October 20, 2023, concerning Technical Guidelines for Person Grade Development in the Transition Period.

Rencana Program Kerja SDM Tahun 2024
HR Work Program Plan for 2024

Pada tahun 2024 terdapat isu strategis terkait pengelolaan Human Capital di mana peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM dan organisasi dalam mendukung kesiapan resources untuk menghadapi strategi peningkatan pendapatan beyond KWH. Adapun beberapa program Perusahaan terkait rencana program kerja SDM di tahun 2024 antara lain:

1. Optimasi organisasi dan pengelolaan sistem SDM yang selaras dengan strategi pengembangan bisnis;
2. Peningkatan kompetensi dan 3 (tiga) level pengembangan dari aspek strategis, technical skill dan supporting meliputi risk and mitigation, investment, business and negotiation untuk mendukung transformasi korporat;
3. Penguatan budaya perusahaan melalui:
   a. Program budaya yang menyasar CCP (Corporate Culture Purpose) Business Excellence, Business Development, Green & Business Innovation, Digital Mindset
   b. Peningkatan leadership & capability PLN NP Ranger melalui pengelolaan Ranger Network
   c. Program peningkatan engagement dan penurunan entropi budaya.
4. Program penempatan resource kebutuhan restrukturisasi organisasi Unit PLN NP;
5. Program penyiapan resource kebutuhan pelimpahan aset Pembangkit PLN wave 2.

In 2024, there are strategic issues related to Human Capital management where increasing the capacity and capability of HR and organizations in supporting the readiness of resources to face the strategy of increasing revenue beyond KWH. Several Company programs related to the HR work program plan in 2024 include:

1. Optimization of HR organization and management system in line with business development strategy;
2. Competency improvement of 3 (three) levels of development from strategic, technical skill, and supporting aspects, including risk and mitigation, investment, business, and negotiation to support corporate transformation;
3. Strengthening corporate culture through:
   a. Cultural programs that target CCP (Corporate Culture Purpose) Business Excellence, Business Development, Green & Business Innovation, Digital Mindset;
   b. Improving PLN NP Ranger leadership & capability through Ranger Network management;
   c. Program to increase engagement and reduce cultural entropy.
4. Resource placement program for the needs of organizational restructuring of PLN NP Unit;
5. Resource preparation program for the needs of the delegation of wave 2 PLN Power Plant assets.

Teknologi Informasi
Information Technology

Implementasi Teknologi Informasi (TI) dan digitalisasi menciptakan proses bisnis yang efisien, efektif dan berlaya saing tinggi. Sejalan dengan program *Holding Sub Holding* (HSH) PLN, pengelolaan TI PLN NP dilaksanakan untuk mendukung dan menyiapkan solusi transisi proses digitalisasi.

The implementation of Information Technology (IT) and digitalization creates efficient, effective, and highly competitive business processes. In line with the PLN Sub Holding (HSH) program, PLN NP's IT management is implemented to support and prepare transition solutions for the digitalization process.

Fungsi Pengelola Teknologi Informasi
Function of Information Technology Management

Pengelolaan Teknologi Informasi dilaksukan oleh Bidang Information Technology and Digital yang merupakan sub organisasi PLN NP sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direksi No. 0040/DIR/DIS/2022 tanggal 3 Desember 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Pembangkitan Jawa-Bali.

Information Technology Management is carried out by the Information Technology and Digital Division, which is a sub-organization of PLN NP as stated in the Decree of the Board of Directors No. 0040/DIR/DIS/2022 dated December 3, 2022, concerning the Organization and Work Procedures of PT Pembangkitan Jawa-Bali.

Bidang Information Technology and Digital dipimpin oleh seorang Vice President Information Technology and Digital yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Keuangan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Vice President Information Technology and Digital dapat dibantu Manajer dan staf yang formasi jabatannya sesuai kebutuhan dan ditetapkan oleh Peraturan Direksi. Bidang Information Technology and Digital membawahi 3 (tiga) fungsi yaitu Information Technology Planning, Information Technology Development dan Information Technology Operations.

The Information Technology and Digital Division is led by a Vice President of Information Technology and Digital who is directly responsible to the Director of Finance. In carrying out its main duties and functions, the Vice President of Information Technology and Digital can be assisted by Managers and staff whose position formations are as needed and determined by Board of Directors Regulations. The Information Technology and Digital Division oversees 3 (three) functions, namely Information Technology Planning, Information Technology Development, and Information Technology Operations.

Tata Kelola Teknologi Informasi
Information Technology Governance

Sebagai subholding dari PT PLN (Persero), pengelolaan TI PLN NP diselaraskan dengan Tata Kelola TI PT PLN (Persero) selaku Holding. Pada tahun 2033 Tata kelola TI PLN NP berlandaskan pada Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 0620/DIR/DIR/2017 tentang Pedoman dan Kebijakan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan best practice lainnya seperti COBIT (Control Objective for Information Technologies). Secara garis besar pelaksanaan Tata Kelola TI PLN NP dapat dilihat pada gambar berikut:

As a sub-holding of PT PLN (Persero), PLN NP's IT management is harmonized with PT PLN (Persero)'s IT Governance as a Holding. In 2033, PLN NP's IT governance was based on the Information Technology Strategic Plan (RSTI) regulated in the Decree of the Board of Directors No. 0620/DIR/DIR/2017 concerning Guidelines and General Policies for Information Technology Governance and other best practices such as COBIT (Control Objective for Information Technologies). The outline of PLN NP's IT Governance implementation can be seen in the following picture:

Tata Kelola TI PLN NP
IT Governance of PLN NP

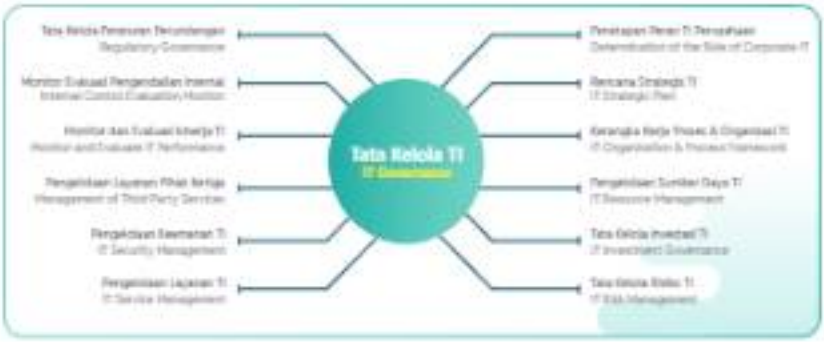

Arsitektur Teknologi Informasi
Information Technology Architecture

Arsitektur TI menggambarkan bangunan teknologi informasi, baik aplikasi maupun infrastruktur yang akan dibangun oleh PLN NP sebagai arah pengembangan aplikasi TI di lingkungan Perusahaan, sebagaimana dalam gambar berikut:

IT Architecture illustrates the building of information technology, both applications and infrastructure that will be built by PLN NP as the direction of IT application development within the Company, as in the following picture:

Arsitektur Teknologi Informasi
Information Technology Architecture

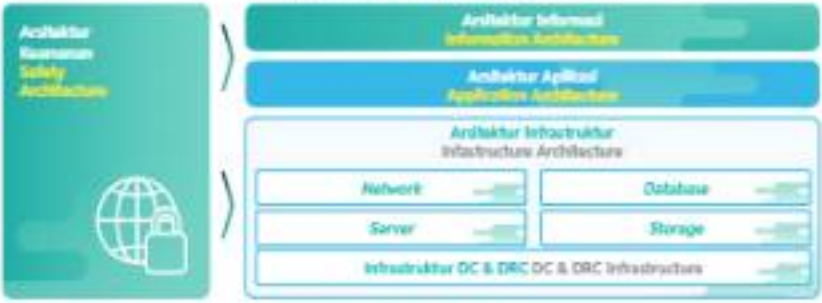

Prinsip Arsitektur Teknologi Informasi
Principles of Information Technology Architecture

Roadmap Teknologi Informasi
Information Technology Roadmap

Roadmap TI PLN NP disusun sesuai dengan Rencana Strategis Teknology Informasi (RSTI) Periode Tahun 2020-2024 hal ini agar pengembangan TI di PLN NP konsisten dan kontinyu secara berkelanjutan dari tahun ke tahun sebagaimana dalam gambar berikut.

The PLN NP IT Roadmap is prepared in accordance with the Information Technology Strategic Plan (RSTI) for 2020-2024 so that IT development in PLN NP is consistent and continuous from year to year, as shown in the following picture.

Disaster Recovery Plan (DRP)
Disaster Recovery Plan (DRP)

Disaster Recovery Plan (DRP) adalah perencanaan yang fokus pada pemulihan sistem dan layanan teknologi informasi yang digunakan secara korporat dalam rangka mendukung strategi *Business Continuity Plan* (BCP). PLNNP telah menyusun *Disaster Recovery Plan* (DRP) serta melakukan pengujian secara berkala setiap tahun untuk memastikan sistem DRP berjalan dengan baik dan sistem bisa dipulihkan sesuai target Recovery Time Objective (RTO) maupun Recovery Point Objective (RPO) yang ditetapkan.

Disaster Recovery Plan (DRP) focuses on the recovery of information technology systems and services used corporately to support the Business Continuity Plan (BCP) strategy. PLN NP has implemented a Disaster Recovery Plan (DRP) and conducts periodic testing every year to ensure the DRP system is running well and the system can be restored according to the expected Recovery Time Objective (RTO) and Recovery Point Objective (RPO) targets.

Penguatan *Cyber Security*
Strengthening Cyber Security

Berdasarkan arahan saat pengesahan RKAP 2021, program tata kelola teknologi informasi disusun dengan memastikan bahwa penggunaan dan pengembangan aplikasi sesuai dengan kebutuhan proses bisnis, aman (maksimum cyber security), memberikan nilai tambah secara berkesinambungan, serta mengoperasionalisasi dengan pembentukan *Cyber Security Incident Response Team* (CSIRT).

Based on the direction during the ratification of the 2021 ABCP, the information technology governance program was prepared by ensuring that the use and development of applications are in accordance with business process needs, safe (maximum cyber security), provide added value sustainably, and operationalize the establishment of the Cyber Security Incident Response Team (CSIRT).

Dengan adanya tren peningkatan serangan siber di lingkungan PLN NP, Bidang Teknologi Informasi melakukan pengujian pengamanan siber baik dari segi People, Process dan Technology. Penguatan Cyber Security yang dilakukan antara lain:

1. Sosialisasi keamanan siber;
2. Pengadaan perangkat Firewall server farm;
3. Pelaksanaan assessment kesiapan digital power plant;
4. Pelaksanaan assessment keamanan siber.

With the increasing trend of cyber-attacks within PLN NP, the Information Technology Division strengthened cyber security in terms of People, Processes, and Technology. Cyber Security strengthening includes:

1. Cyber security socialization;
2. Procurement of server farm firewall devices;
3. Implementation of digital power plant readiness assessment;
4. Implementation of cyber security assessment.

Selain itu, dalam rangka optimalisasi pengendalian pengamanan yang berprinsip pada confidentiality, integrity, authentication, non-repudiation dan availability atas penggunaan aplikasi di Perusahaan yang terdiri dari aplikasi yang mendukung proses bisnis dan aplikasi yang menambah nilai layanan dari proses bisnis Perusahaan, PLN NP menerbitkan Instruksi Direksi No. 0001/01/DIR/2022 perihal Optimalisasi Pelaksanaan Pengendalian Pengamanan Penggunaan Aplikasi pada Fasilitas Komputer PT Pembangkitan Jawa-Bali.

In addition, to optimize security controls based on the principles of confidentiality, integrity, authentication, non-repudiation, and availability over the use of applications in the Company consisting of applications that support business processes and applications that add service value to the Company's business processes, PLN NP issued Board of Directors Instruction No. 0001/01/DIR/2022 regarding Optimizing the Implementation of Security Control of Application Use at PT Pembangkitan Jawa-Bali's Computer Facilities.

Risiko Utama dan *Disruption* Teknologi Informasi
Major Risks and Information Technology Disruption

Dalam pelaksanaan operasional proses bisnis tentunya terdapat beberapa potensi risiko yang akan muncul terkait Teknologi Informasi. Oleh karena itu bidang Teknologi Informasi PLN telah memetakan risiko internal bersama dengan mitigasi nya di tahun 2021 antara lain:

In the implementation of operational business processes, several potential risks related to Information Technology will arise. Therefore, the PLN Information Technology Division has mapped internal risks along with their mitigation in 2021, among others:

No	Risiko Risk	Mitigasi Mitigation
1	Potensi serangan siber dari internal maupun eksternal perusahaan Potential cyber-attacks from the Company internal and external	Program anggaran investasi terkait Firewall Server Farm Investment budget program on Firewall Server Farm
2	Potensi arsitektur aplikasi tidak selaras dengan arsitektur bisnis Potential application architecture is not aligned with business architecture	Program terkait pelaksanaan housekeeping server fisik maupun virtual pada tahun 2023 Program related to the physical and virtual server housekeeping implementation in 2023
3	Potensi kehilangan data korporat Potential corporate data loss	Program pengelolaan storage pada tahun 2023 Storage management program in 2023
4	Potensi pelanggaran pemanfaatan hak kekayaan intelektual Potential violation of intellectual property rights utilization	Program anggaran investasi terkait lisensi Oracle Investment budget program regarding Oracle licenses
5	Operasional layanan TI korporat terganggu (down) Corporate IT service operations are disrupted (down)	Program pengelolaan PC, data center, dan internet pada tahun 2023 PC, data center, and internet management program in 2023

Realisasi Program Strategis Teknologi Informasi Tahun 2023

Realization of Information Technology Strategic Program in 2023

PLN NP telah melakukan beberapa program strategis TI selama tahun 2023, diantaranya adalah:

1. Pengembangan aplikasi *Ifian* 2023 berupa pengembangan tambahan modul aplikasi Pengelolaan Anggaran (Ifian) meliputi:
   a. Modul penerimaan anggaran penyusunan BRS,
   b. Modul pengendalian anggaran penyusunan BRS dan pengembangan aplikasi.
2. Kesiapan Infrastruktur Security Unit Holding Subholding (HSH) dengan melakukan sosialisasi awareness dan peningkatan kesiapan IT Security ke seluruh unit HSH.
3. Digitalisasi penagihan dan pembayaran dengan melakukan pembahasan proses bisnis Tanda Tangan Elektronik (TTE) di Office Automation dan Verifikasi Online untuk approval dokumen pembayaran (paperless).
4. *Dashboard Monitoring Project* dengan melakukan pengembangan dashboard untuk monitoring project-project strategis yang dilaksanakan PLN NP.

PLN NP has conducted several IT strategic programs during 2023, including:

1. Development of the *Ifian* 2023 application in the form of continued development of the Budget Management (Ifian) application module, including:
   a. BRS preparation budget planning module,
   b. BRS budget control module and application development.
2. Sub-holding Holding Unit (HSH) Security infrastructure readiness by socializing awareness and improving IT Security readiness to all HSH units.
3. Digitalization of billing and payment by discussing Electronic Signature (TTE) business processes in Office Automation and Online Verification for approval of payment documents (paperless).
4. Dashboard Monitoring Project by developing dashboards for monitoring strategic projects implemented by PLN NP.

Realisasi Program Pengembangan Teknologi Informasi Tahun 2023

Realization of Information Technology Development Program in 2023

Selain melaksanakan program-program strategis TI, bidang teknologi informasi PLN NP juga melakukan beberapa pengembangan solusi TI lainnya sebagai bentuk kesiapan kapabilitas TI sebagai berikut:

1. Manajemen Aset Perspektif Finansial dengan melakukan assessment kesiapan proses bisnis, data, teknologi untuk implementasi Analisa Life Cycle Cost Management (LCCM) dan penyusunan Business Requirement Specification (BRS) Aplikasi LCCM.

In addition to implementing IT strategic programs, PLN NP's information technology division also conducted several other IT solution developments as a form of IT capability readiness as follows:

1. Financial Perspective Asset Management by assessing the readiness of business processes, data, and technology for the Life Cycle Cost Management (LCCM) Analysis implementation and LCCM Application Business Requirement Specification (BRS) preparation.

2. *Roll Out* EAM Wilayah Kalimantan dan Sulawesi dengan melakukan support roll out EAM Maximo Ex PLN di UPDK Balikpapan, UPDK Palangkaraya, UPDK Tarakan, UPDK Kapuas, UPDK Bakaru dan UPDK Kendari.
3. Upgrade3pars dengan melakukan upgrade aplikasi manajemen sistem terintegrasi IMS.
4. Pengembangan aplikasi *Fire Risk Assessment* (FRIST) 2023 dengan melakukan pengembangan aplikasi *Fire Risk Assessment* (FRS) untuk menunjang pemetaan kesiapan prasarana proteksi kebakaran di unit pembangkit.

2. Roll Out EAM Kalimantan and Sulawesi Region by supporting roll out EAM Maximo Ex PLN in Balikpapan UPDK, Palangkaraya UPDK, Tarakan UPDK, Kapuas UPDK, Bakaru UPDK, and Kendari UPDK.
3. 3pars upgrade by upgrading the IMS integrated system management application.
4. Development of the Fire Risk Assessment (FRIST) 2023 application by developing the Fire Risk Assessment (FRS) application to support the mapping of fire protection infrastructure readiness in the power plant unit.

Audit Teknologi Informasi
Information Technology Audit

Evaluasi implementasi tata kelola TI semantiasa dilakukan PLN NP dalam rangka pengembangan dan perbaikan TI secara berkesinambungan. Di tahun 2023 dilakukan audit TI sebagai berikut:

PLN NP continually conducts evaluations of IT governance implementation to develop and improve IT sustainably. In 2023, the following IT audits were conducted:

Tabel Audit TI Tahun 2023
Table of IT Audit in 2023

No.	Judul Audit Audit Title	Jumlah Temuan Total Findings	Jumlah OFI/ Rekom Total OFI/ Recommendation	Status
1.	Audit SPI PT PLN (Persero) UKI Audit of PT PLN (Persero)	2	9	Closed
2.	Audit Sistem Manajemen berbasis ISO/ IEC 27001:2013 dan ISO/ IEC 20000-1:2018 Management System Audit based on ISO / IEC 27001: 2013 and ISO / IEC 20000-1: 2018	0	0	Closed
3.	Audit IT General Control oleh PwC IT General Control Audit by PwC	0	0	Closed

Tindak lanjut dari temuan dan rekomendasi telah dilaksanakan seluruhnya.

Follow-up of findings and recommendations have been fully implemented.

Assessment Eksternal Teknologi Informasi
Assessment of External Information Technology

Untuk meningkatkan kualitas layanan Teknologi Informasi, PLN NP juga melaksanakan assessment yang dilakukan oleh tim independen, yaitu Penilaian IT Maturity. Capaian IT Maturity pada tahun 2023 yaitu sebesar 3,70.

To improve the quality of Information Technology services, PLN NP also carried out assessment conducted by an independent team, namely IT Maturity Assessment. The IT Maturity achievement in 2023 is 3.70.

Rencana Program Kerja Teknologi Informasi Tahun 2024
Information Technology Work Program Plan for 2024

Rencana Program Kerja TI PLN NP di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Digitalisasi Pembayaran: Pengembangan aplikasi untuk pembuatan Berita Acara (Berita Acara Penerimaan Barang & Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan).

PLN NP's IT Work Program Plan in 2024 is as follows:

1. Digitization of Payment: Application development for issuance of Minutes (Minutes of Receipt of Goods & Minutes of Completion of Work).

2. Digitalisasi Pembayaran: Penerapan *Host to Host*,
3. Digitalisasi Pembayaran: *Health Meter* untuk *reimbursement* layanan kesehatan karyawan,
4. Pengembangan Smart SCM,
5. Pengembangan *Dashboard* KJPP,
6. Pengembangan *Dashboard* ESG,
7. Integrasi Aplikasi VMS dengan CSMS,
8. Pengembangan Digitalisasi Perencanaan Anggaran (I-Plan Modul 2) sesuai dengan perubahan proses bisnis HSH di perusahaan,
9. Pengembangan Aplikasi *Employee Well Being & Welcoming*,
10. Pengadaan server DRC untuk mendukung implementasi Digitalisasi Monitoring dan Evaluasi untuk semua Pembangkit PLN NP,
11. Implementasi *Network* dan *Security Device Unit* HSH untuk mendukung Pengembangan infrastruktur cyber security.

1. Payment Digitization: Host to Host Implementation,
2. Payment Digitization: Health Meter for employee health bill reimbursement,
3. Smart SCM Development,
4. KJPP Dashboard Development,
5. ESG Dashboard Development,
6. Integration of VMS Application with CSMS,
7. Development of Digitalization of Budget Planning (I-Plan Module 2) in accordance with changes in HSH business processes in the Company,
8. Development of Employee Well Being & Welcoming Applications,
9. Procurement of DRC servers to support the Digitalization of Monitoring and Evaluation implementation for all PLN NP Power Plants,
10. Implementation of Network and Security Device of HSH Unit to support the cyber security infrastructure development.

PLN Nusantara *Power Integrated Management System* (PLN NP-IMS)

PLN Nusantara Power Integrated Management System (PLN NP-IMS)

PLN NP-IMS berbasis *Enterprise Architecture* merupakan peta cetak biru organisasi yang berisi proses bisnis, data, aplikasi dan infrastruktur IT, yang dirancang secara terpadu selaras dengan risiko dan kinerja perusahaan guna mendukung berjalannya kegiatan organisasi yang lebih efektif dan efisien

Enterprise Architecture based PLN NP-IMS is an organizational blueprint map that contains business processes, data, applications, and IT infrastructure, which are designed in an integrated manner aligned with company risks and performance to support the operation of more effective and efficient organizational activities.

Penerapan PLN NP Integrated Management System berbasis *Enterprise Architecture* di lingkungan Perusahaan mempunyai andil dalam memaksimalkan efektivitas dan efisiensi roda operasional Perusahaan. Secara keseluruhan, implementasi PLN NP-IMS menghasilkan efisiensi bagi Perusahaan melalui penghematan waktu, biaya, dan minimalisasi gangguan kegiatan bisnis.

Implementasi PLN NP-IMS mempadukan proses bisnis dan dokumentasi pendukung sistem manajemen menjadi lebih ringkas, mengeliminasi duplikasi serta memudahkan pemeliharaan atas berbagai sistem manajemen yang diintegrasikan diantaranya ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 14064, ISO 50001, ISO 55001, ISO 17025, ISO 20000-1, ISO 27001, ISO 22301, ISO 37001, ISO 37301, ISO 37001, ISO 26000, SMK3, SMK2, dan SMP.

The PLN NP Integrated Management System implementation based on Enterprise Architecture within the Company has contributed to maximizing the effectiveness and efficiency of the Company's operations. Overall, the PLN NP-IMS implementation brings efficiency to the Company through savings in time, costs, and minimization of business activity disruptions.

The PLN NP-IMS implementation makes business processes and supporting documentation of the management system more concise, eliminates duplication, and facilitates maintenance of various integrated management systems including ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 14064, ISO 50001, ISO 55001, ISO 17025, ISO 20000-1, ISO 27001, ISO 22301, ISO 37001, ISO 37301, ISO 37001, ISO 26000, SMK3, SMK2, and SMP.

Pengelola PLN NP-IMS
PLN NP-IMS Management

PLN NP-IMS dikelola oleh Satuan Technology Development and Asset Management khususnya Bidang Asset Management System Implementation. Hal ini berdasarkan Peraturan Direksi PT PLN Nusantara Power No. 0006/1019/DIR/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi PT Pembangkitan Jawa-Bali No. 0048/1019/DIR/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Susunan Organisasi dan Formasi Tenaga Kerja pada Satuan Technology Development and Asset Management PT Pembangkitan Jawa-Bali. Pengelola PLN NP-IMS yakni Bidang Asset Management System Implementation membawahi 3 Sigal sub bidang yaitu sub bidang Asset Management, sub bidang Digital Power Plant, dan sub bidang Integrated Management System and Business Process.

PLN NP-IMS is managed by the Technology Development and Asset Management Unit, especially the Asset Management System Implementation Division. It is based on the Regulation of the Board of Directors of PT PLN Nusantara Power No. 0006/1019/DIR/2023 concerning Amendments to the Regulation of the Board of Directors of PT Pembangkitan Jawa-Bali No. 0048/1019/DIR/2022 concerning Regulations on the Implementation of the Organizational Structure and Manpower Formation in the Technology Development and Asset Management Unit of PT Pembangkitan Jawa-Bali. The PLN NP-IMS manager, namely the Asset Management System Implementation Division, oversees 3 Sigal sub-divisions, namely the Asset Management sub-division, the Digital Power Plant sub-division, and the Integrated Management System and Business Process sub-division.

Tata Kelola dan Lingkup PLN NP-IMS
Governance and Scope of PLN NP-IMS

PLN NP-IMS merupakan penyempurnaan dari berbagai proses sistem integrasi termasuk interaksi diantara proses-proses yang dijambarkan dalam bagan Proses Bisnis atau Sistem Kerja. Penerapan PLN NP-IMS ini sesuai dengan Peraturan Direksi No. 001/1019/DIR/2019 tentang Implementasi PLN NP-IMS di PT Pembangkitan Jawa-Bali dan sesuai dengan Edaran Direksi PT PLN (Persero) No. 0004.E/DIR/2023 tentang Standar Prosedur Manajemen Proses Bisnis PT PLN (Persero). Dalam proses penyusunan PLN NP-IMS, PLN NP merujuk pada konsep Plan Do Check Action (PDCA) ISO 9001:2015 sebagai kerangka Integrated Process.

PLN NP-IMS is a refinement of various integration system processes, including interrelation between processes described in the Business Process or Work System chart. The PLN NP-IMS implementation is in accordance with the Board of Directors Regulation No. 001/1019/DIR/2019 concerning the Implementation of PLN NP-IMS at PT Pembangkitan Jawa-Bali and in accordance with the Circular of the Board of Directors of PT PLN (Persero) No. 0004.E/DIR/2023 concerning Standard Procedures for Business Process Management of PT PLN (Persero). In the process of preparing PLN NP-IMS, PLN NP refers to the concept of Plan Do Check Action (PDCA) ISO 9001:2015 as an Integrated Process Framework.

Skema Proses *Plan Do Check Action* (PDCA)
Plan Do Check Action (PDCA) Scheme

Dalam skema di atas dikerjakan dan dikendalikan melalui delapan langkah-langkah proses integrasi sebagai berikut:

a. Pemetaan bisnis proses dan interaksi prosesnya.
b. Identifikasi diagram konteks dan kesesuaian dengan tugas-tugas organisasi dan masing-masing unit.
c. Alignment standard yang digunakan dengan menghilangkan duplikasi prosedur dan format, uji dan review proses-proses.
d. Pengembangan kebijakan, objective, target dan action plan sistem integrasi.
e. Menetapkan manual integrasi dan pengembangan generic procedure yang berlaku dalam sistem integrasi.
f. Melaksanakan pelatihan pemahaman dan sosialisasi sebelum penerapan PLN NP-IMS.
g. Melaksanakan pemantauan dan peningkatan berkelanjutan terhadap Sistem Manajemen Terintegrasi.
h. Pengamatan conformance proses sistem manajemen terintegrasi terkait pemenuhan persyaratan standar-standar manajemen, melalui suatu badan sertifikasi.

Based on the scheme above, it is generated and controlled through eight steps of integration process as follows:

a. Business Processes and Interaction Mapping Process.
b. Identification of Context Diagrams and suitability with the main tasks and functions for the organization and each Unit.
c. Applied alignment standard through eliminating duplication of Procedure and Format, Test, and Review of the processes.
d. Policy Development, Objective, Target, and Action Plan Integrated System.
e. Establishment of Integrated Manual and Generic Procedure development applied in integrated systems.
f. Implementation of knowledge and socialization training prior to PLN NP-IMS application.
g. Continuous monitoring and improvement towards Integrated Management System.
h. Conformance process Guarantee for the Integrated System process related to the fulfillment of management standard requirements through Certification department.

Adapun sistem manajemen yang diadopsi Perusahaan dalam PLN NP-IMS meliputi beberapa sistem manajemen sebagai berikut:

The Company adopts management system in the PLN NP-IMS, including several management systems as follows:

Tabel Sistem Manajemen yang Diadopsi dalam PLN-IMS
Table of Management System Adopted in PLN-IMS

No.	Sistem Manajemen Management System	Deskripsi Implementasi Implementation Description
1.	Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Quality Management System ISO 9001:2015	Seluruh persyaratan klausul diterapkan kecuali Klausul 7.3 Design and Development, diakenakan kegiatan ini tidak dilakukan oleh PLN NP All requirement clauses are applied, unless the 7.3 Clause in Design and Development since this activity is not implemented by PLN NP
2.	Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015 Environmental Management System ISO 14001:2015	Seluruh persyaratan klausul diterapkan All requirement clauses are applied
3.	Sistem Manajemen K3 ISO 45001:2018 OHS Management System ISO 45001:2018	Seluruh persyaratan klausul diterapkan All requirement clauses are applied
4.	Sistem Manajemen Gas Rumah Kaca ISO 14064:2018 Greenhouse Gas Management System ISO 14064:2018	Seluruh persyaratan klausul diterapkan sebagai guidance for reporting All requirement clauses are applied as guidance for reporting
5.	Sistem Manajemen Energi ISO 50001:2018 Energy Management System ISO 50001:2018	Seluruh persyaratan klausul diterapkan All requirement clauses are applied
6.	Sistem Manajemen Aset ISO 55001:2014 Assets Management System ISO 55001:2014	Seluruh persyaratan klausul diterapkan All requirement clauses are applied
7.	(KAN) Akreditasi Pengujian Lab ISO 17025:2017 (KAN) Laboratory Testing Accreditation ISO 17025:2017	Seluruh persyaratan klausul diterapkan All requirement clauses are applied
8.	Sistem Manajemen ISO 37001:2016 Management System ISO 37001:2016	Seluruh persyaratan klausul diterapkan All requirement clauses are applied
9.	Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO 27001:2013 Cyber Security Management System ISO 27001:2013	Seluruh persyaratan klausul diterapkan All requirement clauses are applied
10.	Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha/Bisnis ISO 22301:2012 Business Continuity Management System ISO 22301:2012	Seluruh persyaratan klausul diterapkan All requirement clauses are applied
11.	Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System ISO 37001:2016	Seluruh persyaratan klausul diterapkan All requirement clauses are applied
12.	Sistem Manajemen Kepatuhan ISO 37301:2021 Compliance Management System ISO 37301:2021	Seluruh persyaratan klausul diterapkan All requirement clauses are applied
13.	Sistem Manajemen Risiko ISO 31000:2018 Risk Management System ISO 31000:2018	Seluruh persyaratan klausul diterapkan sebagai guidance All requirement clauses are applied as guidance
14.	Sistem Manajemen Tanggung Jawab Sosial ISO 26000:2010 Social Responsibility Management System ISO 26000:2010	Seluruh persyaratan klausul diterapkan sebagai guidance All requirement clauses are applied as guidance
15.	Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Occupational Health and Safety Management System	Seluruh persyaratan klausul diterapkan All requirement clauses are applied
16.	Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan Electricity Safety Management System	Seluruh persyaratan klausul diterapkan sebagai guidance All requirement clauses are applied as guidance
17.	Sistem Manajemen Pengamanan Security Management System	Seluruh persyaratan klausul diterapkan All requirement clauses are applied

Sistem Manajemen Terintegrasi PLN NP
Integrated Management System of PLN NP

9 ISO Tersertifikasi Integrasi
9 ISO Certified Integration

ISO 9001	Sistem Manajemen Mutu Quality Management System
ISO 14001	Sistem Manajemen Lingkungan Environmental Management System
ISO 50001	Sistem Manajemen Energi Energy Management System
ISO 45001	Sistem Manajemen K3 OHS Management System
ISO 55001	Sistem Manajemen Aset Asset Management System
ISO 20000-1	Sistem Manajemen Layanan IT Lingkup layanan email IT Service Management System (Scope of email services)
ISO 27001	Sistem Manajemen Keamanan Informasi Information Security Management System
ISO 22301	Sistem Manajemen Kelangsungan Bisnis Business Continuity Management System
ISO 37001	Sistem Manajemen Anti Penyuapan Anti Bribery Management System
ISO 21001	Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan Educational Organization Management System

1 ISO Tersertifikasi *Partial Unit*
1 ISO Certified Partial Unit

ISO 17025	Akreditasi Lab Pengujian dan Kalibrasi Accreditation of Testing and Calibration Laboratory

3 ISO Terimplementasi belum Tersertifikasi
3 ISO Implemented not yet Certified

ISO 37301	Sistem Manajemen Kepatuhan Compliance Management System
ISO 14064	Validasi dan verifikasi Gas Rumah Kaca Greenhouse gas validation and verification
ISO 30414	Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Human Resources Management System

3 Standar Nasional Tersertifikasi
3 Certified National Standards

SMK3	Sistem Manajemen K3 OHS Management System
SMP	Sistem Manajemen Pengamanan Security Management System
SMKK	Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan Electricity Safety Management System

Standar *Guide* Diimplementasikan
Implemented Guide Standards

ISO 26001	Sistem Manajemen Etika Etic Management System
ISO 26000	Sistem Manajemen Tanggung Jawab Sosial Social Responsibility Management System

Perusahaan menjamin bahwa kebijakan, program, sasaran dan proses-proses selalu mutakhir (up-to-date) sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam rangka pemenuhan masing-masing standar sistem manajemen yang diimplementasikan. Selain itu, penyesuaian standar sistem manajemen dibelajari, diimplementasikan dan dipelihara sesuai standar terbaru.

The Company guarantees that the policies, program, target and processes are always up-to-date following the Company needs in order to fulfill each of the applied management system standards. Moreover, PLN NP also establishes, implements, and maintains the management system standard requirements according to the latest standards.

Realisasi Program Kerja PLN NP-IMS Tahun 2023

Realization of PLN NP-IMS' Work Program Plan in 2023

PLN NP telah melakukan beberapa program kerja dalam rangka menjaga kualitas PLN NP-IMS selama tahun 2023, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pemutakhiran Proses Bisnis PLN Nusantara Power pasca holding sub-holding.
2. Upgrade Teknologi Aplikasi SPMXX dari versi 14 ke versi 16 untuk pengelolaan Proses Bisnis.
3. Pembaharuan Kebijakan Sistem Manajemen Terintegrasi PLN NP-IMS.
4. Pengelolaan Sistem Manajemen Terintegrasi (SMT) PLN NP.
5. Penyelesaian Proses Bisnis Digitalisasi Pembayaran.
6. Pelaksanaan Re-sertifikasi ISO.

PLN NP have carried out several work program in order to maintain the quality of PLN NP-IMS during 2023, including:

1. Updating PLN Nusantara Power Business Process after sub-holding.
2. Upgrading SPMXX Application Technology from version 14 to version 16 for Business Process management.
3. Updating the PLN NP-IMS Integrated Management System Policy.
4. Management of the PLN NP Integrated Management System (SMT).
5. Completion of Payment Digitalization Business Process.
6. ISO Re-certification Implementation.

Rencana Program Kerja PLN NP-IMS Tahun 2024

PLN NP-IMS' Work Program Plan for 2024

Rencana Program Kerja PLN NP-IMS di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pembaharuan Artefact Integrated Management System (IMS) Enterprise Architecture (EA).
2. Updating Proses Bisnis.
3. Pengembangan Tata Kelola Asset Management yang didukung Proses Bisnis terintegrasi.
4. Sinkronisasi IMS PLN NP & PLN Holding.
5. Pelaksanaan Re-sertifikasi ISO dan Surveillance Audit ISO.
6. Penguatan Teknologi/Aplikasi Pengelolaan IMS & SMT.
7. Peningkatan Engagement Implementasi IMS.
8. Utilisasi, Monitoring Evaluasi & Kompetensi.

PLN NP-IMS Work Program Plan for 2024 is as follows:

1. Updating the Enterprise Architecture (EA) Integrated Management System (IMS) Artefact.
2. Updating Business Process.
3. Development of Asset Management Governance supported by Integrated Business Processes.
4. IMS Synchronization of PLN NP & PLN Holding.
5. Implementation of ISO Re-certification and ISO Surveillance Audit.
6. Strengthening Technology/Application of IMS & SMT Management.
7. Increased Engagement in IMS Implementation.
8. Utilisation, Monitoring, Evaluation & Competence.

Manajemen Aset
Assets Management

Sejalan dengan peran PLN NP dalam mendukung SOLID PLN penerapan manajemen aset Perusahaan mencakup proses pengembangan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengalihan aset secara efisien berlandaskan *Management Aset Performance Excellent* ISO 55001 melalui *Digital Power Plant* (DCORE). Untuk mengoptimalkan kemampuan industri melalui manajemen aset yang berkelanjutan dengan pendekatan berbasis risiko.

In line with PLN NP's role in supporting PLN SOLID, the implementation of the Company's asset management includes the process of developing, operating, maintaining, and transferring assets efficiently based on ISO 55001 Excellent Performance Asset Management Through Digital Power Plant (DCORE). It is to optimize industrial capability through sustainable asset management with a risk based approach.

Pengelola Manajemen Aset
Asset Management Executive

Satuan *Technology Development and Asset Management* merupakan unit organisasi di Perusahaan yang bertanggung jawab mengelola manajemen aset PLN NP khususnya Bidang Asset Management. System Implementation sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi PT PLN Nusantara Power No. 0006/P/019/DIR/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi PT Pembangkitan Jawa-Bali No. 0048/P/019/DIR/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Susunan Organisasi dan Formasi Tenaga Kerja pada Satuan *Technology Development and Asset Management* PT Pembangkitan Jawa-Bali.

The Technology Development and Asset Management Unit is an organizational unit in the Company that is responsible for managing PLN NP's asset management, especially the Asset Management. System Implementation Division as stipulated in the Board of Directors Regulation of PT PLN Nusantara Power No. 0006/P/019/DIR/2023 concerning Amendments to the Board of Directors Regulation of PT Pembangkitan Jawa-Bali No. 0048/P/019/DIR/2022 concerning Implementation Regulations for the Organizational Structure and Manpower Formation in the Technology Development and Asset Management Unit of PT Pembangkitan Jawa-Bali.

Pengelolaan Manajemen Aset berada di bawah wewenang Bidang *Asset Management System Implementation* dan membawahi 3 (tiga) sub bidang yaitu Bidang Asset Management, Bidang *Digital Power Plant*, dan Bidang *Integrated Management System and Business Process*.

Asset Management is under the authority of the Asset Management System Implementation Division and oversees 3 (three) sub-divisions, namely the Asset Management Division, the Digital Power Plant Division, and the Integrated Management System and Business Process Division.

Kerangka Kerja Manajemen Aset
Asset Management Framework

Pelaksanaan konsep manajemen aset di Perusahaan mengacu pada *standard best practice* ISO 55001:2014 yang disesuaikan dengan Aset yang dikelola oleh PLN NP, yaitu Aset pembangkit listrik. Pedoman implementasi manajemen aset pembangkitan di PLN NP mengacu pada Peraturan Direksi PT Pembangkitan Jawa Bali No. 0024/P/019/DIR/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Implementasi Manajemen Aset Pembangkitan PT PLN. Penerapan manajemen aset pembangkitan akan menjadi kekuatan utama dalam pengelolaan aset yang berkinerja tinggi. Sinergi dengan

The implementation of the asset management concept in the Company refers to the ISO 55001:2014 best practice standard adjusted to the Assets managed by PLN NP, namely power plant Assets. Guidelines for the implementation of Electric Power Plant asset management in PLN NP refer to the Regulation of the Board of Directors of PT Pembangkitan Jawa Bali No. 0024/P/019/DIR/2022 concerning Regulations for the Implementation of PT PLN's Electric Power Plant Asset Management. The implementation of electric power generator asset management will be a major strength in

asset owner dan asset manager akan terus ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas aset yang akan menghasilkan kinerja yang maksimal dengan nilai biaya pokok produksi yang optimal. Proses pengelolaan manajemen aset tersebut dituangkan dalam Framework Manajemen Aset Pembangkitan pada Peraturan Direksi tersebut diatas, sebagaimana ditunjukkan melalui bagan berikut:

managing high-performing assets. Synergy with asset owners and managers will continue to be improved to enhance the quality of assets that will produce maximum performance with optimal cost of production. The asset management process is outlined in the Electric Power Generator Asset Management Framework in the above-mentioned Board of Directors Regulation, as shown in the following chart:

Kerangka Kerja Manajemen Aset Pembangkitan di PLN NP
Electric Power Generator Asset Management Framework in PLN NP

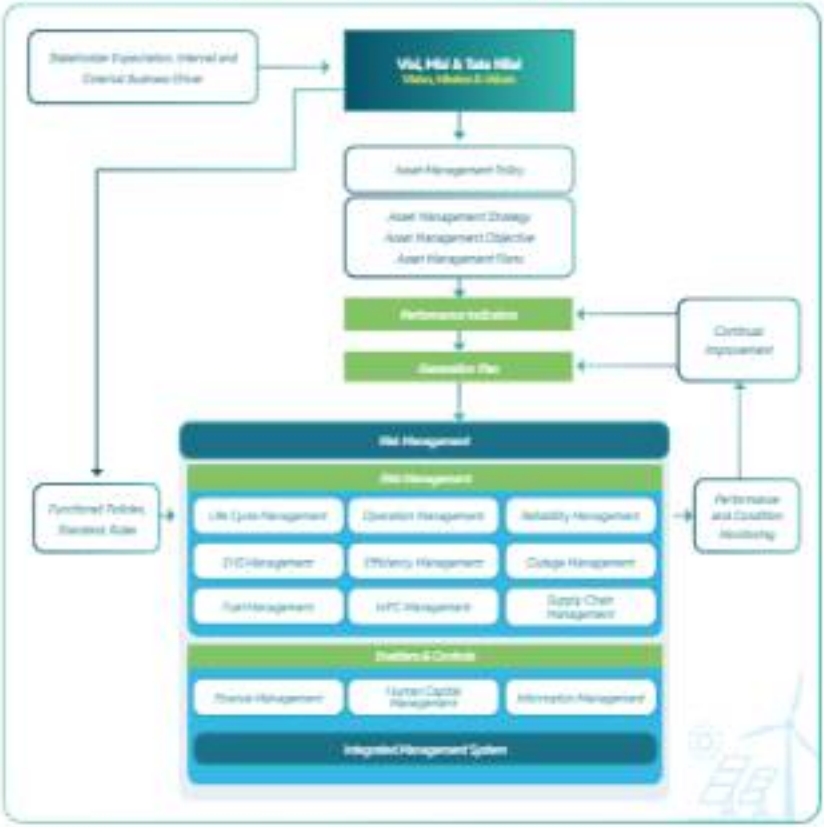

Adapun isu strategis di tahun 2020 terkait manajemen aset pembangkitan antara lain:

1. Penyediaan tenaga listrik dengan prinsip ketahanan (security),
2. Penyediaan tenaga listrik dengan prinsip ketahanan (affordability),
3. Penyediaan tenaga listrik dengan prinsip ketahanan (low emission).

The strategic issues in 2020 related to electric power generator asset management, include:

1. Provision of electricity with the principle of resilience (security),
2. Provision of electricity with the principle of resilience (affordability),
3. Provision of electricity with the principle of resilience (low emission).

Strategi Manajemen Aset

Asset Management Strategy

PLN NP menerapkan penerapan strategi manajemen aset sebagai kebijakan Perusahaan dalam pengelolaan aset, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen serta menyediakan dan memperlahankan aset sehingga mencapai hasil layanan yang excellence. Strategi manajemen aset membantu elemen-elemen Perusahaan dalam membuat keputusan atas aset guna mencapai hasil yang diinginkan secara efektif dan efisien dianaranya:

1. Pemanfaatan seoptimal mungkin aset yang ada,
2. Pemanfaatan nilai uang saat dilakukan investasi aset baru,
3. Pembuatan keputusan untuk bermodelan, mempertahankan, atau divestasi aset dengan memperhatikan serta melindungi kebutuhan generasi sekarang dan masa depan.

PLN NP implements the asset management strategy as the Company's policy in asset management, which aims to meet consumer needs as well as provide and maintain assets so as to achieve service excellence. The asset management strategy assists the Company's elements in making decisions on assets to achieve the desired results effectively and efficiently, including:

1. Utilization of the existing assets as optimal as possible;
2. Utilization of value for money when new asset investments are made;
3. Making decisions to invest, retain or divest assets by taking into account and protecting the needs of current and future Electric Power Plants.

Area yang menjadi sasaran strategis implementasi Manajemen Aset di PLNNP adalah sebagai berikut:

1. *Plant Availability & Reliability*
2. Peningkatan efisiensi thermal
3. Kepemimpinan yang sustainable
4. *Sustainable Human & Knowledge Asset Performance*
5. *Risk Management* dalam pengelolaan aset.

Strategic targets for the implementation of Asset Management in PLN NP are the following areas:

1. Plant Availability & Reliability;
2. Improved thermal efficiency;
3. Sustainable leadership;
4. Sustainable Human & Knowledge Asset Performance;
5. Risk Management in asset management.

Pengelolaan aset dilakukan untuk mencapai kinerja excellent pada area strategis di atas dengan menerapkan Strategi Manajemen Aset sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan kesiapan dan keandalan pembangkit;
2. Mengoptimalkan efisiensi pembangkit;
3. Menyelaraskan *Supply Chain Management* dengan seluruh kegiatan pembiayaan dan kinerja pembangkit berdasarkan prinsip *life cycle cost*;
4. Mengoptimalkan komunikasi internal dan eksternal;
5. Mengembangkan kapasitas organisasi dalam mencapai dan mempertahankan pencapaian kinerja;
6. Mengoptimalkan Knowledge Management;
7. Pengelolaan aset pembangkit dengan mengedepankan faktor HSE (Health, Safety and Environment).

Asset management is intended to achieve excellent performance above strategic areas by implementing the following Asset Management Strategies:

1. Optimizing power plant readiness and reliability;
2. Optimizing power plant efficiency;
3. Aligning Supply Chain Management with all financing activities and power plant performance based on life cycle cost principles;
4. Optimizing internal and external communication;
5. Developing organizational capacity in achieving and sustaining performance achievements;
6. Optimizing Knowledge Management;
7. Managing power plant assets by prioritizing the HSE (Health, Safety and Environment) factor.

Proses Manajemen Aset
Asset Management Process

Proses Manajemen Aset di PLN NP ditunjukan dalam gambar sebagai berikut:

The Asset Management process at PLN NP is as the following picture:

Diagram Proses Manajemen Aset PLN NP
Diagram of Asset Management Process of PLN NP

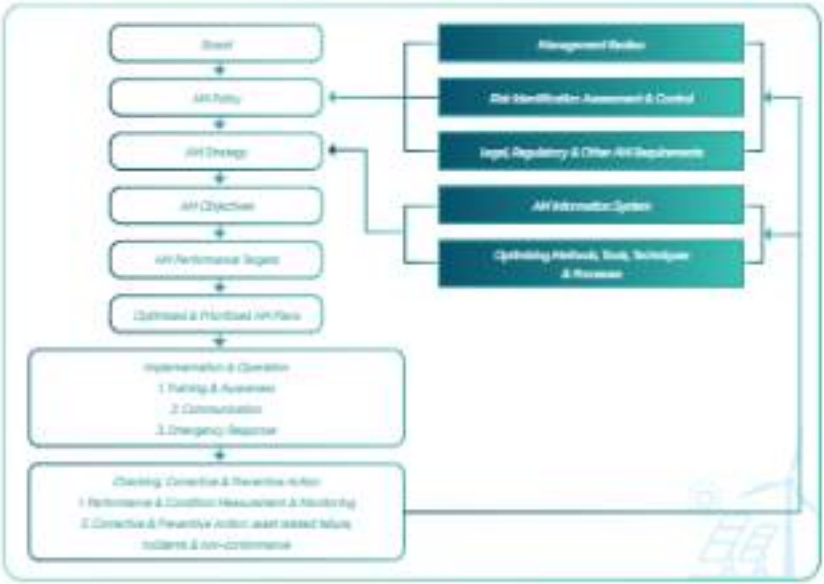

Eksekusi Manajemen Aset
Asset Management Execution

Manajemen aset Perusahaan menerapkan prinsip life cycle dan tandah manajemen risiko yang didukung oleh berbagai sumber daya dan prosedur pengelolaan aset yang dilakukan oleh seluruh unit. Pengelolaan tersebut dirangkaian dengan melakukan cascading sebagaimana ditunjukkan dalam gambar sebagai berikut:

The Company's asset management implements life-cycle principles and risk management principles supported by various resources and asset management procedures conducted by all units. The management is realized by cascading as shown in the following picture:

Cascading Manajemen Aset
Asset Management Cascading

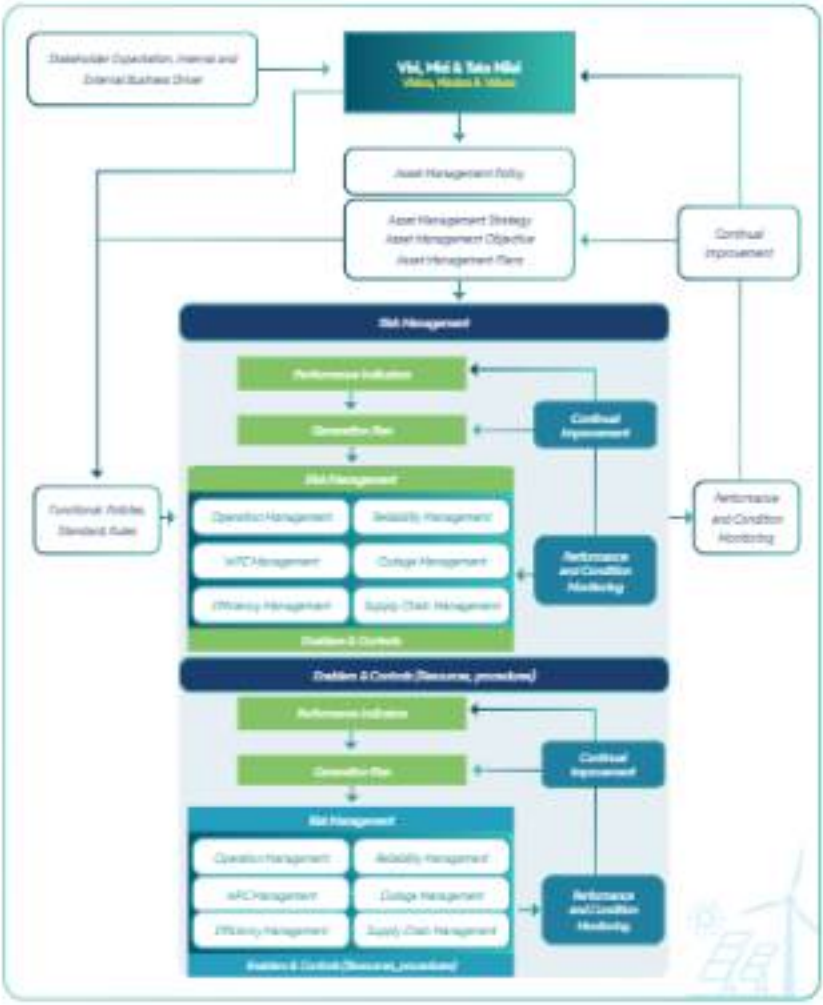

Realisasi Program Kerja Manajemen Aset Tahun 2023

Realization of Asset Management Work Program in 2023

PLN NP telah melakukan beberapa program kerja dalam rangka menjaga kualitas Manajemen Aset selama tahun 2023, diantaranya adalah:

1. Pengelolaan Asset Management dan Tata Kelola Pembangkitan, dengan melakukan pembinaan dan implementasi asset Manajemen, baik di unit-unit eksisting maupun unit yang baru bergabung.
2. Improvement Asset Management dengan melakukan penyesuaian Tata Kelola Pembangkitan pada unit baru.
3. Project Owner Proyek EAM untuk Support Beyond Power.

PLN NP has conducted several work programs to maintain the quality of Asset Management during 2023, including:

1. Electric Power Generator Asset Management and Governance, by providing guidance and implementation of Asset Management, both in existing and newly joined units.
2. Asset Management Improvement by adjusting the Electric Power Generator Governance in new units.
3. Project Owner of EAM Project to Support Beyond Power.

Rencana Program Kerja Manajemen Aset Tahun 2024

Asset Management Work Program Plan for 2024

Rencana Program Kerja Manajemen Aset di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Asset Management dan Tata Kelola Pembangkitan dengan melakukan parenting sistem pada unit baru dan unit yang akan bergabung di wave 2 Holding Subholding (HSH).
2. Improvement Asset Management dan Tata Kelola Pembangkitan.
3. Project Owner Proyek EAM untuk Support Beyond Power.

Asset Management Work Program Plan in 2024 is as follows:

1. Electric Power Generator Asset Management and Governance by conducting sistem parenting on new units and units that will join the Wave 2 Holding Subholding (HSH).
2. Improvement of Electric Power Generator Asset Management and Governance.
3. Project Owner of EAM Project for Support Beyond Power.

Pengembangan Usaha
Business Development

PLN NP berkembang dengan melakukan kegiatan pembangkitan tenaga listrik dalam rangka memanfaatkan secara maksimal potensi yang dimiliki Perusahaan guna meningkatkan *revenue* dengan berfokus dalam bisnis energi yang tidak terbatas pada pembangkitan *heavy asset*, melainkan *asset light* dan energi inovatif lainnya untuk mencapai diversifikasi usaha sehingga dapat meningkatkan nilai pertumbuhan Perusahaan secara berkelanjutan.

PLN NP develops by conducting electric power generation activities to maximize the potential of the Company to increase revenue by focusing on the energy business that is not limited to heavy asset electric power generation, but light assets and other innovative energy to achieve business diversification so as to increase the value of the Company's growth sustainably.

Pengelola Pengembangan Usaha
Business Development Management

Pengelola Pengembangan Usaha dilakukan oleh Direktorat Pengembangan Bisnis dan Niaga sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi PT Pembangkitan Jawa-Bali No. 040/DIR/ DIV/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Pembangkitan Jawa-Bali. Pengelola pengembangan usaha berada di bawah Direktorat Pengembangan Bisnis dan Niaga, yang membawahi 5 Bidang yaitu Bidang *Corporate Planning and Sustainability*, Bidang *Portfolio Management and Subsidiaries*, Bidang *Business Development-Generation*, Bidang *Business Development-Generation Derivatives*, dan Bidang *Corporate Performance*.

Business Development Management is carried out by the Directorate of Business Development and Commerce as stipulated in the Regulation of the Board of Directors of PT Pembangkitan Jawa-Bali No. 040/DIR/DIV/2022 concerning Organization and Work Procedures of PT Pembangkitan Jawa-Bali. The business development manager is under the Directorate of Business Development and Commerce, which oversees five divisions, namely the Corporate Planning and Sustainability Division, the Portfolio Management and Subsidiaries Division, the Business Development-Generation Division, the Business Development-Generation Derivatives Division, and the Corporate Performance Division.

Di dalam pelaksanaan pengembangan usaha, bidang-bidang tersebut didukung oleh Anak Perusahaan di bidang investasi (PT PLN Nusantara Renewables), bidang konstruksi (PT PLN Nusantara Power Construction) serta didukung oleh Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi lainnya.

In the business development implementation, these areas are supported by Subsidiaries in the investment sector (PT PLN Nusantara Renewables), construction sector (PT PLN Nusantara Power Construction), and supported by other Subsidiaries and Association Companies.

Tata Kelola Pengembangan Usaha
Business Development Governance

Fokus utama pengembangan usaha adalah mempersiapkan optimasi dari sumber daya internal untuk memberikan kontribusi yang maksimal dari segala peluang bisnis yang akan muncul. PLN NP memiliki kompetensi di bidang pembangkitan fossil dan energi baru dan terbarukan sesuai tren global mendasang dengan pengembangan usaha yang meliputi penjualan tenaga listrik, inovasi bidang energi, dan jasa-jasa lainnya untuk meningkatkan *value added* Perusahaan.

The main focus of business development is to prepare the optimization of internal resources to provide maximum contribution from all emerging business opportunities. PLN NP has competencies in the field of fossil and new and renewable energy electric power generation according to future global trends with business development that includes the sale of electricity, investment in energy, and other services to increase the Company's value added.

Pengembangan usaha PLN NP sampai saat ini fokus pada peningkatan revenue yang kemudian dituntaskan kedalam beberapa program strategis Perusahaan antara lain:

1. Penyelesaian proyek penugasan (Add On Muara Tawar, PLTU Cirata, PLTA Balang Toru, PLTU Sumbagsel-1), (E-Non GHG Emission & Renewable Energy);
2. Pengembangan Pembangkit EBT dan Non-EBT dalam RUPTL 2021-2030 (E-Renewable Energy) melalui skema IPP Majority dan Minority Shares;
3. Akuisisi pembangkit brownfield, pengembangan additional demand di kawasan industri dengan melakukan pengembangan baik IPC, captive power maupun akuisisi pembangkit;
4. Eksekusi model bisnis untuk industri rooftop (E-Renewable Energy);
5. Penambahan potensi penjualan produk MRO luar PLN dan luar negeri;
6. Perluasan bisnis PLN SC melalui pengembangan bisnis proses dan sistem pada logistik dan warehousing;
7. Assessment, Revitalisasi dan EPC PLTS di PLN Group (E-Renewable Energy).

Dalam melaksanakan pengembangan usaha, PLN NP telah dilengkapi dengan perangkat kebijakan tata kelola pengembangan usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengembangan usaha oleh divisi terkait. Selain itu, telah tersedia aplikasi PMO (Program Management Office) untuk membantu Project Manager dalam melakukan fungsi kontrol dan monitor proyek mulai dari tahap inisiasi hingga tahap penyelesaian proyek tersebut.

PLN NP's business development to date has focused on increasing revenue, which is then derived into several of the Company's strategic programs, among others:

1. Completion of assignment projects (Muara Tawar Add On, Cirata UPT, Balang Toru HPP, Sumbagsel-1 CFPP), (E-Non GHG Emission & Renewable Energy);
2. Development of RBE and Non-RBE Plants in RUPTL 2021-2030 (E-Renewable Energy) through IPP Majority and Minority Shares schemes;
3. Acquisition of brownfield power plants, development of additional demand in industrial areas by developing both IPC, captive power, and acquisition of power plants;
4. Execution of business model for rooftop industry (E-Renewable Energy);
5. Addition of potential sales of MRO products outside PLN and abroad;
6. Expansion of PLN SC business through business process and system development in logistics and warehousing;
7. Assessment, Revitalization, and EPC of SPP in PLN Group (E-Renewable Energy).

In carrying out business development, PLN NP has been equipped with business development governance policy tools as the guideline in implementing business development by the relevant divisions. Moreover, the PMO (Program Management Office) application is available to assist the Project Manager in running project control and monitoring functions from the initiation stage to the project completion stage.

Realisasi Program Kerja Pengembangan Usaha Tahun 2023

Realization of Business Development Work Program in 2023

PLN NP telah melaksanakan beberapa program kerja Pengembangan Usaha selama tahun 2023, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan purchase option PLTGU Sengkang 315 MW di Wajo, Sulawesi Selatan dalam rangka mendukung keandalan sistem Listrik Sulawesi. Aksi ini menambah kapasitas pembangkit eksisting PLN NP sebesar 315 MW.
2. Progres penyelesaian proyek-proyek pengembangan usaha agar dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan antara lain:
   a. PLTS Apung Cirata: Telah diresmikan oleh Presiden RI pada 9 November 2023 dan telah beroperasi dengan baik.
   b. PLTS Terapung Karangkelebet: Proses penerbitan persetujuan RUPS atas partner terpilih pada desember 2023.
   c. PLTU MT Sumbagsel-1: Proses konstruksi pembangkit dengan progress adalah pelaksanaan Boiler Foundation Take Over Unit #1. Pembangkit ini ditargetkan COD pada tahun 2024.
   d. PLTB Tanah Laut: Pengembangan PLTB Tanah Laut 70 MW telah dilaksanakan PPA dan dalam proses pembahasan Shareholder Agreement.

PLN NP has conducted several Business Development work programs during 2023, including the following:

1. Executing the purchase option of the 315 MW Sengkang CCPP in Wajo, South Sulawesi, to support the reliability of the Sulawesi Electricity system. This action increased PLN NP's existing power plant capacity by 315 MW.
2. Progress on the completion of business development projects to run according to predetermined targets, among others:
   a. Cirata Floating UPP: The President of Indonesia inaugurated it on November 9, 2023, and it has been operating well.
   b. Karangkelebet Floating UPP: The process of issuing GMS approval for the selected partner in December 2023.
   c. MT Sumbagsel-1 UPP: The power plant construction process with the progress of the implementation of Boiler Foundation Take Over Unit #1. This power plant is targeted for COD in 2024.
   d. Tanah Laut WPP: The 70 MW Tanah Laut WPP development has executed a PPA and is in the process of discussing the Shareholder Agreement.

a. *Add On Muara Tawar: Telah dilakukan Synchronization Test pada Blok 3 dan Power Receiving pada Blok 4.*
i. PLTS IKN: Proses pekerjaan konstruksi PLTS IKN Tahap 1 10 MW. Penyelesaian pekerjaan konstruksi PLTS IKN Tahap 1 ditargetkan pada Februari 2024. Proses tahap1 partnership sudah dilaksanakan dengan pembentukan JVC pada November 2023 dengan nama PT Nusantara Sembcorp Solar Energi.
g. Relokasi Balanghari & Jabalsaring: *Progress relokasi adalah pelaksanaan Trafo Commissioning, dengan target COD pada tahun 2024.*
h. PLTA Batang Toru: Progress konstruksi data ini adalah pekerjaan River Diversion dengan target COD tahun 2026.

3. Melalui Anak Perusahaan PLN NP (PLN Nusantara Power Services, PLN Nusantara Renewables, PLN Nusantara Power Construction dan PLN SC) telah terlibat dalam pengembangan PLTS IKN 50MW dengan PLN SC sebagai ketua konsorsiumnya.

a. Muara Tawar Add On: Synchronization Test has been conducted on Block 3 and Power Receiving on Block 4.
i. IKN SPP: The construction work process of IKN's Phase 1 10 MW SPP. The completion of the construction work of the IKN Phase 1 SPP is targeted for February 2024. The partnership process has been implemented with the establishment of a JVC in November 2023 under the name PT Nusantara Sembcorp Solar Energi.
g. Balanghari & Jabalsaring Relocation: Relocation progress is the implementation of the Commissioning Trafo, with a COD target in 2024.
h. Batang Toru HPP: The construction progress of this data is River Diversion work with a COD target of 2026.

3. Through its Subsidiaries (PLN Nusantara Power Services, PLN Nusantara Renewables, PLN Nusantara Power Construction, and PLN SC) PLN NP has been involved in the development of the 50MW IKN SPP with PLN SC as the consortium chairman.

Rencana Program Kerja Pengembangan Usaha Tahun 2024

Business Development Work Program Plan for 2024

Secara umum, Rencana Program Kerja Pengembangan Usaha PLN NP di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. PLTS Substitusi PS (0,5 MW).
2. PLTS Bawean (3 MW).
3. PLTA Sulbagsel (Kostal) Tersebar (COD 2029) (200 MW).
4. PLTS Dieselisasi (48,58 MW).
5. PLTS Pulau (30 MW).
6. PLTS Sumbawa-Bima (10 MW).
7. PLTS Timor 1 dan 2 (10 MW).
8. PLTS Belang (50 MW).
9. PLTS Sumenep 1 (50 MW).
10. PLTS Banten (50 MW).
11. PLTS Indramayu (100 MW).
12. PLTS Manas (50 MW).
13. PLTS Ngawi (50 MW).
14. PLTS Sakeli (50 MW).
15. PLTS Tolaldo (10 MW).
16. PLTS Sumba 1,2 (75 MW).
17. PLTS Belun (0,6 MW).
18. PLTS Cirebon (80 MW).
19. PLTS Pemalang (50 MW).
20. PLTS Sumenep 2 (50 MW).
21. PLTS Bojonegoro (50 MW).
22. PLTS Belitung (5 MW).
23. PLTS Tembesi Batam (35 MW).

In general, PLN NP's Business Development Work Program Plan in 2024 is as follows:

1. PS Substitution SPP (0,5 MW).
2. Bawean SPP (3 MW).
3. Sulbagsel HPP (Kostal) Spread over (COD 2029) (200 MW).
4. Dieselisation SPP (48,58 MW).
5. Pulau SPP (30 MW).
6. Sumbawa-Bima SPP (10 MW).
7. Timor 1 and 2 SPP (10 MW).
8. Belang SPP (50 MW).
9. Sumenep 1 SPP (50 MW).
10. Banten SPP (50 MW).
11. Indramayu SPP (100 MW).
12. Manas SPP (50 MW).
13. Ngawi SPP (50 MW).
14. Sakeli SPP (50 MW).
15. Tolaldo SPP (10 MW).
16. Sumba 1,2 SPP (75 MW).
17. Belun SPP (0,6 MW).
18. Cirebon SPP (80 MW).
19. Pemalang SPP (50 MW).
20. Sumenep 2 SPP (50 MW).
21. Bojonegoro SPP (50 MW).
22. Belitung SPP (5 MW).
23. Tembesi Batam SPP (35 MW).

24. PLTA Hidro Sumatera (Kuota) Tersebar (400 MW).
25. PLTA Kalselteng/nna (Kuota) Tersebar (100 MW).
26. PLTA Sulsagpel (Kuota) Tersebar (COD 2028) (200 MW).
27. PLTA Jawa Bali (Kuota) Tersebar (30 MW).
28. PLTS Jawa Bali (Kuota) Tersebar 10 MW (COD RUPTL 2024) (50 MW).
29. PLTB Tanah Laut (70 MW).
30. PLTS Floating Kerenghalan (100 MW).
31. PLTS IKN (30 MW).
32. Relokasi Pembangkit (70 MW).
33. Akuisisi Pembangkit IPP Terkendala (200 MW).
34. Persiapan Pengembangan Bisnis/Proyek.

24. Hydro Sumatera HPP (Quota) Spread over (400 MW).
25. Kalselteng/nna HPP (Quota) Spread over (100 MW).
26. Sulsagpel HPP (Quota) Spread over (COD 2028) (200 MW).
27. Java Bali HPP (Quota) Spread over (30 MW).
28. Java Bali SPP (Quota) Spread over 10 MW (COD RUPTL 2024) (50 MW).
29. Tanah Laut MPP (70 MW).
30. Kerenghalan Floating SPP (100 MW).
31. IKN SPP (30 MW).
32. Power Plant Relocation (70 MW).
33. IPP Power Plant Acquisition Constrained (200 MW).
34. Business/Project Development Preparation.

Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis

Analisis Industri
Industry Analysis

Tinjauan Perekonomian Dunia
World Economy Overview

Pertumbuhan global, yang diperkirakan sebesar 3,1 persen pada tahun 2023, diproyeksikan akan tetap sebesar 3,1 persen pada tahun 2024 sebelum sedikit meningkat menjadi 3,2 persen pada tahun 2025. Dibandingkan dengan perkiraan WEO pada bulan Oktober 2023, perkiraan untuk tahun 2024 adalah sekitar 0,2 poin persentase lebih tinggi, yang mencerminkan peningkatan di Tiongkok, Amerika Serikat, serta negara-negara emerging market dan berkembang.

Global growth, which is estimated at 3.1 percent in 2023, is projected to remain at 3.1 percent in 2024 before increasing slightly to 3.2 percent in 2025. Compared with the WEO forecast in October 2023, the forecast for 2024 is about 0.2 percentage points higher, reflecting improvements in China, the United States, emerging markets, and developing countries.

Pertumbuhan ekonomi diperkirakan lebih kuat dari perkiraan pada paruh kedua tahun 2023 di Amerika Serikat, dan beberapa negara emerging market dan berkembang. Dalam beberapa kasus, belanja pemerintah dan swasta berkontribusi terhadap peningkatan ini, dengan peningkatan pendapatan riil yang dapat dibelanjakan mendukung konsumsi di tengah masih ketatnya pasar tenaga kerja dan rumah tangga dan rumah tangga yang menghabiskan tabungan mereka di era pandemi, meskipun masih ketat. Ekspansi di sisi pasokan juga terjadi, dengan peningkatan partisipasi angkatan kerja secara luas, penyelesaian masalah rantai pasokan di era pandemi, dan penurunan waktu pengiriman. Peningkatan momentum ini tidak dirasakan di semua wilayah, terutama dengan lemahnya pertumbuhan di kawasan euro, yang mencerminkan lemahnya sentimen konsumen, dampak yang masih ada dari tingginya harga energi, dan melemahnya sektor manufaktur dan investasi bisnis yang sensitif terhadap suku bunga. Negara-negara berpendapatan rendah terus mengalami kerugian output yang besar dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi (2017-2019) di tengah tingginya biaya pinjaman.

Economic growth is expected to be stronger than expected in the second half of 2023 in the United States, several emerging markets, and developing countries. In some cases, government and private expenditures contribute to this improvement, with an increase in real disposable income supporting consumption in the middle of a tight labor market and households, and households spending their savings in the pandemic era, although it is still tight. Expansion on the supply side also occurred, with a broad-based increase in labor force participation, resolution of supply chain issues in the pandemic era, and a decrease in delivery times. This increased momentum was not felt across all regions, particularly with weak growth in the euro area, reflecting weak consumer sentiment, the lingering impact of high energy prices, and weak interest-rate sensitive manufacturing and business investment. Low-income countries continue to experience large output losses compared to pre-pandemic conditions (2017-2019) amidst high borrowing costs.

Inflasi global diperkirakan turun dari sekitar 6,8 persen pada tahun 2023 (rata-rata tahunan) menjadi 5,6 persen pada tahun 2024 dan 4,4 persen pada tahun 2025. Penyebab penurunan inflasi berbeda-beda di setiap negara, namun secara umum mencerminkan melalnya inflasi inti sebagai akibat dari kebijakan moneter yang masih ketat, melemahnya pasar tenaga kerja, dan efek lanjutan dari penurunan harga energi relatif yang terjadi sebelumnya dan yang sedang berlangsung.

Global inflation is expected to decline from around 6.8 percent in 2023 (annual average) to 5.6 percent in 2024 and 4.4 percent in 2025. The causes of the decline in inflation vary by country but generally reflect lower core inflation due to tight monetary policy, weakening labor markets, and the after-effects of the previous and ongoing decline in relative energy prices.

Reformasi struktural yang ditargetkan dan dilaksana secara hati-hati dapat memperkuat pertumbuhan produktivitas dan membalikkan penurunan prospek pertumbuhan jangka menengah meskipun ruang kebijakan terbatas. Menggabungkan reformasi yang meringankan hambatan-hambatan yang paling mengikat terhadap kegiatan ekonomi dapat mempercepat pendekatan output, bahkan dalam jangka pendek, dan memperoleh dukungan masyarakat. Kebijakan industri dapat diterapkan ketika

Targeted and prudent structural reforms can strengthen productivity growth and reverse the deterioration in medium-term growth prospects despite limited policy space. Combining reforms that ease the most binding barriers to economic activity can accelerate output gains, even in the short term, and secure public support. Industrial policies can be applied when the externalities that are clearly identifiable or important market failures are well known, and other more effective policy options

eksternalitas yang dapat diidentifikasi dengan jelas atau kegagalan pasar yang penting sudah diketahui dengan baik dan pilihan kebijakan lain yang lebih efektif tidak tersedia, namun kebijakan tersebut harus konsisten dengan peraturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Kebijakan-kebijakan tersebut kemungkinan besar akan berhasil jika dilengkapi dengan reformasi perekonomian yang lepas dan kerangka tata kelola yang baik. Penetapan harga karbon, subsidi untuk investasi ramah lingkungan, pengurangan subsidi energi, dan mekanisme penyesuaian batas karbon dapat mempercepat transisi ramah lingkungan namun harus dirancang untuk mendukung konsistensi dengan peraturan WTO. Investasi dalam kegiatan adaptasi iklim dan infrastruktur juga diperlukan untuk mendukung ketahanan.

Sumber: World Economic Outlook International Monetary Fund (IMF) Januari 2024

are not available. However, they must be consistent with World Trade Organization (WTO) regulations. Such policies are most likely to succeed if complemented by appropriate economic reforms and a good governance framework. Carbon pricing, subsidies for green investments, reductions in energy subsidies, and carbon cap adjustment mechanisms can accelerate the green transition. However, they must be designed to support consistency with WTO regulations. Investments in climate adaptation activities and infrastructure are also needed to support resilience.

Source: World Economic Outlook International Monetary Fund (IMF) January 2024

Grafik Pertumbuhan Ekonomi Dunia (%)
Chart of World Economic Growth (%)

Sumber: World Economic Outlook International Monetary Fund (IMF) Januari 2024

Source: World Economic Outlook International Monetary Fund (IMF) January 2024

Analisis Perekonomian Indonesia
Indonesian Economy Analysis

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Indonesian Economic Growth

Perekonomian Indonesia 2023 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp20.892,4 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp75,0 juta atau US$4.919,3

Ekonomi Indonesia tahun 2023 tumbuh sebesar 5,05 persen, lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,31 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 13,96 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 9,83 persen.

The Indonesian economy in 2023, as measured by Gross Domestic Product (GDP) at current prices, reached Rp20,892.4 trillion, and GDP per capita reached Rp75.0 million or US$4,919.3

Indonesia's economy in 2023 increased by 5.05 percent, lower than the achievement in 2022, which experienced an increase of 5.31 percent. On the production side, the highest increase occurred in the Transportation and Warehousing Business Field by 13.96 percent. Meanwhile, from the expenditure side, the highest increase was achieved by Consumption Expenditure of Nonprofit Institutions Serving Households (PK-LNPRT) by 9.83 percent.

Ekonomi Indonesia triwulan IV-2023 terhadap triwulan IV-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,04 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,33 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen PK-LNPRT mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 18,71 persen.

Indonesia's economy in the fourth quarter of 2023 against the fourth quarter of 2022 experienced an increase of 5.04 percent (y-on-y). On the production side, the Transportation and Warehousing Business Field experienced the highest increase of 10.33 percent. While on the expenditure side, the PK-LNPRT component experienced the highest increase of 18.71 percent.

Ekonomi Indonesia triwulan IV-2023 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 0,49 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 19,81 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 39,13 persen.

Indonesia's economy in the fourth quarter of 2023 against the previous quarter experienced an increase of 0.49 percent (q-to-q). In terms of production, the Public Administration, Defense, and Compulsory Social Security Business Field experienced the highest increase of 19.81 percent. In terms of expenditure, the Government Consumption Expenditure Component (PK-P) experienced the highest increase of 39.13 percent.

Selama tahun 2023 perekonomian Indonesia dilihat secara spasial masih terus tumbuh. Kelompok provinsi menurut pulau yang mencatat pertumbuhan tertinggi adalah Maluku dan Papua, Sulawesi, serta Kalimantan dengan pertumbuhan (y-on-y) sebesar 6,94 persen; 6,37 persen; dan 5,43 persen. Sedangkan kelompok provinsi di Pulau Jawa yang berkontribusi sebesar 57,05 persen terhadap ekonomi nasional mencatat pertumbuhan 4,96 persen (y-on-y).

During 2023, the Indonesian economy continued to grow spatially. The provincial groups by the island that recorded the highest increases were Maluku and Papua, Sulawesi, and Kalimantan with growth (y-on-y) of 6.94 percent; 6.37 percent; and 5.43 percent. Meanwhile, the group of provinces in Java, which contributed 57.05 percent to the national economy, recorded an increase of 4.96 percent (y-on-y).

Sumber: Berita Resmi Statistik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV 2023 No.07/02/Th. XXVI, 5 Februari 2024

Source: Official Statistics of Indonesia's Economic Growth Statistics for the Fourth Quarter of 2023 No.07/02/Th. XXVI, February 5, 2024

Tingkat Inflasi Indonesia

Indonesia's Inflation Rate

Pada Desember 2023 terjadi inflasi year on year (y-on-y) sebesar 2,61 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 116,06. Inflasi tertinggi terjadi di Sorong sebesar 5,08 persen dengan IHK sebesar 120,82 dan terendah terjadi di Bandung sebesar 0,63 persen dengan IHK sebesar 116,76.

In December 2023, there was year-on-year (y-on-y) inflation of 2.61 percent, with a Consumer Price Index (CPI) of 116.06. The highest inflation occurred in Sorong by 5.08 percent with a CPI of 120.82, and the lowest occurred in Bandung by 0.63 percent with a CPI of 116.76.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 6,78 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,78 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,30 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,57 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,94 persen; kelompok transportasi sebesar 1,27 persen; kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,20 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,69 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,97 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,02 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 2,55 persen.

Y-on-y inflation occurred due to an increase in prices as indicated by the increase in all expenditure group index, namely: food, beverages, and tobacco group by 6.78 percent; clothing and footwear group by 0.78 percent; housing, water, electricity, and household fuel group by 0.30 percent; household supplies, equipment, and routine maintenance group by 1.57 percent; health group by 1.94 percent; transportation group by 1.27 percent; information, communication, and financial services group by 0.20 percent; recreation, sports, and culture group by 1.69 percent; education group by 1.97 percent; food and beverage supply/restaurant group by 2.02 percent; and personal care and other services group by 2.55 percent.

Sumber: Berita Resmi Statistik No.01/01/Th.XXVII, Januari 2024 "Perkembangan Indeks Harga Konsumen Desember 2023" diumumkan tanggal 2 Januari 2024

Source: Official Statistics of Statistics No.01/01/Th.XXVII, January 2, 2024 "Development of Consumer Price Index December 2023" published on January 2, 2024

Nilai Tukar Mata Uang

Currency Exchange Rates

Penguatan nilai tukar Rupiah berlanjut sejalan dengan konsistensi kebijakan moneter Bank Indonesia dan mulai meredanya ketidakpastian pasar keuangan global. Nilai tukar Rupiah pada 20 Desember 2023 menguat secara rata-rata sebesar 0,44% dibandingkan dengan perkembangan pada November 2023. Dengan perkembangan tersebut, nilai tukar Rupiah menguat 0,57% dibandingkan dengan level akhir Desember 2023, lebih baik dibandingkan dengan Peso Filipina, Rupee India, dan Baht Thailand yang masing-masing tercatat melemah sebesar 0,06%, 0,32%, dan 0,85%. Di samping kebijakan stabilisasi Bank Indonesia, berlanjutnya apreasiasi nilai tukar Rupiah didorong oleh masuknya aliran portofolio asing, menariknya imbal hasil aset keuangan domestik, serta tetap positifnya prospek ekonomi ke depan. Bank Indonesia tetap akan mewaspadai sejumlah risiko yang mungkin timbul dan memastikan terjaganya stabilitas nilai tukar Rupiah. Strategi operasi moneter pro-market melalui instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI dioptimalkan guna meningkatkan managemen likuiditas instrumen keuangan domestik dan menarik masuknya aliran masuk modal asing dari luar negeri. Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah, perbankan, dan dunia usaha untuk mendukung implementasi instrumen penempatan valas Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) sejalan dengan PP No. 36 Tahun 2023.

Sumber: Bank Indonesia, Tinjauan Kebijakan Moneter Desember 2023

The strengthening of the Rupiah exchange rate continued in line with the consistency of Bank Indonesia's monetary policy and the easing of global financial market uncertainty. The Rupiah exchange rate on December 20, 2023, strengthened on average by 0.44% compared to the development in November 2023. With this development, the Rupiah exchange rate strengthened by 0.57% compared to the level at the end of December 2023, better than the Philippine Peso, Indian Rupee, and Thai Baht, which recorded a weakening of 0.06%, 0.32%, and 0.85%, respectively. In addition to Bank Indonesia's stabilization policy, the continued appreciation of the Rupiah exchange rate is driven by the inflow of foreign portfolio flows, attractive yields on domestic financial assets, and the continued positive economic outlook. Going forward, Bank Indonesia will remain cautious of several risks that may arise and ensure the stability of the Rupiah exchange rate. The strategy of pro-market monetary operations through SRBI, SVBI, and SUVBI instruments is optimized to improve the liquidity management of domestic financial instruments and attract foreign capital inflows from abroad. Bank Indonesia continues to strengthen coordination with the Government, banks, and businesses to support the implementation of foreign exchange placement instruments for Natural Resources Export Proceeds (DHE SDA) in line with Government Regulation No. 36 of 2023.

Source: Bank Indonesia, Monetary Policy Review in December 2023

Kondisi Industri Listrik Indonesia

Condition of Indonesian Electricity Industry

Tren penjualan dan jumlah pelanggan tenaga listrik di Indonesia terus mengalami pergerakan yang positif. Data penjualan listrik menunjukkan peningkatan penjualan menjadi 285,33 TWh pada tahun 2023 dari penjualan sebesar 270,81 TWh pada tahun 2022. Dengan kata lain, terdapat peningkatan sebesar 14,41 TWh atau 5,32 persen dari tahun sebelumnya.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM. Meskipun mengemban tanggung jawab yang besar dalam memenuhi kebutuhan listrik masyarakat di seluruh Indonesia, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan ESDM optimis dapat mencapai target-target yang telah ditetapkan. Berbagai langkah strategis ditetapkan dalam upaya pemenuhan rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik di Indonesia mencapai 100 persen, meskipun kondisi geografis dengan karakteristik topografi yang beragam menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan penyediaan tenaga listrik.

The trend of electricity sales and customer numbers in Indonesia continues to experience positive movements. Electricity sales data shows an increase in sales to 285.33 TWh in 2023 from 270.81 TWh in 2022. In other words, there was an increase of 14.41 TWh or 5.32 percent from the previous year.

This was conveyed by the Director of Electricity Business Development of the Directorate General of Electricity of the Ministry of Energy and Mineral Resources. Despite carrying a big responsibility in fulfilling the electricity needs of people throughout Indonesia, the Directorate General of Electricity of the Ministry of ESDM is optimistic that it can achieve the predetermined targets. Various strategic steps are set in an effort to fulfill the electrification ratio and the ratio of electrified villages in Indonesia to reach 100 percent, although geographical conditions with diverse topographical characteristics are a challenge in the equal distribution of electricity supply.

Hingga akhir tahun 2023, masih terdapat 185.662 rumah tangga yang tersebar di 140 desa yang belum teraliri listrik. Desa-desa tersebut berkonsentrasi di Pulau Papua, kecuali bagian Papua Barat. Oleh sebab itu, target 100 persen rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik menjadi tugas yang tidak mudah.

Dalam rangka mencapai 100 persen, pemerintah sudah menghitung resources yang dibutuhkan dari sisi jaringan, pembangkit, dan dari sisi biaya sebagai investasi yang untuk bisa melistrik desa-desa ini. Upaya peningkatan kualitas dan kuantitas elektrifikasi di Indonesia terus mengalami kemajuan. Pada tahun 2023, realisasi konsumsi listrik perkapita sebesar 1,137 kWh/kapita, mampu memenuhi target yang direncanakan.

Selaras dengan target Net Zero Emission pada tahun 2060, turut diproyeksikan pertumbuhan demand (moderat) sebesar 4,000 kWh/kapita yang terdiri dari 88% EBT, sementara 12% nya energi fosil dan CCS. Selain itu, realisasi Supergrid sebagai kunci transisi energi diharapkan mampu meningkatkan interkoneksi energi antarpulau dan mengatasi ketidakseimbangan bauran energi di Indonesia. Kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan menjadi hal terpenting dalam mewujudkan hal ini.

Sumber : https://www.esdm.go.id/id/media-center/siaran-pers/ini-penyebab-listrik-di-indonesia-terus-naik-ini-strategi-pemerintah-penuhi-kebutuhan

Until the end of 2023, there were 185,662 households in 140 villages without electricity. These villages are concentrated in Papua Island, except for West Papua. Therefore, the target of 100 percent electrification and electrified village ratios is not an easy task.

The government has calculated the resources needed in terms of networks, power plants, and costs as an investment to be able to electrify these villages to achieve 100 percent. Efforts to enhance the quality and quantity of electrification in Indonesia continue to progress. In 2023, the realization of electricity consumption per capita of 1,137 kWh/kapita was able to meet the planned target.

In line with the Net Zero Emission target by 2060, a (moderate) demand growth of 4,000 kWh/kapita is also projected, consisting of 88% NRE, while 12% is fossil energy and CCS. In addition, the realization of Supergrid as the key to energy transition is expected to improve inter-island energy interconnection and overcome the imbalance of energy mix in Indonesia. Collaboration from all stakeholders is the most crucial in realizing this.

Source : https://www.esdm.go.id/id/media-center/siaran-pers/ini-penyebab-listrik-di-indonesia-terus-naik-ini-strategi-pemerintah-penuhi-kebutuhan

Kontribusi PLN NP Dalam Industri Pembangkit Listrik Indonesia

PLN NP's Contribution to Indonesia's Power Plant Industry

Komposisi produksi listrik per jenis energi primer di Jawa, Madura, dan Bali diproyeksikan pada tahun 2030 akan menjadi 66,7% batubara, 17% gas (termasuk LNG), 4,6% tenaga air, 6,6% panas bumi, 0,3% BBM dan 4,8% EBT. Porsi pembangkit EBT di Jawa, Madura, dan Bali akan meningkat dari 8,5% tahun 2021 menjadi 16,7% di tahun 2030.

The composition of electricity production per type of primary energy in Java, Madura, and Bali is projected by 2030 to be 66.7% coal, 17% gas (including LNG), 4.6% hydropower, 6.6% geothermal, 0.3% fuel, and 4.8% New and Renewable Energy. The share of NRE (New and Renewable Energy) power plants in Java, Madura, and Bali will increase from 8.5% in 2021 to 16.7% in 2030.

Gambar Komposisi Bauran Energi Listrik Berdasarkan Jenis Bahan Bakar Jawa, Madura, dan Bali (GWh)

Picture of Electricity Energy Mix Composition by Fuel Type in Java, Madura, and Bali (GWh)

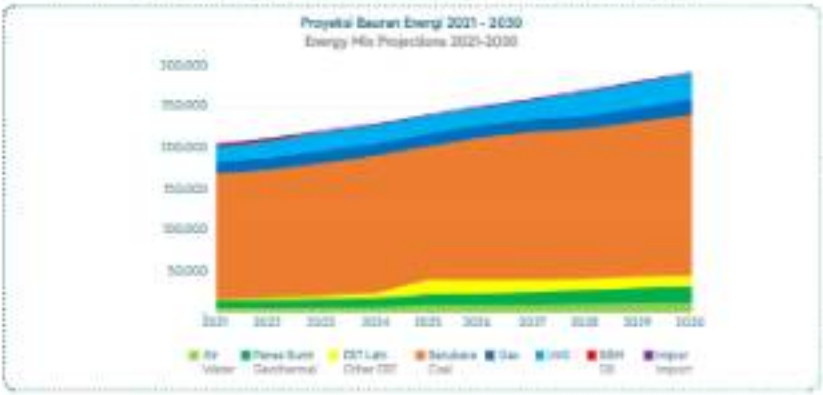

Proyeksi kebutuhan bahan bakar untuk pembangkit dapat dilihat dalam tabel di bawah. Volume kebutuhan batubara terus meningkat sampai tahun 2024, namun pada tahun 2025 kebutuhan tersebut akan menurun untuk memenuhi kebijakan Pemerintah, yaitu target bauran energi EBT 23%, sedangkan selanjutnya volumenya bertambah walaupun porsinya semakin menurun.

The projected fuel demand for power plants can be seen in the table below. The volume of coal needs to continue to increase until 2024. However, the need will decrease in 2025 to meet the Government's policy of a 23% NRE energy mix target, while the volume will increase even though the portion significantly decreases.

Tabel Proyeksi Kebutuhan Bahan Bakar Pembangkit Jawa, Madura, dan Bali
Table of Projected Fuel Needs for Jawa, Madura, and Bali Power Plants

No	Jenis Bahan Bakar Type of Fuel	Satuan Unit	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Biodiesel	ribu KL thousand KL	208	255	45	44	55	67	71	72	77	8.2	
2	Biomassa Biomass	ribu ton	344	1.094	3.048	2.482	6.370	7.087	6.094	5.373	5.371	5.348	
3	Gas	TBTU	351	357	360	365	360	357	339	319	329	365	
4	BBM Fuel	ribu KL thousand KL	456	490	504	507	507	516	565	569	555	572	
5	Batubara Coal	juta ton million ton	83	84	87	93	98	93	96	98	101	104	

Di tahun 2023, kontribusi PLN NP dalam mendukung sistem kelenggalistrikan Jawa Madura Bali bertambah seiring dengan rencana COD Add On blok 3 dan blok 4 PLTGU Muara Tawar dengan kapasitas masing-masing 250 MW serta adanya pembentukan holding sub holding PLN dengan implikasi pengalihan aset PLN yang dikelola PLN NP di sistem Jawa Madura Bali sebesar 4.379 MW.

In 2023, PLN NP's contribution in supporting the Jawa Madura Bali electricity system increased along with the COD Add On plan of block 3 and block 4 of Muara Tawar CCPP with a capacity of 250 MW each and the formation of PLN sub-holding with the implication of transferring PLN assets managed by PLN NP in the Jawa Madura Bali system of 4,379 MW.

PLN NP juga mendukung penyediaan tenaga listrik dengan 3 prinsip ketahanan, yaitu security, affordability dan low emission di antaranya melalui program coal switching, anti blackout dan unit fast response, swakelola pemeliharaan, optimasi Pemakaian Sendiri melalui PLTS substitusi PS, co-firing dan budidaya tanaman energi untuk mendukung program co-firing PLTU batubara.

PLN NP also supports the provision of electricity with three principles of resilience, namely security, affordability, and low emission, including through programs coal switching, anti-blackout, and fast response units, self-managed maintenance, optimization of Self Consumption through PS substitution SPP, co-firing, and cultivation of energy plants to support the coal CFPP co-firing program.

Kontribusi PLN Nusantara Power terhadap penyediaan listrik nasional dan pembangkitan selaras dengan transformasi PLN di mana berdasarkan pada empat aspirasi yang menjadi arah perubahan PLN, yaitu Green, Lean, Innovative, dan Customer focused. Selain mendukung sistem kelenggalistrikan Jawa Madura Bali, bentuk kontribusi PLN Nusantara Power terhadap penyediaan listrik nasional dan pembangkitan dalam bentuk SOLID PLN adalah sebagai berikut:

PLN Nusantara Power's contribution to national electricity supply and electric power generation is in line with PLN's transformation, which is based on four aspirations that become PLN's direction of change, namely Green, Lean, Innovative, and Customer focused. In addition to supporting the Jawa Madura Bali electricity system, PLN Nusantara Power's contribution to national electricity supply and electric power generation in the form of SOLID PLN is as follows:

- **Securing Business Sustainability**
  Dukungan *6 line of defense system* Jawa Bali dengan cara penguatan sistem proteksi di semua pembangkit dan fasilitas blackstart di Muara Tawar, Muara Karang, Cirata serta optimasi CNG Grissik dan Muara Tawar sebagai peak saving.

- **Securing Business Sustainability**
  The six lines of defense support for the Jawa Bali system by strengthening the protection system in all power plants and blackstart facilities in Muara Tawar, Muara Karang, and Cirata, as well as optimizing CNG Grissik and Muara Tawar as peak saving.

- ***Optimising Cost Efficiency***
  Coal switching, efisiensi pemakaian sendiri (TS) pembangkit, Swakelola pemeliharaan dan pengelolaan jadwal overhaul, dan Implementasi digitalisasi pembangkit.
- ***Leading Industries Capabilities***
  Pengelolaan kinerja excellence melalui pembangkit non batubara dengan EAF 92,6% & EFOR 2,87%, pembangkit batubara dengan EAF 82,02% & EFOR 4,16%. Serta implementasi *Three Lines of Defense*, ICOFR & ISO 37001 sebagai Governance Risk Compliance, Manajemen Aset, Performance Excellent ISO 55001 dengan *Digital Power Plant* (ICORE) dan Pengelolaan lingkungan dengan compliance terhadap regulasi.
- ***Increasing Profit Contribution***
  Peningkatan kinerja keuangan Anak Perusahaan/Perusahaan Asosiasi dan peningkatan laba Perusahaan asosiasi.
- ***Developing New Edge (Renewable Energy)***
  Penyelesaian pembangunan PLTS Cirata Floating PV sebesar 145 MWac atau setara 192 MWp (COD – 2022), PLTA Batang Toru (510 MW (COD – 2025). Menginisiasi project baru berdasarkan RUPTL 2021-2030 dengan total kapasitas 1933,5 MW dengan target COD 2022-2028. Serta pemanfaatan Biomassa untuk co-firing PLTU batubara & inisiasi implementasi di pembangkit existing skala besar dan unit pembangkit yang dikelola PLN NP.

- **Optimising Cost Efficiency**
  Coal switching, self-consumption efficiency (TS) of power plants, self-managed maintenance and overhaul schedule, and implementation of power plant digitalisation.
- **Leading Industries Capabilities**
  Excellence performance management through non-coal power plants with EAF 92,6% & EFOR 2,87%, coal power plants with EAF 82,02% & EFOR 4,16%, as well as the implementation of Three Lines of Defense, ICOFR & ISO 37001 as Governance Risk Compliance, Excellent Performance Asset Management ISO 55001 with Digital Power Plant (ICORE) and Environmental Management with regulatory compliance.
- **Increasing Profit Contribution**
  Improved financial performance of Subsidiaries/Associated Companies and increased profits of Associated Companies.
- **Developing New Edge (Renewable Energy)**
  Completion of 145 MWac or equivalent to 192 MWp Cirata Floating PV (PP (COD – 2022), 510 MW Batang Toru HPP (COD – 2025). Initiating new projects based on the 2021-2030 RUPTL with a total capacity of 1,933.5 MW with a COD target of 2022-2028, as well as the utilization of Biomass for co-firing coal CFPP & initiation of implementation in existing large-scale power plants and power plant units managed by PLN NP.

Analisis Operasi Per Segmen Usaha
Operational Analysis per Business Segment

Segmen Usaha Penjualan Tenaga Listrik
Electricity Sales Business Segment

PLN NP memiliki 38 unit pembangkit yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia untuk memproduksi dan menjual tenaga listrik. Penjualan Tenaga Listrik merupakan bisnis utama yang dimiliki oleh PLN NP dimana 97,08% pendapatan berasal dari penjualan tenaga listrik pembangkit. Segmen usaha penjualan tenaga listrik meliputi kegiatan pembangkitan tenaga listrik, sampai dengan penyaluran listrik kepada pelanggan. Dalam segmen usaha ini, PLN NP memperhatikan beberapa indikator kinerja yaitu kinerja pembangkit, produksi, dan penjualan tenaga listrik.

PLN NP has 38 power plant units spread throughout Indonesia to produce and sell electricity. Electricity Sales is the main business owned by PLN NP, where 97.08% of revenue comes from the sale of electricity from existing power plants. The electricity sales business segment includes electric power generator activities, up to the electricity distribution to customers. In this business segment, PLN NP pays attention to several performance indicators, namely the performance of power plants, production, and sales of electricity.

Kinerja Operasi Pembangkit
Power Plant Performance

Indikator kinerja pembangkit meliputi faktor ketersediaan, faktor gangguan, efisiensi pembangkit, pemeliharaan pembangkit, dan kapasitas daya terpasang. Kinerja operasi PLN NP tahun 2023 dinilai memuaskan, terlihat dari beberapa indikator kinerja pembangkit yang meliputi efisiensi pembangkit, dan ketepatan pelaksanaan serta durasi pemeliharaan.

The indicators of power plant performance include availability factors, outage factors, power plant efficiency, power plant maintenance, and installed power capacity. PLN NP's operating performance in 2023 was considered satisfactory, as seen from several indicators of power plant performance, including power plant efficiency and the accuracy of maintenance implementation and duration.

Faktor Kesiapan dan Keandalan Pembangkit
Readiness and Reliability Factors of Power Plants

PLN NP menekankan fokus penciptaan nilai bisnis pembangkit pada penjualan tenaga listrik yang lebih optimal dengan standard performa excellence EAF yang mencapai world-class standard dan mengusung prinsip cost leadership agar dapat mendukung kinerja usaha pemegang saham. Faktor kesiapan dan keandalan mesin pembangkit diukur berdasarkan indikator *Equivalent Availability Factor* (EAF), *Scheduled Outage Factor* (SOF), dan *Net Plant Heat Rate* (NPHR).

PLN NP emphasizes the focus on creating the existing power plant business value on more optimal electricity sales with the excellent EAF performance standard that reaches the world-class standard and carries the principle of cost leadership to support the business performance of shareholders. The readiness and reliability factors of power plants are measured based on the Equivalent Availability Factor (EAF), Scheduled Outage Factor (SOF), and Net Plant Heat Rate (NPHR) indicators.

Equivalent Availability Factor (EAF)

EAF of Existing Power Plant

Realisasi EAF PLTU sebesar 84,85% dan Non PLTU sebesar 94,73% menunjukkan bahwa tingkat kesiapan pembangkit PLN NP sangat tinggi untuk menyuplai kelistrikan di Indonesia

The realization of EAF of CFPP of 84.85% and Non-CFPP of 94.73% shows that the readiness level of the PLN NP power plant is very high to supply electricity in Indonesia

EAF adalah indikator yang menunjukkan tingkat kesiapan suatu pembangkit untuk beroperasi menghasilkan energi listrik. EAF menjadi indikator utama Perusahaan dalam menyajikan pelayanan kepada pelanggan. Nilai EAF berfungsi untuk mengetahui faktor ketersediaan pembangkit untuk beroperasi dengan Daya Mampu Netto (DMN) pada periode tertentu. Semakin tinggi nilai EAF menunjukkan kinerja pembangkit yang semakin baik.

EAF is the indicator that shows the readiness level of a power plant to operate and produce electricity. EAF is the Company's main indicator in realizing services to customers. The corporate EAF value has the function of knowing the availability factor of the power plant corporately to operate with Net Dependable Capacity (NDC) in a certain period. The higher the EAF value, the better the power plant performance.

Nilai EAF unit pembangkitan batubara (PLTU) PLN NP pada tahun 2023 adalah 84,85% sedikit menurun dibandingkan tahun 2022 sebesar 91,08%. Penurunan ini disebabkan karena perbedaan tipe pemeliharaan periodik per mesin pembangkit untuk pembangkit pasca Holding Subholding. Sedangkan nilai EAF unit pembangkitan gas dan non batubara (non PLTU) PLN NP pada tahun 2023 adalah 94,73% sedikit menurun dibandingkan tahun 2022 sebesar 95,78%. Penurunan ini dikarenakan peningkatan jumlah gangguan pada unit pembangkit pasca Holding Subholding.

The EAF value of PLN NP's coal generation unit (CFPP) in 2023 was 84.85%, slightly decreased compared to 2022 of 91.08%. This decrease was due to differences in the type of periodic maintenance per power plant machine for post-Subholding Holding power plants. While the EAF value of gas and non-coal generation units (non-CFPP) of PLN NP in 2023 was 94.73%, slightly decreased compared to 2022 of 95.78%. This decrease was due to an increase in the number of disturbances in the post-Subholding Holding power plant unit.

Tabel EAF Unit Pembangkitan Batubara (PLTU) (%)
Table of EAF of Generation Unit (CFPP) (%)

EAF Unit Pembangkitan EAF of Generation Unit	2021	2022	2023	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease (%)
UP Paiton Paiton (U)	95,13	91,08	91,08	0,00
UP Paiton-9 Paiton-9 (U)	Belum menjadi aset PLN NP Not yet an asset of PLN NP		72,99	-
UP Indramayu Indramayu (U)			85,16	-
UP Rembang Rembang (U)			87,21	-
UP Pacitan Pacitan (U)			88,87	-
UP Tanjung Awar-Awar Tanjung Awar-Awar (U)			84,78	-
UP Tanjung Tanjung (U)			81,57	-
UP Kaltim Tarus Kaltim Tarus (U)			82,97	-
UP Pulang Pisau Pulang Pisau (U)			88,22	-
UPK Bukit Asam Bukit Asam (GOU)			83,45	-
UPK Sebuku Sebuku (GOU)			86,28	-
UPK Tanahbumbu Tanahbumbu (GOU)			88,21	-
UPK Nagan Raya Nagan Raya (GOU)			79,38	-
UPK Purnajaya Purnajaya (GOU)			83,26	-
PLTU Tembilahan Tembilahan (CFPP)			80,05	-
PLTU Kalteng Kalteng (CFPP)			88,97	-
PLTU Amurang Amurang (CFPP)			77,83	-
PLTU Anggrek Anggrek (CFPP)			84,07	-
PLTU Ampana Ampana (CFPP)			83,98	-
PLTU Kendari 1-2 Kendari 1-2 (CFPP)			53,72	-
EAF Unit Pembangkitan Batubara (PLTU) EAF of Coal Generation Unit (CFPP)	**95,13**	**91,08**	**84,85**	**(6,24)**

Tabel EAF Unit Pembangkitan Gas dan Non Batubara (Non PLTU) (%)
Table of EAF of Gas and Non-Coal Generation Unit (Non-CFPP) (%)

EAF Unit Pembangkitan EAF of Generation Units	2021	2022	2023	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease (%)
UP Brantas Brantas (U)	97,67	95,71	97,84	2,13
UP Cilacap Cilacap (U)	93,17	91,62	95,59	3,95

EAF Unit Pembangkitan EAF of Generation Units	2021	2022	2023	Peningkatan/ Penurunan/ Increase/ Decrease (%)
UP Muara Karang Muara Karang GU	97,09	93,07	97,70	3,49
UP Muara Tawar Muara Tawar GU	92,72	93,87	98,09	4,71
UP Gresik Gresik GU	97,71	96,52	94,56	(1,93)
PLTMG Bawean Bawean GIPP	-	-	96,34	-
PLTU Suppa Suppa GPP	-	-	79,09	-
PLTMG Arun Arun GIPP	Belum menjadi unit PLN NP Not yet an asset of PLN NP		93,98	-
PLTMG Arun Ekspansi Arun GIPP Expansion			95,16	-
PLTG Sebalang Sebalang GTPP			65,72	-
UPDK Belawan Belawan DGU			89,97	-
UPDK Pekanbaru Pekanbaru DGU			96,36	-
UPDK Bandar Lampung Bandar Lampung DGU			96,47	-
UPDK Pandan Pandan DGU			95,55	-
UPDK Bakaru Bakaru DGU			99,60	-
UPDK Minahasa Minahasa DGU			95,26	-
UPDK Gorontalo Gorontalo DGU			95,98	-
UPDK Kendari Kendari DGU			93,23	-
UPDK Kupang Kupang DGU			98,94	-
UPDK Ballipapan Ballipapan DGU			97,73	-
UPDK Tarakan Tarakan DGU			93,09	-
UPDK Palangkaraya Palangkaraya DGU			95,78	-
UP Sengkang Sengkang GU			94,27	-
EAF Unit Pembangkitan Gas & Non Batubara (Non PLTU) EAF of Gas and Non-Coal Generation Unit (Non CFPP)	**95,31**	**95,16**	**94,73**	**(0,47)**

Grafik EAF Unit Pembangkitan Batubara (PLTU) (%)

Chart of EAF of Coal Generation Unit (CFPP) (%)

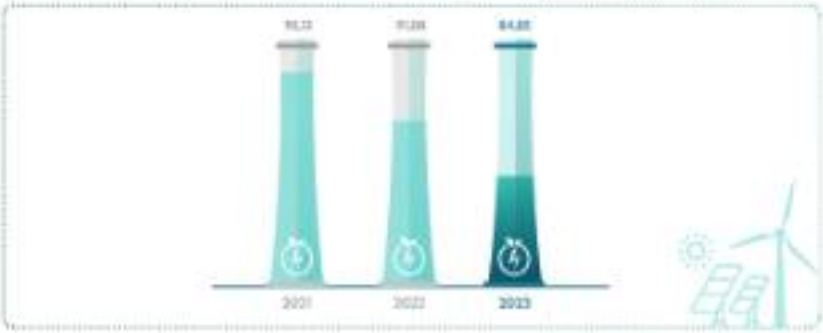

Grafik EAF Unit Pembangkitan Gas dan Non Batubara (Non PLTU) (%)
Chart of EAF of Gas and Non-Coal Generation Unit (Non-CFPP) (%)

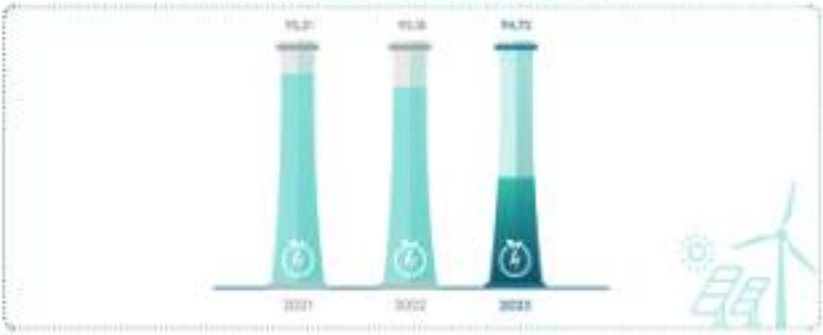

Scheduled Outage Factor (SOF)

SOF of Existing Power Plant

Realisasi SOF PLTU sebesar 11,71% dan SOF non PLTU sebesar 3,53%

The realization of SOF of CFPP was 11.71% and SOF of non-CFPP was 3.53%

SOF adalah indikator untuk mengukur tingkat pembangkit keluar sistem karena pemeliharaan terencana, yaitu *Planned Outage Hour* dan *Maintenance Outage Hour* yang sudah direncanakan sebelumnya. Semakin tinggi nilai SOF menunjukkan pemeliharaan terencana yang dilakukan pada mesin pembangkit lebih banyak (dari sisi durasi). Semakin rendah nilai SOF, maka dinilai semakin baik karena menunjukkan optimasi durasi pemeliharaan yang sudah direncanakan sebelumnya.

SOF is the indicator to measure the level of power plant out of the system due to planned maintenance, namely Planned Outage Hour and Maintenance Outage Hour that has been planned previously. The higher the SOF value, the more planned maintenance is implemented on the power plant (in terms of duration). The lower the SOF value, the better it is due to the optimization of the preplanned maintenance duration.

Nilai SOF unit pembangkitan batubara (PLTU) PLN NP pada tahun 2023 adalah 11,71% meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 6,47%. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh adanya perubahan tipe pemeliharaan periodik per mesin pembangkit untuk pembangkit pasca *Holding Subholding*. Sedangkan nilai SOF unit pembangkitan gas dan non batubara (non PLTU) PLN NP pada tahun 2023 adalah 3,53% menurun dibandingkan tahun 2022 sebesar 4,35%. Penurunan ini dipengaruhi oleh penundaan pemeliharaan periodik karena belum tercapainya running hour.

The SOF value of PLN NP's coal generation unit (CFPP) in 2023 was 11.71%, an increase compared to 2022 of 6.47%. The increase was mainly influenced by changes in the type of periodic maintenance per power plant machine for post-Subholding, Holding power plants. While the SOF value of PLN NP's gas and non-coal (non-CFPP) generation units in 2023 was 3.53%, a decrease compared to 2022 of 4.35%. This decrease is influenced by delays in periodic maintenance because running hours have not been achieved.

Tabel SOF Unit Pembangkitan Batubara (PLTU) (%)
Table of SOF of Coal Generation Unit (CFPP) (%)

SOF Unit Pembangkitan SOF of Generation Units	2021	2022	2023	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease (%)
UP Paiton: Paiton [illegible]	3,88	6,47	6,68	[illegible]
UP Paiton-9: Paiton-9 [illegible]	Belum menjadi aset PLN NP Not yet an asset of PLN NP		[illegible]	-
UP Indramayu: Indramayu [illegible]			[illegible]	-
UP Pembang: Pembang [illegible]			[illegible]	-

SOF Unit Pembangkitan SOF of Generation Units	2021	2022	2023	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease (%)
UP Pacitan Pacitan (GU)	Belum menjadi aset PLN NP Not yet an asset of PLN NP		0.07	-
UP Tanjung Awar-Awar Tanjung Awar-Awar (GU)			10.36	-
UP Temayan Temayan (GU)			13.22	-
UP Kaliori Teluk Kaliori Teluk (GU)			6.71	-
UP Pulang Pisau Pulang Pisau (GU)			11.70	-
UPK Bukit Asam Bukit Asam (GCU)			9.02	-
UPK Sebalang Sebalang (GCU)			0.57	-
UPK Tarahan Tarahan (GCU)			10.50	-
UPK Nagan Raya Nagan Raya (GCU)			13.88	-
UPK Punagaya Punagaya (GCU)			0.44	-
PLTU Tembilahan Tembilahan CFPP			13.28	-
PLTU Belapang Belapang CFPP			0.79	-
PLTU Amurang Amurang CFPP			1.20	-
PLTU Anggrek Anggrek CFPP			5.37	-
PLTU Ampana Ampana CFPP			11.77	-
PLTU Kendari 1-2 Kendari 1-2 CFPP			9.60	-
SOF Unit Pembangkitan Batubara (PLTU) **SOF of Coal Generation Unit (CFPP)**	**3.88**	**6.47**	**11.71**	**38.31**

Tabel SOF Unit Pembangkitan Gas dan Non Batubara (Non PLTU) (%)
Table of SOF of Gas and Non-Coal Generation Unit (Non-CFPP) (%)

SOF Unit Pembangkitan SOF of Generation Unit	2021	2022	2023	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease (%)
UP Bratas Bratas (GU)	5.24	2.27	5.10	(6.47)
UP Ciralia Ciralia (GU)	5.31	3.46	4.79	(29.82)
UP Muara Karang Muara Karang (GU)	5.47	5.50	0.43	(95.07)
UP Muara Tawar Muara Tawar (GU)	0.83	5.78	1.47	(77.05)
UP Gresik Gresik (GU)	1.04	3.03	3.84	26.73
PLTMG Bawean Bawean CFPP	-	-	5.24	-
PLTG Suppa Suppa CFPP	-	-	0.61	-
PLTMG Arun Arun CFPP	Belum menjadi aset PLN NP Not yet an asset of PLN NP		6.03	-
PLTMG Arun Ekspansi Arun CFPP Expansion			5.73	-
PLTU Sebalang Sebalang CFPP			3.66	-
UPDK Belawan Belawan (GCU)			5.72	-
UPDK Pekanbaru Pekanbaru (GCU)			8.95	-
UPDK Bandar Lampung Bandar Lampung (GCU)			3.14	-
UPDK Pandan Pandan (GCU)			6.40	-
UPDK Bakaru Bakaru (GCU)			6.25	-
UPDK Minahasa Minahasa (GCU)			4.26	-
UPDK Gorontalo Gorontalo (GCU)			4.09	-

SOF Unit Pembangkitan SOF of Generation Unit	2021	2022	2023	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease (%)
UPDK Pemalar Bendungan (DCS)			[illegible]	-
UPDK Kapuas Kapuas (DCS)			[illegible]	-
UPDK Balikpapan Balikpapan (DCS)			[illegible]	-
UPDK Tarakan Tarakan (DCS)			[illegible]	-
UPDK Palangkaraya Palangkaraya (DCS)			[illegible]	-
UP Sengkang Sengkang (GI)			[illegible]	-
SOF Unit Pembangkitan Gas & Non Batubara (Non PLTU) SOF of Gas and Non-Coal Generation Unit (Non-CFPP)	3,37	4,35	3,33	(10,85)

Grafik SOF Unit Pembangkitan Batubara (PLTU) (%)
Chart of SOF of Coal Generation Unit (CFPP) (%)

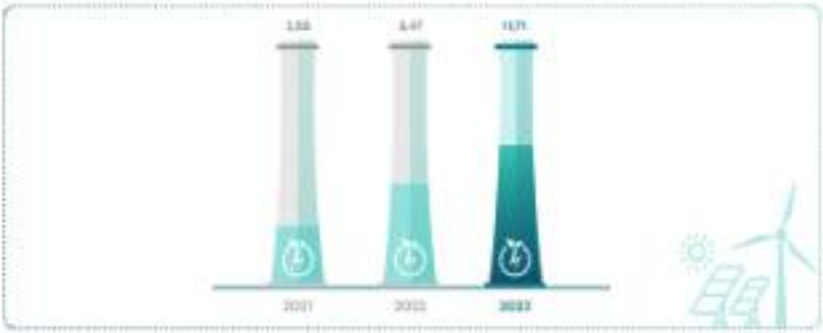

Grafik SOF Unit Pembangkitan Gas dan Non Batubara (Non PLTU) (%)
Chart of SOF of Gas and Non-Coal Generation Unit (Non-CFPP) (%)

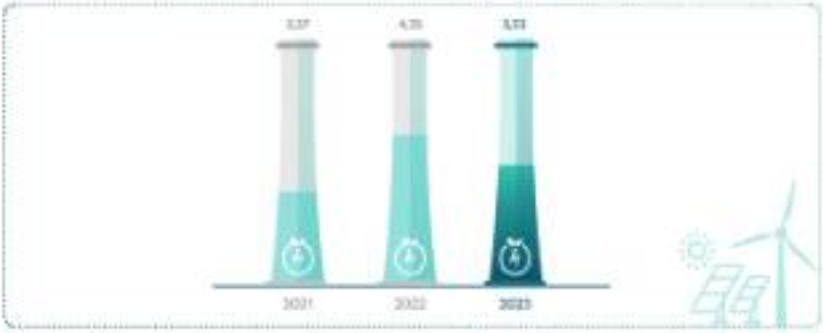

Net Plant Heat Rate (NPHR)

Efisiensi mesin pembangkit thermal diukur berdasarkan indikator *Net Plant Heat Rate*/NPHR. Indikator NPHR bertujuan untuk mengukur efisiensi pemakaian bahan bakar yang dikonversikan ke dalam nilai kalori yang dibutuhkan untuk setiap kWh produksi neto yang dihasilkan oleh unit pembangkit pada suatu periode. Semakin rendah nilai *Net Plant Heat Rate* menunjukkan bahwa pembangkit tersebut semakin efisien.

Nilai NPHR unit pembangkitan batubara (PLTU) PLN NP pada tahun 2023 adalah 3.064,73 kCal/kWh meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 2.797,22 kCal/kWh. Peningkatan heat rate tersebut terutama disebabkan oleh penambahan unit pembangkit pasca Holding Subholding yang mayoritas memiliki kapasitas pembangkit relatif kecil (dibawah 100 MW). Sedangkan nilai NPHR unit pembangkitan gas dan non batubara (non PLTU) PLN NP pada tahun 2023 adalah 2.242,64 kCal/kWh sedikit menurun dibandingkan tahun 2022 sebesar 2.284,33 kCal/kWh. Penurunan heat rate tersebut terutama disebabkan oleh pengoperasian PLTU Gas di Jawa lebih rendah daripada tahun 2022.

Net Plant Heat Rate (NPHR)

The efficiency of thermal power plants is measured based on the Net Plant Heat Rate/NPHR indicator. The NPHR indicator aims to measure the efficiency of fuel consumption converted into the calorific value needed for each kWh of net production generated by the power plant unit in a period. The lower the Net Plant Heat Rate indicates that the power plant is more efficient.

The NPHR value of PLN NP's coal generation unit (CFPP) in 2023 was 3,064.73 kCal/kWh, an increase compared to 2022 of 2,797.22 kCal/kWh. The increase in heat rate was mainly due to the addition of power plant units after Subholding Holding, the majority of which had a relatively small power plant capacity (below 100 MW). While the NPHR value of PLN NP's gas and non-coal (non-CFPP) generation units in 2023 was 2,242.64 kCal/kWh, slightly decreased compared to 2022 of 2,284.33 kCal/kWh. The decrease in the heat rate was mainly due to the operation of the Gas CFPP in Java, which was lower than in 2022.

Tabel NPHR Unit Pembangkitan Batubara (PLTU) (kCal/kWh)
Table of NPHR of Coal Generation Unit (CFPP) (kCal/kWh)

NPHR Unit Pembangkitan NPHR of Generation Unit	2021	2022	2023	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease (%)
UP Paiton: Paiton (U1)	2.749,09	2.797,22	2.995,50	10,00
UP Paiton-P: Paiton-P (U1)	Belum menjadi aset PLN NP Not yet an asset of PLN NP		2.651,04	-
UP Indramayu: Indramayu (U1)			3.875,75	-
UP Bombang: Bombang (U1)			3.844,00	-
UP Pacitan: Pacitan (U1)			2.756,68	-
UP Tanjung Awar-Awar: Tanjung Awar-Awar (U1)			3.744,54	-
UP Tanjung: Tanjung (U1)			3.771,00	-
UP Kaltim Teluk: Kaltim Teluk (U1)			3.472,34	-
UP Pulang Pisau: Pulang Pisau (U1)			4.053,77	-
UPK Bukit Asam: Bukit Asam (U1)			3.847,42	-
UPK Sebelang: Sebelang (U1)			4.303,74	-
UPK Tanahbumbu: Tanahbumbu (U1)			3.480,99	-
UPK Nagan Raya: Nagan Raya (U1)			2.931,88	-
UPK Punagaya: Punagaya (U1)			3.139,76	-
PLTU Tanjungkalian: Tanjungkalian (CFPP)			5.411,09	-
PLTU Selangang: Selangang (CFPP)			4.540,17	-
PLTU Amurang: Amurang (CFPP)			4.540,08	-
PLTU Anggrek: Anggrek (CFPP)			6.261,34	-
PLTU Ampana: Ampana (CFPP)			9.735,16	-
PLTU Kendari 1-2: Kendari 1-2 (CFPP)			5.761,87	-
NPHR Unit Pembangkitan Batubara (PLTU) NPHR of Coal Generation Unit (CFPP)	**2.749,09**	**2.797,22**	**3.064,73**	**9,56**

Tabel NPHR Unit Pembangkitan Gas dan Non Batubara (Non PLTU) (kCal/kWh)
Table of NPHR of Gas and Non-Coal Generation Unit (Non-CFPP) (kCal/kWh)

NPHR Unit Pembangkitan NPHR of Generation Unit	2021	2022	2023	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease (%)
UP Muara Karang Muara Karang GU	2.254,07	2.238,24	[illegible]	(12,48)
UP Muara Tawar Muara Tawar GU	2.467,84	2.363,81	[illegible]	(1,96)
UP Cilegon Cilegon GU	2.321,98	2.288,71	[illegible]	3,08
PLTMG Bawean Bawean GEPP	2.572,67	2.674,90	2.686,20	0,82
PLTD Sugile Sugile DPP	-	-	2.249,78	-
PLTMG Arun Arun GEPP	Belum menjadi aset PLN NP Not yet an asset of PLN NP		2.294,09	-
PLTMG Arun Skopanal			2.322,57	-
PLTD Sebelang Arun GEPP Expansion			4.964,41	-
UPDK Belawan Belawan GCU			2.408,06	-
UPDK Pekanbaru Pekanbaru GCU			2.359,05	-
UPDK Bandar Lampung Bandar Lampung GCU			3.495,46	-
UPDK Minahasa Minahasa GCU			2.505,08	-
UPDK Gorontalo Gorontalo GCU			2.675,99	-
UPDK Bandar Bandar GCU			2.476,28	-
UPDK Kupang Kupang GCU			2.521,41	-
UPDK Ballopapan Ballopapan GCU			2.405,83	-
UPDK Tarakan Tarakan GCU			2.469,66	-
UPDK Palangkaraya Palangkaraya GCU			2.264,59	-
UP Sengkang Sengkang GU			2.471,06	-
NPHR Unit Pembangkitan Gas & Non Batubara (Non PLTU) NPHR of Gas and Non-Coal Generation Unit (Non-CFPP)	**2.361,72**	**2.384,33**	**2.243,14**	**(1,78)**

Grafik NPHR Unit Pembangkitan Batubara (PLTU) (kCal/kWh)
Chart of NPHR of Coal Generation Unit (CFPP) (kCal/kWh)

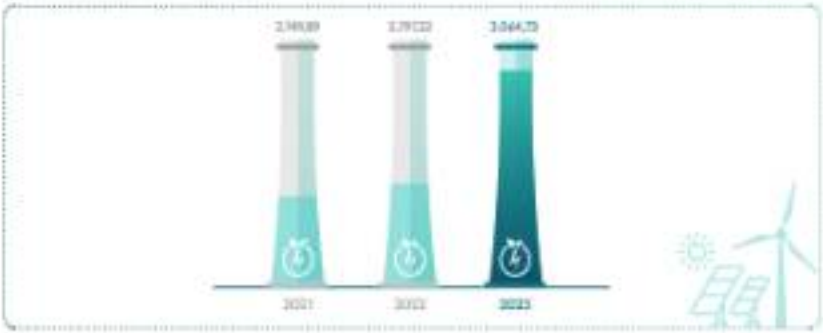

Grafik NPHR Unit Pembangkitan Gas dan Non Batubara (Non PLTU) (kCal/kWh)
Chart of NPHR of Gas and Non-Coal Generation Unit (Non-CFPP) (kCal/kWh)

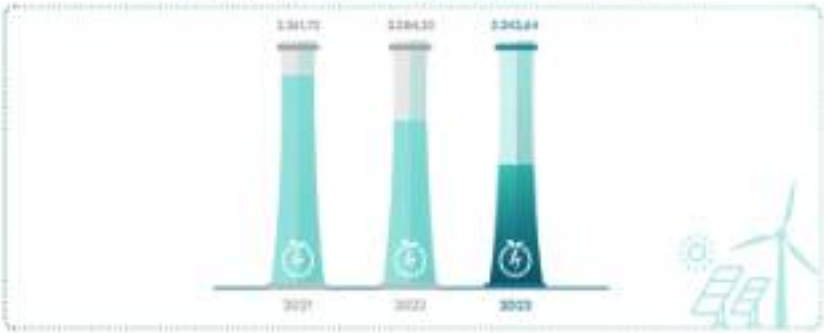

Faktor Gangguan Pembangkit

Outage factors of Power Plant

Faktor gangguan mesin pembangkit diukur berdasarkan indikator Equivalent Forced Outage Rate (EFOR) dan Sudden Outage Frequency (SdOF).

The outage factor of power plants is measured based on the Equivalent Forced Outage Rate (EFOR) and Sudden Outage Frequency (SdOF) indicators.

Equivalent Forced Outage Rate (EFOR)

EFOR merupakan indikator untuk mengukur tingkat mesin pembangkit keluar paksa atau ketidaksiapan unit untuk beroperasi karena gangguan. Semakin rendah nilai EFOR menunjukkan penanganan gangguan semakin cepat.

Nilai EFOR unit pembangkitan batubara (PLTU) PLN NP pada tahun 2023 adalah 3,95% meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 0,47%. Sedangkan nilai EFOR unit pembangkitan gas dan non batubara (non PLTU) PLN NP pada tahun 2023 adalah 2,93% meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 0,41%. Peningkatan nilai EFOR tersebut terutama disebabkan oleh adanya penyelesaian chronic problem unit pembangkit Holding Subholding.

EFOR of Existing Power Plant

EFOR is the indicator to measure the reliability level of power plants to operate during an outage or the inability of the unit to operate due to interference. The lower the EFOR value, the faster the outage is handled.

The EFOR value of PLN NP's coal generation unit (CFPP) in 2023 was 3.95%, an increase compared to 2022 of 0.47%. While the EFOR value of PLN NP's gas and non-coal generation units (non-CFPP) in 2023 was 2.93%, an increase compared to 2022 by 0.41%. The increase in the EFOR value was mainly due to the completion of the chronic problem of the Holding Subholding power plant unit.

Tabel EFOR Unit Pembangkitan Batubara (PLTU) (%)
Table of EFOR of Coal Generation Unit (CFPP) (%)

EFOR Unit Pembangkitan EFOR of Generation Unit	2021	2022	2023	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease (%)
UP Pelton Pelton (U)	0,93	3,47	1,05	(53,40)
UP Pelton-II Pelton-II (U)	Belum menjadi aset PLN NP Not yet an asset of PLN NP		3,50	-
UP Indonesiayu Indonesiayu (U)			3,49	-
UP Bentiang Bentiang (U)			0,84	-
UP Pechan Pechan (U)			3,15	-
UP Tanjung Awar-Awar Tanjung Awar-Awar (U)			3,49	-
UP Tempian Tempian (U)			3,04	-

EFOR Unit Pembangkitan EFOR of Generation Unit	2021	2022	2023	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease (%)
UP Kaltim Teluk Kaltim Teluk GU	Belum menjadi aset PLN NP Not yet an asset of PLN NP		0,01	-
UP Pulang Pisau Pulang Pisau GU			3,08	-
UPK Bukit Asam Bukit Asam GCU			11,93	-
UPK Sebalang Sebalang GCU			4,34	-
UPK Tanahair Tanahair GCU			1,38	-
UPK Nagan Raya Nagan Raya GCU			8,51	-
UPK Punagaya Punagaya GCU			4,81	-
PLTU Tembilahan Tembilahan CFPP			0,67	-
PLTU Ketapang Ketapang CFPP			0,73	-
PLTU Amurang Amurang CFPP			1,13	-
PLTU Anggrek Anggrek CFPP			18,14	-
PLTU Ampana Ampana CFPP			2,48	-
PLTU Kendari 1-2 Kendari 1-2 CFPP			11,98	-
EFOR Unit Pembangkitan Batubara (PLTU) EFOR of Coal Generation Unit (CFPP)	0,72	0,47	2,15	370,21

Tabel EFOR Unit Pembangkitan Gas dan Non Batubara (Non PLTU) (%)
Table of EFOR of Gas and Non-Coal Generation Unit (Non-CFPP) (%)

EFOR Unit Pembangkitan EFOR of Generation Unit	2021	2022	2023	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease (%)
UP Bontang Bontang GU	0,09	0,03	0,09	-
UP Cilegon Cilegon GU	11,97	1,44	0,93	(93,06)
UP Muara Karang Muara Karang GU	0,60	0,60	0,34	(43,33)
UP Muara Tawar Muara Tawar GU	0,78	0,63	0,53	(16,67)
UP Gresik Gresik GU	1,40	0,11	1,97	1.545,67
PLTMG Bawean Bawean GFPP	-	-	0,07	-
PLTD Suppa Suppa DPP	-	-	44,22	-
PLTMG Arun Arun GFPP	Belum menjadi aset PLN NP Not yet an asset of PLN NP		1,46	-
PLTMG Arun Rapuana Arun GFPP Expansion			1,39	-
PLTG Sebalang Sebalang GFPP			85,53	-
UPDK Belawan Belawan DCU			11,66	-
UPDK Pekanbaru Pekanbaru DCU			1,70	-
UPDK Bandar Lampung Bandar Lampung DCU			0,67	-
UPDK Pandan Pandan DCU			0,79	-
UPDK Bakauni Bakauni DCU			0,06	-
UPDK Minahasa Minahasa DCU			1,03	-
UPDK Gorontalo Gorontalo DCU			0,53	-

EFOR Unit Pembangkitan EFOR of Generation Unit	2021	2022	2023	Peningkatan/ Penurunan/ Increase/ Decrease (%)
UPDK Bandar Bandar (GCU)			8,77	-
UPDK Kapuas Kapuas (GCU)			0,00	-
UPDK Balikpapan Balikpapan (GCU)			15,39	-
UPDK Tarakan Tarakan (GCU)			2,49	-
UPDK Palangkaraya Palangkaraya (GCU)			0,57	-
UP Sengkang Sengkang (GU)			2,19	-
EFOR Unit Pembangkitan Gas & Non Batubara (Non PLTU) EFOR of Gas and Non-Coal Generation Unit (Non-CFPP)	3,51	0,41	3,93	858,53

Grafik EFOR Unit Pembangkitan Batubara (PLTU) (%)
Chart of EFOR of Coal Generation Unit (CFPP) (%)

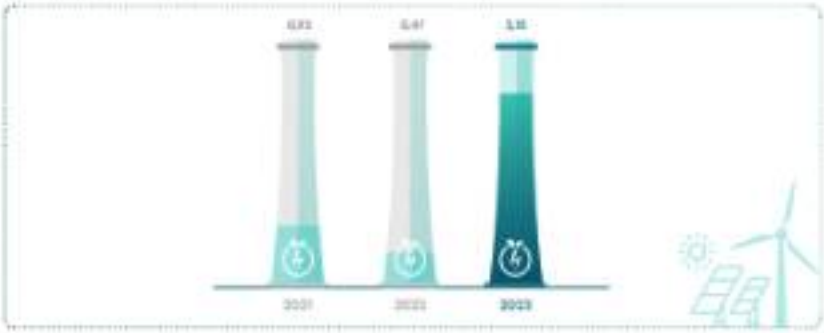

Grafik SOF Unit Pembangkitan Gas dan Non Batubara (Non PLTU) (%)
Chart of EFOR of Gas and Non-Coal Generation Unit (Non-CFPP) (%)

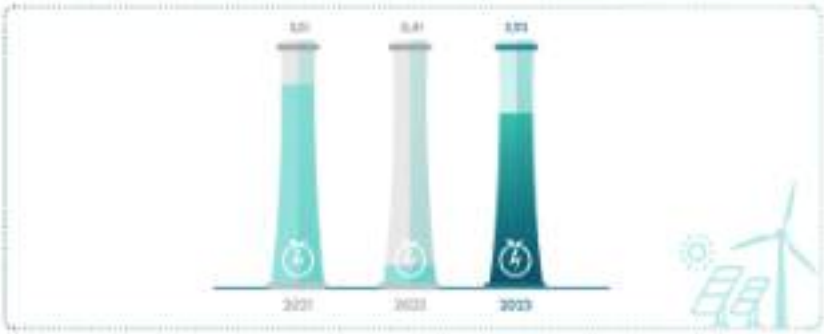

Sudden Outage Frequency (SdOF)

SdOF merupakan indikator yang menunjukkan jumlah gangguan yang terjadi dalam periode tertentu, terutama frekuensi terjadinya gangguan yang berulang. Semakin rendah nilai SdOF maka semakin baik.

Nilai SdOF unit pembangkitan batubara (PLTU) PLN NP pada tahun 2023 adalah 3,81 kali/unit, meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 1,0 kali/unit, sedangkan nilai SdOF unit pembangkitan gas dan non batubara (non PLTU) PLN NP pada tahun 2023 adalah 1,30 kali/unit, meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 0,81 kali/unit. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh adanya peningkatan jumlah pembangkit pasca Holding Subholding yang dikelola oleh PLN NP.

SdOF of Existing Power Plant

SdOF is the indicator that shows the number of outage that occurs within a certain period, especially the frequency of repeated outage. The lower the SdOF value, the better.

The SdOF value of PLN NP's coal generation unit (CFPP) in 2023 was 3.81 times/unit, an increase compared to 2022 of 1.0 times/unit, while the SdOF value of PLN NP's gas and non-coal generation unit (non-CFPP) in 2023 was 1.30 times/unit, an increase compared to 2022 of 0.81 times/unit. The increase was influenced by an increase in the number of post-Holding Subholding power plants managed by PLN NP.

Tabel SdOF Unit Pembangkitan Batubara (PLTU) (kali/unit)
Table of SdOF of Coal Generation Unit (CFPP) (times/unit)

SdOF Unit Pembangkitan SdOF of Generation Unit	2021	2022	2023	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease (%)
UP Paiton: Paiton (U)	2,00	1,00	0,00	(100,00)
UP Paiton II: Paiton II (U)	Belum menjadi aset PLN NP Not yet an asset of PLN NP		1,00	-
UP Indramayu: Indramayu (U)			1,00	-
UP Rembang: Rembang (U)			1,50	-
UP Pacitan: Pacitan (U)			0,50	-
UP Tanjung Awar-Awar: Tanjung Awar-Awar (U)			0,50	-
UP Tarahan: Tarahan (U)			1,50	-
UP Bakbir: Teluk Sabin Teluk (U)			3,00	-
UP Pulang Pisau: Pulang Pisau (U)			2,00	-
UPK Bukit Asam: Bukit Asam (UOU)			2,25	-
UPK Sebalang: Sebalang (UOU)			3,00	-
UPK Tanahair: Tanahair (UOU)			1,50	-
UPK Nagan Raya: Nagan Raya (UOU)			6,00	-
UPK Punagaya: Punagaya (UOU)			1,50	-
PLTU Tanjungbalai: Tanjungbalai (CFPP)			4,00	-
PLTU Ketapang: Ketapang (CFPP)			1,50	-
PLTU Amurang: Amurang (CFPP)			0,50	-
PLTU Anggrek: Anggrek (CFPP)			9,00	-
PLTU Ampana: Ampana (CFPP)			2,50	-
PLTU Bangka 1-2: Bangka 1-2 (CFPP)			4,50	-
SdOF Unit Pembangkitan Batubara (PLTU) **SdOF of Coal Generation Unit (CFPP)**	**2,00**	**1,00**	**3,81**	**181,00**

Tabel SdOF Unit Pembangkitan Gas dan Non Batubara (Non PLTU) (kali/unit)
Table of SdOF of Gas and Non-Coal Generation Unit (Non-CFPP) (times/unit)

SOF Unit Pembangkitan SdOF of Generation Unit	2021	2022	2023	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease (%)
UP Bontang Bontang GU	0.40	0.24	0.23	475.00
UP Cinta Cinta GU	1.38	1.00	0.50	(50.00)
UP Muara Karang Muara Karang GU	0.90	1.03	0.77	(0.17)
UP Muara Tawar Muara Tawar GU	1.50	0.88	0.50	(41.18)
UP Gresik Gresik GU	0.23	0.39	0.61	56.41
PLTMG Bawean Bawean GEPP	-	-	5.00	-
PLTD Suppa Suppa DPP	-	-	13.00	-
PLTMG Arun Arun GEPP	Belum menjadi aset PLN NP Not yet an asset of PLN NP		0.79	-
PLTMG Arun Ekspansi Arun GEPP Expansion			4.69	-
PLTG Sebelang Sebelang GTPP			2.00	-
UPDK Belawan Belawan GCU			1.70	-
UPDK Pekanbaru Pekanbaru GCU			3.08	-
UPDK Bandar Lampung Bandar Lampung GCU			0.94	-
UPDK Pandan Pandan GCU			0.89	-
UPDK Bakaru Bakaru GCU			0.56	-
UPDK Minahasa Minahasa GCU			1.33	-
UPDK Gorontalo Gorontalo GCU			1.14	-
UPDK Kendari Kendari GCU			0.59	-
UPDK Kupang Kupang GCU			0.38	-
UPDK Balikpapan Balikpapan GCU			0.38	-
UPDK Tarakan Tarakan GCU			2.67	-
UPDK Palangkaraya Palangkaraya GCU			3.06	-
UP Sengkang Sengkang GU			2.00	-
SdOF Unit Pembangkitan Gas & Non Batubara (Non PLTU) SdOF of Gas and Non-Coal Generation Unit (Non-CFPP)	**0.88**	**0.61**	**1.30**	**113.11**

Grafik SdOF Unit Pembangkitan Batubara (PLTU) (kali/unit)
Chart of SdOF of Coal Generation Unit (CFPP) (times/unit)

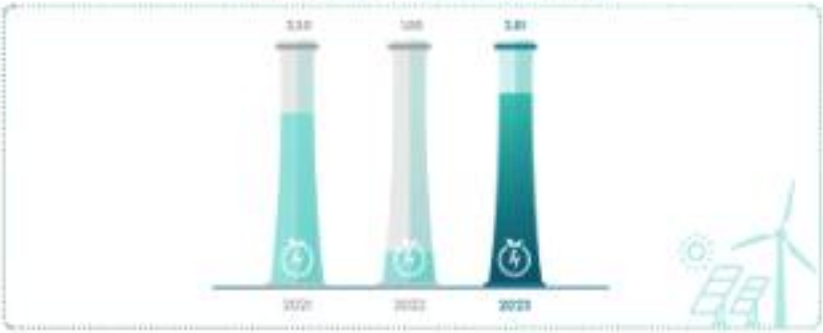

Grafik SdOF Unit Pembangkitan Gas dan Non Batubara (Non PLTU) (kali/unit)
Chart of SdOF of Gas and Non-Coal Generation Unit (Non-CFPP) (times/unit)

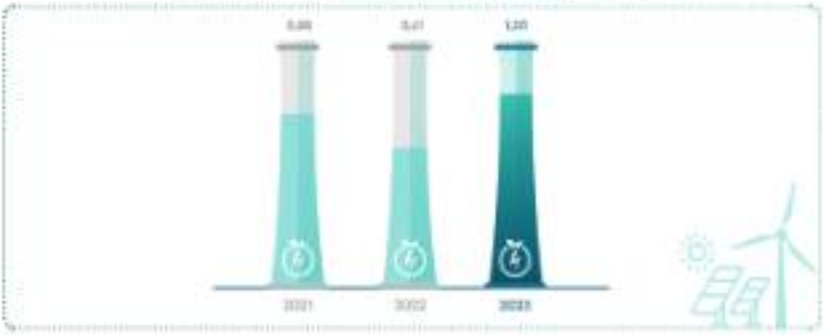

Faktor Efisiensi Pembangkit

Efficiency Factors of Power Plant

Untuk meningkatkan efisiensi pembangkit pada tahun 2023 terdapat KPI SFC (Specific Fuel Consumption) yang dibagi menjadi 3 sesuai dengan jenis bahan bakar yaitu Batubara, Gas dan Minyak (BBM). Specific Fuel Consumption (SFC) adalah rasio perbandingan total konsumsi bahan bakar terhadap daya listrik yang dibangkitkan. SFC digunakan sebagai salah satu cara untuk mengetahui seberapa efisien sebuah mesin pembangkit dan salah satu penentu biaya produksi khususnya biaya bahan bakar yang dipertukan dalam pembangkit. Dengan demikian, semakin tinggi nilai SFC menunjukkan semakin efisien pengoperasian pembangkit.

There is a KPI SFC (Specific Fuel Consumption), which is divided into three according to the type of fuel, namely Coal, Gas, and Oil (BBM), to improve the efficiency of the power plant in 2023. Specific Fuel Consumption (SFC) is the ratio of total fuel consumption to electrical power generated. SFC is used as a way to determine how efficient a power plant engine is and one of the determinants of production costs, especially the cost of fuel required in the power plant. Therefore, the higher the SFC value, the more efficient the power plant operation is.

SFC Batubara SFC of Coal	SFC Gas SFC of Gas	SFC Minyak (BBM) SFC of Oil (BBM)
0,6617 kg/kWh	0,0086 MMBTU/kWh	0,2855 Liter/kWh

Daya Terpasang Pembangkit (DTP)

Installed Capacity of Power Plant

Daya Terpasang Pembangkit (DTP) merupakan daya yang terlisna sesuai dengan setiap mesin pembangkit. Dari total DTP sistem kelistrikan di Indonesia 72.976,30 MW, saat ini PLN NP memiliki total DTP sebesar 18.571,04 MW atau mencapai 25,45% dari DTP sistem kelistrikan di Indonesia. DTP Unit Pembangkitan Batubara (PLTU) sebesar 6.261,35 MW, yaitu mencapai 8,58% dari DTP Sistem Kelistrikan Indonesia, dan DTP Unit Pembangkitan Gas dan Non Batubara (Non PLTU) sebesar 12.311,69 MW yaitu mencapai 16,87% dari DTP Sistem Kelistrikan Indonesia.

The Installed Capacity of Power Plant (DTP) is the power listed according to each power plant engine. Of the total DTP of the electricity system in Indonesia of 72.976,30 MW, PLN NP currently has a total DTP of 18.571,04 MW or 25,45% of the DTP of the electricity system in Indonesia. The DTP of the Coal Generation Unit (CFPP) was 6.261,35 MW, which reached 8,58% of the DTP of Indonesia's Electricity System, and the DTP of the Gas and Non-Coal Generation Unit (Non-CFPP) was 12.311,69 MW, which reached 16,87% of the DTP of Indonesia's Electricity System.

Tabel DTP Unit Pembangkitan Batubara (PLTU) (%)
Table of DTP of Coal Generation Unit (CFPP) (%)

Unit Pembangkitan Generation Unit	DTP	
	MW	(%)
UP Paiton: Paiton GU	[illegible]	[illegible]
UP Paiton-P Paiton-P GU	[illegible]	[illegible]
UP Indramayu Indramayu GU	[illegible]	[illegible]
UP Rembang Rembang GU	[illegible]	[illegible]
UP Pacitan Pacitan GU	[illegible]	[illegible]
UP Tanjung Awan Awan Tanjung Awan Awan GU	[illegible]	[illegible]
UP Tenayan Tenayan GU	[illegible]	[illegible]
UP Kaltim Teluk Kaltim Teluk GU	[illegible]	[illegible]
UP Pulang Pisau Pulang Pisau GU	[illegible]	[illegible]
UPK Bukit Asam Bukit Asam GUU	[illegible]	[illegible]
UPK Sebalang Sebalang GUU	[illegible]	[illegible]
UPK Tarahan Tarahan GUU	[illegible]	[illegible]
UPK Nagan Raya Nagan Raya GUU	[illegible]	[illegible]
UPK Pumapaya Pumapaya GUU	[illegible]	[illegible]
PLTU Tembilahan Tembilahan CFPP	[illegible]	[illegible]
PLTU Ketapang Ketapang CFPP	[illegible]	[illegible]
PLTU Amurang Amurang CFPP	[illegible]	[illegible]
PLTU Anggrek Anggrek CFPP	[illegible]	[illegible]
PLTU Ampana Ampana CFPP	[illegible]	[illegible]
PLTU Kendari 1-2 Kendari 1-2 CFPP	[illegible]	[illegible]
DTP Unit Pembangkitan Batubara (PLTU) **DTP of Coal Generation Unit (CFPP)**	**[illegible]**	**[illegible]**

Tabel DTP Unit Pembangkitan Gas dan Non Batubara (Non PLTU)
Table of DTP of Gas and Non-Coal Generation Unit (Non CFPP)

Unit Pembangkitan Generation Unit	DTP	
	MW	(%)
UP Bratas Bratas GU	[illegible]	[illegible]
UP Cirata Cirata GU	[illegible]	[illegible]
UP Muara Karang Muara Karang GU	[illegible]	[illegible]
UP Muara Tawar Muara Tawar GU	[illegible]	[illegible]
UP Cawang Cawang GU	[illegible]	[illegible]
PLTMG Bawean Bawean GEPP	[illegible]	[illegible]
PLTD Suppa Suppa DPP	[illegible]	[illegible]
PLTMG Arun Arun GEPP	[illegible]	[illegible]
PLTMG Arun Blapang Arun GEPP Expansion	[illegible]	[illegible]
PLTU Sebalang Sebalang CFPP	[illegible]	[illegible]

Unit Pembangkitan Generation Unit	DIP	
	MW	(%)
UPDK Belawan Belawan (GCU)	1.275,80	1,75
UPDK Pekanbaru Pekanbaru (GCU)	3.017	0,49
UPDK Bandar Lampung Bandar Lampung (GCU)	338,01	0,54
UPDK Pandan Pandan (GCU)	139,50	0,19
UPDK Bakaru Bakaru (GCU)	149,91	0,70
UPDK Minahasa Minahasa (GCU)	211,67	0,29
UPDK Gorontalo Gorontalo (GCU)	114,08	1,17
UPDK Bandar Bandar (GCU)	80,37	0,32
UPDK Kupang Kupang (GCU)	187,57	0,36
UPDK Ballikpapan Ballikpapan (GCU)	54,5	0,08
UPDK Tarakan Tarakan (GCU)	43,57	0,9
UPDK Palangkaraya Palangkaraya (GCU)	155,44	0,21
UP Sengkang Sengkang (GU)	115	0,43
DIP Unit Pembangkitan Gas & Non Batubara (Non PLTU) DIP of Gas and Non-Coal Generation Unit (Non CFPP)	**12.371,89**	**16,97**

Tabel Total DIP Unit Pembangkitan PLN NP
Table of Total DIP of PLN NP's Generation Unit

Unit Pembangkitan Generation Unit	DIP	
	MW	(%)
DIP Unit Pembangkitan Batubara (PLTU) DIP of Coal Generation Unit (CFPP)	6.141,35	8,58
DIP Unit Pembangkitan Gas dan Non Batubara (Non PLTU) DIP of Gas and Non-Coal Generation Unit (Non CFPP)	12.371,89	16,97
Total DIP	**18.573,24**	**25,45**

Daya Mampu Neto (DMN)
Net Dependable Capacity

Daya Mampu Neto PLN NP sebesar 15.855,67 MW atau berkontribusi sebesar 23,40% terhadap Sistem Kelistrikan Indonesia

PLN NP's Net Dependable Capacity was 15,855.67 MW or contributed 23.40% to Indonesia's Electricity System

Kapasitas Daya Mampu Neto (DMN) adalah daya mampu pembangkit dalam satuan Mega Watt berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian yang dituangkan dalam Sertifikat Laik Operasi. Daya Mampu Netto Sistem Kelistrikan Indonesia adalah sebesar 67.790,10 MW, sedangkan DMN PLN NP sebesar 15.855,67 MW, atau memberikan kontribusi di Sistem Kelistrikan Indonesia sebesar 23,40%.

Net Dependable Capacity (NDC) is the power plant's capacity in Mega Watt based on the examination and testing results as outlined in the Commissioning Certificate. The Net Dependable Capacity of Indonesia's Electricity System was 67,790.10 MW, while the NDC of PLN NP was 15,855.67 MW, or contributed to Indonesia's Electricity System by 23.40%.

Tabel DMN Unit Pembangkitan Batubara (PLTU)
Table of MDC of Coal Generation Unit (CFPP)

Unit Pembangkitan Generation Unit	DMN	
	MW	(%)
UP Paiton Paiton (U)	[illegible]	[illegible]
UP Paiton-9 Paiton-9 (U)	[illegible]	[illegible]
UP Indramayu Indramayu (U)	[illegible]	[illegible]
UP Rembang Rembang (U)	[illegible]	[illegible]
UP Pacitan Pacitan (U)	[illegible]	[illegible]
UP Tanjung Awar-Awar Tanjung Awar-Awar (U)	[illegible]	[illegible]
UP Tanjungan Tanjungan (U)	[illegible]	[illegible]
UP Kaltim Teluk Kaltim Teluk (U)	[illegible]	[illegible]
UP Pulang Pisau Pulang Pisau (U)	[illegible]	[illegible]
UPK Bukit Asam Bukit Asam (GOU)	[illegible]	[illegible]
UPK Sebalang Sebalang (GOU)	[illegible]	[illegible]
UPK Tarahan Tarahan (GOU)	[illegible]	[illegible]
UPK Inalum Raya Inalum Raya (GOU)	[illegible]	[illegible]
UPK Pomalaya Pomalaya (GOU)	[illegible]	[illegible]
PLTU Tembilahan Tembilahan CFPP	[illegible]	[illegible]
PLTU Belapang Belapang CFPP	[illegible]	[illegible]
PLTU Amurang Amurang CFPP	[illegible]	[illegible]
PLTU Anggrek Anggrek CFPP	[illegible]	[illegible]
PLTU Ampana Ampana CFPP	[illegible]	[illegible]
PLTU Kendari 1-2 Kendari 1-2 CFPP	[illegible]	[illegible]
DMN Unit Pembangkitan Batubara (PLTU) MDC of Coal Generation Unit (CFPP)	**[illegible]**	**[illegible]**

Tabel DMN Unit Pembangkitan Gas dan Non Batubara (Non PLTU)
Table of MDC of Gas and Non-Coal Generation Unit (Non CFPP)

Unit Pembangkitan Generation Unit	DMN	
	MW	(%)
UP Bontang Bontang (U)	[illegible]	[illegible]
UP Cilacap Cilacap (U)	[illegible]	[illegible]
UP Muara Karang Muara Karang (U)	[illegible]	[illegible]
UP Muara Tawar Muara Tawar (U)	[illegible]	[illegible]
UP Grissik Grissik (U)	[illegible]	[illegible]
PLTMG Sawean Sawean (GFPP)	[illegible]	[illegible]
PLTD Tuapoe Tuapoe (DFPP)	[illegible]	[illegible]
PLTMG Arun Arun (GFPP)	[illegible]	[illegible]
PLTMG Arun Expansion Arun (GFPP Expansion)	[illegible]	[illegible]
PLTU Sebalang Sebalang (CFPP)	[illegible]	[illegible]

Unit Pembangkitan Generation Unit	DMN	
	MW	(%)
UPDK Belawan Belawan (GCU)	104,704	1,24
UPDK Pekanbaru Pekanbaru (GCU)	378,93	5,41
UPDK Bandar Lampung Bandar Lampung (GCU)	40,08	0,54
UPDK Pandan Pandan (GCU)	120,60	0,59
UPDK Bakaru Bakaru (GCU)	154,89	0,70
UPDK Minahasa Minahasa (GCU)	350,345	1,31
UPDK Gorontalo Gorontalo (GCU)	105,50	0,59
UPDK Bandar Bandar (GCU)	54,41	0,08
UPDK Kupang Kupang (GCU)	154,23	0,70
UPDK Ballikpapan Ballikpapan (GCU)	30,78	0,05
UPDK Tarakan Tarakan (GCU)	53,32	0,08
UPDK Palangkaraya Palangkaraya (GCU)	127,60	0,20
UP Sengkang Sengkang (GU)	372,96	5,47
DMN Unit Pembangkitan Gas & Non Batubara (Non PLTU) NDC of Gas and Non-Coal Generation Unit (Non CFPP)	**10,387,67**	**15,46**

Tabel Total DMN Unit Pembangkitan PLN NP
Table of Total NDC of PLN NP's Generation Unit

Unit Pembangkitan Generation Unit	DTP	
	MW	(%)
DMN Unit Pembangkitan Batubara (PLTU) NDC of Coal Generation Unit (CFPP)	5,468	8,14
DMN Unit Pembangkitan Gas dan Non Batubara (Non PLTU) NDC of Gas and Non-Coal Generation Unit (Non CFPP)	10,387,67	15,46
Total DMN Total NDC	**15,855,67**	**23,60**

Net Capacity Factor (NCF)
Net Capacity Factor

Realisasi NCF unit pembangkitan batubara (PLTU) sebesar 70,18% dan NCF unit pembangkitan gas dan non batubara (non PLTU) sebesar 32,71%

The realization of NCF for coal generation units (CFPP) was 70,18% and NCF for gas and non-coal generation units (non-CFPP) was 32,71%.

Net Capacity Factor (NCF) adalah rasio antara total produksi netto dengan daya mampu netto unit pembangkit dikali dengan jam periode tertentu. Semakin tinggi nilai NCF maka semakin baik tingkat utilisasi unit pembangkit.

Net Capacity Factor (NCF) is the ratio between total net production and net dependable capacity of a power plant unit multiplied by the hours of a certain period. The higher the NCF value, the better the utility level of power plant unit.

Pada tahun 2023, Nilai NCF unit pembangkitan batubara (PLTU) PLN NP pada tahun 2023 adalah 70,98% sedikit meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 68,15%. Sedangkan nilai NCF unit pembangkitan gas dan non batubara (non PLTU) PLN NP pada tahun 2023 adalah 32,71% sedikit meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 28,02%. Peningkatan NCF tersebut terutama disebabkan oleh adanya penambahan unit pembangkit dan peningkatan kapasitas pembangkit yang dikelola oleh PLN NP.

In 2023, the NCF value of PLN NP's coal generation unit (CFPP) in 2023 was 70.98%, a slight increase compared to 2022 of 68.15%. While the NCF value of PLN NP's gas and non-coal generation units (non-CFPP) in 2023 was 32.71%, a slight increase compared to 2022 of 28.02%. The increase in NCF was mainly due to the addition of power plant units and an increase in power plant capacity managed by PLN NP.

Tabel NCF Unit Pembangkitan Batubara (PLTU) (%)
Table of NCF of Coal Generation Unit (CFPP) (%)

NCF Unit Pembangkitan NCF of Generation Unit	2021	2022	2023	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease (%)
UP Paiton Paiton (1)(2)	80,80	68,15	66,67	(2,17)
UP Paiton-II Paiton-II (3)	Belum menjadi aset PLN NP Not yet an asset of PLN NP		83,77	-
UP Indramayu Indramayu (1)			77,44	-
UP Rembang Rembang (1)			79,00	-
UP Pacitan Pacitan (1)			74,68	-
UP Tanjung Awar-Awar Tanjung Awar-Awar (1)			80,39	-
UP Tanjung Tanjung (1)			67,13	-
UP Kaltim Teluk Kaltim Teluk (1)			64,77	-
UP Pulang Pisau Pulang Pisau (1)			71,17	-
UPK Bukit Asam Bukit Asam (1)(3)			86,73	-
UPK Sebangka Sebangka (1)(3)			83,80	-
UPK Tanahair Tanahair (1)(3)			84,66	-
UPK Nagan Raya Nagan Raya (1)(3)			67,97	-
UPK Punagaya Punagaya (1)(3)			76,79	-
PLTU Tembilahan Tembilahan CFPP			77,72	-
PLTU Belitung Belitung CFPP			85,70	-
PLTU Amurang Amurang CFPP			90,60	-
PLTU Anggrek Anggrek CFPP			29,55	-
PLTU Ampana Ampana CFPP			33,08	-
PLTU Bandar Lampung Bandar Lampung CFPP			38,77	-
NCF Unit Pembangkitan Batubara (PLTU) **NCF of Coal Generation Unit (CFPP)**	**80,80**	**68,15**	**70,98**	**2,98**

Tabel NCF Unit Pembangkitan Gas dan Non Batubara (Non PLTU) (%)
Table of NCF of Gas and Non-Coal Generation Unit (Non CFPP) (%)

NCF Unit Pembangkitan NCF of Generation Unit	2021	2022	2023	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease (%)
UP Bratan Bratan (1)(3)	54,07	60,04	46,08	(23,25)
UP Cirata Cirata (1)(3)	14,95	18,93	13,80	(26,39)
UP Muara Karang Muara Karang (1)(3)	46,54	28,30	42,42	49,89
UP Muara Tawar Muara Tawar (1)(3)	73,00	71,68	51,03	(28,85)

NCF Unit Pembangkitan NCF of Generation Unit	2021	2022	2023	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease (%)
UP Cilacap Cilacap CGU	33,54	30,23	40,34	33,36
PLTMG Bawean Bawean GBPP	75,44	98,60	96,95	(1,40)
PLTD Suppa Suppa DPP	7,38	7,38	9,89	(47,20)
PLTMG Aceh Aceh GBPP	Belum menjadi aset PLN NP Not yet an asset of PLN NP		38,60	-
PLTMG Arun Eksplorasi Arun GBPP Ekspansion			54,28	-
PLTG Sebangka Sebangka GTPP			2,70	-
UPDK Bekasan Bekasan DGU			54,46	-
UPDK Pekanbaru Pekanbaru DGU			40,98	-
UPDK Bandar Lampung Bandar Lampung DGU			30,71	-
UPDK Pandan Pandan DGU			48,07	-
UPDK Bakaru Bakaru DGU			16,70	-
UPDK Minahasa Minahasa DGU			20,60	-
UPDK Gorontalo Gorontalo DGU			26,39	-
UPDK Bandar Bandar DGU			25,74	-
UPDK Kupang Kupang DGU			11,06	-
UPDK Balikpapan Balikpapan DGU			2,20	-
UPDK Tarakan Tarakan DGU			53,09	-
UPDK Palangkaraya Palangkaraya DGU			20,50	-
UP Sengkang Sengkang GU			-4,71	-
NCF Unit Pembangkitan Gas & Non Batubara (Non PLTU) **NCF of Gas and Non-Coal Generation Unit (Non CFPP)**	**28,72**	**28,03**	**32,71**	**16,70**

Pemakaian Bahan Bakar

Fuel Consumption

Pemakaian bahan bakar untuk pembangkit di tahun 2023 masih didominasi bahan bakar batubara sebanyak 23,710,995 ton, biomassa sebanyak 465,534 ton, gas alam sebanyak 202,268 BBTU, MFO sebanyak 50,891 kL, dan HSD sebanyak 301,921 kL, dengan pemakaian energy mix sebagai berikut:

Fuel consumption for power plants in 2023 was still dominated by coal fuel of 23,710,995 tons, biomass of 465,534 tons, natural gas of 202,268 BBTU, MFO of 50,891 kL, and HSD of 301,921 kL, with the following energy mix:

Tabel Pemakaian Bahan Bakar

Table of Fuel Consumption

Jenis Bahan Bakar Fuel Types	Satuan Unit	2021	2022	2023	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
					%	Nominal
Batubara Coal	ton	22,815,978	22,775,238	23,710,995	704,36	935,758
Gas Alam Natural Gas	BBTU	106,000	80,362	202,268	151,94	121,906
HSD	kL	174,189	30,175	301,921	2884,88	271,746
MFO	kL	89,857	50,836	50,891	115,89	26,375
Biomassa	ton	81,408	94,795	465,534	397,32	383,739

Produksi Tenaga Listrik
Electricity Production

Produksi Tenaga Listrik tahun 2023 sebesar 66.846 GWh meningkat 291,73% dibandingkan dengan tahun 2022

Electricity Production in 2023 was 66,846 GWh, an increase of 291,73% compared to 2022

Produksi tenaga listrik unit pembangkit PLN NP pada tahun 2023 adalah sebesar 66.846 GWh meningkat 291,73% dibandingkan tahun 2022 sebesar 17.064,31 GWh. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh adanya penambahan unit pembangkit dan peningkatan kapasitas pembangkit yang dikelola oleh PLN NP.

PLN NP's existing unit electricity production in 2023 was 66,846 GWh, an increase of 291,73% compared to 2022 of 17,064,31 GWh. The increase was influenced by the addition of power plant units and the increase in power plant capacity managed by PLN NP.

Tabel Produksi Tenaga Listrik Unit Pembangkitan Batubara (PLTU) (GWh)
Table of Electricity Production of Coal Generation Units (CFPP) (GWh)

	2021	2022	2023	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
UP Pelaihari Pelaihari GU	5.670,26	4.797,04	16.451,89	242,96	11.654,85
UP Indramayu Indramayu GU	Belum menjadi aset PLN NP Not yet an asset of PLN NP		6.281,14	-	6.281,14
UP Rembang Rembang GU			4.931,57	-	4.931,57
UP Paiton Paiton GU			3.888,34	-	3.888,34
UP Tanjung Awar-Awar Tanjung Awar-Awar GU			4.138,26	-	4.138,26
UP Tenayan Tenayan GU			1.187,52	-	1.187,52
UP Kaltim Teluk Kaltim Teluk GU			1.135,67	-	1.135,67
UP Pulang Pisau Pulang Pisau GU			698,29	-	698,29
UPK Bukit Asam Bukit Asam GUU			1.371,91	-	1.371,91
UPK Sebelang Sebelang GOU			1.244,78	-	1.244,78
UPK Tarahan Tarahan GOU			1.422,17	-	1.422,17
UPK Nagan Raya Nagan Raya GOU			1.082,22	-	1.082,22
UPK Punagaya Punagaya GOU			1.546,36	-	1.546,36
PLTU Tanjungkalian Tanjungkalian CFPP			93,03	-	93,03
PLTU Belapang Belapang CFPP			14,55	-	14,55
PLTU Amurang Amurang CFPP			208,36	-	208,36
PLTU Anggrek Anggrek CFPP			166,77	-	166,77
PLTU Ampana Ampana CFPP			22,48	-	22,48
PLTU Kendari 1-2 Kendari 1-2 CFPP			93,68	-	93,68
Jumlah Produksi Tenaga Listrik Unit Pembangkit Batubara (PLTU) Total Electricity Production of Coal Generation Units	**5.670,26**	**4.797,04**	**36.321,81**	**661,42**	**31.733,77**

Tabel Produksi Tenaga Listrik Unit Pembangkitan Gas dan Non Batubara (Non PLTU) (GWh)
Table of Electricity Production of Gas and Non Coal Generation Units (Non-CFPP) (GWh)

	2021	2022	2023	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
UP Bontang Bontang GU	5.692,26	4.719,84	1.193,14	(36,08)	(3.526,70)
UP Cilegon Cilegon GU			1.216,77	(26,23)	(432,54)
UP Muara Karang Muara Karang GU			7.287,00	39,79%	5.408,80
UP Muara Tawar Muara Tawar GU			1.699,87	(13,84)	(273,03)
UP Cirebon Cirebon GU			7.031,84	23,98	1.779,84
PLTMG Bawean Bawean GTPP			21,05	(2,02)	(0,43)
PLTU Suppa Suppa STPP			127,01	92,48	61,37
PLTMG Arun Arun GTPP			516,81	-	516,81
PLTMG Arun Repowal Arun GTPP Expansion			1.138,24	-	1.138,24
PLTG Sebalang Sebalang GTPP			3,88	-	3,88
UPDK Belawan Belawan DGU			4.473,70	-	4.473,70
UPDK Pekanbaru Pekanbaru DGU	Belum menjadi aset PLN NP Not yet an asset of PLN NP		946,73	-	946,73
UPDK Bandar Lampung Bandar Lampung DGU			428,12	-	428,12
UPDK Pandan Pandan DGU			554,77	-	554,77
UPDK Sakaru Sakaru DGU			993,48	-	993,48
UPDK Minahasa Minahasa DGU			287,62	-	287,62
UPDK Gorontalo Gorontalo DGU			296,79	-	296,79
UPDK Bendan Bendan DGU			326,80	-	326,8
UPDK Kupang Kupang DGU			721,79	-	721,79
UPDK Bolloangan Bolloangan DGU			6,98	-	6,988
UPDK Tarakan Tarakan DGU			249,77	-	249,77
UPDK Palangkaraya Palangkaraya DGU			489,72	-	489,72
UP Sengkang Sengkang GU			1.103,90	-	1.103,90
Jumlah Produksi Tenaga Listrik Unit Pembangkit Gas dan Non Batubara (Non PLTU) Total Electricity Production of Gas and Non-Coal Coal Generation Units (Non-CFPP)	14.770,57	12.366,47	30.394,38	147,13	18.027,91

Peningkatan/Penurunan Kapasitas Produksi

Increase/Decrease in Production Capacity

Produksi tenaga listrik unit eksisting PLN NP pada tahun 2023 adalah sebesar 66.846,00 GWh meningkat 391,7% dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar 13.664,31 GWh. Jumlah produksi tersebut mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 113,3% dari RKAP 2023.

Produksi tenaga listrik di tahun 2023 jauh lebih tinggi dari tahun 2022, hal ini dipengaruhi oleh adanya penambahan unit pembangkit dan peningkatan kapasitas pembangkit yang dikelola oleh PLN NP.

PLN NP's existing unit electricity production in 2023 was 66,846.00 GWh, an increase of 391.7% compared to 2022 of 13,664.31 GWh. The total production reached the predetermined target of 113.3% of the 2023 ABCP.

Electricity production in 2023 was much higher than in 2022. This was influenced by the addition of power plant units and the increase in power plant capacity managed by PLN NP.

Tabel Pencapaian Realisasi Produksi Tenaga Listrik
Table of Achievement of Electricity Production Realization

Produksi Production	Realisasi 2022 (GWh) 2022 Realization (GWh)	Target RKAP 2023 (GWh) 2023 ABOP Target (GWh)	Realisasi 2023 (GWh) 2023 Realization (GWh)	Persentase (%) Percentage (%)	
				Pertumbuhan 2023 2023 Growth	Pencapaian RKAP 2023 2023 ABOP Achievement
Tenaga Listrik Electricity	7.026,42	58.975,70	66.846,06	29,17	113,5

Pemakaian Sendiri
Self-Consumption

Pemakaian Sendiri di tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun 2022 yaitu 19% untuk Unit Pembangkitan Batubara (PLTU) dan 2,48% untuk Unit Pembangkitan Non Batubara (non PLTU)

Self-consumption in 2023 increased compared to 2022, namely 19% for Coal Generation Units (CFPP) and 2,48% for Non-Coal Generation Units (non-CFPP)

Pemakaian sendiri merupakan tenaga listrik yang digunakan untuk aktivitas operasional unit pembangkit. Jumlah pemakaian sendiri pada tahun 2023 untuk Unit Pembangkitan Batubara adalah sebesar 2.916,36 GWh atau 19%. Pemakaian sendiri tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 sebesar 372,56 GWh atau 23%. Peningkatan ini tersebut dipengaruhi oleh adanya penambahan unit pembangkit dengan kapasitas dibawah 100 MW yang memiliki rasio Pemakaian Sendiri (PS) lebih tinggi.

Self-consumption is electricity used for the operational activities of the power plant unit. The total self-consumption in 2023 for the Coal Generating Unit was 2.916,36 GWh or 19%. The self-consumption was higher than in 2022 by 372,56 GWh atau 23%. This increase was mainly influenced by the addition of power plant units with a capacity below 100 MW, which had a higher Self-Consumption (PS) ratio.

Jumlah pemakaian sendiri pada tahun 2023 untuk Unit Pembangkitan Non Batubara dan Gas adalah sebesar 751,04 GWh atau 2,48%. Pemakaian sendiri tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 sebesar 312,26 GWh atau 1,66%. Peningkatan ini tersebut dipengaruhi oleh adanya penambahan unit pembangkit tersebut PLTD yang memiliki rasio Pemakaian Sendiri (PS) lebih tinggi.

The total self-consumption in 2023 for Non-Coal and Gas Generation Units was 751,04 GWh or 2,48%. The self-consumption was higher compared to 2022 by 312,26 GWh or 1,66%. This increase was mainly influenced by the addition of power plant units, especially DPP, which has a higher Self-Consumption (PS) ratio.

Tabel Pemakaian Sendiri Unit Pembangkitan Batubara (PLTU) (GWh)
Table of Self-Consumption of Coal Generation Unit (CFPP) (GWh)

Unit Pembangkitan Generation Unit	2021		2022		2023		Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%
UP Paiton Paiton (U)	422,63	2,16	271,54	2,78	257,77	3,62	(14,00)	(5,16)
UP Paiton II Paiton II (U)	Belum menjadi aset PLN NP Not yet an asset of PLN NP				177,12	3,97	-	-
UP Indonesia Indonesia (U)					48,118	2,19	-	-
UP Rembang Rembang (U)					272,70	5,43	-	-
UP Pacitan Pacitan (U)					115,57	6,79	-	-
UP Tanjung Awar-Awar Tanjung Awar-Awar (U)					201,79	5,12	-	-
UP Tarahan Tarahan (U)					150,29	12,26	-	-
UP Kaltim Teluk Kaltim Teluk (U)					146,00	11,49	-	-

Unit Pembangkitan Generation Unit	2021		2022		2023		Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%
UP Pulang Pisau Pulang Pisau GU					93,24	14,28	-	-
UPK Bukit Asam Bukit Asam GCU					140,77	33,16	-	-
UPK Sebalang Sebalang GCU					141,72	11,49	-	-
UPK Teraman Teraman GCU					101,43	11,25	-	-
UPK Nagan Raya Nagan Raya GCU					134,07	12,17	-	-
UPK Pulangiaya Pulangiaya GCU	Belum merjadi aset PLN NP Not yet an asset of PLN NP				163,48	33,03	-	-
PLTU Tembilahan Tembilahan CFPP					14,71	15,65	-	-
PLTU Kalteng Kalteng CFPP					17,40	18,17	-	-
PLTU Amurang Amurang CFPP					35,34	15,69	-	-
PLTU Anggrek Anggrek CFPP					31,33	14,65	-	-
PLTU Ambarita Ambarita CFPP					6,19	13,44	-	-
PLTU Kendari 1-2 Kendari 1-2 CFPP					15,79	16,71	-	-
Jumlah Pemakaian Sendiri Unit Pembangkitan Batubara (PLTU) Total Self-Consumption of Coal Generation Unit (CFPP)	**432,63**	**2,10**	**372,16**	**1,78**	**2.916,26**	**7,97**	**2.543,90**	**2,70**

Tabel Pemakaian Sendiri Unit Pembangkitan Gas dan Non Batubara (Non PLTU) (GWh)
Table of Self-Consumption of Gas and Non-Coal Generation Unit (Non-CFPP) (GWh)

Unit Pembangkitan Generation Unit	2021		2022		2023		Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%
UP Bratas Bratas GU	16,36	1,16	16,19	1,16	15,21	1,14	(0,88)	(0,08)
UP Cirata Cirata GU	28,72	2,16	34,76	2,71	29,87	2,12	(6,89)	(0,59)
UP Muara Karang Muara Karang GU	134,38	4,01	73,45	2,17	215,16	2,95	141,71	(24,74)
UP Muara Tawar Muara Tawar GU	62,08	1,80	32,85	2,68	46,87	2,88	(3,98)	2,41
UP Cikarang Cikarang GU	173,84	2,70	102,16	2,53	194,36	3,09	91,81	35,99
PLTMG Bawean Bawean GBPP	1,05	5,24	0,77	2,57	0,84	2,96	0,07	15,46
PLTD Suppa Suppa DPP	0,26	2,16	1,19	5,89	2,83	7,93	1,64	0,53
PLTMG Arun Arun GBPP					12,84	2,48	-	-
PLTMG Arun Sisparse Arun GBPP Expansion					14,25	1,25	-	-
PLTU Sebalang Sebalang CFPP					0,13	0,38	-	-
UPDK Belawan Belawan DGU					89,92	2,13	-	-
UPDK Pekanbaru Pekanbaru DGU					30,68	2,38	-	-
UPDK Bandar Lampung Bandar Lampung DGU	Belum merjadi aset PLN NP Not yet an asset of PLN NP				6,39	1,47	-	-
UPDK Pandan Pandan DGU					9,05	1,64	-	-
UPDK Bakauni Bakauni DGU					1,31	0,75	-	-
UPDK Minahasa Minahasa DGU					3,99	1,85	-	-
UPDK Gorontalo Gorontalo DGU					6,04	11,93	-	-
UPDK Bandar Bandar DGU					3,66	2,03	-	-

Unit Pembangkitan Generation Unit	2021		2022		2023		Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%
UPDK Kapuas (GCU)	Belum menjadi aset PLN NP Not yet an asset of PLN NP				6,80	5,17	-	-
UPDK Bellipapan (GCU)					3,36	5,46	-	-
UPDK Tarakan (GCU)					9,69	2,29	-	-
UPDK Palangkaraya (GCU)					104	0,90	-	-
UP Sengkang (GCU)					20,97	2,76	-	-
Jumlah Pemakaian Sendiri Unit Pembangkitan Non Batubara dan Gas (Non-PLTU) Total Self-Consumption of Gas and Non-Coal Generation Unit (Non-CFPP)	259,55	2,40	231,26	1,66	751,04	2,48	434,77	49,40

Penjualan Tenaga Listrik
Electricity Sales

Penjualan tenaga listrik unit pembangkit PLN NP secara kumulatif pada tahun 2023 adalah sebesar 63.178,6 GWh meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 16.376,48 GWh. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh adanya penambahan unit pembangkit dan peningkatan kapasitas pembangkit yang dikelola oleh PLN NP.

The cumulative electricity sales from PLN NP's existing units in 2023 was 63,178.6 GWh, an increase compared to 2022 of 16,376.48 GWh. The increase was mainly influenced by the addition of power plant units and the increase of power plant capacity managed by PLN NP.

Penjualan tenaga listrik unit pembangkitan batubara (PLTU) PLN NP pada tahun 2023 adalah 33.855,22 GWh meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 4.790,51 GWh. Sedangkan penjualan tenaga listrik unit pembangkitan gas dan non batubara (non PLTU) PLN NP pada tahun 2023 adalah 29.543,37 GWh meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 11.954,18 GWh.

The electricity sales of PLN NP's coal generation unit (CFPP) in 2023 was 33,855.22 GWh, an increase compared to 2022 of 4,790.51 GWh. While electricity sales of PLN NP's gas and non-coal generation units (non-CFPP) in 2023 were 29,543.37 GWh, an increase compared to 2022 of 11,954.18 GWh.

Tabel Penjualan Tenaga Listrik Unit Pembangkitan Batubara (PLTU) (GWh)
Table of Electricity Sales of Coal Generation Unit (CFPP) (GWh)

Unit Pembangkitan Generation Unit	2021	2022	2023	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
				%	GWh
UP Paiton (Paiton CU)	5,470,36	4,790,50	4,327,63	(0,91)	(462,88)
UP Paiton II (Paiton II CU)	Belum menjadi aset PLN NP Not yet an asset of PLN NP		2,989,57	-	-
UP Indramayu (Indramayu CU)			5,903,06	-	-
UP Pembang (Pembang CU)			3,877,82	-	-
UP Pacitan (Pacitan CU)			3,443,53	-	-
UP Tanjung Awar-Awar (Tanjung Awar-Awar CU)			3,915,47	-	-
UP Tanjung Jati (Tanjung Jati CU)			1,117,74	-	-
UP Nelson (Nelson CU)			1,038,67	-	-
UP Pulang Pisau (Pulang Pisau CU)			567,06	-	-
UPK Bukit Asam (Bukit Asam CU)			1,127,79	-	-
UPK Sebelang (Sebelang CU)			1,115,44	-	-

Unit Pembangkitan Generation Unit	2021	2022	2023	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
				%	Gwh
UPK Tanahair Tanahair GCU	Belum menjadi aset PLN NP Not yet an asset of PLN NP		[illegible]	-	-
UPK Nagan Raya Nagan Raya GCU			[illegible]	-	-
UPK Punagaya Punagaya GCU			[illegible]	-	-
PLTU Tembilahan Tembilahan CFPP			[illegible]	-	-
PLTU Ketapang Ketapang CFPP			[illegible]	-	-
PLTU Amurang Amurang CFPP			[illegible]	-	-
PLTU Anggrek Anggrek CFPP			[illegible]	-	-
PLTU Ampana Ampana CFPP			[illegible]	-	-
PLTU Kendari 1-2 Kendari 1-2 CFPP			[illegible]	-	-
Jumlah Penjualan Tenaga Listrik Unit Pembangkitan Batubara (PLTU) Total Electricity Sales of Coal Generation Unit (CFPP)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Tabel Penjualan Tenaga Listrik Unit Pembangkitan Gas dan Non Batubara (Non PLTU) (GWh)

Table of Electricity Sales of Gas and Non-Coal Generation Unit (Non-CFPP) (GWh)

Unit Pembangkitan Generation Unit	2021	2022	2023	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
				%	Gwh
UP Bratas Bratas GU	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
UP Cirata Cirata GU	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
UP Muara Karang Muara Karang GU	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
UP Muara Tawar Muara Tawar GU	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
UP Cikarang Cikarang GU	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PLTMG Bawean Bawean GEPP	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PLTD Sopsop DPP	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PLTMG Arun Arun GEPP	Belum menjadi aset PLN NP Not yet an asset of PLN NP		[illegible]	-	-
PLTMG Arun Sisparia Arun GEPP Sisparian			[illegible]	-	-
PLTD Sebelang Sebelang GEPP			[illegible]	-	-
UPDK Belawan Belawan GCU			[illegible]	-	-
UPDK Pekanbaru Pekanbaru GCU			[illegible]	-	-
UPDK Bandar Lampung Bandar Lampung GCU			[illegible]	-	-
UPDK Pandan Pandan GCU			[illegible]	-	-
UPDK Bakaru Bakaru GCU			[illegible]	-	-
UPDK Minahasa Minahasa GCU			[illegible]	-	-
UPDK Gorontalo Gorontalo GCU			[illegible]	-	-
UPDK Bandari Bandari GCU			[illegible]	-	-
UPDK Kupang Kupang GCU			[illegible]	-	-
UPDK Balikpapan Balikpapan GCU			[illegible]	-	-
UPDK Tarakan Tarakan GCU			[illegible]	-	-
UPDK Palangkaraya Palangkaraya GCU			[illegible]	-	-
UP Sengkang Sengkang GU			[illegible]	-	-
Jumlah Penjualan Tenaga Listrik Unit Pembangkitan Gas dan Non Batubara (Non PLTU) Total Electricity Sales of Gas and Non-Coal Generation Unit (Non-CFPP)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Tabel Pencapaian Realisasi Penjualan Tenaga Listrik
Table of Electricity Sales Achievement

Penjualan Sales	Realisasi 2022 (GWh) 2022 Realization (GWh)	Target RKAP 2023 (GWh) 2023 ABOP Target (GWh)	Realisasi 2023 (GWh) 2023 Realization (GWh)	Persentase (%) Percentage (%)	
				Pertumbuhan 2023 2023 Growth	Pencapaian RKAP 2023 2023 ABOP Achievement
Tenaga Listrik Electricity	16,370.48	55,497.83	63,178.6	28.5,7	113.8

Grafik Penjualan Tenaga Listrik Unit Pembangkitan Batubara (PLTU) (GWh)
Chart of Electricity Sales of Coal Generation Unit (CFPP) (GWh)

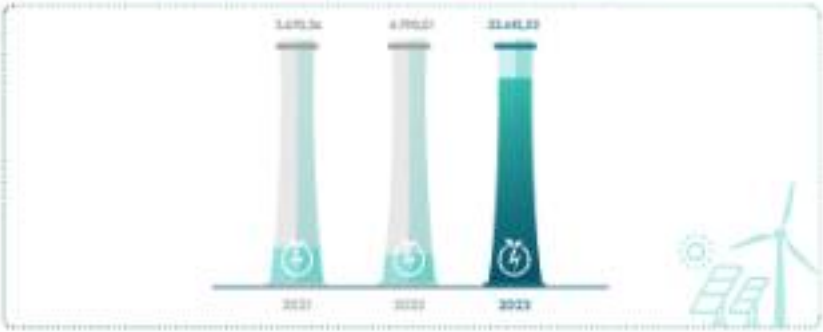

Grafik Penjualan Tenaga Listrik Unit Pembangkitan Gas dan Non Batubara (Non PLTU) (GWh)
Chart of Electricity Sales of Gas and Non-Coal Generation Unit (Non-CFPP) (GWh)

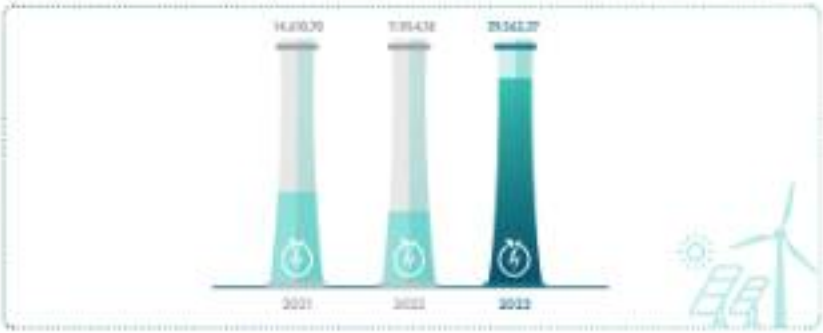

Segmen Usaha Jasa *Operation and Maintenance* (O&M)

Operation and Maintenance (O&M) Services Business Segment

PLN NP menyediakan Jasa Operation and Maintenance (O&M) sebagai bentuk pengembangan Perusahaan dan memanfaatkan potensi yang dimiliki secara maksimal. Bidang usaha jasa O&M dilakukan oleh PLN NP secara langsung (wilayah Jawa dan luar Jawa) maupun melalui anak perusahaan dan perusahaan patungan. Berikut adalah kinerja pembangkit jasa O&M dari PLN NP.

PLN NP provides Operation and Maintenance (O&M) Services as a form of Company development and utilizes its maximum potential. The O&M services business field is conducted by PLN NP directly (Java and outside Java) and through subsidiaries and joint ventures. The following is the performance of O&M service power plants from PLN NP.

Unit Pembangkitan Generation Unit	EAF (%)		EFOR (%)		NPHR (Kcal/kWh)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
PLTU Indramayu Indramayu CFPP	85,89	Sudah menjadi aset PLN NP Has become an asset of PLN NP	4,34	Sudah menjadi aset PLN NP Has become an asset of PLN NP	2.854,17	Sudah menjadi aset PLN NP Has become an asset of PLN NP
PLTU Rembang Indramayu CFPP	71,49		4,22		2.155,94	
PLTU Paiton P Indramayu CFPP	88,07		0,46		2.474,09	
PLTU Pacitan Indramayu CFPP	94,87		1,98		2.816,93	
PLTU Tanjung Awar Awar Indramayu CFPP	81,71		3,79		2.920,20	
PLTGU Muara Karang Blok 1 Muara Karang Blok 1 CCGPP	90,23		0,00		1.972,84	
PLTGU Muara Tawar Blok 5 Muara Tawar Blok 5 CCGPP	98,84		0,04		2.035,84	
PLTGU Muara Karang Blok 1 Peaker Muara Karang Blok 1 Peaker CCPP	93,95		0,52		1.845,70	
PLTU Tanjung Jati Tanjung Jati CFPP	83,57		4,60		4.771,31	
PLTU Teluk Balikpapan Teluk Balikpapan CFPP	91,79		0,64		2.324,29	
PLTMG Arun Arun CCPP	93,36		1,03		1.955,31	
PLTU Pulang Pisau Pulang Pisau CFPP	89,93		2,74		2.995,42	
PLTU Amurang Amurang CFPP	88,41		1,39		4.829,32	
PLTU Ampana Ampana CFPP	88,59		0,89		6.690,07	
PLTU Kelapang Kelapang CFPP	76,88		2,11		7.077,95	
PLTU Tembilahan Tembilahan CFPP	90,77		0,72		5.930,04	
PLTU Anggrek Anggrek CFPP	91,91		5,40		5.637,28	
PLTU Kendari 3 Kendari 3 CFPP	-	-	-	-	-	-
PLTU Bangka Bangka CFPP	74,58	79,85	14,20	6,85	5.395,16	4.666,50
PLTU Belitung Belitung CFPP	93,93	87,30	2,78	3,6	5.102,57	4.688,07
PLTU Bolok Bolok CFPP	95,70	89,69	0,41	3,40	4.354,67	4.115,97
PLTU Ropa Ropa CFPP	89,40	85,91	1,62	0,94	5.050,67	4.976,59
PLTU Tolaue Tolaue CFPP	77,90	91,65	4,71	1,47	5.436,34	4.993,69
PLTA Asahan Asahan HPP	96,95	93,62	0,00	0,04	-	-
PLTU Banjarsari Banjarsari CFPP	85,36	79,23	8,38	8,82	3.855,94	3.434,78

Kepemilikan Pembangkit di IPP
Power Plant Ownership in IPP

Kepemilikan saham PLN NP pada pembangkit IPP dengan total kapasitas sebesar 5,715 MW meliputi:

PLN NP's shareholding in IPP power plants with a total capacity of 5,715 MW, includes:

No.	Unit Pembangkitan Generation Unit	Kapasitas Terpasang Installed Capacity	Porsi Saham Stock Portion
1	PLTA Asahan Asahan HPP	2 x 90 MW	20,60%
2	PLTU Banjarsari Banjarsari CFPP	3 x 100 MW	50,90%
3	PLTU Jawa 7 Jawa 7 CFPP	2 x 1000 MW	30%
4	PLTU Cikarang Unit #1 dan #2 Cikarang Unit #1 and #2 CFPP	3 x 300 MW	49%
	Cikarang Unit #3 Cikarang Unit #3	1 x 840 MW	
	Cikarang Unit #4 Cikarang Unit #4	1 x 1000 MW	
5	PLTU Mamuju Mamuju CFPP	2 x 25 MW	10%
6	PLTA Bakaru Tana Bakaru Tana HPP	4 x 127,5 MW	20%
7	PLTS Tengiung Cirata Cirata Floating SPP	145 MW	–
8	PLTU Sumbagsel 1 Sumbagsel 1 CFPP	2 x 150 MW	10%
9	PLTD Bolok Bolok DPP	50 MW	50%

Segmen Usaha Jasa *Engineering, Procurement and Construction* (EPC)
Engineering, Procurement, and Construction (EPC) Services Business Segment

PLN NP menyediakan Jasa Engineering, Procurement, and Construction (EPC) melalui salah satu Anak Perusahaannya yaitu PT PLN Nusantara Power Construction (PLN NPC). Jasa EPC yang dilakukan oleh PLN NP tersebut terdiri atas pembangunan pembangkit-pembangkit baru, khususnya di luar Pulau Jawa yang didukung tenaga profesional dan kemampuan dalam penguasaan teknologi pembangkitan, serta pembangunan jaringan Transmisi dan Distribusi (T&D) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Terdapat 5 proyek EPC yang dikelola oleh PT PLN Nusantara Power Construction (PLN NPC) dengan total kapasitas 54 MW.

PLN NP provides Engineering, Procurement, and Construction (EPC) Services through one of its subsidiaries, PT Nusantara Elektrika (NE). The EPC services conducted by PLN NP consist of the construction of new power plants, especially outside Java Island, supported by professionals and capabilities in mastering electric power generation technology, as well as the construction of Transmission and Distribution (T&D) networks spread throughout Indonesia. There are 8 EPC projects managed by PT PLN Nusantara Power Construction (PLN NPC) with a total capacity of 166 MW.

Tabel Proyek EPC yang dikelola PLN NP melalui Anak Perusahaan
Table of EPC Projects managed by PLN NP through Subsidiaries

Pembangkit Power Plant	Kapasitas Terpasang Installed Capacity	Lokasi Location	Status Pekerjaan Work Progress (%)
PLTU Timika Timika CFPP	4 x 7 MW	Papua	On Progress
PLTU Bima Bima CFPP	2 x 10 MW	Nusa Tenggara Barat	On Progress
PLTU Sofifi Sofifi CFPP	2 x 3 MW	Maluku Utara	On Progress

Segmen Usaha Jasa Lainnya
Other Services Business Segment

Segmen Usaha Lainnya merupakan proyek yang berada dibawah Bidang Business Development– Generation Derivatives dibentuk oleh PLN NP dengan fungsi utama untuk memastikan penerapan dan pengembangan strategi bisnis, manajemen produk dan marketing, integrated serta sales dan kontrak dalam mendukung pengembangan bisnis derivatif pembangkit. Dengan fungsi utama untuk memastikan pengembangan strategi bisnis, melakukan eksekusi eksekusi strategi bisnis, bertindak sebagai pelaku aktivitas pemasaran, serta mengelola bisnis penunjang Jasa O&M, dan pemanfaatan aset untuk mendukung pengembangan bisnis Perusahaan. Berikut adalah progres pelaksanaan beberapa proyek yang berada di bawah Bidang Business Development – Generation Derivatives sampai dengan 2023.

- MRO (Maintenance, Repair and Overhaul)
  - Unit 3 Planned Outage in 2023 Maintenance Service,
  - Major Overhaul CT 3 PT MCTN 2023, dan
  - OM PLTU Bibyana Bangladesh.
- Non MRO (Maintenance, Repair and Overhaul)
  - Jasa Set-Up SMP PT BPI Unit Banjaran,
  - Jasa Set-Up ISO 9001:2015 PT BPI,
  - Kawasan Industri Group Danamitra,
  - Jasa Set-up ICARE PT PLN EPI,
  - EAM Geoliza,
  - Evakuasi Daya PT Geoliza Energi
- PLTS
  - Revitalisasi PLTS Tarakelek dan Kodingareng UPS Makassar Selatan,
  - Revitalisasi PLTS Dongkala UPS Baubau.

The Other Business Segment is a project under the Business Development–Generation Derivatives Division established by PLN NP with the main function to ensure business strategy planning and development, product management, and integrated marketing, as well as sales and contracts in supporting the development of the generation derivatives business. The main function is to ensure the development of business strategies, evaluate the execution of business strategies, act as a player in marketing activities, and manage the business of supporting O&M Services and asset utilization to support the Company's business development. The following is the progress of the development of several projects under the Business Development – Generation Derivatives Division until 2023.

- MRO (Maintenance, Repair, and Overhaul)
  - Unit 3 Planned Outage in 2023 Maintenance Service,
  - Major Overhaul CT 3 PT MCTN 2023, and
  - OM of Bibyana Bangladesh CPPP.
- Non-MRO (Maintenance, Repair, and Overhaul)
  - SMP Set-Up Services of PT BPI Banjaran Unit,
  - ISO 9001:2015 Set-Up Services of PT BPI,
  - Danamitra Group Industrial Estate,
  - ICARE Set-up Services of PT PLN EPI,
  - EAM of Geoliza,
  - Power Evacuation of PT Geoliza Energi
- SPP
  - Revitalization of Tarakelek and Kodingareng UPS SPP, South Makassar,
  - Revitalization of Dongkala UPS Baubau SPP

Profitabilitas Per Segmen
Profitability by Segment

Pendapatan Usaha Per Segmen
Revenues by Segment

Segmen dengan kontribusi terbesar terhadap pendapatan usaha berasal dari Penjualan Tenaga Listrik sebesar 97,21% atau Rp90,00 triliun

The segment with the highest contribution to revenue came from Sales of Electricity at 97,21% or Rp90,00 trillion

Pendapatan usaha PLN NP tahun 2023 sebesar Rp90,37 triliun meningkat 18,91% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp76 triliun. Peningkatan pendapatan usaha PLN NP dipengaruhi oleh kenaikan jumlah KWh jual yang melebihi target pada tahun 2023 untuk memenuhi kebutuhan sistem serta efisiensi penggunaan bahan bakar. Komponen pendapatan PLN NP sesuai dengan segmen usaha yang dimiliki yaitu penjualan tenaga listrik, jasa operasi dan pemeliharaan, konstruksi, dan pendapatan lainnya.

PLN NP's revenues in 2023 were Rp90,37 trillion, an increase of 18,91% compared to Rp76 trillion in 2022. The increase in PLN NP's revenue was influenced by an increase in the number of selling KWh that exceeded the target in 2023 to fulfill system needs and efficient use of fuel. The components of PLN NP's revenue are in accordance with its business segments, namely sales of electricity, operation and maintenance services, construction, and other revenues.

Tabel Pendapatan Usaha Per Segmen
Table of Revenues by Segment

Uraian Description	2021		2022		2023	
	Rp juta Rp million	%	Rp juta Rp million	%	Rp juta Rp million	%
Pendapatan Usaha: Revenue:						
Penjualan Tenaga Listrik Sales of Electricity	24.545.378	97,17	73.693.038	96,95	87.851.944	97,21
Pendapatan Usaha Lainnya: Other Operating Revenue:						
Jasa Operasi dan Pemeliharaan Operation and Maintenance Services	410.757,67	1,75	888.248	1,17	1.165.705	1,29
Konstruksi Construction	727.234	2,88	848.101	1,11	1.083.838	1,20
Lainnya Others	181.965	0,72	583.866	0,77	274.915	0,30
Jumlah Pendapatan Usaha Total Revenue	**25.865.334**	**100,00**	**76.004.453**	**100,00**	**90.375.607**	**100,00**

Pada tahun 2023, kontribusi dari masing-masing segmen terhadap pendapatan usaha yaitu penjualan tenaga listrik sebesar 97,21%, jasa operasi dan pemeliharaan sebesar 1,29%, konstruksi sebesar 1,20%, dan pendapatan lainnya sebesar 0,30%.

In 2023, the contribution of each segment to revenue was 97.21% sales of electricity, 1.29% operations and maintenance services, 1.20% construction, and 0.30% other revenues.

Grafik Kontribusi Pendapatan Per Segmen Tahun 2023
Chart of Revenue Contribution by Segment in 2023

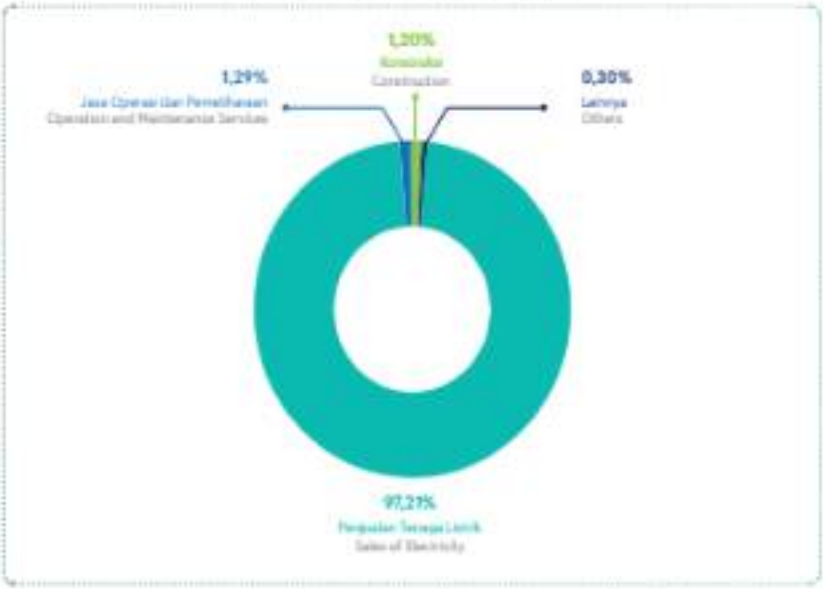

Kontribusi dari Kinerja Anak Perusahaan
Contribution from Subsidiaries' Performance

Kinerja keuangan Anak Perusahaan turut menjadi kontributor dalam komponen laba komprehensif PLN NP tahun 2023. Penjelasan terkait jumlah laba Anak Perusahaan terhadap laba komprehensif Perusahaan sebagai berikut:

The financial performance of the Subsidiaries is also a contributor to the comprehensive income component of PLN NP in 2023. Explanation of the total profit of Subsidiaries to the Company's comprehensive income is as follows:

Tabel Laba Usaha Per Segmen (Rp juta)
Table of Operating Income by Segment (Rp million)

Nama Anak Perusahaan Name of Subsidiary	2021	2022	2023
PT PLN Nusantara Services (PLN NPS)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PT PLN Nusantara Construction (PLN NPC)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PT Navigat Innovative Indonesia (NII)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PT PLN Nusantara Renewables (PLN NR)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang (PLN SC)	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Analisis Kinerja Keuangan
Financial Performance Analysis

Analisis Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Analysis of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

Jumlah Laba Tahun Berjalan PLN NP tahun 2023 adalah sebesar Rp15,67 triliun meningkat 149,83% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp6,47 triliun. Sedangkan, jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan PLN NP tahun 2023 adalah sebesar Rp15,38 triliun meningkat 129,5% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp6,92 triliun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan jumlah KWh jual yang melebihi target pada tahun 2023 untuk memenuhi kebutuhan sistem serta efisiensi penggunaan bahan bakar.

In 2023, PLN NP's total Profit for the Year was Rp15,67 trillion, an increase of 149,83% compared to Rp6,47 trillion in 2022. Meanwhile, PLN NP's Total Comprehensive Income for the Year 2023 was Rp15,38 trillion, an increase of 129,5% compared to Rp6,92 trillion in 2022. The increase was mainly influenced by the increased number of selling KWh that exceeded the target in 2023 to fulfill system needs and fuel use efficiency.

Tabel Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain (Rp juta)
Table of Profit or Loss and Other Comprehensive Income (Rp million)

Uraian Description	2021	2022*)	2023	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Pendapatan Usaha Revenue	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Beban Usaha Operating Expenses	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Laba Usaha Operating Income	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit before Income Tax	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Uraian Description	2021	2022*)	2023	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expense	(1,371,852)	(1,019,878)	(1,775,864)	(51.23)	(756,012)
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	**5,025,188**	**5,470,716**	**11,667,632**	**149.83**	**6,196,916**
Penghasilan (beban) Komprehensif Lain Tahun Berjalan setelah Pajak Other Comprehensive Income/(Loss) for the Year after Tax	(1,301,389)	444,746	(86,918)	(119.71)	(531,664)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income for the Year	**3,723,799**	**5,915,464**	**11,581,453**	**129.51**	**5,665,991**
Laba Tahun Berjalan Diatribusikan kepada Profit for the Year Attributable to					
- Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent	5,030,033	5,435,649	11,642,978	115.01	6,207,949
- Kepentingan Non-Pengendali Non-controlling Interests	19,155	35,067	24,654	(29.97)	(10,413)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat Diatribusikan kepada Total Comprehensive Income for the Year Attributable to					
- Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent	3,694,318	5,872,211	12,559,937	113.93	6,687,726
- Kepentingan Non-Pengendali Non-controlling Interests	29,479	43,253	22,348	(48.35)	(20,905)
Laba Per Saham Dasar (Rupiah penuh) Basic Earnings per Share (Rp full amount)	**968**	**936**	**44**	**(95.24)**	**(892)**

*) Disajikan kembali *) As Restated

Grafik Jumlah Laba Tahun Berjalan (Rp juta)
Chart of Total Profit for the Year (Rp million)

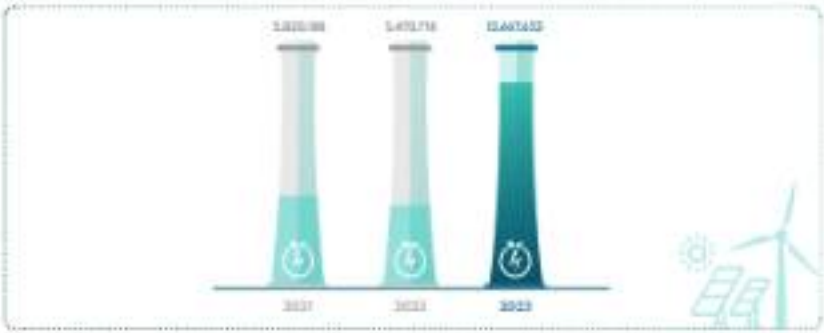

Pendapatan Usaha
Revenue

Pendapatan Usaha meningkat menjadi Rp90,37 triliun

Revenue increased to Rp90.37 trillion

Komponen atas pendapatan Usaha PLN NP terdiri dari Penjualan Tenaga Listrik dan Usaha Lainnya. Kontribusi terbesar terhadap pendapatan usaha berasal dari penjualan tenaga listrik untuk sistem Jawa-Bali.

The components of PLN NP's revenue consist of Sales of Electricity and Other Businesses. The largest contribution to revenue comes from the sale of electricity for the Java-Bali system.

Pendapatan usaha PLN NP tahun 2023 sebesar Rp90,37 triliun meningkat 18,97% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp76 triliun. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh kenaikan jumlah KWh jual yang melebihi target pada tahun 2023 untuk memenuhi kebutuhan sistem.

PLN NP's revenue in 2023 was Rp90.37 trillion, an increase of 18.97% compared to Rp76 trillion in 2022. The increase was influenced by the increased number of selling KWh, which exceeded the target in 2023 to meet system needs.

Tabel Pendapatan Usaha (Rp juta)
Table of Revenue (Rp million)

Uraian Description	2021	2022*)	2023	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Penjualan Tenaga Listrik Sales of Electricity	24.541.279	75.690.178	87.86.749	16,22	14.160.571
Pendapatan Usaha Lainnya Other Operating Revenue	4.966.756	1.356.915	3.514.958	6,49	23.914
Jumlah Pendapatan Usaha Total Revenue	**29.508.134**	**76.046.093**	**91.375.607**	**18,90**	**14.268.914**

*) Disajikan kembali *) As restated

Grafik Pendapatan Usaha (Rp juta)
Chart of Revenue (Rp million)

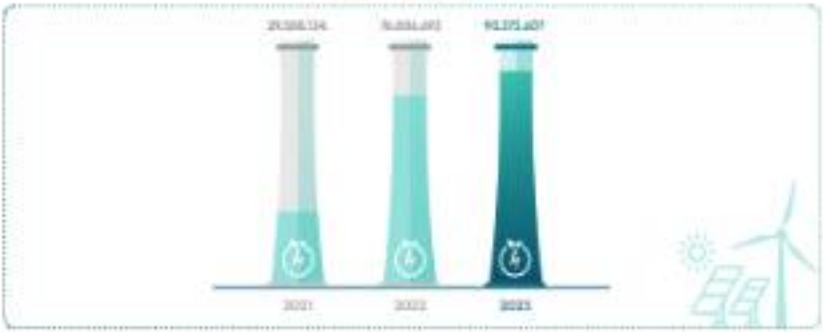

Beban Usaha
Operating Expenses

Beban Usaha meningkat menjadi Rp76 triliun

Operating Expenses increased to Rp76 trillion

Jumlah Beban Usaha PLN NP tahun 2023 adalah sebesar Rp76 triliun meningkat 9,56% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp69,37 triliun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan penggunaan bahan bakar seiring dengan adanya peningkatan produksi KWh.

In 2023, PLN NP's operating expenses were Rp76 trillion, an increase of 9.56% compared to Rp69.37 trillion in 2022. The increase was mainly influenced by an increase in fuel usage along with an increase in KWh production.

Tabel Beban Usaha (Rp juta)
Table of Operating Expenses (Rp million)

Uraian Description	2021	2022[*]	2023	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Pembelian Tenaga Listrik Purchased Electricity	333.657	1.024.795	847.509	(17,26)	(249.096)
Bahan Bakar dan Pelumas Fuel and Lubricants	14.471.816	49.831.736	54.787.384	9,94	4.955.648
Pemeliharaan Maintenance	4.726.361	5.231.183	5.869.787	12,21	638.604
Penyusutan Depreciation	3.783.144	9.002.839	9.494.832	5,47	492.993
Kepegawaian Employee Costs	1.790.453	2.354.433	3.203.833	36,07	849.400
Lain-lain Others	934.562	1.681.713	1.603.607	(4,64)	(78.106)
Jumlah Beban Usaha Total Operating Expenses	**25.101.143**	**69.371.701**	**76.006.366**	**9,56**	**6.634.335**

[*] Disajikan kembali [*] Restated

Grafik Beban Usaha (Rp juta)
Chart of Operating Expenses (Rp million)

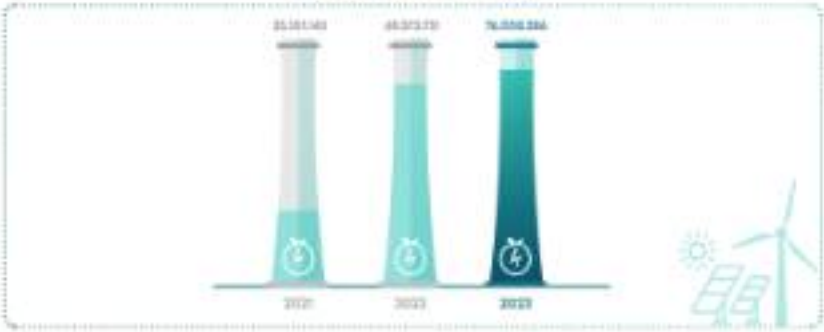

Laba Usaha
Operating Income

Jumlah Laba Usaha PLN NP tahun 2023 adalah sebesar Rp14,37 triliun meningkat 116,8% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp6,63 triliun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan jumlah KWh jual yang melebihi target pada tahun 2023 untuk memenuhi kebutuhan sistem serta efisiensi penggunaan bahan bakar.

In 2023, PLN NP's operating income was Rp14.37 trillion, an increase of 116.8% compared to Rp6.63 trillion in 2022. The increase was mainly influenced by the increased number of selling KWh, which exceeded the target in 2023 to meet system needs and fuel use efficiency.

Pos Keuangan dan Lain-lain
Financial Items and Others

Jumlah Pos Keuangan dan Lain-lain Bersih PLN NP tahun 2023 adalah sebesar Rp2,03 triliun meningkat 7,9% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp1,88 triliun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh penambahan keuntungan pada transaksi yang menggunakan kurs mata uang asing.

In 2023, PLN NP's Net Financial Items and Others was Rp2.03 trillion, an increase of 7.9% compared to Rp1.88 trillion in 2022. The increase was mainly influenced by additional gains on transactions using foreign currency exchange rates.

Tabel Pos Keuangan dan Lain-lain Bersih (Rp juta)
Table of Net Financial Items and Others (Rp million)

Uraian Description	2021	2022*)	2023	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Penghasilan Keuangan / Finance Income	186,653	182,177	206,202	13,23	23,875
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing – bersih Gain/(loss) on foreign exchange – net	3,124	(865,861)	177,622	(120,51)	1,043,575
Beban Keuangan / Finance Costs		(570,464)	(567,773)	(0,24)	2,691
Bagian laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama Share in net profit of associates and joint ventures	2,868,211	2,184,221	2,154,340	(1,14)	(29,881)
Penghasilan/(Beban) Lain-lain Bersih Other Income/(Expenses) – Net	(272,786)	272,449	(209,024)	(176,2)	(481,762)
Jumlah Pos Keuangan dan Lain-lain Bersih Total Net Financial Items and Others	**2,785,049**	**1,877,515**	**2,026,376**	**7,91**	**148,543**

*) Disajikan kembali / As Restated

Grafik Pos Keuangan dan Laba Rugi Bersih (Rp juta)
Chart of Net Financial Items and Others (Rp million)

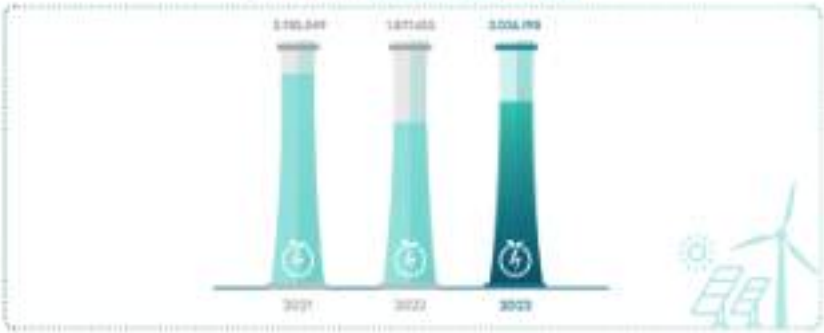

Laba Sebelum Pajak Penghasilan
Profit before Income Tax

Jumlah Laba Sebelum Pajak Penghasilan PLN NP tahun 2023 adalah sebesar Rp16,39 triliun meningkat 92,82% dibandingkan tahun 2022 adalah sebesar Rp8,51 triliun. Peningkatan tersebut tersebut dipengaruhi oleh kenaikan jumlah KWh jual yang melebihi target pada tahun 2023 untuk memenuhi kebutuhan sistem serta efisiensi penggunaan bahan bakar.

In 2023, PLN NP's Profit Before Income Tax was Rp16,39 trillion, an increase of 92.82% compared to Rp8,51 trillion in 2022. The increase was mainly influenced by the increased number of selling KWh, which exceeded the target in 2023 to meet the system needs and the efficiency of fuel use.

Beban Pajak Penghasilan
Income Tax Expense

Jumlah Beban Pajak PLN NP tahun 2022 adalah sebesar Rp2,73 triliun menurun 93,33% dibandingkan tahun 2022 adalah sebesar Rp3,04 triliun. Penurunan tersebut tersebut disebabkan oleh adanya koreksi fiskal pada tahun 2022 dan 2021.

In 2023, PLN NP's total Tax Expense was Rp2,73 trillion, a decrease of 10.13% compared to Rp3,04 trillion in 2022. The decrease was mainly due to fiscal corrections in 2022 and 2021.

Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan
Comprehensive Income for the Year

Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan tahun 2023 adalah sebesar Rp13,58 triliun meningkat 129,10% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp5,92 triliun. Peningkatan penghasilan komprehensif tahun berjalan tersebut dipengaruhi oleh kenaikan jumlah KWh jual yang melebihi target pada tahun 2023 untuk memenuhi kebutuhan sistem.

In 2023, Total Comprehensive Income for the Year was Rp13,58 trillion, an increase of 129.10% compared to Rp5,92 trillion in 2022. The increase in comprehensive income for the year was mainly influenced by the increased number of selling KWh, which exceeded the target in 2023 to fulfill the system's needs.

Tabel Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan (Rp juta)
Table of Comprehensive Income for the Year (Rp million)

Uraian Description	2021	2022*)	2023	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Pos-pos yang Akan Diklasifikasi ke Laba Rugi Items that may be Reclassified Subsequently to Profit or Loss					
Bagian (Kerugian) Penghasilan Komprehensif Lain dari Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Share in Other Comprehensive Loss/Income from Associates and Joint Ventures	(4.666)	969.916	(103.037)	(110,62)	(1.073.012)
Pos-pos yang Tidak Akan Diklasifikasi ke Laba rugi Items that will not be Reclassified to Profit or Loss					
Revaluasi Aset Tetap Revaluation of Property, Plant, and Equipment	(3.154.033)	(3.054)	(4.384)	(3.330)	(1.329)
Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti Remeasurement of Defined Benefit Plans	112.425	(164.508)	23.196	(114,09)	187.704
(Beban) Manfaat Pajak Penghasilan Terkait Related Income Tax (Expense) Benefits	665.385	148.372	(5.980)	(104,03)	(154.295)
(Kerugian)/penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak Other comprehensive (loss)/income for the year after tax		448.746	(86.198)	(119,19)	(535.944)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income for the Year	(2.101.289)	5.917.464	12.001.455	120,51	7.663.991

*) Disajikan kembali *) As Restated

Laba Per Saham Dasar
Basic Earnings per Share

Perusahaan memiliki jumlah saham sebanyak 308,930 juta saham dimana hampir seluruhnya dimiliki oleh PT PLN (Persero). Perhitungan jumlah laba per saham dasar atau biasa disebut Earning Per Share atau Laba per saham merupakan perhitungan yang dilakukan untuk menemukan pendapatan yang diperoleh perusahaan sesuai dengan jumlah saham beredar yang dimiliki. Perusahaan tidak mempunyai efek berpotensi dilusi saham, sehingga laba per saham dasar sama dengan laba per saham dilusian.

The Company has a total of 308,930 million shares, which are almost entirely owned by PT PLN (Persero). The calculation of basic earnings per share, or commonly called Earning Per Share, is a calculation made to find the income earned by the Company in accordance with the number of outstanding shares owned. The Company does not have the effect of potentially diluting shares, hence, basic earnings per share is the same as diluted earnings per share.

Jumlah Laba Per Saham PLN NP tahun 2023 adalah sebesar Rp44 menurun 95,14% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp906. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah saham setelah adanya program holding subholding (HSH) PLN Group pada awal tahun 2023.

In 2023, PLN NP's total Earnings per Share was Rp44, a decrease of 95.14% compared to Rp906 in 2022. The decrease was mainly influenced by the increase in the number of shares after the PLN Group sub-holding (HSH) program in early 2023.

Analisis Posisi Keuangan
Financial Position Analysis

Jumlah aset PLN NP pada tahun 2023 adalah sebesar Rp343,46 triliun, jumlah liabilitas sebesar Rp34,60 triliun, dan jumlah ekuitas sebesar Rp308,86 triliun.

PLN NP's total assets in 2023 were Rp343.46 trillion, total liabilities were Rp34.60 trillion, and total equity was Rp308.86 trillion.

Tabel Posisi Keuangan (Rp juta)
Table of Financial Position (Rp million)

Uraian Description	2021*)	2022*)	2023	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Aset Assets	330.454.339	332.593.691	343.461.168	3,27	10.867.477
Aset Lancar Current Assets	32.727.559	34.548.253	48.882.318	41,49	14.335.065
Aset Tidak Lancar Non-current Assets	297.727.780	298.045.438	294.578.850	(1,16)	(3.467.588)
Liabilitas Liabilities	28.031.355	30.763.888	34.600.344	12,47	3.836.456
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	17.347.597	9.914.987	11.707.047	17,96	1.792.060
Liabilitas Jangka Panjang Non-current Liabilities	10.683.758	20.848.901	22.893.297	9,79	2.044.396
Ekuitas Equity	302.422.984	301.829.803	308.860.824	2,33	7.031.021

*Diaudit/Audited *) Unaudited

Aset
Assets

Jumlah Aset meningkat menjadi Rp343,46 triliun

Total Assets increased to Rp343.46 trillion

Pada tahun 2023 komponen aset terbesar perusahaan masih didominasi oleh aset tidak lancar. Jumlah Aset PLN NP tahun 2023 adalah sebesar Rp343,46 triliun meningkat sebesar 3,27% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp332,60 triliun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan jumlah piutang usaha. Peningkatan piutang usaha terjadi karena jumlah penjualan piutang melalui penerimaan kas dari tagihan Penjualan Tenaga Listrik yang lebih rendah di tahun 2023. Saldo kas PNP masih dianggap mencukupi untuk kebutuhan operasional sejalan dengan kebijakan manajemen kas terpusat PLN (Optimasi Cash Management PLN Holding).

In 2023, the Company's largest asset component was still dominated by non-current assets. The total assets of PLN NP in 2023 were Rp343.46 trillion, an increase of 3.27% compared to Rp332.60 trillion in 2022. The increase was mainly influenced by the increased total trade receivables. The increase in trade receivables occurred due to the total receivables disbursement through cash receipts from lower Sales of Electricity bills in 2023. PLN NP's cash balance was still considered sufficient for operational needs in line with PLN's centralized cash management policy (PLN Holding Cash Management Optimization).

Tabel Aset (Rp juta)
Table of Assets (Rp million)

Uraian Description	2021*)	2022*)	2023	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Aset Lancar Current Assets	32.727.559	34.548.253	48.882.318	41,49	14.335.065
Aset Tidak Lancar Non-current Assets	297.727.780	298.045.438	294.578.850	(1,16)	(3.467.588)
Jumlah Aset Total Assets	330.454.339	332.593.691	343.461.168	3,27	10.867.477

*Diaudit/Audited *) Unaudited

Grafik Aset (Rp juta)
Chart of Assets (Rp million)

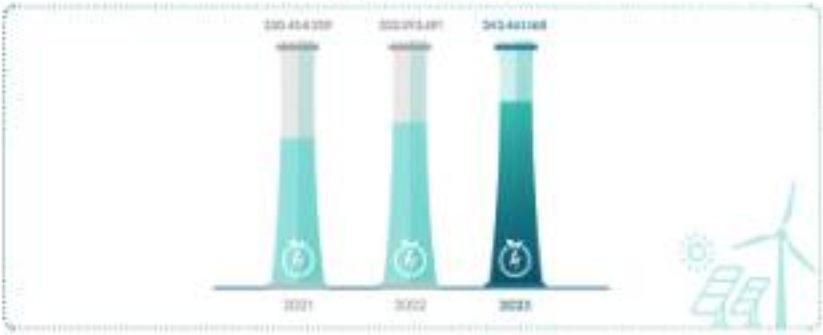

Aset Lancar
Current Assets

Jumlah Aset Lancar tahun 2023 adalah sebesar Rp48,88 triliun meningkat 41,49% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp34,55 triliun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan jumlah piutang usaha tenaga listrik.

Total Current Assets in 2023 amounted to Rp48.88 trillion, an increase of 41.49% compared to 2022 of Rp34.55 trillion. The increase was mainly influenced by an increase in the amount of electricity trade receivables.

Tabel Aset Lancar (Rp juta)
Current Assets (Rp million)

Uraian (Description)	2021*)	2022*)	2023	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Deposito Berjangka Time Deposits	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya Restricted cash in banks and time deposits	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Piutang Usaha Trade Receivables	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Piutang Lain-lain bagian lancar Other Receivables – current portion	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Piutang kepada ventura bersama bagian lancar Receivables from Joint Ventures –current portion	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Persediaan Inventories	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pajak Dibayar Dimuka bagian lancar Prepaid Taxes – current portion	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka Prepaid Expenses and Advances	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Jumlah Aset Lancar Total Current Assets	32.727.909	34.548.253	48.883.318	41,49	14.335.065

*) Disajikan kembali *) As Restated

Grafik Aset Lancar (Rp juta)
Chart of Current Assets (Rp million)

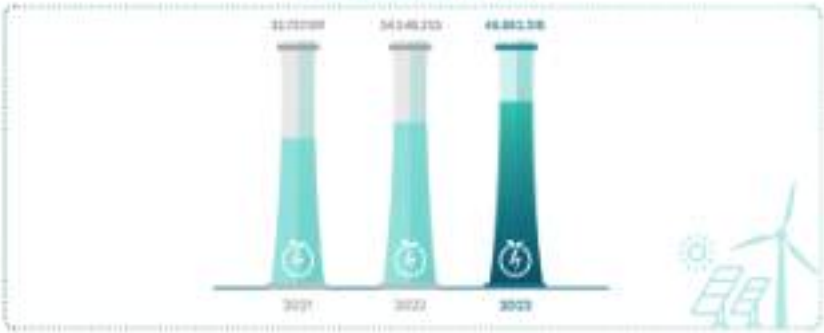

Kas dan Setara Kas
Cash and Cash Equivalents

Jumlah Kas dan Setara Kas tahun 2023 adalah sebesar Rp6,88 triliun menurun 33,57% dibandingkan tahun 2022 adalah sebesar Rp8,96 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh jumlah pencairan piutang melalui penerimaan kas dari tagihan Penjualan Tenaga Listrik yang lebih rendah di tahun 2023. Saldo kas PLN NP masih dianggap mencukupi untuk kebutuhan operasional sejalan dengan kebijakan manajemen kas terpusat PLN (Optimasi Cash Management PLN Holding).

In 2023, total Cash and Cash Equivalents were Rp6.88 trillion, a decrease of 33.57% compared to Rp8.96 trillion in 2022. The decrease was mainly caused by the total receivables disbursement through cash receipts from lower Sales of Electricity bills in 2023. PLN NP's cash balance was considered sufficient for operational needs in line with PLN's centralized cash management policy (PLN Holding Cash Management Optimization).

Tabel Kas dan Setara Kas (Rp juta)
Table of Cash and Cash Equivalents (Rp million)

Uraian Description	2021	2022*)	2023	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Kas Cash on Hand	1.004	1.478	2.062	39,51	584
Bank Cash in Banks	6.399.339	8.375.353	6.435.012	(23,17)	(1.940.340)
Pihak Berelasi Related Parties	6.261.488	8.378.490	6.360.366	(23,54)	(1.958.044)
Pihak Ketiga Third Parties	138.031	96.863	74.647	(22,91)	(17.704)
Deposito Berjangka Time Deposits	942.645	581.327	409.211	(29,61)	(172.116)
Pihak Berelasi Relat Parties	942.532	581.215	409.100	(29,61)	(172.116)
Pihak Ketiga Third Parties	113	113	113	0,00	0
Jumlah Kas dan Setara Kas Total Cash and Cash Equivalents	7.342.988	8.958.158	6.846.288	(23,57)	(2.111.870)

*) Disajikan Kembali *) Restated

Grafik Kas dan Setara Kas (Rp juta)
Chart of Cash and Cash Equivalents (Rp million)

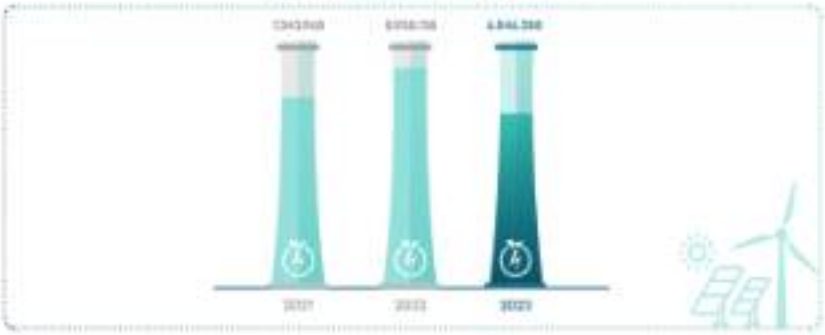

Deposito Berjangka
Time Deposits

Jumlah Deposito Berjangka tahun 2023 adalah sebesar Rp881,72 miliar meningkat 79,87% dibandingkan tahun 2022 adalah sebesar Rp491,30 miliar. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh penambahan penempatan deposito berjangka yang lebih tinggi di tahun 2023 (Perolehan Kas dari Pembayaran SML dan Dividen Asosiasi PLN NR (30.1%)) ditempatkan pada deposito berjangka).

In 2023, total Time Deposits were Rp881,72 billion, an increase of 79.87% compared to Rp491,30 billion in 2022. The increase was mainly influenced by the addition of higher placement of time deposits in 2023 (Cash Acquisition from SML Payment and Dividend of PLN NR Association (30.1%)) placed in time deposits).

Grafik Deposito Berjangka (Rp juta)
Chart of Time Deposits (Rp million)

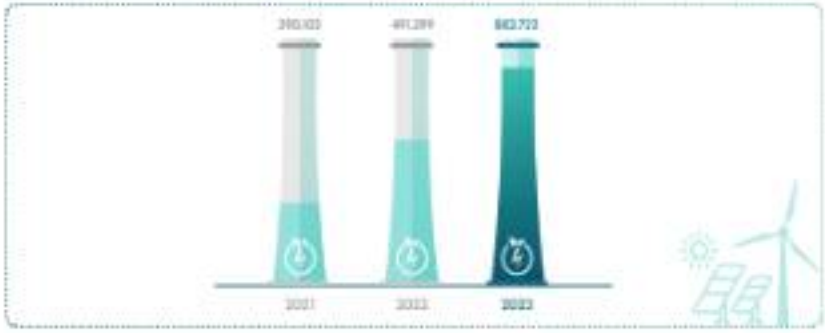

Rekening Bank dan Deposito Berjangka Dibatasi Penggunaannya

Restricted Cash in Banks and Time Deposits

Pada tahun 2023 saldo atas jumlah rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya dalam jangka pendek sebesar Rp89,61 miliar menurun 70,27% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp301,42 miliar. Hal ini disebabkan oleh telah selesainya standby letter of credit (SBLC) di Asosiasi PLN NR (PNSE) sehingga dana di dalamnya dapat ditarik keluar dari Rekening Bank dan Deposito Berjangka untuk meningkatkan likuiditas.

In 2023, the balance of total restricted cash in banks and time deposits in short term was Rp89.61 billion, a decrease of 70.27% compared to Rp301.42 billion in 2022. It was due to the completion of a standby letter of credit (SBLC) at PLN NR Association (PNSE) so that the fund could be withdrawn from Cash in Banks and Time Deposits to improve liquidity.

Piutang Usaha

Trade Receivables

Jumlah Piutang Usaha PLN NP pada tahun 2023 adalah sebesar Rp35,84 triliun meningkat 89,78% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp18,89 triliun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh jumlah pemusatan piutang melalui penerimaan kas dari tagihan Penjualan Tenaga Listrik yang lebih rendah di tahun 2023.

In 2023, PLN NP's total Trade Receivables were Rp35.84 trillion, an increase of 89.78% compared to Rp18.89 trillion in 2022. The increase was mainly influenced by the total disbursement of receivables through cash receipts from lower Sales of Electricity bills in 2023.

Tabel Piutang Usaha (Rp juta)

Table of Trade Receivables (Rp million)

Uraian Description	2021*)	2022*)	2023	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Pihak Berelasi Related Parties	21.304.099	18.811.016	35.743.888	90,00	16.932.874
Pihak Ketiga Third Parties	20.968	121.219	988.511	11,80	16.719
Cadangan kerugian kredit ekspektasian Allowance for expected credit losses	(21.697)	(54.338)	(91.548)	(15,42)	8.690
Jumlah Piutang Usaha Total Trade Receivables	**20.303.370**	**18.885.917**	**35.841.299**	**89,78**	**16.955.382**

*) Disajikan kembali *) As Restated

Tabel Piutang Usaha (Rp juta)

Chart of Trade Receivables (Rp million)

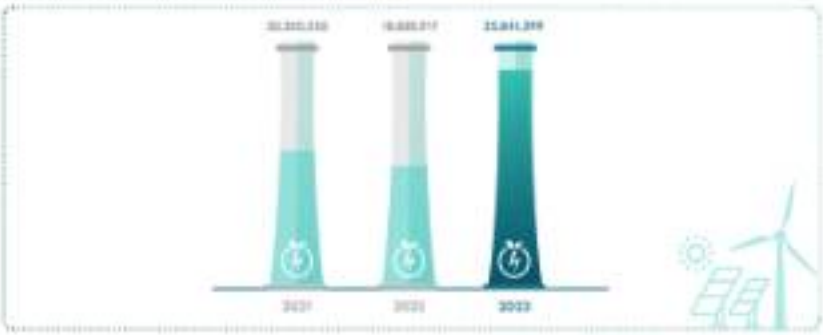

Piutang Lain-lain bagian Lancar
Other Receivables - Current Portion

Jumlah Piutang Lain-lain PLN NP pada tahun 2022 adalah sebesar Rp239,32 miliar menurun 31,33% dibandingkan tahun 2021 adalah sebesar Rp347,98 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh kolektibilitas penagihan piutang yang lebih baik di tahun 2021.

In 2021, PLN NP's Other Receivables were Rp239,32 billion, a decrease of 31,33% compared to Rp347,98 billion in 2020. The decrease was due to better receivables collectibility in 2021.

Piutang kepada Ventura Bersama
Receivables from Joint Ventures

Jumlah Piutang kepada Ventura Bersama Bagian Lancar PLN NP tahun 2021 adalah sebesar Rp84,92 miliar menurun 1,28% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp87,79 miliar. Sedangkan jumlah Piutang kepada Ventura Bersama Bagian Tidak Lancar PLN NP tahun 2021 sebesar Rp602,44 miliar menurun 20,32% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp756,07 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya pelunasan pinjaman pada Entitas Ventura Bersama.

In 2021, the Current Portion of PLN NP's total Receivables from Joint Ventures was Rp84,92 billion, a decrease of 1,28% compared to Rp87,79 billion in 2020. Meanwhile, the Non-Current Portion of PLN NP's total Receivables from Joint Ventures in 2021 was Rp602,44 billion, a decrease of 20,32% compared to Rp756,07 billion in 2020. The decrease was due to the repayment of loans to Joint Venture Entities.

Persediaan
Inventories

Jumlah Persediaan tahun 2021 adalah sebesar Rp4,36 triliun menurun 7,25% dibandingkan tahun 2020 adalah sebesar Rp4,69 triliun. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya penggunaan Batubara yang lebih tinggi dari target sesuai permintaan sistem.

In 2021, the total Inventory was Rp4,36 trillion, a decrease of 7,25% compared to Rp4,69 trillion in 2020. The decrease was due to the use of Coal, which was higher than the target according to system demand.

Tabel Persediaan (Rp juta)
Table of Inventories (Rp million)

Uraian Description	2021*)	2020*)	2019	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Batubara, Bahan Bakar dan Pelumas Coal, Fuel, and Lubricants	3.603.068	4.066.353	3.869.840	(14,00)	(596.663)
Material Pemeliharaan Material Maintenance	731.911	632.401	889.033	40,66	257.542
Cadangan penurunan nilai persediaan dan persediaan usang Allowance for impairment of inventories and inventory obsolescence	(36.997)	(46.099)	(40.033)	0,01	(3.232)
Jumlah Persediaan Total Inventories	3.295.182	4.652.665	4.340.919	(7,25)	(344.754)

*) Disajikan kembali *) As Restated

Tabel Persediaan (Rp juta)
Chart of Inventories (Rp million)

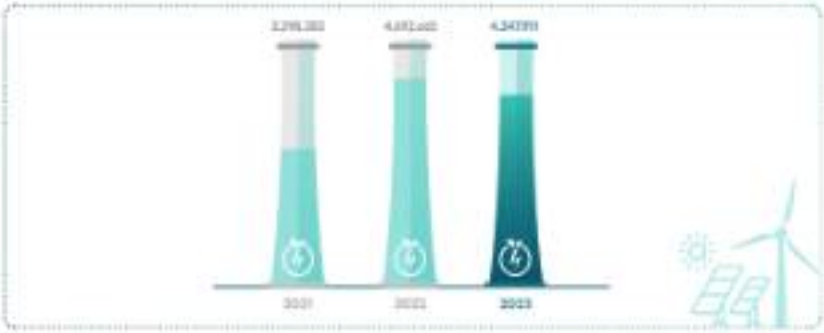

Pajak Dibayar Dimuka
Prepaid Taxes

Jumlah Pajak Dibayar Dimuka bagian lancar PLN NP tahun 2022 adalah sebesar Rp424,14 miliar menurun 39,54% dibandingkan tahun 2021 adalah sebesar Rp701,46 miliar, sedangkan Pajak Dibayar Dimuka bagian tidak lancar PLN NP tahun 2022 adalah sebesar Rp4,331 miliar meningkat 130,69% dibandingkan tahun 2021 adalah sebesar Rp189,48 miliar. Hal ini dipengaruhi oleh reklasifikasi ke nilai jangka panjang sesuai dengan jadwal jatuh tempo pajak yang lebih panjang dibandingkan tahun 2021.

In 2022, the current portion of PLN NP's Prepaid Tax was Rp424,14 billion, a decrease of 39.54% compared to Rp701.46 billion in 2021, while the non-current portion of PLN NP's Prepaid Tax in 2022 was Rp4,331 billion, an increase of 130.69% compared to Rp189.48 billion in 2021. This was influenced by the reclassification to long-term value in accordance with the longer tax maturity schedule compared to 2021.

Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka
Prepaid Advances and Advances

Jumlah Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka tahun 2022 adalah sebesar Rp144,12 miliar meningkat 41,90% dibandingkan tahun 2021 adalah sebesar Rp101,56 miliar. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh adanya penambahan kontrak sewa baru di tahun 2022.

In 2022, total Prepaid Expenses and Advances were Rp144.12 billion, an increase of 41.90% compared to Rp101.56 billion in 2021. The increase was mainly due to the addition of new lease contracts in 2022.

Aset Tidak Lancar
Non-current Assets

Jumlah Aset Tidak Lancar PLN NP tahun 2022 adalah sebesar Rp294,58 triliun menurun 1,16% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp298,05 triliun. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh adanya pelunasan pada pinjaman ventura Bersama asosiasi PLN NP (SG PJB).

The total Non-current Assets of PLN NP in 2022 were Rp294.58 trillion, a decrease of 1.16% compared to Rp298.05 trillion in 2021. The decrease was influenced by the repayment of receivables from PLN NP's associate joint venture (SG PJB).

Tabel Aset Tidak Lancar (Rp juta)
Table of Non-current Assets (Rp million)

Uraian (Description)	2021*)	2022*)	2023	Peningkatan/Penurunan (Increase/Decrease)	
				%	Nominal
Aset Tetap (Property, Plant, and Equipment)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Properti Investasi (Investment Properties)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Investasi pada Entitas Asosiasi/Ventura Bersama (Investments in Associates/Joint Ventures)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Rekening Bank dan Deposito Berjangka Dibatasi Penggunaannya (Restricted Cash in Banks and Time Deposits)	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Aset Pajak Tangguhan - Bersih (Deferred Tax Assets - Net)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Piutang kepada Ventura Bersama bagian tidak lancar (Receivables from Joint Ventures – non-current portion)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Piutang Lain-lain bagian tidak lancar (Other Receivables – non-current portion)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pajak dibayar di muka bagian tidak lancar (Prepaid Taxes – non-current portion)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Aset Tidak Lancar Lain (Other Non-current Assets)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Jumlah Aset Tidak Lancar (Total Non-current Assets)	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**

*) Diaudit (Audited) *) Un-Audited

Grafik Aset Tidak Lancar (Rp juta)
Chart of Non-current Assets (Rp million)

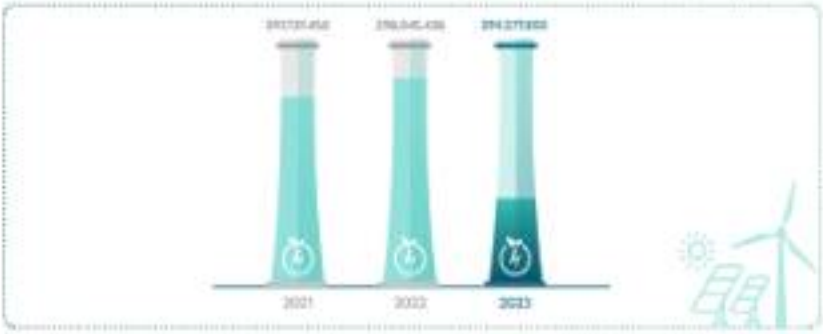

Aset Tetap
Property, Plant, and Equipment

Jumlah Aset Tetap PLN NP tahun 2023 adalah sebesar Rp273,87 triliun mengalami 1,83% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp278,98 triliun. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya penurunan nilai Aset Tetap Tidak Beroperasi (ATTB) sesuai progress pelaksanaan.

The total Property, Plant, and Equipment of PLN NP in 2023 was Rp273,87 trillion, a decrease of 1,83% compared to Rp278,98 trillion in 2022. The decrease was due to a decrease in the value of Non-Operating Property, Plant, and Equipment (ATTB) in accordance with the implementation progress.

Tabel Aset Tetap (Rp juta)
Table of Property, Plant, and Equipment (Rp million)

Uraian Description	2021[1]	2022[1]	2023	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Tanah dan Hak Atas Tanah Land and Land Rights	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Bangunan Umum, Waduk, dan Prasarana Buildings, Reservoirs, and Infrastructure	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Instalasi dan Mesin Pembangkit Installation and Power Plants	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Peralatan Transmisi dan Distribusi Transmissions and Distribution Equipment	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Peralatan Pengolahan Data dan Telekomunikasi Telecommunications and Data Processing Equipment	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Peralatan Umum General Equipment	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Kendaraan Bermotor Motor Vehicles	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Material Cadangan Utama Major Spare Parts	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Aset Hak Guna Right-of-use Assets	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Aset Dalam Pembangunan Construction in Progress	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Aset Tidak Digunakan dalam Operasi Assets Not Used in Operations	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Penyisihan Penurunan Nilai Provision for Impairment Losses	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-
Jumlah Aset Tetap Total Property, Plant, and Equipment	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**

[1] [illegible] [2] [illegible]

Grafik Aset Tetap (Rp juta)
Chart of Property, Plant, and Equipment (Rp million)

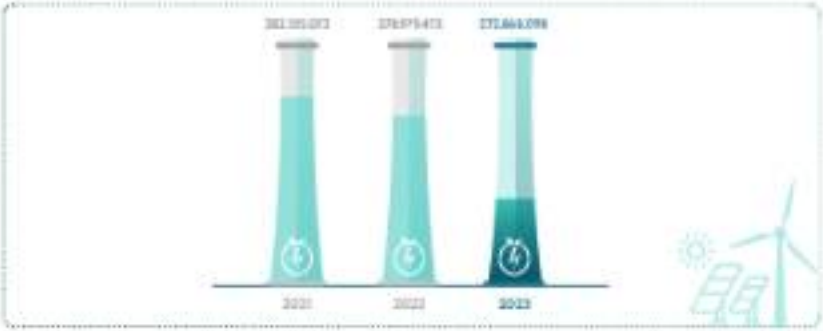

Properti Investasi

Investment Properties

Properti investasi merupakan tanah milik Perusahaan yang berlokasi di Pelton - Jawa Timur, Bekasi - Jawa Barat, Pluit - Jakarta Utara, Cipeundeuy - Bandung Barat dan Asahan - Sumatera Utara dengan hak legal berupa HGB (Hak Guna Bangunan) berjangka waktu dari 32 sampai 40 tahun, jatuh tempo pada 2032, yang disewakan kepada PT PLN (Persero), PT Pelton Energy, PT Jawa Power, PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero), PT Anugerah Mega Energi, PT Pertamina Hulu Energi ONWJ, PT Nusantara Regas, PT Cinta Karya Lestari, BUT Sinohydro Corporation Limited dan PT Bajradaya Sentramusa.

Investment property is land owned by the Company located in Pelton - East Java, Bekasi - West Java, Pluit - North Jakarta, Cipeundeuy - West Bandung, and Asahan - North Sumatra with legal rights in the form of HGB (Right to Build) with a period of 32 to 40 years, maturing in 2032, leased to PT PLN (Persero), PT Pelton Energy, PT Jawa Power, PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero), PT Anugerah Mega Energi, PT Pertamina Hulu Energi ONWJ, PT Nusantara Regas, PT Cinta Karya Lestari, BUT Sinohydro Corporation Limited, and PT Bajradaya Sentramusa.

Jumlah Properti Investasi PLN NP tahun 2023 adalah sebesar Rp1,63 triliun meningkat 3,37% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp1,57 triliun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh adanya perubahan pada nilai wajar. Grup juga mencatat perubahan nilai wajar yang disajikan sebagai bagian dari penghasilan/(beban) lain-lain bersih dalam laporan laba rugi konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

In 2023, PLN NP's total Investment Property was Rp1,63 trillion, an increase of 3,37% compared to Rp1,57 trillion in 2022. The increase was mainly due to changes in fair value. The Group also recorded changes in fair value, which are presented as part of other income/ (expense) - net in the consolidated statements of profit or loss for the years ended December 31, 2023, and 2022.

Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

Investment in Associates and Joint Ventures

Jumlah Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama PLN NP tahun 2023 adalah sebesar Rp17,49 triliun meningkat 6,56% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp16,71 triliun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh adanya penambahan penyertaan pada Asosiasi NRI (15 Persen).

In 2023, PLN NP's total Investment in Associates and Joint Ventures was Rp17,49 trillion, an increase of 6,56% compared to Rp16,71 trillion in 2022. The increase was mainly influenced by the additional investment in NRI Associates (15 Percent).

Rekening Bank dan Deposito Berjangka Dibatasi Penggunaannya

Restricted Cash in Banks and Time Deposits

Jumlah Rekening Bank dan Deposito Berjangka Dibatasi Penggunaannya PLN NP tahun 2023 adalah sebesar Rp5,15 miliar meningkat 42,7% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp3,23 miliar. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh telah selesainya standby letter of credit (SBLC) di Anak Perusahaan (PLN NR) sehingga dana di dalamnya dapat ditarik kelua dari Rekening Bank dan Deposito Berjangka jangka panjang untuk meningkatkan likuiditas.

The total of PLN NP's Restricted Cash in Banks and Time Deposits in 2023 was Rp5,15 billion, an increase of 42,7% compared to Rp3,23 billion in 2022. The increase was mainly influenced by the completion of the standby letter of credit (SBLC) at the Subsidiary (PLN NR) so that the funds in it could be withdrawn from the long-term Cash in Banks and Time Deposits to improve liquidity.

Aset Pajak Tangguhan – Bersih

Deferred Tax Assets – Net

Jumlah Aset Pajak Tangguhan – Bersih PLN NP tahun 2023 adalah sebesar Rp7,95 miliar menurun 0,85% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp14,57 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh penyesuaian dengan jumlah nilai aset tetap pada tahun berjalan.

In 2023, PLN NP's Deferred Tax Assets - Net was Rp7,95 billion, a decrease of 0,85% compared to Rp14,57 billion in 2022. The decrease was due to adjustments to the total value of property, plant, and equipment in the current year.

Aset Tidak Lancar Lainnya
Other Non-current Assets

Jumlah Aset Tidak Lancar Lainnya PLN NP tahun 2023 adalah sebesar Rp309,25 miliar meningkat 14,8% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp269,37 miliar. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan jumlah biaya ditangguhkan seiring dengan bertambahnya progres atas proyek-proyek baru.

In 2023, PLN NP's Other Non-Current Assets were Rp309.25 billion, an increase of 14.8% compared to Rp269.37 billion in 2022. The increase was mainly influenced by the increased total deferred costs in line with the increasing progress of new projects.

Liabilitas
Liabilities

Jumlah Liabilitas meningkat menjadi Rp34,60 triliun

Total Liabilities increased to Rp34.60 trillion

Jumlah Liabilitas PLN NP tahun 2023 adalah sebesar Rp34,60 triliun meningkat 12,47% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp30,76 triliun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh penambahan liabilitas imbalan kerja karena penyesuaian imbalan kerja jatuh tempo oleh aktuaris dan penambahan liabilitas pajak tangguhan yang menyesuaikan perbedaan temporer.

PLN NP's total liabilities in 2023 were Rp34.60 trillion, an increase of 12.47% compared to Rp30.76 trillion in 2022. The increase was mainly influenced by the addition of employee benefits liabilities due to the adjustment of employee benefits maturity by actuaries and the addition of deferred tax liabilities that adjust temporary differences.

Tabel Liabilitas (Rp juta)
Table of Liabilities (Rp million)

Uraian Description	2021*)	2022*)	2023	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Liabilitas Jangka Panjang Non-current Liabilities	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**12,47**	**[illegible]**

*) Disajikan kembali *) As restated

Grafik Liabilitas (Rp juta)
Chart of Liabilities (Rp million)

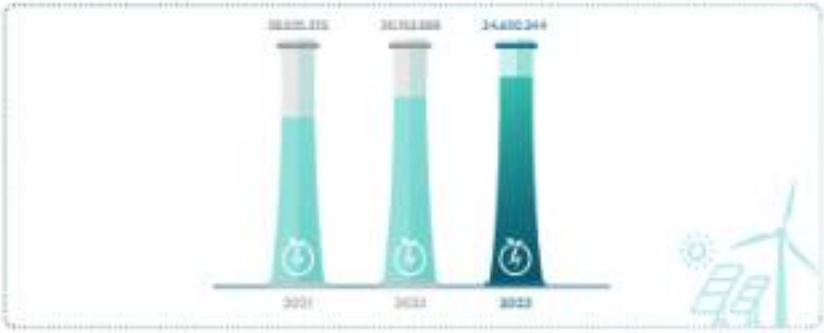

Liabilitas Jangka Pendek

Current Liabilities

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek PLN NP tahun 2023 adalah sebesar Rp110 triliun meningkat 11,96% dibandingkan tahun 2022 adalah sebesar Rp99 triliun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan utang lain-lain pada transaksi biaya energi impor.

The total Current Liabilities of PLN NP in 2023 was Rp110 trillion, an increase of 11.96% compared to Rp99 trillion in 2022. The increase was mainly influenced by an increase in other payables on imported energy cost transactions.

Tabel Liabilitas Jangka Pendek (Rp juta)

Table of Current Liabilities (Rp million)

Uraian Description	2021*)	2022*)	2023	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Utang Usaha Trade Payables	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Utang Lain-lain Other Payables	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Utang Pajak Lainnya Other Taxes Payable	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Utang Pajak Penghasilan Badan Corporate Income Tax Payable	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Beban Masih Harus Dibayar Accrued Expenses	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Liabilitas Sewa - bagian jangka pendek Lease Liabilities - short-term portion	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pinjaman dari Pemegang Saham - Jangka Pendek Loans from Shareholder - Short-term	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek Short-term Employee Benefits Liabilities	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities	**12.841.571**	**9.914.987**	**11.101.047**	**11,96**	**1.186.060**

*) Disajikan kembali *) As Restated

Grafik Liabilitas Jangka Pendek (Rp juta)

Chart of Current Liabilities (Rp million)

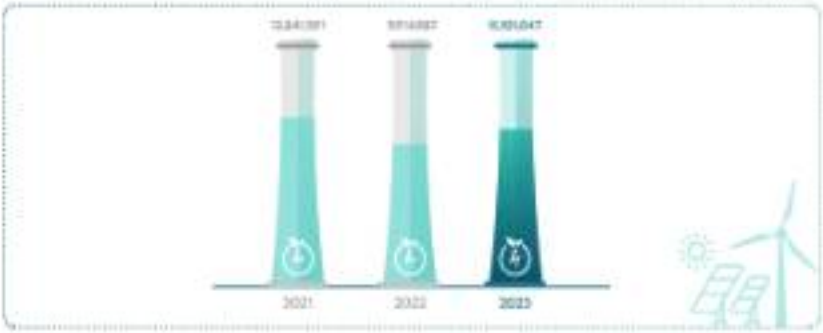

Utang Usaha
Trade Payables

Jumlah utang usaha PLN NP tahun 2023 adalah sebesar Rp277 triliun meningkat 1,89% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp262 triliun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh penambahan hutang atas material dan jasa untuk persiapan pemeliharaan unit.

PLN NP's total trade payables in 2023 was Rp277 trillion, an increase of 1,89% compared to Rp262 trillion in 2022. The increase was mainly influenced by the addition of payables for materials and services in preparation for unit maintenance.

Tabel Utang Usaha (Rp juta)
Table of Trade Payables (Rp million)

Uraian Description	2021*)	2022*)	2023	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Pihak berelasi Related Parties	6.721.445	4.124.070	2.778.332	(32,63)	(1.345.738)
Pihak ketiga Third Parties	4.088.849	3.503.167	4.993.190	42,54	1.490.023
Jumlah Utang Usaha Total Trade Payables	**10.810.294**	**7.627.237**	**7.771.522**	**1,89**	**144.285**

*) Disajikan kembali *) As Restated

Grafik Utang Usaha (Rp juta)
Chart of Trade Payables (Rp million)

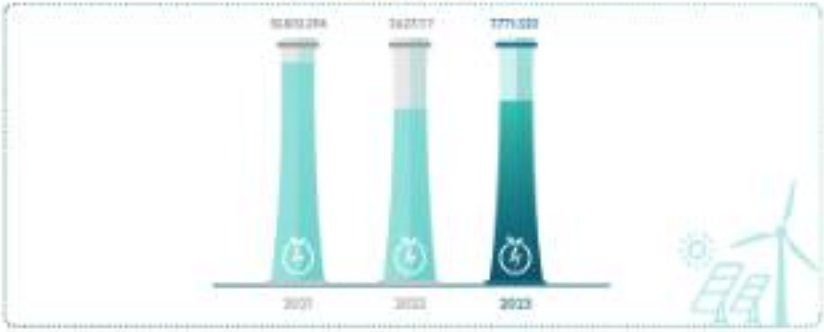

Utang Lain-lain
Other Payables

Jumlah Utang Lain-lain PLN NP tahun 2023 adalah sebesar Rp1,57 triliun meningkat 94,08% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp810,04 miliar. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh penambahan hutang atas biaya energi impor unit.

PLN NP's total Other Payables in 2023 was Rp1,57 trillion, an increase of 94,08% compared to Rp810,04 billion in 2022. The increase was mainly influenced by the addition of payables for the cost of imported energy units.

Tabel Utang Lain-lain (Rp juta)
Table of Other Payables (Rp million)

Uraian (Description)	2021*)	2022*)	2023	Peningkatan/Penurunan (Increase/Decrease)	
				%	Nominal
Pihak ketiga Third parties	562.705	496.943	1.259.942	164,94	770.999
Pihak berelasi Related parties	161.219	313.099	312.709	(1,24)	(3.890)
Jumlah Utang Lain-lain Total Other Payables	**723.924**	**810.042**	**1.572.651**	**94,16**	**762.609**

*) Disajikan kembali *) As Restated

Utang Pajak Lainnya
Other Taxes Payable

Jumlah Utang Pajak PLN NP tahun 2023 adalah sebesar Rp192,32 miliar meningkat 573,85% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp21,97 miliar. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh penambahan akrual biaya kepegawaian yang meningkatkan hutang pajak PPh pasal 21, serta penambahan biaya jasa dan material untuk kesiapan pemeliharan unit yang meningkatkan hutang pajak PPh pasal 23 dan PPh pasal 21.

PLN NP's total Tax Payable in 2023 was Rp192,32 billion, an increase of 573,85% compared to Rp21,97 billion in 2022. The increase was mainly influenced by the addition of accruals of personnel expenses, which increased Income Tax Article 21 payable, as well as the addition of service and material costs for unit maintenance readiness, which increased Income Tax Article 23 and Income Tax Article 21 payable.

Utang Pajak Penghasilan Badan
Corporate Income Tax Payable

Jumlah Utang Pajak Penghasilan Badan PLN NP tahun 2023 adalah sebesar Rp5,92 miliar menurun 93,67% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp62,01 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh telah dilunasinya hutang pajak atas penjualan gedung di Anak Perusahaan (PT Nusantara Power Construction sebelumnya PT Rekadaya Elektrika).

PLN NP's Corporate Income Tax Payable in 2023 was Rp5,92 billion, a decrease of 93,67% compared to Rp62,01 billion in 2022. The decrease was due to the repayment of tax payable on the sale of buildings in the Subsidiary (PT Nusantara Power Construction, formerly PT Rekadaya Elektrika).

Beban Masih Harus Dibayar
Accrued Expenses

Jumlah beban masih harus dibayar PLN NP tahun 2023 adalah sebesar Rp10,09 miliar meningkat 44,29% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp7,84 miliar. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh belum terealisasinya beberapa biaya kepegawaian di tahun 2023 sehingga menambah jumlah akrual biaya kepegawaian.

The total accrued expenses of PLN NP in 2023 was Rp10,09 billion, an increase of 44,29% compared to Rp7,84 billion in 2022. The increase was mainly influenced by the non-realized of several personnel expenses in 2023. Hence, it increased the total accrual of personnel expenses.

Liabilitas Sewa
Lease Liabilities

Jumlah liabilitas sewa bagian jangka pendek tahun 2023 adalah sebesar Rp216,09 miliar meningkat 94,46% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp111,15 miliar. Sedangkan jumlah liabilitas sewa bagian jangka panjang tahun 2023 adalah sebesar Rp1,32 triliun meningkat 18,62% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp1,96 triliun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh adanya penambahan kontrak sewa baru di tahun 2023.

The short-term portion of lease liabilities in 2023 was Rp216,09 billion, an increase of 94,46% compared to Rp111,15 billion in 2022. Meanwhile, the total long-term portion of lease liabilities in 2023 was Rp1,32 trillion, an increase of 18,62% compared to Rp1,96 trillion in 2022. The increase was mainly due to the addition of new lease contracts in 2023.

Pinjaman dari Pemegang Saham
Loans from Shareholder

Pinjaman dari pemegang saham jangka pendek tahun 2023 adalah sebesar Rp28.701 miliar menurun 1,89% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp29.126 miliar. Sedangkan jumlah pinjaman dari Pemegang Saham jangka panjang tahun 2023 adalah sebesar Rp1,99 triliun menurun 12,92% dibandingkan tahun 2022 adalah sebesar Rp2,28 triliun. Hal ini dipengaruhi oleh adanya pembayaran angsuran atas pinjaman dari pemegang saham di tahun 2023.

The short-term loans from shareholders in 2023 were Rp28.701 billion, a decrease of 1,89% compared to Rp29.126 billion in 2022. While the long-term loans from shareholders in 2023 were Rp1,99 trillion, a decrease of 12,92% compared to Rp2,28 trillion in 2022. This was influenced by the installment payments on loans from shareholders in 2023.

Liabilitas Imbalan Kerja
Employee Benefits Liabilities

Jumlah Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek tahun 2023 adalah sebesar Rp849,08 miliar meningkat 10,93% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp765,40 miliar. Sedangkan jumlah Liabilitas imbalan kerja jangka panjang tahun 2023 adalah sebesar Rp5,63 triliun meningkat 4,98% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp5,46 triliun. Hal ini dipengaruhi oleh penyesuaian nilai imbalan kerja jatuh tempo oleh aktuaria, menyesuaikan dengan data kepegawaian.

Total Short-term Employee Benefits Liabilities in 2023 was Rp849,08 billion, an increase of 10,93% compared to Rp765,40 billion in 2022. While the total long-term Employee Benefits Liabilities in 2023 was Rp5,63 trillion, increased by 4,98% compared to Rp5,46 trillion in 2022. It was influenced by the adjustment of the value of employee benefits maturity by the actuary, adjusting to the employment data.

Liabilitas Jangka Panjang
Non-current Liabilities

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang PLN NP tahun 2023 adalah sebesar Rp22,50 triliun meningkat 12,71% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp20,00 triliun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh penambahan liabilitas imbalan kerja karena penyesuaian imbalan kerja jatuh tempo oleh aktuaria dan penambahan liabilitas pajak tangguhan yang menyesuaikan perbedaan temporer.

In 2023, PLN NP's total Non-current Liabilities were Rp22,50 trillion, an increase of 12,71% compared to Rp20,00 trillion in 2022. The increase was mainly influenced by the additional employee benefits liabilities due to the adjustment of employee benefits maturity by the actuary and the addition of deferred tax liabilities that adjust temporary differences.

Tabel Liabilitas Jangka Panjang (Rp juta)
Table of Non-current Liabilities (Rp million)

Uraian Description	2021*)	2022*)	2023	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Liabilitas Pajak Tangguhan - Bersih Deferred Tax Liabilities - Net	10.240.148	10.890.609	10.890.093	19,08	2.495.402
Pinjaman dari Pemegang Saham Jangka Panjang Loans From Shareholder – long-term	3.183.228	2.286.533	1.997.538	(18,93)	(296.995)
Liabilitas Sewa - Bagian jangka panjang Lease Liabilities – long-term portion	52.771	1.955.286	2.119.295	8,62	164.037
Liabilitas Imbalan Kerja Employee Benefits Liabilities	2.695.370	3.457.977	3.630.268	4,98	172.293
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Total Non-current Liabilities	**15.971.664**	**20.040.701**	**22.499.297**	**12,71**	**2.459.396**

*) Disajikan kembali *) As Restated

Grafik Liabilitas Jangka Panjang (Rp juta)
Chart of Non-current Liabilities (Rp million)

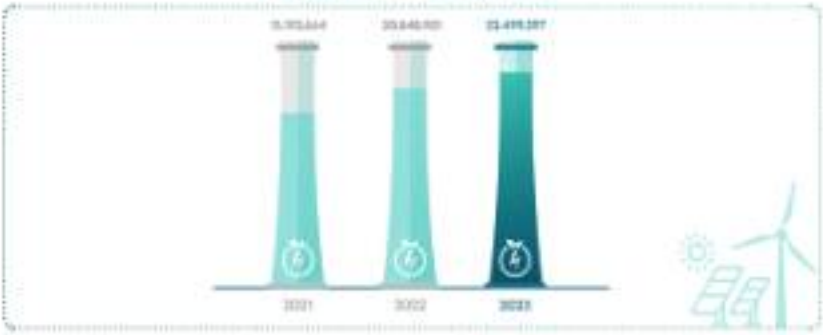

Liabilitas Pajak Tangguhan – Bersih
Deferred Tax Liabilities – Net

Jumlah Liabilitas Pajak Tangguhan – Bersih tahun 2023 adalah sebesar Rp15,55 triliun meningkat 190% dibandingkan tahun 2022 adalah sebesar Rp10,04 triliun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh penambahan liabilitas pajak tangguhan yang menyesuaikan perbedaan temporer.

In 2023, total Deferred Tax Liabilities – Net was Rp15.55 trillion, an increase of 190% compared to Rp10.04 trillion in 2022. The increase was mainly influenced by the additional deferred tax liabilities that adjust temporary differences.

Ekuitas
Equity

Jumlah Ekuitas meningkat menjadi Rp308,86 triliun

Total Equity increased to Rp308.86 trillion

Jumlah Ekuitas PLN NP tahun 2023 adalah sebesar Rp308,86 triliun meningkat 3,15% dibandingkan 2022 adalah sebesar Rp301,83 triliun. Peningkatan ekuitas di tahun 2023 dipengaruhi oleh pencapaian laba di tahun 2023 yang melebihi target.

The total Equity of PLN NP in 2023 was Rp308.86 trillion, an increase of 3.15% compared to Rp301.83 trillion in 2022. The increase in equity in 2023 was influenced by the profit achievement in 2023, which exceeded the target.

Tabel Ekuitas (Rp juta)
Table of Equity (Rp million)

Uraian Description	2021*)	2022*)	2023	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Modal Saham – Nilai Nominal Rp500 (Nilai Penuh) Per Saham Capital Stock – Par Value of Rp500 (Full Amount) per Share					

Uraian Description	2021*)	2022*)	2023	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Modal Dasar - 1.234.042 juta Saham (Tahun 2022 dan sebelumnya 6.000 juta saham). Authorized - 1.234.042 million Shares (6.000 million shares in 2022 and previously)					
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - 308.510 juta Saham (Tahun 2022 dan sebelumnya 24.020 juta saham) Subscribed and Fully Paid-up - 308.510 million Shares (24.020 million shares in 2022 and previously)	3.000.000	3.000.000	154.255.249	5.141,84	151.255.249
Tambahan Modal Disetor Additional Paid-in Capital	2.195.205	2.890.809	94.808.390	(1.445,81)	(91.879.205)
Ekuitas Hasil Entity Equity of Merging Entity	51.221.268	51.556.044	-	-	(51.556.044)
Selisih Transaksi dengan Kepentingan Non-Pengendali Difference in Transaction with Non-controlling Interest	(67.770)	(67.770)	(67.770)	-	-
Saldo Laba Retained Earnings					
Ditentukan Penggunaannya Appropriated	1.429.875	1.429.875	1.429.875	-	-
Tidak Ditentukan Penggunaannya Unappropriated	30.164.759	30.812.569	37.867.720	23,03	7.055.151
Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income	77.498.243	77.074.439	77.055.494	(0,04)	(84.497)
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Equity Attributable to					
Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent	302.218.101	301.557.507	308.847.767	2,42	7.290.260
Kepentingan Non-Pengendali Non-controlling interests	243.083	270.236	296.667	7,83	20.391
Jumlah Ekuitas Total Equity	**302.491.204**	**301.827.803**	**308.845.824**	**2,33**	**7.031.021**

*) Disajikan kembali *) As Restated

Grafik Ekuitas (Rp juta)
Chart of Equity (Rp million)

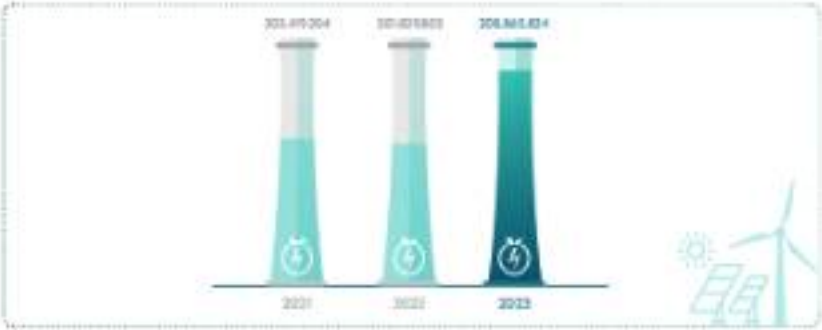

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Subscribed and Fully Paid-up

Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Perusahaan diharuskan untuk membuat penyisihan cadangan wajib tinggal sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Tidak ada batasan waktu untuk membentuk cadangan tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 1 Januari 2022, Perusahaan belum membentuk cadangan umum sesuai dengan Undang-Undang tersebut.

Based on the Law on Limited Liability Companies, the Company is required to make a mandatory reserve provision of up to at least 20% of the total subscribed and fully paid-up capital. There is no time limit to establish such reserves. As of December 31, 2023, 2022, and January 1, 2022, the Company has not established a general reserve in accordance with the Law.

Berdasarkan Akta Notaris No. 70 tanggal 30 Desember 2023 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PLN Nusantara Power yang juga memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0000006.AH.01.02.TAHUN 2023, dampak pembentukan struktur subholding (Catatan 1b dalam Laporan Keuangan Audited) terhadap komposisi modal saham Perusahaan yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Based on Notarial Deed No. 70 dated December 30, 2023, concerning Amendments to the Articles of Association of PT PLN Nusantara Power, which also obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0000006.AH.01.02.TAHUN 2023, the impact of the establishment of the sub-holding structure (Note 1b in the Audited Financial Statements) on the composition of the Company's share capital was effective from January 1, 2023.

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh merupakan saham biasa yang memberikan hak untuk memberi satu suara per saham dan berpartisipasi dalam dividen. Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh PLN NP tahun 2023 adalah sebesar Rp54,26 triliun meningkat dibandingkan jumlah di tahun 2022 sebesar Rp5,00 triliun.

The Subscribed and Fully Paid-up represent ordinary shares that provide the right to carry one vote per share and participate in dividends. In 2023, PLN NP's Subscribed and Fully Paid-up was Rp54.26 trillion, an increase compared to Rp5.00 trillion in 2022.

Tambahan Modal Disetor

Additional Paid-In Capital

Tambahan modal disetor sebesar Rp2,87 triliun berasal dari nilai pengalihan aset tetap, termasuk dana rehabilitasi PLTU Gresik Unit 1 dan 2 (berdasarkan Surat Direktur Utama PLN No. 1311/533/DIRUT/2001 tanggal 19 Maret 2001), dan material pemeliharaan sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2000 yang diterima dari PLN.

The additional paid-in capital of Rp2,87 trillion was derived from the transfer value of property, plant, and equipment, including rehabilitation funds for Gresik CFPP Units 1 and 2 (based on Letter of PLN's President Director No. 1311/533/DIRUT/2001 dated March 19, 2001), and maintenance materials from 1996 to 2000 received from PLN.

Berdasarkan Akta Notaris No. 101 tanggal 28 Juli 2023, dari Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta, PLN NPC menjalankan perjanjian jual beli saham dengan PT PLN Enjiniring (PLNE) yang merupakan entitas sepengendali, untuk mengakuisisi 125,074,552 lembar saham biasa atau setara dengan 100% kepemilikan atas PPN dengan mengalihkan 93,411,836 lembar saham biasa atau setara dengan 99,8% kepemilikan atas REC. Selisih sebesar Rp24,26 miliar antara nilai pengalihan dan nilai buku bersih yang diterima dicatat dalam akun ekuitas sebagai tambahan modal disetor.

Based on Notarial Deed No. 101 dated July 28, 2023, from Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notary in Jakarta, RE held a share purchase agreement with PT PLN Enjiniring (PLNE) which is an entity under common control, to acquire 125,074,552 common stocks or equivalent to 100% ownership of PPN by transferring 93,411,836 common stocks or equivalent to 99.8% ownership of REC. The difference of Rp24,26 between the transfer value and net book value received is recorded in the equity account as additional paid-in capital.

Tambahan modal disetor sebesar Rp99,70 triliun berasal dari selisih antara jumlah imbalan yang diakhiran dan nilai buku bersih yang diterima dari PLN (Catatan 5 dalam Laporan Keuangan Audited).

The additional paid-in capital of Rp99,70 trillion was derived from the difference between the total consideration transferred and the net book value received from PLN (Note 5 in the Audited Financial Statements).

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk
Equity Attributable to Owners of the Parent

Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk PLN NP tahun 2023 adalah sebesar Rp308,36 triliun meningkat 2,32% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp301,32 triliun. Peningkatan ini dipengaruhi oleh pencapaian laba di tahun 2023 yang melebihi target.

Total Equity Attributable to Owners of the Parent Entity PLN NP in 2023 was Rp308.36 trillion, an increase of 2.32% compared to Rp301.32 trillion in 2022. This increase was influenced by the profit achievement in 2023, which exceeded the target.

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non-Pengendali
Equity Attributable to Non-controlling Interests

Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non-Pengendali PLN NP tahun 2023 adalah sebesar Rp298,67 miliar meningkat 7,03% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp278,28 miliar. Peningkatan ini dipengaruhi oleh pencapaian laba di tahun 2023 yang melebihi target.

In 2023, PLN NP's Total Equity Attributable to Non-Controlling Interests was Rp298.67 billion, an increase of 7.03% compared to Rp278.28 billion in 2022. This increase was influenced by the profit achievement in 2023, which exceeded the target.

Analisis Arus Kas
Cash Flows Analysis

Jumlah Kas dan Setara Kas menurun menjadi Rp6,85 triliun

Total Cash and Cash Equivalents decreased to Rp6.85 trillion

Jumlah Kas dan Setara Kas PLN NP tahun 2023 adalah sebesar Rp6,85 triliun menurun 23,17% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp8,91 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penerimaan kas dari Jaghan Penjualan Tenaga Listrik yang lebih rendah. Saldo kas PNP masih dianggap mencukupi untuk kebutuhan operasional sejalan dengan kebijakan manajemen kas terpusat PLN (Optimow Cash Management PLN Holding).

PLN NP's total Cash and Cash Equivalents in 2023 was Rp6.85 trillion, a decrease of 23.17% compared to Rp8.91 trillion in 2022. The decrease was mainly due to lower cash receipts from Sales of Electricity bills. PLN NP's cash balance was still considered sufficient for operational needs in line with PLN's centralized cash management policy (PLN Holding Cash Management Optimization).

Tabel Arus Kas (Rp juta)
Table of Cash Flows (Rp million)

Uraian Description	2021	2022(*)	2023	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi Net Cash Provided by Operating Activities	4.202.208	5.799.978	3.059.588	(14,30)	(1.940.390)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi Net Cash Used in Investing Activities	(354.356)	(3.986.039)	(3.496.400)	(14,39)	589.639
Kas Bersih Diperoleh dari Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities	(3.715.115)	(2.969.994)	(2.908.444)	90,07	(61.550)

Uraian Description	2021	2022*)	2023	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
(Penurunan)/Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas Net (Decrease)/Increase in Cash and Cash Equivalents	3.871.157	1.556.945	(1.028.856)	(166,83)	(2.423.804)
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year	3.97.773	7.343.968	8.958.758	21,91	1.614.792
Pengaruh Perubahan Kurs Mata Uang Asing Effect of Changes in Foreign Currency	17.013	57.845	(6.270)	(106,58)	(63.758)
Jumlah Kas dan Setara Kas Akhir Tahun **Total Cash and Cash Equivalents at the End of the Year**	**7.343.968**	**8.958.758**	**6.844.288**	**(23,57)**	**(2.115.870)**

*) Disajikan Kembali, *) As Restated

Grafik Jumlah Kas dan Setara Kas (Rp juta)
Chart of Total Cash and Cash Equivalents (Rp million)

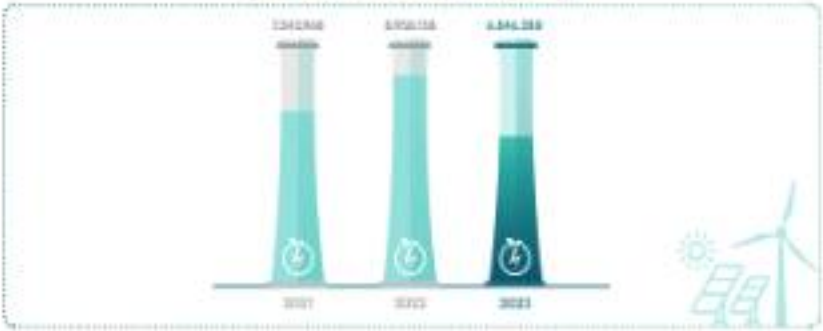

Arus Kas Aktivitas Operasi
Cash Flows of Operating Activities

Jumlah Kas Bersih diperoleh dari aktivitas operasi PLN NP tahun 2023 adalah sebesar Rp1,06 triliun menurun 84,50% dibandingkan tahun 2022 adalah sebesar Rp5,80 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penerimaan kas dari hasil Penjualan Tenaga Listrik yang lebih rendah. Saldo kas PLN NP masih dianggap mencukupi untuk kebutuhan operasional sejalan dengan kebijakan manajemen kas terpusat PLN (Optimasi Cash Management PLN Holding).

In 2023, the total Net Cash provided by PLN NP's operating activities was Rp1,06 trillion, a decrease of 84,50% compared to Rp5,80 trillion in 2022. The decrease was mainly due to lower cash receipts from Sales of Electricity bills. PLN NP's cash balance was considered sufficient for operational needs in line with PLN's centralized cash management policy (PLN Holding Cash Management Optimization).

Tabel Arus Kas Aktivitas Operasi (Rp juta)
Table of Cash Flows of Operating Activities (Rp million)

Uraian Description	2021	2022	2023	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Penerimaan Kas dari Pelanggan Cash Receipts from Customer	75.416.595	62.374.287	60.077.280	(4,4%)	(2.297.077)
Pembayaran Kas kepada Pemasok, Karyawan, dan Lainnya Cash Paid to Suppliers, Employees, and Others	(71.013.078)	(56.597.053)	(56.553.109)	0,8%	(443.786)
Penerimaan Bunga Penerimaan Bunga Interest Received	316.441	225.454	212.591	(5,7%)	(12.863)
Pembayaran Bunga Interest Payment		(56.450)	(202.990)	(64,0%)	146.540
Pembayaran surat keterangan pajak kurang bayar Payments of tax assessment letter for underpayment	(134.172)	-	(2.836)	100,0%	(2.836)
Penerimaan pengembalian atas surat keterangan pajak kurang bayar Receipt of refund tax assessment letter for underpayment	-	450.199	160.858	(64,2%)	(289.340)
Penerimaan restitusi pajak penghasilan badan Cash receipt for corporate income tax refund	227.944	234.488	243.779	3,9%	9.291
Penerimaan restitusi Pajak Pertambahan Nilai Cash receipts for value Added Taxes refund	381.587	404.759	322.334	(19,6%)	(325.425)
Pembayaran PPh Badan & PPh Final Payments of Corporate Income Tax and Final Income Tax	(216.472)	(262.522)	(484.844)	91,2%	(222.322)
Jumlah Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi Total Net Cash Provided by Operating Activities	**4.321.206**	**5.799.978**	**3.059.366**	**(64,5%)**	**(2.740.612)**

Arus Kas Aktivitas Investasi
Cash Flows of Investing Activities

Jumlah Kas Bersih digunakan untuk aktivitas investasi PLN NP tahun 2023 adalah sebesar Rp3,42 triliun menurun 14,29% dibandingkan tahun 2022 adalah sebesar Rp3,99 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penerimaan dividen kas pada entitas Perusahaan asosiasi dan ventura bersama yang meningkat dibandingkan tahun 2022 serta penurunan penempatan investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama.

In 2023, the total Net Cash used in PLN NP's investing activities was Rp3.42 trillion, a decrease of 14.29% compared to Rp3.99 trillion in 2022. The decrease was mainly due to the cash dividends received from associates and joint ventures, which increased compared to 2022, and a decrease in addition of investment in associates and joint ventures.

Tabel Arus Kas Aktivitas Investasi (Rp juta)
Table of Cash Flows of Investing Activities (Rp million)

Uraian Description	2021	2022*)	2023	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Penambahan Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Additions of Investments in Associates and Joint Ventures	(12.598)	(293.398)	(62.062)	(89,3%)	231.336
Penambahan Piutang kepada Ventura Bersama Additions of Receivables from Joint Ventures	(9.622)	-	(759.608)	-	(759.608)

Uraian Description	2021	2022*)	2023	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Penerimaan alat piutang kepada ventura bersama Receipts of receivables from joint ventures	-	64,720	264,603	308.84	199,883
Penarikan Deposito Berjangka Withdrawal of Time Deposits	554,372	30,000	272,473	598.91	242,473
Penempatan deposito berjangka Placement of time deposits	-	(215,936)	(875,360)	305.57	(659,424)
Penarikan Rekening Bank dan Deposito Berjangka Dibatasi Penggunaannya Withdrawal of Restricted Cash in Banks and Time Deposits	35,717	972	4,368	349.69	3,396
Penempatan Rekening Bank dan Deposito Berjangka Dibatasi Penggunaannya Placement of Restricted Cash in Banks and Time Deposits	(35,400)	(727,033)	(282,560)	(34.86)	444,473
Pembelian Aset Tetap Purchase of Property, Plant, and Equipment	(1,003,904)	(1,389,402)	(1,392,540)	4.28	(59,537)
Pembelian Aset Takberwujud Purchase of Intangible Assets	-	(82,346)	(20,937)	(74.60)	71,409
Jumlah Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi Total Net Cash Used in Investing Activities	(334,256)	(2,984,039)	(1,416,403)	(14.27)	569,636

*) Disajikan kembali *) As Restated

Arus Kas Aktivitas Pendanaan
Cash Flows of Financing Activities

Jumlah Kas Bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan PLN NP tahun 2023 adalah sebesar Rp248,64 miliar meningkat 152,07% dibandingkan tahun 2022 adalah sebesar Rp296,99 miliar. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh belum adanya pencairan atas pinjaman SHL dari PLN Holding sedangkan untuk pembayarannya telah ada di tahun 2023.

In 2023, the total Net Cash used in PLN NP's financing activities was Rp248,64 billion, an increase of 152.07% compared to Rp296,99 billion in 2022. The increase was mainly influenced by no disbursement of the SHL from PLN Holding, while the payment remained in 2023.

Tabel Arus Kas Aktivitas Investasi (Rp juta)
Table of Cash Flows of Financing Activities (Rp million)

Uraian Description	2021	2022*)	2023	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Penerimaan pinjaman pemegang saham Proceeds of loans from a shareholder	217,667	203,240	-	-	203,240
Pembayaran pinjaman dari pemegang saham Payments of loans from a shareholder	(334,297)	(255,303)	(162,288)	1.07	(1,802)
Penerimaan setoran modal dari kepentingan non-pengendali Receipts of capital deposit from non-controlling interests	-	-	7	-	7

Uraian Description	2021	2022(*)	2023	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
Pembayaran Penambahan Kepemilikan pada entitas anak dan Kepentingan Non-Pengendali Payments of Additional Ownership in a Subsidiary from Non-controlling Interest	-	(1,184)	-	-	1,184
Penerimaan atas divestasi entitas anak Receipts for divestment of a subsidiary	-	6,785	-	-	(6,785)
Pembayaran liabilitas sewa Payments of lease liabilities	(5,799)	(88,345)	(384,332)	335.54	(295,987)
Kas proyek untuk pendanaan umum(**) Project cash for general funding (**)	-	(922,904)	-	-	922,904
Pembayaran Dividen oleh Entitas Anak Kepada Kepentingan Non-Pengendali Payments of Dividends by Subsidiaries to Non-controlling Interests	(1,679)	(716)	(1,964)	174.23	(1,248)
Jumlah Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan Total Net Cash Used in Financing Activities	(147,510)	(276,994)	(748,644)	152.07	(451,650)

(*) Disajikan Kembali (*) As Restated

Dampak Perubahan Harga terhadap Pendapatan dan Laba Perusahaan

Impact of Price Changes on Company Revenue and Profit

Dampak Perubahan Biaya Pokok Penyediaan (BPP)

Impact of Changes in Cost of Electricity Supply (BPP)

Biaya pokok penyediaan tenaga listrik merupakan biaya yang disediakan PLN NP dalam hal ini adalah dari sisi pembangkit yaitu dari pembelian energi primer sampai tenaga listrik dijual kepada PLN.

The cost of electricity supply is the cost provided by PLN NP, in this case, in terms of power plants, namely from the primary energy purchase until the electricity is sold to PLN.

Dampak perubahan BPP terhadap pendapatan usaha yaitu setiap perubahan Rp1 biaya pokok penyediaan tenaga listrik mempengaruhi pendapatan usaha di tahun 2023 berubah sebesar Rp74,98 miliar dan Rp202,13 miliar di tahun 2022.

The impact of BPP changes on revenues is that every Rp1 change in the cost of electricity supply affects revenues in 2023 to change by Rp74,98 billion and Rp202,13 billion in 2022.

Dampak perubahan BPP terhadap laba operasi perusahaan yaitu setiap perubahan Rp1 biaya pokok penyediaan tenaga listrik mempengaruhi laba operasi di tahun 2023 berubah sebesar Rp17,8 miliar dan Rp3,75 miliar di tahun 2022.

The impact of changes in BPP on the Company's operating profit is that every Rp1 change in the cost of electricity supply affects operating profit in 2023 to change by Rp17,8 billion and Rp3,75 billion in 2022.

Dampak Perubahan Harga Jual Tenaga Listrik
Impact of Changes in Electricity Selling Price

Pendapatan penjualan listrik diakui berdasarkan pemakaian energi listrik (kWh) yang disewa kepada PLN dengan menggunakan formula tarif yang dikalkulasikan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik. Formula tarif mencakup perhitungan komponen harga kapasitas, harga tetap operasi dan pemeliharaan, harga bahan bakar, tingkat pasokan energi serta variabel lainnya. Sehingga apabila terdapat perubahan harga jual dari tenaga listrik berdasarkan formula tarif mempengaruhi pendapatan usaha Perusahaan.

Revenue from electricity sales is recognized based on the use of electrical energy (kWh) supplied to PLN using the tariff formula determined in the power purchase agreement. The tariff formula includes calculating capacity price components, fixed price of operation and maintenance, fuel price, energy supply rate, and other variables. Therefore, if there is a change in the selling price of electricity based on the tariff formula, it will affect the Company's revenue.

Dampak perubahan harga jual tenaga listrik terhadap pendapatan usaha yaitu setiap perubahan Rp1 harga jual listrik mempengaruhi pendapatan usaha di tahun 2023 berubah sebesar Rp63,18 miliar dan Rp16,38 miliar untuk tahun 2022.

The impact of changes in the selling price of electricity on revenues is that every Rp1 change in the selling price of electricity affects revenues in 2023 to change by Rp63,18 billion and Rp16,38 billion for 2022.

Dampak perubahan harga jual tenaga listrik terhadap laba usaha yaitu setiap perubahan Rp1 harga jual listrik mengakibatkan laba usaha di tahun 2023 berubah senilai Rp894 miliar dan Rp1,05 miliar untuk tahun 2022.

The impact of changes in the selling price of electricity on operating income is that every Rp1 change in the selling price of electricity results in operating income in 2023 to change by Rp894 billion and Rp1,05 billion for 2022.

Tingkat Kemampuan Membayar Utang dan Kolektibilitas Piutang, serta Rasio Keuangan Lainnya
Solvency, Receivables Collectibility, and Other Financial Ratios

Kemampuan Membayar Utang
Solvency

Tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya diukur menggunakan rasio solvabilitas dan rasio likuiditas. Berikut adalah rincian tanggal jatuh tempo kontraktual untuk liabilitas keuangan dengan pembayaran yang telah disepakati.

The Company's ability level in fulfilling its obligations is measured using solvency ratios and liquidity ratios. The following is a detail of contractual maturity dates for financial liabilities with the agreed payments.

Tabel Rincian Jatuh Tempo Liabilitas (Rp juta)
Table of Liabilities Maturity Details (Rp million)

Uraian Description	Jatuh Tempo Due Date				
	Satu tahun One year	Lebih dari 1 tahun tetapi tidak lebih dari 3 tahun More than 1 year but not more than 3 years	Lebih dari 3 tahun tetapi tidak lebih dari 5 tahun More than 3 years but not more than 5 years	Lebih dari 5 tahun More than 5 years	Jumlah Total
Utang usaha Trade Payables	277.522	-	-	-	277.522
Liabilitas Sewa Lease Liabilities	314.297	944.207	1.176.646	1.830.713	4.267.863
Utang Lain-lain Other Payables	1.272.921	-	-	-	1.272.921
Biaya yang Masih Harus Dibayar Accrued Expenses	327.958	-	-	-	327.958
Pinjaman dari Pemegang Saham Loans from Shareholder	470.081	769.292	658.846	1.094.729	2.993.948
Jumlah Total	**10.179.581**	**1.713.499**	**1.835.490**	**2.885.438**	**16.394.008**

Rasio Solvabilitas
Solvency Ratio

Rasio solvabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan membayar seluruh utangnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio solvabilitas dapat dilihat melalui beberapa rasio keuangan diantaranya adalah *Debt to Assets Ratio* (DAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER).

The solvency ratio is a ratio that measures the Company's ability to pay all its debts, both short and long-term. The solvency ratio can be seen through several financial ratios, including Debt to Assets Ratio (DAR) and Debt to Equity Ratio (DER).

Tabel Rasio Solvabilitas (%)
Table of Solvency Ratio (%)

Uraian Description	2021	2022	2023	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease
				%
Debt to Assets Ratio (DAR)	8,48	9,35	10,07	0,77
Debt to Equity Ratio (DER)	9,77	10,79	11,20	0,41

Debt to Assets Ratio (DAR)
Debt to Assets Ratio (DAR)

Nilai DAR PLN NP tahun 2023 adalah 10,07% yaitu lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 yaitu 9,35%. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan Liabilitas Imbalan Kerja karena penyesuaian imbalan kerja jatuh tempo oleh aktuaris dan penambahan Liabilitas Pajak Tangguhan yang menyesuaikan Perbedaan Temporer.

In 2023, PLN NP's DAR value was 10.07%, which was higher than 9.35% in 2022. The increase was mainly due to the addition of Employee Benefits Liabilities because of the adjustment of maturity employee benefits by actuaries and the addition of Deferred Tax Liabilities that adjust Temporary Differences.

Grafik DAR (%)
Chart of DAR (%)

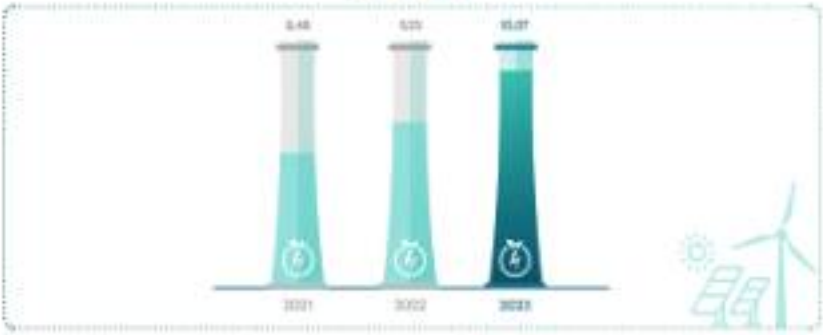

Debt to Equity Ratio (DER)

Debt to Equity Ratio (DER)

Nilai DER PLN NP tahun 2023 adalah 11,20% yaitu lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 yaitu 10,19%. Peningkatan tersebut disebabkan oleh penambahan Liabilitas Imbalan Kerja karena penyesuaian imbalan kerja jatuh tempo oleh aktuaris dan penambahan Liabilitas Pajak Tangguhan yang menyesuaikan Perbedaan Temporer.

In 2023, PLN NP's DER value was 11.20%, which was higher than 10.19% in 2022. The increase was mainly due to the addition of Employee Benefits Liabilities because of the adjustment of maturity employee benefits by actuaries and the addition of Deferred Tax Liabilities that adjust Temporary Differences.

Grafik DER (%)
Chart of DER (%)

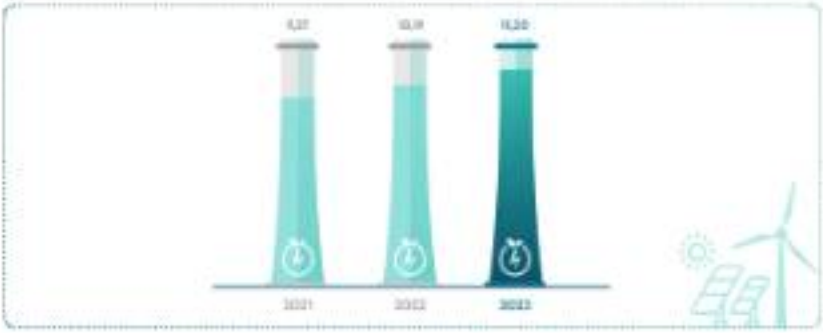

Namun secara keseluruhan rasio DAR dan DER masih sangat kecil dan tidak mengindikasikan adanya risiko insolvency dikarenakan perusahaan memiliki nilai ekuitas yang lebih tinggi dari nilai Kewajibannya.

However, the overall DAR and DER ratios are still very small and do not indicate insolvency risk due to the Company having a higher equity value than its liabilities value.

Rasio Likuiditas
Liquidity Ratio

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang akan jatuh tempo. Rasio yang digunakan untuk menilai rasio likuiditas diantaranya adalah cash ratio, quick ratio, dan current ratio. Semakin tinggi nilai dari rasio-rasio tersebut, maka mengindikasikan bahwa PLN NP mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya yang akan jatuh tempo.

The liquidity ratio is used to measure the Company's ability to fulfill its short-term obligations that will be due. The ratios used to assess liquidity ratios include cash ratio, quick ratio, and current ratio. The higher the value of these ratios, the more capable PLN NP is of fulfilling its obligations that will be due.

Tabel Rasio Likuiditas (%)
Table of Liquidity Ratio (%)

Uraian Description	2021	2022	2023	Peningkatan/ Penurunan Increase/Decrease	
				%	
Cash Ratio	41.03	84.49	57.99	(31.27)	
Quick Ratio	139.07	301.12	400.18	33.03	
Current Ratio	154.85	345.44	445.18	28.88	

Cash Ratio
Cash Ratio

Cash Ratio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban yang harus segera dipenuhi dengan aset lancar. Nilai Cash Ratio PLN NP tahun 2023 adalah 57.99% yaitu lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 yaitu 84.49%. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh jumlah pencairan piutang melalui penerimaan kas dari tagihan Penjualan Tenaga Listrik yang lebih rendah di tahun 2023. Saldo kas PNP masih dianggap mencukupi untuk kebutuhan operasional sejalan dengan kebijakan manajemen kas terpusat PLN (Optimasi Cash Management PLN Holding).

The Cash Ratio is used to measure the Company's ability to pay obligations that must be fulfilled immediately with current assets. In 2023, PLN NP's Cash Ratio value was 57.99%, which was higher than 84.49% in 2022. The decrease was mainly influenced by the total disbursement of receivables through cash receipts from lower Electricity Sales bills in 2023. PNP's cash balance is still considered sufficient for operational needs in line with PLN's centralized cash management policy (PLN Holding Cash Management Optimization).

Grafik Cash Ratio (%)
Chart of Cash Ratio (%)

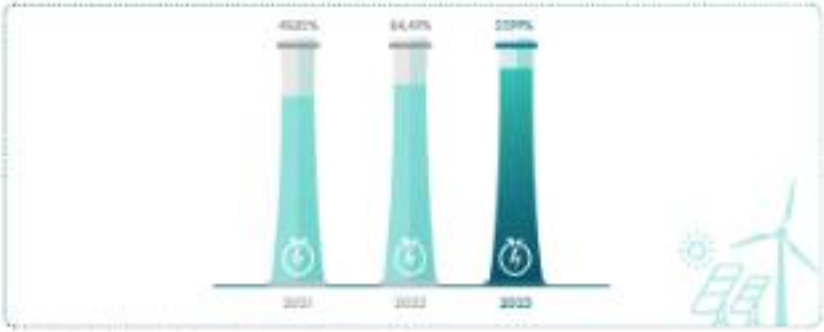

Quick Ratio

Quick Ratio

Quick Ratio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban yang harus segera dipenuhi dengan Aset Lancar di luar persediaan, karena persediaan dianggap tidak mudah digunakan untuk memenuhi kewajiban yang akan segera jatuh tempo. Nilai Quick Ratio PLN NP tahun 2023 adalah 401,08% yaitu lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 yaitu 301,12%. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan jumlah piutang usaha tenaga Listrik serta rendahnya jumlah pencairan piutang melalui penerimaan kas dari tagihan Penjualan Tenaga Listrik.

The Quick Ratio is used to measure the Company's ability to pay obligations that must be fulfilled immediately with Current Assets outside of inventory, since inventory is considered not easy to be used to fulfill obligations that will be due soon. The Quick Ratio value of PLN NP in 2023 was 401.08%, which was higher than 301.12% in 2022. The increase was influenced by the increased total trade receivables for Electricity and the low total disbursement of receivables through cash receipts from Electricity Sales bills.

Grafik Quick Ratio (%)

Chart of Quick Ratio (%)

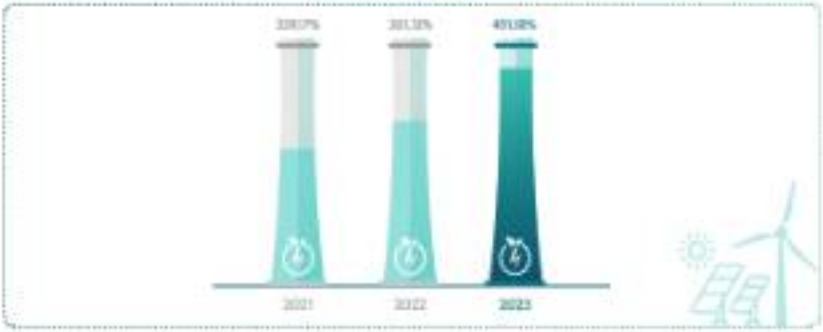

Current Ratio

Current Ratio

Current Ratio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang akan segera jatuh tempo dengan Aset Lancar yang dimilikinya. Nilai Current Ratio PLN NP tahun 2023 adalah 440,21% yaitu meningkat dibandingkan tahun 2022 adalah 348,44%. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan jumlah piutang usaha tenaga Listrik serta rendahnya jumlah pencairan piutang melalui penerimaan kas dari tagihan Penjualan Tenaga Listrik.

Current Ratio is used to measure the Company's ability to fulfill obligations that will be due soon with its Current Assets. In 2023, PLN NP's Current Ratio value was 440.21%, an increase compared to 348.44% in 2022. The increase was influenced by the increased total trade receivables for Electricity and the low total disbursement of receivables through cash receipts from Electricity Sales bills.

Grafik Current Ratio (%)
Chart of Current Ratio (%)

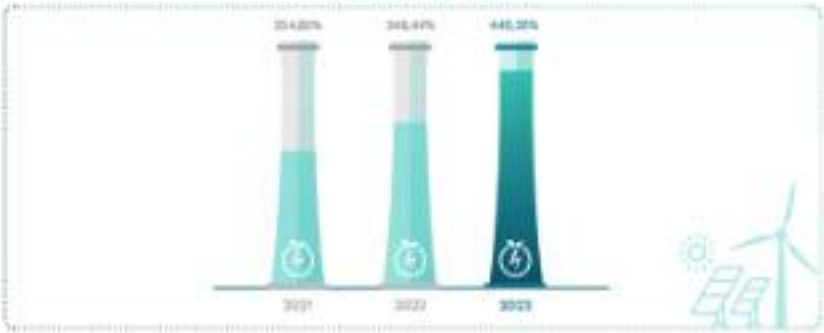

Tingkat Kolektibilitas Piutang
Receivables Collectibility

Kemampuan perusahan dalam mengumpulkan piutang dapat diketahui dengan menghitung nilai *Collection Period*. Nilai *Collection Period* semakin kecil maka semakin baik, artinya kemampuan perusahaan dalam mengumpulkan piutang semakin cepat. Nilai Collection Period PLN NP tahun 2023 adalah 114 hari, yaitu lebih lambat dibandingkan tahun 2022 (Restated) yaitu 91 hari. Hal tersebut tersebut dipengaruhi oleh jumlah pemakaian piutang melalui penerimaan kas dari tagihan Penjualan Tenaga Listrik yang lebih rendah di tahun 2023. Saldo kas PLN NP masih dianggap mencukupi untuk kebutuhan operasional sejalan dengan kebijakan manajemen kas terpusat PLN (Optimasi Cash Management PLN Holding).

The Company's ability to collect receivables can be known by calculating the Collection Period value. The smaller the Collection Period value, the better, meaning that the Company's ability to collect receivables is getting faster. PLN NP's Collection Period value in 2023 was 114 days, which was slower than in 2022 (Restated) of 91 days. It was mainly influenced by the lower total disbursement of receivables through cash receipts from Electricity Sales bills in 2023. PNP's cash balance is still considered sufficient for operational needs in line with PLN's centralized cash management policy (PLN Holding Cash Management Optimization).

Grafik Collection Period (hari)
Chart of Collection Period (day)

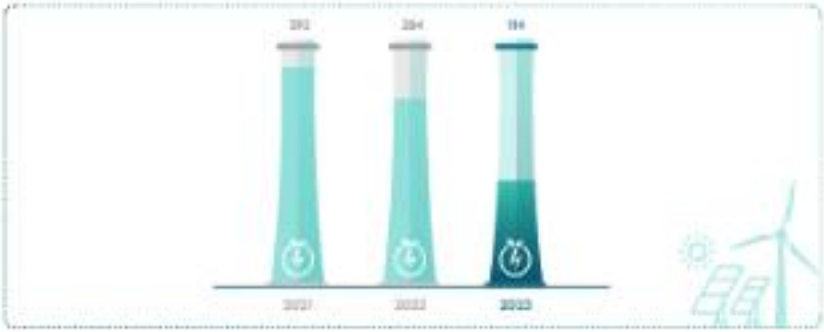

Rasio Keuangan Lainnya
Other Financial Ratios

Selain rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang serta tingkat kolektibilitas piutang, berikut disajikan rasio penting lainnya yang relevan di PLN NP untuk mengukur kinerja keuangan.

Apart from ratios to determine the Company's ability to fulfill short-term and long-term obligations as well as the receivables collectibility, the following are described other important ratios that are relevant in PLN NP to measure financial performance.

Rasio Profitabilitas
Profitability Ratio

Rasio Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Perusahaan dalam menghasilkan laba. Profitabilitas perusahaan dapat dilihat dari Return on Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE).

Profitability ratio is a ratio used to measure the Company's ability to generate profits. The Company's profitability can be seen from Return on Asset (ROA) and Return on Equity (ROE).

Tabel Rasio Profitabilitas (%)
Table of Profitability Ratio (%)

Uraian Description	2021	2022	2023	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease %
ROA	1,76	1,64	3,98	141,93
ROE	5,91	1,91	6,43	144,35

Return on Asset (ROA)
Return on Asset (ROA)

ROA digunakan untuk mengukur perolehan laba yang tersedia bagi pemilik perusahaan atas setiap nilai aset yang ada pada perusahaan. Nilai ROA PLN NP tahun 2023 adalah sebesar 3,98% lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 yaitu 1,64%. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh adanya peningkatan laba yang dipengaruhi oleh kenaikan jumlah KWh jual yang melebihi target pada tahun 2023 serta efisiensi penggunaan bahan bakar.

ROA is used to measure the acquisition of profits available for the owners of the Company on each asset value in the Company. In 2023, PLN NP's ROA value was 3.98%, higher than 1.64% in 2022. The increase was mainly influenced by the increased profit, which was influenced by the increase in the number of selling KWh that exceeded the target in 2023 and the efficiency of fuel use.

Grafik ROA (%)
Chart of ROA (%)

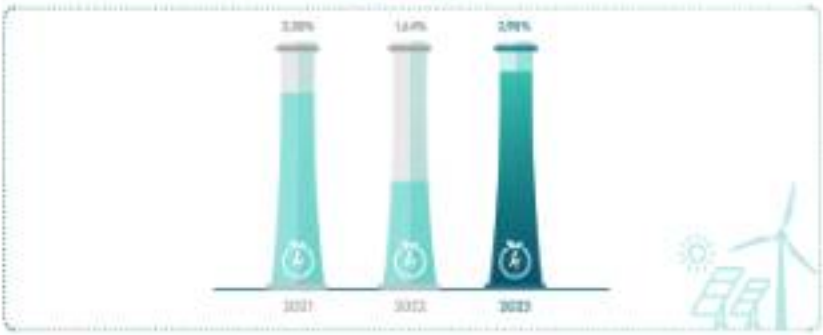

Return on Equity (ROE)
Return on Equity (ROE)

ROE digunakan untuk mengukur perolehan laba yang tersedia bagi pemilik perusahaan atas modal yang diinvestasikan di dalam perusahaan. Nilai ROE PLN NP tahun 2023 adalah 4,43%, yaitu lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 yaitu 1,81%. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh oleh adanya peningkatan laba yang dipengaruhi oleh kenaikan jumlah KWh jual yang melebihi target pada tahun 2022 serta efisiensi penggunaan bahan bakar.

ROE is used to measure the acquisition of profits available for the owners of the Company on the capital invested in the Company. In 2023, PLN NP's ROE value was 4.43%, which was higher than 1.81% in 2022. The increase was mainly influenced by the increased profit due to the increase in the number of selling KWh that exceeded the target in 2022 and the efficiency of fuel use.

Grafik ROE (%)
Chart of ROE (%)

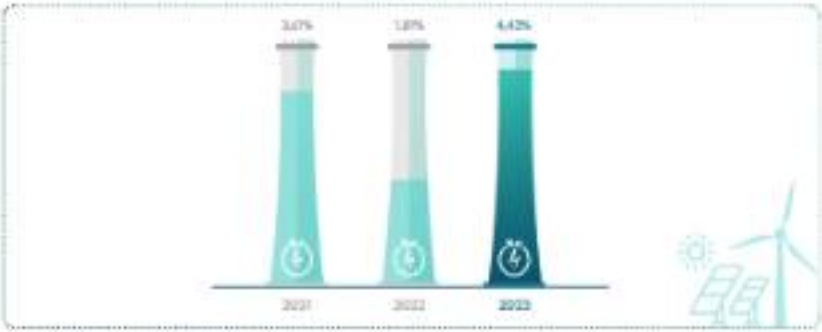

Rasio Aktivitas
Activity Ratio

Rasio aktivitas digunakan untuk memberikan gambaran aktivitas operasional yang dilakukan Perusahaan baik yang berkaitan dengan kegiatan penjualan, pembelian, dan kegiatan lainnya. Inventory Turn Over (ITO) dan Total Asset Turn Over (TATO) merupakan bagian rasio aktivitas.

Activity ratio is used to provide an overview of the operational activities conducted by the Company both related to sales, purchasing, and other activities. Inventory Turn Over (ITO) and Total Asset Turn Over (TATO) are part of the activity ratio.

Tabel Rasio Aktivitas (%)
Table of Activity Ratio (%)

Uraian Description	2021	2022	2023	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease
				%
ITO (hari) (days)	77	73	99	35,75
TATO (kali) (times)	0,77	0,76	0,35	-53,75

Inventory Turn Over (ITO)

Inventory Turn Over (ITO)

ITO menunjukkan kemampuan dana yang tertanam dalam persediaan berputar dalam suatu periode tertentu, atau likuiditas dari persediaan dan tendensi untuk adanya overstock. Rasio perputaran persediaan mengukur efisiensi pengelolaan persediaan untuk menilai efisiensi operasional, yang memperlihatkan seberapa baiknya manajemen mengontrol modal yang ada pada persediaan.

ITO shows the ability of funds embedded in inventory to rotate in a certain period, or the liquidity of inventory and the tendency for overstock. The inventory turnover ratio measures the efficiency of inventory management to assess operational efficiency, which shows how well management controls the capital in inventory.

Nilai ITO PLN NP tahun 2023 adalah 19 hari yaitu lebih lambat dibandingkan tahun 2022 yaitu 13 hari. Hal tersebut terutama disebabkan oleh pemenuhan stock persediaan untuk persiapan pemeliharaan periode awal tahun.

The ITO value of PLN NP in 2023 was 19 days, which was slower than in 2022 of 13 days. It was mainly due to the fulfillment of inventory stock in preparation for maintenance at the beginning of the year.

Grafik ITO (hari)
Chart of ITO (day)

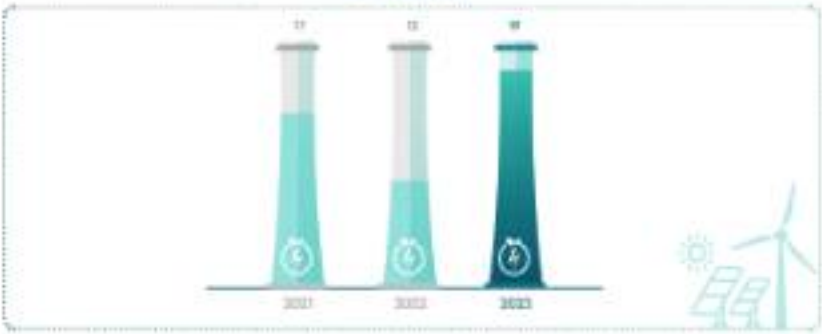

Total Asset Turn Over (TATO)

Total Asset Turn Over (TATO)

TATO menjelaskan rasio yang menggambarkan perputaran aset diukur dari penjualan. Jadi semakin besar rasio ini semakin baik yang berarti bahwa aset dapat lebih cepat berputar dan menah laba dan menunjukkan semakin efisien penggunaan kesekurahan aset dalam menghasilkan penjualan.

TATO is a ratio that describes asset turnover measured from sales. Therefore, the greater this ratio, the better, which means that assets can turn faster and achieve profits and show the more efficient use of overall assets in generating sales.

Nilai TATO PLN NP tahun 2023 adalah 0,33 kali lebih tinggi dibandingkan nilai TATO di tahun 2022 yaitu 0,16 kali. Hal tersebut terjadi karena adanya peningkatan laba yang dipengaruhi oleh kenaikan jumlah KWh jual yang melebihi target pada tahun 2023 serta efisiensi penggunaan bahan bakar.

The TATO value of PLN NP in 2023 was 0.33 times higher than the TATO value in 2022 of 0.16 times. This occurred due to the increased profit influenced by the increase in the number of selling KWh, which exceeded the target in 2023, and the efficiency of fuel use.

Grafik TATO (kali)
Chart of TATO (day)

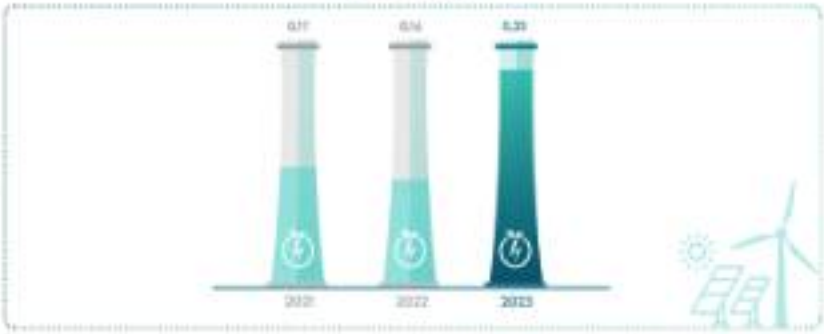

Struktur Modal
Capital Structure

Struktur modal adalah perbandingan antara liabilitas dan ekuitas. Liabilitas terdiri dari jangka panjang dan jangka pendek, sedangkan ekuitas terdiri dari saham disetor dan laba ditahan. PLN NP senantiasa mengelola struktur modal untuk mendukung keberlanjutan bisnis dan memaksimalkan imbalan bagi Pemegang Saham.

Capital structure is the comparison between liabilities and equity. Liabilities consist of long-term and short-term, while equity consists of paid-in shares and retained earnings. PLN NP continuously manages its capital structure to support business sustainability and maximize returns for Shareholders.

Struktur Modal tahun 2023 didominasi oleh Ekuitas yaitu sebesar Rp308,86 triliun atau 89,93%, sedangkan Liabilitas sebesar Rp34,60 triliun, atau 10,07%.

The Capital Structure in 2023 was dominated by Equity of Rp308,86 trillion or 89,93%, while Liabilities were Rp34,60 trillion or 10,07%.

Tabel Struktur Modal (Rp juta)
Table of Capital Structure (Rp million)

	2021		2022		2023	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Liabilitas Liabilities	12.994.562	6,39	12.367.941	7,70	34.600.244	10,07
Ekuitas Equity	161.167.268	93,61	162.354.088	92,30	308.843.024	89,93
Aset Assets	**172.163.830**	**100,00**	**174.722.029**	**100,00**	**343.443.268**	**100,00**

Grafik Struktur Modal (%)
Chart of Capital Structure (%)

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal
Management Policy on Capital Structure

Manajemen Grup mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan kelangsungan usaha dan untuk memastikan pemenuhan batasan rasio kecukupan modal. Struktur modal Grup terdiri ekuitas pemegang saham induk, yang terdiri dari modal saham, tambahan modal disetor dan saldo laba.

The Group's Management manages capital risk to ensure that they will be able to continue as a going concern and to ensure the fulfillment of capital adequacy ratio limits. The Group's capital structure consists of parent shareholders' equity, which comprises capital stock, additional paid-in capital, and retained earnings.

Dewan Direksi Grup secara berkala melakukan tinjauan struktur permodalan Grup. Sebagai bagian dari tinjauan ini, Dewan Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

The Group's Board of Directors periodically reviews the Group's capital structure. As part of this review, the Board of Directors considers the cost of capital and the associated risks.

Perusahaan berusaha untuk meminimalkan biaya modal sehingga dapat memaksimalkan nilai Perusahaan. Oleh karena itu, kebijakan Grup dalam rencana pendanaan akan selalu mempertimbangkan risiko keuangan yang mungkin timbul di masa depan.

The Company strives to minimize the cost of capital so as to maximize the Company's value. Therefore, the Group's policy in seeking funding will always take into account the financial risks that may arise in the future.

Dasar Pemilihan Kebijakan Struktur Modal
Basis for Capital Structure Policy Selection

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Perusahaan bersepenas dengan kebijakan yang telah ditentukan oleh Dewan Direksi.

The Company's financial risk management objectives and policies are to ensure that adequate financial resources are available for business operations and development as well as to manage market risk (including foreign currency risk and interest rate risk), credit risk, and liquidity risk. The Company operates with policies that have been determined by the Board of Directors.

Dalam melaksanakan aktivitas manajemen risiko, Perusahaan telah memiliki pedoman dalam bentuk Pedoman Umum Manajemen Risiko. Pedoman ini mengatur keseimbangan antara fungsi operasional bisnis dengan pengelolaan risiko keuangan.

In carrying out risk management activities, the Company has had guidelines in the form of Guidelines for General Risk Management. This guideline regulates the balance between business operational functions and financial risk management.

Risiko keuangan utama Perusahaan adalah pada risiko pasar (termasuk risiko nilai wang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit, dan risiko likuiditas. Manajemen meneliti dan mengeluarkan kebijakan untuk mengelola masing-masing risiko. Grup menerapkan kebijakan manajemen risiko yang bertujuan untuk meminimalisasi pengaruh dari ketidakpastian risiko keuangan terhadap kinerja keuangan Perusahaan.

The Company's main financial risks are market risk (including foreign currency risk and interest rate risk), credit risk, and liquidity risk. Management reviews and issues policies to manage each risk. The Group implements risk management policies that aim to minimize the effect of uncertain financial risks on the Company's financial performance.

Tingkat Likuiditas Perusahaan
Liquidity Ratio of the Company

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang akan jatuh tempo. Perusahaan melakukan monitoring berkala secara konsisten terhadap tingkat likuiditas Perusahaan, adapun rasio likuiditas Perusahaan di tahun 2023 yaitu rasio kas sebesar 529,9%, rasio cepat sebesar 401,38%, dan rasio lancar sebesar 440,35%.

The liquidity ratio is used to measure the Company's ability to fulfill its maturing short-term obligations. The Company conducts consistent periodic monitoring of the Company's liquidity level. In 2023, the Company's liquidity ratio was 529.9% cash ratio, 401.38% quick ratio, and 440.35% current ratio.

Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal
Material Commitments for Capital Goods Investment

Nama Pihak dan Tujuan Perikatan
Name of the Party and Purposes of Commitment

Pada tahun 2023, PLN NP memiliki ikatan material untuk investasi barang modal berupa pengadaan bahan bakar dengan beberapa pemasok diantaranya perjanjian pengadaan batubara, perjanjian pengadaan gas, dan perjanjian pengadaan bahan bakar minyak. Tujuan dari adanya perikatan ini agar Perusahaan memperoleh bahan bakar yang berkualitas tinggi tanpa mengesampingkan efisiensi biaya modal. Sehingga dapat menunjang dengan baik keandalan kegiatan pembangkitan tenaga listrik. Berikut adalah bentuk bentuk perikatan pengadaan bahan bakar tersebut:

In 2023, PLN NP had material commitments for capital goods investment in the form of fuel procurement with several suppliers, including coal procurement agreements, gas procurement agreements, and fuel procurement agreements. The purpose of these agreements is for the Company to obtain high-quality fuel without compromising capital cost efficiency. Thus, it can support well the reliability of electric power generator activities. The following is the form of the fuel procurement agreement:

Pengadaan Bahan Bakar
Fuel Procurement

Perjanjian Pengadaan Batubara
Coal Procurement Agreement

Pemasok Supplier	Nomor Kontrak Contract Number	Satuan Unit	Jumlah Total	Periode Period
PT Bukit Asam	3013/E/040/DIR/2012	Metric ton Metric ton	6,570,000	Desember 2012 -Maret 2032 December 2012 -March 2032
	1202019/040/DIR/2014			Oktober 2014 - Desember 2023 October 2014 - December 2023
	1214139/040/DIR/2014			September 2014 - Desember 2023 September 2014 - December 2023

Pemasok Supplier	Nomor Kontrak Contract Number	Satuan Unit	Jumlah Total	Periode Period
Konsorsium PT Arutmin Indonesia dan PT Dermaga Nusaja Tbk Consortium of PT Arutmin Indonesia and PT Dermaga Nusaja Tbk	0070.K/DI/DI.02.02/2021/2019	Metrik ton Metric ton	2,762,785	Januari 2017 - Agustus 2017 January 2017 - August 2017
Konsorsium PT Dwi Guna Laksana dan PT Borneo Indobara Consortium of PT Dwi Guna Laksana and PT Borneo Indobara	0044.Amd/DI.02.02/2021/2019	Metrik ton Metric ton	1,442,616	Oktober 2017 - Desember 2021 October 2017 - December 2021
Konsorsium PT Eksploitasi Energi Indonesia Tbk dan PT Borneo Indobara Consortium of PT Eksploitasi Energi Indonesia Tbk and PT Borneo Indobara	0100-1/Ep/DI.02.02/2020/0000/2022	Metrik ton Metric ton	1,108,258	April 2020- April 2022 April 2020- April 2022
PT PLN Batubara Niaga	0201.01/DI/01.03/PLN/KP/2020/2022	Metrik ton Metric ton	1,046,417	April 2020-Desember 2020 April 2020-December 2020
PT Indexim Coalindo	0004.A/DI/01.03/2020/2019	Metrik ton Metric ton	844,795	April 2019 - Maret 2018 April 2019 - March 2018
PT Bhumiyang Mitra Bersama Blok Dua	0001.H/DI/01.03/C0000000/2022	Metrik ton Metric ton	752,991	Januari 2020 - Januari 2021 January 2020 - January 2021
PT Bhumi Rantau Energi	0021.H/DI/01.03/C0000000/2022	Metrik ton Metric ton	700,062	Januari 2022 - Januari 2024 January 2022 – January 2024
PT Kaltim Prima Coal	7440/Ep.01.01/PLN/KP/2020/2021	Metrik ton Metric ton	654,483	Agustus 2020- Desember 2020* August 2020- December 2020*
PT Bara Tabang	0930.K/041/2022	Metrik ton Metric ton	658,037	November 2022 - September 2023* November 2022 – September 2023*

*Termasuk kontrak multi tahunan

* Valid until the quota is fulfilled

Pada tanggal 31 Desember 2021, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara untuk dan atas nama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (KESDM) menerbitkan surat Nomor 1405/MB.05/DJB.B/2021 (Surat No. B-1405) yang antara lain mengatur bahwa seluruh pemegang PKP2B, IUP, IUPK, Operasi Produksi, KIPK Kelanjutan Kontrak/Perjanjian Operasi, dan pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara (a) dilarang melakukan penjualan batubara ke luar negeri sejak tanggal 1 sampai dengan 31 Januari 2022; (b) wajib memasok seluruh produksi batubaranya untuk memenuhi kebutuhan listrik untuk kepentingan umum sesuai kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri (DMO) dan/atau penugasan dari Pemerintah kepada perusahaan dan/atau kontrak dengan PLN dan Independent Power Producer (IPP) ; dan (c) dalam hal sudah terdapat batubara di pelabuhan muat dan/atau telah dimuat di kapal, harus segera dikirim ke PLN/ milik Grup PLN dan IPP yang pelaksanaannya agar segera diselesaikan dengan PLN. Dalam Surat B-1405 juga terdapat informasi bahwa larangan ekspor batubara akan dievaluasi dan dikaji berdasarkan realisasi pasokan batubara untuk pembangkit listrik tenaga batubara PLN dan IPP.

On December 31, 2021, the Director General of Mineral and Coal for and on behalf of the Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia (MEMR) issued letter No.B-1405/MB.05/DJB.B/2021 (Letter no. B-1405) which, among others, stipulates that all holders of PKP2B, IUP, Production Operation IUPK, Contract Continuity/Operation Agreement IUPK, and Coal Transportation and Sales License holders (a) are prohibited from selling coal abroad from January 1 up to 31, 2022; (b) required to supply all of its coal production to fulfill electricity needs for the public interest in accordance with the Domestic Market Obligation (DMO) and/ or assignments from the Government to the Company and/or contracts with PLN and Independent Power Producer (IPP); and (c) in the event that coals are already present at the loading port and/ or have been loaded on the ship, it must be delivered immediately to the Steam Power Plant (CFPP) owned by PLN Group and IPP, the implementation of which should be immediately settled with PLN. There is also information in Letter B-1405 that the coal export ban will be evaluated and reviewed based on the realization of coal supply for coal-fired power plants of PLN and IPP.

Pada tanggal 19 Januari 2022, KESDM mengeluarkan Keputusan Menteri No.13.K/HK.01 /MEM.B/2022 yang mengatur tentang pedoman pengenaan sanksi administratif, larangan ekspor batubara, pengenaan denda dan pemberian dana kompensasi untuk memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri.

On January 19, 2022, the Ministry of Energy and Mineral Resources issued the Ministerial Decree No. 13.K/HK.01/MEM.B/2022, which regulates the guidelines for imposing administrative sanctions, coal export bans, imposing fines and providing compensation funds to fulfill domestic coal needs.

Perjanjian Pengadaan Gas

Gas Procurement Agreement

Sektor Sector	Pemasok Supplier	Nomor/Tanggal Kontrak Number/Date of Contract	Periode Period	Satuan Unit	Jumlah Total
Credit	PT Pertamina Hulu Energi WMO	Kesepakatan Bersama Perjanjian Jual Beli Gas Joint Agreement of Gas Sale and Purchase Agreement	2023 - 2023	TBTU	632,892
Credit	PT Saka Energi Indonesia	Amandemen GSA 9 Nov 2011 Amendment to GSA Nov 9, 2011	2011 – 2026	BCF	300,00
Credit	Kangean Energy Indonesia Ltd	462.PJ/ AMD0/DAT/DIR/2010 beserta Amandemen kesepakatannya 462.PJ/ AMD0/DAT/DIR/2010 along with the Amendment to the agreement	2008 – 2038	TBTU	377,00
Credit	PT Petrogas Jatim Utama	001.PJ/DAT/2010 beserta Adendum dan kesepakatannya 001.PJ/DAT/2010 along with the Addendum and agreement	2016 – 2023	BCF	41,59 7,30
Credit	PT PLN Energi Primer Indonesia	114.K/030.PJ/DIR/2023	2023-2024	BBTUD	25-50
Credit	PT PGN Jambaran Tiung Biru	0495.PJ/EP.01.03/DAT/2019	2023-2038	TBTU	311
Muara Karang	PT Pertamina Hulu Energi (PHE)	0081.PJ/EP.01.03/C.2020/2020/2021	2021 - 2025	TBTU	5,495
Muara Karang	PT Perusahaan Gas Negara	0041.PJ/Tgu.01.01/P.01.01.02/2022	2022 - 2023	TBTU	1,227
Muara Tawar	PT Pertamina EP	0301-1.PJ/EP.01.03.DAT/2019	2018 - 2024	BBTU	21,044
Muara Karang & Muara Tawar	PT Nusantara Regas	0821.PJ/DAT/DIR/2014	2023	Kargo Cargo	
Muara Karang & Muara Tawar	PT Tangguh PSC	0110.PJ/EP.01.01/DIR/1.02/a	2010 - 2024	Kargo Cargo	
Muara Karang & Muara Tawar	PT Pertamina (Persero)	0570.PJ/EP.01.02/DTDAN-2/2017	2023	BBTU	sesuai kebutuhan As needed
Arun	PT Perta Arun Gas	0040.PJ/EP.01.03/P.01.01.02/2022	2022 - 2023	MMSCFD	sesuai kebutuhan As needed
Belawan	PT Perta Arun Gas	0040.PJ/EP.01.03/P.01.01.02/2022	2023 - 2023	MMSCFD	sesuai kebutuhan As needed
Belawan	PT Pertamina Gas	0.00.1.PJ/DAT/DIR/2014	2016 - 2029	MMSCF	34,675,000
Pekanbaru	PT Energi Mega Persada Tbk	0.00.PJ/EP.01.02.C.2020/2020/2021	2021 - 2024	BBTU	40
Pekanbaru	PT PHE Jambi Merang	0.00.PJ/EP.01.02.C.2021/2020/2022	2022 - 2026	BCF	5
Pekanbaru	PT Transportasi Gas Indonesia	0.00.PJ/EP.01.03/DIR/2016	2018 - 2021	MMSCF	16,704,000
Palembang	PT Medco Bangkanai	–	2016 - 2021	BBTU	20
Tanjung	PT Medco E&P Indonesia	0.00.pj/EP.01.03/P.01.01.02/2022	2022 - 2025	BBTU	174,100
Tanjung	PT Pertamina EP	0.00.PJ/DAN.01.02/P.AEP.00.01/2023	2023	BBTU	6,3
Gorontalo	PT PLN Gas & Geothermal	0.00.PJ/EP.01.01/P.01.01.02/2022	2023 - 2028	Kargo Cargo	104
Sengkang	PT PLN Energi Primer Indonesia	0.00.PJ/DAN.01.02/P.LAEP.00.01/2023	2023 - 2024	BBTU	17,05

Harga realisasi pembelian gas pipa pada VIII penyerahan di tahun 2013 berkisar antara AS$4,10 sampai dengan AS$18,37 dari Rp63.430 sampai dengan Rp449.480 per Million British Thermal Unit (MMBTU) Million Standard Cubic Feet (MSCF).

The realized purchase price of pipeline gas at the delivery point in 2013 ranged from US$4.10 to US$18.37 and Rp63,430 to Rp449,480 per Million British Thermal Unit (MMBTU) Million Standard Cubic Feet (MSCF).

Perjanjian Pengadaan Bahan Bakar Minyak

Fuel Procurement Agreement

Perusahaan melalui PLN dan Pertamina mengadakan Perjanjian Induk Jual Beli Bahan Bakar Minyak No.017/PJ/DIR/DIR/2001 tanggal 8 Oktober 2001. Perjanjian ini telah diadendum pada tanggal 16 Mei 2002, dimana PLN dan Pertamina menyepakati antara lain: (i) penggunaan harga bahan bakar bulanan ditetapkan oleh Pertamina untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 April 2007 dan harga bahan bakar 109,5% dari Mid Oil Platts Singapore (MOPS) ditambah PPN untuk periode 1 Mei 2007 sampai dengan 31 Desember 2007; (ii) harga bahan bakar setelah tanggal 31 Desember 2007 akan ditetapkan oleh kedua belah pihak setiap tahun; (iii) jangka waktu pembayaran berikut pengenaan denda keterlambatan pembayaran sebesar tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia bulanan ditambah 1,5%; (iv) efektif mulai 1 Mei 2007, saldo utang yang belum dibayar atas pembelian bahan bakar sampai dengan 30 April 2007 dikenakan bunga sebesar tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia per tahun ditambah 1,5%, sampai diselesaikan dengan menerbitkan obligasi PLN paling lambat tanggal 31 Agustus 2007; (v) utang kepada Pertamina, termasuk obligasi yang akan diterbitkan maksimum sebesar Rp18 triliun (angka pokok); (vi) perjanjian ini berlaku untuk 5 tahun sejak tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011; dan (vii) Sucofindo ditunjuk sebagai surveyor independen.

The Company, through PLN and Pertamina, made a Master Agreement for Fuel Sale and Purchase No.017/PJ/DIR/DIR/2001 dated October 8, 2001. This agreement has been amended on May 16, 2002, where PLN and Pertamina agreed, among others: (i) the use of monthly fuel prices was determined by Pertamina for the period January 1 to April 30, 2007, and fuel prices of 109.5% from Mid Oil Platts Singapore (MOPS) plus VAT for the period May 1, 2007 to December 31, 2007; (ii) fuel prices after December 31, 2007, will be determined by both parties annually; (iii) payment period and penalty charges for late payment amounted to the interest rate of the monthly Certificate of Bank Indonesia plus 1.5%; (iv) effective starting May 1, 2007, the unpaid balance of payables for fuel purchases up to April 30, 2007, will be subject to interest at the interest rate per year of the Certificate of Bank Indonesia plus 1.5%, until settled by issuing PLN bonds no later than August 31, 2007; (v) payables to Pertamina, including bonds that will be issued at a maximum of Rp18 trillion (full amount); (vi) this agreement is valid for five years since January 1, 2007 until December 31, 2011; and (vii) sucofindo was appointed as the independent surveyor.

Perjanjian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan. Berdasarkan Addendum VIII tertanggal 8 Februari 2022, kesepakatan harga jual beli bahan bakar minyak (HSD dan MFO) sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2023 antara Pertamina dan Perusahaan adalah sebagai berikut:

a. Terhitung sejak 1 September 2021, seluruh tanggung jawab, hak dan kewajiban Pertamina berdasarkan perjanjian dialihkan kepada PT Pertamina Patra Niaga.
b. Perubahan formulasi harga bahan bakar minyak yang berlaku sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2023.
c. Penyerahan BBM pada tanggal 1 hingga akhir bulan, MOPS, Jakarta Interbank Spot Dollar (JISDOR) dan Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) yang berlaku adalah rata-rata tengah MOPS, rata-rata JISDOR dan rata-rata JIBOR selama 1 bulan, yang terbit sejak tanggal 25 pada 2 bulan sebelumnya sampai dengan tanggal 24 pada 1 bulan sebelum bulan penyerahan BBM.

The agreement has been amended several times. Based on Addendum VIII dated February 8, 2022, the agreement on the sale and purchase price for fuel (HSD and MFO) from January 1, 2021 to December 31, 2023, between Pertamina and the Company is as follows:

a. As of September 1, 2021, all responsibilities, rights, and obligations of Pertamina based on the agreement are transferred to PT Pertamina Patra Niaga.
b. Changes in fuel price formulation effective from January 1, 2022, to December 31, 2023.
c. Fuel delivery on the 1st to the end of the month, the applicable MOPS, Jakarta Interbank Spot Dollar (JISDOR), and Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) are the middle average of MOPS, average JISDOR, and average JIBOR for one month, published from the 25th of the previous two months to the 24th of the one month before the month of fuel delivery.

Perusahaan telah mencatat pembelian HSD, Biosolar, dan MFO selama tahun 2023 berdasarkan harga tersebut.

The Company has recorded purchases of HSD, Biosolar, and MFO during 2023 based on these prices.

Pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 1 Januari 2022, saldo utang usaha atas pembelian bahan bakar kepada Pertamina adalah masing-masing sebesar Rp214.710, Rp24.455 dan Rp833.450.

As of December 31, 2023, 2022, and January 1, 2023, the balance of trade payables for fuel purchases to Pertamina was Rp214,710, Rp24,455, and Rp833,450, respectively.

Sumber Dana
Source of Funds

Pada tahun 2023 Perusahaan telah menyediakan sumber dana untuk memenuhi perjanjian pengadaan bahan bakar sebesar Rp58,217,123 juta yang berasal dari dana internal perusahaan.

In 2023, the Company has provided funding sources to fulfill fuel procurement agreements of Rp58,217,123 million from the Company's internal funds.

Mata Uang yang Menjadi Denominasi
Denominated Currency

Sampai dengan 31 Desember 2023, perincian ikatan material untuk pengadaan bahan bakar berdasarkan mata uang adalah Rupiah (Rp).

Until December 31, 2023, the details of material commitments for fuel procurement based on currency were Rupiah (Rp).

Langkah-Langkah Perlindungan Risiko Mata Uang
Currency Risk Protection Measures

Perusahaan memiliki eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar yang timbul dari transaksi dengan pelanggan maupun pemasok yang didenominasi dalam mata uang asing, sehingga Perusahaan terekspos terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Untuk menghindari risiko terkait beberapa perikatan pengadaan bahan bakar dengan pihak pemasok termasuk didalamnya risiko keuangan dan risiko pasar (risiko mata uang asing dan risiko tingkat risiko bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Manajemen menelaah dan mengeluarkan kebijakan untuk mengelola masing-masing risiko (mitigasi risiko). Dengan menerapkan kebijakan manajemen risiko yang bertujuan untuk meminimalisasi pengaruh dari ketidakpastian risiko keuangan terhadap kinerja keuangan Perusahaan.

The Company has exposure to exchange rate fluctuations arising from transactions with customers and suppliers that are denominated in foreign currencies. Thus, the Company is exposed to foreign exchange rate fluctuations. To avoid risks related to several fuel procurement commitments with suppliers, including financial and market risks (foreign currency risk and interest rate risk), credit risk, and liquidity risk, Management reviews and issues policies to manage each risk (risk mitigation) by implementing risk management policies that aim to minimize the effect of uncertain financial risks on the Company's financial performance.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 07 tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara, seluruh harga dasar kontrak diatas akan dilinjau secara periodik setiap 3 (tiga) bulanan untuk disesuaikan dengan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang AS$, dan harga dasar bahan bakar minyak HSD untuk industri. Sehubungan dengan perjanjian jual beli batubara, pemasok diwajibkan untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan.

In accordance with the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 07 of 2017 concerning Procedures for Determining Sales Benchmark Prices of Metal Minerals and Coal, all of the above basic contract prices will be reviewed periodically every 3 (three) months to be adjusted to the Rupiah exchange rate against the US$, and the basic price of HSD fuel oil for industry. In connection with the coal sale and purchase agreement, the supplier is required to assure guarantees.

Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL)
Power Purchase Agreement (PPA)

Perusahaan memiliki sejumlah PJBTL dengan PLN. Dalam perjanjian tersebut, PLN membayar pasokan tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan formula pembayaran. Pembayaran tersebut mencakup komponen biaya kapasitas, energi, operasional dan pemeliharaan yang tergantung pada tingkat pasokan energi serta variabel lain yang ditentukan dalam perjanjian.

The Company has several PPAs with PLN. Under these agreements, PLN pays for electricity supply provided by the Company at an amount determined based on a payment formula. The payment includes the components of capacity, energy, operational and maintenance costs, which depend on the level of energy supply as well as other variables determined in the agreement.

Pada tanggal 30 Desember 2022, PLN dan Perusahaan telah menandatangani amandemen dan pernyataan kembali PJBTL untuk periode kontrak dari tahun 2023 sampai dengan 2032. Perjanjian ini telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir pada tanggal 28 Desember 2022 terkait dengan pertusaan wilayah.

On December 30, 2022, PLN and the Company have signed an amendment and restatement of the PPA for the contract period from 2023 to 2032. The agreement has undergone several amendments, with the latest amendment on December 28, 2022, related to the expansion of the area.

Pada tanggal 31 Desember 2023, amandemen dan pernyataan kembali PJBTL terdiri dari 5 Buku PJBTL atas wilayah Jawa-Bali, 7 Buku PJBTL atas wilayah Sumatra, 4 atas Buku PJBTL atas wilayah Kalimantan, 1 Buku PJBTL atas wilayah Maluku dan 5 Buku PJBTL atas wilayah Sulawesi.

On December 31, 2023, the amendment and restatement of the PPA consists of five PPA Books for the Jawa-Bali region, seven PPA Books for Sumatra region, four PPA Books for Kalimantan region, one PPA Book for Maluku region, and five PPA Books for Sulawesi region.

Perjanjian Operasi dan Pemeliharaan
Operation and Maintenance Agreement

Perusahaan memiliki beberapa Perjanjian Jasa Operasi dan Pemeliharaan sampai dengan 31 Mei 2025. Sebagai tindak lanjut pembentukan subholding yang dijabarkan pada Catatan 2b, manajemen berkeyakinan bahwa beberapa Perjanjian Jasa Operasi dan Pemeliharaan terkait aset bagian usaha pembangkitan listrik yang dialihkan akan dihentikan sejak 1 Januari 2023.

The Company has several Operation and Maintenance Service Agreements until May 31, 2025. As a follow-up to the sub-holding establishment described in Note 2b, management believes that several Operation and Maintenance Service Agreements related to the transferred electric power generation business assets will be terminated on January 1, 2023.

Saat ini, Perusahaan masih memiliki 5 Perjanjian Jasa Operasi dan Pemeliharaan dengan unit pembangkit PLN yaitu PLTU Bolokilopa, PLTU Sambelia, PLTU Bangka-Belitung, PLTU Kendari Unit 3 dan PLTU Tidore.

Currently, the Company still has five Operation and Maintenance Service Agreements with PLN's power plant units, namely Bolokilopa CFPP, Sambelia CFPP, Bangka-Belitung CFPP, Kendari CFPP Unit 3, and Tidore CFPP.

Sumber Dana
Source of Funds

Pada tahun 2023 Perusahaan telah menyediakan sumber dana untuk memenuhi perjanjian pengadaan operasi dan pemeliharaan sebesar Rp6.503,475 juta yang berasal dari dana internal perusahaan.

In 2023, the Company has provided funding sources to fulfill the operation and maintenance procurement agreement of Rp6,503,475 million from the Company's internal funds.

Mata Uang yang Menjadi Denominasi
Denominated Currency

Sampai dengan 31 Desember 2023, perincian ikatan material untuk pengadaan operasi dan pemeliharaan berdasarkan mata uang adalah Rupiah (Rp).

Until December 31, 2023, the details of material commitments for operation and maintenance based on currency were Rupiah (Rp).

Langkah-Langkah Perlindungan Risiko Mata Uang
Currency Risk Protection Measures

Dalam hal perikatan pengadaan dan pemeliharaan, PLN NP tidak menggunakan mata uang asing sehingga tidak dilakukan langkah perlindungan risiko dari posisi mata uang asing terkait.

In terms of procurement and maintenance commitments, PLN NP does not use foreign currencies, so that no risk protection measures of the related foreign currency positions.

Perolehan Barang Modal

Acquisition of Capital Expenditures

Pada tanggal 19 Desember 2012 Perusahaan telah menandatangani perjanjian novasi dengan PLN, Konsorsium Doosan Heavy Industries and Construction Co. Ltd. dan PT Hutama Karya (Persero) sehubungan dengan Perjanjian Kontrak No. 0125.P/DAN/02.01/DIR/2012 tertanggal 29 Maret 2012 untuk proyek add on PLTGU Muara Tawar Blok 3, 5 dan 4. Perjanjian tersebut terakhir diubah pada Addendum IV, pada tanggal 31 Agustus 2022 terkait kerja tambah untuk switchyard 500 kV diameter 6, 11 dan 12 serta kerja tambah untuk transducer blok 3.

On December 19, 2012, the Company has signed a novation agreement with PLN, Consortium of Doosan Heavy Industries and Construction Co. Ltd., and PT Hutama Karya (Persero) in connection with Contract Agreement No. 0125.P/DAN/02.01/DIR/2012 dated March 29, 2012 for the add-on project of Muara Tawar Block 3, 5, and 4 CCPP. The agreement was last amended, namely Addendum IV, on August 31, 2022, related to additional work for 500 kV switchyard diameters 6, 11, and 12 and additional work for transducer block 3.

Pada tanggal 29 Maret 2023, Perusahaan dengan Konsorsium Mitsubishi Corporation dan PT Wijaya Karya (Persero) telah menandatangani kesepakatan bersama penerimaan pengalihan kontrak No.0233.P/DAN/02.01/DIR/2016, tertanggal 26 Agustus 2016 terkait proyek PLTGU Muara Karang sebagai akibat pembentukan subholding. Perjanjian tersebut terakhir diubah pada Addendum IV, pada tanggal 12 Juni 2023 terkait perubahan pihak dalam kontrak dan nilai kontrak dikarenakan perubahan PPN, serta penambahan ketentuan tentang klaim biaya overhead di dalam kontrak.

On March 29, 2023, the Company and the Consortium of Mitsubishi Corporation and PT Wijaya Karya (Persero) have signed a joint agreement to accept the transfer of contract No.0233.P/DAN/02.01/DIR/2016, dated August 26, 2016, related to the Muara Karang CCPP project as a result of the formation of a subholding. The agreement was last amended, namely Addendum IV, on June 12, 2023, related to changes in the parties to the contract and contract value due to changes in VAT, as well as the addition of provisions regarding overhead cost claims in the contract.

Sehubungan dengan perjanjian diatas dan kegiatan pembangkit lainnya, Perusahaan mempunyai fasilitas SBLC dengan rincian sebagai berikut:

In connection with the above agreement and other power plant activities, the Company has SBLC facilities with details as follows:

Bank penerbit Issuing Bank	Penerima manfaat Beneficiary	Mata uang Currency	Jumlah Total
Mandiri	Mitsubishi Corporation	JPY	141,364,000
	Mitsubishi Corporation Machinery	JPY	17,472,544
	Mitsubishi Corporation Machinery	JPY	22,181,289
	Mitsubishi Corporation Machinery	JPY	16,365,840
	Doosan Enerbility Co. Ltd	KRW	2,178,418,711
	Doosan Enerbility Co. Ltd	USD	3,840,088
	Doosan Enerbility Co. Ltd	EUR	7,497,964
	GE Global Parts and Products GmbH	EUR	1,063,087
	GE Global Parts and Products GmbH	EUR	3,104,388

Sumber Dana

Source of Funds

Pada tahun 2022 Perusahaan telah menyediakan sumber dana untuk memenuhi perjanjian perolehan barang modal sebesar Rp834,78 juta yang berasal dari Pinjaman berupa Shareholder Loan ke PLN dan dana internal.

In 2022, the Company has provided funding sources to fulfill the capital goods acquisition agreement of Rp834,78 million, which comes from Loans in the form of SHL to PLN and internal funds.

Mata Uang yang Menjadi Denominasi
Denominated Currency

Sampai dengan 31 Desember 2022, pemesan Aset material untuk pembelian barang modal berdasarkan mata uang adalah Yen Jepang, Won Korea, Dollar Amerika, dan Euro Eropa, hal ini berdasarkan adanya fasilitas stand-by letter of credit.

Until December 31, 2022, the details of material commitments for the acquisition of capital goods by currency are Japanese Yen, Korean Won, US Dollar, and European Euro. It was based on the standby letter of credit facility.

Langkah-Langkah Perlindungan Risiko Mata Uang
Currency Risk Protection Measures

Perusahaan melakukan pemisah atas kenaikan dan penurunan atas sensitivitas nilai tukar. Di mana untuk setiap 10% kenaikan dan penurunan Rupiah terhadap mata uang asing yang relevan menggambarkan penilaian manajemen terhadap perubahan yang rasional pada nilai tukar setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini. Analisa sensitivitas ini hanya mencakup saldo item moneter setelah pajak dalam mata uang asing dan menyesuaikan translasi pada akhir tahun untuk 10% perubahan dalam nilai tukar mata uang asing.

The Company assesses the increase and decrease of exchange rate sensitivity. Where every 10% increase and decrease in Rupiah against the relevant foreign currency represents management's assessment of a rational change in exchange rates after considering current economic conditions. This sensitivity analysis includes only the after-tax balances of monetary items denominated in foreign currencies and adjusts the year-end translations for a 10% change in foreign exchange rates.

Selain itu Perusahaan juga melakukan analisa terhadap sensitivitas tingkat suku bunga yang telah ditentukan berdasarkan eksposur Grup terhadap tingkat suku bunga untuk saldo instrumen keuangan terutang setelah pajak pada tanggal pelaporan. Analisa ini disusun dengan mengasumsikan jumlah saldo aset dan kewajiban tertentu pada akhir periode pelaporan tersebut sepanjang tahun.

In addition, the Company also performs an interest rate sensitivity analysis, which has been determined based on the Group's exposure to interest rates for the outstanding financial instrument balances after tax at the reporting date. This analysis was prepared by assuming that the total balances of assets and liabilities at the end of the reporting period were outstanding throughout the year.

Analisa sensitivitas ini menggunakan asumsi kenaikan dan penurunan sebesar 50 basis poin ("bp") pada tingkat bunga yang relevan dengan variabel lain dianggap konstan. Kenaikan dan penurunan sebesar 50 bp merupakan penilaian manajemen atas kemungkinan perubahan yang rasional terhadap tingkat bunga setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini.

This sensitivity analysis uses a 50 basis point ("bp") increase or decrease assumption in the relevant interest rate with all other variables held constant. An increase and decrease of 50 bp represents management's assessment of the likelihood of a rational change in interest rates after considering current economic conditions.

Realisasi Investasi Barang Modal
Realization of Capital Goods Investment

PLN NP melakukan investasi barang modal dalam bentuk aset tetap berupa tanah, bangunan umum, wadak dan crossarm, instalasi dan mesin pembangkit, perlengkapan transmisi dan distribusi, perlengkapan umum dan kendaraan bermotor. Selain itu juga terdapat investasi pada penguatan pembangkitan dan pengembangan usaha pembangkitan. Secara umum, tujuan investasi barang modal yang dilakukan Perusahaan adalah untuk mendukung kinerja operasional Perusahaan sehingga pembangkit semakin efisien dan andal serta memperlancar proses bisnis.

PLN NP invests in capital goods in the form of property, plant, and equipment, including land, buildings, reservoirs and infrastructure, installations and power plants, transmission and distribution equipment, general equipment, and motor vehicles. In addition, there are also investments in electric power generator strengthening and business development. In general, the purpose of investment in capital goods conducted by the Company is to support the Company's operational performance so that the power plant is more efficient and reliable, as well as to facilitate business processes.

Investasi Barang Modal pada Aset Tetap
Capital Goods Investment in Property, Plant, and Equipment

Investasi barang modal PLN NP pada aset tetap di tahun 2023 adalah sebesar Rp4,67 triliun menurun 17,35% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp6,43 triliun. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh adanya beberapa keterlambatan lowering untuk Anggaran Investasi penguatan pembangkit.

PLN NP's capital goods investment in property, plant, and equipment in 2023 was Rp4,67 trillion, a decrease of 17,35% compared to Rp6,43 trillion in 2022. The decrease was mainly influenced by several delays in lowering for the Investment Budget for power plant strengthening.

Tabel Jenis, Tujuan, dan Nilai Investasi Barang Modal Aset Tetap
Table of Type, Purpose, and Value of Capital Goods Investment in Property, Plant, and Equipment

Uraian Description	Tujuan Investasi Purpose of Investment	2022		Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease %
		2022*)	2023	
Tanah Land	Pembangunan pembangkit baru Building new power plant	-	[illegible]	[illegible]
Bangunan umum, waduk dan prasarana Buildings, Reservoirs, and Infrastructure	Operasional Perusahaan Company Operational	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Instalasi dan mesin pembangkit Installations and power plants	Efisiensi dan keandalan pembangkit Power plant efficiency and reliability	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Peralatan transmisi dan distribusi Transmission and distribution equipment	Operasional Perusahaan Company Operational	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Peralatan telekomunikasi dan pengolahan data Telecommunications and Data Processing Equipment	Operasional Perusahaan Company Operational	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Peralatan umum General equipment	Operasional Perusahaan Company Operational	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Kendaraan bermotor Motor vehicles	Operasional Perusahaan Company Operational	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Material cadang utama Major spare parts	Operasional Perusahaan Company Operational	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Aset hak guna Right-of-use assets	Operasional Perusahaan Company Operational	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Aset dalam pembangunan Construction in progress	Operasional Perusahaan Company Operational	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Aset tidak digunakan dalam operasi Assets not used in operations	Operasional Perusahaan Company Operational	[illegible]	-	[illegible]
Jumlah Realisasi Kegiatan Investasi **Total Realization of Investment Activities**		**6,430,063**	**4,671,488**	**(27,35)**

*) Disajikan kembali *) Restated

Dampak capaian realisasi investasi di tahun 2023, maka jumlah Aset Tetap tahun 2023 adalah sebesar Rp273,67 triliun menurun 1,85% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp278,98 triliun. Penurunan ini disebabkan karena nilai penyusutan korporat yang lebih besar dari nilai investasi realisasi aset tetap.

With the achievement of investment realization in 2023, the total Property, Plant, and Equipment in 2023 was Rp273,67 trillion, a decrease of 1,85% compared to Rp278,98 trillion in 2022. The decrease was due to the value of corporate depreciation, which was higher than the investment value of property, plant, and equipment realization.

Tabel Aset Tetap (Rp juta)
Table of Property, Plant, and Equipment (Rp million)

Uraian Description	1 Januari 2023 January 1, 2023	Penambahan Additions	Pengurangan Deduction	Reklasifikasi Reclassification	31 Desember 2023 December 31, 2023
Biaya Perolehan: Acquisition Cost:					
Tanah dan Hak Atas Tanah Land and Land Rights	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]
Bangunan Umum, Waduk dan Prasarana Buildings, Reservoirs, and Infrastructure	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]
Instalasi dan Mesin Pembangkit Installation and Power Plants	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]
Perlengkapan Transmisi dan Distribusi Transmissions and Distribution Equipment	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]
Perlengkapan Pengolahan Data dan Telekomunikasi Telecommunications and Data Processing Equipment	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]
Perlengkapan Umum General Equipment	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]
Kendaraan Bermotor Motor Vehicles	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]
Material Cadang Utama Major Spare Parts	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]
Sub Jumlah Sub Total					
Aset Hak Guna Right-of-use Assets	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Aset Dalam Pembangunan Construction in Progress	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Aset Tidak Digunakan dalam Operasi Assets not Used in Operations	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
Jumlah Biaya Perolehan Total Acquisition Cost	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**(21)**	**[illegible]**
Akumulasi Penyusutan: Accumulated Depreciation:					
Bangunan Umum, Waduk dan Prasarana Buildings, Reservoirs, and Infrastructure	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]
Instalasi dan Mesin Pembangkit Installation and Power Plants	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]
Perlengkapan Transmisi dan Distribusi Transmissions and Distribution Equipment	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]
Perlengkapan Pengolahan Data dan Telekomunikasi Telecommunications and Data Processing Equipment	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]
Perlengkapan Umum General Equipment	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]
Kendaraan Bermotor Motor Vehicles	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]
Material Cadang Utama Major Spare Parts	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]
Sub Jumlah Sub Total					

Uraian Description	1 Januari 2023 January 1, 2023	Penambahan Additions	Pengurangan Deduction	Reklasifikasi Reclassification	31 Desember 2023 December 31, 2023
Aset Hak Guna Right-of-use Assets	168.284	289.477	(26.671)	-	431.090
Aset Tidak Digunakan dalam Operasi Assets not Used in Operations	3.540.191	93.505	(726.893)	(90.897)	3.116.308
Jumlah Akumulasi Penyusutan Total Accumulated Depreciation	**15.730.861**	**9.508.307**	**(363.465)**	**-**	**25.075.703**
Penyisihan Penurunan Nilai Provision for Impairment Losses	(209.736)	-	-	-	(209.736)
Nilai Buku Book Value	**255.999.491**				**271.868.096**

Investasi Barang Modal pada Pembangkitan, Pengembangan Usaha dan Penugasan

Capital Goods Investment in Electric Power Generator, Business Development, and Assignment

Selain investasi pada barang modal di aset tetap, PLN NP juga melakukan investasi barang modal dimana sebagian besar dipergunakan dalam rangka untuk penguatan kinerja core business aset existing dan pembiayaan program pengembangan usaha. Investasi tersebut pada tahun 2023 adalah sebesar Rp5,71 triliun meningkat 170,73% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp1,17 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan jumlah investasi atas aset-aset PLN yang telah dialihkan ke PLN NP melalui Holding Sub Holding di awal tahun 2023.

Apart from capital goods investment in property, plant, and equipment, PLN NP also invests in capital goods where the majority are programmed to strengthen the core business performance of the existing assets and finance business development programs. The investment in 2023 was Rp5,71 trillion, an increase of 170.73% compared to Rp1,17 trillion in 2022. The increase was mainly due to the additional total investment in PLN assets that had been transferred to PLN NP through Holding Sub Holding at the beginning of 2023.

Tabel Investasi Barang Modal pada Pembangkitan, Pengembangan Usaha dan Penugasan (Rp juta)
Table of Capital Goods Investment in Electric Power Generator, Business Development, and Assignment (Rp million)

Jenis dan Tujuan Investasi Types and Objectives of Investment	2022	2023
Penguatan Pembangkitan: Electric Power Generator Strengthening		
Kapitalisasi Capitalization	338.376	1.752.525
Penguatan Sistem Pembangkit Power Plant Strengthening	99.633	867.173
Penggantian Peralatan Utama Pembangkit Main Power Plant Equipment Replacement	79.593	631.416
Sistem dan Sarana Informatika Information Systems and Facilities	21.226	29.712
Jumlah Penguatan Pembangkitan: Total Electric Power Generator Strengthening	**528.428**	**3.484.825**
Pengembangan Usaha Pembangkitan Electric Power Generator Business Development		
Pengembangan Usaha Pembangkitan Electric Power Generator Business Development	844.552	1.222.341
Jumlah Pengembangan Usaha Pembangkitan Total Electric Power Generator Business Development	**844.552**	**1.222.341**
Jumlah Investasi Barang Modal pada Penguatan dan Pengembangan Usaha Pembangkitan Total Capital Goods Investment in Electric Power Generator Strengthening and Business Development	**1.372.966**	**4.707.166**

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Perusahaan Tahun 2023 dan Proyeksi Tahun 2024

Comparison between Target and Realization of Company Performance in 2023 and Projection for 2024

Target, Realisasi dan Proyeksi Kinerja Keuangan

Target, Realization, and Projection of Financial Performance

Sebelum dimulainya tahun anggaran baru, PLN NP membuat target terkait kinerja yang akan dicapai untuk tahun mendatang dalam RKAP. Hal ini sebagai bentuk evaluasi Perusahaan dengan melakukan perbandingan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun 2 komponen ini untuk mengukur kinerja Perusahaan yang telah dicapai yaitu berdasarkan kinerja keuangan, kinerja operasional, dan produksi. Kinerja keuangan dijelaskan dalam pencapaian PLN NP pada target pendapatan dan laba Perusahaan sebagaimana pada Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain sebagai berikut:

Prior to the commencement of the new fiscal year, PLN NP set targets related to the performance that will be achieved for the coming year in the RKAP. It is a form of the Company evaluation by comparing the realization with the pre-determined target. There are two core components to measure the Company's performance that has been achieved, namely based on financial performance, operational performance, and production. Financial performance is described in PLN NP's achievement of the Company's revenue and profit targets as in the Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income as follows:

Tabel Perbandingan Target dengan Realisasi Pendapatan dan Laba Tahun 2023 serta Proyeksi Tahun 2024 (Rp juta)
Table of Comparison between Target and Realization of Revenue and Profit in 2023 and Projection for 2024 (Rp million)

Uraian Description	Target RKAP 2023 2023 RKAP Target	Realisasi 2023 2023 Realization	Pencapaian (%) Achievement (%)	Proyeksi 2024 Projection for 2024
Pendapatan Usaha Revenue	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Beban Usaha Operating Expenses	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Laba Usaha Operating Income	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**

Target, Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Usaha

Target, Realization, and Projection of Revenues

Pendapatan usaha yang dimaksud adalah hasil dari penjualan energi listrik untuk sistem Jawa Bali, Jasa Operasi & Pemeliharaan (O&M), Jasa Konstruksi, dan Lainnya.

The referred revenues are the proceeds from the electricity sales for Java Bali system, Operation & Maintenance (O&M) Services, Construction Services, and Others.

Tabel Perbandingan Target dengan Realisasi Pendapatan Usaha Tahun 2023 serta Proyeksi Tahun 2024 (Rp juta)
Table of Comparison between Target and Realization of Revenues in 2023 and Projection for 2024 (Rp million)

Uraian Description	Target RKAP 2023 2023 RKAP Target	Realisasi 2023 2023 Realization	Pencapaian (%) Achievement (%)	Proyeksi 2024 Projection for 2024
Penjualan Tenaga Listrik Sales of Electricity	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Jasa O&M O&M Services	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Jasa Konstruksi Construction Services	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pendapatan Usaha Lainnya Other Operating Revenue	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Penjualan Tenaga Listrik
Sales of Electricity

Realisasi pendapatan dari penjualan tenaga listrik tahun 2023 adalah sebesar Rp8785 triliun dengan pencapaian 103,71% dari target RKAP 2023. Pencapaian ini didukung oleh pencapaian KWh jual yang lebih tinggi (13,8% lebih tinggi dari RKAP) untuk menyesuaikan kebutuhan dan mendukung optimasi sistem. Selanjutnya, di tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp82,39 triliun berdasarkan asumsi penyesuaian permintaan produksi oleh sistem PLN untuk pembangkit yang dioperasikan oleh PLN NP.

The realization of revenue from sales of electricity in 2023 was Rp8785 trillion, with an achievement of 103.71% of the 2023 ABOP target. This achievement is supported by the achievement of higher selling KWh (13.8% higher than the ABOP) to adjust the needs and support system optimization. Furthermore, it is projected at Rp82.39 trillion in 2024 based on the assumption of production demand adjustment by the PLN system for power plants operated by PLN NP.

Jasa O&M
O&M Services

Realisasi pendapatan dari jasa O&M tahun 2023 adalah sebesar Rp1,17 triliun dengan pencapaian 88,97% dari target RKAP 2023. Pencapaian ini dikarenakan belum terealisasinya beberapa kontrak O&M sesuai asumsi RKAP. Selanjutnya, di tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp 2,15 triliun berdasarkan asumsi diberikannya Jasa O&M kepada PLN NP untuk mengoperasikan beberapa aset PLN.

The realization of revenue from O&M services in 2023 was Rp1.17 trillion, with an achievement of 88.97% of the 2023 ABOP target. This achievement is due to several O&M contracts not being realized according to ABOP assumptions. Furthermore, it is projected at Rp2.15 trillion in 2024 based on the assumption that O&M services will be provided to PLN NP to operate several PLN assets.

Jasa Konstruksi
Construction Services

Realisasi pendapatan dari jasa konstruksi tahun tahun 2023 adalah sebesar Rp961,52 miliar dengan pencapaian 45,27% dari target RKAP 2023. Tidak tercapainya pendapatan jasa konstruksi di tahun 2023 disebabkan oleh penundaan beberapa pekerjaan EPC. Selanjutnya, di tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp 1,53 triliun berdasarkan asumsi proyek-proyek yang akan diikuti dan dipenoleh Perusahaan di tahun 2024.

The realization of revenue from construction services in 2023 was Rp961.52 billion with an achievement of 45.27% of the 2023 ABOP target. The revenue from construction services in 2023 was not achieved due to the postponement of several EPC jobs. Furthermore, it is projected at Rp1.53 trillion in 2024 based on the assumption of projects that the Company will participate in and obtain in 2024.

Jasa Lainnya
Other Services

Realisasi pendapatan dari jasa Lainnya tahun 2023 adalah sebesar Rp396,27 miliar dengan pencapaian 62,10% dari target RKAP 2023. Tidak tercapainya pendapatan jasa konstruksi di tahun 2023 disebabkan oleh pekerjaan MRO dan overhaul internasional belum terelisasi sesuai jadwal serta belum terealisasinya beberapa kontrak-kontrak pekerjaan usaha lain. Selanjutnya, di tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp447 miliar berdasarkan asumsi pengembangan dan identifikasi atas proyek-proyek yang berpotensi akan didapatkan oleh Perusahaan baik proyek dari PLN Grup maupun proyek Beyond KWh.

The realization of revenue from other services in 2023 was Rp396.27 billion, with an achievement of 62.10% of the 2023 ABOP target. The revenue from construction services in 2023 was not achieved due to international MRO and overhead work that had not been executed on schedule and several other business work contracts that had not been realized. Furthermore, it is projected at Rp447 billion in 2024 based on the assumption of the development and identification of projects that have the potential to be obtained by the Company, both projects from the PLN Group and Beyond KWh projects.

Target, Realisasi dan Proyeksi Laba
Target, Realization, and Projection of Profit

Realisasi Laba tahun berjalan tahun 2023 adalah sebesar Rp13,67 triliun dengan pencapaian 163,01% dari target RKAP 2023. Pencapaian ini didukung oleh adanya pencapaian laba Penjualan Tenaga Listrik yang lebih baik, serta keberhasilan portofolio investasi perusahaan yang memberikan kontribusi laba asosiasi yang tinggi terutama dari investasi di PLTU Cikarang (CIPP) & PLTU Jawa 7 (SJGP-JB). Selanjutnya, di tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp10,40 triliun berdasarkan asumsi Peningkatan laba di setiap lini bisnis Perusahaan baik, laba tenaga listrik, laba Jasa O&M dan laba Jasa Konstruksi.

In 2023, the realization of Profit for the Year was Rp13,67 trillion, with an achievement of 163,01% of the 2023 ABOP target. This achievement was supported by the achievement of better Electricity Sales profit and the success of the Company's investment portfolio, which contributed high associate profits, specifically from investments in Cikarang CFPP (CIPP) & Java 7 CFPP (SJGP-JB). Furthermore, it is projected at Rp10,40 trillion in 2024 based on the assumption of increased profits in each of the Company's business lines, both electricity profits, O&M Services profits, and Construction Services profits.

Biaya Pokok Produksi (BPP)
Cost of Production (BPP)

Realisasi BPP tahun 2023 adalah sebesar Rp1.512,25/kWh dengan pencapaian 83,47% dari target RKAP 2023 sebesar Rp1.880,42/kWh. Pencapaian ini didukung oleh adanya pencapaian KWh yang tercapai lebih baik, serta upaya-upaya efisiensi baik di komponen fix cost & variable cost. Selanjutnya, di tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp1.340,48/kWh/kWh berdasarkan asumsi penurunan biaya di tahun 2024 khususnya biaya bahan bakar yang menyesuaikan dengan kebutuhan sistem di PLN.

The realization of BPP in 2023 was Rp1.512,25/kWh, with an achievement of 83,47% of the 2023 ABOP target of Rp1.880,42/kWh. This achievement was supported by better KWh achievement and efficiency efforts in both the fixed and variable cost components. Furthermore, it is projected at Rp1.340,48/kWh in 2024 based on the assumption of a decrease in costs in 2024, specifically fuel costs that adjust to the system needs in PLN.

Target, Realisasi dan Proyeksi Posisi Keuangan
Target, Realization, and Projection of Financial Position

Kinerja posisi keuangan ditunjukkan pada pencapaian pada target jumlah aset, liabilitas dan ekuitas sebagaimana pada Laporan Posisi Keuangan.

Financial position performance is shown in the target achievement of total assets, liabilities and equity as in the Statement of Financial Position.

Target, Realisasi dan Proyeksi Aset
Target, Realization, and Projection of Assets

Realisasi Jumlah Aset tahun 2023 adalah sebesar Rp341,46 triliun dengan pencapaian 99,99% dari target RKAP 2023. Pencapaian ini didukung oleh progress proyek Add on yang direncanakan selesai pada tahun 2024. Selanjutnya, di tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp345,81 triliun berdasarkan asumsi bertambahnya jumlah investasi pada Entitas Asosiasi/Ventura Bersama dan jumlah Kas dan Setara Kas sebagai akibat dari proses Penagihan (Collection Period) yang lebih baik.

The realization of Total Assets in 2023 was Rp341,46 trillion, with an achievement of 99,99% of the 2023 ABOP target. This achievement was supported by the progress of the Add on project, which is planned to be completed in 2024. Furthermore, the total assets are projected at Rp345,81 trillion in 2024 based on the assumption of an increase in the total investment in Associates/Joint Ventures and total Cash and Cash Equivalents as a result of a better Collection Period.

Tabel Perbandingan Target dengan Realisasi Jumlah Aset Tahun 2023 serta Proyeksi Tahun 2024 (Rp juta)
Table of Comparison between Target and Realization of Total Assets in 2023 and Projection for 2024 (Rp million)

Uraian Description	Target RKAP 2023 2023 ABOP Target	Realisasi 2023 2023 Realization	Pencapaian (%) Achievement (%)	Proyeksi 2024 Projection for 2024
Aset Lancar Current Assets	44.087.021	48.881.218	110,88	48.975.657
Aset Tidak Lancar Non-current Assets	302.175.868	294.537.860	97,49	296.832.573
Jumlah Aset Total Assets	**346.263.789**	**343.441.568**	**99,19**	**345.807.180**

Aset Lancar
Current Assets

Realisasi Jumlah Aset Lancar tahun 2023 adalah sebesar Rp48,88 triliun dengan pencapaian 110,88% dari target RKAP 2023. Pencapaian ini didukung oleh adanya peningkatan jumlah piutang usaha yang disebabkan oleh penerimaan kas dari tagihan Penjualan Tenaga Listrik yang lebih rendah. Selanjutnya, di tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp46,97 triliun berdasarkan asumsi Peningkatan nilai jumlah Kas dan Setara Kas sebagai akibat dari proses Penagihan (Collection Period) yang lebih baik.

In 2023, the realization of Total Current Assets was Rp48,88 trillion, with an achievement of 110,88% of the 2023 ABCP target. This achievement was supported by the increased total trade receivables caused by lower cash receipts from Electricity Sales bills. Furthermore, current assets are projected at Rp46,97 trillion in 2024 based on the assumption of increased value of Cash and Cash Equivalents due to a better Collection Period.

Aset Tidak Lancar
Non-current Assets

Realisasi Jumlah Aset Tidak Lancar tahun 2023 adalah sebesar Rp294,58 triliun dengan pencapaian 97,49% dari target RKAP 2023. Pencapaian ini dikebabkan oleh progress proyek Add on yang direncanakan selesai pada tahun 2024. Selanjutnya, di tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp296,85 triliun berdasarkan asumsi bertambahnya jumlah investasi pada Entitas Asosiasi/Ventura.

The realization of Total Non-Current Assets in 2023 was Rp294,58 trillion, with an achievement of 97,49% of the 2023 ABCP target. This achievement was due to the progress of the Add on project, which is planned to be completed in 2024. Furthermore, non-current assets are projected at Rp296,85 trillion in 2024 based on the assumption of increased total investment in Associates/ Venture Entities.

Target, Realisasi dan Proyeksi Liabilitas
Target, Realization, and Projection of Liabilities

Realisasi Jumlah Liabilitas tahun 2023 adalah sebesar Rp34,60 triliun dengan pencapaian 136,05% dari target RKAP 2023. Pencapaian ini didukung oleh penambahan Liabilitas Imbalan Kerja karena penyesuaian imbalan kerja jatuh tempo oleh aktuaris dan penambahan Liabilitas Pajak Tangguhan yang menyesuaikan Perbedaan Temporer. Selanjutnya, di tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp36,41 triliun berdasarkan asumsi penambahan imbalan kerja dan Liabilitas Pajak Tangguhan yang menyesuaikan Perbedaan Temporer.

The realization of Total Liabilities in 2023 was Rp34,60 trillion, with an achievement of 136,05% of the 2023 ABCP target. This achievement was supported by additional Employee Benefits Liabilities due to the adjustment of matured employee benefits by actuaries and the addition of Deferred Tax Liabilities that adjust Temporary Differences. Furthermore, liabilities are projected at Rp36,41 trillion in 2024 based on the assumption of additional employee benefits and Deferred Tax Liabilities adjusting Temporary Differences.

Tabel Perbandingan Target dengan Realisasi Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Tahun 2023 serta Proyeksi Tahun 2024 (Rp juta)
Table of Comparison between Target and Realization of Total Liabilities and Equity in 2023 and Projection for 2024 (Rp million)

Uraian Description	Target RKAP 2023 2023 ABCP Target	Realisasi 2023 2023 Realization	Pencapaian (%) Achievement (%)	Proyeksi 2024 Projection for 2024
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	12.487.781	11.501.047	88,93	10.834.037
Liabilitas Jangka Panjang Non-current Liabilities	12.944.409	22.499.097	173,84	25.577.997
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	**25.432.191**	**34.000.144**	**136,05**	**36.412.034**
Jumlah Ekuitas Total Equity	**320.831.079**	**308.860.824**	**96,27**	**345.407.182**

Liabilitas Jangka Pendek
Current Liabilities

Realisasi Jumlah Liabilitas Jangka Pendek tahun 2023 adalah sebesar Rp1110 triliun dengan pencapaian 88,90% dari target RKAP 2023. Pencapaian ini didukung oleh optimalnya proses pembayaran hutang usaha utamanya hutang usaha atas BBM dan Batubara. Selanjutnya, di tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp1,03 triliun berdasarkan asumsi penurunan nilai hutang usaha bahan bakar dan material pemeliharaan yang dapat dioptimalkan untuk pembayarannya.

The realization of Total Current Liabilities in 2023 was Rp1110 trillion, with an achievement of 88,90% of the 2023 ABCP target. This achievement was supported by the optimization of the payment process of trade payables, specifically trade payables for fuel and Coal. Furthermore, current liabilities are projected at Rp1,03 trillion in 2024 based on the assumption of decreased value of trade payables for fuel and maintenance materials that can be optimized for payment.

Liabilitas Jangka Panjang
Non-current Liabilities

Realisasi Jumlah Liabilitas Jangka Panjang tahun 2023 adalah sebesar Rp23,93 triliun dengan pencapaian 181,54% dari target RKAP 2023. Pencapaian ini didukung oleh penambahan Liabilitas Imbalan Kerja karena penyesuaian imbalan kerja jatuh tempo oleh aktuaria dan penambahan Liabilitas Pajak Tangguhan yang menyesuaikan Perbedaan Temporer. Selanjutnya, di tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp25,57 triliun berdasarkan asumsi Peningkatan nilai liabilitas jangka Panjang perusahaan.

The realization of Total Non-Current Liabilities in 2023 was Rp23,93 trillion, with an achievement of 181,54% of the 2023 ABCP target. This achievement was supported by additional Employee Benefits Liabilities due to the adjustment of matured employee benefits by actuaries and the addition of Deferred Tax Liabilities that adjust Temporary Differences. Furthermore, it is projected at Rp25,57 trillion in 2024 based on the assumption of increased value of the Company's non-current liabilities.

Target, Realisasi dan Proyeksi Ekuitas
Target, Realization, and Projection of Equity

Realisasi Jumlah Ekuitas tahun 2023 adalah sebesar Rp308,86 triliun dengan pencapaian 136,05% dari target RKAP 2023. Pencapaian ini didukung oleh pencapaian laba di tahun 2023 yang melebihi target (pencapaian KWh jual yang lebih tinggi (13,8% lebih tinggi dari RKAP). Selanjutnya, di tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp309,19 triliun berdasarkan asumsi pencapaian operasi Perusahaan dengan meningkatnya laba operasi yang menambah nilai ekuitas perusahaan.

The realization of Total Equity in 2023 was Rp308,86 trillion, with an achievement of 136,05% of the 2023 ABCP target. This achievement was supported by the achievement of profit in 2023, which exceeded the target (achievement of higher selling KWh (13,8% higher than ABCP). Furthermore, it is projected at Rp309,19 trillion in 2024 based on the assumption of the Company's operating achievements, with the increased operating profit adding to the value of the Company's equity.

Target, Realisasi dan Proyeksi Struktur Modal
Target, Realization, and Projection of Capital Structure

Realisasi Struktur Modal tahun 2023 adalah sebesar Rp345,46 triliun dengan pencapaian pencapaian 99,99% dari target RKAP 2023. Pencapaian ini disebabkan oleh progress proyek Add on yang direncanakan selesai pada tahun 2024.

The realization of Capital Structure in 2023 was Rp345,46 trillion, with an achievement of 99,99% of the 2023 ABCP target. This achievement was due to the progress of the Add on project, which is planned to be completed in 2024.

Tabel Perbandingan Target dengan Realisasi Struktur Modal Tahun 2022 serta Proyeksi Tahun 2023 (Rp juta)
Table of Comparison between Target and Realization of Capital Structure in 2023 and Projection for 2024 (Rp million)

Uraian Description	Target RKAP 2023 2023 ABCP Target		Realisasi 2023 2023 Realization		Pencapaian (%) Achievement (%)	Proyeksi 2024 Projection for 2024	
	Nominal (Rp juta) Nominal (Rp million)	Komposisi (%) Composition (%)	Nominal (Rp juta) Nominal (Rp million)	Komposisi (%) Composition (%)		Nominal (Rp juta) Nominal (Rp million)	Komposisi (%) Composition (%)
Liabilitas Liabilities	15,412,171	7,34	34,600,344	10,01	136,05	36,473,004	10,53
Ekuitas Equity	203,828,019	97,66	308,860,819	89,99	96,37	309,319,178	89,47
Aset Assets	**246,261,990**	**100,00**	**343,461,163**	**100,00**	**99,99**	**345,820,182**	**100,00**

Target, Realisasi dan Proyeksi Aspek Operasional
Target, Realization, and Projection of Operational Aspect

Aspek operasional mencakup pada pencapaian faktor kinerja pembangkit eksisting, produksi tenaga listrik dan pemakaian listrik.

Operational aspect includes the achievement of performance factors of existing power plants, electricity production, and electricity consumption.

Target, Realisasi dan Proyeksi Kinerja Pembangkit Batubara (PLTU)
Target, Realization, and Projection of Coal Power Plant Performance (CFPP)

Indikator kinerja pembangkit batubara (PLTU) mencakup kesiapan dan keandalan, gangguan, efisiensi pembangkit, dan efisiensi bahan bakar.

CFPP power plant performance indicators include readiness and reliability, disruption, power plant efficiency, and fuel efficiency.

Tabel Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Pembangkit Batubara (PLTU) Tahun 2023 serta Proyeksi Tahun 2024
Table of Comparison between Target and Realization of Coal Power Plant (CFPP) Performance in 2023 and Projection for 2024

Uraian Description	Target RKAP 2023 2023 ABCP Target	Realisasi 2023 2023 Realization	Pencapaian (%) Achievement (%)	Proyeksi 2024 Projection for 2024
Equivalent Availability Factor (EAF) (%)	88,87	84,85	95,47%	81,99
Equivalent Forced Outage Rate (EFOR) (%)	3,66	3,95	113,93%	3,83
Net Capacity Factor (NCF) (%)	59,39	70,38	118,51%	63,87
Net Plant Heat Rate (NPHR) (kcal/kWh)	3.180,93	3.064,73	103,85%	3.073,38
Specific Fuel Consumption (SFC) Batubara (kg/kWh) Coal Specific Fuel Consumption (SFC) (kg/kWh)	0,4858	0,4477	102,23%	0,4791

Equivalent Availability Factor (EAF)
Equivalent Availability Factor (EAF)

Realisasi EAF Pembangkit Batubara tahun 2023 adalah sebesar 84,85% dengan pencapaian 95,47% dari target RKAP 2023. Pencapaian ini dikarenakan oleh adanya luncuran *Planned Outage* tahun 2022, *Planned Outage Extension* dan *Maintenance Outage* diluar Rencana Operasi Tahunan 2023. Selanjutnya, di tahun 2024 Capaian EAF Pembangkit Batubara diproyeksikan sebesar 81,99% dikarenakan pelaksanaan tipe *overhaul* dengan durasi lebih besar dibandingkan tahun 2023.

In 2023, the realization of EAF of the Coal Power Plant was 84.85%, with an achievement of 95.47% of the 2023 ABCP target. This achievement was due to the launch of Planned Outage in 2022, Planned Outage Extension, and Maintenance Outage outside the 2023 Annual Operating Plan. Furthermore, the Achievement of EAF of the Coal Power Plant in 2024 is projected at 81.99% due to the implementation of the type of overhaul with a longer duration than in 2023.

Equivalent Forced Outage Rate (EFOR)
Equivalent Forced Outage Rate (EFOR)

Realisasi EFOR Pembangkit Batubara tahun 2023 adalah sebesar 3,95% dengan pencapaian 113,93% dari target RKAP 2023. Pencapaian ini didukung oleh adanya perbaikan kinerja pada unit pembangkit MSM. Selanjutnya, di tahun 2024 capaian EFOR Pembangkit Batubara diproyeksikan sebesar 3,83% berdasarkan asumsi adanya *Hidden Failure* kategori *High Impact Low Probability* yang baru dapat diselesaikan saat *overhaul* tahun 2024.

In 2023, the realization of EFOR of Coal Power Plant was 3.95%, with an achievement of 113.93% of the 2023 ABCP target. This achievement was supported by an improvement in the performance of the Suralaya Holding power plant unit. Furthermore, the achievement of EFOR of the Coal Power Plant in 2024 is projected at 3.83% based on the assumption that there is a Hidden Failure in the High Impact Low Probability category, which can only be resolved during the overhaul in 2024.

Net Capacity Factor (NCF)

Net Capacity Factor (NCF)

Realisasi NCF Pembangkit Batubara tahun 2023 adalah sebesar 70,98% dengan pencapaian 118,07% dari target RKAP 2023. Pencapaian ini didukung oleh tingkat kesiapan dan plant factor yang tinggi. Selanjutnya, di tahun 2024 Capaian NCF Pembangkit Batubara diproyeksikan sebesar 65,87% berdasarkan asumsi pembebanan dari dispatch dan masuknya beberapa pembangkit IPP.

The realization of NCF of the Coal Power Plant in 2023 was 70.98%, with an achievement of 118.07% of the 2023 ABOP target. This achievement was supported by a high level of readiness and plant factor. Furthermore, the Achievement of NCF of the Coal Power Plant in 2024 is projected at 65.87% based on the assumption of loading from dispatch and the incoming several IPP power plants.

Net Plant Heat Rate (NPHR)

Net Plant Heat Rate (NPHR)

Realisasi NPHR Pembangkit Batubara tahun 2023 adalah sebesar 3.084,73 kcal/kWh dengan pencapaian 103,65% dari target RKAP 2023. Pencapaian ini didukung oleh pencapaian NCF yang lebih baik daripada rencana. Selanjutnya, di tahun 2024 Capaian NPHR Pembangkit Batubara diproyeksikan sebesar 3.075,38 kcal/kWh berdasarkan asumsi NCF yang lebih rendah dan rasio cofiring meningkat.

The realization of NPHR of the Coal Power Plant in 2023 was 3.084,73 kcal/kWh, with an achievement of 103.65% of the 2023 ABOP target. This achievement is supported by the better-than-planned NCF achievement. Furthermore, the Achievement of NPHR of the Coal Plant in 2024 is projected at 3.075,38 kcal/kWh based on the assumption of lower NCF and increased cofiring ratio.

Specific Fuel Consumption (SFC) Batubara

Specific Fuel Consumption (SFC) Batubara

Realisasi SFC Batubara tahun 2023 adalah sebesar 0,6417 kg/kWh dengan pencapaian 101,69% dari target RKAP 2023. Pencapaian ini didukung oleh pencapaian GCV yang lebih baik daripada rencana. Selanjutnya, di tahun 2024 Capaian SFC Batubara diproyeksikan sebesar 0,6791 kg/kWh berdasarkan asumsi GCV yang rendah dan rasio cofiring meningkat dengan kalori yang lebih rendah daripada batubara.

In 2023, the realization of Coal SFC was 0.6417 kg/kWh, with an achievement of 101.69% of the 2023 ABOP target. This achievement was supported by better-than-planned GCV achievement. Furthermore, the Coal SFC Achievement in 2024 is projected at 0.6791 kg/kWh based on the assumption of lower GCV and increased cofiring ratio with lower calories than coal.

Target, Realisasi dan Proyeksi Kinerja Pembangkit Gas & Non Batubara (Non PLTU)

Target, Realization, and Projection of Non-Coal Power Plant Performance (Non CFPP)

Tabel Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Pembangkit Gas & Non Batubara (Non PLTU) Tahun 2023 serta Proyeksi Tahun 2024

Table of Comparison between Target and Realization of Non-Coal Power Plant Performance (Non CFPP) in 2023 and Projection for 2024

Uraian Description	Target RKAP 2023 2023 ABOP Target	Realisasi 2023 2023 Realization	Pencapaian (%) Achievement (%)	Proyeksi 2024 Projection for 2024
Equivalent Availability Factor (EAF) (%)	94,69	94,73	100,04%	91,04
Equivalent Forced Outage Rate (EFOR) (%)	3,30	2,91	104,62%	1,97
Net Capacity Factor (NCF) (%)	31,67	32,71	103,49%	30,56
Net Plant Heat Rate (NPHR) (kcal/kWh)	3.343,63	3.343,64	104,57%	3.398,84
Specific Fuel Consumption (SFC) Gas (MMBTU/kWh) Gas Specific Fuel Consumption (SFC) (MMBTU/kWh)	0,0089	0,0086	103,27%	0,0091
Specific Fuel Consumption (SFC) Minyak (Liter/kWh) Oil Specific Fuel Consumption (SFC) (Liter/kWh)	0,3976	0,3855	104,06%	0,2938

Equivalent Availability Factor (EAF)

Equivalent Availability Factor (EAF)

Realisasi EAF Pembangkit Gas dan Non Batubara (Non PLTU) tahun 2023 adalah sebesar 94,73% dengan pencapaian 100,14% dari target RKAP 2023. Pencapaian ini didukung oleh optimasi durasi pemeliharaan dan rendahnya tingkat gangguan pada pembangkit. Selanjutnya, di tahun 2024 Capaian EAF Pembangkit Gas dan Non Batubara (Non PLTU) diproyeksikan sebesar 92,06% berdasarkan asumsi adanya penambahan jadwal pelaksanaan pemeliharaan pada pembangkit.

The realization of EAF of Gas and Non-Coal Plants (Non CFPP) in 2023 was 94.73%, with an achievement of 100.14% of the 2023 ABOP target. This achievement was supported by optimizing the duration of maintenance and the low level of disruption to the power plant. Furthermore, the Gas and Non-Coal Plants (Non CFPP) EAF Achievement in 2024 is projected at 92.06% based on the assumption of additional maintenance implementation schedule at the power plant.

Equivalent Forced Outage Rate (EFOR)

Equivalent Forced Outage Rate (EFOR)

Realisasi EFOR Pembangkit Gas dan Non Batubara (Non PLTU) tahun 2023 adalah sebesar 2,93% dengan pencapaian 104,62% dari target RKAP 2023. Pencapaian ini didukung oleh membaiknya tingkat gangguan. Selanjutnya, di tahun 2024 capaian EFOR Pembangkit Gas dan Non Batubara (Non PLTU) diproyeksikan sebesar 1,97% berdasarkan asumsi PLTU 3 Bekasan tidak terhitung dalam kinerja.

The realization of EFOR of Gas and Non-Coal Plants (Non CFPP) in 2023 was 2.93%, with an achievement of 104.62% of the 2023 ABOP target. This achievement was supported by the improvement in the level of interference. Furthermore, in 2024, the EFOR achievement of Gas and Non-Coal Plants (Non CFPP) is projected at 1.97% based on the assumption that Bekasan 3 CFPP is not included in the performance.

Net Capacity Factor (NCF)

Net Capacity Factor (NCF)

Realisasi NCF Pembangkit Gas dan Non Batubara (Non PLTU) tahun 2023 adalah sebesar 31,7% dengan pencapaian 103,45% dari target RKAP 2023. Pencapaian ini didukung oleh tingkat kesiapan dan merit order yang tinggi. Selanjutnya, di tahun 2024 Capaian NCF Pembangkit Gas dan Non Batubara (Non PLTU) diproyeksikan sebesar 30,56% berdasarkan asumsi pembebanan dari dispatch.

The realization of NCF of Gas and Non-Coal Plants (Non CFPP) in 2023 was 31.7%, with an achievement of 103.45% of the 2023 ABOP target. The achievement was supported by a high level of readiness and merit order. Furthermore, in 2024, the NCF Achievement of Gas and Non-Coal Plants (Non CFPP) is projected at 30.56% based on the assumption of loading from dispatch.

Net Plant Heat Rate (NPHR)

Net Plant Heat Rate (NPHR)

Realisasi NPHR Pembangkit Gas dan Non Batubara (Non PLTU) tahun 2023 adalah sebesar 2.243,64 kcal/kWh dengan pencapaian 104,31% dari target RKAP 2023. Pencapaian ini didukung oleh pencapaian NCF yang lebih baik daripada rencana. Selanjutnya, di tahun 2024 Capaian NPHR Pembangkit Gas dan Non Batubara (Non PLTU) diproyeksikan sebesar 2.398,84 kcal/kWh berdasarkan asumsi NCF yang lebih rendah dan rasio bahan bakar naik meningkat.

The realization of NPHR of the Gas and Non-Coal Plants (Non CFPP) in 2023 was 2,243.64 kcal/kWh, with an achievement of 104.31% of the 2023 ABOP target. This achievement was supported by the better-than-planned NCF achievement. Furthermore, in 2024, the NPHR achievement of Gas and Non-Coal Plants (Non CFPP) is projected at 2,398.84 kcal/kWh based on the assumption of a lower NCF and an increased biofuel ratio.

Specific Fuel Consumption (SFC) Gas

Gas Specific Fuel Consumption (SFC)

Realisasi SFC Gas tahun 2023 adalah sebesar 0,0088 MMBTU/kWh dengan pencapaian 103,37% dari target RKAP 2023. Pencapaian ini didukung oleh pencapaian GCF yang lebih baik daripada rencana. Selanjutnya, di tahun 2024 Capaian SFC Gas diproyeksikan sebesar 0,0091 MMBTU/kWh berdasarkan asumsi GCF yang lebih rendah.

In 2023, the Gas SFC realization was 0.0088 MMBTU/kWh, with an achievement of 103.37% of the 2023 ABOP target. This achievement was supported by the achievement of GCF, which was better than the plan. Furthermore, in 2024, the Gas SFC Achievement is projected at 0.0091 MMBTU/kWh based on lower GCF assumptions.

Specific Fuel Consumption (SFC) Minyak

Oil Specific Fuel Consumption (SFC)

Realisasi SFC Gas tahun 2023 adalah sebesar 0,2855 Liter/kWh dengan pencapaian 104,04% dari target RKAP 2023. Pencapaian ini didukung oleh pencapaian GCF yang lebih baik daripada rencana. Selanjutnya, di tahun 2024 Capaian SFC Minyak diproyeksikan sebesar 0,2935 Liter/kWh berdasarkan asumsi GCF yang lebih rendah dan rasio bahan bakar nabati meningkat.

In 2023, the realization of Gas SFC was 0.2855 Liter/kWh, with an achievement of 104.04% of the 2023 ABCP target. This achievement was supported by GCF achievement, which was better than the plan. Furthermore, in 2024, the Oil SFC Achievement is projected at 0.2935 Liter/kWh based on the assumption of lower GCF and increased biofuel ratio.

Target, Realisasi dan Proyeksi Produksi dan Penjualan

Target, Realization and Projection of Production and Sales

Tabel Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Produksi dan Penjualan Tahun 2023 serta Proyeksi Tahun 2024
Table of Comparison between Target and Realization of Production and Sales Performance in 2023 and Projection for 2024

Uraian Description	Target RKAP 2023 2023 ABCP Target	Realisasi 2023 2023 Realization	Pencapaian (%) Achievement (%)	Proyeksi 2024 Projection for 2024
MWh Produksi Tenaga Listrik MWh Electricity Production	58.995,70	66.846,00	113,3	57.531,78
MWh Penjualan Tenaga Listrik MWh Electricity Sales	53.497,80	61.178,60	113,8	54.180,93

Realisasi Produksi Tenaga Listrik tahun 2023 adalah sebesar 66.846,00 GWh dengan pencapaian 113,3% dari target RKAP 2023. Pencapaian ini dipengaruhi oleh peningkatan demand energi Listrik.

The realization of Electricity Production in 2023 was 66,846.00 GWh, with an achievement of 113.3% of the 2023 ABCP target. This achievement was affected by an increased demand for Electricity.

Realisasi Penjualan Tenaga Listrik tahun 2023 adalah sebesar 61.178,60 GWh dengan pencapaian 113,8% dari target RKAP 2023. Pencapaian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

1. Peningkatan demand energi Listrik sehingga penjualan Listrik PLN NP meningkat
2. Penambahan pembangkit Senghang dan relokasi atas pembangkit Halmahera Timur
3. Percepatan waktu durasi pemeliharaan sehingga penjualan bisa meningkat.

The realization of Electricity Sales in 2023 was 61,178.60 GWh, with an achievement of 113.8% of the 2023 ABCP target. This achievement was influenced by several factors, among others:

1. Increased demand for electricity resulting in increased PLN NP electricity sales
2. Addition of Senghang power plant and relocation of East Halmahera power plant
3. Acceleration of maintenance duration thereby increasing sales

Target, Realisasi dan Proyeksi Aspek Pemasaran

Target, Realization and Projection of Marketing Aspect

Terkait aspek pemasaran dapat dilihat dari pencapaian atas target penjualan tenaga listrik dan cakupan pangsa pasar.

The marketing aspect can be seen from the achievement of electricity sales target and market share coverage.

Tabel Perbandingan Target dengan Realisasi Aspek Pemasaran Tahun 2023 serta Proyeksi Tahun 2024
Table of Comparison between Target and Realization of Marketing Aspect in 2023 and Projection for 2024

Uraian Description	Target RKAP 2023 2023 ABCP Target	Realisasi 2023 2023 Realization	Pencapaian (%) Achievement (%)	Proyeksi 2024 Projection for 2024
Pangsa Pasar (%) Market Share (%)	21,19	21,78	102,78	19,5

Realisasi Pangsa Pasar tahun 2023 secara kumulatif adalah sebesar 31,78% dengan pencapaian 102,78% dari target di tahun 2023. Pencapaian ini dipengaruhi oleh adanya peningkatan demand energi Listrik sehingga penjualan Listrik PLN NP meningkat. Selanjutnya, di tahun 2024 diproyeksikan sebesar 31,5% berdasarkan asumsi pada Rencana Operasi Tahunan tahun 2024 dan pada tahun 2024, sudah beroperasinya pembangkit IPP di wilayah Sumatera, dan beberapa pembangkit Batubara dilakukan 2024 mengalami periode pemeliharaan dengan durasi cukup panjang.

The cumulative realization of Market Share in 2023 was 31.78%, with an achievement of 102.78% of the target in 2023. This achievement was influenced by an increased demand for electricity so that PLN NP's electricity sales increased. Furthermore, in 2024, it is projected at 31.5% based on assumptions in the 2024 Annual Operation Plan and the operation of IPP power plants in the Sumatra region in 2024, and several Coal power plants in 2024 experienced a long maintenance period.

Target, Realisasi dan Proyeksi Pengembangan SDM
Targets, Realization, and Projection of HR Development

Terkait dengan pengembangan SDM indikator yang digunakan adalah biaya pelatihan.

Related to HR development, the indicator used is training costs.

Tabel Perbandingan Target dengan Realisasi Pengembangan SDM Tahun 2023 serta Proyeksi Tahun 2024 (Rp Miliar)
Table of Comparison between Target and Realization of HR Development in 2023 and Projection for 2024 (Rp Billion)

Uraian Description	Target RKAP 2023 2023 ABCP Target	Realisasi 2023 2023 Realization	Pencapaian (%) Achievement (%)	Proyeksi 2024 Projection for 2024
Biaya Pendidikan & Pelatihan (Rp Miliar) Education & Training Costs (Rp Billion)	00,00	14,1	100,16	12,94

Biaya Pelatihan
Training Costs

Realisasi Biaya Pelatihan tahun 2023 adalah sebesar Rp14,1 miliar dengan pencapaian 100,16% dari target RKAP 2023. Pencapaian ini dipengaruhi oleh adanya peningkatan jumlah karyawan pasca Holding Subholding dan pada tahun 2023 sudah banyak program pengembangan karyawan yang dapat berjalan secara offline. Selanjutnya, di tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp12,94 miliar berdasarkan asumsi optimasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan terpusat oleh UPDL dari PT PLN (Persero).

The realization of Training Costs in 2023 was Rp14.1 billion, with an achievement of 100.16% of the 2023 ABCP target. This achievement was influenced by an increase in the number of employees after Subholding Holding and many employee development programs that can be implemented offline in 2023. Furthermore, in 2024, it is projected at Rp12.94 billion based on the assumption of optimizing the implementation of centralized education and training by UPDL from PT PLN (Persero).

Proyeksi Kebijakan Dividen
Dividend Policy Projection

Terkait proyeksi kebijakan dividen dipastikan mengacu pada Keputusan RUPS dilakukan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku.

Related to the projection of dividend policy, it is decided to refer to the GMS Resolution based on the prevailing laws and regulations.

Kebijakan Dividen
Dividend Policy

Kebijakan Pembagian Dividen
Dividend Distribution Policy

Kebijakan Dividen PLN NP diatur berdasarkan Anggaran Dasar PT PLN Nusantara Power Pasal 26 tentang Penggunaan Laba yaitu sebagai berikut:

1. Pembagian dividen diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Dividen hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif.
3. Dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah ditetapkan untuk dibayarkan, dimasukkan dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.
4. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh Pemegang Saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan dengan syarat pengambilannya tidak secara sekaligus dan dengan membayar biaya administrasi yang ditetapkan Direksi.
5. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.
6. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir apabila dimintacatat Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari saham yang telah dikeluarkan, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan kemampuan keuangan Perseroan.
7. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.
8. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan mederita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan.
9. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen interim.

PLN NP's Dividend Policy is regulated based on the Articles of Association of PT PLN Nusantara Power Article 26 on the Use of Profit, as follows:

1. Dividend distribution is decided by the General Meeting of Shareholders.
2. Dividends may only be distributed if the Company has a positive retained earnings.
3. Dividends that are not taken within 5 (five) years after being provided to be paid are deposited in a reserve fund specifically designated for that purpose.
4. Dividends in the special reserve fund can be claimed by the entitled Shareholders by submitting proof of their rights to the dividends, which can be received by the Board of Directors of the Company on the condition that the collection is not in a lump sum and by paying administrative costs determined by the Board of Directors.
5. Dividends that have been included in the special reserve and not taken within a period of 10 (ten) years will become the rights of the Company.
6. The Company may distribute interim dividends prior to the end of the Company's financial year if requested by Shareholders representing at least 1/10 (one-tenth) of the issued shares by taking into account the projected profit and financial capabilities of the Company.
7. The distribution of interim dividends shall be determined based on the decision of the Board of Directors after obtaining the approval of the Board of Commissioners.
8. In the event that after the end of the financial year, the Company suffers a loss, the interim dividends that have been distributed must be returned by the Shareholders to the Company.
9. The Board of Directors and Board of Commissioners are jointly and severally responsible for the Company's losses if the Shareholders are unable to return the interim dividends.

Pembagian Dividen
Dividend Distribution

Pembagian Dividen Tahun 2023
Dividend Distribution in 2023

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 13 Juni 2023, pemegang saham memberi kuasa kepada pemegang saham mayoritas untuk menetapkan saldo laba, cadangan umum dan tujuan serta dividen atas laba Perusahaan tahun 2022. Berdasarkan surat PLN tanggal 10 Agustus 2023, pembagian dividen untuk tahun buku 2022 ditetapkan sebesar Rp6,58 triliun atau Rp1,091 (nilai penuh) per lembar saham.

Based on the Minutes of the General Meeting of Shareholders dated June 13, 2023, the shareholders authorized the majority shareholder to determine the retained earnings, appropriation of general reserves, and dividends on the Company's profit for 2023. Based on PLN's letter dated August 10, 2023, the dividend distribution for the 2022 fiscal year was set at Rp6.58 trillion or Rp1,091 (full amount) per share.

Berdasarkan surat No. 2E00/W8534 tanggal 10 Agustus 2023 perihal Tindak Lanjut Penelaahan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022, disampaikan bahwa Laba Bersih Tahun Buku 2022 yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk adalah sebesar Rp4,55 triliun dibayarkan 100% dibagi sebagai dividen dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dividen untuk PT PLN (persero) telah dibukukan offset Dividen dengan Piutang Tenaga Listrik sebesar Rp4,55 triliun;
2. Dividen untuk pemegang saham minoritas sebesar Rp1,091,- dibayarkan secara tunai.

Based on letter No. 2E00/W8534 dated August 10, 2023, regarding the Follow-up on the Determination of the Use of the Company's Net Profit for the 2022 Fiscal Year, it was conveyed that the Net Profit for the 2022 Fiscal Year distributed to the owners of the parent entity was Rp4,55 trillion, 100% of which was determined to be distributed as dividends with the following provisions:

1. Dividends for PT PLN (Persero) have been offset with Electricity Receivables of Rp4,55 trillion;
2. Dividends for minority shareholders was Rp1,091,- paid in cash.

Pembagian Dividen Tahun 2022

Dividend Distribution in 2022

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 20 Juni 2022, pemegang saham memberi kuasa kepada pemegang saham mayoritas untuk menetapkan saldo laba, cadangan umum dan tujuan serta dividen atas laba Perusahaan tahun 2021. Berdasarkan surat PLN tanggal 8 September 2022, pembagian dividen untuk tahun buku 2021 ditetapkan sebesar Rp6,81 triliun atau Rp968 (nilai penuh) per lembar saham.

Based on the Minutes of the General Meeting of Shareholders dated June 20, 2022, the shareholders granted authority to the majority shareholder to determine the retained earnings, appropriation of general reserves, and dividends of the Company's profit for 2021. Based on PLN's letter dated September 8, 2022, the dividend distribution for the 2021 fiscal year was determined at Rp6,81 trillion or Rp968 (full amount) per share.

Berdasarkan surat No. 2E110/2010 tanggal 19 Oktober 2022 perihal Tindak Lanjut Penelaahan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2021, disampaikan bahwa Laba Bersih Tahun Buku 2021 yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk adalah sebesar Rp6,81 triliun dibayarkan 100% dibagi sebagai dividen dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dividen untuk PT PLN (persero) telah dibukukan offset Dividen dengan Piutang Tenaga Listrik sebesar Rp6,81 triliun;
2. Dividen untuk pemegang saham minoritas sebesar Rp968,- dibayarkan secara tunai.

Based on letter No. 2E110/2010 dated October 19, 2022, regarding the Follow-up on the Determination of the Use of the Company's Net Profit for the 2021 Fiscal Year, it is submitted that the Net Profit for the 2021 Fiscal Year distributed to the owners of the parent entity was Rp6,81 trillion, 100% of which was determined to be distributed as dividends with the following provisions:

1. Dividends for PT PLN (Persero) have been offset with Electricity Receivables of Rp6,81 trillion;
2. Dividends for minority shareholders was Rp968,- paid in cash.

Tabel Pembagian Dividen
Table of Dividend Distribution

Uraian Description	2021	2022	2023
Laba Bersih Didistribusikan kepada Pemilik Entitas Induk (Rp miliar) Net Profit Attributable to Owners of the Parent (Rp billion)	7.001	6.810	4.546
Dividen yang Dibagikan (Rp miliar) Distributed Dividends (Rp billion)	7.001	6.810	4.546
Dividen per Lembar (Rp) Dividend per Share (Rp)	1.277	968	1.091
Dividend Pay Out Ratio	100	100	100
Tanggal Pengumuman Dividen Date of Dividend Announcement	28 Desember 2021 December 30, 2021	8 September 2022 September 8, 2022	10 Agustus 2023 August 10, 2023
Tanggal Pembayaran Dividen Date of Dividend Payment	3 Januari 2022 January 3, 2022	19 Oktober 2022 October 19, 2022	23 Agustus 2023 August 23, 2023

Grafik Dividen yang Dibagikan (Rp miliar)
Chart of Distributed Dividend (Rp billion)

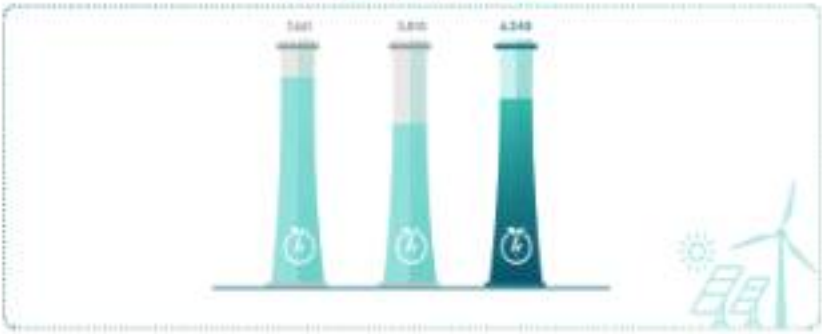

Kontribusi kepada Negara
Contribution to the State

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara karena pungutan yang dibebankan bagi setiap Wajib Pajak di negara ini akan dipergunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, termasuk digunakan sebagai pendapatan negara untuk membayar semua pengeluaran, tak terkecuali pengeluaran yang bertujuan demi pembangunan negara.

PLN NP sebagai Perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN yaitu PT PLN (Persero) kini berperan sebagai agent of value creator dan agent of development yang diharapkan mampu memberikan kontribusi keuntungan ke Negara. Oleh karena itu, komitmen PLN NP kepada Negara terwujud dalam kepatuhan pemenuhan kewajiban Perusahaan sebagai Wajib Pajak melalui pembayaran pajak serta dividen. Jumlah setoran pajak tahun 2023 sebesar Rp4,04 Triliun, meningkat 228,59% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp1,23 Triliun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah pembelian material dan penggunaan jasa dari pihak ketiga.

Sebagai Pemotong Pajak, Perusahaan secara aktif berperan serta dalam melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan atas pajak-pajak seperti PPh Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi dan sewa bangunan; PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi; dan PPh Pasal 23 atas penghasilan yang diterima wajib pajak badan.

PLN NP tidak memperoleh putusan berwajib dari pengadilan pajak tertinggi terkait masalah perpajakan apapun selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Taxes have a crucial role in the state's life because the collection charged from each Taxpayer in this country will be used for the welfare and prosperity of the people, including being used as state revenue to finance all expenditures, including expenditures aimed at state development.

PLN NP as a Company whose shares are mostly owned by SOE, PT PLN (Persero), plays a role as an agent of value creator and agent of development that is expected to be able to contribute profits to the State. Therefore, PLN NP's commitment to the State is realized in compliance with the Company's obligations fulfillment as a Taxpayer through tax and dividend payments. The total tax payment in 2023 was Rp4,04 Trillion, increased by 228,59% compared to Rp1,23 Trillion in 2022. The increase was mainly influenced by the amount of material purchases and the use of services from third parties.

As a Tax Withholder, the Company actively participates in withholding, depositing, and reporting on taxes such as Income Tax Article 4 paragraph 2 on construction services and building leases; Income Tax Article 21 on income received by individual taxpayers; and Income Tax Article 23 on income received by corporate taxpayers.

PLN NP has not obtained a guilty verdict from the highest tax court related to any tax issues for the last 3 (three) years.

Tabel Setoran Pajak (Rp Miliar)
Table of Tax Payment (Rp Billion)

Uraian Description	2021	2022	2023	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
PPh Pasal 21 Income Tax Article 21	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PPh Pasal 23 Income Tax Article 23	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PPh Pasal 4 ayat 2 Income Tax Article 4 paragraph 2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PPh Pasal 15 Income Tax Article 15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PPh Pasal 22 Income Tax Article 22	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PPh Pasal 26 Income Tax Article 26	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PBB Land and Building Tax	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PPN Masukan Input VAT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Jumlah Setoran Pajak Input VAT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Grafik Setoran Pajak (Rp miliar)
Chart of Tax Payment (Rp billion)

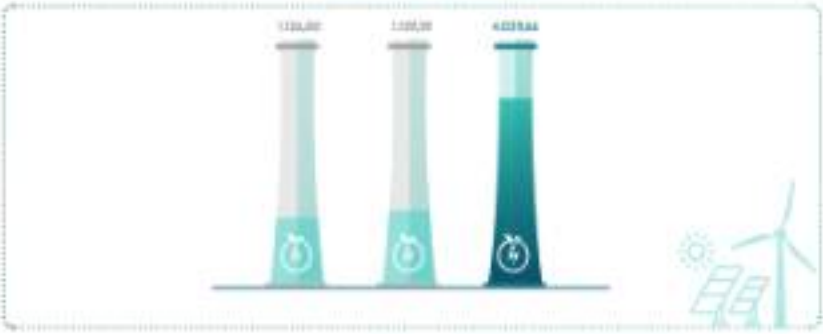

Pajak yang dipungut oleh pihak lain sampai dengan akhir tahun 2023 sebesar Rp291,26 miliar meningkat 95,82% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp149,25 miliar yang terdiri dari:

Taxes collected by other parties until the end of 2023 were Rp291,26 billion, an increase of 95.82% compared to 2022 of Rp149,25 billion, consisting of:

Tabel Penerimaan Pajak yang Dipungut oleh Pihak Lain (Rp miliar)
Table of Tax Revenues Collected by Other Parties (Rp billion)

Uraian Description	2021	2022	2023	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Nominal
PPh Pasal 22 Income Tax Article 22	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PPh Pasal 23 Income Tax Article 23	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Jumlah Pungutan Pajak Jumlah Pungutan Pajak	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**

Selain pembayaran pajak kepada Negara, adalah kontribusi lain PLN NP terhadap Negara secara tidak langsung melalui peningkatan APBN yaitu PLN NP telah menyumbang dividen kepada PT PLN (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada tahun 2023. Pembahasan mengenai pembagian dividen telah dijelaskan diuraian sebelumnya yaitu bagian Kebijakan Dividen.

In addition to tax payments to the State, another indirect contribution of PLN NP to the State is through an increase in the State Budget, namely PLN NP has contributed dividends to PT PLN (Persero), which is a State-Owned Enterprise (SOE) in 2023. The discussion regarding dividend distribution has been explained in the previous sub-chapter, namely the Dividend Policy section.

Realisasi Dana Penawaran Umum
Realization of Public Offering Proceeds

Sampai dengan 31 Desember 2023, status PLN NP belum merupakan Listed Company dan belum melakukan penawaran umum, sehingga tidak ada informasi mengenai total perolehan dana, rencana penggunaan dana, rincian penggunaan dana, saldo dana, maupun tanggal persetujuan RUPS atas perubahan penggunaan dana.

As of December 31, 2023, PLN NP status was not a Listed Company and had not conducted a public offering, so there is no information regarding the total funds obtained, the planned use of funds, details of the use of funds, the balance of funds, or the date of the GMS approval of the changes in the use of funds.

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi/Berelasi
Information on Material Transactions Containing Conflict of Interest and/or Transactions with Affiliated/Related Parties

Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan
Material Transaction Containing Conflict of Interest

Sampai dengan 31 Desember 2023, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

As of December 31, 2023, there were no transactions containing conflicts of interest.

Transaksi dengan Pihak Afiliasi/Berelasi
Transactions with Affiliated/Related Parties

Pihak-Pihak Berelasi
Related Parties

Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sesuai yang didefinisikan oleh PSAK No. 7, Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi sebagai berikut:

a. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

The Group conducts transactions with related parties as defined by SFAS No. 7, Related Party Disclosures, as follows:

a. A person or their close family member is related to the reporting entity if that person:

i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
ii. Memiliki pengaruh signifikan atas pelapor atau entitas pelapor; atau
iii. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau Ventura Bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas);

i. Has control or joint control over the reporting entity;
ii. Has significant influence over the reporter or the reporting entity; or
iii. Is a key management personnel of the reporting entity or a parent of the reporting entity.

b. An entity is related to the reporting entity if it fulfills any of the following matters:
i. The entity and the reporting entity are members of the same group (meaning that the parent, subsidiary, and fellow subsidiary are related to each other);
ii. One entity is an associate or joint venture of another entity (or an associate or joint venture that is a member of a group of which the other entity is a member);
iii. Both entities are joint ventures of the same third party;
iv. One entity is a joint venture of a third entity, and the other entity is an associate of the third entity;
v. The entity is a post-employment benefit plan for employee benefits of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is the entity that organizes the plan, the sponsoring entity is also related to the reporting entity;
vi. Entities controlled or jointly controlled by a person identified in (a);
vii. The person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or the entity's key management personnel (or a parent of the entity);

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh Pemerintah. Pemerintah mengacu kepada otoritas Pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

Government-related entities are entities that are controlled, jointly controlled, or influenced by the Government. Government refers to Government agencies and similar agencies, whether local, national, or international.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan yang merupakan pemegang saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai kuasa pemegang saham.

Government-related entities can be entities controlled or significantly influenced by the Ministry of Finance, which is the entity's shareholder, or entities controlled by the Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of State-Owned Enterprises (SOE) as the shareholder's proxy.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan yang relevan.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant Notes.

Sifat Hubungan Pihak Berelasi
Nature of Related Party Relationship

Dalam kegiatan usahanya, PLN NP melakukan transaksi tertentu dengan pihak hubungan berelasi. Berikut adalah penjelasan mengenai sifat hubungan berelasi yang dimiliki oleh PLN NP:

a. Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia yang merupakan pemegang saham Perusahaan dan BUMN;

In its business activities, PLN NP conducts certain transactions with related parties. The following is an explanation regarding the nature of the related relationships owned by PLN NP:

a. The Government, in this case, is the Minister of Finance of the Republic of Indonesia, who is a shareholder of the Company and SOE, respectively;

b. Perusahaan mempunyai hubungan berelasi dengan BUMN lainnya yang dimiliki bersama oleh Kementerian Keuangan;
c. Grup mempunyai pengaruh signifikan atas investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama;
d. Dewan Komisaris dan Direksi merupakan personil manajemen kunci Grup.

b. The Company has a related relationship with other SOEs jointly owned by the Ministry of Finance;
c. The Group has significant influence over investments in associates or joint ventures;
d. The Board of Commissioners and Board of Directors are the key management personnel of the Group.

Nama Pihak yang Bertransaksi
Name of Transacting Parties

Berikut ini adalah daftar pihak berelasi yang memiliki transaksi dengan Perusahaan:

The following is a list of related parties that have transactions with the Company:

Tabel Nama Pihak yang Bertransaksi
Table of Name of Transacting Parties

No	Uraian Description	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Sifat Transaksi Nature of Transaction
1	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan rekening bank, deposito berjangka, dan bank garansi Placement of cash in banks, time deposits, and bank guarantees
2	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan rekening bank, deposito berjangka, dan bank garansi Placement of cash in banks, time deposits, and bank guarantees
3	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan rekening bank, deposito berjangka, dan bank garansi Placement of cash in banks, time deposits, and bank guarantees
4	PT Bank Syariah Indonesia (BSI)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan rekening bank Placement of cash in banks
5	PT Pertamina (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian bahan bakar dan minyak pelumas Purchase of fuels and lubricants
6	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian bahan bakar gas Purchase of gas fuel
7	PT Pertamina Patra Niaga	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian bahan bakar gas Purchase of gas fuel
8	PT Pertamina Hulu Energi	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian bahan bakar gas Purchase of gas fuel
9	PT Pertamina EP Cepu	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian bahan bakar gas Purchase of gas fuel
10	PT Pertamina Gas	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian bahan bakar gas Purchase of gas fuel
11	PT Bukit Asam Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian batubara Purchase of coal
12	PT Nusantara Regas	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi atas jasa regasifikasi Regasification services

No	Uraian Description	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Sifat Transaksi Nature of Transaction
13	PT Superintending Company of Indonesia (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pelayanan teknik, survei dan pengukuran batubara Engineering services, survey, and coal measurement
14	PT Surveyor Indonesia	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pelayanan teknik, survei dan pengukuran batubara Engineering services, survey, and coal measurement
15	PT Hutama Karya (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi jasa konstruksi Construction services
16	PT Aqueme Jaya Indonesia	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian air Purchase of water
17	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Entitas induk Pengendali Controlling parent entity	Transaksi penjualan tenaga listrik Sales of electricity
18	Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero)	Pemegang saham minoritas Minority shareholder	Penyertaan modal Paid-in capital
19	PT Indonesia Power	Entitas sepengendali Entity under common control	Transaksi penjualan barang dan jasa Transaksi penjualan barang dan jasa
20	PT PLN Batam	Entitas sepengendali Entity under common control	Transaksi penjualan barang dan jasa Transaksi penjualan barang dan jasa
21	PT PLN Energi Primer Indonesia	Entitas sepengendali Entity under common control	Transaksi pembelian bahan bakar
22	PT PLN Energi Gas	Entitas sepengendali Entity under common control	Transaksi sewa Floating Storage Regasification Unit Transaksi sewa Floating Storage Regasification Unit
23	PT Haleyora Power	Entitas sepengendali Entity under common control	Transaksi pembelian barang dan jasa Purchase of goods and services
24	PT Indonesia Comnets Plus	Entitas sepengendali Entity under common control	Transaksi pembelian barang dan jasa Purchase of goods and services
25	PT PLN Enjiniring	Entitas sepengendali Entity under common control	Transaksi pembelian barang dan jasa Purchase of goods and services
26	PT PLN Tarakan	Entitas sepengendali Entity under common control	Transaksi pembelian barang dan jasa Purchase of goods and services
27	PT Energi Management Indonesia (Persero)	Entitas sepengendali Entity under common control	Transaksi pembelian barang dan jasa Purchase of goods and services
28	PT Mandau Cipta Tenaga Nusantara	Entitas sepengendali Entity under common control	Transaksi pembelian barang dan jasa Purchase of goods and services
29	PT Pelayaran Bahtera Adiguna	Entitas sepengendali Entity under common control	Jasa pengangkutan batubara Coal transport services
30	PT Asuransi Pensiun Listrik Nasional	Pihak berelasi lainnya Other related parties	Asuransi bangunan dan perlengkapan umum Insurance for buildings and general equipment
31	PT Sumber Segara Primadaya	Entitas asosiasi Associate	Jasa operasi dan pemeliharaan Operation and maintenance services
32	PT Rekind Daya Mamuju	Entitas asosiasi Associate	Transaksi jasa proyek Project services
33	PT Bajradaya Sentranusa	Ventura bersama Joint venture	Jasa operasi dan pemeliharaan Operation and maintenance services
34	PT Bukit Pembangkit Innovative	Ventura bersama Joint venture	Jasa operasi dan pemeliharaan Operation and maintenance services
35	PT Shentua Guohua Pembangkitan Jawa Bali	Ventura bersama Joint venture	Pinjaman kepada ventura bersama Receivables from Joint Ventures

No	Uraian Description	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Sifat Transaksi Nature of Transaction
36	PT Pembangkitan Jawa Bali Masdar Solar Energi	Ventura bersama Joint venture	Piutang lepada Ventura Bersama Receivables from Joint Ventures
37	PT North Sumatera Hydro Energi	Ventura bersama Joint venture	Piutang lain-lain Other receivables
38	PT Nusiga Pembangkitan Jawa Bali	Ventura bersama Joint venture	Jasa operasi dan pemeliharaan, dan piutang dividen Operation and maintenance services, and dividend receivables
39	Dana pensiun PLN	Pihak berelasi lainnya Other related parties	Pengelolaan dana pensiun Pension fund manager
40	Personil manajemen kunci Key management personnel	Komisaris, Direktur dan Kepala Divisi Commissioners, Directors, and Division Heads	Upah dan tunjangan Salaries and allowances

Tujuan Transaksi dengan Pihak Berelasi
Purpose of Transactions with Related Parties

Transaksi afiliasi dilakukan berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan profesional dengan tujuan menguntungkan kedua belah pihak (efficient related party transaction). Transaksi pihak berelasi menjadi efisien jika menguntungkan pemegang saham pengendali maupun pemegang saham non pengendali.

Affiliated transactions are carried out based on the principle of mutual need and professionalism with the aim of benefiting both parties (efficient related party transaction). Related party transactions are efficient if they benefit both controlling and non-controlling shareholders.

Saldo dan Transaksi dengan Pihak Berelasi
The Balance and Transactions with Related Parties

Berikut adalah saldo dan transaksi dengan pihak berelasi tahun 2023 dan 2022:

The following are balances and transactions with related parties in 2023 and 2022:

Tabel Saldo dan Transaksi dengan Pihak Berelasi (Rp juta)
Table of Balances and Transactions with Related Parties (Rp million)

Uraian Description	Pihak Yang Bertransaksi Transacting Party	2023[1] Rp juta Rp million	2022 Rp juta Rp million
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	BNI	4.960.548	2.436.806
	Bank Mandiri	3.760.039	3.647.879
	BRI	134.026	719.285
	BSI	70.012	96.497
	Sub Jumlah Sub Total	**8.899.625**	**6.769.467**
Deposito Berjangka Time Deposits	BRI	297.421	495.406
	BNI	21.493	80.605
	Bank Mandiri	162.416	302.604
	Sub Jumlah Sub Total	**481.299**	**883.722**
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya Restricted cash in banks and time deposits	BRI	180.314	93.543
	BNI	1.127	3.594
	Bank Mandiri	112.262	39.368
	Sub Jumlah Sub Total	**294.703**	**93.503**

Uraian Description	Pihak Yang Bertransaksi Transacting Party	2023*) Rp juta Rp million	2022 Rp juta Rp million
Piutang usaha Trade receivables	PLN	[illegible]	[illegible]
	PLN Batam	-	[illegible]
	BPI	[illegible]	[illegible]
	PIP	[illegible]	[illegible]
	BOSW	[illegible]	[illegible]
	Lain-lain	[illegible]	[illegible]
	Sub Jumlah Sub Total	**[illegible]**	**[illegible]**
Piutang lain-lain Other receivables	SUPUR	[illegible]	[illegible]
	KPUR	-	[illegible]
	PNUR	[illegible]	[illegible]
	NGHE	[illegible]	-
	Sub Jumlah Sub Total	**[illegible]**	**[illegible]**
Piutang kepada ventura bersama Receivables from joint ventures	SUPUR	[illegible]	[illegible]
	PNUR	[illegible]	[illegible]
	Sub Jumlah Sub Total	**[illegible]**	**[illegible]**
Utang usaha Trade payables	Pertamina	[illegible]	[illegible]
	PTI	[illegible]	[illegible]
	Pelita Niaga	[illegible]	[illegible]
	Pertamina	[illegible]	[illegible]
	PEPC	-	[illegible]
	PNB	-	[illegible]
	Perum Jasa Tirta	[illegible]	[illegible]
	PT Guasindra Nagas	[illegible]	[illegible]
	Huberna Karya	[illegible]	[illegible]
	Pertagas	[illegible]	-
	PLN Batam	[illegible]	-
	PTBA	[illegible]	-
	PGN	[illegible]	-
	Lain-lain	[illegible]	[illegible]
	Sub Jumlah Sub Total	**[illegible]**	**[illegible]**
Utang lain-lain Other payables	PLN	[illegible]	[illegible]
	ICON	[illegible]	[illegible]
	HP	[illegible]	[illegible]
	PP	[illegible]	[illegible]
	SAC	[illegible]	-
	PLNI	[illegible]	[illegible]
	Sub Jumlah Sub Total	**[illegible]**	**[illegible]**
Pinjaman dari pemegang saham Loans from shareholder	PLN	[illegible]	[illegible]
	Sub Jumlah Sub Total	**[illegible]**	**[illegible]**

Uraian Description	Pihak Yang Bertransaksi Transacting Party	2022*)	2023
		Rp juta Rp million	Rp juta Rp million
Penjualan tenaga listrik Sales of electricity	PLN	[illegible]	[illegible]
	Sub Jumlah Sub Total	**[illegible]**	**[illegible]**
Pendapatan usaha lainnya Other operating income	PLN	[illegible]	[illegible]
	PLN Batam	[illegible]	[illegible]
	PIP	[illegible]	[illegible]
	IPI	[illegible]	[illegible]
	KDSN	[illegible]	[illegible]
	Lain-lain	[illegible]	[illegible]
	Sub Jumlah Sub Total	**[illegible]**	**[illegible]**
Pembelian tenaga listrik Purchased electricity	PLN	[illegible]	[illegible]
	Sub Jumlah Sub Total	**[illegible]**	**[illegible]**
Pembelian bahan bakar dan pelumas Purchased fuel and lubricants	Pertamina	[illegible]	[illegible]
	PGN	[illegible]	[illegible]
	IMI	[illegible]	[illegible]
	IPI	[illegible]	[illegible]
	Perum Jasa Tirta	[illegible]	[illegible]
	PTBA	[illegible]	[illegible]
	PLNGG	[illegible]	[illegible]
	PLNE	[illegible]	[illegible]
	Sub Jumlah Sub Total	**[illegible]**	**[illegible]**
Beban pemeliharaan Maintenance expenses	PLN Tarahan	[illegible]	[illegible]
	PLN Batam	[illegible]	[illegible]
	PLNE	[illegible]	[illegible]
	PIP	[illegible]	[illegible]
	Lain-lain	[illegible]	[illegible]
	Sub Jumlah Sub Total	**[illegible]**	**[illegible]**
Beban usaha lain-lain Other operating expenses	Jasindo	[illegible]	[illegible]
	APLN	[illegible]	-
	Sub Jumlah Sub Total	**[illegible]**	**[illegible]**
Beban keuangan Finance costs	PLNGG	[illegible]	[illegible]
	PLN	-	[illegible]
	Sub Jumlah Sub Total	**[illegible]**	**[illegible]**

*) Disajikan kembali / As restated

a. Pinjaman kepada Pemegang Saham

Pada tanggal 30 Maret 2018, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dengan PLN sebesar AS$180.000.000 dengan tingkat bunga tahunan LIBOR USD enam bulan dengan marjin 0,98%. Pinjaman ini digunakan untuk mendanai proyek add-on PLTGU Muara Tawar Blok 2, 3 dan 4. Jangka waktu perjanjian efektif sejak ditandatangannya perjanjian ini dan akan berakhir pada tanggal 8 Mei 2032. Pada tanggal 31 Oktober 2021, perjanjian ini telah diamandemen untuk mengubah suku bunga dari LIBOR menjadi SOFR.

Saldo pinjaman ini pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp1,28 triliun (setara dengan AS$141.986.345) dan Rp1,67 triliun (setara dengan AS$171.054.545), dengan porsi jangka pendek masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp287,0 miliar dan Rp291,05 miliar.

a. Loans from Shareholders

On March 30, 2018, the Company signed a loan agreement with PLN of US$180,000,000 with an annual interest rate of six-month US$ LIBOR with a margin of 0.98%. This loan is used to fund the add-on project of Muara Tawar Block 2, 3, and 4 CCPPs. The term of the agreement is effective since the signing of this agreement and will expire on May 8, 2032. On October 31, 2021, this agreement has been amended to change the interest rate from LIBOR to SOFR.

The balance of these loans as of December 31, 2023, and 2022, was Rp1.28 trillion (equivalent to US$141,986,345) and Rp1.67 trillion (equivalent to US$171,054,545), respectively, with the short-term portion as of December 31, 2023, and 2022 of Rp287.0 billion and Rp291.05 billion, respectively.

b. Kompensasi Manajemen Kunci

Jumlah kompensasi Dewan Komisaris Perusahaan untuk 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp15,63 miliar dan Rp15,97 miliar. Jumlah kompensasi Direksi Perusahaan untuk 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp18,29 miliar dan Rp18,83 miliar. Seluruh kompensasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan merupakan imbalan kerja jangka pendek.

b. Compensation for the Key Management

The total compensation of the Company's Board of Commissioners for 2023 and 2022 was Rp15.63 billion and Rp15.97 billion, respectively. The total compensation of the Company's Board of Directors for 2023 and 2022 was Rp18.29 billion and Rp18.83 billion, respectively. All compensation to the Company's Board of Commissioners and Board of Directors are short-term employee benefits.

Kewajaran Transaksi

Transaction Fairness

Seluruh transaksi dengan pihak berelasi telah sesuai dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati kedua belah pihak, sehingga Perusahaan menganggap bahwa semua transaksi masih dalam batas wajar sesuai dengan PSAK No. 7 tentang Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi. Hal ini mengindikasikan bahwa Perusahaan telah melakukan transaksi dengan pihak yang berelasi secara wajar. Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan yang relevan.

All transactions with related parties have been in accordance with the policies and terms agreed by both parties, so the Company considers that all transactions are still within reasonable limits in accordance with PSAK No. 7 concerning Related Party Disclosures. This indicates that the Company has fairly conducted transactions with related parties. All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant Notes.

Kebijakan Perusahaan terkait Mekanisme Review atas Transaksi

Company Policy Related to Review Mechanism of Transaction

Mekanisme review atas transaksi dengan pihak berelasi melalui proses audit baik yang dilakukan oleh auditor internal maupun auditor eksternal. Sebagai upaya untuk memastikan tingkat kewajaran transaksi dan kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, laporan transaksi afiliasi di atas telah diaudit oleh Auditor.

The review mechanism of transactions with related parties is through an audit process conducted by both internal and external auditors. As an effort to ensure the level of fairness of transactions and conformity with accounting standards generally applied in Indonesia, the reports of affiliated transactions above have been audited by the Auditor.

Keterlibatan Organ Perusahaan dalam Proses Review Transaksi Pihak Berelasi
Involvement of Company Organs in the Review Process of Related Party Transactions

Mekanisme review atas transaksi dengan pihak berelasi dilakukan melalui proses audit, baik oleh auditor internal maupun auditor eksternal. Dalam proses audit tersebut, Perusahaan melibatkan Organ Perusahaan diantaranya Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan beberapa Divisi yang terkait.

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan oleh Komite Audit, Dewan Komisaris berperan dalam memberikan arahan dan masukan kepada Direksi agar transaksi dengan pihak berelasi dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip transaksi yang wajar (arms-length principle).

Direksi memastikan seluruh transaksi dengan pihak berelasi di sepanjang tahun 2023, telah melalui prosedur yang memadai dan telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum dan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (arms-length principle). Informasi lebih rinci terkait transaksi pihak berelasi telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan pada Catatan 32.

The review mechanism for transactions with related parties is carried out through an audit process, both by internal and external auditors. In the audit process, the Company involves its organs, including the Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee, and several related Divisions.

Based on the results of the review conducted by the Audit Committee, the Board of Commissioners has a role in providing direction and input to the Board of Directors so that transactions with related parties can be carried out in accordance with the arms-length principle.

The Board of Directors ensures that all transactions with related parties throughout 2023 have gone through adequate procedures and been carried out in accordance with generally accepted business practices and meet the arms-length principle. More detailed information regarding related party transactions has been disclosed in the Company's Consolidated Financial Statements in Note 32.

Informasi Material Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi, dan Restrukturisasi Utang/Modal
Material Information on Investment, Expansion, Divestment, Acquisition, and Debt/Capital Restructuring

Investasi
Investment

Pada tahun 2023, PLN NP melakukan tiga bentuk investasi yaitu investasi pada kinerja unit dan pengembangan usaha, investasi pada entitas asosiasi/ventura bersama, dan investasi penyertaan saham pada entitas anak.

In 2023, PLN NP invested in three sectors, including investment in unit performance and business development, investment in associates/joint ventures, and share investment in subsidiaries.

Investasi pada Penguatan Pembangkitan dan Pengembangan Usaha
Investment in Strengthening Electric Power Generation and Business Development

PLN NP mengatur mekanisme investasi ini dalam Peraturan Direksi No. 001/I/019/DIR/2020 tentang Pedoman Tata Kelola Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Peraturan Direksi No. 019/I/019/2020 tentang Kebijakan Investasi PT Pembangkitan Jawa – Bali, dan Peraturan Direksi No. 0038/I/DIR/019/DIR/2021 tentang Batasan Operasi dan Biaya Investasi Pembangkitan Jawa – Bali.

PLN NP regulates this investment mechanism in Board of Directors Regulation No. 001/I/019/DIR/2020 concerning Guidelines for the Governance of the Company's Annual Budget and Operational Plan (ABOP), Board of Directors Regulation No. 019/I/019/2020 concerning Investment Policy of PT Pembangkitan Jawa – Bali, and Board of Directors Regulation No. 0038/I/DIR/019/DIR/2021 concerning Operating Limits and Investment Costs of Pembangkitan Jawa – Bali.

Realisasi investasi penguatan pembangkit pada tahun 2022 adalah sebesar Rp1,49 triliun atau lebih tinggi 370,6% bila dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp316,43 miliar. Bila dibandingkan dengan RKAP 2023, pencapaiannya sebesar 81,46%. Investasi untuk program pengembangan usaha pada tahun 2023 adalah sebesar Rp1,22 triliun atau lebih tinggi 44,72% bila dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp844,55 miliar. Bila dibandingkan dengan RKAP 2023, pencapaiannya sebesar 51,8%. Ketidaktercapaian ini disebabkan tersuatu karena penyerapan dikurus untuk beberapa program pengembangan usaha mundur serta terdapat beberapa keterlambatan leasing untuk Anggaran Investasi penguatan pembangkit.

The realization of investment in power plant strengthening in 2023 was Rp1.49 trillion or 370.6% higher than the realization in 2022 of Rp316.43 billion. When compared to the 2023 RKCP, the achievement was 81.46%. Investment for business development programs in 2023 was Rp1.22 trillion or 44.72% higher than the realization in 2022 of Rp844.55 billion. When compared to the 2023 RKCP, the achievement was 51.8%. This non-achievement was mainly due to the backward allocation of disbursements for several business development programs, and there were several delays in leasing for the Investment Budget for power plant strengthening.

Sumber dana yang digunakan untuk investasi ini merupakan alokasi dana internal perusahaan/Anggaran RKAP tahun 2023. Tujuan dari investasi ini telah dicantum dalam sub bab Realisasi Investasi Barang Modal.

The source of funds used for this investment is the allocation of the Company's internal funds/RKCP Budget in 2023. The purpose of this investment has been described in the Realization of Capital Goods Investment sub chapter.

Investasi pada Entitas Asosiasi/Ventura Bersama

Investment in Associates/Joint Ventures

PLN NP melakukan investasi pada 8 (delapan) perusahaan ventura bersama dan 3 (tiga) entitas asosiasi.

PLN NP invested in 8 (eight) joint ventures and 3 (three) associated entities.

Tabel Investasi pada Entitas Asosiasi/Ventura Bersama Tahun 2021-2023

Table of Investment in Associates/Joint Ventures in 2021-2023

Perusahaan Company	Domisili Domicile	Jenis Usaha Type of Business	Tahun Operasi Operation Year	% Penyertaan % Investment	
				2022	2023
Entitas Asosiasi Associated Entities					
PT Sumber Segara Primadaya (SSP)	Cilacap	Pembangkit listrik tenaga uap Steam power plant	2006	49,00	49,00
PT Bekasi Daya Manunggal (BDM)	Jakarta	Pembangkit listrik tenaga uap Steam power plant	2008	33,00(*)	33,00(*)
PT Sumbagsel Energi Sakti Nusantara	Jakarta	Pembangkit listrik tenaga uap Steam power plant	2[illegible]	33,00(*)	33,00(*)
Ventura Bersama Joint Ventures					
PT Bukit Pembangkit Innovative (BPI)	Palembang	Pembangkit listrik tenaga uap Steam power plant	2015	41,25	41,25
PT Konsorsium Pembangkitan Jawa Bali (KPJB)	Jepara	Operasi dan Pemeliharaan Operation and Maintenance	2010	49,00	49,00
PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali	Jakarta	Pembangkit listrik tenaga uap Steam power plant	2019	30,00	30,00
PT Bakrie Sentosa (BCSN)	Aceh	Pembangkit listrik tenaga air Hydro power plant	2011	36,67	36,67
PT North Sumatera Hydro Energy	Jakarta	Pembangkit listrik Power Plant	2[illegible]	25,00	25,00
PT Guohua Taishan Pembangkitan Jawa-Bali	Jakarta	Operasi dan Pemeliharaan Operation and Maintenance	2019	30,00	30,00
PT Pembangkitan Jawa Bali Masdar Solar Energy (PMSE)	Jakarta	Pembangkit listrik tenaga surya Solar power plant	2[illegible]	51,00	51,00
PT Nusantara Sembcorp Jakarta Solar Energy (NSJSE)	Jakarta	Pembangkit listrik tenaga surya Solar power plant	2[illegible]	–	51,00

(*) Dalam tahap pengembangan
(**) Tersisipkan pada Anak Perusahaan

(*) Under development
(**) Embed in a Company Subsidiary

Berdasarkan Akta Notaris No. 7 tanggal 31 Desember 2023 yang dibuat di hadapan Nina Ng. S.H., Notaris di Jakarta, PLN NR dan PT Sembcorp Renewables Indonesia (Sembcorp) mendirikan ventura bersama dengan kepemilikan saham masing-masing sebesar 51% dan 49%. Pada Januari 2024, para pemegang saham telah menempatkan dan menyetor penuh modal dasar RS55.

Based on Notarial Deed No. 7 dated December 31, 2023, made before Nina Ng. S.H., Notary in Jakarta, PLN NR and PT Sembcorp Renewables Indonesia (Sembcorp) established a joint venture with 51% and 49% shareholding, respectively. In January 2024, the shareholders have fully subscribed and paid up the authorized capital of RS55.

Tujuan dari dilakukannya investasi pada entitas diatas terutama terkait potensi pertumbuhan jangka panjang, karena seluruh entitas tersebut bergerak dalam industri ketenagalistrikan yang sama dengan industri Perusahaan. Manajemen meyakini bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai.

The purpose of investing in the above entities is mainly related to long-term growth potential, as all of these entities are engaged in the same power industry as the Company's industry. Management believes that there is no indication of impairment.

Sumber dana yang digunakan untuk investasi ini merupakan alokasi dana internal perusahaan.

The source of funds used for this investment is the Company's internal fund allocation.

Investasi Penyertaan Saham pada Entitas Anak

Share Investment in Subsidiaries

Perusahaan memiliki saham entitas anak baik langsung maupun tidak langsung sebagai berikut:

The Company owns shares of subsidiaries either directly or indirectly as follows:

Tabel Investasi Penyertaan Saham pada Entitas Anak Tahun 2022-2023
Table of Share Investment in Subsidiaries in 2022-2023

Perusahaan Company	Domisili Domicile	Jenis Usaha Type of Business	% Penyertaan % Investment	
			2022	2023
PT PLN Nusantara Power Services (PLN NPS) (dahulu PT Pembangkitan (pemasangan) peralatan ketenagalistrikan/ Jasa Bak Services) dan entitas anaknya PT PLN Nusantara Power Services (PLN NPS) (formerly PT Pembangkitan (Installation) of electricity equipment/Jasa Bak Services) and its subsidiaries	Surabaya	Jasa Operasi dan Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik dan Pembangunan (Pemasangan) Peralatan Ketenagalistrikan Operation and Maintenance Services of Power Plants and Construction (Installation) of Electricity Equipment	P1000	P1000
PT Hikita Karya Prima (HKP) *	Surabaya	Jasa Servisasi Servicing	R1000	R1000
PT PLN Nusantara Power Construction (PLN NPC) (dahulu PT Rekadaya Elektrika) PT PLN Nusantara Power Construction (PLN NPC) (formerly PT Rekadaya Elektrika)	Jakarta	Rekayasa, pengadaan dan konstruksi, dan operasi dan pemeliharaan sektor ketenagalistrikan Engineering, procurement and construction, and operation and maintenance of the electricity sector	99,97	99,97
PT Prima Power Nusantara (PPN)*	Jakarta	Rekayasa, pengadaan dan konstruksi, dan operasi dan pemeliharaan sektor ketenagalistrikan Engineering, procurement and construction, and operation and maintenance of the electricity sector	100,00	100,00
PT Rekadaya Elektrika Consult (REC)*	Jakarta	Supervisi dan konsultasi Supervision and consulting	-	-
PT Energi Innovatif Indonesia (EII)	Palembang	Perdagangan, konstruksi, pertambangan dan pertanian Trade, construction, mining, and agriculture	70,77	70,77

Perusahaan Company	Domisili Domicile	Jenis Usaha Type of Business	% Kepemilikan % Investment	
			2022	2023
PT PLN Nusantara Renewables (PLN NR) (dahulu PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi) dan entitas anaknya PT PLN Nusantara Renewables (PLN NR) (formerly PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi) and its subsidiaries	Jakarta	Investasi ketenagalistrikan Electricity investment	100,00	100,00
PT Pembangkitan Jawa Bali Investindo (PJB Investindo) * dan entitas anaknya PT Pembangkitan Jawa Bali Investindo (PJB Investindo) * and its subsidiaries	Jakarta	Penempatan investasi di pengadaan listrik Placement of investment in electricity procurement	100,00	100,00
PT Pembangkit Jawa Bali Kerinci Cinde (PJBK) *	Jakarta	Pembayaran dalam bentuk penyertaan modal Financing in the form of capital investment	100,00	100,00
PT Prima Layanan Rhaya Suku Cadang (PLRSC)	Jakarta	Perdagangan barang dan jasa, engineering, rantai pasokan, dan konsultasi di bidang ketenagalistrikan Trade in goods and services, engineering, supply chain, and consulting in the electricity sector	51,00	51,00

* perusahaan tidak langsung (entitas anak)

- Berdasarkan Akta Notaris No. 38 tanggal 27 April 2022 dari Lenny Janis Ishak, SH, Notaris di Jakarta, Perusahaan mengadakan perjanjian jual beli saham untuk membeli saham PLN NPS dari Yayasan Kesejahteraan PT Pembangkitan Jawa Bali (YK PJB), dimana Perusahaan membeli sebagian kepemilikan saham PLN NPS atau setara dengan 1% kepemilikan atas PLN NPS dengan nilai pengalihan sebesar Rp11,184. Nilai buku bersih PLN NPS untuk porsi kepemilikan YK PJB adalah sebesar Rp9,612.
- Pada tahun 2022, Perusahaan melakukan penambahan penyertaan modal sebesar Rp85,384 sehingga nilai penyertaan pada PLN NPC menjadi Rp710,709. Pada tahun 2022, PLN NPC, entitas anak, melakukan akuisisi PPN dan divestasi BEC dengan entitas sepengendali. Lihat Catatan 22 untuk informasi terkait nilai transaksi.
- Pada tahun 2023, PLN NR, entitas anak, melakukan penambahan penyertaan modal sebesar AS$7,915,400 (setara dengan Rp114,918) sehingga nilai penyertaan pada PJB Investindo menjadi Rp301,671.
- Pada tahun 2023, PJB Investindo, entitas anak tidak langsung, melakukan penambahan penyertaan modal sebesar AS$1,315,625 (setara dengan Rp19,572) sehingga nilai penyertaan pada PJBK menjadi Rp248,571.

Tujuan dari dilakukannya investasi berupa penyertaan saham pada entitas anak diatas tersebut untuk pengembangan usaha dari Perusahaan untuk di bidang selain Penjualan Tenaga Listrik.

Sumber dana yang digunakan untuk investasi ini menggunakan alokasi dana internal perusahaan.

- Based on Notarial Deed No. 38 dated April 27, 2022, of Lenny Janis Ishak, SH, Notary in Jakarta, the Company entered into a share sale and purchase agreement to purchase shares of PLN NPS to PT Pembangkitan Jawa Bali Welfare Foundation (YK PJB), under which the Company purchased a part of shares or equivalent to 1% ownership of PLN NPS with a total transaction value of Rp11,184. The net book value of the YK PJB's ownership portion in PLN NPS was Rp9,612.
- In 2022, the Company made additional investments amounting to Rp85,384; therefore, the carrying amount of investments in PLN NPC amounting to Rp710,709. In 2022, PLN NPC, a subsidiary, acquired PPN and divested BEC with an entity under common control. Refer to Note 22 for information regarding the transaction value.
- In 2023, PLN NR, a subsidiary, made an additional capital investment of US$7,915,400 (equivalent to Rp114,918) so that the value of investment in PJB Investindo became Rp301,671.
- In 2023, PJB Investindo, an indirect subsidiary, made an additional capital investment of US$1,315,625 (equivalent to Rp19,572) so that the value of investment in PJBK became Rp248,571.

The purpose of the investment in the form of shares investment in the above subsidiaries is mainly for business development of the Company in the field other than Sales of Electricity.

The source of funds used for this investment is the Company's internal fund allocation.

Ekspansi
Expansion

PLN NP mengatur mekanisme ekspansi dalam Peraturan Direksi No. 019/I/09/2020 tentang Kebijakan Investasi PT Pembangkitan Jawa – Bali. Pada tahun 2021, PLN NP tidak melakukan aktivitas ekspansi, sehingga tidak tersedapat informasi terkait tujuan dan nilai transaksi, sumber dana, serta hasil kegiatan ekspansi.

PLN NP regulates the expansion mechanism in the Board of Directors Regulation No. 019/I/09/2020 concerning the Investment Policy of PT Pembangkitan Jawa - Bali. In 2021, PLN NP did not conduct any expansion activities, as there is no information regarding the purpose and value of transactions, sources of funds, and results of expansion activities.

Divestasi
Divestment

PLN NP mengatur mekanisme divestasi dalam Peraturan Direksi No. 019/I/09/2020 tentang Kebijakan Investasi PT Pembangkitan Jawa-Bali. Pada tahun 2021, PLN NP tidak melakukan aktivitas divestasi, sehingga tidak tersedapat informasi terkait tujuan dan nilai transaksi, sumber dana, serta hasil kegiatan divestasi.

PLN NP regulates the divestment mechanism in the Board of Directors Regulation No. 019/I/09/2020 concerning the Investment Policy of PT Pembangkitan Jawa - Bali. In 2021, PLN NP did not conduct divestment activities, as there is no information regarding the purpose and value of the transaction, the source of funds, and the results of divestment activities.

Akuisisi
Acquisition

PLN NP mengatur mekanisme akuisisi dalam Peraturan Direksi No. 019/I/09/2020 tentang Kebijakan Investasi PT Pembangkitan Jawa-Bali. . Pada tahun 2021, PLN NP tidak melakukan aktivitas akuisisi, sehingga tidak tersedapat informasi terkait tujuan dan nilai transaksi, sumber dana, serta hasil kegiatan akuisisi.

PLN NP regulates the acquisition mechanism in the Board of Directors Regulation No. 019/I/09/2020 regarding the Investment Policy of PT Pembangkitan Jawa - Bali. In 2021, PLN NP did not conduct any acquisition activities, so there is no information regarding the purpose and value of the transaction, the source of funds, and the results of acquisition activities.

Restrukturisasi Utang dan/atau Modal
Debt and/or Capital Restructuring

PLN NP mengatur mekanisme restrukturisasi utang dan/atau modal dalam Peraturan Direksi No. 019/I/09/2020 tentang Kebijakan Investasi PT Pembangkitan Jawa – Bali . Pada tahun 2021, PLN NP tidak melakukan aktivitas restrukturisasi utang dan/atau modal, sehingga tidak tersedapat informasi terkait tujuan dan nilai transaksi, sumber dana, serta hasil kegiatan restrukturisasi utang dan/atau modal.

PLN NP regulates the mechanism for debt and/or capital restructuring in the Board of Directors Regulation No. 019/I/09/2020 concerning the Investment Policy of PT Pembangkitan Jawa - Bali. In 2021, PLN NP did not carry out debt and/or capital restructuring activities, so there was no information regarding the purpose and value of transactions, sources of funds, and results of debt and/or capital restructuring activities.

Perubahan Kebijakan Akuntansi
Changes in Accounting Policy

Alasan Perubahan Kebijakan Akuntansi
Reason of Changes in Accounting Policy

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi material yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Perusahaan. Kebijakan ini telah diaplikasikan secara konsisten terhadap semua tahun yang disajikan, kecuali dinyatakan lain.

A. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan ("SAK")
Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan telah disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

B. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian
Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian adalah dasar akrual. Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha dan dengan pengukuran nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia memerlukan penggunaan estimasi dan asumsi akuntansi penting tertentu. Penyusunan laporan keuangan juga menghendaki manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan. Area-area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi, atau area dimana asumsi dan estimasi yang berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian dungkapkan dalam Catatan 4 dalam Laporan Keuangan Audited KAP.

The following are the material accounting policies applied in preparing the Company's consolidated financial statements. These policies have been applied consistently to all years presented unless otherwise stated.

A. Compliance with the Financial Accounting Standards ("FAS")
The Company's consolidated financial statements have been prepared in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards.

B. Basis of preparation of the consolidated financial statements
The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, are prepared on the accrual basis of accounting. The preparation and presentation of the consolidated financial statements are based on a going concern assumption, and the measurement basis is historical cost, except for certain accounts that have been measured on the basis described in the related accounting policies.

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of specific critical accounting estimates and assumptions. It also requires management to exercise its judgment in the process of applying the Group's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgment or complexity, or where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements, are disclosed in Note 4 in the Financial Statements of Audited PAI.

Uraian Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dampaknya
Description on the Changes in Accounting Policy and the Impact

Standar Akuntansi Berlaku Efektif Tahun 2023
Accounting Standards Effective in 2023

- Amandemen PSAK No. 1, Penyajian Laporan Keuangan – Pengungkapan Kebijakan Akuntansi;
- Amandemen PSAK No. 16, Aset Tetap – Hasil Sebelum Penggunaan yang Dimaksudkan;
- Amandemen PSAK No. 25, Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan – Definisi Estimasi Akuntansi;
- Amandemen PSAK No. 46, Pajak Penghasilan – Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal;
- Amandemen PSAK No. 46, Pajak Penghasilan – Reformasi Pajak Internasional – Ketentuan Model Pilar Dua.

- Amendment to SFAS No. 1, Presentation of Financial Statements – Disclosure of Accounting Policies;
- Amendment to SFAS No. 16, Property, Plant and Equipment – Proceeds before Intended Use;
- Amendment to SFAS No. 25, Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors – Definition of Accounting Estimates;
- Amendment to SFAS No. 46, Income Taxes – Deferred Taxes related to Assets and Liabilities Arising from a Single Transaction;
- Amendment to SFAS No. 46, Income Taxes – International Tax Reform – Two Pillar Model Provisions.

Dampak atas Penerapan Standar Akuntansi Berlaku Efektif Tahun 2022

Impact of the Accounting Standard Implementation Effective In 2022

Penerapan dari amandemen terhadap standar akuntansi, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2022 tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Grup dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan konsolidasian pada tahun berjalan.

The implementation of the annual amendments to accounting standards, effective from January 1, 2022, did not result in any significant changes to the Group's accounting policies and did not have material impact on the amounts reported in the consolidated financial statements in the current year.

Standar dan Interpretasi telah Diterbitkan tetapi Belum Diterapkan

Issued Standards and Interpretations but Not Yet Implemented

Standar baru dan amandemen yang telah diterbitkan, namun berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023, tapi penerapan dini diperkenankan, adalah sebagai berikut:

- PSAK No. 74, Kontrak Asuransi;
- Amandemen PSAK No. 1, Penyajian Laporan Keuangan – Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang;
- Amandemen PSAK No. 1,Penyajian Laporan Keuangan - Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan;
- Amandemen PSAK No. 2, Laporan Arus Kas;
- Amandemen PSAK No. 10, Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing - Kekurangan Kelentukan;
- Amandemen PSAK No. 60, Instrumen Keuangan: Pengungkapan - Pengaturan Pembiayaan Pemasok;
- Amandemen PSAK No. 73, Sewa - Liabilitas Sewa dalam Jual dan Sewa-Balik;
- Amandemen PSAK No. 74, Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK No. 74 dan PSAK No. 71 - Informasi Komparatif.

New standards and amendments that have been issued, but are effective for financial years beginning on or after January 1, 2023, but early adoption is permitted, are as follows:

- SFAS No. 74, Insurance Contracts;
- Amendment to SFAS No. 1, Presentation of Financial Statements – Classification of Current or Non-Current Liabilities;
- Amendment to SFAS No. 1, Presentation of Financial Statements - Long-term Liabilities with Covenants;
- Amendment to SFAS No. 2, Statement of Cash Flows;
- Amendment to SFAS No. 10, The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates - Lack of Exchangeability;
- Amendment to SFAS No. 60, Financial Instruments: Disclosure – Supplier Finance Arrangements;
- Amendment to SFAS No. 73, Lease- Lease Liability in a Sale and Leaseback;
- Amendment to SFAS No. 74, Insurance Contracts on the Initial Application of SFAS No. 74 and SFAS No. 71 - Comparative Information.

Standar baru dan amandemen di atas berlaku efektif mulai 1 Januari 2024, kecuali untuk PSAK No. 74, Amandemen PSAK No. 10 dan Amandemen PSAK No. 74 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2025, tetapi penerapan dini diperkenankan.

The new standards and amendments above are effective from January 1, 2024, except for SFAS No. 74, Amendments to SFAS No. 10, and Amendments to SFAS No. 74, which are effective from January 1, 2025, but early adoption is permitted.

Dampak atas Standar dan Interpretasi yang telah Diterbitkan tetapi Belum Diterapkan

Impact of Standards and Interpretations Issued but Not Yet Applied

Pada tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru, amandemen dan revisi pada laporan keuangan konsolidasian Perusahaan.

At the date of completion of these consolidated financial statements, the Company is currently studying the possible impact of the adoption of new standards, amendments, and revisions on the Company's consolidated financial statements.

Mulai 1 Januari 2024, referensi terhadap masing-masing PSAK dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) akan diubah sebagaimana diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Starting January 1, 2024, references to each SFAS and Interpretation of Financial Accounting Standards (IFAS) will be amended as issued by the Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants.

Perubahan Peraturan dan Dampaknya terhadap Perusahaan

Regulatory Changes and the Impacts on the Company

Berikut beberapa perubahan peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku efektif pada tahun 2022 serta dampaknya terhadap kinerja PLN NP:

The following are several changes in laws and regulations as well as non-regulations effective in 2022 and their impact on PLN NP's performance:

Tabel Perubahan Peraturan Perundang-undangan dan Dampaknya terhadap Perusahaan
Table of Changes in Laws and Regulations and Their Impact on the Company

No	Peraturan Regulation	Keterangan Perubahan Change Description	Dampaknya Terhadap PLN NP secara Kualitatif dan/atau Kuantitatif Qualitative and/or Quantitative Impact on PLN NP
1	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 3 Tahun 2022 Penataan Perizinan dan Persetujuan Bidang Sumber Daya Air Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing No. 3 of 2022 Arrangement of Licenses and Approvals in the Water Resources Sector	1. Permen PUPR No. 3 Tahun 2022 memberi kebijakan kepada masyarakat dan pelaku usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya air, namun belum memperoleh izin dan persetujuan bidang sumber daya air untuk memdapatkan izin atau persetujuan bidang sumber daya air, sehingga memberi kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat dan pengusaha. 2. Dalam hal diberikan izin atau persetujuan bidang sumber daya air, maka izin atau persetujuan tersebut disertai dengan sanksi administratif berupa denda administrasi dan/ atau disertai dengan perbaikan Sumber Air, prasarana Sumber Daya Air, sarana dan/ atau prasarana yang telah dibangun. Sanksi administratif tersebut dihitung sejak 1 November 2019. 3. Dalam hal permohonan ditolak maka penolakan akan disertai dengan kewajiban untuk melakukan pembongkaran sarana dan/ atau prasarana yang telah dibangun, serta mengembalikan Sumber Air sesuai dengan kondisi semula. 1. Regulation of the Minister of PUPR No. 3 of 2022 provides policies for the community and business actors who carry out activities to utilize water resources but have not obtained permits and approvals in the water resources sector to obtain permits or approvals in the water resources sector, thus providing legal certainty and protection for the community and entrepreneurs. 2. If a permit or approval in the water resources sector is granted, it is accompanied by administrative sanctions in the form of administrative fines and/or repairs to Water Sources, Water Resources infrastructure, and facilities and/or infrastructure that have been built. The administrative sanctions were calculated from November 1, 2019. 3. If the application is rejected, it will be accompanied by an obligation to dismantle the facilities and/or infrastructure that have been built and restore the Water Source to its original condition.	1. Pembangkit listrik yang menggunakan sumber daya air milik PT PLN NP wajib memiliki izin atau persetujuan di bidang sumber daya air. 2. Dalam hal permohonan izin atau persetujuan sumber daya air yang diajukan PT PLN NP: a. Disetujui, disertai dengan sanksi administratif berupa denda administratif dan/atau disertai dengan perbaikan Sumber Air, prasarana Sumber Daya Air, sarana, dan/atau prasarana yang telah dibangun. Sanksi administratif tersebut dihitung sejak 1 November 2019. b. Ditolak, disertai dengan kewajiban untuk melakukan pembongkaran sarana dan/atau prasarana yang telah dibangun serta mengembalikan Sumber Air sesuai dengan kondisi semula. 1. Power plants that use water resources owned by PT PLN NP are required to have a license or approval in the water resources sector. 2. If the application for a license or approval of water resources submitted by PT PLN NP: a. Approved, accompanied by administrative sanctions in the form of administrative fines and/or repairs to Water Resources, Water Resources infrastructure, facilities, and/or infrastructure that have been built. The administrative sanctions were calculated since November 1, 2019. b. Rejected, accompanied by an obligation to dismantle the facilities and/or infrastructure that have been built and restore the Water Source to its original condition.

No.	Peraturan Regulation	Keterangan Perubahan Change Description	Dampaknya Terhadap PLN NP secara Kualitatif dan/atau Kuantitatif Qualitative and/or Quantitative Impact on PLN NP
2	Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code	1. KUHP mengakui korporasi sebagai pihak yang dapat bertanggung jawab dan dipidana. Pidana dapat dikenakan kepada korporasi dan orang-orang yang terlibat dalam korporasi tersebut baik pengurus yang memiliki kedudukan fungsional pemilik, pemimpin, pengurus, bendahara, hingga pemilik manfaat. 2. Tindak Pidana oleh Korporasi dapat dipertanggungjawabkan jika termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi mengurungkan korporasi secara melawan hukum dikenal sebagai kelalaian korporasi. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana dan/ atau Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana. 3. Pidana bagi Korporasi terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Korporasi juga dapat dikenakan tindakan. 1. The Criminal Code regulates corporations as parties that can be held responsible and punished. Criminals can be imposed on corporations and people involved in the corporation, both management, who have a functional position as commanders, controllers, and beneficial owners. 2. Criminal Acts by Corporations can be accounted for if they are included in the scope of business or activities, as specified in the Articles of Association or other provisions applicable to the Corporation, benefit them unlawfully accepted as Corporation policy. The Corporation does not take the necessary steps to prevent greater impact and ensure compliance with applicable legal provisions to avoid criminal acts and/or the Corporation allows criminal acts to occur. 3. Punishment for Corporations consists of principal punishment and additional punishment. Corporations can also be subject to actions.	1. PT PLN NP sebagai badan hukum berupa Perseroan Terbatas termasuk sebagai subjek tindak pidana sehingga KUHP juga berlaku terhadap PT PLN NP. 2. PT PLN NP perlu memperhatikan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menghindari segala tindakan yang berpotensi membawakan tindak pidana. 1. PT PLN NP, as a legal entity in the form of a Limited Liability Company, is included as a subject of criminal offense so that the Criminal Code also applies to PT PLN NP. 2. PT PLN NP needs to pay attention to the level of compliance with applicable laws and regulations and avoid all actions that have the potential to cause criminal offenses.

No.	Peraturan Regulation	Keterangan Perubahan Change Description	Dampaknya Terhadap PLN NP secara Kualitatif dan/atau Kuantitatif Qualitative and/or Quantitative Impact on PLN NP
3.	Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia No. PER-1/MBU/03/2023 mengenai Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BUMN Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) of the Republic of Indonesia No. PER-1/MBU/03/2023 concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility (TJSL) Programs of SOEs	1. Dalam pelaksanaan Penugasan Khusus berdasarkan Permen BUMN No. 1 Tahun 2023 BUMN dapat bekerja sama dengan badan usaha milik swasta. 2. Dalam pelaksanaan Program TJSL BUMN berupa pembelian bantuan dan/ atau kegiatan lainnya BUMN dapat melakukan kerja sama dengan Anak Perusahaan. 3. Perusahaan dengan bentuk PT membutuhkan pengukuhan dalam RUPS PT atau dilaksanakan secara langsung oleh Direksi untuk memberlakukan Permen BUMN No. 1 Tahun 2023 dengan memperhatikan ketentuan di bidang pasar modal. 4. BUMN dapat memberlakukan Permen BUMN No. 1 Tahun 2023 kepada Anak Perusahaan. 1. In the implementation of Special Assignments based on the Regulation of the Minister of SOE No. 1 of 2023, SOEs can cooperate with privately owned business entities. 2. In the implementation of the SOE TJSL Program in the form of providing assistance and/or other activities, SOEs can cooperate with subsidiaries. 3. Companies with the form of PT require inauguration in the GMS of PT or directly enacted by the Board of Directors to enforce Regulation of the Minister of SOE No. 1 of 2023 with due observance of the capital market provisions. 4. SOEs can apply Regulation of the Minister of SOE No. 1 of 2023 to its Subsidiaries.	1. PT PLN (Persero) selaga holding company dapat bekerja sama dengan PLN NP dalam pelaksanaan penugasan khusus maupun program TJSL BUMN berdasarkan Permen BUMN No. 1 Tahun 2023. 2. PLN NP membutuhkan pengukuhan dalam RUPS PLN NP atau dilaksakan secara langsung oleh Direksi untuk memberlakukan Permen BUMN No. 1 Tahun 2023 dengan memperhatikan ketentuan di bidang pasar modal. 1. PT PLN (Persero) as a holding company can cooperate with PLN NP in the implementation of special assignments and SOE TJSL programs based on Regulation of the Minister of SOE No. 1 of 2023. 2. PLN NP requires inauguration in the GMS of PLN NP or directly enacted by the Board of Directors to enact Regulation of the Minister of SOE No. 1 of 2023 with due observance of the capital market provisions.
4.	Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises	1. Permen BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 ini menggabungkan beberapa ketentuan pada Permen BUMN antara lain: a. Peraturan Menteri No. PER-03/MBU/2010 tentang Cara Privatisasi Penyusunan Program Tahunan Privatisasi, Dan Penunjukan Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Serta Profesi Lainnya. b. Peraturan Menteri No. PER-09/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada BUMN; c. Peraturan Menteri No. PER-02/MBU/2014 tentang Pedoman Restrukturisasi Dan Revitalisasi BUMN Oleh Perusahaan Persero (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset; d. Peraturan Menteri No. PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama BUMN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri No. PER-04/MBU/09/2017 dan Peraturan Menteri No. PER-03/MBU/06/2021. 1. Ketentuan dalam Permen BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 berdampak langsung terhadap PLN NP mengingat terdapat kewajiban PLN NP menyelenggarakan dan mengintegrasikan proses bisnis dan kebijakan strategi berdasarkan Corporate Charter PLN dengan PNP. 2. PLN NP dapat memberlakukan Permen No. PER-2/MBU/03/2023 dengan penyesuaian setelah ditetapkan RUPS PLN NP. 3. PLN NP perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pengadaan pedoman kegiatan korporasi signifikan BUMN. 1. The provisions in Regulation of the Minister of SOE No. PER-2/MBU/03/2023 have a direct impact on PLN NP considering PLN NP's obligation to harmonize and integrate business processes and strategic policies based on PLN's Corporate Charter with PNP.	
4.	Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises	1. Permen BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 ini menggabungkan beberapa ketentuan pada Permen BUMN antara lain: a. Peraturan Menteri No. PER-03/MBU/2010 tentang Cara Privatisasi Penyusunan Program Tahunan Privatisasi, Dan Penunjukan Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Serta Profesi Lainnya. b. Peraturan Menteri No. PER-09/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada BUMN; c. Peraturan Menteri No. PER-02/MBU/2014 tentang Pedoman Restrukturisasi Dan Revitalisasi BUMN Oleh Perusahaan Persero (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset; d. Peraturan Menteri No. PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama BUMN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri No. PER-04/MBU/09/2017 dan Peraturan Menteri No. PER-03/MBU/06/2021.	1. Ketentuan dalam Permen BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 berdampak langsung terhadap PLN NP mengingat terdapat kewajiban PLN NP menyelenggarakan dan mengintegrasikan proses bisnis dan kebijakan strategi berdasarkan Corporate Charter PLN dengan PNP. 2. PLN NP dapat memberlakukan Permen No. PER-2/MBU/03/2023 dengan penyesuaian setelah ditetapkan RUPS PLN NP. 3. PLN NP perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pengadaan pedoman kegiatan korporasi signifikan BUMN. 1. The provisions in Regulation of the Minister of SOE No. PER-2/MBU/03/2023 have a direct impact on PLN NP considering PLN NP's obligation to harmonize and integrate business processes and strategic policies based on PLN's Corporate Charter with PNP.	

No	Peraturan Regulation	Keterangan Perubahan Change Description	Dampaknya Terhadap PLN NP secara Kualitatif dan/atau Kuantitatif Qualitative and/or Quantitative Impact on PLN NP
		a. Peraturan Menteri No. PER-08/MBU/10/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa BUMN f. Peraturan Menteri No. PER-7/MBU/03/2021 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Penilaian Penggunaan Tenkalnar Penjertaan. g. Modal Negara Kepada BUMN dan Penerapan Terbatas. 2. Permen ini dapat diberlakukan kepada Anak Perusahaan BUMN melalui pengusulan dalam RUPS Anak Perusahaan BUMN yang bersangkutan dengan persyaratan sesuai karakteristik dan kebutuhan Anak Perusahaan BUMN.	2. PLN NP can enforce Ministerial Regulation No. PER-2/MBU/02/2023 with adjustments after the issuance of PLN NP's GMS. 3. PLN NP needs to make adjustments to the provisions relating to the management of guidelines for significant corporate activities of SOEs
		1. Regulation of the Minister of SOEs No. PER-2/MBU/02/2023 combines several provisions in the Regulation of the Minister of SOEs, among others: a. Ministerial Regulation No. PER-01/MBU/2010 on Privatization Methods, Preparation of Annual Privatization Program, and Appointment of Supporting Institutions and/or Professions, and Other Professions; b. Ministerial Regulation No. PER-01/MBU/2011 on the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs; c. Ministerial Regulation No. PER-02/MBU/2014 on Guidelines for the Restructuring and Revitalization of SOEs by the Company (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset; d. Ministerial Regulation No. PER-03/MBU/08/2017 on Guidelines for SOE Cooperation as amended by Ministerial Regulation No. PER-04/MBU/04/2017 and Ministerial Regulation No. PER-03/MBU/04/2019; e. Ministerial Regulation No. PER-08/MBU/10/2019 on General Guidelines for the Implementation of Goods and Services Procurement of SOEs; f. Ministerial Regulation No. PER-9/MBU/03/2021 on Guidelines for Proposing, Reporting, Monitoring, and Changing the Use of Additional Investments; g. State Capital to SOEs and Limited Liability Companies. 2. This regulation can be applied to SOE Subsidiaries through inauguration in the GMS of the relevant SOE Subsidiary with adjustments according to the characteristics and needs of the SOE Subsidiary.	

No.	Peraturan Regulation	Keterangan Perubahan Change Description	Dampaknya Terhadap PLN NP secara Kualitatif dan/atau Kuantitatif Qualitative and/or Quantitative Impact on PLN NP
5.	Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-3/MBU/03/2023 on Organs and Human Capital of SOEs	1. Permen BUMN No. 3 2023 bertujuan untuk mengintegrasikan menyelaraskan dan menyelarasakan semua kerangka kerja yang berlaku untuk sumber daya manusia dan aspek organisasi BUMN khususnya terkait Direksi Dewan Komisaris Dewan Pengawas BUMN dan Anak Perusahaan BUMN. 2. Syarat anggota Direksi AP BUMN tidak mengalami perubahan signifikan namun Permen BUMN No. 3 2023 telah menghapuskan persyaratan batas atas umur yang sebelumnya dalam Permen BUMN 3 2020 mensyaratkan tidak melebihi 58 tahun ketika akan menjabat Direksi. 3. Ketentuan terkait syarat materil formal dan syarat lain serta tata cara pengangkatan dikecualikan terhadap Calon Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan berasal dari anggota Direksi BUMN yang bersangkutan. 4. Anggota Direksi BUMN yang merjabat sebagai anggota Dewan Komisaris di Anak Perusahaan tidak boleh menerima seluruh penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris yang dirangkapnya di Anak Perusahaan dan dianggap sebagai pendapatan lain lain BUMN induk. 1. Regulation of the Minister of SOE No. 3 2023 aims to integrate, synchronize, and harmonize all frameworks that apply to human resources and organizational aspects of SOEs, particularly related to the Board of Directors of the Board of Commissioners of the Supervisory Board of SOEs and SOE Subsidiaries. 2. The requirements for members of the Board of Directors of SOE subsidiaries have not changed significantly. However, Regulation of the Minister of SOE No. 3 2023 has eliminated the upper age limit requirement, which previously in Regulation of the Minister of SOE No. 3 2020 required not exceeding 58 years of age when serving on the Board of Directors. 3. Provisions related to formal material requirements and other requirements, as well as procedures for appointment, are excluded for Prospective Members of the Board of Commissioners of Subsidiaries who come from members of the Board of Directors of the SOE concerned. 4. Members of the Board of Directors of SOEs who serve as members of the Board of Commissioners of subsidiaries may not receive all of their income as members of the Board of Commissioners of the subsidiaries and are considered as other income of the parent SOE.	1. Calon Anggota Direksi /Dewan Komisaris PT PLN NP wajib mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Permen BUMN No. 3 2023 dalam proses pengangkatannya. 2. Terhadap calon Anggota Dewan Komisaris PT PLN NP yang berasal dari anggota Direksi PT PLN (Persero) dikecualikan terhadap beberapa ketentuan terkait syarat materil formal dan syarat lain serta tata cara pengangkatan. 3. Anggota Direksi PT PLN (Persero) yang yang merjabat sebagai anggota Dewan Komisaris di PT PLN NP tidak boleh menerima seluruh penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris yang dirangkapnya di PT PLN NP dan dianggap sebagai pendapatan lain lain BUMN induk. 1. Prospective Members of the Board of Directors/Board of Commissioners of PT PLN NP are required to follow the provisions as stipulated in Regulation of the Minister of SOEs No. 3 2023 in the appointment process. 2. Candidates for the Board of Commissioners of PT PLN NP who come from members of the Board of Directors of PT PLN (Persero) are exempted from several provisions related to formal material requirements and other requirements, as well as appointment procedures. 3. Members of the Board of Directors of PT PLN (Persero) who serve as members of the Board of Commissioners at PT PLN NP may not receive all income as members of the Board of Commissioners who are concurrently at PT PLN NP and are considered as other income of the parent SOE.

No.	Peraturan Regulation	Keterangan Perubahan Change Description	Dampaknya Terhadap PLN NP secara Kualitatif dan/atau Kuantitatif Qualitative and/or Quantitative Impact on PLN NP
6.	Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2022 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU Regulation No. 3 of 2022 on Assessment of Mergers, Consolidations, or Acquisitions of Shares and/or Assets that May Result in Monopolistic Practices and/or Unfair Business Competition	1. Pelaku Usaha wajib menyampaikan Notifikasi kepada KPPU atas Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset yang memenuhi ketentuan wajib notifikasi antara lain: a. memenuhi batasan nilai Aset dan/atau nilai Penjualan; b. terjadi perubahan pengendalian; c. bukan transaksi antar Pelaku Usaha terafiliasi; dan d. transaksi antar Pelaku Usaha yang memiliki Aset dan/atau Penjualan di Indonesia. e. pengambilalihan Aset mengakibatkan peningkatan kemampuan pengawasan atas suatu pasar tertentu oleh Pelaku Usaha yang melakukan Pengambilalihan Aset; dan f. bukan termasuk transaksi Pengambilalihan Aset yang dikecualikan. 2. Notifikasi disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset berlaku efektif secara yuridis. 2. KPPU berwenang melakukan penanganan perkara inisiatif dalam hal menemukan dugaan pelanggaran praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. 1. Business Actors are required to submit Notifications to KPPU for Mergers, Consolidations, or Acquisitions of Shares and/or Assets that fulfill the mandatory notification provisions, among others: a. meets the limitation of Asset value and/or Sales value; b. change in control; c. not a transaction between affiliated Business Actors; and d. transactions between Business Actors having Assets and/or Sales in Indonesia. e. assets acquisition results in an increase in the ability to control a certain market by the Business Actor conducting the Assets Acquisition; and f. does not include an exempted Assets Acquisition transaction. 2. The notification is submitted no later than 30 (thirty) Days as of the date on which the Merger, Consolidation, or Acquisition of Shares and/or Assets becomes legally effective. 2. KPPU is authorized to conduct case-handling initiatives if it finds alleged violations of monopolistic practices and/or unfair business competition.	1. Dalam hal PT PLN NP melakukan kegiatan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset wajib melakukan penilaian atas kegiatan tersebut termasuk dalam ketentuan wajib notifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2022. 2. PT PLN NP memiliki kewajiban notifikasi kepada KPPU dalam hal Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset yang dilakukan memenuhi kriteria wajib notifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2022. 1. In the event that PT PLN NP conducts Merger, Consolidation, or Acquisition of Shares and/or Assets activities, it is obliged to assess the activities included in the mandatory notification provisions as stipulated in KPPU Regulation No. 3 Year 2022. 2. PT PLN NP must notify KPPU if the Merger, Consolidation, or Acquisition of Shares and/or Assets conducted meets the mandatory notification criteria as stipulated in KPPU Regulation No. 3 Year 2022.

No.	Peraturan Regulation	Keterangan Perubahan Change Description	Dampaknya Terhadap PLN NP secara Kualitatif dan/atau Kuantitatif Qualitative and/or Quantitative Impact on PLN NP
7	- Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PSK) a. Pasal 8 menetapkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertindak sebagai regulator dan pengawas atas kegiatan para pihak dalam bursa karbon atau dalam hal ini perdagangan karbon; b. Pasal 34 menetapkan perdagangan karbon dapat dilakukan dengan melalui bursa karbon Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK). - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon - Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 12/SEOJK.04/2023 yang mengatur tentang Tata Cara Penyelenggaraan Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon - Law No. 4 of 2023 on Financial Sector Development and Strengthening (PSK Law) a. Article 8 stipulates that the Financial Services Authority (FSA) acts as a regulator and supervisor of the activities of the parties to the carbon exchange or, in this case, carbon trading; b. Article 34 stipulates that carbon trading can be carried out using the carbon exchange mechanism of Presidential Regulation No. 98 of 2021 concerning the Implementation of Carbon Economic Value (NEK). - Regulation of the Minister of Environment and Forestry No. 21 of 2022 on the Procedure for the Application of Carbon Economic Value - Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 14 of 2023 on Carbon Trading through the Carbon Exchange - Circular Letter of the Financial Services Authority (SEOJK) No. 12/SEOJK.04/2023, which regulates the Procedures for Organizing Carbon Trading through the Carbon Exchange	1. Melalui PI TJU Blok 3 Muara Karang, PLN NP memiliki komoditas berupa Carbon Credit dengan pengakuan Sertifikat Pengurangan Emisi GRK yang dapat diperdagangkan melalui bursa karbon di IDX Carbon; 2. Sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antara nilai ekonomi dan lingkungan. 1. Through Muara Karang Block 3 CCPP, PLN NP has a commodity in the form of Carbon Credit with recognition of GHG Emission Reduction Certificates that can be traded through the carbon exchange at IDX Carbon; 2. As a means to achieve a balance between economic and environmental values.	1. Penurunan emisi karbon melalui kegiatan operasional pembangkit. 2. Penambahan pendapatan PLN NP dari proses perdagangan bursa karbon; 3. Corporate image sebagai pembangkit ramah lingkungan. 1. Reduction of carbon emissions through power plant operations. 2. Additional PLN NP revenue from the carbon exchange trading process. 3. Corporate image as an environmentally friendly power plant.

No.	Peraturan Regulation	Keterangan Perubahan Change Description	Dampaknya Terhadap PLN NP secara Kualitatif dan/atau Kuantitatif Qualitative and/or Quantitative Impact on PLN NP
8	Keputusan Menteri ESDM No. 2916K/ 10.05/MEM.L/2023 Tentang Standar Penyelenggaraan Persetujuan Penggunaan Air Tanah Decree of the Minister of EMR No. 2916K/ 10.05/MEM.L/2023 on Standards for the Implementation of Groundwater Use Approval	1. Persetujuan Penggunaan Air Tanah pada cekungan air tanah dan sumber air tanah lainnya di wilayah sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat diselenggarakan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. 2. Penyelenggaraan Persetujuan Penggunaan Air Tanah dilaksanakan oleh Kepala Badan Geologi berdasarkan Standar Pelayanan Persetujuan Penggunaan Air Tanah yang terdiri: a. Untuk permohonan debit penggunaan air tanah kurang dari atau sama dengan 2 (dua) liter perdetik dari 1 (satu) sumur bor/gali dan untuk permohonan yang diajukan oleh instansi pemerintah; b. Untuk permohonan debit penggunaan air tanah lebih dari 2 (dua liter per detik dari 1 (satu) sumur bor/gali; dan c. Untuk kegiatan Dewatering yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan Persetujuan Dewatering. 3. Permohonan persetujuan penggunaan air tanah dapat diajukan oleh Perseorangan, Kelompok Masyarakat, Instansi Pemerintah, Badan Hukum, maupun Lembaga Sosial kepada Menteri ESDM melalui kepala Badan Geologi. 4. Penyelenggaraan Persetujuan Penggunaan Air Tanah yang bukan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat diatur oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1. Approval of Groundwater Use in groundwater basins and other groundwater sources in river areas under the authority of the Central Government is organized by the Minister of Energy and Mineral Resources. 2. Implementation of Groundwater Use Approval is carried out by the Head of the Geological Agency based on the Groundwater Use Approval Service Standards consisting of: a. for applications of groundwater use discharge less than or equal to 2 (two) liters per second from 1 (one) borehole/dig and for applications submitted by government agencies; b. for applications of groundwater use discharge of more than 2 (two liters per second from 1 (one) borehole/dig; and c. for Dewatering activities, hereinafter referred to as Dewatering Approval Service Standard. 3. Application for approval of groundwater use can be submitted by Individuals, Community Groups, Government Agencies, Legal Entities, or Social Institutions to the Minister of EMR through the Head of the Geological Agency.	1. Pembangkit listrik PLN Nusantara Power yang menggunakan air tanah berstatus kewenangan Pemerintah Pusat dengan volume diatas 100 (meter) kubik atau 100.000 liter perbulan berpotensi mengajukan permohonan persetujuan penggunaan air tanah. 2. Pembangkit listrik PLN Nusantara Power yang menggunakan air tanah berstatus kewenangan Pemerintah Daerah, pengajuan izin penggunaan air tanah dilakukan melalui Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Untuk memastikan titik sumur berada pada wilayah sungai Pemerintah Pusat atau Daerah, maka unit PLN Nusantara Power dapat memastikan melalui https://mypointnt.id/wp/ dengan menginput titik koordinat sumur yang dibuat. 4. Setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dikenakan Pajak Air Tanah yang besarannya diatur dalam Peraturan Daerah masing-masing. 5. Implementasi Keputusan Menteri ESDM ini membutuhkan pembahasan lanjutan bersama Badan Geologi Kementerian ESDM sebagai Pejabat Berwenang yang ditunjuk oleh Menteri ESDM untuk penerbitan izin. 1. The power plant of PLN Nusantara Power that uses groundwater with the status of authority of the Central Government with a volume above 100 (cubic meters) or 100.000 liters per month has the potential to apply for a groundwater use license. 2. For the power plant of PLN Nusantara Power that uses groundwater has the status of the authority of the Regional Government, the application for groundwater use license is carried out through the Regional Government in accordance with the provisions of laws and regulations. 3. The PLN Nusantara Power unit can ensure that the well location is in the Central or Regional Government river area through https://mypointnt.id/wp/ by inputting the coordinates of the well made. 4. Every extraction and/or utilization of groundwater is subject to Groundwater Tax, the amount of which is regulated in the respective Regional Regulations. 5. The implementation of this Decree of the Minister of EMR requires further discussion with the Geological Agency of the Ministry of EMR as the Authorized Official appointed by the Minister of EMR for the issuance of licenses.

No.	Peraturan Regulation	Keterangan Perubahan Change Description	Dampaknya Terhadap PLN NP secara Kualitatif dan/atau Kuantitatif Qualitative and/or Quantitative Impact on PLN NP
		4. Organization of Groundwater Use Approval, which is not the authority of the Central Government, is regulated by the Regional Government in accordance with the provisions of laws and regulations.	
V	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 12 Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Bahan Bakar Biomassa Sebagai Campuran Bahan Bakar Pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 12 of 2023 concerning the Utilization of Biomass Fuel as a Fuel Mixture in Steam Power Plants	1. Bahan Bakar Biomassa (B3m): Bahan bakar padat yang seluruhnya atau sebagian besar berasal dari bahan organik dengan diameter dan mutu tertentu. 2. Cofiring: Kegiatan pembakaran pada pembangkit listrik tenaga uap antara batubara dengan satu atau lebih B3m berbeda pada waktu bersamaan dengan rasio tertentu untuk menggantikan sebagian batubara dengan mempertimbangkan kualitas bahan bakar sesuai kebutuhan. 3. Jenis dan Pelaksanaan Cofiring: a. Pellet Biomassa b. Serbuk Kayu c. Serpihan Kayu d. Cangkang Sawit e. Sekam Padi f. Tempurung Kelapa g. Limbah Kehutanan h. Limbah Pertanian i. Bahan Organik Lainnya 4. Pelaksanaan Cofiring & Harga: a. Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum terintegrasi b. Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum bidang pembangkit tenaga listrik c. Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri 5. Harga Pembelian B3m: a. Harga Patokan Tertinggi: i. PT PLN (Persero) selaku pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum terintegrasi; dan ii. Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk pembangkitan tenaga listrik yang bekerja sama dengan PT PLN (Persero). b. Harga Kesepakatan: i. Pemegang izin izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum terintegrasi selain PT PLN (Persero); ii. Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk pembangkitan tenaga listrik yang bekerja sama dengan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum terintegrasi selain PT PLN (Persero); dan iii. Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.	1. Dengan diberlakukanya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 12 Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Bahan Bakar Biomassa Sebagai Campuran Bahan Bakar Pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap maka pelaksanaan kegiatan cofiring pada pembangkit PT PLN NP dapat mengacu pada ketentuan ini. 2. PT PLN NP perlu melakukan update ketentuan Peraturan Direksi PT PLN No. 001/P/PLN/2A/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Cofiring PLTU Berbahan Bakar Batubara Dengan Bahan Bakar Biomassa. 1. With the issuance of the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 12 of 2023 concerning the Utilization of Biomass Fuel as a Fuel Mixture in Steam Power Plants, the implementation of cofiring activities at PT PLN NP power plants can refer to this provision. 2. PT PLN NP needs to update the provisions of the Regulation of the Board of Directors of PT PLN No. 001/P/PLN/2A/2023 concerning Guidelines for the Implementation of Cofiring Coal-Fired UPP with Biomass Fuel.

No	Peraturan Regulation	Keterangan Perubahan Change Description	Dampaknya Terhadap PLN NP secara Kualitatif dan/atau Kuantitatif Qualitative and/or Quantitative Impact on PLN NP
		4. Panduan Harga a. Harga patokan tertinggi dihitung dengan formula harga Batubara dikali nilai koefisien harga (Km [k]) dikali faktor koreksi nilai kalori (Fc); b. Harga patokan tertinggi merupakan harga (Km free on board (FOB)); c. Harga Batubara merupakan harga rata-rata Batubara free on board (FOB); d. Harga Batubara ditentukan berdasarkan rata-rata harga Batubara acuan tahun sebelumnya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. Nilai koefisien harga (Km dibatasi paling tinggi 1,7 (satu koma dua) faktor koreksi nilai kalori (Fc) merupakan koefisien perbandingan nilai kalori (Km terhadap nilai kalori rata-rata Batubara. 1. Biomass Fuel (Bm): Solid fuel derived entirely or mostly from organic materials with certain standards and quality 2. Cofiring: The combustion activity in a steam power plant between coal and one or more different Bm at the same time with a specific ratio to replace part of the coal by paying attention to the fuel's quality as needed 3. Types and Implementation of Cofiring a. Biomass Pellets b. Wood Powder c. Wood Chips d. Palm Shell e. Rice Husk f. Coconut Shell g. Forestry Waste h. Agricultural Waste i. Other Organic Materials 4. Implementation of Cofiring & Price a. Holder of a business license to supply electricity for integrated public interest b. Holder of a business license to supply electricity for public interest in the power plant sector c. Holder of a business license to supply electricity for own interest 5. Bm Purchase Price a. Highest Benchmark Price i. PT PLN (Persero) as the holder of business license to supply electricity for integrated public interest; and ii. Holder of business license to supply electricity for electric power generator in cooperation with PT PLN (Persero). b. Deal Price i. The holder of a business license to supply electricity for integrated public interest other than PT PLN (Persero);	

No.	Peraturan Regulation	Keterangan Perubahan Change Description	Dampaknya Terhadap PLN NP secara Kualitatif dan/atau Kuantitatif Qualitative and/or Quantitative Impact on PLN NP
		c. The holder of a business license to supply electricity for electric power generator in cooperation with the holder of the business license to supply electricity for integrated public interest other than PT PLN (Persero); and iii. The holder of a business license to supply electricity for its own interest. b. Price Manual a. The highest benchmark price is calculated using the Coal price formula multiplied by the IDm price coefficient (k) multiplied by the calorific value correction factor (Tc); b. The highest benchmark price is the price of IDm free in board (FOB); c. The Coal price is the average price of free on board (FOB) Coal; d. The Coal price is determined based on the average reference Coal price of the previous year with the provisions of laws and regulations; e. The coefficient value of the IDm price is set at a maximum of 1.2 (one point two); f. The calorific value correction factor (Tc) is a coefficient of comparison of the calorific value of IDm to the average calorific value of Coal.	

Key Performance Indicator

Key Performance Indicator

Key Performance Indicator (KPI)

Key Performance Indicator (KPI)

Sistem manajemen kinerja yang baik merupakan kiti bagi Perusahaan untuk memaksimalkan pencapaian visi dan misinya dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. KPI dipahami sebagai sistem yang mampu memuat ukuran dengan merepresentasikan kinerja dari keseluruhan bagian organisasi, serta memuat indikator untuk mengevaluasi kinerja organisasi dalam rangka mencapai target Perusahaan.

A good performance management system is the Core for the Company to maximize the achievement of its vision and mission by optimizing the resources it has. The Company believes that KPI is a system that can contain measures by representing the performance of all parts of the organization and contains indicators to evaluate organizational performance to achieve the Company's targets.

Pengelolaan KPI yang meliputi penyusunan standar, indikator, target, kinerja Perusahaan dan penjabarannya sampai dengan satuan unit kerja terkecil di lingkungan Perusahaan serta seluruh pegawai dilakukan oleh Bidang Corporate Performance yang berada dibawah Direktorat Pengembangan Bisnis dan Niaga.

KPI management, which covers the preparation of standards, indicators, Company performance targets, and its elaboration up to the smallest work unit within the Company and all employees, is managed by the Corporate Performance Department under the Directorate of Business Development and Commercial.

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT PLN Nusantara Power (Perusahaan) tanggal 30 Januari 2023, tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2023 serta Kontrak Manajemen Tahun 2023 tanggal 30 Januari 2023, Pemegang Saham Perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan menyepakati Kontrak Manajemen/Key Performance Indicators (KPI) tahun 2023. Adapun realisasi KPI Kontrak Manajemen antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Perusahaan tahun 2023 adalah sebesar **103,31** sebagaimana tabel berikut:

Based on the Minutes of the General Meeting of Shareholders (GMS) of PT PLN Nusantara Power (the Company) dated January 30, 2023, regarding the Ratification of the Company's Annual Budget and Operational Plan (RKAP) for 2023, as well as the Management Contract for 2023 dated January 30, 2023, the Company's Shareholders, Board of Commissioners, and Board of Directors agreed on the Management Contract/Key Performance Indicators (KPI) for 2023. The realization of the Management Contract KPI between the Board of Directors and the Board of Commissioners with the Company's Shareholders in 2023 was **103,31**, as shown in the following table:

Tabel Realisasi Kontrak Manajemen Tahun 2023
Table of Management Contract Realization in 2023

No	Indikator Kinerja Kunci Key Performance Indicators		Satuan Unit	Bobot Weight	Target 2023 2023 Target	Realisasi Realization	Pencapaian Achievement	Nilai Value
A.	**Economic and Social Value**			**37**				**36,42**
1	EBITDA	♦	Rp Miliar Rp Billion	5	21.372,60	24.700,64	115,60%	5,50
2	Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Pembangkit Cost of Electricity Supply (COS) of Power Plant	♦		4	1.180,42	1.171,68	110,99%	4,40
3	ROIC	♦	Rp/kWh	5	3,45	4,49	110,00%	5,50
4	Equivalent Forced Outage Rate (EFOR) Jawa Bali Equivalent Forced Outage Rate (EFOR) of Java Bali			5				4,91
	a. EFOR PLTU EFOR of CFPP	♦	%		7,70	9,00	110,00%	
	b. EFOR Non PLTU EFOR of Non-CFPP	♦	%		0,80	0,91	87,99%	
5	Equivalent Forced Outage Rate (EFOR) Luar Jawa Bali Equivalent Forced Outage Rate (EFOR) of Outside Java Bali			4				4,01
	a. EFOR PLTU EFOR of CFPP	♦	%		5,68	6,20	91,91%	
	b. EFOR Non PLTU EFOR of Non-CFPP	♦	%		10,71	8,87	110,00%	
6	Equivalent Availability Factor (EAF) Jawa Bali Equivalent Availability Factor (EAF) of Java Bali			5				4,81
	a. EAF PLTU EAF of CFPP	♦	%		88,38	85,23	96,47%	
	b. EAF Non PLTU EAF of Non-CFPP	♦	%		96,24	96,54	100,31%	
7	Equivalent Availability Factor (EAF) Luar Jawa Bali Equivalent Availability Factor (EAF) of Outside Java Bali			4				4,00
	a. EAF PLTU EAF of CFPP	♦	%		83,70	83,80	100,14%	
	b. EAF Non PLTU EAF of Non-CFPP	♦	%		[illegible]	[illegible]	100,10%	
8	Fuel Consumption and Heat Rate (SFC)			5				5,17
	a. SFC Batubara Coal SFC	♦	Kg/kWh		0,4808	0,4417	111,73%	
	b. SFC Gas Gas SFC	♦	MMBtu/kWh		0,03397	0,03398	111,17%	
	c. SFC BBM Fuel SFC	♦	Liter/kWh		0,2976	0,2855	104,08%	
B.	**Business Model Innovation**			**27**				**27,78**
1	Pemenuhan Risk Maturity Index (RMI) Risk Maturity Index (RMI) Fulfillment	♦	Level	4	RMI 3 = 3,38 RMI 4 = 4,20	4,19	112,14%	4,48
2	Pendapatan Beyond kWh Beyond kWh Revenue			4				5,41

No	Indikator Kinerja Kunci Key Performance Indicators		Satuan Unit	Bobot Weight	Target 2023 2023 Target	Realisasi Realization	Pencapaian Achievement	Nilai Value
	a. Pendapatan dari Luar PLN Grup Revenue outside PLN Group		Rp Miliar Rp Billion		360,41	432,24	119,9%	
	b. Jumlah Kontrak Bisnis di Luar Negeri Number of Foreign Business Contracts		Kontrak Contract		2	2	100,00%	
3	Sinergi antar Anak Perusahaan Lain (termasuk Sinergi Unit PLN) Synergy between Other Subsidiaries (excluding PLN Unit Synergy)	↑	Rp Miliar Rp Billion	4	1.162	1.290,00	100,00%	4,40
4	Share of EBT Production/Bauran Energy EBT	↑	%	4	9,41	Sundai CMC	100,00%	4,00
5	Carbon Emission Reduction	↑	%	5	0,402	0,594	100,00%	5,30
6	Strategic Partnership GenCo	↑	Tahapan/ Milestone Tahap/ Milestone	4	Penandatangan Partnership GenCo GenCo Partnership Signing	Penandatangan Strategic GenCo GenCo Strategic Signing	104,93%	4,19
C.	Technology Leadership			14				15,16
1	Digital Power Plant Implementation	↑	Jumlah Unit Total Unit	5	10	10 Laporan implementasi dan 21 berita acara Go Live 10 Implementation Reports and 21 Go Live Minutes	100,00%	5,00
2	Value Creation			4				4,40
	a. Efisiensi Biaya Pemeliharaan Maintenance Costs Efficiency	↑	Rp Miliar Rp Billion		84,00	305,88	100,00%	
	b. Efisiensi HPHR HPHR Efficiency	↑	Rp Miliar Rp Billion		200,00	299,07	100,00%	
3	Jaminan Penyediaan Energi Primer Batubara Coal Primary Energy Supply Guarantee	↔	%	5	15-20	13,71	105,73%	5,28
D.	Energize Investment			14				15,30
1	EPC Project Completion	↑	%	5	100% sesuai milestone 100% according to milestone	1. Cirata 100,00% 2. AdaOri MTW 99,32% 3. Halim 95,00%	97,77%	4,88
2	Total Units with PROPER (Beyond Compliance)	↑	Jumlah Unit Total Unit	5	10	10	100,00%	5,00
3	Pengendalian penggunaan Anggaran Investasi sesuai RKAP 2023 Controlling the use of the Investment Budget in accordance with the 2023 ABCP	↔	%	4	95-100% sesuai dengan penetapan RKAP 2023 95-100% in accordance with the stipulation of the 2023 ABCP	70,75	73,68%	2,95
E.	Unleash Talent			8				8,80
1	Pengembangan Talenta Pegawai Employee Talent Development			4				4,40
	a. Talent Milenial (<= 42 Tahun) Millennial Talent (<= 42 years old)	↑	%		9	10	100,00%	
	b. Perempuan dan Nominated Talent Female in nominated talent	↑	%		22	24	100,00%	
2	Risk and Digital			4				4,40

No	Indikator Kinerja Kunci Key Performance Indicators		Satuan Unit	Bobot Weight	Target 2023 2023 Target	Realisasi Realization	Pencapaian Achievement	Nilai Value
	a. Sertifikasi Manajemen Risiko Pegawai Employee Risk Management Certification	*	Pegawai		GMT I : 15 (Januari-Juni) Tahun 2023 : 50 (Januari-Desember) to DIREKTUR: 15 (January-June) 2023: 50 (January-December)	88	150,00%	
	b. Making Digital Talent	*	%		1	11,57	150,00%	
II	**Compliance**							**0,00**
1	Compliance (LICL, Safety, Security & Environment, SPI, Reporting)			Max (-10)			100,00	0,00
	TOTAL			**100**				**102,57**

Grafik Capaian KPI/Kontrak Manajemen PLN NP (skor)
Chart of KPI/Management Contract Achievement of PLN NP (score)

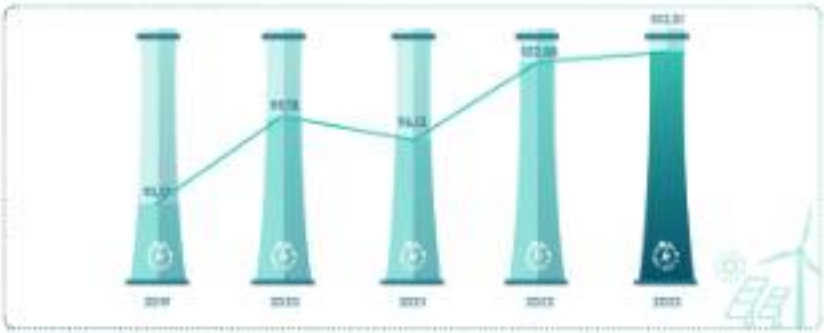

Aspek Pemasaran dan Pangsa Pasar
Marketing and Market Share Aspect

Strategi Pemasaran dan Target Pencapaian Pasar
Marketing Strategy and Market Achievement Target

Salah satu upaya yang dilakukan PLN NP untuk terus meningkatkan pangsa pasarnya serta menjaga kepuasan pelanggannya adalah dengan melakukan survei kepuasan Pelanggan. Dalam rangka peningkatan Customer Experience, Perusahaan melakukan peningkatan kompetensi dan keahlian SDM untuk memastikan excellence service kepada pelanggan, disamping itu

One of the efforts made by PLN NP to continue to increase its market share and maintain customer satisfaction is by conducting customer satisfaction surveys. In order to improve Customer Experience, the Company increases the competence and expertise of human resources to ensure excellence in service to customers, in addition to the specialization of the Company's HR must be

spesialisasi SDM Perusahaan harus didorong mendukung misalnya Environment, Social and Governance (ESG) PLN dan Energy Transition Mechanism termasuk kompetensi economy carbon. Perusahaan juga melakukanlah pengukuran terhadap ESG dan melakukan pengembangan pada seluruh aspek termasuk operasional pembangkitan.

Selain itu, Perusahaan secara konsisten melaksanakan transformasi dan implementasi digitalisasi untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Perusahaan juga turut berkontribusi untuk memaksimalkan peluang peningkatan demand listrik melalui kerjasama dengan pelanggan industri, pengembangan infrastruktur, ekosistem kendaraan listrik, serta penggunaan konsor listrik dan program-program yang selaras dengan tujuan tersebut. Pada tahun 2023 Perusahaan telah menjari dan mengembangkan pasar baru baik melakukan penetrasi pasar baru nasional dan internasional maupun menciptakan produk bisnis kelistrikan terintegrasi dengan melakukan penetrasi *Prospected Customer Beyond PLN*, dan dilakukannya penetrasi dan komunikasi ke pasar nasional maupun internasional.

Adapun program yang telah dilaksanakan untuk untuk memastikan perencanaan dan pengembangan strategi bisnis, manajemen produk dan marketing integrated serta sales dan kontrak dalam mendukung pengembangan bisnis demand pembangkit antara lain:

a. MRO (Maintenance, Repair, dan Overhaul)
   Dengan adanya Unit 3 Planned Outage in 2023 Maintenance Service, Major Overhaul CT 3 PT MCTN 2023, dan OM PLTU Bibiyana Bangladesh.
b. Non-MRO
   Dengan adanya Jasa Set-Up SMF PT BPI Unit Banjaran, Jasa Set-Up ISO 9001:2015 PT BPI, Kawasan Industri Grosp Danamkita.
c. PLTS
   Dengan adanya Revitalisasi PLTS Tenaleka dan Kodingareng UPJ Makassar Selatan, dan Revitalisasi PLTS Dongkala UPJ Baubau.

service aged to support PLN's Environment, Social, and Governance (ESG) initiatives and Energy Transition Mechanism, including carbon economy competencies. The Company should implement ESG measurement and development in all aspects, including electric power generator operations.

In addition, the Company consistently transforms and implements digitalization to improve services to customers. The Company also contributes to maximizing opportunities to increase electricity demand through cooperation with industrial customers, infrastructure development, electric vehicle ecosystems, and electric store usage and programs that are aligned with these objectives. In 2023, the Company has sought and developed new markets both penetrating new national and international markets and creating integrated electricity business products by mapping Prospected Customers Beyond PLN and penetrating and communicating with national and international markets.

The programs that have been implemented to ensure the planning and development of business strategies, product management, and integrated marketing as well as sales and contracts in supporting the power plant derivative business development, among others:

a. MRO (Maintenance, Repair, and Overhaul)
   With Unit 3 Planned Outage in 2023 Maintenance Service, Major Overhaul CT 3 PT MCTN 2023, and OM Bibiyana Bangladesh CSM
b. Non-MRO
   With the SMF Set-Up Services of PT BPI Banjaran Unit, ISO 9001: 2015 Set-Up Services of PT BPI, Danamkita Group Industrial Estate.
c. SPP
   With the Revitalization of Tenaleka SPP and Kodingareng UPJ South Makassar, and Revitalization of Dongkala SPP UPJ Baubau.

Analisis Segmen Pasar dan Kondisi Persaingan

Analysis of Market Segments and Competition Conditions

PLN NP berupaya menjadi Perusahaan Terkemuka dan Terpercaya dalam Bisnis Energi Berkelanjutan. Untuk mendukung Transisi Energi, PLN NP akan fokus pada peningkatan kapasitas pembangkit listrik dengan memanfaatkan teknologi energi terbarukan melalui peningkatan kapasitas Hydro & Solar PV, peningkatan persentase co-firing biomass di PLTU-nya, serta penerapan *De-dieselization* program di seluruh Indonesia.

Seiring dengan perkembangan kelistrikan di Indonesia, khususnya pada sistem Jawa-Bali, Realisasi market share PLN NP sampai dengan Tahun 2023 sebesar 19,4%. Penjualan energi listrik Sistem Jawa Bali sampai dengan akhir tahun 2023 adalah sebesar

PLN NP strives to be a Leading and Trusted Company in the Sustainable Energy Business. To support the Energy Transition, PLN NP will focus on increasing power plant capacity by utilizing renewable energy technology through increasing Hydro & Solar PV capacity, increasing the percentage of biomass co-firing in its CFPP, and implementing De-dieselization programs throughout Indonesia.

Along with the development of electricity in Indonesia, especially in the Java-Bali system, PLN NP's market share realization until 2023 was 19.4%. Sales of electricity in the Java-Bali system until the end of 2023 were 217,860 GWh, reaching 99.44% of the Annual

217,860 GWh mencapai 99,84% dari Rencana Operasi Tahunan (ROT) sebesar 218,442 GWh, dan mengalami pertumbuhan sebesar 4,41% bila dibandingkan dengan penjualan di periode yang sama tahun 2022.

Operating Plan (ROT) of 218,442 GWh, and increased by 4.41% if compared to sales in the same period in 2022.

Pangsa Pasar
Market Share

Pada tahun 2023 kegiatan pasokan listrik di sistem kelistrikan Indonesia disupply oleh Subholding (PLN Nusantara Power dan PLN Indonesia Power), PLN Tanjung Jati, serta Pembangkit IPP yang lokasinya tersebar dalam beberapa regional. Berikut adalah gambar diagram pangsa pasar PLN NP dalam Sistem Kelistrikan Indonesia.

In 2023, electricity supply activities in the Indonesian electricity system were supplied by Subholding (PLN Nusantara Power and PLN Indonesia Power), PLN Tanjung Jati, and IPP Power Plants, whose locations are spread over several regions. The following is a diagram of PLN NP's market share in the Indonesian Electricity System.

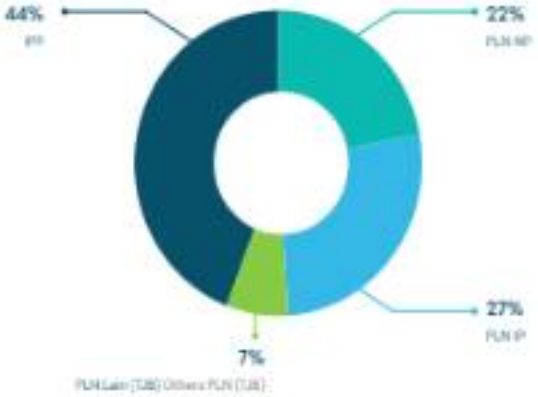

Tabel Penjualan dan Pangsa Pasar PLN Nusantara Power dalam Sistem Kelistrikan (Rp juta)
Table of Sales and Market Share of PLN Nusantara Power in the Electricity System

Uraian Description	2021(*)		2022(*)		2023(**)	
	GWh	%	GWh	%	GWh	%
PLN NP	19.779	10,04	16.256	7,79	63.889	21,78
UBJOM	24.140	12,25	26.258	12,58	-	-
PLN IP	37.936	19,19	35.797	17,15	79.969	27,22
UJP	28.918	14,67	30.103	14,42	-	-
PLN Lain (TJB) Other PLN (TJB)	19.078	9,68	19.268	9,23	21.383	7,28
IPP (Listrik Swasta) IPP (Private Electricity)	67.168	34,07	80.769	38,71	127.766	43,51
Total	**197.019**	**100,00**	**208.454**	**100,00**	**293.007**	**100,00**

Keterangan:
(*) Pengguna jasa Sistem Kelistrikan Jawa Bali (Jaksel, Holding subsidiary)
(**) Pengguna jasa Sistem Kelistrikan Indonesia (Jaksel, Holding, Subsidiary)

Remarks:
(*) Market share in the Java Bali Electricity System (Jaksel, Holding, Sub-holding)
(**) Market share in the Indonesia Electricity System (Jaksel, Holding, Sub-holding)

Prospek Usaha
Business Prospect

Prospek Perekonomian Dunia
World Economic Outlook

Pertumbuhan global diproyeksikan sebesar 3,1 persen pada tahun 2024 dan 3,2 persen pada tahun 2025, dengan perkiraan tahun 2024 0,2 poin persentase lebih tinggi dibandingkan perkiraan pada World Economic Outlook (WEO) bulan Oktober 2023 karena ketahanan yang lebih besar dari perkiraan di Amerika Serikat, beberapa negara emerging market dan negara berkembang, serta dukungan fiskal di Tiongkok. Namun perkiraan untuk tahun 2024–2025 masih di bawah rata-rata historis (2000–2019) sebesar 3,8 persen, dengan kenaikan suku bunga kebijakan bank sentral untuk melawan inflasi, penarikan dukungan fiskal di tengah tingginya utang yang membebani aktivitas ekonomi, dan rendahnya pertumbuhan produktivitas.

Global growth is projected at 3.1 percent in 2024 and 3.2 percent in 2025, with the 2024 forecast 0.2 percentage points higher than that in the October 2023 World Economic Outlook (WEO) due to greater-than-expected resilience in the United States, several emerging markets and developing countries, and fiscal support in China. However, the forecast for 2024-2025 is still below the historical average (2000-2019) of 3.8 percent, with rising central bank policy rates to counter inflation, withdrawal of fiscal support amidst high debt weighing on economic activity, and low productivity growth.

Inflasi turun lebih cepat dari perkiraan di sebagian besar wilayah, di tengah melemahnya permasalahan sisi penawaran dan kebijakan moneter yang restriktif. Inflasi global diperkirakan akan turun menjadi 5,8 persen pada tahun 2024 dan menjadi 4,4 persen pada tahun 2025, dengan perkiraan tahun 2025 direvisi turun.

Inflation declined faster than expected in most regions in the midst of weakening supply-side issues and restrictive monetary policy. Global inflation is expected to fall to 5.8 percent in 2024 and 4.4 percent in 2025, with the 2025 forecast revised downward.

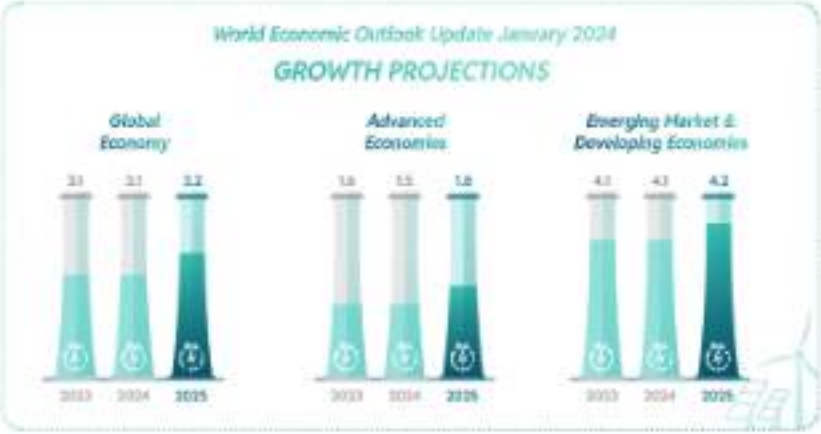

Dengan disinflasi dan pertumbuhan yang stabil, kemungkinan terjadinya hard landing telah berkurang, dan risiko terhadap pertumbuhan global secara umum seimbang. Sisi positifnya, disinflasi yang lebih cepat dapat menyebabkan kondisi keuangan semakin melemah. Kebijakan fiskal yang lebih longgar dari yang diperkirakan dan dari perkiraan dalam proyeksi dapat menyebabkan pertumbuhan yang lebih tinggi untuk sementara waktu, namun dengan risiko penyesuaian yang lebih mahal di kemudian hari. Momentum reformasi struktural yang lebih kuat dapat meningkatkan produktivitas dengan dampak positif lintas batas negara.

Pada sisi negatifnya, lonjakan harga komoditas baru akibat gangguan geopolitik — termasuk serangan yang terus berlanjut di Laut Merah — dan gangguan pasokan atau inflasi yang lebih persisten dapat mempersempit kondisi moneter yang ketat. Memburuknya permasalahan sektor properti di Tiongkok atau, di negara lain, perubahan kebijakan berupa kenaikan pajak dan pemotongan belanja juga dapat menyebabkan kekecewaan terhadap pertumbuhan.

Sumber: World Economic Outlook Januari 2026, International Monetary Fund (IMF)

With stable disinflation and growth, the likelihood of a hard landing has lessened, and risks to global growth are generally balanced. On the positive side, faster disinflation could cause financial conditions to weaken further. Lower-than-necessary and forecast fiscal policy could lead to temporarily higher growth but with the risk of more costly adjustments later. Stronger structural reform momentum could boost productivity with positive cross-border effects.

On the downside, new commodity price spikes due to geopolitical shocks – including continued attacks on the Red Sea – and supply disruptions or more persistent inflation could prolong tight monetary conditions. The increasing issues with the property sector in China or, in other countries, policy changes in the form of tax increases and spending cuts could also cause disappointment in growth.

Source: World Economic Outlook January 2026, International Monetary Fund (IMF)

Prospek Perekonomian Indonesia

Indonesia's Economic Outlook

Optimisme ekonomi Indonesia dengan berbagai kebijakan pemerintah di tengah dinamika kondisi global di sepanjang 2023, baik dari sisi rantai pasok, bencana alam, volatilitas sektor keuangan, serta fragmentasi geo-ekonomi, perekonomian Indonesia relatif tangguh. Dampak perang Rusia-Ukraina dan konflik Timur Tengah tidak begitu dirasa pengaruhnya terhadap Indonesia. Capaian dalam mempertahankan stabilitas ini menjadi fondasi bagi laju pertumbuhan 2024.

Di tengah momentum pemulihan ekonomi global yang masih berlanjut, dan ketidakpastian pasar keuangan yang masih tinggi, pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan akan tetap kuat. Hal ini didorong oleh konsumsi rumah tangga dan investasi. Investasi bangunan lebih tinggi dari proyeksi, didapang berlanjutnya Proyek Strategis Nasional di sejumlah daerah dan berkembangnya properti. Konsumsi rumah tangga dan investasi non bangunan tetap terjaga. Ekspor barang diprakirakan belum kuat seiring penurunan permintaan dari negara mitra dagang utama, khususnya untuk komoditas CPO, besi baja, dan bata bara. Sedangkan ekspor jasa khususnya pariwisata, tumbuh kuat.

Indonesia's economic optimism with various government policies amidst disruptive global conditions throughout 2023, both in terms of supply chains, natural disasters, financial sector volatility, and geo-economic fragmentation, the Indonesian economy is relatively resilient. The impact of the Russia-Ukraine war and the Middle East conflict was less severe on Indonesia. This achievement in maintaining stability is the foundation for the 2024 growth rate.

In the middle of the continuing momentum of global economic recovery and high financial market uncertainty, Indonesia's economic growth is projected to remain strong. It is driven by household consumption and investment. Building investment is higher than expected, supported by the continuation of National Strategic Projects in several regions and property development. Household consumption and non-building investment are maintained. Goods exports are not expected to be robust in line with declining demand from major trading partner countries, particularly for CPO, steel, and coal commodities. Meanwhile, service exports, especially tourism, increased strongly.

Salah satu isu pada tahun 2024 yang jauh dari sorotan berbagai media adalah harga minyak dan perkembangan subsidi energi dari pemerintah. Sektor ini dianggap paling sering mendorong fluktuasi ekonomi dan inflasi di suatu negara termasuk Indonesia. Sepanjang 2023, harga rata-rata crude oil West Texas Intermediate (WTI) ada di sekitar US$ 80/barel dan dengan harga yang kurang lebih stabil dimakasud, pemerintah menggelontorkan subsidi Rp95,6 triliun untuk subsidi belanja BBM dan LPG 3 Kg. Dari data dan perkembangan sepanjang 2023, dengan harga minyak dunia sepanjang 2023, dan juga dengan memperhatikan harga minyak 10 tahun terakhir, maka isu fluktuasi komoditas ini dan subsidi yang akan digelontorkan pemerintah diproyeksikan tetap stabil.

Sumber: Bulletin, Investasi, Keuangan dan Ekonomi Januari 2024, https://fiskal.kemenkeu.go.id/journal/image/2024/BKK_Jan_2024.pdf

One of the issues in 2024 that is far from the spotlight of the media is the oil price and the development of government energy subsidies. This sector is considered to most often boost economic fluctuations and inflation in a country, including Indonesia. Throughout 2023, the average price of West Texas Intermediate (WTI) crude oil was around US$80/barrel, and with this more or less stable price, the government disbursed Rp95,6 trillion in subsidies for fuel and 3 Kg LPG. From the data and developments throughout 2023, with world oil prices throughout 2023, and also taking into account the oil prices of the last 10 years, the issue of fluctuations in this commodity and the subsidies that the government will disburse are projected to remain stable.

Source: Bulletin, Investasi, Keuangan, and Ekonomi, January 2024, https://fiskal.kemenkeu.go.id/journal/image/2024/BKK_Jan_2024.pdf

Prospek Industri Kelistrikan Nasional
National Electricity Industry Prospect

Proyeksi Ketenagalistrikan
Electricity Projections

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan proyeksi kebutuhan listrik dalam negeri di tahun 2024 diperkirakan akan mencapai 3,6% hingga 4,2% lebih besar dari tahun 2023 ini.

The Ministry of Energy and Mineral Resources (EMR) revealed that the projected demand for domestic electricity in 2024 will reach 3.6% up to 4.2% higher than in 2023.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM mengatakan kebutuhan listrik di Indonesia akan melonjak hingga 4,2% di tahun 2024 dari tahun 2023 ini yang mencapai 283,13 terawatt hour (TWh). Proyeksi tersebut akan menentukan besaran kebutuhan tambahan listrik di Indonesia dengan tambahan pembangkit dan infrastruktur penyediaan tenaga listrik lainnya.

Sumber: https://www.cnbcindonesia.com/news/20240103101101-4-489168/kebutuhan-listrik-ri-naik-sampai-4-tahun-depan

The Director General of Electricity of the Ministry of EMR said that electricity demand in Indonesia will increase by 4.2% in 2024 from 2023, which reached 283.13 terawatt hours (TWh). The projection will determine the amount of additional electricity demand in Indonesia with additional power plants and other power supply infrastructure.

Source: https://www.cnbcindonesia.com/news/20240103101101-4-489168/kebutuhan-listrik-ri-naik-sampai-4-tahun-depan

Dalam RUKN 2021-2060 hasil proyeksi kebutuhan tenaga listrik tahun 2021 sebesar 206 TWh meningkat menjadi 1.002 TWh pada tahun 2060. Rata-rata pertumbuhan tenaga listrik sekitar 4,5% per-tahun. Proyeksi kebutuhan tenaga listrik tahun 2060 untuk pelanggan Rumah Tangga sekitar 205 TWh, Bisnis sekitar 158 TWh, Publik sekitar 49 TWh, Industri sekitar 349 TWh, Kendaraan Bermotor Listrik sekitar 205 TWh dan Hidrogen 37 TWh.

In RUKN 2021-2060 the projected electricity demand in 2021 was 206 TWh, an increase to 1,002 TWh in 2060. The average increase of electricity is about 4.5% per year. The projection of electricity demand by 2060 for Household customers is around 205 TWh, Business is around 158 TWh, Public is around 49 TWh, Industry is around 349 TWh, Electric Motor Vehicle is around 205 TWh, and Hydrogen is 37 TWh.

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik sampai tahun 2060, diperlukan tambahan pembangkit rata-rata sekitar 2,9 GW per tahun. Kapasitas pembangkit pada tahun 2060 diproyeksikan mencapai 159 GW. PLTS mendominasi kapasitas dengan porsi sekitar 41%, diikuti oleh PLTB dengan porsi 23%, Amonia dengan porsi 12%, dan Hidrogen dengan porsi 7%. Sisanya 17% berasal dari pembangkit EBET lainnya seperti PLTA, PLTBio, PLTP, dan PLTAL.

Additional power plants are required to meet the demand for electricity until 2060 at an average of about 2.9 GW per year. The power plant capacity in 2060 is projected to reach 159 GW. The SPP dominates the capacity with a portion of around 41%, followed by WPP with a portion of 23%, Ammonia with a portion of 12%, and Hydrogen with a portion of 7%. The remaining 17% comes from other EBET power plants such as HPP, Biobased Power Plant, GPP, and Seawater Power Plant.

Grafik Proyeksi Kapasitas Pembangkit Regional Jawa Bali 2023-2060
Chart of Projected Capacity of Jawa Bali Regional Power Plant for 2023-2060

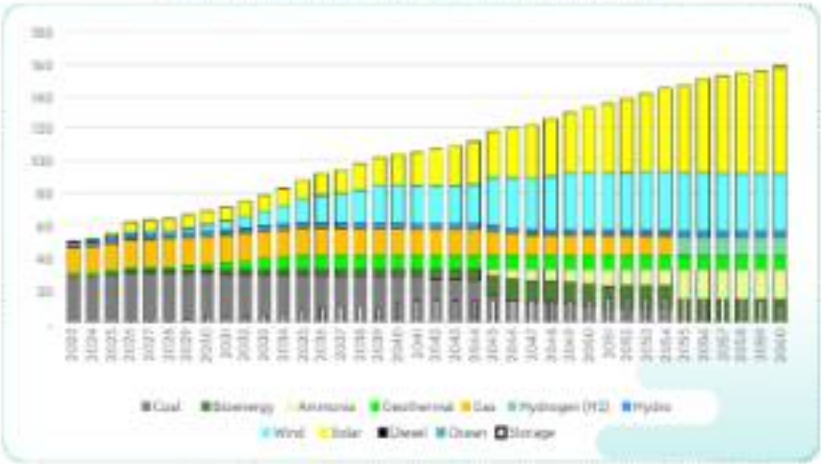

Proyeksi Penjualan Listrik
Electricity Sales Projection

Dalam RUPTL 2021-2030 memperkirakan konsumsi listrik tahun 2024 Jawa, Madura, dan Bali akan mencapai 207,938 GWh dalam skenario optimis dan mencapai 202,943 GWh. Hingga Februari 2024, realisasi penjualan listrik mencapai 47,89 terawatt hour (TWh) atau tumbuh 8,56% dari periode yang sama pada tahun lalu. Dari jumlah tersebut, penjualan penjualan listrik sektor industri mencapai 14,69 TWh atau tumbuh 2,97%, sektor bisnis mencapai 8,94 TWh atau tumbuh sebesar 10,75% dan sektor rumah tangga sebesar 20,25 TWh atau tumbuh sebesar 11,08%.

The 2021-2030 Electricity Supply Business Plan (RUPTL) estimates that electricity consumption in 2024 for Java, Madura, and Bali will reach 207,938 GWh in the optimistic scenario and reach 202,943 GWh. Until February 2024, the realization of electricity sales reached 47,89 terawatt hours (TWh) or increased by 8,56% from the same period last year. Of this amount, electricity sales in the industrial sector reached 14,69 TWh or increased by 2,97%, the business sector reached 8,94 TWh or increased by 10,75%, and the household sector reached 20,25 TWh or increased by 11,08%.

Tabel Proyeksi Penjualan Tenaga Listrik Jawa, Madura, Bali (GWh) dengan Skenario Optimis
Table of Projected Electricity Sales in Jawa, Madura, Bali (GWh) with Optimistic Scenario

Uraian Description	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Rumah Tangga Household	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Bisnis Business	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Publik Public	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Industri Industry	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Total	181,938	189,641	198,444	207,938	217,412	227,093	236,209	245,449	254,956	265,255

Uraian Description	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pertumbuhan % Growth %	4,2	4,4	4,5	4,8	4,6	4,5	4,7	3,9	3,7	4,3
Konsumsi Tenaga Listrik per kapita (kWh/kapita)* Electricity Consumption per Capita (kWh/capita)*	1,166	1,207	1,262	1,291	1,249	1,293	1,407	1,483	1,521	1,582
Beban Puncak (Non-Coincident (MW) Non-Coincident Peak Load (MW)	29,680	30,973	32,355	33,609	35,036	36,469	38,593	39,990	40,630	42,165

* Estimasi konsumsi listrik per kapita tanpa institut konsumsi listrik PLN
Sumber: RKPTL PLN 2021-2030

* Data konsumsi listrik per kapita only basis di PLN electricity consumption
Source: RKPTL PLN 2021-2030

Tabel Proyeksi Penjualan Tenaga Listrik Jawa, Madura, Bali (GWh) dengan Skenario Moderat
Table of Projected Electricity Sales in Jawa, Madura, Bali (GWh) with Moderate Scenario

Uraian Description	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Rumah Tangga Household	75,514	77,623	79,836	82,023	84,277	86,701	88,305	89,803	91,791	93,646
Bisnis Business	33,187	34,966	37,514	39,938	41,271	44,919	47,862	50,737	53,871	57,140
Publik Public	4,695	10,282	10,534	11,834	1,126	12,362	13,418	14,031	14,791	15,559
Industri Industry	62,356	64,472	67,464	70,691	74,588	78,280	81,708	85,017	88,500	92,404
Total	**180,852**	**187,403**	**195,358**	**203,945**	**211,261**	**222,072**	**230,848**	**239,738**	**248,959**	**258,699**
Pertumbuhan % Growth %	3,6	3,6	4,2	4,4	4,5	4,2	4,0	3,8	3,8	3,9
Konsumsi Tenaga Listrik per kapita (kWh/kapita)* Electricity Consumption per Capita (kWh/capita)*	1,149	1,182	1,232	1,267	1,275	1,303	1,404	1,448	1,495	1,544
Beban Puncak (Non-Coincident (MW) Non-Coincident Peak Load (MW)	29,503	31,633	33,316	35,032	34,398	35,716	37,033	38,339	39,946	41,171

* Estimasi konsumsi listrik per kapita tanpa institut konsumsi listrik PLN
Sumber: RKPTL PLN 2021-2030

* Data konsumsi listrik per kapita only basis di PLN electricity consumption
Source: RKPTL PLN 2021-2030

Proyeksi Kondisi Pembangkit
Projection of Power Plant Condition

Pembangkit dengan sumber EBT di Indonesia didominasi oleh PLTA/M/MM. Meskipun kapasitas terpasang PLTS tergolong paling kecil dibandingkan dengan pembangkit sumber EBT lain, pembangkit dengan peningkatan tertinggi selama 5 (lima) tahun terakhir adalah PLTS yaitu sebesar 43%. Adapun pembangkit dengan pertumbuhan terendah selama 5 (lima) tahun terakhir adalah PLTB yaitu sebesar 2%.

The NRE-sourced power plants in Indonesia are dominated by HPP/MHPP. Although the installed capacity of SPP is classified as the smallest compared to other NRE-sourced power plants, the power plant with the highest increase over the last 5 (five) years is SPP of 43%. The power plant with the lowest increase over the last 5 (five) years is WPP of 2%.

Grafik Perkembangan Kapasitas Terpasang Pembangkit Tenaga Listrik Dengan Sumber EBT (dalam GW)
Chart of Development of Installed Capacity of Power Plants with NRE Sources (in GW)

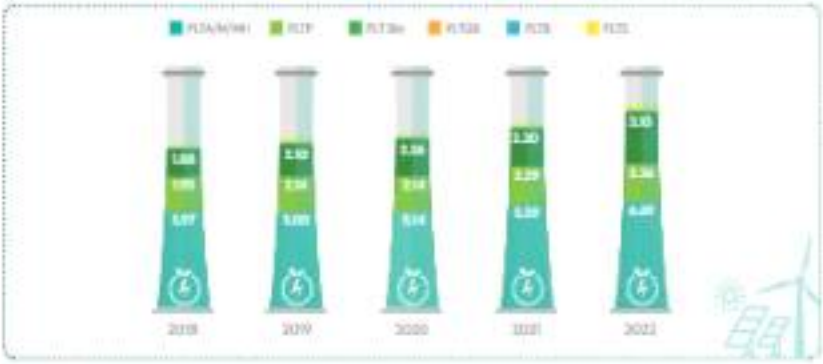

Prospek Usaha PLN NP

Business Prospect of PLN NP

PLN Nusantara Power adalah subholding pembangkitan PT PLN (Persero) dan memiliki peran penting dalam mendukung kebutuhan listrik di Indonesia. PLN NP saat ini memasok 18,673 MW yang tersebar dari 624 mesin pembangkit yang tersebar dari Aceh (Aceh) hingga ke Tobelo (Maluku).

PLN Nusantara Power is the electric power generator subholding of PT PLN (Persero) and has a crucial role in supporting Indonesia's electricity needs. PLN NP currently supplies 18,673 MW from 624 power plants spread from Aceh (Aceh) to Tobelo (Maluku).

Penjualan Tenaga Listrik masih menjadi bisnis utama yang dimiliki oleh PLN NP dimana 96% pendapatan Perusahaan berasal dari penjualan tenaga listrik pembangkit eksisting. Seiring dengan perkembangan kelistrikan di Indonesia, di tahun 2021, kontribusi PLN NP dalam mendukung sistem kelistrikan Jawa Madura Bali akan bertambah seiring dengan rencana COD Add On blok 3 dan blok 4 PLTGU Muara Tawar dengan kapasitas masing-masing 250 MW maupun rencana pembentukan holding sub holding PLN dengan implikasi pengalihan aset PLN yang dikelola PLN NP di sistem Jawa Madura Bali sebesar 4,579 MW. PLN NP mendukung penyediaan tenaga listrik dengan 3 prinsip ketahanan, yaitu security, affordability dan low emission di antaranya melalui program: coal switching, anti blackout dan unit fast response, swakelola pemeliharaan, optimasi Pemakaian Sendiri melalui PLTS substitusi PS, co-firing dan budidaya tanaman energi untuk mendukung program co-firing PLTU batubara.

Sales of Electricity is still the main business owned by PLN NP, where 96% of the Company's revenue comes from the sale of electricity from existing power plants. Along with the development of electricity in Indonesia, in 2021, PLN NP's contribution in supporting the Java Madura Bali electricity system increased along with the COD Add On plans of blocks 3 and 4 Muara Tawar CCPP with a capacity of 250 MW each, and the plan to form a PLN sub-holding with the implication of transferring PLN assets managed by PLN NP in the Java Madura Bali system of 4,579 MW. PLN NP supports the provision of electricity with three principles of resilience, namely security, affordability, and low emission, including through programs: coal switching, anti-blackout and fast response units, self-managed maintenance, optimization of Self-Consumption through PS substitution SPS, co-firing and cultivation of energy plants to support the coal CFPP co-firing program.

Pada tahun 2021, PLN NP turut memperkenalkan produk iCORE yang merupakan produk inovasi dalam pengelolaan pembangkit berbasis digital 4.0. Melalui iCORE, proses pemantauan operasional, analisis, dan diagnosa kondisi pembangkit dapat dilakukan secara digital dan real time melalui pengoptimalan sensor yang terpasang pada mesin-mesin pembangkit. PLN NP semakin menjadi pionir dalam digitalisasi unit pembangkit di Indonesia melalui penerapan iCORE sejak tahun 2016.

In 2021, PLN NP also developed the iCORE product, which is an innovative product in digital 4.0-based power plant management. Through iCORE, the process of operational monitoring, analysis, and diagnosis of power plant conditions can be carried out digitally and in real-time through the optimization of sensors installed on power plant machines. PLN NP has been a pioneer in digitizing power plant units in Indonesia through the implementation of iCORE since 2016.

Kontribusi PLN NP dalam *Renewable Energy*

PLN NP's Contribution to Renewable Energy

Berdasarkan data RUPTL PLN 2021-2030 komposisi produksi listrik per jenis energi primer di Jawa, Madura, dan Bali diproyeksikan pada tahun 2030 akan menjadi 66,7% batubara, 17,1% gas (termasuk LNG), 4,6% tenaga air, 6,6% panas bumi, 0,2% BBM, dan 4,8% EBT lainnya. Porsi pembangkit EBT di Jawa, Madura, dan Bali akan meningkat dari 8,5% tahun 2021 menjadi 16,1% di tahun 2030.

Based on data from PLN's 2021-2030 RUPTL, the composition of electricity production per type of primary energy in Java, Madura, and Bali is projected in 2030 to be 66.7% coal, 17.1% gas (including LNG), 4.6% hydropower, 6.6% geothermal, 0.2% fuel, and 4.8% other NRE. The portion of NRE power plants in Java, Madura, and Bali will increase from 8.5% in 2021 to 16.1% in 2030.

Komposisi Bauran Energi Listrik Berdasarkan Jenis Bahan Bakar Jawa, Madura, dan Bali (GWh)

Picture of Electricity Energy Mix Composition by Fuel Type in Java, Madura, and Bali (GWh)

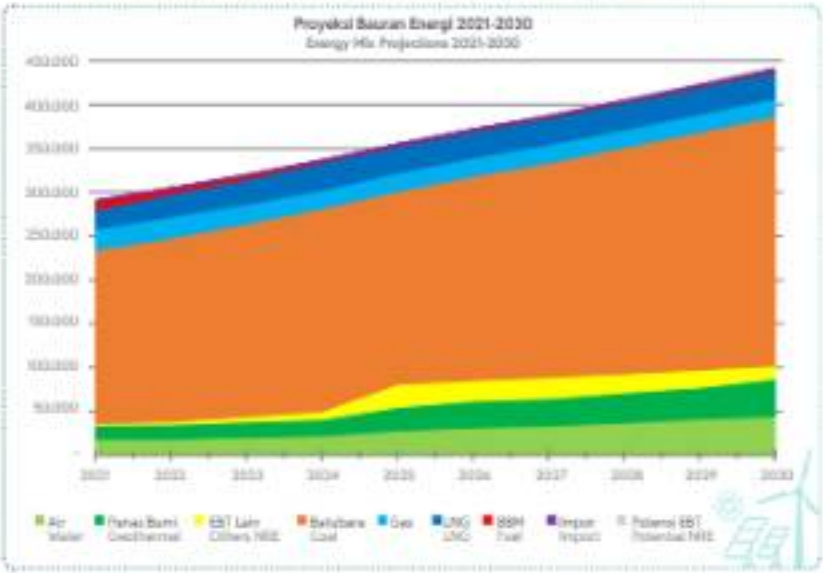

Sumber: RUPTL PLN 2021-2030

Source: RUPTL PLN 2021-2030

PLN Nusantara Power (PLN NP) kembali mendukung upaya pemerintah mewujudkan bauran energi nasional dari energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23% pada tahun 2025. Melalui pemanfaatan hidrogen dalam unit pembangkit, PLN NP dapat berkontribusi dalam mewujudkan net zero emission. Hal ini dipaparkan PLN NP dalam Hydrogen Roundtable Talk, dimana kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan publik, serta juga untuk menarik perhatian pemerintah, sektor industri dan sektor energi tentang pentingnya peran Green Hydrogen dalam turut mempercepat transisi energi menuju Net Zero Emission, baik sebagai bahan baku industri, maupun sebagai sumber energi atau energy carrier dan energy storage.

PLN Nusantara Power (PLN NP) again supports the government's efforts to realize a national energy mix from new and renewable energy (NRE) of 23% by 2025. Through the use of hydrogen in power plant units, PLN NP can contribute to realizing net zero emission. This was revealed by PLN NP in the Hydrogen Roundtable Talk, where this activity is intended to provide public knowledge, as well as to attract the attention of the government, the industrial sector, and the energy sector regarding the importance of the role of Green Hydrogen in accelerating the energy transition towards Net Zero Emission, both as an industrial raw material, as well as an energy source or energy carrier and energy storage.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (DBTKE) Kementerian ESDM, menyampaikan aspek kebijakan dan regulasi dari sisi pemerintah Republik Indonesia dalam mendorong terbentuknya sektor industri produksi Green Hydrogen, maupun memperluas konversi pemanfaatan Green Hydrogen sebagai alternatif dari Hidrogen konvensional. Hydrogen diharapkan sebagai salah satu kontributor transisi energi dan memiliki peran penting dalam dekarbonisasi sistem energi global. Hidrogen diharapkan sebagai salah satu kontributor transisi energi dan memiliki peran penting dalam dekarbonisasi sistem energi global.

The Director General of New, Renewable Energy and Energy Conservation (DBTKE) of the Ministry of EMR conveyed the policy and regulatory aspects of the government of the Republic of Indonesia in encouraging the establishment of the Green Hydrogen producer industry sector, as well as expanding the conversion of Green Hydrogen utilization as an alternative to conventional Hydrogen. Hydrogen is expected as one of the contributors to the energy transition and has an important role in decarbonizing the global energy system.

Peluang dan Strategi Perusahaan Kedepan

Opportunities and Future Company Strategies

Dalam menjawab dan mengoptimalkan tantangan kedepan perlu dibuangkan dalam program-program strategis arah dan koridor program kerja Perusahaan dengan mengacu pada peta lini bisnis, green RUPTL 2021-2030, pemenuhan bauran EBT 23% pada tahun 2025 dan mendukung komitmen Pemerintah menuju karbon netral di tahun 2060; selain itu untuk mendukung monitoring terhadap Program Environment, Social, dan Governance (ESG) maka setiap program disandingkan juga kesesuaiannya dengan program ESG.

1. Penguatan pembangkit existing dan Holding Subholding melalui program peningkatan keandalan dan efisiensi pembangkit: LTPSA, Overhaul (Coal Handling Facility, Balance of Plant), Remaining Life Assessment, Aging Management, dan Digitalisasi Aset Pembangkit (S-Product Responsibility)
2. Peningkatan persentase cofiring dan kajian konversi PLTU Batubara menuju 100% biomassa dalam rangka peningkatan Capacity Factor (CF)/Renewable Capacity atau GHG Emission)
3. Potensi Pengembangan usaha dari Green RUPTL 2021-2030 dan mendukung kebijakan Pemerintah terkait EBT.

In answering and optimizing future challenges, it is necessary to outline strategic programs in the direction and corridor of the Company's work program by referring to the business line map, the 2021-2030 green RUPTL, fulfilling the 23% NRE mix in 2025, and supporting the Government's commitment to carbon neutral in 2060; in addition, to support monitoring of the Environment, Social, and Governance (ESG) Program, the suitability of each program is also aligned with the ESG program.

1. Strengthening of existing power plants and Holding Sub-holding through a program to improve power plant reliability and efficiency: LTPSA, Overhaul (Coal Handling Facility, Balance of Plant), Remaining Life Assessment, Aging Management, and Digitalization of Power Plant Assets (S-Product Responsibility)
2. Increase in cofiring percentage and study on the conversion of Coal CFPP to 100% biomass in the context of increasing Capacity Factor (CF)/Renewable Capacity or GHG Emission)
3. Potential business development from Green RUPTL 2021-2030 and support Government policies related to NRE.

Informasi dan Fakta Material setelah Tanggal Laporan Akuntan

Material Information and Facts after the Accountant's Report Date

Setelah Laporan Keuangan Konsolidasian tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan tertbl tidak terdapat informasi terkait kejadian material setelah periode pelaporan.

After the publication of the Consolidated Financial Statements for the 2023 fiscal year audited by the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners, there was no information related to material events after the reporting period.

Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian Luar Biasa dan Jarang Terjadi

Financial Information Containing Extraordinary and Rare Events

Setelah Laporan Keuangan Konsolidasian tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan tertbl memuat informasi di tahun 2023 tidak terdapat peristiwa yang mengandung kejadian luar biasa dan jarang terjadi.

After the publication of the Consolidated Financial Statements for the 2023 fiscal year, which have been audited by the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners, the information stated that there were no events containing extraordinary and rare events in 2023.

Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

Membangun Tata Kelola Berkelanjutan
Building Sustainable Governance

Sebagai bagian dari upaya mendukung akselerasi transisi energi, PLN Nusantara Power memanfaatkan momentum transformasi yang membawa perubahan besar untuk menjadikan Perusahaan sebagai penyedia energi listrik yang handal, efisien dan ramah lingkungan berbasis teknologi, inovasi dan berorientasi pada masa depan. PLN Nusantara Power berpegang pada kaidah Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) untuk menciptakan nilai jangka panjang dan fokus pada peningkatan kapasitas pembangkit listrik dengan memanfaatkan teknologi energi terbarukan dalam mendukung ketahanan energi nasional.

As part of efforts to support the acceleration of energy transition, PLN Nusantara Power takes advantage of the momentum of transformation which brings major changes to make the Company a reliable, efficient and environmentally friendly provider of electrical energy based on technology, innovation and oriented towards the future. PLN Nusantara Power adheres to the principles of Good Corporate Governance to create long-term value and focuses on increasing the capacity of electricity power plants by utilizing renewable energy technology to support national energy security.

Pelaksanaan legal end state untuk program holding-subholding ketenagalistrikan menjadikan PLN NP sebagai *Generation Company* terbesar di Asia Tenggara dan berkontribusi dalam upaya Indonesia untuk mengambil bagian pada rantai pasok global di tengah momentum percepatan transisi energi. Dengan kompetensi yang dimiliki bidang pembangkitan, PLN NP melaksanakan manajemen aset baik dengan melaksanakan asset wellness, digitalisasi, efisiensi pembangkit dan mendukung program green seperti co-firing untuk seluruh pembangkit yang dimiliki dan dikelola oleh PLN NP. Selain itu, pengembangan bisnis beyond kWh terus dikembangkan dalam rangka meningkatkan nilai tambah Perusahaan. Fokus PLN NP dalam mendukung value creation dan sustainability melalui transisi energi adalah pada peningkatan kapasitas pembangkit listrik dengan memanfaatkan teknologi energi terbarukan melalui peningkatan kapasitas Hydro & Solar PV, peningkatan persentase co-firing biomass di PLTU yang dimiliki, serta penerapan De-dieselization program di seluruh Indonesia.

Transformasi Perusahaan menjadi struktur Holding Subholding meningkatkan kapasitas dan jumlah pembangkit yang tersebar di seluruh Indonesia juga menjadi tantangan bagi PLN NP. Kondisi aging dan hidden capacity pada sebagian pembangkit yang dikelola mendorong PLN NP untuk melakukan program penguatan pembangkit. PLN NP mendukung program pemerintah dan PLN terkait Energi Baru Terbarukan (EBT) dengan mengembangkan pembangkit renewable energy dari Green Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030, hal tersebut sejalan dengan arah pengembangan korporasi Perusahaan yang telah memasuki tahap Transformasi Korporasi 2 menuju new energy dan sustainable. Perusahaan berupaya menjawab tantangan dan memanfaatkan setiap peluang dengan berpegang pada prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik guna mendukung Jump to the New 2 Curve untuk memastikan

PLN NP implements legal end state for the electricity holding-subholding program in order to become the largest Power Plant Company in Southeast Asia and contributes to Indonesia efforts to take part in the global supply chain amid the momentum of energy transition acceleration. With its competence in the power plant sector, PLN NP carries out good asset management by implementing asset wellness, digitalization, power plant efficiency and supporting green programs such as co-firing for all power plants owned and managed by PLN NP. Furthermore, business development beyond kWh continues to be developed in order to increase added values of the Company. PLN NP focuses in supporting value creation and sustainability through the energy transition by increasing electricity power plant capacity by utilizing renewable energy technology through increasing Hydro & Solar PV capacity, increasing the percentage of co-firing biomass in CFPPs, as well as implementing the De-dieselization program throughout Indonesia.

The Company transformation into a Holding Sub-Holding structure increases the capacity and number of power plants spread throughout Indonesia and is also a challenge for PLN NP. The condition of aging and hidden capacity in some of the managed power plants encourages PLN NP to carry out power plant strengthening program. PLN NP supports the government and PLN programs related to New Renewable Energy (NRE) by developing renewable energy power plants from Green Electricity Supply Business Plan (RUPTL) 2021-2030. This is in line with the Company's corporate development direction which has entered the Corporate Transformation stage 2 towards the new and sustainable energy. The Company strives to answer challenges and take advantage of every opportunity by adhering to the principles of Good Corporate Governance to support the Jump to the New 2 Curve to ensure PLN NP growth and sustainability and successfully achieve the vision

pertumbuhan dan keberlanjutan PLN NP serta berhasil mencapai visi dan misi RJPP 2020-2024 serta arah pengembangan korporasi Perusahaan yang telah memasuki tahap Transformasi Korporasi 3 menuju ke arah new energy dan sustainable dapat dijalankan secara optimal.

and mission of the Company's Long Term Plan (RJPP) 2020-2024 as well as the direction of corporate development of the Company which has entered the Corporate Transformation stage 3 towards the new and sustainable energy which can be performed optimally.

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) terus berkembang seiring dengan dinamika bisnis sebagai dampak dari perubahan kondisi sosial dan lingkungan di masyarakat yang didukung dengan perkembangan teknologi. Kesadaran setiap individu pelaku bisnis untuk menjalankan praktik tata kelola yang mengutamakan kelangsungan hidup Perusahaan dalam jangka panjang dan kepentingan stakeholders sangat diperlukan sebagai dorongan dari aspek etika (ethical driven) dalam membangun tata kelola yang baik agar senantiasa relevan dan memungkinkan Perusahaan untuk bertahan dalam segala kondisi. Selain itu, diperlukan dorongan dari peraturan (regulatory driven) yang mewajibkan Perusahaan untuk patuh menjalankan praktik tata kelola yang disesuaikan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. PLN NP terus berupaya mengimplementasikan GCG sejalan dengan ketentuan dan best practices terus berkembang dimana prinsip-prinsip GCG dipegang oleh empat pilar governance korporasi yaitu perilaku beretika, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan (ETAK) yang mengikuti perkembangan sesuai dengan perkembangan terkini dan nilai dasar Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Fairness.

Implementation of Good Corporate Governance (GCG) continues to develop along with business dynamics as a result of changes in social and environmental conditions in society which are supported by technological developments. The awareness of every individual business actor to carry out governance practices that prioritize the long-term survival of the Company and the stakeholders' interests is highly necessary as ethical drive in building good governance so that it remains relevant and enables the Company to survive in all conditions. Also, regulatory driven motivation is needed which requires the Company to adhere to the governance practices required by applicable laws and regulations. PLN NP continues to strive to implement GCG in line with provisions and the best practices continue to develop where GCG principles are based on the four pillars of corporate governance, namely: ethical behavior, accountability, transparency, and sustainability (ETAK) which are developments in accordance with the latest developments in the basic values of Transparency, Accountability, Responsibility, Independence and Fairness.

PLN NP dalam menumbuhkan visi Perusahaan telah berorientasi pada upaya mendukung kinerja perusahaan secara berkelanjutan serta peran organ-organ Perusahaan yang dapat merencerminkan implementasi governance (ETAK) dengan mempertimbangkan kepentingan stakeholders. Dalam melaksanakan kegiatannya, PLN NP senantiasa mengedepankan kejujuran, memperlakukan semua pihak dengan hormat (respect), memenuhi komitmen, membangun serta menjaga nilai-nilai moral dan keyakinan secara konsisten.

PLN NP in formulating the Company's vision has been oriented towards efforts to support the company's performance in a sustainable manner and the role of the Company's organs that can reflect the implementation of governance (ETAK) by considering the interests of stakeholders. In carrying out its activities, PLN NP always practices honesty, treats all parties with respect, fulfills commitments, builds and maintains moral values and trust consistently.

Perusahaan serius memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (fairness) dan dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan serta berkomitmen melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan agar berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui kerjasama dengan semua pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kehidupan mereka dengan cara yang selaras dengan kepentingan bisnis dan agenda pembangunan berkelanjutan.

The Company takes seriously the interests of shareholders and other stakeholders based on the principles of fairness and equality and is managed independently so that each organ of the company does not dominate each other and cannot be intervened by other parties. The Company complies with laws and regulations and is committed to carrying out its responsibilities towards society and the environment in order to contribute to sustainable development by working with all relevant stakeholders to improve their lives in a way that is aligned with business interests and the sustainable development agenda.

Landasan Hukum Tata Kelola Perusahaan
Legal Foundations of Corporate Governance

Perusahaan mengimplementasikan dan memenuhi kaidah-kaidah dalam menata organ dan menjalankan kegiatan operasional korporasi guna melindungi kepentingan dan memenuhi harapan para pemegang saham dan para pemangku kepentingan lain serta terwujudnya penciptaan nilai korporasi yang berkelanjutan sesuai dengan dasar hukum dan standar penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik di lingkungan Perusahaan berlandaskan pada peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-Undang RI No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-01/MBU/2011 dan PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, yang diubah menjadi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
4. Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara, yang telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. SK-12/S.MBU/08/2023.

The Company implements and fulfills the rules in organizing organs and carrying out corporate operational activities in order to protect the interests and meet the expectations of shareholders and other stakeholders as well as achieving sustainable corporate value creation based on legal basis and standards for implementing good corporate governance. The implementation of good corporate governance within the Company is based on the following regulations:

1. Republic of Indonesia Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises;
2. Republic of Indonesia Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
3. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-01/MBU/2011 and PER-09/MBU/2012 on the Implementation of Good Corporate Governance, as amended by Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;
4. Decree by the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises No. SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, which was revoked by Decree by the Secretary of the Minister of SOE No.SK-12/S.MBU/08/2023.

Standar Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Standards for the Good Corporate Governance Implementation

Perusahaan mempertimbangkan kebutuhan, lingkungan tempat beroperasi, ukuran dan kompleksitas bisnis, serta sifat risiko dan tantangan yang dihadapi dalam mengadopsi standar penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagai acuan *best practices*. Standar penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang menjadi acuan Perusahaan antara lain:

1. Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara, yang telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. SK-12/S.MBU/08/2023 dan saat ini sedang menunggu acuan baru Kementerian BUMN.
2. Pedoman Umum Governance Korporat Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG);
3. *Principles of Corporate Governance* oleh *Organisation for Economic Co-Operation and Development* (OECD);
4. ASEAN *Corporate Governance Scorecard*;
5. Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbaik dalam Penilaian Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

The Company considers its needs, the environment in which it operates, the size and complexity of the business, and the nature of the risks and challenges faced within adopting standards for implementing good corporate governance as a reference for best practices. Standards for implementing good corporate governance that are used as a reference for the Company as follows:

1. Decree by the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises No. SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, which was revoked by Decree by the Secretary of the Minister of SOE No. SK-12/S.MBU/08/2023 and Currently waiting for the new reference from the Ministry of SOE.
2. General Guidelines for Indonesian Corporate Governance by the National Committee for Governance Policy (KNKG);
3. Principles of Corporate Governance oleh Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD);
4. ASEAN Corporate Governance Scorecard;
5. Guidelines for Public Company Governance in Financial Services Authority (FSA) Regulations.

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Organ Structure

Kinerja Perusahaan dan pengelolaan bisnis berkelanjutan harus didukung dengan struktur tata kelola yang memadai baik dari segi organ maupun kebijakan. Perusahaan menerapkan struktur organ tata kelola yang dapat mendukung efektivitas kegiatan operasional sesuai dengan kebutuhan Perusahaan dan sejalan dengan ketentuan perundangan serta best practices yang terus berkembang sehingga mampu mendukung transformasi dalam menghadapi perubahan lingkungan dan tantangan bisnis Perusahaan. Struktur organ tata kelola Perusahaan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perusahaan.

Organ utama yang menentukan pengelolaan, pengendalian dan pengarahan korporasi terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Direksi sebagai pelaksana fungsi pengelolaan Perusahaan dibantu oleh organ di bawah Direksi yang terdiri dari Sekretaris Perusahaan, Satuan Pengawasan Intern, Satuan Legal, Risk and Compliance serta Unit Kerja Lainnya sebagai organ pendukung tata kelola Perusahaan. Dewan Komisaris juga membentuk organ pendukung yang terdiri dari Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Investasi dan Manajemen Risiko, Komite Nominasi dan Remuneras.

Company performance and sustainable business management must be supported by an adequate governance structure both in terms of organs and policies. The Company designed a governance organ structure that are able to encourage the effectiveness of operational activities following the Company needs and in line with statutory provisions and continuously developing best practices so as to support transformation in facing environmental changes and business reach of the Company. Governance organs structure of the Company refers to Law of the Republic of Indonesia no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Company Articles of Association.

The main organs that determine the management, control and direction of the corporation consist of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners and the Board of Directors. The Board of Directors as the executor of the Company management functions is assisted by organs under the Board of Directors consisting of the Corporate Secretary, the Internal Audit Unit , the Legal, Risk and Compliance as well as other work units as supporting organs for corporate governance. The Board of Commissioners also forms Supporting organs consisting of the Secretary to the Board of Commissioners, Audit Committee, Investment, dan Risk Management Committee, Nomination and Remuneration Committee.

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Organ Structure

Penanggung Jawab Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Responsible for the Good Corporate Governance Implementation

Direksi melalui Edaran Direksi PT PLN Nusantara Power No. 0009E/012/DIR/2023 tentang Direksi Pembina Satuan dan Sekretariat Perusahaan telah menetapkan Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan GCG untuk dapat memastikan kualitas penerapan GCG. Secara teknis, Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi dibantu oleh Sekretaris Perusahaan sesuai dengan Peraturan Direksi No. 004D/919/DIR/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Pembangkitan Jawa-Bali dalam memastikan pengelolaan, pemenuhan dan pemantauan GCG di lingkungan PLN NP.

Tanggung jawab Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi terkait penerapan dan pemantauan GCG antara lain:

1. Menyusun rencana kerja yang diperlukan untuk memastikan perusahaan memenuhi Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) di Perusahaan dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
2. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Perusahaan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku;
3. Memantau dan menjaga kepatuhan Perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Perusahaan dengan pihak ketiga;
4. Melaporkan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang disampaikan kepada RUPS dan Dewan Komisaris minimal sekali dalam setahun.

The Board of Directors has Circular of PT PLN Nusantara Power's Board of Directors No. 0009E/012/DIR/2023 concerning the Directors of Unit Development and Company Secretariat appoints a Director of Human Capital Management and Administration as the person in charge of implementing and monitoring GCG to be able to ensure the quality of GCG implementation. Technically, Director of Human Capital Management and Administration is assisted by the Corporate Secretary in accordance with Directors Regulation No. 40 /1004/DIR/2022 concerning the Organization and Work Procedures of PT Pembangkitan Jawa-Bali in ensuring management, compliance and GCG monitoring within PLN NP.

The responsibilities of the Director of Human Capital Management and Administration regarding GCG implementation and monitoring include the following:

1. Preparing work plans necessary to ensure the Company complies with the Guidelines for Implementing Good Corporate Governance in the Company and other laws and regulations in order to implement the principles of Good Corporate Governance;
2. Monitoring and ensuring that the Company's business activities do not deviate from applicable regulations;
3. the Company's compliance with all agreements and commitments made by the Company with the third parties;
4. Reporting on the implementation of Good Corporate Governance which is submitted to the GMS and the Board of Commissioners at least once a year.

Kebijakan Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Policy

Kebijakan tata kelola Perusahaan (soft structure) senjata erat kaitannya dengan bagaimana proses dan perilaku hubungan dengan stakeholders serta pencapaian tujuan Perusahaan dapat berjalan dengan baik. Perusahaan menyusun kebijakan sebagai penerapan aturan dalam mendukung implementasi GCG sesuai dengan peraturan perundang-undangan, best practice serta nilai-nilai budaya Perusahaan yang menjadi acuan dalam berperilaku dan menjalankan proses kerja sehingga dapat mendukung efektivitas pencapaian tujuan Perusahaan. Pelaksanaan kebijakan yang diterapkan setiap fungsi dalam tata kelola Perusahaan berdasarkan pendekatan tiga pilar utama, yaitu Objective, Risk and Control (ORC). Setiap fungsi didorong untuk dapat mengelola risiko dan memiliki kontrol atas organisasi yang mencakup seluruh rangkaian proses di dalam Perusahaan sesuai dengan dinamika usaha dan regulasi yang berlaku. Kebijakan tata kelola yang telah dimiliki Perusahaan antara lain:

1. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (CG Code);
2. Pedoman Perilaku (Code of Conduct);
3. Pedoman Tata/Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (Board Manual);

Corporate governance policies (soft structure) are closely related to how the process and behavior of relationships with the stakeholders and the achievement of Company goals are able to run well. The Company formulates policies as a set of rules in supporting GCG implementation in accordance with statutory regulations, best practices and corporate cultural values which serve as a reference in behaving and performing business processes so as to encourage the effectiveness of achieving the Company's goals. The implementation of policies by each function in corporate governance is based on an approach of three main pillars, namely Objective, Risk and Control (ORC). Each function is encouraged to be able to manage risks and have control over the organization which covers the entire series of processes within the Company following the business dynamics and applicable regulations. The Company's governance policies include the following:

1. Corporate Governance Guidelines (CG Code);
2. Code of Conduct;
3. Guidelines for the Work Procedures of the Board of Directors and Board of Commissioners (Board Manual);

4. Pedoman Tatalaksana Kerja Dewan Komisaris (Board of Commissioner Manual);
5. Pedoman Tatalaksana Kerja Direksi (Board of Director Manual);
6. Pedoman Subsidiary Governance (Tata Kelola Komunikasi AFPK);
7. Kebijakan Pengungkapan Informasi (Disclosure Information);
8. Audit Internal Charter;
9. Charter Komite;
10. Pedoman Kebijakan Perusahaan;
11. Budaya Perusahaan;
12. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi;
13. Pedoman Batasan Kewenangan Pengambilan Keputusan;
14. Pedoman Penerapan Governance, Risk, Compliance (GRC);
15. Pedoman terkait Kebijakan Anti Fraud;
16. Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
17. Pedoman terkait Benturan Kepentingan;
18. Pedoman Pelaksanaan Pelaporan dan Pengendalian Gratifikasi;
19. Pedoman Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System / WBS);
20. Kebijakan Sistem Manajemen Terintegrasi;
21. Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa; dan
22. Berbagai kebijakan dan prosedur Perusahaan yang senantiasa dilengkapi dan disempurnakan secara terus-menerus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkini.

Perusahaan melakukan peninjauan secara berkala dan pemutakhiran kebijakan apabila diperlukan serta menyusun kebijakan pendukung lainnya untuk mengakomodir kebutuhan dan perkembangan Perusahaan, peraturan perundang-undangan serta *best practices* penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

4. Board of Commissioners Work Procedure Guidelines (Board of Commissioners Manual);
5. Guidelines for Directors Work Procedures (Board of Director Manual);
6. Subsidiary Governance Guidelines (AFPK Communication Governance);
7. Information Disclosure Policy;
8. Internal Audit Charter;
9. Committee Charter;
10. Company Policy Guidelines;
11. Corporate Culture;
12. Implementation of Integrated Risk Management;
13. Guidelines for Limiting Decision-Making Authority;
14. Guidelines for Implementing Governance, Risk, Compliance (GRC);
15. Guidelines related to Anti-Fraud Policy;
16. Guidelines for State Officials' Wealth Reporting (LHKPN);
17. Guidelines related to Conflict of Interest;
18. Guidelines for Implementing Gratification Reporting and Control;
19. Guidelines for Reporting Violations (Whistleblowing System/ WBS);
20. Integrated Management System Policy;
21. Guidelines for Procurement of goods and services; and
22. Various Company policies and procedures are continuously complemented and refined following the latest and applicable laws and regulations.

The Company regularly reviews and updates policies if necessary and develops other supporting policies to accommodate the Company needs and developments, statutory regulations and best practices for implementing good corporate governance.

Proses Tata Kelola Berkelanjutan

Sustainable Governance Process

Penerapan praktik GCG secara substansi harus dapat mendorong kepedulian setiap unsur dalam Perusahaan dan para pemangku kepentingan lainnya terhadap kepentingan terbaik Perusahaan dalam jangka panjang. Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) merupakan rangkaian proses, perilaku, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengelolaan, pengendalian dan pengarahan korporasi termasuk hubungan antara para pemangku kepentingan (stakeholder) yang terlibat serta tujuan pengarahan Perusahaan. Perusahaan mendorong terciptanya nilai yang berkelanjutan dengan menerapkan proses tata kelola yang selaras dengan nilai-nilai yang ada di Perusahaan dalam rangka memastikan penerapan setiap proses bisnis dilandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. PLN NP melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas proses implementasi tata kelola yang baik, serta melakukan perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja penerapannya.

Substantial implementation of GCG practices must be able to encourage concern from every element within the Company and other stakeholders towards the best interests of the Company in the long term. Corporate Governance is a series of processes, behaviors, policies, rules and institutions that influence the management, control and direction of a corporation, including the relationships between the stakeholders involved and the objectives of managing the Company. The Company encourages the creation of sustainable value by designing governance processes that are in line with the Company's existing values in order to ensure that the implementation of every business process is based on the principles of good corporate governance. PLN NP carries out regular evaluations of the effectiveness of the good governance implementation process, as well as making necessary improvements and adjustments to improve implementation performance.

Proses Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Process

Keterangan:

1. Develop GCG
   Pengembangan arsitektur GCG dan kebijakan tata kelola dalam penerapan GCG, yang meliputi pandoman organisasi, pedoman kebijakan dan panduan perilaku. Hasil output proses ini adalah Roadmap GCG dan CG Code sebagai pedoman implementasi GCG di Perusahaan. Kedua output ini akan menjadi referensi dalam penyusunan soft structure GCG dan pedoman kebijakan tata kelola lainnya. Pedoman tersebut dievaluasi secara berkala disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan Perusahaan.

2. Cascade to all Parties
   Kegiatan mengkomunikasikan dan mensosialisasikan soft structure GCG dan pedoman kebijakan tata kelola lainnya kepada seluruh insan Perusahaan. Pedoman tersebut dievaluasi

Information:

1. Develop GCG
   Development of GCG architecture and governance policies in implementing GCG, which includes organizational guidelines, policy guidelines and behavior guidelines. The output of this process is GCG Roadmap as guidelines for implementing GCG in the Company. These two outputs will become references in preparing GCG soft structure GCG and other policy guidelines. These guidelines are evaluated periodically following the Company's developing needs.

2. Cascade to all Parties
   Activities to communicate and socialize GCG soft structure GCG and other guidelines to all Company Personnel. These guidelines are evaluated periodically following the Company's

secara berkala disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan Perusahaan. Selain itu, seluruh karyawan juga menandatangani komitmen atas kepatuhan terhadap pedoman perilaku setiap tahunnya.

3. *Plan the Implementation*
Proses penerapan tata kelola dengan mengkoordinasikan sumber daya untuk mencapai tujuan. Hasil dari proses ini adalah ditetapkannya pedoman kebijakan tata kelola, antara lain Charter Komite (Komite Audit Charter dan Internal Audit Charter), Audit Internal Charter, Pedoman kebijakan lainnya yang ditetapkan melalui Keputusan Direksi dan penandatanganan Pakta Integritas oleh Direksi.

4. *Execution*
Tahapan mengelola dan memantau proses kegiatan bisnis yang dilaksanakan Perusahaan memperhatikan prinsip-prinsip GCG.

5. *Monitor & Learn*
Dalam rangka mengukur kualitas penerapan tata kelola perusahaan, Perusahaan melakukan penilaian atas pelaksanaan GCG setiap tahun, dengan menggunakan standar yang ditetapkan oleh Pemegang Saham. Hasil dari proses ini adalah hasil assessment GCG, baik yang dilakukan oleh assessor independen (pada tahun genap), ataupun secara self assessment (pada tahun ganjil). Perusahaan juga melakukan pengukuran dengan standar yang lebih tinggi yaitu menggunakan *ASEAN Corporate Governance Scorecard* (ACGS) pada tahun 2021.

6. *Test & Adapt*
Pengembangan berkelanjutan atas hasil assessment GCG. Perlu dilakukan continuous improvement dari penerapan GCG yang telah dilakukan dengan melakukan pemutakhiran atas kebijakan tata kelola dan melaksanakan tindak lanjut atas Area of Improvement.

developing needs. In addition, all employees also sign a commitment to comply with the code of conduct every year.

3. Plan the Implementation
This is process of implementing governance by coordinating resources to achieve goals. The result of this process is the determination of governance policy guidelines, including Committee Charters (Audit Committee Charter and Internal Audit Charter), Internal Audit Charter, other policy guidelines determined through the Board of Directors Decisions and signing of the Integrity Pact by the Board of Directors.

4. Execution
The stages of the managing and overseeing business activity process carried out by the Company pay attention to the GCG principles.

5. Monitor & Learn
In the context to measure the quality of the implementation of corporate governance, the Company assessment the GCG implementation every year, using standards set by Shareholders. The result of this process is the result of a GCG assessment, either carried out by an independent assessor (in even years), or by self-assessment (in odd years). The Company also measured using the higher standard, namely the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) in 2021.

6. Test & Adapt
Continuous development of GCG assessment results. It is necessary to continuously improve GCG implementation that has been carried out by updating governance policies and following-up actions on Areas of Improvement.

Sasaran Strategis Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Strategic Objectives

Penerapan tata kelola berkelanjutan diharapkan mampu mendorong efektivitas pencapaian tujuan Perusahaan melalui program strategis Perusahaan dalam menjawab tantangan dan isu strategis di tahun 2021. Perusahaan telah menyusun program-program strategis sebagai arah dan koridor program kerja Perusahaan agar dapat mencapai target. Perusahaan dengan mengacu pada peta bisnis Perusahaan, Green RUPTL 2021-2030, Pemenuhan Bauran EBT 23% pada tahun 2025 dan mendukung komitmen Pemerintah menuju karbon netral di tahun 2060. Selain itu, untuk mendukung monitoring terhadap Program Environment, Social, dan Governance (ESG) maka setiap program

The implementation of sustainable governance was expected to be able to encourage the effectiveness of achieving the Company's goals through the Company's strategic programs in responding to challenges and strategic issues in 2021. The Company prepared strategic programs as directions and corridors for the Company's work program in order to achieve the Company's targets by referring to the Company's business line map, Green Electricity Supply Business Plan (RUPTL) 2021-2030, Fulfilment of 23% NBE Mix in 2025 as well as supports the Government's commitment to be carbon neutral by 2060. In addition, to support monitoring of the Environment, Social, and Governance (ESG) Program,

strategi disandingkan juga kesesuaiannya dengan program ESG. Selanjutnya program strategi disusun meliputi aspek sebagai berikut:

1. Daya Saing Pembangkit;
2. Penyediaan Listrik dengan 3 Prinsip Ketahanan (Security, Affordability, Low Emission);
3. Pengembangan Usaha dan Peningkatan Revenue; dan
4. Holding Sub Holding.

each strategic program is also aligned to suitability with the ESG program. Furthermore, a strategic program is prepared covering the following aspects:

1. Power Plant Competitiveness;
2. Electricity Provision with 3 Resilience Principles (Security, Affordability, Low Emission);
3. Business Development and Increased Revenue; and
4. Holding Sub Holding.

Implementasi Budaya Berkelanjutan
Sustainable Culture Implementation

Perusahaan melakukan identifikasi tujuan jangka panjang Perusahaan dan pengembangan rencana strategis serta pemetaan kekuatan dan kelemahan internal untuk mencapai tujuan PLN NP. Proses tersebut dilakukan untuk dapat menyusun program kerja yang tepat berdasarkan prinsip tata kelola yang baik. Perusahaan secara berkelanjutan melakukan peningkatan penerapan GCG sehingga mampu menyandang predikat sebagai Good Corporate Citizen serta mampu merealisasikan dan mewujudkan upaya pencapaian tujuan perusahaan yang terintegrasi dengan aspek keberlanjutan. PLN NP juga berupaya membangun kesadaran dan kepedulian setiap individu di lingkungan Perusahaan untuk menjalankan praktik GCG yang mengutamakan kelangsungan bisnis Perusahaan dalam jangka panjang dan kepentingan stakeholders.

The Company identifies the long-term goals and develops strategic plans as well as mapping internal strengths and weaknesses to achieve PLN NP goals. This process is carried out to be able to develop appropriate work programs based on good governance principles. The Company continuously improves GCG implementation so as to be able to hold the title of Good Corporate Citizen and to be able to align and realize efforts to achieve the Company goals that are integrated with sustainability aspects. PLN NP also seeks to build awareness and concern for every individual within the Company to carry out GCG practices that prioritize the long-term continuity of the Company's business and the stakeholders' interest.

Program kegiatan yang telah dilakukan PLN NP dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis GCG pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Perpantian susunan Dewan Komisaris dan Direksi serta indaksi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru;
2. Pelaksanaan RUPS untuk pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2023;
3. Penandatanganan Komitmen Sistem Manajemen Anti Penyuapan Direksi PT PLN Nusantara Power;
4. Assessment GCG untuk periode implementasi Tahun 2022 oleh Asessor Independen;
5. Penyusunan Annual Report Tahun 2022;
6. Proses perubahan Peraturan Direksi tentang Penerapan Governance, Risk Management, and Compliance (GRC);
7. Penetapan peraturan Direksi mengenai batasan kewenangan;
8. Pelaksanaan self-assessment GCG Anak Perusahaan PT PLN Nusantara Power untuk periode implementasi tahun 2022;
9. Penetapan kebijakan sistem manajemen terintegrasi PT PLN Nusantara Power;
10. Penetapan dokumen pengelolaan interaksi korporasi PT PLN Nusantara Power dan Anak Perusahaan PT PLN Nusantara Power (Corporate Charter);
11. Penetapan pedoman perencanaan dan penetapan program investasi;

PLN NP carried out the following activity programs in order to encourage the achievement of GCG strategic targets in 2022:

1. Changes in the composition of the Board of Commissioners and Directors as well as the induction of new members of the Board of Commissioners and Directors;
2. GMS Holding to ratify the Company's Annual Budget and Operational Plan for 2023;
3. Signed of the Anti-Bribery Management System Commitment for the Directors of PT PLN Nusantara Power;
4. Assessment for the 2022 implementation period by an Independent Assessor;
5. Preparation of the 2022 Annual Report;
6. Revision process of the Directors' Regulations regarding the Implementation of Governance, Risk Management and Compliance (GRC);
7. Determination of Board of Directors regulations regarding limits of authority;
8. Implementation of the GCG self-assessment of the subsidiary of PT PLN Nusantara Power for the 2022 period;
9. Determination of PT PLN Nusantara Power's integrated management system policy;
10. Determination of corporate interaction management documents for PT PLN Nusantara Power and its subsidiary (Corporate Charter);
11. Determination of planning guidelines and investment programs;

12. Pelaksanaan RUPS untuk persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan tahun 2022;
13. Penetapan kebijakan strategis audit internal;
14. Penetapan perubahan Anggaran Dasar PT PLNSC;
15. Penetapan perubahan nama PT PLN Investasi menjadi PT PLN Nusantara Renewables;
16. Penetapan tata kelola pengembangan bisnis pembangkit listrik;
17. Penetapan penggunaan produk dalam negeri;
18. Adanya persetujuan pendirian Joint Venture Company (JVC) dibawah PT PLN Nusantara Renewables dalam rangka pengembangan Proyek PLTS Kaadlangtorna (Kazda Tersebar) 50 MW untuk IKN;
19. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2024;
20. Penetapan Direksi tentang Rencana Jangka Panjang (RJP) dan Visi Misi Perusahaan Tahun 2024 – 2028;
21. Penetapan perubahan nama PT Rekadaya Elektrika menjadi PT PLN Nusantara Power Construction;
22. Penetapan perubahan nama PT PJB Services menjadi PT PLN Nusantara Power Services;
23. Penetapan peraturan pelaksana tata laksana pengadaan dan penerimaan jasa;
24. Penetapan peraturan tata naskah dinas dan kearsipan;
25. Sosialisasi dan refreshment infrastruktur dan pemahaman penerapan GCG di PT PLN Nusantara Power;
26. Legal Info tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/02/2023, sebagai aturan penggant Permen BUMN No. PER- 01/MBU/2011 dan PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, KEP-101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang Badan Usaha Milik Negara, KEP-103/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, KEP-171/M-PB/MPB/1999 tentang Laporan Manajemen Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, PER-11/MBU/11/2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara, PER-5/MBU/09/2022 tentang manajemen risiko pada BUMN dan beberapa aturan lainnya;
27. Legal info tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/ MBU/03/2023;
28. Review Permen BUMN PER-2/MBU/03/2023 dan penyusunan Draft Board Manual;
29. Review Permen BUMN PER-2/MBU/03/2023 dan penyusunan Draft Board of Directors Manual;
30. Arahan Pemegang Saham untuk melakukanakan self assessment GCG Tahun 2023, dengan menggunakan metode SK-16/S. MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN.

13. GHG Holding to approve the Annual Report and ratify the 2023 Financial Report;
14. Determination of strategic internal audit policies;
14. Determination of changes to PT PLNSC's Articles of Association;
15. Determination of the change of name of PT PJB Investasi to PT PLN Nusantara Renewables;
16. Determination of governance for power plants business development;
17. Determination of the use of domestic products;
18. Approval for the establishment of a Joint Venture Company (JVC) under PT PLN Nusantara Renewables in the context of developing the 50 MW Kaadlangtorna SPP Project (Spread Quota) for IKN;
19. Preparation of Company Annual Budget and Operational Plan for 2024;
20. Approval by the Board of Directors of the Long-term Plan (LRP) and Company Vision and Mission for 2024 – 2028;
21. Determination of the name change of PT Rekadaya Elektrika to PT PLN Nusantara Power Construction;
22. Determination of the change of name of PT PJB Services to PT PLN Nusantara Power Services;
23. Determination of implementing regulations for warehousing management and receipt of services;
24. Determination of regulations for official documents and archives;
25. Socialization and refreshment of infrastructure and understanding of GCG implementation at PT PLN Nusantara Power;
26. Legal Information regarding Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises based on Minister of SOE Regulation No. PER-2/MBU/03/2023, as a replacement regulation for Minister of SOE No. PER- 01/ MBU/2011 and PER-09/MBU/2012 concerning the Implementation of Good Corporate Governance, KEP-101/MBU/2002 concerning the Preparation of Long Term Plans for State-Owned Enterprises, KEP-103/MBU/2002 concerning the Preparation of Work Plans and State-Owned Enterprise Company Budget, KEP-171/M-PGOE/1999 concerning Management Reports of State-Owned Enterprise Companies, PER-11/MBU/11/2020 concerning Management Contracts and Annual Management Contracts of Directors of State-Owned Enterprises, PER-5/MBU/09/2022 concerning risk management in SOE and several other regulations;
27. Legal information regarding SOE Organs and Human Resources based on SOE Ministerial Regulation No. PER-2/MBU/03/2023;
28. Review of SOE Ministerial Regulation PER-2/MBU/03/2023 and the Board Manual preparation;
29. Review of SOE Ministerial Regulation PER-2/MBU/03/2023 and the Board of Directors Manual preparation;
30. Direction for Shareholders to carry out a GCG self assessment in 2023, using the SK-16/S.MBU/2012 method concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in SOE.

Penilaian Implementasi GCG
GCG Implementation Assessment

Implementasi GCG secara berkala dilakukan penilaian dalam rangka mengukur tingkat pemenuhan standar tata kelola perusahaan yang baik di lingkungan Perusahaan. Penilaian implementasi GCG tahun 2021 dilaksanakan oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur selaku Pihak Independen berdasarkan Surat Direktur Utama No. ZA00/0001/1 tanggal 4 Februari 2022 perihal Permohonan sebagai Asessor Independen – Dalam Rangka Assessment GCG Periode 2022 PT Pembangkitan Jawa-Bali dan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur No. PE-05.01/S-576/PW13/4/2022 tanggal 15 Februari 2022 perihal Asesmen GCG pada PT Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB) Periode Tahun 2022. Kriteria yang digunakan dalam penilaian berdasar merujuk pada Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN. Capaian skor dari hasil assessment GCG untuk periode implementasi tahun 2022 sebesar 94,84 dengan klasifikasi "Sangat Baik".

GCG implementation is regularly assessed in order to measure the level of compliance with good corporate governance standards within the Company. PGCG implementation in 2022 was assessed by the Representative of the East Java Province Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) as an Independent Party, based on the Main Director's Letter No. ZA00/0001 dated February 4, 2022, regarding the Application as an Independent Assessor – In the Context of the 2022 GCG Assessment for PT Pembangkitan Jawa-Bali and Letter from the Head of East Java Province BPKP Representative No. PE-05.01/S-576/PW13/4/2022 dated February 15, 2022 regarding GCG Assessment of PT Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB) for the 2022 Period. This refers to the Decree by the Secretary of the Ministry of SOE No. SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in SOE. Achievement of scores from GCG assessment results for the 2022 period achieved 94,842 to a "Very Good" classification.

Penilaian dan evaluasi penerapan GCG untuk periode implementasi tahun 2022 dilakukan secara mandiri (*self assessment*), sesuai dengan Surat Sekretaris Perusahaan PT PLN (Persero) No. 74.02b/MBK.01.01/F0000106/2022 Tanggal 15 Desember 2022 Perihal Pelaksanaan *Self Assessment Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2021. Berdasarkan pelaksanaan *self assessment* yang telah dilaksanakan pada Januari – April 2024, capaian skor dari hasil *self assessment* GCG untuk periode implementasi tahun 2023 sebesar 94,88 dengan klasifikasi "Sangat Baik".

Assessment and evaluation of GCG implementation for the 2022 implementation period was carried out independently (self-assessment) according PT PLN (Persero) Corporate Secretary Letter No. 74.02b/MBK.01.01/F0000106/2022 Dated December 15, 2022, Regarding the Implementation of the 2022 Good Corporate Governance (GCG) Self Assessment. Based on the implementation of the self-assessment which was carried out in January – April 2024, the score achieved from the GCG self-assessment results for the implementation period in 2023 achieved 94,884 with the classification "Very Good".

Skor Penilaian GCG Tahun 2019 - 2023
GCG Assessment Score 2019 - 2023

PLN NP telah melakukan penilaian penerapan GCG sejak tahun 2009. Capaian assessment GCG dalam 5 (lima) tahun terakhir mampu memenuhi target yang ditetapkan dengan memperoleh kualifikasi "Sangat Baik" (nilai di atas 85). Capaian tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pencapaian per aspek penyajian tahun 2023 adalah sebagai berikut:

PLN NP has carried out an assessment of GCG implementation since 2009. GCG assessment achievements in the last 5 (five) years was able to meet the targets set, by obtaining the "Very Good" qualification (score above 85). Achievements in 2023 increased compared to the previous year. Achievements per testing aspect in 2023 are as follows:

Skor Assessment GCG PLN NP Periode 2023
PLN NP GCG Assessment Score for the 2023 Period

No	Aspek Penyajian Testing Aspect	Bobot Weight	Capaian Tahun 2023 Achievements in 2023		Keterangan Information
			Skor Score	% Capaian % Achievements	
1	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Secara Berkelanjutan Commitment to the Sustainable Implementation of Good Corporate Governance	7	6,73	96,20	Sangat Baik Very Good
2	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal Shareholders and GMS/Capital Owners	6	5,84	97,07	Sangat Baik Very Good
3	Dewan Komisaris Board of Commissioners	35	32,46	92,75	Sangat Baik Very Good
4	Direksi Board of Directors	35	34,48	98,50	Sangat Baik Very Good
5	Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency	9	9	100	Sangat Baik Very Good
6	Aspek Lainnya Other Aspects	8	4,39		Sangat Baik Very Good
Skor Keseluruhan Overall Score		100		**94,03**	
Kualifikasi Kualitas Penerapan GCG GCG Implementation Quality Qualification				**Sangat Baik** Very Good	

Pada penilaian penerapan GCG tahun 2023 yang dilakukan secara mandiri (self assessment), menghasilkan beberapa Area of Improvement (AoI) berupa rekomendasi untuk dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas penerapan GCG di tahun selanjutnya, termasuk melakukan proses perbaikan atau tindak lanjut atas Area of Improvement atau rekomendasi yang diberikan oleh asessor independen pada penilaian tahun 2022. Rekomendasi penilaian penerapan GCG tahun 2023 adalah sebagai berikut:

GCG implementation in 2023 which was carried out independently (self-assessment), resulted in several Areas of Improvement (AoI) in the form of recommendations to be followed up in order to improve the quality of GCG implementation in the following year, including carrying out a process of improvement or follow-up on Areas of Improvement or recommendations provided by independent assessors in the 2022 assessment. Recommendations for assessing GCG implementation in 2023 are as follows:

Rekomendasi Hasil Assessment GCG Perusahaan Periode Tahun 2023
Recommendations for Company GCG Assessment Results for the 2023 Period

Aspek Aspect	Rekomendasi Recommendations	
Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Secara Berkelanjutan Commitment to the Sustainable Implementation of Good Corporate Governance	1. Pedoman tata kelola belum dimutakhirkan karena mengikuti timeline yang ditetapkan PLN 2. Pemutakhiran Pedoman Perilaku masih dalam bentuk draft 3. Rekomendasi Act Assessment GCG tahun 2020 sebagian selesai dan sebagian masih dalam proses penyelesaian.	1. The governance guidelines have not been updated since they follow the timeline set by PLN. 2. The updated Code of Conduct is still in draft form. 3. The 2020 Act GCG Assessment recommendations are partly complete and partly still in the process of being finalized.

Aspek Aspect	Rekomendasi Recommendations	
Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal Shareholders and GMS/ Capital Owners	1. Pelantikan Direksi belum didukung dengan Berita Acara Pelantikan 2. Tidak ada keterlapan Pemegang Saham/RUPS mengenai jumlah jabatan Direksi yang dapat dirangkap, dan tidak terkait konflik kepentingan. 3. Penetapan pengangkatan pelantikan Dewan Komisaris belum didukung berita acara pelantikan hanya didukung dengan Berita Acara serah terima jabatan. 4. Anggota Komisaris Independen tidak dinyatakan secara eksplisit dalam SK pengangkatan sekurang-20% dari jumlah seluruh Komisaris. 5. Belum ada aturan yang secara eksplisit menetapkan jumlah maksimal jabatan sebagai Komisaris yang dapat dipegang seorang anggota Komisaris. 6. Pengajuan RJPP kepada Pemegang Saham tanggal 16 November 2020, sedangkan persetujuan oleh Pemegang Saham tanggal 9 November 2020 sehingga melebihi waktu 40 hari. 7. Belum seluruhnya aksi korporasi dilakukan pemaparan terlebih dahulu oleh Direksi. 8. Aksi korporasi tentang Penghapusbukuan ATTB dengan nilai ekonomis diatas 5 tahun yang telah mendapat tanggapan dari Dewan Komisaris sesuai surat No. DK 00/502 tanggal 4 Februari 2022 yg telah disusulkan oleh Direksi, belum memdapatkan persetujuan dari Pemegang Saham. 9. Belum seluruhnya persetujuan aksi korporasi ditentukan tepat waktu sesuai ketentuan yaitu paling lambat 30 (tiga puluh) hari. 10. Belum ada pedoman/sistem Penilaian Kinerja Dewan Komisaris yang memuat sekurang-kurangnya indikator kinerja utama dan kriteria keberhasilan. 11. Realisasi progres pelaksanaan tindak lanjut untuk aspek Pemegang Saham belum seluruhnya dituntaskan/rampu.	1. The inauguration of the Board of Directors has not been supported by the inauguration Minutes. 2. There is no Shareholder/GMS determination regarding the number of Directors' positions that can be held concurrently, if there is no conflict of interest. 3. The determination of the appointment/inauguration of the Board of Commissioners has not been supported by a minute of inauguration, only supported by a Minutes of positions handover. 4. Independent Commissioners are not explicitly stated in the appointment decree as 20% of the total number of Commissioners. 5. There are no regulations that explicitly determine the maximum number of positions as Commissioner that a Commissioner can hold. 6. Submission of the Company's Long Term Plan (LJPP) to Shareholders on November 16, 2020, while ratification by Shareholders on November 9, 2020, so that it exceeds the 40 days period. 7. Not all corporate actions have been presented beforehand by the Board of Directors. 8. Corporate action related to the write off of ATTB with an economic value of more than 5 years which has received a response from the Board of Commissioners in line with letter No. DK 00/502 dated February 4, 2022, which was proposed by the Board of Directors, but has not yet received approval from the Shareholders. 9. Not all corporate action approvals have been given on time according to the provisions, namely no later than 30 (thirty) days. 10. There are no guidelines/system for the Board of Commissioners' Performance Assessment that contains at least key performance indicators and success criteria. 11. The realization of progress in implementing follow-up actions for the Shareholder aspect has not been fully followed-up.
Dewan Komisaris Board of Commissioners	1. Dewan Komisaris telah melaksanakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Dewan Komisaris, tetapi pelaksanaannya belum sesuai dengan yang direncanakan. 2. Penyampaian RKA Dewan Komisaris kepada Direksi untuk dimasukkan sebagai bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) belum tepat waktu. 3. Dewan Komisaris belum mencantumkan rencana pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa dalam RKA Dewan Komisaris tahun 2022. 4. Dewan Komisaris belum memiliki kebijakan pengawasan kepatuhan perusahaan terhadap perjanjian dan komitmen yang dibuat dengan pihak ketiga. 5. Dewan Komisaris melakukan telaah terhadap transaksi atau tindakan Direksi melalui proses pembahasan dan rapat internal Dewan Komisaris dan rapat pengawasan Direksi. Namun, terhadap usulan penempatan wakil PT PLN pada Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi PT PLN belum didapatkan dokumen pembahasan dan pendapat. 6. Belum seluruhnya pemberian otorisasi atau rekomendasi setelah diterimanya dokumen secara lengkap dan penjelasan tertulis secara resmi dari Direksi dilakukan tepat waktu.	1. The Board of Commissioners has implemented a training program in order to improve the competency of the Board of Commissioners members, but its implementation has not been as planned. 2. Submission of the Board of Commissioners' RKA to the Board of Directors for inclusion as part of the Annual Budget and Operational Plan (ABOP) was not timely. 3. The Board of Commissioner has not included a plan for monitoring the procurement of goods and services in the Board of Commissioners' RKA for 2022. 4. The Board of Commissioner does not yet have a policy for monitoring the Company compliance with agreements and commitments made with the third parties. 5. The Board of Commissioner reviews transactions or actions of the Board of Directors through a discussion process at internal meetings of the Board of Commissioners and supervisory meetings of the Board of Directors. However, regarding the proposal to place PT PLN representatives in Subsidiaries and Affiliated Companies of PT PLN, no discussion and assessment documents were obtained. 6. Not all authorizations or recommendations have been given after receiving complete documents and official written explanations from the Board of Directors in a timely manner.

Aspek Aspect	Rekomendasi Recommendations	
	7. Dewan Komisaris melalui surat No. DK0145/03 tanggal 10 Mei 2022, telah mengusulkan nama KAP yang akan mengaudit laporan keuangan PT NJB beserta alasan pencalonan tersebut, tetapi belum mencantumkan besarnya honorarium KAP tersebut (bersifat kualitatif).	7. Board of Commissioners through letter No. DK0145/03 dated May 10, 2022, has proposed the name of the PAF that will audit PT NJB's financial statements along with the reasons for the nomination, but has not included the amount of the PAF's honorarium (qualitative in nature).
	8. Dewan Komisaris belum melakukan telaah terhadap laporan DCG yang dungkapkan dalam laporan tahunan.	8. The Board of Commissioners had not reviewed the DCG report disclosed in the annual report.
	9. Dewan Komisaris belum memiliki kebijakan mengenai pengukuran dan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris.	9. The Board of Commissioners did not yet have a policy regarding measurement and assessment of the performance of the Board of Commissioners.
	10. BOC Manual terhadap tata tertib Rapat Dewan Komisaris belum memuat: a. Pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya; b. Pembahasan/telaah atas usulan Direksi dan arahan/keputusan RUPS terkait dengan usulan Direksi.	10. BOC Manual regarding the rules and regulations for Board of Commissioners Meetings did not yet contain the following: a. Follow-up evaluations of the results of the previous meetings; b. Discussion/review for the Board of Directors' proposals and GMS other bons/decisions related to the Board of Directors' proposals.
	11. Belum seluruhnya dalam risalah rapat mencantumkan alasan Dewan Komisaris yang berhalangan hadir.	11. Not all of the meeting minutes included the reasons why the Board of Commissioners were unable to attend.
Direksi Board of Directors	1. SOP pengadaan barang dan jasa belum sepenuhnya dilaksanakan secara efektif karena masih ditemui adanya temuan audit.	1. SOP for the procurement of goods and services had not been fully implemented effectively because there are still audit findings.
	2. Direksi menyampaikan rancangan RKAP kepada Dewan Komisaris sesuai Surat 2A0301/2021 tanggal 24 Januari 2022 tentang Penyampaian Usulan RKAP Tahun 2022, sehingga rancangan tersebut disampaikan sebelum tanggal 15 September 2021.	2. The Board of Directors submitted the ABCP draft to the Board of Commissioners in accordance with Letter 2A0301/2021 dated January 24, 2022, concerning Submission of Proposed ABCP for 2022, the draft should have been submitted before September 15, 2021.
	3. Nilai total HPS bervariasi, bisa bersifat rahasia/tertutup maupun terbuka tergantung jenis pengadaan barang/jasa yang dilakukan, namun sebagian besar HPS tertutup.	3. The total HPS value varies, it can be secret/closed or open depending on the type of procurement of goods/services carried out, but most HPS are closed.
	4. Terdapat temuan audit internal atas pengadaan barang dan jasa sebanyak 16 dari 39 unit yang diperiksa.	4. There were internal audit findings regarding the procurement of goods and services in 16 of the 39 units inspected.
	5. Pedoman tentang gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas penghasilan Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Afiliasi masih berupa draft.	5. Guidelines regarding salaries/honoraria, allowances and income facilities for Directors and Commissioners of Subsidiaries/Affiliated Companies are still in draft form.
	6. Perusahaan mampu memenuhi harapan Pemegang Saham melalui pencapaian target yang telah disepakati. Namun: a. pertumbuhan modal bersih perusahaan (*growth in the net worth*) selama 3 (tiga) tahun terakhir belum konsisten; b. dividen selama 3 tahun terakhir terjadi secara fluktuasi; c. tren DPS untuk kurun waktu 3 tahun terakhir belum konsisten.	6. The Company was able to meet Shareholders' expectations by achieving agreed targets. However: a. The Company's net capital growth (growth in the net worth) for the last 3 (three) years were not yet consistent; b. dividends over the last 3 years had fluctuated; c. The DPS trend for the last 3 years were not been consistent.
	7. Direksi wajib menyosialisasikan RKAP kepada seluruh karyawan perusahaan.	7. The Board of Directors is obliged to socialize the ABCP to all company employees.
Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency	1. Dalam Annual Report 2021 terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama mengenai komitmen perusahaan terhadap perlindungan konsumen. Tidak tersajasi informasi terkait biaya yang telah dikeluarkan, hanya ada anggaran saja tanpa ada realisasi.	1. The 2021 Annual Report is related to corporate social responsibility, especially regarding the Company's commitment to the consumer protection. There is no information regarding the costs that have been incurred, there is only a budget without any realization.
Aspek Lainnya Other Aspects	-	-

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Penilaian GCG

Follow-up on GCG Assessment Results Recommendations

Rekomendasi dari Area of Improvement (AoI) hasil penilaian tahun 2022 telah dilaksanakan pada tahun 2023 dan secara berkelanjutan dilakukan proses monitoring atas tindak lanjut pelaksanaan AoI hingga saat ini. PLN NP melakukan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi tersebut sebagai upaya perbaikan pelaksanaan GCG di lingkungan Perusahaan. Tindak lanjut rekomendasi atas hasil penilaian tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Recommendations from The Area of Improvement (AoI) results of the 2022 assessment were implemented in 2023 and a continuous monitoring process is carried out on the follow-up to the completion of the AoI to date. PLN monitors the follow-up of these recommendations as an effort to improve GCG implementation within the Company. Follow-up recommendations for the 2022 assessment results are as follows:

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Assessment GCG Periode Tahun 2022

Follow-up to Recommendations on GCG Assessment Results for the 2022 Period

No	Rekomendasi Recommendations	Tindak Lanjut Follow-up	
ASPEK 1 : KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK SECARA BERKELANJUTAN **ASPECT 1: COMMITMENT TO THE SUSTAINABLE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE**			
1	Pedoman tata kelola belum disesuaikan karena mengikuti timeline yang ditetapkan PLN. The governance guidelines had not been updated since they follow the timeline set by PLN.	1. Terdapat Perubahan PER-05/MBU/04/2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada BUMN menjadi PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, sekaligus mencabut PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN. 2. Pedoman tata kelola akan dilakukan disesuaikan dan penyesuaian dengan ketentuan yang baru. 3. Sedang dilakukan proses pengadaan jasa konsultan penyusunan pedoman tata kelola.	1. There was a change in PER-05/MBU/04/2022 concerning the Implementation of Risk Management in SOE to PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, while simultaneously revoked PER-01/MBU/2011 concerning Implementation of Good Corporate Governance in SOE. 2. Governance guidelines will be updated to reflect new provisions. 3. Currently in the procuring consultant services for the preparation of governance guidelines.
2	Pemutakhiran Pedoman Perilaku masih dalam bentuk draft. The updated Code of Conduct is still in draft form.	1. Standar Etika Perusahaan (Code of Conduct) tahun 2019 berisi pada Pedoman Perilaku dengan berpedoman pada tata nilai dan perilaku utama pada PJB. 2. Standar Etika Perusahaan akan dilakukan pemutakhiran dengan menyesuaikan pada core value dan panduan perilaku pada tata nilai perusahaan. 3. Sedang dilakukan proses pengadaan jasa konsultan penyusunan pedoman perilaku.	1. 2019 Corporate Code of Conduct contain guideline by PJB's main values and behavior. 2. The Company's Code of Conduct will be updated by adapting to the core values and behavioral guidelines of the Company's values. 3. Currently in the procuring consultant services for the preparation of governance guidelines.
3	Rekomendasi AoI Assessment GCG tahun 2020 sebagian selesai dan sebagian masih dalam proses penyelesaian. 2020 AoI GCG Assessment recommendations are partly complete and partly still in the process of being finalized.	Area of Improvement Assessment GCG tahun 2020 akan dilakukan identifikasi kembali untuk update progres tindak lanjut dan update nya.	The 2020 GCG Area of Improvement Assessment will be re-identified to update follow-up progress and updates.
ASPEK 2 : PEMEGANG SAHAM DAN RUPS/PEMILIK MODAL : Proses tindak lanjut atas hal ini sedang dalam tahap pembahasan di Pemegang Saham **ASPECT 2: SHAREHOLDERS AND GMS/CAPITAL OWNERS: The follow-up process on this matter is currently in the discussion stage with the Shareholders**			
1	Pelantikan Direksi belum didukung dengan Berita Acara Pelantikan. The inauguration of the Board of Directors has not been supported by the inauguration Minutes.	Kewenangan Pemegang Saham.	Shareholders Authority.

No	Rekomendasi Recommendations	Tindak Lanjut Follow-up	
2	Tidak ada ketetapan Pemegang Saham/RUPS mengenai jumlah jabatan Direksi yang dapat dirangkap, bila tidak terjadi konflik kepentingan. There is no Shareholder/GMS determination regarding the number of Directors' positions that can be held concurrently, if there is no conflict of interest.	Kewenangan Pemegang Saham	Shareholders Authority
3	Penetapan pengangkatan/pelantikan Dewan Komisaris belum didukung berita acara pelantikan hanya didukung dengan Berita Acara serah terima jabatan. The determination of the appointment/ inauguration of the Board of Commissioners has not been supported by a minute of inauguration, only supported by a Minute of positions handover.	Kewenangan Pemegang Saham	Shareholders Authority
4	Anggota Komisaris Independen tidak dinyatakan secara eksplisit dalam SK pengangkatan sebanyak 70% dari jumlah seluruh Komisaris. Independent Commissioners are not explicitly stated in the appointment decree as 70% of the total number of Commissioners.	Kewenangan Pemegang Saham	Shareholders Authority
5	Belum ada aturan yang secara eksplisit menetapkan jumlah maksimal jabatan sebagai Komisaris yang dapat dipegang seorang anggota Komisaris. There are no regulations that explicitly determine the maximum number of positions as Commissioners that a Commissioner can hold.	Kewenangan Pemegang Saham	Shareholders Authority
6	Pengajuan RJPP kepada Pemegang Saham tanggal 16 November 2020, persetujuan pengesahan oleh Pemegang Saham tanggal 9 November 2021 sehingga melebihi waktu 60 hari dari pengajuan oleh Direksi. Submission of the the Company's Long Term Plan (RJPP) to Shareholders on November 16 2020, while ratification by Shareholders on November 9 2021 so that it exceeds the 60 days period from submission by the Board of Directors.	Kewenangan Pemegang Saham	Shareholders Authority
7	Belum seluruhnya aksi korporasi dilakukan pemaparan terlebih dahulu oleh Direksi. Not all corporate actions have been presented beforehand by the Board of Directors.	Kewenangan Pemegang Saham	Shareholders Authority
8	Aksi korporasi berbasis Penghapusbukuan ATTB dengan nilai ekonomis diatas 5 tahun yang telah mendapat tanggapan dari Dewan Komisaris sesuai surat No. DK 00/7/D3 tanggal 4 Februari 2022 yg telah disusulkan oleh Direksi, tetapi belum mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham. Corporate action related to write-off of ATTB with an economic value of more than 5 years which has received a response from the Board of Commissioners in accordance with letter No. DK 00/7/D3 dated February 4, 2022, which has been proposed by the Board of Directors, but has not yet received approval from the Shareholders.	Kewenangan Pemegang Saham	Shareholders Authority
9	Belum seluruhnya persetujuan aksi korporasi diberikan tepat waktu sesuai ketentuan yaitu paling lambat 30 (tiga puluh) hari. Not all corporate action approvals have been given on time according to the provisions, namely no later than 30 (thirty) days.	Kewenangan Pemegang Saham	Shareholders Authority

No	Rekomendasi Recommendations	Tindak Lanjut Follow-up	
10	Belum ada pedoman/sistem Penilaian Kinerja Dewan Komisaris yang memuat sebuang-kurangnya indikator kinerja utama dan criteria keberhasilan. There are no guidelines/system for the Board of Commissioners' Performance Assessment that contains at least key performance indicators and success criteria.	Kementerian Pemegang Saham.	Shareholders Authority.
11	Realisasi progres pelaksanaan tindak lanjut untuk aspek Pemegang Saham belum seluruhnya dimaksimalkan. The realization of progress in implementing follow-up actions for the Shareholder aspect has not been fully followed up.	Kementerian Pemegang Saham.	Shareholders Authority.
ASPEK 3 - DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS ASPECT 3: BOARD OF COMMISSIONERS/SUPERVISORY BOARD			
1	Dewan Komisaris telah melaksanakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Dewan Komisaris, tetapi pelaksanaannya belum sesuai dengan yang direncanakan. The Board of Commissioners has implemented a training program in order to improve the competency of members of the Board of Commissioners, but its implementation has not been as planned.	Sekretaris Dewan Komisaris akan mengajukan usulan pelatihan untuk Dewan Komisaris.	The Secretary of the Board of Commissioners will submit training proposals for the Board of Commissioners.
2	Penyampaian RKA Dewan Komisaris kepada Direksi untuk dimasukkan sebagai bagian dari RKAP belum tepat waktu. Submission of the Board of Commissioners' RKA to the Board of Directors for inclusion as part of the ABCP was not timely.	Sekretaris Dewan Komisaris menyampaikan Rencana Kerja Dewan Komisaris kepada Sekretaris Perusahaan.	The Secretary of the Board of Commissioners submits the Work Plan of the Board of Commissioners to the Corporate Secretary.
3	Dewan Komisaris belum mencantumkan rencana pengadaan terhadap pengadaan barang dan jasa dalam RKA Dewan Komisaris tahun 2022. The Board of Commissioners has not included a plan for monitoring the procurement of goods and services in the Board of Commissioners' RKA for 2022.	Dewan Komisaris akan mencantumkan rencana pengadaan terhadap pengadaan barang dan jasa pada RKAP selanjutnya.	The Board of Commissioners will include a monitoring plan for the procurement of goods and services in the next ABCP.
4	Dewan Komisaris belum memiliki kebijakan pengawasan kepatuhan perusahaan terhadap perjanjian dan komitmen yang dibuat dengan pihak ketiga. The Board of Commissioners does not yet have a policy for monitoring the Company compliance with agreements and commitments made with the third parties.	1. Telah tercantum pada BOC Manual. 2. Sedang dilakukan proses pengadaan jasa konsultan penyusunan BOC Manual.	1. It has been stated in the BOC Manual. 2. Currently in the process of procuring consultant services for preparing the BOC Manual.
5	Dewan Komisaris melakukan telaah terhadap transaksi atau tindakan Direksi melalui proses pembahasan dan rapat internal Dewan Komisaris dan rapat pengawasan Direksi. Namun, terhadap usulan penempatan wakil PT PLN pada Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi PT PLN belum didapatkan dokumen pembahasan dan penilaian. The Board of Commissioners reviews transactions or actions of the Board of Directors through a discussion process at internal meetings of the Board of Commissioners and supervisory meetings of the Board of Directors. However, regarding the proposal to place PT PLN representatives in Subsidiaries and Affiliated Companies of PT PLN, no discussion and assessment documents have been obtained.	1. Telah dilaksanakan pembahasan dan evaluasi terhadap usulan wakil perusahaan pada pengurus anak perusahaan. 2. Tanggapan Dewan dikampaikan melalui surat No. 2202/DS/DSR Tanggal 30 November 2023 Perihal Tanggapan Tertulis Dewan Komisaris Terhadap Usulan Penempatan Wakil PT PLN NP Pada Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi PT PLN NP.	1. Discussions and evaluations have been carried out regarding proposals from the Company's representatives to the subsidiary management. 2. The Board of Commissioners' response was conveyed via letter No. 2202/DS/DSR Dated November 30, 2023, Regarding the Written Response of the Board of Commissioners regarding the Proposal to Place PT PLN NP's Representatives in Subsidiaries and Affiliated Companies of PT PLN NP.

No	Rekomendasi Recommendations	Tindak Lanjut Follow-up	
6	Belum seluruhnya pemberian otorisasi atau rekomendasi setelah diterimanya dokumen secara lengkap dan penjelasan tertulis secara resmi dari Direksi dilakukan tepat waktu. Not all authorizations or recommendations have been given after receiving complete documents and official written explanations from the Board of Directors in a timely manner.	Penyesuaian dan pemutakhiran BOC Manual.	Manual BOC adjustments and updates.
7	Dewan Komisaris melalui surat No. 003/HK03/2022 tanggal 10 Mei 2022, telah mengusulkan nama KAP yang akan mengaudit laporan keuangan PT PLN beserta alasan pencalonan tersebut, tetapi belum mencantumkan besarnya honorarium KAP tersebut (bersifat kualitatif). The Board of Commissioners through letter No. 003/HK03/2022 dated May 10, 2022, has proposed the name of the PAF that will audit PT PLN's financial statements along with the reasons for the nomination, but has not included the amount of the PAF's honorarium (qualitative in nature).	1. Persetujuan KAP sudah disampaikan melalui surat No. 2102/280100 Tanggal 6 Juni 2022 Perihal Usulan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Laporan Keuangan PT PLN Nusantara Power serta Anak Perusahaan Tahun Buku 2022; 2. Nilai KAP disesuai sesuai dengan hasil negosiasi/nilai kontrak Holding dengan KAP terpilih.	1. PAF's approval has been conveyed via letter No. 2102/280100 Dated June 6, 2022, Regarding Proposed Appointment of a Public Accounting Firm (PAF) to Audit the Financial Statements of PT PLN Nusantara Power and Subsidiaries for the 2022 Financial Year; 2. PAF's honorarium is approved in accordance with the results of negotiations/holding contract value with the selected PAF.
8	Dewan Komisaris belum melakukan telaah terhadap laporan GCG yang dungkapkan dalam laporan tahunan. The Board of Commissioners has not reviewed the GCG report disclosed in the annual report.	Telaah terhadap Laporan GCG pada Laporan Tahunan.	Review the GCG Report in the Annual Report.
9	Dewan Komisaris belum memiliki kebijakan mengenai pengukuran dan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris. The Board of Commissioners does not yet have a policy regarding measurement and assessment of the Board of Commissioners performance.	1. Akan disusun Kriteria penilaian kinerja Dekom; 2. Akan disusun SK Dekom Perihal Penilaian Kinerja Dekom.	1. BOC performance assessment criteria will be prepared; 2. A Board of Commissioners Decree will be prepared regarding the Board of Commissioners Performance Assessment.
10	BOC Manual terhadap tata tertib Rapat Dewan Komisaris belum memuat: a. Pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya; b. Pembahasan telaah atas usulan Direksi dan analisa/keputusan RUPS terkait dengan usulan Direksi. BOC Manual regarding the rules and regulations for Board of Commissioners Meetings does not yet contain the following: a. Follow-up evaluations of the results of the previous meetings; b. Discussion/review of the Board of Directors' proposals and GMS directors/decisions related to the Board of Directors' proposals.	1. Pembahasan Evaluasi dan Update BOC Manual, bahwa setiap RDD ada agenda pembahasan evaluasi hasil rapat sebelumnya. 2. Pembahasan Evaluasi hasil rapat sebelumnya telah dilaksanakan sejak RDD Juni 2022; 3. Sedang dilakukan proses pengadaan jasa konsultan penyusunan BOC Manual.	1. Discussion of Evaluation and Update of the BOC Manual, that each RDD has an agenda for discussing the evaluation of the previous meeting results; 2. Discussion Evaluation of the results of the previous meeting has been carried out since the RDD on June 2022; 3. Currently in process of procuring consultant services for preparing the BOC Manual.
11	Belum seluruhnya dalam telah rapat mencantumkan alasan Dewan Komisaris yang berhalangan hadir. Not all of the meeting minutes include the reasons why the Board of Commissioners were unable to attend.	Risalah Rapat telah mencantumkan alasan Dewan Komisaris yang berhalangan hadir.	The minutes of the meeting included the reasons why the Board of Commissioners were unable to attend.
ASPEK 4 : DIREKSI **ASPECT 4: BOARD OF DIRECTORS**			
1	SOP pengadaan barang dan jasa belum sepenuhnya dilaksanakan secara efektif karena masih dijumpai adanya temuan audit. SOP for the procurement of goods and services has not been fully implemented effectively since there are still audit findings.	SDOM melakukan awareness atau sosialisasi terhadap SOP Pengadaan barang dan jasa yang berlaku.	SDOM carries out awareness or re-socialization of applicable SOPs for the procurement of goods and services.

No	Rekomendasi Recommendations	Tindak Lanjut Follow-up	
3	Direksi menyampaikan rancangan RKAP kepada Dewan Komisaris sesuai Surat ZA0003571 tanggal 24 Januari 2022 tentang Penyampaian Usulan RKAP Tahun 2022, sehingga rencangan tersebut disampaikan sebelum tanggal 15 September 2021. The Board of Directors submitted the ABCP draft to the Board of Commissioners in accordance with letter ZA0003571 dated January 24, 2022 concerning Submission of Proposed ABCP for 2022, the draft should have been submitted before September 15, 2021.	1. Direksi menyampaikan Rancangan RKAP 2023 kepada Dewan Komisaris pada 31 Oktober 2022 dan menyampaikan Rancangan RKAP 2024 kepada Dewan Komisaris pada 31 Oktober 2023; 2. Direksi menyampaikan Rancangan RKAP 2023 kepada RUPS pada 31 Oktober 2022.	1. The Board of Directors submitted the 2023 ABCP Draft to the Board of Commissioners on October 31, 2022 and submitted the 2024 ABCP Draft to the Board of Commissioners on October 31, 2023; 2. The Board of Directors submitted the 2023 ABCP Draft to the GMS on October 31, 2022.
3	Nilai total HPS bervariasi, bisa bersifat rahasia/tertutup maupun terbuka tergantung jenis pengadaan barang/jasa yang dilakukan, namun sebagian besar HPS tertutup. The total HPS value varies, it can be secret/closed or open depending on the type of procurement of goods/services carried out, but most HPS are closed.	1. Aturan HPS telah sesuai dengan Peraturan Direksi PLN NP tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa. 2. Sudah dilakukan Refreshment terkait HPS pada ajang Forum Pengadaan 2023. 3. Adanya sosialisasi peraturan Direksi PT PLN No.0018/P/DIR/2023 tentang Kebijakan Strategis Pengadaan Barang/Jasa di PLN Unitlinduk Padang pada 31 Agustus 2023. 4. Akan dilakukan ratifikasi peraturan Direksi PT PLN No.0018/P/DIR/2023 tentang Kebijakan Strategis Pengadaan Barang/Jasa (Tahun 2024).	1. The HPS rules are in accordance with the PLN NP Board of Directors Regulations regarding Guidelines for Procurement of Goods/Services; 2. Refreshment regarding HPS has been carried out during the 2023 Procurement Forum; 3. There was socialization of PT PLN Directors' regulations No.0018/P/DIR/2023 concerning Strategic Policy for Procurement of Goods/Services at PLN Unitlinduk Padang on August 31, 2023; 4. There will be ratification of PT PLN Board of Directors regulation No.0018/P/DIR/2023 concerning Strategic Policy for Procurement of Goods/Services (2024).
4	Terdapat temuan audit internal atas pengadaan barang dan jasa sebanyak 16 dari 28 unit yang diperiksa. There were internal audit findings regarding the procurement of goods and services in 16 of the 28 units inspected.	SPI memastikan Auditee menindaklanjuti AoI terkait pengadaan barang dan jasa atas Hasil Audit 2021 dan 2022 sesuai dengan due date yang disepakati.	SPI ensures that the Auditee follows up on the AoI regarding the procurement of goods and services based on the 2021 and 2022 Audit Results following the agreed due date.
5	Pedoman tentang gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas penghasilan Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Afiliasi masih berupa draft. Guidelines regarding salaries/honoraria, allowances and income facilities for Directors and Commissioners of Subsidiaries/Affiliated Companies are still in draft form.	1. Penyesuaian draft Peraturan Direksi Pedoman Penetapan Remuneras Direksi dan Dewan Komisaris AP PT PLN NP dengan Permen BUMN terbaru yaitu Permen BUMN 3 tahun 2023 tentang Organ & SDM BUMN. 2. Proses penyelesaian Draft Produk Hukum Pedoman Penetapan Remuneras Direksi dan Dewan Komisaris AP PT PLN NP.	1. Adjustment of the draft Board of Directors Regulations on Guidelines for Determining Remuneration for Directors and Board of Commissioners of AP PT PLN NP with the latest SOE Ministerial Regulation, namely SOE Ministerial Regulation 3 of 2023 concerning SOE Organs & Human Resources. 2. Process of refining Draft Legal Product Guidelines for Determining Remuneration for Directors and Board of Commissioners of AP PT PLN NP.

No	Rekomendasi Recommendations	Tindak Lanjut Follow-up	
6	Perusahaan mampu memenuhi harapan Pemegang Saham melalui pencapain target yang telah disepakati. Namun: a. pertumbuhan modal bersih perusahaan (growth in the network) selama 3 (tiga) tahun terakhir belum konsisten; b. dividen selama 3 tahun terakhir terjadi secara fluktuasi; c. tren EPS untuk kurun waktu 3 tahun terakhir belum konsisten. The Company is able to meet Shareholders' expectations by achieving agreed targets. However: a. the Company's net capital growth (growth in the network) over the last 3 (three) years was not consistent; b. Dividends over the last 3 years have fluctuated; c. The EPS trend for the last 3 years was not consistent.	1. Aksi korporasi HSH 1 Jan 2023 memberikan dampak pada pertumbuhan modal perusahaan di tahun 2023 ini, yaitu naik menjadi sebesar Rp154 triliun. Naiknya pertumbuhan modal tersebut akan menyesuaikan kebijakan bisnis dan merangkangkan rencana strategis jangka panjang untuk meningkatkan stabilitas pertumbuhan modal bersih. 2. Naiknya modal di tahun 2023 akan menaikkan dana cadangan perusahaan juga, yaitu perusahaan perlu mencadangkan dana sebesar 20% dari modal perusahaan dan dengan adanya tambahan aset HSH akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan sehingga perusahaan akan mengoptimalkan pembagian laba yang dipersoleh. 3. Naiknya modal di tahun 2023 juga menaikkan lembar saham perusahaan dari sebelumnya tersdapat 6 juta lembar saham menjadi 308 juta lembar saham. Perusahaan akan mengoptimalkan tren pertumbuhan EPS dari laba yang dipersoleh.	1. HSH's corporate action on January 1, 2023 had an impact on the Company's capital growth in 2023, which increased to Rp154 trillion. The increase in capital growth will adjust business policies and develop long-term strategic plans to increase the stability of net capital growth. 2. The increase in capital in 2023 will also increase the company's reserve funds, that is, the company needs to reserve funds equal to 20% of the company's capital and with additional HSH assets it will affect the Company's financial performance so that the Company will optimize the distribution of profits earned. 3. The increase in capital in 2023 will also increase the Company's shares from previously 6 million shares to 308 million shares. The Company will optimize the EPS growth trend from the profit obtained.
ASPEK 5 : PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI **ASPECT 5: INFORMATION DISCLOSURE AND TRANSPARENCY**			
1	Dalam Annual Report 2021 terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama mengenai komitmen perusahaan terhadap perlindungan konsumen. Tidak terdapat informasi terkait biaya yang telah dikeluarkan, hanya ada anggaran saja tanpa ada realisasi. The 2021 Annual Report is related to corporate social responsibility, especially regarding the company's commitment to consumer protection. There is no information regarding the costs that have been incurred, there is only a budget without any realization.	Telah dilakukan evaluasi dan perbaikan dalam penyusunan Annual Report 2022.	Evaluation and improvements had been carried out in the preparation of the 2022 Annual Report.

Penilaian GCG Berdasarkan ASEAN *Corporate Governance Scorecard*

GCG Assessment Based on the ASEAN Corporate Governance Scorecard

Sebagai wujud komitmen untuk senantiasa meningkatkan standar implementasi tata kelola perusahaan, PT PLN Nusantara Power juga melakukan pengukuran/penilaian atas praktek tata kelola berdasarkan ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) pada tahun 2023.

As a commitment to continuously improving the implementation standards of corporate governance, PT PLN Nusantara Power also measured/assessed the governance practices based on the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) in 2023.

Komponen penilaian ASEAN CG Scorecard dikelompokkan ke dalam 2 (dua) tingkat sebagai berikut:

1. Tingkat 1
   Terdiri dari 5 (lima) prinsip yaitu Hak-Hak Pemegang Saham, Perlakuan Setara terhadap Pemegang Saham, Peran Pemangku Kepentingan, Pengungkapan dan Transparansi, serta Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris.

The ASEAN CG Scorecard assessment components are grouped into 2 (two) levels as follows:

1. Level 1
   Consists of 5 (five) principles, namely the Shareholders Rights, Equal Treatment of the Shareholders, Role of the Stakeholders, Disclosure and Transparency, and Responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners.

1. Tingkat 3

   Terdiri dari bonus dan penalti

   Hasil penilaian GCG PLN NP berdasarkan ASEAN CG Scorecard mencapai skor sebesar 86,55. Hal ini mengindikasi bahwa kinerja tingkat kepatuhan PLN NP termasuk dalam predikat "Good" atau Level 3 (80-89,99), yakni praktik GCG yang dilakukan perusahaan sudah mengadopsi sebagian standar internasional. Berikut adalah rincian skor dari masing-masing komponen scorecard

1. Level 3

   Consists of bonuses and penalties

   The results of the PLN NP GCG assessment based on the ASEAN CG Scorecard reached a score of 86.55. This shows that PLN NP compliance level performance is included in the predicate "Good" or Level 3 (80-89,99), namely that the GCG practices carried out by the company have adopted some international standards. The following is a breakdown of the scores for each scorecard component:

Hasil Penilaian ASEAN CG Scorecard
Result of ASEAN CG Scorecard

Prinsip Penilaian ACGS ACGS Scoring Principles	Skor Score
Prinsip A - Hak-Hak Pemegang Saham Principle A - The Shareholders Rights	3,00
Prinsip B - Perlakuan Setara Terhadap Pemegang Saham Principle B - Equal Treatment of the Shareholders	3,00
Prinsip C - Peran Pemangku Kepentingan Principle C - Role of the Stakeholders	15,69
Prinsip D - Pengungkapan dan Transparansi Principle D - Disclosure and Transparency	24,80
Prinsip E - Tanggung Jawab Dewan Komisaris Principle E - Responsibility of the Board of Commissioners	33,97
Bonus/Penalti Bonus/Penalty	4,00
Skor Total Total Score	**86,55**

Penerapan atas Pedoman Governansi Perusahaan
Implementation of Company Governance Guidelines

Sebagai acuan best practices dalam rangka mendorong kualitas penerapan tata kelola perusahaan yang baik, PLN NP mengadopsi standar penerapan tata kelola perusahaan yang baik untuk beberapa aspek yang relevan dengan Perusahaan diantaranya ASEAN Corporate Governance Scorecard, Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia. Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang dijabarkan lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Selain itu, Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi tahun 2021 sebagai pemutakhiran atas pedoman GCG yang diterbitkan sebelumnya. PLN NP telah memetakan prinsip dan rekomendasi berdasarkan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia yang telah dijalankan Perusahaan adalah sebagai berikut:

As a reference for best practices in order to encourage the quality of implementing good corporate governance, PLN NP adopts standards for implementing good corporate governance for several aspects relevant to the Company, including the ASEAN Corporate Governance Scorecard, Public Company Governance Guidelines and General Guidelines for Indonesian Corporate Governance. Public Company Governance Guidelines refer to the Financial Services Authority (FSA) Regulation No. 21/POJK.04/2015 concerning the Implementation of Public Company Governance Guidelines which are further explained in the Financial Services Authority (FSA) Circular No.32/SEOJK.04/ 2015 concerning Public Company Governance Guidelines. In addition, General Guidelines for Indonesian Corporate Governance were published by the National Committee for Governance Policy in 2021 as an update to the previously published GCG guidelines. PLN NP has mapped out the principles and recommendations based on the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance which have been implemented by the Company as follows:

Penerapan Prinsip dan Rekomendasi Pedoman Governansi Perusahaan
Implementation of Principles and Recommendations for Corporate Governance Guidelines

Prinsip 1. Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris
Principle 1. Roles and Responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners

1.1. Peran dan Tanggung Jawab Direksi
1.1. Roles and Responsibilities of the Board of Directors

	Rekomendasi Recommendation	Pemenuhan Fulfillment	
1.1.1.	Untuk mencapai penciptaan nilai yang berkelanjutan, Direksi menjalankan peran kepemimpinannya dan berupaya mencapai hasil governansi sebagai berikut: a. berdaya saing dan berfokus ke kinerja jangka panjang; b. beretika dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis; c. berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan; serta d. berkemampuan dalam bertahan dan berlumbuh (corporate resilience). To achieve sustainable value creation, the Board of Directors carries out its leadership role and strives to achieve the following governance results: a. competitive and focused on long-term performance; b. ethical and responsible in running business; c. contributing positively to the society and environment; as well as d. ability to survive and grow (corporate resilience).	a. Direksi telah menyusun RJPP sebagai grand design dan tujuan jangka panjang Perusahaan. b. Direksi telah menyusun pedoman perilaku yang berisi mengenai etika dalam menjalankan bisnis. Direksi telah menyusun struktur organisasi serta seluruh panduan dan pedoman atau SOP yang mengatur seluruh kepemimpinan Perusahaan. c. Direksi telah melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung keberlanjutan operasi perusahaan. Perusahaan memiliki kebijakan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan. d. Direksi telah mengidentifikasi value creation mapping sebagai perusahaan pembangkit. Sebagai kemampuan agility menghadapi tantangan dan corporate resilience, perusahaan telah menyusun program pengembangan pembangkit dan beyond kWh.	a. The Board of Directors prepared the Company's Long Term Plan (RJPP) as the Company's grand design and long-term goal. b. The Board of Directors prepared the code of conduct containing ethics in running a business. The Board of Directors prepared an organizational structure as well as all regulations and guidelines or SOP that regulate all Company management. c. The Board of Directors implemented corporate social responsibility to support the operations sustainability of the Company. The Company has a policy regarding corporate social and environmental responsibility. d. The Board of Directors identified value creation mapping as a power plant company. As an agility capability to face challenges and corporate resilience, the Company developed a generation and beyond kWh development program.
1.1.2.	Direksi harus memastikan bahwa misi, visi, tujuan, sasaran, strategi, dan rencana tahunan dan jangka menengah korporasi konsisten dengan tujuan jangka panjang, dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi secara efektif. The Board of Directors is required to ensure that the corporation's mission, vision, goals, objectives, strategies, and annual and medium-term plans are consistent with long-term goals, by utilizing innovation and technology effectively.	Direksi telah menyusun visi misi, sasaran, strategi, rencana jangka panjang (RJPP) dan rencana tahunan (RKAP).	The Board of Directors prepared a vision and mission, targets, strategies, long-term plans (RJPP), and annual budget and operational plans (ARCP).
1.1.3.	Direksi memastikan bahwa korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku. The Board of Directors ensures that the corporation implements appropriate and effective risk management and internal control systems that are in line with the corporate vision, mission, goals, objectives, and strategies and comply with the applicable laws, regulations, and standards.	Direksi menetapkan aturan dan pedoman penerapan manajemen risiko di Perusahaan melalui Peraturan Direksi tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.	The Board of Directors established rules and guidelines for implementing risk management in the Company through the Directors' Regulations regarding the Implementation of Integrated Risk Management.
1.1.4.	Direksi memastikan integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporasi dan pengungkapan yang tepat waktu dan akurat atas semua informasi material mengenai korporasi. The Board of Directors ensures the integrity of the corporation's accounting and financial reporting systems and the timely and accurate disclosure of all material information regarding the corporation.	Direksi telah memastikan integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporasi dan pengungkapan yang tepat waktu dan akurat atas semua informasi material mengenai korporasi.	The Board of Directors ensured the integrity of the corporation's accounting and financial reporting systems and timely and accurate disclosure of all material information regarding the corporation.

Rekomendasi Recommendation	Pemenuhan Fulfillment	
11.5. Direksi memastikan pelaporan keberlanjutan telah dibuat sebagaimana mestinya. The Board of Directors ensures that sustainability reporting has been prepared appropriately.	Direksi telah menyusun sustainability report.	The Board of Directors prepared a sustainability report.
11.6. Direksi membangun kerangka kerja untuk governansi teknologi informasi (TI) korporasi yang selaras dengan kebutuhan dan prioritas bisnis korporasi, mendorong peluang dan kinerja bisnis, memperkuat manajemen risiko, serta mendukung tujuan dan strategi korporasi. The Board of Directors builds a framework for corporate information technology (IT) governance that is aligned with corporate business needs and priorities, encourages business opportunities and performance, strengthens risk management, as well as supports the corporate goals and strategies.	PT PLN NP memiliki dokumen Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) yang menjadi arahan/pedoman pengembangan aspek teknologi informasi Perusahaan dan digunakan sebagai acuan rutin tahunan, serta telah memiliki arsitektur sistem informasi. Penerapan/pengembangan TI di perusahaan sesuai dengan master plan, dimana sesuai dengan kebutuhan dan prioritas bisnis korporasi, mendorong peluang dan kinerja bisnis, memperkuat manajemen risiko, serta mendukung tujuan dan strategi korporasi.	PT PLN NP has an Information Technology Strategic Plan (RSTI) document which provides directions/ guidelines for the development of the Company's information technology aspects and is used as an annual routine reference, and has an information system architecture. The implementation/development of IT in the Company is following the master plan, which is in line with corporate business needs and priorities, encourages business opportunities and performance, strengthens risk management, as well as supports corporate goals and strategies.
11.7. Bagi korporasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, Direksi perlu memastikan kewenangan dan ketersediaan perangkat pendukung yang memadai agar Dewan Pengawas Syariah dapat menjalankan perannya dengan efektif. For corporations that carry out business activities based on Sharia principles, the Board of Directors needs to ensure the authority and availability of adequate supporting equipment so that the Sharia Supervisory Board can carry out its role effectively.	Perusahaan tidak menjalankan operasional kegiatan perusahaan dengan menerapkan prinsip syariah.	The Company does not carry out operational company activities by applying sharia principles.
11.8. Piagam Direksi secara periodik ditinjau. Piagam mencakup antara lain pembagian peran Direktur secara individual dapat dalam di Piagam Direksi atau dengan aturan keputusan Direksi. The Board of Directors Charter is periodically reviewed. The Charter includes, among others, the division of roles of individual Directors which can be regulated in the Directors' Charter or by a Directors' Decree.	Pembagian peran Direktur dinyatakan pada Surat Pengangkatan Direksi pada Keputusan RUPS secara Sirkuler, dimana secara umum peran, fungsi dan tugas pokok masing-masing Direktur dijelaskan pada Peraturan Direksi.	The distribution of roles of Directors is stated in the Letter of Appointment of Directors in the Circular GMS Resolution, where the roles, functions, and main duties of each Director are further explained in the Directors' Regulations.
11.9. Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan. The Board of Directors has a policy regarding the resignation of the Board of Directors members in the event they are involved in financial crimes and are proven to have made a mistake.	Terdapat mekanisme pengunduran diri Direktur Jabatan Direktur berakhir apabila tidak memenuhi persyaratan sebagai Direktur, salah satunya dinyatakan pailit, dinyatakan bersalah yang menyebabkan perusahaan dinyatakan pailit, atau dihukum karena merugikan keuangan negara.	There is a mechanism for Director resignation. The Director's position ends if he does not fulfill requirements as a Director, one of which is being declared bankrupt, being found guilty of causing the Company to be declared bankrupt, or punished for causing harm to state finances.

12. Penilaian Kinerja Direksi dan Anggotanya

12. Performance Assessment of the Board of Directors and Its Members

Rekomendasi Recommendation	Pemenuhan Fulfillment	
12.1. Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif dan independen untuk menentukan efektivitas Direksi dan setiap individu direksi. The Board of Commissioners conducts annual formal evaluations objectively and independently to determine the effectiveness of the Board of Directors and each individual director.	Dewan Komisaris menetapkan kebijakan penilaian sendiri (self assessment) bagi Direksi untuk menilai kinerja Direksi. Dewan Komisaris menetapkan kebijakan penilaian kinerja Dewan Komisaris dan dilakukan secara self assessment dalam melakukan pengawasan terhadap Direksi.	The Board of Commissioners establishes a self-assessment policy for the Board of Directors to assess the performance of the Board of Directors. The Board of Commissioners establishes a policy for assessing the performance of the Board of Commissioners and carries out self-assessment in supervising the Board of Directors.

Rekomendasi Recommendation	Pemenuhan Fulfillment	
1.2.2. Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi dan Remuneras, bertanggung jawab menentukan kriteria evaluasi kinerja dan menilai kinerja Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya. The Board of Commissioners, with the consideration of the Nomination and Remuneration Committee, is responsible for determining performance evaluation criteria and assessing the performance of the President Director and other members of the Board of Directors.	Dewan Komisaris memastikan bahwa evaluasi kinerja Direktur Utama dilakukan pada kriteria yang telah ditentukan. Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi dan Remuneras melakukan evaluasi kinerja Direksi, dan melakukan pembahasan remuneras Direksi atas evaluasi kinerja Direksi.	The Board of Commissioners ensures that performance evaluation for the President Director is based on the predetermined criteria. The Board of Commissioners, with the consideration of the Nomination and Remuneration Committee, evaluates the performance of the Directors, and discusses the remuneration of the Directors based on the evaluation of the performance of the Directors.

1.3. Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1.3. Roles and Responsibilities of the Board of Commissioners

Rekomendasi Recommendation	Pemenuhan Fulfillment	
1.3.1. Dewan Komisaris menelaah strategi korporasi paling tidak setiap tahun dan menyetujui misi, visi dan strategi korporasi yang dirumuskan oleh Direksi. Dewan Komisaris juga menelaah, memberikan saran dan menyetujui rencana bisnis dan rencana keuangan jangka panjang dan rencana keuangan jangka pendek korporasi. Dewan Komisaris memberikan advis dan melakukan pemantauan kepada Direksi atas pengelolaan implementasinya. Direksi dan Dewan Komisaris terlibat dalam keputusan yang sangat penting bagi korporasi, diatur dalam anggaran dasar korporasi. The Board of Commissioners reviews the corporate strategy at least annually and approves the mission, vision, and corporate strategy formulated by the Board of Directors. The Board of Commissioners also reviews, provides advice, and approves business plans and long-term financial plans and short-term financial plans of the corporation. The Board of Commissioners provides advice and monitors the Board of Directors regarding implementation management. The Board of Directors and Board of Commissioners are involved in very important decisions for the corporation, regulated in the corporation's articles of association.	Direksi dalam mengusulkan rencana jangka panjang perusahaan (RJP), rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) atau rencana jangka pendek perusahaan maupun rencana bisnis dengan batas nilai tertentu akan meminta persetujuan persetujuan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris akan melakukan review dan memberikan tanggapan/rekomendasi/persetujuan atas tindakan korporasi tersebut.	In approving the Company's long-term plan (RJP), the Company's annual budget and operational plan (ABOP) or short-term company plan or business plan with a certain value limit, the Board of Directors will request approval from the Board of Commissioners. The Board of Commissioners will review and provide response/recommendations/approval of these corporate actions.
1.3.2. Jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris harus dicantumkan dalam laporan tahunan. The types of decisions that require approval from the Board of Commissioners must be disclosed in the annual report.	Persetujuan Dewan Komisaris yang dituangkan dalam bentuk Tanggapan Tertulis ataupun Rekomendasi Dewan Komisaris dituangkan dalam Laporan Tahunan.	Approval from the Board of Commissioners given in the form of a Written Response or Recommendation from the Board of Commissioners is stated in the Annual Report.

	Rekomendasi Recommendation	Pemenuhan Fulfillment	
1.3.3.	Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remuneras, Dewan Komisaris mengusulkan kepada, dan untuk diputuskan oleh, RUPS pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam mengusulkan hal di atas, Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman, unsur nondiskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, etnis, golongan dan jender. Dewan Komisaris memastikan proses pencalonan dan pemilihan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris adalah formal dan transparan. By taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee, the Board of Commissioners proposes to, and is decided by, the GMS the appointment and/or dismissal of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners. In proposing the above, the Board of Commissioners paid attention to diversity, non-discriminatory elements and provides equal opportunities without distinction between ethnicity, religion, race, group, and gender. The Board of Commissioners ensures that the nomination and election process for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners is formal and transparent.	Proses pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris PLN NP menjadi wewenang Pemegang Saham, dalam hal ini PT PLN (Persero). Dewan Komisaris memastikan proses pencalonan dan pemilihan anggota Direksi formal dan transparan. Dewan Komisaris memberikan tanggapan atas anggota Direksi.	The process of appointing and/or dismissing members of the Board of Directors and Board of Commissioners of PLN NP falls under the authority of the Shareholders, in this case PT PLN (Persero). The Board of Commissioners ensures that the nomination and election process for members of the Board of Directors is formal and transparent. The Board of Commissioners provides responses to members of the Board of Directors.
1.3.4.	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi. Setiap tahun Dewan Komisaris meninjau paparan pelaksanaan rencana pengembangan dan suksesi yang disampaikan Direktur Utama. The Board of Commissioners or the Committee that carries out the nomination function prepares a succession policy in the nomination process for members of the Board of Directors. Every year, the Board of Commissioners reviews reports on the implementation of development and succession plans submitted by the President Director.	1. Dalam Piagam Komite Nominasi dan Remuneras tertuang bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remuneras adalah menyusun kebijakan program pengembangan (talent pool) dan menetapkan kriteria seleksi dan remuneras anggota Direksi dan Dewan Komisaris. 2. Proses pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris PLN NP menjadi wewenang Pemegang Saham, dalam hal ini PT PLN (Persero).	1. The Nomination and Remuneration Committee Charter states that one of the duties and responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee is to ensure development program policies (talent pool) and determine selection and remuneration criteria for members of the Board of Directors and Board of Commissioners. 2. The process of appointing and/or dismissing members of the Board of Directors and Board of Commissioners of PLN NP is under the authority of the Shareholders, in this case PT PLN (Persero).
1.3.5.	Dewan Komisaris a) mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite yang menjalankan fungsi remuneras, besaran remuneras anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang selaras dengan pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan kepentingan jangka panjang korporasi dan pemegang saham; b) secara berkala meninjau sistem remuneras Direksi dan Dewan Komisaris. The Board of Commissioners a) submits to the GMS, which may be preceded by a proposal from the Committee carrying out the remuneration function, the amount of remuneration for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners that is in line with sustainable corporate development and the long-term interests of the corporation and shareholders; b) periodically reviews the remuneration system for the Board of Directors and Board of Commissioners.	Direksi mengajukan usulan atas besaran remuneras Direksi dan Dewan Komisaris, yang akan dibahas review dan pembahasan oleh Komite Nominasi dan Remuneras. Dewan Komisaris mengajukan permohonan persetujuan atas usulan yang telah dibahas oleh Internal Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham.	The Board of Directors submits proposals regarding the amount of remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners, which will be reviewed and discussed by the Nomination and Remuneration Committee. The Board of Commissioners submits a request for approval of the proposal that has been discussed internally by the Board of Commissioners with the Shareholders.

Rekomendasi Recommendation		Pemenuhan Fulfillment	
1.3.8.	Dewan Komisaris mengawasi efektivitas kebijakan governansi korporat dan implementasinya serta mengusulkan perubahan jika diperlukan. The Board of Commissioners monitors the effectiveness of corporate governance policies and their implementation and proposes changes if necessary.	Komite Dewan Komisaris melakukan monitoring efektivitas kebijakan dan penerapan tata kelola perusahaan.	The Board of Commissioners Committee monitors the effectiveness of policies and implementation of corporate governance.
1.3.9.	Dewan Komisaris memastikan dan mengarahkan agar korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan, kode perilaku dan standar yang berlaku. The Board of Commissioners monitors and directs the corporation to implement appropriate and effective risk management and internal control systems that are in line with corporate goals, objectives, and strategies and comply with applicable laws and regulations, codes of conduct, and standards.	1. Dewan Komisaris menyusun program kerja Dewan Komisaris, salah satunya adalah melakukan pemantauan efektivitas pengelolaan manajemen risiko korporat melalui Komite Investasi dan Manajemen Risiko. Dewan Komisaris melalui Komite Investasi dan Manajemen Risiko melakukan pembahasan risk appetite perusahaan, evaluasi manajemen risiko dan strategi risiko perusahaan. 2. Selain itu Dewan Komisaris melalui Komite Audit, memantau pelaksanaan audit dan memantau tindak lanjut atas temuan hasil audit. Dewan Komisaris melakukan pembahasan atas hasil audit pihak eksternal dan internal. Dewan Komisaris melalui Komite Audit akan memantau dan menilai efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal.	1. The Board of Commissioners prepares the work program of the Board of Commissioners, one of which is monitoring the effectiveness of corporate risk management through the Investment and Risk Management Committee. The Board of Commissioners, through the Investment and Risk Management Committee, discusses the Company's risk appetite, evaluates risk management and the Company's risk strategy. 2. In addition, the Board of Commissioners, through the Audit Committee, monitors the implementation of audits and monitors follow-up to audit findings. The Board of Commissioners reviews the results of external and internal audits. The Board of Commissioners, through the Audit Committee, will monitor and assess the effectiveness of the implementation of the Internal Control System.
1.3.10.	Dewan Komisaris mengawasi dan mengarahkan agar terwujud integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporat, serta independensi fungsi audit internal dan eksternal. The Board of Commissioners supervises and directs the achievement of the integrity of the corporate accounting and financial reporting system, as well as the independence of the internal and external audit functions.	Dewan Komisaris melalui Komite Audit melakukan pemeliharaan hasil audit internal eksternal dan memastikan independensi fungsi audit internal eksternal. Dewan Komisaris menerima pernyataan dari Direktur Utama dan Direktur Keuangan bahwa laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi di Indonesia dan semua informasi dalam laporan keuangan telah disusun secara lengkap dan benar.	The Board of Commissioners, through the Audit Committee, reviews the results of the internal external audit and ensures the independence of the internal external audit function. The Board of Commissioners received a statement from the President Director and Finance Director that the Group's consolidated financial reports have been prepared and presented in accordance with Indonesian Accounting Standards, and all information in the financial reports has been contained completely and correctly.
1.3.11.	Dewan Komisaris memantau, meninjau dan menyetujui laporan tahunan dan laporan keberlanjutan korporasi serta memastikan integritasnya, serta mengawasi proses pengungkapan dan penyampaian korporasi. The Board of Commissioners monitors, reviews, and approves the Corporation's annual report's and sustainability reports and ensures their integrity, as well as oversees the corporate disclosure and communication process.	Dewan Komisaris membuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dari tahun setelah tahun berjalan. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan. Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi atas konten laporan keberlanjutan dan bertanggung jawab atas kebenaran isi laporan keberlanjutan.	The Board of Commissioners prepares a Board of Commissioners Supervision Report every year after the end of the current year. The Board of Directors and Board of Commissioners are fully responsible for the correctness of the contents of the annual report. The Board of Commissioners has evaluated the content of the sustainability report and is responsible for the correctness of the content of the sustainability report.

Rekomendasi Recommendation	Pemenuhan Fulfillment	
1.2.10. Piagam Dewan Komisaris secara periodik dikinjau. The Board of Commissioners Charter is periodically reviewed.	Dewan Komisaris secara berkala melakukan review terhadap pedoman kerja Dewan Komisaris dan jika dipandang perlu, dilakukan pemutakhiran sesuai kebutuhan Dewan Komisaris dan perkembangan Perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku	The Board of Commissioners periodically reviews the work guidelines of the Board of Commissioners and, if deemed necessary, updates them according to the needs of the Board of Commissioners and the Company's developments as well as applicable laws and regulations.
1.2.11. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan. The Board of Commissioners has a policy regarding the resignation of members of the Board of Commissioners if they are involved in financial crimes and are proven to have made a mistake.	Kebijakan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan tertuang pada BOC Manual. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan Keputusan RUPS, apabila terbukti terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan/atau Negara dan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.	The resignation policy for members of the Board of Commissioners is regulated in the Company's Articles of Association and contained in the BOC Manual. Members of the Board of Commissioners can be dismissed at any time based on a GMS Decision if they are proven to be involved in actions that are detrimental to the Company and/or the State and are found guilty based on a Court decision that has permanent legal force.
1.2.12. Komisaris Independen sangat diharapkan untuk dapat berkontribusi dalam diskusi yang jujur, objektif, aktif dan konstruktif pada rapat Dewan Komisaris. Independent commissioners are highly expected to be able to contribute to honest, objective, active, and constructive discussions at Board of Commissioners meetings.	Setiap Komisaris diwajibkan untuk selalu berpartisipasi aktif secara kolegial dan sesuai prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yang diatur di dalam Anggaran Dasar dan BOC Manual.	Each Commissioner is required to always participate actively in a collegial manner and in accordance with the principles of good corporate governance, which are regulated in the Articles of Association and BOC Manual.
1.2.13. Komisaris Utama berperan sebagai koordinator Dewan Komisaris dan memastikan efektivitasnya. Komisaris Utama mendorong budaya keterbukaan dan dialog konstruktif yang memungkinkan berbagai pandangan disampaikan, termasuk mengkoordinasi penetapan agenda rapat dewan yang rapat dan memastikan waktu yang cukup tersedia untuk membicarakan semua agenda. Selain itu, juga harus ada kesempatan bagi Dewan Komisaris untuk bertemu dengan jajaran Direksi dan manajemen senior. The President Commissioner acts as coordinator of the Board of Commissioners and ensures its effectiveness. The Chief Commissioner encourages a culture of openness and constructive dialogue that allows a variety of views to be expressed, including coordinating the setting of appropriate board meeting agendas and ensuring sufficient time is available to discuss all agenda items. Apart from that, there must also be an opportunity for the Board of Commissioners to meet with the Board of Directors and senior management.	Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Pemegang Saham secara Sirkular. Komisaris Utama mengkoordinasi pembagian peran diantara anggota Dewan Komisaris. Dewan Komisaris rutin melaksanakan Rapat Internal Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris yang mengundang Direksi (Rapat Pengawasan), dan dipimpin oleh Komisaris Utama. Tidak terdapat mantan Direktur Utama dan anggota Direksi yang terpilih sebagai Komisaris Utama.	The Board of Commissioners is led by the President Commissioner, who is appointed based on a Circular Shareholder Decision. The President Commissioner coordinates the distribution of roles among members of the Board of Commissioners. The Board of Commissioners regularly holds Internal Board of Commissioners Meetings and Board of Commissioners Meetings, which invite the Directors (Supervision Meetings) and is chaired by the President Commissioner. There are no former President Directors or members of the Board of Directors who were elected as President Commissioner.

I.4. Pembentukan Komite

I.4. Committee Formation

Rekomendasi Recommendation	Pemenuhan Fulfillment	
I.4.1. Korporasi memiliki komite-komite di bawah Dewan Komisaris sekurang-kurangnya terdiri dari Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Pemantau Manajemen Risiko. The Corporation has committees under the Board of Commissioners consisting of at least: Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, and Risk Management Monitoring Committee.	Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Investasi dan Manajemen Risiko, dan Komite Nominasi dan Remuneras, sebagai Organ Pendukung Dewan Komisaris.	The Board of Commissioners has established an Audit Committee, Investment and Risk Management Committee, and Nomination and Remuneration Committee, as supporting organs for the Board of Commissioners.
I.4.2. Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Komite Audit seluruhnya independen dan komite lain yang dibentuk Dewan Komisaris adalah mayoritas dari pihak independen, serta semua anggota komite memiliki kompetensi, berkualitasnya, serta memiliki wewenang yang memadai untuk menjalankan perannya secara efektif dan independen. The Board of Commissioners ensures that all members of the Audit Committee are independent and that the majority of other committees formed by the Board of Commissioners are independent, and that all committee members are competent, committed and have sufficient authority to carry out their roles effectively and independently.	Dewan Komisaris membentuk Komite Audit, yang memunyai tugas memastikan sistem pengendalian internal Perusahan telah berfungsi secara efektif dan efisien, termasuk dilakukannya fungsi GCG. Komite Audit terdiri dari profesional yang tidak memunyai kepentingan atau keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan conflict of interest. Pembentukan Komite Audit ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisaris dan terdapat piagam komite, dimana dalam terdua dokumen tersebut tertuang peran, wewenang, tugas pokok dan fungsi Komite Audit.	The Board of Commissioners formed an Audit Committee, which has the task of ensuring that the Company's internal control system functions effectively and efficiently, including the GCG function. The Audit Committee consists of professionals who have no personal interests or connections that could give rise to a conflict of interest. The formation of the Audit Committee was approved through a Decree of the Board of Commissioners and there is a committee charter, wherein these two documents the role, authority, main duties, and functions of the Audit Committee are stated.
I.4.3. Untuk memastikan pemantauan atas pelaksanaan tugas Komite Audit berjalan objektif dan independen, Komisaris Utama tidak boleh menjadi ketua Komite Audit, kecuali dalam keadaan luar biasa yang harus dijelaskan dalam laporan tahunan. To ensure that monitoring of the implementation of the Audit Committee's duties is objective and independent, the President Commissioner may not be chairman of the Audit Committee, except in extraordinary circumstances which must be explained in the annual report.	Komisaris Utama tidak menangkap sebagai Ketua Komite Audit.	The President Commissioner does not serve as Chairman of the Audit Committee.

1.5. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Anggotanya

1.5. Performance Assessment of the Board of Commissioners and Its Members

Rekomendasi Recommendation	Pemenuhan Fulfillment	
1.5.1. Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara objektif untuk menentukan efektivitas Dewan, komitenya, dan setiap individu komisaris. The Board of Commissioners conducts an annual formal evaluation objectively to determine the effectiveness of the Board, its committees, and each individual commissioner.	Evaluasi Komite secara kelompok pada masing-masing Komite diberikan penilaian yang dapat dilihat pada Laporan Tahunan Perusahaan. Dewan Komisaris memiliki kebijakan dalam penilaian kinerja Dewan Komisaris, yang dituangkan pada Laporan Pengawasan Dewan Komisaris. Masing-masing Ketua Komite melakukan penilaian kinerja atas masing-masing anggota komite sebagai bagian evaluasi penugasan dan masing-masing Komite menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Dewan Komisaris.	Committee evaluation as a group for each Committee is given an assessment, which can be seen in the Company's Annual Report. The Board of Commissioners has a policy for assessing the performance of the Board of Commissioners, which is outlined in the Board of Commissioners' Supervision Report. Each Committee Chair carries out a performance assessment of each committee member as part of the assignment evaluation and each Committee prepares regular task implementation reports to the Board of Commissioners.

1.6. Benturan Kepentingan

1.6. Conflict of Interest

Rekomendasi Recommendation	Pemenuhan Fulfillment	
1.6.1. Anggota Direksi yang merangkap jabatan di luar korporasi, harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Seorang komisaris menilai satu Dewan Komisaris dan satu komite yang menjalankan fungsi nominasi, sebelum menerima pencalonan baru sebagai direktur atau komisaris dari korporasi terbuka, jabatan direktur lainnya atau orang lain dengan komitmen waktu yang signifikan. Members of the Board of Directors who hold concurrent positions outside the corporation must obtain approval from the Board of Commissioners. A Commissioner notifies the Board of Commissioners and the chair of the committee performing the nominating function, before accepting a new appointment as director or commissioner of a publicly traded corporation, other directorship, or other position with a significant time commitment.	Pada Anggaran Dasar Perusahaan telah diatur bahwa anggota Direksi dilarang untuk merangkap jabatan rangkap.	The Company's Articles of Association stipulate that members of the Board of Directors are prohibited from holding multiple positions.
1.6.2. Dewan Komisaris memantau dan mengelola potensi benturan kepentingan manajemen, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham, termasuk penyalahgunaan aset korporasi dan penyalahgunaan dalam transaksi pihak berelasi. Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak turut serta dalam pemantauan dan pengambilan keputusan atas potensi benturan kepentingan yang melibatkan Komisaris atau afiliasi Komisaris yang bersangkutan. The Board of Commissioners monitors and manages potential conflicts of interest of management, members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and shareholders, including misuse of corporate assets and misuse in related party transactions. Commissioners who have a conflict of interest do not participate in monitoring and making decisions regarding potential conflicts of interest involving the Commissioner or affiliates of the Commissioner concerned.	Dewan Komisaris memantau dan mengelola potensi benturan kepentingan sesuai dengan Surat Keputusan Bersama antara Direksi dan Dewan Komisaris PT PLN NP No. 0016/DIR/2020 dan 004/K/DK/PLN NP/2020 tentang Pengelolaan Benturan kepentingan di Lingkungan PT PLN NP. Pencegahan benturan kepentingan di Perusahaan juga dilakukan dengan penyampaian Pakta Integritas setiap tahun oleh seluruh Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat, yang berisikan pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan dan akan menegah/menangani benturan kepentingan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi Perusahaan.	The Board of Commissioners monitors and manages potential conflicts of interest in accordance with the Joint Decree between the Board of Directors and the Board of Commissioners of PT PLN NP No. 0016/DIR/2020 and 004/K/DK/PLN NP/2020 concerning Management of Conflicts of Interest within PT PLN NP. Preventing conflicts of interest in the Company is also carried out by submitting an Integrity Pact every year by all serving Directors and Board of Commissioners, which contains a statement that they have no conflict of interest and will prevent/handle conflicts of interest so that they do not cause harm to the Company.

1.7 Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

1.7. Increasing the Competency of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners

Rekomendasi Recommendation	Pemenuhan Fulfillment	
1.7.1. Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris memahami peran dan tanggung jawab mereka, karakteristik dan operasi korporasi, peraturan perundang-undangan dan standar yang relevan serta kewajiban lain yang berlaku. Direksi melalui sekretaris korporasi mendukung semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam memperbarui dan meyajamkan keterampilan dan pengetahuan mereka yang diperlukan untuk menjalankan peran mereka di Dewan. The Board of Commissioners ensures that members of the Board of Directors and Board of Commissioners understand their roles and responsibilities, characteristics and operations of the corporation, relevant laws and regulations and standards as well as other applicable obligations. The Board of Directors, through the corporate secretary, supports all members of the Board of Directors and Board of Commissioners in updating and refreshing their skills and knowledge necessary to carry out their roles on the Board.	Sekretaris Perusahaan memiliki kewajiban program pengenalan perusahaan kepada Direktur dan atau Komisaris yang baru diangkat, salah satunya mengatur tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.	The Corporate Secretary has an obligation to introduce the Company to newly appointed Directors and/or Commissioners, one of which is regarding the duties and responsibilities of the Directors and Board of Commissioners as well as things that are not permitted.

Prinsip 2. Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Principle 2. Composition and Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners

2.1. Komposisi Direksi

2.1. Composition of the Board of Directors

Rekomendasi Recommendation	Pemenuhan Fulfillment	
2.1.1. Dalam menentukan kandidat calon direktur, Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi tidak hanya mengandalkan rekomendasi dari Dewan Komisaris, manajemen atau pemegang saham mayoritas. Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi dapat menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat. In determining prospective director candidates, the Board of Commissioners through the Nomination and Remuneration Committee does not only rely on recommendations from the Board of Commissioners, management, or majority shareholders. The Board of Commissioners through the Nomination and Remuneration Committee can use independent sources to determine candidates who meet the requirements.	1. Dalam menentukan kandidat calon Direktur, mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. 2. Proses pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris PLN NP menjadi kewenangan Pemegang Saham, dalam hal ini PT PLN (Persero).	1. In determining potential Director candidates, refer to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises. 2. The process of appointing and/or dismissing members of the Board of Directors and Board of Commissioners of PLN NP is under the authority of the Shareholders, in this case PT PLN (Persero).

Rekomendasi Recommendation	Pemenuhan Fulfillment	
21.3. Dewan Komisaris memastikan bahwa kriteria dalam menyeleksi anggota Direksi mencakup paling tidak pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Direksi serta memperhatikan terpenuhinya keberagaman Direksi. The Board of Commissioners ensures that the criteria for selecting members of the Board of Directors include at least the knowledge, abilities, and skills required to appropriately fulfill the role of the Board of Directors and pay attention to the fulfillment of the diversity of the Board of Directors.	1. Informasi mengenai calon anggota Direksi, komposisi Direksi, penentuan jumlah anggota Direktur menjadi kewenangan Pemegang Saham, dalam hal ini PT PLN (Persero). 2. Jumlah anggota Direksi dan komposisi Direksi saat ini telah mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman dan telah sesuai dengan kondisi korporasi serta telah mempertimbangkan efektivitas dalam pengambilan keputusan. 3. Direktur Operasi Pembangkit memiliki pengalaman sebelumnya di bidang operasi ketenagalistrikan. 4. Direktur Keuangan yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.	1. Information regarding candidates for the Board of Directors, composition of the Board of Directors, determination of the number of Directors is the authority of the Shareholders, in this case PT PLN (Persero). 2. The number of members of the Board of Directors and the current composition of the Board of Directors have reflected diversity in terms of capabilities, expertise, knowledge, experience and have been in accordance with the corporate conditions and in accordance with corporate conditions and has considered effectiveness in decision making. 3. The Director of Power Plant Operations has previous experience in the field of electricity operations. 4. Finance Director in charge of accounting or finance has expertise and/or knowledge in accounting.
21.3. Kebijakan korporasi tentang keberagaman pada Direksi dan Dewan Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan. Corporate policies regarding diversity among the Board of Directors and Board of Commissioners are disclosed in the Annual Report.	Dalam Laporan Tahunan telah tercantum kebijakan keberagaman korporasi Dewan Komisaris dan Direksi.	In the Annual Report, the policy for diversity in the composition of the Board of Commissioners and Directors is stated.
21.4. Dewan Komisaris memastikan bahwa kebijakan dan prosedur untuk seleksi dan nominasi komisaris adalah jelas dan transparan sehingga dapat menghasilkan komposisi Dewan yang diinginkan. Dewan Komisaris menggunakan sumber independen untuk menemukan kandidat yang memenuhi syarat. The Board of Commissioners ensures that the policies and procedures for the selection and nomination of Commissioners are clear and transparent so as to produce the desired Board composition. The Board of Commissioners uses independent sources to determine qualified candidates.	1. Informasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris, seperti identitas calon, alasan pengangkatan, kompetensi inti, kualifikasi, latar belakang profesional, jabatan saat ini di korporasi lain, menjadi kewenangan Pemegang Saham, dalam hal ini PT PLN (Persero). 2. Anggota Dewan Komisaris mengungkapkan kepemilikan saham dalam korporasi, hubungan dengan pemegang saham (faktor yang mempengaruhi independensi) dan benturan kepentingan setiap tahunnya.	1. Information regarding prospective members of the Board of Commissioners, such as the identity of the candidate, reasons for appointment, core competencies, qualifications, professional background, current position in another corporation, is the authority of the Shareholders, in this case PT PLN (Persero). 2. Members of the Board of Commissioners disclose share ownership in the corporation, relationships with shareholders (factors that influence independence), and conflicts of interest every year.
21.5. Dewan Komisaris/Komite yang menjalankan fungsi nominasi menetapkan prosedur dan kriteria nominasi yang konsisten dengan matriks keahlian Dewan Komisaris yang telah disetujui Dewan Komisaris dan memastikan bahwa profil kandidat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam matriks keahlian dan kriteria nominasi. The Board of Commissioners/Committee which carries out the nomination function determines nomination procedures and criteria that are consistent with the Board of Commissioners' skills matrix which has been approved by the Board of Commissioners and ensures that the candidate profile meets the requirements set out in the skills matrix and nomination criteria.	Proses pengangkatan dan/atau pemberhentian, prosedur dan kriteria nominasi anggota Dewan Komisaris PLN NP menjadi kewenangan Pemegang Saham, dalam hal ini PT PLN (Persero), dengan mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.	The appointment and/or dismissal process, procedures and nomination criteria for members of the Board of Commissioners of PLN NP fall under the authority of the Shareholders, in this case PT PLN (Persero), with reference to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.

Rekomendasi Recommendation	Pemenuhan Fulfillment	
2.1.6. Komposisi Dewan Komisaris harus dibentuk sedemikian rupa sehingga anggota-anggotanya secara kelompok mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang budaya, dan gender yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Dewan Komisaris. The composition of the Board of Commissioners must be formed in such a way that its members as a group reflect the diversity in terms of abilities, skills, knowledge, experience, age, cultural background, and gender required to appropriately fulfill the role of the Board of Commissioners.	1. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris, komposisi Dewan Komisaris yang mempertimbangkan keahlian, kemampuan, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang budaya dan gender, menjadi kewenangan Pemegang Saham, dalam hal ini PT PLN (Persero). 2. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris telah mempertimbangkan kondisi korporasi. 3. Terdapat Komisaris yang memiliki pengalaman di Bidang Operasi Ketenagalistrikan.	1. Determining the number of members of the Board of Commissioners, the composition of the Board of Commissioners which takes into account skills, abilities, knowledge, experience, age, cultural background, and gender, is the authority of the Shareholders, in this case PT PLN (Persero). 2. Determination of the number of members of the Board of Commissioners has taken into account the condition of the corporation. 3. There are Commissioners who have experience in the field of Electricity Operations.
2.1.7. Untuk memastikan Dewan Komisaris dalam memberikan advis dan supervisi secara independen kepada Direksi dan untuk peran-peran yang terdapat potensi benturan kepentingan, Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Independen yang cukup jumlahnya, dengan masa jabatan yang dibatasi dan terdapat pengungkapan jangka waktu keanggotaan Dewan Komisaris serta independensi mereka dan wajib pernyataan tertulis. To enable the Board of Commissioners to provide independent advice and supervision to the Board of Directors and for roles where there is a potential conflict of interest, the Board of Commissioners consists of a sufficient number of Independent Commissioners, with limited terms of office and disclosure of the term of membership of the Board of Commissioners and their independence, from a corporate perspective.	1. Dewan Komisaris mengungkapkan independensi masing-masing anggota Dewan Komisaris. 2. Tidak terdapat Mantan Direktur Utama/anggota Direksi yang masuk ke dalam Dewan Komisaris. 3. Tidak terdapat Komisaris Independen yang menjabat melebihi 9 tahun. 4. Anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham dan memenuhi criteria Komisaris Independen, namun tidak dinyatakan sebagai Komisaris Independen secara definitif dalam Keputusan Pengangkatan Dewan Komisaris oleh Pemegang Saham, berjumlah 2 (dua) orang Komisaris.	1. The Board of Commissioners expresses the independence of each member of the Board of Commissioners. 2. There are no former President Directors/members of the Board of Directors who are on the Board of Commissioners. 3. There are no Independent Commissioners who have served more than nine years. 4. Members of the Board of Commissioners who are not affiliated with shareholders and meet the criteria for Independent Commissioners but who are not definitively declared Independent Commissioners in the Decree on the Appointment of the Board of Commissioners by Shareholders, total 2 (two) Commissioners.
2.1.8. Untuk memfasilitasi fungsi Direksi dan Dewan Komisaris yang efektif dan guna meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan, Komite Nominasi dan Remuneras memastikan bahwa terdapat proses yang formal, ketat dan transparan untuk pencalonan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. To facilitate the effective functioning of the Board of Directors and Board of Commissioners and to increase investor and stakeholder confidence, the Nomination and Remuneration Committee ensures that there is a formal, strict, and transparent process for the appointment and appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners.	1. Proses pengangkatan dan/atau pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris PLN NP menjadi kewenangan Pemegang Saham, dalam hal ini PT PLN (Persero), dengan merujuk pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-2/MBU/02/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. 2. Semua Komisaris mengalokasikan waktu yang cukup kepada Perusahaan untuk menjalankan tanggung jawab secara efektif. 3. Anggota Dewan Komisaris menjunjung tinggi prinsip independensi dalam menangani benturan kepentingan dan tidak memiliki benturan kepentingan, yang dicantumkan setiap tahunnya.	1. The process of appointing and/or dismissing the Directors and Board of Commissioners of PLN NP falls under the authority of the Shareholders, in this case PT PLN (Persero), with reference to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-2/MBU/02/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises. 2. All Commissioners allocate sufficient time to the Company to carry out their responsibilities effectively. 3. Members of the Board of Commissioners uphold the principle of independence in handling conflicts of interest and have no conflicts of interest, which are disclosed annually.

2.2. Komposisi Direksi

2.2. Composition of the Board of Directors

Rekomendasi Recommendation	Pemenuhan Fulfillment	
2.2.1. Kebijakan remuneras anggota Direksi terdiri atas struktur remuneras yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Remuneras Direksi harus diusulkan, diajukan dengan melalui Komite Nominasi dan Remuneras, oleh Dewan Komisaris untuk diputuskan oleh RUPS. Jumlah remuneras yang diusulkan kepada RUPS tersebut ditentukan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Direksi dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. The remuneration policy for members of the Board of Directors consists of a remuneration structure that is oriented towards sustainable corporate development and encourages the achievement of long-term goals. Directors' remuneration must be proposed, possibly through the Nomination and Remuneration Committee, by the Board of Commissioners to be decided by the GMS. The amount of remuneration proposed to the GMS is determined by considering the role of each member of the Board of Directors and the economic situation and corporate performance.	Usulan Remuneras Direksi melalui proses pengajuan dari Direksi kepada Dewan Komisaris, selanjutnya Dewan Komisaris akan mengusulkan kepada Pemegang Saham Penetapan Remuneras Direksi dilakukan oleh Pemegang Saham Mayoritas (PT PLN (Persero)) yang diberikan kewenangan melalui RUPS (RUPS Laporan Tahunan).	Proposed Remuneration for Directors goes through a submission process from the Directors to the Board of Commissioners, then the Board of Commissioners will propose it to Shareholders. Determination of Directors' Remuneration is carried out by the Majority Shareholder (PT PLN (Persero)), who is given authority through the GMS (Annual Report GMS).
2.2.2. Kebijakan remuneras anggota Dewan Komisaris terdiri atas struktur remuneras yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Jumlah remuneras yang diusulkan Dewan Komisaris kepada RUPS tersebut ditentukan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Dewan Komisaris dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. Di samping itu juga harus dipertimbangkan posisinya selaga Komisaris Utama dan Ketua serta keanggotaannya dalam komite-komite. The remuneration policy for members of the Board of Commissioners consists of a remuneration structure that is oriented towards sustainable corporate development and encourages the achievement of long-term goals. The amount of remuneration proposed by the Board of Commissioners to the GMS is determined by considering the role of each member of the Board of Commissioners and the economic situation and corporate performance. Apart from that, consideration must also be given to his position as President Commissioner and chairman as well as his membership in committees.	Usulan Remuneras Dewan Komisaris melalui proses pengajuan dari Direksi kepada Dewan Komisaris, selanjutnya Dewan Komisaris akan mengusulkan kepada Pemegang Saham. Penetapan Remuneras Dewan Komisaris dilakukan oleh Pemegang Saham Mayoritas (PT PLN (Persero)) yang diberikan kewenangan melalui RUPS (RUPS Laporan Tahunan). Adapun kebijakan terkait pengaturan organ pendukung Dewan telah diatur oleh Pemegang Saham, yaitu salah satu unsur komite adalah berasal dari anggota Dewan Komisaris.	Proposed Remuneration for the Board of Commissioners goes through a submission process from the Directors to the Board of Commissioners, then the Board of Commissioners will propose it to the Shareholders. Determination of the Remuneration of the Board of Commissioners is carried out by the Majority Shareholder (PT PLN (Persero)), who is given authority through the GMS (Annual Report GMS). The policies related to the regulation of the Board of Commissioners' supporting organs have been regulated by Shareholders, namely that one of the committee elements comes from members of the Board of Commissioners.

Rekomendasi Recommendation	Pemenuhan Fulfillment	
2.2.3. Untuk memastikan bahwa paket remunerasi ditentukan bertasarkan prestasi, kualifikasi dan kompetensi direktur dan komisaris dengan memperhatikan kinerja operasional korporasi, kinerja individu dan kondisi pasar, Komite Nominasi dan Remuneras memastikan bahwa terdapat prosedur yang adil dan transparan untuk menetapkan kebijakan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris. To ensure that remuneration packages are determined based on the achievements, qualifications and competencies of directors and commissioners by taking into account corporate operational performance, individual performance, and market conditions, the Nomination and Remuneration Committee ensures that there are fair and transparent procedures for determining remuneration policies for members of the Board of Directors and Board of Commissioners.	Usulan Remuneras Direktur Utama mempertimbangkan beberapa faktor antara lain: 1. Perbandingan remuneras antara perusahaan dengan perusahaan dengan jenis bisnis yang sama, melalui salary survey yang dilakukan oleh konsultan. 2. Kinerja perusahaan pada tahun sebelumnya. 3. Anggaran yang telah ditetapkan pada RKAP serta nilai aktual yang telah ditetapkan. Remuneras bagi Direksi & Dewan Komisaris mengikuti faktor jabatan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-2/MBU/01/2015 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.	The Remuneration Proposal for the President Director considers several factors, including: 1. Comparison of remuneration between companies and companies with the same type of business, through salary surveys conducted by Consultants. 2. Company performance in the previous year. 3. The budget that has been determined in the RKAP and the actual value that has been determined. Remuneration for Directors & Board of Commissioners follows the applicable position factors in accordance with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-2/MBU/01/2015 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.

Prinsip 3. Hubungan Kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris

Principle 3. Working Relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners

3.1. Sifat Hubungan Kerja

3.1. Nature of Employment Relationships

Rekomendasi Recommendation	Pemenuhan Fulfillment	
3.1.1. Terdapat diskusi yang terbuka antara Direksi dengan Dewan Komisaris serta di antara para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris. Namun, tetap perlu menjaga kerahasiaan informasi agar tidak terjadi kebocoran informasi rahasia. There are open discussions between the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as between members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners. However, it is still important to maintain the confidentiality of information to prevent leaks of confidential information.	1. Hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris merupakan hubungan yang bersifat formal dan harus senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme baku atau korespondensi yang berlaku di Perusahaan. 2. Korespondensi antara Direksi dengan Dewan Komisaris menggunakan media surat elektronik yang berlaku di Perusahaan, yang didalamnya mengandung penjelasan maksud dan tujuan atas surat tersebut. Dalam hal korespondensi bersifat rahasia maka dapat dilakukan secara surat non elektronik. Dalam hal administrasi, Sekretaris Dewan Komisaris dapat berkorespondensi formal kepada Sekretaris Perusahaan (dan sebaliknya). Dewan Komisaris melalui Komisaris Utama dapat melakukan korespondensi kepada Direksi melalui Direktur Utama terkait fungsi pengawasan dan pemberian nasihat, dengan ditembuskan kepada Sekretaris Dewan Komisaris dan Sekretaris Perusahaan. 3. Dewan Komisaris mengadakan rapat paling sedikit setiap 1 (bulan) sekali, yang mengundang Direksi (Rapat Pengawasan). 4. Dewan Komisaris berhak memperoleh informasi Perusahaan secara tepat waktu, lengkap, terukur dan akurat, dan Direksi bertanggung jawab atas penyampaian informasi Perusahaan kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu, lengkap, terukur dan akurat.	1. The working relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners is a formal relationship and must always be based on a standard mechanism or correspondence that applies in the Company. 2. Correspondence between the Board of Directors and the Board of Commissioners uses the electronic mail medium applicable in the Company, which contains an explanation of the purpose and objectives of the letter. If the correspondence is confidential, it can be done via non-electronic mail. In administrative matters, the Secretary of the Board of Commissioners can correspond formally with the Corporate Secretary (and vice versa). The Board of Commissioners, through the President Commissioner, can correspond with the Board of Directors through the President Director regarding their supervisory and advisory functions, with a copy to the Secretary of the Board of Commissioners and the Corporate Secretary. 3. The Board of Commissioners holds a meeting at least once every 1 (month), inviting the Board of Directors (Supervisor Meeting). 4. The Board of Commissioners has the right to obtain Company information in a timely, complete, measurable, and accurate manner, and the Board of Directors is responsible for conveying Company information to the Board of Commissioners in a timely, complete, measurable, and accurate manner.

Rekomendasi Recommendation	Pemenuhan Fulfillment	
3.1.3. Sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing, Direksi bekerjasama dengan Dewan Komisaris dalam merumuskan misi, visi dan strategi korporasi dan secara reguler membahas penginplementasiannya. In accordance with their respective duties and roles, the Board of Directors collaborates with the Board of Commissioners in formulating the corporate mission, vision, and strategy and regularly discusses their implementation.	Direksi secara periodik melakukan review atas rencana jangka panjang yang telah disusun, ketika dirasa sudah tidak relevan, maka Direksi akan menyusun revisi RJPP yang akan dibahas dan dimintakan persetujuan kepada Dewan Komisaris, sebelum diajukan kepada Pemegang Saham.	The Board of Directors periodically reviews the long-term plans that have been prepared. When it is deemed no longer relevant, the Board of Directors will prepare a revised the Company's Long Term Plan (RJPP), which will be discussed and approved by the Board of Commissioners, before being proposed to Shareholders.
3.1.3. Sekretaris Korporasi memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris, memastikan implementasi praktik governance korporasi yang baik, termasuk komunikasi yang efektif dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. The Corporate Secretary has an important role in supporting the effectiveness of the working relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners, encouraging the implementation of good corporate governance practices, including effective communication with shareholders and other stakeholders.	Sekretaris Perusahaan memiliki peran dalam mendukung efektivitas hubungan kerja maupun korespondensi formal dan non formal antara Direksi dan Dewan Komisaris. Sekretaris Perusahaan juga efektif mengelola komunikasi eksternal dengan pemegang saham dan stakeholder eksternal (stakeholder management).	The Corporate Secretary has a role in supporting the effectiveness of working relationships as well as formal and non-formal correspondence between the Board of Directors and the Board of Commissioners. The Corporate Secretary also effectively manages external communications with shareholders and external stakeholders (stakeholder management).

3.2. Akses Informasi Dewan Komisaris

3.2. Access Information on the Board of Commissioners

Rekomendasi Recommendation	Pemenuhan Fulfillment	
3.2.1. Direksi bertanggung jawab untuk memastikan Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. Dewan Komisaris sendiri memastikan bahwa ia memperoleh informasi yang memadai. Direksi menyediakan informasi kepada Dewan Komisaris secara tersedia, tanpa penundaan dan secara komprehensif tentang semua masalah yang relevan dengan korporasi. Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat meminta Direksi untuk memberikan informasi tambahan. The Board of Directors is responsible for ensuring that the Board of Commissioners has access to accurate, relevant, and timely information. The Board of Commissioners itself ensures that it obtains adequate information. The Board of Directors provides information to the Board of Commissioners regularly, without delay and comprehensively, on all issues relevant to the corporation. The Board of Commissioners may, at any time ask the Board of Directors to provide additional information.	Dewan Komisaris berhak memperoleh informasi Perusahaan secara tepat waktu, lengkap, terukur dan akurat dan Direksi bertanggung jawab atas penyampaian informasi Perusahaan kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu, lengkap, terukur dan akurat.	The Board of Commissioners has the right to obtain Company information in a timely, complete, measurable, and accurate manner, and the Board of Directors are responsible for conveying Company information to the Board of Commissioners in a timely, complete, measurable, and accurate manner.

3.3. Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris atas Dampak Struktur Kepemilikan terhadap Korporasi

3.3. Responsibility of the Board of Directors and Board of Commissioners for the Impact of Ownership Structure on the Corporation

Rekomendasi Recommendation	Pemenuhan Fulfillment	
3.3.1. Dampak struktur kepemilikan terhadap korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris mempertimbangkan tanggung jawabnya dalam konteks struktur kepemilikan saham dan hubungan antar pemegang saham korporasi yang mungkin berdampak terhadap pengelolaan dan operasi korporasi. The impact of ownership structure on corporations. The Board of Directors and Board of Commissioners consider their responsibilities in the context of the share ownership structure and relationships between corporate shareholders that may have an impact on the management and operations of the corporation.	1. Direksi dan Dewan Komisaris memahami hak, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawabnya masing-masing dalam mengarahkan dan mengendalikan kegiatan Perusahaan. Hal tersebut penting sehingga masing-masing mampu melaksanakan tugas secara profesional, efisien, efektif, dan berkualitas. 2. Direksi dan Dewan Komisaris menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif. 3. Direksi dan Dewan Komisaris menghormati tugas dan wewenang Direksi dalam mengelola Perusahaan dan wewenang Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan serta memberikan nasihat terhadap kebijakan pengelolaan Perusahaan. 4. Perusahaan memiliki struktur pemegang saham yaitu PT PLN (Persero) dengan kepemilikan saham sebesar 99.99% dan YPK PLN dengan kepemilikan saham sebesar 0.01%.	1. The Board of Directors and Board of Commissioners understand their respective rights, obligations, authorities, and responsibilities in directing and controlling the Company's activities. This is important so that each of them is able to carry out their duties professionally, efficiently, effectively, and with quality. 2. The Board of Directors and Board of Commissioners avoid domination by any party, are not influenced by certain interests, are free from conflicts of interest and all influence or pressure, so that decision-making can be carried out objectively. 3. The Board of Directors and the Board of Commissioners respect the duties and authority of the Board of Directors in managing the Company, and the authority of the Board of Commissioners in supervising and providing advice on Company management policies. 4. The Company has a shareholder structure, namely PT PLN (Persero) with a share ownership of 99.99% and YPK PLN with a share ownership of 0.01%.

Prinsip 4. Perilaku Etis dan bertanggung jawab

Principle 4. Ethical and responsible behavior

4.1. Pedoman Etika dan Perilaku

4.1. Code of Conduct

Rekomendasi Recommendation	Pemenuhan Fulfillment	
4.1.1. Pernyataan ini dituangkan dalam Pedoman Perilaku dan Etika Usaha yang harus secara jelas mengungkapkan harapan korporasi bahwa setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta karyawan akan: a. Bertindak untuk kepentingan terbaik korporasi. b. Bertindak dengan jujur dan dengan integritas berdasarkan tinggi.	a. Setiap insan Perusahaan berkomitmen untuk tumbuh dan berkembang bersama dengan Perusahaan, serta menerapkan praktik-praktik bisnis terbaik dalam pengelolaan perusahaan. b. Setiap insan Perusahaan berkomitmen untuk menjunjung tinggi etika, jujur dan amanah, serta berintegritas.	a. Every Company Person is committed to growing and developing together with the Company, as well as implementing the best business practices in company management. b. Every Company Person is committed to upholding ethics, honesty and trustworthiness, and integrity.

Rekomendasi Recommendation	Pemenuhan Fulfillment
c. Bersikap independen dan bertindak bertanggung jawab dengan itikad baik, dengan uji tuntas dan kehati-hatian. d. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi korporasi dan operasinya. e. Menghindari tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tindakan yang tidak etis bertentangan pedoman etika korporasi. f. Tidak terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan apapun yang akan menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan korporasi atau yang akan berdampak negatif terhadap reputasi korporasi. g. Tidak mengambil manfaat atau properti atau informasi yang dimiliki korporasi, kepemilikan aset lainnya atau pelanggannya untuk kepentingan pribadi atau yang menyebabkan kerugian bagi korporasi dan pelanggannya. h. Tidak memanfaatkan jabatannya atau peluang yang diharapkan oleh jabatannya untuk kepentingan pribadi. i. Menghindari perbuatan meminta atau menerima dari pihak ketiga pembayaran, gratifikasi atau keuntungan lain untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang menimbulkan benturan kepentingan/ memberikan keuntungan kepada pihak ketiga secara melanggar peraturan perundang-undangan. j. Menghormati perbedaan pendapat dan hak-hak setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan. k. Menyampaikan pengungkapan yang lengkap, adil, akurat, tepat waktu, dan dapat dipahami dalam laporan dan dokumen yang disampaikan korporasi kepada regulator dan dalam komunikasi publik lainnya. This statement is outlined in the Code of Conduct which must clearly express the corporate's expectations that each member of the Board of Directors and Board of Commissioners as well as employees will: a. Acting to the best interests of the corporation; b. Act honestly and with high standards of integrity; c. Be independent and act on complete information, in good faith, with due diligence and care. d. Comply with the laws and regulations that apply to the corporation and its operations; e. Avoid actions that violate laws and regulations or unethical actions based on corporate ethical guidelines; f. Not be involved or participate in any activity that will create a conflict of interest with the best interests of the corporation or that will have a negative impact on the corporation's reputation;	c. Setiap Insan Perusahaan berkomitmen untuk menghindari setiap tindakan yang menimbulkan benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi independensi. Setiap Insan Perusahaan berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan sesuai dengan klasifikasi informasi. Pengungkapan informasi kepada publik dan stakeholder lainnya harus dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi informasi, kepentingan perusahaan dan kebutuhan pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. d. Setiap Insan Perusahaan berkomitmen untuk menghindari setiap tindakan yang menimbulkan benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi independensi. Setiap Insan Perusahaan berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan sesuai dengan klasifikasi informasi. Pengungkapan informasi kepada publik dan stakeholder lainnya harus dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi informasi, kepentingan perusahaan dan kebutuhan pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. e. Setiap Insan Perusahaan berkomitmen untuk menghindari setiap bentuk tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tindakan yang tidak etis. f. Setiap Insan Perusahaan berkomitmen untuk menghindari setiap tindakan yang menimbulkan benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi independensi. g. Setiap Insan Perusahaan berkomitmen untuk mengoptimalkan aset perusahaan untuk kepentingan penambahan nilai perusahaan sesuai dengan kewenangan dan lingkup pekerjaan. Menjaga, memelihara dan mengamankan aset perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta tidak menggunakan aset perusahaan untuk kegiatan yang melanggar hukum dan etika. h. Setiap Insan Perusahaan berkomitmen untuk menghindari setiap tindakan yang menimbulkan benturan kepentingan, salah satunya memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi.	c. Every Company Person is committed to avoiding any action that creates a conflict of interest that could affect independence. Every Company Employee is obliged to maintain the confidentiality of Company information in accordance with the information classification. Disclosure of information to the public and other stakeholders must be carried out by taking into account the classification of information, company interests, and the needs of interested parties in accordance with applicable legislation. d. Every Company Person is committed to avoiding any action that creates a conflict of interest that could affect independence. Every Company Employee is obliged to maintain the confidentiality of Company information in accordance with the information classification. Disclosure of information to the public and other stakeholders must be carried out by taking into account the classification of information, company interests, and the needs of interested parties in accordance with applicable legislation. e. Every Company Employee is committed to avoiding any form of action that violates laws and regulations or is unethical. f. Every Company Person is committed to avoiding any action that creates a conflict of interest that could affect independence. g. Every Company Person is committed to optimizing company assets for the benefit of adding company value in accordance with their authority and scope of work. Maintain, maintain, and secure company assets in accordance with applicable regulations and not use company assets for activities that violate the law and ethics. h. Every Company Person is committed to avoiding any action that creates a conflict of interest, one of which is using their position for personal gain.

Rekomendasi Recommendation	Pemenuhan Fulfillment	
g. Do not take advantage of property or information owned by the corporation, ownership of other assets or to customers for personal gain, or which causes losses to the corporation and its customers. h. Not taking advantage of his position or the opportunities generated by his position for personal gain. i. Avoid acts of requesting or receiving from third parties payments, gratuities, or other benefits for oneself or for other people which creates a conflict of interest/providing benefits to third parties in violation of statutory regulations. j. Respect differences of opinion and the rights of every member of the Board of Directors, Board of Commissioners, and employees. k. Ensure complete, fair, accurate, timely, and understandable disclosure in reports and documents submitted by the corporation to regulators and in other public communications.	i. Perusahaan mengupayakan terjadinya hubungan yang harmonis antara Perusahaan dengan Mitra Usaha. Seluruh Insan Perusahaan dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan apabila Insan Perusahaan tersebut memiliki benturan kepentingan dengan Mitra Usaha, serta membuka peluang terjadinya gratifikasi serta menerima suap dan gratifikasi. j. Setiap Insan Perusahaan wajib untuk menjaga hubungan baik dengan seluruh stakeholder perusahaan sesuai dengan nilai-nilai perusahaan. Dalam rangka menjaga keharmonisan antar Insan Perusahaan, maka Insan Perusahaan wajib untuk menghormati sesama Insan Perusahaan, bertindak adil dalam menyelesaikan permasalahan atau perbedaan pendapat, serta menciptakan suasana kerja yang kondusif untuk Insan Perusahaan. k. Setiap Insan Perusahaan bertanggungjawab untuk menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan sesuai dengan klasifikasi informasi. Pengungkapan informasi kepada publik dan stakeholder lainnya harus dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi informasi, kepentingan perusahaan dan kebutuhan pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan-undangan yang berlaku.	i. The Company strives for a harmonious relationship between the Company and its Business Partners. All Company Employees are prohibited from participating in decision-making if the Company Employees have a conflict of interest with Business Partners, as well as opening up opportunities for gratification and accepting bribes and gratuities. j. Every Company Person is obliged to maintain good relations with all company stakeholders in accordance with company values. In order to maintain harmony between Company Employees, Company Employees are obliged to respect fellow Company Employees, act fairly in resolving problems or differences of opinion, and create a conducive working atmosphere for Company Employees. k. Every Company Employee is obliged to maintain the confidentiality of Company information in accordance with the information classification. Disclosure of information to the public and other stakeholders must be carried out by taking into account the classification of information, company interests, and the needs of interested parties in accordance with applicable legislation.
4.1.2. Direksi menetapkan kebijakan dan praktik anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, anti suap, antikorupsi, antikecurangan (anti fraud), keterlibatan dalam politik dengan merujuk pada standar nasional atau internasional mengenai anti pencucian uang, anti suap, antikorupsi, antikecurangan atau standar terkait lainnya. The Board of Directors determines policies and practices for anti-money laundering and terrorism financing, anti-bribery, anti-corruption, anti-fraud, involvement in politics by referring to national or international standards regarding anti-money laundering, anti-bribery, anti-corruption, anti-fraud, or other related standards.	Dalam rangka menciptakan korporasi yang patuh terhadap tata kelola yang baik, perusahaan berkomitmen untuk menjalankan setiap proses bisnis secara transparan dan akuntabel. Sebagai bentuk komitmen Direksi, Dewan Komisaris serta Insan Perusahaan dalam mendukung peningkatan integritas untuk mewujudkan manajemen anti fraud, mengelola dan mencegah terjadinya fraud, memperkuat sistem pengendalian anti fraud, serta mempositifkan budaya kerja dan lingkungan bisnis yang berintegritas.	In order to create a corporation that adheres to good governance, the Company is committed to carrying out every business process transparently and accountably. As a form of commitment of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Company Employees in supporting increased integrity, to realize anti-fraud management, manage and prevent fraud, strengthen the anti-fraud control system, and improve a work culture and business environment with integrity.

4.2. Nilai – nilai dan Budaya Organisasi
4.2. Organizational Values and Culture

Rekomendasi Recommendation	Pemenuhan Fulfillment	
4.2.1. Korporasi mengartikulasikan, menumbuhkan dan mengungkapkan budaya dan nilai-nilai korporasi. Corporations articulate, cultivate, and express corporate culture and values.	Perusahaan telah menetapkan panduan dalam implementasi tata nilai perusahaan dalam bersikap, bertindak dan berperilaku bagi Insan Perusahaan.	The Company established guidelines for implementing company values in attitudes, actions and behavior for Company Employees.

4.3. Komunikasi dan Penegakan Pedoman Etika, Nilai-nilai dan Budaya
4.3. Communication and Enforcement of Ethics, Values, and Culture Guidelines

	Rekomendasi Recommendation	Pemenuhan Fulfillment	
4.3.1.	Pedoman perilaku dan kode etik korporasi dikomunikasikan secara efektif kepada Direksi, Dewan Komisaris, serta seluruh karyawan, diintegrasikan ke dalam strategi dan operasi korporasi termasuk sistem manajemen risiko dan struktur remunerasi, serta ditegakkan. The corporate code of conduct is communicated effectively to the Board of Directors, Board of Commissioners, and all employees, integrated into corporate strategy and operations including the risk management system and remuneration structure, and enforced.	Perusahaan telah menetapkan Standar Etika Perusahaan, sebagai pedoman etika dan perilaku insan Perusahaan, sebagai landasan dalam mengelaborasi proses bisnis dalam rangka mengakomodasi visi, misi dan tujuan perusahaan. Perusahaan telah menetapkan aturan dan pedoman penerapan manajemen risiko terintegrasi serta struktur remunerasi.	The Company established Corporate Ethical Standards, as guidelines for the ethics and behavior of Company employees, as a basis for carrying out the Company's business processes in order to carry out the Company's vision, mission, and goals. The Company established rules and guidelines for implementing integrated risk management as well as a remuneration structure.

Prinsip 5. Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan
Principle 5. Risk Management, Internal Control, and Compliance

5.1. Pengendalian Internal dan Kepatuhan
5.1. Internal Control and Compliance

	Rekomendasi Recommendation	Pemenuhan Fulfillment	
5.1.1.	Direksi melakukan reviu secara berkala atas ketepatan desain dan efektivitas operasional sistem governansi, pengelolaan risiko, pengendalian internal, dan kepatuhan korporasi dan melaporkan pelaksanaan dan hasil reviu kepada para pemegang saham melalui laporan tahunan Korporasi. The Board of Directors carries out regular reviews of the accuracy of the design and operational effectiveness of the governance system, risk management, internal control, and corporate compliance and reports the implementation and results of the review to shareholders through the Corporate's annual report.	Telah dilaksanakan reviu secara berkala atas: 1. efektivitas sistem governansi melalui assessment GCG yang dilaksanakan secara periodik oleh assessor independen; 2. reviu atas pelaksanaan pengelolaan risiko melalui assessment maturity level risiko; 3. reviu kepatuhan terhadap pengendalian internal telah dilakukan oleh auditor eksternal, serta tidak terdapat temuan berkaitan dengan pengendalian internal; 4. auditor eksternal telah melakukan audit pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Hasil atas reviu dan laporan auditor disampaikan kepada pemegang saham.	Periodic reviews have been carried out on: 1. effectiveness of the governance system through GCG assessments carried out periodically by independent assessors; 2. review of the implementation of risk management through risk maturity level assessment; 3. a review of compliance with internal control has been carried out by an external auditor, and there are no findings related to internal control; 4. external auditors have carried out audits on compliance with laws and regulations. The results of the review and auditor's report are submitted to shareholders.

5.2. Manajemen Risiko
5.2. Risk management

	Rekomendasi Recommendation	Pemenuhan Fulfillment	
5.2.1.	Strategi dan risiko merupakan satu kesatuan, dipisahkan secara transparan, masuk ke dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, serta dalam diskusi di rapat Dewan Komisaris dan Direksi. Strategy and risk are one unit, disclosed transparently, included in the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners, as well as in discussions at meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors.	1. Peran dan akuntabilitas Direksi telah dijabarkan dalam Peraturan Direksi terkait Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi. 2. Pengambilan keputusan strategis dilakukan pada mekanisme 4EP yang tertuang dalam Peraturan Direksi terkait Penerapan GRC.	1. The role and accountability of the Board of Directors have been described in the Directors' Regulations regarding the implementation of Integrated Risk Management. 2. Strategic decision-making is based on the 4EP mechanism contained in the Directors' Regulations regarding GRC implementation.

Rekomendasi Recommendation	Pemenuhan Fulfillment	
5.3.3. Komite Pemantau Manajemen Risiko membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dengan menciptakan mekanisme yang transparan, fokus, dan independen dalam pengawasan manajemen risiko korporasi. The Risk Management Monitoring Committee assists in carrying out the duties of the Board of Commissioners by creating a transparent, focused, and independent mechanism for supervising corporate risk management.	Komite Investasi dan Manajemen Risiko melakukan pengawasan manajemen risiko korporasi dengan melakukan rapat secara berkala dengan bidang manajemen risiko.	The Investment and Risk Management Committee supervises corporate risk management by holding regular meetings with the risk management sector.

5.3. Integrasi Governansi, Manajemen Risiko dan Kepatuhan

5.3. Integration of Governance, Risk Management, and Compliance

Rekomendasi Recommendation	Pemenuhan Fulfillment	
5.3.1. Direksi membangun sistem governansi, manajemen risiko, dan kepatuhan (GRC) yang terintegrasi, dengan menangani berbagai ketidakpastian secara terpadu dan dengan integritas yang tinggi, untuk memastikan bahwa korporasi dapat mencapai tujuannya. The Board of Directors built an integrated governance, risk management and compliance (GRC) system, by handling various uncertainties in an integrated manner and with high integrity, to ensure that the corporation can achieve its goals.	Perusahaan telah menetapkan pandoman sebagai acuan dalam penerapan governance, risk and compliance (GRC) di lingkungan perusahaan, agar penerapan GRC dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan yang memenuhi kaidah GCG sesuai dengan visi, misi dan dilandasi dengan budaya perusahaan.	The Company has established guidelines as a reference in implementing governance, risk and compliance (GRC) in the Company environment, so that the implementation of GRC can increase the effectiveness, efficiency, growth and sustainability of the Company which meets GCG principles in accordance with the vision, mission and is based on company culture.
5.3.2. Direksi memastikan bahwa bagian yang membawahi fungsi kepatuhan tidak merangkap melaksanakan fungsi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. The Board of Directors ensures that the department in charge of the compliance function does not concurrently carry out functions that have the potential to cause a conflict of interest.	Fungsi kepatuhan berada dibawah VP Risk Management and Compliance.	The compliance function is under the VP of Risk Management and Compliance.

5.4. Audit Internal

5.4. Internal Audit

Rekomendasi Recommendation	Pemenuhan Fulfillment	
5.4.1. Dewan Komisaris melalui Komite Audit memastikan dan memastikan bahwa fungsi audit internal membantu korporasi untuk mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang objektif dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan governansi korporasi. The Board of Commissioners, through the Audit Committee, monitors and ensures that the internal audit function helps the corporation to achieve its goals by bringing an objective and disciplined approach to evaluating and improving the effectiveness of risk management, internal control, and corporate governance.	1. Audit internal dilakukan secara objektif dan independen dan Satuan Pengawasan Intern Audit internal secara fungsional bertanggungjawab dan melapor kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. 2. Dewan Komisaris melalui Komite Audit memastikan fungsi audit internal memiliki wewenang, sumber daya dan akses atas informasi yang memadai untuk melaksanakan perannya secara efektif. 3. Komite Audit mengajaji efektivitas pelaksanaan audit internal dan menyampaikan hasilnya kepada Dewan Komisaris. 4. Komite Audit memastikan pelaksanaan audit internal dilakukan berdasarkan standar professional audit internal yang berlaku.	1. Internal audits are carried out objectively and independently from the Internal Audit Unit. Internal audit is functionally responsible and reports to the Board of Commissioners through the Audit Committee. 2. The Board of Commissioners through the Audit Committee ensures that the internal audit function has adequate authority, resources, and access to information to carry out its role effectively. 3. The Audit Committee reviews the effectiveness of internal audit implementation and submits the results to the Board of Commissioners. 4. The Audit Committee ensures that internal audits are carried out based on applicable internal audit professional standards.

Prinsip 6. Pengungkapan dan Transparansi

Principle 6. Disclosure and Transparency

6.1. Kebijakan Pengungkapan

6.1. Disclosure Policy

Rekomendasi Recommendation		Pemenuhan Fulfillment	
6.1.1	Korporasi memiliki kebijakan dan prosedur pengungkapan dan transparansi yang memastikan pengungkapan informasi material dan menjaga informasi sensitif serta rahasia korporasi. The corporation has disclosure and transparency policies and procedures that ensure the disclosure of material information and safeguard sensitive information and corporate secrets.	Perusahaan menyusun pedoman pengelolaan informasi, data dan dokumen perusahaan secara aman, tepat waktu dan bertanggung jawab sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kebijakan ini diatur mengenai pengklasifikasian, pengungkapan dan pengamanan informasi, data dan dokumen Perusahaan.	The Company prepares guidelines for managing company information, data, and documents safely, timely, and responsibly as a form of compliance with applicable laws and regulations. This policy regulates the classification, disclosure and security of Company information, data, and documents.
6.1.2	Hak pemegang saham untuk memperoleh secara teratur dan tepat waktu informasi material yang relevan tentang korporasi harus dipenuhi. Shareholders' rights to obtain regularly and in a timely manner relevant material information about the corporation must be fulfilled.	Direksi memberikan perlakuan yang sama (fairness) dalam memberikan informasi kepada pemegang saham secara teratur dan tepat waktu. Perusahaan menyampaikan informasi (laporan manajemen triwulanan dan laporan manajemen tahunan) dengan muatan dan waktu yang sama kepada pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas.	The Board of Directors provides equal treatment (fairness) in providing information to shareholders on a regular and timely basis. The Company submits information (quarterly management reports and annual management reports) with the same content and time to majority shareholders and minority shareholders.

6.2. Laporan Keuangan dan Keberlanjutan

6.2. Financial Statements and Sustainability Reports

Rekomendasi Recommendation		Pemenuhan Fulfillment	
6.2.1.	Korporasi mengungkapkan sistem dan prosedur untuk memastikan bahwa laporan keuangan interim yang tidak diaudit atau direviu oleh auditor eksternal secara material adalah akurat, lengkap, dan memberikan investor informasi yang tepat untuk membuat keputusan investasi yang tepat. The Corporation discloses systems and procedures to ensure that interim financial reports that have not been audited or reviewed by an external auditor are materially accurate, complete, and provide investors with appropriate information to make informed investment decisions.	Perusahaan telah mengungkapkan sistem dan prosedur untuk memastikan bahwa laporan keuangan interim yang tidak diaudit atau direviu oleh auditor eksternal secara material adalah akurat, lengkap, dan memberikan investor informasi yang tepat untuk membuat keputusan investasi yang tepat.	The Company has disclosed systems and procedures to ensure that interim financial reports that have not been audited or reviewed by an external auditor are materially accurate, complete, and provide investors with appropriate information to make informed investment decisions.
6.2.2.	Komite Audit memastikan kualitas audit laporan keuangan yang dilakukanoleh auditor eksternal. Kegiatan ini termasuk merekomendasikan penunjukan, penunjukan kembali dan, jika perlu, pemberhentian dan remuneras auditor eksternal. The Audit Committee ensures the quality of financial report audits carried out by external auditors. These activities include recommending the appointment, reappointment and, if necessary, dismissal and remuneration of external auditors.	1. Dewan Komisaris secara rutin menyelenggarakan rapat pengawasan dan koordinasi progres audit Laporan Keuangan dengan KAP terpilih. 2. Dewan Komisaris menerbitkan surat rekomendasi penunjukan auditor eksternal. 3. Dewan Komisaris melalui Komite Audit memastikan agar auditor eksternal menginformasikan semua temuan dan masalah signifikan yang ditemukan auditor eksternal selama pelaksanaan audit.	1. The Board of Commissioners regularly holds monitoring and coordination meetings on the progress of the audit of Financial Reports with selected KAPs. 2. The Board of Commissioners issues a letter of recommendation for the appointment of an external auditor. 3. The Board of Commissioners, through the Audit Committee, ensures that the external auditor informs all significant findings and problems discovered by the external auditor during the audit.

Rekomendasi Recommendation	Pemenuhan Fulfillment	
6.3.3. Laporan keberlanjutan harus disiapkan dan diungkapkan dengan akurat dan disusun sesuai kerangka pelaporan keberlanjutan nasional atau internasional. Sustainability reports must be prepared and disclosed accurately, and prepared in accordance with national or international sustainability reporting frameworks.	Direksi telah menyusun sustainability report.	The Board of Directors prepared a sustainability report.
6.3.4. Korporasi menerbitkan laporan tahunan secara terintegrasi yang menampilkan kinerja historis ke dalam konteks dan menggambarkan risiko, peluang, dan prospek korporasi di masa depan, sehingga membantu pemegang saham dan pemangku kepentingan memahami tujuan strategis korporasi dan kemajuannya dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan. Corporations publish integrated annual reports that put historical performance into context and describe the corporation's risks, opportunities, and future prospects, thereby helping shareholders and stakeholders understand the corporation's strategic objectives and its progress in creating sustainable value.	Perusahaan menerbitkan laporan tahunan terintegrasi yang menggambarkan historis kinerja, risiko, peluang dan strategi gow perusahaan ke depan.	The Company publishes an integrated annual report that describes the Company's historical performance, risks, opportunities, and future strategic goals.

6.3. Diseminasi Informasi

6.3. Information Dissemination

Rekomendasi Recommendation	Pemenuhan Fulfillment	
6.3.1. Saluran penyebaran informasi harus menyediakan akses yang setara, tepat waktu, dan relatif mudah untuk informasi yang relevan bagi pengguna. Information dissemination channels should provide equal, timely and relatively inexpensive access to relevant information for users.	Perusahaan memiliki situs website perusahaan dan media sosial yang dapat diakses secara umum, dimana menyediakan informasi yang update dan tepat waktu.	The Company has a publicly accessible company website and social media, which provide updated and timely information.
6.3.2. Korporasi mentaatkan bahwa pernyataan tahunan terhadap penerapan Pedoman Umum Governance Korporat Indonesia, termasuk penjelasan atas penerapan atas masing-masing Rekomendasi dan Panduan tersedia di situs web selama jangka waktu minimal lima tahun. The Corporation ensures that an annual statement regarding the implementation of the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance, including an explanation of the implementation of each Recommendation and Guide is available on the website for a minimum period of five years.	Perusahaan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan Permen BUMN PER-(1/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN, yang saat ini telah diubah menjadi Peraturan Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023, sehingga dilakukan beberapa penyesuaian dan pemutakhiran atas aturan pengganti Permen BUMN tersebut. Perusahaan telah menerapkan penilaian atas pelaksanaan implementasi tata kelola sesuai dengan indikator pada Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2017 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN, yang saat ini telah diubah dengan adanya Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. SK-72/S.MBU/08/2023. Selain itu, Perusahaan juga telah mengungkapkan penerapan Pedoman Umum Governance Korporat Indonesia, termasuk penjelasan atas penerapan atas masing-masing Rekomendasi dalam Laporan Tahunan Perusahaan yang dimuat dalam situs web.	The Company has implemented good corporate governance in accordance with BUMN Ministerial Regulation PER-(1/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in BUMN, which has now been changed to Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises based on BUMN Ministerial Regulation No. PER-2/MBU/03/2023, several adjustments and updates have been made to the regulations replacing the BUMN Ministerial Regulation. The Company has carried out an assessment of the implementation of governance in accordance with the indicators in the Decree of the Secretary of the Ministry of SOE No. SK-16/S.MBU/2017 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in BUMN, which has now been revoked with the Decree of the Secretary of the Minister of SOE No. SK-72/S.MBU/08/2023. Apart from that, the Company has also disclosed the implementation of the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance, including an explanation of the implementation of each Recommendation in the Company's Annual Report, which is published on the website.

Rekomendasi Recommendation	Pemenuhan Fulfillment	
6.3.3. Untuk korporasi yang terdaftar di pasar modal di yurisdiksi selain yurisdiksi asal, peraturan perundang-undangan atas governansi korporasi yang berlaku harus diungkapkan dengan jelas. Dalam hal cross listing kriteria dan prosedur cross listing kriteria dan prosedur untuk mengakui penyelesaian listing untuk listing utama harus transparan dan didokumentasikan. For corporations listed on the capital market in jurisdictions other than the home jurisdiction, the applicable corporate governance laws and regulations must be clearly disclosed. In the case of cross listing, cross listing criteria and procedures, criteria and procedures for recognizing listing requirements for the main listing must be transparent and documented.	Perusahaan tidak terdaftar pada pasar modal.	The Company is not listed on the capital market.

Prinsip 7. Perlindungan terhadap Hak-Hak Pemegang Saham

Principle 7. Protection of Shareholder Rights

7.1. Hak Pemegang Saham

7.1. Shareholder Rights

Rekomendasi Recommendation	Pemenuhan Fulfillment	
7.1.1. Korporasi memiliki suatu kebijakan komunikasi yang memfasilitasi dan mendorong partisipasi pemegang saham atau investor. The corporation has a communications policy that facilitates and encourages shareholder or investor participation.	Perusahaan memiliki panduan/mekanisme hubungan kerja formal dengan pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.	The Company has a formal working relationship guide/mechanism with shareholders through the General Meeting of Shareholders.
7.1.2. Korporasi yang merupakan entitas induk memastikan bahwa kebijakan governance korporasinya berlaku bagi entitas anak dan entitas sepengendali yang di dalamnya investasi korporasi adalah signifikan. The corporation, which is the parent entity, ensures that its corporate governance policies apply to subsidiaries and entities under common control in which the corporation's investment is significant.	PT PLN NP memiliki tata kelola Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi (APPA) yang mengatur alur komunikasi antara PT PLN NP selaku induk dengan AP PLN NP. Selain itu juga terdapat arahan-arahan dari Pemegang Saham dalam RUPS RKAP & Laporan Pertanggungjawaban Tahunan (LPT) Anak Perusahaan (AP) yang mengamatkan kebijakan kebijakan di lingkup PLN Group terlaksana di masing-masing AP PLN NP.	PT PLN NP has Subsidiaries and Affiliated Companies governance which regulates the flow of communication between PT PLN NP as the parent and PLN NP Subsidiaries. Apart from that, there were also directions from Shareholders in the Subsidiaries ARCP & Annual Accountability Report (AAR) GMS, which mandated that policies within the PLN Group be implemented in each PLN NP Subsidiaries.

Rekomendasi Recommendation		Pemenuhan Fulfillment	
7.1.1.	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang mengatur akuisisi, pengambilalihan, dan transaksi luar biasa seperti merger dan penjualan aset korporasi yang substansial untuk memastikan transaksi terjadi secara transparan dan dalam kondisi yang wajar dan melindungi hak-hak semua pemegang saham sesuai dengan haknya. Corporations have rules and procedures governing acquisitions, takeovers, and extraordinary transactions such as mergers and sales of substantial corporate assets to ensure transactions occur transparently and under fair conditions and protect the rights of all shareholders according to their class.	Tentang aturan prosedur tersebut telah diatur dalam Anggaran Dasar PLN NP serta Board Manual PLN NP.	Regarding these procedural rules, they have been regulated in the PLN NP Articles of Association and the PLN NP Board Manual.

7.2. Perlakuan Adil Terhadap Pemegang Saham

7.2. Fair Treatment of Shareholders

Rekomendasi Recommendation		Pemenuhan Fulfillment	
7.2.1.	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan a) semua pemegang saham dari seri yang sama dalam satu kelas saham harus diperlakukan setara, b) pengungkapan aturan dan prosedur tersebut serta pengungkapan struktur modal dan pengaturan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memperoleh penguasaan atau kendali yang tidak proporsional dengan kepemilikan sahamnya. Corporations have rules and procedures that ensure a) all shareholders of the same series in one class of shares must be treated equally, b) disclosure of such rules and procedures as well as disclosure of capital structures and arrangements that allow certain shareholders to obtain disproportionate influence or control of share ownership.	Perusahaan memiliki struktur pemegang saham yaitu PT PLN (Persero) dengan kepemilikan saham sebesar 99.99% dan 1% PLN dengan kepemilikan saham sebesar 0.01%. Direksi memberikan perlakuan yang setara (kesetaraan) dalam memberikan informasi kepada Pemegang Saham.	The Company has a shareholder structure, namely PT PLN (Persero) with a share ownership of 99.99% and 1% PLN with a share ownership of 0.01%. The Board of Directors provides equal treatment (fairness) in providing information to Shareholders.
7.2.2.	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan transaksi pihak berelasi disetujui dan dilaksanakan sedemikian rupa yang dapat meyakinkan bahwa benturan kepentingan telah dikelola dengan tepat, dan melindungi kepentingan korporasi dan pemegang saham. Corporations have rules and procedures that ensure related party transactions are approved and implemented in a manner that ensures that conflicts of interest are managed appropriately, and protects the interests of the corporation and shareholders.	Perusahaan telah memiliki aturan mengenai pengelolaan benturan kepentingan.	The Company has regulations regarding managing conflicts of interest.

Rekomendasi Recommendation	Pemenuhan Fulfillment	
7.1.3. Korporasi memiliki dan mengungkapkan kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading. Korporasi memiliki aturan yang jelas mengenai pembagian apa pun dalam saham korporasi yang dilakukan oleh direksi, komisaris dan orang dalam untuk memastikan bahwa mereka tidak boleh memanfaatkan keuntungan secara langsung atau tidak langsung dari informasi yang tidak/belum tersedia di pasar. Corporations have and disclose policies to prevent insider trading. Corporations have clear rules regarding any trading in corporate shares carried out by directors, commissioners and insiders to ensure that anyone cannot profit directly or indirectly from information that is not/not yet available on the market.	Perusahaan telah memiliki aturan mengenai pedoman perilaku dan benturan kepentingan. Setiap tahunnya Direksi dan Dewan Komisaris menandatangani Pakta Integritas, dimana didalamnya diatur bahwa Direksi dan Dewan Komisaris berkomitmen untuk tidak melakukan pengambilan keputusan serta tidak melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan.	The Company has rules regarding code of conduct and conflicts of interest. Every year the Board of Directors and Board of Commissioners sign an Integrity Pact, which stipulates that the Board of Directors and Board of Commissioners are committed to not making decisions and not carrying out transactions that contain conflicts of interest.

7.3. Rapat Umum Pemegang Saham

7.3. General Meeting of Shareholders

Rekomendasi Recommendation	Pemenuhan Fulfillment	
7.3.1. Korporasi melakukan panggilan RUPS dengan agenda dan materi RUPS selengkap dan sedini mungkin (paling lambat 28 hari sebelum RUPS) untuk memberikan waktu dan materi yang cukup bagi pemegang saham untuk mempelajari dengan baik agenda rapat. Undangan rapat dan seluruh informasi RUPS disampaikan melalui sarana elektronik seperti melalui situs web korporasi. The corporation calls for a GMS with the GMS agenda and materials as complete and as early as possible (no later than 28 days before the GMS) to provide sufficient time and materials for shareholders to properly study the meeting agenda. Meeting invitations and all GMS information are disclosed via electronic means such as through the corporate website.	Dalam Anggaran Dasar telah disebutkan bahwa Direksi wajib melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan. Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat, disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan. Dalam prakteknya, materi RUPS telah disampaikan kepada Pemegang Saham, sehingga berdapat waktu yang cukup bagi Pemegang Saham untuk mempelajari agenda rapat dengan baik. Korporasi bukan merupakan Perusahaan Terbuka, dimana undangan rapat dan seluruh informasi RUPS tidak wajib disampaikan melalui situs website perusahaan, hanya ringkasan atas pelaksanaan RUPS yang dicantumkan pada website perusahaan.	It is stated that the Board of Directors is obliged to summon a General Meeting of Shareholders no later than 14 (fourteen) days before the date the General Meeting of Shareholders is held. Materials to be discussed at the GMS are available at the Company's office from the date the invitation for the GMS is given until the date the GMS is held. In practice, the GMS material has been delivered to Shareholders, so that there is sufficient time for Shareholders to study the meeting agenda properly. A corporation is not a public company, where meeting invitations and all GMS information are not required to be disclosed on the Company website. Only a summary of the implementation of the GMS is included on the Company website.
7.3.2. Korporasi memiliki dan mengungkapkan aturan dan prosedur yang memfasilitasi pemegang saham dalam berpartisipasi dan memberikan suara secara efektif di RUPS. The corporation has and discloses rules and procedures that facilitate shareholders in participating and voting effectively at the GMS.	Perusahaan telah menyusun aturan dan prosedur mengenai Rapat Umum Pemegang Saham pada Anggaran Dasar Perusahaan (Pasal 21, 22, 23 dan 24).	The Company has prepared rules and procedures regarding the General Meeting of Shareholders in the Company's Articles of Association (Articles 21, 22, 23 and 24).

Rekomendasi Recommendation	Pemenuhan Fulfillment	
7.3.3. Pemegang saham berpartisipasi efektif dalam menetapkan pemunjukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Shareholders participate effectively in determining the appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners.	Pemegang Saham menetapkan Direksi dan Dewan Komisaris melalui Keputusan RUPS secara Sirkuler setelah dilakukan proses penilaian atas calon Direktur dan/atau Komisaris.	Shareholders determine the Board of Directors and Board of Commissioners through a Circular GMS Resolution after an assessment process has been carried out on prospective Directors and/or Commissioners.
7.3.4. Korporasi memastikan transparansi dan akuntabilitas auditor eksternal di RUPS. The corporation ensures transparency and accountability of external auditors at the GMS.	RUPS memberikan kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan pemunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai auditor yang akan mengaudit laporan keuangan Perusahaan, laporan evaluasi kinerja dan laporan kepatuhan.	The GMS gives power to the majority Shareholders to determine the appointment of a Public Accounting Firm as an auditor who will audit the Company's financial reports, performance evaluation reports, and compliance reports.
7.3.5. Penyampaian hasil pemungutan suara dan ringkasan risalah RUPS secara lengkap diumumkan ke publik pada hari kerja berikutnya. Submission of voting results and a complete summary of the minutes of the GMS will be announced to the public on the following working day.	Korporasi bukan merupakan Perusahaan Terbuka serta hanya memiliki 2 pemegang saham dengan pemegang saham mayoritas adalah PT PLN (Persero) dengan penyertaan kepemilikan saham sebesar 99,99% dan 1% PLN dengan penyertaan kepemilikan saham sebesar 0,01%.	The corporation is not a public company and only has two shareholders with the majority shareholders being PT PLN (Persero), with a share ownership percentage of 99.99% and 1% PLN with a share ownership percentage of 0.01%.
	Seluruh hasil suara/keputusan Pemegang Saham tidak wajib diunggahkan melalui situs website perusahaan, hanya ringkasan atas pelaksanaan RUPS yang diumumkan pada website perusahaan.	All results of Shareholders' 'votes' decisions are not required to be disclosed on the Company website. Only a summary of the implementation of the GMS is included on the Company website.

Prinsip 8. Pemangku Kepentingan Lainnya
Principle 8. Other Stakeholders

8.1. Keterlibatan Pemangku Kepentingan Kunci (*Stakeholder Engagement*)
8.1. Key Stakeholder Engagement (Stakeholder Engagement)

Rekomendasi Recommendation	Pemenuhan Fulfillment	
8.1.1. Korporasi melalui Sekretaris Korporasi melaksanakan komunikasi yang regular, transparan dan efektif dengan pemangku kepentingan kunci serta memahami harapan dan keluhan mereka serta dampak korporasi terhadap mereka. The Corporation, through the Corporate Secretary, carries out regular, transparent, and effective communication with key stakeholders and involves them to understand their hopes and complaints as well as the impact of the corporation on them.	Sekretaris Perusahaan memiliki kewajiban dalam merencana, melaksanakan, mengembangkan dan evaluasi pengelolaan strategi komunikasi, hubungan masyarakat, media dan stakeholders Perusahaan.	The Corporate Secretary has the obligation to plan, implement, develop, and evaluate the management of communication strategies, public relations, media, and Company stakeholders.

8.2. Integrasi Keberlanjutan dalam Model Bisnis

8.2. Integration of Sustainability in Business Models

	Rekomendasi Recommendation	Pemenuhan Fulfillment	
8.2.1.	Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi bertanggung jawab, akuntabel dan transparan atas governansi keberlanjutan, termasuk menetapkan strategi, prioritas, dan target keberlanjutan korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris memasukkan pertimbangan keberlanjutan ketika menjalankan peranannya, termasuk antara lain dalam pengembangan dan implementasi strategi korporasi, rencana bisnis, rencana aksi utama dan manajemen risiko. The Board of Commissioners together with the Board of Directors is responsible, accountable, and transparent for sustainability governance, including determining corporate sustainability strategies, priorities, and targets. The Board of Directors and Board of Commissioners include sustainability considerations when carrying out their roles, including, among others, in the development and implementation of corporate strategy, business plans, main action plans, and risk management.	1. Direksi memastikan strategi, prioritas, dan target keberlanjutan perusahaan serta kinerja terhadap target dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan. 2. Direksi dan Dewan Komisaris mengikuti dan memahami masalah keberlanjutan yang relevan bagi perusahaan, melalui Rapat Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi. 3. Direksi menunjuk VP CRP yang berperan khusus dalam mengelola strategi keberlanjutan, termasuk mengintegrasikan pertimbangan keberlanjutan dalam kegiatan korporasi.	1. The Board of Directors ensures that the Company's strategy, priorities, and sustainability targets as well as performance against targets are communicated to stakeholders. 2. The Board of Directors and Board of Commissioners follow and understand sustainability issues that are relevant to the Company, through Supervisory Meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors. 3. The Board of Directors appoints a VP of CRP, who has a special role in managing the sustainability strategy, including integrating sustainability considerations into corporate activities.

8.3. Perlindungan terhadap Pemangku Kepentingan

8.3. Protection of Stakeholders

	Rekomendasi Recommendation	Pemenuhan Fulfillment	
8.3.1.	Direksi memastikan dan mengungkapkan bahwa operasi korporasi mencerminkan penerapan standar etika, tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tinggi di seluruh korporasi dan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang tepat diterapkan untuk menghormati serta memenuhi hak-hak pemangku kepentingan. The Board of Directors ensures and discloses that corporate operations reflect the application of high standards of ethics, social and environmental responsibility. Throughout the corporation and ensures that appropriate policies and procedures are implemented to respect and comply with stakeholder rights.	Perusahaan telah menerapkan standar etika perusahaan serta adanya kebijakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.	The Company has implemented corporate ethical standards as well as social and environmental responsibility policies.
8.3.2.	Direksi mendorong karyawan bekerja untuk kepentingan jangka panjang korporasi dan mengedepankan keberlanjutan. The Board of Directors encourages employees to work for the long-term interests of the corporation and prioritizes sustainability.	Setiap insan Perusahaan berkomitmen untuk tumbuh dan berkembang bersama dengan perusahaan, dengan wajib untuk berani mengambil inisiatif terkait urusan pekerjaan, bekerja secara sistematis dan berkelanjutan, serta cepat menyesuaikan diri dan tanggap terhadap perubahan yang terjadi.	Every Company Person is committed to growing and developing together with the Company, with the obligation to have the courage to take initiative regarding work matters, learn systematically and continuously, and quickly adapt and be responsive to changes that occur.

Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders

Pemegang Saham memiliki kekuasaan tertinggi yang dijalankan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam menentukan keputusan strategis serta hal-hal lain yang tidak diserahkan kepada Dewan Komisaris atau Direksi. RUPS merupakan organ kepemilikan yang menjadi wadah bagi Pemegang Saham untuk menjaminkan hak dan kewenangannya. RUPS secara khusus memiliki kewenangan diantaranya mengesahkan perubahan Anggaran Dasar, mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris, menyetujui atau menolak rencana kerja Perusahaan, menetapkan perhitungan alokasi laba perusahaan, mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, memberikan persetujuan atas laporan tahunan, dan menunjuk akuntan publik, serta menetapkan jumlah dan jenis kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi. Pengambilan keputusan oleh RUPS dapat dilakukan dalam forum pertemuan atau melalui surat keputusan yang ditetapkan secara sirkuler.

Shareholders hold the highest authority, exercised through the General Meeting of Shareholders (GMS) mechanism, to determine strategic decisions and other matters not delegated to the Board of Commissioners or Directors. The GMS is an ownership body that provides a platform for Shareholders to exercise their rights and authorities. The GMS specifically holds the authority to, among other things, ratify amendments to the Articles of Association, appoint and dismiss Directors and the Board of Commissioners, approve or reject the Company's business plan, determine the allocation of the Company's profits, evaluate the performance of the Board of Commissioners and Directors, approve annual reports, appoint public accountants, and determine the compensation for the Board of Commissioners and Directors. Decisions made by the GMS can be taken either during a meeting or through a circular resolution.

Komposisi kepemilikan saham Perusahaan menjadikan PT PLN (Persero) sebagai Pemegang Saham utama dan pengendali Perusahaan dengan kepemilikan saham sebesar 99,99%. Sementara 0,01% kepemilikan saham Perusahaan dimiliki oleh Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero). Direktur Utama PT PLN (Persero) merupakan representasi pemegang saham utama dan pengendali. Secara teknis hubungan dengan anak perusahaan berada di bawah Direktur Perencanaan PT PLN (Persero) melalui Divisi Manajemen Portofolio.

The Company's shareholding composition places PT PLN (Persero) as the principal and controlling Shareholder, holding 99.99% of the Company's shares. Meanwhile, 0.01% of the Company's shares are owned by the PT PLN (Persero) Education and Welfare Foundation. The President Director of PT PLN (Persero) represents the main and controlling Shareholder. Technically, the relationship with subsidiaries is managed under the Director of Planning of PT PLN (Persero) through the Portfolio Management Division.

Sebagai organ utama tata kelola Perusahaan, Pengambilan keputusan oleh Pemegang Saham sepenuhnya didasarkan pada kepentingan Perusahaan dengan mengedepankan prinsip kewajaran dan kesetaraan serta aspek keberlanjutan. Berdasarkan hal tersebut, Pemegang Saham Pengendali bertanggung jawab untuk:

1. Memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan pada pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengungkapkan kepada pihak yang berwenang informasi tentang Pemegang Saham Pengendali sampai dengan Pemegang Saham Pengendali Terakhir (Ultimate Shareholders) dalam hal terdapat dugaan terjadi pelanggaran ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau dalam hal diminta oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menjaminkan agar akuntabilitas dan hubungan antara perusahaan-perusahaan yang dibawah kendalinya dilakukan secara jelas.

As the principal organ of the Company's governance, the Shareholders' decision-making process is entirely based on the Company's interests, prioritizing principles of fairness, equity, and sustainability. Based on these principles, the Controlling Shareholder is responsible for:

1. Considering the interests of minority shareholders and other stakeholders in accordance with the Articles of Association and prevailing laws and regulations.
2. Disclosing to the relevant authorities information about the Controlling Shareholder up to the Ultimate Shareholders in cases of suspected violations of the Articles of Association and/or prevailing laws and regulations, or upon request by authorized institutions in accordance with applicable regulations.
3. Ensuring clear accountability and relationships among the controlled companies.

Ketentuan Penyelenggaraan RUPS
Provisions of GMS Holding

Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan merupakan representasi manajerial Grup PLN dalam mempertanggung jawabkan seluruh pelaksanaan fungsi pengendalian dan fungsi pengawasan serta menentukan kebijakan strategis atas entitas yang bernaung didalamnya, dimana RUPS Perusahaan terdiri dari RUPS Tahunan serta RUPS Luar Biasa. Pelaksanaan RUPS mengacu pada Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perusahaan serta dijelaskan juga dalam Corporate Governance Code (CG Code).

RUPS Tahunan diselenggarakan terkait persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahan (RKAP) dan Laporan Tahunan Perusahaan. RUPS tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan. RUPS tentang Persetujuan Laporan Tahunan diadakan paling lambat dalam bulan Juni atau 6 (enam) bulan setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan.

RUPS Luar Biasa (RUPSLB) diselenggarakan di luar jadwal yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, dapat diadakan setiap saat, jika dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham. Direksi wajib menyelenggarakan RUPSLB sesuai permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permintaan RUPS diterima. Dalam hal Direksi tidak menyelenggarakan RUPSLB, maka Dewan Komisaris/Pemegang Saham yang memenuhi syarat permintaan, berhak untuk memanggil sendiri RUPS atas biaya Perusahaan, setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perusahaan.

Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dengan mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan tata cara rapat, disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perusahaan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan. Jangka waktu pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 hari sebelum RUPS. Selain itu, RUPS harus didokumentasikan dalam bentuk risalah RUPS yang memuat sekurang-kurangnya waktu, agenda, peserta, pendapat yang berkembang dalam RUPS dan keputusan RUPS. Risalah RUPS tersebut, wajib ditandatangani oleh Ketua RUPS dan paling sedikit 1 (satu) Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Tanda tangan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat dengan Akta Notaris.

The General Meeting of Shareholders represents the PLN Group's managerial accountability for all management and oversight functions and determines strategic decisions for the entities within it. The Company's GMS consists of the Annual GMS and Extraordinary GMS. The GMS is conducted in accordance with Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and the Company's Articles of Association, as also detailed in the Corporate Governance Code (CG Code).

The Annual GMS is held for the approval of the Annual Budget and Operational Plan (ABOP) and the Company's Annual Report. The GMS for the approval of the Corporate Work Plan and Budget is held no later than 30 days after the start of the fiscal year. The GMS for the approval of the Annual Report is held no later than June or six months after the end of the relevant fiscal year.

The Extraordinary GMS (EGMS) is held outside the scheduled times stipulated in the Articles of Association and can be convened at any time if deemed necessary by the Board of Directors and/or Board of Commissioners and/or Shareholders. The Board of Directors is required to convene an EGMS upon a written request from the Board of Commissioners or Shareholders within 30 days from the date the GMS request is received. If the Board of Directors does not convene the EGMS, the requesting Board of Commissioners/ Shareholders have the right to call the GMS at the Company's expense after obtaining permission from the Head of the District Court with jurisdiction over the Company's domicile.

Invitations to the GMS are made via registered mail, specifying the date, time, place, and procedure of the meeting, along with a notice that materials to be discussed at the GMS are available at the Company's office from the date of the GMS invitation until the date of the GMS. The invitation for the GMS is issued at least 14 days before the meeting. Furthermore, the GMS must be documented in the form of minutes, containing at least the time, agenda, participants, opinions expressed during the GMS, and decisions made. The minutes must be signed by the chairperson of the GMS and at least one Shareholder appointed from and by the participants of the GMS. Such signatures are not required if the minutes are prepared in a notarial deed.

Penyelenggaraan RUPS Tahun 2023

Implementation of the 2023 Annual GMS

Perusahaan telah melaksanakan RUPS Tahunan sebanyak 2 (dua) kali yaitu RUPS Tahunan tentang Pengesahan RKAP Tahun 2023 tanggal 30 Januari 2023 dan RUPS Tahunan tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 pada tanggal 13 Juni 2023. RUPS tersebut dihadiri oleh seluruh pemegang saham dan/atau kuasa/wakil pemegang saham yang seluruhnya memiliki 308,510,498,000 saham, bertempat di Kantor Pusat PT PLN (Persero) serta melalui video conference. Pelaksanaan RUPS dilaksanakan secara mandiri tanpa menggunakan pihak independen dalam penghitungan suara.

The Company conducted the Annual GMS twice, namely the Annual GMS for the Ratification of the 2023 ABOP on January 30, 2023, and the Annual GMS for the Approval of the Annual Report and Ratification of the 2023 Financial Statements on June 13, 2023. These GMS were attended by all shareholders and/or their proxies/representatives, representing a total of 308,510,498,000 shares, and held at the Head Office of PT PLN (Persero) as well as via video conference. The GMS was conducted independently without using an independent party for vote counting.

Hasil Penyelenggaraan RUPS RKAP Tahun 2023

Results of the 2023 ABOP GMS

Penanggilan: Surat No. 2A0000070 tanggal 4 Januari 2023 **Invitation:** Letter No. 2A0000070 on January 4, 2023	
Berita Acara : Dimuat dalam Akta Notaris No. 49 tanggal 30 Januari 2023 Berita Acara Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT PLN Nusantara Power Tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023 tanggal 30 Januari 2023	**Minutes:** Recorded in Notarial Deed No. 49 on January 30, 2023 Minutes of the Statement of Decisions of the General Meeting of Shareholders of PT PLN Nusantara Power regarding the Ratification of the Annual Budget and Operational Plan (ABOP) for 2023 on January 30, 2023
Agenda Rapat 1: Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Buku 2023	**Meeting Agenda 1:** Approval and Ratification of the Work Plan and Budget for the Fiscal Year 2023
Keputusan: RUPS Menyetujui dan Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2023	**Decision:** The GMS approved and ratified the Company's Work Plan and Budget for 2023
Tindak Lanjut : Risalah RUPS RKAP 2023 dan RKAP Tahun 2023 yang telah disahkan	**Follow-Up:** Minutes of the 2023 ABOP GMS and the approved ABOP for 2023
Agenda Rapat 2: Persetujuan dan Pengesahan Kontrak Manajemen/Key Performance Indicator tahun 2023	**Agenda Rapat 2:** Persetujuan dan Pengesahan Kontrak Manajemen/Key Performance Indicator tahun 2023
Keputusan: RUPS Menyetujui dan Mengesahkan Key Performance Indicator (KPI) Perusahaan Tahun 2023	**Decision:** The GMS approved and ratified the Company's Key Performance Indicators (KPI) for 2023
Tindak Lanjut : Risalah RUPS RKAP 2023 dan dokumen Kontrak Manajemen/Key Performance Indicator tahun 2023 yang telah disahkan	**Follow-Up:** Minutes of the 2023 ABOP GMS and the approved Management Contract/Key Performance Indicators document for 2023

Hasil Penyelenggaraan RUPS Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2023

Results of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders (GMS) for Approval of the Annual Report

Penanggilan: Surat No. 2A0000070 tanggal 30 Mei 2023 **Invitation:** Letter No. 2A0000070 on May 30, 2023	
Berita Acara : Akta Notaris No. 08 Berita Acara RUPS Tahunan Tahun Buku 2022, tanggal 13 Juni 2023	**Minutes:** Notarial Deed No. 08 Minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders, on June 13, 2023

Agenda Rapat 1:
Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 termasuk Laporan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2022 serta Pembebasan Pembebasan Tanggung jawab Sepenuhnya (Volledig Acquit et de Charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengurusan dan Pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022.

Keputusan:
1. RUPS menyetujui dan menerima Laporan Tahunan mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2022 yang terdiri atas Laporan Keuangan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan.
2. RUPS menyetujui dan menerima Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2022.
3. RUPS mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 yang memuat Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian, Laporan Arus Kas Konsolidasian dan Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian beserta penjelasannya, dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC Indonesia) dengan pendapat "Wajar dalam semua hal yang material" sebagaimana dimaksud dalam laporan No 00161/3105/AU/2/0345-3/1/IV/2023/2023 tanggal 4 April 2023.
4. RUPS memberikan pembebasan sepenuhnya (Volledig Acquit et de Charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan sesuai dengan tanggung jawab dan tindakan dalam bidang masing-masing yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta termuat dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC Indonesia). Pengesahan dan Pembebasan tanggung jawab tersebut tidak melepaskan tanggung jawab hukum terhadap Direksi dan/atau Dewan Komisaris apabila Laporan yang disampaikan tersebut terbukti melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan/atau ternyata dikemudian hari terbukti adanya tindakan yang merugikan dan/atau menyalahi Perseroan.

Tindak Lanjut :
Risalah RUPS Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2022.

Meeting Agenda 1:
Approval and Ratification of the Company's Annual Report for the Fiscal Year 2022, including the Supervisory Report of the Board of Commissioners for 2022, and the Granting of Full Discharge (Volledig Acquit et de Charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for the Management and Supervisory Actions Conducted During the Fiscal Year 2022.

Decision:
1. The GMS approved and accepted the Annual Report on the Condition and Operations of the Company during the Fiscal Year 2022, which consists of the Financial Report, Performance Evaluation Report, and Compliance Report.
2. The GMS approved and accepted the Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners during the Fiscal Year 2022.
3. The GMS ratified the Company's Financial Statements for the Fiscal Year 2022, which include the Consolidated Statement of Financial Position, Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income, Consolidated Statement of Cash Flows, and Consolidated Statement of Changes in Equity with their explanations. These statements were audited by the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC Indonesia) with an unqualified opinion as stated in report No. 00161/3105/AU/2/0345-3/1/IV/2023/2023 on April 4, 2023.
4. The GMS granted full discharge (Volledig Acquit et de Charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for their management and supervisory actions conducted during the Fiscal Year 2022, as long as these actions did not violate applicable laws and regulations and were included in the financial statements audited by the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC Indonesia). This ratification and discharge do not absolve legal responsibilities of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners if it is later proven that the disclosed reports violated legal provisions and procedures or if any actions were found to be improper and/or detrimental to the Company.

Follow-Up:
Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders for the Approval of the Annual Report.

Agenda Rapat 2:
Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2022.

Keputusan:
RUPS memberi kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2022.

Tindak Lanjut :
Surat Direktur Utama PT PLN (Persero) selaku Pemegang Saham Mayoritas Perusahaan No. 4214/PWL.02/02/F0000000/2023-R tanggal 2 Agustus 2023 Perihal Penetapan Penggunaan Laba Bersih 2022, Penetapan Tantiem 2022 dan Penghasilan 2023 Direksi/Dewan Komisaris PT PLN Nusantara Power.

Meeting Agenda 2:
Determination of the Use of Net Profit for the Fiscal Year 2022.

Decision:
The GMS authorized the majority Shareholder to determine the Use of Net Profit for the Fiscal Year 2022.

Follow-Up:
A letter from the President Director of PT PLN (Persero) as the majority Shareholder of the Company, No. 4214/PWL.02/02/F0000000/2023-R, on August 2, 2023, regarding the Determination of the Use of Net Profit 2022, Determination of 2022 Tantiem, and 2022 Income for the Directors/Board of Commissioners of PT PLN Nusantara Power.

Agenda Rapat 3:
Persetujuan Tantiem Tahun Buku 2022 dan Remuneras Tahun Buku 2022 bagi Direksi dan Komisaris, serta Bonus bagi Karyawan Tahun Buku 2022.

Meeting Agenda 3:
Approval of the Tantiem for the Fiscal Year 2022 and the Remuneration for the Fiscal Year 2022 for the Directors and Commissioners, as well as the Bonus for Employees for the Fiscal Year 2022.

Keputusan:
RUPS memberi kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Tantiem Tahun Buku 2022 dan Remuneration Tahun Buku 2021 bagi Direksi dan Dewan Komisaris serta Bonus bagi Karyawan untuk Tahun Buku 2022.

Decision:
The GMS authorized the majority Shareholder to determine the Tantiem for the Fiscal Year 2022 and the Remuneration for the Fiscal Year 2021 for the Directors and the Board of Commissioners, as well as the Bonus for Employees for the Fiscal Year 2022.

Tindak Lanjut :
Surat Direktur Utama PT PLN (Persero) selaku Pemegang Saham Mayoritas Perusahaan No. 4240/DIMNU.01.02/F1000000/2023-R tanggal 2 Agustus 2023 Perihal Penetapan Penggunaan Laba Bersih 2022, Penetapan Tantiem 2022 dan Penghasilan 2022 Direksi/Dewan Komisaris PT PLN Nusantara Power.

Follow-Up:
A letter from the President Director of PT PLN (Persero) as the majority Shareholder of the Company, No. 4240/DIMNU.01.02/F1000000/2023-R, on August 2, 2023, regarding the Determination of the Use of Net Profit 2022, Determination of 2022 Tantiem, and 2022 Income for the Directors/Board of Commissioners of PT PLN Nusantara Power.

Agenda Rapat 4:
Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2022.

Meeting Agenda 4:
Appointment of the Public Accounting Firm for Auditing the Company's Reports for the Fiscal Year 2022.

Keputusan:
RUPS memberi kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai auditor yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan untuk Tahun Buku 2022.

Decision:
The GMS authorized the majority Shareholder to appoint the Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements, Performance Evaluation Report, and Compliance Report for the Fiscal Year 2022.

Tindak Lanjut :
Surat Direktur Keuangan PT PLN (Persero) No. 4196/KEU.01.04/F1000000/2023 tanggal 28 Juli 2023 Perihal Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan Tahun 2022.

Follow-Up:
A letter from the Finance Director of PT PLN (Persero), No. 4196/KEU.01.04/F1000000/2023, on July 28, 2023, regarding the Implementation of the Audit of the 2022 Financial Statements.

Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan hadir dalam RUPS Tahunan guna mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya baik secara kolegial maupun individu. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi seluruhnya hadir dalam satu RUPS Tahunan tentang Persetujuan RKAP Tahun 2023. Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2022 adalah sebagai berikut:

The Board of Commissioners and Directors of the Company attended the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) to account for the execution of their duties both collegially and individually. All members of the Board of Commissioners and Directors attended the AGM for the Approval of the 2023 the Annual Budget and Operational Plan (ABOP). The Board of Commissioners and Directors present at the Approval of the Annual Report for the Fiscal Year 2022 are as follows:

Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam RUPS
Attendance of the Board of Commissioners and Directors at the AGM

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
E. Haryadi	**Ruby Firmansyah**
Komisaris Utama President Commissioner	Direktur Utama President Director
Jaman P. Hutajulu	**Rachmanto Indarto**
Komisaris Commissioner	Direktur Operasi Pembangkit Batubara Director of Operation Coal Power Plant
Emir Enesa Wardana	**Tossy Rosal**
Komisaris Commissioner	Direktur Operasi Pembangkit Gas Director of Operation Gas Power Plant
Bagus Purukito	**Muhamad Reza**
Komisaris Commissioner	Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga Director of Business Development and Commerce

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
Kenedy	**Evi Hartono**
Komisaris Commissioner	Direktur Keuangan Director of Finance
	Karyawan Aji
	Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi Director of Human Capital Management and Administration

Catatan:
Hendra Sudiyanto (Komisaris) tidak hadir karena sedang bertugas di luar negeri

Note:
Hendra Sudiyanto (Commissioner) did not attend due to his overseas business trip.

Selain melalui RUPS, Pemegang Saham juga menerbitkan keputusan secara sirkuler terkait hal-hal yang memerlukan persetujuan Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Keputusan Pemegang Saham secara sirkuler sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

In addition to the AGM, Shareholders also issue circular resolutions regarding matters requiring Shareholder approval in accordance with the Articles of Association. The circular resolutions by Shareholders throughout 2023 are as follows:

Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler Tahun 2023
Circular Resolutions by Shareholders in 2023

No	Tanggal Date	Perihal Subject
1	10 Januari 2023 January 10, 2023	Persetujuan Konsolidasi Pengadaan Asuransi. Approval of Consolidated Insurance Procurement.
2	3 Maret 2023 March 3, 2023	KBLI dan Perizinan PT PLN Nusantara Power. KBLI and Licensing of PT PLN Nusantara Power.
3	10 Maret 2023 March 10, 2023	Persetujuan PLTS Kaleidengkirana SOMW IKN. Approval of Kaleidengkirana SOMW IKN Solar Power Plant (PP).
4	21 Maret 2023 March 21, 2023	Pengalokasian Pengembangan Proyek Pembangkit RUPTL 2021-2030. Allocation for Power Plant Project Development in Electricity Supply Business Plan (RUPTL) 2021-2030.
5	10 Mei 2023 May 10, 2023	Persetujuan Penunjukan Mandatory Partner Proyek IPP PLTA Jawa-Bali. Approval of Expansion of Mandatory Partner for IPP Hydro Power Plant Project in Java-Bali.
6	10 Mei 2023 May 10, 2023	Persetujuan Penunjukan Mandatory Partner Proyek IPP PLTA Sumbagsel. Approval of Expansion of Mandatory Partner for IPP Hydro Power Plant Project in Southern Sumatra (Sumbagsel).
7	10 Mei 2023 May 10, 2023	Akuisisi PLTGU Senghang. Acquisition of Senghang Gas and Steam Power Plant (CCPP).
8	19 Mei 2023 May 19, 2023	Persetujuan Penghapusbukuan ATTB UP Muara Karang, UP Grenik, UP Pahom, UP Cirata dan UHBKU. Approval of Asset Write-off for Muara Karang (GU), Grenik (GU), Pahom (GU), Cirata (GU), and UHBKU.
9	16 Juni 2023 June 16, 2023	Pengangkatan dan Pemberhentian Komisaris PT PLN Nusantara Power (Ida Nuryatin). Appointment and Dismissal of Commissioner of PT PLN Nusantara Power (Ida Nuryatin).
10	3 Agustus 2023 August 3, 2023	Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur PT PLN Nusantara Power (DIRGAS). Appointment and Dismissal of Director of PT PLN Nusantara Power (DIRGAS).
11	9 Agustus 2023 August 9, 2023	Persetujuan Penghapusbukuan ATTB UP Grenik, UP Muara Tawar, UP Muara Karang, UP Pahom, UP Cirata. Approval of Asset Write-off for Grenik (GU), Muara Tawar (GU), Muara Karang (GU), Pahom (GU), and Cirata (GU).
12	30 Agustus 2023 August 30, 2023	Revisi RKAP Tahun 2023. Revision of the 2023 RKAP.
13	28 September 2023 September 28, 2023	Persetujuan Penetapan Strategic Partner Pengembangan PLTS Kaleidengkirana (Suatu tersebut) 50 MW untuk IKN. Approval of Strategic Partner Appointment for the Development of Kaleidengkirana Solar Power Plant (Distributed Quota) 50 MW for IKN.

No.	Tanggal Date	Perihal Subject
14	3 Oktober 2022 October 3, 2022	Persetujuan Penugasan Mandatory Partner Pengadaan Pembelian PLTS (termasuk penyimpanan baterai) Isolated Tersebar Tahap I Hybrid dengan Pengoperasian PLTD PLN dalam Rangka Program Dieselisasi PLTD untuk Klaster 1 Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Madura. Approval of Assignment of Mandatory Partner for the Procurement of Solar Power Plants (including battery storage) Isolated Distributed Stage I Hybrid with the Operation of PLN Diesel Power Plants DEPP in the Framework of the Diesel Power Plant Dieselization Program for Cluster 1 Sumatra, Kalimantan, Java, and Madura.

Keputusan serta arahan Pemegang Saham sepanjang tahun buku 2022 telah direalisasikan seluruhnya, baik yang diberikan melalui keputusan RUPS, RKAP, RUPS Penetapan Laporan Tahunan maupun Keputusan Pemegang Saham secara sirkuler.

The resolutions and directions of the Shareholders throughout the fiscal year 2022 have been fully realized, whether provided through the ABOP AGM resolutions, the AGM for the Approval of the Annual Report, or through circular resolutions by the Shareholders.

Realisasi Keputusan RUPS Tahun 2022

Realization of AGM Resolutions for 2022

Keputusan RUPS 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yaitu RUPS Tahunan tentang Pengesahan RKAP Tahun 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2022 dan RUPS Tahunan tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2021 pada tanggal 29 Juni 2022 telah dilaksanakan seluruhnya pada tahun buku tersebut dengan realisasi sebagai berikut :

The resolutions of the AGM one year prior, namely the AGM for the Approval of the 2022 Annual Budget and Operational Plan (ABOP) held on January 29, 2022, and the AGM for the Approval of the Annual Report and the Ratification of the Financial Statements for the Fiscal Year 2021 held on June 29, 2022, have been fully implemented within that fiscal year with the following realization:

Keputusan RUPS Pengesahan RKAP 2022

Resolution of the AGM for the Approval of the 2022 ABOP

Penanggilan Surat No. 2A/000/07/2 tanggal 7 Januari 2022 Notification Letter No. 2A/000/07/2 on January 7, 2022	
Berita Acara : Dimuat dalam Akta Notaris No. 25 tanggal 22 Februari 2022. Berita Acara Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Pembangkitan Jawa-Bali tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2022 tanggal 29 Januari 2022.	**Minutes:** Recorded in Notary Deed No. 25 on February 22, 2022. Minutes of the Statement of Resolutions of the General Meeting of Shareholders of PT Pembangkitan Jawa-Bali regarding the Ratification of the Annual Budget and Operational Plan (ABOP) for 2022 on January 29, 2022.
Agenda Rapat 1: Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Buku 2022. **Keputusan:** RUPS Menyetujui dan Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2022. **Tindak Lanjut :** Risalah RUPS RKAP 2022 No. 000/RUPS1/V/2022	**Meeting Agenda 1:** Approval and Ratification of the Corporate Work Plan and Budget for the Fiscal Year 2022. **Resolution:** The AGM approved and ratified the Corporate Work Plan and Budget for the Fiscal Year 2022. **Follow-Up:** Minutes of the 2022 ABOP AGM No. 000/RUPS1/V/2022.
Agenda Rapat 2: Persetujuan dan Pengesahan Kontrak Manajemen/Key Performance Indicator tahun 2022. **Keputusan:** RUPS Menyetujui dan Mengesahkan Key Performance Indicator (KPI) Perusahaan Tahun 2022. **Tindak Lanjut :** Risalah RUPS RKAP 2022 No. 000/RUPS1/V/2022	**Meeting Agenda 2:** Approval and Ratification of the Management Contract/Key Performance Indicator for 2022. **Decision:** The AGM approved and ratified the Company's Key Performance Indicator (KPI) for 2022. **Follow-Up:** Minutes of the 2022 ABOP AGM No. 000/RUPS1/V/2022.

Keputusan RUPS Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2021
AGM Resolutions for the Approval of the 2021 Annual Report

Penyampaian
Surat No. [illegible] tanggal 6 Juni 2022
Notification
Letter No. [illegible] on June 6, 2022

Berita Acara : Akta Notaris No. 41 Berita Acara RUPS Tahunan Tahun Buku 2021, tanggal 29 Juni 2022 ( )	**Minutes:** Recorded in Notary Deed No. 41, Minutes of the AGM for the 2021 Fiscal Year, on June 29, 2022
Agenda Rapat 1: Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 termasuk Laporan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2021 serta Pemberian Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (Volledig Acquit et de Charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas Pengurusan dan Pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021	**Meeting Agenda 1:** Approval and Ratification of the Company's 2021 Annual Report, including the 2021 Board of Commissioners' Supervisory Report, and Granting Full Release and Discharge (Volledig Acquit et de Charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for their management and supervision carried out during the 2021 Fiscal Year.
Keputusan: 1. RUPS menyetujui dan menerima Laporan Tahunan mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2021 yang terdiri atas : Laporan Keuangan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Keputusan. 2. RUPS menyetujui dan menerima Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2021. 3. RUPS mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 yang memuat Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian, Laporan Arus Kas Konsolidasian dan Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian beserta penjelasannya, dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC Indonesia) dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material" sebagaimana dimaksud dalam laporan No.00488/2130/AU1/02/1041-1/1/III/2022 tanggal 31 Maret 2022. 4. RUPS memberikan pembebasan sepenuhnya (Volledig Acquit et de Charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan sesuai dengan tanggung jawab dan tindakan dalam bidang masing-masing yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta termuat dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC Indonesia). Pengesahan dan Pembebasan tanggung jawab tersebut tidak melepaskan tanggung jawab hukum terhadap Direksi dan/atau Dewan Komisaris apabila Laporan yang dipertanggjawabkan tersebut terbukti melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan/atau ternyata dikemudian hari terbukti adanya tindakan yang merugikan dan/atau merugikan Perseroan.	**Decision:** 1. The AGM approved and accepted the Annual Report on the State and Progress of the Company during the 2021 Fiscal Year, which includes the Financial Report, Performance Evaluation Report, and Compliance Report. 2. The AGM approved and accepted the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the 2021 Fiscal Year. 3. The AGM ratified the Company's Financial Statements for the 2021 Fiscal Year, which include the Consolidated Financial Position Report, Consolidated Comprehensive Income Report, Consolidated Cash Flow Report, and Consolidated Equity Changes Report along with their explanations, audited by Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC Indonesia) with an "unqualified opinion" as stated in report No. 00488/2130/AU1/02/1041-1/1/III/2022 on March 31, 2022. 4. The AGM granted full release and discharge (Volledig Acquit et de Charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for their management and supervision responsibilities and actions undertaken during the 2021 Fiscal Year, as long as these actions were not contrary to the prevailing laws and regulations and were included in the Financial Statements audited by Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC Indonesia). This ratification and release from liability do not exempt the Board of Directors and/or the Board of Commissioners from legal responsibilities if the reports disclosed are proven to violate legal provisions and procedures and/or if there are proven actions that damage and/or harm the Company in the future.
Tindak Lanjut : Risalah RUPS RAKP 2022 No. 001/RUPS I/I/2022.	**Follow-Up:** Minutes of the 2022 AGEP AGM No. 001/RUPS I/I/2022.

Agenda Rapat 2:
Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2021.

Keputusan:
RUPS memberi Kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2021.

Tindak Lanjut :
1. Surat Direktur Utama PT PLN (Persero) selaku Pemegang Saham Mayoritas Perusahaan No. 52164/MNU.01.03/0000000000/2021-B tanggal 8 September 2021 Perihal Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun 2021, Remuneras 2022 dan Tantiem 2021 Direksi/ Dewan Komisaris
2. Surat No. 2311/2000 tanggal 19 Oktober 2021 perihal Tindak Lanjut Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2021.

Hearing Agenda 2:
Determination of the Use of the 2021 Net Profit.

Resolution:
The AGM granted authority to the majority Shareholder to determine the use of the 2021 Net Profit.

Follow-Up:
1. Letter from the President Director of PT PLN (Persero) as the Majority Shareholder of the Company No. 52164/MNU.01.03/ 0000000000/2021-B on September 8, 2021, regarding the Determination of the Use of the 2021 Net Profit, 2022 Remuneration, and 2021 Tantiem for the Directors/Board of Commissioners.
2. Letter No. 2311/2000 on October 19, 2021, regarding follow-up on the Determination of the Use of the Company's 2021 Net Profit.

Agenda Rapat 3:
Penetapan Tantiem Tahun Buku 2021 dan Remuneras Tahun Buku 2022 bagi Direksi dan Komisaris, serta Bonus bagi Karyawan Tahun Buku 2021

Keputusan:
RUPS memberi Kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Tantiem Tahun Buku 2021 dan Remuneras Tahun Buku 2022 bagi Direksi dan Dewan Komisaris serta Bonus bagi karyawan untuk Tahun Buku 2021

Tindak Lanjut :
1. Surat Direktur Utama PT PLN (Persero) selaku Pemegang Saham Mayoritas Perusahaan No. 52164/MNU.01.03/0000000000/2021-B tanggal 8 September 2021 Perihal Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun 2021, Remuneras 2022 dan Tantiem 2021 Direksi/ Dewan Komisaris
2. Surat Direktur SDM PT PLN No. 4715/5DM.04.01/ 0000000000/2021-B Tanggal 21 Juli 2022 perihal Pembayaran Penghasilan Non-Rutin Periode Bulan Juli Tahun 2022.

Hearing Agenda 3:
Determination of Tantiem for the 2021 Fiscal Year and Remuneration for the 2022 Fiscal Year for the Board of Directors and Board of Commissioners, as well as Bonuses for Employees for the 2021 Fiscal Year.

Resolution:
The AGM granted authority to the majority Shareholder to determine the Tantiem for the 2021 Fiscal Year and Remuneration for the 2022 Fiscal Year for the Board of Directors and Board of Commissioners as well as Bonuses for Employees for the 2021 Fiscal Year.

Follow-Up:
1. Letter from the President Director of PT PLN (Persero) as the Majority Shareholder of the Company No. 52164/MNU.01.03/ 0000000000/2021-B on September 8, 2021, regarding the Determination of the Use of the 2021 Net Profit, 2022 Remuneration, and 2021 Tantiem for the Directors/Board of Commissioners.
2. Letter from the Director of HR of PT PLN No. 4715/5DM.04.01/ 0000000000/2021-B on July 21, 2022, regarding the Payment of Non-Routine Income for the Period of July 2022.

Agenda Rapat 4:
Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Perseroan Tahun Buku 2022.

Keputusan:
RUPS memberi Kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai auditor yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan untuk Tahun Buku 2022.

Tindak Lanjut :
Surat EVP Akuntansi PT PLN (Persero) No. 46.072/KEU.02.04/ 0000000000/2022 Tanggal 12 Agustus 2022 Perihal Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan Tahun 2022.

Hearing Agenda 4:
Appointment of a Public Accounting Firm to Audit the Company's Financial Statements for the 2022 Fiscal Year.

Resolution:
The AGM granted authority to the majority Shareholder to appoint a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements, Performance Evaluation Report, and Compliance Report for the 2022 Fiscal Year.

Follow-Up:
Letter from the EVP of Accounting of PT PLN (Persero) No. 46.072/ KEU.02.04/0000000000/2022 on August 12, 2022, regarding the Implementation of the Audit of the 2022 Financial Statements.

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Organ pengawasan dalam tata kelola Perusahaan dijalankan oleh Dewan Komisaris yang merupakan majelis, dimana kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara. Keputusan Dewan Komisaris yang menyangkut tugas dan tanggung jawabnya tidak dapat dilakukan secara individu, melainkan harus berdasarkan hasil pembahasan bersama sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan. Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi terkait dengan pengelolaan Perusahaan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kepentingan terbaik Perusahaan serta pemangku kepentingan. Hal tersebut dilaksanakan dapat menjaga keberlangsungan PLN NP dan mendorong efektivitas penciptaan nilai jangka panjang dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

The supervisory body in the Company's governance is carried out by the Board of Commissioners, which functions as a collegial body where the positions of each member, including the Chief Commissioner, are equal. Decisions of the Board of Commissioners regarding their duties and responsibilities cannot be made individually, but must be based on joint discussions in accordance with the Company's Articles of Association. In carrying out its supervisory function and providing advice to the Board of Directors on the Company's management, the Board of Commissioners must comply with applicable regulations and act in the best interests of the Company and its stakeholders. This is expected to ensure the sustainability of PLN NP and enhance long-term value creation to support sustainable development.

Susunan Dewan Komisaris
Composition of the Board of Commissioners

Susunan Dewan Komisaris ditetapkan oleh Pemegang Saham melalui keputusan RUPS, dimana jumlah anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama berjumlah 4 (empat) orang yang terdiri dari 2 orang Komisaris Independen dan 4 orang Komisaris. Dewan Komisaris yang menjabat telah melalui proses pengaringan dan seleksi serta dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) oleh PT PLN (Persero) selaku Pemegang Saham. Periode Januari sampai dengan Desember 2023, susunan Dewan Komisaris PLN NP yang menjabat adalah sebagai berikut:

The composition of the Board of Commissioners is determined by the Shareholders through resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS), where the total number of members, including the Chief Commissioner, is six, consisting of two Independent Commissioners and four Commissioners. The serving Board of Commissioners has undergone a selection and screening process and has passed the fit and proper test by PT PLN (Persero) as the Shareholder. From January to December 2023, the composition of the PLN NP Board of Commissioners is as follows:

Susunan Dewan Komisaris Tahun 2023
Composition of the Board of Commissioners for 2023

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Evy Haryadi	Komisaris Utama President Commissioner	Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT PLN Tanggal 21 September 2023. Circular GMS Decision regarding the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT PLN on September 21 2023.
Bagus Purnomo	Komisaris (Independen) Commissioner (Independent)	Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT PLN Tanggal 30 Desember 2021. Circular GMS Decision regarding the Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT PLN on 30 December 2021.
Tirta Kresna Wardana	Komisaris (Independen) Commissioner (Independent)	Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT PLN Tanggal 30 Desember 2021. Circular GMS Decision regarding the Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT PLN on 30 December 2021.
Jaman P. Hutapea	Komisaris Commissioner	Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT PLN Tanggal 11 Maret 2019 jo. Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT PLN Tanggal 13 November 2020. Circular GMS Decision regarding Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT PLN March 11 2019 jo. Circular GMS Decision regarding the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT PLN on 13 November 2020.

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Hendra Iswahyudi	Komisaris Commissioner	Keputusan RUPS Sirkular tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT PJB Tanggal 19 Desember 2022 jo. Keputusan RUPS Sirkular tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT PJB Tanggal 11 November 2020. Circular GMS Decision regarding the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT PJB on 19 December 2022 jo. Circular GMS Decision regarding the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT PJB on 11 November 2020.
Kenedy	Komisaris Commissioner	Keputusan RUPS Sirkular tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT PJB tanggal 14 Desember 2022. Circular GMS Decision regarding the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT PJB on December 14, 2022.
Ida Nurjatin Hoetari[1]	Komisaris Commissioner	Keputusan RUPS Sirkular tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT PLN Nusantara Power tanggal 16 Juni 2023. Circular GMS Decision regarding the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT PLN Nusantara Power on June 16, 2023.

Keterangan:
1. RUPS Sirkular tanggal 16 Juni 2023, memberhentikan dengan hormat Sdr. Jemmi F. Hutapea sebagai Komisaris serta mengangkat dan menetapkan Sdri. Ida Nurjatin Hoetari sebagai Komisaris.

Note:
1. The Circular GMS on June 16, 2023, terminated Mr. Jemmi F. Hutapea as Commissioner and appointed Ms. Ida Nurjatin Hoetari as Commissioner.

Komisaris Independen
Independent Commissioners

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata untuk kepentingan Perusahaan. Sebagaimana dijelaskan dalam Tata Laksana Kerja Direksi-Dewan Komisaris (Board Manual), Komisaris Independen Perusahaan memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Berasal dari luar Perusahaan;
2. Tidak memiliki saham langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan;
3. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perusahaan, Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Utama Perusahaan;
4. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

Penetapan Komisaris Independen mengacu pada Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana Komisaris Independen diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya. Untuk memampukan Dewan Komisaris dalam memberikan nasihat dan pengawasan secara independen kepada Direksi dan untuk peran-peran yang berdapat potensi berbenturan kepentingan, Dewan Komisaris PLN NP terdiri dari Komisaris Independen dengan jumlah yang cukup memadai. Anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham dan memenuhi kriteria Komisaris Independen, namun tidak definitif dinyatakan sebagai Komisaris Independen berjumlah 3 (tiga) orang komisaris atau 50% dari 6 (enam) orang anggota Dewan Komisaris per 31 Desember 2023 yaitu Sdr. Emir Kresna Wardana, Sdr. Bagus Purohito dan Sdr. Kenedy.

Independent Commissioners are members of the Board of Commissioners who are not affiliated with the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners, or the controlling shareholders, and are free from business or other relationships that may affect their ability to act independently or solely for the Company's interests. As outlined in the Board Manual, the criteria for Independent Commissioners are as follows:

1. External party;
2. Do not own shares directly or indirectly in the Company;
3. There no affiliation with the Company, the Commissioners, Directors, or the Major Shareholders of the Company;
4. There no direct or indirect business relationships related to the Company's activities.

The appointment of Independent Commissioners refers to Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, where Independent Commissioners are appointed by the GMS from parties not affiliated with the major shareholders, Board of Directors, and/or other members of the Board of Commissioners. To enable the Board of Commissioners to provide independent advice and oversight to the Board of Directors and for roles with potential conflicts of interest, the PLN NP Board of Commissioners includes a sufficient number of Independent Commissioners. Three members of the Board of Commissioners, or 50% of the six members as of December 31, 2023, meet the criteria for Independent Commissioners but are not definitively declared as such: Mr. Emir Kresna Wardana, Mr. Bagus Purohito and Mr. Kenedy.

Pernyataan Independensi dan Potensi Benturan Kepentingan

Statement of Independence and Potential Conflicts of Interest

Perusahaan mendorong Dewan Komisaris untuk menjaga independensi dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan dalam melaksanakan fungsinya semata-mata demi kepentingan terbaik Perusahaan. Anggota Dewan Komisaris PLN NP membuat Pakta Integritas dan menyampaikan kepada Perusahaan terkait kepemilikan saham pribadi dan keluarga di PLN NP dan perusahaan lainnya. Setiap Anggota Dewan Komisaris membuat pernyataan independensi dan bebas benturan kepentingan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya setiap tahun dengan menandatangani Pakta Integritas yang menyatakan bahwa:

1. Tidak memiliki benturan kepentingan dan/atau terlibat dalam transaksi yang memiliki benturan kepentingan dengan PT PLN Nusantara Power dan/atau anak perusahaannya yang terkonsolidasi dan terafiliasi;
2. Tidak memangku jabatan rangkap dalam jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang merugikan perusahaan dan dilarang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PT PLN Nusantara Power;
3. Tidak memiliki hubungan keluarga vertikal sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan semenda dengan anggota Direksi lainnya maupun dengan anggota Dewan Komisaris PT PLN Nusantara Power.

The Company encourages the Board of Commissioners to maintain independence and avoid all forms of conflicts of interest in performing their functions solely for the Company's best interests. Members of the PLN NP Board of Commissioners sign an Integrity Pact and disclose their personal and family share ownership in PLN NP and other companies. Each member of the Board of Commissioners annually declares their independence and absence of conflicts of interest by signing an Integrity Pact stating that:

1. They have no conflicts of interest and/or are not involved in transactions with conflicts of interest with PT PLN Nusantara Power and/or its consolidated and affiliated subsidiaries;
2. They do not hold concurrent positions that could lead to conflicts of interest detrimental to the Company and are prohibited by applicable laws for PT PLN Nusantara Power;
3. They have no blood relations up to the second degree, either directly or indirectly, with other members of the Board of Directors or the Board of Commissioners of PT PLN Nusantara Power.

Penandatanganan Pakta Integritas Dewan Komisaris

Signing of the Board of Commissioners Integrity Pact

Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Penandatanganan Signing Date
Evy Haryadi	Komisaris Utama/President Commissioner	14 Desember 2022/December 14, 2022
Bagus Purnomo	Komisaris (Independen)/Commissioner (Independent)	7 Agustus 2022/August 7, 2022
Vera Virama Wandana	Komisaris (Independen)/Commissioner (Independent)	28 Juli 2023/July 28, 2023
Jaman P. Hutapea[1]	Komisaris/Commissioner	29 Agustus 2022/August 29th, 2022
Hendra Iswahyudi	Komisaris/Commissioner	28 Juli 2023/July 28, 2023
Ronaldy	Komisaris/Commissioner	28 Juli 2023/July 28, 2023
Ida Nuryatin Finahari	Komisaris/Commissioner	30 Juli 2023/July 30, 2023

Keterangan:
1. RUPS Tahunan tanggal 16 Juni 2023, mengundurkan dengan hormat Ibu Jaman P. Hutapea sebagai Komisaris serta mengangkat dan menetapkan Ibu. Ida Nuryatin Finahari sebagai Komisaris.

Note:
1. The Annual GMS on June 16, 2023 honorably dismissed Mr. Jaman P. Hutapea as Commissioner and appointed Mrs. Ida Nuryatin Finahari as Commissioner.

Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris

Affiliation Relationships of the Board of Commissioners Members

Hubungan afiliasi yang dimaksud mencakup hubungan keluarga dan keuangan antara anggota Dewan Komisaris dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi serta anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali Perusahaan. Hubungan afiliasi anggota Dewan Komisaris yang menjabat sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Affiliation relationships include family and financial ties between members of the Board of Commissioners, among the Board of Commissioners, the Board of Directors, and the Major and/or Controlling Shareholders of the Company. The affiliation relationships of the Board of Commissioners members throughout 2023 are as follows:

Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris
Affiliation Relationships of the Board of Commissioners Members

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keluarga Dengan Family Relations With			Hubungan Keuangan Dengan Financial Relations With		
		Dewan Komisaris Board of Commissioner	Direksi Board of Director	Pemegang Saham Shareholders	Dewan Komisaris Board of Commissioner	Direksi Board of Director	Pemegang Saham Shareholders
Ery Heryadi	Komisaris Utama President Commissioner	Tidak Ada Tidak Ada	Tidak Ada Tidak Ada	Tidak Ada Tidak Ada	Tidak Ada Tidak Ada	Tidak Ada Tidak Ada	Tidak Ada Tidak Ada
Bagus Pandhita	Komisaris (Independen) Commissioner (Independent)	Tidak Ada Tidak Ada	Tidak Ada Tidak Ada	Tidak Ada Tidak Ada	Tidak Ada Tidak Ada	Tidak Ada Tidak Ada	Tidak Ada Tidak Ada
Emir Erwana Wardana	Komisaris (Independen) Commissioner (Independent)	Tidak Ada Tidak Ada	Tidak Ada Tidak Ada	Tidak Ada Tidak Ada	Tidak Ada Tidak Ada	Tidak Ada Tidak Ada	Tidak Ada Tidak Ada
Jizman P. Hutapea[1]	Komisaris Commissioner	Tidak Ada Tidak Ada	Tidak Ada Tidak Ada	Tidak Ada Tidak Ada	Tidak Ada Tidak Ada	Tidak Ada Tidak Ada	Tidak Ada Tidak Ada
Handra Sandhyudi	Komisaris Commissioner	Tidak Ada Tidak Ada	Tidak Ada Tidak Ada	Tidak Ada Tidak Ada	Tidak Ada Tidak Ada	Tidak Ada Tidak Ada	Tidak Ada Tidak Ada
Ronedy	Komisaris Commissioner	Tidak Ada Tidak Ada	Tidak Ada Tidak Ada	Tidak Ada Tidak Ada	Tidak Ada Tidak Ada	Tidak Ada Tidak Ada	Tidak Ada Tidak Ada
Ida Nuryatin Finahari[1]	Komisaris Commissioner	Tidak Ada Tidak Ada	Tidak Ada Tidak Ada	Tidak Ada Tidak Ada	Tidak Ada Tidak Ada	Tidak Ada Tidak Ada	Tidak Ada Tidak Ada

Keterangan:
1. RUPS Tahunan tanggal 16 Juni 2023, mengakhiri dengan hormat Ibu Jizman P. Hutapea sebagai Komisaris serta mengangkat dan memberikan Ibu Ida Nuryatin Finahari sebagai Komisaris.

Note:
1. The Annual GMS on June 16, 2023, honorably dismissed Ms. Jizman P. Hutapea as Commissioner and appointed Ms. Ida Nuryatin Finahari as Commissioner.

Selain itu, seluruh anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang menjabat sepanjang tahun 2023 tidak memiliki hubungan afiliasi di perusahaan lain yang dilarang sesuai dengan ketentuan internal Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Additionally, all members of the Company's Board of Commissioners who served throughout 2023 do not have affiliations with other companies that are prohibited by the Company's internal regulations and applicable laws.

Anggota Dewan Komisaris secara berkala melaporkan kepemilikan sahamnya baik atas nama pribadi maupun keluarga pada Perusahaan dan/atau perusahaan lainnya untuk dicatat dalam Daftar Khusus. Kepemilikan saham Anggota Dewan Komisaris yang menjabat sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Members of the Board of Commissioners regularly report their share ownership, both personally and by family, in the Company and/or other companies to be recorded in a Special Register. The share ownership of the Board of Commissioners members serving throughout 2023 is as follows:

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Beserta Keluarga
Share Ownership of the Board of Commissioners Members and Their Families

Nama Name	Jabatan Position	Kepemilikan Saham Oleh Pribadi Pada Ownership of Shares by Individuals		Kepemilikan Saham Oleh Keluarga Pada Share Ownership by the Pada Family	
		Perusahaan Company	Perusahaan Lain Other Companies	Perusahaan Company	Perusahaan Lain Other Companies
Evy Haryadi	Komisaris Utama President Commissioner	-	/	-	-
Bagus Purnomo	Komisaris (Independen) Commissioner (Independent)	-	-	-	-
Emir Gnana Wardana	Komisaris (Independen) Commissioner (Independent)	-	-	-	-
Jaman P. Hutapea[1]	Komisaris Commissioner				
Nendra Iswahyudi	Komisaris Commissioner	-	-	-	-
Ronald	Komisaris Commissioner	-	-	-	-
Ida Nuryatin Finahari[1]	Komisaris Commissioner	-	-	-	-

Keterangan:
1. RUPS Tahunan tanggal 16 Juni 2020, memberhentikan dengan hormat Sdr. Jaman P. Hutapea sebagai Komisaris serta mengangkat Ibu Ida Nuryatin Finahari sebagai Komisaris.

Note:
1. The Circular GMS on June 16, 2020, honorably dismissed Mr. Jaman P. Hutapea as Commissioner and appointed Ms. Ida Nuryatin Finahari as Commissioner.

Pedoman Kerja Dewan Komisaris
Work Guidelines of the Board of Commissioners

Pedoman kerja Dewan Komisaris merupakan bagian dari struktur kebijakan atau soft structure tata kelola perusahaan yang baik di lingkungan PLN NP yang menjadi pedoman khusus bagi Dewan Komisaris dalam menjalankan perannya sesuai dengan Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman kerja Dewan Komisaris ditetapkan oleh Komisaris Utama pada tanggal 12 Desember 2011 dalam bentuk Piagam Kerja Dewan Komisaris. Piagam Kerja Dewan Komisaris kemudian dimutakhirkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 011K/DK/PJB/2014 tanggal 22 Desember 2014 menjadi pedoman kerja yang saat ini dikenal dengan Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris atau *Board of Commissioner Manual* (BoC Manual).

Dewan Komisaris dalam pelaksanaan fungsinya juga berpedoman pada *Board Manual* yang disusun pada tahun 2010 dan terakhir kali dimutakhirkan serta ditetapkan melalui kesepakatan bersama antara Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 28 November 2014. Muatan BoC Manual merupakan penjabaran lebih lanjut dari *Board Manual* yang berdasar teknis atas pelaksanaan fungsi organ Dewan Komisaris. Dewan Komisaris secara berkala melakukan review terhadap pedoman kerja Dewan Komisaris dan pemutakhiran jika dipandang perlu, sesuai kebutuhan Dewan Komisaris dan perkembangan Perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The work guidelines of the Board of Commissioners are part of the soft structure of good corporate governance policies within PLN NP, serving as specific guidelines for the Board of Commissioners in performing their roles according to the Articles of Association and applicable laws. The work guidelines of the Board of Commissioners were established by the Chief Commissioner on December 12, 2011, in the form of the Board of Commissioners' Work Charter. The Work Charter was updated based on the Board of Commissioners' Decree No. 011K/DK/PJB/2014 on December 22, 2014, becoming the current Board of Commissioners Manual (BoC Manual).

The Board of Commissioners also follows the Board Manual, drafted in 2010 and last updated through a mutual agreement between the Board of Directors and the Board of Commissioners on November 28, 2014. The BoC Manual provides a more technical elaboration of the Board Manual for the Board of Commissioners' functions. The Board of Commissioners periodically reviews and updates their work guidelines as necessary, according to their needs and the Company's development and applicable laws.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan dijabarkan lebih rinci dalam *Board Manual* serta *BoC Manual* melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang secara umum terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat atas pengelolaan Perusahaan. Pengambilan keputusan Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris, sehingga tidak menyalahi wewenang dan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan operasional kecuali hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The Board of Commissioners, as stipulated in the Company's Articles of Association and detailed in the Board Manual and BoC Manual, performs duties and responsibilities generally related to the supervisory and advisory functions over the Company's management. Decisions made by the Board of Commissioners are part of their supervisory duties, without nullifying the authority and responsibility of the Board of Directors for management execution. The Board of Commissioners is not involved in operational decisions, except for matters specified in the Articles of Association and applicable laws.

Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat yang dijalankan Dewan Komisaris bertujuan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Direksi sesuai dengan tujuan PLN NP dan arahan Pemegang Saham. Pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris dilakukan secara proaktif, mencakup semua aspek bisnis Perusahaan. Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Komisaris meliputi:

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan.
2. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.
3. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani RJPP dan RKAP.
4. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perusahaan.
5. Melaporkan dengan segera kepada Rapat Umum Pemegang Saham apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan.
6. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan.
7. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan apabila diminta.
8. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.
9. Melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perusahaan tersebut dan Perusahaan lain.

The supervisory and advisory functions of the Board of Commissioners aim to ensure the effective implementation of policies and decision-making processes by the Board of Directors in line with PLN NP's goals and Shareholders' directives. The Board of Commissioners conducts proactive supervision covering all aspects of the Company's business. The main duties and responsibilities of the Board of Commissioners include:

1. Providing advice to the Board of Directors in managing the Company.
2. Reviewing, examining, and signing the Company's Long-Term Plan and Work Plan and Budget prepared by the Board of Directors, according to the Articles of Association.
3. Giving opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders on the Long-Term Plan and Work Plan and Budget of the Company, explaining the reasons for the Board of Commissioners signing the Company's Long-Term Plan (RJPP) and Annual Budget and Operational Plan (ABOP).
4. Monitoring the Company's activities and providing opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders on any issues deemed important for the Company's management.
5. Reporting immediately to the General Meeting of Shareholders if there are signs of declining Company performance.
6. Reviewing and examining periodic and annual reports prepared by the Board of Directors and signing the annual report.
7. Providing explanations, opinions, and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding the Annual Report when requested.
8. Preparing minutes of the Board of Commissioners' meetings and keeping copies.
9. Reporting their share ownership and/or their family's ownership in the Company and other companies to the Company.

10. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
11. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pembinaan nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

10. Reporting on the supervisory duties carried out during the past fiscal year to the General Meeting of Shareholders.
11. Performing other duties related to supervisory and advisory roles, as long as they do not conflict with laws, the Articles of Association, and/or resolutions of the General Meeting of Shareholders.

Pembagian Tugas Anggota Dewan Komisaris
Division of Duties among Board of Commissioners Members

Dewan Komisaris menjalankan fungsinya sebagai majelis dimana peran pengawasan dan konsultasi dilakukan secara kolegial. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri mewakili Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan menyangkut fungsi pengawasan. Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas masing-masing anggota Dewan Komisaris untuk secara khusus melakukan pengawasan atas pengelolaan Perusahaan pada bidang-bidang tertentu sebagai upaya mendorong efektivitas fungsi pengawasan.

The Board of Commissioners functions as a collegial body where supervisory and consultative roles are performed collectively. Members of the Board of Commissioners cannot individually represent the Board of Commissioners in making decisions related to the supervisory function. The Board of Commissioners assigns specific oversight responsibilities to its members over certain areas of the Company's management to enhance the effectiveness of their supervisory function.

Pembagian Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Division of Supervisory Duties among the Board of Commissioners Members

Nama Name	Jabatan Position	Tugas Pengawasan Supervisory Duties	
Evy Haryadi	Komisaris Utama President Commissioner	Koordinator atas semua tugas dan kewajiban Dewan Komisaris diantaranya :	The Coordinator oversees all tasks and responsibilities of the Board of Commissioners, including:
		1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan.	1. Providing advice to the Board of Directors in managing the Company.
		2. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.	2. Reviewing and signing the Company's Long-Term Plan and Work Plan and Budget prepared by the Board of Directors, in accordance with the provisions of this Articles of Association.
		3. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan mengenai aspek Dewan Komisaris menandatangani RJPP dan RKAP.	3. Providing opinions and recommendations to the General Meeting of Shareholders regarding the Company's Long-Term Plan and Work Plan and Budget, explaining the reasons for the Board of Commissioners' endorsement of the the Company's Long-Term Plan (RJPP) and ABCP.
		4. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perusahaan.	4. Monitoring the Company's activities, providing opinions and recommendations to the General Meeting of Shareholders on any issues deemed important for the management of the Company.
		5. Melaporkan dengan segera kepada Rapat Umum Pemegang Saham apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan.	5. Promptly reporting to the General Meeting of Shareholders in the event of a decline in the Company's performance.
		6. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan.	6. Reviewing periodic reports and annual reports prepared by the Board of Directors and signing the annual report.
		7. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan apabila diminta.	7. Providing explanations, opinions, and recommendations to the General Meeting of Shareholders regarding the Annual Report when requested.
		8. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham.	8. Providing a report on the supervisory tasks carried out during the past fiscal year to the General Meeting of Shareholders.

Nama Name	Jabatan Position	Tugas Pengawasan Supervisory Duties	
		9. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham	9. Fulfilling other obligations in the context of supervision and advisory duties, as long as they do not contradict the laws and regulations, Articles of Association, and/or resolutions of the General Meeting of Shareholders.
Jumen P. Hutajulu[1]	Komisaris Commissioner	1. Pengawasan dalam bidang Manajemen Risiko dan Kepatuhan. 2. Pengawasan bidang Investasi dan pengembangan usaha.	1. Supervision in the field of Risk Management and Compliance. 2. Supervision in the field of investment and business development.
Pandia Swadiyuda	Komisaris Commissioner	1. Pengawasan dalam bidang SDM dan Organisasi. 2. Pengawasan dalam bidang Kesehatan, Keselamatan Kerja (K3). 3. Pengawasan dalam bidang Teknologi Informasi.	1. Supervision in the field of Human Resources and Organization. 2. Supervision in the field of Occupational Health and Safety (OHS). 3. Supervision in the field of Information Technology.
Bagus Puruhito	Komisaris (Independen) Commissioner (Independent)	1. Pengawasan dalam bidang Manajemen Risiko dan Kepatuhan. 2. Pengawasan bidang Investasi dan pengembangan usaha. 3. Pengawasan dalam bidang Stakeholder Management.	1. Supervision in the field of Risk Management and Compliance. 2. Supervision in the field of investment and business development. 3. Supervision in the field of Stakeholder Management.
Emir Erwana Wardana	Komisaris (Independen) Commissioner (Independent)	1. Pengawasan dalam bidang SDM dan Organisasi. 2. Pengawasan dalam bidang Kesehatan, Keselamatan Kerja (K3). 3. Pengawasan dalam bidang Teknologi Informasi.	1. Supervision in the field of Human Resources and Organization. 2. Supervision in the field of Occupational Health and Safety (OHS). 3. Supervision in the field of Information Technology.
Kennedy	Komisaris Commissioner	1. Pengawasan dalam bidang Operasi dan Pemeliharaan. 2. Pengawasan dalam bidang Stakeholder Management. 3. Pengawasan dalam bidang Kesehatan dan Keselamatan Peralatan Pembangkit.	1. Supervision in the field of Operations and Maintenance. 2. Supervision in the field of Stakeholder Management. 3. Supervision in the field of Health and Safety of Power Plant Equipment.
Ida Nuryatin Finahari[2]	Komisaris Commissioner	1. Pengawasan dalam bidang Manajemen Risiko dan Kepatuhan. 2. Pengawasan bidang Investasi dan pengembangan usaha. 3. Pengawasan dalam bidang Stakeholder Management.	1. Supervision in the field of Risk Management and Compliance. 2. Supervision in the field of investment and business development. 3. Supervision in the field of Stakeholder Management.

Keterangan:
1. RUPS Luar Biasa tanggal 16 Juni 2025, memberhentikan dengan hormat Ibu Jumen P. Hutajulu sebagai Komisaris serta mengangkat dan berhentikan Ibu Ida Nuryatin Finahari sebagai Komisaris.

Note:
1. Extraordinary General Meeting of Shareholders on June 16, 2025, respectfully dismissed Ms. Jumen P. Hutajulu as Commissioner and appointed and dismissed Ms. Ida Nuryatin Finahari as Commissioner.

Dewan Komisaris juga memastikan organ pendukung fungsi pengawasan yang telah dibentuk, menjalankan tugasnya sesuai dengan rencana kerja Dewan Komisaris dan pedoman kerja yang telah ditetapkan dengan menempatkan anggota Dewan Komisaris sebagai ketua dan wakil ketua pada komite di bawah organ Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundangan dan ketentuan terkait lainnya yang berlaku bagi Perusahaan. Pendelegasian anggota Dewan Komisaris pada komite mempertimbangkan kompetensi dan dianggap mampu melaksanakan tugas pada masing-masing komite tersebut. Susunan anggota Dewan Komisaris yang didelegasikan pada komite di bawah organ Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

The Board of Commissioners also ensures that the supervisory support organ, which has been established, performs its duties in line with the Board of Commissioners' work plan and guidelines, by placing members of the Board of Commissioners as chairpersons and vice-chairpersons of committees under the Board of Commissioners' organ, in accordance with applicable regulations and other relevant provisions for the Company. Delegating members of the Board of Commissioners to committees considers their competencies and their capability to carry out tasks in each respective committee. The composition of members of the Board of Commissioners' delegated to committees under the Board of Commissioners' organ is as follows:

Susunan Anggota Dewan Komisaris pada Komite Dewan Komisaris
Composition of Members of the Board of Commissioners on the Board of Commissioners' Committee

Komite Committee	Ketua Chairman	Wakil Ketua Vice Chairman
Komite Audit Audit Committee	Hendra Iwakiyudi	-
Komite Investasi dan Manajemen Risiko Investment and Risk Management Committee	Jonas P. Hutapea	Emir Kresna Wardana
Komite Nominasi dan Remuneras Nomination and Remuneration Committee	Bagus Purnomo	Vacant

Sehubungan dengan adanya perubahan komposisi Dewan Komisaris maka, Susunan anggota Dewan Komisaris yang ditugaskan pada komite di bawah organ Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Regarding changes in the composition of the Board of Commissioners, the composition of members of the Board of Commissioners assigned to committees under the Board of Commissioners' organ is as follows:

Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris pada Komite Dewan Komisaris
Changes in the Composition of Members of the Board of Commissioners on the Board of Commissioners' Committee

Komite Committee	Ketua Chairman	Wakil Ketua Vice Chairman
Komite Audit Audit Committee	Vacant	-
Komite Investasi dan Manajemen Risiko Investment and Risk Management Committee	Bagus Purnomo	Ida Nuryatin Finahari
Komite Nominasi dan Remuneras Nomination and Remuneration Committee	Hendra Iwakiyudi	Emir Kresna Wardana

Pelaksanaan Fungsi Dewan Komisaris
Implementation of the Board of Commissioners' Functions

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dijalankan dengan melaksanakan pengawasan dan konsultasi yang mencakup aspek operasional dan keuangan serta aspek lainnya yang terkait dengan kegiatan pengelolaan dan keberlangsungan bisnis PLN NP. Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris secara garis besar telah melaksanakan fungsinya yang meliputi:

1. Aspek Korporat
   a. Berperan sesuai fungsinya pada persiapan dan penyelenggaraan RUPS tahunan yakni RUPS Persetujuan RKAP dan RUPS Pertanggungjawaban Tahunan (LPT).
   b. Memberikan laporan pelaksanaan pengawasan tahun 2023 yang dilaporkan kepada Pemegang Saham.
   c. Arahan dalam penyusunan RJPP dan RKAP 2023.
   d. Monitoring pelaksanaan RJPP dan RKAP serta kendalanya.
   e. Pendapatan dalam penyusunan Tata Kelola Niaga, Risiko Korporat, Risiko Bisnis, Kepatuhan, Agenda Korporat dan lain-lain.
   f. Pembaharuan Pedoman Manajemen Risiko sesuai dengan ISO 31000:2018.
   g. Pembaharuan Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual).

The tasks and responsibilities of the Board of Commissioners have been carried out by supervising and consulting on operational and financial aspects as well as other aspects related to the management and continuity of PLN NP's business activities. Throughout 2023, the Board of Commissioners has broadly performed its functions, including:

1. Corporate Aspects
   a. Playing its role in preparing and conducting annual General Meetings of Shareholders, namely the Approval of the RBCP and Annual Accountability Report (AAR) General Meetings.
   b. Providing a report on the implementation of supervision in 2023, reported to the Shareholders.
   c. Guidance in the preparation of the Company's Long Term Plan (RJPP) and RBCP 2023.
   d. Monitoring the implementation of the Company's Long Term Plan (RJPP) and RBCP and their revision needs.
   e. Advising on the preparation of Corporate Governance, Corporate Risks, Business Risks, Compliance, Corporate Agendas, and others.
   f. Updating the Risk Management Guidelines in accordance with ISO 31000:2018.
   g. Updating the Board of Commissioners and Directors' Work Procedures (Board Manual).

2. Niaga dan Operasi - Pemeliharaan
   a. Produksi/penjualan KWh dan pengendalian Biaya Pokok Produksi.
   b. Analisa market share Perusahaan di Sistem Kelistrikan Jawa Bali.
   c. Energy mix dan security of supply energy primer.
   d. Program dan realisasi pemeliharaan unit pembangkit.
   e. Bisnis O&M baik yang dilakukan oleh Perusahaan maupun Anak Perusahaan.
   f. Bisnis lain di luar O&M ketenagalistrikan dengan kompetensi unggul yang dimiliki.
   g. Aspek K3L atas seluruh unit pembangkit untuk mengejar Zero Accident dan tingkat PROPER.

3. Pengembangan Usaha dan Pembinaan Anak Perusahaan
   a. Arahan dalam menindaklanjuti penugasan yang diterima dari Pemegang Saham, termasuk dalam penyiapan SDM dan sumber daya lainnya.
   b. Evaluasi dan rekomendasi atas pelaksanaan program kemitraan IPP termasuk pemilihan partner/mitra bisnis.
   c. Evaluasi atas pembentukan Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi dan setoran setelahnya.
   d. Pengawasan dan pemeliharaan atas kemajuan seluruh proyek penugasan.
   e. Mendorong dan mendampingi Direksi dan Manajemen dalam pengembangan usaha di bidang energi baru terbarukan.

4. SDM dan Organisasi
   a. Pendidikan Direksi & Komisaris pada Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi.
   b. Penyusunan organisasi dan pembagian tugas.
   c. Evaluasi dan analisa atas Efektifitas Organisasi.
   d. Review atas proses bisnis seluruh fungsi dengan mengacu pada standar APQC (American Productivity Quality Center) dan keselarasannya dengan teknologi informasi melalui penyusunan Enterprise Architecture.
   e. Review atas kebijakan aspek K3L (Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Lingkungan).
   f. Review Talent Mobility untuk memastikan adaptasi lebih cepat terhadap perubahan transformasi dengan cara menyebarkan dan memindahkan kompetensi utama Talent lintas proyek atau lintas bisnis saat diperlukan.

5. Audit
   a. Review rencana kerja SPI serta pelaksanaannya, termasuk evaluasi temuan-temuan penting.
   b. Memantau pelaksanaan Risk Based Audit dan memberikan arahan dalam pelaksanaan Three Line of Defenses.
   c. Memantau kebijakan dan pelaksanaan ICOFR (Internal Control Over Financial Report).
   d. Evaluasi hasil audit eksternal (KAP dan auditor eksternal lainnya).

2. Commerce and Operations - Maintenance
   a. Production/sale of KWh and control of Production Costs.
   b. Analysis of the Company's market share in the Java Bali Power System.
   c. Energy mix and security of primary energy supply.
   d. Programs and realization of generator unit maintenance.
   e. O&M business conducted by both the Company and its Subsidiaries.
   f. Other non-electricity O&M businesses with superior competencies.
   g. HSE aspects across all generator units to maintain Zero Accidents and PROPER levels.

3. Business Development and Subsidiary Development
   a. Guidance in following up on assignments received from Shareholders, including in preparing HR and other resources.
   b. Evaluation and recommendation on the implementation of IPP partnership programs including partner/business partner selection.
   c. Evaluation of the establishment of Subsidiaries and Affiliated Companies and their share deposits.
   d. Supervision and advisory on the progress of all assignment projects.
   e. Encouraging and assisting the Board of Directors and Management in developing business in the field of renewable energy.

4. HR and Organization
   a. Selection of Directors & Commissioners at Subsidiaries and Affiliated Companies.
   b. Organization structuring and task division.
   c. Evaluation and analysis of Organizational Effectiveness.
   d. Review of the entire business process functions based on APQC (American Productivity Quality Center) standards and their alignment with information technology through the development of Enterprise Architecture.
   e. Review of HSE policies (Health and Safety at Work and Environment).
   f. Talent Mobility Review to ensure faster adaptation to transformational changes by disseminating and transferring key Talent competencies across projects or business lines when needed.

5. Audit
   a. Review of the SPI work plan and its implementation, including the evaluation of significant findings.
   b. Monitoring the implementation of Risk-Based Audits and providing guidance in the implementation of Three Lines of Defense.
   c. Monitoring the policy and implementation of ICOFR (Internal Control Over Financial Reporting).
   d. Evaluation of external audit results (KAP and other external auditors).

e. Memfollow-up tindak lanjut keputusan dan arahan RUPS.

f. Memfollow-up pelaksanaan Whistle Blowing System (WBS) serta revisi terhadap pedomannya.

g. Memberikan masukan mengenai pengkinian Piagam Audit Internal SPI Perusahaan.

a. Monitoring the follow-up to decisions and resolutions of the General Meetings of Shareholders.

f. Monitoring the implementation of the Whistleblowing System (WBS) and revisions to its guidelines.

g. Providing input on updating the Company's Internal Audit SPI Charter.

Kunjungan Kerja Dewan Komisaris

Board of Commissioners' Site Visits

Kunjungan Dewan Komisaris dilakukan secara rutin ke Unit Pembangkit maupun Anak Perusahaan guna mendapat informasi secara langsung mengenai operasional Unit/Anak Perusahaan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan dan konsultasi Dewan Komisaris. Dewan Komisaris telah melakukan kunjungan sepanjang tahun 2023, sebagai berikut:

Board of Commissioners' visits are routinely conducted to Generating Units and Subsidiaries to obtain direct information on the operational aspects of Units/Subsidiaries to support the effectiveness of the Board of Commissioners' supervisory and consulting functions. In 2023, the Board of Commissioners conducted visits as follows:

No.	Lokasi Location	Waktu Time
1.	Kantor Pusat Surabaya Surabaya Head Office	4 Januari 2023 January 4, 2023
2.	Kantor Pusat Surabaya Surabaya Head Office	25 Januari 2023 January 25, 2023
3.	Kantor Pusat Surabaya & PLTS Kanreglakes Surabaya Head Office & Kanreglakes SPP	10 – 11 Februari 2023 February 10 – 11, 2023
4.	Kantor Pusat Surabaya Surabaya Head Office	16 Februari 2023 February 16, 2023
5.	PLTU Cirebon Cirebon SPP	10 Maret 2023 March 10, 2023
6.	PLTU Indramayu Indramayu CFPP	6 April 2023 April 6, 2023
7.	Kantor Pusat Surabaya Surabaya Head Office	2 Mei 2023 May 2, 2023
8.	PLTA Batang Toru Batang Toru HPP	6 Juli 2023 July 6, 2023
9.	Kantor Pusat Surabaya Surabaya Head Office	20 Juli 2023 July 20, 2023
10.	Kantor Pusat Surabaya Surabaya Head Office	30 Juli 2023 July 30, 2023
11.	PLTU Cilacap Cilacap PLTU	5 Agustus 2023 August 5, 2023
12.	PLTU Cirebon Cirebon SPP	28 Agustus 2023 August 28, 2023
13.	Kantor Pusat Surabaya Surabaya Head Office	2 – 4 Oktober 2023 October 2 – 4, 2023
14.	Kantor Pusat Surabaya Surabaya Head Office	2 Oktober 2023 October 2, 2023
15.	Kantor Pusat Surabaya Surabaya Head Office	7 Oktober 2023 October 7, 2023
16.	PLTU Cirebon Cirebon SPP	16 Oktober 2023 October 16, 2023
17.	PLTU Jeli Jeli SPP	2 November 2023 November 2, 2023
18.	PLTU Tanjung Tanjung CFPP	4 November 2023 November 4, 2023
19.	PLTU Cirebon Cirebon SPP	9 November 2023 November 9, 2023
20.	PLTU Cirebon Cirebon SPP	1 Desember 2023 December 1, 2023

Persetujuan dan Rekomendasi Dewan Komisaris

Approval and Recommendations of the Board of Commissioners

Dewan Komisaris memiliki wewenang memberikan persetujuan dan rekomendasi kepada Direksi atas kegiatan pengelolaan Perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan internal lainnya berlaku di PLN NP. Persetujuan dan rekomendasi tersebut dapat diberikan baik dengan keputusan hasil Rapat Dewan Komisaris dan Direksi yang tertuang dalam Notulen Rapat maupun melalui surat Dewan Komisaris terkait dengan persetujuan maupun rekomendasi Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan dan rekomendasi yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Tanggapan Dewan Komisaris terhadap Permohonan Persetujuan Usulan Rekomposisi Anggaran Kas Investasi Pengembangan untuk Akuisisi PLTGU Sengkang (16 Mei 2023).
2. Usulan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Laporan Keuangan PT PLN Nusantara Power serta Anak Perusahaan Tahun Buku 2023 (6 Juni 2023).
3. Rekomendasi Usulan Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (22 Juni 2023).
4. Tanggapan Tertulis Dewan Komisaris terhadap Permohonan Tanggapan Tertulis Persetujuan Penetapan Kandidat Partner Proyek Pembangunan PLTS MW 50 MWac bersama BESS (4 Juli 2023).
5. Tanggapan Tertulis Dewan Komisaris terhadap Permohonan Tanggapan Tertulis Persetujuan Penandatanganan Amandemen PJBTL atas Penambahan Entitas PLTGU Sengkang (21 Juli 2023).
6. Tanggapan Tertulis Dewan Komisaris terhadap Permohonan Tanggapan Tertulis atas Perubahan Anggaran Dasar PT PLN Nusantara Power (7 Agustus 2023).
7. Tanggapan Tertulis Dewan Komisaris atas Penyampaian Usulan RKAP Tahun 2024 PT PLN Nusantara Power (30 November 2023).
8. Tanggapan Tertulis Dewan Komisaris Terhadap Usulan Penempatan Wakil PT PLN NP Pada Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi PT PLN NP (30 November 2023).
9. Tanggapan Tertulis Dewan Komisaris atas Permohonan Penelitian dan Pemelaahan serta Pendapat dan Saran Tertulis atas Rancangan Rencana Jangka Panjang PT PLN Nusantara Power 2024 – 2028 (10 Desember 2023).
10. Tanggapan Dewan Komisaris terhadap Permohonan Rekomendasi Persetujuan Alignment UKM PLN dengan AI PLN NP 2023 (27 Desember 2023).

The Board of Commissioners has the authority to approve and recommend to the Board of Directors on the Company's management activities in accordance with the Articles of Association and other internal provisions applicable to PLN NP. These approvals and recommendations can be made either through the decisions of the Board of Commissioners and Directors' Meeting recorded in the Meeting Minutes or through letters from the Board of Commissioners regarding the approval or recommendation of the Board of Commissioners. Throughout 2023, the Board of Commissioners provided approvals and recommendations covering the following:

1. Response of the Board of Commissioners to the Approval Request for the Investment Cash Budget Recomposition Proposal for the Acquisition of Sengkang CCPP (May 16, 2023).
2. Proposal for the Appointment of Public Accountant Office (KAP) for the Audit of the Financial Statements of PT PLN Nusantara Power and its Subsidiaries for the 2023 Fiscal Year (June 6, 2023).
3. Recommendation for the Appointment Proposal of Company Secretary (June 22, 2023).
4. Written Response of the Board of Commissioners to the Written Response Request for Approval of the Candidate Partner Project Assignment Proposal for 50 MWac MW Solar Power Plant along with BESS (July 4, 2023).
5. Written Response of the Board of Commissioners to the Written Response Request for Approval of the Signing of the PJBTL Amendment for the Addition of Sengkang CCPP Entities (July 21, 2023).
6. Written Response of the Board of Commissioners to the Written Response Request for the Amendment to the Articles of Association of PT PLN Nusantara Power (August 7, 2023).
7. Written Response of the Board of Commissioners to the Submission of the RBCP Proposal for the 2024 Fiscal Year of PT PLN Nusantara Power (November 30, 2023).
8. Written Response of the Board of Commissioners Regarding the Proposal for the Placement of Deputy PT PLN NP at Subsidiaries and Affiliated Companies of PT PLN NP (November 30, 2023).
9. Written Response of the Board of Commissioners to the Request for Research and Review as well as Written Opinions and Suggestions on the Draft Long-Term Plan of PT PLN Nusantara Power 2024 – 2028 (December 10, 2023).
10. Response of the Board of Commissioners to the Request for Approval Recommendation of the PLN UKM Alignment with PLN NP AI 2023 (December, 27 2023).

Rapat Dewan Komisaris
Board of Commissioners Meetings

Rapat Dewan Komisaris baik Rapat Internal maupun Rapat Pengawasan masing-masing dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan sebagaimana diatur dalam BoC. manual dan Board Manual. Selain itu, anggota Dewan Komisaris juga dapat menghadiri Rapat Konsultasi yang diadakan oleh Direksi. Rapat Konsultasi merupakan Rapat Direksi yang dihadiri oleh Dewan Komisaris untuk membahas berbagai aspek operasional dan pengelolaan Finansial Perusahaan. Ketentuan tersebut menjadi dasar penyusunan rencana rapat Dewan Komisaris yang dibuat sebelum tahun berjalan baik rapat Internal Dewan Komisaris maupun Rapat Pengawasan yang masing-masing minimal dilaksanakan 1 (satu) kali setiap bulan. Agenda rapat internal Dewan Komisaris secara umum meliputi tindak lanjut rapat sebelumnya dan tugas Dewan Komisaris, laporan manajemen dan kinerja, dan laporan Komite Dewan Komisaris. Sementara agenda rapat pengawasan secara umum meliputi laporan manajemen dan kinerja, tindak lanjut rapat sebelumnya serta progres proyek dan penugasan. Materi yang akan dibahas dalam rapat pengawasan/konsultasi terlebih dahulu dikaji dalam Rapat Intern Dewan Komisaris (RID) maupun Rapat Komite berdasarkan laporan-laporan yang dibuat oleh Manajemen.

The Board of Commissioners holds both Internal Meetings and Supervisory Meetings, each at least once a month as stipulated in the BoC. manual and Board Manual. Additionally, Commissioners may attend Consultation Meetings held by the Board of Directors. Consultation Meetings are Board of Directors meetings attended by the Board of Commissioners to discuss various operational and financial management aspects of the Company. These provisions form the basis for drafting the Board of Commissioners meeting plan prepared before each year, covering both internal Board of Commissioners meetings and Supervisory Meetings, each of which must be conducted at least once a month. The agenda for Internal Board of Commissioners meetings generally includes follow-ups from previous meetings and tasks of the Board of Commissioners, management and performance reports, and reports from Board of Commissioners Committees. Meanwhile, the agenda for Supervisory Meetings generally covers management and performance reports, follow-ups from previous meetings, as well as project progress and assignments. The topics to be discussed in supervision/consultation meetings are first reviewed in Internal Board of Commissioners Meetings (RID) or Committee Meetings based on reports prepared by Management.

Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat internal sebanyak 12 kali serta rapat pengawasan sebanyak 12 kali dengan agenda dan tingkat kehadiran masing-masing Dewan Komisaris sebagai berikut:

Throughout 2023, the Board of Commissioners conducted internal meetings 12 times and supervisory meetings 12 times, with the agenda and attendance rates of each Commissioner as follows:

Rapat Internal Dewan Komisaris Tahun 2023
Board of Commissioners Internal Meetings in 2023

No.	Tanggal Date	Agenda	
1.	26 Januari 2023 January 26, 2023	1. Sambutan Dewan Komisaris 2. Evaluasi Bagaian Bulan Januari 2023 3. Pembahasan Draft RKAP 2023	1. Welcome from the Board of Commissioners 2. Evaluation of January 2023 Activities 3. Discussion of the 2023 ABCP Draft
2.	24 Februari 2023 February 24, 2023	1. Sambutan Dewan Komisaris 2. Evaluasi Bagaian Bulan Januari 2023 3. Laporan Komite Audit 4. Laporan Komite Investasi dan Manajemen Risiko 5. Laporan Komite Nominasi dan Remuneras	1. Welcome from the Board of Commissioners 2. Evaluation of January 2023 Activities 3. Audit Committee Report 4. Investment and Risk Management Committee Report 5. Nomination and Remuneration Committee Report
3.	28 Maret 2023 March 28, 2023	1. Sambutan Dewan Komisaris 2. Evaluasi Bagaian Bulan Maret 2023 3. Laporan Komite Audit 4. Laporan Komite Investasi dan Manajemen Risiko 5. Laporan Komite Nominasi dan Remuneras	1. Welcome from the Board of Commissioners 2. Evaluation of January 2023 Activities 3. Audit Committee Report 4. Investment and Risk Management Committee Report 5. Nomination and Remuneration Committee Report
4.	27 April 2023 April 27, 2023	1. Sambutan Dewan Komisaris 2. Evaluasi Bagaian Bulan April 2023 3. Laporan Komite Audit 4. Laporan Komite Investasi dan Manajemen Risiko 5. Laporan Komite Nominasi dan Remuneras	1. Welcome from the Board of Commissioners 2. Evaluation of April 2023 Activities 3. Audit Committee Report 4. Investment and Risk Management Committee Report 5. Nomination and Remuneration Committee Report

No.	Tanggal Date	Agenda	
5.	29 Mei 2023 May 29, 2023	1. Sambutan Dewan Komisaris 2. Evaluasi Kegiatan Bulan Mei 2023 3. Laporan Komite Audit 4. Laporan Komite Investasi dan Manajemen Risiko 5. Laporan Komite Nominasi dan Remuneras	1. Welcome from the Board of Commissioners 2. Evaluation of May 2023 Activities 3. Audit Committee Report 4. Investment and Risk Management Committee Report 5. Nomination and Remuneration Committee Report
6.	26 Juni 2023 June 26, 2023	1. Sambutan Dewan Komisaris 2. Evaluasi Kegiatan Bulan Juni 2023 3. Laporan Komite Audit 4. Laporan Komite Investasi dan Manajemen Risiko 5. Laporan Komite Nominasi dan Remuneras	1. Welcome from the Board of Commissioners 2. Evaluation of June 2023 Activities 3. Audit Committee Report 4. Investment and Risk Management Committee Report 5. Nomination and Remuneration Committee Report
7.	26 Juli 2023 July 26, 2023	1. Sambutan Dewan Komisaris 2. Evaluasi Kegiatan Bulan Juli 2023 3. Laporan Komite Audit 4. Laporan Komite Investasi dan Manajemen Risiko 5. Laporan Komite Nominasi dan Remuneras	1. Welcome from the Board of Commissioners 2. Evaluation of July 2023 Activities 3. Audit Committee Report 4. Investment and Risk Management Committee Report 5. Nomination and Remuneration Committee Report
8.	25 Agustus 2023 August 25, 2023	1. Sambutan Dewan Komisaris 2. Evaluasi Kegiatan Bulan Agustus 2023 3. Laporan Komite Audit 4. Laporan Komite Investasi dan Manajemen Risiko 5. Laporan Komite Nominasi dan Remuneras	1. Welcome from the Board of Commissioners 2. Evaluation of August 2023 Activities 3. Audit Committee Report 4. Investment and Risk Management Committee Report 5. Nomination and Remuneration Committee Report
9.	29 September 2023 September 29, 2023	1. Sambutan Dewan Komisaris 2. Evaluasi Kegiatan Bulan September 2023 3. Laporan Komite Audit 4. Laporan Komite Investasi dan Manajemen Risiko 5. Laporan Komite Nominasi dan Remuneras	1. Welcome from the Board of Commissioners 2. Evaluation of September 2023 Activities 3. Audit Committee Report 4. Investment and Risk Management Committee Report 5. Nomination and Remuneration Committee Report
10.	25 Oktober 2023 October 25, 2023	1. Sambutan Dewan Komisaris 2. Evaluasi Kegiatan Bulan September 2023 3. Laporan Komite Audit 4. Laporan Komite Investasi dan Manajemen Risiko 5. Laporan Komite Nominasi dan Remuneras	1. Welcome from the Board of Commissioners 2. Evaluation of September 2023 Activities 3. Audit Committee Report 4. Investment and Risk Management Committee Report 5. Nomination and Remuneration Committee Report
11.	29 November 2023 November 29, 2023	1. Sambutan Dewan Komisaris 2. Evaluasi Kegiatan Bulan November 2023 3. Laporan Komite Audit 4. Laporan Komite Investasi dan Manajemen Risiko 5. Laporan Komite Nominasi dan Remuneras	1. Welcome from the Board of Commissioners 2. Evaluation of November 2023 Activities 3. Audit Committee Report 4. Investment and Risk Management Committee Report 5. Nomination and Remuneration Committee Report
12.	19 Desember 2023 December 19, 2023	1. Sambutan Dewan Komisaris 2. Laporan Komite Nominasi dan Remuneras 3. Laporan Komite Investasi dan Manajemen Risiko 4. Laporan Komite Audit	1. Welcome from the Board of Commissioners 2. Nomination and Remuneration Committee Report 3. Investment and Risk Management Committee Report 4. Audit Committee Report

Rapat Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2023

Board of Commissioners and Board of Directors Supervisory Meetings in 2023

No.	Tanggal Date	Agenda	
1.	26 Januari 2023 January 26, 2023	1. Pengantar dari Dewan Komisaris 2. Executive Summary a. Laporan K3L b. Laporan Kinerja Korporat c. Laporan Proyek 3. Persiapan RUPS RKAP 2023	1. Introduction to the Board of Commissioners 2. Executive Summary a. HSE report b. Corporate Performance Report c. Project Report 3. Preparation of the 2023 GMS RKAP

No.	Tanggal Date	Agenda	
2.	28 Februari 2023 February 28, 2023	1. Pengantaran Dewan Komisaris 2. Executive Summary: a. Laporan K3L b. Laporan Kinerja Korporat 3. Laporan Progres Pengembangan: a. Proyek Penugasan PLTS Cirata b. Proyek Strategis PLTS Karanglakes dan PLTS IKN 4. Ini SDM setelah Legal End Date 5. Rencana Antisipasi Kebocoran Penstock PLTA Sulsel.	1. Introduction to the Board of Commissioners 2. Executive Summary: a. HSE report b. Corporate Performance Report 3. Development Progress Report: a. Cirata SPP Assignment Project b. Karanglakes SPP and IKN SPP Strategic Projects 4. HR issues after Legal End Date 5. Sulsel Hydroelectric Power Plant Penstock Leak Anticipation Plan.
3.	20 Maret 2023 March 20, 2023	1. Pengantaran Dewan Komisaris 2. Executive Summary a. Laporan K3L b. Laporan Progres Pengembangan Proyek PLTA Batangtoru, PLTS Cirata, PLTS Karanglakes dan PLTS IKN 3. Tindak lanjut arahan Dewan Komisaris pada RDB Februari 2023 4. Laporan realisasi dan strategi pencapaian KPI 2023 5. Dukungan Dewan Komisaris yang diperlukan oleh Manajemen	1. Introduction to the Board of Commissioners 2. Executive Summary a. HSE report b. Progress Report on the Development of the Batangtoru HPP, Cirata SPP, Karanglakes SPP and IKN PLTS Projects 3. Follow up on the Board of Commissioners' directives on the February 2023 RDB 4. Report on the realization and strategy for achieving KPI 2023 5. Support from the Board of Commissioners required by Management.
4.	28 April 2023 April 28, 2023	1. Pengantaran Dewan Komisaris 2. Executive Summary a. Laporan K3L b. Laporan Progres Pengembangan Proyek 3. Laporan realisasi dan strategi pencapaian KPI 2023 – Realisasi Maret 2023	1. Introduction to the Board of Commissioners 2. Executive Summary a. HSE report b. Project Development Progress Report 3. Report on the realization and strategy for achieving KPI 2023 – Realization March 2023
5.	30 Mei 2023 May 30, 2023	1. Pengantaran Dewan Komisaris 2. Executive Summary a. Laporan K3L b. Laporan Progres Proyek Konstruksi 3. Laporan Progres Proyek Strategis 4. Laporan Realisasi dan Strategi Pencapaian KPI 2023 – Realisasi April 2023 5. Tindak lanjut arahan Dewan Komisaris pada RDB April 2023	1. Introduction to the Board of Commissioners 2. Executive Summary a. HSE report b. Construction Project Progress Report 3. Strategic Project Progress Report 4. Realization Report and Strategy for Achieving KPI 2023 – Realization April 2023 5. Follow up on the Board of Commissioners' directives on the April 2023 RDB
6.	27 Juni 2023 June 27, 2023	1. Pengantaran Dewan Komisaris 2. Executive Summary a. Laporan K3L b. Laporan Progres Proyek Konstruksi: Relokasi Pembangkit, PLTS Cirata, PLTA Batangtoru, dan Add On Muara Tawar c. Laporan Progres Proyek Strategis: PLTS Karanglakes, PLTS IKN, dan PLTGU Sengkang 3. Tindak lanjut arahan Dekom pada RDB Mei 2023 4. Laporan realisasi dan strategi pencapaian KPI 2023 – Realisasi Mei 2023	1. Introduction to the Board of Commissioners 2. Executive Summary a. HSE report b. Construction Project Progress Report: Power Plant Relocation, Cirata SPP, Batangtoru HPP, and Muara Tawar Add On c. Strategic Project Progress Report: Karanglakes SPP, IKN SPP, and Sengkang CCPP 3. Follow up on BOC's direction on the May 2023 RDB 4. Report on the realization and strategy for achieving KPI 2023 – Realization in May 2023
7.	31 Juli 2023 July 31, 2023	1. Pengantar Dewan Komisaris 2. Executive Summary a. Laporan K3L b. Laporan Progres Proyek Konstruksi: Relokasi Pembangkit, PLTS Cirata, PLTA Batangtoru, Add On Muara Tawar, dan PLTS IKN c. Laporan Progres Proyek Strategis: PLTS IKN dan PLTS Karanglakes 3. Tindak lanjut arahan Dekom pada RDB Juni 2023 4. Laporan realisasi dan strategi pencapaian KPI 2023 – Realisasi Juni 2023	1. Introduction to the Board of Commissioners 2. Executive Summary a. HSE report b. Construction Project Progress Report: Power Plant Relocation, Cirata SPP, Batangtoru HPP, Muara Tawar Add On, and IKN SPP c. Strategic Project Progress Report: IKN SPP and Karanglakes SPP 3. Follow up on BOC's direction on the June 2023 RDB 4. Report on the realization and strategy for achieving KPI 2023 – Realization June 2023

No.	Tanggal Date	Agenda	
8.	28 Agustus 2023 August 28, 2023	1. Pengantar Dewan Komisaris 2. Executive Summary a. Laporan KOL b. Laporan Progres Proyek Konstruksi: Relokasi Pembangkit, PLTG Cinta, PLTA Balangtoru, Add On Muara Tawai dan PLTG IKN c. Laporan Progres Proyek Strategis: PLTG IKN dan PLTG Kerangkeles d. Laporan KOL 3. Laporan realisasi dan strategi pencapaian KPI 2023 – Realisasi Juli 2023 4. Tindak lanjut arahan Dekom pada RDD Juli 2023	1. Introduction to the Board of Commissioners 2. Executive Summary a. HSE report b. Construction Project Progress Report: Power Plant Relocation, Cinta UPP, Balangtoru HPP, Muara Tawai Add On, and IKN IPP c. Strategic Project Progress Report: IKN IPP and Kerangkeles IPP d. HSE report 3. Report on the realization and strategy for achieving KPI 2023 – Realization July 2023 4. Follow up on BOC's direction on the July 2023 RDD
9.	30 September 2023 September 30, 2023	1. Pengantar Dewan Komisaris 2. Executive Summary a. Laporan KOL b. Laporan Progres Proyek Konstruksi c. Laporan Progres Proyek Strategis 3. Laporan realisasi dan strategi pencapaian KPI 2023 – Realisasi Agustus 2023 4. Tindak lanjut arahan Dekom pada RDD Agustus 2023	1. Introduction to the Board of Commissioners 2. Executive Summary a. HSE report b. Construction Project Progress Report c. Strategic Project Progress Report 3. Report on the realization and strategy for achieving KPI 2023 – Realization in August 2023 4. Follow up on BOC's direction on the August 2023 RDD
10.	26 Oktober 2023 October 26, 2023	1. Pengantar Dewan Komisaris 2. Executive Summary a. Laporan KOL b. Laporan Progres Proyek Konstruksi c. Laporan Progres Proyek Strategis 3. Laporan realisasi dan strategi pencapaian KPI 2023 – Realisasi September 2023 4. Tindak lanjut arahan Dekom pada RDD September 2023	1. Introduction to the Board of Commissioners 2. Executive Summary a. HSE report b. Construction Project Progress Report c. Strategic Project Progress Report 3. Report on the realization and strategy for achieving KPI 2023 – Realization in September 2023 4. Follow up on BOC's direction on the September 2023 RDD
11.	30 November 2023 November 30, 2023	1. Pengantar Dewan Komisaris 2. Penyampaian RJPP 2024 – 2028 3. Penyampaian RKAP 2024	1. Introduction to the Board of Commissioners 2. Submission of the Company's Long Term Plan (RJPP) 2024 – 2028 3. Submission of the 2024 ABCP
12.	29 Desember 2023 December 29, 2023	1. Executive Summary 2. Laporan Realisasi dan Strategi Capaian KPI – November 2023 3. Tindak Lanjut Arahan Dewan Komisaris pada RDD Oktober 2023	1. Executive Summary 2. KPI Achievement Realization and Strategy Report – November 2023 3. Follow up on the Board of Commissioners' directives on the October 2023 RDD

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Tahun 2023
Frequency and Attendance Rates of the Board of Commissioners in Meetings in 2023

Nama Name	Rapat Internal Internal Meeting		Rapat Pengawasan Supervision Meeting		Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders	
	Frekuensi Rapat Meeting Frequency	Tingkat Kehadiran Attendance Rate	Frekuensi Rapat Meeting Frequency	Tingkat Kehadiran Attendance Rate	Frekuensi Rapat Meeting Frequency	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Ery Haryadi	12	100%	11	91.67%	2	100%
Jaman P. Hutapea[1]	4	80%	4	80%	1	100%
Hendra Iswahyudi	10	83.33%	10	100%	2	100%
Bagus Purubito	12	100%	12	100%	2	100%
Emir Insana Wardana	11	91.33%	12	100%	2	100%
Ranedy	11	91.67%	12	100%	2	100%
Ida Nurjalin Finahari[1]	5	71.43%	7	100%	1	100%

Keterangan:
1. RUPS Luar Biasa tanggal 14 Juli 2023, diberhentikan dengan hormat Ir. Jaman P. Hutapea sebagai Komisaris serta mengangkat dan melantikan Ibu Ida Nurjalin Finahari sebagai Komisaris.

Note:
1. Circular RUPS on June 14, 2023, respectively dismissed Mr. Jaman P. Hutapea as Commissioner and appointed and established Ms. Ida Nurjalin Finahari as Commissioner.

Program Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris
Board of Commissioners Competence Development Program

Kebijakan program pengembangan kompetensi Dewan Komisaris diatur dalam Pedoman Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris (Board of Commissioner Manual) dan Board Manual. Program pengembangan Dewan Komisaris dilenggarakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kompetensi yang relevan dengan bisnis PLN NP dalam rangka mendukung tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris. Selama tahun 2023, anggota Dewan Komisaris telah mengikuti kegiatan program pengembangan kompetensi sebagaimana telah dijelaskan pada uraian terkait Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Kepala SPI.

The policy on the development of the Board of Commissioners' competencies is governed by the Board of Commissioners' Work Procedures Guidelines (BoC Manual) and the Board Manual. The Board of Commissioners' development program is conducted to enhance knowledge and competencies relevant to PLN NP's business to support the responsibilities of the Board of Commissioners. During 2023, Board of Commissioners members participated in competency development activities as outlined in the descriptions related to Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretaries, and Head of SPI Education and Training.

Program Pengenalan Bagi Dewan Komisaris Baru
New Board of Commissioners Introduction Program

Program pengenalan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai PLN NP yang diperlukan anggota Dewan Komisaris yang baru menjabat dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Perusahaan memiliki kebijakan program pengenalan (Program Induksi) bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat sebagaimana diatur dalam Pedoman Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris (Board of Commissioner Manual) dan Board Manual. Program pengenalan Perusahaan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Unit Perusahaan/Anak Perusahaan dan penghapian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan PLN NP dimana program tersebut dilaksanakan. Sekretaris Perusahaan berkoordinasi dengan Sekretaris Dewan Komisaris dalam pelaksana program pengenalan. Materi program pengenalan meliputi:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG di Perusahaan;
2. Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetisi, risiko dan berbagai masalah strategis lainnya sesuai dengan RJPP Perusahaan;
3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan audit eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit;
4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris.

The introduction program aims to provide an overview of PLN NP necessary for newly appointed Board of Commissioners members to support the execution of their duties and responsibilities. The Company has an induction program for newly appointed Board of Commissioners members as stipulated in the Board of Commissioners' Work Procedures Guidelines (BoC Manual) and the Board Manual. The introduction program may include presentations, meetings, visits to Company' Subsidiary units, document reviews, or other programs deemed suitable by PLN NP where the program is implemented. The Corporate Secretary coordinates with the Board of Commissioners' Secretary in implementing the introduction program. The introduction program material includes:

1. Implementation of corporate governance principles in the Company;
2. Overview of the Company regarding objectives, nature and scope of activities, financial and operational performance, strategies, short-term and long-term business plans, competitive position, risks, and various other strategic issues as per the Company's Long Term Plan (RJPP);
3. Information regarding delegated authorities, internal and external audits, internal control systems and policies, including the Audit Committee;
4. Information on the duties and responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners.

Pada tahun 2023, telah dilaksanakan program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat sebagai berikut:

In 2023, an introduction program was conducted for newly appointed Board of Commissioners members as follows:

Program Induksi Anggota Dewan Komisaris Baru Tahun 2023
New Board of Commissioners Member Induction Program in 2023

No.	Tanggal Date	Agenda		Anggota Dewan Komisaris Board of Commissioner's Member
1.	12 Januari 2023 January 12, 2023	1. Profil perusahaan 2. GCG	1. Company profile 2. GCG	Seluruh

No.	Tanggal Date	Agenda		Anggota Dewan Komisaris Board of Commissioner's Member
2.	13 Juli 2020 July 13, 2020	1. Profil perusahaan 2. GCG 3. Audit Internal 4. Whistle Blowing System (WBS)	1. Company profile 2. GCG 3. Internal Audit 4. Whistle Blowing System (WBS)	Ida Nuryatin Finahari

Penilaian Kinerja Komite–Komite di Bawah Dewan Komisaris
Assessment of Committees Under the Board of Commissioners' Performance

Dewan Komisaris secara berkala melakukan penilaian atas kinerja komite di bawah Dewan Komisaris sebagai bentuk evaluasi atas pelaksanaan tugas masing-masing komite sesuai dengan Pedoman Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris (*Board of Commissioner Manual*) dan *Board Manual*. Penilaian kinerja komite di bawah Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan kriteria yang dilaksanakan Dewan Komisaris berupa pencapaian target-target rencana kerja tahunan komite. Penjelasan lebih lanjut mengenai penilaian kinerja komite di bawah Dewan Komisaris dapat dilihat pada uraian terkait Komite Audit, Komite Nominasi dan Remuneasi serta Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan.

The Board of Commissioners periodically assesses the performance of committees under the Board of Commissioners as a form of evaluation of each committee's tasks as per the Board of Commissioners' Work Procedures Guidelines (BoC Manual) and the Board Manual. The assessment of the performance of committees under the Board of Commissioners is based on criteria set by the Board of Commissioners, such as achieving the annual committee work plan targets. Further explanation on the assessment of the performance of committees under the Board of Commissioners can be found in the descriptions related to the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, and Risk Management and Compliance Committee.

Penilaian Kinerja Direksi oleh Dewan Komisaris
Evaluation of the Board of Directors' Performance by the Board of Commissioners

Sebagai bagian dari fungsi Pengawasan yang diatur dalam Pedoman Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris (*Board of Commissioner Manual*) dan *Board Manual*, Dewan Komisaris bersama komite Dewan Komisaris melakukan evaluasi atas kinerja Direksi secara berkala. Evaluasi kinerja Direksi dilakukan berdasarkan laporan manajemen bulanan maupun triwulanan pada setiap pertemuan rapat pengawasan serta penilaian kinerja tahunan berdasarkan kriteria pencapaian atas *Key Performance Indicator* (KPI) baik kolegial maupun individu pada akhir periode tahun buku. Penjelasan lebih lanjut mengenai penilaian kinerja Direksi dapat dilihat pada uraian terkait Direksi.

As part of the Supervision function regulated in the Board of Commissioners' Work Procedures Guidelines (BoC Manual) and the Board Manual, the Board of Commissioners, together with the Board of Commissioners' Committees, evaluates the performance of the Board of Directors regularly. The evaluation of the Board of Directors' performance is based on monthly or quarterly management reports at each supervisory meeting, and annual performance assessments based on achievement criteria for Key Performance Indicators (KPIs), both collegially and individually at the end of the fiscal year. Further explanation on the evaluation of the Board of Directors' performance can be found in the descriptions related to the Board of Directors.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris
Board of Commissioners Performance Evaluation

Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja Dewan Komisaris secara mandiri (*self-assessment*) pada setiap akhir periode tahun buku bersamaan pelaksanaan evaluasi atas kinerja komite Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar, *Board Manual* dan Pedoman Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris (*Board of Commissioner Manual*). Dewan Komisaris melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas pengawasan yang dijalankan Dewan Komisaris berdasarkan Laporan Tugas Pengawasan, penerapan tata kelola perusahaan yang baik aspek Dewan

The Board of Commissioners conducts a self-assessment of its performance at the end of each fiscal year concurrently with the evaluation of the performance of the Board of Commissioners' committees, considering the provisions of the Articles of Association, Board Manual, and the Board of Commissioners' Work Procedures Guidelines (BoC Manual). The Board of Commissioners evaluates the execution of supervisory tasks carried out by the Board of Commissioners based on the Supervision Task Report, the implementation of good corporate governance aspects

Komisaris dan pencapaian realisasi Key Performance Indicators (KPI) Dewan Komisaris sebagai bagian dari laporan tugas pengawasan yang disampaikan kepada Pemegang Saham. Kinerja Dewan Komisaris berdasarkan Pencapaian KPI tahun 2023 adalah sebagai berikut:

by the Board of Commissioners, and the achievement of the realization of Key Performance Indicators (KPIs) of the Board of Commissioners as part of the supervisory task report submitted to the Shareholders. The Board of Commissioners' performance based on the Achievement of KPIs in 2023 is as follows:

Program Inisiasi Anggota Dewan Komisaris Baru Tahun 2023

Realization of Key Performance Indicators of the Board of Commissioners 2023

No.	Indikator Kinerja Kunci Key Performance Indicators	Bobot Weight	Nilai Capaian Achievement Value
1.	Review dan Tanggapan atas Rencana Perusahaan Review and Response to Company Plans	8	8
2.	Review dan Tanggapan atas Kinerja Perusahaan Review and Response to Company Performance	10	10
3.	Review tindak lanjut hasil/temuan audit internal/eksternal Review follow-up results/findings of internal/external audits	7	3
4.	Memberi tanggapan tertulis/persetujuan/masukan/saran terkait rencana strategis Perusahaan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris Provide written responses/approval/advice/suggestions regarding the Company's strategic plans that require approval from the Board of Commissioners	20	20
5.	Menyampaikan program kerja dan KPI Dewan Komisaris Tahun 2023 Delivering work programs and KPIs for the Board of Commissioners for 2023	8	8
6.	Menyampaikan pendapat/usul Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham/RUPS Convey opinions/proposals from the Board of Commissioners to Shareholders/GMS	9	9
7.	Menyampaikan Laporan tentang tugas pengawasan Dewan Komisaris Submit a report regarding the supervisory duties of the Board of Commissioners	9	9
8.	Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners Meeting	25	25
9.	Kajian Komite Committee Review	5	5
10.	Pengenalan/Induksi/Peningkatan Kompetensi Introduction/Induction/Competency Improvement	9	3
11.	Pengelolaan GCG GCG Management	5	5
Nilai Kinerja Performance Value		100	97

Penilaian terkait pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik atas aspek Dewan Komisaris termasuk organ pendukung Dewan Komisaris juga dilakukan secara berkala baik oleh pihak independen maupun mandiri (self assessment) secara bergantian setiap tahun. Hal tersebut merupakan bagian dari penilaian tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan kriteria penilaian sesuai dengan kerangka acuan yang diatur dalam Surat Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No.SK/SMBU/2012. Hasil penilaian penerapan tata kelola perusahaan yang baik tahun 2023 dilakukan secara mandiri (self-assessment), dimana pada aspek Dewan Komisaris mencapai skor 33,463 dari skor maksimal 35 atau setara dengan 92,75% dengan kategori Sangat Baik.

Assessment related to the implementation of good corporate governance aspects by the Board of Commissioners, including support organs of the Board of Commissioners, is also conducted periodically by both independent and self-assessment alternately each year. This is part of the assessment of good corporate governance based on assessment criteria according to the reference framework regulated in the Decree of the Minister of SOEs No.SK/SMBU/2012. The results of the assessment of the implementation of Good Corporate Governance aspects in 2023 were conducted through self-assessment, where in terms of the Board of Commissioners aspects, it achieved a score of 33.463 out of a maximum score of 35, or equivalent to 92.75%, with a category of Very Good.

Direksi
Board of Director

Transformasi PLN NP menjadi struktur Holding-SubHolding memiliki kapasitas dan jumlah pembangkit yang tersebar di seluruh Indonesia menjadi tantangan bagi PLN NP. Peran Direksi sangat penting dalam memastikan keberhasilan transformasi tersebut. Direksi terus berupaya mengembangkan PLN NP untuk dapat menjaga kepentingan terbaik jangka panjang korporasi dan pemegang saham serta para pemangku kepentingan dengan menciptakan nilai yang berkelanjutan. Sehingga Perusahaan menjadi entitas bisnis tangguh dan terpercaya dalam bisnis energi berkelanjutan yang berkemampuan dalam bertahan dan berkembang, beretika dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis, berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan, serta berdaya saing dan berfokus ke kinerja jangka panjang.

The transformation of PLN NP into a Holding-Sub-Holding structure enhances the capacity and number of power plants spread across Indonesia, presenting a significant challenge for PLN NP. The role of the Board of Directors is crucial in ensuring the success of this transformation. The Board of Directors continually strives to develop PLN NP to safeguard the long-term best interests of the corporation, shareholders, and stakeholders by creating sustainable value. Thus, the Company becomes a leading and trustworthy entity in the sustainable energy business, capable of enduring and growing, conducting business ethically and responsibly, contributing positively to society and the environment, and being competitive with a focus on long-term performance.

Direksi sebagai organ utama tata kelola Perusahaan secara kolektif memimpin jalannya fungsi pengelolaan Perusahaan sesuai Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan asas tata kelola yang baik (Good Corporate Governance). Setiap anggota Direksi menjalankan tugasnya menggunakan wewenang dan sumber daya yang dimiliki dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, bertindak secara rasional, hati-hati dan mempertimbangkan berbagai aspek penting yang relevan.

The Board of Directors, as the main governance body of the Company, collectively leads the management functions of the Company in accordance with the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations, while adhering to the principles of Good Corporate Governance. Each member of the Board of Directors performs their duties, uses their authority and resources in good faith and takes full responsibility, acts diligently and prudently, and considers various relevant important aspects.

Susunan Direksi
Composition of the Board of Directors

Susunan Direksi sebagai organ utama yang menjalankan fungsi pengelolaan Perusahaan ditetapkan oleh Pemegang Saham melalui keputusan RUPS. Direksi PLN NP berjumlah 4 (empat) orang sesuai dengan nomenklatur dalam struktur organisasi Perusahaan yang mengacu pada keputusan RUPS. Anggota Direksi yang menjabat telah melalui serangkaian nominasi mulai dari proses penjaringan dan seleksi serta dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) oleh PT PLN (Persero) selaku Pemegang Saham. Periode Januari sampai dengan Desember 2023, susunan Direksi PLN NP yang menjabat adalah sebagai berikut:

The composition of the Board of Directors, as the primary body executing the Company's management functions, is determined by the Shareholders through a General Meeting of Shareholders (GMS) decision. The Board of Directors of PLN NP consists of 4 (six) members, in accordance with the nomenclature in the Company's organizational structure based on the GMS decision. The serving members of the Board of Directors have undergone a series of nominations, starting from screening and selection processes and have passed the fit and proper test conducted by PT PLN (Persero) as the Shareholder. From January to December 2023, the composition of the Board of Directors of PLN NP is as follows:

Susunan Direksi Tahun 2023
Composition of the Board of Directors in 2023

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Rully Firmansyah	Direktur Utama President Director	Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pengangkatan Anggota Direksi PT PJB tanggal 21 September 2022. Circular GMS Decision regarding the Appointment of Members of the Board of Directors of PT PJB on September 21, 2022.
Muhamad Reza	Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga Director of Business Development and Commerce	Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pengangkatan Anggota Direksi PT PJB tanggal 21 September 2022. Circular GMS Decision regarding the Appointment of Members of the Board of Directors of PT PJB on September 21, 2022.

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
M. Yusuf Nasal A.[1]	Direktur Operasi Pembangkit Gas Director of Operation Gas Power Plant	Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris PT PLN tanggal 23 April 2021. Circular GMS Decision regarding the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners of PT PLN on April 23, 2021.
Rachmanto Indarto	Direktur Operasi Pembangkit Batubara Director of Operation Coal Power Plant	Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi tanggal 15 Juli 2020 jo. Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi tanggal 12 November 2020. Circular GMS Decision regarding Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors on 15 July 2020 jo. Circular GMS Decision regarding Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors on November 12, 2020.
Dwi Hartono	Direktur Keuangan Director of Finance	Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pengangkatan Anggota Direksi PT PLN tanggal 21 September 2020. Circular GMS Decision regarding the Appointment of Members of the Board of Directors of PT PLN on September 21, 2020.
Karyawan Aji	Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi Director of Human Capital Management and Administration	Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi tanggal 12 Juni 2020 jo. Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi tanggal 12 November 2020. Circular GMS Decision regarding Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors on June 12, 2020, jo. Circular GMS Decision regarding Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors on November 12, 2020.
Romang Pernila[1]	Direktur Operasi Pembangkit Gas Director of Operation Gas Power Plant	Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi tanggal 3 Agustus 2020. Circular GMS Decision regarding Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors on 3 August 2020.

Keterangan:
1. RUPS Sirkuler tanggal 3 Agustus 2020, memberhentikan dengan hormat Sdr. M. Yusuf Nasal A. selaku Direktur Operasi Pembangkit Gas, mengangkat dan memberikan Sdr. Romang Pernila selaku Direktur Operasi Pembangkit Gas.

Note:
1. Circular GMS on August 3, 2020, formally dismissed M. Yusuf Nasal A. as Director of Operation Gas Power Plant, appointed and appointed Romang Pernila as Director of Operation Gas Power Plant.

Pernyataan Independensi dan Potensi Benturan Kepentingan
Statement of Independence and Potential Conflicts of Interest

Perusahaan mendorong Direksi untuk menjaga independensi dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan dalam melaksanakan fungsinya semata-mata demi kepentingan terbaik Perusahaan. Anggota Direksi PLN NP membuat Pakta Integritas dan menyampaikan kepada Perusahaan terkait kepemilikan saham pribadi dan keluarga di PLN NP dan perusahaan lainnya. Setiap Anggota Direksi membuat pernyataan independensi dan bebas benturan kepentingan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya setiap tahun dengan menandatangani Pakta Integritas yang menyebutkan bahwa:

1. Akan melaksanakan tugas dan wewenang maupun pengembangan karir serta mengambil keputusan dalam keadaan mandiri, tidak berada di bawah tekanan dan/atau bebas dari pengaruh maupun intervensi dari pihak manapun termasuk tidak terbatas pada intervensi dari partai politik, kelompok maupun golongan tertentu (independence).

The Company encourages the Board of Directors to maintain independence and avoid any form of conflict of interest in performing their functions solely for the best interests of the Company. The members of the Board of Directors of PLN NP sign an Integrity Pact and submit it to the Company regarding the ownership of shares by themselves and their families in PLN NP and other companies. Each Board member annually declares their independence and freedom from conflicts of interest in performing their functions and duties by signing an Integrity Pact, which states that:

1. They will perform their duties and exercise their authority or career development and make decisions independently, not under pressure, and/or free from influence or intervention from any party, including but not limited to political parties, groups, or certain factions (independence).

2. Akan melaksanakan tugas dan wewenang serta mengambil keputusan dengan mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan lainnya oleh karenanya tidak akan menyalahgunakan kewenangan jabatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk kepentingan pihak manapun termasuk namun tidak terbatas pada kepentingan pribadi, partai politik, kelompok maupun golongan tertentu (duty care and loyalty).
3. Akan melaksanakan tugas dan wewenang serta mengambil keputusan tanpa ada kepentingan pribadi atau tujuan untuk melakukan sesuatu untuk manfaat diri sendiri, maupun menguntungkan pihak-pihak yang terkait, atau pihak yang terafiliasi, partai politik, kelompok maupun golongan tertentu (conflict of interest).
4. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta dalam mengambil keputusan, tidak akan meminta, tidak akan menawarkan/tidak menjanjikan untuk memberi/menerima hadiah, upeti, suap, sogok, gratifikasi apapun dan/atau bentuk imbalan lainnya yang bukan menjadi hak secara sah dari secara hukum dari pihak manapun.
5. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta dalam mengambil keputusan, tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) baik yang secara langsung maupun tidak langsung.
6. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta dalam mengambil keputusan, tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan terjadinya kerugian dalam penetapan harga pembelian, pemborosan dan kebocoran keuangan perusahaan.
7. Akan melaksanakan tugas dan wewenang serta mengambil keputusan dengan pemahaman/pengusaan yang cukup tentang berbagai ketentuan dan peraturan yang terkait (prudent person rule), dan mematuhi serta melaksanakan seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (duty abiding the law).

2. They will perform their duties and exercise their authority and make decisions prioritizing the interests of the Company above all else and therefore will not misuse their authority for the benefit of any party, including but not limited to personal interests, political parties, groups, or certain factions (duty of care and loyalty).
3. They will perform their duties and exercise their authority and make decisions without personal interest or intention to do something for personal gain, nor to benefit related parties or affiliates, political parties, groups, or certain factions (conflict of interest).
4. They will not request, offer, or promise to give/receive gifts, tributes, bribes, gratuities, or any other form of reward that is not legally and rightfully theirs from any party.
5. They will not engage in corrupt practices, collusion, or nepotism (KKN) directly or indirectly.
6. They will not engage in actions that result in unreasonable pricing, financial waste, or leakage in the Company's finances.
7. They will perform their duties and exercise their authority with adequate understanding of various related regulations and will comply with all applicable laws and regulations (duty to abide by the law).

Penandatanganan Pakta Integritas Direksi
Signing of the Integrity Pact by the Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Penandatanganan Signing Date
Rizy Firmansyah	Direktur Utama President Director	31 Juli 2023 July 31, 2023
Muhamad Reza	Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga Director of Business Development and Commerce	31 Juli 2023 July 31, 2023
M. Yusuy Nawal A.[1]	Direktur Operasi Pembangkit Gas Business Development and Commerce	24 Juli 2023 July 24, 2023
Rachmasie Indarto	Direktur Operasi Pembangkit Batubara Director of Operation Coal Power Plant	24 Juli 2023 July 24, 2023
Dwi Hartono	Direktur Keuangan Director of Finance	26 Juli 2023 July 26, 2023
Ranyowan Aji	Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi Director of Human Capital Management and Administration	24 Juli 2023 July 24, 2023
Kurnang Permana[1]	Direktur Operasi Pembangkit Gas Director of Operation Gas Power Plant	4 Desember 2023 December 4, 2023

Keterangan:
1. SK PLN Direksi tanggal 2 Agustus 2023, bersamaan dengan mutasi Sdr. M. Yusuy Nawal A. sebagai Direktur Operasi Pembangkit Gas, mengangkat dan menetapkan Sdr. Kurnang Permana sebagai Direktur Operasi Pembangkit Gas.

Note:
1. Decree PLN in August 2, 2023, concurring dismissal M. Yusuy Nawal A. as Director of Operation Gas Power Plant (appointed and appointed Kurnang Permana as Director of Operation Gas Power Plant.

Hubungan Afiliasi dan Kepemilikan Saham Anggota Direksi
Affiliation and Share Ownership of the Board of Directors

Hubungan afiliasi yang dimaksud mencakup hubungan keluarga dan keuangan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dengan sesama anggota Direksi serta anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali Perusahaan. Hubungan afiliasi anggota Direksi yang menjabat sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Affiliation refers to family and financial relationships between members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors themselves, and members of the Board of Directors with the Company's Main and/or Controlling Shareholders. The affiliations of the Board members throughout 2023 are as follows:

Hubungan Afiliasi Anggota Direksi
Affiliation of the Board Members

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keluarga Dengan Family Relationship with			Hubungan Keuangan Dengan Financial Relationship With		
		Dewan Komisaris Board of Commissioner	Direksi Board of Director	Pemegang Saham Shareholders	Dewan Komisaris Board of Commissioner	Direksi Board of Director	Pemegang Saham Shareholders
Ruly Firmansyah	Direktur Utama President Director	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Muhamad Reza	Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga Director of Business Development and Commerce	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
M. Yusuf Nurul A.[1]	Direktur Operasi Pembangkit Gas Director of Operation Gas Power Plant	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Rachmanow Indarto	Direktur Operasi Pembangkit Batubara Director of Operation Coal Power Plant	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Dwi Hartono	Direktur Keuangan Director of Finance	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Karyawan Aji	Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi Director of Human Capital Management and Administration	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Romeng Pamintu[1]	Direktur Operasi Pembangkit Gas Director of Operation Gas Power Plant	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Keterangan:
1. RUPS Luar Biasa tanggal 3 Agustus 2023, bersamaan dengan ke-mundur-an M. Yusuf Nurul A. sebagai Direktur Operasi Pembangkit Gas, mengangkat dan menetapkan Ibu Romeng Pamintu sebagai Direktur Operasi Pembangkit Gas.

Note:
1. Circular GMS on August 3, 2023, concurrently dismissed M. Yusuf Nurul A. as Director of Operation Gas Power Plant, appointed and appointed Romeng Pamintu as Director of Operation Gas Power Plant.

Selain itu, seluruh anggota Direksi Perusahaan yang menjabat sepanjang tahun 2023 tidak memiliki hubungan afiliasi di perusahaan lain yang dilarang sesuai dengan ketentuan internal Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Furthermore, none of the Company's Board members throughout 2023 have any affiliations in other companies prohibited by the Company's internal regulations and applicable laws.

Anggota Direksi secara berkala melaporkan kepemilikan sahamnya baik atas nama pribadi maupun keluarga pada Perusahaan dan/atau perusahaan lainnya untuk dicatat dalam Daftar Khusus. Kepemilikan saham Anggota Direksi yang menjabat sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Board members periodically report their share ownership, both personally and by their families, to the Company and/or other companies for recording in a Special Register. The share ownership of the Board members and their families throughout 2023 is as follows:

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Beserta Keluarga
Share Ownership of the Board Members and Their Families

Nama Name	Jabatan Position	Kepemilikan Saham Oleh Pribadi Pada Share Ownership by Individuals on		Kepemilikan Saham Oleh Keluarga Pada Share Ownership by Families on	
		Perusahaan Company	Perusahaan Lain Other Companies	Perusahaan Company	Perusahaan Lain Other Companies
Rully Firmansyah	Direktur Utama President Director	-	✓	-	-
Muhamad Reza	Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga Director of Business Development and Commerce	-	-	-	-
M. Yossy Faisal A.[1]	Direktur Operasi Pembangkit Gas Director of Operation Gas Power Plant	-	-	-	-
Rachmanna Indarto	Direktur Operasi Pembangkit Batubara Director of Operation Coal Power Plant	-	-	-	-
Dul Hartono	Direktur Keuangan Director of Finance	-	-	-	-
Karyawan Aji	Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi Director of Human Capital Management and Administration	-	-	-	-
Romang Pamela[1]	Direktur Operasi Pembangkit Gas Director of Operation Gas Power Plant	-	-	-	-

Keterangan:
1. RUPS Luar Biasa tanggal 5 Agustus 2020, menonaktifkan dengan hormat Sdr. M. Yossy Faisal A. sebagai Direktur Operasi Pembangkit Gas, mengangkat dan menetapkan Sdr. Romang Pamela sebagai Direktur Operasi Pembangkit Gas

Note:
1. Circular GMS on August 5, 2020, consecutively dismissed M. Yossy Faisal A. as Director of Operation Gas Power Plant appointed and appointed Romang Pamela as Director of Operation Gas Power Plant

Pedoman Kerja Direksi
Board of Directors Manual

Pedoman kerja Direksi merupakan bagian dari struktur kebijakan atau soft structure tata kelola perusahaan yang baik di lingkungan PLN NP yang menjadi pedoman khusus bagi Direksi dalam menjalankan perannya sesuai dengan Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman kerja Direksi disusun sejak tahun 2013 dalam bentuk Tata Laksana Kerja Direksi. Tata Laksana Kerja Direksi atau *Board of Directors Manual* (BoD Manual) kemudian ditetapkan berlakukan lewat Keputusan Direksi No. 0001K/000/DIR/2014 tanggal 30 Desember 2014. Muatan BoD Manual merupakan penjabaran lebih lanjut dari *Board Manual* yang berisiko teknis dari pelaksanaan kerja organ Direksi. Direksi dalam pelaksanaan fungsinya juga berpedoman pada *Board Manual* yang disusun pada tahun 2010 dan terakhir kali dimutakhirkan serta ditetapkan melalui kesepakatan bersama antara Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 25 November 2014. Direksi secara berkala melakukan review terhadap pedoman kerja Direksi dan pemutakhiran jika dipandang perlu, sesuai kebutuhan Direksi dan perkembangan Perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The Board of Directors' work guidelines are part of the soft structure of good corporate governance policies within PLN NP, serving as a specific guide for the Board in performing their roles in accordance with the Articles of Association and applicable laws. These guidelines were established in 2013 in the form of the Board of Directors Manual (BoD Manual), ratified by the Board of Directors' Decision No. 0001K/000/DIR/2014 on December 30, 2014. The BoD Manual elaborates on the technical execution of the Board's functions. Additionally, the Board also adheres to the Board Manual, which was prepared in 2010 and last updated and ratified through a joint agreement between the Board of Directors and the Board of Commissioners on November 25, 2014. The Board regularly reviews and updates the work guidelines as necessary, in line with the needs of the Board, the Company's development, and applicable laws.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Duties and Responsibilities of the Board of Directors

Direksi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dijabarkan lebih jelas dalam Board Manual serta BoD Manual. Fungsi pengelolaan Perusahaan yang dijalankan Direksi bertujuan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan proses bisnis Perusahaan sesuai dengan tujuan Perusahaan dan arahan Pemegang Saham dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi secara efektif serta memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tujuan Perusahaan dituangkan dalam Visi dan Misi Perusahaan yang dijabarkan dalam asaran dan strategi dalam bentuk Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahunan yang disusun Direksi atas persetujuan Pemegang Saham. Tugas dan tanggung jawab Direksi secara umum meliputi:

1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.
2. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan persetujuan RUPS.
3. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
4. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi.
5. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perusahaan, serta dokumen keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan.
6. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.
7. Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan.
8. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan.
9. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan, dan dokumen keuangan Perusahaan, dan dokumen Perusahaan lainnya.

The Board of Directors performs their duties and responsibilities as stipulated in the Articles of Association and elaborated in the Board Manual and BoD Manual. The Board's management functions are to ensure the effective implementation of the Company's policies and business processes in line with the Company's objectives and Shareholders' directives, utilizing innovation and technology effectively, and fulfilling social and environmental responsibilities. The Company's goals are outlined in its Vision and Mission, which are detailed in the Company's Long-term Plan (LJPP) and the Annual Budget and Operational Plan (ABOP) prepared by the Board with Shareholders' approval. The general duties and responsibilities of the Board include:

1. Ensuring and guaranteeing the implementation of the Company's business activities in accordance with its purposes and objectives.
2. Preparing the Company's Long-term Plan, Work Plan and Budget, and any amendments, and submitting them to the Board of Commissioners and Shareholders for GMS approval.
3. Explaining the Company's Long-term Plan and Work Plan and Budget to the GMS.
4. Maintaining the Shareholders' Register, Special Register, GMS Minutes, and Board of Directors' Meeting Minutes.
5. Preparing the Annual Report as a form of accountability, along with the Company's financial documents as required by law.
6. Preparing Financial Statements based on Financial Accounting Standards, and submitting them for audit by a Public Accountant.
7. Submitting the Annual Report, including the Financial Statements, to the GMS for approval and ratification.
8. Explaining the Annual Report to the GMS.
9. Submitting the approved Balance Sheet and Income Statement to the Ministry of Law and Human Rights as required by law.
10. Maintaining the Shareholders' Register, Special Register, GMS Minutes, Board of Commissioners' Meeting Minutes, Board of Directors' Meeting Minutes, Annual Report, financial documents, and other Company documents.

11. Menyimpan di tempat kedudukan Perusahaan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris, dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perusahaan serta dokumen Perusahaan lainnya.
12. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, termasuk fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan.
13. Membuatkan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham.
14. Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian dan tugasnya.
15. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta Anggota Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham.
16. Melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.

11. Keeping these documents at the Company's headquarters: Shareholders' Register, Special Register, GMS Minutes, Board of Commissioners' Meeting Minutes, Board of Directors' Meeting Minutes, Annual Report, financial documents, and other Company documents.
12. Developing an accounting system based on Financial Accounting Standards and internal control principles, especially in management, recording, storage, and supervision functions.
13. Providing regular reports as required, as well as other reports requested by the Board of Commissioners and/or Shareholders.
14. Preparing the Company's organizational structure with detailed tasks.
15. Explaining any matters asked or requested by the Board of Commissioners and Shareholders.
16. Performing other duties in accordance with the Articles of Association and as determined by the GMS under applicable laws.

Pembagian Tugas Anggota Direksi
Task Division of the Board Members

Direksi menjalankan peran kepemimpinannya dengan melakukan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi berdasarkan memenuhi jabatan anggota Direksi yang tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan struktur organisasi Perusahaan. Pembagian tugas Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi, maka hal tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. Direksi Perusahaan juga menetapkan pembagian tugas melalui Keputusan Direksi No. 045/F/09/DIR/2022 tanggal 1 Desember 2022. Pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi ditetapkan sebagai berikut:

The Board of Directors leads by distributing duties and management authority among its members based on their positions and responsibilities within the Company's organizational structure. This distribution is determined by the GMS decision as stipulated in the Limited Liability Company Law. If the GMS does not determine the distribution, it is decided by the Board of Directors. The Board also established the distribution of duties through the Board of Directors' Decision No. 045/F/09/DIR/2022 on December 1, 2022. The distribution of duties and responsibilities for each board member is as follows:

Pembagian Tugas Anggota Direksi
Distribution of Duties among the Board Members

Jabatan Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities	
Direktur Utama President Director	1. Memimpin, membina dan memastikan arah, kebijakan dan strategi Perusahaan sesuai Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). 2. Memimpin, membina dan memastikan kinerja Perusahaan dan Direksi sesuai visi, misi, sasaran usaha, strategi, kebijakan dan program kerja yang ditetapkan.	1. Lead, guide, and ensure the Company's direction, policies, and strategies align with the Company's Long Term Plan (RJPP) and the Annual Budget and Operational Plan (ABUP). 2. Lead, guide, and ensure the Company's and Directorates' performance align with the vision, mission, business goals, strategies, policies, and work programs.

Jabatan Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities	
	3. Menyelaraskan seluruh inisiatif internal Perusahaan dan memastikan peningkatan kemampuan bersaing Perusahaan. 4. Memastikan bahwa Perusahaan terus berkembang dan memberikan nilai tambah bagi shareholders. 5. Melaksanakan fungsi corporate leader untuk memastikan engagement seluruh anggota Perusahaan sekaligus sebagai inspirator dan motivator yang mengarahkan semua sumber daya Perusahaan untuk mencapai visi, misi dan tujuan Perusahaan. 6. Mengoordinasikan pelaksanaan strategis dan operasional Sekretariat Perusahaan, Satuan Pengawasan Intern, Satuan Technology Development and Asset Management, Satuan Legal, Risk, and Compliance, Satuan Supply Chain Management dan Satuan Project Management. 7. Memastikan implementasi budaya Perusahaan, kepatuhan, Kesehatan dan keselamatan kerja, keamanan dan lingkungan (K3KL) serta sistem manajemen yang diterapkan perusahaan sesuai visi dan misi Perusahaan. 8. Memastikan pelaksanaan identifikasi dan mitigasi risiko Perusahaan.	3. Align all Internal Company initiatives and ensure the Company's competitive capability is enhanced. 4. Ensure the Company continuously grows and adds value for shareholders. 5. Execute the role of corporate leader to ensure the engagement of all Company members while acting as an inspirer and motivator to direct all Company resources towards achieving the Company's vision, mission, and goals. 6. Coordinate the strategic and operational execution of the Corporate Secretariat, Internal Audit Unit, Technology Development and Asset Management Unit, Legal, Risk, and Compliance Unit, Supply Chain Management Unit, and Project Management Unit. 7. Ensure the implementation of the Company culture, compliance, Occupational Health, Safety, Security and Environment (HSSE), and the management systems applied by the Company align with its vision and mission. 8. Ensure the implementation of risk identification and mitigation for the Company.
Direktur Operasi Pembangkit Gas Director of Operation Gas Power Plant	1. Memimpin, memfasilitasi dan mengoptimalkan pengendalian kinerja operasi dan pemeliharaan Unit Pembangkit sesuai Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). 2. Memimpin, memfasilitasi dan mengoptimalkan perencanaan operasi dan pemeliharaan Unit Pembangkit berdasarkan prioritas pembelanjaan terkait Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL). 3. Menetapkan, mengembangkan, mengevaluasi dan memastikan terlaksananya kebijakan strategi dan operasional Unit Pembangkit. 4. Memimpin, memfasilitasi, monitoring dan evaluasi kinerja operasi dan pemeliharaan, serta pengendalian energi primer Unit Pembangkit dengan mengutamakan keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) pada Unit Pembangkit. 5. Memimpin, memfasilitasi dan mengoptimalkan kebijakan strategi dan operasional niaga tenaga listrik, pengelolaan dan evaluasi standar sistem manajemen energi, serta jasa O&M atau AHC, kepada Anak Perusahaan atau pihak lainnya pada Unit Pembangkit. 6. Mengoordinasikan pelaksanaan strategis dan operasional Bidang O&M Planning and Control IV, Bidang O&M Planning and Control V, Bidang O&M Planning and Control of New Renewable Energy (NRE), Bidang Power Generation Reliability II, Bidang Contract Management and Customer Relations II, Bidang Primary Energy Planning and Control II, Unit Pembangkitan, Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan dan Unit Maintenance, Repair and Overhaul. 7. Memastikan implementasi budaya Perusahaan, kepatuhan, Kesehatan dan keselamatan kerja, keamanan dan lingkungan (K3KL) serta sistem manajemen yang diterapkan perusahaan sesuai visi dan misi Perusahaan. 8. Memastikan pelaksanaan identifikasi dan mitigasi risiko pada Direktorat Operasi Pembangkit Gas. 9. Memastikan pengelolaan dan pengendalian program kerja, anggaran dan monitoring realisasi program kerja pada Direktorat Operasi Pembangkit Gas.	1. Lead, guide, and optimize the performance management of operations and maintenance of the Power Generation Unit in accordance with the Company's Long Term Plan (RJPP) and RKAP. 2. Lead, guide, and optimize the planning of operations and maintenance of the Power Generation Unit based on leading priorities related to the Power Purchase Agreement (PJBTL). 3. Establish, develop, evaluate, and ensure the implementation of strategic and operational policies for the Power Generation Unit. 4. Lead, guide, monitor, and evaluate the operational and maintenance performance and control of primary energy for the Power Generation Unit, prioritizing Health Safety Environment (HSE). 5. Lead, guide, and optimize the strategic and operational policies of electricity trading, management and evaluation of energy management system standards, and O&M or AHC services to Subsidiaries or other parties at the Power Generation Unit. 6. Coordinate the strategic and operational execution of the O&M Planning and Control IV, O&M Planning and Control V, O&M Planning and Control of New Renewable Energy (NRE), Power Generation Reliability II, Contract Management and Customer Relations II, Primary Energy Planning and Control II, Power Generation Unit, Power Generation Control Unit, and Maintenance, Repair and Overhaul Unit. 7. Ensure the implementation of the Company culture, compliance, Health, Safety, Security and Environment (HSSE), and the management systems applied by the Company align with its vision and mission. 8. Ensure the implementation of risk identification and mitigation in the Directorate of Gas Power Generation Operations. 9. Ensure the management and control of work programs, budgets, and monitoring of program realization in the Directorate of Gas Power Generation Operations.

Jabatan Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities	
Direktur Operasi Pembangkit Batubara Director of Operation Coal Power Plant	1. Memimpin, membina dan mengoptimalkan pengelolaan kinerja operasi dan pemeliharaan Unit Pembangkit sesuai Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). 2. Memimpin, membina dan mengoptimalkan perencanaan operasi dan pemeliharaan Unit Pembangkit berdasarkan prioritas pembebanan terkait Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL). 3. Menetapkan, mengembangkan, mengevaluasi dan memastikan terlaksanaanya kebijakan strategi dan operasional Unit Pembangkit. 4. Memimpin, membina, monitoring dan evaluasi kinerja operasi dan pemeliharaan, serta pengendalian energi primer Unit Pembangkit dengan mengutamakan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) pada Unit Pembangkit. 5. Memimpin, membina dan mengoptimalkan kebijakan strategi dan operasional niaga tenaga listrik, pengelolaan dan evaluasi standar sistem manajemen energi, serta Jasa O&M atau AMC kepada Anak Perusahaan atau pihak lain/yang ada Unit Pembangkit. 6. Mengoordinasikan pelaksanaan strategi dan operasional Bidang O&M Planning and Control I, Bidang O&M Planning and Control II, Bidang O&M Planning and Control III, Bidang Power Generation Reliability I, Bidang Contract Management and Customer Relations I, Bidang Primary Energy Planning and Control I, Unit Pembangkitan dan Unit Pelaksana Pembangkitan. 7. Memastikan implementasi budaya Perusahaan, kepatuhan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Keamanan dan Lingkungan (K3L) serta sistem manajemen yang diterapkan perusahaan sesuai visi dan misi Perusahaan. 8. Memastikan pelaksanaan identifikasi dan mitigasi risiko pada Direktorat Operasi Pembangkit Batu bara. 9. Memastikan pengelolaan dan pengendalian program kerja, anggaran dan monitoring realisasi program kerja pada Direktorat Operasi Pembangkit Batubara.	1. Lead, guide, and optimize the performance management of operations and maintenance of the Power Generation Unit in accordance with the Company's Long Term Plan (RJPP) and ABCP. 2. Lead, guide, and optimize the planning of operations and maintenance of the Power Generation Unit based on loading priorities related to the PJBTL. 3. Establish, develop, evaluate, and ensure the implementation of strategic and operational policies for the Power Generation Unit. 4. Lead, guide, monitor, and evaluate the operational and maintenance performance and control of primary energy for the Power Generation Unit, prioritizing Health, Safety, Security and Environment (HSSE). 5. Lead, guide, and optimize the strategic and operational policies of electricity trading, management and evaluation of energy management system standards, and O&M or AMC services to Subsidiaries or other parties at the Power Generation Unit. 6. Coordinate the strategic and operational execution of O&M Planning and Control I, O&M Planning and Control II, O&M Planning and Control III, Power Generation Reliability I, Contract Management and Customer Relations I, Primary Energy Planning and Control I, Power Generation Unit, and Generation Operating Unit. 7. Ensure the implementation of the Company culture, compliance Health, Safety, Security and Environment (HSSE), and the management systems applied by the Company align with its vision and mission. 8. Ensure the implementation of risk identification and mitigation in the Directorate of Coal Power Generation Operations. 9. Ensure the management and control of work programs, budgets, and monitoring of program realization in the Directorate of Coal Power Generation Operations.
Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga Director of Business Development and Commerce	1. Memimpin, membina dan mengoptimalkan pengelolaan penerapan strategi Perusahaan dan portofolio AP/PA sesuai yang diterapkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) maupun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). 2. Menetapkan, mengembangkan, mengevaluasi dan memastikan penetapan perencanaan dan target Perusahaan jangka panjang/menengah dalam bentuk RJPP serta mengoordinasikan penyusunan Rencana Jangka Panjang Unit (RJPU) di seluruh Unit Kerja Perusahaan. 3. Menetapkan, mengembangkan, mengevaluasi dan memastikan terlaksanaanya kebijakan strategi dan operasional manajemen investasi dan portofolio bisnis Perusahaan dan AP/PA. 4. Menetapkan, mengembangkan, mengevaluasi dan memastikan terlaksanaanya kebijakan strategi dan operasional bisnis pengembangan pembangkitan Independent Power Producer (IPP) dan non IPP pada Energi Baru Terbarukan (EBT) dan thermal. 5. Menetapkan, mengembangkan, mengevaluasi dan memastikan terlaksanaanya kebijakan strategi dan operasional pengembangan bisnis derivatif pembangkit.	1. Lead, guide, and optimize the strategic planning management of the Company and Subsidiaries and Affiliated Companies portfolio as outlined in the Company's Long Term Plan (RJPP) and ABCP. 2. Establish, develop, evaluate, and ensure the determination of long term/medium term planning and targets in the form of the Company's Long Term Plan (RJPP) and coordinate the preparation of the Long Term Plan Unit (RJPU) across all Company Work Units. 3. Establish, develop, evaluate, and ensure the implementation of strategic and operational policies for investment management and the business portfolio of the Company and Subsidiaries and Affiliated Companies. 4. Establish, develop, evaluate, and ensure the implementation of strategic and operational policies for the business development of Independent Power Producer (IPP) and non-IPP generation in New Renewable Energy (NRE) and thermal. 5. Establish, develop, evaluate, and ensure the implementation of strategic and operational policies for derivative power plant business development.

Jabatan Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities	
	6. Menetapkan, mengembangkan, mengevaluasi dan memastikan terlaksananya kebijakan strategi dan operasional pengelolaan manajemen kinerja Perusahaan sesuai standar kinerja unggul yang selaras dengan RJPP, RKAP dan arahan dari PT PLN (Persero). 7. Mengoordinasikan pelaksanaan strategi dan operasional Bidang Corporate Planning and sustainability, Bidang Portfolio Management and Subsidiaries, Bidang Business Development-Generation, Bidang Business Development-Generation Derivatives dan Bidang Corporate Performance. 8. Memastikan implementasi budaya Perusahaan, kepatuhan, kesehatan dan keselamatan kerja, keamanan dan lingkungan (K3KL) serta sistem manajemen yang dianutnya pencapaian sesuai visi dan misi Perusahaan. 9. Memastikan pelaksanaan identifikasi dan mitigasi risiko pada Direktorat Pengembangan Bisnis dan Niaga. 10. Memastikan pengelolaan dan pengendalian program kerja, anggaran dan monitoring realisasi program kerja pada Direktorat Pengembangan Bisnis dan Niaga.	6. Establish, develop, evaluate, and ensure the implementation of strategic and operational policies for performance management in line with superior performance standards aligned with the Company's Long Term Plan (LRPP), ABCP, and directives from PT PLN (Persero). 7. Coordinate the strategic and operational execution of Corporate Planning and Sustainability, Portfolio Management and Subsidiaries, Business Development-Generation, Business Development-Generation Derivatives, and Corporate Performance. 8. Ensure the implementation of the Company culture, compliance, Health, Safety, Security and Environment (HSSE), and the management systems applied by the Company align with its vision and mission. 9. Ensure the implementation of risk identification and mitigation in the Directorate of Business and Commercial Development. 10. Ensure the management and control of work programs, budgets, and monitoring of program realization in the Directorate of Business and Commercial Development.
Direktur Keuangan Director of Finance	1. Memimpin, membina dan mengoptimalkan pengembangan sistem keuangan, kebijakan perbendaharaan, kebijakan dan strategi pengelolaan akuntansi termasuk pengembangan sistem akuntansi, serta perencanaan strategi pengembangan kebijakan, prosedur dan tata kelola teknologi informasi. 2. Menetapkan, mengembangkan, mengevaluasi dan memastikan strategi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kebijakan pendanaan dan kebutuhan pendanaan Perusahaan dan Anak Perusahaan, serta pengaturan portofolio dan pengelolaan debt and equity sebagai peluang pendanaan untuk pengembangan aset Perusahaan. 3. Menetapkan, mengembangkan, mengevaluasi dan memastikan strategi kebijakan, pedoman penyusunan dan koordinasi penyusunan RKAP serta konsolidasi dengan Unit Kerja dan Anak Perusahaan, identifikasi isu strategis dan target utama Perusahaan dalam RKAP, monitoring dan pengendalian pencapaian RKAP, prioritisasi dan ketepatan alokasi anggaran serta verifikasi atas kas penerimaan dan pengeluaran sesuai RKAP. 4. Menetapkan, mengembangkan, mengevaluasi dan memastikan strategi pelaksanaan verifikasi administrasi keuangan, strategi pengelolaan operasional perbendaharaan, strategi pengelolaan manajemen kas dan likuiditas perusahaan, strategi pengelolaan penerbitan dan pendistribusian invoice, dan strategi pengelolaan pendapatan dan penarikan piutang tertagih serta revenue assurance system. 5. Menetapkan, mengembangkan, mengevaluasi dan memastikan strategi pemanfaatan non-cash loan dari PT PLN (Persero) dan pengurusan jaminan Bank serta pengelolaan dan administrasi pertagihan. 6. Menetapkan, mengembangkan, mengevaluasi dan memastikan strategi pengelolaan, penyusunan laporan dan keberadaan laporan keuangan, penyempurnaan sistem akuntansi, komponen biaya penjualan tenaga listrik dan bisnis derivatif pembangkitan, kebijakan akuntansi dan asuransi aset serta pengembangan Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR). 7. Menetapkan, mengembangkan, mengevaluasi dan memastikan strategi penyusunan dan pelaksanaan architecture solution dan business case layanan dan infrastruktur teknologi informasi.	1. Lead, guide, and optimize the development of financial systems, treasury policies, accounting management policies and strategies, including the development of accounting systems, and strategic planning for IT development, policies, procedures, and governance. 2. Establish, develop, evaluate, and ensure the strategy for planning, implementing, and controlling funding policies and requirements for the Company and Subsidiaries, as well as debt collection and management of debt and equity as funding opportunities for the development of the Company's assets. 3. Establish, develop, evaluate, and ensure the strategy for policy formulation, preparation guidelines, and coordination of RKAP preparation, as well as consolidation with Work Units and Subsidiaries, identification of strategic issues and main targets in the RKAP, monitoring and controlling RKAP achievement, prioritization and accuracy of budget allocation, and verification of cash flow receipts and expenditures in accordance with the RKAP. 4. Establish, develop, evaluate, and ensure the strategy for financial administration verification, treasury operations management, cash and liquidity management, income insurance and distribution management, revenue and receivables collection management, and revenue assurance systems. 5. Establish, develop, evaluate, and ensure the strategy for the utilization of non-cash loans from PT PLN (Persero) and handling bank guarantees as well as taxation administration and management. 6. Establish, develop, evaluate, and ensure the strategy for the preparation, study, and availability of financial reports, improvement of accounting systems, cost components of electricity sales, and derivative power plant businesses, accounting policies, asset insurance, and the development of Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR). 7. Establish, develop, evaluate, and ensure the strategy for the preparation and implementation of IT architecture solutions and business cases for IT services and infrastructure.

Jabatan Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities	
	8. Mengoordinasikan pelaksanaan strategis dan operasional Bidang Corporate Finance, Bidang Treasury and Tax, Bidang Accounting and Insurance dan Bidang Technology and Digital. 9. Memastikan implementasi budaya Perusahaan, kepatuhan, kesehatan dan keselamatan kerja, keamanan dan Lingkungan (K3KL) serta sistem manajemen yang diterapkan perusahaan sesuai visi dan misi Perusahaan. 10. Memastikan pelaksanaan identifikasi dan mitigasi risiko pada Direktorat Keuangan. 11. Memastikan pengelolaan dan pengendalian program kerja, anggaran dan monitoring realisasi program kerja pada Direktorat Keuangan.	8. Coordinate the strategic and operational execution of Corporate Finance, Treasury and Tax, Accounting and Insurance, and Technology and Digital fields. 9. Ensure the implementation of the Company culture, compliance, Health, Safety, Security and Environment (HSSE), and the management systems applied by the Company align with its vision and mission. 10. Ensure the implementation of risk identification and mitigation in the Directorate of Finance. 11. Ensure the management and control of work programs, budgets, and monitoring of program realization in the Directorate of Finance.
Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi Director of Human Capital Management and Administration	1. Memimpin, membina dan mengoptimalkan kebijakan pengelolaan human capital dan pengembangan organisasi untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam RJPP dan RKAP. 2. Menetapkan, mengembangkan, mengevaluasi dan memastikan strategi penyusunan, evaluasi dan pengendalian anggaran biaya kepegawaian, kebutuhan human capital jangka pendek dan jangka panjang serta evaluasi struktur organisasi dan formasi tenaga kerja. 3. Menetapkan, mengembangkan, mengevaluasi dan memastikan strategi pengelolaan implementasi rekrutmen, penempatan baik dan kaderisasi Karyawan, administrasi Karyawan, fasilitas kesejahteraan Karyawan, sistem manajemen kinerja Karyawan serta internalisasi budaya Perusahaan dan pencapaian kinerja Perusahaan. 4. Menetapkan, mengembangkan, mengevaluasi dan memastikan proses penetapan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi. 5. Menetapkan, mengembangkan, mengevaluasi dan memastikan strategi kebijakan, pedoman dan pengelolaan serta implementasi program strategis dan kegiatan kesehatan dan keselamatan kerja (K3), keamanan dan Lingkungan, serta pelaporan Environmental, Social and Governance (ESG) aspek Lingkungan. 6. Menetapkan, mengembangkan, mengevaluasi, memastikan dan mengkoordinasikan strategi pengelolaan fasilitas, pendayagunaan aset, pencatatan aset, serta anggaran administrasi Perusahaan. 7. Mengoordinasikan pelaksanaan strategis dan operasional Bidang Human Capital Strategy, Bidang Human Capital Development, Bidang Human Capital Services, Bidang Health, Safety, Security and Environment, Bidang General Affairs dan Unit PJB Academy. 8. Memastikan implementasi budaya Perusahaan, kepatuhan, kesehatan dan keselamatan kerja, keamanan dan Lingkungan (K3KL) serta sistem manajemen yang diterapkan perusahaan sesuai visi dan misi Perusahaan. 9. Memastikan pelaksanaan identifikasi dan mitigasi risiko pada Direktorat Manajemen Human Capital dan Administrasi. 10. Memastikan pengelolaan dan pengendalian program kerja, anggaran dan monitoring realisasi program kerja pada Direktorat Manajemen Human Capital dan Administrasi.	1. Lead, guide, and optimize human capital management and organizational development policies to achieve the targets set in the Company's Long Term Plan (LJPP) and ARKP. 2. Establish, develop, evaluate, and ensure strategies for budgeting, evaluating, and controlling personnel costs, short-term and long-term human capital needs, and evaluating the organizational structure and workforce formation. 3. Establish, develop, evaluate, and ensure strategies for managing recruitment implementation, career planning, and employee succession, employee administration, employee welfare facilities, performance management systems, and the internalization of the Company culture and performance achievement. 4. Establish, develop, evaluate, and ensure the process of determining members of the Board of Directors and Board of Commissioners of Subsidiaries and Associates. 5. Establish, develop, evaluate, and ensure strategies for policies, guidelines, and management and implementation of strategic programs and OHS activities, security and environmental protection, and ESG aspect reporting. 6. Establish, develop, evaluate, ensure, and coordinate strategies for facility management, asset utilization, asset licensing, and Company administration budget. 7. Coordinate the strategic and operational execution of Human Capital Strategy, Human Capital Development, Human Capital Services, Health, Safety, Security, and Environment, General Affairs, and the PJB Academy. 8. Ensure the implementation of the Company culture, compliance, Health, Safety, Security and Environment (HSSE), and the management systems applied by the Company align with its vision and mission. 9. Ensure the implementation of risk identification and mitigation in the Directorate of Human Capital and Administration Management. 10. Ensure the management and control of work programs, budgets, and monitoring of program realization in the Directorate of Human Capital and Administrative Management.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Implementation of the Duties and Responsibilities of the Board of Directors

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dijalankan sesuai dengan tujuan Perusahaan yang telah ditetapkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan secara tahunan dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Key Performance Indicators (KPI). Direksi melakukan serangkaian upaya dan program kerja untuk memastikan kelancaran bisnis Perusahaan dan mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan. Upaya tersebut mencakup manajemen organisasi, operasional, keuangan, kualitas layanan dan pengembangan produk yang ramah lingkungan. Direksi mendorong inovasi dan pemanfaatan teknologi secara efektif untuk meningkatkan daya saing, menanggapi perhatian dan harapan pemangku kepentingan, memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan serta menciptakan nilai yang berkelanjutan. Direksi pada tahun 2023 telah mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengelolaan Perusahaan sebanyak 85 keputusan. Sepanjang tahun 2023, Direksi telah melakukan inisiatif upaya pencapaian target-target RKAP dan KPI sebagai berikut.

The implementation of the Board of Directors' duties and responsibilities is aligned with the Company's objectives outlined in the Long-Term Plan (LRPP) and annually detailed in the Annual Budget and Operational Plan (ABOP) and Key Performance Indicators (KPI). The Board undertakes various efforts and work programs to ensure smooth business operations and achieve strategic objectives. These efforts include managing the organization, operations, finances, service quality, and developing environmentally friendly products. The Board encourages innovation and effective use of technology to enhance competitiveness, respond to stakeholder concerns and expectations, fulfill social and environmental responsibilities, and create sustainable value. In 2023, the Board issued 85 decisions related to the Company's management. Throughout 2023, the Board undertook initiatives to achieve ABOP and KPI targets, including:

Inisiatif Upaya Pencapaian Target RKAP dan KPI di tahun 2023

Initiatives for Achieving ABOP and KPI Targets in 2023

Aspek Aspect	Program Kerja Working Program	
Nilai Ekonomi Sosial Social Economic Value	1. Monitoring EBITDA 2. Monitoring Efisiensi Biaya Pokok Penyediaan Pembangkit 3. Mengukur Return on Invested Capital (ROIC) 4. Memastikan Capaian Angka Equivalent Forced Outage Rate (EFOR) 5. Memastikan Capaian Angka Equivalent Availability Factor (EAF) 6. Mengukur Tingkat Spesifik Fuel Consumption (SFC)	1. Monitoring EBITDA 2. Monitoring the Efficiency of Basic Costs of Providing Power Plants 3. Measuring Return on Invested Capital (ROIC) 4. Ensure the achievement of the Equivalent Forced Outage Rate (EFOR) figure 5. Ensure the achievement of the Equivalent Availability Factor (EAF) figure 6. Measuring Specific Fuel Consumption (SFC) levels
Inovasi Model Bisnis Business Model Innovation	1. Memastikan pemenuhan Risk Maturity Index (RMI) 2. Meningkatkan Pendapatan Beyond kWh 3. Mengoptimalkan Sinergi Antar Anak Perusahaan Lain (tidak termasuk Sinergi Unit PLN) 4. Meningkatkan Persentase Bauran Energi EBT 5. Mengukur Carbon Emission Reduction 6. Mengimplementasikan Strategic Partnership Genco	1. Ensure compliance with the Risk Maturity Index (RMI) 2. Increase Revenue Beyond kWh 3. Optimizing Synergies Between Other Subsidiaries (excluding PLN Unit Synergies) 4. Increase the Percentage of NBT Energy Mix 5. Measuring Carbon Emission Reduction 6. Implementing Genco's Strategic Partnership
Kepemimpinan Teknologi Technology Leadership	1. Mengimplementasikan Digital Power Plant 2. Memastikan Dukungan Value Creation 3. Memastikan Penyediaan Energi Primer Batubara	1. Implementing a Digital Power Plant 2. Ensure Value Creation Support 3. Ensure the provision of primary coal energy
Pengembangan Investasi Investment Development	1. Monitoring EPC Project Completion 2. Memastikan Tingkat Proper unit (Beyond Compliance) 3. Mengendalikan Penggunaan Anggaran Investasi sesuai RKAP 2023	1. Monitoring EPC Project Completion 2. Ensure Proper Unit Level (Beyond Compliance) 3. Control the use of the investment budget according to the 2023 ABOP
Pengembangan Talenta Talent Development	1. Mengukur % Talent Milenial (<42 tahun) dan % Perempuan Dalam Nominated Talent 2. Mengimplementasikan Risk and Digital Talent	1. Measuring the % of Millennial Talent (<42 years) and the % of Women in Nominated Talent 2. Implementing Risk and Digital Talent
Aspek Kepatuhan Compliance Aspects	1. Memenuhi Good Corporate Governance, kesehatan keselamatan ketenagalistrikan dan pengelolaan lingkungan hidup, tindak lanjut temuan SPI, BPK, dan Auditor lainnya serta ketepatan waktu penyampaian Laporan dan Akurasi data kinerja	1. Complying with Good Corporate Governance, electricity safety and environmental management, following up on findings from SPI, BPK, and other auditors as well as timely submission of reports and accuracy of performance data

Direksi juga telah melaksanakan arahan Pemegang Saham dan rekomendasi Dewan Komisaris dalam RUPS. Monitoring atas tindak lanjut arahan Pemegang Saham dan rekomendasi Dewan Komisaris tersebut sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

The Board of Directors has also implemented the directives of the Shareholders and recommendations of the Board of Commissioners in the General Meeting of Shareholders (GMS). Monitoring of the follow-up on these directives and recommendations throughout 2023 is as follows:

Monitoring Tindak Lanjut Arahan Pemegang Saham dan Rekomendasi Dewan Komisaris
Monitoring of the Follow-Up on Shareholders' Directives and Board of Commissioners' Recommendations

RUPS GMS	Arahan Pemegang Saham Shareholder Directive				Rekomendasi Dewan Komisaris Recommendation of the Board of Commissioners			
	Jumlah Total	Selesai Finished	Selesai Berkelanjutan Sustainable Finish	Proses Tindak Lanjut Follow-up Process	Jumlah Total	Selesai Finished	Selesai Berkelanjutan Sustainable Finish	Proses Tindak Lanjut Follow-up Process
LPT 2021 (29 Juni 2022) 2021 AGM (June 29, 2022)	12	7	5	0	14	4	10	0
RKAP 2023 (30 Januari 2023) 2023 ABCP (January 30, 2023)	49	19	26	4	17	10	5	2
LPT 2022 (14 Juni 2023) 2022 AGM (June 14, 2023)	33	1	16	14	12	1	12	4
Total	**94**	**26**	**46**	**18**	**43**	**15**	**27**	**6**

Rapat Direksi
Board of Directors Meetings

Rapat Direksi diadakan setiap kali dianggap perlu, namun sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan sebagaimana diatur dalam BoD manual dan Board Manual. Rapat Direksi dapat diadakan di luar jadwal rutin, jika dianggap perlu serta bersifat segera dan strategis, dengan agenda hal-hal yang memerlukan pengambilan keputusan. Dalam pelaksanaannya, Direksi menjadwalkan agar Rapat diselenggarakan minimal satu kali dalam satu minggu (setiap hari Kamis). Selain itu, Direksi dapat juga dapat mengundang anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Konsultasi yang diadakan oleh Direksi. Rapat Konsultasi merupakan Rapat Direksi yang dihadiri oleh Direksi untuk membahas berbagai aspek operasional dan pengelolaan finansial Perusahaan. Selain itu, dalam rangka pelaporan kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan fungsi pengelolaan Perusahaan oleh valuinya dilakukan melalui Rapat Pengawasan Dewan Komisaris yang dihadiri oleh Direksi. Ketentuan tersebut menjadi dasar penyusunan rencana Rapat Direksi yang dibuat sebelum tahun berjalan dan membahas agenda rutin dan agenda non rutin (lain-lain). Agenda rutin terdiri dari Laporan Kondisi Pasar, Posisi Perusahaan dan Laporan Manajemen. Agenda non rutin (lain-lain) adalah hal-hal diluar agenda rutin yang perlu dibahas sebagai laporan kepada Direksi maupun memerlukan persetujuan Direksi atau pembahasan atas arahan/keputusan Dewan Komisaris dan/atau RUPS.

The Board of Directors' meetings are held as necessary, but at least once a month as stipulated in the Board of Directors Manual and Board Manual. Meetings can be convened outside the regular schedule if deemed necessary and urgent, focusing on agenda items requiring immediate decisions. The Board of Directors aims to hold meetings at least once a week (every Thursday). Additionally, the Board may invite members of the Board of Commissioners to Consultation Meetings to discuss various operational and financial management aspects of the Company. Furthermore, reporting to the Board of Commissioners on the Company's management functions is conducted through Supervision Meetings attended by the Board of Directors. These provisions form the basis for the Board of Directors' meeting plans, which include both routine and non-routine agendas. Routine agendas cover Market Condition Reports, Company Position, and Management Reports. Non-routine agendas include matters outside the regular agenda that need to be reported to the Board of Directors, require the Board's approval, or discuss the directives/decisions of the Board of Commissioners and/or GMS.

Direksi melaksanakan tugas dan tanggungjawab serta pengambilan keputusan secara kolegial terkait fungsi pengelolaan Perusahaan melalui mekanisme Rapat Internal Direksi. Sepanjang tahun 2023, Direksi telah melaksanakan 22 kali Rapat Internal Direksi dengan agenda dan tingkat kehadiran Direksi sebagai berikut:

The Board of Directors carries out duties and responsibilities as well as collegial decision-making related to the Company's management functions through the mechanism of the Internal Board of Directors Meetings. Throughout 2023, the Board of Directors held 22 Internal Board of Directors Meetings with the following agendas and attendance:

Rapat Internal Direksi Tahun 2023
Internal Meetings of the Board of Directors in 2023

No.	Waktu Pelaksanaan Execution Time	Agenda	
1.	10 Januari 2023 January 10, 2023	1. Persiapan RUPS RKAP 2023 2. Laporan Progres Proyek	1. Preparation for the 2023 GMS ABCP 2. Project Progress Report
2.	24 Januari 2023 January 24, 2023	1. Konsultasi Aspek Perizinan Pasca Implementasi Holding Subholding 2. Persiapan Rapat Pengawasan Dekom 3. Persiapan RUPS RKAP 2023 Anak Perusahaan	1. Consultation on Licensing Aspects Post Implementation of Holding Subholding 2. Preparation for Board of Commissioners Oversight Meeting 3. Preparation of the 2023 GMS ABCP of Subsidiaries
3.	7 Februari 2023 February 7, 2023	1. Pengalokasian Pembangkit Sewa dan Opsi Pemenuhan 2. Laporan Progres Proses Pemilihan Partner PLTS Kanengkalan 3. Laporan Rencana Pemilihan Partner PLTS IKN	1. Rental Plant Management and Fulfillment Options 2. Progress Report on the Kanengkalan SPP Partner Selection Process 3. IKN SPP Partner Selection Plan Report
4.	16 Februari 2023 February 16, 2023	1. Penyampaian Progres Persiapan Raker 2. Permohonan Kepastian Perubahan Batasan Wewenang	1. Presentation of Work Meeting Preparation Progress 2. Request for Decision on Changes to Limitations of Authority
5.	23 Februari 2023 February 23, 2023	1. Progres Tindak Lanjut Rapat Direksi 2. Laporan Progres Proyek Strategis 3. Laporan Progres Pengadaan HGPP terkait LTE Turbine Gas 4. Persiapan Rapat Pengawasan Dekom	1. Progress of Follow-up to Board of Directors Meetings 2. Strategic Project Progress Report 3. HGPP Procurement Progress Report related to LTE Turbine Gas 4. Preparation for Board of Commissioners Oversight Meetings
6.	28 Februari 2023 February 28, 2023	1. Penyampaian Pengembangan Proyek PLTS IKN	1. Submission of IKN SPP Project Development
7.	2 Maret 2023 March 2, 2023	1. Progres Tindak Lanjut Rapat Direksi 2. Laporan Progres Proyek Strategis 3. Laporan Progres Konstruksi Proyek	1. Progress of Follow-up to Board of Directors Meetings 2. Strategic Project Progress Report 3. Project Construction Progress Report
8.	9 Maret 2023 March 9, 2023	1. Progres Tindak Lanjut Rapat Direksi 2. Penyampaian Proyek Integrasi OA - AMS	1. Progress of Follow-up to Board of Directors Meetings 2. Submission of OA - AMS Integration Progress
9.	16 Maret 2023 March 16, 2023	1. Pengembangan Usaha – Rencana Akuisisi PLTGU Sengkang	1. Business Development – Sengkang CCPP Acquisition Plan
10.	24 Maret 2023 March 24, 2023	1. Progres Tindak Lanjut Rapat Direksi	1. Progress of Follow-up to Board of Directors Meetings
11.	28 Maret 2023 March 28, 2023	1. Permohonan Usulan Keputusan Tagline 2. Persiapan Rapat Pengawasan Dekom	1. Request for Tagline Decision Proposal 2. Preparation for Board of Commissioners Oversight Meeting
12.	4 April 2023 April 4, 2023	1. Laporan Progres Pembebasan Lahan untuk Dedieselisasi 2. Progres Tindak Lanjut Rapat Direksi	1. Progress Report on Land Acquisition for Dieselization 2. Progress of Follow-up to Board of Directors Meetings
13.	3 Mei 2023 May 3, 2023	1. Usulan Persetujuan Perubahan Pandu GRC 2. Usulan Persetujuan Rekomposisi Anggaran PLTGU Sengkang 3. Laporan Progres PLTS Substitusi Pemakaian Sendiri 4. Usulan Team Matrix dan Investor Day	1. Proposed Approval of Changes to the GRC Pandu 2. Proposed Approval of the Sengkang CCPP Budget Recomposition 3. Self-Use Substitution SPP Progress Report 4. Proposed Team Matrix and Investor Day
14.	19 Mei 2023 May 19, 2023	1. Laporan Progres Proses Pemilihan Partner PLTS Kanengkalan	1. Progress Report on the Kanengkalan SPP Partner Selection Process
15.	6 Juni 2023 June 6, 2023	1. Persiapan RUPS LPT 2023 PT PLN NP	1. Preparation for the 2023 AGM GMS PT PLN NP

No.	Waktu Pelaksanaan Execution Time	Agenda	
16.	20 Juni 2023 June 20, 2023	1. Persiapan RUPS LPT 2023 Anak Perusahaan PT PLN NP 2. Laporan Usulan SHL ke KBEI, RK dan PLN SC 3. Persetujuan Preferred Strategic Partner untuk pengembangan PLTG 80X 50 MW	1. Preparation for the 2023 AAR GMS, PT PLN NP Subsidiary 2. SHL Proposal Report to KBEI, RK and PLN SC 3. Approval of the Preferred Strategic Partner for the development of the 50 MW 80X SPP
17.	22 Juni 2023 June 22, 2023	1. Konsultasi Rencana Proyek Luar Negeri	1. Consultation on Overseas Project Plans
18.	7 Juli 2023 July 7, 2023	1. Progres Tindak Lanjut Rapat Direksi 2. Progres Project Monitoring 3. Penyampaian RKAP 2024 & Realisasi 2023 4. Amandemen KBEI, untuk PLTGU Sengkang 5. Bisnis Proses Persetujuan Dirut 6. Progress Penugasan SOH pada Proses Bidding Mitra dan Pembangkitan 7. Strategi Penyelesaian Proyek Relokasi Hulim Pasca Pengakhiran Kontrak	1. Progress of Follow-up to Board of Directors Meetings 2. Project Monitoring Progress 3. Submission of 2024 ABCP & 2023 Realization 4. Amendment to the KBEI, for Sengkang CCPP 5. Business Process Director Approval Process 6. Progress of SOH Assignment in Partner Bidding and Generation Process 7. Strategy for Completion of the Hulim Relocation Project Post Contract Termination
19.	13 Juli 2023 July 13, 2023	1. Konsultasi Persiapan Rakor Sem 2 2023 2. Konsultasi Persiapan RJB COMMECT 2023 3. Permohonan Keputusan perihal Proyek PLTS Terapung Batam	1. Consultation on Preparation for Coordination Meeting Sem 2 2023 2. Consultation on Preparation for RJB COMMECT 2023 3. Request for Decision regarding the Batam Floating SPP Project
20.	28 Juli 2023 July 28, 2023	1. Penyampaian Draft Profil Risiko Korporat 2024 2. Persiapan Rapat Pengawasan Dekom 3. Pembahasan Penambahan Opsi Saham Sumbagsel	1. Submission of Draft Corporate Risk Profile 2024 2. Preparation for Board of Commissioners Oversight Meeting 3. Discussion on the addition of South Sumatra share options
21.	3 Agustus 2023 August 3, 2023	1. Realisasi RKAP s/d Juni 2023 2. Laporan Pengembangan Digital Power Plant 3. Konsultasi Persiapan Agenda Nusantaraenergy	1. Realization of ABCP until June 2023 2. Digital Power Plant Development Report 3. Consultation on Nusantaraenergy Agenda Preparation
22.	10 Agustus 2023 August 10, 2023	1. Laporan Progres Penugasan RUPTL 2. Laporan Progres Proyek Konstruksi (Add On Muara Tawar) 3. Laporan Persiapan Nusantara Power Connect 2023 4. Laporan Persiapan Nusantaraenergy 2023	1. Electricity Supply Business Plan (RUPTL) Assignment Progress Report 2. Construction Project Progress Report (Add On Muara Tawar) 3. Nusantara Power Connect 2023 Preparation Report 4. Nusantaraenergy 2023 Preparation Report
23.	4 September 2023 September 4, 2023	1. Konsultasi Hasil Evaluasi Semprul 2 PLTG Karangkates	1. Consultative Evaluation Results of Cover 2 Karangkates SPP
24.	7 September 2023 September 7, 2023	1. Konsultasi Dividen RJB dan Usulan Perubahan Nama AP PLN NP 2. Laporan Progres Persiapan NP Connect	1. RJB Dividend Consultative and Proposal to Change the Name of AP PLN NP 2. NP Connect Preparation Progress Report
25.	13 September 2023 September 13, 2023	1. Penugasan PT PLN NP dalam Pengembangan PLTS IKN	1. Assignment of PT PLN NP in the development of IKN SPP
26.	6 Oktober 2023 October 6, 2023	1. Laporan Progres Pemilihan Partner PLTS Batam 2. Usulan Persetujuan preferred strategic partner untuk pengembangan PLTG Karangkates 130 MW	1. Progress Report on Batam SPP Partner Selection 2. Proposed approval for the preferred strategic partner for the development of Karangkates SPP 130 MW
27.	11 Oktober 2023 October 11, 2023	1. Laporan Rencana Pembelajaran Tim Matriks Proyek 2. Laporan Progres Akuisisi 3. Laporan Strategi Penyerapan Anggaran Investasi 4. Laporan Monitoring Biaya Administrasi s.d September 2023 5. Progres Tindak Lanjut Rapat Direksi	1. Project Matrix Team Learning Plan Report 2. Acquisition Progress Report 3. Investment Budget Absorption Strategy Report 4. Administration Cost Monitoring Report until September 2023 5. Progress of Follow-up to Board of Directors Meetings
28.	25 Oktober 2023 October 25, 2023	1. Persiapan Rapat Pengawasan Dekom 2. Laporan Rencana Implementasi AMG 3. Dividen PLN NP dan RUPS LPT NP 2022	1. Preparation for the Board of Commissioners Oversight Meeting 2. AMG Implementation Plan Report 3. PLN NP Dividend and AAR NP GMS 2022
29.	10 November 2023 November 10, 2023	1. Laporan Update Kerja Sama Kajian Nuklir 2. Penetapan Pengadaan	1. Nuclear Study Cooperation Update Report 2. Determination of Procurement

No.	Waktu Pelaksanaan Execution Time	Agenda	
30.	28 November 2023 November 28, 2023	1. Permohonan Strategic Partner PLTU Tanjung Tembesi Baharu	1. Application for Strategic Partner for Tembesi Baharu Floating EPP
31.	11 Desember 2023 December 11, 2023	1. Usulan Persetujuan Pemenang Pengadaan 2. Usulan Persetujuan Penunjukkan Langsung Pengadaan 3. Penyampaian Rencana Akuisisi PLTU IPP Kupang Baru 1x15	1. Proposed Approval of Procurement Winner 2. Proposed Approval of Direct Procurement Appointments 3. Submission of the Acquisition Plan for CFPP IPP Baru Kupang 1x15
32.	28 Desember 2023 December 28, 2023	1. Usulan Persetujuan Pemenang Pengadaan	1. Proposed Approval of the Procurement Winner

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Direksi dalam Rapat Tahun 2023
Frequency and Attendance of the Board of Directors in Meetings in 2023

Nama Name	Rapat Internal Internal Meeting		Rapat Pengawasan Supervision Meeting		Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders	
	Frekuensi Rapat Meeting Frequency	Tingkat Kehadiran Attendance Rate	Frekuensi Rapat Meeting Frequency	Tingkat Kehadiran Attendance Rate	Frekuensi Rapat Meeting Frequency	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Rully Firmansyah	22	100 %	11	100 %	2	100 %
Muhamad Reza	20	91 %	11	100 %	2	100 %
M. Yusy Nizwil A.[1]	21	100 %	7	100 %	2	100 %
Rachmanto Indarto	22	100 %	11	91,67 %	2	100 %
Dwi Hartono	21	95 %	11	100 %	2	100 %
Karyawan Ali	22	100 %	11	100 %	2	100 %
Komang Permita[2]	9	82 %	6	100 %	2	100 %

Keterangan:
1. Masa jabatan tanggal 3 Agustus 2023, berdasarkan Surat Keputusan Direksi M. Yusy Nizwil A. sebagai Direktur Operasi Pembangkit Jawa, mengangkat dan menetapkan Ibu Komang Permita sebagai Direktur Operasi Pembangkit Jawa.

Note:
1. Effective date on August 3, 2023, based on Decision of M. Yusy Nizwil A. as Director of Operation Java Power Plant, appointed and appointed Komang Permita as Director of Operation Java Power Plant.

Keputusan atau Kewenangan Direksi yang Memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris
Decisions or Authorities of the Board of Directors Requiring Approval from the Board of Commissioners

Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris untuk:

1. Menggunakan aktiva tetap untuk penerbitan kredit jangka pendek (sampai dengan 1 (satu) tahun);
2. Mengadakan transaksi, kontrak, perjanjian, kesepakatan dan /atau kerjasama dengan badan usaha / pihak lain dengan ketentuan pekerjaan, kerjasama, kontrak atau kegiatan tersebut nilai per transaksinya melebihi 2% (dua persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari ekuitas Perusahaan yang telah diaudit tahun buku terakhir. Pembatasan tersebut diberlakukan tanpa memperhatikan jangka waktu pelaksanaan kerjasama/kontrak/kegiatan dimaksud.

The following actions by the Board of Directors must first receive written approval from the Board of Commissioners:

1. Pledging fixed assets for short-term credit (up to one year);
2. Engaging in transactions, contracts, agreements, or cooperation with other entities where the value per transaction exceeds 2% to 10% of the Company's audited equity from the last fiscal year. This limitation applies regardless of the cooperation/contract period.

3. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang (lebih dari 1 (satu) tahun), kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang diberikan kepada anak perusahaan dengan ketentuan pinjaman kepada anak perusahaan dilaporkan kepada Dewan Komisaris; Seluruh Pinjaman kepada anak perusahaan, termasuk pinjaman jangka pendek, dilaporkan kepada Dewan Komisaris melalui Laporan Manajemen Triwulanan.
4. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati.
5. Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun.
6. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi, tidak termasuk pengangkatan pejabatnya.
7. Melakukan penyesuaian pos anggaran maupun penuntukan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang telah ditetapkan.
8. Pengusulan wakil Perusahaan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan yang tidak memenuhi kriteria kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bersifat strategis.

Sepanjang tahun 2023, keputusan atau kewenangan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Usulan Rekomendasi Penghapusbukuan AFTB dengan Umur Ekonomis di atas 5 Tahun, tanggal 13 Februari 2023.
2. Usulan Struktur Organisasi PLTGU Sengkang, tanggal 28 April 2023.
3. Permohonan Persetujuan Usulan Rekomposisi Anggaran Kas Investasi Pengembangan untuk Akuisisi PLTGU Sengkang, tanggal 15 Mei 2023.
4. Permohonan Tanggapan Tertulis Persetujuan Penetapan Kandidat Partner Proyek Penugasan PLTS 90% 50 MWac beserta BESS, tanggal 26 Juni 2023.
5. Permohonan Tanggapan Tertulis/Persetujuan Penandatanganan Amandemen PJBTL atas Penambahan Entitas PLTGU Sengkang, tanggal 11 Juli 2023.
6. Permohonan Tanggapan Tertulis atas Perubahan Anggaran Dasar PT PLN Nusantara Power, tanggal 11 Juli 2023.
7. Permohonan Tanggapan Tertulis berkat Persetujuan Preferred Strategic Partner dan Penugasan ke PT PLN Nusantara Renewables/Afiliasi untuk Pengembangan PLTS Tenaganeg Kenangkalan 100 MW, tanggal 23 Oktober 2023.
8. Permohonan Tanggapan Tertulis atas Usulan RKAP Tahun 2024, tanggal 31 Oktober 2023.
9. Permohonan Tanggapan Tertulis atas Penempatan Wakil PT PLN Nusantara Power pada Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi PT PLN Nusantara Power, tanggal 3 November 2023.

3. Accepting or granting medium/long-term loans (more than 1 (one) year), except for loans (payables or receivables) to subsidiaries with the provisions that loans to subsidiaries are reported to the Board of Commissioners; All loans to subsidiaries, including short-term loans, are reported to the Board of Commissioners through the Quarterly Management Report.
4. Writing off bad debts and dead stock.
5. Disposing of movable fixed assets with a common economic life of up to five years.
6. Establishing the organizational structure one level below the Board of Directors, excluding the appointment of officials.
7. Modifying budget items or allocations in the Company's Work Plan and Budget (RKAP).
8. Proposing the Company's representatives as candidates for the Board of Directors and Board of Commissioners in joint ventures and/or subsidiaries that do not significantly contribute to or are not strategic for the Company.

In 2023, decisions or authorities of the Board of Directors requiring approval from the Board of Commissioners according to the Company's Articles of Association were as follows:

1. Proposal for the write-off of assets with an economic life over five years on February 13, 2023.
2. Proposal for the Organizational Structure of Sengkang CCPP on April 28, 2023.
3. Request for approval of the reallocation of the Development Investment Cash Budget for the acquisition of Sengkang CCPP on May 15, 2023.
4. Request for written feedback on the approval of the partner candidate for the 90% DPP 50 MWac assignment project and BESS on June 26, 2023.
5. Request for written feedback on the amendment to the PJBTL regarding the addition of the Sengkang CCPP entity on July 11, 2023.
6. Request for written feedback on changes to the Articles of Association of PT PLN Nusantara Power on July 11, 2023.
7. Request for written feedback on the approval of the Preferred Strategic Partner and assignment to PT PLN Nusantara Renewables/Affiliate for the development of the Kenangkalan 100 MW Floating Solar Power Plant on October 23, 2023.
8. Request for written feedback on the 2024 RKAP proposal on October 31, 2023.
9. Request for written feedback on the placement of PT PLN Nusantara Power representatives in subsidiaries and affiliates on November 3, 2023.

10. Permohonan Penelitian dan Penelaahan serta Pendapat dan Saran Tertulis atas Rancangan Rencana Jangka Panjang PT PLN Nusantara Power 2024-2028, tanggal 9 November 2023.
11. Permohonan Rekomendasi Dewan Komisaris terkait Penselarasan Alignment LKAI PLN dengan AI PLN NP 2023, tanggal 14 Desember 2023.

10. Request for research, review, and written opinion on the draft of the PT PLN Nusantara Power Long-Term Plan for 2024-2028 on November 9, 2023.
11. Request for the Board of Commissioners' recommendation regarding the alignment approval of LKAI PLN with AI PLN NP 2023 on Desember 14, 2023.

Keputusan atau Kewenangan Direksi yang Memerlukan Persetujuan RUPS Setelah Mendapatkan Tanggapan Tertulis dari Dewan Komisaris

Decisions or Authorities of the Board of Directors Requiring GMS Approval After Receiving Written Feedback from the Board of Commissioners

Direksi hanya dapat melakukan perbuatan-perbuatan setelah mendapat tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan persetujuan tertulis RUPS untuk tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Menggunakan aktiva tetap untuk jaminan kredit jangka menengah/panjang (lebih dari 1 (satu) tahun).
2. Melakukan penyertaan modal pada perusahaan lain, termasuk penambahan modal pada Anak Perusahaan dan/atau perusahaan patungan.
3. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan.
4. Melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan.
5. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan.
6. Mengikat Perusahaan sebagai penjamin (borg atau avalis) dan jaminan lainnya (Corporate Guarantee dan sejenisnya), kecuali untuk pemberitan Standby Letter of Credit/SBLC, Letter of Credit/LC yang timbul karena transaksi bisnis tetap mengacu pada ketentuan ayat 8 huruf b Pasal 11 Anggaran Dasar Perusahaan.
7. Mengadakan transaksi, kontrak, perjanjian, kesepakatan dan /atau kerjasama dengan badan usaha/pihak lain dengan ketentuan pekerjaan, kerjasama, kontrak atau kegiatan tersebut nilai per transaksinya melebihi kewenangan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (8) huruf b Anggaran Dasar Perusahaan atau ditentukan lain oleh Anggaran Dasar dan/atau RUPS.
8. Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan.
9. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap Perusahan kecuali aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun.
10. Menetapkan bisnis point organisasi Perusahaan;
11. Menetapkan dan merubah logo Perusahaan;

The Board of Directors can only perform actions after receiving written feedback from the Board of Commissioners and written approval from the GMS for the following:

1. Pledging fixed assets for medium/long-term credit (more than one year).
2. Investing in other companies, including capital increases in subsidiaries and/or joint ventures.
3. Establishing subsidiaries and/or joint ventures.
4. Divesting capital in subsidiaries and/or joint ventures.
5. Merging, consolidating, acquiring, separating, and dissolving subsidiaries and/or joint ventures.
6. Binding the Company as a guarantor (borg or avalis) and other guarantees (Corporate Guarantee, etc.), except for issuing Standby Letters of Credit/SBLC, Letters of Credit/LC arising from business transactions per Article 11(8)(b) of the Company's Articles of Association.
7. Engaging in transactions, contracts, agreements, or cooperation with other entities where the value per transaction exceeds the authority of the Board of Commissioners as stipulated in Article 11(8)(b) of the Articles of Association or as determined by the Articles of Association and/or GMS.
8. Forgoing collection of written-off bad debts.
9. Disposing of and writing off the Company's fixed assets, except for movable fixed assets with a common economic life of up to five years.
10. Establishing the Company's organisational blueprint.
11. Establishing and changing the Company's logo.

12. Melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal 11 Anggaran Dasar Perusahaan, yang belum dilengkapi dalam RKAP, termasuk melakukan perubahan RKAP, kecuali untuk perubahan pos anggaran maupun penurunannya wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris;
13. Membentuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan yang berdampak bagi Perusahaan;
14. Membebankan biaya Perusahaan yang bersifat tetap dan rutin untuk kegiatan yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan;
15. Pengusulan wakil Perusahaan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan atau anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perusahaan dan/atau bernilai strategis.

Sepanjang tahun 2023, keputusan atau kewenangan Direksi yang memerlukan persetujuan RUPS setelah mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Penempatan Wakil Komisi pada PT KYJB, tanggal 8 Maret 2023.
2. Usulan Persetujuan purchase option PLTGU Sengkang 215 MW, tanggal 3 April 2023.
3. Penghapusbukuan ATB: GP Greek, UP Muara Karang, UP Paiton, UP Crata dan UMRO, tanggal 19 Mei 2023.
4. Penetapan partner proyek percepatan pengembangan PLTS Kabelberghjima (Kyuna) Tersebar 50 MW untuk REN, tanggal 6 Juli 2023.
5. Penetapan strategic partner untuk pengembangan proyek percepatan PLTS Terapung Karangkates 100 MWC tanggal 10 November 2023.

13. Undertaking actions as referred to in Article 11(8) of the Articles of Association not included in the RKAP, including amendments to the RKAP, except for changes in budget items or allocations that require Board of Commissioners' approval.
12. Forming foundations, organizations, and/or associations related or unrelated to the Company that impact the Company.
14. Imposing fixed and routine costs on the Company for activities of foundations, organizations, and/or associations related or unrelated to the Company.
15. Proposing the Company's representatives as candidates for the Board of Directors and Board of Commissioners in joint ventures and/or subsidiaries that significantly contribute to or are strategically valuable to the Company.

Throughout 2023, decisions or authorities of the Board of Directors requiring GMS approval after receiving written feedback from the Board of Commissioners according to the Company's Articles of Association were as follows:

1. Placement of Komisi's representative in PT KYJB on March 8, 2023.
2. Proposal for the approval of the purchase option for the 215 MW Sengkang CCPP on April 3, 2023.
3. Write-off of assets at Greek GU, Muara Karang GU, Paiton GU, Crata GU, and UMRO on May 19, 2023.
4. Determination of the partner for the development project assignment of Kabelberghjima SPP (Kyuna) Dispersed 50 MW for REN on July 6, 2023.
5. Determination of the strategic partner for the development project assignment of the 100 MW Karangkates Floating Solar Power Plant on November 10, 2023.

Program Pengembangan Kompetensi Direksi

Board of Directors Competency Development Program

Kebijakan program pengembangan kompetensi Direksi diatur dalam Pedoman Tata Laksana Kerja Direksi (Board of Directors Manual) dan Board Manual. Program pengembangan Direksi dilenggarakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kompetensi yang relevan dengan bisnis PLN NP dalam rangka mendukung tugas dan tanggung jawab Direksi. Selama tahun 2023, anggota Direksi telah mengikuti kegiatan program pengembangan kompetensi sebagaimana telah dijelaskan pada uraian terkait Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Sekretaris Perusahaan, dan Kepala SPI.

The competency development program for the Board of Directors is regulated in the Board of Directors Manual and Board Manual. The program aims to enhance the knowledge and competencies relevant to PLN NP's business to support the duties and responsibilities of the Board of Directors. In 2023, members of the Board of Directors participated in competency development activities as detailed in the section on Education and Training of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Head of SPI.

Program Pengenalan Direksi
Board of Directors Induction Program

Program pengenalan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai PLN NP yang diperlukan anggota Direksi yang baru diangkat dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Perusahaan memiliki kebijakan program pengenalan (Program Induksi) bagi anggota Direksi yang baru diangkat sebagaimana diatur dalam Pedoman Tata Laksana Kerja Direksi (Board of Directors Manual) dan Board Manual. Program pengenalan Perusahaan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Unit Perusahaan/Anak Perusahaan dan penyajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan PLN NP dimana program tersebut dilaksanakan. Sekretaris Perusahaan ditunjuk sebagai pelaksana Program Pengenalan bagi Direktur yang baru diangkat. Materi program pengenalan meliputi:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG di Perusahaan.
2. Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetisi, risiko dan berbagai masalah strategis lainnya.
3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan audit eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit.
4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris.

The orientation program aims to provide new members of the Board of Directors with an overview of PLN NP to support their duties and responsibilities. The Company has an orientation program policy for newly appointed Board members, as outlined in the Board of Directors Manual and Board Manual. The orientation program can include presentations, meetings, visits to Company Units/Subsidiaries, and document reviews or other programs deemed appropriate by PLN NP. The Corporate Secretary is designated to implement the orientation program for newly appointed Directors. The orientation program materials include:

1. Implementation of GCG principles in the Company.
2. Overview of the Company regarding its objectives, nature and scope of activities, financial and operational performance, strategies, short and long-term business plans, competitive position, risks, and other strategic issues.
3. Information on delegated authorities, internal and external audits, internal control systems and policies, including the Audit Committee.
4. Information on the duties and responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners.

Pada tahun 2023, telah dilaksanakan program pengenalan bagi Direktur yang baru diangkat sebagai berikut:

In 2023, the orientation program for newly appointed Directors was implemented as follows:

No.	Tanggal Date	Agenda	Anggota Direksi Member of the Board of Directors
1.	15 Agustus 2023 August 15, 2023	Pengelolaan Pembangkit Power Plant Management	Koreng Parmita
2.	21 Agustus 2023 August 21, 2023	Program Kerja Direktorat Operasi Pembangkit Gas Work Program of the Director of Operation Gas Power Plant	
3.	22 Agustus 2023 August 22, 2023	Pengelolaan Energi Primer Primary Energy Management	
4.	29 Agustus 2023 August 29, 2023	Profil Perusahaan, Good Corporate Governance (Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Direksi) Company Profile, Good Corporate Governance (Duties, Responsibilities and Authority of Directors)	

Penilaian Kinerja Komite dan Unit Kerja atau Organ Pendukung Tata Kelola dan Pengendalian Internal di Bawah Direksi
Performance Assessment of Committees and Work Units or Governance and Internal Control Supports under the Board of Directors

Perusahaan mempertimbangkan skala bisnis dan struktur organisasi Perusahaan saat ini yang dipandang telah memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas Direksi, dipandang belum perlu untuk membentuk komite di bawah Direksi. Oleh karena itu, tidak tersedia informasi profil, pelaksanaan tugas dan penilaian atas kinerja komite dibawah Direksi sepanjang tahun 2023.

The Company considers its current business scale and organizational structure adequate to support the duties of the Board of Directors. Therefore, the formation of committees under the Board of Directors is deemed unnecessary at this time. Consequently, there is no information on the profile, tasks, or performance evaluations of such committees for the year 2023.

Organ pendukung tata kelola Perusahaan dan pengendalian internal yang telah dimiliki Perusahaan diantaranya Sekretaris Perusahaan, Satuan Pengawasan Internal, Satuan Pelayanan Hukum, dan Satuan Manajemen Risiko dan Kepatuhan. Pelaksanaan tugas organ pendukung tersebut diantaranya tercermin dari realisasi atas *Key Performance Indicator* (KPI) yang telah disepakati sebagai acuan dan ukuran pencapaian target pelaksanaan tugas masing-masing organ. Direktur Utama secara berkala melakukan penilaian kinerja Sekretaris Perusahaan, Satuan Pengawasan Internal dan Satuan Hukum, Risiko, dan Kepatuhan berdasarkan parameter kriteria kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas tersebut.

The Company's governance and internal control support organs include the Corporate Secretary, Internal Audit Unit, Legal Services Unit, and Risk Management and Compliance Unit. The duties of these support organs are reflected in the realization of the agreed-upon Key Performance Indicators (KPI), which serve as benchmarks for achieving their respective targets. The President Director periodically assesses the performance of the Corporate Secretary, Internal Audit Unit, and Legal, Risk, and Compliance Unit based on the criteria of Task Completeness and Execution.

Penilaian Kinerja Direksi

Performance Assessment of the Board of Directors

Direksi melakukan penilaian kinerja secara mandiri (self-assessment) dilakukan setiap bulan dan pada akhir periode tahun buku dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar, Board Manual dan Pedoman Tata Laksana Kerja Direksi (*Board of Directors Manual*). Penilaian tersebut dilakukan baik terhadap masing-masing individu Direksi maupun kolegial atas realisasi capaian target-target KPI serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagai bagian dari laporan yang akan disampaikan dalam pembahasan kinerja Perusahaan dengan Dewan Komisaris dalam Rapat Pengawasan. Direksi juga menyampaikan laporan manajemen yang memuat realisasi program kerja berdasarkan RKAP serta menyampaikan realisasi capaian KPI korporat dan masing-masing Direksi secara khususnya dan tahunan.

The Board of Directors conducts a self-assessment of its performance monthly and at the end of the fiscal year, adhering to the provisions of the Articles of Association, Board Manual, and Board of Directors Manual. These evaluations consider both individual and collective achievements of KPI targets and the Annual Budget and Operational Plan (ABOP). The results form part of the performance report presented during Supervisory Meetings with the Board of Commissioners. The Board of Directors also submits a management report detailing the implementation of work programs based on the ABOP, as well as quarterly and annual KPI achievements for both the corporation and individual directors.

Penilaian yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap kinerja Direksi secara kolegial dan individu berdasarkan laporan manajemen dan realisasi *Key Performance Indicators* (KPI) merupakan bagian dari pelaksanaan tugas fungsi pengawasan. RUPS melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi berdasarkan Laporan Keuangan, Laporan realisasi RKAP (Manajemen), Laporan Tahunan dan Realisasi *Key Performance Indicators* (KPI) serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Pengukuran keberhasilan kinerja Direksi oleh RUPS yang merupakan hasil kerja kolegial dari seluruh Anggota Direksi tercermin dari pencapaian KPI Korporat tahun 2023 sebagai berikut:

The Board of Commissioners evaluates the performance of the Board of Directors, both collectively and individually, based on management reports and KPI realizations, as part of their supervisory duties. The General Meeting of Shareholders (GMS) assesses the Board of Directors' performance based on the Financial Statements, ABOP realization reports (Management), Annual Report, and KPI achievements, as well as the implementation of good corporate governance. The success of the Board of Directors, reflecting their collective efforts, is evidenced by the Corporate KPI achievements in 2023 as follows:

Realisasi *Key Performance Indicators* Direksi 2023
Realization of *Key Performance Indicators* for the Board of Directors in 2023

No.	Indikator Kinerja Kunci Key Performance Indicators	Bobot Weight	Nilai Capaian Achievement Value
1.	Economy and Social Value	27	28,47
2.	Business Model Innovation	27	27,09
3.	Technology Leadership	14	15,38
4.	Energize Investment	14	15,23
5.	Unleash Talent	8	8,80
6.	Compliance	Max (-10)	-
	Nilai Kinerja Performance Value	**100**	**103,01**

Penilaian terkait pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik atau aspek Direksi termasuk organ pendukung Direksi juga dilakukan secara berkala baik oleh pihak independen maupun mandiri (self-assessment) secara bergantian setiap tahun. Hal tersebut merupakan bagian dari penilaian tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan kriteria penilaian sesuai dengan kerangka acuan yang diatur dalam Surat Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No.16/S.MBU/2012. Hasil penilaian penerapan tata kelola perusahaan yang baik tahun 2022 dilakukan secara mandiri (self-assessment), dimana pada aspek Direksi mencapai skor 34,478 dari skor maksimal 35 atau setara dengan 98,50% dengan kategori Sangat Baik.

Evaluations related to good corporate governance for the Board of Directors and its support organs are conducted periodically by independent parties and through self-assessments, alternating annually. This is part of the corporate governance assessment based on criteria outlined in the Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs No. 16/S.MBU/2012. The self-assessment results for good corporate governance implementation in 2022 show that the Board of Directors achieved a score of 34.478 out of a maximum of 35, equivalent to 98.50%, categorized as Excellent.

Nominasi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Nomination and Remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners

Tersedianya sumber daya manusia yang memadai untuk menjalankan peran kunci sebagai organ utama tata kelola Perusahaan sangat bergantung dengan bagaimana fungsi nominasi dan remunerasi dijalankan. Regenerasi kepemimpinan yang didukung dengan manajemen sumber daya manusia yang efektif adalah bagian penting dalam menjaga keberlanjutan dan kesuksesan jangka panjang Perusahaan. Remunerasi yang sesuai juga merupakan upaya mendukung motivasi dan kinerja, serta berkontribusi pada keberhasilan jangka panjang Perusahaan.

The availability of adequate human resources to fulfill key roles as the main governance organs of the Company heavily depends on how the nomination and remuneration functions are executed. Leadership regeneration, supported by effective human resource management, is crucial for maintaining the Company's sustainability and long-term success. Appropriate remuneration also supports motivation and performance, contributing to the Company's long-term success.

Sebagai anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT PLN (Persero), ketentuan Nominasi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris PLN NP secara khusus merujuk pada Peraturan Menteri BUMN dan kebijakan internal PT PLN (Persero) sebagai pemegang saham utama dan pengendali.

As a subsidiary of the State-Owned Enterprise (SOE) PT PLN (Persero), the nomination and remuneration provisions for the Board of Directors and the Board of Commissioners of PLN NP specifically refer to the Regulation of the Minister of SOEs and the internal policies of PT PLN (Persero) as the main shareholder and controller.

Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Policy on Diversity in the Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors

Proses nominasi Dewan Komisaris dan Direksi perlu memperhatikan aspek keberagaman diantaranya pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan keahlian yang dapat mendukung dan memberikan pandangan yang lebih luas dan komprehensif terkait dengan alternatif pemecahan masalah dan strategi pengembangan Perusahaan sehingga menghasilkan keputusan yang lebih efektif. Selain itu, dalam mendukung aspek keberlanjutan terkait dengan kesetaraan kesempatan kerja,

The nomination process for the Board of Commissioners and the Board of Directors must consider aspects of diversity, including knowledge, skills, experience, and expertise, which can support and provide broader and more comprehensive perspectives on problem-solving alternatives and the Company's development strategies, resulting in more effective decisions. Additionally, to support sustainability related to equal employment opportunities, diversity aspects may also include age and gender. The policy on

aspek keberagaman juga dapat mencakup usia dan jenis kelamin. Kebijakan keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi secara tertulis mengacu pada Anggaran Dasar, ketentuan Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dan Profil Direksi.

diversity in the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors is documented in the Articles of Association, shareholder provisions, and applicable laws and regulations. The diversity composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors can be seen in the Profile of the Board of Commissioners and the Profile of the Board of Directors sections.

Pemegang Saham dalam RUPS memberikan arahan bahwa Perusahaan harus memperhatikan dan melaksanakan target-target komposisi talent perempuan dan talent milenial mengacu pada peluncur tolok kinerja talent dari PLN kepada Anak Perusahaan. Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi telah menandatangani Kontrak Manajemen yang didalamnya memuat Indikator Kinerja Kunci terkait Perempuan dalam nominated talent dan milenial (<41 tahun) dalam nominated talent. Beberapa upaya yang telah dilakukan Perusahaan tahun 2023 dalam rangka memenuhi target dan mendukung aspek keberagaman tersebut diantaranya:

1. Melakukan pemetaan talent mengacu pada pedoman kontrak manajemen yang diberikan oleh PT PLN (Persero) selaku Pemegang Saham.
2. Menyampaikan data talent kepada PT PLN (Persero) dengan persentase women talent sebesar 26% dan milenial sebesar 52% dari nominated talent.
3. Implementasi program pengembangan women talent yang selaras dengan kebutuhan kompetensi dalam mendukung program strategi korporat antara lain excellent stakeholder management, business ecosystem, dikal kepemimpinan, leading community dan coaching clinic networking & collaboration.
4. Melakukan assessment kesiapan secara periodik mengacu pada peraturan direksi No. 0088/010/DIR/2022 tentang Kebijakan Strategis Human Experience Management System (HEMS) pada manajemen talenta dan karyawan sebagai bagian penyiapan kader Perusahaan.

Shareholders at the General Meeting of Shareholders (GMS) provide direction that the Company should pay attention to and implement targets for the composition of female and millennial talents, referring to PLN's technical performance guidelines for its subsidiaries. The Shareholders, Board of Commissioners, and Board of Directors have signed a Management Contract that includes Key Performance Indicators related to female nominated talent and millennial (<41 years) nominated talent. Efforts made by the Company in 2023 to meet these targets and support diversity include:

1. Conducting talent mapping based on the management contract guidelines provided by PT PLN (Persero) as the Shareholder.
2. Submitting talent data to PT PLN (Persero) with 26% female talent and 52% millennial talent from the nominated talent pool.
3. Implementing a women talent development program aligned with the competency needs to support strategic corporate programs, including excellent stakeholder management, business ecosystem, leadership training, leading community and coaching clinic networking & collaboration.
4. Periodically assessing succession planning based on the Board of Directors' Regulation No. 0088/010/DIR/2022 on the Strategic Human Experience Management System (HEMS) in talent and employee management as part of preparing the Company's future leaders.

Nominasi Direksi dan Dewan Komisaris
Nomination of the Board of Directors and Board of Commissioners

Nominasi Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan melalui serangkaian proses yang mencakup penjaringan, penilaian calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris serta penelaahan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Indonesia No. PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Suksesi Direksi merupakan bagian dari penerapan fungsi nominasi di tingkat manajerial tertinggi dalam rangka menyiapkan regenerasi untuk melanjutkan tongkat kepemimpinan Perusahaan.

The nomination of the Board of Directors and the Board of Commissioners is carried out through a series of processes, including screening, evaluation of candidates for the Board of Directors and the Board of Commissioners, and appointment, referring to the Regulation of the Minister of SOEs of Indonesia No. PER-3/MBU/03/2023 on March 20, 2023, on Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises. The succession of the Board of Directors is part of the nomination function at the highest managerial level to prepare for leadership regeneration to continue the Company's leadership.

Mekanisme Nominasi Direksi
Mechanism for Nominating the Board of Directors

Pembentukan Tim Evaluasi Evaluation Team Establishment

Pemegang Saham membentuk Tim Evaluasi untuk :
- Melakukan penjaringan dan penilaian terhadap Calon Anggota Direksi.
- Menyampaikan hasil evaluasi akhir penilaian untuk disampaikan kepada Direksi BUMN/ Pemegang Saham guna mendapatkan persetujuan.
- Menunjuk 1 (satu) atau lebih Lembaga Profesional untuk melakukan Assessment Calon Anggota Direksi, jika diperlukan.
- Menyampaikan hasil evaluasi akhir yang telah disetujui oleh Direksi BUMN/ Pemegang Saham guna disampaikan oleh Direksi BUMN/ Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris BUMN dan/atau Menteri Negara BUMN, jika diperlukan.

The Shareholders establish Evaluation Team for the following:
- Checking and assessing the prospective Board of Directors.
- Determining the final result of the evaluation to be delivered to the Board of Directors of SOEs/Shareholders in order to obtain the approval.
- Appoint 1 (one) or more Professional Institutions to conduct an Assessment of Candidates for Members of the Board of Directors, if necessary.
- Preparing evaluation result determined by the Board of Directors of SOEs/ Shareholders to be delivered to the Board of Commissioners and/or Ministry of State Owned Enterprises of Indonesia, if necessary.

Proses Penjaringan Election Process

- Tim Evaluasi menerima usulan dan mencari informasi bakal Calon Anggota Direksi dari berbagai sumber.
- Tim Evaluasi melakukan seleksi berdasarkan kriteria dan persyaratan administrasi yang ditetapkan (daftar riwayat hidup, dokumen lain, dan informasi yang diterima) untuk menyusun Daftar Bakal Calon (Long list) sebanyak minimal 5 (lima) orang calon untuk masing-masing jabatan anggota Direksi.
- Tim Evaluasi menyampaikan Daftar Bakal Calon (Long list) kepada Direksi BUMN/ Pemegang Saham untuk memperoleh persetujuan.

The Evaluation Team receives the recommendation and collects information concerning the prospective Board of Directors from various sources.
The Evaluation Team conducts selection based on stipulated administrative criteria and requirements (CV, other documents, and other information collected) to enlist the candidates in the (long list) with at least 5 (five) prospective Candidates.
The Evaluation Team submits the Prospective Candidate List (Long list) to the State Owned Enterprises Board of Directors/Shareholders for approval.

Proses Penilaian Assessment Process

- Tim evaluasi melakukan penilaian terhadap bakal calon yang namanya tercantum dalam Daftar Bakal Calon Anggota Direksi (long list) yang telah disetujui oleh Direksi BUMN/Pemegang Saham untuk memperoleh calon-calon terbaik yang akan diusulkan kepada Direksi BUMN/Pemegang Saham sebagai Calon Anggota Direksi.
- Dalam hal Assessment dilakukan oleh Lembaga Profesional, hasil Assessment disampaikan oleh Lembaga Profesional kepada tim evaluasi untuk dievaluasi.
- Hasil Assessment ditentukan oleh tim evaluasi dalam Daftar Calon Anggota Direksi (short list) yang terdiri dari 3 (tiga) orang untuk masing-masing jabatan anggota Direksi dengan peringkat nilai terbaik.
- Tim evaluasi menyampaikan Daftar Calon Anggota Direksi (short list) kepada Direksi BUMN/Pemegang Saham untuk penetapan Calon Direksi terpilih disertai dengan penjelasan mengenai proses penentuannya dan lampiran hasil penilaian lengkap.

The Evaluation Team assesses the candidates whose names are listed in the List of Candidates for Members of the Board of Directors (long list) that has been approved by the Board of Directors of SOEs/ Shareholders to obtain the best candidates who will be proposed to the Board of Directors of SOEs/Shareholders as Candidates for Members of the Board of Directors.
In the event that the Assessment is conducted by a Professional Institution, the results of the Assessment are submitted by the Professional Institution to the evaluation team for evaluation.
The results of the Assessment are determined by the evaluation team in a List of Candidates for Members of the Board of Directors (short list) consisting of 3 (three) people for each position of members of the Board of Directors with the best score ranking.
The Evaluation Team submits the List of Candidates for the Board of Directors (short list) to the Board of Directors of SOEs/Shareholders for the determination of the elected Candidates for the Board of Directors accompanied by an explanation of the determination process and an attachment of the complete assessment results.

Proses Penetapan Determination Process

- Direksi BUMN/ Pemegang Saham melakukan evaluasi akhir atas hasil Penilaian untuk menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan Anggota Direksi.
- Direksi BUMN/ Pemegang Saham mengajukan Calon Anggota Direksi untuk ditetapkan dalam RUPS menjadi anggota Direksi Perusahaan.
- Pengajuan untuk ditetapkan dalam RUPS dilakukan setelah Calon Anggota Direksi yang bersangkutan menandatangani Kontrak Manajemen.
- Mencabut Pemegang Saham baik di dalam RUPS maupun di luar RUPS memberikan calon Direksi terpilih sebagai Anggota Direksi Perusahaan.

The Board of Directors of SOEs/Shareholder conduct a final evaluation of the Assessment results to determine 1 (one) candidate for each position of Member of the Board of Directors.
The Board of Directors of SOEs/Shareholder submits the Candidate for the position of Member of the Board of Directors to be determined in the GMS as a member of the Company's Board of Directors.
The submission to be stipulated in the GMS is made after the relevant Prospective Member of the Board of Directors signs the Management Contract.
The Shareholders' decision either in the GMS or outside the GMS, determines the elected candidate as a member of the Board of Directors of the Company.

Mekanisme Nominasi Komisaris
Mechanism for Nominating the Board of Commissioners

Pembentukan Tim Evaluasi Evaluation Team Establishment

Pemegang Saham membentuk Tim Evaluasi untuk:
- Melakukan penjaringan dan penilaian terhadap Calon Anggota Dewan Komisaris;
- Menyampaikan hasil evaluasi akhir penilaian untuk disampaikan kepada Direksi BUMN/ Pemegang Saham guna mendapatkan penetapan;
- Menyiapkan hasil evaluasi akhir yang telah ditetapkan oleh Direksi BUMN/ Pemegang Saham guna disampaikan oleh Direksi BUMN/ Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris BUMN secara melalui Menteri BUMN, jika diperlukan.

The Shareholder establish Evaluation Team for the following:
- Planning and assessing the prospective Board of Commissioners;
- Determine the final evaluation results of the assessment to be submitted to the Board of Directors of SOEs/Shareholder for determination;
- Preparing evaluation result determined by the Board of Directors of SOEs/ Shareholders to be delivered to the Board of Commissioners and/ or Ministry of State- Owned Enterprises of Indonesia, if necessary.

Proses Penjaringan Election Process

- Tim Evaluasi melakukan verifikasi dan memasti informasi bakal Calon Anggota Dewan Komisaris dari berbagai sumber.
- Tim Evaluasi melakukan seleksi berdasarkan kriteria dan persyaratan administrasi yang ditetapkan (daftar riwayat hidup, dokumen lain, dan informasi yang diterima) untuk menyusun Daftar Bakal Calon (long list) paling sedikit 3 (tiga) kali lipat jumlah jabatan Dewan Komisaris yang lowong untuk jabatan anggota Dewan Komisaris.
- Tim Evaluasi menyampaikan Daftar Bakal Calon (long list) kepada Direksi BUMN/ Pemegang Saham untuk memperoleh persetujuan.

- The Evaluation Team reviews the recommendation and collects information concerning the prospective Board of Commissioners from various sources.
- The Evaluation Team conducts selection based on stipulated administrative criteria and requirements (CV, other documents, and other information collected) to enlist the candidates in the long list with at least 3 (three) prospective Candidates of the Board of Commissioners.
- The Evaluation Team submits the Prospective Candidate List (long list) to the State Owned Enterprises Board of Directors/Shareholder for approval.

Proses Penilaian Assessment Process

- Tim evaluasi melakukan penilaian terhadap bakal Calon Anggota Dewan Komisaris yang namanya tercantum dalam Daftar Bakal Calon Anggota Dewan Komisaris (long list) yang telah disetujui oleh Direksi BUMN/ Pemegang Saham untuk memperoleh nilai-nilai terbaik yang akan disusulkan kepada Direksi BUMN/ Pemegang Saham sebagai Calon Anggota Dewan Komisaris.
- Hasil penilaian dituangkan dalam Daftar Calon Anggota Dewan Komisaris (short list) yang terdiri dari 2 (dua) kali lipat jabatan Anggota Dewan Komisaris yang lowong dengan peringkat nilai tertinggi.
- Tim evaluasi menyampaikan Daftar Calon Anggota Dewan Komisaris (short list) kepada Direksi BUMN/Pemegang Saham untuk penetapan Calon Direksi terpilih disertai dengan penjelasan mengenai proses pemilihannya dan lampiran hasil penilaian lengkap.

- The Evaluation Team assesses prospective candidates for members of the Board of Commissioners whose names are listed in the List of Candidates for Members of the Board of Commissioners (long list) approved by the Board of Directors of SOEs/Shareholders to obtain the best candidates to be proposed to the Board of Directors of SOEs/Shareholders as Candidates for Members of the Board of Commissioners.
- The results of the assessment are determined in the List of Candidates for Members of the Board of Commissioners (short list) consisting of 2 (two) times the vacant position of Members of the Board of Commissioners with the best score standing.
- The Evaluation Team submits the List of Candidates for Member of the Board of Commissioners (short list) to the Board of Directors of the SOE/ Shareholder for the determination of the selected Candidates for the Board of Directors, accompanied by an explanation of the determination process and an attachment of the complete assessment results.

Proses Penetapan Determination Process

- Direksi BUMN/ Pemegang Saham melakukan evaluasi akhir atas hasil Penilaian untuk menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Dewan Komisaris terpilih untuk masing-masing jabatan Anggota Dewan Komisaris.
- Direksi BUMN/ Pemegang Saham mengusulkan Calon Anggota Dewan Komisaris untuk ditetapkan dalam RUPS menjadi Anggota Dewan Komisaris Perusahaan.
- Keputusan Pemegang Saham baik di dalam RUPS maupun di luar RUPS menetapkan Calon Anggota Dewan Komisaris terpilih sebagai Anggota Dewan Komisaris Perusahaan.

- The Board of Directors of the SOEs/ Shareholder conducts a final evaluation of the Assessment results to determine 1 (one) candidate for each position of Member of the Board of Commissioners.
- The Board of Directors of the SOEs/Shareholder proposes the Candidate for Member of the Board of Commissioners to be determined in the GMS to become a Member of the Board of Commissioners of the Company.
- Resolution of the Shareholders either in the GMS or outside the GMS stipulates the elected Prospective Member of the Board of Commissioners as a Member of the Board of Commissioners of the Company.

Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris
Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners

Penghasilan atau remunerasi adalah imbalan/balas jasa yang diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris karena kedudukan dan peran yang diberikan kepada Perusahaan sesuai dengan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kebijakan remuneras PLN NP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PT PLN (Persero) sebagai pemegang saham utama dan pengendali yang merupaca kepada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan secara internal telah menetapkan kebijakan remuneras Dewan Komisaris dan Direksi melalui Peraturan Direksi PT Pembangkitan Jawa-Bali No. 0094/I/09/DIR/2022 tentang Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa-Bali.

Remuneration or compensation is the reward given to the Board of Directors and the Board of Commissioners for their positions and roles within the Company, according to their duties, authorities, obligations, and responsibilities based on regulations. PLN NP's remuneration policy is implemented in accordance with the provisions of PT PLN (Persero) as the main shareholder and controller, referring to the Regulation of the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia No. PER-3/MBU/03/2023 on March 20, 2023, on Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises. Internally, the Company has established a remuneration policy for the Board of Commissioners and the Board of Directors through the Board of Directors Regulation of PT Pembangkitan Jawa-Bali No. 0094/I/09/DIR/2022 on the Income of the Board of Directors and the Board of Commissioners of PT Pembangkitan Jawa-Bali.

Struktur Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris
Structure of the Remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners

Remunerasi yang diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris berupa Gaji atau Honorarium, Tunjangan, dan Fasilitas serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus/LTI (long term incentive). Struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi PT Pembangkitan Jawa-Bali No. 0094/I/09/DIR/2022 tentang Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa-Bali. Komponen remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan secara rinci diuraikan sebagai berikut:

Remuneration provided to the Board of Directors and the Board of Commissioners includes Salary or Honorarium, Allowances, Facilities, and Bonuses/Performance Incentives/Special Incentives/Long-Term Incentives (LTI). The remuneration structure for the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company is regulated in the Board of Directors Regulation of PT Pembangkitan Jawa-Bali No. 0094/I/09/DIR/2022 on the Income of the Board of Directors and the Board of Commissioners of PT Pembangkitan Jawa-Bali. The detailed components of the remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners are as follows:

Struktur Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris
Structure of Remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners

Komponen Remunerasi Remuneration Components	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
Gaji/Honorarium Salary/Honorarium	• Honorarium Komisaris Utama ditetapkan sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari Gaji Direktur Utama. • Honorarium Komisaris ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Honorarium Komisaris Utama. • President Commissioner's Honorarium is set at 45% (forty-five percent) of President Director's salary. • The Commissioner's Honorarium is set at 90% (ninety percent) of President Commissioner's Honorarium.	• Gaji Direktur Utama ditetapkan oleh Pemegang Saham. • Gaji Direktur yang lain ditetapkan sebesar 92% (dengan puluh lima persen) dari Gaji Direktur Utama. • President Director's salary is determined by the Shareholders. • The salary of other Directors is set at 95% (eighty-five percent) of President Director's salary.
Tunjangan Cuti Tahunan dan Cuti Besar Annual Leave and Long Leave Benefits	Tidak diberikan N/A	Tidak diberikan N/A
Tunjangan Hari Raya Holiday allowance	Tunjangan hari raya diberikan sebesar 1 (satu) kali Honorarium. The holiday allowance is given in the amount of 1 (one) times the Honorarium.	diberikan sebesar 1 (satu) kali Gaji 1 (one) time salary

Komponen Remuneras Remuneration Components	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
Fasilitas/Tunjangan Perumahan Housing Facilities/ Allowances	-	1 (satu) Rumah Jabatan beserta perlengkapan pemeliharaan, utilitas, dan pengamanannya ditanggung sepenuhnya oleh Perusahaan. Apabila Perusahaan tidak menyediakan fasilitas rumah jabatan, maka Perusahaan dapat memberikan tunjangan perumahan 1 (one) Office Home along with maintenance equipment, utilities and security are fully borne by the Company. If the Company does not provide housing facilities, the Company can provide a housing allowance.
Tunjangan Transportasi Transportation Allowance	Tunjangan transportasi diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Honorarium masing-masing anggota Dewan Komisaris. Transportation allowance is given in the amount of 20% (twenty percent) of the Honorarium of each member of the Board of Commissioners.	-
Asuransi Purna Jabatan Post-Service Insurance	Ketentuan mengenai asuransi purna jabatan anggota Direksi mutatis mutandis berlaku bagi pemberian asuransi purna jabatan anggota Dewan Komisaris. Provisions regarding post-service insurance for members of the Board of Directors apply mutatis mutandis to the determination of post-service insurance for members of the Board of Commissioners.	Asuransi purna jabatan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Direksi yang masaknya definitif. 2. Tidak diberikan untuk anggota Direksi yang berstatus pegawai PT PLN (Persero) grup. 3. Premi yang ditanggung oleh perusahaan paling banyak 25% (dua puluh lima persen), dari Gaji dalam satu tahun. 4. Pemberian premi, iuran atau lebih lain yang relevan untuk asuransi purna jabatan sudah termasuk di dalamnya premi untuk asuransi kecelakaan dan kematian. Post-service insurance is provided with the following conditions: 1. Directors whose status is definitive. 2. Not given to members of the Board of Directors who have employee status in the PT PLN (Persero) group. 3. The premium borne by the company is a maximum of 25% (twenty five percent) of salary in one year. 4. Provision of premiums, contributions or other relevant terms for post-service insurance, including premiums for accident and death insurance.
Fasilitas Kendaraan Vehicle Facilities	-	Anggota Direksi hanya berhak atas 1 (satu) fasilitas kendaraan dari perusahaan. Fasilitas kendaraan termasuk di dalamnya biaya pemeliharaan dan operasional diberikan dengan memperhatikan kondisi keuangan perusahaan. Members of the Board of Directors are only entitled to 1 (one) vehicle facility from the company. Vehicle facilities including maintenance and operational costs are provided taking into account the company's financial condition.
Fasilitas Kesehatan Medical Facility	Ketentuan mengenai Fasilitas kesehatan anggota Direksi, mutatis mutandis berlaku bagi Fasilitas kesehatan anggota Dewan Komisaris. Provisions regarding health facilities for members of the Board of Directors apply mutatis mutandis to health facilities for members of the Board of Commissioners.	Fasilitas kesehatan diberikan berupa: a) Rawat jalan dan obat; b) Rawat inap dan obat; dan c) Medical check up. Health facilities provided include: a) Outpatient care and medication; b) Hospitalization and medication; And c) Medical check up.
Fasilitas Bantuan Hukum Legal Aid Facility	Ketentuan mengenai Fasilitas bantuan hukum anggota Direksi dan mantan anggota Direksi, mutatis mutandis berlaku bagi Fasilitas bantuan hukum bagi anggota Dewan Komisaris serta mantan anggota Dewan Komisaris. Provisions regarding legal aid facilities for members of the Board of Directors and former members of the Board of Directors, mutatis mutandis apply to legal aid facilities for members of the Board of Commissioners and former members of the Board of Commissioners.	Fasilitas bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembiayaan jasa konsultan/pengacara/konsultan hukum yang meliputi proses pemeriksaan sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa di lembaga peradilan. Legal aid facilities are provided in the form of financing the services of a lawyer/legal consultant office which includes the examination process as a witness, suspect and defendant in a judicial institution.

Komponen Remuneras Remuneration Components	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
Tantiem/Insentif Kinerja/ Insentif Khusus Tantiem/Performance Incentives/Special Incentives	Tantiem ditetapkan oleh Pemegang Saham dengan komposisi bawahan Komisaris Utama 65% dari Direktur Utama dan Anggota Komisaris sebesar 70% dari Komisaris Utama. Tantiem is determined by Shareholders with the composition of the President Commissioner being 40% of the President Director, and Commissioners are 65% of the President Commissioner.	Tantiem ditetapkan oleh Pemegang Saham dengan komposisi bawahan anggota Direksi lainnya 85% dari Direktur Utama. The bonus is determined by the Shareholders with the composition of the other members of the Board of Directors being 85% of the President Director.
LTI (long term incentive)	Tidak diberikan N/A	Tidak diberikan N/A

Prosedur Penetapan Usulan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Procedure for Determining the Proposed Remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners

Penetapan Penghasilan yang berupa Gaji atau Honorarium, Tunjangan, dan Fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan, dan faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Penetapan Penghasilan yang berupa Tantiem/Insentif Kinerja/LTI yang bersifat variabel (merit rating) dilakukan dengan mempertimbangkan faktor kinerja dan kemampuan keuangan Perusahaan, serta faktor lain yang relevan.

The determination of income in the form of Salary or Honorarium, Allowances, and fixed facilities considers factors such as business scale, business complexity, inflation rate, financial condition and capability of the Company, and other relevant factors, without conflicting with regulations. The determination of income in the form of Bonuses/Performance Incentives/LTI, which are variable (merit rating), considers the Company's performance and financial capability, as well as other relevant factors.

Remunerasi dikaji oleh Direksi dan Dewan Komisaris dengan dibantu Komite Nominasi dan Remunerasi secara berkala setiap tahun untuk disusulkan dan memperoleh penetapan Pemegang Saham melalui RUPS sesuai dengan kebijakan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Penetapan Penghasilan berupa gaji/honorarium dan tantiem akan dilakukan oleh Pemegang Saham dan disampaikan melalui surat penetapan tersendiri berdasarkan keputusan RUPS. Sedangkan untuk tunjangan dan fasilitas diberikan berdasarkan ketentuan PT PLN (Persero) selaku pemegang saham mayoritas yang mengacu kepada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Mekanisme penetapan usulan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Remuneration is reviewed by the Board of Directors and the Board of Commissioners with the assistance of the Nomination and Remuneration Committee periodically each year for proposal and approval by the Shareholders through the GMS in accordance with the applicable policies, considering principles of prudence, fairness, and accountability. The determination of income in the form of salary/honorarium and bonuses will be made by the Shareholders and communicated through a separate determination letter based on the GMS resolution. Meanwhile, allowances and facilities are provided based on the provisions of PT PLN (Persero) as the majority shareholder, referring to the Regulation of the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia No. PER-3/MBU/03/2023 on March 20, 2023, on Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises. The mechanism for determining the proposed remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners is as follows:

Mekanisme Penetapan Usulan Remuneraasi Direksi dan Dewan Komisaris
Mechanism for Determining the Proposed Remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners

Usulan Remuneraasi oleh Direksi
Remuneration Proposal by the Board of Directors

Direksi mengajukan usulan remuneraasi kepada Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remuneraasi
The Board of Directors submits the remuneration proposal to the Board of Commissioners through the Nomination and Remuneration Committee.

Pembahasan dengan Komite Nominasi dan Remuneraasi
Discussion with the Nomination and Remuneration Committee

Komite Nominasi dan Remuneraasi melakukan penelaahan atas kompensasi yang diberikan di pasar untuk pekerjaan yang berlangsung pada perusahaan lainnya dengan bidang usaha dan status yang sama. Dengan mempertimbangkan kinerja usaha perusahaan dan kontribusi masing-masing individu, lantas dilakukan pembahasan oleh Komite Nominasi dan Remuneraasi untuk menyiapkan rekomendasi.
The Nomination and Remuneration Committee reviews the compensation provided in the market for the work concerned in other companies with the same business field and status. By considering the Company's business performance and the contribution of each individual, a discussion is then conducted by the Nomination and Remuneration Committee to prepare recommendations.

Pembahasan dan Persetujuan oleh Dewan Komisaris
Discussion and Approval with the Board of Commissioners

Dewan Komisaris melakukan pembahasan lanjutan dan penelaahan atas usulan remuneraasi yang diajukan.
The Board of Commissioners conducts further discussion and approval of the proposed remuneration.

Penyampaian Usulan
Proposal Submission

Usulan remuneraasi disampaikan kepada pemegang saham untuk mendapat persetujuan dan penetapan.
The remuneration proposal is submitted to shareholders for approval and determination.

Persetujuan dan Penetapan Remuneraasi
Approval and Determination of Remuneration

Pemegang Saham memberikan persetujuan dan menetapkan remuneraasi melalui RUPS.
Shareholders approve and determine remuneration through the GMS.

Jumlah Remuneraasi Direksi dan Dewan Komisaris
Amount of Remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners

Pemegang saham menetapkan Remuneraasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan untuk tahun 2023 melalui Surat Keputusan Pemegang Saham Mayoritas PLN NP No. 42943/MN.01.03/ F1/0000000/2023-R tanggal 03 Agustus 2023 Terkait Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun 2022, Penetapan Tantiem 2023, dan Penghasilan 2023 Direksi/Dewan Komisaris PT PLN Nusantara Power. Rincian remuneraasi untuk masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Shareholders determined the Remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for 2023 through the Majority Shareholder's Decision Letter PLN NP No. 42943/MN.01.03/F1/0000000/2023-R on August 3, 2023, regarding the Determination of the Use of 2022 Net Profit, 2023 Bonuses, and 2023 Income for the Board of Directors/Board of Commissioners of PT PLN Nusantara Power. The remuneration details for each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners are as follows:

Remuneraci Direksi
Remuneration for the Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Remuneraci Bulanan Monthly Remuneration			Tunjangan Tahunan THR (Rp) Annual Religious Holiday Allowances (Rp)	Gaji dan Tunjangan 2023 (Rp) Salary and Benefits 2023 (Rp)	Tantiem (Rp) Tantiem (Rp)
		Gaji Pertahun (Rp) Monthly Salary (Rp)	Tunjangan Per Bulan (Rp) Allowance Per Month (Rp)	Total (Rp) Total (Rp)			
Ruly Firmansyah	Direktur Utama President director	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Muhamad Reza	Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga Director of Business and Commerce Development	210.250.000	15.500.000	226.850.000	211.250.000	450.200.000	178.460.000
M. Yusuf Nouvel A.*	Direktur Operasi Pembangkit Gas Director of Gas Plant Operations	210.250.000	15.500.000	226.850.000	211.250.000	450.200.000	1.145.400.000
Rachmanto Indarto	Direktur Operasi Pembangkit Batubara Director of Coal Plant Operations	210.250.000	15.500.000	226.850.000	211.250.000	450.200.000	171.840.000
Dwi Hartono	Direktur Keuangan Director of Finance	210.250.000	15.500.000	226.850.000	211.250.000	450.200.000	188.400.000
Karyawan Ali	Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi Director of Human Capital Management and Administration	210.250.000	15.500.000	226.850.000	211.250.000	450.200.000	171.840.000
Kurniang Parrotta*	Direktur Operasi Pembangkit Gas Director of Gas Plant Operations	210.250.000	15.500.000	226.850.000	0	226.850.000	544.220.000

Keterangan:
1. [illegible] 2023, [illegible] M. Yusuf Nouvel A. sebagai Direktur Operasi Pembangkit Gas, [illegible] Kurniang Parrotta sebagai Direktur Operasi Pembangkit Gas baru.

Note:
1. [illegible] 2023 [illegible] M. Yusuf Nouvel A. as Director of Operation Gas Power Plant appointed and appointed Kurniang Parrotta as Director of Operation Gas Power Plant.

Remuneraci Dewan Komisaris
Remuneration for the Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Remuneraci Bulanan Monthly Remuneration				Tunjangan Tahunan THR (Rp) Annual Religious Holiday Allowances (Rp)	Honorarium dan Tunjangan 2023 (Rp) Honoraria and Allowances 2023 (Rp)	Tantiem (Rp) Tantiem (Rp)
		Honor Per Bulan (Rp) Honoraria Per Month (Rp)	Tunjangan Transport Per Bulan (Rp) Transport Allowance Per Month (Rp)	Tunjangan Komunikasi Per Bulan (Rp) Communication Allowance Per Month (Rp)	Total (Rp) Total (Rp)			
Ivy Haryadi	Komisaris Utama President Commissioner	0	0	0	0	0	0	0
Bagus Purnomo	Komisaris (Independen) Commissioner (Independent)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Nama Name	Jabatan Position	Remuneran Bulanan Monthly Remuneration				Tunjangan Tahunan THR (Rp) Annual Religious Holiday Allowance (Rp)	Honorarium dan Tunjangan 2023 (Rp) Honorarium and Allowance 2023 (Rp)	Santiasa (Rp) Santiasa (Rp)
		Honor Per Bulan (Rp) Honorarium Per Month (Rp)	Tunjangan Transport Per Bulan (Rp) Transport Allowance Per Month (Rp)	Tunjangan Komunikasi Per Bulan (Rp) Communication Allowance Per Month (Rp)	Total (Rp) Total (Rp)			
Fini Inesna Wardana	Komisaris (Independen) Commissioner (Independent)	101.655.000	30.339.000	1.000.000	132.994.000	101.655.000	234.649.000	544.300.000
Jurian P. Hutajulu[1]	Komisaris Commissioner	101.655.000	30.339.000	1.000.000	132.994.000	101.655.000	234.649.000	544.300.000
Hendra Iwanhyudi	Komisaris Commissioner	101.655.000	30.339.000	1.000.000	132.994.000	101.655.000	234.649.000	544.300.000
Kenedy	Komisaris Commissioner	101.655.000	30.339.000	1.000.000	132.994.000	101.655.000	234.649.000	0
Ida Nuryatin Finohan[2]	Komisaris Commissioner	101.655.000	30.339.000	1.000.000	132.994.000	101.655.000	234.649.000	0

Keterangan:
1. RUPS Tahunan tanggal 16 Juni 2023, mengakhiri masa jabatan Jurian P. Hutajulu sebagai Komisaris serta mengangkat dan menetapkan Dari Ida Nuryatin Finohan sebagai Komisaris.

Note:
1. Annual GMS on June 16, 2023, concerning, ended Mr. Jurian P. Hutajulu as Commissioner and appointed Mr. Ida Nuryatin Finohan as Commissioner.

Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja
Performance-Based Long-Term Compensation

Sepanjang tahun 2023, belum terdapat kebijakan terkait kompensasi atau insentif jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/atau karyawan yang dimiliki oleh Perusahaan, antara lain berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (management stock ownership program/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (employee stock ownership program/ESOP. Sehingga tidak ada informasi terkait jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya, jangka waktu pelaksanaan, persyaratan manajemen dan/atau karyawan yang berhak serta harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan.

In 2023, there was no policy related to performance-based long-term compensation or incentives for management and/or employees owned by the Company, such as a management stock ownership program (MSOP) or an employee stock ownership program (ESOP). Therefore, there is no information related to the number of ESOP/MSOP shares and their realization, implementation period, management and/or employee eligibility requirements, and the execution price or pricing determination.

Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary of the Board of Commissioners

Sekretariat Dewan Komisaris merupakan organ pendukung dalam tata kelola Perusahaan yang melaksanakan kegiatan untuk membantu Dewan Komisaris dalam memastikan bahwa proses pelaksanaan tugas Dewan Komisaris berjalan lancar serta dokumentasi yang berkaitan dengan keputusan dan kebijakan yang diusul dan dimintakan dengan baik. Sekretariat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang sekretaris Dewan Komisaris dan dibantu staf Sekretariat Dewan Komisaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris berasal dari luar Perusahaan.

The Secretariat of the Board of Commissioners is a supporting organ in the Company's governance, performing activities to assist the Board of Commissioners in ensuring that their duties are carried out smoothly and that documentation related to decisions and policies is properly administered. The Secretariat of the Board of Commissioners is led by a Secretary of the Board of Commissioners, supported by staff appointed and dismissed by the Board of Commissioners. The Secretary of the Board of Commissioners is appointed from external party (sourced from outside the Company).

Profil Sekretaris Dewan Komisaris
Profile of the Secretary of the Board of Commissioners

Kuncoro Suryokusumo

Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary of the Board of Commissioners

Warga Negara Indonesia, 46 tahun, berdomisili di Tangerang.

Menjabat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris sejak tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 000/DK/FUB/2022 tanggal 1 November 2022.

Pendidikan
Menyelesaikan pendidikan S1 Listrik dari Institut Teknologi Bandung tahun 2002 dan D2 Bidang Kelistrikan dari Institut Teknologi Bandung dan Hochschule Darmstadt University of Applied Sciences pada tahun 2015.

Riwayat Pekerjaan
Memulai karir sejak tahun 2004 di PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Beliau pernah menjabat sebagai Manager Unit Pelaksana Penyaluran dan Pengatur Beban Sistem Kalbar pada PT PLN (Persero) UIKL Kalimantan (2019), Manager Unit Pelaksana Transmisi Kalbar dan Kaltara pada PT PLN (Persero) UIKL Kalimantan (2019-2021), Manager Unit Pelaksana Pengatur Beban Kalimantan pada PT PLN (Persero) UIKL Kalimantan (2021-2022), Manager Perencanaan Sistem Kelistrikan pada PT PLN (Persero) UIKL Kalimantan (2022), Pjs Vice President Eksekutif Desain pada PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2022-Sekarang).

An Indonesian citizen, 46 years old, based in Tangerang.

He has been serving as the Secretary of the Board of Commissioners since 2022, based on the Board of Commissioners Decree No. 000/DK/FUB/2022 on November 1, 2022.

Education
Completed a bachelor's degree in Electrical Engineering from the Bandung Institute of Technology in 2002 and a Master's degree in Electrical Engineering from the Bandung Institute of Technology and Hochschule Darmstadt University of Applied Sciences in 2015.

Work Experience
He began his career in 2004 at PT PLN (Persero) in the South and Central Kalimantan Region. He has held various positions, including Manager of the Kalimantan Power Distribution and Load Management Unit at PT PLN (Persero) UIKL Kalimantan (2019), Manager of the East Kalimantan and North Kalimantan Transmission Unit at PT PLN (Persero) UIKL Kalimantan (2019-2021), Manager of the Kalimantan Load Management Unit at PT PLN (Persero) UIKL Kalimantan (2021-2022), System Planning Manager at PT PLN (Persero) UIKL Kalimantan (2022), and Acting Executive Vice President at PT PLN (Persero) Head Office (2022-Present).

Pedoman Kerja dan Tugas Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris

Work Guidelines and Responsibilities of the Secretary of the Board of Commissioners

Sekretaris Dewan Komisaris dalam mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris berpedoman pada *Corporate Governance Code*, *Board Manual* dan *Board of Commissioner Manual* (BoC Manual). Dalam rangka tertib administrasi dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, Sekretariat Dewan Komisaris harus memastikan dokumen penyelenggaraan kegiatan untuk membantu Dewan Komisaris tersimpan dengan baik di Perusahaan. Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris secara khusus dalam membantu Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan dan implementasi GCG adalah sebagai berikut:

1. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan di bidang kesekretariatan dalam lingkungan Dewan Komisaris yang rincian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Dewan Komisaris.
2. Mengoordinasikan penyediaan informasi yang diselukan Dewan Komisaris dan Komite-Komite Dewan Komisaris, seperti monitoring tindak lanjut hasil keputusan/ rekomendasi dan arahan Dewan Komisaris, laporan berkala dari Direksi (Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan, Laporan Tahunan, Laporan Hasil Pemeriksaan SPI) serta laporan/informasi lainnya mengenai pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi.
3. Menyusun dan menfinalisasi laporan dan dokumen yang menjadi kewajiban Dewan Komisaris, antara lain Laporan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris.
4. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris, penyiapan dan pengiriman undangan, penyampaian materi rapat serta pembuatan risalah rapat, serta tugas-tugas lain yang terkait.
5. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Komite Komisaris.
6. Mengumpulkan data-data teknis yang berasal dari Komite-Komite Dewan Komisaris untuk keperluan Dewan Komisaris.
7. Menyusun dan mengadministrasikan risalah rapat dan dokumen Dewan Komisaris lainnya serta mengirimkan hasil-hasil keputusan rapat kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
8. Menetapkan prosedur teknis kunjungan kerja Dewan Komisaris.
9. Menjadi penghubung (liaison officer) Dewan Komisaris dengan pihak lain.
10. Dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik Perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris dan wajib melaporkan secara tertulis hasil penugasan tersebut.
11. Sekretaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan tugasnya.

The Secretary of the Board of Commissioners, in supporting the duties of the Board of Commissioners, adheres to the Corporate Governance Code, Board Manual, and Board of Commissioners Manual (BoC Manual). To maintain orderly administration and good corporate governance, the Secretariat of the Board of Commissioners must ensure that documents supporting the Board of Commissioners' activities are well preserved in the Company. The specific duties and responsibilities of the Secretary of the Board of Commissioners in assisting the Board of Commissioners with oversight functions and the implementation of GCG include:

1. Leading and organizing secretarial activities within the Board of Commissioners, with detailed tasks further regulated by the Board of Commissioners.
2. Coordinating the provision of information required by the Board of Commissioners and its Committees, such as monitoring the follow-up on decisions/recommendations and directives of the Board of Commissioners, periodic reports from the Board of Directors (Monthly Reports, Quarterly Reports, Annual Reports, Internal Audit Reports), and other reports/information on Company management conducted by the Board of Directors.
3. Compiling and finalizing reports and documents required by the Board of Commissioners, including the Board of Commissioners' Oversight Report and the Board of Commissioners' Work Plan and Budget.
4. Organizing meetings of the Board of Commissioners, preparing and sending invitations, distributing meeting materials, recording minutes, and other related tasks.
5. Coordinating and facilitating activities of the Commissioners' Committees.
6. Collecting technical data from the Board of Commissioners' Committees for the Board of Commissioners' needs.
7. Compiling and administering minutes of meetings and other documents of the Board of Commissioners and sending the decisions of the meetings to the relevant parties.
8. Establishing technical procedures for the Board of Commissioners' site visits.
9. Acting as the liaison officer between the Board of Commissioners and other parties.
10. Accessing records or information about employees, funds, assets, and other resources of the Company related to the performance of duties based on written assignment letters from the Board of Commissioners and reporting the results of such assignments in writing.
11. The Secretary and Staff of the Secretariat of the Board of Commissioners must maintain the confidentiality of Company documents, data, and information, both internally and externally, and use them only for official duties.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Komisaris

Execution of Duties of the Secretary of the Board of Commissioners

Sekretaris Dewan Komisaris melakukan kegiatan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan dan konsultasi kepada Direksi. Pelaksanaan tugas Sekretaris Dewan Komisaris sepanjang tahun 2022 secara umum meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kesekretariatan di lingkungan Dewan Komisaris termasuk surat keluar dan surat masuk dan dokumen lainnya.
2. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris dan rapat/pertemuan antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham, Direksi maupun pihak-pihak terkait lainnya.
3. Menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dan komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan:
   a) Monitoring tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan arahan Dewan Komisaris.
   b) Bahan/materi yang bersifat administrasi mengenai laporan/kegiatan Direksi dalam mengelola Perusahaan.
   c) Dukungan administrasi serta monitoring berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Dewan Komisaris sehubungan dengan kegiatan pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi.
   d) Akses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik Perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
4. Mengumpulkan data-data teknis yang berasal dari komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris dan tenaga ahli Dewan Komisaris untuk keperluan Dewan Komisaris.

The Secretary of the Board of Commissioners performs activities to assist the Board of Commissioners in carrying out their supervisory and consultative duties to the Board of Directors. The tasks of the Secretary of the Board of Commissioners throughout 2022 generally included:

1. Conducting administrative secretarial activities within the Board of Commissioners, including outgoing and incoming correspondence and other documents.
2. Organizing meetings of the Board of Commissioners and meetings between the Board of Commissioners and Shareholders, the Board of Directors, and other relevant parties.
3. Providing data/information required by the Board of Commissioners and its committees, related to:
   a) Monitoring/follow-up actions on decisions, recommendations, and directives of the Board of Commissioners.
   b) Administrative materials on reports/activities of the Board of Directors in managing the Company.
   c) Administrative support and monitoring related to matters requiring approval or recommendations from the Board of Commissioners concerning Company management activities conducted by the Board of Directors.
   d) Access to records or information about employees, funds, assets, and other resources of the Company related to the performance of duties.
4. Collecting technical data from committees within the Board of Commissioners and expert staff for the Board of Commissioners' needs.

Penilaian Kinerja Sekretaris Dewan Komisaris

Performance Evaluation of the Secretary of the Board of Commissioners

Evaluasi terhadap kinerja Sekretariat Dewan Komisaris dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun sebagai bagian dari laporan berkala Dewan Komisaris dengan menggunakan metode yang ditetapkan Dewan Komisaris. Penilaian kinerja Sekretaris Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan realisasi atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris dalam mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris serta indikator lain yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

The performance evaluation of the Secretariat of the Board of Commissioners is conducted periodically, at least once a year, as part of the regular reports of the Board of Commissioners, using methods established by the Board of Commissioners. The performance evaluation of the Secretary of the Board of Commissioners is based on the realization of the duties and responsibilities in supporting the oversight functions of the Board of Commissioners, as well as other indicators determined by the Board of Commissioners.

Komite Audit
Audit Committee

Dewan Komisaris dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi telah membentuk Komite Audit. Komite Audit memantau dan memastikan berjalannya fungsi-fungsi yang berhubungan dengan audit dan pengendalian internal Perusahaan serta penugasan lainnya yang diberikan Dewan Komisaris. Komite Audit dibentuk dengan mengacu pada Undang-Undang No. 19 tahun 2003, Undang-Undang No.40 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Komite Audit bersifat independen baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

The Board of Commissioners, in supporting its supervisory and advisory functions to the Board of Directors, has established the Audit Committee. The Audit Committee monitors and ensures the functioning of audit and internal control processes within the Company, along with other assignments given by the Board of Commissioners. The Audit Committee was formed in accordance with Law No. 19 of 2003, Law No. 40 of 2007, and the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-3/MBU/03/2023 on March 20, 2023, regarding the Organ and Human Resources of State-Owned Enterprises. The Audit Committee operates independently in its tasks and reporting and is directly accountable to the Board of Commissioners.

Susunan, Periode dan Masa Jabatan Komite Audit
Composition, Term, and Tenure of the Audit Committee

Dewan Komisaris membentuk Komite Audit yang terdiri dari ketua dan anggota. Komite Audit dipimpin oleh seorang Ketua yang merupakan anggota Dewan Komisaris dan dibantu oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris. Salah seorang anggota yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris merangkap sebagai Sekretaris Komite. Ketua dan anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris.

The Board of Commissioners forms the Audit Committee, which consists of a chairperson and members. The Audit Committee is led by a Chairperson who is a member of the Board of Commissioners and is assisted by at least two members who are not from the Board of Commissioners. One of the members who is not from the Board of Commissioners also serves as the Secretary of the Committee. The Chairperson and members of the Audit Committee are appointed and dismissed by the Board of Commissioners based on a Board of Commissioners' decision.

Masa jabatan anggota Komite Audit yang merupakan anggota Dewan Komisaris berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir. Sedangkan masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

The tenure of Audit Committee members who are also members of the Board of Commissioners ends automatically when their term as members of the Board of Commissioners ends. Meanwhile, the tenure for members who are not from the Board of Commissioners is three years and can be extended for one additional term, without prejudice to the Board of Commissioners' right to dismiss them at any time.

Susunan Komite Audit yang berjalan tahun 2023 ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Pembangkitan Jawa Bali No. 005.K/DK/PJB/2022, tanggal 27 Juni 2022, tentang Susunan Keanggotaan Komite Audit Pada Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali sebagai berikut:

The composition of the Audit Committee for 2023 was established based on the Board of Commissioners' Decision No. 005.K/DK/PJB/2022, on June 27, 2022, regarding the Membership Structure of the Audit Committee at the Board of Commissioners of PT Pembangkitan Jawa Bali as follows:

Susunan Komite Audit Januari 2023
Composition of the Audit Committee as of January 2023

Nama Name	Jabatan Position	Keahlian Expertise	Periode Jabatan Period of Office
Hendra Iswahyudi	Ketua (Komisaris) Chairman (Commissioner)	Teknik Fisika, Perencanaan dan Kebijakan Publik, Ekonomi Engineering Physics, Planning and Public Policy, Economics	Kesatu First
Edward Tahirsa	Sekretaris merangkap Anggota (Pihak Independen) Secretary and Member (Independent Party)	Akuntansi, Keuangan, Anggaran dan Pajak Accounting, Finance, Budget, and Tax	Kesatu First
Andar Sudiar Sukma	Anggota (Pihak Independen) Member (Independent Party)	Hukum/Kepatuhan, Internal Auditing, dan Boseminal Fraud Legal/Compliance, Internal Auditing, and Fraud Examination	Kedua Second

Perubahan susunan Komite Audit tahun 2023 ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Keputusan Dewan Komisaris PT PLN Nusantara Power No. 002.KDK-PLN NP/2023, tanggal 1 Februari 2023, tentang Pembentukan Komite Audit Pada Dewan Komisaris PT PLN Nusantara Power sebagai berikut:

Changes in the composition of the Audit Committee for 2023 were established based on the Board of Commissioners' Decision No. 002.KDK-PLN NP/2023, on February 1, 2023, regarding the formation of the Audit Committee at the Board of Commissioners of PT PLN Nusantara Power as follows:

Susunan Komite Audit Februari – Desember 2023
Composition of the Audit Committee from February to December 2023

Nama Name	Jabatan Position	Keahlian Expertise	Periode Jabatan Period of Office
Kenedy	Ketua (Komisaris) Chairman (Commissioner)	Hukum/Law	Kesatu First
Edward Tahirsa	Sekretaris merangkap Anggota (Pihak Independen) Secretary and Member (Independent Party)	Akuntansi, Keuangan, Anggaran dan Pajak Accounting, Finance, Budget and Tax	Kesatu First
Andi Hasimsa	Anggota Member	Akuntansi, Keuangan, Anggaran dan Pajak Accounting, Finance, Budget and Tax	Kedua Second

Profil Anggota Komite Audit
Profile of Audit Committee Members

Kenedy
Ketua Komite Audit
Chair of the Audit Committee

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.

The profile can be seen in the Board of Commissioners' Profile section.

Edward Fahrizal

Sekretaris Komite Audit
Secretary of the Audit Committee

Warga Negara Indonesia, 58 tahun, berdomisili di Bandung.

Riwayat Pendidikan
Menyelesaikan pendidikan S1 Akuntansi - Universitas Islam Indonesia tahun 1990 dan Magister Manajemen Bisnis - Universitas Dr Soetomo tahun 2004. Selain itu, pendidikan non formal yang pernah diikuti untuk mendapatkan sertifikasi diantaranya Corporate Finance (2015), Merger & Acquisition Managing Subsidiaries (2018) dan Executive Education I (2019).

Dasar Pengangkatan
Diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali No. 014.K/DK/010/2021, tanggal 31 Desember 2021.

Rangkap Jabatan
Tidak memiliki rangkap jabatan yang bertentangan dengan ketentuan Internal Perusahaan dan peraturan serta perundangan yang berlaku.

Riwayat Pekerjaan
Pernah berkarir sebagai VP Pengembangan Akuntansi PT PLN (Persero) (2018-2021), Manager Keuangan PLN UID Jawa Barat (2016-2018), Manager Keuangan PLN Wilayah NTB (2014-2016) dan Kepala Divisi Keuangan PLN Banten (2011-2014).

Indonesian citizen, 58 years old, domiciled in Bandung.

Educational background
Completed a Bachelor's degree in Accounting - Indonesia Islamic University in 1990 and a Master's in Business Management - Dr Soetomo University in 2004. Apart from that, non formal education that has been attended to obtain certification includes Corporate Finance (2015), Merger & Acquisition Managing Subsidiaries (2018) and Executive Education I (2019).

Basis of Appointment
Appointed based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Pembangkitan Jawa Bali No. 014.K/DK/010/2021 on 31 December 2021.

Double job
Do not hold concurrent positions that conflict with the Company's internal provisions and applicable rules and regulations.

Employment history
Had a career as VP of Accounting Development of PT PLN (Persero) (2018-2021), Finance Manager of PLN UID West Java (2016-2018), Finance Manager of PLN NTB Region (2014-2016) and Head of Finance Division of PLN Banten (2011-2014).

Andi Haslinda

Anggota Komite Audit
Member of the Audit Committee

Warga Negara Indonesia, 45 tahun, berdomisili di Jakarta

Riwayat Pendidikan
Menyelesaikan pendidikan S1 Akuntansi dari Universitas Hasanuddin tahun 2002 dan S2 Manajemen Keuangan dari Universitas Hasanuddin tahun 2007.

Selain itu, pendidikan non formal yang pernah diikuti untuk mendapatkan sertifikasi diantaranya Qualified Chief Risk Officer (QCRO), dan Certified Internal Audit Executive (CIAE).

Dasar Pengangkatan
Diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT PLN Nusantara Power No. 001.KEP/PLN NP/2022 tanggal 7 Februari 2022.

Rangkap Jabatan
Tidak memiliki rangkap jabatan yang bertentangan dengan ketentuan Internal Perusahaan dan peraturan serta perundangan yang berlaku.

Riwayat Pekerjaan
Berkarir sebagai VP Manajemen Risiko Komersial, Digital dan Trading PT PLN (Persero) (2021-Sekarang), Senior Manager Keuangan PLN Unit WHU (2019-2021), Manager Akuntansi PLN UIP Sulbagsel (2010-2019).

Indonesian citizen, 45 years old, based in Jakarta

Education
Completed a Bachelor's degree in Accounting from Hasanuddin University in 2002 and a Master's degree in Financial Management from Hasanuddin University in 2007.

Apart from that, non formal education that has been attended to obtain certification includes Qualified Chief Risk Officer (QCRO), and Certified Internal Audit Executive (CIAE).

Basis of Appointment
Appointed based on the Decree of the Board of Commissioners of PT PLN Nusantara Power No. 001.KEP/PLN NP/2022 on February 7 2022.

Double job
Do not hold concurrent positions that conflict with the Company's internal provisions and applicable rules and regulations.

Employment history
VP Commercial Risk Management, Digital and Trading PT PLN (Persero) (2021-Present), Senior Finance Manager PLN UIW WHU (2019-2021), Accounting Manager PLN UIP Sulbagsel (2010-2019).

Independensi Komite Audit
Independence of the Audit Committee

Komite Audit bersifat independen dalam pelaksanaan tugasnya semata-mata untuk kepentingan Perusahaan, terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat bertentangan dengan kepentingan Perusahaan. Anggota Komite Audit telah memenuhi kriteria independensi sebagai berikut:

The Audit Committee operates independently in its duties solely for the benefit of the Company, free from influences from various parties that may have conflicting interests with the Company. The members of the Audit Committee have met the independence criteria as follows:

Independensi Komite Audit
Independence of the Audit Committee

Kriteria Independensi Independence Criteria	Rewady	Edward Fabrizal	Andi Hadinda
Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit dan non-audit atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir Not a person in a public accounting firm, legal consultant firm, or other party who provided audit and non-audit services or other consulting services to the Company within the last 6 (six) months.	✓	✓	✓
Tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung di Perusahaan Does not own shares either directly or indirectly in the Company.	✓	✓	✓
Bukan orang yang memiliki wewenang, baik langsung maupun tidak langsung untuk merencanakan, memimpin, atau/atau mengendalikan Perusahaan dalam waktu enam bulan terakhir Not a person who has the authority and responsibility to plan, lead, and/or control the Company within the last six months.	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun ke samping atau hubungan semenda. Not having blood family relationships with members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners up to the second degree, either in a straight line or sideways or by marriage.	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan usaha langsung dan tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan; dan Has no direct or indirect business relationships related to the Company's business activities; And	✓	✓	✓
Tidak sedang berada dalam institusi yang kegiatan usahanya memberikan jasa kepada Perusahaan. Not currently in an institution whose business activities are providing services to the Company.	✓	✓	✓

Pedoman Kerja Komite Audit
Audit Committee Charter

Komite Audit telah memiliki pedoman kerja dalam bentuk Piagam Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris pada tanggal 31 Desember 2018. Piagam Komite Audit dikaji secara berkala dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan penyesuaian guna memastikan kesesuaian mudahnya dengan dinamika organisasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan best practices.

Piagam Komite Audit memuat ketentuan antara lain: Maksud dan Tujuan, Fungsi dan Tugas Pokok dan Tanggung Jawab, Wewenang, Organisasi dan Keanggotaan, Penilaian Kinerja Anggota Komite, Pertemuan/rapat dan Kode Etik.

The Audit Committee has a work guideline in the form of an Audit Committee Charter established by the Board of Commissioners on December 31, 2018. The Audit Committee Charter is reviewed periodically and updated as necessary to ensure its alignment with organizational dynamics, applicable laws and regulations, and best practices.

The Audit Committee Charter includes provisions on: Purpose and Objectives, Primary Functions and Responsibilities, Authority, Organization and Membership, Performance Evaluation of Members, Meetings, and Code of Conduct.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit
Duties and Responsibilities of the Audit Committee

Komite Audit bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris untuk melakukan fungsi pengawasan dan konsultasi berkaitan dengan penerapan audit internal dan efektivitas pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Tugas pokok Komite Audit sebagaimana diatur di dalam Piagam Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Membuat program/rencana kerja tahunan yang berisi rencana kegiatan, jadwal dan penggunaan sumber daya.
2. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Dewan Komisaris mengenai kegiatan Komite Audit.
3. Menyampaikan dengan segera temuan hasil pemeriksaan Auditor Eksternal maupun Internal yang potensial dan signifikan.
4. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai tindak lanjut hasil pemeriksaan Auditor, termasuk temuan potensial dan signifikan yang belum ditindaklanjuti secara tuntas.
5. Menelaah Laporan Keuangan Perusahaan dan informasi Keuangan lainnya yang akan disampaikan kepada pemegang saham.
6. Memberikan saran dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai hal-hal yang terkait dengan tugas Dewan Komisaris antara lain melakukan review/evaluasi internal audit charter, kinerja dan efektivitas kegiatan SPI, kecukupan SDM SPI serta struktur organisasi SPI.
7. Mengusulkan kepada Dewan Komisaris agar Direksi menugaskan kepada SPI untuk melaksanakan pemeriksaan tertentu/pemeriksaan khusus.
8. Menyampaikan usulan kepada Dewan Komisaris dalam proses penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit laporan keuangan.
9. Menyampaikan usulan kepada Dewan Komisaris untuk memasukkan hal-hal strategis dalam ruang lingkup pemeriksaan, dalam penyusunan PKAT SPI.

The Audit Committee works collectively to assist the Board of Commissioners in supervisory and consultative functions related to internal audit implementation and the effectiveness of internal controls, including the adequacy of financial reporting processes. The Audit Committee is accountable to the Board of Commissioners. The main duties of the Audit Committee as stipulated in the Audit Committee Charter are as follows:

1. Developing an annual work program that includes planned activities, schedules, and resource utilization.
2. Submitting periodic reports to the Board of Commissioners on the activities of the Audit Committee.
3. Immediately reporting any significant and potential findings from external and internal auditors.
4. Providing input to the Board of Commissioners on follow-up actions for auditor findings, especially significant and potential findings that have not been fully addressed.
5. Reviewing the Company's Financial Statements and other Financial Information to be presented to shareholders.
6. Offering suggestions and recommendations to the Board of Commissioners on matters related to the Board's duties, including reviewing/evaluating the internal audit charter, performance and effectiveness of internal audit activities, adequacy of internal audit human resources, and internal audit organizational structure.
7. Proposing to the Board of Commissioners that the Board of Directors assigns specific or special audits to the Internal Audit Unit.
8. Recommending to the Board of Commissioners on the appointment of a Public Accounting Firm to audit the financial statements.
9. Suggesting strategic items to be included in the audit scope in the preparation of the Annual Audit Work Plan of the Internal Audit Unit (PKAT).

Rencana Program Kerja Komite Audit
Audit Committee Work Program Plan

Komite Audit menyusun program kerja setiap tahun mengacu pada tugas pokok Komite Audit sebagaimana diatur di dalam Piagam Komite Audit. Program kerja disusun guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2021, Program kerja Komite Audit adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan rutin yang terdiri dari:
   a. Kegiatan Internal Komite Audit yang meliputi :

The Audit Committee prepares an annual work program based on the primary duties as outlined in the Audit Committee Charter. The work program is designed to enhance the effectiveness of the Audit Committee's duties and responsibilities in supporting the supervisory functions of the Board of Commissioners. Throughout 2021, the Audit Committee's work program included:

1. Routine activities consisting of:
   a. Internal activities of the Audit Committee, including:

1) Evaluasi Laporan Manajemen dan Kinerja Korporat.

2) Penyiapan surat Dewan Komisaris sesuai bidang tugas Komite Audit.

3) Melakukan monitoring KPI Dewan Komisaris dan monitoring arahan Dewan Komisaris serta Pemegang Saham sesuai RUPS.

4) Penyiapan dan penyampaian Laporan Kinerja Komite Audit.

b. Kegiatan Koordinasi Komite Audit Dengan Satuan Pengawasan Intern (SPI), meliputi :

1) Review dan Evaluasi Program Kerja Audit Tahunan (PKAT).

2) Pembahasan berkala mengenai Hasil Audit SPI dan Hasil Audit Eksternal.

3) Supervisi terhadap pelaksanaan Risk Based Audit (RBA), evaluasi pengendalian internal korporat, implementasi Quality Assurance Review, dan fungsi SPI diluar Audit.

4) Koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik (KAP), SPI PT PLN (Persero) dan auditor eksternal lainnya.

3. Kegiatan Khusus/Non Rutin yang terdiri dari :

a. Review dan pengkinian atas dokumen Piagam Komite Audit.

b. Review dan Evaluasi atas program korporat tahun 2023 di bidang Akuntansi dan keuangan.

c. Review dan Evaluasi atas aspiprogram operasional korporat tahun 2023 di bidang Equivalent Availability Factor (EAF) Pembangkit Existing, serta dampak penerapan coal switching pada pembangkit existing.

d. Review dan Evaluasi mengenai penerapan Three Line of Defense di Perusahaan.

e. Evaluasi atas rencana korporat untuk melaksanakan Internal Control for Financial Reporting (ICoFR)

f. Kunjungan lapangan ke pembangkit-pembangkit milik dan yang dikelola oleh Perusahaan.

g. Koordinasi dengan Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris lainnya.

3. Program Pengembangan Kompetensi Komite Audit.

1) Evaluation of Management Reports and Corporate Performance.

2) Preparation of letters from the Board of Commissioners in line with the Audit Committee's duties.

3) Monitoring the KPI of the Board of Commissioners and shareholder directives according to the General Meeting of Shareholders (RUPS).

4) Preparation and submission of the Audit Committee's Performance Report.

b. Coordination activities between the Audit Committee and the Internal Audit Unit (SPI), including:

1) Review and Evaluation of the Annual Audit Work Program (PKAT).

2) Regular discussions on SPI Audit Results and External Audit Results.

3) Supervision of the implementation of Risk-Based Audit (RBA), evaluation of corporate internal control, implementation of Quality Assurance Review, and SPI functions beyond audit.

4) Coordination with Public Accounting Firms (KAP), SPI of PT PLN (Persero), and other external auditors.

3. Special/Non-Routine activities, including:

a. Review and update of the Audit Committee Charter.

b. Review and Evaluation of corporate programs in 2023 in the fields of Accounting and Finance.

c. Review and Evaluation of corporate operational issues/programs in 2023 related to the Equivalent Availability Factor (EAF) of existing power plants and the impact of coal switching on existing power plants.

d. Review and Evaluation of the Implementation of the Three Lines of Defense in the Company.

e. Evaluation of the corporate plan to implement Internal Control over Financial Reporting (ICoFR).

f. Site visits to power plants owned and managed by the Company.

g. Coordination with the Secretary of the Board of Commissioners and other Board Committees.

3. Competency Development Program for the Audit Committee.

Pelaksanaan Tugas Komite Audit

Execution of Audit Committee Duties

Komite Audit melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan rencana program kerja tahun 2023 dengan merujuk pada Piagam Komite Audit. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit diantaranya melakukan telaah, memberikan masukan atau rekomendasi, menghadiri rapat-rapat dengan Dewan Komisaris, Direksi, seluruh jajaran manajemen dan pertemuan lain serta melakukan kunjungan kerja bersama Dewan Komisaris. Komite Audit melaporkan realisasi program kerja secara triwulanan kepada Dewan Komisaris.

The Audit Committee carries out its duties and responsibilities based on the 2023 work program, referring to the Audit Committee Charter. Activities carried out in the execution of the Audit Committee's duties and responsibilities include reviewing, providing input or recommendations, attending meetings with the Board of Commissioners, the Board of Directors, the entire management team, and other meetings, as well as conducting joint site visits with the Board of Commissioners. The Audit Committee reports the realization of the work program on a quarterly basis

Secara umum, Komite Audit telah melakukan pengawasan dan pembimbingan serta memberikan masukan sepanjang tahun 2023 antara lain untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Pembahasan evaluasi Tindak Lanjut Arahan RUPS dan Dewan Komisaris PLNI.
2. Penyelesaian Laporan Komite Audit Triwulan IV Tahun 2022.
3. Pembahasan Laporan Kerja Satuan Pengawasan Internal (SKSPI) Triwulan IV Tahun 2022 serta Triwulan I, II dan III Tahun 2023.
4. Kunjungan Kerja bersama Dewan Komisaris ke beberapa pembangkit antara lain.
5. Focus Group Discussion (FGD) Assessment GCG Aspek III Dewan Komisaris.
6. Penyelesaian Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Semester II Tahun 2022.
7. Pembahasan Permasalahan Operasional Pembangkit, terutama EFOR, yang dihadapi Perusahaan.
8. Pembahasan Overhaul Pembangkit.
9. Pembahasan Internal Control Over Financial Report (ICoFR).
10. Pembahasan KPI Individu Direksi.
11. Evaluasi Kinerja KAP tahun buku 2022.
12. Pembahasan Kinerja Keuangan Perusahaan tahun 2023.
13. Pembahasan Corporate Charter.
14. Pembahasan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) 2024 dengan Satuan Pengawasan Internal (SPI).
15. Pembahasan RKAT tahun 2024.
16. Assessment GCG tahun buku 2023.
17. Mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh komite lainnya.

to the Board of Commissioners. Generally, throughout 2023, the Audit Committee has conducted supervision, provided assistance, and offered input on the following matters:

1. Discussion on the evaluation of the Follow-Up of RUPS and the Board of Commissioners' PLNI directives.
2. Completion of the Fourth Quarter 2022 Audit Committee Report.
3. Discussion of the Fourth Quarter 2022 Internal Audit Unit (SKSPI) Work Report, as well as the First, Second, and Third Quarters of 2023.
4. Joint site visits with the Board of Commissioners to several power plants.
5. Focus Group Discussion (FGD) on GCG Assessment Aspect III of the Board of Commissioners.
6. Completion of the Second Half 2022 Board of Commissioners' Oversight Report.
7. Discussion of Operational Issues of Power Plants, particularly EFOR, faced by the Company.
8. Discussion on Power Plant Overhaul.
9. Discussion on Internal Control Over Financial Reporting (ICoFR).
10. Discussion on Individual KPI of the Board of Directors.
11. Evaluation of the performance of Public Accounting Firms for the 2022 fiscal year.
12. Discussion on the Company's Financial Performance in 2023.
13. Discussion on the Corporate Charter.
14. Discussion on the 2024 Annual Audit Work Program (PKAT) with the Internal Audit Unit (SPI).
15. Discussion on the 2024 ABCP.
16. GCG Assessment for the 2023 fiscal year.
17. Participation in activities initiated by other committees.

Rapat Komite Audit
Audit Committee Meetings

Rapat Komite Audit dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu bulan untuk merealisasikan Program Komite Audit sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Audit. Selain itu, BoC Manual juga mengatakan bahwa Komite Audit wajib melakukan pertemuan rutin dengan Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan serta melakukan pertemuan dengan fungsi terkait, terutama fungsi keuangan dan Internal Audit dalam rangka membahas perkembangan dan aktivitas Perusahaan baik secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila diperlukan. Sepanjang tahun 2023, Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali.

Audit Committee meetings are held regularly, at least once a month, to complete the Audit Committee's program as outlined in the Audit Committee Charter. Additionally, the BoC Manual stipulates that the Audit Committee must hold regular meetings with the Board of Commissioners at least once a month and meet with relevant functions, particularly Finance and Internal Audit, to discuss the Company's progress and activities both regularly and as needed. Throughout 2023, the Audit Committee held twelve meetings.

Frekuensi Rapat Internal dan Tingkat Kehadiran Anggota Komite Audit
Frequency of Internal Meetings and Attendance of Audit Committee Members

Nama Name	Jabatan Position	Frekuensi Rapat Meeting Frequency	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Hendra Soeprajogi	Ketua (Komisaris) Chairman (Commissioner)	1	1	100%
Ramelly	Ketua Chairman	11	11	100%

Nama Name	Jabatan Position	Frekuensi Rapat Meeting Frequency	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Edward Tahrizal	Sekretaris (Pihak Independen) Secretary (Independent Party)	12	12	100%
Andi Hasbinda	Anggota (Pihak Independen) Member (Independent Party)	11	11	100%
Andar Sudiar Sukma	Anggota (Pihak Independen) Member (Independent Party)	1	1	100%

Program Pengembangan Kompetensi Komite Audit
Competency Development Program for the Audit Committee

Program pengembangan kompetensi untuk Komite Audit bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan Anggota Komite Audit dalam menjalankan tugas secara efektif. Pengembangan Kompetensi Komite Audit sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

The competency development program for the Audit Committee aims to enhance the understanding and skills of the Audit Committee members to perform their duties effectively. The competency development activities for the Audit Committee throughout 2023 included:

Program Pengembangan Kompetensi Komite Audit
Competency Development Program for the Audit Committee

Nama Name	Jabatan Position	Program Pengembangan Development Program	Tanggal Date
Kennedy	Ketua Chairman	• Abbreviation profil Perusahaan dan GCG Company profile and GCG workshop	12 Januari 2023 January 12, 2023
		• Seminar Nusantara Power Connect 2023 'Strengthening The Base, Expanding The Business'	11-12 September 2023 September 11-12, 2023
Edward Tahrizal	Sekretaris (Pihak Independen) Secretary (Independent Party)	• CEL Methodology and Environmental and Social Management Systems	25 Oktober 2023 October 25, 2023
		• Seminar Nusantara Power Connect 2023 'Strengthening The Base, Expanding The Business'	11-12 September 2023 September 11-12, 2023
Andi Hasbinda	Anggota (Pihak Independen) Member (Independent Party)	• BUMN GRC Masterclass – Pemeringkatan & Penerbitan Efek Berutang (Pang & Sukuk (EBUS) BUMN GRC Masterclass – Rating & Issuance of Debt Securities and Sukuk (EBUS)	10 Agustus 2023 August 10, 2023
		• BUMN GRC Masterclass – Pre IPO dan Post IPO	10 Agustus 2023 August 10, 2023
		• CEL Methodology and Environmental and Social Management Systems	25 Oktober 2023 October 25, 2023
		• Seminar Nusantara Power Connect 2023 'Strengthening The Base, Expanding The Business'	11-12 September 2023 September 11-12, 2023

Penilaian Kinerja Komite Audit
Performance Evaluation of the Audit Committee

Dewan Komisaris melakukan penilaian atas kinerja Komite Audit untuk memastikan dan mendorong efektivitas pelaksanaan tugas Komite Audit. Prosedur dan kriteria penilaian kinerja Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan dilaksanakan sebagai bagian dari agenda rapat evaluasi internal Dewan Komisaris dan organ Dewan Komisaris. Penilaian kinerja Komite Audit mencakup pelaksanaan tugas, kontribusi dan pelaporan kepada Dewan Komisaris. Hasil penilaian atas kinerja Komite Audit tahun 2023 adalah sebagai berikut:

The Board of Commissioners evaluates the performance of the Audit Committee to ensure and promote the effective execution of the Audit Committee's duties. The procedures and criteria for evaluating the performance of the Audit Committee are determined by the Board of Commissioners and conducted as part of the internal evaluation meetings of the Board of Commissioners and its organs. The performance evaluation of the Audit Committee includes the execution of tasks, contributions, and reporting to the Board of Commissioners. The results of the performance evaluation of the Audit Committee for 2023 are as follows:

Tabel Evaluasi Kinerja Komite Audit
Table of Audit Committee Performance Evaluation

No.	Kriteria Penilaian Assessment criteria	Rata-Rata Average
1.	Ketepatan waktu agenda kegiatan Dewan Komisaris. Timeliness of the Board of Commissioners' activity agenda.	9,00
2.	Kualitas pekerjaan. Quality of work	9,00
3.	Kontribusi pada kegiatan Dewan Komisaris. Contribution to the activities of the Board of Commissioners.	9,00
4.	Presentasi pada Rapat Internal Dewan Komisaris (RID). Presentation at the Internal Meeting of the Board of Commissioners (RID).	9,00
5.	Pelaksanaan rapat (RID, RDD, RKM). Implementation of meetings (RID, RDD, RKM).	9,00
6.	Penyiapan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris. Preparation of Board of Commissioners Supervision Report.	8,80
	Rata-Rata Skor Average Score	**8,98**

Komite Audit juga melakukan evaluasi mandiri (self assessment) secara berkala atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang telah dijalankan. Komite Audit selanjutnya menyusun langkah-langkah yang dipertakan dalam rangka perbaikan dan pengembangan serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Audit berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan atas kinerja Komite Audit dalam mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

The Audit Committee also conducts periodic self-assessments of the duties and responsibilities it has performed. The Audit Committee then develops the necessary steps for improvement and development to enhance the effective execution of its duties based on the evaluation results of the Audit Committee's performance in supporting the duties of the Board of Commissioners.

Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee

Dewan Komisaris membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan pengkajian, telaah dan memberikan masukan atas hal-hal yang berhubungan dengan sistem pengelolaan talenta, sistem penilaian kinerja, nominasi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris perusahaan anak, kebijakan remuneras serta struktur organisasi Perusahaan. Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk dengan mengacu pada Undang-Undang No. 19 tahun 2003, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Komite Nominasi dan Remunerasi bersifat independen baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

The Board of Commissioners established the Nomination and Remuneration Committee to support the execution of its duties and responsibilities. The Nomination and Remuneration Committee concerns, reviews, and provides input on matters related to talent management systems, performance assessment systems, nominations of the Board of Directors or members of the Board of Commissioners of subsidiaries, remuneration policies, and the Company's organizational structure. The Nomination and Remuneration Committee was formed in line with Law No. 19 of 2003, Law No. 40 of 2007, and Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-3/MBU/03/2023 on March 20, 2023, concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises. The Nomination and Remuneration Committee operates independently in both its duties and reporting and is directly accountable to the Board of Commissioners.

Susunan, Periode dan Masa Jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi
Composition, Period, and Term of Office of the Nomination and Remuneration Committee

Dewan Komisaris membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang terdiri dari ketua dan anggota. Komite Nominasi dan Remunerasi dipimpin oleh seorang Ketua yang merupakan anggota Dewan Komisaris dan dibantu oleh Wakil. Ketua merangkap anggota yang merupakan anggota Dewan Komisaris serta 2 (dua) orang anggota yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris. Salah seorang anggota yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris merangkap sebagai Sekretaris Komite. Ketua dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris.

The Board of Commissioners established the Nomination and Remuneration Committee, which consists of a chairperson and members. The Nomination and Remuneration Committee is led by a Chairperson who is a member of the Board of Commissioners, supported by a Vice Chairperson who is also a member of the Board of Commissioners, and two other members who are not part of the Board of Commissioners. One of the non-Commissioner members serves as the Committee Secretary. The Chairperson and members of the Nomination and Remuneration Committee are appointed and dismissed by the Board of Commissioners based on its resolutions.

Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remuneras yang merupakan anggota Dewan Komisaris berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir. Sedangkan masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

The term of office for Nomination and Remuneration Committee members who are also members of the Board of Commissioners ends automatically when their term as Board members expires. For members who are not part of the Board of Commissioners, the term of office is three years, which can be extended for one more term, without prejudice to the Board of Commissioners' right to dismiss them at any time.

Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi yang berjabat tahun 2023 sebagai berikut:

The composition of the Nomination and Remuneration Committee in 2023 is as follows:

Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Januari 2023
Composition of the Nomination and Remuneration Committee as of January 2023

Nama Name	Jabatan Position	Keahlian Expertise	Periode Jabatan Period of Office
Bagus Purnomo	Ketua (Komisaris) Chairman (Commissioner)	Human Capital Management, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Organisasi Human Capital Management, Occupational Health and Safety, Organization	Kesatu First
Kennedy	Wakil Ketua (Komisaris) Vice Chairman (Commissioner)	Hukum Law	Kesatu First
Chaerudin Dania	Sekretaris merangkap Anggota (Pihak Independen) Secretary and Member (Independent Party)	Human Capital, Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Corporate Culture Human Capital, Occupational Safety and Health Management, Corporate Culture	Kesatu First
Eri Nuryhyanto	Anggota (Pihak Independen) Member (Independent Party)	Regulasi dan Manajemen Bisnis Penyediaan Tenaga Listrik, Tarif Tenaga Listrik Regulation and Management of Electricity Supply Business, Electricity Tariffs	Kesatu First

Perubahan susunan Komite Nominasi dan Remunerasi tahun 2023 ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT PLN Nusantara Power No. 001/K/DK-PLN NP/2023, tanggal 1 Februari 2023, tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi pada Dewan Komisaris PT PLN Nusantara Power sebagai berikut:

The changes in the composition of the Nomination and Remuneration Committee in 2023 were stipulated based on the Board of Commissioners' Decision of PT PLN Nusantara Power No. 001/K/DK-PLN NP/2023, on February 1, 2023, concerning the Formation of the Nomination and Remuneration Committee on the Board of Commissioners of PT PLN Nusantara Power, as follows:

Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Februari – Juli 2023
Composition of the Nomination and Remuneration Committee from February to July 2023

Nama Name	Jabatan Position	Keahlian Expertise	Periode Jabatan Period of Office
Hendra Iswahyudi	Ketua (Komisaris) Chairman (Commissioner)	Teknik Fisika, Perencanaan dan Kebijakan Publik, Ekonomi Engineering, Physics, Planning and Public Policy, Economics	Kesatu First
Bagus Pandhito	Wakil Ketua (Komisaris) Vice Chairman (Commissioner)	Human Capital Management, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Organisasi Human Capital Management, Occupational Health and Safety, Organization	Kesatu First
Gigih Udi Atmo	Sekretaris merangkap Anggota (Pihak Independen) Secretary and Member (Independent Party)	Project Management, Financial Management	Kesatu First
Prasetyorini	Anggota (Pihak Independen) Member (Independent Party)	Human Capital Management dan Organisasi Human Capital Management and Organization	Kesatu First

Perubahan kedua susunan Komite Nominasi dan Remunerasi tahun 2023 ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT PLN Nusantara Power No. 0076/DK/PLN NP/2023, tanggal 10 Juli 2023, tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi pada Dewan Komisaris PT PLN Nusantara Power sebagai berikut:

The second change in the composition of the Nomination and Remuneration Committee in 2023 was stipulated based on the Board of Commissioners' Decision of PT PLN Nusantara Power no. 0076/DK/PLN NP/2023, on July 10, 2023, concerning the Formation of the Nomination and Remuneration Committee on the Board of Commissioners of PT PLN Nusantara Power, as follows:

Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Juli – Desember 2023
Composition of the Nomination and Remuneration Committee from July to December 2023

Nama Name	Jabatan Position	Keahlian Expertise	Periode Jabatan Period of Office
Hendra Iswahyudi	Ketua (Komisaris) Chairman (Commissioner)	Teknik Fisika, Perencanaan dan Kebijakan Publik, Ekonomi Engineering, Physics, Planning and Public Policy, Economics	Kesatu First
Erni Ursina Wachdana	Wakil Ketua (Komisaris) Vice Chairman (Commissioner)	Stakeholder Management, Risk Management	Kesatu First
Gigih Udi Atmo	Sekretaris merangkap Anggota (Pihak Independen) Secretary and Member (Independent Party)	Project Management, Financial Management	Kesatu First
Prasetyorini	Anggota (Pihak Independen) Member (Independent Party)	Human Capital Management dan Organisasi Human Capital Management and Organization	Kesatu First

Profil Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Profile of Nomination and Remuneration Committee Members

Hendra Iswahyudi
Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi
Chairman of the Nomination and Remuneration Committee

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.

The profile can be seen in the Board of Commissioners Profile section.

Emir Kresna Wardana

Wakil Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi
Deputy Chair of the Nomination and Remuneration Committee

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.

The profile can be seen in the Board of Commissioners' Profile section.

Gigih Udi Atmo

Sekretaris dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Secretary and Member of the Nomination and Remuneration Committee

Warga Negara Indonesia, 46 tahun, berdomisili di Gedung I No. 20C, RT 04/RW 05, Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan 12510

Riwayat Pendidikan
Menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Elektro dari Universitas Gadjah Mada (1996), S2 Engineering Project Management dari Universitas Melbourne (2007), S2 Infrastructure Engineering dari Universitas Melbourne (2016)

Selain itu, pendidikan non formal yang pernah ditempuh untuk mendapatkan sertifikasi diantaranya Data Science Analytic (2020), APEC Energy Demand and Supply Modeling (2019), SPSS Statistic Analysis (2020), dan Engineering Contract Management (2022)

Dasar Pengangkatan
Diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT PLN (Persero) No. 0016/DIR-PLN (W) 2022 tanggal 17 Januari 2022.

Ringkasan Jabatan
Direktur Panas Bumi pada Direktorat Jenderal EBT dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM

Riwayat Pekerjaan
Pernah bertugas sebagai Direktur Konservasi Energi (2022 – 2024), Koordinator Pelayanan Usaha Kelistrikan (2021 – 2022), Energy Economist Asia Pacific, Energy Research Center Jepang (2017 – 2020), Energy Economist Asia Pacific

Indonesian, 46 years old, domiciled at Gedung I No. 20C, RT 04/RW 05, Pejaten Barat, Pasar Minggu, South Jakarta 12510

Educational Background
Completed a bachelor's degree in Electrical Engineering from Gadjah Mada University (1996), a Master's degree in Engineering Project Management from the University of Melbourne (2007), a Master's degree in Infrastructure Engineering from the University of Melbourne (2016)

Apart from that, non formal education that has been attended to obtain certification includes Data Science Analytic (2020), APEC Energy Demand and Supply Modeling (2019), SPSS Statistical Analysis (2020), and Engineering Contract Management (2022)

Deed of Appointment
Appointed based on the Decree of the Board of Commissioners of PT PLN (Persero) No. 0016/DIR-PLN (W) 2022 on 1 January 2022

Concurrent Position(s)
Director of Geothermal at the Directorate General of EBT and Energy Conservation, Ministry of Energy and Mineral Resources

Employment History
Had a career as Director of Energy Conservation (2022 – 2024), Coordinator of Electricity Business Services (2021 – 2022), Energy Economist Asia Pacific, Energy Research Center Japan (2017 – 2020), Energy Economist Asia Pacific

Prasetyorini

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Member of the Nomination and Remuneration Committee

Warga Negara Indonesia, 56 tahun, berdomisili di Jalan Wangsamaka no 7, Kotabaru Parahyangan, Kabupaten Bandung Barat 40553

Riwayat Pendidikan
Menyelesaikan pendidikan S1 Manajemen Perusahaan dari Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta tahun 1991

Selain itu, pendidikan non-formal yang pernah dikuti untuk mendapatkan sertifikasi diantaranya Certified Business Management Program in Human Resources (2010), Sertifikasi Pengetahuan Dasar di Bidang Dana Pensiun (2019), Sertifikasi Pengembangan Human Capital (2020), dan Loop Certified Professional Coach (2022)

Dasar Pengangkatan
Diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT PLN Nusantara Power No. 005.K/DK-PLN/NP/2023 tanggal 1 Februari 2023

Rangkap Jabatan
Tidak memiliki rangkap jabatan yang bertentangan dengan ketentuan internal Perusahaan dan peraturan serta perundangan yang berlaku.

Riwayat Pekerjaan
Pernah bertugas sebagai Manajer Keuangan, SDM dan Administrasi PT PLN (Persero) Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan (2014 - 2015), Manager SDM dan Organisasi PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat (2015 – 2017), Manager Senior Sistem Informasi Pegawai dan Remuneras PT PLN (Persero) (2017 - 2018), dan Vice President Pengembangan Talenta Korporat PT PLN (Persero) (2018 - 2022).

Indonesian, 56 years old, domiciled at Jalan Wangsamaka no 7, Kotabaru Parahyangan, West Bandung Regency 40553

Educational Background
Completed Bachelor's Degree in Corporate Management from the National Development University "Veteran" Yogyakarta in 1991

Apart from that, non-formal education that has been attended to obtain certification includes the Certified Business Management Program in Human Resources (2010), Basic Knowledge Certification in the Pension Fund Sector (2019), Human Capital Development Certification (2020), and Loop Certified Professional Coach (2022)

Basis of Appointment
Appointed based on the Decree of the Board of Commissioners of PT PLN Nusantara Power No. 005.K/DK-PLN/NP/2023 on 1 February 2023.

Concurrent Position(s)
Not having concurrent positions that conflict with the Company's internal regulations and applicable laws and regulations.

Employment History
Had a career as Finance, HR and Administration Manager of PT PLN (Persero) Electricity Maintenance Center (2014 - 2015), HR and Organization Manager of PT PLN (Persero) West Java Distribution (2015 - 2017), Senior Manager of PT PLN Employee Information Systems and Remuneration (Persero) (2017 - 2018), and Vice President of Corporate Talent Development PT PLN (Persero) (2018 - 2022).

Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi
Independence of the Nomination and Remuneration Committee

Komite Nominasi dan Remunerasi bersifat independen dalam pelaksanaan tugasnya semata-mata untuk kepentingan Perusahaan, terbebas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat bertentangan dengan kepentingan Perusahaan. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi telah memenuhi kriteria independensi sebagai berikut:

The Nomination and Remuneration Committee operates independently in the performance of its duties solely for the benefit of the Company, free from the influence of various parties whose interests may conflict with those of the Company. Members of the Nomination and Remuneration Committee meet the following independence criteria:

Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi
Independence of the Nomination and Remuneration Committee

Kriteria Independensi Independence Criteria	Hendra Isnaheyudi	Dwi Kawra Wardana	Digih Gili Abno	Prasetyorini
Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit dan non-audit atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir Not a person in a public accounting firm, legal consultant firm, or other party who provided audit and non-audit services or other consulting services to the Company within the last 6 (six) months	✓	✓	✓	✓

Kriteria Independensi Independence Criteria	Hendra Iwashyudi	Emir Kresna Mardana	Gigih Udi Atmo	Presiskyono
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung di Perusahaan. Does not own shares either directly or indirectly in the Company.	✓	✓	✓	✓
Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan/atau mengendalikan Perusahaan dalam waktu enam bulan terakhir. Not a person who has the authority and responsibility to plan, lead and/or control the Company within the last six months.	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun ke samping atau hubungan semenda. Not having blood family relationships with members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners up to the second degree, either in a straight line or sideways or by marriage.	✓	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan usaha langsung dan tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan; dan Has no direct or indirect business relationships related to the Company's business activities; And	✓	✓	✓	✓
Tidak sedang berada dalam institusi yang kegiatan usahanya memberikan jasa kepada Perusahaan. Not currently in an institution whose business activities are providing services to the Company.	✓	✓	✓	✓

Pedoman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee Charter

Komite Nominasi dan Remunerasi sebelumnya menggunakan nomenklatur Komite SDM dan Organisasi. Komite Nominasi dan Remunerasi dalam pelaksanaan tugasnya berpedoman pada Piagam Komite SDM dan Organisasi yang telah ditetapkan Dewan Komisaris pada tahun 2018. Pedoman tersebut dikaji secara berkala dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan penyesuaian guna memastikan kesesuaian materinya dengan dinamika organisasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan best practices.

Piagam Komite tersebut memuat ketentuan antara lain Maksud dan Tujuan, Fungsi dan Tugas Pokok, Tanggung Jawab dan Wewenang, Organisasi dan Keanggotaan, Key Performance Indicator dan Penilaian Kinerja Komite, Mekanisme Kerja dan Kode Etik.

The Nomination and Remuneration Committee previously used the nomenclature of the HR and Organization Committee. In carrying out its duties, the Nomination and Remuneration Committee adheres to the HR and Organization Committee Charter established by the Board of Commissioners in 2018. These guidelines are reviewed periodically and updated as necessary to ensure their relevance to organizational dynamics, applicable regulations, and best practices.

The Committee Charter includes provisions such as: Purpose and Objectives, Functions and Main Duties, Responsibilities and Authorities, Organization and Membership, Key Performance Indicators, and Performance Assessment, Working Mechanisms, and Code of Conduct.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi
Duties and Responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee

Komite Nominasi dan Remunerasi bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris untuk melakukan fungsi pengawasan dan konsultasi berkaitan dengan sistem pengelolaan talenta, sistem penilaian kinerja dan kebijakan remunerasi. Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Tugas pokok Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

The Nomination and Remuneration Committee works collectively to assist the Board of Commissioners in performing supervisory and consultative functions related to talent management systems, performance assessment systems, and remuneration policies. The Nomination and Remuneration Committee is accountable to the Board of Commissioners. The main duties of the Nomination and Remuneration Committee are as follows:

1. Melakukan review secara berkala atas Sistem Pengelolaan Talenta (Talent Management System) perusahaan serta monitoring dan evaluasi atas pelaksanaannya.
2. Melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur Pengklasifikasian Talenta (Talent Classification) yang dilakukan oleh Direksi.
3. Melakukan validasi dan kalibrasi atas Talenta yang diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris (Selected Talent), untuk menghasilkan daftar Talenta yang akan dicominasikan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS (Nominated Talent).
4. Melakukan evaluasi terhadap Calon Wakil Perusahan yang akan diusulkan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris perusahaan anak, sebelum diajukan kepada RUPS.
5. Melakukan evaluasi atas usulan Key Performance Indicators Individu anggota Direksi.
6. Menyiapkan usulan sistem evaluasi kinerja individu bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
7. Menyiapkan usulan program pengembangan bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
8. Melakukan evaluasi atas kebijakan remuneasi bagi pegawai yang membutuhkan persetujuan/ tanggapan dari Dewan Komisaris.
9. Melakukan evaluasi atas usulan Direksi mengenai struktur organisasi perusahaan.
10. Melakukan analisa, memberi masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas kebijakan, pedoman, strategi dan sistem SDM dan Organisasi Perusahaan.
11. Melakukan analisa, memberi masukan kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan SDM dan Organisasi yang dilakukan oleh Perusahaan.
12. Bersama komite lainnya memberi dan memberi masukan sesuai dengan bidang komite kepada Dewan Komisaris atas :
    a. Pelaksanaan Anggaran Dasar dan Board Manual Perusahaan;
    b. Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP);
    c. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
    d. Laporan Tahunan, Triwulanan dan Laporan Kinerja bulanan;
    e. Good Corporate Governance (GCG);
    f. Key Performance Indicator (KPI) Perusahaan;
13. Mempelajari, mengevaluasi dan memberikan masukan terhadap Laporan Managemen, Kinerja SDM dan Organisasi dan Laporan K3L yang disusun oleh Direksi.
14. Melakukan analisa, memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas usulan-usulan Direksi dalam:
    a. Program Pengembangan SDM dan Organisasi yang mendukung Human Capital Readiness (HCR) dan Organizational Capital Readiness (OCR);
    b. Nominasi pejabat satu tingkat di bawah Direksi.
15. Melakukan analisa, memberi masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas kebijakan, strategi dan pelaksanaan pengelolaan LK3 (Lingkungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja) perusahaan.

1. Conduct periodic review of the Company's Talent Management System and monitor and evaluate its implementation.
2. Evaluate the talent classification systems and procedures conducted by the Directors.
3. Validate and calibrate the talents proposed by the Directors to the Board of Commissioners (Selected Talent) to produce a list of talents to be nominated by the Board of Commissioners to the GMS (Nominated Talent).
4. Evaluate prospective representatives of the Company to be proposed as members of the Directors or Board of Commissioners of subsidiaries before being submitted to the GMS.
5. Evaluate the proposed Key Performance Indicators for individual members of the Directors.
6. Prepare proposals for the individual performance assessment system for members of the Directors and/or the Board of Commissioners.
7. Prepare development program proposals for members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners.
8. Evaluate remuneration policies for employees requiring approval/responses from the Board of Commissioners.
9. Evaluate the Directors' proposals regarding the Company's organizational structure.
10. Analyze, provide input, and make recommendations to the Board of Commissioners on policies, guidelines, strategies, and HR and Organizational Systems of the Company.
11. Analyze and provide input to the Board of Commissioners on the implementation of HR and Organizational management activities carried out by the Company.
12. Collectively with other committees, evaluate and provide input as per the committee's field to the Board of Commissioners on:
    a. Implementation of the Company's Articles of Association and Board Manual;
    b. Company's Long Term Plan (LTP);
    c. Annual Budget and Operational Plan (ABOP);
    d. Annual, Quarterly, and Monthly Performance Reports;
    e. Good Corporate Governance (GCG);
    f. Company Key Performance Indicators (KPIs).
13. Study, evaluate, and provide input on Management Reports, HR Performance and Organization Reports, and HSE Reports prepared by the Directors.
14. Analyze, provide input, and make recommendations to the Board of Commissioners on Directors' proposals regarding:
    a. HR and Organizational Development Programs supporting Human Capital Readiness (HCR) and Organizational Capital Readiness (OCR);
    b. Nomination of officials one level below the Directors.
15. Analyze, provide input, and make recommendations to the Board of Commissioners on policies, strategies, and implementation of the company's LK3 (Environment, Health, and Safety Management).

10. Melakukan analisa, memberi masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas kebijakan, strategi dan pelaksanaan pengelolaan budaya perusahaan, hubungan industrial serta pelaksanaan reward and punishment pegawai.
12. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Komite Nominasi dan Remunerasi, melaksanakan rapat-rapat komite, membuat risalah rapat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas-tugas komite secara berkala kepada Dewan Komisaris.
18. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian, memastikan selesainya dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sesuai lingkup tugas dan kewajiban Komite Dewan Komisaris.
19. Menjaga kerahasiaan data serta informasi perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Dewan Komisaris.

10. Analyze, provide input, and make recommendations to the Board of Commissioners on policies, strategies, and implementation of corporate culture management, industrial relations, and employee reward and punishment.
12. Develop the activity plan and budget for the Nomination and Remuneration Committee, hold committee meetings, record meeting minutes, and submit periodic reports on the committee's activities to the Board of Commissioners.
18. Identify issues that require attention, ensure their resolution, and perform other tasks assigned by the Board of Commissioners within the scope of the Committee's duties and obligations.
19. Maintain confidentiality of the Company's data and information following the prevailing regulations of the Board of Commissioners.

Rencana Program Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Work Program of the Nomination and Remuneration Committee

Komite Nominasi dan Remunerasi menyusun program kerja setiap tahun mengacu pada tugas pokok Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana diatur di dalam Piagam Komite. Program kerja disusun guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2022, Program kerja Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Internal Komite Nominasi dan Remunerasi :
   a. Evaluasi Laporan Manajemen Bulanan, Triwulanan dan Tahunan.
   b. Evaluasi pencapaian Target Program Bidang SDM dan Organisasi.
   c. Evaluasi pencapaian Target Zero Accident, K3L dan Proper.
   d. Evaluasi pencapaian Target HCR dan OCR.
   e. Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola IT dan Manajemen Dokumen.
   f. Menyajikan Laporan Kegiatan Komite SDM dan Organisasi.
   g. Menyajikan dan memantau Program Kerja Komite SDM dan Organisasi.
   h. Mengevaluasi dan memberikan masukan kepada Dekom terhadap usulan Direksi dalam hal pengembangan Organisasi, Nominasi dan Remunerasi Perusahaan.
   i. Berpartisipasi Aktif dalam Rapat Internal Dekom (RID), untuk membahas bahan rapat pengawasan dengan Direksi.
   j. Memberikan masukan (apabila diminta) kepada Dewan Komisaris dalam rapat pengawasan dengan Direksi.

The Nomination and Remuneration Committee prepares an annual work program based on its main duties as outlined in the Committee Charter. The work program is designed to promote the effective execution of the Nomination and Remuneration Committee's duties and responsibilities in supporting the Board of Commissioners' supervisory functions. Throughout 2022, the work program of the Nomination and Remuneration Committee included:

1. Internal Activities of the Nomination and Remuneration Committee:
   a. Evaluation of Monthly, Quarterly, and Annual Management Reports.
   b. Evaluation of the achievement of HR and Organizational Program targets.
   c. Evaluation of Zero Accident targets, HSSE, and PROPER compliance.
   d. Evaluation of HCR and OCR targets.
   e. Monitoring and evaluating IT Governance and Document Management.
   f. Preparing HR and Organization Committee Activity Reports.
   g. Preparing and monitoring the HR and Organization Committee Work Program.
   h. Evaluating and providing input to the Board of Commissioners on Directors' proposals regarding organizational development, nomination, and remuneration.
   i. Actively participating in Internal Board of Commissioners Meetings (RID) to discuss supervisory meeting materials with the Directors.
   j. Providing input (when requested) to the Board of Commissioners in supervisory meetings with the Directors.

2. Kegiatan bersama Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan:

   a. Melakukan rapat mingguan antar Komite dan Sekretaris Dewan Komisaris.
   b. Melakukan evaluasi Laporan Kinerja dan Laporan Manajemen.
   c. Evaluasi atas usulan RKAP 2024.
   d. Evaluasi atas Kinerja Anak Perusahaan / Perusahaan Afiliasi.
   e. Evaluasi atas IT Governance dan Evaluasi TLD (Three Lines of Defense).
   f. Melandaskan arahan Dewan Komisaris terkait fungsi pengawasan dan pemberian nasihat.
   g. Menyiapkan dokumen pendukung terkait dengan asessmen GCG.
   h. Menyiapkan draft tanggapan Dewan Komisaris atas RKAP dan LPT.
   i. Menyiapkan draft tanggapan/rekomendasi Dewan Komisaris atas surat Direksi.
   j. Pembahasan permasalahan korporat dengan jajaran manajemen sesuai permintaan Dewan Komisaris/Direksi.

2. Activities with the Secretary of the Board of Commissioners, Audit Committee, Risk Management and Compliance Committee:

   a. Conducting weekly meetings between committees and the Secretary of the Board of Commissioners.
   b. Evaluating Performance and Management Reports.
   c. Evaluating the proposed ABOP 2024.
   d. Evaluating the performance of Subsidiaries / Affiliated Companies.
   e. Evaluating IT Governance and TLD (Three Lines of Defense).
   f. Following up on directions from the Board of Commissioners regarding supervisory and advisory functions.
   g. Preparing supporting documents related to GCG assessments.
   h. Drafting responses from the Board of Commissioners on ABOP and AAR.
   i. Drafting responses/recommendations from the Board of Commissioners on Directors' letters.
   j. Discussing corporate issues with management as requested by the Board of Commissioners / Directors.

Pelaksanaan Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi
Implementation of Nomination and Remuneration Committee Duties

Komite Nominasi dan Remunerasi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan rencana program kerja tahun 2023 dengan mengacu pada Piagam Komite. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi diantaranya melakukan telaah, memberikan masukan atau rekomendasi, menghadiri rapat-rapat dengan Dewan Komisaris, Direksi, seluruh jajaran manajemen dan pertemuan lain serta melakukan kunjungan kerja bersama Dewan Komisaris. Komite Nominasi dan Remunerasi melaporkan realisasi program kerja secara triwulanan kepada Dewan Komisaris. Secara umum, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan pengawasan dan pendampingan serta memberikan masukan sepanjang tahun 2023 antara lain untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Evaluasi Laporan Kinerja setiap bulan dan Laporan Manajemen Triwulanan tahun 2023.
2. Pembahasan usulan wakil Perusahaan pada Anak Perusahaan.
3. Pembahasan pelaksanaan Program Bidang SDM dan Organisasi termasuk mengevaluasi pencapaian targetnya.
4. Evaluasi pencapaian target Zero Accident terkait implementasi K3L dan Reposisi Fungsi K3L dan Persiapan PROPER.
5. Evaluasi pencapaian target OCR dan HCR.
6. Monitoring dan Evaluasi tata kelola IT terkait IT Master Plan, Enterprise Architecture (EA) Perusahaan, IMS – 2.0 dan Pengembangan Teknologi Informasi.

The Nomination and Remuneration Committee performs its duties and responsibilities based on the 2023 work program, referring to the Committee Charter. Activities carried out in order to carry out the duties and responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee include conducting reviews, providing input or recommendations, attending meetings with the Board of Commissioners, Board of Directors, all levels of management and other meetings and conducting working visits with the Board of Commissioners. The Nomination and Remuneration Committee reports the realization of the work program quarterly to the Board of Commissioners. In general, the Nomination and Remuneration Committee has supervised and assisted and provided input throughout 2023, among others, for the following:

1. Evaluation of the Monthly Performance Reports and Quarterly Management Reports for 2023.
2. Discussion on the Company's representative proposals for Subsidiaries.
3. Discussion on the implementation of HR and Organizational Programs, including evaluating their target achievements.
4. Evaluation of Zero Accident target achievements related to the implementation of HSE, Repositioning of HSE Functions, and PROPER Preparation.
5. Evaluation of OCR and HCR target achievements.
6. Monitoring and Evaluation of IT Governance related to the IT Master Plan, the Company's Enterprise Architecture (EA), IMS – 2.0, and Information Technology Development.

7. Pembahasan usulan Remuneras Dewan Komisaris dan Direksi.
8. Menyampaikan Laporan Komite Nominasi dan Remuneras secara triwulanan sepanjang tahun 2023.
9. Menyusun Program Kerja Komite Nominasi dan Remuneras tahun 2024.
10. Berpartisipasi Aktif dalam Rapat Internal Dewan Komisaris (RKD).
11. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dalam rapat pengawasan dengan Direksi.
12. Menghadiri rapat Komite Audit, Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan, Sekretaris Dewan Komisaris.
13. Menghadiri rapat antar Komite dan Sekretaris Dewan Komisaris.
14. Menghadiri kunjungan kerja lapangan dengan Dewan Komisaris.

7. Discussion on Remuneration Proposals for the Board of Commissioners and Directors.
8. Submission of Quarterly Nomination and Remuneration Committee Reports throughout 2023.
9. Preparation of the 2024 Nomination and Remuneration Committee Work Program.
10. Active Participation in Internal Board of Commissioners Meetings (RKD).
11. Providing input to the Board of Commissioners during supervisory meetings with the Directors.
12. Attending meetings with the Audit Committee, Risk Management and Compliance Committee, and the Secretary of the Board of Commissioners.
13. Participating in inter-Committee and Secretary of the Board of Commissioners meetings.
14. Joining fieldwork visits with the Board of Commissioners.

Rapat Komite Nominasi dan Remuneras

Nomination and Remuneration Committee Meetings

Rapat Komite Nominasi dan Remuneras dselenggarakan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu bulan untuk menyelesaikan Program Komite Nominasi dan Remuneras sebagaimana diatur dalam Piagam Komite. Selain itu, BoC Manual juga mengejelaskan bahwa Komite Nominasi dan Remuneras wajib melakukan pertemuan rutin dengan Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan serta melakukan pertemuan dengan fungsi terkait mengenai pelaksanaan nominasi dan remuneras di Perusahaan dalam rangka membahas perkembangan dan aktivitas Perusahaan baik secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila diperlukan. Sepanjang tahun 2023, Komite Nominasi dan Remuneras telah melaksanakan rapat sebanyak 24 (Dua puluh empat) kali.

The Nomination and Remuneration Committee meetings are held regularly at least once a month, to address the Nomination and Remuneration Committee Program as outlined in the Committee Charter. Additionally, the BoC Manual mandates that the Nomination and Remuneration Committee must hold regular meetings with the Board of Commissioners at least once a month and meet with relevant functions regarding the implementation of nominations and remuneration in the Company to discuss the Company's developments and activities both periodically and as needed. Throughout 2023, the Nomination and Remuneration Committee held 24 (twenty-four) meetings.

Frekuensi Rapat Internal dan Tingkat Kehadiran Anggota Komite Nominasi dan Remuneras

Frequency of Internal Meetings and Attendance Rate of Nomination and Remuneration Committee Members

Nama Name	Jabatan Position	Frekuensi Rapat Meeting Frequency	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Bagus Purnomo	Ketua (Komisaris) Chairman (Commissioner)	12	12	100 %
Kenedy	Wakil Ketua (Komisaris) Vice Chairman (Commissioner)	2	2	100 %
Hendra Iwishyadi	Ketua Chairman	22	22	100 %
Tirie Krema Wardana	Wakil Ketua Vice Chairman	11	11	100 %
Jogin Lok Aimo	Sekretaris (Pihak Independen) Secretary (Independent Party)	22	22	100 %
Prasetyorini	Anggota (Pihak Independen) Member (Independent Party)	22	22	100 %
Chairuddin Dana	Sekretaris merangkap Anggota (Pihak Independen) Secretary and Member (Independent Party)	2	2	100 %
Dri Nugrahyanto	Anggota (Pihak Independen) Member (Independent Party)	2	2	100 %

Program Pengembangan Kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi
Competency Development Program for the Nomination and Remuneration Committee

Program pengembangan kompetensi untuk Komite Nominasi dan Remunerasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dalam menjalankan tugas secara efektif. Pengembangan Kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

The competency development program for the Nomination and Remuneration Committee aims to enhance the understanding and skills of its members in performing their duties effectively. During 2023, there was no competency development undertaken by the Nomination and Remuneration Committee.

Program Pengembangan Kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi
Competency Development Program for the Nomination and Remuneration Committee

Nama Name	Jabatan Position	Program Pengembangan Development Program	Tanggal Date
Hendra Isnehyudi	Ketua Chairman	- Seminar Nusantara Power Connect 2023 "Strengthening The Base, Expanding The Business	11-12 September 2023 September 11-12, 2023
Emi Kresna Wardana	Wakil Ketua Deputy Chairman	- Seminar Nusantara Power Connect 2023 "Strengthening The Base, Expanding The Business	11-12 September 2023 September 11-12, 2023
Cipto Udi Ahmo	Sekretaris Secretary	- Seminar Nusantara Power Connect 2023 "Strengthening The Base, Expanding The Business	11-12 September 2023 September 11-12, 2023
Prasetyoto	Anggota Member	- Seminar Nusantara Power Connect 2023 "Strengthening The Base, Expanding The Business	11-12 September 2023 September 11-12, 2023

Penilaian Kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi
Performance Assessment of the Nomination and Remuneration Committee

Dewan Komisaris melakukan penilaian atas kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi untuk memastikan dan mendorong efektivitas pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi. Prosedur dan kriteria penilaian kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan dilaksanakan sebagai bagian dari agenda rapat evaluasi internal Dewan Komisaris dan organ Dewan Komisaris. Penilaian kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi meliputi pelaksanaan tugas, kontribusi dan pelaporan kepada Dewan Komisaris. Hasil penilaian atas kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi tahun 2023 adalah sebagai berikut:

The Board of Commissioners evaluates the performance of the Nomination and Remuneration Committee to ensure and promote the effective execution of its duties. The performance assessment procedures and criteria for the Nomination and Remuneration Committee are established by the Board of Commissioners and conducted as part of the internal evaluation meeting agenda of the Board of Commissioners and its organs. The performance assessment of the Nomination and Remuneration Committee includes the execution of duties, contributions, and reporting to the Board of Commissioners. The performance assessment results for the Nomination and Remuneration Committee in 2023 are as follows:

Tabel Evaluasi Kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi
Table of Nomination and Remuneration Committee Performance Assessment

No.	Kriteria Penilaian Assessment criteria	Rata-Rata Average
1.	Ketepatan waktu agenda kegiatan Dewan Komisaris Timeliness of the Board of Commissioners' activity agenda	3,00
2.	Kualitas pekerjaan Quality of work	4,00
3.	Kontribusi pada kegiatan Dewan Komisaris Contribution to the activities of the Board of Commissioners	3,00
4.	Presentasi pada Rapat Internal Dewan Komisaris (RKD) Presentation at the Internal Meeting of the Board of Commissioners (RKD)	4,00
5.	Pelaksanaan rapat (RKD, RDD, RKM) Implementation of meetings (RKD, RDD, RKM)	3,00
6.	Penyiapan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Preparation of Board of Commissioners Supervision Report	3,00
	Rata-Rata Skor Average Score	**4,17**

Komite Nominasi dan Remuneras juga melakukan evaluasi mandiri (self assessment) secara berkala atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang telah dijalankan. Komite Nominasi dan Remuneras selanjutnya menyusun langkah-langkah yang dipertukan dalam rangka perbaikan dan pengembangan serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remuneras berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan atas kinerja Komite Nominasi dan Remuneras dalam mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

The Nomination and Remuneration Committee also conducts regular self-assessments of its duties and responsibilities. Based on these evaluations, the Nomination and Remuneration Committee formulates necessary steps for improvements and developments to enhance the effectiveness of its tasks in supporting the Board of Commissioners.

Komite Investasi dan Manajemen Risiko

Investment and Risk Management Committee

Dewan Komisaris membentuk Komite Investasi dan Manajemen Risiko untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab fungsi pengawasan. Komite Investasi dan Manajemen Risiko melakukan pengawasan, telaah dan memberikan masukan atas hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan kebijakan dan strategi Perusahaan dan aspek risiko maupun investasi. Komite Investasi dan Manajemen Risiko dibentuk dengan mengacu pada Undang-Undang No. 19 tahun 2003; Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-1/MBU/01/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Komite Investasi dan Manajemen Risiko bersifat independen baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

The Board of Commissioners established the Investment and Risk Management Committee to support the execution of supervisory duties and responsibilities. The Investment and Risk Management Committee supervises, reviews, and provides input on matters related to the Company's policies and strategies from the perspectives of risk and investment. The Investment and Risk Management Committee was formed based on Law No. 19 of 2003, Law No. 40 of 2007, and the Minister of State-Owned Enterprises Regulation of the Republic of Indonesia No. PER-1/MBU/01/2023 on March 20, 2023, regarding the Organization and Human Resources of State-Owned Enterprises. The Investment and Risk Management Committee operates independently in both its tasks and reporting and is directly accountable to the Board of Commissioners.

Susunan, Periode dan Masa Jabatan Komite Investasi dan Manajemen Risiko

Composition, Term, and Tenure of the Investment and Risk Management Committee

Dewan Komisaris membentuk Komite Investasi dan Manajemen Risiko yang terdiri dari ketua dan anggota. Komite Investasi dan Manajemen Risiko dipimpin oleh seorang Ketua yang merupakan anggota Dewan Komisaris dan dibantu oleh Wakil Ketua merangkap anggota yang merupakan anggota Dewan Komisaris serta 2 (dua) orang anggota yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris. Salah seorang anggota yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris merangkap sebagai Sekretaris Komite. Ketua dan anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris.

The Board of Commissioners formed the Investment and Risk Management Committee, which consists of a chairperson and members. The committee is led by a Chairperson who is a member of the Board of Commissioners and supported by a Vice Chairperson who is also a member of the Board of Commissioners, along with two members who are not from the Board of Commissioners. One of the non-Commissioner members also serves as the Committee Secretary. The Chairperson and members of the Investment and Risk Management Committee are appointed and dismissed by the Board of Commissioners based on its resolutions.

Masa jabatan anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko yang merupakan anggota Dewan Komisaris berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir. Sedangkan masa jabatan anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

The tenure of committee members who are also Board of Commissioners members ends automatically when their term as the Board of Commissioners expires. Non-Commissioner committee members serve a three-year term, which can be extended once, without prejudice to the Board of Commissioners' right to dismiss them at any time.

Susunan Komite Investasi dan Manajemen Risiko yang berlaku tahun 2023 ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali No. 015/K/DK/PJB/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang pembentukan Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan pada Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali sebagai berikut:

The composition of the Investment and Risk Management Committee for 2023 was determined by the Board of Commissioners of PT Pembangkitan Jawa Bali Resolution No. 015/K/DK/PJB/2021 on December 31, 2021, regarding the formation of the Risk Management and Compliance Committee within the Board of Commissioners of PT Pembangkitan Jawa Bali as follows:

Susunan Komite Investasi dan Manajemen Risiko Januari 2023
Composition of the Investment and Risk Management Committee January 2023

Nama Name	Jabatan Position	Keahlian Expertise	Periode Jabatan Period of Office
Jamen P. Hutapea	Ketua (Komisaris) Chairman (Commissioner)	Kewenangan, Standardisasi Ketenagalistrikan dan Inspektur Auditor Safety, Electricity Standardization and Inspector Auditor	Kesatu First
Erlin Krisna Wardhana	Wakil Ketua (Pihak Independen) Deputy Chairman (Independent Party)	Stakeholder Management, Risk Management	Kesatu First
Bambang Irianto	Sekretaris (Pihak Independen) Secretary (Independent Party)	General Accounting and Cost Accounting, Capital Budgeting, Corporate Finance, Organization Management, Process Facilitation dan Risk Management	Kedua Second
Cigih Ldi Atmo	Anggota (Pihak Independen) Member (Independent Party)	Project Management, Financial Management	Kesatu First

Perubahan susunan Komite Investasi dan Manajemen Risiko tahun 2023 ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Keputusan Dewan Komisaris PT PLN Nusantara Power No. 002.K/DK-PLN NP/2023, tanggal 1 Februari 2023, tentang Pembentukan Komite Investasi dan Manajemen Risiko Pada Dewan Komisaris PT PLN Nusantara Power sebagai berikut:

The composition of the Investment and Risk Management Committee for 2023 was amended based on the Board of Commissioners' resolution of PT PLN Nusantara Power No. 002.K/DK-PLN NP/2023 on February 1, 2023, regarding the formation of the Investment and Risk Management Committee within the Board of Commissioners of PT PLN Nusantara Power as follows:

Susunan Komite Investasi dan Manajemen Risiko Februari – Juli 2023
Composition of the Investment and Risk Management Committee February – July 2023

Nama Name	Jabatan Position	Keahlian Expertise	Periode Jabatan Period of Office
Jamen P. Hutapea	Ketua (Komisaris) Chairman (Commissioner)	Kewenangan, Standardisasi Ketenagalistrikan dan Inspektur Auditor Safety, Electricity Standardization and Inspector Auditor	Kesatu First
Erlin Krisna Wardhana	Wakil Ketua (Pihak Independen) Deputy Chairman (Independent Party)	Stakeholder Management, Risk Management	Kesatu First
Eri Nurcahyanto	Sekretaris (Pihak Independen) Secretary (Independent Party)	Regulasi dan Manajemen Bisnis Penyediaan Tenaga Listrik, Tarif Tenaga Listrik Regulation and Management of Electricity Supply Business, Electricity Tariffs	Kesatu First
Dyota Ovijanto	Anggota (Pihak Independen) Member (Independent Party)	Manajemen Bisnis Penyediaan Tenaga Listrik Electricity Supply Business Management	Kesatu First

Perubahan kedua susunan Komite Investasi dan Manajemen Risiko tahun 2023 ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Keputusan Dewan Komisaris PT PLN Nusantara Power No. 0026.K/DK-PLN NP/2023, tanggal 10 Juli 2023, tentang Pembentukan Komite Investasi dan Manajemen Risiko Pada Dewan Komisaris PT PLN Nusantara Power sebagai berikut:

The second amendment to the composition of the Investment and Risk Management Committee for 2023 was based on the Board of Commissioners' resolution of PT PLN Nusantara Power No. 0026.K/DK-PLN NP/2023 on July 10, 2023, regarding the formation of the Investment and Risk Management Committee within the Board of Commissioners of PT PLN Nusantara Power as follows:

Susunan Komite Investasi dan Manajemen Risiko Juli – Desember 2023
Composition of the Investment and Risk Management Committee July – December 2023

Nama Name	Jabatan Position	Keahlian Expertise	Periode Jabatan Period of Office
Bagus Puruhito	Ketua (Komisaris) Chairman (Commissioner)	Human Capital Management, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Organisasi Human Capital Management, Occupational Health and Safety, Organization	Kesatu First
Ida Nuryatin Finahari	Wakil Ketua (Pihak Independen) Deputy Chairman (Independent Party)	Stakeholder Management, Risk Management	Kesatu First
Iri Nurcahyanto	Sekretaris (Pihak Independen) Secretary (Independent Party)	Regulasi dan Manajemen Bisnis Penyediaan Tenaga Listrik, Tarif Tenaga Listrik Regulation and Management of Electricity Supply Business, Electricity Tariffs	Kesatu First
Djoko Dwijono	Anggota (Pihak Independen) Member (Independent Party)	Manajemen Bisnis Penyediaan Tenaga Listrik Electricity Supply Business Management	Kesatu First

Profil Anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko
Profile of Investment and Risk Management Committee Members

Bagus Puruhito
Ketua Komite Investasi dan Manajemen Risiko
Chairman of the Investment and Risk Management Committee

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.

The profiles can be found in the Board of Commissioners Profile section.

Ida Nuryatin Finahari
Wakil Ketua Komite Investasi dan Manajemen Risiko
Deputy Chair of the Investment and Risk Management Committee

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.

The profiles can be found in the Board of Commissioners Profile section.

Eri Nurcahyanto

Sekretaris dan Anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko
Secretary and Member of the Investment and Risk Management Committee

Warga Negara Indonesia, 42 tahun, berdomisili di Jakarta

Riwayat Pendidikan
Menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Elektro dari Universitas Universitas Diponegoro tahun 2004, dan S2 Magister Teknik Tenaga Listrik dan Energi dari Universitas Universitas Indonesia tahun 2009

Dasar Pengangkatan
Diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT PLN Nusantara Power No. 008/KEP/DK-PLN-NP/2021, tanggal 30 Juli 2021

Riwayat Pekerjaan
Pernah bekerja sebagai Analis Kebijakan Ahli Madya Kementerian ESDM

Indonesian, 42 years old, based in Jakarta

Education
Completed a Bachelor's degree in Electrical Engineering from Diponegoro University in 2004, and a Master's degree in Electrical Power and Energy Engineering from the University of Indonesia in 2009

Basis of Appointment
Appointed based on the Decree of the Board of Commissioners of PT PLN Nusantara Power No. 008/KEP/DK-PLN-NP/2021, on July 30, 2021

Employment History
Had a career as an Associate Expert Policy Analyst at the Ministry of Energy and Mineral Resources.

Djoko Dwijatno

Anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko
Member of the Investment and Risk Management Committee

Warga Negara Indonesia, 56 tahun, berdomisili di Tangerang Selatan

Riwayat Pendidikan
Menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Mesin dari Universitas Institut Teknologi Bandung tahun 1990.

Dasar Pengangkatan
Diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT PLN Nusantara Power No. 008/KEP/DK-PLN-NP/2021, tanggal 30 Juli 2021

Riwayat Pekerjaan
Pernah bekerja sebagai Senior Spesialist Transmisi dan Pemrosesan Sistem PT PLN (Persero), Expert Bisnis Regional PT PLN (Persero), dan Executive Vice President Independent Power Producer PT PLN (Persero)

Indonesian, 56 years old, based in South Tangerang

Education
Completed his bachelor's degree in Mechanical Engineering from Bandung Institute of Technology University in 1990.

Basis of Appointment
Appointed based on the Decree of the Board of Commissioners of PT PLN Nusantara Power No. 008/KEP/DK-PLN-NP/2021, on July 30, 2021

Employment History
He had a career as a Senior Transmission and System Planning Specialist at PT PLN (Persero), Regional Business Expert at PT PLN (Persero), and Executive Vice President Independent Power Producer at PT PLN (Persero).

Independensi Komite Investasi dan Manajemen Risiko

Independence of the Investment and Risk Management Committee

Komite Investasi dan Manajemen Risiko bersifat independen dalam pelaksanaan tugasnya semata-mata untuk kepentingan Perusahaan, terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan Perusahaan. Anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko telah memenuhi kriteria independensi sebagai berikut:

The Investment and Risk Management Committee operates independently in its duties solely in the interest of the Company, free from influence of parties with interests that may conflict with the Company's. The members of the Investment and Risk Management Committee meet the following independence criteria:

Independensi Komite Investasi dan Manajemen Risiko
Independence of the Investment and Risk Management Committee

Kriteria Independensi Independence Criteria	Bagus Purukito	Nia Maryatin Pinahwati	Sri Hunrahyanto	Djoko Dwijatmo
Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit dan non-audit atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir. Not a person in a public accounting firm, legal consultant firm, or other party who provided audit and non-audit services or other consulting services to the Company within the last 6 (six) months.	√	√	√	√
Tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung di Perusahaan. Does not own shares either directly or indirectly in the Company.	√	√	√	√
Bukan orang yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan/atau mengendalikan Perusahaan dalam waktu enam bulan terakhir. Not a person who has the authority and responsibility to plan, lead and/or control the Company within the last six months.	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga setelah dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sampai dengan kedua, baik menurut garis lurus maupun ke samping atau hubungan semenda. Not having blood family relationships with members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners up to the second degree, either in a straight line or sideways or by marriage.	√	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha langsung dan tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan; dan Has no direct or indirect business relationships related to the Company's business activities; And	√	√	√	√
Tidak sedang berada dalam institusi yang kegiatan usahanya memberikan jasa kepada Perusahaan. Not currently in an institution whose business activities are providing services to the Company.	√	√	√	√

Pedoman Kerja Komite Investasi dan Manajemen Risiko
Investment and Risk Management Committee Charter

Komite Investasi dan Manajemen Risiko sebelumnya menggunakan nomenklatur Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan. Komite Investasi dan Manajemen Risiko dalam pelaksanaan tugasnya berpedoman pada Piagam Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang telah ditetapkan Dewan Komisaris pada tahun 2018. Pedoman tersebut dikaji secara berkala dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan pemutakhiran guna memastikan kesesuaian muatannya dengan dinamika organisasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan best practices.

Piagam Komite tersebut memuat ketentuan antara lain Maksud dan Tujuan, Fungsi dan Tugas Pokok, Tanggung Jawab dan Wewenang, Organisasi dan Keanggotaan, Key Performance Indicator dan Penilaian Kinerja Komite, Mekanisme Kerja dan Kode Etik.

Previously known as the Risk Management and Compliance Committee, the Investment and Risk Management Committee carries out its duties based on the Charter of the Risk Management and Compliance Committee, established by the Board of Commissioners in 2018. This charter is reviewed regularly and updated as necessary to ensure alignment with organizational dynamics, applicable regulations, and best practices.

The charter includes provisions on Purpose and Objectives, Main Functions and Duties, Responsibilities and Authorities, Organization and Membership, Key Performance Indicators and Committee Performance Assessment, Work Mechanisms, and Code of Ethics.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Investasi dan Manajemen Risiko
Duties and Responsibilities of the Investment and Risk Management Committee

Komite Investasi dan Manajemen Risiko bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris untuk melakukan fungsi pengawasan dan konsultasi berkaitan dengan kebijakan dan strategi Perusahaan dari sisi risiko maupun investasi. Komite Investasi dan Manajemen Risiko bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Tugas pokok Komite Investasi dan Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

1. Menilai dan memberi masukan terhadap kebijakan dan strategi Perusahaan kepada Dewan Komisaris, baik dari sisi risiko maupun investasi.
2. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas penilaian terhadap hasil kajian analisa risiko dan investasi pada:
   a. Kegiatan Perencanaan Perusahaan.
   b. Kegiatan Operasional Perusahaan.
   c. Kegiatan Investasi Perusahaan.
   d. Kegiatan Evaluasi atas penerapan *Enterprise Risk Management* di Perusahaan.
   e. Tingkat Kepatuhan Perusahaan dalam menyampaikan laporan berkala kepada Dewan Komisaris.
3. Menyampaikan laporan berkala kepada Dewan Komisaris mengenai kegiatan Komite.
4. Memastikan dan menilai bahwa semua kegiatan Perusahaan yang ada di dalam RJPP dan RKAP telah mengandung pendekatan *Enterprise Risk Management* terhadap berbagai risiko Perusahaan.
5. Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan saran kepada Direksi mengenai berbagai hal yang dapat meningkatkan kelancaran dan efektivitas proses manajemen risiko.
6. Melakukan pendahuluan terhadap aksi korporasi strategis yang memerlukan persetujuan atau tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris terkait aspek kepatuhan dan manajemen risiko.
7. Melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan apakah pengendalian risiko dan penerapan aspek kepatuhan telah dilaksanakan secara dan efektif.
8. Melakukan penilaian terhadap penerapan fungsi manajemen risiko dan investasi serta melaporkannya kepada Dewan Komisaris; dan
9. Bertindak sebagai early warning system dengan memberikan kajian, saran dan rekomendasi terkait penerapan manajemen risiko dan kepatuhan kepada Dewan Komisaris.

The Investment and Risk Management Committee works collectively to assist the Board of Commissioners in oversight and advisory roles related to the Company's policies and strategies concerning risk and investment. The committee reports to the Board of Commissioners. The primary duties of the Investment and Risk Management Committee include:

1. Assessing and providing input on the Company's policies and strategies from the perspectives of risk and investment.
2. Advising the Board of Commissioners on risk and investment analysis, including:
   a. Corporate planning activities.
   b. Operational activities.
   c. Investment activities.
   d. Evaluation of Enterprise Risk Management implementation.
   e. Compliance with periodic reporting to the Board of Commissioners.
3. Submitting regular reports to the Board of Commissioners on committee activities.
4. Monitoring and evaluating that all activities in the Company's Long Term Plan (RJPP) and Annual Budget and Operational Plan (RKAP) incorporate Enterprise Risk Management approaches.
5. Assisting the Board of Commissioners in advising the Board of Directors on improving risk management processes.
6. Reviewing strategic corporate actions requiring the Board of Commissioners' approval or written response concerning compliance and risk management.
7. Conducting field visits to ensure that risk controls and compliance are implemented effectively.
8. Evaluating the implementation of risk management and investment functions and reporting to the Board of Commissioners.
9. Acting as an early warning system by providing studies, suggestions, and recommendations related to risk management and compliance to the Board of Commissioners.

Rencana Program Kerja Komite Investasi dan Manajemen Risiko
Annual Work Program of the Investment and Risk Management Committee

Komite Investasi dan Manajemen Risiko menyusun program kerja setiap tahun merujuk pada tugas pokok Komite Investasi dan Manajemen Risiko sebagaimana diatur di dalam Piagam Komite. Program kerja disusun guna mendukung efektivitas pelaksanaan

The Investment and Risk Management Committee prepares an annual work program based on its primary duties as outlined in the Charter. The program aims to ensure effective execution of the committee's duties and responsibilities in supporting the oversight

tugas dan tanggung jawab Komite Investasi dan Manajemen Risiko dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2023, Program kerja Komite Investasi dan Manajemen Risiko adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan rutin yang terdiri dari :
   a. Kegiatan koordinasi Komite Investasi dan Manajemen Risiko dengan manajemen yang meliputi :
      1) Review RJPP
      2) Menyiapkan bahan pertemuan Dekom dengan Pemegang Saham.
      3) Evaluasi RKAP 2023
      4) Penyusunan RKAP 2024
   b. Monitoring dan Evaluasi Laporan Manajemen berkala.
   c. Koordinasi Internal Komite Investasi dan Manajemen Risiko.
   d. Koordinasi berkala Komite Investasi dan Manajemen Risiko dengan manajemen.
   e. Evaluasi Potensi/Mitigasi Risiko di Korporat.
   f. Rapat bersama dengan Komite lain.
2. Kegiatan Khusus/Non Rutin yang terdiri dari :
   a. Review kebijakan, strategi dan implementasi Pengadaan PT PLN.
   b. Review strategi portofolio terkait Unrestricted Subsidiaries, RJPP dan Corporate Charter.
   c. Monitoring dan Review Implementasi Tindak Lanjut Hasil Audit II
   d. Monitoring dan Review Pengendalian Internal (COSO, ERM, ICOFR, APQC, Three Lines of Defense).
   e. Monitoring dan Review Kebijakan Strategi Security of Supply.
   f. Review Enterprise Architecture.
   g. Monitoring dan Review Implementasi Corporate Agenda.
   h. Monitoring dan Review Implementasi Corporate Transformation.
3. Program Pengembangan Kompetensi Komite Investasi dan Manajemen Risiko.

role of the Board of Commissioners. The 2023 work program includes:

1. Routine Activities:
   a. Coordination with management, covering:
      1) Reviewing the Company's Long Term Plan (RJPP).
      2) Preparing materials for meetings between the Board of Commissioners and Shareholders.
      3) Evaluating the 2023 ABCP.
      4) Preparing the 2024 ABCP.
   b. Monitoring and evaluating periodic management reports.
   c. Internal coordination within the committee.
   d. Regular coordination with management.
   e. Evaluating corporate risk potentials and mitigations.
   f. Joint meetings with other committees.
2. Special/Non-Routine Activities:
   a. Reviewing policies, strategies, and the implementation of PT PLN Pengadaan.
   b. Reviewing portfolio strategies related to Unrestricted Subsidiaries, the Company's Long Term Plan (RJPP), and the Corporate Charter.
   c. Monitoring and reviewing the implementation of IT audit follow-up actions.
   d. Monitoring and reviewing internal controls (COSO, ERM, ICOFR, APQC, Three Lines of Defense).
   e. Monitoring and reviewing strategies for supply security.
   f. Reviewing the Enterprise Architecture.
   g. Monitoring and reviewing the implementation of the Corporate Agenda.
   h. Monitoring and reviewing corporate transformation implementation.
3. Competency Development Program for the Investment and Risk Management Committee.

Pelaksanaan Tugas Komite Investasi dan Manajemen Risiko

Implementation of the Investment and Risk Management Committee's Duties

Komite Investasi dan Manajemen Risiko melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan rencana program kerja tahun 2023 dengan mengacu pada Piagam Komite. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Investasi dan Manajemen Risiko diantaranya melakukan telaah, memberikan masukan atau rekomendasi, menghadiri rapat-rapat dengan Dewan Komisaris, Direksi, seluruh jajaran manajemen dan pertemuan lain serta melakukan kunjungan kerja

The Investment and Risk Management Committee carries out its duties and responsibilities based on the 2023 work program plan with reference to the Committee Charter. Activities carried out in order to fulfill the duties and responsibilities of the Investment and Risk Management Committee includeconducting reviews, providing input or recommendations, attending meetings with the Board of Commissioners, Board of Directors, all levels of management and other meetings and conducting working visits with the Board of

Bersama Dewan Komisaris, Komite Investasi dan Manajemen Risiko melaporkan realisasi program kerja secara triwulanan kepada Dewan Komisaris. Secara umum, Komite Investasi dan Manajemen Risiko telah melakukan pengawasan dan pendampingan serta memberikan masukan sepanjang tahun 2022 antara lain untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Evaluasi pelaksanaan RKAP 2023.
2. Proses penyusunan draft RKAP 2024.
3. Pelaksanaan enterprise risk management di level korporasi.
4. Pengawasan kebijakan pengelolaan Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi.
5. Pengawasan pelaksanaan pengendalian internal dengan menggunakan pendekatan Three line of Defense.
6. Permintaan rekomendasi dan persetujuan tertulis Dewan Komisaris atas tindakan korporasi yang dilakukan oleh Direksi.
7. Pembaharuan informasi mengenai pengelolaan UBU/OM dan Unit Pembangkit.
8. Proses investasi dan bisnis pengembangan usaha korporasi.
9. Proses bisnis internal termasuk tapi tidak terbatas kepada bidang pengembangan usaha, pengadaan, UBU/OM dan lain-lain.
10. Pendampingan pelaksanaan proses transformasi korporasi Holding dan Subholding.

Commissioners. The committee reports the realization of the work program quarterly to the Board of Commissioners. Throughout 2023, the committee performed oversight, guidance, and provided input on:

1. Evaluating the implementation of the 2023 ABCP.
2. Drafting the 2024 ABCP.
3. Implementing enterprise risk management at the corporate level.
4. Overseeing the management policies of subsidiaries and affiliates.
5. Monitoring internal controls using the Three Lines of Defense approach.
6. Requesting recommendations and written approvals from the Board of Commissioners on corporate actions by the Board of Directors.
7. Updating information on the management of OMBU and Power Plants.
8. Corporate investment and business development processes.
9. Internal business processes including but not limited to business development, procurement, OMBU, and others.
10. Supporting the corporate transformation process of Holding and Subholding.

Rapat Komite Komite Investasi dan Manajemen Risiko

Meetings of the Investment and Risk Management Committee

Rapat Komite Investasi dan Manajemen Risiko dselenggarakan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu bulan untuk menyelesaikan Program Komite Nominasi dan Remuneras sebagaimana diatur dalam Piagam Komite. Selain itu, BoC Manual juga menjelaskan bahwa Komite Investasi dan Manajemen Risiko wajib melakukan pertemuan rutin dengan Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun serta melakukan pertemuan dengan fungsi terkait mengenai pelaksanaan investasi dan manajemen risiko di Perusahaan dalam rangka membahas perkembangan dan aktivitas Perusahaan baik secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila diperlukan. Sepanjang tahun 2023, Komite Investasi dan Manajemen Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali.

The Investment and Risk Management Committee meetings are held regularly at least once a month to address the committee's program as outlined in the Charter. The BoC Manual also states that the committee must hold regular meetings with the Board of Commissioners at least once a month and meet with relevant functions regarding investment and risk management to discuss corporate developments and activities as needed. In 2023, the committee held 12 meetings.

Frekuensi Rapat Internal dan Tingkat Kehadiran Anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko
Frequency of Internal Meetings and Attendance of Investment and Risk Management Committee Members

Nama Name	Jabatan Position	Frekuensi Rapat Meeting Frequency	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Jaman P. Hutapea	Ketua (Komisaris) / Chairman (Commissioner)	6	6	100 %
Erlin Krisna Wardana	Wakil Ketua (Pihak Independen) Deputy Chairman (Independent Party)	6	6	100 %
Bagus Pandhito	Ketua (Komisaris) / Chairman (Commissioner)	6	6	100 %
Ida Nuryatin Finahari	Wakil Ketua (Komisaris) Deputy Chairman (Commissioner)	6	6	100 %
Bambang Irianto	Sekretaris (Pihak Independen) Secretary (Independent Party)	7	7	100 %

Nama Name	Jabatan Position	Frekuensi Rapat Meeting Frequency	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Gigih Udi Atmo	Anggota (Pihak Independen) Member (Independent Party)	1	1	100 %
Eri Nurnaryanto	Sekretaris merangkap Anggota (Pihak Independen) Secretary and Member (Independent Party)	11	11	100 %
Djoko Dwijatmo	Anggota (Pihak Independen) Member (Independent Party)	11	11	100 %

Program Pengembangan Kompetensi Komite Investasi dan Manajemen Risiko

Competency Development Program for the Investment and Risk Management Committee

Program pengembangan kompetensi untuk Komite Investasi dan Manajemen Risiko bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko dalam menjalankan tugas secara efektif. Pengembangan Kompetensi Komite Investasi dan Manajemen Risiko sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

The competency development program aims to enhance the understanding and skills of committee members to effectively performing their duties. In 2023, the following competency development activities were undertaken:

Program Pengembangan Kompetensi Komite Investasi dan Manajemen Risiko
Competency Development Program for the Investment and Risk Management Committee

Nama Name	Jabatan Position	Program Pengembangan Development Program	Tanggal Date
Bagus Purnomo	Ketua (Komisaris) Chairman (Commissioner)	• Seminar Nusantara Power Connect 2023 "Strengthening The Base, Expanding The Business"	11-12 September 2023 September 11-12, 2023
Ida Nuryatin Finahari	Wakil Ketua (Komisaris) Deputy Chairman (Commissioner)	• Workshop profil Perusahaan dan SCG Company profile and SCG workshop	13 Juli 2023 July 13, 2023
		• Leadership Development Program	4 Agustus, 20-21 Oktober 2023 4 Agustus, 20-21 Oktober 2023
		• Seminar Nusantara Power Connect 2023 "Strengthening The Base, Expanding The Business"	11-12 September 2023 September 11-12, 2023
Eri Nurnaryanto	Sekretaris merangkap Anggota (Pihak Independen) Secretary and Member (Independent Party)	• CG Methodology and Environmental and Social Management Systems	26 Oktober 2023 October 26, 2023
		• Seminar Nusantara Power Connect 2023 "Strengthening The Base, Expanding The Business"	11-12 September 2023 September 11-12, 2023
Djoko Dwijatmo	Anggota (Pihak Independen) Member (Independent Party)	• CG Methodology and Environmental and Social Management Systems	26 Oktober 2023 October 26, 2023
		• Seminar Nusantara Power Connect 2023 "Strengthening The Base, Expanding The Business"	11-12 September 2023 September 11-12, 2023

Penilaian Kinerja Komite Manajemen Risiko dan Kepatuhan
Performance Assessment of the Risk Management and Compliance Committee

Dewan Komisaris melakukan penilaian atas kinerja Komite Investasi dan Manajemen Risiko untuk memastikan dan mendorong efektivitas pelaksanaan tugas Komite Investasi dan Manajemen Risiko. Prosedur dan kriteria penilaian kinerja Komite Investasi dan Manajemen Risiko ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan dilaksanakan sebagai bagian dari agenda rapat evaluasi internal Dewan Komisaris dan organ Dewan Komisaris. Penilaian kinerja Komite Investasi dan Manajemen Risiko mencakup pelaksanaan tugas, kontribusi dan pelaporan kepada Dewan Komisaris. Hasil penilaian atas kinerja Komite Investasi dan Manajemen Risiko tahun 2023 adalah sebagai berikut:

The Board of Commissioners assesses the performance of the Investment and Risk Management Committee to ensure and encourage effective execution of its duties. The procedures and criteria for performance evaluation are set by the Board of Commissioners and carried out as part of the internal evaluation meetings of the Board of Commissioners and its organs. The performance evaluation covers task execution, contributions, and reporting to the Board of Commissioners. The 2023 performance assessment results are as follows:

Tabel Evaluasi Kinerja Komite Investasi dan Manajemen Risiko
Performance Evaluation Table of the Investment and Risk Management Committee

No.	Kriteria Penilaian Assessment criteria	Rata-Rata Average
1.	Ketepatan waktu agenda kegiatan Dewan Komisaris Timeliness of the Board of Commissioners' activity agenda	3,00
2.	Kualitas pekerjaan Quality of work	3,00
3.	Kontribusi pada kegiatan Dewan Komisaris. Contribution to the activities of the Board of Commissioners	3,00
4.	Presentasi pada Rapat Internal Dewan Komisaris (RID) Presentation at the Internal Meeting of the Board of Commissioners (RID)	3,00
5.	Pelaksanaan rapat (RID, RDG, RKNK) Implementation of meetings (RID, RDG, RKNK)	3,00
6.	Penyiapan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris. Preparation of Board of Commissioners Supervision Report	3,00
	Rata-Rata Skor Average Score	**3,00**

Komite Investasi dan Manajemen Risiko juga melakukan evaluasi mandiri (self assessment) secara berkala atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang telah dijalankan. Komite Investasi dan Manajemen Risiko selanjutnya menyusun langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka perbaikan dan pengembangan serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Investasi dan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan atas kinerja Komite Investasi dan Manajemen Risiko dalam mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

The Investment and Risk Management Committee also conducts regular self-assessments of its duties and responsibilities. Based on these evaluations, the committee formulates necessary steps for improvement and development to enhance the effectiveness of its task performance in supporting the Board of Commissioners.

Komite Lain
Other Committees

Dewan Komisaris dapat membentuk komite lain yang nama dan tugasnya disesuaikan dengan kebutuhan Dewan Komisaris yang terdiri dari ketua dan anggota. Selain Komite Audit, Komite Nominasi dan Remuneasi serta Komite Investasi dan Manajemen Risiko, dipandang belum perlu untuk membentuk komite lainnya di bawah Dewan Komisaris. PLN NP mempertimbangkan skala bisnis dan struktur organisasi Perusahaan serta struktur organ pendukung Dewan Komisaris saat ini yang dipandang telah

The Board of Commissioners is authorized to form other committees whose names and duties are adjusted to the needs of the Board of Commissioners consisting of a chairman and members. Apart from the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Investment and Risk Management Committee, it is deemed not necessary to form other committees under the Board of Commissioners. PLN NP considers the Company's business scale and organizational structure as well as the current supporting

mematai untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan. Oleh karena itu sepanjang tahun 2022, tidak terdapat informasi profil, pelaksanaan tugas dan penilaian atas kinerja komite lainnya di bawah Dewan Komisaris.

organ structure of the Board of Commissioners which is deemed adequate to support the implementation of the supervisory function. Therefore, in 2022, there was no profile information, implementation of duties or assessment of the performance of other committees under the Board of Commissioners.

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan merupakan bagian penting sebagai organ pendukung dalam tata kelola Perusahaan. Keberadaannya terkait dengan fungsi yang dijalankan Direksi. Fungsi Sekretaris Perusahaan juga memastikan kepatuhan terhadap peraturan terkait pengadaan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan sebagai penghubung dengan pemangku kepentingan. Pembentukan dan pelaksanaan fungsi Sekretaris Perusahaan merujuk pada Undang-undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-2/MBU/02/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Corporate Secretary is an important part as a supporting organ in corporate governance, especially in relation to the functions carried out by the Board of Directors. Corporate Secretary also functions to ensure compliance with the regulations regarding disclosure requirements in line with the implementation of the principles of Good Corporate Governance and as a liaison with the stakeholders. The formation and implementation of the Corporate Secretary functions refers to Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises, Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-2/MBU/02/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.

Profil Sekretaris Perusahaan
Profile of the Corporate Secretary

Sri Heny Purwanti

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Warga Negara Indonesia, 53 tahun, lahir di Surakarta/Solo, 30 Juni 1969 dan berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan sejak 2022 melalui Surat Keputusan Direksi PT PLN Nusantara Power No. K.0486/KEP/PNP/2022 tanggal 27 Juni 2022.

Riwayat Pendidikan
- S1 Akuntansi – Universitas Sebelas Maret (1994).
- S2 Ilmu Manajemen – PPM Manajemen (2003).

Riwayat Pekerjaan
Beliau pernah menjabat sebagai:
- VP Budaya Perusahaan dan Sistem Kompensasi PT PLN (Persero) pada tahun 2021-2022.
- Manager Executive Director PT PLN (Persero) pada tahun 2020 – 2021.
- VP Corporate Culture PT PLN (Persero) pada tahun 2018 – 2020.
- Manager Senior Budaya Perusahaan PT PLN (Persero) pada tahun 2017 – 2018.
- Manager Bidang Pembelajaran Non Teknik PT PLN Puslitkat pada tahun 2015-2017.
- Manager Unit Pendidikan dan Pelatihan PT PLN Puslitkat pada tahun 2014 – 2015.
- Manager Area Bisnis PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang pada tahun 2011 – 2013.
- Manager Area Chacas PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang pada tahun 2010 – 2011.
- Manager Area Mungkung PLN Distribusi Bali pada tahun 2008-2009.

Indonesian citizen, 53 years old, born in Surakarta/Solo, June 30, 1969 and domiciled in Jakarta. Serving as Corporate Secretary since 2022 through the Decree by PT PLN Nusantara Power's Directors No. K.0486/KEP/PNP/2022 dated June 27, 2022.

Education
- Bachelor of Accounting – Sebelas Maret University (1994).
- Master of Management – PPM Management (2003).

Career History
She previously served as the following:
- VP of Corporate Culture and Compensation Systems at PT PLN (Persero) in 2021-2022.
- Manager Executive Director at PT PLN (Persero) in 2020 – 2021.
- VP Corporate Culture at PT PLN (Persero) in 2018 – 2020.
- Senior Manager of Corporate Culture at PT PLN (Persero) in 2017 – 2018.
- Manager of Non Technical Learning Sector at PT PLN Puslitkat in 2015-2017.
- Manager of the Education and Training Unit at PT PLN Puslitkat in 2014 – 2015.
- Business Area Manager at PLN Distribution Jakarta and Tangerang Distribution in 2011 – 2013.
- PLN Chacas Area Manager for Greater Jakarta and Tangerang Distribution in 2010 – 2011.
- PLN Bali Distribution Mungkung Area Manager in 2008-2009.

Kedudukan dan Struktur Organ Sekretariat Perusahaan

Position and Organ Structure of Corporate Secretary

Perusahaan menetapkan Sekretaris Perusahaan setiap jajaran satu level di bawah Direksi yang memimpin organ Sekretariat Perusahaan. Sekretariat Perusahaan merupakan organ pendukung Direksi yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan sumber daya manusia terkait dengan promosi dan mutasi yang berlaku di lingkungan Perusahaan.

The Company determines the Corporate Secretary as an official one level below the Directors who leads the Corporate Secretariat organ. Corporate Secretary is a supporting organ for the Board of Directors which is directly responsible to the President Director. Corporate Secretary is appointed and dismissed by the President Director based on the Company's internal mechanisms with approval by the Board of Commissioners based on the provisions of laws and regulations as well as human resource policies related to promotions and transfers applicable within the Company.

Struktur Organ Sekretariat Perusahaan ditetapkan berdasarkan Peraturan Direksi No. 0046.P/019/DIR/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Pembangkitan Jawa-Bali serta No. 0044.P/019/DIR/2023 tentang Peraturan Pelaksana Susunan Organisasi dan Formasi Tenaga Kerja Sekretariat Perusahaan. Sekretaris Perusahaan membawahi dua bidang, yaitu GCG, Secretary and Protocol (BID GCG) dan Corporate Communication and CSR (BID COM).

Corporate Secretariat Organ Structure is determined based on the Board of Directors Regulation No. 0046.P/019/DIR/2023 concerning the Organization and Work Procedures of PT Pembangkitan Jawa-Bali and No. 0044.P/019/DIR/2023 concerning Implementing Regulations on the Organizational Structure and Workforce Formation of Corporate Secretary. Corporate Secretary supervises two fields, namely GCG, Secretary and Protocol (BID GCG) as well as Corporate Communication and CSR (BID COM).

Struktur Organ Sekretariat Perusahaan
Company Secretariat Organ Structure

Pedoman Kerja Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary Work Guidelines

Sekretaris Perusahaan mengacu pada Peraturan Direksi No. 004KU/1/019/DIR/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Pembangkitan Jawa-Bali serta Peraturan Direksi No. 004A/1/019/DIR/2022 tentang Penataan Pelaksana Susunan Organisasi dan Formasi Tenaga Kerja Sekretariat Perusahaan terkait lingkup tanggung jawab dan garis koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya. Sekretaris Perusahaan juga secara khusus berpedoman pada Corporate Secretary Manual yang merupakan bagian integral dari Corporate Governance Code.

Corporate Secretary refers to the Board of Directors Regulation No. 004KU/1/019/DIR/2022 concerning the Organization and Work Procedures of PT Pembangkitan Jawa-Bali as well as the Board of Directors Regulation No. 004A/1/019/DIR/2022 concerning Implementation of Regulations on the Organizational Structure and Workforce Formation of Corporate Secretary related to the scope of responsibility and lines of coordination in their duties implementation. Corporate Secretary is also specifically guided by the Corporate Secretary Manual which is an integral part of the Corporate Governance Code.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan
Duties and Responsibilities of the Corporate Secretary

Fungsi utama Sekretaris Perusahaan yaitu memastikan strategi kebijakan dan pelaksanaan operasional stakeholder management, pengelolaan informasi publik serta penanganan krisis secara baik dan cepat sehingga terjalin hubungan yang harmonis antara Perusahaan dengan lingkungan untuk menciptakan citra Perusahaan yang positif dalam mendukung strategi Perusahaan serta menjalankan tugas pokok berdasarkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan diantaranya sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan mengevaluasi kebijakan strategis dan operasional pada Sekretariat Perusahaan.
2. Memastikan strategi pengelolaan, monitoring dan evaluasi tata kelola Perusahaan, laporan Perusahaan, pedoman dan program korporat, protokoler internal dan eksternal, pendokumentasian kegiatan strategis Perusahaan serta pemilihan kegiatan award yang diikuti Perusahaan.
3. Memastikan strategi pengelolaan pembinaan, pemenuhan dan asesmen GCG.
4. Memastikan strategi pengelolaan, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan administrasi Direksi dan Dewan Komisaris antara lain meliputi kesekretariatan, remuneras, fasilitas, protokoler dan program pengembangan.
5. Memastikan strategi pengelolaan, monitoring dan evaluasi kebijakan kesekretariatan Kantor Perwakilan.
6. Memastikan strategi pengelolaan pengembangan, pengendalian dan evaluasi kebijakan strategi komunikasi internal dan eksternal, penyediaan informasi publik dan corporate branding, serta pembinaan ke seluruh Unit Kerja dalam kegiatan komunikasi Perusahaan.
7. Memastikan strategi pengelolaan stakeholder management, pengendalian potensi krisis komunikasi, serta menjalankan fungsi mediator dalam penyelesaian masalah yang dihadapi Perusahaan.

The main function of the Corporate Secretary is to ensure policy strategies and operational implementation of the stakeholders management, public information management and crisis handling well and quickly so as to establish harmonious relationship between the Company and the environment in order to create positive image of the Company in supporting its strategy and perform the main tasks based on the Principles of Good Corporate Governance (GCG) and Anti-Bribery Management System (SMAP). The Corporate Secretary has the following duties and responsibilities:

1. Developing and evaluating strategic and operational policies at the Corporate Secretariat.
2. Ensuring the management strategies, monitoring and evaluation of Company governance, Company reports, corporate guidelines and programs, internal and external protocols, documentation of Company strategic activities and selection of award activities in which the Company participates in.
3. Ensuring the management strategy for developing, fulfilling and assessing GCG.
4. Ensuring management, monitoring and evaluation strategies for the administration of the Board of Directors and Board of Commissioners, including secretariat, remuneration, facilities, protocols and development programs.
5. Ensuring management strategies, monitoring and evaluation of Representative Office secretarial policies.
6. Ensuring development management strategies, control and evaluation of internal and external communication strategy policies, provision of public information and corporate branding, as well as guidance to all Work Units in communication activities of the Company.
7. Ensuring the stakeholders management strategies, controlling potential communication crises, as well as carrying out the function of mediator in resolving issues faced by the Company.

8. Memastikan strategi pengelolaan pelaksanaan dan pelaporan Environment, Social and Governance (ESG) pada stream social dan governance.
9. Mengoordinasikan pelaksanaan strategis dan operasional pada Bidang GCG, Secretary and protocol dan Bidang Corporate Communication and CSR.
10. Memastikan dukungan sesuai terhadap pengembangan bisnis kepada fungsi yang mengelola pengembangan bisnis.
11. Memastikan implementasi budaya Perusahaan, Kepatuhan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Keamanan dan Lingkungan (K3KL) serta sistem manajemen yang diterapkan perusahaan sesuai visi dan misi Perusahaan.
12. Memastikan pelaksanaan identifikasi dan mitigasi risiko Sekretariat Perusahaan.
13. Memastikan pengelolaan dan pengendalian program kerja, anggaran dan monitoring realisasi program kerja pada Sekretariat Perusahaan.

8. Ensuring management strategy implementation and reporting Environment, Social and Governance (ESG) in the social and governance stream.
9. Coordinating strategic and operational implementation in the GCG, Secretary and protocol fields and Corporate Communication and CSR fields.
10. Ensuring resources support for business development to the function that manages business development.
11. Ensuring the implementation of Corporate Culture, Compliance, Occupational Health, Safety, Security and Environment (HSSE), as well as the management system implemented following the Company's vision and mission.
12. Ensuring the implementation of risk identification and mitigation at the Corporate Secretariat.
13. Ensuring the management and control of work programs, budgets and monitoring the realization of work programs at Corporate Secretary.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan

Duties Implementation of Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan menyusun Laporan Sekretariat Perusahaan untuk disampaikan kepada Direksi yang mencatatkan realisasi atas pelaksanaan program kerja masing-masing bidang dalam Sekretariat Perusahaan. Sepanjang tahun 2023, pelaksanaan fungsi Sekretaris Perusahaan meliputi:

1. Bidang GCG, Secretary and Protocol
   a. Melaksanakan Rapat Direksi, yang selama 2023 telah terselenggara sebanyak 22 kali dengan waktu penyelesaian rusuh rata-rata selama 4,73 hari.
   b. Koordinasi pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris-Direksi (Konsultasi dan Pengawasan), yang selama 2023 telah terselenggara sebanyak 13 kali.
   c. Koordinasi pelaksanaan RUPS Tahunan Perusahaan yang selama 2023 terlaksana sebanyak 2 kali, yaitu RUPS Pengesahan RKAP 2023 pada 30 Januari 2022 dan RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 pada tanggal 13 Juni 2023.
   d. Menyelenggarakan Rapat Kerja tahun 2023 dalam 2 tahap yaitu Rapat Kerja Semester I tanggal 20-21 Februari 2023 dan Rapat Kerja Semester II pada tanggal 20-21 Juli 2023.
   e. Monitoring penyelesaian M-Action korporat (jadwal RUPS dan Rapat) dilakukan setiap triwulan dengan capaian penyelesaian sebesar 100%.
   f. Pelaksanaan roadshow empowering nusantara pada 8 Unit antara lain UPDK Bandar Lampung, UPK Panegaya, UPDK Balikpapan, UPK Bukit Asam, UPK Negan Raya, UPDK Kapuas, UPDK Belawan, dan UPDK Kendari.

The Corporate Secretary prepares a Corporate Secretariat Report to be submitted to the Board of Directors which includes the realization of the implementation of work programs for each sector within the Corporate Secretariat. Throughout 2023, implementation function Corporate Secretary includes the following:

1. GCG, Secretary and Protocol Field
   a. Organized the Board of Directors Meetings, which during 2022 were held 22 times with an average completion time for minutes of meeting of 4.73 days.
   b. Coordination of the implementation of the Board of Commissioners-Directors Meetings (Consultation and Supervision), which during 2023 were held 13 times.
   c. Coordination of the implementation of the Company's Annual GMS which was held twice in 2023, namely the GMS to Ratify the 2023 ABCP on January 30, 2022 and the GMS to Approve the Annual Report and Ratify the Financial Statement for the 2022 Financial Year on June 13, 2023.
   d. Held the 2023 Work Meeting in 2 stages, namely the Semester I Work Meeting on February 20-21, 2023 and the Semester II Work Meeting on July 20-21, 2023.
   e. Monitoring the completion of corporate M-Action (GMS and Directors Meeting direction) is carried out every quarterly with completion achievements by 100%.
   f. Implementation of the empowering archipelago roadshow in 8 units, including Bandar Lampung GCU, Panegaya GCU, Balikpapan GCU, Bukit Asam GCU, Negan Raya GCU, Kapuas GCU, Belawan GCU , and Kendari GCU.

g. Pengelolaan agenda direksi dan kegiatan protokoler termasuk pengelolaan administrasi dan kesekretariatan/ kearsipan.
h. Menerbitkan Laporan Kinerja Bulanan, yang selama 2023 terbit sebanyak 8 (delapan) Laporan.
i. Menyusun Laporan Manajemen Perusahaan yang diterbitkan dan disampaikan kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris. Laporan tersebut terdiri atas:

   1) Laporan Manajemen Tahunan Unaudited tahun 2021;
   2) Laporan Manajemen Tahunan Audited tahun 2022
   3) Laporan Manajemen Triwulan I tahun 2023;
   4) Laporan Manajemen Triwulan II tahun 2023;
   5) Laporan Manajemen Triwulan III tahun 2023;
j. Menyusun Laporan Tahunan 2022 (Annual Report dan Sustainability Report) yang telah didistribusikan kepada stakeholder Perusahaan serta telah diunggah di website Perusahaan;
k. Memberikan pelayanan data dan informasi kepada para pihak yang berkepentingan dengan Perusahaan yaitu Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi serta pihak ketiga lainnya;
l. Menyusun Corporate Presentation Tahun 2023 untuk setiap triwulan;
m. Menyusun buku Statistik Perusahaan Tahun 2023;
n. Penerapan GCG Korporat secara nyata melalui kegiatan Assessment GCG Periode Implementasi Tahun 2022 oleh BPKP dengan capaian skor sebesar 94,84 yang merupakan tertinggi di PLN Grup.
o. Pelaksanaan Assessment GCG Anak Perusahaan untuk Periode Implementasi Tahun 2023.
p. Sosialisasi GCG kepada seluruh unit mengenai pembinaan scope dalam Good Corporate seperti: Standar Etika Perusahaan, Tata Nilai Perusahaan, Gratifikasi, LHKPN, Kebijakan Anti Fraud, Benturan Kepentingan, ISO 37001 Anti Penyuapan, Compliance dan Whistle Blowing System. Telah dilaksanakan 4 kali dalam setahun tanggal 26 Juni 2023 (1 sesi), 4 Desember 2023, dan 15 Desember 2023.
q. Evaluasi dan monitoring pelaksanaan GCG dengan melakukan penilaian GCG periode tahun 2023 secara mandiri (self assessment) berdasarkan parameter Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012.
r. Melaksanakan Induksi Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2023 sebanyak 3 kali pertemuan.

2. Bidang Corporate Communication and CSR
   a. Penyusunan materi, pelaksanaan dan pengolahan hasil survei efektivitas komunikasi tahun 2023 dengan nilai Indeks Efektivitas Komunikasi yaitu 91,11%.
   b. Pelaksanaan dan pelaporan evaluasi kegiatan engagement kepada stakeholder PLN NP.

g. Management of the Board of Directors' agendas and protocol activities including administration and secretarial/ archival management.
h. Publication of 8 (eight) Reports in 2023.
i. Preparation of the Company Management Reports which were published and submitted to Shareholders and the Board of Commissioners. The reports consists of the following:

   1) Management Annual Unaudited Report in 2021;
   2) Management Annual Audited Report in 2022
   3) First Quarter of 2023 Management Report;
   4) Second Quarter of 2023Management Report;
   5) Third Quarter of 2023 Management Report;
j. Preparation of the 2022 Annual Report (Annual Report and Sustainability Report) which was distributed to the Company's stakeholders and uploaded on the Company's website;
k. Provision of data and information services to the parties with an interest in the Company, namely Shareholders, Board of Commissioners, Directors and other third parties;
l. Preparation of Corporate Presentations 2023 for every quarterly ;
m. Compilation of Company Statistics book for 2023;
n. Implementation of Corporate GCG is reflected through the GCG Assessment activities for the 2022 Implementation Period by BPKP with a score of 94.84, which is the highest in the PLN Group.
o. Implementation of Subsidiary GCG Assessment for the 2023 Implementation Period.
p. GCG socialization to all units regarding the development of the scope of Good Corporate such as Corporate Ethics Standards, Company Values, Gratification, LHKPN, Anti-Fraud Policy, Conflict of Interest, ISO 37001 Anti-Bribery, Compliance and Whistle Blowing System. It was held 4 times a year on June 26, 2023 (1 session), December 4, 2023, and December 15, 2023.
q. Evaluation and monitoring of GCG implementation through an independent GCG assessment for the 2023 period (self assessment) based on the parameters of the Decree by the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012.
r. Induction for the new Board of Commissioners and Directors during 2023 at 3 meetings.

2. Corporate Communication and CSR Field
   a. Prepared material, implemented and processed the results of the 2023 communication effectiveness survey with a Communication Effectiveness Index value of 91.11%.
   b. Implementation and reporting of evaluation of engagement activities to PLN NP stakeholders.

c. Pembinaan Komunikasi Korporat pada seluruh Unit
d. Penyusunan rencana publikasi terhadap berapem kegiatan sesuai agenda setting PLN
e. Penyusunan rencana konten media sosial serta pelaksanaan publikasi konten media sosial sesuai dengan program atau kegiatan korporat.
f. Perencanaan dan pelaksanaan publikasi melalui media informasi seperti website, portal, AMS, eknows, WAG, atau media lingkup internal perusahaan lainnya
g. Pengelolaan kegiatan sponsorship dan iklan sebagai bentuk partisipasi Perusahaan kepada stakeholders meliputi pendokumentasian sponsorship, evaluasi dan tindak lanjut

h. Melakukan koordinasi pelaksanaan benchmark tahun 2023 dari eksternal sebanyak 8 kali
i. Media Relation / Press Release & Press Conference
j. Monitoring Media Kanan Cetak dan Online
k. Koordinasi pelaksanaan event korporat antara lain kegiatan HUT PLN NP, Peresmian Green Hydrogen Plant Muara Karang, GroundBreaking PLTS BDN IOMW, Peresmian PLTS Tetapang Cirata dan kegiatan lainnya.

l. Koordinator program (Pentilna) CSR Perusahaan yang dilaksanakan di unit kerja (UP/UPK/UPDK)
m. Penyusunan Laporan CSR Korporat TW I/TW II, TW III, dan TW IV
n. Pengukuran Nilai Social Return on Investment (SROI) tahun 2023 tercapai sebesar 1,18.
o. Memastikan capaian Tingkat Proper Unit Beyond Compliance (Proper Hijau dan Emas) pada tahun 2023 sebanyak 10 unit.
p. Mengukur tingkat keberhasilan program CSR dengan indeks kepuasan pada masyarakat.
q. Pelaksanaan Awarding USL-Comdev PLN NP 2023 melalui penjurian dari expert.

c. Corporate Communication Development in all Units
d. Preparation of publication plans for various activities according to PLN's agenda setting
e. Preparation of social media content plans and social media content publications following the corporate programs or activities
f. Plan and implementation of publications through information media such as websites, portals, AMS, e-connexions, WAG, or other internal company media
g. Management of sponsorship and advertising activities as actualization of the Company participation to the stakeholders includes documentation of sponsorship, evaluation and follow-up
h. Coordination on the implementation of the 2023 benchmark from external sources 8 times
i. Media Relations: Press Release & Press Conference
j. Monitoring the Printed and Online Newspaper Media
k. Coordination of corporate events including PLN NP Anniversary activities, Inauguration of the Muara Karang Green Hydrogen Power Plant, Groundbreaking of the IOMW BDN SPP, Inauguration of the Cirata Floating SPP and other activities.
l. Coordination of the Company's CSR program (Coordinator) which was implemented in the work unit (UP/UPK/UPDK).
m. Preparation of Corporate CSR Reports Q1, Q2, Q3, and Q4
n. Measurement of Social Return on Investment (SROI) value in 2023 achieved the score of 1.18.
o. Ensured the achievement of the Beyond Compliance Proper Unit Level (Green and Gold Proper) in 2023 for 10 units.
p. Measured the success level of CSR programs with the community satisfaction index.
q. Implementation of the CSR-Comdev PLN NP 2023 Awarding through expert judging.

Program Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary Competency Development Program

Perusahaan melaksanakan program pengembangan kompetensi bagi Sekretaris Perusahaan dan staf pada organ Sekretariat Perusahaan dalam rangka mendorong kinerja pelaksanaan fungsi Sekretaris Perusahaan. Sepanjang tahun 2023, Program pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Sekretaris Perusahaan dan staf pada organ Sekretariat Perusahaan adalah sebagai berikut:

The Company implements competency development program for the Corporate Secretary and staff in the Corporate Secretariat organ in order to encourage performance of the Corporate Secretary's functions. Throughout 2023, the competency development program participated in by the Corporate Secretary and staff in the Corporate Secretariat organs is as follows:

Program Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan
Development Program Competence for Corporate Secretary

No	Jabatan Position	Nama Sertifikasi/Pelatihan Name of Certification/Training	Tanggal Pelaksanaan Date Implementation	Penyelenggara Organizer
1.	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	Pelatihan Public Speaking Public Speaking Training	11 November 2023 November 11, 2023	PJB Academy
2.	Officer GCG and Corporate Reporting	Pelatihan ESG ESG Training	22 – 24 Februari 2023 February 22-24, 2023	CRMS Indonesia
3.	Officer GCG and Corporate Reporting (2 orang) (2 persons)	Literasi Digital Sektor Pemerintahan kepada Pegawai PLN Batch 5 Gelombang Pegawai PLN Mulai Cakap Digital Government Sector Digital Literacy for PLN Batch 5 Employees with the theme PLN Employees are Increasingly Digitally Capable	31 Mei 2023 May 31, 2023	Direktorat Pemberdayaan Informatika, Kementerian Komintel Directorate of Information Empowerment, Ministry of Communication and Information
4.	Officer GCG and Corporate Reporting (2 orang) (2 persons)	In House Training On Sustainability Reporting – Reporting with GRI Standards 2021 Update	4 – 6 Juli 2022 July 4-6, 2022	NCCR
5.	Officer GCG and Corporate Reporting (3 orang) (3 orang)	Training Certified Secure Computer User (CSCU)	• 14 – 15 September 2023 • 26 – 27 September 2023 • 10 – 11 October 2023 • 14 – 15 September 2023 • 26 – 27 September 2023 • 10 – 11 October 2023	PT Nina Integrasi Informatika
6.	Officer GCG and Corporate Reporting (1 orang) (1 person)	Health & Safety Management System	13 Oktober 2023 October 13, 2023	PJB Academy
7.	Officer GCG and Corporate Reporting (2 orang) (2 orang)	Sertifikasi Certified Sustainability Report Specialist (CSRS) Certified Secure Computer User (CSCU) training	23 – 29 Oktober 2023 November 23-29, 2023	Institute CSP
8.	Senior Officer Secretariat Administration (6 Orang) (6 persons)	Pelatihan Professional Secretary Professional Secretary Training	15-16 Maret 2023 March 15-16, 2023	PJB Academy Surabaya
9.	Officer Corporate Management (2 orang) (1 person)	Health & Safety Management System	13 Oktober 2023 October 13, 2023	PJB Academy
10.	Officer Corporate Management (2 orang) (1 person)	Pelatihan ESG ESG Training	22 – 24 Februari 2023 February 22-24, 2023	CRMS Indonesia
11.	Officer Corporate Management (2 orang) (1 person)	Training Interpretasi Lanjut Berdasarkan "Baldrige Excellence Framework" Advanced Interpretation Training Based on the "Baldrige Excellence Framework"	4-6 Desember 2023 December 4-6, 2023	PJB Academy
12.	Officer Corporate Management (2 orang) (1 person)	IELTS Preparation	18-22 Desember 2023 December 18-22, 2023	UPDL Bogor
13.	Officer Stakeholder Management and Investor Relation	Pemelajaran ISO 37001:2016 SMAP Tingkat Dasar Basic Level ISO 37001:2016 SMAP learning	20-21 Mei 2023 May 20-21, 2023	Puslitbar PLN – UPDL Surabaya
14.	Officer Stakeholder Mgmt & Investor Relations (2 orang) (2 persons)	Sertifikasi Public Media Relations Officer Public Media Relations Officer Certification	12 Desember 2023 December 16, 2023	LSPPI

No.	Jabatan Position	Nama Sertifikasi/Pelatihan Name of Certification/Training	Tanggal Pelaksanaan Date Implementation	Penyelenggara Organizer
15.	Junior Officer CSR (1 orang) (1 person)	In House Training On Sustainability Reporting – Reporting with GRI Standards 2021 Update	4 – 6 Juli 2023 July 4-6, 2023	NCCR
16.	Officer Corporate Social Responsibility (1 orang) (1 person)	Pelatihan ESG ESG Training	22 – 24 Februari 2023 February 22-24, 2023	CBMS Indonesia

Evaluasi Kinerja Sekretaris Perusahaan
Evaluation of Corporate Secretary Performance

Perusahaan menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi Sekretaris Perusahaan secara berkala berdasarkan kriteria yang disusun dalam bentuk *Key Performance Indicator* dan laporan pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan. Evaluasi Kinerja Sekretaris Perusahaan dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun. Sekretaris Perusahaan tahun 2023 telah mencapai target sebesar 102,74% pada semester I 2023 dan sebesar 100,94% pada semester II 2023 sehingga rata-rata pencapaian sebesar 101,85% dari *Key Performance Indicator* telah ditetapkan.

Perusahaan menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi Sekretaris Perusahaan secara berkala berdasarkan kriteria yang disusun dalam bentuk *Key Performance Indicator* dan laporan pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan. Evaluasi Kinerja Sekretaris Perusahaan dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun. Sekretaris Perusahaan tahun 2023 telah mencapai target sebesar 102,74% pada semester I 2023 dan sebesar 100,94% pada semester II 2023 sehingga rata-rata pencapaian sebesar 101,85% dari *Key Performance Indicator* telah ditetapkan.

Unit Audit Internal
Internal Audit Unit

Pengawasan internal merupakan aspek penting dalam mengawal proses transformasi dan memastikan keberlanjutan Perusahaan. Penyelenggaraan pengawasan internal dilakukan oleh Direksi yang didukung melalui unit audit internal dengan nomenklatur Satuan Pengawasan Intern (SPI). Direksi menetapkan SPI sebagai pelaksana fungsi Audit Internal untuk melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan pengendalian internal, manajemen risiko, dan proses tata kelola Perusahaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Perusahaan. SPI berperan sebagai *strategic business partner* dengan menjalankan fungsi assurance (audit) dengan pendekatan audit berbasis risiko dan konsultansi untuk memberikan nilai tambah pada pengendalian internal, manajemen risiko, dan proses tata kelola Perusahaan.

SPI dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pengawasan Intern (KSPI) yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal merujuk pada kebijakan sumber daya manusia terkait dengan promosi dan mutasi yang berlaku di lingkungan Perusahaan serta ketentuan Piagam Pengawasan Internal dengan persetujuan Dewan Komisaris dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Internal supervision is an important aspect in overseeing the transformation process and ensuring the Company sustainability. Internal supervision is implemented by the Board of Directors supported by an internal audit unit with the nomenclature of the Internal Audit Unit (IAU). The Board of Directors establishes IAU as the executor of the Internal Audit function to evaluate the effectiveness of the implementation of internal control, risk management, and corporate governance processes, following the provisions of laws and regulations and Company policies. IAU acts as a strategic business partner by carrying out assurance (audit) functions with a risk-based audit approach and consultancy to provide added value to the Company's internal control, risk management and governance processes.

IAU is led by a Head of Internal Audit Unit (KSPI) who is appointed and dismissed by the President Director based on internal mechanisms referring to human resource policies related to promotions and mutations applicable within the Company and the provisions of the Internal Audit Charter with the approval by the Board of Commissioners and is directly responsible to the President Director.

Profil Kepala Satuan Pengawasan Intern
Profile of the Head of Internal Audit

Ericson Saragi Sidabutar

Kepala Satuan Pengawasan Intern
Head of Internal Audit

Warga Negara Indonesia, Usia 56 tahun, dan berdomisili di Jakarta.

Menjabat sebagai Kepala Satuan Pengawasan Intern berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN Nusantara Power No. K.2444/H0/R&B/2022 tanggal 19 Desember 2022.

Riwayat Pendidikan
Menyelesaikan pendidikan S1 Akuntansi dari Universitas Sumatera Utara. Saya memiliki kualifikasi dan sertifikasi sebagai profesi audit internal yaitu Qualified Internal Auditor (QIA), serta Certified Risk Governance Professional (CRGP).

Riwayat Pekerjaan
Pernah menjabat sebagai Senior Manager Keuangan UID Jawa Timur PT PLN (Persero) (2021 – 2022); Senior Manager Keuangan SDM dan Administrasi PLN P2B Jawali PT PLN (Persero) (2017 – 2021); Senior Manager Keuangan SDM dan Administrasi PLN Pusdiklat PT PLN (Persero) (2016 – 2017); Kepala Bidang Audit SPI Pusat PT PLN (Persero) (2013 – 2016); Manager Sub Bagian CSR PT PLN (Persero) (2010 – 2013); Kepala PLN Cabang Pekan Baru PT PLN (Persero) (2008 – 2009); Kepala PLN Cabang Jayapura PT PLN (Persero) (2005 – 2007); dan Kepala PLN Cabang Tahuna PT PLN (Persero) (2003 – 2005).

Indonesian citizen, 56 years old, and domiciled in Jakarta.

Serving as Head of Internal Audit Unit based on the Decree of PT PLN Nusantara Power's the Board of Directors of No. K.2444/H0/R&B/2022 dated December 19, 2022.

Education History
I've graduated with a bachelor's degree in Accounting from the University of North Sumatra. I've has qualifications and certifications as an internal audit professional, namely Qualified Internal Auditor (QIA), and Certified Risk Governance Professional (CRGP).

Work History
I've previously served as Senior Manager of East Java Finance UID at PT PLN (Persero) (2021 – 2022); Senior Manager of HR Finance and Administration at PLN P2B Jawali of PT PLN (Persero) (2017 – 2021); Senior Manager of HR Finance and Administration at PLN Pusdiklat of PT PLN (Persero) (2016 – 2017); Head of Audit Division of Central IAU at PT PLN (Persero) (2013 – 2016); Manager of CSR Subdivision at PT PLN (Persero) (2010 – 2013); Head of PLN Pekan Baru Branch at PT PLN (Persero) (2008 – 2009); Head of PLN Jayapura Branch at PT PLN (Persero) (2005 – 2007); and Head of PLN Tahuna Branch at PT PLN (Persero) (2003 – 2005).

Struktur Organ dan Kedudukan Satuan Pengawasan Intern
Organ Structure and Position of Internal Audit Unit

Direksi menetapkan struktur organ Satuan Pengawasan Intern berdasarkan Peraturan Direksi No.0047/0119/DIR/2022 tentang Peraturan Pelaksana Susunan Organisasi dan Formasi Tenaga Kerja Pada Satuan Pengawasan Intern PT Pembangkitan Jawa-Bali. Kedudukan SPI secara struktural berada di bawah Direktur Utama dan secara fungsional memiliki akses komunikasi langsung kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit dalam melakukan koordinasi dan menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan dan hasil audit.

The Board of Directors determines the organ structure of the Internal Audit Unit based on the Board of Directors Regulation No.0047/0119/DIR/2022 concerning Regulations for Implementing the Organizational Structure and Manpower Formation of the Internal Audit Unit at PT Pembangkitan Jawa-Bali. IAU position is structurally under the President Director and functionally has direct communication access to the Board of Commissioners through the Audit Committee in coordinating and submitting information relating to the audit implementation and results.

Tata Kelola Satuan Pengawasan Intern
Internal Audit Governance

Direksi telah menetapkan tata kelola SPI sebagai panangkah pedoman kerja SPI dalam melaksanakan pengawasan intern Perusahaan yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. SPI juga mengacu pada best practices auditor internal dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Tata kelola tersebut disesuaikan dengan struktur organisasi dan kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan antara lain:

1. International Professional Practices Framework Tahun 2017 (IPPF) yang merupakan kerangka kerja konseptual sebagai pedoman resmi praktik auditor internal yang dikeluarkan oleh Institute of Internal Auditor. Pedoman dalam IPPF meliputi Pedoman Wajib (Mandatory Guidance) dan Pedoman yang Disarankan (Strongly Recommended Guidance).
2. Piagam Pengawasan Internal yang merupakan landasan umum dalam pelaksanaan pengawasan internal Perusahaan. Piagam Pengawasan Internal disahkan oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama. Piagam Pengawasan Internal terakhir kali disahkan pada tanggal 11 September 2020 dan dilakukan evaluasi secara periodik untuk memastikan kesesuaian materi ketentuan sesuai dengan perkembangan organisasi dan ketentuan yang berlaku.
3. Peraturan Direksi No.0015/P0190/DIR/2023 tentang Kebijakan Strategis Audit Internal (KSAI) yang disahkan pada tanggal 31 Juli 2023. KSAI mengatur pedoman umum pelaksanaan tugas dan wewenang SPI dalam menjalankan fungsi audit dan konsultansi. Ruang lingkup KSAI meliputi:
   a. Organisasi SPI, Piagam Pengawasan Internal dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia;
   b. Perencanaan Audit Internal;
   c. Penugasan Audit Internal;

The Board of Directors established IAU governance as a set of guidelines for IAU in performing internal supervision of the Company following the applicable laws and regulations. IAU also refers to the best practices of internal auditors in carrying out their duties and responsibilities. The governance is adjusted to the organizational structure and complexity of the Company's business activities, among others:

1. International Professional Practices Framework (IPPF) 2017 which is a conceptual framework as an official guide to the practice of internal auditors issued by the Institute of Internal Auditors. The guidelines in the IPPF include Mandatory Guidance and Strongly Recommended Guidance.
2. Internal Supervisory Charter is the general basis for the internal supervision implementation of the Company. The Internal Supervision Charter is authorized by the President Commissioner and President Director. The Internal Supervisory Charter was last ratified on September 11, 2020 and periodically evaluated to determine the adequacy of the content of the provisions following the organizational developments and applicable regulations.
3. Board of Directors Regulation No.0015/P0190/DIR/2023 concerning Internal Audit Strategic Policy (KSAI) which was approved on July 31, 2023. KSAI serves as a general guideline for the implementation of IAU duties and authorities in carrying out audit and consultancy functions. The scope of KSAI includes the following:
   a. IAU Organization, Internal Audit Charter and Human Resources Management;
   b. Internal Audit Planning;
   c. Internal Audit Assignments;

d. Proses Audit Internal;
e. Sistem Informasi dan Pelaporan Audit Internal;
f. Quality Assurance and Improvement Program (QAIP);
g. Pengawasan Tindak Lanjut.

d. Internal Audit Process;
e. Internal Audit Information and Reporting System;
f. Quality Assurance and Improvement Program (QAIP);
g. Follow-up Monitoring.

Tugas dan Tanggung Jawab Serta Lingkup Pekerjaan Satuan Pengawasan Intern

Duties and Responsibilities and Scope of Work of the Internal Audit Unit

Ruang lingkup SPI meliputi kegiatan assurance (audit) dan konsultasi, melalui evaluasi atas kecukupan dan efektivitas pengendalian risiko, pengendalian intern dan proses tata kelola (governance) di lingkungan Perusahaan (termasuk Anak Perusahaan dan Afiliasinya dengan seizin Direktur Utama selaku Kuasa Pemegang Saham). Ruang lingkup yang menjadi fokus audit, pengujian dan evaluasi dari SPI dilakukan secara wajar, proporsional dan berbasis risiko baik yang berdasar strategis maupun operasional Perusahaan, mencakup:

1. Menyusun dan menyempurnakan strategi SPI sesuai dengan visi dan misi Perusahaan;
2. Menyusun dan menyempurnakan Piagam Pengawasan Internal / Audit Charter dan Kebijakan Strategis Audit Internal, serta Rencana Jangka Panjang (RJP) SPI selaras dengan RJP Perusahaan;
3. Menyusun dan menyempurnakan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT);
4. Melakukanakan evaluasi kualitas audit dan jasa konsultansi oleh Jajaran SPI maupun pihak independen atas seluruh proses audit;
5. Melakukanakan analisis dan penyusunan laporan hasil audit bagi Manajemen dan pihak eksternal, pengelolaan anggaran SPI, evaluasi dan pelaporan realisasi PKAT, Rencana Kerja Anggaran sesuai kewenangan bidang tugasnya;
6. Melakukanakan kajian dan pengembangan organisasi SPI, pengembangan SDM, pengelolaan pendidikan SPI serta administrasi SDM, logistik dan kesekretariatan SPI;
7. Melakukanakan koordinasi dan kerjasama di SPI maupun Bidang dan Unit lainnya, Lembaga atau Instansi/Lembaga Pengawasan lainnya, guna mempertancar pencapaian target yang ditetapkan, peningkatan kinerja SPI dan Perusahaan sesuai kewenangannya;
8. Memastikan sistem pengendalian internal Perusahaan berjalan efisien dan efektif;
9. Melakukanakan fungsi audit operasional dan audit khusus;
10. Memberikan konsultansi atas saran perbaikan yang dipertukan Management; dan

The scope of IAU includes assurance (audit) and consultancy activities, through evaluation of the adequacy and effectiveness of risk management, internal control and governance processes within the Company (including its Subsidiaries and Affiliates with the permission of the President Director as the Shareholders Representative). The scope that becomes the focus of audit, testing and evaluation from IAU is carried out reasonably, proportionally and risk-based both strategic and operational in nature of the Company, including:

1. Developing and refining the IAU strategy based on the Company's vision and mission;
2. Developing and improving Internal Audit Charter and Internal Audit Strategic Policy, as well as the IAU Long Term Plan (RJP) in line with the Company's RJP;
3. Developing and refining the Annual Audit Work Program (PKAT);
4. Evaluating the quality of audit and consulting services by IAU and independent parties on the entire audit process;
5. Analyzing and preparing audit reports for Management and external parties, IAU budget management, evaluation and reporting on the realization of PKAT, Budget Work Plan according to the authority of the field of duty;
6. Studying and developing IAU organizations, human resource development, IAU education management as well as HR administration, logistics and IAU secretariat;
7. Coordinating and cooperating with IAU as well as other Fields and Units, Institutions or other Supervisory Agencies / Institutions, in order to facilitate the achievement of targets set, improve the performance of IAU and the Company according to their authority;
8. Ensuring the Company's internal control system runs efficiently and effectively;
9. Carrying out operational audit and special audit functions;
10. Providing consultancy or suggesting improvements as required by Management; and

11. Mengelola Whistle Blowing System (WBS) dengan menindaklanjuti semua pelaporan termasuk yang tidak ada identitas Pelapor untuk menciptakan iklim kondusif dan mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang dapat merugikan kerugian finansial maupun non finansial dan citra Perusahaan.

11. Managing the Whistle Blowing System (WBS) by following up on all reports including those without the identity of the whistleblower to create a conducive climate and encouraging the reporting of matters that can cause financial and non-financial losses and the Company's image.

Formasi dan Kualifikasi Auditor Satuan Pengawasan Intern

Formation and Qualifications of Internal Audit Unit Auditors

Formasi SPI ditetapkan berdasarkan hasil analisa beban kerja dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan internal. SPI memiliki auditor dengan pengetahuan dan keahlian yang memadai berdasarkan kualifikasi dan sertifikasi sebagai profesi auditor internal. Formasi pada SPI sampai dengan akhir tahun 2022 berjumlah 27 pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

IAU formation is determined based on the results of workload analysis in supporting the implementation of internal control functions. IAU has auditors with adequate knowledge and expertise based on qualifications and certification as an internal auditor profession. Formation in IAU until the end of 2022 amounted to 27 employees with the following composition:

Formasi dan Kualifikasi Auditor Satuan Pengawasan Intern
Formation and Qualifications of Internal Audit Unit Auditors

No	Nama Name	Jabatan Position	Pendidikan Education	
1	Dinsen Sangi Sitabuhar	Kepala Satuan Pengawasan Intern Head Of Internal Audit	D1 Akuntansi D2 Manajemen	Bachelor of Accounting Master of Management
2	Sulistyo Utomo	Vice President Audit I	D1 Teknik Fisika D2 Manajemen	Bachelor of Physics Engineering Master of Management
3	Hanul Anwar	Vice President Audit II	D1 Akuntansi D2 Keuangan Syariah	Bachelor of Accounting Master of Sharia Finance
4	Mochammad Agustian	Vice President Audit III	D1 Teknik Elektro D2 Bidang Manajemen D2 Bidang Kelistrikan	Bachelor of Electrical Engineering Master of Management Master of Electricity
5	Sugito	Senior Specialist Audit Consulting – A	D1 Teknik Mesin	Bachelor of Mechanical Engineering
6	Agus Priyo Kusumo	Senior Specialist Audit Consulting – A	D1 Teknik Industri	Bachelor of Industrial Engineering
7	Hadiyanti Sylviani	Senior Specialist Audit Consulting – B	D1 Akuntansi D2 Manajemen	Bachelor of Accounting Master of Management
8	Ahmad Fajar Rizki	Specialist Audit I	D1 Teknik Elektro D2 Manajemen Teknologi	Bachelor of Electrical Engineering Master of Technology Management
9	Ali Umar Syafi	Specialist Audit I	D1 Informatika	Bachelor of Informatics
10	Ferlinawandi Krisnawandari	Specialist Audit I	D1 Hukum D2 Kenotariatan	Bachelor of Laws Master of Notary
11	Rona Nonnatha Hauli Siregar	Specialist Audit I	D1 Akuntansi	Bachelor of Accounting
12	Lione Mery Teodora	Senior Officer Audit I	D1 Manajemen D2 Manajemen	Bachelor of Management Master of Management
13	Thierry Widya Lukiani	Senior Officer Audit I	D1 Teknik Elektro	Bachelor of Electrical Engineering
14	Rina Fitriyaniasari	Officer Audit I	D1 Teknik Kimia D2 Teknik Mesin	Bachelor of Chemical Engineering Master of Mechanical Engineering
15	Achmad Faisal Imaroddin	Officer Audit I	D1 Teknik Industri	Bachelor of Industrial Engineering

No	Nama Name	Jabatan Position	Pendidikan Education	
16	Lahmma Alkaisha Haryaa	Officer Audit I	S1 Manajemen	Bachelor of Management
17	Fadlanto Nikna	Officer Audit I	S1 Teknik Elektro	Bachelor of Electrical Engineering
18	Riyo Hussein Muhammad	Officer Audit I	S1 Teknik Fisika	Bachelor of Physics Engineering
19	Dyah Maya Saffitri	Specialist Audit II	S1 Akuntansi	Bachelor of Accounting
20	Rachmad Lutfi	Specialist Audit II	S1 Teknik Mesin	Bachelor of Mechanical Engineering
21	Ika Ramadhona	Senior Officer Audit I	S1 Manajemen	Bachelor of Management
22	Suhermar	Senior Officer Audit I	S1 Teknik Elektro	Bachelor of Electrical Engineering
23	Tri Isnuryani	Senior Officer Audit I	S1 Hukum S2 Manajemen	Bachelor of Laws Master of Management
24	Bima Surya Sofhananda	Officer Audit II	S1 Teknik Industri	Bachelor of Industrial Engineering
25	Rachmadika Anjani Kurniahjo	Officer Audit II	S1 Manajemen	Bachelor of Management
26	Elvira Sari Virnanda	Officer Audit II	S1 Akuntansi	Bachelor of Accounting
27	Vodegari Ign. Rido Devanda	Specialist Audit III	S1 Teknik Mesin S2 Bidang Kelistrikan	Bachelor of Mechanical Engineering Master of Electricity
28	Elly Rahmad	Specialist Audit III	S1 Akuntansi	Bachelor of Accounting
29	Arindita Pradana	Senior Officer Audit III	S1 Ekonomi Pembangunan S2 Manajemen Strategi	Bachelor of Development Economics Master of Strategy Management
30	Mahdia Dinia Auliya	Officer Audit III	S1 Teknik Elektro	Bachelor of Electrical Engineering
31	Filratsu Shiddiq Sriatika Putra	Officer Audit III	S1 Hukum	Bachelor of Laws
32	Demdi Maheswarman	Officer Audit III	S1 Elektronika	Bachelor of Electronics
33	Dikky Galih Hanbali	Officer Methodology & QA – II	S1 Teknik Elektro	Bachelor of Electrical Engineering
34	Arizky Aryanto	Officer Methodology & QA – II	S1 Teknik Industri	Bachelor of Electrical Engineering
35	Ahmad Syaiful Zuhri	Senior Officer Counterpart	S1 Teknik Industri	Bachelor of Electrical Engineering
36	Alfiet Paruhan Sinambela	Senior Officer Counterpart II	S1 Akuntansi	Bachelor of Accounting
37	Ahmad Fikha Wyata	Officer Counterpart – II	S1 Teknik Elektro	Bachelor of Electrical Engineering

Sertifikasi Auditor Satuan Pengawasan Intern
Internal Audit Unit Auditor Certification

Sertifikasi Profesi Professional Certification	Jumlah Auditor Number of Auditors
Qualified Internal Auditor (QIA) Manajerial Managerial	28 Orang Employees
Qualified Internal Auditor (QIA) Lanjutan Advanced	3 Orang Employees
Qualified Internal Auditor (QIA) Dasar Basic	3 Orang Employees
Qualified Risk Management Analyst (QRMA)	4 Orang Employees
Enterprise Risk Management Associate/Certified Professional	6 Orang Employees
Certified Fraud Examiners	1 Orang Employee
Qualified Risk Management Officer (QRMO)	1 Orang Employee

Pelaksanaan Kegiatan Satuan Pengawasan Intern
Implementation of Internal Audit Unit Activities

Sebagai bagian dari penyelenggaraan pengawasan internal, SPI menyusun Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) dengan pendekatan Risk Based Internal Audit (RBIA) berdasarkan sasaran-sasaran strategis (Strategy Map) Perusahaan. PKAT SPI tahun 2023 mencakup program-program utama dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Penugasan Audit Internal dengan objek audit Unit Pembangkitan (UP), Unit Pelaksana Pembangkitan dan Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan (UPKL/UPDK), Unit Maintenance Repair Overhaul (UMRO), PJB Academy, Divisi/ Bidang/ Satuan Kerja PLN NP Kantor Pusat, dan Anak Perusahaan;
2. Penugasan audit dengan tujuan tertentu dan audit tematik;
3. Peran sebagai consultant dan catalyst;
4. Penguatan networking SPI dengan Stakeholders;
5. Penguatan Tata Kelola SPI;
6. Peningkatan kapabilitas dan kapasitas personil SPI;
7. Pelaksanaan koordinasi dengan Komite Audit dan counterpart eksternal auditor.

Program kerja utama SPI telah direalisasikan sepanjang tahun 2023 yang mencakup kegiatan pelaksanaan audit internal, peningkatan kompetensi SDM SPI, pelaksanaan koordinasi dengan komite audit dan counterpart eksternal, peran sebagai konsultan dan katalis, serta kegiatan lainnya untuk membantu Direksi dalam rangka penyelenggaraan pengawasan Internal Perusahaan. SPI menghadiri rapat yang diselenggarakan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris sepanjang tahun 2023 sebagai berikut:

As part of the implementation of internal supervision, IAU prepares an Annual Audit Work Program (PKAT) with a Risk Based Internal Audit (RBIA) approach based on the Company's strategic objectives (Strategy Map). IAU's PKAT for 2023 includes major programs with the following activities:

1. Internal Audit Assignment with audit object of Generating Unit (GU), Generation Operating Unit and Generation Control Unit (GOU/PLCU), Maintenance Repairment Overhaul Unit (UMRO), PJB Academy, Division/Sector/Work Unit of PLN NP Head Office, and Subsidiaries;
2. Specific purpose audit engagements and thematic audits;
3. Role as consultant and catalyst;
4. Strengthening IAU networking with the Stakeholders;
5. Strengthening IAU Governance;
6. Increasing the capability and capacity of IAU personnel;
7. Coordination with the Audit Committee and counterpart external auditors.

IAU main work program has been realized throughout 2023 which includes the implementation of internal audits, improving the competence of IAU human resources, coordinating with audit committees and external counterparts, acting as consultants and catalysts, and other activities to support the Board of Directors in the framework of implementing the Company's internal control. IAU attended meetings organized by the Board of Directors, Board of Commissioners and Board of Commissioners Committee throughout 2023 as follows:

Kehadiran SPI dalam Rapat Tahun 2023
SPI Attendance in Meetings in 2023

Rapat Meetings	Jumlah Rapat Number of Meetings	Kehadiran Attendance	Tingkat kehadiran Attendance rate
Direksi Directors	33	33	100%
Dewan Komisaris Board of Commissioners	12	12	100%
Komite Audit Audit Committee	4	4	100%

Pelaksanaan Audit Internal
Internal Audit Implementation

Pelaksanaan audit internal mencakup audit operasional, audit sistem manajemen, audit khusus, dan audit proses bisnis. Pada tahun 2023 telah dilakukan pada obyek audit sebagai berikut:

The implementation of internal audits includes operational audits, management system audits, special audits, and business process audits. In 2023, the following audit objects were conducted:

Pelaksanaan Audit Operasional
Operational Audit Implementation

No	Obyek Audit Audit Object	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date
	Triwulan I First Quarter	
1	Unit Pembangkitan Tanjung Awar-Awar Tanjung Awar-Awar Generating Unit	24 Januari-13 Februari 2023 January 24 - February 13, 2023
2	Unit Pembangkitan Paiton Paiton Generating Unit	24 Januari-13 Februari 2023 January 24 - February 13, 2023
3	Unit Pembangkitan Cirata Cirata Generating Unit	24 Januari-13 Februari 2023 January 24 - February 13, 2023
4	Unit Pembangkitan Bembang Bembang Generating Unit	13 Februari-3 Maret 2023 February 13 - March 3, 2023
5	Unit Pembangkitan Cirebon Cirebon Generating Unit	20 Februari-10 Maret 2023 February 20 - March 10, 2023
6	Unit Pembangkitan Muara Tawar Muara Tawar Generating Unit	20 Februari-10 Maret 2023 February 20 - March 10, 2023
7	Unit Pembangkitan Muara Karang Muara Karang Generating Unit	20 Februari-10 Maret 2023 February 20 - March 10, 2023
	Triwulan II Second Quarter	
8	Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Balikpapan Balikpapan Generation Control Unit	4-25 Mei 2023 May 4-25, 2023
9	Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Palangkaraya Palangkaraya Generation Control Unit	5-26 Mei 2023 May 5-26, 2023
10	Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Pekanbaru Pekanbaru Generation Control Unit	5-26 Mei 2023 May 5-26, 2023
11	Unit Pelaksana Pembangkitan Kapuas Kapuas Generation Operating Unit	5-26 Mei 2023 May 5-26, 2023
12	Unit Pelaksana Pembangkitan Sebalang Sebalang Generation Operating Unit	7 Juni-6 Juli 2023 June 7 - July 6, 2023
13	Unit Pelaksana Pembangkitan Bukit Asam Bukit Asam Generation Operating Unit	12 Juni-6 Juli 2023 June 12 - July 6, 2023
14	Unit Pelaksana Pembangkitan Nagan Raya Nagan Raya Generation Operating Unit	12 Juni-6 Juli 2023 June 12 - July 6, 2023
15	Unit Pembangkitan Kaltim Teluk Kaltim Gulf Generating Unit	12 Juni-6 Juli 2023 June 12 - July 6, 2023
	Triwulan III Third Quarter	
16	Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Gorontalo Gorontalo Generation Control Unit	17 Juli - 7 Agustus 2023 July 7 - August 7, 2023
17	Unit Pelaksana Pembangkitan Tarahan Tarahan Generation Operating Unit	17 Juli - 7 Agustus 2023 July 7 - August 7, 2023
18	Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Bandar Lampung Bandar Lampung Generation Control Unit	17 Juli - 7 Agustus 2023 July 7 - August 7, 2023
19	Unit Pembangkitan Pacitan Pacitan Generating Unit	17 Juli - 7 Agustus 2023 July 7 - August 7, 2023
20	Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Belawan Belawan Generation Control Unit	21 Agustus - 8 September 2023 August 21 - September 8, 2023
21	Unit Pembangkitan Arun Arun Generation Unit	23 Agustus - 12 September 2023 August 23 - September 12, 2023
	Triwulan IV Fourth Quarter	
22	PJB Academy	30 Oktober – 17 November 2023 October 30 - November 17, 2023
23	PT EGE Services	30 Oktober – 17 November 2023 October 30 - November 17, 2023
24	PT Prima Layanan Niaga Duta Cerdas	4 – 22 Desember 2023 December 4-22, 2023

Pelaksanaan Audit Sistem Manajemen
Implementation of Management System Audit

No	Obyek Audit Audit Object	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date
	Triwulan I First Quarter	
1	Unit Pembangkitan Tanjung Awar-Awar Tanjung Awar-Awar Generating Unit	24 Januari-13 Februari 2023 January 24 - February 13, 2023
2	Unit Pembangkitan Paiton Paiton Generating Unit	24 Januari-13 Februari 2023 January 24 - February 13, 2023
3	Unit Pembangkitan Cirata Cirata Generating Unit	24 Januari-13 Februari 2023 January 24 - February 13, 2023
4	Unit Pembangkitan Rembang Rembang Generating Unit	13 Februari-3 Maret 2023 February 13 - March 3, 2023
5	Unit Pembangkitan Cirebon Cirebon Generating Unit	20 Februari-10 Maret 2023 February 20 - March 10, 2023
6	Unit Pembangkitan Muara Tawar Muara Tawar Generating Unit	20 Februari-10 Maret 2023 February 20 - March 10, 2023
7	Unit Pembangkitan Muara Karang Muara Karang Generating Unit	20 Februari-10 Maret 2023 February 20 - March 10, 2023
	Triwulan II Second Quarter	
8	Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Balikpapan Balikpapan Generation Control Unit	4-26 Mei 2023 May 4-26, 2023
9	Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Palangkaraya Palangkaraya Generation Control Unit	5-26 Mei 2023 May 5-26, 2023
10	Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Pekanbaru Pekanbaru Generation Control Unit	5-26 Mei 2023 May 5-26, 2023
11	Unit Pelaksana Pembangkitan Kapuas Kapuas Generation Operating Unit	5-26 Mei 2023 May 5-26, 2023
12	Unit Pelaksana Pembangkitan Sebangka Sebangka Generation Operating Unit	7 Juni-5 Juli 2023 June 7 - July 5, 2023
13	Unit Pelaksana Pembangkitan Bukit Asam Bukit Asam Generation Operating Unit	12 Juni-4 Juli 2023 June 12 - July 4, 2023
14	Unit Pelaksana Pembangkitan Nagan Raya Nagan Raya Generation Operating Unit	12 Juni-4 Juli 2023 June 12 - July 4, 2023
15	Unit Pembangkitan Kaltim Teluk Kaltim Gulf Generating Unit	12 Juni-4 Juli 2023 June 12 - July 4, 2023
16	Audit ISO 37001 2016 SMAP	15-25 Mei 2023 May 15-25, 2023
17	Audit ISO 21001 2018 SMOP	21-28 Juni 2023 June 21-28, 2023
	Triwulan III Third Quarter	
18	Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Ciamotakis Ciamotakis Generation Control Unit	17 Juli - 7 Agustus 2023 July 17-August 7, 2023
19	Unit Pelaksana Pembangkitan Tarahan Tarahan Generation Operating Unit	17 Juli - 7 Agustus 2023 July 17-August 7, 2023
20	Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Bandar Lampung Bandar Lampung Generation Control Unit	17 Juli - 7 Agustus 2023 July 17-August 7, 2023
21	Unit Pembangkitan Pacitan Pacitan Generating Unit	17 Juli - 7 Agustus 2023 July 17-August 7, 2023
22	Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Belawan Belawan Generation Control Unit	31 Agustus - 8 September 2023 August 31 - September 8, 2023
23	Unit Pembangkitan Arun Arun Generation Unit	23 Agustus - 13 September 2023 August 23 - September 13, 2023

No	Objek Audit Audit Object	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date
	Triwulan IV Fourth Quarter	
14	PLN Academy	30 Oktober – 17 November 2023 October 30 – November 17, 2023
30	Audit ISO 22301	24 November – 1 Desember 2023 November 24 – December 1, 2023
31	Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Minahasa Minahasa Generation Control Unit	4 – 8 Desember 2023 December 4-8, 2023
32	Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Kendari Kendari Generation Control Unit	4 – 8 Desember 2023 December 4-8, 2023
33	Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Pandan Pandan Generation Control Unit	4 – 8 Desember 2023 December 4-8, 2023
34	Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Tarakan Tarakan Generation Control Unit	4 – 8 Desember 2023 December 4-8, 2023
35	Unit Pelaksana Pembangkitan Punagaya Punagaya Generation Operating Unit	4 – 8 Desember 2023 December 4-8, 2023

Pelaksanaan Audit Khusus
Special Audit Implementation

No	Objek Audit Audit Object	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date
	Triwulan III Third Quarter	
1	Audit Khusus atas Pengaduan WBS Special Audit of WBS Complaints	21 Agustus – 31 Oktober 2023 August 21 - October 31, 2023

Pelaksanaan Audit Proses Bisnis
Business Process Audit Implementation

No	Objek Audit Audit Object	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date
	Triwulan III Third Quarter	
1	Proses Bisnis Rantai Pasok Batubara & Biomassa (DMBBR, SCM, LUM dan UMP) Coal & Biomass Supply Chain Business Process (DMBBR, SCM, LUM and UMP)	22 Agustus – 25 September 2023 August 22 - September 25, 2023
	Triwulan IV Fourth Quarter	
2	Evaluasi Manajemen Risiko Risk Management Evaluation	30 Oktober – 17 November 2023 October 30 – November 17, 2023

Koordinasi Dengan Komite Audit dan *Counterpart* Eksternal
Coordination with Audit Committee and External Counterparts

Koordinasi dengan Komite Audit secara rutin dilakukan yang mencakup kegiatan penyampaian laporan atas pelaksanaan tugas SPI dan reviu atas penerapan Model Tiga Lini (Three Lines Model) dengan realisasi sebanyak 4 (empat) kali rapat sepanjang tahun 2023 sebagai berikut:

1. Pada tanggal 15 Mei 2023, Satuan Pengawasan Internal dan Komite Audit telah menyelenggarakan Rapat Pembahasan Laporan Kegiatan Satuan Pengawasan Internal (LKSPI) Triwulan I tahun 2023.

IAU routinely holds coordination with the Audit Committee which includes activities to submit reports on the implementation of IAU duties and review of the implementation of the Three Lines Model with the realization of 4 (four) meetings throughout 2023 as follows:

1. On May 15, 2023, the Internal Audit Unit and the Audit Committee held a meeting to discuss the Internal Audit Unit Activity Report for the first quarter of 2023.

3. Pada tanggal 27 Juli 2023, Satuan Pengawasan Internal dan Komite Audit telah menyelenggarakan Rapat Pembahasan Laporan Kegiatan Satuan Pengawasan Internal (LKSPI) Triwulan II tahun 2023.
3. Pada tanggal 5 November 2023, Satuan Pengawasan Intern dan Komite Audit telah menyelenggarakan Rapat Pembahasan Laporan Kegiatan Satuan Pengawasan Internal (LKSPI) Triwulan III tahun 2023.
4. Pada tanggal 19 Desember 2023, Satuan Pengawasan Intern dan Komite Audit telah menyelenggarakan Rapat Penyampaian Laporan Hasil Audit Periode Bulan Oktober – November 2023.

3. On July 27, 2023, the Internal Audit Unit and the Audit Committee held a meeting to discuss the Internal Audit Unit Activity Report for the second quarter of 2023.
3. On November 5, 2023, the Internal Audit Unit and the Audit Committee held a meeting to discuss the Internal Audit Unit Activity Report for the third quarter of 2023.
4. On December 19, 2023, the Internal Audit Unit and Audit Committee held a meeting to submit the Audit Report for the period of October - November 2023.

Fungsi Counterparting juga dilakukan SPI terhadap auditor eksternal sepanjang tahun 2023 dengan kegiatan sebagai berikut:

IAU also carried out counterparting functions against the external auditors throughout 2023 with the following activities:

Counterparting Auditor Eksternal
Counterparting External Auditor

No	Auditor Eksternal External Auditor	Kegiatan Activities	
1	Badan Pemeriksa Keuangan Supreme Audit Agency	1. Berdasarkan Surat Tugas BPK RI No.13a/S1/14-KK/01/2023 tanggal 27 Januari 2023 perihal pemeriksaan atas kepatuhan pengakuan pendapatan, biaya dan investasi dalam penyediaan tenaga listrik tahun 2022 pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), anak perusahaan, dan instansi terkait lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur Bali, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan.	1. Based on BPK RI Task Letter No.13a/S1/14-KK/01/2023 dated January 27, 2023 regarding the examination of compliance with the management of revenue, costs and investment in the provision of electricity in 2022 at PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), subsidiaries, and other related agencies in DKI Jakarta, West Java, Central Java, East Java Bali, North Sumatra, Riau, South Sumatra, West Kalimantan, South Kalimantan and South Sulawesi.
		2. Berdasarkan Surat Tugas BPK RI No. 79/S1/14-KK/11/04/2023 tanggal 13 Juni 2023 perihal Pemeriksaan Pendahuluan Kegiatan Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara pada Otoritas Ibukota Negara dan Instansi Terkait Lainnya.	2. Based on BPK RI Task Letter No. 79/S1/14-KK/11/04/2023 dated June 13, 2023 regarding Preliminary Examination of Preparation, Development, and Relocation Activities of the National Capital City at the National Capital Authority and Other Related Agencies.
		3. Berdasarkan Surat Tugas No.105/S1/14-KK/08/2023 tanggal 7 Agustus 2023 perihal pemeriksaan kinerja atas pengelolaan transisi energi dalam penyediaan tenaga listrik pada PT PLN (Persero), Anak Perusahaan, dan instansi terkait lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Timur, dan Sweda selama 100 hari dari tanggal 7 Agustus sampai dengan 31 Desember 2023.	3. Based on Task Letter No.105/S1/14-KK/08/2023 dated August 7, 2023 regarding performance audit on the management of energy transition in the provision of electricity at PT PLN (Persero), Subsidiaries, and other related Agencies in DKI Jakarta, West Java, East Kalimantan, and Sweden for 100 days from August 7 to December 31, 2023.
		4. Berdasarkan Surat Tugas BPK RI No. 145/S1/14-KK/09/2023 tanggal 11 September 2023 perihal Pemeriksaan Terinci atas Kepatuhan Pengelolaan Kredit Proyek Tahun Buku 2017 sampai dengan Semester I tahun 2023 pada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah serta Instansi Terkait Lainnya.	4. Based on BPK RI Task Letter No. 145/S1/14-KK/09/2023 dated September 11, 2023 regarding Detailed Inspection of Compliance with Project Credit Management for Fiscal Year 2017 to Semester 1 of 2023 at PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Central Java and Other Related Agencies.
		5. Berdasarkan Surat Tugas BPK RI No. 86/S1/14-KK/09/2023 tanggal 22 September 2023 perihal Pemeriksaan Kinerja atas Kesiapan Pengembangan Energi Baru Terbarukan untuk Penyediaan Energi Bersih dan Terjangkau dalam Sektor Ketenagalistrikan Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Semester I 2023 pada Kementerian ESDM, Kementerian KoMaRiVes serta Instansi Terkait Lainnya.	5. Based on BPK RI Task Letter No. 86/S1/14-KK/09/2023 dated September 22, 2023 regarding Performance Audit on Readiness of New Renewable Energy Development for the Provision of Clean and Affordable Energy in the Electricity Sector for 2021 Financial Year until Semester I of 2023 at the Ministry of Energy and Mineral Resources, Ministry of CoMaRiVes and Other Related Agencies.

No	Auditor Eksternal External Auditor	Kegiatan Activities	
2	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Financial and Development Supervisory Agency	1. Berdasarkan Surat Tugas No.PE.03.01/S1-73/D4041/2022 tanggal 25 Februari 2022 perihal melakukan reviu atas Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangunan PLTGU Muara Tawar Add-on 2, 3, dan 4 Jawa Barat dan tanggal 25 Februari sampai dengan 3 Maret 2022. 2. Berdasarkan Surat Tugas No.PE.04.01/S7-289/D4041/2022 tanggal 29 Mei 2022 perihal melakukan Reviu atas Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangunan PLTGU Muara Tawar Add-on 2, 3, dan 4 Jawa Barat dan tanggal 29 Mei sampai dengan 14 Juni 2022. 3. Berdasarkan Surat Tugas No.PE.02.02/S1-913/D4041/2022 tanggal 23 Agustus 2022 perihal melakukan Reviu atas Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangunan PLTGU Muara Tawar Add-on 2, 3, dan 4 Triwulan III 2022 dan tanggal 26 Agustus sampai dengan 8 September 2022. 4. Berdasarkan Surat Tugas No.PE.09.02/S-1869/D4/04/2022 tanggal 03 Oktober 2022 perihal melakukan evaluasi atas konservasi energi dan Sumber Daya energi tahun 2022 pada PT PLN (Persero) dan tanggal 23 Oktober – 30 November 2022. 5. Berdasarkan Surat Tugas No.PE.02.02/S1-1511/D4041/2022 tanggal 17 November 2022 perihal melakukan Reviu atas Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangunan SUTT 150kV Rancaekek – Sunyaragi dan tanggal 17 November sampai dengan 9 Desember 2022.	1. Based on Task Letter No.PE.03.01/S1-73/D4041/2022 dated February 25, 2022 regarding the review of the Governance of the National Strategic Project (PSN) for the Construction of Muara Tawar Add-on 2, 3, and 4 West Java CCPP from February 25 to March 3, 2022. 2. Based on Task Letter No.PE.04.01/S7-289/D4041/2022 dated May 29, 2022 regarding conducting a review of the Governance of the National Strategic Project (PSN) Construction of Muara Tawar Add-on 2, 3, and 4 West Java CCPP from May 29 to June 14, 2022. 3. Based on Task Letter No.PE.02.02/S1-913/D4041/2022 dated August 23, 2022 regarding the review of the Governance of the National Strategic Project (PSN) for the Construction of Muara Tawar Add-on 2, 3, and 4 CCPP for the Third Quarter of 2022 from August 26 to September 8, 2022. 4. Based on Task Letter No.PE.09.02/S-1869/D4/04/2022 dated October 03, 2022 regarding evaluating energy conservation and energy resources in 2022 at PT PLN (Persero) from October 23 - November 30, 2022. 5. Based on Task Letter No.PE.02.02/S1-1511/D4041/2022 dated November 17, 2022 regarding the review of the Governance of the National Strategic Project (PSN) 150kV SUTT Construction Rancaekek - Sunyaragi from November 17 to December 9, 2022.
3	Satuan Pengawasan Internal PLN PLN Internal Audit Unit	1. Berdasarkan Surat Tugas No.004/SPI/2021/KI/1000000/2022 tanggal 1 Desember 2022 perihal penugasan audit subsidi listrik tahun anggaran 2022 dari tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan 10 Februari 2023. 2. Berdasarkan Surat Tugas No.011.001/PO AUDIT KIN/SPI/2022/KI/1000000/2023 tanggal 03 Februari 2023 perihal penugasan audit operasional UPDK Bakaru dan tanggal 1 Maret sampai dengan 4 April 2023. 3. Berdasarkan Surat Tugas No.024.STG/PO AUDIT TIK/SPI/2023/KI/1000000/2023 tanggal 25 April 2023 perihal penugasan audit teknologi informasi pada PT PLN Nusantara Power dan Direktorat/Divisi/Unit/Subholding/Anak Perusahaan/Anak Perusahaan dari Anak Perusahaan serta turunan selanjutnya yang pelaporan keuangannya terkonsolidasi pada PT PLN (Persero) dan tanggal 4 Mei sampai dengan 7 Juni 2023. 4. Berdasarkan Surat Tugas No.011.001/PO AUDIT KIN/SPI/2023/KI/1000000/2023 tanggal 25 April 2023 perihal penugasan audit kinerja pada PT PLN Nusantara Power dan Direktorat/Divisi/Unit/Subholding/Anak Perusahaan/Anak Perusahaan dari Anak Perusahaan serta turunan selanjutnya yang pelaporan keuangannya terkonsolidasi pada PT PLN (Persero) dan tanggal 4 Mei sampai dengan 7 Juni 2023.	1. Based on Task Letter No.004/SPI/2021/KI/1000000/2022 dated December 1, 2022 regarding the assignment of electricity subsidy audit for fiscal year 2022 from December 12, 2022 to February 10, 2023. 2. Based on Task Letter No.011.001/PO AUDIT KIN/SPI/2022/KI/1000000/2023 dated February 03, 2023 regarding the assignment of operational audit of Bakaru GCU from March 1 to April 4, 2023. 3. Based on Assignment Letter No.024.STG/PO AUDIT TIK/SPI/2023/KI/1000000/2023 dated April 25, 2023 regarding the assignment of information technology audits at PT PLN Nusantara Power and Directorates/Divisions/Units/Subholdings/Subsidiaries of Subsidiaries and subsequent derivatives whose financial reporting is consolidated with PT PLN (Persero) from May 4 to June 7, 2023. 4. Based on Assignment Letter No.011.001/PO AUDIT KIN/SPI/2023/KI/1000000/2023 dated April 25, 2023 regarding the assignment of performance audits on PT PLN Nusantara Power and Directorates/Divisions/Units/Subholdings/Subsidiaries of Subsidiaries and subsequent derivatives whose financial reporting is consolidated with PT PLN (Persero) from May 4 to June 7, 2023.

No	Auditor Eksternal External Auditor	Kegiatan Activities	
		5. Berdasarkan Surat Tugas No.028.STU/SPI.01/04/F.000000000/2023 tanggal 19 Juni 2023 perihal penugasan review terhadap implementasi pemanfaatan limbah FABA di PT PLN NP UP Paiton #1, #2 dan #9 dari tanggal 22 Juni sampai dengan 18 Juli 2023. 6. Berdasarkan Surat Tugas No.030.STU/PTU AUDIT KEBERSIHAN.02/F.000000000/2023.REV tanggal 17 Juli 2023 perihal penugasan audit operational dan Termatik E-Proc pada PT PLN Nusantara Power dari tanggal 19 Juli s.d 23 Agustus 2023. 7. Berdasarkan Surat Tugas SPI PLN No.015.TU/SPI.01/04/F.000000000/2023 tanggal 6 November 2023 perihal Review atas Efektivitas Pelaksanaan Koordinasi Kesiapan Pembangkit Dalam Memenuhi Kebutuhan Energi Listrik antara PLN Holding dengan PLN Sub Holding. 8. Berdasarkan Surat Tugas No.043.STU/SPI.01/04/F.000000000/2023 tanggal 6 Desember 2023 perihal penugasan verifikasi subsidi listrik tahun anggaran 2023 dari tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan 9 Februari 2024.	5. Based on Task Letter No.028.STU/SPI.01/04/F.000000000/2023 dated June 19, 2023 regarding the assignment of a review of the implementation of FABA waste utilization at PT PLN NP's Paiton (U) #1, #2 and #9 from June 22 to July 18, 2023. 6. Based on Task Letter No.030.STU/PTU AUDIT KEBERSIHAN.02/F.000000000/2023.REV dated July 17, 2023 regarding the assignment of operational and Thematic E-Proc audits at PT PLN Nusantara Power from July 19 to August 23, 2023. 7. Based on PLN HQ Task Letter No.015.TU/SPI.01/04/F.000000000/2023 dated November 6, 2023 regarding the Review of the Effectiveness of the Implementation of Coordination of Plant Readiness in Meeting Electric Energy Needs between PLN Holding and PLN Sub Holding. 8. Based on Task Letter No.043.STU/SPI.01/04/F.000000000/2023 dated December 6, 2023 regarding the assignment of electricity subsidy verification for fiscal year 2023 from December 11, 2023 to February 9, 2024.
4	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia) PAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (PwC Indonesia)	Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No.040.13/B.000.04/F.000000000/2023 tanggal 10 Juli 2023 perihal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Audit Laporan Keuangan Tahun 2023. 1. Pada tanggal 25 Juli 2023 telah dilakukan kickoff meeting audit dengan PT PLN (Persero) Grup. 2. Pada tanggal 25 Agustus 2023 telah dilaksanakan pembahasan rencana audit PT PLN NP dan Entitas Anak kepada Manajemen dan Komite Audit PT PLN NP.	Based on the Work Start Order (SPMK) No.040.13/B.000.04/F.000000000/2023 dated July 10, 2023 regarding the Work Start Order (SPMK) for Financial Statement Audit Year 2023. 1. On July 25, 2023, an audit kickoff meeting was held with PT PLN (Persero) Group. 2. On August 25, 2023, the audit plan of PT PLN NP and Subsidiaries was discussed with the Management and Audit Committee of PT PLN NP.

Peran Sebagai Konsultan dan Katalis

Role as Consultant and Catalyst

Peran SPI sebagai consultant dan catalyst dilakukan melalui pemberian saran dan masukan kepada Unit Pembangkitan (UP), Unit Pelaksana Pembangkitan dan Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan (UPK/UPDK), Unit Maintenance Repair Overhaul (UMRO), PJB Academy, Divisi/Bidang/Satuan Kerja PLN NP Kantor Pusat dan Anak Perusahaan PT PLN NP untuk optimalisasi pelaksanaan tugas operasional khususnya terkait dengan pencapaian kinerja dan optimalisasi sumber daya. Penugasan konsultansi pada tahun 2023 telah dilakukan pada beberapa klien sebagai berikut.

SIU role as a consultant and catalyst is carried out by providing advice and input to the Generating Unit (GU), Generation Operating Unit and Generating Control Unit (GOU/GCU), Maintenance Repair Overhaul Unit (UMRO), PJB Academy, Divisions' Work Unit of PLN NP Headquarter and Subsidiaries to optimize the implementation of operational tasks, especially related to performance achievement and optimization of resources. Consultancy assignments in 2023 have been carried out on several clients as follows:

Peran sebagai Konsultan dan Katalis

Role as Consultant and Catalyst

No	Klien / Unit Kerja Client / Work Unit	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date
1	Proses Bisnis Beyond Kwh Beyond Kwh Business Process	23 Oktober – 31 Desember 2023 October 23 - December 31, 2023
2	Proses Bisnis Pengembangan Bisnis Pembangkitan Generation Business Development Business Process	23 Oktober – 31 Desember 2023 October 23 - December 31, 2023
3	Proses Bisnis SDM HR Business Processes	23 Oktober – 31 Desember 2023 October 23 - December 31, 2023

No.	Klien / Unit Kerja Client / Work Unit	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date
4	Proses Bisnis Keuangan Finance Business Process	23 Oktober – 31 Desember 2023 October 23 – December 31, 2023
5	Proses Bisnis Kinerja Operasi dan Pemeliharaan Operation and Maintenance Performance Business Process	23 Oktober – 31 Desember 2023 October 23 – December 31, 2023
6	Proses Bisnis Pengadaan Barang & Jasa Goods & Services Procurement Business Process	23 Oktober – 31 Desember 2023 October 23 – December 31, 2023

Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit

Monitoring Follow-up of Audit Results

SPI melakukan monitoring atas tindak lanjut hasil audit dan dilaporkan secara berkala kepada Direksi dan Komite Audit. Rekapitulasi atas pemantauan tindak lanjut hasil audit tahun 2023 adalah sebagai berikut:

IAU monitors the follow-up of audit results and reports regularly to the Board of Directors and Audit Committee. A recapitulation of the monitoring of follow-up on audit results in 2023 is as follows:

Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Audit SPI

Recapitulation of Follow-Up on IAU Audit Results

Tahun Year	Temuan Findings	Closed	In Progress	Persentase Penyelesaian Completion Percentage
2021	213	213	0	100%
2022	240	241	1	99,6%
2023	238	223	15	93,7%

Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Audit Eksternal Tahun 2023

Recapitulation of Follow-up on External Audit Results in 2023

No.	Auditor Eksternal External Auditor	Temuan Findings	Closed	In Progress	Persentase Penyelesaian Completion Percentage
1	BPK RI	-	-	-	-
2	BPKP	-	-	-	-
3	KAP	1	1	0	100%
4	BSA (QSA)	-	-	-	-
5	SPI PLN	19	19	0	100%

Program Pengembangan Auditor Satuan Pengawasan Internal

Internal Audit Unit Auditor Development Program

Satuan Pengawasan Internal terus meningkatkan mutu dan kompetensi auditor dalam pelaksanaan tugas audit melalui program diklat berjenjang untuk memperoleh sertifikat Qualified Internal Auditor (QIA) atau sertifikat kompetensi lainnya, seminar dan lokakarya internal audit dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan pengawasan internal.

The Internal Audit Unit continues to improve the quality and competence of auditors in auditing tasks through the tiered training programs to obtain Qualified Internal Auditor (QIA) certificates or other competency certificates, internal audit seminars and workshops in order to support the effectiveness of the implementation of internal supervision.

Program Pengembangan Auditor Satuan Pengawasan Internal
Internal Audit Unit Auditor Development Program

No.	Pelatihan Training	Jumlah Peserta Number of Participants	Durasi (hari) Duration (days)	Penyelenggara Organizer
	Triwulan I First Quarter			
1	QIA Tingkat Lanjutan Advanced QIA	2	10	YPIA
2	Microsoft Excel Advance	1	3	Multimatics
	Triwulan II Second Quarter			
3	QIA Tingkat Dasar QIA Basic Level	2	10	YPIA
4	CISA (Certified Information System Auditor)	1	5	Multimatics
5	ISO 27001:2013	5	2	Sidware
6	Dikat Audit Kinerja Performance Audit Training	2	4	BPK
	Triwulan III Third Quarter			
7	Audit Management System 2.0	1	1	FIB Academy
8	Certified Fraud Examiner	1	5	ACFE
9	Housekeeping Management 5S	2	2	FIB Academy
10	QIA Dasar Basic QIA	2	12	YPIA
11	QIA Lanjutan Advanced QIA	2	15	YPIA
12	Audit Intern Report	22	2	SAI
	Triwulan IV Fourth Quarter			
13	Group Safety & Health Management System	7	10	FIB Academy
14	Audit Intern Report	16	2	SAI
15	Lead Auditor ISO 9001:2015	1	5	FIB Academy
16	Internal Control Finance Report	3	2	FIB Academy
17	BCM DP	2	4	LSPHB
18	Public Speaking	1	1	FIB Academy
19	Integrated Management System	2	3	FIB Academy
20	Analisa Laporan Keuangan Financial Statement Analysis	2	2	IAI Jawa Timur
21	Lead Auditor ISO 14001	3	5	BSI
22	Group Safety & Health Management System	7	10	FIB Academy

Quality Assurance Review Audit Internal

Quality Assurance Review of Internal Audit

Pelaksanaan *Quality Assurance Review* Internal dilakukan terhadap program jaminan kualitas dan peningkatan fungsi audit internal secara keseluruhan harus dilakukan setiap tahun secara self assessment dan secara eksternal harus dilakukan setiap 5 (lima) tahun oleh assor yang independen sebagaimana diatur dalam International Professional Practices Framework (IPPF) Standar 1300.

Internal Quality Assurance Review is conducted on the quality assurance program and improvement of the internal audit function as a whole must be carried out annually by self-assessment and externally must be carried out every 5 (five) years by an independent assessor as stipulated in the International Professional Practices Framework (IPPF) Standard 1300.

Pada tahun 2023 Quality Assurance Review (QAR) dilakukan oleh pihak eksternal independen. PT BAI ditunjuk dan ditetapkan untuk melaksanakan QAR berdasarkan Surat Perintah Kerja No. 481.SPK/DIS/BGAI/2023 tanggal 11 Oktober 2023. Hasil asesmen QAR eksternal tahun 2023 oleh PT BAI dampaikan bahwa SPI PT PLN NP terhadap Standar dan Kode Etik Audit Internal adalah Sebagian Sesuai (Partially Conforms). Hasil QAR eksternal akan ditindaklanjuti pada tahun 2024 bersamaan dengan pelaksanaan QAR internal. Berikut disampaikan hasil QAR eksternal sebagai berikut.

In 2023, Quality Assurance Review (QAR) was conducted by an independent external party PT BAI was appointed and determined to carry out the QAR based on Work Order No. 481.SPK/DIS/BGAI/2023 dated October 11, 2023. The results of the external QAR assessment in 2023 by PT BAI concluded that the IAU of PT PLN NP against the Internal Audit Standards and Code of Conduct is Partially Conforms. External QAR results will be followed up in 2024 along with the implementation of internal QAR. The following external QAR results are presented as follows:

Evaluasi secara keseluruhan Overall evaluation		2023		
		GC	PC	DNC
Attribute Standards (1000 through 1300)				
1000	Tugas, Kewenangan, dan Tanggung Jawab Fungsi, Authorities and Responsibilities	✓		
1010	Pengakuan atas Pedoman Wajib dalam Piagam Audit Internal Recognition of Mandatory Guidance in the Internal Audit Charter	✓		
1100	Independensi dan Objektivitas Independence and Objectivity	✓		
1110	Independensi Organisasi Organizational Independence	✓		
1111	Berkomunikasi Langsung dengan Dewan Communicate Directly with the Board	✓		
1112	Kepala Internal Audit Melaksanakan Peran di luar Audit Internal Head of Internal Audit Performs a Role Outside of Internal Audit	✓		
1120	Objektivitas Individu Individual Objectivity	✓		
1130	Penurunan Nilai Independensi atau Objektivitas Impairment of Independence or Objectivity	✓		
1200	Kecakapan dan Kesemakan Proficiency and Accuracy	✓		
1210	Kecakapan Proficiency	✓		
1220	Kesemakan Professional Professional Obsrvement	✓		
1230	Pendidikan Profesi Berkelanjutan Continuing Professional Education	✓		
1300	Program Peningkatan dan Penjaminan Kualitas Quality Improvement and Assurance Program	✓		
1310	Kebutuhan Program Peningkatan dan Penjaminan Kualitas Quality Improvement and Assurance Program Needs	✓		
1311	Assesmen Internal Internal Assessment	✓		
1312	Assesmen Eksternal External Assessment	✓		
1320	Pelaporan Program Peningkatan dan Penjaminan Kualitas Quality Improvement and Assurance Program Reporting	✓		
1321	Penggunaan Frase "Telah sesuai dengan Standar Internasional untuk Praktik Audit Internal yang Profesional" Use of the Phrase "According to International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing"	✓		
1322	Pengungkapan Ketidaksesuaian Disclosure of Non-conformities	✓		
Performance Standards (2000 through 2600)				
2000	Pengelolaan Unit Audit Internal Internal Audit Unit Management	✓		
2010	Perencanaan Planning	✓		
2020	Persetujuan dan Komunikasi Consent and Communication	✓		
2030	Pengelolaan Sumber Daya Resource Management	✓		
2040	Kebijakan dan Prosedur Policies and Procedures	✓		

Evaluasi secara keseluruhan Overall evaluation		2023		
		GC	PC	DNC
1050.2	Koordinasi dan Penyandaran Coordination and Deployment		✓	
1060.1	Pelaporan kepada Dewan Reporting to the Board	✓		
1070	Penyedia Jasa Eksternal dan Tanggung Jawab Organisasi untuk Kegiatan Audit Internal External Service Providers and Organizational Responsibility for Internal Audit Activities	✓		
2000	Sifat Pekerjaan Nature of Work		✓	
2110	Tata Kelola Governance		✓	
2120	Manajemen Risiko Risk Management		✓	
2130	Pengendalian Control	✓		
2200	Penentuan Penugasan Assignment Planning	✓		
2201	Pertimbangan Perencanaan Planning Considerations	✓		
2202	Tujuan Penugasan Purpose of Assignment	✓		
2203	Ruang Lingkup Penugasan Scope of Assignment	✓		
2230	Alokasi Sumber Daya Resource Allocation	✓		
2240	Program Kerja Penugasan Assignment Work Program	✓		
2300	Pelaksanaan Penugasan Implementation of Assignment	✓		
2310	Identifikasi Informasi Information identification	✓		
2320	Analisis dan Evaluasi Analysis and Evaluation	✓		
2330	Dokumentasi Informasi Information Documentation	✓		
2340	Pengawasan (Supervisi) Penugasan Supervision Assignment	✓		
2400	Komunikasi Hasil Penugasan Communication of Assignment Results		✓	
2410	Criteria Komunikasi Communication Criteria	✓		
2420	Kualitas Komunikasi Communication Quality		✓	
2421	Kesalahan dan Kelalaian Errors and Omissions	✓		
2430	Penggunaan Frase "Telah Dilaksanakan Sesuai dengan SPPI" Use of the Phrase "Implemented in accordance with SPPI"	✓		
2431	Pengungkapan Ketidaksesuaian dalam Pelaksanaan Penugasan Disclosure of Non-conformities in the implementation of Assignments	✓		
2440	Penyebarluasan Hasil Penugasan Dissemination of Assignment Results	✓		
2450	Opini Keseluruhan Overall Opinion		✓	
2500	Pemantauan Perkembangan Progress Monitoring	✓		
2600	Komunikasi Penerimaan Risiko Risk Acceptance Communication	✓		
	Kode Etik Code of Conduct	✓		

	GC atau "Generally Conforms" diberikan apabila aktivitas internal audit yang ada telah sebagian besar sesuai dengan Conformance with) Standar dan Kode Etik Audit Internal. GC or "Generally Conforms" is given in the event the existing internal audit activity is largely in conformance with the Internal Audit Standards and Code of Conducts.
	PC atau "Partially Conforms" diberikan apabila aktivitas audit memenuhi sebagian dari Standar dan Kode Etik; meskipun demikian, kondisi ini tidak menghalangi aktivitas audit internal untuk tetap melaksanakan tanggung jawabnya dengan cara yang masih dapat diterima. PC or "Partially Conforms" is given when the internal audit activity partially complies with the Standards and Code; however, this does not prevent the internal audit activity from continuing to carry out its responsibilities in an acceptable manner.
	DNC atau "Does Not Conform" diberikan apabila aktivitas internal audit tidak sesuai dengan Standar dan Kode Etik. Ketidaksesuaiannya signifikan sehingga dapat mengganggu atau menghalangi aktivitas audit dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara memadai. DNC or "Does Not Conform" is given when the internal audit activity does not conform to the Standards and Code of Conducts. The non-conformance is significant enough to interfere with or prevent the audit activity from adequately performing its responsibilities.

Evaluasi Kinerja Satuan Pengawasan Intern
Internal Audit Performance Evaluation

Direksi melakukan evaluasi atas penyelenggaraan pengawasan internal secara berkala dalam rapat yang dihadiri SPI. Hasil Quality Assurance Review Internal & Eksternal juga menjadi bagian dari evaluasi atas kecukupan fungsi audit internal yang dijalankan SPI. Direksi juga menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi audit internal secara berkala berdasarkan kriteria yang disusun dalam bentuk Key Performance Indicator (KPI) dan laporan pelaksanaan tugas SPI. Evaluasi kinerja SPI berdasarkan KPI dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun. SPI tahun 2025 telah mencapai target sebesar 101,4% dari KPI yang telah ditetapkan.

The Board of Directors evaluates the implementation of internal control on a regular basis in meetings attended by IAU. The results of the Internal & External Quality Assurance Review are also part of the evaluation of the adequacy of the internal audit function carried out by IAU. The Board of Directors also monitors and evaluates the quality of the internal audit function periodically based on criteria prepared in the form of Key Performance Indicators (KPI) and reports on the implementation of IAU duties. IAU performance based on KPI is evaluated 2 (two) times a year. In 2025, IAU achieved a target of 101.4% of the set KPI.

Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System

Pengendalian internal yang efektif dapat membantu Perusahaan dalam memastikan tercapainya tujuan dan penciptaan nilai dengan keyakinan dan integritas pada semua data dan informasi yang dimiliki untuk menetapkan sasaran dan strategi yang tepat sehingga dapat tumbuh secara berkelanjutan. Perusahaan. Sebagai aspek penting dalam pengamanan dan optimalisasi aset Perusahaan, Sistem Pengendalian Internal harus dijalankan secara integral melibatkan seluruh jenjang organisasi Perusahaan mulai dari pimpinan dan seluruh pegawai. Sistem Pengendalian Internal mencakup serangkaian proses, kebijakan, dan prosedur yang menyeluruh, saling berkaitan dan berkesinambungan pada setiap tindakan dan kegiatan baik individu maupun kelompok.

Effective internal control may assist the Company in ensuring the achievement of goals and creation of value with confidence and integrity in all data and information held to set appropriate targets and strategies so as to be able to grow sustainably. As an important aspect in securing and optimizing the Company assets, Internal Control System is obliged to be implemented in an integral manner involving all organization levels of the Company starting from the leadership and all employees. Internal Control System includes a comprehensive, interrelated and continuous series of processes, policies and procedures for every action and activity, both individual and group.

Penerapan Sistem Pengendalian Internal memerlukan komitmen untuk menjalankan kegiatan operasional yang efektif dan efisien, memastikan kesandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan regulasi serta pengamanan aset Perusahaan. Sehingga dapat mengawal efektivitas pencapaian tujuan pada setiap tahap transformasi Perusahaan guna menghadirkan nilai tambah yang lebih luas bagi seluruh stakeholder.

Implementation of an Internal Control System requires a commitment to carrying out effective and efficient operational activities, ensuring the reliability of financial reporting, compliance with laws and regulations and safeguarding Company assets. Therefore, we can monitor the effectiveness of achieving goals at each stage of the Company transformation in order to provide the more comprehensive added value for all stakeholders.

Kerangka Kerja Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System Framework

Sistem Pengendalian Internal merupakan komponen penting dalam penerapan tata kelola Perusahaan, pengelolaan risiko dan kepatuhan. Perusahaan berupaya mendorong efektivitas Sistem Pengendalian Internal melalui penetapan kebijakan dan penerapan best practices diantaranya merujuk pada Internal Control-Integrated Framework yang diterbitkan COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) dan

Internal Control System is an important component in the implementation of corporate governance, risk management and compliance. The Company seeks to encourage the effectiveness of Internal Control System by establishing policies and implementing best practices, including referring to the Internal Control-Integrated Framework established by COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) and Integrated Risk

Manajemen Risiko Terintegrasi menggunakan Three Lines Model sebagai Kerangka kerja Sistem Pengendalian Internal. Kebijakan Sistem Pengendalian Internal ditetapkan dalam Peraturan Direksi PT PLN Nusantara Power No.0015/I/019/DIR/2023 tentang Kebijakan Strategis Audit Internal dan Peraturan Direksi PT PLN Nusantara Power No.0026/I/019/DIR/2023 tentang Kebijakan Strategis Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi PT PLN Nusantara Power.

Management using the Three Lines Model as the Internal Control System Framework. The Internal Control System Policy is stipulated in PT PLN Nusantara Power Directors Regulation No.0015/I/019/DIR/2023 concerning Internal Audit Strategic Policy and PT PLN Nusantara Power Directors Regulation No.0026/I/019/DIR/2023 concerning Implementation Strategic Policy PT PLN Nusantara Power Integrated Risk Management.

Internal Control-Integrated Framework

Internal Control-Integrated Framework

Internal Control-Integrated Framework diakui sebagai kerangka kerja terkemuka untuk menerapkan, dan melakukan pengendalian internal serta menilai efektivitas pengendalian internal yang mencakup lima komponen pengendalian yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan (monitoring). Perusahaan membangun Sistem Pengendalian Internal yang sejalan dengan prinsip-prinsip Internal Control-Integrated Framework dan memperhatikan lima komponen tersebut dalam penerapannya. Lingkungan pengendalian dibangun dengan membentuk sikap dan kesadaran akan pentingnya pengendalian internal melalui penegakan integritas dan nilai etika, memastikan kecukupan atas kebijakan dan pembentukan struktur organisasi yang efektif. Pengelolaan risiko dilakukan dengan mengidentifikasi, menganalisis & evaluasi, menilai serta menentukan langkah penanggulangan risiko usaha yang relevan. Perusahaan menerapkan dan mengembangkan kegiatan pengendalian internal termasuk pengendalian terhadap teknologi serta menerapkan pengendalian sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan dengan melakukan pembagian tugas dan tanggung jawab untuk kegiatan terkait, penggunaan wewenang secara tepat untuk melakukan suatu kegiatan serta pertisakan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai. Terkait informasi dan komunikasi, Perusahaan memastikan integritas informasi dan data perusahaan serta telah menyediakan media komunikasi baik internal dan eksternal diantaranya melalui Rapat Kerja, Rapat Koordinasi, sosialisasi, email, website Perusahaan, intranet, portal dan media lainnya. Pemantauan dilakukan secara berkala melalui performance check oleh Direktur Pertama Teknis, Audit Internal oleh Satuan Pengawasan Internal dan Fungsi Quality Assurance Audit Internal serta Audit oleh eksternal (BPK, BPKP dan KAP).

The Internal Control-Integrated Framework is recognized as the leading framework for designing, implementing and carrying out internal control as well as assessing the effectiveness of internal control which includes five control components, namely control environment, risk assessment, control activities, information and communication and monitoring. The Company built an Internal Control System that is in line with the principles of the Internal Control-Integrated Framework and pays attention to the five components in its implementation. The control environment is built by forming attitudes and awareness of the importance of internal control through upholding integrity and ethical values, ensuring the adequacy of policies and establishing an effective organizational structure. Risk management is implemented by identifying, analyzing & evaluating, assessing and determining relevant business risk management steps. The Company determines and develops internal control activities, including control over technology and implements control following the established policies and procedures by dividing tasks and responsibilities for related activities, using authority appropriately to carry out an activity and creating and using adequate documents and records. Regarding information and communication, the Company ensures the integrity of its information and data and has provided both internal and external communication media, including through Work Meetings, Coordination Meetings, socialization, email, Company website, intranet, portals and other media. Monitoring is carried out periodically through performance checks by the Director of Technical Development, Internal Audit by the Internal Monitoring Unit and the Internal Audit Quality Assurance Function as well as external audits (BPK, BPKP and KAP).

Three Lines Model

Three Lines Model

Kerangka kerja sistem pengendalian Three Lines Model sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko terintegrasi membagi peran dan tanggung jawab dalam organisasi menjadi 3 (tiga) lapis yang melibatkan :

The Three Lines Model control system framework as part of the implementation of integrated risk management divides roles and responsibilities within the organization into 3 (three) layers which involve:

1. Lini 1 (Risk Owner): melaksanakan Pengelolaan Risiko pada area tanggung jawabnya.
2. Lini 2 (Fungsi Manajemen Risiko/Risk Unit dan fungsi kepatuhan): bersama dengan unit kerja lainnya menjalankan mekanisme 4EF dan mendukung para pihak di Lini 1 dalam melaksanakan dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko yang dijalankan.
3. Lini 3: melaksanakan pemeriksaan dan verifikasi atas keandalan kendali dan tindak lanjut terhadap risiko yang berlangsung di Lini 1.

Pembagian peran, tugas dan tanggung jawab Model Tiga Lini merujuk pada proses bisnis dalam IMS 2.0 yang diterapkan saat ini dan tidak terbatas pada:

1. Lini 1
   a. Melaksanakan sistem pengendalian internal sesuai dengan rancang bangun kriteria yang disusun oleh Lini 2.
   b. Memastikan adanya lingkungan pengendalian (control environment) yang kondusif dalam menjalankan proses bisnis.
   c. Menerapkan kebijakan manajemen risiko, yaitu memastikan identifikasi seluruh risiko, kecukupan mitigasi risiko dan memantau efektivitas tindak lanjutnya.

2. Lini 2
   a. Memastikan efektivitas rancang bangun sistem pengendalian internal yang dilaksanakan oleh Lini 1.
   b. Mereview rancang bangun sistem pengendalian internal secara periodik sesuai kebutuhan mempertimbangkan usulan Lini 1 dan rekomendasi Lini 3.
   c. Melakukan fungsi pembinaan, supervisi, pengendalian, konsultasi, koordinasi dan evaluasi atas proses dan hasil kepada Lini 1.
   d. Memfasilitasi, mengarahkan, dan memantau pelaksanaan manajemen risiko sesuai Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Perusahaan.

3. Lini 3
   a. Melakukan audit berbasis risiko untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal yang dilaksanakan oleh Lini 1 dan Lini 2 telah berjalan efektif.
   b. Memberikan rekomendasi untuk memastikan adanya peningkatan kualitas secara berkelanjutan (continuous improvement) terhadap proses bisnis perusahaan.
   c. Melakukan konsultasi dan pendampingan kepada Lini 1 dan Lini 2 guna penyempurnaan sistem pengendalian internal berdasarkan hasil audit.

1. Line 1 (Risk Owner): Risk Management in their area of responsibility.
2. Line 2 (Risk Management Function/Risk Unit and compliance function): together with other work units implement the 4EF mechanism and support parties in Line 1 in implementing and improving the effectiveness of the risk management carried out.
3. Line 3: inspection and verification of the reliability of control and follow-up on risks taking place in Line 1.

The division of roles, duties and responsibilities of the Three Lines Model refers to the business processes in IMS 2.0 which are currently implemented and are not limited to the following:

1. Line 1
   a. Implementing an internal control system based on the design criteria prepared by Line 2.
   b. Ensuring that there is a control environment that is conducive to carrying out business processes.
   c. Implementing risk management policies, namely ensuring identification of all risks, adequacy of risk mitigation and monitoring the effectiveness of follow-up actions.

2. Line 2
   a. Ensuring the effectiveness of the internal control system design implemented by Line 1.
   b. Reviewing the internal control system design periodically as needed, considering Line 1 proposals and Line 3 recommendations.
   c. Carrying out the functions of coaching, supervision, control, consultation, coordination and evaluation of processes and results to Line 1.
   d. Fostering, directing and monitoring the implementation of risk management in accordance with the Risk Management Implementation Policy in the Company Environment.

3. Line 3
   a. Conducting risk-based audits to ensure that the internal control system implemented by Line 1 and Line 2 runs effectively.
   b. Providing recommendations to ensure continuous quality improvement (continuous improvement) of the Company's business processes.
   c. Providing consultation and assistance to Line 1 and Line 2 to improve the internal control system based on audit results.

Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Operasional
Implementation of the Operational Internal Control System

Perusahaan memastikan efektivitas dan efisiensi kegiatan perpetakan Perusahaan dalam rangka mencapai tujuan, terpercayanya informasi, dan terjaganya aset-aset perusahaan. Pengendalian Internal diimplementasikan sampai dengan level unit dan individu guna memastikan aktivitas operasional yang dijalankan sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawab yang dimiliki. Setiap unit dan individu melakukan aktivitas operasional sesuai dengan prosedur dan program kerja termasuk sasaran kinerja yang telah ditetapkan, menganalisa risiko dan melakukan upaya mitigasi di level unit masing-masing serta memastikan pelaksanaannya berjalan secara optimal berdasarkan ketersediaan sumber daya dan hasil yang penuh.

The Company ensures the effectiveness and efficiency of Company management activities in order to achieve objectives, reliable information, and safeguarding the Company assets. Internal control is implemented at the unit and individual level to ensure that operational activities are carried out according to the scope of duties and responsibilities. Each unit and individual carries out operational activities following the procedures and work programs including the predetermined performance targets, analyzes risks and carries out mitigation efforts at the respective unit level as well as ensures that the implementation runs optimally based on the availability of resources and the results obtained.

Satuan Manajemen Risiko dan Kepatuhan melakukan update profil risiko dan monitoring atas upaya mitigasi yang dijalankan pada aktivitas operasional Perusahaan. SPI melakukan audit pada unit dalam rangka memastikan aktivitas operasional berjalan sesuai strategi atau program kerja dan prosedur yang telah ditetapkan guna memastikan pencapaian tujuan Perusahaan. Direksi mengembali laporan pelaksanaan tugas dari setiap unit termasuk Satuan Manajemen Risiko dan Kepatuhan serta Satuan Pengawasan Internal melalui rapat dan laporan tertulis. Selain itu, Satuan Manajemen Risiko dan Kepatuhan serta SPI secara khusus menyampaikan laporan berkala kepada Dewan Komisaris serta berkoordinasi dengan Komite Audit dan Komite Manajemen risiko. Berdasarkan laporan yang diterima dari setiap unit, Direksi memberikan laporan tertulis melalui laporan manajemen dan memantau kinerja operasional melalui rapat Direksi dan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris juga secara rutin melakukan kunjungan ke unit-unit bisnis untuk memastikan kegiatan operasional berjalan dengan baik.

The Risk Management and Compliance Unit updates risk profiles and monitors mitigation efforts carried out in the Company's operational activities. IAU audits the units in order to ensure that operational activities are running according to the established strategy or work program and procedures to ensure the achievement of Company goals. The Board of Directors obtains reports on the implementation of duties from each unit, including the Risk Management and Compliance Unit and the Internal Monitoring Unit, through meetings and written reports. Furthermore, the Risk Management and Compliance Unit and IAU specifically submit the periodic reports to the Board of Commissioners and coordinate with the Audit Committee and Risk Management Committee. Based on reports received from each unit, the Board of Directors provides written reports through management reports and discusses the operational performance through Board of Directors and Board of Commissioners meetings. The Board of Commissioners also regularly visits business units to ensure operational activities are running well.

Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Keuangan
Implementation of the Internal Financial Control System

Internal Controls Over Financial Reporting (ICoFR) merupakan salah satu bentuk pengendalian internal atas aspek keuangan yang pelaksanaannya berada di bawah pengawasan pimpinan Perusahaan serta unit kerja terkait. Pengendalian internal atas aspek keuangan dilakukan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan atas pengendalian internal dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai terhadap kewajaran pelaporan keuangan, terpercayanya informasi, dan terjaganya aset-aset perusahaan. Implementasi dan pengembangan ICoFR memiliki 3 (tiga) tahapan proses yang terdiri dari penyusunan pedoman dan rancangan pengendalian, pengujian dan pemutakhiran rancangan pengendalian serta pelaksanaan penyusunan pernyataan berjenjang. Laporan ICoFR merupakan salah satu bentuk komitmen manajemen untuk memastikan integritas penyajian laporan keuangan Perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai auditor eksternal yang ditunjuk oleh PT PLN (Persero).

Internal Controls Over Financial Reporting (ICoFR) is actualization of internal control over financial aspects which the implementation is under the supervision of the Company leadership and related work units. The Company carries out internal control over financial aspects to ensure the effectiveness of the implementation of internal control in order to provide adequate confidence to the reliability of financial reporting, the trustworthiness of information, and the safeguarding of the Company assets. The implementation and development of ICoFR has a 3 (three) stage process consisting of preparing guidelines and control designs, testing and updating control designs as well as implementing the preparation of the tiered statements. The ICoFR report is the management commitment to ensuring the integrity of the presentation of the Company's financial reports prepared by the Public Accounting Firm (PAF) as an external auditor appointed by PT PLN (Persero).

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan
Compliance with Laws and Regulations

Direksi bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap hukum, peraturan dan kontrak yang berlaku bagi Perusahaan yang dalam penerapannya didelegasikan dan dijalankan oleh unit-unit terkait. Sebagai upaya dalam memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material, maka Perusahaan menunjuk auditor eksternal untuk melakukan pengujian terhadap kepatuhan Perusahaan atas peraturan-peraturan terkait hukum peraturan dan kontrak. Hasil pengujian oleh auditor eksternal menunjukan bahwa Perusahaan sepanjang tahun buku 2023 mematuhi dalam semua hal yang material.

The Board of Directors is responsible for the compliance with laws, regulations and contracts applicable to the Company, the implementation of which is delegated and carried out by the relevant units. In an effort to obtain adequate assurance that the financial statements are free from material misstatement, the Company appoints an external auditor to audit of the Company compliance with certain articles of regulatory and contractual law. Test results by external auditors show that the Company complied in all material respects throughout the 2023 financial year.

Kecukupan Sistem Pengendalian Internal
Adequacy of the Internal Control System

Kecukupan sistem pengendalian internal merupakan aspek penting dalam mendorong efektivitas penerapannya. Perusahaan secara berkala melakukan evaluasi atas efektivitas sistem pengendalian internal dengan metode pengumpulan dan review dokumen, survei persepsi, interview dan observasi serta review analitis yang dilakukan oleh auditor internal maupun eksternal sesuai prosedur audit yang berlaku untuk memastikan kecukupan atas penerapannya. Audit pada tingkatan aktivitas dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI) atas objek yang dilampirkan dalam Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) serta objek lain sebagai penugasan khusus dari pimpinan Perusahaan. Sedangkan secara entitas, audit dilakukan oleh Auditor Eksternal, yakni Kantor Akuntan Publik (KAP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Direksi secara berkala setiap tahun membuat pernyataan bahwa Direksi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dan penerapannya di dalam Perusahaan.

Sufficient internal control system is an important aspect in encouraging the effectiveness of its implementation. The Company periodically evaluates the effectiveness of its internal control system using document collection and review methods, perception surveys, interviews and observations as well as analytical review carried out by internal and external auditors based on applicable audit procedures to ensure the adequacy of the implementation. Audits at the activity level are carried out by the Internal Audit Unit (IAU) on objects specified in the Annual Audit Work Program (PKAT) as well as other objects as special assignments from the Company's leadership. Meanwhile, as an entity, audits are carried out by External Auditors, namely the Public Accounting Firm (PAF), the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) and the Financial Audit Agency (BPK). The Board of Directors periodically makes a statement every year that the Board of Directors is responsible for the internal control system and its implementation within the Company.

Evaluasi penerapan sistem pengendalian internal Perusahaan juga dilakukan dengan assessment terhadap seluruh elemen pengendalian berdasarkan berdasarkan prinsip-prinsip Internal Control-Integrated Framework (COSO Framework tahun 2013). Assessment pengendalian internal tahun 2023 dilakukan secara korporat dengan mengambil sampling pada 33 Unit dan Divisi/Bidang Kantor Pusat. Evaluasi dilakukan dengan survei persepsi melalui kuesioner dan wawancara yang hasilnya menunjukan bahwa pengendalian internal Perusahaan secara umum sudah ada (present) dan berfungsi (function). Assessment pengendalian internal juga menghasilkan beberapa rekomendasi atas prinsip-prinsip yang terkait dengan elemen pengendalian internal untuk mendorong efektivitas sistem pengendalian internal. Selain itu, Hasil audit berdasarkan Laporan Auditor Independen atas kepatuhan pengendalian internal tahun buku 2023 menunjukan bahwa Perusahaan mematuhi, dalam semua hal yang material. Atas hasil tersebut Direksi dan Dewan Komisaris menyatakan bahwa sistem pengendalian internal Perusahaan dipandang cukup memadai.

The implementation of the Company's internal control system is also evaluated by assessing all control elements based on the principles of the Internal Control-Integrated Framework (COSO Framework 2013). The 2023 internal control assessment was carried out corporately by taking sampling from 33 Units and Divisions/Fields of the Headquarter. The evaluation was carried out using a perception survey through questionnaires and interviews, the results of which showed that the Company's internal controls generally existed and were functioning. The internal control assessment also generated several recommendations on principles related to internal control elements to encourage the effectiveness of the internal control system. In addition, the audit results based on the Independent Auditor's Report on internal control compliance for the 2023 financial year show that the Company complies, in all material respects. Based on these results, the Board of Directors and Board of Commissioners stated that the Company's internal control system is deemed adequate.

Manajemen Risiko
Risk Management

Ketidakpastian yang berkaitan dengan aktivitas usaha merupakan faktor penting dalam mengadakan Perusahaan berkemampuan dalam bertahan dan bertambah (corporate resilience) untuk mencapai penciptaan nilai yang berkelanjutan. Manajemen risiko merupakan serangkaian prosedur dan metodologi terstruktur dalam mengatasi ketidakpastian berkaitan dengan ancaman yang dapat mengganggu kinerja dan keberlanjutan Perusahaan. Manajemen risiko meliputi kegiatan mengidentifikasi, mengatur, memperlakukan, dan memantau risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Perusahaan sebagai bagian dari penerapan Sistem Pengendalian Intern dan Tata Kelola Terintegrasi.

Managing uncertainty related to threats on business activities is an important factor in making the Company capable of surviving and growing (corporate resilience) to achieve the sustainable value creation. Risk management is a series of the structured procedures and methodologies for managing uncertainty related to threats that may disrupt the Company performance and sustainability. Risk management includes activities to identify, measure, treat and monitor risks arising from all of the Company's business activities as part of the implementation of the Internal Control System and Integrated Governance.

Perusahaan membentuk manajemen risiko untuk dapat mengidentifikasi peluang dan ancaman yang mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan secara efektif serta mengalokasikan dan menggunakan sumber daya untuk mengelola risiko yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Perusahaan demi memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Perusahaan secara berkala meninjau seluruh risiko untuk menghasilkan risiko utama sesuai dengan risk appetite dalam menyusun profil risiko berdasarkan sasaran tahunan dan strategic objective jangka panjang Perusahaan. Profil risiko dikaji secara komprehensif oleh Direksi sebagai risk owner utama dan dikomunikasikan kepada Dewan Komisaris.

The Company designs risk management to be able to identify opportunities and threats that affect the Company's business activities effectively as well as allocates and uses the resources to manage the risks faced in order to support the achievement of the Company's objectives in order to provide added value for the stakeholders, both short and long term. The Company periodically reviews all risks to produce main risks following the risk appetite in preparing a risk profile based on annual targets and long-term strategic objectives of the Company. The Board of Directors as the main risk owner comprehensively reviews the risk profile and communicates it to the Board of Commissioners.

Kebijakan Manajemen Risiko
Risk Management Policy

Manajemen risiko PLN NP telah dilengkapi dengan perangkat kebijakan yang merujuk pada peraturan perundang-undangan diantaranya Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan best practices seperti standar ISO 31000:2018 (Risk management - Guidelines). Perangkat kebijakan Manajemen Risiko PLN NP antara lain Peraturan Direksi No. 0016/P/019/DIR/2023 tentang Kebijakan Strategis Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi PT PLN Nusantara Power tanggal 1 Desember 2023; Statement of Corporate Intent No. 010/020/DIR/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi PT Pembangkitan Jawa-Bali; Peraturan Direksi No. 0030/P/019/DIR/2021 tentang Penerapan Governance, Risk Management and Compliance (GRC) di Lingkungan PT PJB dan Keputusan Direksi No. 0035/K/020/DIR/2021 tentang penetapan Risk Appetite Statement (RAS) untuk mendukung implementasi manajemen risiko. PLN NP secara berkala meninjau dan apabila dipandang perlu melakukan penyesuaian atas perangkat Kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, best practices serta skala organisasi dan bisnis yang dijalankan Perusahaan.

PLN NP risk management has been equipped with policy tools that refer to statutory regulations including Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises and best practices such as standards ISO 31000:2018 (Risk management - Guidelines). PLN NP Risk Management Policy Toolkit includes the Directors Regulation No. 0016/P/019/DIR/2023 concerning Strategic Policy for Implementing Integrated Risk Management of PT PLN Nusantara Power dated December 1, 2023; Statement by Corporate Intent No. 010/020/DIR/2021 concerning the Implementation of Integrated Risk Management at PT Pembangkitan Jawa-Bali; Directors' Regulation No. 0030/P/019/DIR/2021 concerning the Implementation of Governance, Risk Management and Compliance (GRC) within PT PJB and Directors' Decree No. 0035/K/020/DIR/2021 concerning the determination of the Risk Appetite Statement (RAS) to support the implementation of risk management. PLN NP periodically reviews and if deemed necessary, updates the Company's Risk Management Policy tools based on the statutory regulations, best practices and the scale of the organization and business run by the Company.

Sistem Manajemen Risiko

Risk Management System

Sistem Manajemen Risiko Perusahaan meliputi pengurusan aktif oleh Direksi dan pengawasan oleh Dewan Komisaris, kecukupan kebijakan dan standar prosedur Manajemen Risiko, penerapan strategi Risiko serta kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang didukung dengan sistem informasi Manajemen Risiko. Kerangka kerja pengelolaan risiko PLN NP menyadari mekanisme yang mencerminkan siklus Plan, Do, Check, Act (PDCA) yang bersifat dinamis, terstruktur, terintegrasi dengan perbaikan berkesinambungan. Kerangka Kerja Manajemen Risiko menjadi acuan dalam menjalankan pengelolaan risiko yang terintegrasi melalui Three Lines Model sebagai bagian dari penerapan sistem pengendalian internal dan tata kelola terintegrasi sehingga Perusahaan mampu menerapkan manajemen risiko secara efektif.

System includes active management by the Board of Directors and supervision by the Board of Commissioners, adequacy of Risk Management policies and standard procedures, determination of Risk strategies and adequacy of identification, measurement, treatment, recording, monitoring, evaluation and reporting processes supported by the Risk Management information system. The PLN NP risk management framework is a mechanism that reflects the Plan, Do, Check, Act (PDCA) cycle which is dynamic, structured, integrated with continuous improvement. The Risk Management Framework is a reference in carrying out integrated risk management through the Three Lines Model as part of implementing an integrated internal control and governance system so that the Company is able to implement risk management effectively.

Kerangka Kerja Manajemen Risiko
Risk Management Framework

Proses manajemen risiko dilakukan oleh Risk Owner yang dibantu oleh Risk Officer masing-masing Unit Kerja yang difasilitasi oleh Satuan Legal, Risk, and Compliance. Identifikasi dan penilaian risiko di lingkungan Perusahaan menggunakan pendekatan Enterprise Risk Management berbasis ISO 31000 : 2018. Pengelolaan risiko aset pembangkit dilakukan selaras dengan sistem manajemen aset PAS 55 – ISO 55000. Beberapa teknik assessment risiko untuk aset pembangkit, seperti Risk Evaluation and Prioritization (REAP), Failure Mode Effect Analysis (FMEA), Root Cause Failure Analysis (RCFA), dan Life Cycle Cost (LCC) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan investasi.

The Risk Owner carries out the risk management process assisted by the Risk Officer of each Work Unit which is facilitated by the Legal, Risk and Compliance Unit. Risk identification and assessment within the Company uses an Enterprise Risk Management approach based on ISO 31000: 2018. Risk management of power plant assets is in line with the PAS 55 – ISO 55000 asset management system. Several risk assessment techniques for power plant assets such as Risk Evaluation and Prioritization (REAP), Failure Mode Effect Analysis (FMEA), Root Cause Failure Analysis (RCFA), and Life Cycle Cost (LCC) are used as considerations in investments.

Sistem Informasi Manajemen Risiko
Risk Management Information System

Perusahaan mengembangkan sistem informasi dalam mendukung sistem manajemen risiko berupa aplikasi manajemen risiko terintegrasi yang diberi nama I-CARE (Integrated – Compliance, Risk Management, Effective and Efficient Operation). I-CARE dapat diakses oleh seluruh unit dan bidang di kantor pusat yang dirancang untuk dapat mempermudah pengoperasian, pengentrian dan pengolahan data sehingga proses pengambilan keputusan didukung dengan data-data yang akurat dan telah digunakan secara konsisten dalam melakukan identifikasi, analisa dan evaluasi risiko di lingkungan Perusahaan. Adapun konten pada I-CARE yaitu risiko-risiko yang ada di Perusahaan baik Kantor Pusat maupun Unit Kerja yang terdiri dari Penetapan Scope, Identifikasi Risiko sampai dengan penentuan Program Mitigasi Risiko (Action Plan), Loss Event, Risk and Underwriter Survey, Risk Evaluation and Prioritization (REAP), Business Continuity Management System (BCMS). Selain itu, I-CARE juga mengimplementasikan tools untuk pengukuran efektivitas program mitigasi risiko, sehingga apabila diperlukan, bidang sebagai risk owner bisa melakukan penyesuaian program mitigasi apabila dinilai program tersebut kurang efektif. Hal tersebut diharapkan dapat mendorong tercapainya sasaran Perusahaan.

The Company developed an information system to support the risk management system in the form of an integrated risk management application called I-CARE (Integrated – Compliance, Risk Management, Effective and Efficient Operation). I-CARE can be accessed by all units and fields at the Headquarter and is designed to facilitate operation, retrieval and processing of data so that the decision-making process is supported by accurate data and has been used consistently in identifying, analyzing and evaluating risks within the Company. I-CARE content is the risks that exist in the Company, both Headquarter and Work Units, consisting of Scope Determination, Risk Identification to determine the Risk Mitigation Program (Action Plan), Loss Event, Risk and Underwriter Survey, Risk Evaluation and Prioritization (REAP), Business Continuity Management System (BCMS). Moreover, I-CARE also implements tools to measure the effectiveness of risk mitigation programs. If necessary, the sector as risk owner can make adjustments to the mitigation program if it is deemed that the program is less effective. This is expected to encourage targets achievement of the Company.

Struktur dan Tanggung Jawab Manajemen Risiko
Risk Management Structure and Responsibilities

Manajemen Risiko PLN NP melibatkan setiap jenjang organisasi sampai ke level individu dalam Perusahaan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing sebagai suatu mekanisme terintegrasi yang berkesinambungan. Tanggung jawab pengelola risiko Perusahaan mengacu pada Peraturan Direksi No 0026/010/DIR/2023 tentang Kebijakan Strategis Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi PT PLN Nusantara Power sebagai berikut:

PLN NP Risk Management involves every level of the organization down to the individual level within the Company according to their respective responsibilities as a sustainable integrated mechanism. The responsibility of the Company's risk management refers to Directors' Regulation No. 0026/010/DIR/2023 concerning Strategic Policy for Implementing Integrated Risk Management of PT PLN Nusantara Power as follows.

Struktur dan Tanggung Jawab dalam Manajemen Risiko
Structure and Responsibilities in Risk Management

No	Pengelola Manager	Tugas & Tanggung Jawab Assignment and Responsibilities	
1.	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Peran dan kewenangan Dewan Komisaris sesuai dengan board manual dan anggaran dasar Perusahaan.	The Board of Commissioner's role and authority are according to the board manual and the Company's articles of association.

No	Pengelola Manager	Tugas & Tanggung Jawab Assignment and Responsibilities
1.	Direksi Directors	• Memegang mandat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk melaksanakan pengelolaan perusahaan, termasuk di dalamnya melaksanakan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi maupun praktik pengelolaan Risiko perusahaan, mulai dari perencanaan strategis hingga pada eksekusinya dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran perusahaan. • Menetapkan kebijakan dan arahan strategis penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi. • Memimpin penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dan memberikan komitmen untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi serta menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam pengelolaan Risiko perusahaan di direktoratnya masing-masing. • Membangun dan memperkuat budaya Risiko perusahaan. • Menetapkan, mengelola, dan memantau Risiko Utama yang dihadapi perusahaan dalam pencapaian sasaran strategis perusahaan. • Mengambil keputusan pengelolaan Risiko sesuai batasan kewenangan yang berlaku di lingkungan perusahaan.	– General Meeting of Shareholders (GMS) mandates the holder to carry out Company management, including implementing Integrated Risk Management and Company Risk management practices, starting from strategic planning to its execution in order to achieve the Company targets. – Establishing policies and strategic direction for the implementation of Integrated Risk Management. – Leading the implementation of Integrated Risk Management and being committed to supporting the implementation of Integrated Risk Management and providing the resources needed to manage the Company risk in their respective directorates. – Building and strengthening the Company's Risk culture. – Determining, managing and monitoring the main risks faced by the Company in achieving the Company's strategic targets. – Making risk management decisions following the authority limits that apply within the Company.
2.	Satuan Kerja Manajemen Risiko Risk Management Work Unit	• Sebagai penanggung jawab penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi perusahaan sesuai dengan desain kerangka kerja dan tata kelola Risiko, beserta upaya pengembangannya. • Sebagai pendamping dan *Checker/Reviewer* dan *Approval* sesuai mekanisme pendelegasian wewenang terhadap penilaian Risiko maupun tindak lanjut Risiko perusahaan. • Sebagai pemberi masukan terhadap penilaian Risiko maupun tindak lanjut Risiko yang dijalankan oleh *Risk Leader* dan *Risk Champion* di Satuan Kerja (SK). • Mengusulkan pembentukan entitas kerja untuk membantu Direksi dalam hal mengkoordinasikan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi perusahaan untuk disetujui Direktur Pembina Manajemen Risiko (DPMR). • Mengusulkan rumusan arahan strategis penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi perusahaan maupun tata kelola Risiko perusahaan untuk disetujui Direktur Pembina Manajemen Risiko (DPMR). • Mengusulkan kebijakan dan strategi penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, termasuk di dalamnya kriteria Risiko perusahaan untuk disetujui Direktur Pembina Manajemen Risiko (DPMR). • Menyediakan rumusan target kinerja efektivitas penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi maupun praktik pengelolaan Risiko yang dijalankan perusahaan. • Melaksanakan evaluasi terhadap capaian kinerja pengelolaan Risiko secara berkala, serta pengembangan berkelanjutan Manajemen Risiko Terintegrasi. – Meminta informasi dari para pihak internal Perusahaan untuk kebutuhan penyusunan kajian Risiko, penurunan laporan Profil Risiko, dan efektivitas pengelolaan Risiko Perusahaan untuk dilaporkan kepada Direktur Pembina Manajemen Risiko (DPMR) serta informasi lain yang dibutuhkan Direktur Pembina Manajemen Risiko (DPMR) dalam menjalankan perannya.	– As the person in charge of implementing the Company's Integrated Risk Management in accordance with the risk framework and governance design, along with its development efforts. – As a companion and Checker/Reviewer and Approval according to the mechanism for delegation of authority regarding risk assessment and the Company risk follow-up. – As a provider of input on Risk assessments and Risk follow-up carried out by Risk Leaders and Risk Champions in Work Units. – Proposing the formation of a work entity to assist the Board of Directors in coordinating the implementation of the Company's Integrated Risk Management to be approved by the Director of Risk Management Development (DPMR). – Proposing the formulation of strategic directions for implementing the Company's Integrated Risk Management and the Company Risk governance for approval by the Director of Risk Management Development (DPMR). – Proposing policies and strategies for implementing Integrated Risk Management, including the Company risk criteria for approval by the Director of Risk Management Development (DPMR). – Providing the formulation of performance targets for the effectiveness of implementing Integrated Risk Management and risk management practices carried out by the Company. – Regularly evaluating the Risk management performance achievements as well as ongoing development of Integrated Risk Management. – Requesting information from internal parties in the Company for the need to prepare Risk studies, formulating the Risk Profile reports, and the effectiveness of Company Risk management to be reported to the Director of Risk Management Development (DPMR) as well as other information required by the Director of Risk Management Development (DPMR) in carrying out their role.

No	Pengelola Manager	Tugas & Tanggung Jawab Assignment and Responsibilities	
		• Merancang program peningkatan kapabilitas internal di bidang Manajemen Risiko, termasuk di dalamnya kesadaran dan budaya Risiko dalam mendukung penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, serta tingkat maturitas penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, sesuai kebutuhan perusahaan bersama fungsi kerja terkait.	• Designing a program to increase internal capabilities in the field of Risk Management, including Risk awareness and culture in implementing Integrated Risk Management, as well as the level of maturity in implementing Integrated Risk Management, according to the needs of the Company together with related work functions.
4.	Satuan Pengawas Internal Internal Supervisory Unit	• Berperan sebagai entitas kerja yang dibentuk Direksi untuk membantu direksi melaksanakan peranannya sesuai mandat yang diberikan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), khususnya dalam melaksanakan fungsi audit internal Perusahaan. • Sebagai reviewer sekaligus independent assurance provider terhadap pelaksanaan penerapan manajemen Risiko terintegrasi dan praktik pengelolaan Risiko perusahaan. • Mengelola audit universe dalam rangka penyusunan rencana audit internal tahunan. • Meminta informasi dari Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Fungsi Manajemen Risiko di Satuan Kerja/Unit serta auditee dalam rangka melaksanakan peranannya. • Melaksanakan fungsi audit internal, menyusunan laporan hasil audit internal, dan melaporkannya kepada Direktur Utama dan komite audit. • Meminta auditee untuk melaksanakan usulan tindakan perbaikan atau rekomendasi pengembangan berdasarkan hasil audit.	• Acting as a work entity formed by the Board of Directors to assist the Board of Directors in performing roles following mandate assigned by the General Meeting of Shareholders (GMS), especially in carrying out the Company's internal audit function. • As a reviewer and independent assurance provider regarding the implementation of integrated risk management and the Company risk management practices. • Managing the audit universe in the context of formulating the annual internal audit plan. • Requesting information from the Risk Management Work Unit and the Risk Management Function in the Work Unit/Unit as well as auditees in order to carry out their role. • Carrying out the internal audit function, formulate internal audit results reports, and report them to the President Director and audit committee. • Requesting the auditee to implement proposed corrective actions or development recommendations based on the audit results.
5.	Risk Leader	• Sebagai reviewer dan approver atas: - Penilaian dan tindak lanjut kajian Risiko dalam proses pengambilan keputusan kritikal; - Penilaian dan tindak lanjut Profil Risiko pada unit kerjanya; - Penilaian dan tindak lanjut Risiko Operasional pada satuan kerjanya; dan - Pelaporan Risiko kepada atasan dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. • Meminta laporan penilaian Risiko dan tindak lanjut Risiko, kasus/informasi terkait lainnya dari Risk Champion pada unit kerjanya. • Risk Leader Satuan Kerja/Unit dapat meminta pendampingan dari Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Fungsi Manajemen Risiko Satuan Kerja/Unit dalam melaksanakan akuntabilitasnya. • Mengambil keputusan pengelolaan Risiko sesuai dengan batasan kewenangan yang berlaku.	• As a reviewer and approver for the following: - Risk Assessment and follow-up in the critical decision-making process; - Risk Profile assessment and follow-up in the work unit; - Assessment and follow-up of Operational Risk in work units; And - Risk reporting to superiors and the Risk Management Work Unit. • Requesting risk assessment reports and risk follow-up, along with other related information from the Risk Champion in the work unit. • The Risk Leader of the Work Unit/Unit can request assistance from the Risk Management Work Unit and the Risk Management Function of the Work Unit/Unit in carrying out its accountability. • Making risk management decisions based on the applicable authority limits.
6.	Risk Champion	• Berperan sebagai Maker atas: - penilaian dan tindak lanjut kajian Risiko dalam proses pengambilan keputusan kritikal; - penilaian dan tindak lanjut profil Risiko pada unit kerjanya; dan - pelaporan Risiko kepada Risk Leader. • Meminta informasi dari unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka menjalankan peranannya. • Melaksanakan penilaian Risiko dan tindak lanjut Risiko serta menyusunan laporannya kepada Risk Leader. • Risk Champion Satuan Kerja/Unit dapat meminta pendampingan dari Satuan Kerja Manajemen Risiko atau Fungsi Manajemen Risiko Satuan Kerja/Unit dalam melaksanakan akuntabilitasnya. • Mengambil keputusan pengelolaan Risiko pada unit kerjanya sesuai dengan batasan kewenangan yang berlaku.	• Serving as Maker for the following: - Risk assessment and follow-up in the critical decision-making process; - Assessment and follow-up of Risk profiles in work units; And - Risk reporting to the Risk Leader. • Requesting information from the work unit for which he is responsible in order to carry out his role. • Carrying out risk assessments and risk follow-up and formulating reports to the Risk Leader. • Work Unit/Unit Risk Champions may request assistance from the Risk Management Work Unit or Work Unit/Unit Risk Management Function in carrying out their accountability. • Making risk management decisions in the work unit based on the applicable authority limits.

No	Pengelola Manager	Tugas & Tanggung Jawab Assignment and Responsibilities	
7.	Seluruh Karyawan All Employees	• Mempelajari dan memahami kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi, serta mengimplementasikan proses Manajemen Risiko Terintegrasi dalam melakukan pekerjaan. • Mendokumentasikan proses bisnis yang ada di lelang lingkup kewenangannya, permasalahan yang telah terjadi, dan Risiko yang berpotensi terjadi beserta pengendaliannya, serta melakukan Control Self Assessment (CSA) secara periodik sesuai ketentuan. • Memberikan masukan untuk perbaikan kebijakan dan implementasi Manajemen Risiko Terintegrasi. • Menginformasikan Risiko yang terkait dengan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada atasannya.	- Studying and understanding the Integrated Risk Management policy, as well as implementing the Integrated Risk Management process in working. - Documenting the existing business processes in the field/scope of authority, the occurred issues, and risks that have the potential to occur along with their controls, as well as conducting periodic Control Self Assessments (CSA) according to provisions. - Providing input for improving policies and implementation of Integrated Risk Management. - Informing his superiors of risks related to activities for which he is responsible.

Fungsi Pelaksana Program Manajemen Risiko

Risk Management Program Implementation Function

Perusahaan membentuk Satuan Legal, Risk, and Compliance yang memiliki mandat sebagai fungsi pelaksana program manajemen risiko yang mengawal seluruh proses manajemen risiko di PLN NP. Satuan Legal, Risk, and Compliance melalui Bidang Risiko berkoordinasi dengan setiap jenjang organisasi mulai dari unit kerja sebagai pemilik risiko sampai dengan Dewan Komisaris termasuk Komite sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan serta berkoordinasi dengan Divisi Manajemen Risiko Strategis PT PLN (Persero) sebagai Divisi Pairing untuk implementasi Manajemen Risiko dalam pembuatan keputusan di setiap proses bisnis kritikal Perusahaan. Satuan Legal, Risk, and Compliance dibentuk berdasarkan Peraturan Direksi No. 004G1/10/W/GRI/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Pembangkitan Jawa-Bali. Satuan Legal, Risk, and Compliance secara struktural melaporkan pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

The Company established a Legal, Risk and Compliance Unit which has the mandate to function as a risk management program implementer that oversees the entire risk management process at PLN NP. The Legal, Risk and Compliance Unit through the Risk Division coordinates with every level of the organization starting from the work unit as risk owner up to the Board of Commissioners including the Committee to perform the supervisory function and coordinates with the Strategic Risk Management Division of PT PLN (Persero) as the Pairing Division for Management Implementation Risks in decision making in every critical business process of the Company. The Legal, Risk and Compliance Unit is established based on Directors Regulation No. 004G1/10/W/GRI/2022 concerning the Organization and Work Procedures of PT Pembangkitan Jawa-Bali. The Legal, Risk and Compliance Unit structurally reports on the implementation of its duties and is directly responsible to the President Director.

Vice President Corporate Law And Contract

Vice President Regulation, Litigation, And Permission

Vice President Risk Management And Compliance

Bidang Risiko telah didukung oleh tenaga profesional yang memiliki keahlian dan kompetensi terkait manajemen risiko dengan sertifikasi profesi sebagai berikut:

The Risk Sector is supported by professional staff who have expertise and competence related to risk management with the following professional certifications:

Sertifikasi Profesi Personel Bidang Risk Management and Compliance
Professional Certification for Risk Management and Compliance Personnel

Jenis Sertifikasi Profesi Types of Professional Certification	Jumlah Amount
Enterprise Risk Management Associate Professional (ERMAP)	4
Certified Risk Management Professional (CRMP)	5
Certified Risk Management Officer (CRMO)	3
Qualified Risk Management Analyst (QRMA)	7
Qualified Risk Management Officer (QRMO)	5
Business Continuity Management Certified Professional (BCMCP)	6
Certified Risk Governance Professional (CRGP)	1

Profil dan Mitigasi Risiko
Risk Profiling and Mitigation

Profil Risiko Korporat merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Perusahaan melakukan review kembali seluruh risiko utama yang tercantum dalam Profil Risiko tahun 2022. Beberapa risiko yang telah menurun tingkat risikonya dan sesuai dengan risk appetite, namun demikian masih ada beberapa risiko yang belum sesuai dengan risk appetite sehingga muncul kembali dalam Profil Risiko tahun 2023. Profil Risiko Korporat menunjukan terdapat 15 risiko utama yang teridentifikasi dapat menghambat pencapaian sasaran di tahun 2023. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan dengan Profil Risiko tahun 2022 yang berjumlah 13, hal ini dikarenakan ada penambahan dan pembatalan risiko dari risiko tahun 2023. Perusahaan telah menyusun upaya pengelolaan risiko korporat tahun 2023 sebagai langkah mitigasi sebagai berikut:

The Corporate Risk Profile is an inseparable part of the Company's Annual Budget and Operational Plan (ABOP). The Company reviewed all the main risks depicted in the 2022 Risk Profile. Some risks decreased in risk level and are in line with the risk appetite, however there are still some risks that are not in line with the risk appetite so they reappeared in the 2023 Risk Profile. Risk Profile Corporate shows that there are 15 main risks identified that could hinder targets achievement in 2023. This number is more than the 2022 Risk Profile which was only 13, due to a breakdown and breakdown of the 2023 risks. The Company developed corporate risk management efforts in 2023 as the following mitigation measures:

Profil dan Mitigasi Risiko Tahun 2023
Risk Profile and Mitigation in 2023

No	Risiko dan Mitigasi Risks and Mitigation	
1	**Risiko :** Tertunda pengelolaan unit-unit yang dialihkan pasca subholding	**Risks:** Failure to manage units transferred after subholding
	Mitigasi : **Untuk Pembangkit yang dialihkan** 1. Review dan penajaman PQR RLA untuk diterapkan di unit-unit PLN Subholding 2. Pembuatan task measurement online (Roll Out SOKRET 2023) 3. Mapping peralatan dan improvement teknologi/digitalisasi peralatan safety pembangkitan dari dokumen yang tersedia dan melaksanakan kunjungan lapangan 4. Deployment Pedoman Acuan Engineering dan Standard International ke unit-unit pembangkit 5. Melakukan update standard Job PM, PDM LDI peralatan pembangkit	**Mitigation:** **For transferred power plants** 1. Reviewing and sharpening PQR RLA to be implemented in PLN Sub Holding units 2. Making online task measurements (Roll Out SOKRET 2023) 3. Equipment mapping and technology improvements/digitalization of power plant safety equipment from the available documents and carrying out field visits 4. Deployment of Engineering Reference Guidelines and International Standards to UU 5. Updating the job standards for PM, PDM LDI power plant equipment

No	Risiko dan Mitigasi Risks and Mitigation	
	6. Pengembangan ekosistem bisnis MRO melalui strategi partnership system dan pengelolaan customer 7. Review history kinerja dan KOI Pembangkit unit pasca subholding 8. Pengembangan, optimalisasi, dan input data pada Nextlas untuk semua pembangkit existing dan pembangkit pasca subholding 9. Melakukan assessment kondisi peralatan pembangkit pasca subholding secara menyeluruh, RLA dan manual pemeliharaan dan penyusun serta memberikan rekomendasi 10. Mapping kelengkapan manual book dan kontak dengan pihak manufaktur/pabrikan untuk update kelengkapan manual book 11. Pengumpulan dan transfer dokumen history data pembangkit (IK, data kinerja operasi, data pemeliharaan, dll) 12. Optimasi sistem konfigurasi kelistrikan 13. Tindak lanjut pending item ke EPC kontraktor 14. Transfer dokumen RKAL/RKAP PLN existing ke Genco 15. Review IK blackout (penyusun eksternal) 16. Mapping kesiapan fail safe dan anti blackout 17. Integrasi aplikasi CMMS dan manajemen operasi PLN existing dengan Genco 18. Mapping kondisi pembangkit dengan grid code 2020 dan Dilakukan tindak lanjut atas ketidaksesuaian dengan grid code 2020 19. Mapping kondisi akses menuju pembangkit 20. Peningkatan Kinerja Proses OME untuk mendukung keberhasilan pengelolaan unit-unit PLN pasca Subholding 21. Percepatan Eksekusi program-program pemeliharaan dan investasi yang sudah disetujui 22. Penyusunan DRP dan memonitoring secara berkala dengan memperhatikan kebutuhan/leveraging (semester 1 2022) 23. Optimalisasi biaya dengan melakukan repair peralatan pembangkit di UBJOM secara swakelola di lokasi/bengkel MRO 24. Negosiasi dengan Divisi PLN dan penyusunan SHA terkait pore jasa O&M di pembangkit yang di early retirement supaya masih dipegang oleh anak perusahaan PLN. 25. Penyesuaian perjanjian asuransi dengan pihak ketiga untuk unit-unit yang dialihkan.	6. Development of the MRO business ecosystem through strategic partnership systems and customer management. 7. Reviewing the performance history and KOI of generating units after the sub-holding. 8. Development, optimization and data input to Nextlas for all existing power plants and post-sub-holding power plants. 9. Comprehensive post- sub-holding assessment of the condition of power plant equipment, RLA and maintenance and testing history and provide recommendations. 10. Mapping the completeness of the manual book and contacting the manufacturer to update the completeness of the manual book. 11. Collection and transfer of historical power plant data documents (IK, operational performance data, maintenance data, etc.). 12. Optimization of electrical configuration systems. 13. Following up the pending items to the EPC contractor. 14. Transferring the existing PLN RKAL/RKAP documents to Genco. 15. Review of IK blackout (external interference). 16. Mapping fail safe and anti blackout readiness. 17. Integration of CMMS applications and management of existing PLN operations with Genco. 18. Mapping power plant conditions with the 2020 grid code and executing follow-up actions regarding non-conformance with the 2020 grid code. 19. Mapping access conditions to the power plants. 20. Improving OME Process Performance to support the successful management of PLN units after Sub-holding. 21. Accelerating the Execution of approved maintenance and investment programs. 22. Preparation of DRP and regular monitoring taking into account needs/leveraging (semester 1 2022). 23. Optimizing the costs by repairing generating equipment at UBJOM on a self-managed basis at the MRO Workshop. 24. Negotiations with PLN Division and preparation of SHA regarding the portion of O&M services in power plants in early retirement so that they are still held by PLN subsidiaries. 25. Adjustment of insurance agreements with third parties for transferred units.
	SDM 1. Penguatan kompetensi terkait bisnis MRO yang akan mencakup unit-unit PLN lainnya melalui pelatihan dan sertifikasi. 2. Review pengelolaan perjanjian alih daya berdasarkan SK corporate center untuk unit pasca subholding 3. Pelaksanaan team building training antara Ts PLN Group dan organik PLN NP 4. Menyusun peta perencanaan penempatan karyawan sesuai dengan jenis dan kondisi pembangkit yang dikelola PLN NP pasca subholdingisasi 5. Knowledge sharing terkait pengelolaan pembangkit ke unit yang baru dialihkan. 6. Memastikan kompetensi kunci di unit baru tidak hilang dengan adanya Subholding 7. Penyesuaian FTE dan WLA jumlah personel dengan bertambahnya unit yang dikelola sesuai dengan BSO khususnya untuk bidang/fungsi yang merupakan share services 8. Penguatan sarana pendukung dan kecukupan personel bisnis MRO yang akan mencakup unit-unit PLN lainnya.	**HR** 1. Strengthening competencies related to the MRO business which include other PLN units through training and certification. 2. Review of management of outsourcing agreements based on corporate charter decrees for post- sub-holding units. 3. Implementation of team building training between Ts PLN Group and organic PLN NP. 4. Preparing the employee placement planning maps according to the types and conditions of power plants managed by PLN NP after subholdingisation. 5. Knowledge sharing related to power plant management to newly transferred units. 6. Ensuring the key competencies in new units are not lost with the Sub-holding. 7. Adjustment of Formasi Tenaga Kerja and WLA number of personnel by increasing units managed in accordance with BSO, especially for fields/divisions that are share services. 8. Strengthening supporting facilities and adequacy of MRO business personnel which will include other PLN units.

No	Risiko dan Mitigasi Risks and Mitigation	
	SDM	**SDM**
	1. Pemetaan spare part yang identik dan interchangeable antar unit pembangkit sehingga dapat dioptimalkan untuk mendukung keharusan pembangkit. 2. Joint inventory untuk spesifikasi unit yang identik. 3. Melakukan assessment ketersediaan spare part. 4. Melakukan review dan pemetaan perubahan tata kelola Rantai Pasok Material yang berubah akibatkan oleh skema bisnis Holding Subholding. 5. Pemenuhan material cadang (Strategic Parts) dan optimalisasi penggunaan material penyediaan. 6. Melakukan percepatan inovasi dan amandemen perjanjian dengan pihak ketiga. 7. Melakukan Kolaborasi dengan pihak logistik.	1. Mapping of identical and interchangeable spare parts among generating units so that they can be optimized to support power plants reliability. 2. Joint inventory for identical unit specifications. 3. Spare part availability. 4. Reviewing and mapping changes in Material Supply Chain Management that have changed due to the Holding Subholding business scheme. 5. Fulfillment of Strategic Parts and optimization of the use of inventory materials. 6. Accelerating innovation and amendment of agreements with the third parties. 7. Collaborating with logistics parts.
	Proses Bisnis dan IT	**Business and IT Processes**
	1. Update/peninjauan dokumen SOTI menyesuaikan dengan kondisi Perusahaan terkini. 2. Melakukan assesmen untuk mengidentifikasi gap layanan TI (aplikasi dan infrastruktur) antara kondisi eksisting dengan tujuan. 3. Meningkatkan kapasitas infrastruktur TI (environment production, backup dan DRC). 4. Meningkatkan kapasitas license software mempertimbangkan jumlah penambahan pegawai masuk PLN NP. 5. Melakukan develop dan update proses bisnis perusahaan pasca subholding. 6. Mapping SIT Stream SDM PLN NP Group. 7. Sertifikasi standar system management (SIS). 8. Menyiapkan skenario untuk proses secara manual apabila terjadi kegagalan pada proses IT.	1. Updating/reviewing KOTI documents according to the latest Company conditions. 2. Assessments to identify gaps in IT services (applications and infrastructure) between the existing conditions and objectives. 3. Increasing IT infrastructure capacity (production environment, backup and DRC). 4. Software licensing capacity takes into account the additional number of employees joining PLN NP. 5. Developing and updating the Company's business processes after sub-holding. 6. Mapping SIT Stream HR PLN NP Group. 7. Management system standard certification (SIS). 8. Preparing scenarios for manual processes in the event a failure occurs in the IT process.
	Informasi dan komunikasi	**Information and communication**
	1. Pelaporan kepada KNAJ (Komite Manajemen Aturan Jaringan). 2. Memastikan ketersediaan anggaran dari PLN untuk pelaksanaan pemeliharaan rutin, OH dan program investasi pendukung keandalan pembangkit. 3. Memberikan usulan indikator kinerja lain kepada PLN misalnya CF atau running hours.	1. Reporting to KNAJ (Network Rules Management Committee). 2. Ensuring budget availability from PLN for the implementation of routine maintenance, OH and investment programs to support power plants reliability. 3. Proposing other performance indicators to PLN, for example CF or running hours.
	Legal dan perizinan	**Legal and licensing**
	1. Mapping perizinan unit. 2. Mapping legalitas pencatatan aset-aset yang dialihkan.	1. Mapping unit licenses. 2. Mapping the legality of licensing transferred assets.
	Niaga	**Commerce**
	1. Memastikan data KOTI pada perjanjian PPA/IUBTL pembangkit pasca sub-holding sesuai dengan hasil uji/history kinerja pembangkit. 2. Pembuatan/review protap transaksi dan OKKP antara PLN NP dengan PLN Pengatur beban untuk unit pasca subholding. 3. Diskusi dan sosialisasi pelaporan kinerja dan input navitas pada unit pasca subholding. 4. Forum diskusi protap dan OKKP antara PLN NP dengan PLN Pengatur Beban. 5. Diskusi penyusunan model bisnis PPA/IUBTL unit pasca subholding internal PLN NP berdasarkan proyeksi laporan keuangan. 6. Review history kinerja dan KOTI Pembangkit unit pasca subholding. 7. Pengembangan, optimalisasi, dan input data pada Navitas untuk semua pembangkit eksisting dan pembangkit pasca Holding Subholding (HDH). 8. Ketersediaan likuiditas untuk pembayaran pengalihan uang	1. Ensuring that the KOTI data in the PPA/IUBTL agreement for post-sub holding power plants is in accordance with the last results/performance history. 2. Creation/review of transaction procedures and OKKP between PLN NP and PLN Load Manager for post- subholding units. 3. Discussion and socialization of performance reporting and input navigation in post- subholding units. 4. Protap and OKKP discussion forum between PLN NP and PLN Load Regulator. 5. Discussion on the preparation of the PPA/IUBTL business model for PLN NP's post-internal subholding unit based on financial report projections. 6. Reviewing performance history and KOTI of generating units post subholding. 7. Development, optimization and data input to Navitas for all existing plants and post- Holding Subholding (HDH) power plants. 8. Availability of liquidity for debt transfer payments.

No	Risiko dan Mitigasi Risks and Mitigation	
	Manajemen Aset 1. Melakukan Pre Assessment Manajemen Aset dan IMS. 2. Melakukan Awareness aset dan pendekatan tentang culture dalam implementasi Asset Management dan Sistem Manajemen Terintegrasi. 3. Melakukan pendampingan manajemen aset PLN NP di setiap unit pembangkitan pasca subholding.	**Asset Management** 1. Pre-Assessment of Asset Management and IMS. 2. Initial awareness and culture-related approaches in the implementation of Asset Management and Integrated Management Systems. 3. Providing assistance with PLN NP asset management in all post-subholding generation units.
	Bahan Bakar/EP 1. Review perjanjian pengadaan dan ketersediaan stok bahan bakar dan alur komunikasi pengadaan termasuk penerimaan bahan bakar. 2. Review kontrak jasa pendukung energi primer. 3. Melakukan monitoring dan evaluasi tentang coal handling facility unit subholding.	**Fuel/EP** 1. Reviewing the procurement agreements and fuel stock availability and procurement communication flow, including the fuel receipt. 2. Review of primary energy support service contracts. 3. Monitoring and evaluating to the related coal handling facility subholding units.
	Stakeholder 1. Pembuatan stakeholder mapping pasca subholding. 2. Program CSR (ring 1). 3. Mapping target kinerja, progress dan rencana kerja dari unit-unit PLN pasca HGH. 4. Melakukan stakeholder management khususnya pada area yang berisiko.	**Stakeholders** 1. Making stakeholder mapping after sub-holding. 2. Ring 1 CSR program. 3. Mapping performance targets, progress and work plans for PLN units after HGH. 4. Carrying out stakeholder management, especially on risky areas.
2	**Risiko :** Implementasi transformasi subholding belum berjalan optimal.	**Risks:** The implementation of subholding transformation has not run optimally.
	Mitigasi : 1) Revisi Peraturan Direksi Corporate Charter menyesuaikan kebijakan HGH. 2) Revisi RJPP menyesuaikan kebijakan HGH. 3) Revisi RKAP menyesuaikan kebijakan HGH. 4) Ketersediaan likuiditas untuk pembayaran pengalihan utang. 5) Amandemen PJBTL menyesuaikan kebijakan HGH. 6) Penyelarasan desain organisasi menyesuaikan kebijakan HGH. 7) Mengimplementasikan dan evaluasi alur penetapan skema alih SDM ke Subholding (opsi tugas karyawan/ status kepegawaian). 8) Penyelarasan proses bisnis dan alur komunikasi menyesuaikan kebijakan HGH. 9) Sosialisasi proses bisnis baru Holding Subholding PLN tentunya pendelegasian operasional pada divisi/bidang yang bersangkut. 10) Sinkronisasi aplikasi sistem informasi setiap unit.	**Mitigation:** 1) Amending the Directors' Regulation concerning Corporate Charter, adjusting it into HGH policy. 2) Amending the Company's Long Term Plan (RJPP), adjusting it into HGH policy. 3) Amending ABCP, adjusting it into HGH policy. 4) Availability of liquidity for debt transfer payments. 5) Amending PJBTL, adjusting it to HGH policy. 6) Alignment of organizational design to suit HGH policies. 7) Implementing and evaluating the determination of the HR transfer scheme to the Sub-holding (work assignment option/ employee status transfer). 8) Alignment of business processes and communication flows according to HGH policies. 9) Holding Subholding's new business processes, especially operational details in divisions/fields that have an impact. 10) Synchronise information system applications across units.
3	**Risiko:** Pengembangan bisnis Beyond Power dan Power Solution tidak efektif berdampak pada PLN NP kehilangan peluang mendapatkan potensi pendapatan baru.	**Risks:** Ineffective development of the Beyond Power and Power Solution business has resulted in PLN NP losing opportunities to gain potential new income.
	Mitigasi : 1) Konversi kaum intangible knowledge PLN NP. 2) Pembelajaran terkait Future Competence. 3) Melakukan shadowing dan terlibat aktif dalam proyek di bidang masing-masing untuk regenerasi SDM. 4) Pembentukan tim pelaksana proyek. 5) Melakukan review WLA di DIVAGA dan penambahan resources untuk mengakomodir kebutuhan proses bisnis Beyond Power dan Power Solution. 6) Update standar tarif Human Capital Loss (tarif orang per day) secara periodik. 7) Optimalisasi tools management dan workshop untuk mendukung pelaksanaan proyek. 8) Updating strategi dan road map pengembangan bisnis beyond power dengan merujuk hasil evaluasi kondisi eksternal dan internal dalam rangka membentuk bisnis ekosistem. 9) Menyusunan tata kelola pengembangan bisnis power solution dan beyond power. 10) Penyusunan prosedur/ proses bisnis proyek pada DIVAGA. 11) Penyusunan Tata Kelola Inovasi yang didalamnya terdapat bisnis Beyond KWh. 12) Optimalisasi penggunaan PLN NP aces/metalus improvement tool, branding. 13) Menyari market diluar PLN Group.	**Mitigation:** 1) Monetisation of PLN NP intangible knowledge. 2) Learning related to Future Competence. 3) Carry out shadowing and be actively involved in projects in their respective fields for HR regeneration. 4) Formation of the project implementation team. 5) Reviewing WLA at DIVAGA and adding resources to accommodate the needs of Beyond Power and Power Solution business processes. 6) Updating the standard Human Capital Loss rate (per person rate per day) periodically. 7) Optimization of management and workshop tools to support project implementation. 8) Updating the strategy and road map for business development beyond power by referring to the results of evaluating external and internal conditions in order to form a business ecosystem. 9) Updating the governance of power solution and beyond power business development. 10) Preparation of project business procedures/processes on DIVAGA. 11) Preparation of Innovation Governance which includes the Beyond KWh business. 12) Optimizing the use of PLN NP aces through improvements tools, branding. 13) Looking for markets outside the PLN Group.

No	Risiko dan Mitigasi Risks and Mitigation	
4	**Risiko :** Retirement PLTU PLN NP berdampak pada potensi over-resources dan penurunan pendapatan penjualan listrik.	**Risks:** Retirement of the PLN NP's CFPP bring impact on potential overresources and a decrease in electricity sales revenue.
	Mitigasi : 1) Negosiasi dengan Divisi PLN dan penyusunan DHA terkait porsi jasa O&M di pembangkit yang di early retirement supaya masih dipegang oleh anak perusahaan PLN. 2) Kajian migrasi jaringan pembangkit yang tidak di early retirement. 3) Percepatan pengembangan bisnis baru untuk memanfaatkan idle resources. 4) Percepatan pengembangan EBT untuk memanfaatkan idle resources. 5) Digitalisasi pembangkit yang tidak di early retirement untuk meningkatkan kompetitif harga. 6) Penambahan dan optimalisasi cofiring ratio. 7) Kajian Relokasi pembangkit yang tidak di early retirement (termasuk eksisting). 8) Memastikan cost benefit rasio untuk program relokasi guna mentaati amandemen PSAK 16. 9) Stakeholder engagement dengan PLN dan Kementerian. 10) Kajian Optimalisasi Integrasi Resources PLN NP Group untuk meningkatkan utilisasi idle resources termasuk kebijakan shared service dan optimalisasi FTE PLN NP Group. 11) Melakukan market readiness untuk mendapatkan investor prosesi sun off PLTU Pacitan (pilot project retirement).	**Mitigation:** 1) Negotiations with the PLN Division and preparation of DHA regarding the portion of O&M services in power plants that are in early retirement so that it is still held by a PLN subsidiary. 2) Migration study of power plant networks that are not in early retirement. 3) Accelerating the development of new business lines to utilize the idle resources. 4) Acceleration of NBE development to utilize idle resources. 5) Digitalization of power plants that are not in early retirement to increase price competitiveness. 6) Addition and optimization of co-firing ratio. 7) Study of relocation of power plants that are not in early retirement (including existing). 8) Ensuring the cost benefit ratio for the relocation program to mitigate amendments to SFAS 16. 9) The Stakeholders engagement with PLN and the Ministry. 10) Resource Integration Optimization Study to increase utilization of idle resources including shared service policy and optimization of PLN NP Group FTE. 11) Market readiness to obtain investors for the Pacitan CFPP spin off process (pilot project retirement).
5	**Risiko :** Pengembangan bisnis EBT tidak efektif.	**Risks:** NBE business development is ineffective.
	Mitigasi : 1) Evaluasi pelaksanaan model bisnis dalam pengembangan bisnis EBT non pembangkitan (pendanaan, partnership, sinergi AP). 2) Melakukan program Dedieselisasi (konversi PLTD ke pembangkit EBT, dan hybrid kepulauan. 3) Mengembangkan pembangkit EBT skala utilitas (PLTS, PLTB, PLTA/PLTM). 4) Integrasi marketing PLN NP Group dan optimalisasi penggunaan digitalisasi marketing terkait dengan EBT (termasuk peningkatan utilisasi PLN NP access). 5) Implementasi strategi pendanaan untuk pengembangan proyek EBT. 6) Penyiapan model bisnis skema leasing untuk PLTS non PLN Group. 7) Melakukan penawaran PLTS untuk substitusi PS di unit Housing. 8) Benchmark teknologi EBT terintegrasi energy storage ke manufacturer global (perusahaan IPP EBT). 9) Pemenuhan TKDN pada pengembangan pembangkit EBT dengan bekerjasama dengan manufacturer lokal. 10) Penguatan kompetensi SDM terkait kaitan dengan pelaksana pengembang EBT pada sisi teknis, financial, niaga, komersial.	Mitigation: 1) Evaluation of the implementation of business models in developing non-NBE Power Plant businesses (funding, partnerships, AP synergies). 2) Dedieselization program (conversion of DEPP to NBE Power Plants) and hybrid islands. 3) Developing utility scale NBE Power Plants (SPP, WPP, HPP/MHPP). 4) Integration of PLN NP Group marketing and optimization of the use of digital marketing related to NBE (including increasing utilization of PLN NP access). 5) Implementation of funding strategies for developing NBE projects. 6) Preparation of a leasing scheme business model for non-PLN Group SPP. 7) Installing SPP to replace PS in the housing units. 8) NBE technology benchmarks include energy storage for global manufacturing (IPP NBE companies). 9) Fulfillment of TKDN in the development of NBE Power Plants by collaborating with the local manufacturers. 10) Strengthening HR competencies related to implementing NBE developers on the technical, financial, commercial and commercial side.
6	**Risiko :** Kehidupan pembangkit yang telah dikelola PLN NP.	**Risks:** Unpreparedness of power plants that have been managed by PLN NP.
	Mitigasi : 1) Technical Capability Improvement (Mempercepat Eliminasi Chronic Problem & Hidden Capacity). 2) Roadmap pelaksanaan Overhaul bertowers & CIPs (on time, on cost, on quality, on scope, on safety, on clean). 3) Safety management improvement. 4) Green Power Plant (Menciptakan kebersihan, kelestarian dan estetika unit pembangkit jasa O&M). 5) Reverse engineering spare part pembangkit. 6) Review alur BAG terkait pengajuan pekerjaan investasi antara PLN NP dengan PLN. 7) Implementasi Pedoman Manajemen Aset Pembangkitan. 8) Pemutakhiran standard internasional peralatan pembangkit. 9) Implementasi digitalisasi pembangkit. 10) Peningkatan kesehatan peralatan pendukung anti blackout.	Mitigation: 1) Technical Capability Improvement (Accelerating the Elimination of Chronic Issues & Hidden Capacity). 2) Overhaul execution is based on 3 CIPs (on time, on cost, on quality, on scope, on safety, on clean). 3) Safety management improvement. 4) Green Power Plant (Creating cleanliness, sustainability and aesthetics of O&M service generating units). 5) Reverse engineering of power plant spare parts. 6) Reviewing BAG flow related to investment work submissions between PLN NP and PLN. 7) Implementation of Power Plant Asset Management Guidelines. 8) Updating international standards for power plant equipment. 9) Implementation of power plant digitalization. 10) Increasing the reliability of anti-blackout support equipment.

No	Risiko dan Mitigasi Risks and Mitigation	
7	**Risiko :** Komersialisasi Digitalisasi pembangkit dan Manajemen Aset tidak optimal.	**Risks:** Commercialization of power plant digitalization and asset management is not optimal.
	Mitigasi : 1) Penyusunan dan penyampaian strategi marketing dan product knowledge pada calon pelanggan. 2) Penyusunan model bisnis untuk komersialisasi digital power plant di Luar PLN NP Group. 3) Integrasi penuh antara APM (Asset Performance Management) dan EAM. 4) Pengembangan infrastruktur Keamanan Informasi Spine & Leaf. 5) Pengadaan Firewall Server Farm Sandbox Sandbox. 6) Pengembangan infrastruktur Document Learning Storage untuk mendukung proses bisnis pembelajaran. 7) Identifikasi kebutuhan dan Pemenuhan personil dan kompetensi untuk tim implementasi EAM dan DPP. 8) Pelaksanaan Pelatihan komersialisasi yang berkaitan dengan komersialisasi digitalisasi pembangkit (marketing, dll). 9) Penyusunan & review usulan proses bisnis komersialisasi digitalisasi pembangkit. 10) Penyusunan buku panduan tata kelola pembangkitan berbasis digital. 11) Melakukan assessment kesiapan unit yang akan dialihkan asetnya ke PLN NP terkait kebijakan subholding.	**Mitigation:** 1) Preparation and delivery of marketing strategies and product knowledge to the potential customers. 2) Preparation of a business model for the commercialization of digital power plants outside the PLN NP Group. 3) Full integration between APM (Asset Performance Management) and EAM. 4) Spine & Leaf Information Security Infrastructure Development. 5) Procurement of an integrated Sandbox Server Farm Firewall. 6) Document Learning Storage infrastructure to support learning business processes. 7) Identification of needs and fulfillment of personnel and competencies for the EAM and DPP implementation team. 8) Implementation of Commercialization Training related to the commercialization of power plant digitalization (marketing, etc.). 9) Preparation & review of business process proposals for the commercialization of power plant digitalization. 10) Preparation of a digital-based power plants management guidebook. 11) Readiness assessments of units which assets will be transferred to PLN NP regarding sub-holding policies.
8	**Risiko :** Strategi Pendanaan dalam pembangunan pembangkit baru tidak efektif.	**Risks:** Funding strategies for building new power plants are ineffective.
	Mitigasi : 1) Mendorong adanya pembentukan organisasi baru untuk mendukung pendanaan pembangunan pembangkit baru. 2) Menindaklanjuti hasil kajian pendanaan untuk bisnis pembangkitan selain dari pendanaan menggunakan APLN. 3) Pengadaan kompetensi SDM berupa pelatihan yang berkaitan dengan pelaksana pengembang pembangkit pada sisi financial dan pendanaan (EPC). 4) Melakukan peningkatan peran KSK dalam memenuhi kapasitas pendanaan melalui berbagai alternatif pendanaan sesuai rekomendasi kajian pendanaan.	**Mitigation:** 1) Encouraging the formation of new organizations to support funding for the construction of new power plants. 2) Following up on the results of funding studies for generation businesses other than funding using APLN. 3) Strengthening HR competency in the form of training related to implementing power plant developers on the financial and funding (EPC) side. 4) Increasing KSK's role in leveraging funding capacity through various funding alternatives following the funding study recommendations.
9	**Risiko :** Kesiapan dan perubahan kondisional proyek ketenagalistrikan berdampak pada ketidakmampuan dalam pembayaran kewajiban perusahaan.	**Risks:** Unpreparedness and changes in conditions of electricity projects bring impacts on the inability to pay obligations of the Company.

No	Risiko dan Mitigasi Risks and Mitigation	
	Mitigasi : 1) Koordinasi dan komunikasi dengan PLN terkait mekanisme pembayaran investasi dan pengembangan proyek. 2) Pengembangan proyek pembangkit listrik sesuai RUPTL terbaru. 3) Update proses bisnis PLN NP EKI terkait akselerasi proyek untuk mengantisipasi perubahan jadwal proyek dan peluang bisnis yang membutuhkan respon cepat dengan tetap mampu pada ketidakan yang berlaku termasuk serah terima proyek. 4) Melakukan Stakeholder Management untuk berkoordinasi terkait perubahan kondisional proyek. 5) Penyiapan sumber daya dan koordinasi internal terkait perubahan kondisional proyek. 6) Penguatan kompetensi SDM berkaitan dengan pengembangan bisnis atau proyek ketenagalistrikan (EPC). 7) Penyelesaian progress EPC untuk COD Proyek Add On Muara Tawar blok 2,3,4 di 2022 dan 2023. 8) Mengembangkan/memutakhir strategi program proyek dengan merujuk pada hasil evaluasi dan monitoring rutin, dinamika kondisi eksternal dan internal serta mempertimbangkan dampaknya bagi Perusahaan. 9) Proses finalisasi pedoman manajemen proyek. 10) Berkoordinasi dengan DWEP terkait dengan kesiapan Energi Primer untuk memasuki Pembangkit yang telah selesai dibangun. 11) Melakukan usulan kontrak terkait pengadaan biomassa secara berjenjang. 12) Berkoordinasi dengan divisi/bidang di PLN NP terkait dengan serah terima asset dan serah terima operasi. 13) Berkoordinasi dengan PLN untuk kepastian dispatch pembangkit yang telah selesai dibangun. 14) Mengintensasi kerjasama dengan manufaktur lokal untuk Pemenuhan TKDN.	**Mitigation:** 1) Coordination and communication with PLN regarding investment payment mechanisms and project development. 2) Development of power plant projects according to the latest Electricity Supply Business Plan (RUPTL). 3) Updating PLN NP's EKI business processes related to project acceleration to anticipate changes in project schedules and business opportunities that require a quick response while still referring to applicable policies including project handover. 4) Stakeholders Management to coordinate regarding changes to project conditions. 5) Preparation of resources and internal coordination regarding project conditional changes. 6) Strengthening HR competencies related to business development or electricity projects (EPC). 7) Completion of EPC progress for COD Add On Muara Tawar Project blocks 2,3,4 in 2022 and 2023. 8) Developing/updating project program strategies by referring to the results of routine evaluation and monitoring, dynamics of external and internal conditions and analyzing the impact on the Company. 9) The process of finalizing project management guidelines. 10) Coordinating with DWEP regarding Primary Energy's readiness to supply the completed power plants. 11) Proposing contracts related to biomass procurement in stages. 12) Coordinating with divisions/sections in PLN NP regarding asset handover and operations handover. 13) Coordinating with PLN to ensure dispatch of the completed power plants. 14) Initiating collaboration with local manufacturers to fulfill TKDN.
10	**Risiko :** Terhambatnya kontinuitas implementasi co-firing	**Risks:** Delayed continuity in the implementation of co-firing.
	Mitigasi : 1) Pelaksanaan Pelatihan karyawan terkait dengan implementasi Co-Firing. 2) Akan dilakukan penyesuaian terkait tupoksi pengelolaan biomassa. 3) Melakukan usulan kontrak terkait pengadaan biomassa secara berjenjang. 4) Akan dilakukan penyesuaian terkait tupoksi pengelolaan biomassa. 5) Ekspansi implementasi Co-Firing dengan diversifikasi jenis biomassa dan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan penghasil biomassa. 6) Akan dilakukan penyesuaian terkait tupoksi pengelolaan biomassa. 7) Melakukan follow up terhadap rekomendasi kajian untuk memenuhi target co-firing 30%-100% mulai 2025. 8) Ekspansi implementasi Co-Firing dengan diversifikasi jenis biomassa dan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan penghasil biomassa. 9) Pengetatan pemeriksaan dalam proses penerimaan biomassa. 10) Penguatan dan peningkatan kapasitas unloading rate dengan optimalisasi pola operasi dan pemeliharaan serta investasi peralatan. 11) Pembuatan DPT biomassa baru.	Mitigation: 1) Implementation of employee training related to Co-Firing implementation. 2) Adjustments will be made regarding the main tasks and functions of biomass management. 3) Proposing contracts related to biomass procurement in stages. 4) Adjustments for the main tasks and functions of biomass management. 5) Expansion of Co-Firing implementation by diversifying biomass types and collaborating with biomass producer companies. 6) Adjustments for the main tasks and functions of biomass management. 7) Following-up on study recommendations to meet the co-firing target of 30%-100% towards 2025. 8) Expansion of Co-Firing implementation by diversifying biomass types and collaborating with biomass producer companies. 9) Tightening inspections in the biomass acceptance process. 10) Strengthening and increasing the unloading rate capacity by optimizing operation and maintenance patterns and equipment investment. 11) Making new biomass DPT.

No	Risiko dan Mitigasi Risks and Mitigation	
11	**Risiko :** Terjadinya kecelakaan kerja dan darurat kesehatan.	**Risks** Occurrence of work accidents and health emergencies.
	Mitigasi : 1) Penyusunan Pedoman Capital Recycling. 2) Penyusunan Pedoman untuk melakukan Review APPA terhadap keterkaitannya dengan PT. 3) Penyusun kajian opsi pendanaan lain yang dapat digunakan untuk investasi di PLN NP Group. 4) Mengarahkan AP untuk dapat menjajaki proyek produk baru sehingga bisa mempercepat perputaran modal. 5) Mendorong pemanfaatan idle asset di AP. 6) Inisiasi pengembangan aplikasi TRIME untuk AP lainnya. 7) Meningkatkan kompetensi karyawan APPA PJB. 8) Melakukan proses alignment RJPP AP selaras dengan perubahan bisnis baru Jump to New S Curve. 9) Implementasi CDMS. a. Peningkatan jumlah penyedia jasa bersertifikat CDMS. b. Optimalisasi implementasi CDMS secara full cycle.	**Mitigation** 1) Preparation of Capital Recycling Guidelines. 2) Preparation of guidelines for reviewing Subsidiaries and Associated Companies for its conformity with PT. 3) Preparation of a study of other funding options that can be used for investment in the PLN NP Group. 4) Directing Subsidiaries to explore new product projects so as to able to speed up capital turnover. 5) Encouraging the utilization of idle assets in Subsidiaries. 6) Initiation of TRIME application development for other Subsidiaries. 7) Increasing the competency of Subsidiaries and Associated Companies EGB employees. 8) Subsidiaries Company's Long Term Plan (RJPP) alignment process in line with new business changes Jump to New S Curve. 9) CDMS implementation. a. Increase in the number of CDMS certified service providers. b. Optimizing CDMS implementation in full cycle.
12	**Risiko :** Ketidakamanan pasokan energi primer.	**Risks** Primary energy supply insecurity.
	Mitigasi : 1) Peningkatan kompetensi SDM dalam mengelola Energi Primer melalui PJB Academy. 2) Memetakan dan berkolaborasi dengan Jetty terdekat PLTU sebagai alternatif tempat pembongkaran Batubara. 3) Penguatan dan peningkatan kapasitas unloading rate dengan optimalisasi pola operasi dan pemeliharaan serta investasi peralatan. 4) Menambah pengadaan batubara multi source. 5) Mengusulkan ke PT PLN (Persero) untuk melakukan kontrak jangka panjang dan tambahan pasokan batubara baik melalui kontrak spot maupun penambahan volume nominasi pada pemasok yang masih mampu. 6) Menjalin komunikasi dengan para pemasok, kementerian terkait. 7) Pengadaan jasa angkutan BBM dengan multi supply point. 8) Dredging untuk beberapa PLTU untuk mengantisipasi pendangkalan perairan area Jetty.	**Mitigation** 1) Increasing HR competency in managing Primary Energy through PJB Academy. 2) Mapping and collaborating with the Jetty closest to the CFPP as an alternative place for coal unloading. 3) Strengthening and increasing unloading rate capacity by optimizing operation and maintenance patterns as well as equipment investment. 4) Multi source coal procurement. 5) Proposing to PT PLN (Persero) to prepare long term contracts and additional coal supplies either through spot contracts or additional nomination volumes to the suppliers who are still capable. 6) Establishing communication with the suppliers and related ministries. 7) Procurement of fuel transportation services with multiple supply points. 8) Dredging for several CFPPs to anticipate the shallowing of the waters in the Jetty area.
13	**Risiko :** Pengelolaan kepatuhan terhadap perizinan dan regulasi kurang optimal.	**Risks** Management of compliance with licenses and regulations is less than optimal.
	Mitigasi : 1) Inventarisir kebutuhan perubahan perizinan dan pemenuhan peraturan perundangan terkait sehubungan dengan adanya HSH. 2) Melakukan konfirmasi ke instansi penerbit izin terkait. 3) Melakukan pemenuhan perizinan untuk pengembangan bisnis baru (pengembangan bisnis pembangkit dan beyond kwh). 4) Melakukan addendum kontrak bersama dengan hukum online terkait akses dial peraturan regulasi eksternal. 5) Pemenuhan regulasi lingkungan. 6) Monitoring pemenuhan izin lingkungan dan izin PPLH. 7) Monitoring kinerja WWTP dan ETP unit pembangkit. 8) Mendukung pelaksanaan co-firing dengan memastikan bahwa kegiatan tersebut tercantum di dalam dokumen lingkungan. 9) Rencanakan alternatif pemanfaatan FABA untuk unit luar Jawa. 10) Pemanfaatan sumber energi alternatif (biomassa). 11) Pengadaan batubara low sulphur untuk PLTU batubara. 12) Pemasangan CEMs memonitor dan CEIs secara online sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.	**Mitigation** 1) Inventorying the need for licensing changes and compliance with corporate laws and regulations in connection with HSH existence. 2) Confirming with the relevant licensing issuing agency. 3) Fulfilling licenses for new business development (generation and beyond kwh business development). 4) Addendum to the collaboration contract with online law regarding access to draft the external regulations. 5) Compliance with environmental regulations. 6) Monitoring the fulfillment of environmental and PPLH licenses. 7) Monitoring WWTP and ETP performance of generating units. 8) Supporting the implementation of co-firing by ensuring that these activities are included in environmental documents. 9) Alternative planning for the use of FABA for units outside Java. 10) Utilization of alternative energy sources (biomass). 11) Low sulfur coal for coal-fired power plants. 12) Installation of mercury and CEIs CEMs online based on the applicable laws and regulations.

No	Risiko dan Mitigasi Risks and Mitigation	
14	**Risiko :** Kontribusi AP belum optimal mendukung bisnis PLN NP Group.	**Risks:** Subsidiaries contribution has not been optimal in supporting PLN NP Group's business.
	Mitigasi : 1) Mengawal proses perbaikan proses bisnis dan skema komersial di RE, PLNSC 2) Menyusun/mengupdate dan mengeksekusi prosedur analisis asset review/ post mortem investasi termasuk penunjukkan organisasi yang akan menjalankan fungsi tersebut. 3) Mengawal proses eksekusi RJPP AP terutama terkait penetrasi pasar dan diversifikasi bisnis 4) Memindaksanakan kajian opsi pendanaan lain yang dapat digunakan untuk investasi di PLN NP Group. 5) Mengawal pemanfaatan program national pooling oleh AP. 6) Mengawal performa keuangan dan operasional PT RE pasca merger dengan PT PPN 7) Peningkatan kompetensi RE & PLNSC khususnya terkait pengembangan bisnis agar dapat meningkatkan maturity bisnis Perusahaan (apakah terkait dengan FGD/ Pembinaan dll). 8) Mengarahkan AP untuk dapat memaksimalkan fungsi pemasaran atas produk-produk unggulannya melalui berbagai media (ex: roadshow, menghadiri forum/bursa, penghargaan, digital marketing dll) 9) Mengawal pembentukan business ecosystem pada AP melalui skema kontrak payung atau lainnya dengan vendor atau manufaktur terkait untuk mendapatkan harga yang kompetitif. 10) Melibatkan AP (RE, KBD) dalam eksekusi proyek konstruksi baik penugasan dari PLN maupun mandiri dengan skema subkontrak.	1) Overseeing the process of improving business processes and commercial schemes at RE, PLNSC. 2) Developing/updating and executing asset review/investment post mortem analysis procedures, including appointing the organization that will carry out this function. 3) Overseeing the Subsidiaries Company's Long Term Plan (RJPP) execution process, especially regarding market penetration and business diversification. 4) Following up on studies of other funding options that can be used for investment in the PLN NP Group. 5) Overseeing the utilization of the national pooling program by Subsidiaries. 6) Overseeing PT RE's financial and operational performance after the merger with PT PPN. 7) Increasing the competence of RE & PLNSC, especially related to business development in order to increase business maturity of the Company (whether related to FGD/ Coaching, etc.). 8) Directing Subsidiaries to maximize the marketing function of its superior products through various media (ex: roadshows, participating in forums/bursts, awards, digital marketing, etc.). 9) Overseeing the formation of business ecosystem in Subsidiaries through umbrella or other contract schemes with related vendors or manufacturers to obtain competitive prices. 10) Involving Subsidiaries (RE, KBD) in the execution of construction projects, both assignments from PLN and independently using the subcontract schemes.
15	**Risiko :** Organisasi dan human capital kurang mendukung dalam eksekusi program strategis korporat.	**Risks:** Organization and human capital do not support the execution of corporate strategic programs.
	Mitigasi : 1) Melakukan evaluasi dan koordinasi kebutuhan struktur organisasi serta melakukan penyesuaian apabila diperlukan. 2) MPP (Manpower Planning) dengan mengoptimalkan potensi resource dari Unit Pembangkit yang dipensiunkan/ retirement 3) Melakukan pemetaan Business Mindset & Digital Mindset karyawan. 4) Implementasi future talent development sebagai program akselerasi kompetensi korporat dalam mencapai pemenuhan future competency. 5) Integrasi Learning Path dan Career Path untuk optimalisasi Pengembangan Kompetensi Karyawan 6) Pembelajaran Terkait Future Competence berdasarkan Rekomendasi dari Rembina Kantor Pusat. 7) Workshop/pengelolaan KLRA (Hemadilkan ML / KPI OCR terbaru). 8) Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran. 9) Mengarahkan AP untuk memenuhi kuantitas dan kualitas resource di PLN NP Group khususnya terkait pengembangan bisnis/proyek dengan menggunakan skema PKWT. 10) Melakukan integrasi antara Learning Management Children dan HRIS. 11) Melakukan penyesuaian kebijakan terkait Recruitment Pra-Hire. 12) Pengisian kajian risiko fraud/DRMS pada aplikasi i-care	**Mitigation:** 1) Evaluating and coordinating organizational structure needs and making adjustments if necessary. 2) MPP (Manpower Planning) by optimizing the resource potential of the Generation Unit which is projected to retire. 3) Business Mindset & Digital Mindset mapping of employees. 4) Implementation of future talent development as a corporate competency acceleration program in targeting the fulfillment of future competency. 5) Integration of Learning Path and Career Path to optimize employee competency development. 6) Learning Related to Future Competence based on Recommendations from the Headquarter Advisors. 7) KLRA Workshop (Ensuring the latest ML / OCR KPIs). 8) Improving learning support facilities and infrastructure. 9) Directing Subsidiaries to fulfill the quantity and quality of resources in the PLN NP Group, especially regarding business/ project development by prioritizing the PKWT scheme. 10) Integrating Learning Management Children and HRIS. 11) Adjustments to the policies related to Recruitment Pra-Hire. 12) Filling out the DRMS fraud risk assessment on the i-care application.

Level dari masing-masing risiko utama korporat digambarkan kedalam Peta Risiko tahun 2023 dimana terdapat Inherent Risk, Actual Risk dan Target Risk. Inherent Risk adalah tingkat risiko awal dimana perlakuan risiko baik itu tindakan pengendalian maupun tindakan mitigasi risikonya belum dilaksanakan. Actual Risk adalah tingkat risiko yang tertinggal saat dilaporkan dan Target Risk adalah target tingkat risiko yang diharapkan oleh Perusahaan merujuk Selera Risiko setelah seluruh tindakan perlakuan risiko telah dilakukan pada akhir masa pemantauan risiko.

The level of each main corporate risk is described in the 2023 Risk Map, where there are Inherent Risk, Actual Risk and Target Risk. Inherent Risk is the initial risk level where risk treatment, whether control measures or risk mitigation measures have not been implemented. Actual Risk is the risk level that is left behind when reported and Target Risk is the target risk level expected by the Company referring to the Risk Appetite after all risk treatment actions have been carried out at the end of the risk monitoring period.

Peta Risiko Tahun 2023

Risk Map For 2023

Risiko Inherent 2023
Inherent Risk 2023

Risiko Residu TW IV 2023
Residual Risk TW IV 2023

Risiko Target Tahun 2023
Target Risk Year 2023

Program Kerja Manajemen Risiko
Risk Management Work Program

Kebijakan Manajemen Risiko PLN NP telah didukung roadmap manajemen risiko dan diimplementasikan melalui program kerja yang dijalankan oleh Bidang Risiko. Selain itu, Perusahaan juga telah menyusun rencana kerja tindak lanjut analisa gap tingkat kematangan risiko beserta rencana perbaikan yang telah disetujui. PLN NP membangun integrasi manajemen risiko kedalam suatu sistem berupa Pengembangan Aplikasi Manajemen Risiko, mengimplementasikan Manajemen Kinerja berbasis Risiko dengan menyusun KRI disetiap KPI, melakukan tindak lanjut OFI (Opportunity for improvement) atas penilaian maturity level ERM PLN NP untuk mencapai target yang ditetapkan, mengikuti ajang GRC Award serta pembahasan pelaksanaan Risk Competition. Realisasi program kerja terkait penerapan manajemen risiko sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

PLN NP supports its Risk Management Policy with a risk management roadmap and implemented through work programs carried out by the Risk Division. Moreover, the Company also prepared a follow-up work plan for risk maturity level gap analysis along with the approved improvement plans. PLN NP builds risk management integration into a system in the form of Risk Management Application Development, implementing Risk-based Performance Management by compiling KRI for each KPI, carrying out OFI (Opportunity for improvement) follow-up on the ERM maturity level assessment of PLN NP to achieve the set targets, participating in the GRC Award event and discussing the implementation of the Risk Competition. The realization of the work program related to the implementation of risk management throughout 2023 is as follows:

Realisasi Program Kerja Manajemen Risiko
Realization of Risk Management Work Program

No.	Program Kerja Work program	Realisasi Realization	
1	Persiapan Implementasi PERMEN No. PER-5/MBU/09/2022 di PLN Grup dan Anak Perusahaan/Sub Holding Preparation for Implementation of PERMEN No. PER-5/MBU/09/2022 in the PLN Group and Subsidiaries/ Sub Holding Companies.	Dengan memperhatikan perkembangan yang terjadi di PLN Group terkait pembentukan Holding & Sub-Holding PT PLN (Persero), serta arahan Pemegang Saham terkait persiapan implementasi serta sosialisasi Peraturan Menteri BUMN No. PER-5/MBU/09/2022 Tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Badan Usaha Milik Negara, maka berikut hal-hal yang dilakukan untuk mempersiapkan implementasi Permen 5.SUMN: a. Focus Group Discussion (FGD) Persiapan Implementasi PERMEN No. PER-5/MBU/09/2022 di PLN Grup dan Anak Perusahaan/Sub Holding yang dilaksanakan pada tanggal 12-13 Januari 2023 dengan narasumber dari Tim Manajemen Risiko PT PLN (Persero). b. Pembahasan/Overview Proses Bisnis Unit Pairing Pipa Legal Entity State Holding Sub-Holding terkait profil risiko termasuk Risiko Spin-Off Kontrak, Risiko Pembayaran dan Risiko Value Creditor pada tanggal 17 Januari 2023 yang merupakan proses pairing dengan Tim Manajemen Risiko PT PLN (Persero). c. Roadshow Manajemen Risiko Strategis Anak Perusahaan PT PLN Nusantara Power oleh Tim Manajemen Risiko PLN NP terkait profil risiko AP 2023 pasca legal and state holding sub holding, sosialisasi awal PER-5/MBU/09/2022 dan peluang implementasi i-Care atau integrasi aplikasi manajemen risiko. AP yang sudah dilakukan roadshow antara lain : 1) PJB pada tanggal 09 Februari 2023. 2) PJBI pada tanggal 09 Maret 2023. 3) PLNEC pada tanggal 21 Maret 2023. 4) RE pada tanggal 11 April 2023.	By paying attention to developments occurring in the PLN Group regarding the formation of PT PLN (Persero) Holding & Sub-Holding, as well as Shareholders' directions regarding the implementation and socialization of BUM Ministerial Regulation No. PER-5/MBU/09/2022 concerning the implementation of Risk Management in Business Entities (State-owned), as the following things are being done to prepare for the implementation of Ministerial Regulation (PERMEN) No 5 SUMn: a. Focus Group Discussion (FGD) Preparation for implementation of PERMEN NO. PER-5/MBU/09/2022 at the PLN Group and Subsidiaries/Sub-Holding which was held on January 12-13, 2023 with source persons from the PT PLN (Persero) Risk Management Team. b. Discussion/Overview of the Pairing Unit Business Process related to the thermal's risk profile of Contract Spin-Off Risk, Payment Risk and Value Creditor Risk on January 17, 2023 which is the pairing process with the PT PLN (Persero) Risk Management Team. c. PT PLN Nusantara Power Subsidiary Strategic Risk Management Roadshow by the PLN NP Risk Management Team regarding the AP 2023 risk profile post legal and state holding sub-holding, initial socialization of PER-5/MBU/09/2022 and opportunities for implementing i-Care or management application integration risks. Subsidiaries that have carried out roadshows include: 1) PJB on February 9, 2023. 2) PJBI on March 9, 2023. 3) PLNEC on March 21, 2023. 4) RE on April 11, 2023.

No	Program Kerja Work program	Realisasi Realization	
		d. Implementasi i-Care di Anak Perusahaan PLN Nusantara Power 1) Sudah dilakukan permohonan bantuan untuk implementasi i-Care di Anak Perusahaan PLN Nusantara Power pada tanggal 18 April 2023. 2) Sudah dilakukan pembahasan mapping kesiapan Anak Perusahaan untuk implementasi i-Care di Anak Perusahaan PLN Nusantara Power pada tanggal 31 Mei 2023. e. Perdir 002A/PDIR/DIR/2023 tentang Kebijakan Strategis Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi PT PLN Nusantara Power yang ditetapkan pada 1 Desember 2023.	d. Implementation of i-Care in the PLN Nusantara Power Subsidiary 1) A request for assistance was made to implement i-Care at the PLN Nusantara Power subsidiary on April 18, 2023. 2) Discussions were made for mapping the readiness of subsidiaries to implement i-Care in the subsidiary PLN Nusantara Power on May 31, 2023. e. Directors' Regulation No. 002A/PDIR/DIR/2023 concerning Strategic Policy for Implementing Integrated Risk Management of PT PLN Nusantara Power which was ratified on December 1, 2023.
2	Kegiatan Awareness Manajemen Risiko kepada Divisi/Bidang Kantor Pusat dan Unit. Awareness Activities for Headquarter Divisions and Units.	Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk sharing knowledge manajemen risiko dengan mengundang narasumber yang kompeten dalam bidangnya. Pada 2023 telah dilakukan knowledge sharing/sosialisasi sebagai berikut: a. Sosialisasi Manajemen Risiko dan Kepatuhan Terintegrasi ke Unit UPDK dan UPK pada tanggal 16-17 Februari 2023 dengan narasumber dari Tim Manajemen Risiko. b. Workshop Penggunaan Aplikasi i-Care dan Evaluasi UMRR Unit pada tanggal 6-7 Maret 2023 dengan narasumber dari Tim Manajemen Risiko. c. Sosialisasi Manajemen Risiko dan Kepatuhan untuk Risk Officer Kantor Pusat PT PLN Nusantara Power pada Tanggal 6 Maret 2023 dengan narasumber dari Tim Manajemen Risiko. d. Sosialisasi Kriteria Maturity Level RMM Unit tahun 2023 dan Evaluasi Pengelolaan Manajemen Risiko Unit TW I 2023 pada tanggal 4 Mei 2023 dengan narasumber dari Tim Manajemen Risiko. e. Focus Group Discussion (FGD) Manajemen Risiko TW II Tahun 2023 dilaksanakan pada 19 Mei 2023. f. Knowledge sharing pembelajaran proses bisnis dan isu strategis proyek, pembangkitan, energi primer dan pengaturan sistem dilaksanakan pada 19 Mei 2023. g. Workshop Risk Modeling Kuantifikasi Profil Risiko Korporat PLN Nusantara Power Tahun 2024 yang dilaksanakan pada 4-5 Oktober 2023.	This activity was packaged in the form of risk management knowledge sharing by inviting source persons who are competent in their fields. In 2023, PLN NP carried out the following knowledge sharing/socialization: a. Socialization of Integrated Risk Management and Compliance to GCU and GOU Units on February 16-17, 2023 with source persons from the Risk Management Team. b. Workshop on Using the i-Care Application and Socialization of UMRR Units on March 6-7, 2023 with source persons from the Risk Management Team. c. Socialization of Risk Management and Compliance for PT PLN Nusantara Power Headquarter Risk Officers on March 6, 2023 with source persons from the Risk Management Team. d. Maturity Level Criteria and Evaluation of Unit Risk Management Q1/2023 on May 4, 2023 with source persons from the Risk Management Team. e. Focus Group Discussion (FGD) Risk Management Q2/2023 was held on May 19, 2023. f. Knowledge sharing to deepening business processes and strategic issues for projects, generation, primary energy and system management was held on May 19, 2023. g. Risk Modeling Workshop, Quantification of the Corporate Risk Profile of PLN Nusantara Power in 2024, which was held on October 4-5, 2023.
3	Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja Berbasis Risiko. Development of a Risk-Based Performance Management System.	PLN NP sudah melakukan penyusunan panduan/pedoman penurunan kinerja berbasis risiko untuk unit/satuan kerja berupa KRI untuk setiap KPI utama masing-masing unit kinerja dan melakukan assesmen risiko secara kuantitatif. Kinerja berbasis risiko sudah diuji-coba di TW II.	PLN NP prepared guideline/reference for formulating risk-based performance for units/work units in the form of KRI for each main KPI for each performance unit, and carried out quantitative risk assessments. Risk-based performance was validated in Q2/2023.
4	Menuangkan implementasi Manajemen Risiko dalam Kontrak Kinerja Divisi/Bidang Kantor Pusat. Implementing Risk Management Implementation in Headquarter Divisions/Fields' Performance Contracts.	Sebagai upaya meningkatkan pengelolaan manajemen risiko yang terintegrasi serta peningkatan budaya dan kesadaran akan pentingnya pengelolaan manajemen risiko perusahaan, maka mulai tahun 2020 telah dituangkan Maturity Level Implementasi Manajemen Risiko pada kontrak kap-kap Divisi/Bidang di Kantor Pusat. Pada tahun 2023 target kontrak di semester I sebesar 75%, dengan parameter pembaharuan konsistensi dalam melakukan review dan update risiko setiap bulan.	In an effort to improve integrated risk management as well as increase culture and awareness of the importance of managing the Company risk management, starting in 2020, the Maturity Level of Risk Management Implementation has been outlined in the contracts of each Division/Field at the Headquarter. In 2023, the risk target in semester I was 75%, with the assessment parameters being consistency in reviewing and updating risks every month.

No.	Program Kerja Work program	Realisasi Realization	
5	Penyusunan Profil Risiko Perusahaan untuk tahun 2023. Preparation of Corporate Risk Profile for 2023.	Profil risiko tahun 2023 sudah disahkan pada 14 November 2022 oleh seluruh Direksi PLN NP, dan dengan telah dilaksanakan legal and state holding sub holding per Januari 2023 maka sudah dilakukan beberapa identifikasi risiko tematik terkait dengan holding sub holding diantaranya value creation, proses pembayaran ke supplier, pertimbangan aset pembangkit, dan permasalahan hukum pasca pengalihan kontrak pembangkitan yang diakibatkan. Saat ini juga mitigasi sudah dilakukan monitoring dan review per triwulan.	The risk profile for 2023 was ratified on November 14, 2022 by the entire Board of Directors of PLN NP, and with the legal and state of sub-holding as of January 2023, several thematic risk identifications related to sub-holding have been carried out, including value creation, payment processes to suppliers, licensing of power plant assets, and legal issues following the transfer of transferred generation contracts. Currently, mitigation is also being monitored and reviewed quarterly.
6	Penyusunan Profil Risiko Korporat Tahun 2022. Review and Validation of Risk Management Documents.	Sebagai implementasi pelaksanaan GRC, dalam pengambilan keputusan strategis oleh Direksi diperlukan adanya Dokumen Manajemen Risiko dan Evaluasi Kepatuhan (DMRK)/Kajian Risiko.	As GRC implementation, strategic decision making by the Board of Directors requires a Risk Management and Compliance Evaluation Document (DMRK)/Risk Study.
		Dokumen Dokumen Manajemen Risiko dan Evaluasi Kepatuhan ini dibuat oleh pemilik proses bisnis dan direview dan divalidasi oleh SRIS dan BPTH, serta dimintakan legal opinion ke Satuan Legal, Risk, and Compliance Sampai dengan Triwulan IV 2022 telah dilakukan review dan validasi untuk DMRK sebagai berikut: a. DMRK PLTU MW. b. DMRK Pemilihan Strategis Partner Proyek MW. c. DMR PLTB Tanah Laut. d. DMRK Pemilihan Strategis Partner PLTB Tanah Laut. e. DMRK Sengkang. f. DMRK terkait PLTU Tanjung Batam. g. DMRK Akuisisi PLTU Kaltim 4 – 200MW. h. DMR terkait Pembelian Aset PLTGU Sengkang. i. DMRK PLTU Kanangkulas. j. DMRK terkait Pengembangan Clean Carbon Trading dll.	The Risk Management and Compliance Evaluation Document was created by the business process owner, reviewed and validated by SRIS and BPTH, and a legal opinion was requested from the Legal, Risk and Compliance Unit. As of Q4/2022, PLN NP reviewed and validated the following DMRK: a. DMRK of MW IPP. b. DMRK of Strategic Partner for MW Project Selection. c. DMRK of Tanah Laut MBB. d. DMRK of Strategic Partner Selection for Tanah Laut MBB. e. Sengkang DMRK. f. DMRK regarding Batam Floating IPP. g. DMRK Acquiring 4 - 200MW Kaltim CFPP. h. DMR related to the purchase of Sengkang CCPP assets. i. DMRK of Kanangkulas IPP. j. DMRK related to Carbon Trading Business Development etc.

Program Pengembangan Kompetensi dan Kegiatan *Awareness* Bidang Risiko

Competency Development Program and Risk Awareness Activities

Tingkat pemahaman yang baik dan kepedulian setiap elemen yang ada di Perusahaan sangat menentukan efektivitas penerapan manajemen risiko. Program pengembangan kompetensi merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan pemahaman dan kepedulian terhadap penerapan manajemen risiko Perusahaan untuk mendorong efektivitas penerapannya. Program pengembangan kompetensi dilakukan baik berupa public training yang diselenggarakan oleh lembaga profesional maupun in house training yang bekerjasama dengan narasumber berpengalaman di dalam Manajemen Risiko. Program pengembangan kompetensi terkait manajemen risiko tahun 2023 adalah sebagai berikut:

The level of good understanding and concern for each element in the Company greatly determines the effectiveness of implementing risk management. The competition development program is an effort to increase understanding and awareness of the Company's risk management implementation to encourage the effectiveness of its implementation. Competency development programs are carried out in the form of public training organized by professional institutions or in-house training in collaboration with source persons experienced in Risk Management. The competency development program related to risk management in 2023 is as follows:

Program Pengembangan Kompetensi Manajemen Risiko
Risk Management Competency Development Program

No	Program Pengembangan Development Program	Jumlah Peserta No. of participants	Tanggal Date
1	Sertifikasi Qualified Risk Management Analysis (QRMA) Batch 1 Qualified Risk Management Analysis (QRMA) Certification Batch 1	35	25-27 Mei 2021 May 25-27, 2021
2	Sertifikasi Qualified Risk Management Analysis (QRMA) Batch 2 Qualified Risk Management Analysis (QRMA) Certification Batch 2	23	19-21 Juni 2021 June 19-21, 2021
3	Sertifikasi Qualified Risk Management Analysis (QRMA) Batch 3 Qualified Risk Management Analysis (QRMA) Certification Batch 3	43	24-26 Juli 2021 July 24-26, 2021
4	Sertifikasi Qualified Risk Management Analysis (QRMA) Batch 4 Qualified Risk Management Analysis (QRMA) Certification Batch 4	47	19-21 Agustus 2021 August 19-21, 2021
5	Sertifikasi Qualified Risk Management Analysis (QRMA) Batch 5 Qualified Risk Management Analysis (QRMA) Certification Batch 5	33	16-17 September 2021 September 16-17, 2021
6	Sertifikasi Certified Risk Management Officer (CRMO) Batch 1 Certified Risk Management Officer (CRMO) Certification Batch 1	2	13-15 Mei 2021 May 13-15, 2021
7	Sertifikasi Certified Risk Management Officer (CRMO) Batch 2 Certified Risk Management Officer (CRMO) Certification Batch 2	2	19-21 Juni 2021 June 19-21, 2021
8	Sertifikasi Certified Risk Management Officer (CRMO) Batch 3 Certified Risk Management Officer (CRMO) Certification Batch 3	7	17-19 Agustus 2021 August 17-19, 2021
9	Sertifikasi Certified Risk Management Officer (CRMO) Batch 4 Certified Risk Management Officer (CRMO) Certification Batch 4	3	14-16 September 2021 September 14-16, 2021

Pada tahun 2021 telah dilakukan sosialisasi sebagai berikut:

In 2021, PLN NP carried out the following socialization:

Kegiatan Awareness Manajemen Risiko
Risk Management Awareness Activities

No	Kegiatan Activity	Tanggal Date
1	Focus Group Discussion (FGD) Persiapan Implementasi PERMEN No. PER-5/MBU/09/2021 di PLN Grup dan Anak Perusahaan/Subholding Focus Group Discussion (FGD) Preparation for Implementation of PERMEN NO. PER-5/MBU/09/2021 in PLN Group and Subsidiaries/Sub-holdings	11-13 Januari 2021 January 11-13, 2021
2	Roadshow Manajemen Risiko Strategis Anak Perusahaan PT PLN Nusantara Power Roadshow on Strategic Risk Management of PT PLN Nusantara Power's Subsidiaries	PUSC (19 Februari 2021), PUSC (19 Maret 2021), PUNSC (21 Maret 2021), RR (13 April 2021) PUSC (February 19, 2021), PUSC (March 19, 2021), PUNSC (March 21, 2021), RR (April 13, 2021)
3	Sosialisasi Manajemen Risiko dan Kepatuhan Terintegrasi ke Unit UPSK dan UPK Socialization of Integrated Risk Management and Compliance to KGU and GGU Units	16-17 Februari 2021 February 16-17, 2021
4	Workshop Penggunaan Aplikasi I-Care dan Sosialisasi UHRDE Unit Workshop on Using the I-Care Application and Socialization of the UHRDE Unit	8-9 Maret 2021 March 8-9, 2021
5	Sosialisasi Manajemen Risiko dan Kepatuhan untuk Risk Officer Kantor Pusat PT PLN Nusantara Power Socialization of Risk Management and Compliance for Risk Officers at PT PLN Nusantara Power Headquarter	4 Maret 2021 March 4, 2021
6	Sosialisasi Kriteria Maturity Level RKM Unit tahun 2021 dan Evaluasi Pengelolaan Manajemen Risiko Unit TW I 2021 RKM Unit Maturity Level Criteria and Evaluation of Unit Risk Management for Q1/2021	4 Mei 2021 May 4, 2021
7	Focus Group Discussion (FGD) Manajemen Risiko TW II Tahun 2021 Focus Group Discussion (FGD) Risk Management for Q2/2021	19 Mei 2021 May 19, 2021

No	Kegiatan Activity	Tanggal Date
8	Knowledge sharing/pendalaman proses bisnis dan isu strategis proyek, pembangkitan, energi primer dan pengaturan sistem Knowledge sharing in-depth business processes and strategic issues for projects, generation, primary energy and system management	15 Mei 2023 May 15, 2023
9	Workshop Risk Modeling Kuantifikasi Profil Risiko Korporat PLN Nusantara Power Tahun 2024 Risk Modeling Workshop, Quantification of PLN Nusantara Power's Corporate Risk Profile in 2024	4-6 Oktober 2023 October 4-6, 2023
10	Risk Look membahas risiko cyber attack dan lesson learned ledakan tanur rotel di Morowali Risk Look discusses the risk of cyber attacks and lessons learned from the rotel furnace explosion in Morowali	30,31 Desember 2023 December 30, 31, 2023

Evaluasi Kinerja Manajemen Risiko

Risk Management Performance Evaluation

Perusahaan secara berkala melakukan evaluasi atas kinerja pengelolaan risiko untuk dapat melihat kecukupan sistem manajemen risiko telah dijalankan. Evaluasi dilakukan dengan metode penilaian Maturity Level ERM dan Risk Survey. Perusahaan terus melakukan perbaikan atas efektivitas manajemen risiko sesuai dengan OFI (Opportunity for Improvement) yang dihasilkan dari evaluasi kinerja manajemen risiko tersebut.

Telah dilakukan Assessment ML ERM PLN NP Semester 2 Tahun 2023 dengan kriteria PLN, dengan nilai validasi 4,29 di atas target Semester 2 sebesar 4,2. Assessment Maturity Level ERM pada unit yang dikelola PLN NP dilakukan satu semester sekali oleh assessor yang ditunjuk oleh bidang kinerja korporat. Penilaian maturity level ERM baik anak perusahaan maupun unit akan dilaksanakan di akhir tahun 2023. Namun demikian, setiap triwulan unit tetap melakukan self-assessment maturity level ERM untuk memastikan proses ERM di unit tetap berjalan sesuai yang direncanakan.

The Company periodically evaluates risk management performance to see whether the risk management system has been implemented sufficiently. PLN NP evaluates it by using the ERM Maturity Level and Risk Survey assessment methods. The Company continues to improve the effectiveness of risk management following OFI (Opportunity for Improvement) resulting from the risk management performance evaluation.

PLN NP made assessment using PLN criteria, with a validation value of 4.29 above the Semester 2 target of 4.2. The ERM Maturity Level Assessment in units managed by PLN NP is carried out once a semester by assessors appointed by the corporate performance sector. The ERM maturity level assessment for both subsidiaries and units was assessed at the end of 2023. However, every quarter the unit continues to carry out an ERM maturity level self-assessment to ensure the ERM process in the unit continues to run as planned.

Hasil Assessment Maturity Level ERM Unit
Assessment Results of ERM Unit Maturity Level

No	Unit	Target 2023 Target 2023	Asessor KP HO Assessment
1	UP Indramayu Indramayu (U)	3,49	3,67
2	UP Pacitan Pacitan (U)	3,49	3,67
3	UP TJ. Awar-Awar TJ. Awar-Awar (U)	3,49	3,68
4	UP Rembang Rembang (U)	3,49	3,67
5	UP Paiton Paiton (U)	2,95	3,27
6	UP Pulang Pisau Pulang Pisau (U)	3,43	3,43
7	UP Tenayan Tenayan (U)	3,49	3,49
8	UP Kaltim Teluk Kaltim Teluk (U)	3,40	3,42
9	UPK Bukit Asam Bukit Asam (CCS)	3,50	3,93
10	UPK Sebalang Sebalang (CCS)	3,50	3,59
11	UPK Tanahair Tanahair (CCS)	2,50	2,60

No.	Unit	Target 2023 Target 2023	Asessor KP HO Assessment
13	UPK Nagan Raya Nagan Raya (D33)	3,50	2,64
15	UPK Purwajaya Purwajaya (D35)	3,50	3,50
14	UP Muara Karang Muara Karang (D1)	3,75	3,75
16	UP Muara Tawar Muara Tawar (D2)	3,75	3,70
16	UP Arun Arun (D3)	3,25	3,20
17	UP Gresik Gresik (D4)	3,75	3,85
18	UPDK Belawan Belawan (D31)	3,50	3,71
19	UHBD	3,5	3,53
20	UPDK Balikpapan Balikpapan (D32)	3,50	3,71
21	UPDK Palangkaraya Palangkaraya (D33)	3,50	2,75
22	UPDK Kupang Kupang (D34)	3,50	2,71
23	UPDK Gorontalo Gorontalo (D36)	3,50	3,70
24	UPDK Kendari Kendari (D37)	3,50	2,39
25	UPDK Tarakan Tarakan (D38)	3,50	3,71
26	UP Cilegon Cilegon (D5)	3,75	3,78
27	UP Brantas Brantas (D6)	3,75	3,79
28	UPDK Bandar Lampung Bandar Lampung (D39)	3,50	2,67
29	UPDK Pekanbaru Pekanbaru (D39)	3,50	3,71
30	UPDK Minahasa Minahasa (D39)	3,50	2,83
31	UPDK Pandan Pandan (D39)	3,50	3,50
32	UPDK Sabang Sabang (D39)	3,50	3,70
33	PJB Academy	3,40	3,75

Hasil assessment maturity level ERM menunjukan bahwa tingkat kematangan sistem manajemen risiko Perusahaan:

1. Budaya sadar risiko cukup melekat pada risk owner, hal ini ditandai dengan upaya dilakukannya pengendalian risiko.
2. Manajemen risiko telah menjadi dasar dalam pengambilan keputusan.
3. Manajemen risiko telah menjadi bagian dari seluruh proses bisnis Perusahaan.

Direksi dan Dewan Komisaris menandang bahwa sistem manajemen risiko Perusahaan telah cukup memadai. Namun demikian, Direksi dan Dewan Komisaris terus mendorong peningkatan pengelolaan risiko Perusahaan melalui pengawasan aktif oleh Direksi dan pengawasan oleh Dewan Komisaris, memastikan kecukupan kebijakan dan standar prosedur Manajemen Risiko dan penetapan strategi Risiko berdasarkan ketentuan yang berlaku, memastikan kecukupan implementasi mencakup proses komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, identifikasi, pengukuran, perlakuan, pencatatan, pemantauan, serta sistem informasi Manajemen Risiko di Perusahaan.

The results of the ERM maturity level assessment show the following maturity level of the Company's risk management system:

1. The risk awareness culture is quite inherent in the risk owner. This is indicated by efforts to manage risks.
2. Risk management has become the basis for decision-making.
3. Risk management has become part of all Company business processes.

The Board of Directors and Board of Commissioners consider that the Company's risk management system is adequate. However, the Board of Directors and Board of Commissioners continue to encourage improvements in the Company's risk management through active management by the Board of Directors and supervision by the Board of Commissioners, ensure the adequacy of Risk Management policies and standard procedures and the determination of Risk strategies based on the applicable regulations, ensuring the adequacy of implementation includes communication and consultation processes, establishing context, identification, measurement, treatment, recording, monitoring, as well as Risk Management information systems in the Company.

Kode Etik Perusahaan
Code of Conduct

Keberlanjutan bisnis salah satunya bergantung pada bagaimana Perusahaan membangun budaya dan perilaku etis di lingkungan Perusahaan serta hubungan baik dengan pemangku kepentingan. Perusahaan perlu menciptakan lingkungan bisnis yang mendukung tinggi norma-norma yang ada untuk memastikan upaya penciptaan nilai yang dilakukan dapat berjalan secara optimal. Standar perilaku etis yang diharapkan oleh Perusahaan dari seluruh Insan Perusahaan sebagai pelaku bisnis korporasi didokumentasikan dalam bentuk Standar Etika Perusahaan (Code of Conduct).

The sustainability of the business depends on how the Company builds a culture and ethical behavior within the Company and maintains good relationships with stakeholders. The Company needs to create a business environment that upholds existing norms to ensure that value creation efforts can run optimally. The ethical behavior standards expected by the Company from all Company Personnel as corporate business actors are documented in the form of the Company's Code of Conduct (CoC).

Penyusunan COC bertujuan untuk memberikan pedoman yang harus dipatuhi oleh Insan Perusahaan dan menjadi kriteria untuk menilai apakah seorang Insan Perusahaan telah memenuhi atau melakukan penyimpangan. Perusahaan telah menetapkan kode etik Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa-Bali No. 002.K/021/DIR/2019 dan 005.K/DK/PJB/2019 tentang Standar Etika Perusahaan (Code of Conduct) PT Pembangkitan Jawa-Bali. Standar Etika Perusahaan secara berkala dievaluasi dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan pemutakhiran dalam rangka relevansinya terhadap kondisi bisnis, lingkungan dan sosial Perusahaan yang terus berkembang.

The purpose of drafting the CoC is to provide guidelines that must be adhered to by Company Personnel and serve as criteria for assessing whether a Company Personnel has complied or deviated. The Company has established a code of conduct based on the Joint Decree of the Directors and the Board of Commissioners of PT Pembangkitan Jawa-Bali No. 002.K/021/DIR/2019 and 005.K/DK/PJB/2019 concerning the Company's Code of Conduct (CoC) of PT Pembangkitan Jawa-Bali. The Company's Code of Conduct is periodically evaluated and, if necessary, updated to maintain its relevance to the evolving business, environmental, and social conditions of the Company.

Budaya Perusahaan
Company Culture

Perusahaan mengimplementasikan AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) sebagai Budaya Perusahaan (Core Values). AKHLAK sebagai core values PLN NP merupakan "the way we do things around here" yang merjadi nilai, anggapan, asumsi, sikap, dan norma perilaku yang telah melembaga termudah bersepat dalam wujud penampilan, sikap, dan tindakan, sehingga menjadi identitas Perusahaan. Perusahaan telah menerapkan core values AKHLAK sebagai Budaya Perusahaan sebagai bagian dari transformasi Human Capital di BUMN dan transformasi PT PLN (Persero).

The Company implements AKHLAK (Trustworthy, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, Collaborative) as the Company's Core Values. AKHLAK, as the core values of PLN NP, represents "the way we do things around here" and includes the values, assumptions, attitudes, and behavior norms that are institutionalized and manifested in the form of appearance, attitudes, and actions, thus becoming the Company's identity. The Company has formalized the AKHLAK core values as the Company Culture as part of the Human Capital transformation in SOEs and the transformation of PT PLN (Persero).

Core Values AKHLAK
Core Values AKHLAK

Nilai Utama Key Values	Definisi Definition	Panduan Perilaku Value Description
Amanah Trustworthy	Memegang teguh kepercayaan yang diberikan Uphold the trust given	1. Menepati janji dan komitmen 2. Bertanggung jawab atas tugas, kewajiban, dan tindakan yang dilakukan 3. Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika 1. Fulfill promises and commitments 2. Responsible for the tasks, decisions and actions carried out. 3. Adhere to moral and ethical values

Nilai Utama Key Values	Definisi Definition	Panduan Perilaku Value Description
Kompeten Competent	Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas Continue to learn and develop capabilities	1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. 2. Membantu orang lain belajar 3. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik 1. Increase personal competence to answer ever-changing challenges. 2. Helping other people learn. 3. Complete tasks with the best quality.
Harmonis Harmonious	Saling peduli dan menghargai perbedaan. Caring for each other and respecting differences	1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. 2. Suka menolong orang lain. 3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif. 1. Respect everyone regardless of background. 2. Like to help other people. 3. Building a conducive work environment.
Loyal Loyal	Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara. Dedicated and prioritizing the interests of the Nation and State.	1. Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan Negara. 2. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar. 3. Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika. 1. Maintain the good name of fellow employees, leaders, BUMN and the State. 2. Willing to make sacrifices to achieve greater goals. 3. Obey the leadership as long as it does not conflict with law and ethics.
Adaptif Adaptive	Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Continue to innovate and be enthusiastic in driving or facing change.	1. Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik. 2. Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi. 3. Bertindak proaktif. 1. Quickly adapt to become better. 2. Continuously make improvements following technological developments. 3. Act proactively.
Kolaboratif Collaborative	Membangun kerja sama yang sinergis. Building synergetic cooperation.	1. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. 2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. 3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. 1. Provide opportunities for various parties to contribute. 2. Open to working together to produce added value. 3. Mobilize the utilization of various resources for common goals.

Internalisasi Budaya Perusahaan

Internalization of Company Culture

Penguatan budaya dilakukan sesuai Roadmap Budaya Perusahaan dalam menginternalisasikan Core Values AKHLAK di lingkungan PLN NP. Implementasi penguatan budaya Perusahaan dilakukan dengan membangkitkan awareness, membangun pemahaman (Understanding) dan kemudian mendorong keterlibatan insan Perusahaan (acceptance), sehingga pada akhirnya semua karyawan diharapkan memiliki komitmen penuh dalam mewujudkan visi Perusahaan (commitment/transform).

The strengthening of culture is carried out according to the Company Culture Roadmap to internalize the Core Values of AKHLAK within PLN NP. The implementation of cultural strengthening is conducted by raising awareness, building understanding, and then encouraging the involvement of Company Personnel (acceptance). Ultimately, all Company employees are expected to have full commitment to realizing the Company's vision (commitment/transform).

Roadmap Budaya Implementasi Core Values AKHLAK Tahun 2020-2024
Roadmap for Implementing Core Values AKHLAK 2020-2024

Roadmap Implementasi Budaya Perusahaan mencakup penguatan 3 (tiga) aspek untuk membangun budaya Perusahaan yang dijabarkan sebagai berikut:

The Company Culture Implementation Roadmap includes the strengthening of three aspects to build the Company culture, which are detailed as follows:

Aspek Perkuat Budaya
Aspects of Strengthening Culture

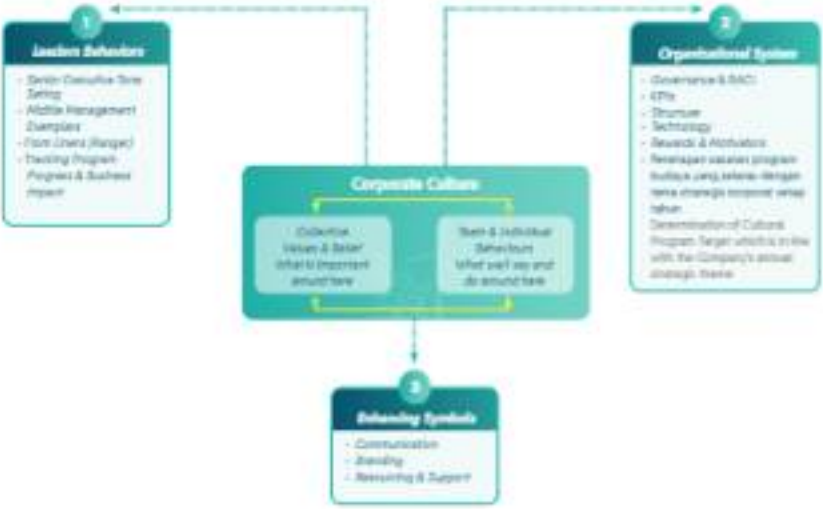

Roadmap Budaya Implementasi Core Values AKHLAK tahun 2020-2024 memasuki periode Milestone 3 tahun 2023-2024. Tema penguatan budaya dan key message Milestone 3 tahun 2023-2024 adalah *Strengthening Corporate Culture Purpose*. Penguatan sasaran budaya ini dilakukan dengan memfokuskan program strategis perusahaan dan KPI Unit Kerja yang berdampak pada value creation (nilai Direktorat/ Korporat, dengan 6 sasaran budaya (Corporate Culture Purpose/ CCP), yaitu:

1. Standardisasi
2. Good Housekeeping
3. Penghapusan Kemubadzoran
4. Nol Kecelakaan Kerja
5. Kepuasan Pelanggan
6. Wellbeing

Keenam CCP ini dikurutkan ke dalam 7 program, dengan 5 yang di-roll out ke seluruh Unit PLN NP dan 2 program di-roll out di Unit pilot project. Membangun budaya memerlukan konsistensi program dan komitmen seluruh stakeholder mengawal program menjadi kunci. Beberapa pengakan dilakukan pada Program Budaya PLN NP pada implementasi Milestone 3 tersebut, sebagaimana dijabarkan sebagai berikut:

The 2020-2024 Company Culture Roadmap implementation of the Core Values AKHLAK has entered Milestone 3 for the period 2023-2024. The theme and key message of culture strengthening for Milestone 3 of 2023-2024 is Strengthening Corporate Culture Purpose. This cultural strengthening target is carried out by focusing on the Company's strategic programs and KPI Unit Work, impacting value creation at the Directorate/Corporate level, with six cultural targets (Corporate Culture Purpose/CCP), namely:

1. Standardization
2. Good Housekeeping
3. Elimination of Waste
4. Zero Work Accidents
5. Customer Satisfaction
6. Wellbeing

These six CCPs are translated into seven programs, with five rolled out to all PLN NP Units and two rolled out in pilot project units. Building culture requires program consistency and the commitment of all stakeholders, making program oversight crucial. Some enhancements in the PLN NP Culture Program during Milestone 3 implementation are depicted as follows:

Program Budaya PLN NP Milestone 3
PLN NP Culture Program Milestone 3

Pokok Muatan Kode Etik Perusahaan
Code of Conduct Content

Kode etik Perusahaan dirumuskan dengan jelas dan komprehensif yang mencakup nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan perilaku yang diharapkan dari setiap Insan Perusahaan. Kode etik sebagaimana diatur dalam Standar Etika Perusahaan (Code of Conduct) secara fundamental memuat ketentuan mengenai standar etika perilaku dan etika bisnis dalam membangun hubungan dengan para pemangku kepentingan mencakup karyawan, pelanggan, rekanan, kompetitor, mitra kerja, pemerintah, dan masyarakat. "ISHIMAGAT" merupakan akronim dari muatan Standar Etika Perusahaan sebagai penyederhanaan dari muatan pokok yang diatur berkaitan dengan etika pengelolaan Perusahaan yang harus dipatuhi oleh seluruh Insan Perusahaan. Penjelasan mengenai cakupan muatan yang diatur dalam Standar Etika Perusahaan adalah sebagai berikut:

The Company's code of conduct is formulated clearly and comprehensively, encompassing values, principles, and behaviors expected from every Company Personnel. The code of conduct, as stipulated in the Company's Code of Conduct, fundamentally includes provisions regarding ethical behavior standards and business ethics in building relationships with stakeholders, including employees, customers, partners, competitors, work partners, the government, and society. "ISHIMAGAT" is an acronym representing the contents of the Company's Code of Conduct, simplifying the main points related to the management ethics of the Company that must be adhered to by all Company Personnel. The explanation of the scope of the Company's Code of Conduct is as follows:

Pokok Muatan Standar Etika Perusahaan
Main Contents of the Company's Code of Conduct

Cakupan Muatan Payload Coverage	Penjelasan	Explanation
Kegiatan Politik dan Sosial Perusahaan Company Political and Social Activities	Perusahaan mempertahankan sikap netral terhadap partai politik sesuai dengan tata nilai **integrity** dan perilaku utama **etis**. Oleh karena itu, Perusahaan tidak memberikan bantuan dana ke partai politik, politisi, ataupun calon pejabat manapun. Namun hal ini tidak berarti Perusahaan melarang hak karyawannya sebagai warga negara untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik.	The company maintains a neutral attitude towards political parties in accordance with the values of **integrity** and **ethical** behavior. Therefore, the Company does not provide financial assistance to political parties, politicians or any candidates for office. However, this does not mean that the Company prohibits its employees' rights as citizens to participate in political activities.
	Perusahaan juga berkomitmen untuk mengutamakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat terutama di sekitar pusat kegiatan operasi. Pengembangan dan pemberdayaan tersebut dilakukan dalam bidang ekonomi sosial budaya dan kesepatan, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Insan Perusahaan yang berwenang dilarang untuk melakukan diskriminasi dan bersifat subjektif dalam menjalankan program CSR seperti mendahulukan program CSR di sekitar tempat asal insan Perusahaan tersebut. Hal ini didasari oleh sesuai dengan tata nilai **integrity** dan perilaku utama **amanah**.	The company is also committed to prioritizing community development and empowerment, especially around operational activity centers. This development and empowerment is prioritized in the economic, socio-cultural and religious fields, education, health and the environment. Authorized Company Personnel are prohibited from discriminating and being subjective in carrying out CSR programs, such as prioritizing CSR programs in the area where the Company Personnel originate. This is based on compliance with the values of **integrity** and the main behavior of **trustworthiness**.
Etika Bekerja Insan Perusahaan Work Ethics of Company Personnel	Setiap Insan Perusahaan berkomitmen untuk tumbuh dan berkembang bersama dengan Perusahaan. Oleh karena itu, dirancang aturan-aturan untuk menjaga komitmen Insan Perusahaan terhadap pengembangan diri Insan Perusahaan serta Perusahaan secara keseluruhan. Komitmen yang dimaksud yaitu: 1. Komitmen pengembangan diri 2. Komitmen kemajuan & pembangunan perusahaan 3. Komitmen anti diskriminasi	Every Company Person is committed to growing and developing together with the Company. Therefore, rules are designed to maintain the commitment of Company Personnel to the personal development of Company Personnel and the Company as a whole. The commitment in question is: 1. Commitment to self-development 2. Commitment to company progress & development 3. Commitment to anti-discrimination
Perlindungan Informasi, Hak Kekayaan Intelektual dan Penggunaan Media Sosial Information Protection, Intellectual Property Rights and Use of Social Media	Sesuai dengan tata nilai **integrity** dengan perilaku utama jujur dan **amanah**, setiap Insan Perusahaan berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan sesuai klasifikasinya. Pengungkapan informasi kepada Publik dan Stakeholder hanya harus dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi informasi, kepentingan Perusahaan, dan kebutuhan pihak yang berkepentingan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.	In accordance with the values of **integrity** with the main behavior being **honesty** and **trustworthiness**, every Company Person is obliged to maintain the confidentiality of Company information according to its classification. Disclosure of information to the public and other stakeholders must be carried out by taking into account the classification of information, the Company's interests and the needs of interested parties in accordance with applicable laws.
	Perusahaan tidak mendukung adanya praktik penjualan informasi dari orang dalam (Insider trading) dan Perusahaan akan melakukan tindakan hukum terhadap pelaku Insider trading sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, seluruh Insan Perusahaan dilarang melakukan praktik penjualan informasi dari orang dalam.	The Company does not tolerate the practice of selling information from insiders (Insider trading) and the Company will take legal action against perpetrators of Insider trading in accordance with applicable regulations. Therefore, all Company personnel are prohibited from carrying out the practice of selling information from insiders.
	Perusahaan menghargai Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak lain, oleh karena itu Insan Perusahaan dilarang untuk menggunakan HAKI milik pihak lain tanpa izin dan prosedur yang sudah diatur karena dapat mengakibatkan Perusahaan menanggung gugatan hukum. Di sisi lain, Perusahaan dan seluruh Insan Perusahaan juga wajib melindungi HAKI milik Perusahaan karena HAKI adalah intangible asset yang sangat bernilai untuk Perusahaan.	The Company respects the Intellectual Property Rights (IPR) of other parties, therefore Company Personnel are prohibited from using IPR belonging to other parties without permission and procedures that have been regulated because this could result in the Company incurring legal action. On the other hand, the Company and all Company Personnel are also obliged to protect the Company's IPR because IPR is a very valuable intangible asset for the Company.
	Media sosial yang mengatasnamakan Perusahaan hanya boleh dikelola oleh pihak yang diberi hak oleh Perusahaan. Unit dan bagian lain dilarang membuat media sosial sendiri yang mengatasnamakan Perusahaan. Insan Perusahaan dilarang mengunggah pernyataan di media sosial yang mengatasnamakan Perusahaan, kecuali pihak yang telah diberi kewenangan oleh Perusahaan. Perusahaan menghormati kebebasan Insan Perusahaan untuk menyampaikan pikirannya dalam bentuk lisan maupun tulisan di dalam media sosial pribadi Insan Perusahaan, selama konten yang diunggah bukan hal yang merugikan perusahaan.	Social media on behalf of the Company may only be managed by parties authorized by the Company. Units and other sections are prohibited from creating their own social media in the name of the Company. Company personnel are prohibited from uploading statements on social media on behalf of the Company, except for parties who have been authorized by the Company. The Company respects the freedom of Company Personnel to express their thoughts in verbal or written form on the personal social media of Company Personnel, as long as the content uploaded is not detrimental to the company.

Cakupan Muatan Payload Coverage	Penjelasan	Explanation
Benturan Kepentingan Conflict of Interest	Aturan mengenai benturan kepentingan dibuat sesuai dengan nilai integrity dan perilaku utama etis, jujur dan amanah. Benturan kepentingan terjadi apabila Insan Perusahaan: 1. Terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan pesaingan dengan Mitra Usaha Perusahaan. 2. Bekerja di perusahaan pesaing atau dengan Mitra Usaha Perusahaan. 3. Memiliki hubungan keluarga langsung dengan pemilik atau pengambil keputusan Mitra Usaha Perusahaan.	Rules regarding conflicts of interest are made in accordance with the values of integrity and the main behavior of being ethical, honest and trustworthy. A conflict of interest occurs if Company Personnel: 1. Be involved directly or indirectly in the management of competing companies or with the Company's Business Partners. 2. Work in a competing company or with a company business partner. 3. Have a direct family relationship with the owner or decision maker of the Company's Business Partners.
	Apabila terjadi benturan kepentingan tersebut maka Insan Perusahaan harus mengundurkan diri dari proses pengambilan keputusan sesuai ketentuan berlaku.	If a conflict of interest occurs, Company Personnel must withdraw from the decision making process in accordance with applicable regulations.
Perlindungan Aset Perusahaan Company Asset Protection	Hak atas aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dan digunakan untuk pencapaian tujuan Perusahaan. Sesuai dengan nilai **integrity** dan perilaku utama **etis**, disusunlah pedoman perilaku yang bertujuan untuk memelihara keutuhan dan keselamatan Aset Perusahaan.	Property/Assets are resources owned by the company and used to achieve the company's goals. In accordance with the values of **integrity** and core **ethical** behavior, a code of conduct has been prepared which aims to maintain the integrity and safety of Company Assets.
Networking dengan Stakeholder Networking with Stakeholders	Setiap Insan Perusahaan wajib untuk menjaga hubungan baik dengan seluruh Stakeholder Perusahaan sesuai dengan nilai-nilai Perusahaan. Pedoman dalam hubungan ini diatur dalam bentuk kewajiban dan larangan yang harus dipenuhi oleh seluruh Insan Perusahaan.	Every Company Person is obliged to maintain good relations with all Company Stakeholders in accordance with the Company's values. Guidelines in this relationship are regulated in the form of obligations and prohibitions that must be fulfilled by all Company Personnel.
Gratifikasi Gratification	Setiap Insan Perusahaan senantiasa mematuhi aturan terkait Gratifikasi sebagai pencerminan dari salah satu nilai Perusahaan, yaitu **integrity** dengan perilaku utama **etis, jujur** dan **amanah** yang bertujuan untuk menciptakan iklim persaingan yang sehat dan bersih di Perusahaan.	Every Company Personnel always complies with the rules regarding Gratification as a reflection of one of the Company's values, namely **integrity** with the main behavior being **ethical, honest** and **trustworthy** which aims to create a climate of healthy and clean competition in the Company.
	Setiap Insan Perusahaan wajib mengetahui perkembangan aturan terkini mengenai Gratifikasi dan mematuhi aturan yang berlaku tersebut. Aturan-aturan tersebut harus disosialisasikan ke seluruh Insan Perusahaan untuk menghindari terjadinya Gratifikasi di lingkungan Perusahaan.	Every Company Personnel is required to be aware of the latest developments in regulations regarding Gratuities and comply with the applicable regulations. These rules must be socialized to all Company Personnel to avoid gratification within the Company.
Kepedulian terhadap K3 serta Kelestarian Lingkungan Concern for K3 and Environmental Conservation	Komitmen Perusahaan terhadap pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta pelestarian lingkungan tercermin dari nilai **profesional** dengan perilaku utama **mengutamakan keselamatan dan lingkungan** yang ada di dalam tata nilai Perusahaan. Aktivitas di Perusahaan berorientasi terhadap keselamatan dan keharmonisan lingkungan.	The Company's commitment to the importance of Occupational Safety and Health (K3) and environmental preservation is reflected in **professional** values with the main behavior of **prioritizing safety and the environment** which is in the Company's values. Activities in the Company are oriented towards safety and environmental harmony.
	Perusahaan berkomitmen untuk meningkatkan kepedulian dan menanamkan nilai-nilai Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta pelestarian lingkungan hidup terhadap seluruh Insan Perusahaan.	The Company is committed to increasing awareness and instilling the values of Occupational Safety and Health as well as environmental preservation among all Company Personnel.
Integritas Proses dan Data Pelaporan Keuangan Integrity of Financial Reporting Processes and Data	Seluruh transaksi bisnis Perusahaan harus dijambarkan dalam bentuk laporan keuangan. Hal ini tercermin dari nilai **integrity** dengan perilaku utama jujur dan nilai **profesional** dengan perilaku utama **bertanggung jawab**. Perusahaan wajib membuat laporan keuangan secara tepat dan akurat untuk mendukung integritas dan reputasi Perusahaan. Semua proses pencatatan dibuat dengan memastikan bahwa seluruh bentuk lengkap, akurat, tepat waktu dan dapat dibuat audit transaksinya.	All Company business transactions must be described in the form of financial reports. This is reflected in the value of **integrity** with the main behavior being honest and **professional** values with the main behavior being **responsible**. Companies are required to make financial reports precisely and accurately to support the integrity and reputation of the Company. All recording processes are carried out by ensuring that all files are complete, accurate, timely and traceable as evidence of transactions.

Pemberlakuan Kode Etik Perusahaan Bagi Seluruh Level Organisasi

Implementation of the Company's Code of Conduct at All Organizational Levels

Pemberlakuan kode etik bagi seluruh insan Perusahaan merupakan langkah penting untuk menjaga integritas, moralitas, dan profesionalisme di lingkungan kerja. Penetapan kode etik Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa-Bali No. 002.K/DIR/2019 dan 005.K/DK/PJB/2019 tentang Standar Etika Perusahaan (*Code of Conduct*) PT Pembangkitan Jawa-Bali mewajibkan pemberlakukan Standar Etika Perusahaan bagi Direksi dan Dewan Komisaris beserta seluruh karyawan yang memiliki hubungan kerja langsung baik karyawan tetap maupun kontrak. Pernyataan kepatuhan terhadap Standar Etika Perusahaan harus dibuat oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan seluruh karyawan secara berkala setiap tahun. Standar Etika Perusahaan juga dijadikan sebagai salah satu target kinerja unit di dalam aspek OCR sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan kerja yang sehat, berintegritas, dan berkelanjutan.

Implementing the code of conduct for all Company personnel is an important step to maintain integrity, morality, and professionalism in the workplace. The establishment of the Company's code of conduct based on the Joint Decree of the Directors and the Board of Commissioners of PT Pembangkitan Jawa-Bali No. 002.K/DIR/2019 and 005.K/DK/PJB/2019 concerning the Company's Code of Conduct (CoC) of PT Pembangkitan Jawa-Bali marks the enforcement of the Company's Code of Conduct for the Directors and Board of Commissioners as well as all employees with direct working relationships, both permanent and contract employees. A compliance statement regarding the Company's Code of Conduct must be made by the Directors, Board of Commissioners, and all employees regularly every year. The Company's Code of Conduct is also one of the performance targets in the OCR aspect as part of the effort to create a healthy, integrated, and sustainable work environment.

Sosialisasi Kode Etik Perusahaan

Socialization of the Company's Code of Conduct

Perusahaan memastikan bahwa kode etik Perusahaan tidak hanya dibuatkan secara formal, tetapi juga diinternalisasi dan diterapkan oleh seluruh insan Perusahaan. Kode etik disosialisasikan secara berkala kepada seluruh level organisasi dari operasional sampai top management untuk membangun perilaku beretika yang mengalir pada setiap kegiatan bisnis yang dijalankan di lingkungan Perusahaan. Perusahaan memanfaatkan media komunikasi dan informasi di seluruh Unit Kerja Perusahaan, meliputi BCD Talk, sosialisasi atau refreshment, email, website, intranet, visual management, dan forum internal untuk menyosialisasikan kode etik kepada seluruh karyawan. Perusahaan juga menyusun ringkasan *Code of Conduct* dalam bentuk buku saku yang dapat mempermudah pemahaman penerapannya dalam kegiatan sehari-hari. Sosialisasi juga diberikan bagi karyawan baru pada saat pembekalan Code of Conduct, Budaya Perusahaan dan nilai-nilai GCG yang dilakukan oleh tim GCG. Guna memastikan sosialisasi terlaksana secara efektif serta memastikan dan mengoptimalkan pemahaman oleh karyawan, Perusahaan melakukan evaluasi dan pengukuran terhadap proses pelaksanaan dan hasil/output mengenai pemahaman karyawan terhadap Standar Etika Perusahaan.

The Company ensures that the code of conduct is not only formally established but also internalized and applied by all Company Personnel. The code of conduct is periodically socialized at all organizational levels from operations to top management to build ethical behavior rooted in every business activity conducted within the Company. The Company uses communication and information media across all Work Units, including BCD Talks, socialization or refreshment, email, website, intranet, visual management, and internal forums to disseminate the code of conduct to all employees. The Company also prepares a summary of the Code of Conduct in a pocketbook form to facilitate understanding and application in daily activities. Socialization is also provided for new employees during Code of Conduct, Company Culture, and GCG values briefings conducted by the GCG team. To ensure effective socialization and optimize employee understanding, the Company evaluates and measures the process and results/output regarding employees' understanding of the Company's Code of Conduct.

Sanksi Pelanggaran Kode Etik Perusahaan

Sanctions for Violating the Company's Code of Conduct

Pelanggaran atas kode etik Perusahaan akan diberikan sanksi sesuai dengan mekanisme internal Perusahaan yang mengacu pada Peraturan Direksi PT Pembangkitan Jawa-Bali No.00001/0019/DIR/2021 tentang Peraturan Disiplin Karyawan PT Pembangkitan

Violations of the Company's code of conduct will result in sanctions according to the Company's internal mechanisms based on the PT Pembangkitan Jawa-Bali Director's Regulation No.00001/0019/DIR/2021 concerning Employee Discipline Regulations of

Jawa-Bali. Pemberian sanksi disiplin dilakukan sebagai bentuk penegakan kodeetik untuk memberikan efek jera dan meminimalisir (mitigasi) dampak risiko fraud yang dapat mempengaruhi kinerja dan citra Perusahaan. Sanksi pelanggaran kode etik dikelompokkan berdasarkan jenis hukuman sebagai berikut:

PT Pembangkitan Jawa-Bali. Disciplinary sanctions are imposed as a form of enforcing the code of conduct to provide a deterrent effect and minimize (mitigate) the risk of fraud that could affect the Company's performance and reputation. Sanctions for code of conduct violations are categorized based on the type of punishment as follows:

Sanksi Disiplin Standar Etika Perusahaan
Disciplinary Sanctions for the Company's Code of Conduct

Jenis Hukuman Types of Punishment	Sanksi Penalty		
	Pokok Basic Punishment		Tambahan Additional Punishment
Disiplin Ringan Light Discipline	1. Peringatan tertulis yang berlaku selama 3 (tiga) bulan; atau 2. Peringatan tertulis yang berlaku selama 6 (enam) bulan	1. Written warning valid for 3 (three) months; or 2. Written warning valid for 6 (six) months	-
Disiplin Sedang Medium Discipline	1. Peringatan tertulis 1 yang berlaku selama 6 (enam) bulan dengan Kriteria Talenta Perlu Penyesuaian (PPS); 2. Peringatan tertulis 2 yang berlaku selama 6 (enam) bulan dengan: a. Pemotongan Tunjangan Posisi (PT) sebesar 75%; dan b. Kriteria Talenta Perlu Penyesuaian (PPS); 3. Peringatan tertulis 2 terakhir yang berlaku selama 6 (enam) bulan dengan kriteria Talenta Sangat Perlu Penyesuaian (SPP); 4. Peringatan tertulis 3 terakhir yang berlaku selama 6 (enam) bulan dengan kriteria Talenta Sangat Perlu Penyesuaian (SPP); 5. Peringatan tertulis 1 terakhir yang berlaku selama 6 (enam) bulan dengan: a. Pemotongan Tunjangan Posisi (PT) sebesar 100%; b. Kriteria Talenta Sangat Perlu Penyesuaian (SPP); dan c. Penurunan 1 grade	1. Written warning 1 which is valid for 6 (six) months with Talent Criteria Needing Adjustment (NPS); 2. Written warning 2 which is valid for 6 (six) months with: a. Cutting Position Allowance (PT) by 75%; And b. Talent Criteria Need Adjustment (NPS); 3. The last 2 written warnings are valid for 6 (six) months with Talent Criteria that Really Need Adjustment (SPP); 4. The last 3 written warnings are valid for 6 (six) months with Talent Criteria that Really Need Adjustment (SPP); 5. Final written warning 1 which is valid for 6 (six) months with: a. Cutting Position Allowance (PT) by 100%; b. Talent Criteria Really Need Adjustment (SPP); And c. Decreased 1 grade	1. Demote 2. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) 1. Demotion 2. Compensation Claims (TGR)
Disiplin Berat Severe Discipline	Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	Termination of Employment (PHK)	Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Compensation Claims (TGR)

Penegakan Kode Etik Perusahaan
Code of Conduct Enforcement

Penerapan kode etik yang efektif dapat mengoptimalkan upaya penciptaan nilai dan menjaga keberlanjutan Perusahaan. Direksi secara konsisten berkomitmen menegakkan kode etik di lingkungan Perusahaan dan memastikan bahwa kode etik dikomunikasikan, dipahami dan diaktualisasikan oleh seluruh insan Perusahaan. Penandatanganan pernyataan kepatuhan kode etik Perusahaan secara berkala merupakan salah satu wujud komitmen penegakan kode etik. Perusahaan melakukan pengawasan terhadap kepatuhan kode etika dan memindak tegas setiap pelaku pelanggaran kode etik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Perusahaan juga memberikan penghargaan kepada individu atau tim yang secara konsisten mengadakan nilai-nilai dan etika Perusahaan sebagai insentif positif bagi seluruh insan Perusahaan untuk mematuhi standar etika.

Effective implementation of the code of conduct can optimize efforts to create value and maintain the Company's sustainability. The Directors consistently commit to enforcing the code of conduct within the Company and ensure that it is communicated, understood, and implemented by all Company Personnel. Signing the compliance statement for the Company's code of conduct regularly is one form of commitment to enforcing the code of conduct. The Company monitors compliance with the code of conduct and takes firm action against any violations following established provisions. The Company also awards individuals or teams that consistently adhere to the Company's values and ethics as a positive incentive for all Company Personnel to comply with the ethical standards.

Perusahaan mendorong setiap karyawan untuk berperan aktif dan wajib melaporkan apabila terdapat indikasi tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Standar Etika Perusahaan melalui fasilitas pengaduan yang telah disediakan untuk mendukung penegakan kode etik Perusahaan. Terdapat dua saluran pengaduan yang disediakan yaitu melalui layanan kepada atasan langsung dan melalui sistem *Whistleblowing System* (WBS) untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di Perusahaan. Selama tahun 2023, terdapat 4 (Empat) pelanggaran disiplin di Perusahaan. Kualitas penegakan kode etik Perusahaan selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

The Company encourages every employee to actively participate and report any indications of actions that can be categorized as violations of the Company's Code of Conduct through complaint facilities provided to support the enforcement of the code of conduct. There are two complaint channels: reports to direct supervisors and the Whistleblowing System (WBS) mechanism, to be followed up according to the Company's applicable regulations. During 2023, there were four disciplinary violations in the Company. The quality of the Company's code of conduct enforcement over the last five years can be seen in the following graph:

Penegakan Pelanggaran Standar Etika Perusahaan Tahun 2019-2023
Enforcement of Violations of the Code of Conduct in 2019-2023

Insan Perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran diperiksa oleh Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Karyawan, dan yang bersangkutan dijatuhi sanksi sesuai jenis dan tindakan pelanggaran berdasarkan ketentuan yang berlaku di Perusahaan. Bentuk pelanggaran dan sanksi atas pelanggaran kode etik yang telah dikeluarkan Perusahaan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Company Personnel found guilty of violations are examined by the Employee Discipline Violation Examination Team, and the individuals concerned are sanctioned according to the type and action of the violation based on the applicable regulations in the Company. The forms of violations and sanctions for the Company's code of conduct violations issued in 2023 are as follows:

Bentuk Pelanggaran dan Jenis Sanksi Pelanggaran Standar Etika
Forms of Violations and Types of Sanctions for Code of Conduct Violations

Bentuk Pelanggaran Forms of Violation	Jumlah Karyawan Terkena Sanksi Disiplin Number of Employees Subject to Disciplinary Sanctions	Jenis Sanksi Types of Sanctions	Hukuman Punishment
Dengan sengaja tidak melaksanakan tugas kedinasan dan/atau tanggung jawab jabatannya Deliberately not carrying out official duties and/or position responsibilities	1	Sedang Medium	Peringatan tertulis 1 yang berlaku selama 6 (enam) bulan dengan Kriteria Talenta Perlu Penyesuaian (PPS) Written warning 1 which is valid for 6 (six) months with Talent Criteria Needs Adjustment (PPS)

Bentuk Pelanggaran Forms of Violation	Jumlah Karyawan Terkena Sanksi Disiplin Number of Employees Subject to Disciplinary Sanctions	Jenis Sanksi Types of Sanctions	Hukuman Punishment
Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan prosedur/ kewenangannya sehingga menyebabkan kerugian Perusahaan Carrying out work in not in accordance with procedures/ authority, causing losses to the Company	2	2 Sedang dan 1 Ringan 2 Medium and 1 Light	**Sedang** : Berupa Peringatan tertulis 1 yang berlaku selama 6 (enam) bulan dengan kriteria Tabelnya Perlu Penyesuaian (PPS) **Ringan** : Berupa Peringatan tertulis 1 yang berlaku selama 6 (enam) bulan **Medium** : In the form of a written warning 1 which is valid for 6 (six) months with Talent Criteria Needing Adjustment (PPS) Light : In the form of a written warning 1 which is valid for 6 (six) months

Evaluasi Implementasi Kode Etik Perusahaan

Code of Conduct Assessment

Perusahaan melakukan evaluasi berkala terhadap muatan dan efektivitas penerapan kode etika perusahaan serta proses sosialisasi atau refreshment yang telah dilakukan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka memastikan dan mengoptimalkan pemahaman oleh karyawan, serta menjaga relevansi muatan kode etik Perusahaan sesuai dengan kondisi internal dan eksternal Perusahaan dan perangkat pendukung lainnya serta mendorong kualitas penerapan dan penegakan kode etik Perusahaan agar dapat mendukung penciptaan nilai yang berkelanjutan. Perusahaan melibatkan karyawan dalam proses pengembangan dan penyusun kode etika Perusahaan dan penerapannya untuk dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan harapan insan Perusahaan, serta memperkuat rasa kepemilikan terhadap kode etik Perusahaan.

The Company periodically assesses the content and effectiveness of the code of conduct implementation as well as the socialization or refreshment processes carried out. This is done to ensure and optimize employee understanding, as well as maintain the relevance of the Company's code of conduct according to internal and external conditions and other supporting devices, and to enhance the quality of the implementation and enforcement of the code of conduct to support sustainable value creation. The Company involves employees in the development and review process of the Company's code of conduct and its implementation to better understand the needs and expectations of Company Personnel, and to strengthen their sense of ownership of the Company's code of conduct.

Kebijakan Anti Korupsi
Anti-Corruption Policy

Perusahaan memiliki komitmen terhadap pencegahan tindak korupsi dalam rangka mengamankan aset, kinerja dan keberlanjutan Perusahaan. Pencegahan tindak korupsi sangat penting untuk meminimalisir adanya risiko Fraud dan permasalahan hukum yang dapat mengindasi inefisiensi dalam pengelolaan Perusahaan serta menjaga reputasi Perusahaan dimata pelanggan, mitra bisnis, akuisisi Pemegang Saham. Kebijakan anti korupsi merupakan bagian dari upaya PLN NP dalam mengawal penciptaan nilai di lingkungan Perusahaan. Perusahaan tidak secara khusus menetapkan kebijakan anti korupsi, namun Perusahaan telah memiliki instrumen kebijakan anti korupsi yang dituangkan dalam Standar Etika Perusahaan serta dituntunan dan dijalankan melalui Program Kebijakan Anti Fraud, Kebijakan Benturan Kepentingan, Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016, Pengendalian Gratifikasi dan memenuhi kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

The Company is committed to preventing corruption to safeguard its assets, performance, and sustainability. Preventing corruption is crucial to minimizing fraud risks and legal issues that can cause inefficiencies in managing the Company and maintaining its reputation among customers, business partners, and shareholders. The anti-corruption policy is part of PLN NP's efforts to ensure value creation within the Company. Although the Company does not have a specific anti-corruption policy, it has implemented anti-corruption instruments outlined in the Company Ethics Standards and enforced through the Anti-Fraud Policy, Conflict of Interest Policy, ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (SMAP), Gratification Control, and compliance with the State Officials Wealth Report (LHKPN).

Program PLN NP Bersih
PLN NP Bersih Program

Program PLN NP bersih merupakan bagian dari program "PLN Bersih Nir Suap" yang didukung dengan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0060.K/DIR/2014 tentang Pedoman PLN bersih. PLN NP telah melakukan deklarasi "PLN NP Bersih" yang diikuti oleh seluruh karyawan serta mitra kerja PLN NP melalui kegiatan Supplier Gathering. Program tersebut diperkuat dengan Pedoman PLN NP Bersih yang ditetapkan Direksi melalui Keputusan Direksi No. 0751.K/010/DIR/2014. Ketentuan terkait dengan gratifikasi juga telah disebarkan secara luas melalui berbagai media cetak maupun elektronik, seperti brosur, pamflet, majalah, website, dan media lainnya. Sosialisasi kepada stakeholders eksternal dilakukan melalui pemberitahuan resmi melalui media massa, pengkomunikasian CoC dalam website perusahaan serta Supplier Gathering.

PLN NP Bersih Program is part of the "PLN Clean No Bribes" initiative, supported by PT PLN (Persero) Board of Directors Regulation No. 0060.K/DIR/2014 regarding Clean PLN Guidelines. PLN NP has declared "Clean PLN NP," which all employees and PLN NP partners participated in through Supplier Gathering events. This program is strengthened by the Clean PLN NP Guidelines established by the Board of Directors through Decision No. 0751.K/010/DIR/2014. Provisions related to gratification have been widely disseminated through various print and electronic media such as brochures, pamphlets, magazines, websites, and other media. External stakeholder socialization is conducted through official notifications via mass media, communication of the Code of Conduct on the Company website, and Supplier Gatherings.

Kebijakan *Anti Fraud*
Anti-Fraud Policy

Instrumen kebijakan dalam upaya pencegahan tindak korupsi di lingkungan Perusahaan salah satunya melalui kebijakan Anti Fraud. Hal tersebut merupakan wujud komitmen PLN NP untuk menjalankan setiap proses bisnis secara bersih, transparan dan akuntabel sebagai bentuk penegakan atas standar etika di lingkungan Perusahaan. Kebijakan Anti Fraud merupakan bagian dari penerapan kebijakan dalam implementasi standar etika Perusahaan yang dituntunkan dari kebijakan Anti Fraud PT PLN (Persero) tertuangkan Surat Keputusan Bersama antara Direksi dan Dewan Komisaris No. 0010.K/010/DIR/2020 dan No. 0010.K/DK-FUB/2020 tentang Kebijakan Anti Fraud di Lingkungan PT PLN.

One of the policy instruments for preventing corruption within the Company is the Anti-Fraud Policy. This policy represents PLN NP's commitment to conducting all business processes transparently and accountably, upholding the ethical standards within the Company. The Anti-Fraud Policy is part of the policy framework for implementing the Company Ethics Standards, ratified from PT PLN (Persero) Anti-Fraud Policy based on a Joint Decree between the Board of Directors and the Board of Commissioners No. 0010.K/010/DIR/2020 and No. 0010.K/DK-FUB/2020 concerning Anti-Fraud Policy within PT PLN.

Benturan Kepentingan
Conflict of Interest

Benturan kepentingan merupakan situasi dimana terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi/golongan insan Perusahaan sehingga dapat mempengaruhi kinerja Perusahaan dan merintangi kemajuan Perusahaan. Kebijakan terkait benturan kepentingan merupakan bagian dari upaya pencegahan tindak korupsi sebagai kebijakan pendukung dalam implementasi standar etika Perusahaan. Memastikan bahwa setiap keputusan dan/atau tindakan yang ambil dalam menjalankan bisnis Perusahaan dilakukan semata-mata demi kepentingan Perusahaan merupakan langkah mendasar untuk mengawal transformasi dan keberlangsungan Perusahaan. Perusahaan menetapkan kebijakan terkait benturan kepentingan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama antara Direksi dan Dewan Komisaris PT PJB No. 003K/021/DIR/2020 dan 004K/DK/PJB/2020 tentang Pengelolaan Benturan Kepentingan di Lingkungan PT PJB.

A conflict of interest arises when there is a disparity between the Company's economic interests and the personal or group economic interests of Company personnel, which can affect the Company's performance and cause losses. The provisions related to conflict of interest are part of the anti-corruption efforts supporting the implementation of the Company Ethics Standards. Ensuring that every decision and/or action taken in running the Company's business is solely for the Company's interests is fundamental to safeguarding the Company's transformation and sustainability. The Company issues conflict of interest policies outlined in a Joint Decree between the Board of Directors and the Board of Commissioners PT PJB No. 003K/021/DIR/2020 and No. 004K/DK/PJB/2020 concerning Conflict of Interest Management within PT PJB.

Insan Perusahaan setiap tahun menyampaikan Pakta Integritas yang berisikan pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan dan akan mencegah/menangani benturan kepentingan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi Perusahaan. Direksi dan Dewan Komisaris yang baru menjabat juga secara khusus harus menandatangani Pakta Integritas dan dipertaharui secara berkala setiap tahun. Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi yang memiliki potensi benturan kepentingan juga tidak diperkenankan ikut serta dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan Perusahaan. Insan Perusahaan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, harus senantiasa mendahulukan kepentingan ekonomis Perusahaan diatas kepentingan ekonomis pribadi atau keluarga, maupun pihak lainnya. Sebagai organ utama tata kelola Perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif.

Every year, Company personnel submit an Integrity Pact stating that they have no conflict of interest and will prevent/manage conflicts of interest to avoid harming the Company. Newly appointed Board of Directors and Board of Commissioners members must also sign an Integrity Pact, updated annually. Members of the Board of Commissioners and Directors with potential conflicts of interest are prohibited from participating in Company decision-making processes. Company personnel must prioritize the Company's economic interests over personal, family, or other interests in performing their duties and responsibilities. As the main governance bodies of the Company, the Board of Commissioners and Directors must avoid domination by any party, remain unaffiliated by specific interests, be free from conflicts of interest and all influences or pressures, to make objective decisions.

Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)
Anti-Bribery Management System (SMAP)

Standar internasional mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016) menjadi panduan untuk organisasi publik, swasta dan nirlaba untuk memberikan kepastian kepada organisasi atas sistem anti penyuapan (adequate procedure) dengan menetapkan serangkaian langkah-langkah pencegahan dan pengendalian yang berkaitan dengan penyuapan, dan juga dimaksudkan untuk mencegah, mengurang, serta mendeteksi risiko korupsi. PLN NP mendorong budaya No Bribery, No Kickback, No Gift, No Luxurious Hospitality yang didukung kerangka kerja pengendalian yang efektif untuk mendeteksi dan meminimalisir praktik penyuapan yang mengarah pada risiko korupsi. Penerapan Sistem Manajemen Anti

The international standard on Anti-Bribery Management Systems (ISO 37001:2016) serves as a guide for public, private, and non-profit organizations to assure the organization has adequate anti-bribery procedures by establishing countermeasures and controls related to bribery. It is also intended to prevent, reduce, and detect corruption risks. PLN NP promotes a culture of No Bribery, No Kickback, No Gift, and No Luxurious Hospitality supported by an effective control framework to detect and minimize bribery practices leading to corruption risks. The implementation of PLN NP's Anti-Bribery Management System refers to Indonesian Law No. 28 of 1999 on State Administration that is Clean and Free from Corruption, Collusion, and Nepotism; Indonesian Law No. 8 of

Penyusunan PLN NP mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; Surat Kementerian BUMN No. S-17/S.MBU/02/2021 pada tanggal 17 Februari 2020 mengusulkan semua BUMN wajib melakukan sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan; dan Peraturan Direksi terkait Kebijakan Manajemen Anti Fraud di Lingkungan PT PLN Nusantara Power (PLN NP).

The Company has obtained ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (SMAP) certification for the Headquarters and several business units. SMAP implementation is reinforced with an Integrity Commitment, which is the signing of a Commitment by the Board of Commissioners and Directors on the Anti-Bribery Management System conducted in the first quarter of 2021. Implementing ISO 37001:2016 in business processes is part of enforcing the Company Ethics Standards, supported by gratification control guidelines, LHKPN Guidelines, Violation Reporting Management, Corporate Culture Guidelines, Risk Management Policies and Guidelines, and the Integrated Management System (IMS) 10. Monitoring and evaluation of SMAP implementation include:

1. Laporan konfirmasi kejadian gratifikasi dan benturan kepentingan secara berkala setiap bulan.
2. Pelaksanaan survey Awareness SMAP untuk seluruh karyawan.
3. Sosialisasi Program Pengendalian Gratifikasi dan Laporan rencana kerja UPG ke KPK secara berkala setiap tahun.
4. Pelaporan LHKPN Periodik dan Khusus.

1. Monthly reports on gratification and conflict of interest incidents.
2. Conducting SMAP Awareness surveys for all employees.
3. Socialization of Gratification Control Programs and annual UPG work plan reports to the KPK.
4. Regular and special LHKPN reporting.

Pengendalian Gratifikasi
Gratification Control

Gratifikasi diartikan positif sebagai pemberian hadiah yang dilakukan dengan rasa tulus dari seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan apa pun. Namun, Gratifikasi dapat diartikan negatif apabila pemberian hadiah yang dilakukan memiliki tujuan tertentu yang dapat menyebabkan benturan kepentingan. Dengan demikian secara perspektif gratifikasi harus dilihat dari kepentingan pemberian gratifikasi tersebut. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk melakukan pengendalian gratifikasi sebagai upaya mencegah terjadinya praktik pemberian dan/atau penerimaan gratifikasi dengan tujuan tertentu yang dapat menyebabkan benturan kepentingan, praktik korupsi dan sejenisnya yang patut diduga hal tersebut akan merugikan Perusahaan.

Gratification is positively interpreted as a sincere gift from one person to another without expecting anything in return. However, it is negatively interpreted if the gift is given with specific intentions that can cause conflicts of interest. Thus, gratification must be viewed from the perspective of the giver's intentions. Therefore, it is necessary to control gratification to prevent the practice of giving and/or receiving gifts with specific intentions that can cause conflicts of interest, corruption, and similar practices that are suspected of harming the Company.

Pengendalian Gratifikasi di lingkungan PLN NP mengacu pada Kebijakan Pengendalian Gratifikasi tersebut diperbaharui dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Direksi dan Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa-Bali No. 005.K/010/DIR/2017 dan No. 013.K/DK-PJB/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelaporan

Gratification control within PLN NP refers to the Gratification Control Policy, updated by the Joint Decree (SKB) of the Directors and Board of Commissioners of PT Pembangkitan Jawa-Bali No. 005.K/010/DIR/2017 and No. 013.K/DK-PJB/2017 regarding the Guidelines for Gratification Reporting and Control Implementation

dan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Pembangkitan Jawa-Bali sebagai bentuk dukungan Dewan Komisaris terhadap program pengendalian gratifikasi. Penerbitan SKB tersebut juga menjadi dasar pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Perusahaan.

within PT Pembangkitan Jawa-Bali as a form of the Board of Commissioners' support for the gratification control program. The issuance of this SKB also forms the basis for establishing the Gratification Control Unit (UPG) within the Company.

Seluruh Insan Perusahaan dilarang untuk menerima bingkisan dan/atau hadiah dalam bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung, dari mitra dan/atau pihak ketiga lainnya terkait dengan suap dan hubungan kedinasan. Unit Pengendalian Gratifikasi secara berkala melaporkan kepada Direksi terkait kegiatan pengendalian gratifikasi yang telah dilaksanakan Perusahaan. Kegiatan pengendalian gratifikasi yang dilaksanakan sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Laporan Penolakan, Penerimaan dan Pemberian Gratifikasi oleh karyawan PLN NP.
2. Penyampaian Laporan Kegiatan UPG Tahun 2022 dan 2023.
3. Penyampaian Himbauan Internalisasi Program Pencegahan Gratifikasi.
4. Partisipasi pada E-Learning Bimbingan Teknis Pengendalian Gratifikasi.
5. Partisipasi UPG dalam Bimbingan Teknis Terkait Implementasi Program Pengendalian Gratifikasi.
6. Koordinasi Persiapan dan Pelaksanaan Survei Awareness Integritas Tahun 2023.
7. Pemberitahuan Larangan Menerima Parsel/Bingkisan atau hadiah lainnya dalam Hari Raya Keagamaan.
8. Diseminasi Media Sosialisasi Pesan Anti-Gratifikasi.
9. Sosialisasi Pencegahan Gratifikasi oleh Admin UPG Unit kepada karyawan PLN NP.

All Company personnel are prohibited from accepting gifts and/or presents in any form, either directly or indirectly, from partners and/or other third parties related to bribery and official relationships. The Gratification Control Unit periodically reports to the Directors regarding gratification control activities carried out by the Company. The gratification control activities carried out throughout 2023 include:

1. Managing Reports of Rejections, Acceptances, and Giving of Gratification by PLN NP employees.
2. Submitting UPG Activity Reports for 2022 and 2023.
3. Delivering Internalization Program Reminders for Gratification Prevention.
4. Participating in E-Learning Technical Guidance for Gratification Control.
5. UPG participation in Technical Guidance Related to Gratification Control Program Implementation.
6. Coordination for Preparation and Implementation of the 2023 Integrity Awareness Survey.
7. Notification of Prohibition on Receiving Parcels/Gifts or other gifts during Religious Holidays.
8. Dissemination of Anti-Gratification Message Socialization Media.
9. Gratification Prevention Socialization by UPG Unit Admin to PLN NP employees.

Pengendalian gratifikasi dilakukan melalui aplikasi Compliance Online System (COS), dimana setiap bulan Insan PLN NP melakukan konfirmasi conflict of interest di cos.plnnusantarapower.co.id. Unit Pengendalian Gratifikasi telah menerima laporan gratifikasi dari seluruh unit dan anak Perusahaan sepanjang tahun 2023 sebanyak 36 laporan. Laporan tersebut terdiri dari 10 Laporan Penolakan Gratifikasi, 16 Laporan Penerimaan dan 10 Laporan Pemberian Gratifikasi.

Gratification control is conducted through the Compliance Online System (COS) application, where PLN NP personnel confirm conflicts of interest monthly at cos.plnnusantarapower.co.id. The Gratification Control Unit received 36 gratification reports from all units and subsidiaries throughout 2023, consisting of 10 Gratification Rejection Reports, 16 Acceptance Reports, and 10 Giving Reports.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
State Officials Wealth Report (LHKPN)

Penyelenggaraan LHKPN di lingkungan Perusahaan ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Direksi dan Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa-Bali No. 004.K/021/DIR/2017 tentang Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan PT Pembangkitan Jawa-Bali. Kebijakan LHKPN tersebut merujuk pada:

1. Peraturan KPK No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan KPK No. 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN).

The implementation of LHKPN within the Company is established through a Joint Decree (SKB) between the Directors and the Board of Commissioners of PT Pembangkitan Jawa-Bali No. 004.K/021/DIR/2017 regarding Guidelines for State Officials Wealth Report (LHKPN) within PT Pembangkitan Jawa-Bali. The LHKPN policy refers to:

1. KPK Regulation No. 2 of 2020 on Amendments to KPK Regulation No. 7 of 2016 regarding Procedures for Registration, Announcement, and Examination of State Officials Wealth Report (LHKPN).

2. Peraturan BUMN No. PER-10/MBU/06/2011 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/05/2018 Tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara
3. Peraturan Direksi PT PLN No. 0174.P/DIR/2017 tentang Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan PT PLN (Persero).

Fungsi Pengelola LHKPN di lingkungan PLN sebagai Admin Instansi yang memiliki wewenang khusus terhadap pengelolaan LHKPN yaitu Bidang Risiko Legal dan Kepatuhan pada Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan. Fungsi Pengelola LHKPN di lingkungan PLN NP sebagai Admin Unit e-LHKPN yang memiliki wewenang khusus terhadap pengelolaan LHKPN yaitu Bidang Kepatuhan Kantor Pusat PLN NP. Bidang kepatuhan kantor pusat berkoordinasi dengan fungsi kepatuhan unit, dan anak perusahaan dan perusahaan asosiasi (AFFIA) untuk membantu kelancaran pelaksanaan pelaporan LHKPN di masing-masing Unit.

Pelaporan LHKPN dilakukan secara rutin setiap tahun oleh insan PLN NP sampai dengan 3 level di bawah Direksi (Direksi dan Dewan Komisaris, Senior Leader, Manajer dan SPV). Pejabat Wajib LHKPN menyampaikan laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaannya. Pejabat Wajib Lapor LHKPN sebagaimana dilaksanakan dalam kebijakan LHKPN berdasarkan Surat Keputusan Bersama No. 004.K/01/DIR/2017 pasal 4 adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris Perusahaan;
2. Direksi Perusahaan;
3. Wakil Perusahaan yang ditugaskan sebagai Direksi atau Komisaris di Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi;
4. Karyawan Perusahaan pada jenjang jabatan struktural yang meliputi Manajemen Atas, Manajemen Menengah, Manajemen Dasar dan Supervisor Atas;
5. Karyawan Perusahaan pada jenjang jabatan fungsional yang meliputi fungsional I, Fungsional 2, dan fungsional 3; dan
6. Pejabat Perencana Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Pengadaan.

Pejabat Wajib LHKPN di lingkungan Perusahaan tiap periodenya mengalami perubahan jumlah yang dimonitoring oleh Bidang Kepatuhan. Sampai dengan akhir tahun 2021, terdapat 1.017 wajib LHKPN dengan rincian sebagai berikut :

1. Minister of SOE Regulation No. PER-10/MBU/06/2021 on Amendments to Minister of SOE Regulation No. PER-01/MBU/05/2018 regarding Reporting of State Officials Wealth within the Ministry of State-Owned Enterprises.
2. PT PLN Directors Regulation No. 0174.P/DIR/2017 on Guidelines for State Officials Wealth Report (LHKPN) within PT PLN (Persero).

The LHKPN Management Function within PLN serves as the Institutional Admin with special authority over LHKPN management, under the Legal Risk and Compliance Division in the Risk Management and Compliance Division. The LHKPN Management Function within PLN NP serves as the Unit Admin e-LHKPN with special authority over LHKPN management, under the Compliance Division at PLN NP Headquarters. The headquarters compliance division coordinates with the compliance functions of units, subsidiaries, and associated companies (AFFIA) to facilitate smooth LHKPN reporting in each Unit.

LHKPN reporting is routinely conducted annually by PLN NP personnel up to three levels below the Directors (Directors and Board of Commissioners, Senior Leaders, Managers, and Supervisors). LHKPN Mandatory Officials submit reports in print and/or other forms detailing the description and information regarding their wealth, personal data, including income, expenses, and other data related to their assets. LHKPN Mandatory Reporting Officials as stipulated in the LHKPN policy based on Joint Decree No. 004.K/01/DIR/2017 Article 4 are as follows:

1. Company Board of Commissioners;
2. Company Directors;
3. Company representatives assigned as Directors or Commissioners in Subsidiaries and Affiliated Companies;
4. Company employees in structural positions covering Upper Management, Middle Management, Lower Management, and Upper Supervisors;
5. Company employees in functional positions covering Functional 1, Functional 2, and Functional 3;
6. Procurement Planning and Implementation Officials.

The number of LHKPN Mandatory Officials within the Company changes each period, monitored by the Compliance Division. By the end of 2021, there were 1,017 LHKPN Mandatory Officials with the following details:

Daftar Wajib Lapor LHKPN Tahun 2023
List of LHKPN Mandatory Officials for 2023

No.	Jenjang Jabatan Position Level	Jumlah Amount
1.	Direksi dan Komisaris PLN NP Directors and Commissioners of PLN NP	9
2.	Manajemen Atas Upper Management	7
3.	Manajemen Menengah Middle Management	16
4.	Manajemen Dasar Basic Management	267
5.	Supervisor Atas Upper Supervisor	456
6.	Supervisor Dasar (Khusus Ti Pengadaan) Basic Supervisor (Procurement Ti only)	27
7.	Fungsional 2 Functional 2	14
8.	Fungsional 3 Functional 3	115
9.	Direksi dan Komisaris AP PLN NP Directors and Commissioners of Subsidiaries PLN NP	12
	Jumlah Total	**1.017**

Perusahaan melakukan monitoring kepatuhan Perusahaan terhadap pelaporan LHKPN pejabat wajib lapor melalui e-filing. Penyampaian LHKPN Tahun 2023 kepada KPK telah dilakukan secara tepat waktu oleh 1017 Wajib LHKPN melalui e-filing.kpk.go.id atau telah mencapai 100 % dari total Wajib LHKPN.

The Company monitors compliance with LHKPN reporting through e-filing. LHKPN submissions for 2023 to the KPK were completed on time by 1017 LHKPN Mandatory Officials through e-filing.kpk.go.id, achieving 100% compliance from all LHKPN Mandatory Officials.

Kepatuhan Pelaporan LHKPN Tahun 2023
LHKPN Reporting Compliance for 2023

Whistleblowing System

Whistleblowing System (WBS) adalah sistem pelaporan yang mendorong peran aktif pegawai dan pihak eksternal Perusahaan untuk menyampaikan pengaduan mengenai dugaan tindak pelanggaran yang dilakukan oleh Insan Perusahaan. Penerapan sistem pelaporan pelanggaran merupakan bagian dari upaya penegakan Standar Etika Perusahaan dan pengelolaan risiko khususnya terkait risiko pelanggaran etika. Perusahaan mendorong penerapannya dengan melakukan sosialisasi Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) kepada pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal melalui media komunikasi visual (website, media elektronik, dll) serta forum tatap muka (Focus Group Discussion, Supplier Gathering, Customer Gathering dll).

The Whistleblowing System (WBS) is a reporting system that encourages active participation from employees and external parties to report suspected violations by Company personnel. The implementation of this reporting system is part of the effort to enforce the Company's Ethical Standards and manage risks, especially those related to ethical violations. The Company promotes the implementation of the Whistleblowing System through internal and external stakeholder socialization using visual communication media (website, electronic media, etc.) and face-to-face forums (Focus Group Discussions, Supplier Gatherings, Customer Gatherings, etc.).

Pedoman Whistleblowing System (WBS) di lingkungan Perusahaan ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Direksi dan Dewan Komisaris No. 004.K/02/DIR/2020 dan No. 003K/DK-P/B/2020 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) sebagai pembaharuan atas Keputusan Direksi No. 095.K/010/DIR/2015.

The guidelines for the Whistleblowing System (WBS) within the Company are established through a Joint Decree (SKB) between the Board of Directors and the Board of Commissioners, No. 004.K/02/DIR/2020 and no. 003K/DK-P/B/2020 concerning the Whistleblowing System, updating the Board of Director's Decree no. 095.K/010/DIR/2015.

Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran
Whistleblowing System Management

Pengelola sistem pelaporan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Direksi dan Dewan Komisaris No. 004.K/02/DIR/2020 dan No. 003K/DK-P/B/2020 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) adalah Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran. Penanganan lebih lanjut atas laporan pelanggaran khususnya yang dilakukan oleh Karyawan dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Karyawan (TPDK).

The management of the Whistleblowing System, as regulated in the Joint Decree (SKB) between the Board of Directors and the Board of Commissioners, No. 004.K/02/DIR/2020 and no. 003K/DK-P/B/2020 concerning the Whistleblowing System, is handled by the Violation Complaint Management Committee. Further handling of violation reports, especially those committed by employees, is carried out by the Employee Discipline Violation Examination Team (TPDK).

Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran
WBS Management Committee

Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran dibentuk dengan Keputusan Direksi yang beranggotakan fungsi pengawasan internal, fungsi hukum dan fungsi kepatuhan. Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran bertugas untuk mengelola pelaporan/pengaduan pelanggaran, antara lain:

1. Menerima pelaporan pelanggaran;
2. Melakukan verifikasi;
3. Menganalisa dan memyelesai laporan pelanggaran untuk memutuskan perlu tidaknya dilakukan investigasi lebih lanjut;
4. Bertanggung jawab atas pelaksanaan program perlindungan Pelapor sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan Perusahaan, terutama aspek kerahasiaan dan jaminan keamanan Pelapor. Untuk keperluan ini anggota Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran memiliki akses terhadap bantuan hukum, keuangan dan operasional bila diperlukan.

The WBS Management Committee is formed based on the Board of Director's Decree and comprises members from internal supervision, legal, and compliance functions. The Committee is responsible for managing violation reports/complaints, including:

1. Receiving violation reports;
2. Verifying reports;
3. Analyzing and selecting violation reports to decide if further investigation is necessary;
4. Ensuring the implementation of the Whistleblower Protection Program according to Company policies, particularly aspects of confidentiality and security of the Whistleblower. For this purpose, Committee members have access to legal, financial, and operational assistance if needed.

Dalam menjalankan tugas, Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran dapat meminta bantuan bidang/fungsi lain sesuai obyek pelaporan pelanggaran bila diperlukan. Anggota Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran juga mendapatkan akses pelaporan langsung kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

In performing their duties, the WBS Management Committee may request assistance from other fields/functions related to the violation report if necessary. Committee members also have direct reporting access to the President Director and the Board of Commissioners.

Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Karyawan

Employee Discipline Violation Audit Team (TPDK)

Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Karyawan (TPDK) bertugas menindaklanjuti penerimaan pelaporan dengan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap substansi pelanggaran yang dilakukan oleh Karyawan. Dalam melaksanakan tugasnya, TPDK berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang Peraturan Disiplin Karyawan Perusahaan. Dalam hal pemeriksaan terbukti adanya pelanggaran, maka TPDK memberikan rekomendasi sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan untuk diputuskan oleh Pejabat Yang Berwenang Memberikan Sanksi (PYBMS). Bila Terlapor adalah Karyawan Kantor Pusat, maka PYBMS adalah Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi, bila Terlapor adalah Karyawan Unit, maka PYBMS adalah Pimpinan Unit.

The Employee Discipline Violation Audit Team (TPDK) is tasked with following up on received reports by further examining the substance of violations committed by employees. In carrying out their duties, TPDK follows the provisions regulating the Company's Employee Discipline Regulations. If the examination proves a violation, TPDK provides sanction recommendations for the violations to be decided by the Authorized Sanctioning Officer (PYBMS). If the reported employee is from the Headquarters, the PYBMS is the Director of Human Capital and Administration Management. If the reported employee is from a Unit, the PYBMS is the Unit Leader.

Mekanisme Penyampaian dan Penanganan Pelaporan Pelanggaran

Mechanism for Submitting and Handling Violation Reports

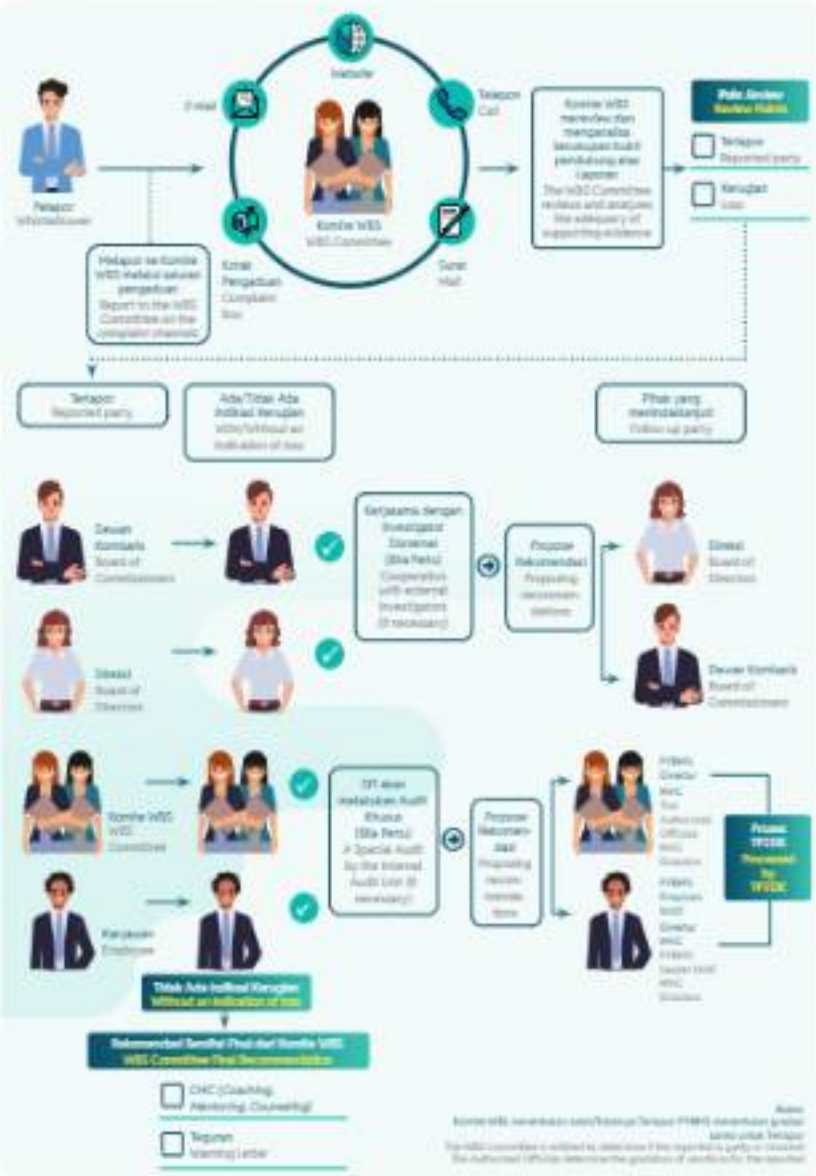

Pelaporan atas dugaan pelanggaran yang terkait dengan insan Perusahaan disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perusahaan wajib menerima laporan pelanggaran dari pihak internal maupun eksternal, baik dari Pelapor yang mencantumkan identitas maupun yang tidak (anonim). Semua laporan yang diterima wajib diproses lebih lanjut sepanjang dapat memberikan bukti-bukti kuat, dapat dipertanggungjawabkan serta tidak mengarah kepada fitnah.
2. Pelaporan pelanggaran wajib disampaikan secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dan disertai bukti pendukung yang berhubungan dengan pelanggaran, diantaranya meliputi:
   a. Pelanggaran yang dilaporkan;
   b. Pihak yang terlibat/Terlapor;
   c. Waktu terjadinya pelanggaran;
   d. Tempat terjadinya pelanggaran;
   e. Bagaimana kejadiannya.
3. Saluran yang tersedia untuk melaporkan pelanggaran adalah:
   a. Surat menyurat dengan alamat:
      Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran
      PT PLN Nusantara Power
      Jalan Ketintang Baru No. 11 Surabaya 60231 Indonesia
   b. Kotak Pengaduan:
      1) Gedung PT PLN Nusantara Power Kantor Pusat;
      2) Gedung Administrasi seluruh Unit Kerja.
   c. Website dengan alamat: https://www.plnnusantarapower.co.id/wbs/
   d. Email dengan alamat pengaduan@plnnusantarapower.co.id;
   e. Telepon/SMS/WhatsApp dengan No. 08113388448.
4. Saluran pelaporan di Unit Kerja dikelola oleh Unit Kerja dan dikomunikasikan secara periodik ke Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran.
5. Untuk memperoleh proses komunikasi dan klarifikasi, dapat dilakukan dengan cara:
   a. Tatap muka; dan/atau
   b. Telepon; dan/atau
   c. Email; dan/atau
   d. Surat menyurat/kotak pos; dan/atau
   e. Sarana komunikasi lainnya.

Pelaporan atas dugaan pelanggaran yang terkait dengan insan Perusahaan ditindaklanjuti dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Laporan pelanggaran disampaikan ke Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran melalui saluran pelaporan yang tersedia.
2. Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran melakukan verifikasi untuk sekiranya memutuskan perlu tidaknya dilakukan investigasi lebih lanjut atas laporan pengaduan pelanggaran dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Violation reports related to Company personnel are submitted with the following provisions:

1. The Company must accept violation reports from internal and external parties, whether from identified or anonymous reporters. All received reports must be further processed as long as they provide strong, accountable evidence and do not constitute slander.
2. Violation reports must be clearly presented, accountable, and supported by related evidence, including:
   a. The reported violation;
   b. The parties involved/reported;
   c. The time of the violation;
   d. The location of the violation;
   e. The details of the incident.
3. Available channels for reporting violations are:
   a. Correspondence to the following address:
      Violation Complaint Management Committee
      PT PLN Nusantara Power
      Jalan Ketintang Baru No. 11 Surabaya 60231 Indonesia
   b. Complaint boxes located at:
      1) PT PLN Nusantara Power Headquarters;
      2) Administration buildings of all work units.
   c. Website: https://www.plnnusantarapower.co.id/wbs/
   d. Email: pengaduan@plnnusantarapower.co.id;
   e. Telephone/SMS/WhatsApp: 08113388448.
4. Reporting channels in work units are managed by the work unit and communicated periodically to the Violation Complaint Management Committee.
5. To facilitate communication and clarification, the process can be conducted via:
   a. Face-to-face meetings;
   b. Telephone;
   c. Email;
   d. Correspondence/complaint box;
   e. Other communication means.

Violation reports related to Company personnel are followed up with the following provisions:

1. Violation reports are addressed to the Violation Complaint Management Committee through the available reporting channels.
2. The Violation Complaint Management Committee verifies the reports to decide if further investigation is needed within 30 days, extendable by another 30 days.

3. Apabila hasil verifikasi menunjukkan bahwa laporan pelanggaran tidak benar (tidak sesuai fakta) dan tidak ada bukti permulaan yang cukup, maka tidak akan diproses lebih lanjut. Apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya indikasi pelanggaran (sesuai fakta) yang disertai bukti permulaan yang cukup, maka pengaduan dapat diproses ke tahap investigasi.
4. Dalam proses verifikasi dan penentuan tindak lanjut, Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran mengklasifikasikan Terlapor sebagai berikut:
   a. Bila Terlapor adalah Karyawan:
      1) Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran melakukan verifikasi, melaporkan ringkasan kasus serta usulan rekomendasi kepada PYBMS untuk proses lebih lanjut. Usulan rekomendasi dapat berupa pemeriksaan lebih lanjut oleh TPSDK bila jenis pelanggaran memiliki indikasi fraud.
      2) Bila tidak ada indikasi fraud maka usulan rekomendasi dapat berupa Coaching, Mentoring, Counseling (CMC) dan teguran kepada Karyawan yang bersangkutan.
      3) Apabila berdasarkan pertimbangan jenis pelanggaran bersifat kompleks, rumit dan memerlukan analisa bukti-bukti yang lebih mendalam, maka Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran dapat meminta kepada Direksi untuk menugaskan SPI melakukan audit khusus terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh TPSDK sesuai ketentuan yang berlaku.
   b. Bila Terlapor adalah Direksi:
      1) Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran melakukan verifikasi, melaporkan ringkasan kasus serta usulan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk proses lebih lanjut.
      2) Dewan Komisaris melakukan proses lebih lanjut terhadap pelaporan pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi, termasuk memutuskan perlu tidaknya bekerjasama dengan Investigator Eksternal. Hasil proses lebih lanjut ini dilaporkan oleh Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham.
   c. Bila Terlapor adalah Dewan Komisaris:
      1) Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran melakukan verifikasi, melaporkan ringkasan kasus serta usulan rekomendasi kepada Direksi untuk proses lebih lanjut.
      2) Direksi melakukan proses lebih lanjut terhadap pelaporan pelanggaran yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, termasuk memutuskan perlu tidaknya bekerjasama dengan Investigator Eksternal. Hasil proses lebih lanjut ini dilaporkan oleh Direksi kepada Pemegang Saham.
   d. Bila Terlapor adalah Organ Pendukung Dewan Komisaris:
      1) Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran melakukan verifikasi, melaporkan ringkasan kasus serta usulan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk proses lebih lanjut.

3. If verification results indicate the report is unfounded (not factual) and lacks sufficient preliminary evidence, it will not be processed further. If verification indicates a violation (factual) with sufficient preliminary evidence, the complaint can proceed to the investigation stage.
4. During verification and follow-up determination, the Violation Complaint Management Committee classifies the reported party as follows:
   a. If the reported party is an employee:
      1) The Committee verifies and reports a case summary and recommendation to the PYBMS for further processing. Recommendations may include further examination by TPSDK if the violation indicates fraud.
      2) If there is no indication of fraud, recommendations may include Coaching, Mentoring, Counseling (CMC), and reprimanding the consumed employee.
      3) If the violation is complex and requires in-depth evidence analysis, the Committee may request the Directors to assign SPI for a special audit before further examination by TPSDK following applicable regulations.
   b. If the reported party is a Director:
      1) The Committee verifies and reports a case summary and recommendation to the Board of Commissioners for further processing.
      2) The Board of Commissioners conducts further processing of the violation report, including deciding on the need for cooperation with an External Investigator. The results of this further process are reported by the Board of Commissioners to the Shareholders.
   c. If the reported party is a member of the Board of Commissioners:
      1) The Committee verifies and reports a case summary and recommendation to the Directors for further processing.
      2) The Directors conduct further processing of the violation report, including deciding on the need for cooperation with an External Investigator. The results of this further process are reported by the Directors to the Shareholders.
   d. If the reported party is a member of the Board of Commissioners' Support Organization:
      1) The Committee verifies and reports a case summary and recommendation to the Board of Commissioners for further processing.

2) Dewan Komisaris melakukan proses lebih lanjut terhadap pelaporan pelanggaran yang dilakukan oleh Organ Pendukung Dewan Komisaris, termasuk memutuskan perlu tidaknya bekerjasama dengan Investigator Eksternal.

c. Bila Terlapor adalah Anggota Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran

Apabila yang dilaporkan melakukan pelanggaran adalah Anggota Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran, maka yang bersangkutan harus dinon-aktifkan untuk sementara waktu menunggu hasil verifikasi dan investigasi. Apabila tidak terbukti, maka yang bersangkutan akan diaktifkan kembali, namun apabila terbukti maka Direksi dapat melakukan pergantian keanggotaan Komite.

5. Apabila hasil investigasi terbukti adanya pelanggaran yang mengarah ke tindak pidana, maka dapat ditindaklanjuti dengan proses hukum yang berlaku kepada lembaga penegak hukum dengan Direksi atau Pejabat Lain yang diberi kuasa oleh Pemegang Saham sebagai Pejabat Penyerah Perkara.

2) The Board of Commissioners conducts further processing of the violation report, including deciding on the need for cooperation with an External Investigator.

c. If the reported party is a member of the Violation Complaint Management Committee

If a member of the Committee is reported for a violation, they must be temporarily suspended pending verification and investigation results. If not proven, the member will be reactivated. If proven, the Directors may replace the member.

5. If the investigation proves a violation that constitutes a criminal act, it can be followed up with legal proceedings by law enforcement agencies with the Directors or other officials authorized by the Shareholders as the Authorized Officers for Case Submission.

Perlindungan Terhadap Pelapor
Protection for Whistleblowers

Perlindungan diberikan kepada Pelapor yang memiliki itikad baik semata-mata demi kepentingan Perusahaan. Perlindungan diberikan sebagai upaya untuk mendorong pelaporan atas dugaan pelanggaran dan menjamin keamanan Pelapor maupun keluarganya. Semua laporan pelanggaran akan dijaga kerahasiaan dan keamanannya oleh Perusahaan. Perlindungan Pelapor dilakukan dengan otoritas bertingkat, sehingga dapat dijaga kerahasiaan identitasnya secara permanen, kecuali dalam hal proses hukum memerlukan dibukanya identitas Pelapor sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika diperlukan, Pelapor juga dapat meminta bantuan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagaimana diatur pada pasal 5, pasal 10 dan pasal 29 ayat (3) Undang-Undang No.31 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Perusahaan akan patuh terhadap segala peraturan perundangan yang terkait serta best practices yang berlaku dalam penyelenggaraan WBS. Perlindungan terhadap Pelapor diimplementasikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika Pelapor adalah pihak internal Perusahaan, maka akan mendapatkan perlindungan standar dari Perusahaan terhadap perlakuan yang merugikan seperti:
   a. Pemecatan yang tidak adil;
   b. Penurunan jabatan atau pangkat;
   c. Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuk;
   d. Catatan merugikan dalam personal file record.
2. Jika Pelapor adalah pihak eksternal Perusahaan, maka akan mendapatkan perlindungan standar dari Perusahaan terhadap perlakuan yang merugikan atas tindakan balasan dari Terlapor atau Organisasi seperti:

Protection is provided to whistleblowers with good intentions solely for the Company's interests. Protection is given to encourage reporting of suspected violations and to ensure the safety of the whistleblower and their family. All violation reports will be kept confidential and secure by the Company. Whistleblower protection is managed with layered authority to maintain the permanent confidentiality of their identity, except when legal proceedings require the disclosure of the whistleblower's identity following applicable laws. If needed, the whistleblower may also seek assistance from the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) as stipulated in Article 5, Article 10, and Article 29 paragraph (3) of Law No. 31 of 2014 concerning Amendments to Law No. 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims.

The Company will comply with all related regulations and best practices in implementing the WBS. Protection for whistleblowers is implemented with the following provisions:

1. If the whistleblower is an internal party of the Company, they will receive standard protection from the Company against adverse treatment such as:
   a. Unfair dismissal;
   b. Demotion or rank reduction;
   c. Harassment or discrimination in any form;
   d. Adverse records in personal file records.
2. If the whistleblower is an external party, they will receive standard protection from the Company against adverse treatment or retaliation from the reported party or organization, such as:

a. Diskriminasi dalam kerjasama usaha;
b. Diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

3. Jika Pelapor adalah Justice Collaborator, maka akan mendapatkan perlindungan standar dari Perusahaan terhadap perlakuan yang merugikan atas laporan yang disampaikan. Apabila dalam proses investigasi Pelapor terbukti ikut bersalah dalam pelanggaran yang dilaporkan, maka kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan yang meringankan terhadap sanksi yang direkomendasikan TPSDK kepada PYBHS.
4. Selain perlindungan di atas, untuk Pelapor yang berlikad baik, Perusahaan juga akan menyediakan perlindungan hukum (jika diperlukan) sebagaimana diatur pada pasal 5 dan pasal 10 Undang-Undang No. 31 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:
a. Perlindungan dari tuntutan pidana dan/atau perdata;
b. Perlindungan atas keamanan pribadi, dan/atau keluarga Pelapor dari ancaman fisik dan/atau mental;
c. Perlindungan terhadap harta Pelapor;
d. Penahanan dan penyamaran identitas Pelapor; dan/atau

e. Pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan Terlapor pada setiap tingkat pemeriksaan perkara dalam hal pelanggaran tersebut masuk pada ranah pengadilan.

a. Discrimination in business cooperation;
b. Discrimination in service provision.

3. If the whistleblower is a Justice Collaborator, they will receive standard protection from the Company against adverse treatment for their report. If, during the investigation, the whistleblower is proven to be involved in the reported violation, their testimony may be considered as a mitigating factor in the sanctions recommended by TPSDK to PYBHS.
4. Besides the above protection, for whistleblowers with good intentions, the Company will also provide legal protection (if needed) as stipulated in Article 5 and Article 10 of Law No. 31 of 2014 concerning Amendments to Law No. 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims and Article 12 of Government Regulation No. 43 of 2018 concerning Procedures for Public Participation and Award Giving in the Prevention and Eradication of Corruption, which include:

a. Protection from criminal and/or civil charges;
b. Protection of personal and/or family safety from physical and/or mental threats;
c. Protection of the whistleblower's assets;
d. Confidentiality and anonymity of the whistleblower's identity; and/or
e. Providing testimony without facing the reported party at every stage of case examination if the violation leads to a court dispute.

Pengaduan dan Tindak Lanjut Pelaporan
Complaints and Follow-Up on Reports

Sepanjang tahun 2023, pengaduan yang masuk melalui berjumlah 4 (empat) pengaduan. Pengaduan yang masuk ke tahap tindak lanjut berdasarkan hasil verifikasi sebanyak 2 (dua) laporan pelanggaran. Penanganan pelaporan yang masuk ke tahap tindak lanjut adalah sebagai berikut:

Throughout 2023, four complaints were received. Two reports were followed up based on verification results. The handling of reports that proceeded to the follow-up stage is as follows:

Penanganan Pelaporan Tahap Tindak Lanjut
Handling of Follow-Up Stage Reports

No.	Kategori Pelapor Reporting Category	Kategori Laporan Pelanggaran Violation Report Category	Tindak Lanjut Pengaduan Complaint Follow-up	Status Tindak Lanjut Follow-up Status
1.	Anonim Anonymous	Tindak Asusila Unethical Acts	Direkomendasikan untuk diproses TPSDK Recommended for TPSDK processing	Proses tindak lanjut Follow-up process
2.	Anonim Anonymous	Pelanggaran SOP Perusahaan Violation of Company SOP	Direkomendasikan untuk diproses TPSDK Recommended for TPSDK processing	Proses tindak lanjut Follow-up process

Evaluasi Pelaksanaan *Whistleblowing System*
Evaluation of Whistleblowing System Implementation

Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran secara berkala menyusun laporan penerapan Whistleblowing System di lingkungan Perusahaan. Laporan berkala penerapan Whistleblowing System disampaikan setiap semester kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris sebagai bahan monitoring dan evaluasi dan bentuk akuntabilitas penerapan Whistleblowing System yang mencakup hasil penerimaan laporan pelanggaran dan tindak lanjut dari pelaporan tersebut, serta pelaksanaan rencana kerja dan program sosialisasi WBS oleh Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran.

The Violation Complaint Management Committee regularly prepares reports on the implementation of the Whistleblowing System within the Company. Periodic reports on the implementation of the Whistleblowing System are submitted every semester to the President Director and the Board of Commissioners as monitoring and evaluation material and a form of accountability for the implementation of the Whistleblowing System, covering the results of received violation reports and follow-ups, as well as the implementation of the WBS work plan and socialization program by the Violation Complaint Management Committee.

Perkara Hukum dan Sanksi Yang Dikenakan Kepada Perusahaan
Legal Cases and Sanctions Imposed on the Company

Kepatuhan dapat melindungi Perusahaan dari risiko yang muncul akibat pelanggaran. Perusahaan melakukan manajemen risiko hukum dan memastikan kepatuhan berjalan dengan baik untuk meminimalisir potensi risiko akibat pelanggaran yang dapat mengganggu kinerja dan keberlanjutan Perusahaan. Menjalankan kegiatan Perusahaan sesuai dengan prosedurnya secara legal dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan aspek penting dalam menghindari perkara hukum, dikenakan sanksi administratif, dan juga kehilangan nama baik serta reputasi perusahaan.

Compliance can protect the Company from risks arising from violations. The Company manages legal risks and ensures proper compliance to minimize potential risks from violations that can disrupt the Company's performance and sustainability. Conducting the Company's activities legally and in accordance with regulations is essential to avoid legal issues, administrative sanctions, and loss of the Company's reputation.

Perkara Hukum
Legal Cases

Perkara hukum mencakup kasus hukum litigasi dan non-litigasi yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, serta anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi. Perkara hukum dapat timbul terkait dengan proses perizinan yang ada di Perusahaan, karena adanya sengketa perdata dan sebagai akibat dari adanya dugaan tindak pidana yang terkait dengan proses bisnis Perusahaan. Selama tahun 2023, kasus hukum yang dihadapi Perusahaan adalah sebagai berikut:

Legal matters include litigation and non-litigation cases faced by the Company, its subsidiaries, as well as members of the Board of Commissioners and Board of Directors. Legal issues may arise related to the Company's licensing processes, civil disputes, or allegations of criminal activities associated with the Company's business processes. During 2023, the legal cases faced by the Company were as follows:

Jumlah Perkara Hukum Perusahaan
Number of Legal Cases of the Company

Jenis Perkara Case Type	Total	Selesai (Telah Memperoleh Keputusan Hukum Tetap) Completed (Has Permanent Legal Force)	Proses Penyelesaian Completion Process
Perkara Perdata/ Arbitrase Civil Cases/Arbitration	1	0/1	1
Kasus Korupsi Corruption Cases	-	-	-

Jenis Perkara Case Type	Total	Selesai (Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap) Completed (Has Permanent Legal Force)	Proses Penyelesaian Completion Process
Kasus Hubungan Industrial Industrial Relations Cases	-	-	-
Kasus Lain-lain Miscellaneous Cases	-	-	-

Penyelesaian Perkara Hukum Perusahaan
Resolution of the Company's Legal Cases

Para Pihak Parties	Pokok Perkara Main Case	Status Perkara Case Status	Upaya Manajemen Management Efforts	Pengaruh/ Risiko Terhadap Perusahaan Influence/Risks on the Company
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum No. 283/Pdt.G/2024/PN.CKR Penggugat: Ahli Waris H. Saeh Bin Madang Tergugat: 1. Budiawan Suwanto 2. BPN Kab Bekasi 3. PT PLN (Persero) cq PT PLN NP 4. Pemerintah Desa Segara Jaya Turut Tergugat: 1. PPATS Dwy Sigit Anshari 2. Ir. Ronald Manurung 3. Maulin Pangaribuan 4. Anno Widodo Agogo Damanik	1. Bahwa pada perkara sebelumnya No. 21/Pdt.G/2019/PN Cbr tahun 2019 TT (I-IV) (perkara sebelumnya Para Penggugat) mengajukan gugatan ke PN Cikarang atas lahan seluas 11.018 m² yang telah dipergunakan oleh PLN dan PT KJB UP Muara Tawar sebagai jalur pipa gas. 2. PT PLN (Persero) telah membebaskan lahan tersebut bersama dengan BPN dan mendapatkan Sertifikat Hak dari Budiawan Suwanto ("Tergugat I") dengan Nomor HGB 205. 3. Para Penggugat mengajukan gugatan dengan dasar Girik yang didapatkan dari jual beli dengan Ahli Waris Saeh bin Madang ("Para Penggugat"). 4. Perkara sebelumnya No. 21/Pdt.G/2019/PN Cbr tahun 2019 telah diputus dan dimenangkan oleh Budiawan Suwanto dan PT PLN (Persero) cq PT PLN NP pada tingkat pertama, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. 5. Bahwa Ahli Waris Saeh bin Madang (perkara sebelumnya Turut Tergugat) kembali mengajukan gugatan No. 283/Pdt.G/2024/PN Cikarang dengan objek gugatan yang sama.	Status perkara saat ini masih dalam proses persidangan tahap pembuktian pada Pengadilan Tingkat Pertama di PN Cikarang. The current status of the case is still in the trial process at the evidentiary stage at the Court of First Instance at the Cikarang District Court.	Manajemen sedang menghadiri dan melaksanakan seluruh rangkaian proses persidangan pada tingkat Pertama dengan berhadap pada putusan sebelumnya yang telah inkracht van gewijsde atau berkekuatan hukum tetap. Management is following and carrying out the entire series of trial processes at the first level by sticking to the previous decision which has been inkracht van gewijsde or has permanent legal force.	Apabila Gugatan Penggugat diterima, maka PT PLN (Persero) akan kehilangan status kepemilikan lahan dan bentangan pada bagian operasional PLTGU Muara Tawar bisa berhenti karena lahan tersebut merupakan jalur pipa yang menyupply gas ke PLTGU Muara Tawar. Selain itu PT PLN (Persero) juga berpotensi membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp33.836.000.000,- (tiga puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh enam juta rupiah). If the Plaintiff's lawsuit is accepted, PT PLN (Persero) will lose its land ownership status and the operational activities of the Muara Tawar CCPP may stop because the land is a pipeline that supplies gas to the Muara Tawar CCPP. Apart from that, PT PLN (Persero) also has the potential to pay compensation to the Plaintiffs worth Rp33.836.000.000 (thirty-three billion eight hundred thirty-six million rupiah).
Lawsuit for Unlawful Actions No. 283/Pdt.G/2024/PN CKR Plaintiff: Ahli Waris H. Saeh Bin Madang Defendant: 1. Budiawan Suwanto 2. BPN Kab Bekasi 3. PT PLN (Persero) cq PT PLN NP 4. Pemerintah Desa Segara Jaya Defendant: 1. PPATS Dwy Sigit Anshari 2. Ir. Ronald Manurung 3. Maulin Pangaribuan 4. Anno Widodo Agogo Damanik	1. Whereas in the previous case No. 21/Pdt.G/2019/PN Cbr of 2019 TT (I-IV) (previous case the Plaintiffs) filed a lawsuit with the Cikarang District Court over land covering an area of 11.018 m² which had been used by PLN and PT KJB Muara Tawar CU as a gas pipeline. 2. PT PLN (Persero) has acquired the land together with BPN and obtained a Certificate of Rights from Budiawan Suwanto ("Defendant I") with HGB Number 205. 3. The Plaintiffs filed a lawsuit based on Girik obtained from buying and selling with the Heirs of Saeh bin Madang ("Plaintiffs"). 4. Previous case No. 21/Pdt.G/2019/PN Cbr of 2019 was decided and won by Budiawan Suwanto and PT PLN (Persero) cq PT PLN NP at the first level, Appeal, Cassation and Judicial Review. 5. That the heirs of Saeh bin Madang (previous case co-defendant) then filed lawsuit No. 283/Pdt.G/2024/PN Cikarang with the same lawsuit object.			

Perkara Hukum Dewan Komisaris dan Direksi yang Sedang Menjabat
Legal Cases of the Board of Commissioners and Board of Directors

Sepanjang tahun 2021, tidak terdapat perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi oleh Dewan Komisaris maupun Direksi Perusahaan yang sedang menjabat baik perdata maupun pidana.

Throughout 2021, there were no material legal matters faced by the Company's Board of Commissioners or Board of Directors, either civil or criminal.

Perkara Hukum Anak Perusahaan
Legal Cases of Subsidiaries

Sepanjang tahun 2021, Tidak terdapat perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi oleh Anak Perusahaan Perusahaan baik perdata maupun pidana.

Throughout 2021, there were no material legal matters faced by the Company's subsidiaries, either civil or criminal.

Sanksi Kepada Perusahaan, Anggota Dewan Komisaris, dan Anggota Direksi oleh Otoritas Terkait
Sanctions on the Company, Members of the Board of Commissioners, and Members of the Board of Directors by Relevant Authorities

Selama tahun 2021, tidak terdapat sanksi administrasi/sanksi yang diberikan kepada Perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi oleh Otoritas Terkait.

In 2021, there were no administrative sanctions imposed on the Company, members of the Board of Commissioners, or members of the Board of Directors by relevant authorities.

Selain itu, pada tahun 2021 tidak terdapat kasus ketidakpatuhan terhadap hukum, aturan dan peraturan yang berkaitan dengan transaksi pihak berelasi yang signifikan atau material serta keputusan bersalah dari pengadilan pajak tertinggi terkait masalah perpajakan apapun dalam tiga tahun terakhir dan tidak terjadi pelanggaran hukum apa pun yang berkaitan dengan masalah perburuhan/ketenagakerjaan/konsumen/kepailitan/komersial/persaingan atau lingkungan.

Additionally, in 2021, there were no cases of non-compliance with laws, rules, and regulations related to significant or material related party transactions, nor were there any adverse decisions from the highest tax courts related to any tax issues in the past three years. Furthermore, there were no legal violations related to labor/employment/consumer/bankruptcy/commercial/competition or environmental issues.

Pengadaan Barang dan Jasa
Procurement of Goods and Services

Pengadaan barang dan jasa dalam rantai pasok Perusahaan memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan produksi. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang tepat untuk dapat memastikan kegiatan produksi telah didukung dengan ketersediaan bahan baku yang memadai dan efisien. PLN NP telah menetapkan kebijakan yang menjadi landasan dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Perusahaan antara lain melalui Peraturan Direksi No. 0.0494/I/0/19/GIS/2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang-Jasa dan Peraturan Direksi No. 0.0195/I/0/19/GIS/2022 tentang Kewenangan Pelaksanaan Pengadaan Barang-Jasa.

The procurement of goods and services in the Company's supply chain plays a crucial role in supporting production activities. Therefore, proper management of goods and services procurement is necessary to ensure that production activities are supported by adequate and efficient raw material availability. The Company has established policies as the basis for procurement activities through the Board of Director's Decree No. 0.0494/I/0/19/GIS/2021 on Guidelines for Goods and Services Procurement and the Board of Director's Decree No. 0.0195/I/0/19/GIS/2022 on Authorities for Goods and Services Procurement.

PLN NP menerapkan konsep Nilai Beli yang Sepadan (Value for Money) yang merupakan kombinasi optimum dari 6 (enam) rights (sejak kualitas, kuantitas, waktu, tempat, tujuan sosial ekonomi, dan harga) dalam memenuhi kebutuhan dari pengguna, dan tidak selalu merupakan opsi harga awal paling murah (lowest initial price option), tetapi merupakan pengembalian tertinggi (best return) dari investasi yang mempertimbangkan kriteria evaluasi yang sudah ditentukan.

The Company applies the Value for Money concept, which is an optimal combination of six rights (the right quality, quantity, time, place, socio-economic objectives, and price) in meeting user needs. This concept is not always the lowest initial price option but the best return on investment, considering predetermined evaluation criteria.

Pelaksana Fungsi Pengadaan Barang dan Jasa

Goods and Services Procurement Function

Pelaksana fungsi pengadaan barang dan jasa PLN NP di Kantor Pusat dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk Direksi sedangkan untuk Unit ditunjuk oleh Pimpinan Unit dengan merujuk pada Peraturan Direksi No. 0144K/010/DIS/2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang-Jasa dan Peraturan Direksi No. 0099.P/010/DIS/2022 tentang Kewenangan Pelaksanaan Pengadaan Barang-Jasa. Perusahaan memastikan pelaksana pengadaan di lingkungan perusahaan telah memenuhi prinsip value for money dengan membentuk Value for Money Committee yang bertugas melakukan reviu dan rekomendasi atas rencana dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang disiapkan oleh fungsi Perencanaan Pengadaan dan selanjutnya dilakukan penandatangan perjanjian/kontrak. Pada Kantor Pusat Value for Money Committee dilaksanakan melalui Rapat Direksi untuk pengadaan yang memerlukan persetujuan Direksi dan Rapat Manajemen Satuan Supply Chain Management untuk pengadaan yang menjadi kewenangan Satuan Supply Chain Management. Sedangkan di Unit fungsi Value for Money Committee dilaksanakan melalui Rapat Manajemen Unit.

The function of goods and services procurement at the Company's Headquarters is carried out by officials appointed by the Board of Directors, while for the Units, it is managed by the Unit Heads based on the Board of Director's Decree No. 0144K/010/DIS/2021 on Guidelines for Goods and Services Procurement and the Board of Director's Decree No. 0099.P/010/DIS/2022 on Authorities for Goods and Services Procurement. The Company ensures that procurement executors adhere to the value for money principle by forming a Value for Money Committee. This committee reviews and recommends procurement plans and implementation prepared by the Procurement Planning function, followed by contract signing. At the Headquarters, the Value for Money Committee operates through Board of Directors' Meetings for procurements requiring Directors' approval and through Supply Chain Management Unit Management Meetings for procurements under their authority. In Units, the Value for Money Committee function is executed through Unit Management Meetings.

Metode Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa

Suppliers Selection Method

Perusahaan menentukan penyedia barang dan jasa dengan metode pemilihan yang berdasarkan pada nilai pengadaan, level criticality, kondisi pasar dan pengetahuan atas pasar. Metode pemilihan penyedia barang dan jasa di lingkungan Perusahaan secara umum adalah sebagai berikut:

1. Pelelangan Terbatas
   Dilakukan dengan mengundang Penyedia Barang/Jasa yang tersebut dalam Daftar Penyedia Terseleksi (DPT). Pelelangan Terbatas dapat berupa pelelangan internasional, nasional, dan lokal. Pelelangan Terbatas dengan DPT merupakan strategi utama Pengadaan Barang/Jasa.
2. Pelelangan Terbuka
   Dilakukan dengan cara mengundang Penyedia Barang/Jasa, yang diumumkan secara luas guna memberi kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi kualifikasi melalui proses prakualifikasi maupun pascakualifikasi, untuk mengikuti pelelangan.

The Company determines suppliers using selection methods based on procurement value, level of criticality, market conditions, and market knowledge. Generally, the Company's supplier selection methods are as follows:

1. Limited Tendering
   Conducted by inviting suppliers from the Selected Provider List (DPT). Limited tendering can be international, national, or local. Limited Tendering with DPT is the main strategy for Goods and Services Procurement.
2. Open Tendering
   Conducted by widely inviting suppliers to allow qualified suppliers to participate through prequalification or post-qualification processes.

3. Pengecualian dari Kompetisi:
   a. Penunjukan Langsung : dilakukan secara langsung dengan menunjuk satu Penyedia Barang/Jasa, berdasarkan Riset Pasar, Due Diligence atau dari DPT.
   b. Pengadaan Langsung : Pengadaan Barang/Jasa yang ada di pasaran untuk memenuhi kebutuhan operasional yang diyakini bahwa harga tersebut merupakan hasil persaingan di pasar, berteknologi sederhana dan berisiko kecil dengan nilai maksimal 100 juta;
   c. Penunjukan Langsung dengan Metode Open Book: Dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan harga yang kompetitif tanpa melalui proses Pelelangan Terbatas/ Pelelangan Terbuka, dengan tetap menjaga kualitas/mutu dan memenuhi kebutuhan waktu pengadaan di lingkungan Perusahaan.

3. Exceptions from Competition:
   a. Direct Appointment: Directly appointing a supplier based on market research, due diligence, or from the DPT.
   b. Direct Procurement: Procuring goods/services available in the market for operational needs with a value up to 100 million, assuming competitive market prices and low risk.
   c. Direct Appointment with Open Book Method: Aimed at obtaining competitive prices without limited/open tendering, while maintaining quality and timely procurement.

Metode Penawaran
Offer Methods

Proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Perusahaan menggunakan metode penawaran sesuai dengan kategori pengadaan barang dan jasa sebagai berikut:

1. *Request for Quotation (RFQ)*
   RFQ digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang termasuk kategori Rutin, dengan spesifikasi yang mudah dikenal di pasar.
2. Invitation to Bid (ITB)
   ITB dapat digunakan untuk Pengadaan Barang/ Jasa yang termasuk kategori Leverage atau Critical/Bottleneck, di mana spesifikasi, kualitas dan kuantitasnya dapat dikaji secara jelas dan lengkap, serta penunjukan pemenang dilakukan berdasarkan penawaran biaya terendah, sepanjang secara kualitas, kuantitas, waktu, tempat, Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), telah memenuhi persyaratan.
3. *Request for Proposals (RFP)*
   RFP digunakan untuk Pengadaan Barang dan Jasa yang termasuk kategori Strategis (seperti EPC) atau jasa konsultansi atau pekerjaan yang membutuhkan inovasi serta keahlian tertentu.

The procurement process in the Company uses offer methods based on the category of goods and services as follows:

1. Request for Quotation (RFQ)
   RFQ is used for routine procurement with easily available market specifications.
2. Invitation to Bid (ITB)
   ITB is used for leverage or critical/bottleneck category procurements where specifications, quality, and quantity are clear, and the winner is chosen based on the lowest cost offer, meeting quality, quantity, time, place, and local content requirements.
3. Request for Proposals (RFP)
   RFP is used for strategic procurements (like EPC), consultancy services, or tasks requiring specific innovation and expertise.

Pengadaan Khusus
Special Procurements

Pengadaan Khusus merupakan strategi pengadaan dari perjanjian/kontrak yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pihak lain untuk kemudahan operasional pengadaan. Kegiatan pengadaan yang termasuk dalam kategori pengadaan khusus adalah sebagai berikut:

1. Pengadaan Gas Bumi/LNG/CNG
2. Pengadaan Batubara
3. Sewa Menyewa/Sewa Beli
4. Sewa Guna Usaha.

Special Procurements are procurement strategies and agreements/ contracts that have been predetermined by other parties to facilitate procurement operations. Procurement activities that fall under the special procurement category are as follows:

1. Natural Gas/LNG/CNG Procurement
2. Coal Procurement
3. Leasing/Rent-to-Own
4. Leasing.

Sewa Guna Usaha terdiri dari:

a. Financial Lease

Penyewa Guna (Lessee) pada akhir masa Perjanjian/ Kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli obyek sewa guna dari pihak yang menyewa gunakan (Lessor) berdasarkan nilai sisa (residual value) yang disepakati bersama;

b. Operating Lease

Adalah obyek sewa guna usaha yang dioperasikan sendiri oleh Lessee namun kepemilikan obyek sewa guna usaha tidak beralih kepada Lessee;

5. Alih Daya;
6. Pengadaan Jasa Konsultasi Perorangan;
7. Pengadaan Asuransi;
8. Pengadaan parts Pembangkit Reverse Engineering dan Re-Engineering

Leasing consists of:

a. Financial Lease

At the end of the Agreement/Contract term, the Lessee has the option to purchase the leased object from the Lessor based on an agreed residual value;

b. Operating Lease

The Lessee operates the leased object independently, but ownership of the leased object does not transfer to the Lessee;

5. Outsourcing;
6. Individual Consultant's Services Procurement;
7. Insurance Procurement;
8. Power Plant Parts Reverse Engineering and Re-Engineering Procurement.

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Implementation of Goods and Services Procurement

Perusahaan memastikan bahwa pelaksanaan pengadaan mengedepankan prinsip "level playing field" dimana semua calon penyedia mendapatkan informasi yang sama, pada saat yang sama, sehingga mereka mempunyai waktu yang sama untuk mempersiapkan Penawaran. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa terbagi atas beberapa tahapan yaitu:

The Company ensures that procurement implementation emphasizes the principle of a "level playing field" where all potential suppliers receive the same information at the same time, allowing equal preparation time for offers. The procurement process includes several stages:

Proses Pelaksanaan Pengadaan

Procurement Process Implementation

Transparansi dan Akuntabilitas Proses Pengadaan

Transparency and Accountability in Procurement Process

Transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa merupakan upaya dalam merwujudkan good procurement practice. Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa, Perusahaan telah melakukan diantaranya:

1. Pemanfaatan Media Pengumuman Pengadaan berbasis Web
   Pengumuman Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya wajib dilakukan secara terbuka untuk umum yang dapat diakses secara luas antara lain melalui website Perusahaan.
2. Penerapan Masa Sanggah
   Sanggahan hanya diajukan apabila terdapat penyimpangan pelaksanaan prosedur kualifikasi yang diatur dalam Dokumen Kualifikasi Pelelangan Pekerjaan bersangkutan, KKN dan atau pelanggaran persaingan yang sehat. Surat sanggahan diajukan kepada Pejabat yang berwenang menetapkan pemenang disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan kepada Kepala Satuan Pengawasan Internal (KSPI). Peserta kualifikasi yang keberatan atas penetapan pemenang dapat mengajukan sanggahan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal pengumuman hasil kualifikasi, dengan memberikan jaminan sanggah sebesar 2‰ (dua permille) dari nilai total HPS atau setinggi-tingginya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah). Masa sanggah hasil prakualifikasi diberikan 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi dan Jawaban atas sanggahan diberikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya sanggahan dari peserta prakualifikasi.
3. Menyediakan Media Pengaduan Pengadaan melalui Komite WBS

Pengaduan atas pelanggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa dapat disampaikan melalui Whistleblowing System sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Direksi dan Dewan Komisaris No. 004.K/021/DIR/2020 dan No. 007K/DK-PJB/2020 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System).

Transparency and accountability in procurement processes are efforts to achieve good procurement practices. The Company's transparency and accountability measures include:

1. Utilizing Web-Based Procurement Announcements
   Procurement announcements for goods, construction works, and other services are made publicly accessible through the Company's website.
2. Implementation of Objection Period
   Objections can be raised if there are deviations in qualification procedures as per the relevant Qualification Documents, corruption, collusion, or unhealthy competition violations. Objection letters must be submitted to the authorized official with evidence and copied to the Head of Internal Supervision Unit (KSPI). Qualification participants dissatisfied with the winner announcement can submit a written objection within three working days of the announcement, including a guarantee of 2‰ (two per thousand) of the total HPS or up to IDR 50,000,000. The objection period for prequalification results is three working days after the announcement, and responses are given within seven working days of receiving the objection.
3. Providing Procurement Complaint Media through the WBS Committee

Violations in the procurement process can be reported through the Whistleblowing System according to the Joint Decree between the Board of Directors and the Board of Commissioners No. 004.K/021/DIR/2020 and 007K/DK-PJB/2020 on the Whistleblowing System.

Data dan Informasi Perusahaan
Company Data and Information

Data merupakan komponen penting yang kemudian diolah menjadi informasi sehingga dapat memberikan keterangan atau gambaran sebagai dasar pengusunan kesimpulan atau pembuatan keputusan. Pengelolaan data dan informasi yang baik memungkinkan Perusahaan untuk mendeskripsikan tujuan strategis yang akan dicapai dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Sehingga Perusahaan mampu menjabarkan rencana dan strategi yang disusun untuk mencapai tujuan dan penciptaan nilai jangka panjang Perusahaan.

Data and information are assets for the Company that must be safeguarded. However, the Company must also consider transparency as a form of accountability and part of its responsibility to stakeholders to maintain trust and reputation.

Data dan Informasi merupakan aset bagi sebuah Perusahaan yang harus dijaga keamanannya. Namun demikian, Perusahaan juga perlu memperhatikan aspek transparansi sebagai bentuk akuntabilitas dan bagian dari tanggung jawab Perusahaan terhadap stakeholders dalam rangka menjaga kepercayaan dan reputasi Perusahaan.

Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi Perusahaan
Company Data and Information Management Policy

Kebijakan pengelolaan data dan informasi di lingkungan Perusahaan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 102.K/010/DIR/2010 tanggal 4 Desember 2010 tentang Kebijakan Pengelolaan Informasi, Data, dan Dokumen Perusahaan PT Pembangkitan Jawa-Bali. Kebijakan tersebut mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Klasifikasi Informasi.
2. Pengungkapan Informasi meliputi prinsip dasar pengungkapan informasi, pengelola, juru bicara, dan akses terhadap pengungkapan informasi.
3. Mekanisme penyediaan informasi, baik internal dan eksternal (publik).
4. Pengamanan Informasi, meliputi tugas dan tanggung jawab keamanan informasi, pengendali dan administrasi informasi, data dan dokumen Perusahaan, tanggung jawab pihak lain atas informasi sangat rahasia dan informasi rahasia, rumor, hubungan dengan komunitas investasi dan media.
5. Sanksi.
6. Pandoman teknis.

The policy on data and information management within the Company is established through the Board of Director's Decree No. 102.K/010/DIR/2010 on December 4, 2010, regarding the Policy on Information, Data, and Document Management of PT Pembangkitan Jawa-Bali. This policy regulates the following aspects:

1. Information Classification
2. Information disclosure includes the basic principles of information disclosure, managers, spokespersons, and access to information disclosure.
3. Mechanisms for Providing Information both internal and external (public).
4. Information Security includes the duties and responsibilities of information security, controllers and administrators of Company information, data, and documents, responsibilities of other parties for highly confidential and confidential information, handling rumors, and relationships with the investment community and media.
5. Sanctions.
6. Technical Guidelines.

Perusahaan juga menetapkan standar etika dalam pengungkapan data dan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan guna menjaga aset Perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap Insan Perusahaan tidak diizinkan untuk membicarakan, membocorkan atau menyebarluaskan informasi mengenai Perusahaan yang dianggap sebagai rahasia kepada siapapun (kecuali rekan kerja yang perlu mengetahui tentang hal tersebut).

The Company also establishes ethical standards for disclosing data and information to interested parties to protect the Company's assets, with the following provisions:

1. Every Company employee is not permitted to discuss, disclose, or disseminate information about the Company considered confidential to anyone (except coworkers who need to know).

2. Insan Perusahaan tidak diizinkan untuk memberikan data dan informasi yang tergolong rahasia Perusahaan kepada pihak lain, baik yang menyangkut keuangan, teknologi, kepegawaian dan data lainnya yang dijaklos dan dianggap akan dapat merugikan Perusahaan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan/atau disyaratkan oleh lembaga yang berwenang.
3. Insan Perusahaan yang tidak bekerja lagi di Perusahaan wajib untuk tetap menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama yang bersangkutan bekerja di Perusahaan, dan tidak diperkenankan mengambil dan/atau menyebarkan informasi rahasia Perusahaan kepada siapapun kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan/atau disyaratkan oleh lembaga yang berwenang.

2. Employees are not allowed to provide classified Company data and information to other parties, including financial, technological, personnel data, and other data that could potentially harm the Company unless otherwise stipulated by law or required by an authorized institution.
3. Employees who are no longer working with the Company must continue to maintain the confidentiality of information obtained during their employment and are not allowed to take and/or disseminate confidential Company information to anyone unless otherwise stipulated by law or required by an authorized institution.

Klasifikasikan data dan informasi Perusahaan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 153.K/010/DIR/2010 tanggal 4 Desember 2010 tentang Kebijakan Pengelolaan Informasi, Data, dan Dokumen Perusahaan PT Pembangkitan Jawa-Bali adalah sebagai berikut:

1. Informasi Sangat Rahasia
   Informasi yang sifatnya tidak dapat diungkapkan kepada pihak manapun, kecuali kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan pihak lain yang ditunjuk oleh Direktur Utama.
2. Informasi Rahasia
   Informasi yang, karena sifatnya hanya dapat diungkapkan kepada pihak internal Perusahaan yang memiliki kewenangan.
3. Informasi Terbatas
   Informasi yang hanya diizinkan untuk kepentingan Perusahaan dan tidak untuk diungkapkan kepada publik.
4. Informasi Biasa
   Informasi yang tidak termasuk ke dalam kategori sangat rahasia, rahasia dan terbatas yang tidak menimbulkan dampak negatif kepada Perusahaan apabila diungkapkan kepada publik.

The classification of the Company's data and information, as established in the Director's Decree No. 153.K/010/DIR/2010 dated December 4, 2010, regarding the Policy on Information, Data, and Document Management of PT Pembangkitan Jawa-Bali, is as follows:

1. Highly Confidential
   Information: Information that cannot be disclosed to any party except shareholders, the Board of Commissioners, the Board of Directors, and other parties approved by the President Director.
2. Confidential Information
   Information that, due to its nature, can only be disclosed to authorized internal Company personnel.
3. Limited Information
   Information intended solely for Company use and not for public disclosure.
4. Ordinary Information
   Information not classified as highly confidential, confidential, or limited, and which does not negatively impact the Company if disclosed to the public.

Kebijakan Pengungkapan Informasi Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris

Policy on Disclosure of Share Ownership by the Board of Directors and Board of Commissioners

Sampai dengan akhir tahun 2023, PLN NP bukan merupakan Perusahaan terbuka dan tidak terdapat kepemilikan saham Perusahaan oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Sehingga tidak terdapat kebijakan mengenai pengungkapan informasi kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan dan pelaksanaan atas kebijakan dimaksud. Namun demikian, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara berkala setiap tahun membuat Daftar Khusus terkait kepemilikan saham pribadi dan keluarga sesuai dengan ketentuan anggaran Dasar.

As of the end of 2023, PLN NP is not a public Company and there is no share ownership in the Company by members of the Board of Directors or the Board of Commissioners. Therefore, there is no policy regarding the disclosure of share ownership by the Board of Directors and Board of Commissioners members within three business days after the occurrence or any change in share ownership. Nevertheless, members of the Board of Directors and the Board of Commissioners annually create a Special List related to personal and family share ownership in accordance with the Articles of Association.

Kebijakan Terkait *Insider Trading*

Policy on Insider Trading

Sampai dengan akhir tahun 2023, PLN NP bukan merupakan Perusahaan terbuka dan merupakan subholding dari grup PLN dan hampir seluruh sahamnya dimiliki oleh PLN sebagai induk satu holding BUMN. Sehingga tidak terdapat kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading yang memuat aturan yang jelas mengenai perdagangan apa pun dalam saham korporasi yang dilakukan oleh Direksi, Komisaris dan orang dalam untuk memastikan bahwa siapapun tidak boleh mendapatkan keuntungan secara langsung atau tidak langsung dari informasi yang tidak/belum tersedia di pasar, dan tidak terdapat perdagangan orang dalam yang melibatkan Direksi/Komisaris, manajemen dan karyawan dalam tiga tahun terakhir.

As of the end of 2023, PLN NP is not a public Company and is a sub-holding of the PLN group, with almost all shares owned by PLN as a state-owned enterprise holding. Thus, there is no policy to prevent insider trading with clear rules regarding any corporate stock trading by Directors, Commissioners, and insiders to ensure that no one gains directly or indirectly from non-public information. Furthermore, there have been no instances of insider trading involving Directors, Commissioners, management, or employees in the last three years.

Akses Informasi bagi Internal Perusahaan

Internal Information Access

Ketersediaan data dan informasi yang memadai bagi internal Perusahaan sangat penting dalam mendukung kegiatan operasional Perusahaan. Perusahaan memastikan akses data dan informasi sesuai dengan wewenang dan ketentuan yang diatur dalam Kebijakan Pengelolaan Informasi Perusahaan. Data dan informasi dengan klasifikasi Informasi Terbatas dan Informasi Biasa dapat diakses oleh Internal Perusahaan melalui:

1. Intranet, Office Automation (OA), dan Email Berantai (Email Blast)
   Pengelolaan isi dan update dari Intranet dan OA dilakukan bersama antara Sekretaris Perusahaan dan Bidang Information Technology and Digital serta pihak terkait. Email berantai berisi informasi terkait kegiatan pekerjaan dan Perusahaan atau sharing knowledge mengenai hal-hal yang bersifat managerial, tidak mengandung unsur SARA dan politik, serta tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, khususnya yang dapat menimbulkan kerusuhan di lingkungan internal maupun eksternal Perusahaan.
2. MyPower
   Perusahaan mengembangkan aplikasi smartphone yang dapat digunakan untuk mengakses informasi Perusahaan. Aplikasi ini berisikan informasi antara lain agenda korporat, publikasi korporat, data kepegawaian (gaji, absensi, perjalanan dinas, dan informasi pelatihan), kontak seluruh karyawan, dan link menuju aplikasi korporat.
3. Nusantara Power News (NP News)
   Media internal yang dapat diakses melalui https://www.pinnusantarapower.co.id/info-pjb/ dan berfungsi sebagai sarana informasi, edukasi dan sosialisasi kebijakan manajemen untuk seluruh karyawan.

Adequate data and information availability for internal use is crucial to support the Company's operational activities. The Company ensures data and information access according to authority and regulations outlined in the Company's Information Management Policy. Data and information classified as Limited Information and Ordinary Information can be accessed internally through:

1. Intranet, Office Automation (OA), and Email Blast
   The content and updates of the Intranet and OA are managed jointly by the Corporate Secretary and the Information Technology and Digital Division. Email blasts contain work-related information and Company news or knowledge sharing on managerial topics, excluding content on ethnicity, religion, race, and politics, and not used for personal purposes, especially those causing unrest internally or externally.
2. MyPower
   The Company has developed a smartphone application to access Company information, including corporate agendas, publications, employee data (salary, attendance, business trips, and training information), contact details for all employees, and links to corporate applications.
3. Nusantara Power News (NP News)
   Internal media accessible at https://www.pinnusantarapower.co.id/info-pjb/, serving as a platform for information, education, and management policy dissemination to all employees.

4. Komunikasi secara formal dapat melalui forum rapat harian khusus di unit (daily meeting), rapat mingguan (weekly meeting), rapat bulanan, rapat kerja, upacara bendera, pesan Direksi, dan pertemuan manajemen dengan Serikat Pekerja. Sedangkan secara informal komunikasi dilakukan melalui 8to10 Talk, Safari Ramadhan, dan kegiatan lainnya.

4. Formal Communication: this includes daily meetings at units, weekly meetings, monthly meetings, work meetings, flag ceremonies, messages from the Board of Directors, and management meetings with the Labor Union. Informal communication occurs through 8to10 talk, Ramadan Safari, and other activities.

Akses Informasi bagi Publik

Public Access to Information

Perusahaan juga menyediakan akses data dan informasi publik untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Data dan Informasi dengan klasifikasi Informasi Biasa dapat diakses secara luas oleh Publik melalui beberapa media informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan tentang persyaratan keterbukaan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Data dan informasi tersebut dapat diperoleh melalui:

1. Website

   Perusahaan menyediakan website Perusahaan yang dapat diakses melalui situs www.plnnusantarapower.co.id dan disajikan secara bilingual yaitu dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Informasi yang tersedia Website PLN NP diantaranya profil, kebijakan tata kelola Perusahaan, kegiatan operasional, kinerja Perusahaan, pendirian di lingkungan Perusahaan, kliping berita media, soft copy NP News, soft copy data Perusahaan (Annual Report, Sustainability Report, Buku Statistik, Laporan Keuangan), pengumuman pelelangan dan beberapa informasi lain yang bisa diakses dengan mudah oleh publik. Selain itu, Perusahaan telah menampilkan layanan unggulan yang menyalu pada website Perusahaan yang diharapkan dapat memperluas jangkauan Perusahaan terhadap pasar karena memudahkan pelaku bisnis dan memberikan akses kepada khalayak luas untuk mengakses beragam layanan terbaik yang dimiliki PLN NP.

2. Surel elektronik (email)

   Sarana komunikasi elektronik dengan alamat email info@plnnusantarapower.co.id yang dikelola oleh Biidang Information Technology and Digital. Fungsi Komunikasi Korporasi bertugas memantau, mengidentifikasi email yang masuk untuk selanjutnya memberikan respon yang memadai.

3. Media Elektronik Interaktif

   Perusahaan menyediakan media elektronik interaktif berupa Kiosk, CD profile, LCD TV di kantor pusat & unit dan email. Kiosk merupakan media informasi interaktif yang dapat dimanfaatkan oleh tamu PLN NP untuk mengakses company profile dan pengumuman lelang PLN NP. Media informasi berupa CD profile dan display LCD TV tersedia di kantor pusat & unit yang menyampaikan company profile, informasi terkini terkait PLN NP dalam bentuk foto dan video dan informasi lain yang perlu diketahui oleh karyawan dan tamu Perusahaan.

The Company also provides public access to data and information for interested parties. Data and information classified as Ordinary Information can be widely accessed by the public through several information and communication media, in line with transparency requirements based on good corporate governance principles. This data and information can be obtained through:

1. Website

   The Company's website, accessible at www.plnnusantarapower.co.id, is bilingual in Bahasa Indonesia and English. Information available includes the Company's profile, governance policies, operational activities, performance, events, media clippings, soft copies of NP News, annual reports, sustainability reports, statistical books, financial statements, tender announcements, and other easily accessible information. Additionally, the Company features its top services on the website to expand its market reach by facilitating business actors and providing broad public access to explore PLN NP's best services.

2. Email

   Electronic communication through the email address info@plnnusantarapower.co.id, managed by the Information Technology and Digital Division. The Corporate Communications Function monitors and identifies incoming emails to provide adequate responses.

3. Interactive Electronic Media

   The Company provides interactive electronic media such as Kiosks, CD profiles, LCD TVs at headquarters and units, and emails. Kiosks are interactive information media for PLN NP guests to access the company profile and tender announcements. CD profiles and LCD TV displays at headquarters and units present the company profile, the latest information related to PLN NP in photos and videos, and other information employees and guests need to know.

4. Events
Partisipasi acara/pameran/events diupayakan memiliki ruang lingkup promosi, publikasi, dan cakupan kegiatan yang bersifat nasional, atau acara/pameran/events kedaerahan yang memiliki keterkaitan erat dengan wilayah operasi atau kegiatan atau rencana pengembangan Perusahaan dimasa depan, atau yang bersifat career expo sesuai dengan kebutuhan SDM PLN NP.

5. Sponsorship & Iklan Non-Media
Partisipasi sponsor ataupun iklan pada kegiatan atau materi cetakan tertentu diupayakan semaksimal mungkin untuk kegiatan atau materi cetakan yang memiliki ruang lingkup promosi, publikasi dan cakupan kegiatan yang bersifat nasional, atau kegiatan yang bersifat edukasi bagi banyak pihak.

6. Media Massa (cetak dan elektronik)
Setiap proses wawancara pihak internal PLN NP dengan media cetak ataupun media elektronik harus didampingi oleh perwakilan dari Sekretaris Perusahaan (Kantor Pusat), atau bidang Umum (Unit Pembangkitan (UP), Unit Pelaksana Pembangkitan (UPK), Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan (UPDK), Unit Maintenance Repair and Overhaul (UMROH), Unit PLN Academy, Unit Pelaksana Proyek dan Unit lain).

7. Media Sosial
Perusahaan juga memiliki media sosial berupa Facebook (plnnusantarapower), Instagram (plnnusantarapower), twitter (plpln_np) dan Youtube (PLN TV Media).

Informasi tentang Perusahaan juga dapat diperoleh melalui Sekretaris Perusahaan yang berkantor di:

4. Events
Participation in events/exhibitions is aimed at promotion, publication, and activities of national scope or regional events closely related to the Company's operational areas, future development plans, or career expos based on PLN NP's HR needs.

5. Sponsorship & Non-Media Advertising
Sponsorship or advertising participation in certain activities or printed materials is maximized for promotion, publication, and activities of national scope or educational purposes for many parties.

6. Mass Media (Print and Electronic)
Any interviews with PLN NP internal parties by print or electronic media must be accompanied by a representative from the Corporate Secretary (Head Office) or the General Division (Generation Unit (UU), Generation Operating Unit (UOU), Generation Control Unit (UCU), Maintenance Repair and Overhaul Unit (UMROH), PLN Academy, Project Implementation Unit and other units).

7. Social Media
The Company also has social media platforms such as facebook (plnnusantarapower), Instagram (plnnusantarapower), Twitter (plpln_np), and YouTube (PLN TV Media).

Information about the Company can also be obtained through the Corporate Secretary at:

PT PLN Nusantara Power

Kantor Pusat Head Office:
Jl. Kebintang Baru No. 11, Surabaya 60231 Indonesia
Telepon Phone : (62-31) 8282180 (Hunting)
Faksimili Fax : (62-31) 8283183

Kantor Strategic Jakarta Jakarta Strategic Office:
18 Office Park Lt. 2 ABCD
Jl. TB Simatupang No. 18, Jakarta Selatan, DKI Jakarta Indonesia

Publikasi dan Pemberitaan Perusahaan
Company Publications and News

Publikasi dan monitoring atas pemberitaan terkait Perusahaan baik yang dilakukan melalui media informasi Perusahaan maupun oleh media eksternal merupakan salah satu upaya dalam menjaga dan membentuk citra PLN NP dimata publik. Publikasi melalui media informasi Perusahaan diantaranya berupa Laporan Tahunan (Annual Report), Laporan Berkelanjutan (Sustainability Report), NP News sebanyak 10 (sepuluh) edisi serta 67 (delapan puluh tujuh) press release. Sepanjang tahun 2023, terdapat pemberitaan oleh media eksternal terkait Perusahaan sebanyak 7614 (tujuh ribu enam ratus empat belas) pemberitaan di media online dan 387 (tiga ratus delapan puluh tujuh) pemberitaan di media cetak.

Publications and monitoring of news related to the Company through its information media or external media are efforts to maintain and shape PLN NP's image in the public eye. Publications through the Company's information media include the Annual Report, Sustainability Report, 10 editions of NP News, and 67 press releases. In 2023, there were 7614 news reports about the Company in online media and 387 reports in print media.

Pertemuan dengan *Stakeholders*
Stakeholder Meetings

Pertemuan dengan stakeholders dilakukan baik secara fisik maupun virtual dalam forum atau event tertentu yang melibatkan stakeholder Perusahaan sebagai bentuk media komunikasi dua arah untuk dapat mengakses data dan informasi Perusahaan. Sepanjang tahun 2023, Perusahaan telah melakukan beberapa pertemuan dengan para stakeholder sebagai berikut:

Meetings with stakeholders are conducted both physically and virtually in forums or specific events involving Company stakeholders as a form of two-way communication to access Company data and information. Throughout 2023, the Company held several meetings with stakeholders as follows:

Pertemuan dengan *Stakeholders*
Stakeholder Meetings

Stakeholder	Jenis Pertemuan Meeting Topics	Jumlah Total Meeting
Pemegang Saham Shareholders	Rapat Kerja dan Rapat Koordinasi Working Meetings and Coordination Meetings	2 kali times
	Performance Business Review	12 kali times
Karyawan Employee	BOD Talk	1 kali time
	Safari Ramadhan (Roadshow empowering nusantara)	7 kali times
	Serikat Pekerja Labor union	7 kali times
	Employee Gathering	1 kali times
Pelanggan Customer	Customer Gathering	1 kali time
Pemasok Supplier	Supplier Gathering	1 kali 2unit masing-masing 1 Time (Each UNIT)
Media Massa Press Media	Media Gathering	2 kali times

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Social and Environmental Responsibility

Strategi Keberlanjutan
Sustainability Strategy

PLN NP berkomitmen untuk menerapkan strategi keberlanjutan dalam setiap inti bisnis Perusahaan dengan menerapkan pembangunan berkelanjutan dengan berorientasi pada tujuan berkelanjutan/TPB (Sustainable Development Goals/SDGs). PLN NP memandang dengan menerapkan strategi keberlanjutan dalam setiap inti bisnis dapat memberikan kepercayaan lebih kepada pemangku kepentingan Perusahaan. Komitmen PLN NP dalam strategi keberlanjutan diwujudkan dengan menancang berbagai kebijakan strategis terkait keberlanjutan dan terus dievaluasi secara berkala untuk mengikuti perkembangan kondisi lingkungan dan bisnis PLN NP.

PLN NP is committed to implementing sustainability strategies in every core business of the Company by applying sustainable development oriented towards the Sustainable Development Goals (SDGs). PLN NP believes that applying sustainability strategies in every core business can enhance stakeholders' trust in the Company. PLN NP's commitment to sustainability strategies is demonstrated by designing various strategic policies related to sustainability which are regularly evaluated to keep pace with environmental and business developments.

Menjawab Tantangan dan Menangkap Peluang Keberlanjutan
Addressing Sustainability Challenges and Seizing Opportunities

PLN NP menghadapi banyak peluang dan tantangan keberlanjutan di dalam dunia kelistrikan global maupun Indonesia yaitu perubahan iklim, dorongan penggunaan energi bersih, dekarbonisasi, desentralisasi dan digitalisasi dalam pembangunan pembangkit ke depan. Selain itu, keamanan pasokan energi primer, berkembangnya teknologi EBT, pandemi Covid-19, regulasi lingkungan, kondisi SDM Perusahaan juga menjadi tantangan yang dihadapi Perusahaan. Bersamaan dengan hal tersebut, lingkungan bisnis di sektor ketenagalistrikan terus mengalami berbagai perubahan baik dari sisi pasar dan persaingan, tren dan dorongan teknologi, iklim investasi yang semakin hangat serta hal-hal lain yang mempengaruhi Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk menjawab kondisi dan tantangan tersebut, PLN NP telah menentukan arah pengembangan dan langkah yang akan diambil dengan mengoptimalkan core competency dan inovasi. Arah pengembangan PLN NP adalah sebagai berikut:

PLN NP faces numerous sustainability challenges and opportunities both globally and nationally in the electricity sector including climate change, the demand of clean energy use, decarbonization, decentralization, and digitalization in future power plant development. Additionally, primary energy supply security, the advancement of renewable energy technologies, the Covid-19 pandemic, environmental regulations, and the Company's HR conditions are other challenges faced by the Company. Simultaneously, the business environment in the electricity sector continues to undergo various changes in terms of market and competition, technological trends, the warming investment climate, and other factors that directly or indirectly affect the Company. To address these conditions and challenges, PLN NP has determined its development direction and steps to optimize its core competency and innovation. The development direction for PLN NP is as follows:

Arah Pengembangan PLN NP 2023
PLN NP Development Direction 2023

New Energy dan Sustainable

Tren dekarbonisasi, digitalisasi, desentralisasi dan tuntutan masyarakat untuk mengunakan energi lebih bersih menjadi landasan Perusahaan untuk bergerak ke arah new energy dan sustainable.

Trends in decarbonisation, digitalisation, decentralisation, and the community's demands for cleaner energy are the Company's foundation to move towards new and sustainable energy.

Renewable Energy Champion

Dengan target Pemerintah pembangunan energi terbarukan untuk mencapai bauran energi nasional mencapai 23% pada tahun 2025, PLN NP mengarahkan untuk menjadi operator solar PV yang terbesar di Indonesia, menjadi leader dalam biomass cofiring hingga 5% fuel mix, menjadi operator vcnt terbesar di Indonesia dan pemain terkemuka di bidang battery storage solution.

With the Government's target to develop renewable energy to achieve the 23% energy mix nationally by 2025, PLN NP has the objective to: become the largest solar PV operator in Indonesia, be a leader in biomass co-firing of up to 5% fuel mix, be the largest vcnt operator in Indonesia, and a flagship player in the battery storage solutions.

Digital Solution Champion

PLN NP mengarahkan untuk menjadi pembangkit berbasis digital, pengadaan digital, control tower digital pada proyek pembangkit listrik serta otomasi proses pendukung pada Finance, human resource dan IT.

PLN NP targets to become a digital-based power plant, digital procurement, digital control tower to power plant projects and automation support process in finance, human resources, and IT.

Power Solution Champion

PLN NP mengarahkan menjadi pengelola energy paling terpercaya bagi pelanggan C&I area menengah di Indonesia (mencapai efisiensi hingga 30%), partner bagi pelaku teknologi global untuk mengembangkan solusi energi bersih bagi Indonesia, rooftop solar untuk pelanggan C&I dan residensial dan mengembangkan pembangkit listrik virtual.

PLN NP targets to be the most trusted energy manager for medium-scale C&I customers in Indonesia (achieving up to 30% efficiency), a partner for global technology players to develop innovative energy solutions in Indonesia, solar rooftops for C&I and residential customers, and develop virtual power plants.

Sejalan dengan adanya beberapa perubahan utama yang signifikan, antara lain pada percepatan target dekarbonisasi dimana Indonesia mengarahkan untuk mencapai Net Zero pada 2060, dengan aspirasi sektor ketenagalistrikan ditetapkan pada 2050 serta PLN Group sedang melakukan restrukturisasi Holding SubHolding untuk streamlining proses bisnis, maka hal tersebut mendorong PLN NP melakukan alignment atas visi, misi, serta tujuan strategisnya pada RJPP 2024 – 2028 sebagaimana berikut.

In line with several significant changes, such as the acceleration of the decarbonization target where Indonesia aims to achieve Net Zero by 2060, with aspirations for the electricity sector set for 2050, and PLN Group undergoing Holding Sub-Holding restructuring to streamline business processes, PLN NP aligns its vision, mission, and strategic objectives for the 2024 – 2028 RJPP as follows.

Tujuan Strategis PLN NP 2024 – 2028
PLN NP Strategic Objectives 2024 – 2028

Landasan Lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Foundation of Social and Environmental Responsibility Scope

PLN NP terus mendukung upaya peningkatan kinerja dari berbagai aspek yaitu aspek lingkungan, sosial dan ekonomi. Upaya ini bertujuan agar dapat memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan yaitu karyawan, pelanggan, vendor dan masyarakat. Peningkatan strategi keberlanjutan ini dirumuskan oleh PLN NP dalam bentuk tanggung jawab sosial Perusahaan yang telah dilengkapi oleh PLN NP sesuai dengan Standar Etika Perusahaan (*Code of Conduct*) yang dituangkan dalam Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris No. 001/KJ/021/DIR/2019 dan 001/KJ/DK/PJB/2019 serta Keputusan Direksi No.0061/K/010/DIR/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Strategi dan kebijakan yang mengatur pelaksanaan program tanggung jawab sosial oleh PLN NP senantiasa disempurnakan dengan mengacu pada Undang-Undang No. 40 tentang Perseroan Terbatas pasal 74 Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan, Peraturan Pemerintah No.47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan.

PLN NP continuously supports the performance improvement efforts from various aspects, including environmental, social, and economic aspects. This effort aims to benefit stakeholders such as employees, customers, vendors, and the community. PLN NP formulates these sustainability strategy enhancements into the Company's social responsibility, implemented in accordance with the Code of Conduct established in the Joint Decree of the Board of Directors and Board of Commissioners No.001/KJ/021/DIR/2019 and 001/KJ/DK/PJB/2019, and the Board of Directors Decree No.0061/K/010/DIR/2012 on Guidelines for Implementing Social and Environmental Responsibility (TJSL). The strategies and policies governing the implementation of social responsibility programs by PLN NP are continually refined by referring to Law No. 40 on Limited Liability Companies Article 74 on Social and Environmental Responsibility, and Government Regulation No. 47 of 2012 on Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies.

Visi Misi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Vision and Mission of Social and Environmental Responsibility

Visi TJSL PLN NP
TJSL Vision of PLN NP

Menjadi Perusahaan Energi yang memiliki kinerja tinggi dalam pengelolaan dampak lingkungan, sosial, ekonomi, dengan memperhatikan keseimbangan antara harapan pemangku kepentingan dan tujuan perusahaan untuk menjadi "most trusted and preferred company".

To become an energy company with high performance in managing environmental, social, and economic impacts, considering the balance between stakeholder expectations and the Company's goals to become the "most trusted and preferred company".

Misi TJSL PLN NP
TJSL Mission of PLN NP

- Meningkatkan reputasi perusahaan melalui peningkatan kinerja lingkungan, sosial, dan ekonomi dengan program-program CSR yang lebih berkualitas dan akuntabel.
- Meningkatkan orientasi pengelolaan program yang terukur dampaknya.
- Meningkatkan dukungan terhadap operasi PLN NP melalui peningkatan penerimaan para pemangku kepentingan terhadap eksistensi PLN NP sebagai bagian dari masyarakat (corporate citizenship).
- Meningkatkan konsistensi komitmen terhadap keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat melalui pelibatan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan program-program CSR relevan dan unik.
- Meningkatkan kualitas hubungan yang luas dengan para pemangku kepentingan melalui strategi komunikasi yang elegan mempromosikan tema CSR yang tokoh, sesuai dengan tujuan perusahaan dan harapan para pemangku kepentingan.

- Enhance the Company's reputation through improved environmental, social, and economic performance with more quality and accountable CSR programs.
- Increase the management orientation of programs with measurable impacts.
- Enhance support for PLN NP operations through increased stakeholder acceptance of PLN NP's existence as part of the community (corporate citizenship).
- Consistently commit to sustainability and community welfare by involving stakeholders in managing relevant and unique CSR programs.
- Improve the quality of extensive relationships with stakeholders through elegant communication strategies promoting robust CSR themes, aligned with the Company's goals and stakeholders' expectations.

Roadmap dan Strategi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Roadmap and Strategy of Social and Environmental Responsibility

Tipologi pelaksanaan program CSR Perusahaan secara umum terdiri dari 6 (enam) kategori yaitu empowerment, capacity building, infrastruktur, charity, KLBS dan CSV. Adapun CSV merupakan tipologi tambahan yang mengklasifikasikan sebuah program yang memiliki alignment dengan bisnis perusahaan. Program-program tersebut dilaksanakan sesuai dengan corporate values, serta mengacu kepada ketentuan Pemerintah, pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam hal penyusunan dan pengembangan program CSR ke depan, PLN Nusantara Power saat ini telah memiliki Rencana Strategis atau roadmap CSR sejak tahun 2018 hingga tahun 2024.

The implementation typology of the Company's CSR programs generally consists of six categories: empowerment, capacity building, infrastructure, charity, KLBS, and CSV. CSV is an additional typology classifying programs aligned with the Company's business. These programs are executed in accordance with corporate values, government regulations, Sustainable Development Goals (SDGs) achievements, and local community needs. For future CSR program planning and development, PLN Nusantara Power has had a CSR Strategic Plan or roadmap since 2018, covering up to 2024.

Rencana Strategis TJSL PLN Nusantara Power Tahun 2018 – 2024
PLN Nusantara Power's CSR Strategic Plan 2018 – 2024

2018
- Workshop dan sosialisasi/pemahaman
- Implementasi PUB Empel
- Workshop and socialization/ understanding
- PUB Depality implementation

2019
- GAP Analysis
- Membangun komitmen menerapkan CSR berbasis ISO 26000
- Penetapan Pedoman Integrasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
- Blue Print CSR Berbasis ISO 26000
- GAP Analysis
- Soft Commitment to performing CSR based on ISO 26000
- Determination of Corporate Social Responsibility Integration Guidelines
- ISO 26000 Based CSR Blue Print

2020
Holistic CSR
- Membentuk Komite CSR
- Menyusun Strategi Keberlanjutan yang komprehensif
- Established CSR Committee
- Developed a comprehensive Sustainability Strategy

2021
Transformasi
Transformation
- Melaksanakan transformasi PLN Power Beyond Generations menujukan Visi dan Misi menuju bisnis berkelanjutan
- Melaksanakan program PLN Empower untuk mewujudkan Sustainable Energy
- Melaksanakan Sustainable Finance
- Pengukuran dampak menggunakan SROI
- Transformation of PLN Power Beyond Generations to realize the Vision and Mission towards a sustainable business
- PLN Empower program to realize Sustainable Energy
- Implementation of Sustainable Finance
- Impact measurement using SROI

2022
Empower
- Program PLN Empower menciptakan Share Value (CSV) bagi bisnis dan masyarakat yang tercatat (SROI) dan Indeks Kepuasan Masyarakat
- PLN Empower program creates measurable Share Value (CSV) for business and society (SROI and Community Satisfaction Index).

2023
Sustainable Impact Creation
- Menciptakan Program CSR yang berdampak berkelanjutan melalui proses produksi dengan energi bersih dan berkelanjutan
- Implementasi PLN Peduli
- Created a CSR Program that presents sustainable impact through a production process with clean and sustainable energy
- Implementation of PLN Cares

2024
Sustainable Business Energy
- Menciptakan bisnis berkelanjutan
- Menjadi Perusahaan terkemuka Se-Asia Tenggara dan Menjadi pilihan nomor 1 pelanggan untuk solusi energi
- Realized a sustainable business
- To be a leading company in Southeast Asia and to be the number 1 choice of customers for energy solutions

Percepatan Pengembangan Usaha Berbasis Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang Berorientasi Pada Target *Net Zero Emission* Pada Tahun 2060
Accelerating the Development of New and Renewable Energy (EBT) Businesses Oriented Towards the Net Zero Emission Target in 2060

Transisi dari energi fosil ke energi yang lebih bersih, rendah emisi dan ramah lingkungan merupakan arah kebijakan energi nasional dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Tahun 2021 -2030. Hal ini sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk mencapai penurunan emisi gas rumah kaca pada Paris

The transition from fossil energy to cleaner, low-emission, and environmentally friendly energy is the national energy policy direction in the Electricity Supply Business Plan (RUPTL) 2021 - 2030. This is part of Indonesia's commitment to achieving a reduction in greenhouse gas emissions under the Paris Agreement

Agreement sebesar 29% dan 41% dengan bantuan internasional. Atas arah kebijakan energi nasional ini, Indonesia berkomitmen untuk mengatasi perubahan iklim melalui roadmap Net Zero Emission dengan penyediaan listrik dan energi yang rendah karbon sampai pada kehausan mengurangi energi fosil, baik bara pada pembangkitan besar dan pun harga relatif murah.

by 29% and 41% with international assistance. To meet the national energy policy direction, Indonesia is committed to addressing climate change through a Net Zero Emission roadmap by providing low-carbon electricity and energy, including reducing fossil and coal energy in large, relatively cheap generation.

Realisasi Program

Program Realization

Program Kinerja Keberlanjutan PLN NP telah dimasukkan dalam RKAP setiap tahunnya. Anggaran tersebut dialokasikan oleh PLN NP ke dalam berbagai program strategi keberlanjutan, diantaranya yaitu:

1. Program Anti Korupsi;
2. Perlindungan K3 kepada Pemangku Kepentingan;
3. Penanganan Pengaduan Kewilayahan dan Kesehatan Kerja;
4. Penelitian dan Pengembangan Pembangkit;
5. Evaluasi Pengelolaan SDM dan Penanganan Pengaduan Karyawan;
6. Mengelola dan Mengendalikan Emisi;
7. Pengelolaan Limbah;
8. Keanekaragaman Hayati;
9. Program Lentera Kiak;
10. Program Denting Nusantara;
11. DIL

PLN NP's Sustainability Performance Program is included in the RKAP every year. The budget is allocated by PLN NP to various sustainability strategy programs, including:

1. Anti-Corruption Program;
2. OHS Protection for Stakeholders;
3. Handling OHS Complaints;
4. Research and Development of Power Plants;
5. HR Management and Complaint Handling;
6. Emission Management and Control;
7. Waste Management;
8. Biodiversity;
9. Lentera Kiak Program;
10. Denting Nusantara Program;
11. Others.

Realisasi biaya pelaksanaan program tanggung jawab sosial PLN NP pada tahun 2023 adalah sebesar Rp51,513 miliar, mencapai 78% dari RKAP 2023 sebesar Rp65,593 miliar. Realisasi tahun 2023 ini mengalami peningkatan, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp40,704 miliar.

The realization of costs for the implementation of PLN NP's social responsibility program in 2023 was Rp51,513 billion, reaching 78% of the 2023 RKAP of Rp65,593 billion. The 2023 realization increased, when compared to the 2022 realization of Rp40,704 billion.

Anggaran dan Realisasi Biaya CSR Tahun 2023
Budget and Realization of CSR Cost in 2023

No	Typology Typology	RKAP 2023 2023 ABOP	Realisasi 2023 2023 Realization	Realisasi 2022 2022 Realization	Pencapaian terhadap RKAP 2023 Achievement of 2023 ABOP
1	Empowerment	20,449	14,048	16,008	70%
2	Capacity Building	21,771	17,594	10,171	81%
3	Infrastruktur Infrastructure	10,368	8,058	4,045	78%
4	Charity	5,116	4,957	6,279	96%
5	K3LH	5,147	3,064	3,411	59%
6	DIV	2,722	4,232	-	155%
Total		**65,593**	**51,513**	**40,704**	**78%**

Kinerja Keberlanjutan Aspek Ekonomi
Economic Sustainability Performance

PLN NP terus berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan perekonomian di Indonesia dengan menyediakan energi listrik bermutu tinggi, andal dan ramah lingkungan. Komitmen ini berkontribusi memberikan dampak positif bagi upaya Indonesia untuk menjadikan bagian pada rantai pasok global di tengah momentum transisi energi saat ini. Transformasi yang dilakukan PLN NP pada tahun 2022 menjadi subholding dari PT PLN (Persero) merhadapkan cita-cita Perusahaan untuk menjadi Perusahaan pembangkit listrik terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini juga menjadi momentum bagi Perusahaan untuk menegaskan kompetensinya di bidang pembangkitan.

PLN NP is continuously committed to driving Indonesia's economic growth by providing high-quality, reliable, and environmentally friendly electrical energy. This commitment contributes positively to Indonesia's effort to become part of the global supply chain amidst the current energy transition momentum. The transformation of PLN NP in 2022 into a sub-holding of PT PLN (Persero) strengthens the Company's aspiration to become the largest power generation company in Southeast Asia. This transformation also serves as a milestone for the Company to affirm its competence in the power generation sector.

Ikhtisar Capaian Kinerja Ekonomi
Overview of Economic Performance Achievements

Pada tahun 2023 pencapaian kinerja ekonomi dapat dilihat pada aspek realisasi produksi tenaga listrik yang berhasil melebihi target RKAP yaitu sebesar 66.846,00 MWh dari 58.919,20 MWh (tercapai 113,5%) dan realisasi penjualan tenaga listrik pada tahun 2023 sebesar 63.178,60 MWh dari target RKAP sebesar 55.497,63 MWh (tercapai 113,8%). Selain itu, target pangsa pasar PLN NP juga telah melebihi target RKAP yaitu sebesar 21,78% dari target sebesar 21,9%. Adanya jumlah produksi listrik yang melebihi target tersebut, memberikan dampak positif pada pada kinerja keuangan PLN NP, dimana realisasi laba bersih berhasil melebihi target RKAP yaitu sebesar Rp11.667.613 juta dari Rp8.181.702 juta (tercapai 167,01%).

In 2023, economic performance achievements can be seen in the aspect of electricity production realization, which exceeded the RKAP target with 66,846.00 MWh compared to the target of 58,919.20 MWh (achieved 113.5%). Additionally, the realization of electricity sales in 2023 was 63,178.60 MWh, surpassing the RKAP target of 55,497.63 MWh (achieved 113.8%). Moreover, PLN NP's market share target also exceeded the RKAP target, reaching 21.78% against the target of 21.9%. The excess electricity production positively impacted PLN NP's financial performance, with net profit realization exceeding the RKAP target at Rp11,667,613 million from Rp8,181,702 million (achieved 167.01%).

Perbandingan Target dan Kinerja Operasional dan Keuangan
Comparison of Operational and Financial Targets and Performance

Uraian Description	2023		Pencapaian Achievement	2022		Pencapaian Achievement	2021		Pencapaian Achievement
	Target	Realisasi Realization		Target	Realisasi Realization		Target	Realisasi Realization	
Produksi Tenaga Listrik (MWh) Electric Power Production (MWh)	58.919,20	66.846,00	113,5%	55.276,42	7.108,43	111,9%	59.403,50	35.640,93	106,36%
Penjualan Listrik (MWh) Electricity Sales (MWh)	55.497,63	63.178,60	113,7%	54.688,30	56.379,46	97,9%	56.500,88	59.040,44	92,0%
Pendapatan Usaha (Rp Juta) Business Income (Rp Million)	89.552.705	95.275.637	106,9%	29.395.683	27.202.200	93,5%	30.779.975	29.508.034	95,87%
Laba Tahun Berjalan (Rp Juta) Profit for the Year (Rp Million)	8.181.702	11.667.613	167,01%	4.081.883	6.581.546	162,24%	3.307.546	5.803.188	181,45%

Kontribusi Kepada Negara
Contribution to the State

Dalam mendorong perkembangan perekonomian di Indonesia, PLN NP berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi keuntungan bagi Negara. Wujud komitmen keberlanjutan ini ditunjukan dengan kepatuhan PLN terhadap pemenuhan kewajiban Perusahaan sebagai wajib pajak melalui pembayaran pajak dan dividen. Jumlah setoran pajak tahun 2023 sebesar Rp4,04 Triliun, meningkat 228,39% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp1,23 Triliun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah pembelian material dan penggunaan jasa dari pihak ketiga.

In driving Indonesia's economic development, PLN NP is committed to continuously contributing profits to the State. This commitment to sustainability is demonstrated by PLN NP's compliance with fulfilling its obligations as a taxpayer through tax and dividend payments. The total tax payment in 2023 was Rp4,04 trillion, an increase of 228,39% compared to Rp1,23 trillion in 2022. This increase was primarily influenced by the rising volume of material purchases and the use of services from third parties.

Sebagai pemotong pajak, Perusahaan secara aktif berperan serta dalam melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan atas pajak-pajak seperti PPh Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi dan sewa bangunan, PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi, dan PPh Pasal 23 atas penghasilan yang diterima wajib pajak badan.

As a tax withholder, the Company actively participates in withholding, depositing, and reporting various taxes, including Income Tax Article 4 paragraph 2 on construction services and building rentals, Income Tax Article 21 on personal income, and Income Tax Article 23 on corporate income.

Tabel Setoran Pajak (Rp Miliar)
Tax Payment Table (Rp Billion)

Uraian Description	2021	2022	2023	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
				%	Rp
PPh Pasal 21 Income Tax Article 21	177,73	141,18	416,16	192,71	272,11
PPh Pasal 23 Income Tax Article 23	56,25	55,57	210,48	278,27	154,91
PPh Pasal 4 ayat 2 Income Tax Article 4 paragraph 2	77,98	72,96	37,86	-48,39	-[illegible]
PPh Pasal 15 Income Tax Article 15	0,89	0,000000000	19,04	19.039.411,87	19,04
PPh Pasal 22 Income Tax Article 22	61,08	76,62	348,73	355,08	272,1
PPh Pasal 26 Income Tax Article 26	0,043	0,098	0,0099	-89,44	-0,0890
PBB Property Tax (PBB)	18,81	25,68	39,41	53,48	13,73
PPN Keluaran Income VAT	785,50	995,41	2.944,97	277,08	2.026,54
Jumlah Setoran Pajak Tax Payment Amount	**1.126,00**	**1.223,39**	**4.037,66**	**228,39**	**2.810,27**

Selain pembayaran pajak kepada Negara, adapun kontribusi lain PLN NP terhadap Negara secara tidak langsung melalui penerimaan APBN yaitu PLN NP telah menyumbang dividen kepada PT PLN (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada tahun 2023. Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 13 Juni 2023, pembagian dividen untuk tahun buku 2022 ditetapkan sebesar Rp6,548 miliar.

In addition to tax payments to the State, PLN NP also contributes indirectly to increasing the State Budget (APBN) through dividend payments to PT PLN (Persero), which is a State-Owned Enterprise (BUMN). Based on the Minutes of the General Meeting of Shareholders on June 13, 2023, the dividend distribution for the 2022 financial year was determined to be Rp6,548 billion.

Kinerja Keberlanjutan Aspek Lingkungan
Environmental Sustainability Performance

Dalam hal Keberlanjutan pengelolaan terhadap lingkungan atas operasional Perusahaan, PLN NP terus berkomitmen untuk membangun bisnis yang ramah lingkungan. Komitmen ini dilakukan PLN NP dengan menerapkan kebijakan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan, pengelolaan energi, pengendalian dan reduksi emisi, penggunaan air yang efisien, pengelolaan limbah B3 maupun non B3 serta pengelolaan keanekaragaman hayati. Selain itu, komitmen PLN NP terhadap pengelolaan lingkungan Perusahaan juga dilakukan melalui penetapan Kebijakan Sistem Manajemen Terintegrasi PT Pembangkitan Jawa-Bali No.0174/020/DIR/2023. Kebijakan ini mengacu pada peraturan yang berlaku diantaranya PP 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta ISO 14001 tentang Sistem Manajemen Lingkungan. Kebijakan tersebut mengatur penggunaan sumber daya energi dan sumber daya alam dalam kegiatan operasional dan pemeliharaan unit pembangkit PLN NP secara efisien. Untuk itu, PLN NP berupaya untuk menjalankan operasional Perusahaan yang ramah lingkungan dan meminimalkan dampak negatif bagi lingkungan dengan menerapkan prinsip 3R (reduce, reuse, dan recycle).

Manajemen PLN NP senantiasa meninjau kebijakan pengelolaan lingkungan hidup secara berkala untuk menjamin kesesuaian kebijakan dengan peraturan yang berlaku dan efektivitas pencapaian program. Kebijakan yang berlaku saat ini merupakan penyempurnaan dari kebijakan sebelumnya yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi 0021K/020/DIR/2023 tentang Kebijakan Sistem Manajemen Terintegrasi. Kesungguhan PLN NP dalam pelaksanaan program langsung jawab sosial terhadap lingkungan merupakan wujud kontribusi dalam memelihara kualitas lingkungan hidup di sekitar area operasional Perusahaan.

In terms of sustainability of environmental management of the Company's operations, PLN NP continues to be committed to building an environmentally friendly business. PLN NP carried out this commitment by implementing sustainable environmental protection policies, energy management, emission control and reduction, efficient water use, management of hazardous and non-hazardous waste and biodiversity management. In addition, PLN NP commitment to the Company's environmental management is also carried out through the establishment of the Integrated Management System Policy of PT Pembangkitan Jawa-Bali No.0174/020/DIR/2023. This policy refers to applicable regulations, including PP 22 of 2021 concerning Environmental Protection and Management and ISO 14001 concerning Environmental Management Systems. The policy regulates efficient use of energy and natural resources in the operational and maintenance activities of PLN NP's generating units. To that end, PLN NP strives to practice environmentally friendly Company operations and minimize negative impacts on the environment by maximizing the 3R principle (reduce, reuse, and recycle).

PLN NP management regularly reviews the environmental management policy to ensure the policy's compliance with applicable regulations and the effectiveness of program implementation. The current policy is a refinement of the previous policy stipulated in the of the Board of Directors Decree 0021K/020/DIR/2023 on the Integrated Management System Policy. PLN NP's seriously implements the social responsibility program for the environment as actualization of contribution in maintaining the quality of the environment around the Company's operational areas.

Kegiatan Pengelolaan Lingkungan
Environmental Management Activities

Untuk melanjutkan komitmennya terhadap pengelolaan lingkungan Perusahaan, PLN NP telah menjalankan berbagai program pengelolaan lingkungan seperti pengelolaan energi, pengendalian dan reduksi emisi, penggunaan air yang efisien, pengelolaan limbah B3 maupun non B3 serta pengelolaan keanekaragaman hayati. Berikut penjelasan terkait pengelolaan lingkungan yang dilakukan PLN NP selama tahun 2023:

To continue its commitment to the Company's environmental management, PLN NP carried out various environmental management programs such as energy management, emission control and reduction, efficient water use, hazardous and non-hazardous waste management and biodiversity management. PLN NP carries out environmental management during 2023 as explained as follows:

Program Kepatuhan Pengelolaan Lingkungan
Environmental Management Compliance Program

Program Kepatuhan terhadap pengelolaan lingkungan merupakan kegiatan pendampingan dan pemantauan secara rutin untuk memastikan kepatuhan PLN NP terhadap pengelolaan lingkungan melalui:

Compliance Program for environmental management is a routine mentoring and monitoring activity to ensure NP PLN compliance with environmental management through the following:

Program Kepatuhan Pengelolaan Lingkungan
Environmental Management Compliance Program

No	Program Kegiatan Activity Program	Realisasi Kegiatan Activity Realization	
1.	Pengelolaan Lingkungan Environmental Management	• Pengelolaan Limbah Padat Domestik • Pengelolaan Limbah FABA • Pengelolaan Limbah B3 • Pengurangan Sampah Plastik • Pengelolaan Limbah Cair • Pengelolaan Emisi Non-GRK • Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan	• Domestic Solid Waste Management • FABA Waste Management • Hazardous Waste Management • Plastic Waste Reduction • Liquid Waste Management • Non-GHG Emission Management • Environmental Management System Certification
2.	Penggunaan Sumber Daya Resource Usage	• Program Efisiensi Penggunaan Air • Program Pengelolaan Kualitas Keseimbangan Air	• Water Use Efficiency Program • Water Scarcity Risk Management Program
3.	Pengelolaan Perubahan Iklim Climate Change Management	• Pengendalian Perubahan Iklim • Inventarisasi dan Penghitungan Emisi GRK • Perdagangan Karbon • Aksi Adaptasi Perubahan Iklim • Mitigasi Perubahan Iklim	• Climate Change Control • GHG Emissions Inventory and Accounting • Carbon Trading • Climate Change Adaptation Action • Climate Change Mitigation
4.	Penggunaan Lahan dan Keanekaragaman Hayati Land Use and Biodiversity	• Pengelolaan Keanekaragaman Hayati • Penutupan dan Rehabilitasi Lahan	• Biodiversity Management • Site Closure and Rehabilitation

Penggunaan Energi Ramah Lingkungan
Use of Green Energy

Dalam komitmennya terhadap pengelolaan lingkungan, PLN NP terus berupaya untuk melakukan efisiensi energi dan mendorong terwujudnya green energy. PLN NP selalu menggunakan energi primer yaitu Bahan Bakar Minyak, Diesel, Batubara, dan Gas/LPG/CNG untuk produksi listrik. Beberapa inisiatif program efisiensi energi yang diterapkan pada pembangkit dalam proses produksi listrik antara lain:

- Retrofit dan Remote Operation Sebagai Solusi Konservasi Dan Upaya Sustainable Pembangkit Listrik Green Energy
- Diversifikasi suplai PS dengan PV Rooftop
- Pemasangan panel Listrik Tenaga Surya Gedung

In its commitment to environmental management, PLN NP continues to strive for energy efficiency and encourage the realization of green energy. PLN NP always uses primary energy, namely fuel Oil, Diesel, Coal, and Gas/LPG/CNG for electricity production. Some of the energy efficiency program initiatives implemented at the power plant in the electricity production process include:

- Retrofitting and Remote Operation as Conservation Solutions and Sustainable Green Energy Power Plant Efforts
- Diversify PS supply with Rooftop PV
- Installation of Building Solar Electricity panels

Komitmen dalam penerapan inisiatif efisiensi khususnya energi primer PLN NP ditunjukkan dengan penggunaan biomassa sebagai campuran bahan bakar pembangkit. Jumlah konsumsi energi primer tahun 2022 yaitu 952.105,652 Gigajoule mengingat dari tahun 2022 sebesar 179.256,510 Gigajoule, yang dirinciskan dalam tabel berikut.

PLN NP demonstrates commitment to the implementation of efficiency initiatives, especially primary energy for PLN NP, through the use of biomass as a mixture of power plant fuels. Total primary energy consumption in 2022 is 952,105,652 Gigajoules, an increase from 2022 of 179,256,510 Gigajoules, which is detailed in the following table.

Konsumsi Energi Primer Tahun 2021-2023 (Gigajoule)
Primary Energy Consumption 2021-2023 (Gigajoule)

No	Jumlah Energi Pusat Total Power Energy	2023	2022	2021
Energi Fosil Fossil Energy				
1	HSD	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	MFO	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	Batubara	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	Gas	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Energi Terbarukan Renewable Energy				
5	Air Water	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	Biomassa Biomass	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Total		**952.105,652**	**179.256,510**	**224.964,289**

Sistem Pengolahan Limbah
Waste Treatment System

Limbah yang dihasilkan atas aktivitas bisnis Perusahaan memiliki dampak negatif dari sisi ekonomi lingkungan dan sosial. Dari sisi ekonomi, pengelolaan limbah yang dihasilkan termasuk biaya untuk pengumpulan, pemrosesan, transportasi dan pembuangan memerlukan biaya yang cukup besar. Selain itu, Perusahaan juga berpotensi menghadapi ancaman hukum dan pemerintah atau masyarakat bahkan penutupan izin operasi jika tidak memenuhi peraturan lingkungan. Dari sisi lingkungan dan sosial, limbah yang tidak dikelola dengan baik dan benar dapat mencemari lingkungan seperti polusi air, udara dan tanah sehingga berdampak negatif pada kesehatan yakni menimbulkan risiko penyakit bagi masyarakat sekitar dan satwa liar.

Untuk itu, PLN NP senantiasa melakukan pengelolaan dampak terkait limbah terhadap kegiatan bisnis Perusahaan seperti proses produksi listrik, termasuk pembakaran bahan bakar fosil dan limbah B2 yang dihasilkan; penggunaan bahan kimia seperti bahan pembersih, pelumas, dan bahan pendingin; proses pemeliharaan dan perbaikan peralatan, yang dapat menghasilkan limbah seperti kain lap, cat, dan baterai bekas; serta kegiatan pengolahan limbah, termasuk pengolahan air limbah dan pengolahan limbah B3.

Waste generated from the Company's business activities has negative economic, environmental and social impacts. In terms of economy, the management of waste generated including costs for collection, processing, transportation and disposal requires considerable costs. In addition, the Company also has the potential to face legal threats from the government or community and even revocation of operating licenses in case it does not comply with environmental regulations. From the environmental and social perspective, waste that is not managed properly can pollute the environment, such as water, air and soil pollution, which has a negative impact on health, namely posing a risk of disease the to surrounding communities and wildlife.

For this reason, PLN NP always manages waste-related impacts on the Company's business activities such as the electricity production process, including the combustion of fossil fuels and hazardous waste generated; the use of chemicals such as cleaning agents, lubricants, and cooling agents; equipment maintenance and repair processes, which can generate waste such as rags, paint, and used batteries; and waste treatment activities, including wastewater treatment and hazardous waste treatment.

Limbah B3
Hazardous Waste

PLN NP dalam melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan regulasi yang berlaku saat ini diantaranya Permen LHK No. 6 tahun 2021 tentang pengelolaan limbah B3. Limbah B3 yang dihasilkan dari operasional pembangkit, maka limbah B3 tersebut disimpan di TPS LB3 yang berizin atau terintegrasi di dalam dokumen lingkungan selama masa simpan yang diperbolehkan. Selanjutnya, limbah B3 tersebut diserahkan ke pihak ketiga yang memiliki izin pengelolaan limbah B3 (pengumpul/pemanfaat/pengolah). PLN NP juga bekerja sama dengan transporter yang memiliki perizinan lengkap dari KLHK dan Kemenhub.

PLN NP manages B3 waste following the current regulations, including Environment and Forestry Ministerial Decree No. 6 of 2021 concerning B3 waste management. B3 waste generated from power plant operations is stored in a licensed LB3 TPS or integrated in the environmental document during the allowed storage period. Furthermore, the B3 waste is handed over to the third party that has a B3 waste management license (collector/beneficiary/processor). PLN NP also cooperates with transporters who have complete licenses from KLHK and the Ministry of Transportation.

Metode Pengelolaan Limbah B3 PLN NP
NP PLN Hazardous Waste Manage

Identifikasi dan Klasifikasi Identification and Classification	Timbulan limbah diidentifikasi dan diklasifikasikan berdasarkan jenisnya. Setiap jenis limbah B3 memiliki karakteristik dan sifat bahaya yang berbeda, sehingga pengelolaan yang tepat harus disesuaikan dengan jenis limbah tersebut.	Waste generation is identified and classified based by type. Each type of hazardous waste has different characteristics and hazardous properties, so proper management must be tailored to the type of waste.
Pemisahan dan Penyimpanan Segregation and Storage	Limbah B3 harus dipisahkan dari limbah non-B3 dan disimpan secara terpisah dalam wadah yang sesuai. Wadah penyimpanan limbah B3 harus dirancang sedemikian rupa sehingga mencegah tumpahan dan kontaminasi lingkungan.	Hazardous waste must be separated from non-hazardous waste and stored separately in appropriate containers. Hazardous waste storage containers must be designed in such a way as to prevent spillage and contamination of the environment.

Transportasi yang Aman
Safe Transportation

Limbah B3 harus diangkut dengan menggunakan kendaraan dan kontainer yang sesuai. Pengangkutan limbah B3 harus memenuhi peraturan dan standar keselamatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, PT PLN NP bekerja sama dengan pengangkut/transporter yang berizin.

Hazardous waste must be transported using appropriate vehicles and containers. B3 waste transportation must comply with regulations and safety standards set by the government. Based on this, PT PLN NP cooperates with licensed carriers/transporters.

Pemanfaatan/ Pengolahan oleh Pihak ketiga
Utilization / Processing by third parties

Dalam rangka melakukan pengelolaan akhir limbah B3, PT PLN NP bekerja sama dengan pemanfaat/ pengolah akhir limbah B3 berizin.

In order to carry out the final B3 waste management, PT PLN NP cooperates with licensed B3 waste end users/processors.

Reduksi Timbulan Limbah B3
Reduction of hazardous waste generation

Melakukan reduksi limbah B3 dengan pengoptimalan penyimpanan material dan mencari substitusi material yang lebih ramah lingkungan.

Reducing hazardous waste by optimizing material storage and finding substitutes for more environmentally friendly materials.

Volume dan Metode Pengelolaan Limbah B3 (Ton)
Volume and Method of Hazardous Waste Management (Tons)

Jenis Limbah B3 Type of Hazardous Waste	Metode Pengelolaan Limbah Waste Management Methods	Jumlah Limbah B3 yang Dihasilkan Total Hazardous Waste Generated			Jumlah Limbah B3 yang Dialihkan dari Pembuangan (Dimanfaatkan) Amount of Hazardous Waste Diverted From Disposal (Utilized)			Jumlah Limbah B3 yang Dimpan dan Keluar Amount of Hazardous Waste Stored and Discharged		
		2023	2022	2021	2023	2022	2021	2023	2022	2021
Oli/ minyak/ pelumas bekas Used oil/ grease/ lubricant	Diserahkan kepada pihak ketiga berizin Handed over to a licensed third party	205,71	23,23	196,31	0	0	0	205,71	23,23	196,31
Kemasan B3 B3 Packaging	Diserahkan kepada pihak ketiga berizin Handed over to a licensed third party	7,66	3,47	3,32	0	0	0	7,66	3,47	3,32
Bahan kimia kadluarsa Expired chemicals	Diserahkan kepada pihak ketiga berizin Handed over to a licensed third party	10,76	20,96	20,89	0	0	0	10,76	20,96	20,89
Majun & Sarung tangan terkontaminasi Contaminated mop & gloves	Diserahkan kepada pihak ketiga berizin Handed over to a licensed third party	58,16	33,96	34,35	0	0	0	58,16	33,96	34,35
Limbah terkontaminasi B3 Hazardous contaminated waste	Diserahkan kepada pihak ketiga berizin Handed over to a licensed third party	108,84	71,84	71,84	0	0	0	108,84	71,84	71,84
Resin bekas Used resin	Diserahkan kepada pihak ketiga berizin Handed over to a licensed third party	15,89	4,79	3,38	0	0	0	15,89	4,79	3,38

Jenis Limbah B3 Type of Hazardous Waste	Metode Pengelolaan Limbah Waste Management Methods	Jumlah Limbah B3 yang Dihasilkan Total Hazardous Waste Generated			Jumlah Limbah B3 yang Dialihkan dari Pemborongan (Dimanfaatkan) Amount of Hazardous Waste Diverted from Disposal (Utilized)			Jumlah Limbah B3 yang Disimpan dan Akhir Amount of Hazardous Waste Stored and Discharged		
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Aki bekas Used batteries	Diserahkan kepada pihak ketiga berizin Handed over to a licensed third party	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Filter bekas Used filters	Diserahkan kepada pihak ketiga berizin Handed over to a licensed third party	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Refrigerant Refrigerants	Diserahkan kepada pihak ketiga berizin Handed over to a licensed third party	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Limbah elektronik E-waste	Diserahkan kepada pihak ketiga berizin Handed over to a licensed third party	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Limbah laboratorium/klinik Laboratory/clinic waste	Diserahkan kepada pihak ketiga berizin Handed over to a licensed third party	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Sludge gas Gas Sludge	Diserahkan kepada pihak ketiga berizin Handed over to a licensed third party	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Jumlah Total		[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Limbah Non-B3

Non-Hazardous Waste

PLN NP dalam melakukan pengelolaan limbah Non-B3 perlu memaksimalkan 3R agar sampah yang berakhir di TPA berkurang. PLN NP melakukan pemanfaatan limbah organik menjadi kompos aliaspun briket, sedangkan sebagian limbah anorganik seperti kardus kemasan, botol minuman sekali pakai, plastik, dan limbah non-B3 lainnya dikelola di bank sampah binaan di sekitar lokasi pembangkit. Sisa limbah yang tidak dapat dimanfaatkan kembali, disarahkan ke TPA.

PLN NP manages Non-B3 waste management by maximizing the 3R so as to decrease the waste ending up in the landfill. PLN NP utilizes organic waste into compost or briquettes, while some inorganic waste such as cardboard boxes, disposable beverage bottles, plastics, and other non-B3 waste is managed in waste banks built around the power plant site. The remaining waste that cannot be reused is handed over to the landfill.

FABA dikelompokkan menjadi Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non-B3) sesuai Peraturan Pemerintah (PP) 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kegiatan Pemanfaatan FABA merupakan salah satu bentuk pengelolaan limbah Non B3 yang dilakukan oleh perusahaan penghasil limbah (PLTU). Pemanfaatan FABA yang dilakukan oleh PLTU merupakan kegiatan tambahan (beyond compliance) yang dilakukan oleh pihak perusahaan dalam mengelola lingkungan yg lebih baik.

FABA is categorized as Non-Hazardous and Toxic Waste (Non-B3) according to Government Regulation (PP) 22 of 2021 concerning the Implementation of Environmental Protection and Management. FABA Utilization activities are manifestation of Non-B3 waste management carried out by waste generating companies (CFPP). CFPP leverages FABA as an additional activity (beyond compliance) carried out by the Company in managing a better environment.

Berikut adalah berbagai macam inovasi yang dilakukan Perusahaan dalam pengelolaan limbah baik B3 maupun non-B3.

The following are various innovations by the Company in managing both hazardous and non-hazardous waste.

Unit Pembangkit Generating Unit	Inovasi Innovation	
Limbah B-3 Limbah B-3		
Tanjung Awar - Awar	Eliminasi limbah sludge area chlorinn plant dengan metode modifikasi jalur automatic drain sea water filter	Chlorinn power plant area sludge waste elimination with automatic drain sea water filter line modification method
Indramayu	Second life battery untuk kampung geram rekyat	Second life battery for kampung geram rekyat
Muara Karang	Automatic oil filling system pada bypass damper untuk menurunkan limbah B3 mejun PLTGU Blok 3	Automatic oil filling system on bypass damper to reduce B3 mejun waste at Block 3 CCPP
Pembang	REGO SUPER (Regreasing Otomatis pada Swing ship Unloader Unit Pembangkitan Pembang)	REGO SUPER (Automatic Regreasing on Swing Ship Unloader of Pembang Generating Unit)
Muara Tawar	HERITOR (High Efficiency Turbine Oil Dehydrator)	HERITOR (High Efficiency Turbine Oil Dehydrator)
Cilacap	Pengurangan limbah minyak pelumas bekas melalui optimasi metode kebocoran di sistem hidrolis exhaust damper	Reduction of waste used lubricating oil through optimization of leakage method in the exhaust damper hydraulic system
Paiton	Pengurangan limbah terkontaminasi B3 (fiber air) melalui injeksi anti chlorine pada ultrafiltration	Reduction of hazardous waste (water fiber) through anti chlorine injection in ultrafiltration
Belitung	Pengaplikasian media penyerap khusus untuk meminimalisir limbah B3 pada kegiatan operasional	Application of special absorbent media to minimize hazardous waste in operational activities
Tanjung	Penambahan tapping point pada fluid coupling BFP untuk purifikasi pelumas secara online	Addition of tapping points to BFP fluid coupling for online lubricant purification
Bangka	Resetting inverter dosing injection pump bahan kimia	Resetting inverter dosing injection pump chemicals
Paiton	D.I.A.P (Direct Injection Ammonia Paiton)	D.I.A.P (Direct Injection Ammonia Paiton)
Pulangjaya	Manual clean purifier MLT agar memperpanjang masa guna pelumas	MLT manual clean purifier to extend the life of lubricants
Limbah Non-B3 Terdaftar Registered Non-B3 Waste		
Tanjung Awar - Awar	Rumah FABA	FABA House
Paiton	Combustion Tuning	Combustion Tuning
Belitung	Pemanfaatan limbah fly ash dan bottom ash sebagai bahan cladding (ahan ruang terbuka hijau	Utilization of fly ash and bottom ash waste as green open space land stabilization material
Bangka	Pemanfaatan FABA sebagai pupuk dan pembenah tanah	FABA utilization as fertilizer and soil improver
Pulangjaya	PAKUBAKA (Pemanfaatan Abu Batubara PLTU Pulangjaya untuk Pengecoran Jalan)	PAKUBAKA (Utilization of Coal Ash for Road Casting from Pulangjaya CCPP)
Pembang	Pelombaan Batha (pemanfaatan limbah B3 fly ash dan bottom ash) sebagai bahan baku substitusi pembuatan paving block)	Batha Competition (utilization of fly ash and bottom ash hazardous waste as substitute raw material for paving block making)
Indramayu	Pemanfaatan FABA sebagai bahan dasar semen	FABA utilization as cement base material
Paiton	DAOT-B (Fly Ash and Bottom Ash for Breakwater)	DAOT-B (Fly Ash and Bottom Ash for Breakwater)
Limbah Non-B3 Non hazardous waste		
Indramayu	Pemanfaatan cangkang kerang menjadi pakan ternak	Utilization of clam shells into animal feed
Tanjung Awar - awar	Pemanfaatan limbah rumput, daun kering dan ranting pohon area unit sebagai Pakan Ternak Berbasis Sustainable Village (desa jaruh suci) pada kelompok binaan desa pertanian terpadu dan sinergi energi	Utilization of Grass Waste, Dry Leaves and Tree Branches Area Unit as Animal Feed Based on Sustainable Village (Desa Suci) in the Assisted Group of Integrated Agriculture Village and Energy Synergy
Muara Karang	Program food waste digester di area kantin	Food waste digester program in the canteen area
Pembang	SAMPO PASTA APUNG (Sampah Botol Plastik untuk fotovoltaik)	SAMPO PASTA APUNG (Plastic Bottle Waste for Photovoltaic)
Muara Tawar	Pemanfaatan thread tube evaporator untuk kandang burung	Utilization of the thread tube evaporator for bird cages
Cilacap	Pengolahan buah bintaro menjadi pestisida organik	Processing bintaro fruit into organic pesticide
Paiton	Pemanfaatan limbah silicaver calcium dengan metode flow line production menjadi produk beton pracetak	Utilization of calcium silicaver waste with flow line production method into precast concrete products
PLTU Belitung	Produksi tepung dari limbah cangkang kepiting	Flour production from crab shell waste

Unit Pembangkit Generating Unit	Inovasi Innovation	
UP Tanjung	Optimalisasi side product composting sebagai media pembenih/bibit nacing	Optimization of side product composting as seed breeding media
PLTU Tumpaiya	Transplantasi terumbu karang menggunakan pipa PVC bekas dengan metode coral tree	Coral reef transplantation using used pvc pipes with coral tree method
UP Pachan	Pemanfaatan sisipan pipa bekas sebagai struktur penggantiNP kolom di GCB dan gudang bihnis	Utilization of used pipe metal as a replacement structure for NP columns in GCB and chemical warehouse
PLTU Barajya	Pemanfaatan tube bekas untuk rangka cagar	Utilization of the used tube for fence frame

Pemantauan Kualitas Lingkungan
Environmental Quality Monitoring

PLN NP berkomitmen dalam mendorong pengurangan atau reduksi emisi melalui upaya-upaya pengurangan emisi di setiap unit pembangkit. Dalam pelaksanaan kegiatannya, PLN NP melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan berupa pengelolaan emisi gas buang dan emisi gas rumah kaca sebagai upaya untuk memelihara kualitas udara di sekitar area operasional Perusahaan.

PLN NP is committed to encouraging emission reduction through emission reduction efforts in each generating unit. In these activities implementation, PLN NP carries out environmental quality monitoring in the form of managing exhaust emissions and greenhouse gas emissions as an effort to maintain air quality around the Company's operational areas.

Inventarisasi Emisi Gas Buang
Exhaust Gas Emission Inventory

PLN NP melakukan pengukuran emisi gas buang dari aktivitas bisnis guna menentukan upaya pengelolaan dampak lingkungan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 15 Tahun 2019 tentang baku mutu emisi pembangkitan. Dalam melakukan pengukuran emisi gas buang, metode yang dilakukan adalah dengan memutur kualitas emisi (mg/m³) secara rutin kemudian mengambil nilai rata-ratanya dalam suatu periode, dan metode pengukuran kedua (opsional) menggunakan akumulasi data CEMS. Pada tahun 2023, jumlah emisi gas buang PLN NP sebesar 245.686.040,00 kg/tahun.

PLN NP measures the flue gas emissions from business activities to determine environmental impact management efforts based on the Minister of Environment Regulation No. 15 of 2019 concerning generation emission quality standards. In measuring exhaust emissions, the method used is to measure emission quality (mg/m³) routinely and then take the average value in a period, and the second measurement method (optional) uses accumulated CEMS data. In 2023, total exhaust emissions from PLN NP amounted to 245,686,040.00 kg/year.

Emisi Gas Buang
Exhaust Gas Emissions

Parameter Parameters	Beban Emisi (kg/tahun) Flue Gas Emissions (kg/years)		
	2023	2022*	2021*
Nitrogen Oksida (NOx)	133.670.950,00	114.611.090,00	103.530.740,00
Partikulat (PM)	12.684.610,00	12.180.030,00	11.611.730,00
Sulfur Dioksida (SOx)	47.347.880,00	56.415.230,00	47.030.180,00
Karbon Dioksida (CO2)	37.744.320,00	32.146.910,00	7.888.260,00
Merkuri (Hg/ Mercury (Hg)	1.190,00	1.420,00	1.080,00
Jumlah Total	**245.686.040,00**	**183.352.480,00**	**174.534.390,00**

- Metode pengukuran emisi gas buang adalah dengan memutur kualitas emisi (mg/m³) secara rutin kemudian mengambil nilai rata-ratanya dalam suatu periode, dan metode pengukuran kedua (opsional) menggunakan akumulasi data CEMS.
- Jumlah Total emisi yang dipergunakan berasal dari emisi yang dihasilkan dari pembakaran mesin diesel.
- Adanya perbedaan data periode tahun 2021-2023, dikarenakan data SR tahun 2022 data perhitungan masih menggunakan data aset aset operasi yang proses PLN NP dan untuk SR tahun 2023 sudah menggunakan data aset aset operasi/data Berdasarkan SK 1914K / aset kapasitas SR tertuang wajib melakukan integrasi data tahun lalu dan aset operasional.

- The measurement method of exhaust emissions is to measure the emission quality (mg/m³) routinely and then take the average value in a period, and the second measurement method (optional) uses the accumulated CEMS data.
- The emission is generated from the combustion of the diesel engine.

- There is a deviation in 2021-2023 because in the 2022 SR the calculation data still uses data from operating assets owned by PLN NP and for the 2023 SR the calculation uses data from ownership assets. Based on SK 1914K/1, the latest SR Report must consider "integrating data from ownership assets".

Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca

Greenhouse Gas Emission Inventory

Perusahaan mendukung upaya pemerintah dalam program mitigasi emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Hal ini tercermin melalui upaya dan inisiatif PLN NP mendukung target Net Zero Emission 2060 seperti peningkatan cofiring biomassa hingga 5% diseluruh PLTU, inventarisasi lengkap scope 1, 2 dan 3 dari gas rumah kaca, perdagangan karbon kelanagsatrikan antar PLTU, inisiatif pengurangan emisi kegiatan operasi serta emisi fugitive, meningkatkan upaya konservasi dan penanaman pohon yang mampu menyerap CO2 serta implementasi Nilai Ekonomi Karbon melalui penerbitan Sertifikat Pengurang Emisi dari aksi mitigasi energi bersih. Selain aksi mitigasi yang diakui internasional, PLN NP juga memperkuat adaptasi terhadap perubahan iklim dengan cara meningkatkan daya tahan masyarakat pesisir terdampak risiko bencana iklim, peningkatan kapasitas pengelolaan energi terbarukan turbin mikro hidro di masyarakat terpencil, hingga mekanisme pengalihan arus migrasi ubur-ubur yg terdampak gelombang panas laut elnino di kawasan laut prabolinggo.

The Company supports the government efforts in the Greenhouse Gas (GHG) emission mitigation program. This is reflected through PLN NP efforts and initiatives to support the Net Zero Emission 2060 target, such as increasing biomass cofiring to 5% in all CFPPs, complete inventory of scope 1, 2 and 3 of greenhouse gases, electricity carbon trading between CFPPs, initiatives to reduce emissions from operating activities and fugitive emissions, increasing conservation efforts and planting trees that can absorb CO2 and implementing Carbon Economic Value through the issuance of Emission Reduction Certificates from clean energy mitigation actions. Apart from internationally recognized mitigation actions, PLN NP also strengthens adaptation to climate change by increasing the resilience of coastal communities affected by climate disaster risks, increasing the capacity of micro hydro turbine renewable energy management in remote communities, to the mechanism of diverting jellyfish migration currents affected by elnino marine heat waves in the prabolinggo sea area.

Aksi mitigasi energi bersih dan energi terbarukan milik PLN NP telah didaftarkan pada skema gas rumah kaca baik nasional ataupun internasional. Salah satu aksi mitigasi energi bersih yang PLN NP miliki adalah pengoperasian pembangkit combined-cycle Blok 3 Muara Karang berbahan bakar LNG. Aksi mitigasi tersebut juga menjadi bagian program pengurangan emisi melalui carbon offset di perusahaan yang bertujuan untuk menurunkan jejak karbon dari aktivitas bisnis dengan memilih sumber kredit yang berkualitas dan terjamin. Selain memberikan insentif ekonomi bagi para stakeholder atas usaha mitigasi iklim, proyek aksi mitigasi energi bersih ini menjadi aksi mitigasi pertama di sektor energi yang telah terverifikasi pada skema mandatory Sistem Registri Nasional KLHK sesuai mandat Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 tentang Penerapan Nilai Ekonomi Karbon.

PLN NP's clean energy and renewable energy mitigation actions have been registered with national and international greenhouse gas schemes. One of PLN NP's clean energy mitigation actions is the operation of the LNG-fueled Block 3 Muara Karang combined-cycle power plant. The mitigation action is also part of the emission reduction program through carbon offset in the Company which purposes to reduce the carbon footprint of business activities by selecting quality and guaranteed credit sources. Apart from providing economic incentives for the stakeholders for climate mitigation efforts, the clean energy mitigation action project is the first mitigation action in the energy sector that has been verified in the mandatory scheme of the KLHK National Registry System as mandated by Presidential Regulation No. 98 of 2021 concerning the Application of Carbon Economic Value.

Perusahaan juga senantiasa meningkatkan kesadaran akan dampak lingkungan dari setiap aspek usaha dan aktivitas melalui kampanye iklim dan kebijakan ke seluruh karyawan dan stakeholder. Dengan kampanye tersebut perusahaan menggunakan 'Nature-Based' Solution yang dilakukan serempak pada event lingkungan hidup di lingkungan usaha se Indonesia untuk dapat mencapai Neutrality di 2060. Perusahaan juga melakukan pengelolaan terhadap emisi bahan perusak ozon (BPO) yang menjadi salah faktor tingkat radiasi matahari ke Bumi. BPO akan menyebabkan terjadinya penipisan lapisan ozon yang mengakibatkan terjadinya degradasi lingkungan. Oleh karena dampak bahaya akibat pemanfaatan BPO sangat besar, PLN NP berkomitmen menggunakan AC dengan refrigeran (zat pendingin) yang ramah lingkungan dan penggunaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) non-Halon. Dengan demikian, Perusahaan ikut andil dalam upaya untuk mencegah penipisan/terjadinya lubang lapisan ozon di atmosfer.

The Company also continues to raise awareness of the environmental impact of every aspect of business and activities through climate campaigns and policies to all employees and stakeholders. With this campaign, the Company activates Nature-Based Solution which is carried out simultaneously at environmental events in business environments throughout Indonesia to achieve Neutrality in 2060. The Company also manages the emission of ozone depleting substances (BPO) which is one of the factors in the level of solar radiation to the Earth. BPOs will cause depletion of the ozone layer which results in environmental degradation. Because the adverse impact of BPO utilization is very large, PLN NP is committed to using air conditioners with environmentally friendly refrigerants and the use of non-Halon fire extinguishers. Thus, the Company contributes to efforts to prevent the depletion of the ozone layer in the atmosphere.

Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca Scope 1 (Ton CO2eq)

Scope 1 Greenhouse Gas Emissions Inventory (Ton CO2eq)

Scope	Gas	2023	2022	2021
Scope 1	Karbon dioksida (CO2) / Carbon dioxide (CO2)	49.555.462,39	39.594.336,19	45.338.832,23
	Metana (CH4) / Methane (CH4)	78,56	546,07	59,91
	Nitrogen dioksida (N2O) / Nitrogen dioxide (N2O)	648,24	516,02	519,32
Emisi Gas Rumah Kaca (Ton CO2eq) Greenhouse Gas Emissions (Ton CO2eq)		**49.556.189,19**	**39.595.398,71**	**45.367.149,66**
Total Produksi (MWh)* / Total Production (MWh)*		61.178.614,00	46.984.630,22	47.175.479,47
Intensitas Emisi (Ton CO2eq/MWh) Emission Intensity (Ton CO2eq/MWh)		**0,78**	**0,82**	**0,84**
Scope 1 Mobile combustion**	Karbon dioksida (CO2) / Carbon dioxide (CO2)	244.426,66	5.956,27	N/A
Scope 1 SF6 Leakage***	SF6 (Ton)	0,7	0,05	N/A

Catatan:
- Total produksi menggunakan data produksi listrik untuk yang dimasukkan perhitungan emisi scope 1.
- Kendaraan operasional adalah yang digunakan di area yang luas dan bukan jalan raya, angkutan, pabrik dengan emergency. Dihitung menggunakan jumlah liter bahan bakar yang dikonsumsi setiap tahun.
*** SF6 dihitung dari kuantitas [illegible] gas hanya.

Notes:
- Total production uses the electricity production for the unit conducting the scope 1 emissions calculation.
- Operational vehicles are those that operate in the work area, whether heavy vehicles, transportation, plants or emergency. Calculation using the number of liters of fuel consumed per year.
*** SF6 is calculated from the total balance supplied of the top-up gas cylinder.

Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca Scope 2 (Ton CO2eq)

Scope 2 Greenhouse Gas Emissions Inventory (Ton CO2eq)

Scope	Category	2023	2022	2021
Scope 2	Purchased Electricity (MWh)	3.777,67	1.270,48	N/A
Emisi Gas Rumah Kaca (Ton CO2eq) Greenhouse Gas Emissions (Ton CO2eq)		**3.277,34**	**1.059,69**	-

Catatan:
- Perhitungan menggunakan faktor emisi GRK sistem interkoneksi [illegible] yang diterbitkan oleh DJEBTKE menggunakan nilai BM yang berbeda pada masing-masing grid sesuai dan metode perhitungan berdasar dari IPCC 2006.
- Perhitungan emisi GRK scope 2 menurunkan 75 ton [illegible] dan [illegible]

Notes:
- The calculation uses the GHG emission factor of the electricity system published by DJEBTKE EDM using the BM value specific to each interconnection and the calculation methods derived from IPCC 2006.
- Scope 2 GHG emissions calculation covers 75 units out of 100 units (2023).

Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca Scope 3 (Ton CO2eq)

Scope 3 Greenhouse Gas Emissions Inventory (Ton CO2eq)

Scope	Category	2023	2022	2021
Scope 3	Upstream Transportation (Kita Lite 2020)*	112.117,78	46.941,07	N/A
Emisi Gas Rumah Kaca (Ton CO2eq) Greenhouse Gas Emissions (Ton CO2eq)		**301.601,26**	**126.742,55**	-

Catatan:
- Perhitungan emisi GRK scope 3 menggunakan perhitungan IPCC 2006.
- Perhitungan emisi GRK scope 3 mencakup 41 unit dari 100 unit (2023).
* Upstream emission berasal dari produksi, [illegible] dan emisi [illegible] transportasi energi primer dari produksi hingga titik di pembangkit, [illegible] dengan [illegible] [illegible] hingga [illegible]

Notes:
- Scope 3 GHG emission calculation covers 41 units out of 100 units (2023).
- Calculation of scope 3 GHG emissions using IPCC 2006.
- Scope 3 GHG emission calculation covers 41 units out of 100 units (2023).
* Upstream emissions are derived from the sum of the carbon footprint of emissions during the transportation of primary energy from the producer to the plant, mostly in the form of sea freight ranges and fuel tank trucks.

Pengelolaan Penggunaan dan Konservasi Air

Water Use Management and Conservation

PLN NP berkomitmen untuk menggunakan air secara bijak dan menjaga keberlangsungan sumbernya melalui upaya konservasi air. PLN NP telah melakukan identifikasi dampak terhadap air untuk mengatasi dampak dari kegiatan pembangkitan listrik terhadap kualitas dan kuantitas air baku, baik itu dalam bentuk air permukaan, air tanah, hingga air laut. Dalam prosesnya, PLN NP menetapkan tujuan dan target yang berkaitan dengan air sebagai bagian dari pendekatan pengelolaan air dan air limbah. Tujuan utama dalam mengelola air dan air limbah adalah untuk menurunkan dampak negatif dan meningkatkan efisiensi dari penggunaan air dan air limbah dalam operasional pembangkitan. Untuk mencapai tujuan ini, PLN NP menetapkan beberapa target kinerja yang berkaitan dengan air, seperti:

1. Efisiensi penggunaan air pada proses operasional dan domestik;
2. Melakukan perawatan secara periodik pada fasilitas pengelolaan air dan air limbah; serta
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air dan air limbah.

PLN NP is committed to using water wisely and maintaining the sustainability of its sources through water conservation efforts. PLN NP identified water impact to determine the impact of electricity generation activities on the quality and quantity of raw water, whether in the form of surface water, groundwater, or seawater. In the process, PLN NP sets water-related objectives and targets as part of its water and wastewater management approach. The main objective in managing water and wastewater is to reduce negative impacts and improve the efficiency of water and wastewater use in generation operations. To achieve this goal, PLN NP sets several water-related performance targets, such as:

1. Water use efficiency in operational and domestic processes;
2. Periodically maintaining water and wastewater management facilities; and
3. Increasing community participation in water and wastewater management.

Inventarisasi Pengambilan/Penarikan Air PLN NP Berdasarkan Sumber

PLN NP's Water Withdrawal Inventory by Source

Sumber Air Water Source	Volume (megaliter)		
	[illegible]	2022	2021
Air Laut Sea Water	**12,712,217**	**2,220,74**	**1,577,04**
Freshwater (≤1000 mg/L TDS)	-	-	-
Other Water (>1000 mg/L TDS)	12,712,217	2,220,74	1,577,04
Air Sungai River Water	**4,216,804**	**249,033,83**	**249,240,41**
Freshwater (≤1000 mg/L TDS)	4,216,804	249,033,83	249,240,41
Other Water (>1000 mg/L TDS)	-	-	-
Air Tanah Groundwater	**1,654,41**	**1,576,46**	**1,447,28**
Freshwater (≤1000 mg/L TDS)	1,654,41	1,576,46	1,447,28
Other Water (>1000 mg/L TDS)	-	-	-
Air PDAM PDAM Water	**11,768**	-	-
Freshwater (≤1000 mg/L TDS)	11,768	-	-
Other Water (>1000 mg/L TDS)	-	-	-
Total	**17,171,759,58**	**251,771,04**	**252,304,74**

Catatan:
PLN NP tidak mengambil air yang berasal dari laut/air yang berasal dari angkut yang mengalami kerusakan air.
TDS = Total Dissolved Solids atau Total Padatan Terlarut

Notes:
PLN NP does not take water sources from water bodies located in areas experiencing water scarcity.
TDS = Total Dissolved Solids or Total Dissolved Solids

Volume Penggunaan Air Berdasarkan Sumber (megaliter)
Volume of Water Use by Source (megaliters)

Sumber Air Water Source	Volume (megaliter)		
	2023	2022	2021
Air Laut Sea Water	2.906,8	2.330,940	1.597,04
Air Sungai River Water	126,04	-	-
Air Tanah Groundwater	1.654,41	1.578,46	1.467,28
Air Tanah PDAM Water	13,788	-	-
Total	**4.701,01**	**3.779,20**	**3.064,32**

Catatan:
- Metode pengukuran menggunakan flowmeter, telah jang & jadwal di 30 kali terbaru
- Data penggunaan air hanya merekam volume air barang.
- PLN NP tidak menggunakan air yang bersumber dari hujan air yang berada di wilayah yang mengalami kekeringan air

Notes:
- The measurement method uses a discharge flowmeter, updated in certain months
- Water usage data does not include the volume of lump water
- PLN NP does not use water sourced from rainwater located in areas experiencing water scarcity

Keanekaragaman Hayati
Biodiversity

Penanaman pohon merupakan wujud komitmen PLN NP dalam kinerja keberlanjutan aspek lingkungan. Dalam beberapa tahun terakhir, PLN NP konsisten menanam pohon di setiap unit pembangkitan sebagai salah satu program Green and Clean Power Plant. Program ini merupakan wujud peran PLN NP untuk mengelola emisi karbondioksida yang berasal dari proses produksi listrik. Penanaman pohon dapat membuat proses produksi listrik lebih aman dan bersih karena karbondioksida dapat terserap. Berikut adalah daftar program penanaman pohon selama tahun 2023.

Tree planting is actualization of PLN NP commitment to environmental sustainability performance. In recent years, PLN NP has consistently planted trees in all generating units as one of the Green and Clean Power Plant programs. This program is actualization of PLN NP's role in overcoming carbon dioxide emissions from the electricity production process. Tree planting can make the electricity production process safer and cleaner since carbon dioxide can be absorbed. The following is a list of tree planting programs for 2023.

Program Penanaman Pohon Tahun 2023
Tree Planting Program in 2023

Unit Pembangkit Generating Unit	2023	2022	2021
UP Indonesia Indonesia GU	19.888	6.960	1.717
UP Pelton I, II, V Pelton I, II, V GU	27.503	21.610	11.400
UP Bantang Bantang GU	13.798	1.329	8.625
UP Muara Karang Muara Karang GU	10.561	25.958	13.21
UP Tarsang Awar-Awar Tarsang Awar-Awar GU	4.534	4.180	185
UP Cirata Cirata GU	5.478	44.350	117.102
UP Cirata Cirata GU	3.003	4.302	9.876
UP Muara Tawar Muara Tawar GU	5.870	1.892	2.402
Jumlah Penanaman Pohon Number of Tree Plantings	**113.425**	**110.434**	**168.344**

Selain menanam pohon mangrove, PLN NP juga membangun rubaha (rumah burung hantu) sebagai tempat perlindungan burung hantu dan juga membangun penangkaran burung hantu seluas 77,5 hektar dengan jumlah burung hantu sudah mencapai 200 ekor yang menempati rubaha.

Apart from planting mangrove trees, PLN NP also built a rubaha (owl house) as an owl sanctuary and also built an owl breeding ground covering an area of 77,5 hectares with 200 owls occupying the rubaha.

Menangani Pengaduan Lingkungan

Handling Environmental Complaints

PLN NP menilai bahwa feedback dari masyarakat merupakan bagian penting dalam keberlanjutan dalam aspek lingkungan. Maka dari itu PLN NP menyediakan fasilitas pengaduan terkait lingkungan sebagai upaya evaluasi untuk senantiasa menciptakan lingkungan yang lestari. Mekanisme pengaduan korporat dapat disampaikan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya melalui Whistleblowing System (WBS) yang bisa diakses pada website PLN NP atau melalui kontak Sekretaris Perusahaan PLN NP sebagai berikut:

PLN NP considers that feedback from the community is an important part of sustainability in the environmental aspect. Therefore, PLN NP provides a complaint facility related to the environment as an evaluation effort to always create a sustainable environment. The corporate complaint mechanism can be submitted by the community and other stakeholders through the Whistleblowing System (WBS) which can be accessed on the PLN NP website or through the contact of the Corporate Secretary of PLN NP as follows:

Email
pengaduan@plnnusantarapower.co.id

Website
www.plnnusantarapower.co.id/wbs

Kotak Pengaduan Complaint Box
1. Lobby Utama PT PLN NP Kantor Pusat
2. Lobby Gedung Administrasi Sekunder Unit PLN NP
1. Main Lobby of PT PLN NP's Head Office
2. Administrative Building Lobby of All PLN NP's Units

Mail box
Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran
Violation Reporting Management Committee
PT PLN Nusantara Power
Jl. Ketintang Baru No. 11, Surabaya
Jawa Timur 60231/Indonesia

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

PLN Nusantara Power

Kantor Pusat Head Office
Jl. Ketintang Baru No. 11
Surabaya, Jawa Timur 60231
Indonesia

Kantor Jakarta Jakarta Office
10 Office Park Lt. 2 ABCD
Jl. TB Simatupang No. 18
Jakarta Selatan, Dki Jakarta
Indonesia

031-8283000
031-8283000
info@plnnusantarapower.co.id

Melalui pengelolaan lingkungan yang baik, selama tahun 2022 PLN NP tidak menerima pengaduan terkait lingkungan dari masyarakat sekitar maupun pemangku kepentingan lainnya, sehingga PLN NP tidak membayarkan denda atau sanksi non moneter atas pernilaian ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan terkait lingkungan.

Through good environmental management, PLN NP did not receive any complaints related to the environment from the surrounding community or other stakeholders during 2022, so PLN NP did not receive any fines or non-monetary sanctions for non-compliance with environmental laws and regulations.

Biaya Kegiatan Pengelolaan Lingkungan
Environmental Management Activity Costs

Pada tahun 2023, PLN NP merealisasikan biaya sebesar Rp49,798 juta untuk kegiatan tanggung jawab sosial terkait lingkungan, meningkat sebesar 85,83% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp26,797 juta.

In 2023, PLN NP realized costs of Rp49,798 million for environment-related social responsibility activities, an increase of 85.83% compared to Rp26,797 million in 2022.

Tabel Tabel Realisasi Biaya Kegiatan Pengelolaan Lingkungan PLN NP Tahun 2022-2023 (Rp Juta)
Table of Cost Realization of PLN NP Environmental Management Activities in 2022-2023 (Rp Million)

Komponen Biaya Lingkungan Environmental Cost Component	2023	2022
Pengendalian Pencemaran Air Water Pollution Control	13,66	5,695
Pengendalian Pencemaran Udara Air Pollution Control	13,077	5,818
Pengelolaan Limbah Waste Management	17,189	7,646
Keanekaragaman Hayati Biodiversity	12,766	7,639
Jumlah Total	**49,798**	**26,797**

Penghargaan dan Sertifikasi di Bidang Lingkungan yang Dimiliki
Environmental Awards and Certifications Held

PLN NP telah menerapkan sistem manajemen lingkungan secara terpadu dan terintegrasi dengan sistem manajemen yang lain serta terus konsisten melaksanakan upaya-upaya perbaikan berkelanjutan untuk mencapai visi misi PLN NP. Dengan komitmen PLN NP tersebut, PLN NP dan Anak Perusahaan mendapatkan beberapa sertifikasi antara lain ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan, ISO 50001:2011 tentang Sistem Manajemen Energi, dan ISO 55001:2014 tentang Sistem Manajemen Aset. PLN NP juga membekali karyawan dengan beragam sertifikasi terkait lingkungan diantaranya penanggung jawab Pengendalian dan Pencemaran Air (PPPA), penanggung jawab Pengendalian dan Pencemaran Udara (PPPU), operator Pengendalian dan Pencemaran Air (PPK), operator Pengendalian dan Pencemaran Udara (PPU), dan Pengendalian Limbah B3 (PLB3).

PLN NP has implemented an integrated environmental management system and integrated with other management systems and continues to consistently carry out continuous improvement efforts to achieve PLN NP's vision and mission. With its commitment, PLN NP and its subsidiaries received several certifications including ISO 14001:2015 on Environmental Management System, ISO 50001:2011 on Energy Management System, and ISO 55001:2014 on Asset Management System. PLN NP also provides employees with various certifications related to the environment including the person in charge of Water Pollution Control (PPPA), the person in charge of Air Pollution Control (PPPU), Water Pollution Control operator (PPK), Air Pollution Control operator (PPU), and Hazardous Waste Control (PLB3).

Selama Tahun 2023, PLN NP berhasil meraih penghargaan di bidang lingkungan, yaitu:

1. 21 Maret 2023 – Penghargaan Green Building pada Perusahaan Pembangkit
   PLN NP melalui UP Sreek meraih Peringkat Gold dalam kategori *Greenship Existing Building* oleh *Green Building Council Indonesia*. Penghargaan ini merupakan kali pertama di Indonesia, perusahaan pembangkitan memdapatkan sertifikat Green Building dengan peringkat emas.
2. 23 Juni 2023 – Penghargaan Energy Management Insight Award
   PLN NP melalui UP Muara Karang berhasil meraih penghargaan *Energy Management Insight Award* di ajang *Energy Management Leadership Awards 2023*. PLN NP UP Muara Karang berhasil meraih penghargaan ini atas upayanya dalam mengimplementasikan ISO 50001 Sistem Manajemen Energi.

During 2023, PLN NP managed to achieve awards in the environmental field, including:

1. March 21, 2023 – Green Building Award for Power Generation Company
   PLN NP through Sreek GU achieved the Gold Rating in the Greenship Existing Building category by the Green Building Council Indonesia. This award is the first time in Indonesia receiving a Green Building certificate with a gold rating by a generation company.
2. June 23, 2023 - Energy Management Insight Award
   PLN NP through Muara Karang GU won the Energy Management Insight Award at the Energy Management Leadership Awards 2023. PLN NP Muara Karang GU won this award for its efforts in implementing ISO 50001 Energy Management System.

3. 14 Agustus 2023 – *Penghargaan Environmental and Social Innovation Award (ESISA) 2023*

   PLN NP meraih 7 (tujuh) penghargaan berikut:
   - 4 PLATINUM pada kategori Efisiensi Energi, 3R Limbah Padat Non B3, Efisiensi Air dan Penurunan Beban Pencemaran, serta Perlindungan Keanekaragaman Hayati.
   - 2 GOLD pada kategori Pengurangan Limbah B3 dan Inovasi Sosial
   - 1 SILVER pada kategori Penurunan Emisi
4. 13 September 2023 – penghargaan Indonesia Energy & Engineering (IEE) Series 2023

   Melalui Co-Firing, PLN NP berhasil dianugerah penghargaan dalam ajang Indonesia Energy & Engineering 2023 (IEE Series 2023). PLN NP dinilai telah berkontribusi besar dalam menerapkan inovasi baru di sektor energi melalui penggunaan teknologi ramah lingkungan.
5. 20 Desember 2023 – PROPER 2023

   PLN NP mendapatkan 14 penghargaan dalam acara PROPER 2023:
   - 6 PROPER Emas
   - 7 PROPER Hijau
   - Juara 2 video PROPER Emas 2023
   - 49 PROPER Biru

3. August 14, 2023 - Environmental and Social Innovation Award (ESISA) 2023

   PLN NP won the following 7 (seven) awards:
   - 4 PLATINUM in the categories of Energy Efficiency, 3R Non-B3 Solid waste, Water Efficiency and Pollution Load Reduction, and Biodiversity Protection
   - 2 GOLD in the category of Hazardous Waste Reduction and Social Innovation
   - 1 SILVER in the Emissions Reduction category
4. September 13, 2023 - Indonesia Energy & Engineering (IEE) Series 2023 award

   Through Co-Firing, PLN NP was awarded the Indonesia Energy & Engineering 2023 (IEE Series 2023). PLN NP is considered to have contributed greatly in implementing new innovations in the energy sector through the use of environmentally friendly technology.
5. December 20, 2023 - PROPER 2023

   PLN NP received 14 awards in the PROPER 2023 event:
   - 6 Gold PROPERs
   - 7 Green PROPERs
   - 2nd place for Gold PROPER 2023 video
   - 49 Blue PROPERs

Kinerja Sosial
Social Performance

PLN NP terus melakukan berbagai kegiatan sosial sebagai wujud keberlanjutan Perusahaan. PLN NP memandang bahwa kegiatan sosial ini merupakan tanggung jawab sosial Perusahaan atas dampak yang dilakukan operasional Perusahaan. Dalam komitmennya, PLN NP telah memenuhi tanggung jawab lingkup sosial yang meliputi pelanggan, karyawan dan masyarakat. Dalam program tanggung jawab sosial perusahaan, PLN NP telah melakukan berbagai program kerja yaitu: peningkatan kualitas layanan kepada pelanggan, survey kepuasan pelanggan; Pendidikan, pelatihan dan pengembangan karyawan, pemberian kesejahteraan kepada karyawan, meningkatkan kualitas lingkungan kerja yang sehat, memberikan bantuan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, program kerja sama bidang pendidikan, bantuan biaya pendidikan, membina dan mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui Program Kelompok Binaan, melakukan pengupatan kapasitas dan penciptaan peluang usaha masyarakat.

PLN NP continues to undertake various social activities to represent the Company's commitment to sustainability. PLN NP views these social activities as its social responsibility for the impacts of its operations. In its commitment, PLN NP has fulfilled its social responsibilities encompassing customers, employees, and the community. In the Company's social responsibility programs, PLN NP has carried out various initiatives including: enhancing service quality for customers, conducting customer satisfaction surveys; providing education, training, and development for employees, ensuring employee welfare, and improving the quality of a healthy working environment; offering assistance and improving educational facilities and infrastructure, partnering in educational programs, providing educational grants, nurturing and developing Micro, Small, and Medium Enterprises through the Binaan Group Program, and strengthening capacity and creating business opportunities for the community.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Social Performance on Community Development

Komitmen dan Kebijakan

Commitment and Policy

PLN NP terus berkomitmen dalam mengembangkan keterampilan masyarakat. Hal itu dilakukan PLN NP sebagai wujud keberlanjutan untuk meningkatkan kualitas masyarakat di lingkungan Perusahaan. PLN NP menyadari bahwa masyarakat dapat ikut andil dalam meningkatkan kualitas ekonomi, sosial dan lingkungan Perusahaan. PLN NP telah melaksanakan berbagai program pengembangan masyarakat secara berkelanjutan guna mendorong peningkatan keterampilan dan kualitas masyarakat sehingga dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara Perusahaan dan masyarakat.

PLN NP remains committed to developing community skills. This commitment is part of PLN NP's efforts to enhance the quality of life in the areas surrounding the Company. PLN NP acknowledges that the community can contribute to improving the economic, social, and environmental quality of the Company. Various community development programs have been implemented sustainably by PLN NP to enhance skills and community quality, fostering a harmonious relationship between the Company and the community.

Wujud komitmen terhadap keberlanjutan dalam pengembangan masyarakat ditunjukan PLN NP dalam Surat Keputusan Direksi No. 045.K/010/DIR/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undang antara lain Undang-undang No. 40 tentang Perseroan Terbatas yang tercantum pada pasal 74 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Peraturan Pemerintah no. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

The Company's commitment to sustainability in community development is demonstrated in PLN NP's Board of Directors Decree No. 045.K/010/DIR/2013 regarding Social Responsibility Guidelines, which refer to several applicable regulations, including Law No. 40 on Limited Liability Companies in Article 74 regarding Social and Environmental Responsibility, and Government Regulation No. 47 of 2012 on Corporate Social and Environmental Responsibility.

Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Kemasyarakatan

Community-related Corporate Social Responsibility Program

Untuk dapat memberikan program CSR bermanfaat dan tepat sasaran, PLN Nusantara Power memulai kegiatan CSR dengan melakukan pemetaan sosial (social mapping) untuk mengidentifikasi permasalahan sosial di sekitar wilayah operasi dan memahami kebutuhan, potensi serta kerentanan masyarakat setempat. Perusahaan juga melibatkan forum komunikasi masyarakat dan pemangku kepentingan lokal dalam seluruh tahapan program CSR, mulai dari perencanaan hingga evaluasi sehingga ditetapkan program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu menangani masalah sosial yang ada.

To deliver effective and targeted CSR programs, PLN Nusantara Power begins its CSR activities with social mapping to identify social issues around its operational areas and understand the needs, potentials, and vulnerabilities of the local communities. The Company also involves community communication forums and local stakeholders in all stages of the CSR program, from planning to evaluation, ensuring that the programs address community needs and tackle existing social issues.

Tipologi pelaksanaan program CSR Perusahaan secara umum terdiri dari 6 (enam) kategori yaitu empowerment, capacity building, infrastruktur, charity, KLBL dan CSV. Adapun CSV merupakan tipologi tambahan yang mengklasifikasikan setiap program yang memiliki alignment dengan bisnis perusahaan. Program-program tersebut dilaksanakan sesuai dengan corporate values, serta mengacu kepada ketentuan Pemerintah, pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam hal perencanaan dan pengembangan program CSR ke depan, PLN Nusantara Power saat ini telah memiliki Rencana Strategis atau roadmap CSR sejak tahun 2018 hingga tahun 2034.

The Company's CSR programs generally fall into six categories: empowerment, capacity building, infrastructure, charity, KLBL and CSV. CSV is an additional typology that classifies a program aligned with the Company's business. These programs are implemented following corporate values, government regulations, the Sustainable Development Goals (SDGs), and local community needs. PLN Nusantara Power has a CSR Strategic Plan or roadmap from 2018 to 2034.

Program CSR PLN Nusantara Power pada tahun 2023 dilaksanakan di 33 (Tiga Puluh Tiga) Unit Kerja yang meliputi UP Muara Karang, UP Muara Tawar, UP Cilacap, UP Brantas, UP Paiton, UP Gresik, Kantor Pusat, UP Rembang, UP Indramayu, UP Tanjung Awar-Awar, UP Tanjungan, UP Kaliim Tetak, UP Pulang Pisau, dan UP Arun, UP Tanjungan, dan UP Sambelia, UPDK Pandan, UPDK Belawan, UPK Nagan Raya, UPDK Pekanbaru, UPDK Bandar Lampung, UPK Sebalang, UPK Tarahan, UPK Bukit Asam, UPDK Palangkaraya, UPDK Tarakan, UPDK Kupang, UPDK Balikpapan, UPK Punagaya, UPDK Minahasa, UPDK Kendari, UPDK Gorontalo dan UPDK Bakaru.

In 2023, PLN Nusantara Power's CSR programs were carried out in 33 units: Muara Karang GU, Muara Tawar GU, Cilacap GU, Brantas GU, Paiton GU, Gresik GU, Headquarters, Rembang GU, Indramayu GU, Tanjung Awar-Awar GU, Tanjungan GU, Kaliim Tetak GU, Pulang Pisau GU, Arun GU, Tanjungan GU, Sambelia GU, Pandan GUU, Belawan GUU, Nagan Raya GUU, Pekanbaru GUU, Bandar Lampung GUU, Sebalang GUU, Tarahan GUU, Bukit Asam GUU, Palangkaraya GUU, Tarakan GUU, Kupang GUU, Balikpapan GUU, UPK Punagaya, Minahasa GUU, Kendari GUU, Gorontalo GUU, and Bakaru GUU.

Program Deteksi Intervensi Menuai Senyuman Balita dan Keluarga (Denting Nusantara)

Denting Nusantara Program

Stunting dipengaruhi oleh asupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, salah satu mikronutrien yang mengalami peningkatan kebutuhan pada 1000 hari pertama kehidupan adalah kalsium yang terjadi pada masa pertumbuhan, kehamilan, menyusui dan defisiensi kalsium, kalsium diperlukan untuk kesuatan tulang ibu hamil. Berdasarkan latar belakang di atas maka diperlukan adanya program program gizi yang bisa untuk meningkatkan GZS sebagai deteksi dini masalah gizi pada balita, meningkatkan pengetahuan ibu terhadap pemberian makan bayi dan anak serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat agar balita dengan status gizi stunting dan wasting dapat tumbuh dan berkembang mencapai status gizi yang optimal.

Stunting is influenced by nutritional intake during the first 1,000 days of life, with calcium being a crucial micronutrient during this period. Calcium is essential for the strength of pregnant women's bones. Therefore, a nutritional program is needed to enhance GZS as early detection of nutritional issues in toddlers, increase mothers' knowledge about infant and child feeding, and empower the community to ensure toddlers with stunting and wasting can achieve optimal nutritional status.

Program ini dilaksanakan di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Penerima Manfaat dari program ini adalah komunitas KITA dan beberapa Posyandu di Kecamatan Penjaringan.

This program is implemented in Pluit Village, Penjaringan Sub-district, North Jakarta. Beneficiaries include the KITA Community and several Posyandu in Penjaringan Sub-district.

Tujuan dari program ini adalah:

- Meningkatkan deteksi dini masalah gizi melalui kegiatan posyandu
- Meningkatkan pengetahuan ibu balita tentang pemberian makan bayi dan anak yang baik dan benar
- Mempermudah kader dalam membuat laporan posyandu
- Terbentuknya makanan alternatif tinggi kalsium untuk balita stunting
- Terjalin kerjasama antar lintas sektor dalam pengolahan limbah menjadi pangan lokal

Goals of the program:

- Early detection of nutritional issues through Posyandu activities
- Increasing mothers' knowledge of proper infant and child feeding
- Simplifying Posyandu reporting by cadres
- Creating alternative high-calcium foods for stunted toddlers
- Establishing cross-sector cooperation in processing waste into local food

Pada program ini banyak dilakukan kegiatan, diantaranya Produksi Rutin Tepung Tulang Ikan dan PMT Berbahan tepung tulang ikan, pembagian PMT balita stunting yang diberikan kepada balita stunting setiap satu minggu sekali, deteksi anemia pada remaja putri dilakukan di 11 sekolah SMP dan SMA yang ada di Kelurahan Pluit, Obrolan Mamah tentang gizi, dan sosialisasi popok pakai ulang. Dengan total penerima manfaat 884 orang, yakni balita stunting 53, ibu hamil 56, remaja putri 749, komunitas KITA 9, Posbindu 8, dan anggota kelompok Rumah Jahit 11.

Activities in this program include the routine production of Fish Bone Flour and PMT based on Fish Bone Flour, weekly distribution of PMT to stunted toddlers, anemia detection in adolescent girls in 11 schools (SMP and SMA) in Pluit Village, "Mamah Talk" about nutrition, and reusable diaper socialization. A total of 884 beneficiaries are involved, including 53 stunted toddlers, 56 pregnant women, 749 adolescent girls, 9 KITA Community members, 8 Posyandu staff, and 11 Rumah Jahit group members.

Program Wisata Lentera Kisik

Lentera Kisik Tourism Program

Lentera Kisik merupakan Taman Baca Masyarakat yang terletak di Desa Plawangan Kecamatan Kragan, Rembang. Lokasi Taman baca Lentera Kisik yang berlokasi langsung dengan pantai Plawangan menjadikan lokasi ini destinasi baca favorit karena membuat pengunjung dapat membaca sekaligus menikmati suasana pantai. Kelompok ini mulai dibina oleh CSR PLN NP UP Rembang pada tahun triwulan I tahun 2020. Pada awalnya kelompok ini bertujuan untuk meningkatkan minat baca masyarakat dan membantu kemajuan pendidikan di Desa Plawangan. Namun seiring berkembangnya lentera kisik, kegiatan pariwisata mulai digalakkan pada tahun 2021.

Lentera Kisik is a community reading garden located in Plawangan Village, Kragan Sub-district, Rembang. Its location next to Plawangan Beach makes it a favorite reading destination where visitors can read while enjoying the beach atmosphere. This group began being nurtured by CSR PLN NP UU Rembang in the first quarter of 2020. Initially, the group aimed to increase reading interest and support educational progress in Plawangan Village. However, tourism activities started to be promoted in 2021 as Lentera Kisik developed.

Tujuan dari program ini adalah:

- Meningkatkan minat baca Masyarakat
- Membantu kemajuan pendidikan di Kecamatan Kragan
- Menjadikan pusat wisata Literasi di Kabupaten Rembang

Goals of the program:

- Increasing community reading interest
- Supporting educational progress in Kragan Sub-district
- Becoming a literacy tourism center in Rembang Regency

Program Sistem Adaptasi Teknologi Pertanian Terpadu Indramayu (SATELIT)

Indramayu Integrated Agricultural Technology Adaptation System (SATELIT) Program

Pertanian merupakan mata pencaharian sebagian besar warga negara Indonesia. Dengan adanya pertanian, suatu negara dapat meningkatkan ketersediaan pangan dan pertumbuhan ekonomi penduduknya. Memperhitungkan hal tersebut maka penerapan yang baik sangat diperlukan dalam upaya pengembangan melalui program pertanian organik.

Agriculture is the primary livelihood for most Indonesian citizens. Good agricultural practices are essential to improve food needs and economic growth.

Sasaran program ini berada di desa Mekarsari & Desa Karangsayung kabupaten Indramayu. Program ini bekerjasama dengan Kelompok Tani desa Mekarsari dan Karangsayung. Penerima manfaat program ini sebanyak 48 orang petani.

This program targets Mekarsari and Karangsayung villages in Indramayu Regency and collaborates with farmers' groups in these villages, benefiting 48 farmers.

Tujuan dari program ini adalah:

- Diharapkan dapat mengatasi kendala kekeringan pada lahan pertanian
- Optimalisasi irigasi lahan pertanian untuk meningkatkan hasil panen
- Membantu petani dalam mengatasi dampak kekeringan yang melanda lahan pertanian

Goals of the program:

- Addressing drought issues on agricultural land
- Optimizing agricultural irrigation to increase yields
- Helping farmers cope with drought impacts

Program Kampung Iklim

Iklim Village Program

Program Kampung Iklim, merupakan program yang memadukan daya tarik wisata berbasis iklim, dimana wilayah wisata dengan daya tarik iklim ini terbentuk dari partisipasi aktif masyarakat dan aktivitas jiwa untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim serta pemanfaatan sumber daya yang ada untuk pengelolaan lingkungan di berbagai kegiatan ekonomi, produktif tanaman sayuran, perikanan, peternakan dan pariwisata.

Iklim (or Climate) Village Program integrates climate-based tourism attractions with active community participation to enhance climate change resilience and resource management for various economic activities, including vegetable farming, fisheries, livestock, and tourism.

Program ini hadir guna menjawab permasalahan yang ada di masyarakat yaitu sampah 0,5 ton per hari tidak terkelola dengan baik (berasal dari warga, UMKM dan wisata) yang berpotensi menimbulkan emisi dari pembusukan & pembakaran sampah oleh warga sebanyak 8,5 Ton CO_2 eq per hari. Penurunan jumlah populasi Pohon Siwalan di Desa Mendroian sejak tahun 2016 sampai sekarang menyisakan 1,386 pohon dari semula 3,600 pohon sehingga berpotensi kehilangan penyerapan karbon yang hilang 16,162 ton/tahun. Lokasi Program berada di 5 Desa yaitu: Desa Mendroian, Desa Desa Kramaringgi, Desa Sidorukun, Desa Pulopanikan, Kelurahan Gending dan Desa Mendroian di Kabupaten Gresik.

This program addresses community issues, such as the unmanageable 0.5 tons of daily waste (from residents, MSMEs, and tourism) that could produce 8.5 tons of CO_2eq per day from waste burning. The declining Siwalan tree population in Mendroian Village from 3,600 trees in 2016 to 1,386 trees threatens a 16,162 ton/year carbon absorption loss. The program is implemented in five villages: Mendroian, Kramaringgi, Sidorukun, Pulopanikan, Gending, and Mendroian in Gresik Regency.

Tujuan dari program ini adalah :

- Menciptakan masyarakat yang sadar akan dampak perubahan iklim melalui kegiatan adaptasi, mitigasi, serta pengatasan kelembagaan Masyarakat
- Sebagai kegiatan Program Kampung Iklim yang dicanangkan Kementerian Lingkungan Hidup
- Perusahaan mendapatkan penghargaan sebagai perusahaan pendukung PROKLIM
- Memanfaatkan potensi program lingkungan yang sudah berjalan dan produk industri kreatif yang dapat ditentukangkan menjadi produk unggulan

Goals of the program:

- Creating climate-conscious communities through adaptation, mitigation, and community institutional strengthening
- Supporting the Climate Village Program initiated by the Ministry of Environment
- Achieving recognition as a PROKLIM-supporting company
- Leveraging ongoing environmental programs and developing creative industry products into flagship products

Biaya yang Dikeluarkan
Program Expenditures

PLN NP mengeluarkan biaya untuk program tanggung jawab sosial terhadap pengembangan sosial dan kemasyarakatan sebesar Rp51,53 miliar yang mencakup Empowerment, Capacity Building, Infrastruktur, Charity, KLBS (kejadian luar biasa) dan CSV dengan rincian sebagai berikut:

PLN NP allocated Rp51,53 billion for social and community development programs, covering Empowerment, Capacity Building, Infrastructure, Charity, KLBS, and CSV.

Anggaran dan Realisasi Biaya CSR Tahun 2023 (Rp juta)
The Budget and Actual CSR Expenses for 2023 (Rp million)

No	Tipologi Typology	RKAP 2023 2023 ABOP	Realisasi 2023 2023 Realization	Pencapaian terhadap RKAP Achievement of ABOP
1	Empowerment	20,449	14,248	92%
2	Capacity Building	21,771	17,516	81%
3	Infrastruktur Infrastructure	10,200	8,058	79%
4	Charity	5,516	4,957	90%
5	KLBS	5,247	3,164	59%
6	CSV	2,312	4,110	178%
Total		**65,595**	**51,053**	**78%**

Penghargaan
Awards

Pada tahun 2023 PLN NP mendapatkan penghargaan dan apresiasi atas program-program CSR yang berhasil dilaksanakan secara berkesinambungan antara lain:

In 2023, PLN NP received several awards and accolades for its continuously successful CSR programs, including:

1. 1 Februari 2023 - CSR & Pengembangan Desa Berkelanjutan Award oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah

- Kategori Silver Award melalui PLTU Tanjung atas keberhasilannya membina Taman Bunga Anjlen Chuna menjadi wisata desa berbaya dan bekerjasama dengan pemerintah Daerah
- Kategori Bronze Award melalui PLTA Cirata atas keberhasilannya membina Program UMKM SINERJAR (Simping Kaum Mekar Rasa)

2. 31 Mei 2023 - TOP CSR Awards 2023

- 5 (lima) penghargaan bintang 4 oleh UP Rembang, UP Paiton, UP Cirata, UP Pacitan, dan UP Tanahair
- 4 (empat) penghargaan bintang 3 oleh UP Bratas, UP Tanjung Awar-Awar, UP Pomegaya, dan UP Muara Tawar

3. 1 Juli 2023 - Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2023

PLN NP melalui UP Muara Karang meraih penghargaan *Best Social Empowerment Category* pada AREA 2023 atas keberhasilan program CSR nya yakni Denting Nusantara sebagai upaya dalam mengatasi permasalahan stunting di wilayah sekitar unit pembangkit.

4. 5 Juli 2023 - Nusantara CSR Awards 2023

PLN NP melalui UP Muara Karang berhasil meraih predikat juara dengan mengkompilasikan program Denting Nusantara karena dianggap mempunyai komitmen dan kontribusi bagi masyarakat dan lingkungan, demi mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih baik dalam ajang penghargaan yang diselenggarakan oleh La Tofi School of Social Responsibility ini.

5. 25 Juli 2023 - CSR Outlook Award 2023

PLN NP sukses meraih dua penghargaan dalam ajang CSR Outlook Award 2023

- Meraih perunggu dalam kategori "*Best Creating Shared Value*" melalui UP Pacitan dengan program berjudul Creating Shared Value pemanfaatan *Fly Ash Bottom Ash* (FABA) PLTU Pacitan.
- Meraih perunggu dalam kategori "*Best Practice in Environment*" melalui UP Indramayu dengan program berjudul Pesisir Tangguh Alinas

6. 14 Oktober 2023 - Penghargaan Festival Program Kampung Iklim (ProKlim) 2023

PLN NP melalui UP Gresik meraih penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai bentuk apresiasi atas konsistensi PLN NP dalam mendukung serta membina kelompok masyarakat di wilayah ProKlim di Kabupaten. Selain itu 11 desa binaan UP Gresik juga berhasil memperoleh penghargaan ProKlim Utama yang turut mengantarkan Bupati Gresik sebagai penerima piagam apresiasi pembinaan ProKlim tingkat Kabupaten.

1. February 1, 2023 CSR & Sustainable Village Development Award by the Ministry of Villages and Regional Development

- Silver Award for PLTU Tanjung for nurturing the Anjlen Chuna Flower Park into a sustainable village tourism site in collaboration with the local government
- Bronze Award for Cirata HPP for nurturing the SINERJAR MSME Program (Simping Kaum Mekar Rasa)

2. May 31, 2023 TOP CSR Awards 2023

- Five 4-star awards for Rembang GU, Paiton GU, Cirata GU, Pacitan GU, and Tanahair GU
- Four 3-star awards for Bratas GU, Tanjung Awar-Awar GU, Pomegaya GU, and Muara Tawar GU

3. July 1, 2023 Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2023

Best Social Empowerment Category for Muara Karang's GU Denting Nusantara program addressing stunting issues near the power plant

4. July 5, 2023 Nusantara CSR Awards

Winner for Muara Karang's GU Denting Nusantara program for its commitment and contribution to society and the environment, hosted by La Tofi School of Social Responsibility

5. July 25, 2023 CSR Outlook Award 2023

PLN NP successfully won two awards at the 2023 CSR Outlook Award

- Bronze in "Best Creating Shared Value" for Pacitan's GU Fly Ash Bottom Ash (FABA) utilization program
- Bronze in "Best Practice in Environment" for Indramayu's GU Coastal Resilience Against Abrasion program

6. October 14, 2023 Climate Village Program (ProKlim) Festival 2023

Award from the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) for Gresik's GU support and guidance in ProKlim areas in Gresik Regency, with 11 villages receiving ProKlim Utama awards, leading to recognition for the Gresik Regent

6. **4 Desember 2023 - Indonesia Sustainable Development Goals Awards (ISDA) Tahun 2023**
   PLN NP mendapatkan apresiasi di bidang CSR yang diselenggarakan oleh Indonesian Sustainable Development Goals Awards (ISDA) tahun 2023
   - Penghargaan Platinum melalui UP Creek, UP Rembang dan UP Muara Tawar
   - Penghargaan Gold melalui UP Pelton
   - Penghargaan Silver melalui UP Muara Karang, UP Pulang Pisau, dan UPDK Bandar Lampung

7. **4 Desember 2023 - Indonesia CSR dan TJSL Award (ICA)**
   Penghargaan ini diraih oleh PLN NP pada Kategori Platinum melalui UP Indramayu dengan judul Program Integrated Sustainability Agriculture for Indramayu Awarding yang diselenggarakan oleh Corporate Forum for CSR Development (CFCD) ini merupakan penilaian CSR yang berbasis ISO 26000:2010, dengan Subjek Inti: Perlindungan Lingkungan, Keanekaragaman Hayati, dan Restorasi Sumber Daya Alam.

6. **December 4, 2023 Indonesian Sustainable Development Goals Awards (ISDA) 2023**
   PLN NP received appreciation in the field of CSR which was awarded by the Indonesian Sustainable Development Goals Awards (ISDA) in 2023
   - Platinum awards for Creek GU, Rembang GU, and Muara Tawar GU
   - Gold award for Pelton GU
   - Silver awards for Muara Karang GU, Pulang Pisau GU, and Bandar Lampung GCU

7. **December 4, 2023 Indonesia CSR dan TJSL Award (ICA)**
   Platinum award for UP Indramayu's Integrated Sustainability Agriculture for Indramayu program, recognized by the Corporate Forum for CSR Development (CFCD) based on ISO 26000:2010, focusing on Environmental Protection, Biodiversity, and Natural Resource Restoration.

Penanganan Pengaduan Masyarakat
Community Complaints Handling

PLN Nusantara Power menyediakan sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan saran, kritik maupun keluhan kepada Perusahaan atas dampak operasi yang ditimbulkan melalui surat resmi, e-mail, telepon, website maupun tatap muka langsung dengan mendatangi Unit-Unit Pembangkit yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka. Selain itu, masyarakat juga dapat menyampaikan keluhan pada saat dilaksanakan survei kepuasan masyarakat maupun saat kegiatan pelaksanaan program CSR berlangsung.

PLN Nusantara Power provides avenues for the community to submit suggestions, criticisms, or complaints about the operational impacts through official letters, emails, phone calls, the website, or face-to-face meetings at nearby power plants. Additionally, complaints can be submitted during community satisfaction surveys or CSR program activities.

Mekanisme Penanganan Pengaduan Masyarakat
Community Complaints Handling Mechanism

Pada tahun 2023, PLN Nusantara Power tidak menerima pengaduan dari masyarakat terkait dampak operasi Perusahaan.

In 2023, PLN Nusantara Power did not receive any complaints from the community regarding the Company's operational impacts.

Kinerja Sosial Aspek Pelanggan
Social Performance on Customer Aspect

Komitmen dan Kebijakan Terhadap Pelanggan
Commitment and Policy regarding Customers

PLN NP berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Komitmen ini merupakan wujud perhatian utama PLN NP dalam menjaga keberlanjutan bisnis ke depan. PLN NP juga terus berusaha menghasilkan layanan yang berkualitas sesuai standar mutu dan layanan yang telah disepakati. PLN NP juga melakukan pemeliharaan, uji kualitas dan evaluasi atas seluruh produk dan jasa guna memastikan keandalan serta keamanan pembangkit sehingga pasokan listrik tetap terselenggara dengan baik.

Perusahaan meyakini bahwa kepuasan Pelanggan merupakan elemen penting bagi keberlanjutan usaha PLN NP. Dengan kepuasan maksimal yang diperoleh Pelanggan, maka dapat meningkatkan loyalitas Pelanggan. Di era digital yang begitu kuat saat ini, kepuasan Pelanggan semakin memenuhi nilai pentingnya.

PLN NP menerapkan sejumlah ketentuan dalam memberikan layanan terbaik kepada pelanggan di antaranya:

- Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik (Grid Code) tahun 2020 yang mencakup aturan mengenai manajemen jaringan, penyambungan, operasi, pemeliharaan dan pelaksanaan operasi, transaksi tenaga listrik, pengukuran, dan kebutuhan data;
- Prosedur Tetap Transaksi Tenaga Listrik tahun 2023 yang mengatur komunikasi transaksi jual-beli tenaga listrik, mengatur ancillary services;
- Prosedur Tetap DKPKP Sistem Jamali tahun 2023, Prosedur Tetap DKPKP Sistem Sumatera tahun 2022, Prosedur Tetap DKPKP Sistem Kalimantan tahun 2022, Prosedur Tetap DKPKP Sistem Sulawesi tahun 2021 yang mengatur status kondisi pembangkit, tata cara komunikasi operasi, dan perhitungan kinerja pembangkit;
- Pedoman Operasi Buku Komunikasi Pengelolaan Tenaga Listrik Tahun 2020.

Sebagai salah satu upaya dalam mendukung komitmen terhadap Pelanggan, PLN NP telah menurunkan Standar pelayanan berupa kesiapan operasi dan energi listrik serta jasa Operation & Maintenance (O&M) diatur dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) dan Kontrak Perjanjian Jasa O&M antara PLN NP dengan PT PLN (Persero) sebagai pelanggan tunggal. Faktor-faktor yang menjadi indikator tingkat kualitas layanan pun dijadikan target KPI korporat setiap tahun, sehingga pencapaian indikator tersebut dipantau secara berkala oleh Manajemen PLN NP. Indikator tersebut antara lain Equivalent Availability Factor (EAF) sebagai indikator faktor kesiapan pembangkit untuk beroperasi, Scheduled Outage Factor (SOF) sebagai indikator ketepatan jadwal pemeliharaan dan Net Plant Heat Rate (NPHR).

PLN NP is committed to continuously improving services to customers. This commitment reflects PLN NP's primary concern for ensuring future business sustainability. PLN NP strives to deliver quality services according to agreed quality standards. The Company also conducts assessments, quality tests, and evaluations of all products and services to ensure the reliability and safety of power plants, thereby ensuring a consistent supply of electricity.

The Company believes that customer satisfaction is a crucial element for the sustainability of PLN NP's business. Achieving maximum customer satisfaction can enhance customer loyalty. In the current strong digital era, customer satisfaction has become increasingly important.

PLN NP implements several provisions to provide the best services to customers, including:

- The 2020 Grid Code, which includes rules on network management, connections, operations, planning and operational execution, electricity transactions, measurement, and data requirements;
- The 2023 Standard Procedure for Electricity Transactions, which governs the communication of electricity sales transactions and ancillary services;
- The 2023 Standard Procedure for DKPKP Jamali System, the 2022 Standard Procedure for DKPKP Sumatra System, the 2022 Standard Procedure for DKPKP Kalimantan System, and the 2021 Standard Procedure for DKPKP Sulawesi System, which regulate the status of power plants, operational communication procedures, and power plant performance calculations;
- The 2020 Standard Operation Guidelines for Electricity Management Communication.

As part of its commitment to customers, PLN NP has formulated service standards encompassing operational readiness, electrical energy, and Operation & Maintenance (O&M) services. These standards are regulated in the Power Purchase Agreement (PPA) and O&M Service Agreement between PLN NP and PT PLN (Persero) as the sole customer. The factors indicating service quality levels are set as annual corporate KPI targets, and their achievement is monitored regularly by PLN NP Management. These indicators include the Equivalent Availability Factor (EAF) as an indicator of power plant readiness, the Scheduled Outage Factor (SOF) as an indicator of maintenance schedule accuracy, and Net Plant Heat Rate (NPHR).

Realisasi Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Aspek Pelanggan
Implementation of Customer-Related Corporate Social Responsibility Program

Peningkatan Layanan Pelanggan
Customer Service Improvement

PLN NP memandang perlindungan Pelanggan merupakan suatu kewajiban, hal ini selaras dengan setiap proses bisnis yang dijalankan oleh Perusahaan selalu memperhatikan kesesuaian rangkaian prosedur Standar Pelayanan PLN NP, hal ini merupakan komitmen Perusahaan untuk terus meningkatkan mutu dan layanan sebagai bentuk tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap Pelanggan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan Perusahaan dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada Pelanggan yaitu:

1. Memberikan kemudahan layanan bagi Pelanggan untuk memperoleh informasi terkait produk, layanan, dan operasional bisnis Perusahaan di Call Center, website, dan media sosial Perusahaan;
2. Melakukan survei kepuasan Pelanggan;
3. Menangani keluhan serta pendapat Pelanggan untuk terus mempercepatkan proses dan kualitas pelayanan;
4. Mempercepat rangkaian proses bisnis dan pekerjaan lainnya sehingga dapat memberikan pelayanan yang lancar dan optimal;
5. Memberi kepastian dalam penyelesaian klaim sehingga dapat meningkatkan kepuasan Pelanggan.

PLN NP views customer protection as an obligation, in line with every business process conducted by the Company, always adhering to PLN NP's Service Standards procedures. This is part of the Company's commitment to continually improve quality and service as a form of social responsibility to customers. The Company's efforts to enhance customer service include:

1. Providing easy access for customers to obtain information related to the Company's products, services, and business operations through the Call Center, website, and social media;
2. Conducting customer satisfaction surveys;
3. Handling customer complaints and feedback to continually improve service processes and quality;
4. Accelerating business processes and other tasks to provide smooth and optimal service;
5. Ensuring prompt resolution of claims to enhance customer satisfaction.

Survei Kepuasan Pelanggan
Customer Satisfaction Surveys

Secara berkelanjutan PLN NP melakukan survei kepuasan pelanggan. Survei dilakukan untuk mengidentifikasi area-area yang menjadi prioritas untuk dilakukannya perbaikan, selain itu untuk mengukur kepuasan Pelanggan, dan sebagai media untuk memperoleh saran dan masukan dari keluhan Pelanggan.

PLN NP continuously conducts customer satisfaction surveys to identify priority areas for improvement, measure customer satisfaction, and gather suggestions and feedback on customer needs.

Hasil Penilaian Pelanggan PLN NP
PLN NP Customer Assessment Results

Nilai Kepuasan, Ketidakpuasan dan Keterikatan Pelanggan PT PLN NP
Customer Satisfaction, Dissatisfaction, and Engagement Scores of PT PLN NP

No.	Jenis Nilai Score Types	Nilai (%) Score (%)		
		2023	2022	2021
A	Nilai Kepuasan Pelanggan Customer Satisfaction Score	84,60	85,00	87,93
B	Nilai Ketidakpuasan Pelanggan Customer Dissatisfaction Score	14,25	14,03	11,81
C	Nilai Keterikatan Pelanggan Customer Engagement Score	98,93	98,63	99,49

Hasil dari survei ini dijadikan evaluasi PLN NP untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan.

The results of these surveys are used by PLN NP for evaluation to keep providing the best service to customers.

Akses Informasi Layanan dan Pengaduan Pelanggan

Access to Service Information and Customer Complaints

Guna mendukung jaminan kepuasan pelanggan, Perusahaan menyediakan fasilitas pusat informasi dan layanan pengaduan terkait keluhan pelanggan. Hal ini diwujudkan melalui pembentukan Aplikasi MACD (Management Complaint) sebagai wujud komitmen Perusahaan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna jasa. Aplikasi MACD (Management Complaint) adalah saluran/jembatan komunikasi antara pengguna jasa dengan Perusahaan yang akan memenuhi kebutuhan permintaan informasi terkait layanan Perusahaan (inquiry), saran, apresiasi, serta penanganan keluhan dari pengguna jasa (complain handling).

To support customer satisfaction assurance, the Company provides an information center and complaint service for customer grievances. This is realized through the MACD (Management Complaint) application, demonstrating the Company's commitment to providing the best service to service users. The MACD (Management Complaint) application is a communication channel between service users and the Company, fulfilling information requests related to the Company's services (inquiries), suggestions, appreciation, and handling complaints from service users.

Tujuan pembentukan Aplikasi MACD (Management Complaint) secara terperinci adalah untuk:

a. Memenuhi permintaan informasi layanan yang akurat dan cepat bagi pengguna jasa, misalnya mengenai jadwal keberangkatan kapal, tarif, dll;
b. Menerima setiap saran dan apresiasi yang disampaikan oleh pengguna jasa dan melaporkannya kepada Divisi/Cabang terkait agar dapat dijadikan sebagai acuan perbaikan pelayanan di masa mendatang;
c. Menerima dan menjawab keluhan dari pengguna jasa dan melaporkannya kepada Divisi/Cabang terkait untuk segera ditindaklanjuti;
d. Mencatat dan melaporkan permintaan informasi, saran, apresiasi, dan keluhan dari pengguna jasa dan melaporkannya kepada Manajemen Perusahaan sebagai proses evaluasi kinerja; dan
e. Meningkatkan kepercayaan pengguna jasa terhadap Perusahaan melalui penyediaan informasi yang lengkap dan akurat serta memberikan tanggapan cepat atas keluhan yang disampaikan.

The detailed objectives of establishing the MACD (Management Complaint) application are to:

a. Fulfill accurate and fast service information requests for service users, such as ship departure schedules, rates, etc.;
b. Receive and report every suggestion and appreciation from service users to the relevant Division/Branch for future service improvements;
c. Receive and respond to complaints from service users and report them to the relevant Division/Branch for immediate follow-up;
d. Record and report service information requests, suggestions, appreciation, and complaints from service users to Company Management for performance evaluation;
e. Enhance service users' trust in the Company by providing complete and accurate information and responding quickly to complaints.

Untuk meningkatkan jangkauan media Aplikasi MACD (Management Complaint) kepada pengguna jasa di seluruh Indonesia, Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan melalui beberapa saluran berikut:

- Situs resmi: macc.pt.masantaraperkasa.co.id
- Telepon: 031-8282180 ext. 417
- Faks : 031-8282192
- Surat: Jl. Kalimalang Baru No. 11 Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, 60231

To increase the reach of the MACD (Management Complaint) application to service users across Indonesia, customers can submit complaints through several channels:

- Official website: macc.pt.masantaraperkasa.co.id
- Telephone: 031-8282180 ext. 417
- Fax: 031-8282192
- Mail: Jl. Kalimalang Baru No. 11 Surabaya, East Java, Indonesia, 60231

Seluruh pengaduan akan ditindaklanjuti oleh Bidang Contract Management and Customer Relations. Pengaduan atau keluhan yang masuk akan dikelompokkan berdasarkan dimensi kepuasan pelanggan untuk setiap produk sebagaimana ditetapkan dalam IUB. IMS. IPM-06.2.3. Mengelola Keluhan Pelanggan. Mekanisme pengaduan pelanggan dan tindaklanjutnya dicantum dalam skema berikut.

All complaints will be followed up by the Contract Management and Customer Relations Department. Complaints received will be categorized based on customer satisfaction dimensions for each product as stipulated in IUB. IMS. IPM-06.2.3. Managing Customer Complaints. The customer complaint mechanism and follow-up actions are outlined in the following scheme.

Mekanisme Pengaduan Pelanggan
Customer Complaint Mechanism

Sampai dengan tahun 2023 jumlah keluhan yang diterima oleh PLN NP adalah sebanyak 669 laporan dan seluruh keluhan pelanggan telah ditindaklanjuti. Hal ini menunjukkan komitmen tinggi PLN NP dalam melindungi hak pelanggan untuk didengar pendapat dan keluhannya sehingga layanan yang diperoleh dapat sesuai dengan kontrak perjanjian.

By 2023, PLN NP received 669 complaints, all of which have been addressed. This demonstrates PLN NP's strong commitment to protecting customer rights to voice their opinions and complaints, ensuring the services provided are in accordance with contractual agreements.

Perlindungan Privasi Pelanggan
Customer Data Confidentiality

PLN NP berkomitmen menjaga kerahasiaan informasi yang disampaikan oleh pelanggan termasuk menjaga nama baik pelanggan sebagaimana yang diatur dalam *Code of Conduct*. Informasi berupa keluhan pelanggan yang disampaikan melalui Aplikasi MACD (Management Complaint) dikelola secara profesional oleh PLN NP, sehingga hanya pihak terkait yang memiliki akses terhadap informasi tersebut guna menindaklanjuti dan menyelesaikan keluhan tersebut. Penggunaan teknologi dalam pengelolaan keluhan pelanggan dilakukan dapat menjaga kepercayaan pelanggan sehingga kualitas layanan PLN NP dapat terus ditingkatkan.

PLN NP is committed to ensuring the confidentiality of information provided by customers, including protecting customer reputations as stipulated in the Code of Conduct. Customer complaints submitted through MACD Application (Management Complaint System) are managed professionally by PLN NP, with access restricted to relevant parties to follow up and resolve complaints. The use of technology in managing customer complaints is expected to maintain customer trust, allowing PLN NP to continuously develop service quality.

Pengembangan dan Inovasi Produk Berkelanjutan
Sustainable Product Development and Innovation

PLN NP memandang bahwa indikator kepuasan terhadap pelanggan salah satunya melalui pengembangan dan inovasi produk. Oleh karena itu, PLN NP terus melakukan inovasi dan pengembangan terhadap layanan kepada pelanggan. Pengembangan dan inovasi produk berkelanjutan serta pengembangan pelayanan pelanggan yang dilakukan PLN NP pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

PLN NP recognizes that customer satisfaction indicators include product development and innovation. Therefore, PLN NP continues to innovate and develop customer services. Sustainable product development and customer service enhancements by PLN NP in 2023 include:

1. **Implementasi Co-Firing berkelanjutan**
   Co-firing berkelanjutan telah diuji coba di 24 unit pembangkit PLN NP dan telah dikomersialisasi di 23 unit pembangkit. Sampai dengan tahun 2023, PLN NP telah memproduksi MWh Green sebesar 529,66 GWh dengan pemanfaatan biomassa sebanyak 484,68 ribu Ton.

1. **Sustainable Co-Firing Implementation**
   Sustainable co-firing has been trialed in 24 PLN NP power plant units and commercialized in 23 units. By 2023, PLN NP has produced 529.66 GWh of Green MWh using 484.68 thousand tons of biomass.

2. A-BOOT (*Advance Boiler Optimization and Tuning*)

Program yang mengintegrasikan 5 elemen, yakni: A-BOOT Analysis, Power Tools, Expert, Combustion Test, dan Modelling sebagai Strategi Peningkatan Efisiensi Bahan Bakar Untuk Mendukung Transformasi 2.0 PLN di pilar *Net Zero Emissions* (NZE) Moonshots. Implementasi program ini dapat menurunkan konsumsi batu bara, sehingga meredusir emisi karbon yang dilepas ke atmosfer sehingga MT CO_2 akumulasi menjadi berkurang dan lebih ramah lingkungan (Environmentally Safe).

3. *Green Hydrogen Plant* (GHP)

Program ini mengintegrasikan Hydrogen Plant Existing dengan sumber energi hijau yang bersumber dari PLTS atap di unit pembangkit. Pada 9 Oktober 2023 telah dilakukan peluncuran perdana Green Hydrogen Plant di UP Muara Karang. PLN NP telah mengembangkan sejumlah produk turunan hidrogen yang siap untuk dikomersilkan, antara lain HGP, FCEV, FCT, dan A2P. HGP (Green Hydrogen Plant) bertujuan untuk memproduksi hidrogen hijau dari sumber hidrogen non-hijau dengan memanfaatkan tenaga surya dan sertifikat energi terbarukan (REC). FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle) mengubah hidrogen menjadi bahan bakar untuk kendaraan listrik, sementara FCT (Fuel Cell Technology) mengonversi hidrogen menjadi energi listrik, mirip dengan fungsi baterai, dan dapat menggantikan genset. Pada akhir tahun 2023, FCEV, HGP, dan FCT telah terpasang di HRS PLTD Senayan.

4. Revitalisasi PLTS

PLN NP telah melakukan beberapa proyek revitalisasi PLTS milik PLN di beberapa lokasi tersebar di Sulawesi, di antaranya 5 lokasi PLTS di Sulawesi Utara: Bunaken, Manangit, Makalehi, Mangas, dan Marore, 2 lokasi PLTS di Sulawesi Selatan: Kadingareng dan Tanakeke, serta 1 lokasi PLTS di Sulawesi Utara: Dongkala. PLN NP melakukan survey, assesmen, perancangan desain yang lebih efisien dan andal, eksekusi, hingga commissioning. Pertakan PLTS ini akan dapat meningkatkan kapasitas produksi di sistem eksisting sekaligus mengurangi penggunaan PLTD sehingga konsumsi BBM berkurang dan emisi karbon semakin berkurang.

5. Carbon Trading

PLTGU Muara Karang Blok 3, dengan emisi yang lebih rendah dan efisiensi operasi hingga 54%, menjadi unit penghasil karbon kredit utama PLN yang terdaftar di IDX Carbon. Pada Oktober 2023, 930,000 ton CO_2 milik PLTGU Muara Karang telah didaftarkan dalam bentuk Sertifikat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) dan siap diperdagangkan di bursa. Di akhir 2023, PLN melalui PLTGU Muara Karang menjadikan satu-satunya penjual SPE-GRK di bursa selain Pertamina. Selain melalui IDX Carbon, di tahun 2023 PLN NP juga telah terdaftar di APPLE-Gatrik dan siap melakukan carbon trading dengan skema PTBAE-PU.

2. Advance Boiler Optimization and Tuning (A-BOOT)

This program integrates five elements: A-BOOT Analysis, Power Tools, Expert, Combustion Test, and Modelling as a strategy to improve fuel efficiency to support PLN's 2.0 Transformation in the Net Zero Emissions (NZE) Moonshots pillar. The implementation of this program reduces coal consumption, thus reducing carbon emissions and making it more environmentally friendly (Environmentally Safe).

3. Green Hydrogen Plant (GHP)

This program integrates existing hydrogen plants with green energy sources from rooftop solar panels at power plant units. On October 9, 2023, the first Green Hydrogen Plant was launched at Muara Karang GU. PLN NP has developed several hydrogen derivative products ready for commercialization, including HGP, FCEV, FCT, and A2P. HGP (Green Hydrogen Plant) aims to produce green hydrogen from non-green hydrogen sources using solar power and renewable energy certificates (REC). FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle) converts hydrogen into fuel for electric vehicles, while FCT (Fuel Cell Technology) converts hydrogen into electrical energy, similar to battery functions, and can replace generators. By the end of 2023, FCEV, HGP, and FCT have been installed at HRS Senayan DKI.

4. Solar Power Plant Revitalization (SPP)

PLN NP has undertaken several solar power plant revitalization projects owned by PLN in various locations across Sulawesi, including five locations in North Sulawesi: Bunaken, Manangit, Makalehi, Mangas, and Marore, two locations in South Sulawesi: Kadingareng and Tanakeke, and one location in North Sulawesi: Dongkala. PLN NP conducts surveys, assessments, designs more efficient and reliable systems, executes, and commissions these projects. The improvement will increase production capacity in existing systems, reduce diesel power plant (DEPP) usage, and decrease fuel consumption and carbon emissions.

5. Carbon Trading

Muara Karang CCPP Block 3, with lower emissions and operational efficiency of up to 54%, is PLN's main carbon credit generator registered on IDX Carbon. In October 2023, 930,000 tons of CO_2 from Muara Karang CCPP were registered as Greenhouse Gas Emission Reduction Certificates (SPE-GRK) and ready for trading. By the end of 2023, PLN through Muara Karang CCPP was the only SPE-GRK seller on the exchange besides Pertamina. In addition to IDX Carbon, in 2023, PLN NP was also registered on APPLE-Gatrik and ready to engage in carbon trading under the PTBAE-PU scheme.

Biaya Pelaksanaan Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pelanggan
Expenditures of Customer-related Corporate Social Responsibility Program

Selama tahun 2023 PLN NP mengeluarkan biaya sebesar Rp1,83 miliar untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap Pelanggan yaitu untuk pelaksanaan kegiatan survei kepuasan pelanggan PLN NP, Forum Komunikasi Pelanggan, Diskusi Operasi dan Kunjungan Pelanggan.

In 2023, PLN NP spent Rp1.83 billion on corporate social responsibility activities for customers, including customer satisfaction surveys, Customer Communication Forums, Operational Discussions, and Customer Visits.

Kinerja Sosial Aspek Ketenagakerjaan
Social Performance on Employment Aspects

Komitmen dan Kebijakan Ketenagakerjaan dan K3
Commitment and Policy regarding Employment and K3

Untuk memperoleh kondisi maupun iklim kerja yang sehat, PLN NP terus berkomitmen untuk melaksanakan inisiatif keberlanjutan aspek ketenagakerjaan. Dengan adanya Sumber Daya Manusia yang terkelola dengan baik berpengaruh langsung terhadap kinerja SDM dalam pencapaian indikator kinerja dan keberlanjutan Perusahaan.

To achieve a healthy working environment, PLN NP is committed to implementing sustainable employment initiatives. Properly managed Human Resources directly influence performance indicators and the sustainability of the Company.

Pelaksanaan inisiatif keberlanjutan aspek ketenagakerjaan telah mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain aspek ketenagakerjaan, Perusahaan juga memprioritaskan aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) bagi karyawan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

The implementation of these sustainability initiatives is based on Indonesian Law No. 13 of 2003 concerning Employment. Additionally, the Company prioritizes Health and Safety at Work (K3) for employees, as regulated by Indonesian Law No. 1 of 1970 concerning Work Safety, Law No. 30 of 2009 concerning Electricity, and Government Regulation No. 50 of 2012 concerning the Implementation of Occupational Health and Safety Management Systems.

Dalam pengelolaan sumber daya manusia, PLN NP juga berkomitmen untuk menjamin Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi karyawan maupun pihak lain yang berkaitan di lingkungan PLN NP. Pengelolaan K3 yang baik akan meminimalisir kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja. Komitmen ini ditunjukan oleh PLN NP melalui penerapan SMK3 sesuai ISO 45001:2018 dan PP 50 Tahun 2012, dengan target tingkat kecelakaan nihil atau zero accident. Komitmen tersebut juga tertuang dalam Kebijakan Sistem Manajemen Terintegrasi PT PLN NP, Safety Golden Rules, dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Oleh karena itu, Manajemen PLN NP ikut andil sebagai Tim Penyusun dan Tim Perumus dalam penyusunan dan kesepakatan PKB. PKB yang berlaku saat ini yaitu PKB antara PLN NP dengan Serikat Pekerja PLN 2022-2024 No. PT PLN 00014/021/DIR/2022 dan No. SP PLN 0014/SP-DPP/2022 telah didaftarkan ke Kementerian Ketenagakerjaan dengan No. KET. 4/HK00.01/00.0000.2212.2023/B/1/2023 tanggal 25 Januari 2023.

In managing human resources, PLN NP is also committed to ensuring occupational health and safety for employees and other parties operating within PLN NP. Effective OHS management minimizes workplace accidents and work-related illnesses. This commitment is demonstrated by PLN NP through the implementation of SMK3 in accordance with ISO 45001:2018 and PP 50 of 2012, targeting zero accidents. This commitment is also reflected in the Integrated Management System Policy of PT PLN NP, the Safety Golden Rules, and the Collective Labor Agreement (PKB). Hence, PLN NP Management actively participates as the Negotiating and Drafting Team in the preparation and agreement of the PKB. The current PKB between PLN NP and the PLN Workers' Union for 2022-2024, registered with the Ministry of Manpower under No. KET. 4/HK00.01/00.0000.2212.2023/B/1/2023 on January 25, 2023.

Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Ketenagakerjaan

Employment-related Corporate Social Responsibility Program

Program-program yang telah dijalankan oleh PLN NP dalam inisiatif keberlanjutan aspek ketenagakerjaan pada tahun 2023 diantaranya:

The programs implemented by PLN NP in sustainable employment initiatives in 2023 include:

Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Kompetensi Karyawan

Employee Education, Training, and Competency Development

PLN NP mewujudkan komitmennya terhadap inisiatif keberlanjutan aspek ketenagakerjaan melalui PJB Academy. PJB Academy menjalankan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan knowledge, skill, dan ability yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, performance, dan sikap mental karyawan PLN NP. Program PJB Academy melibatkan Direktur Utama sebagai Dean dan anggota Direksi sebagai Vice Dean serta Vice President, Senior Manager dan Kepala Satuan sebagai learning steering committee. Pengelola PJB Academy sejumlah 24 karyawan telah memenuhi standar internasional yang dibuktikan dengan sertifikat Corporate Learning Technologist untuk mengelola learning proses dan content berstandar internasional. Selain itu PJB Academy juga sudah tersertifikasi ISO 21001:2018 dari British Standard Institution (BSI) yang merupakan standar yang diakui secara internasional untuk dapat menyajikan layanan pembelajaran yang bermutu dan efektif bagi penerima layanan Pendidikan.

PLN NP fulfills its commitment to sustainable employment initiatives through the PJB Academy. The PJB Academy conducts education and training programs to enhance knowledge, skills, and abilities, aiming to improve the competency, performance, and mental attitude of PLN NP employees. The program involves the CEO as Dean, board members as Vice Deans, and Vice President, Senior Manager, and Unit Heads as the learning steering committee. The 24 staff members managing the PJB Academy meet international standards, evidenced by the Corporate Learning Technologist certification, ensuring international standards for learning processes and content. Furthermore, the PJB Academy is ISO 21001:2018 certified by the British Standards Institution (BSI), recognized internationally for delivering quality and effective learning services.

PJB Academy telah menyusun berbagai program pelatihan dan pengembangan karyawan untuk dilaksanakan pada tahun 2023. Program-program tersebut disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan kapabilitas karyawan sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan produktifitas perusahaan. Kegiatan Pendidikan, pelatihan dan pengembangan pegawai yang telah dilaksanakan selama tahun 2023 yaitu:

- Pelatihan Teknik dan Non-Teknik
- Sertifikasi Teknik dan Non-Teknik
- Workshop Teknik dan Non-Teknik
- Stakeholders (PJB Class)
- FGD

The PJB Academy has designed various training and development programs for employees to be implemented in 2023. These programs aim to enhance employee quality and capability, ultimately boosting the Company's productivity. Education, training, and employee development activities conducted in 2023 include:

- Technical and Non-Technical Training
- Technical and Non-Technical Certification
- Technical and Non-Technical Workshops
- Stakeholders (PJB Class)
- FGD

Namun sehubungan dengan terbitnya Peraturan Direksi No. 0101/PDIR/DIR/2023 tentang Pembubaran Organisasi Unit PJB Academy pada tanggal 29 Desember 2023, maka untuk program pelatihan/pengembangan pegawai di PLN NP kedepannya dikelola oleh Bidang Human Capital Development.

However, with the issuance of the Directors Regulation No. 0101/PDIR/DIR/2023 concerning the Dissolution of the PJB Academy Unit Organization on December 29, 2023, future training and development programs for employees at PLN NP will be managed by the Human Capital Development Division.

Penghargaan Produktivitas Karyawan

Productivity Awards for Employees

Dalam rangka memberikan motivasi kinerja kepada karyawan, serta untuk meningkatkan produktivitas karyawan, kinerja, kompetensi, kreatifitas serta digital mindset, maka PLN NP memberikan penghargaan bagi karyawan yang produktif di lingkungan Perusahaan. Pemberian penghargaan ini diberikan berdasarkan absensi, perilaku disiplin, tingkat produktivitas maupun prestasi yang diraih oleh karyawan. Adapun pemberian yang diberikan oleh PLN NP kepada karyawan yang produktif sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan yaitu dalam bentuk hadiah atau sertifikat.

To motivate employees and enhance productivity, performance, competence, creativity, and digital mindset, PLN NP awards productive employees within the Company. Awards are based on attendance, discipline, productivity levels, and achievements. Awards given to productive employees, in accordance with established criteria, include prizes or certificates.

Pemberian Kesejahteraan

Employee Welfare

Komitmen PLN NP dalam inisiatif keberlanjutan aspek ketenagakerjaan salah satunya dengan pemberian kesejahteraan kepada karyawan. Pemberian kesejahteraan ini bertujuan untuk memotivasi karyawan untuk terus meningkatkan kinerjanya. Dalam prakteknya, PLN NP menerapkan sistem remuneras yang setara dan kompetitif dengan industri sejenis. Remuneras yang diberikan kepada karyawan PLN NP dibagi menjadi 2 yaitu penghargaan ekstrinsik (kompensasi dan manfaat karyawan) dan penghargaan intrinsik (program ataupun fasilitas lainnya) diantaranya:

- Kompensasi Tetap Pay for Person
- Kompensasi tidak tetap
  - Kompensasi Jangka Pendek tendir atau
    - a) Pay for Position
    - b) Pay for Performance
    - c) Insentif Kinerja/Bonus
    - d) Tunjangan Hari Raya
    - e) Tunjangan Cuti Tahunan
  - Kompensasi Jangka Panjang tendir atau
    - a) Tunjangan Cuti Besar
    - b) Penghargaan Kesetiaan Kerja
    - c) Bantuan Ganti Rugi/Peristiwa luar biasa
    - d) Jaminan Sosial Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
    - e) Penghargaan Pensiun
- Manfaat Karyawan
- Penghargaan Intrinsik

PLN NP's commitment to sustainable employment initiatives includes providing welfare to employees, aiming to motivate them to continually improve performance. PLN NP implements a remuneration system that is equitable and competitive with similar industries. The remuneration for PLN NP employees is divided into extrinsic rewards (compensation and benefits) and intrinsic rewards (programs or other facilities), including:

- Fixed Compensation (Pay for Person)
- Variable Compensation:
  - Short-Term Compensation
    - a) Pay for Position
    - b) Pay for Performance
    - c) Performance Incentives/Bonuses
    - d) Holiday Allowances
    - e) Annual Leave Allowances
  - Long-Term Compensation:
    - a) Major Leave Allowances
    - b) Long-Service Awards
    - c) Extraordinary Events Compensation
    - d) Social Security for Work Accidents and Death
    - e) Retirement Awards
- Employee Benefits
- Intrinsic Rewards

Setiap tahun PLN NP melakukanlah penyesuaian remuneras. Gaji seluruh karyawan baik wanita maupun laki-laki telah sesuai dengan ketentuan pemberian upah yang ditetapkan Pemerintah. Selain itu, PLN NP juga memberikan insentif atau bonus berdasarkan kinerja karyawan serta tunjangan cuti tahunan maupun cuti besar dan penghargaan kesetiaan kerja (tendir) sebagai bentuk apresiasi sehingga karyawan dapat senantiasa meningkatkan produktivitas dan loyalitasnya. PLN NP juga menyediakan Bantuan Ganti Rugi yaitu bantuan yang diberikan oleh Perusahaan kepada Karyawan yang mengalami musibah akibat peristiwa luar biasa atau karena kecelakaan kerja.

PLN NP annually adjusts remuneration. Salaries for all employees, both male and female, comply with government wage regulations. Additionally, PLN NP provides incentives or bonuses based on performance, annual and major leave allowances, and long-service awards as forms of appreciation, thereby encouraging continuous productivity and loyalty. PLN NP also provides Extraordinary Events Compensation to employees affected by exceptional circumstances or work-related accidents.

Program Pensiun

Pension Programs

PLN NP mengelenggarakan 2 (dua) program pensiun yakni program pensiun manfaat pasti dan program pensiun iuran pasti. Pemberian program pensiun tersebut dilakukan dengan menyesuaikan pada tahun karyawan mulai bekerja. Untuk karyawan yang bergabung sebelum tahun 2012 maka karyawan tersebut dikelompokkan dalam program manfaat pasti, sedangkan untuk karyawan yang baru mulai bergabung pada tahun 2012 maka karyawan tersebut akan dikelompokkan dalam program iuran pasti.

PLN NP administers two pension programs: a defined benefit plan and a defined contribution plan. The pension program is determined based on the employee's start year. Employees who joined before 2012 participate in the defined benefit plan, while those joining from 2012 onwards participate in the defined contribution plan.

Karyawan yang mencapai batas usia pensiun yaitu 56 tahun mendapatkan manfaat pensiun dari PLN NP. Beberapa program jaminan sosial dan hari tua yang diterapkan oleh PLN NP antara lain:

- Program Pensiun Manfaat Pasti
  Program ini dikelola oleh pihak Dana Pensiun PLN (Persero) atau DP-PLN dengan pendanaan yang diperoleh DP-PLN berasal dari iuran Peserta sebesar 8% x Penghasilan Dasar Pensiun (PNDP) dan iuran Pemberi Kerja sebesar 19,45% x PNDP. Hal ini diatur dan sesuai dengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Selaku Pendiri Dana Pensiun PT PLN (Persero) No. 0399K/DIR/2023 tanggal 11 Desember 2023.
- Iuran Pasti
  Program ini dikelola oleh pihak Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) untuk karyawan dengan iuran Peserta sebesar 8% x *Pay for Pension* (PP) serta iuran Pemberi Kerja sebesar 4% x PP.

Employees reaching the retirement age of 56 receive pension benefits from PLN NP. Social security and old-age programs implemented by PLN NP include:

- Defined Benefit Pension Program
  Managed by the PLN Pension Fund (DP-PLN), funded by participant contributions at 8% of the Pension Base Salary (PNDP) and employer contributions at 19.45% of PNDP. This is regulated by the PLN (Persero) Directors' Decision as the Founder of the PLN Pension Fund No. 0399K/DIR/2023 on December 11, 2023.
- Defined Contribution Program
  Managed by the Financial Institution Pension Fund (DPLK), with participant contributions at 8% of *Pay for Pension* (PP) and employer contributions at 4% of PP.

PLN NP juga mengikutsertakan seluruh karyawan pada program BPJS Ketenagakerjaan berupa program Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan Jaminan Pensiun (JP) serta turut memberikan pendampingan masa pensiun melalui program Masa Persiapan Pensiun (MPP). Pensiunan dan keluarganya mendapatkan bantuan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan Keputusan Direksi No. 0399K/DIR/DIR/2017 tentang Bantuan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Karyawan yang Telah Berhenti Bekerja (Pensiunan) di PLN NP.

PLN NP also enrolls all employees in BPJS Employment programs, including Old Age Security (JHT), Work Accident Insurance, Life Insurance, Unemployment Insurance, and Pension Insurance (JP). The Company provides retirement preparation assistance through the Retirement Preparation Program (MPP). Retirees and their families receive health maintenance assistance as per Director's Decision No. 0399K/DIR/DIR/2017 regarding Health Maintenance Assistance for Retired Employees at PLN NP.

Bidang Kesehatan Kerja, Keselamatan Kerja dan Keamanan

Occupational Health, Safety, and Security

Selain ketenagakerjaan, PLN NP juga berkomitmen untuk terus mengelola dan mengembangkan sistem Kesehatan Kerja, Keselamatan Kerja dan Keamanan (K3). PLN NP menyadari bahwa pengelolaan sistem K3 yang baik dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit kerja di Perusahaan.

In addition to employment aspects, PLN NP is committed to continuously managing and developing occupational health, safety, and security (K3) systems. PLN NP recognizes that effective K3 management minimizes workplace accidents and occupational diseases.

Pembahasan mengenai aspek keselamatan dan kesehatan kepada karyawan juga turut disosialisasikan Perusahaan secara menyeluruh melalui Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang tercantum dalam Bab 16 tentang Perlengkapan Kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, terdiri dari 6 Pasal yaitu pasal 52 sampai 57, diantaranya membahas mengenai:

- Tempat dan Lingkungan Kerja;
- Kewajiban mematuhi K3;
- Penyediaan perlengkapan dan peralatan pendukung K3 beserta prosedur pemakaiannya;
- Sarana pelayanan kesehatan dan fasilitas pemeliharaan kesehatan;
- Kecelakaan kerja dan PAK; serta
- Kompensasi rehabilitasi serta santunan.

Discussions on safety and health aspects are communicated to employees as early as possible through the Collective Labor Agreement (PKB), outlined in Chapter 16 on Work Equipment, Safety, and Health, consisting of six articles (Articles 52 to 57), covering:

- Workplace and Environment;
- K3 Compliance Obligations;
- Provision of K3 Equipment and Procedures;
- Health Services and Maintenance Facilities;
- Work Accidents and Occupational Diseases;
- Rehabilitation and Compensation.

PLN NP melalui bidang Health, Safety, Security & Environment (HSSE) juga menjalankan beberapa program penguatan budaya & sistem manajemen K3, dengan realisasi kegiatan sebagai berikut:

PLN NP's Health, Safety, Security & Environment (HSSE) department also implements several programs to strengthen OHS culture and management systems, including:

Program Penguatan Budaya dan Sistem Manajemen K3
OHS Culture and Management System Strengthening Program

Monitoring Dashboard K3
OHS Dashboard Monitoring

Merupakan kegiatan permit K3 rutin oleh unit Direktorat Operasi Gas & Direktorat Operasi Batubara yang dilakukan para pekerja unit, karyawan dan tenaga alih daya. Selain itu, dilakukan juga pengecekan & pemeliharaan rutin infrastruktur K3 beserta kedaluarsanya untuk mengantisipasi kebutuhan operasional K3 termasuk untuk kondisi emergency dengan turut serta melakukan audit internal OHSAS dan audit pengawasan ISO 45001:2018. Adapun hasil dari kegiatan permit ini akan ditampilkan setiap minggu melalui Dashboard K3 bagian monitor untuk memantau kondisi unsafe condition di tempat kerja.

Routine K3 permits are conducted by the Directorate of Gas Operations & Directorate of Coal Operations units, involving unit leaders, employees, and outsourced personnel. Additionally, routine checks and maintenance of OHS infrastructure and readiness are carried out to anticipate OHS operational needs, including emergency situations. This includes internal OHSAS audits and ISO 45001:2018 surveillance audits. The results of these permits are displayed weekly through the OHS Dashboard for monitoring, aiming to minimize unsafe conditions in the workplace.

Implementasi CSMS
CSMS Implementation

Sampai dengan bulan Desember 2021 persentase implementasi CSMS mencapai 45% untuk seluruh Unit termasuk UPK dan UPDK. Dari total vendor yang terdaftar di PT PLN NP sebanyak 1.569 vendor sudah lolos CSMS, 872 vendor telah lolos CSMS, 543 vendor teverifikasi pemenuhan prakualifikasi. Adapun untuk total vendor yang sudah terdaftar di web CSMS adalah 2.540 vendor.

As of December 2021, CSMS is 45% implemented at all units, including UOBs and DOBs. Of the total vendors registered with PT PLN NP, 1,569 vendors passed CSMS, 872 vendors did not pass CSMS, and 543 vendors are in the prequalification assessment process. There are 2,540 total vendors who have registered on the CSMS web.

Implementasi WPD Plus
Implementation WPD Plus

Sempat Dashboard yang mengintegrasikan semua aspek security & K3. Melalui dashboard ini dilakukan pengajuan working permit dapat dilakukan secara elektronik dan dapat di monitor progresnya. Hingga bulan Desember 2021 implementasi Working Permit Online (WPD) adalah sebagai berikut:

- Unit Balaraja, Modul Working Permit 100%, Modul Safety Induction 100%, Modul Safety Permit 100%
- Unit UPK dan UPDK, Modul Working Permit 67%, Modul Safety Induction 79%, Modul Safety Permit 29%
- Unit CM ke PLN NPS, Modul Working Permit 33%, Modul Safety Induction 58%, Modul Safety Permit 42%.

Dashboard that integrates security & OHS aspects. The dashboard that provide a more effective working permit processing with monitored progress. As of December 2021, the Working Permit Online (WPD) implementation is as follows:

- Balaraja Units, 100% Working Permit Module, 100% Safety Induction Module, 100% Safety Permit Module
- UPK and UPDK units, 67% Working Permit Module, 79% Safety Induction Module, 29% Safety Permit Module
- CM unit to PLN NPS, 33% Working Permit Module, 58% Safety Induction Module, 42% Safety Permit Module

Pelaksanaan Rapat P2K3 Korporat **P2K3 Corporate Meeting**	Dilakukan minimal sebanyak 1 kali dalam 1 bulan sebagai bentuk Partisipasi konsultasi dan komunikasi pekerja tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang berkaitan pelaksanaannya akan dimonitor secara rutin. Adapun materi minimal yang dibahas saat rapat P2K3 meliputi evaluasi phoenix kecelakaan dalam periode bulan sebelumnya, pemeriksaan kesiapan fasilitas emergency, pembahasan temuan total patrol safety & pembahasan aspek kesehatan Industrial hygiene.	Conducted at least once a month as a form of Participation and communication of employees about the occupational health and safety, the implementation of which will be monitored regularly. The material discussed in the P2K3 meeting includes an evaluation of the accident spreadsheet in the previous month, the percentage of emergency facility readiness, discussion of total safety patrol findings, and discussion of health aspects Industrial hygiene.
Implementasi SMK3 **Electrical Safety Management System Implementation**	Dalam rangka pemenuhan Permen ESDM No. 10 Tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan, maka PLN NP melakukan set up sistem manajemen keselamatan ketenagalistrikan (SMK3) serta pelaporan berdasar aplikasi Sinaerdo Kementerian ESDM yang sudah dilakukan oleh unit yang dikelola PLN NP dan unit yang dikelola PJBI, penerapan sistem ini mencakup seluruh aktivitas dan proses kerja, baik pada kegiatan pendukung di kantor maupun pada unit pembangkit, serta unit operasi dan pemeliharaan oleh seluruh karyawan dan kontraktor.	In order to comply with Minister of ESDM Regulation No. 10 of 2021 on Electrical Safety, PLN NP set up an Electrical Safety Management System (SMK3) and report to the Ministry of Energy and Mineral Resources using Sinaerdo application, carried out by PLN NP's managed units and PJBI managed units. The system is implemented, which covers all activities and business processes, both in supporting activities at the office and at the generating unit, as well as the operation and maintenance unit by all employees and contractors.
Penguatan budaya, kompetensi dan sertifikasi K3 **Strengthening K3 culture, competence, and certification**	Untuk meningkatkan kompetensi dan awareness tentang K3 maka dilakukan beberapa program program workshop, P2K3, pelatihan dan sertifikasi K3 serta sesertifikasi SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 dan ISO 45001.	To improve competence and awareness related to OHS, several programs are conducted, i.e., workshops, P2K3, training, and OHS certification, as well as recertification of SMK3 is compliance with Government Regulation No. 50 of 2012 and ISO 45001.

Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Kerja Kontraktor

Contractor Safety Management System (CSMS) Implementation

PLN Nusantara Power memperhatikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja tidak hanya kepada karyawan internalnya tetapi juga kepada kontraktor yang bekerja di lingkungan perusahaannya. Untuk tahun 2023, PLN NP memastikan bahwa kontraktor yang bekerja di lokasi proyek dilengkapi dengan perlindungan K3 yang sesuai dengan standar keselamatan yang telah ditetapkan melalui terselenggaranya klinik *Contractor Safety Management System* (CSMS), selain itu, PLN NP juga memberikan pelatihan K3 kepada kontraktor untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka tentang praktik K3 yang aman dan efisien. CSMS, PLN NP memastikan mitra kerja/kontraktor Perusahaan telah memenuhi persyaratan K3 yang berlaku di Perusahaan serta mampu memenuhi persyaratan K3 dalam pekerjaan kontrak yang dilaksanakan. Implementasi CSMS secara full cycle dapat diakses di https://csms.plnnusantarapower.co.id/. Penerapan CSMS menjadi salah satu wujud sinergi antara PLN NP dengan stakeholder dalam membangun budaya K3 secara menyeluruh agar nihil kecelakaan pada rekanan juga dapat terwujud.

PLN Nusantara Power ensures occupational safety and health protection not only for its internal employees but also for contractors working within the Company. In 2023, PLN NP ensured that contractors at project sites received appropriate K3 protection as per established safety standards through the Contractor Safety Management System (CSMS) clinic. Additionally, PLN NP provided K3 training to contractors to enhance their awareness and understanding of safe and efficient K3 practices. By implementing CSMS, PLN NP ensures that its contractors meet the Company's K3 requirements and can apply these standards in their contractual work. The full cycle implementation of CSMS can be accessed at https://csms.plnnusantarapower.co.id/. CSMS implementation exemplifies PLN NP's synergy with stakeholders to establish a comprehensive K3 culture, aiming for zero accidents among partners.

Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Kerja Kepada Masyarakat

Occupational Health and Safety System Implementation for the Community

Perlindungan terkait K3 tidak hanya diberikan PLN NP kepada stakeholder internal Perusahaan seperti karyawan dan kontraktor, tetapi juga kepada stakeholder eksternal seperti masyarakat sekitar lokasi operasional perusahaan. Pada tahun 2021, PLN NP memastikan bahwa operasinya tidak memberikan dampak negatif pada lingkungan sekitar dan masyarakat dengan menerapkan standar K3 yang ketat dalam setiap aktivitasnya. Selain itu, perusahaan juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar tentang potensi bahaya yang mungkin timbul dari operasi perusahaan dan langkah-langkah pencegahan yang mereka lakukan. PLN NP berkomitmen menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar dengan memastikan bahwa operasinya tidak membahayakan kesehatan dan keselamatan mereka.

PLN NP's K3 protection extends not only to internal stakeholders, such as employees and contractors but also to external stakeholders like the community around the Company's operational areas. In 2021, PLN NP ensured that its operations did not negatively impact the surrounding environment and community by applying stringent K3 standards in all activities. The Company also conducted awareness programs for the local community about potential hazards from its operations and preventive measures being taken. PLN NP is committed to maintaining good relations with the local community by ensuring its operations do not endanger their health and safety.

Kesetaraan *Gender* dan Kesempatan Kerja

Gender Equality and Employment Opportunities

PLN NP berupaya menerapkan prinsip kesetaraan dan anti diskriminasi yakni dengan melakukan pengelolaan karyawan tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, pendidikan, dan latar belakang. Perusahaan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang khususnya karyawan PLN NP terkait rekruitmen, program pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, pengembangan karir, sampai dengan pemberian remuneasi dan kesejahteraan kepada karyawan tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, agama, dan faktor keberagaman lainnya.

PLN NP strives to apply principles of equality and non-discrimination by managing employees without distinguishing gender, education, or background. The Company provides equal opportunities for everyone, particularly PLN NP employees, in recruitment, competency development programs, performance appraisal, career development, and remuneration and welfare without regard to gender, religion, or other diversity factors.

Selama tahun 2021, tidak terdapat laporan mengenai insiden diskriminasi terkait ras, warna kulit, gender, agama, opini politik, asal usul sosial dan segala bentuk diskriminasi lainnya yang melibatkan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal yang terkait Perusahaan.

In 2021, there were no reports of discrimination incidents based on race, color, gender, religion, political opinion, social origin, or any other form of discrimination involving internal or external stakeholders related to the Company.

Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan

Employment Grievance Mechanism

PLN NP memandang bahwa masukan dari masyarakat terkait ketenagakerjaan merupakan hal positif yang dapat mengembangkan kapasitas SDM. Oleh karena itu, PLN NP telah menyediakan saluran pengaduan terkait masalah ketenagakerjaan. Mekanisme pengaduan bagi karyawan yang diterapkan di lingkungan PLN NP sebagai berikut:

PLN NP views community feedback on employment issues as positive for developing HR capacity. Therefore, PLN NP has provided a grievance channel for employment-related issues. The grievance mechanism for employees at PLN NP is as follows:

Tata Cara Tingkatan Penyelesaian Keluhan dan Pengaduan
Procedures for Handling Complaints and Grievances

Keluhan dan pengaduan karyawan ditanggapi dan diselesaikan dengan atasannya langsung.
Employee complaints and grievances are initially discussed and resolved with their immediate supervisor.

Bila penyelesaian tingkat pertama belum mencapai hasil yang memuaskan, maka dengan sepengetahuan atasannya langsung, karyawan dapat menerusakan keluhan dan pengaduannya kepada atasannya yang lebih tinggi.
If the first level of resolution does not yield satisfactory results, with the supervisor's knowledge, the employee can escalate the complaint to a higher level supervisor.

Bila penyelesaian tingkat kedua tersebut telah dijalankan tanpa hasil yang memuaskan, maka pekerja dapat menerusakan keluhan dan pengaduannya kepada Serikat Pekerja. Dalam tingkatan ini keluhan dan pengaduan Pekerja tersebut akan diselesaikan antara Pengusaha dan Serikat Pekerja dalam Lembaga Bipartit.
If the second level of resolution is also unsatisfactory, the employee can escalate the complaint to the Workers' Union. At this level, the complaint will be resolved between the Employer and the Workers' Union within a Bipartite Institution.

Untuk memudahkan pelaksanaan dari ketentuan dalam pasal ini maka dibuat Berita Acara Penyelesaian Keluhan dan Pengaduan Karyawan.
To facilitate the implementation of these provisions, a Record of Complaint and Grievance Resolution is created.

Selama tahun 2023 PLN NP tidak menerima pengaduan dari karyawan mengenai masalah ketenagakerjaan. Kondisi ini menunjukkan kepuasan karyawan terhadap penerapan pengelolaan SDM di PLN NP.

In 2023, PLN NP did not receive any employee complaints regarding employment issues, reflecting employee satisfaction with HR management at PLN NP.

Tingkat Keterikatan dan Kepuasan Karyawan
Employee Engagement and Satisfaction Levels

Aspek yang berpengaruh pentingdalam pencapaian kinerja karyawan diantaranya keterikatan dan kepuasan karyawan. PLN NP meyakini bahwa kepuasan karyawan merupakan indikator utama dalam mencapai kinerja Perusahaan yang tinggi. Oleh karena itu, PLN NP melaksanakan survey kepuasan karyawan setiap tahun sebagai salah satu media untuk menilai efektivitas program pengelolaan SDM dari sudut pandang karyawan. Aspek-aspek yang mempengaruhi keterikatan dan kepuasan karyawan PLN NP yang diukur dalam survei tersebut diantaranya:

1) Company Policy
2) Work Conditions
3) Overall Organization Culture
4) Brand reputation
5) Leadership & Supervisors
6) Career Management
7) Compensation & Benefit
8) Teamwork & Relationship

Employee engagement and satisfaction are crucial factors in achieving performance. PLN NP believes that employee satisfaction is a key indicator of high Company performance. Therefore, PLN NP conducts annual employee satisfaction surveys as a means to assess the effectiveness of HR programs from the employees' perspective. The aspects influencing employee engagement and satisfaction measured in the survey include:

1) Company Policy
2) Work Conditions
3) Overall Organization Culture
4) Brand reputation
5) Leadership & Supervisors
6) Career Management
7) Compensation & Benefit
8) Teamwork & Relationship

9) Training & Development
10) Performance Management
11) Recognition
12) Meaningful Work
13) Diversity & Inclusion

Hasil survey kepuasan karyawan tahun 2023 yaitu Engagement Index sebesar 80,85% dan satisfaction Index sebesar 77,30%.

9) Training & Development
10) Performance Management
11) Recognition
12) Meaningful Work
13) Diversity & Inclusion

The employee satisfaction survey results for 2023 show an Engagement Index of 80.85% and a Satisfaction Index of 77.30%.

Penghargaan dan Sertifikasi di Aspek Ketenagakerjaan

Awards and Certifications in Employment Aspects

Penghargaan dan sertifikasi yang telah diraih oleh PLN NP terkait Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja selama tahun 2023 adalah:

1. **22 Juni 2023 – Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3 Awards) Tahun 2023**
   PLN NP meraih 76 penghargaan pada Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3 Awards) tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia. Penghargaan tersebut meliputi empat kategori sebagai berikut:
   - Kecelakaan Nihil (Zero Accident) diraih oleh 40 unit
   - Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) diraih oleh 12 unit
   - Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 diraih oleh 17 unit
   - Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS diraih oleh 7 unit

1. June 22, 2023 – Occupational Health and Safety (K3) Awards 2023
   PLN NP won 76 awards at the Occupational Health and Safety (K3) Awards 2023 organized by the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia. The awards cover four categories as follows:
   - Zero Accident achieved by 40 units
   - Occupational Health and Safety Management System (SMK3) achieved by 12 units
   - COVID-19 Prevention and Control achieved by 17 units
   - HIV/AIDS Prevention and Control achieved by 7 units

2. **29 September 2023 dan 6 Oktober 2023 – Penghargaan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) Subroto Award 2023**
   PLN NP berhasil meraih 12 (dua belas) penghargaan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) Subroto Award tahun 2023 dari Kementerian ESDM. Penghargaan tersebut meliputi:
   - PLTU Grid Code Sumatera Skala Besar: PLTU Tarahan
   - PLTU Grid Code Sumatera Skala Besar: PLTU Belitung
   - PLTU Grid Code Kalimantan: PLTU Kaltim Teluk
   - PLTU Grid Code Sulawesi: PLTU Punagaya Unit 1 dan 2
   - PLTU Grid Code Nusa Tenggara, Maluku dan Papua: PLTU Tidore
   - PLTG/GU Grid Code Sulawesi: PLTU Malea
   - PLTA Grid Code Jawa, Madura dan Bali Skala Besar: PLTA Sutani
   - PLTA Grid Code Jawa, Madura dan Bali Skala Kecil: PLTA Tulungagung
   - PLTA Grid Code Sumatera Skala Besar: PLTA Kota Panjang
   - PLTA Grid Code Sumatera Skala Menengah: PLTA Renun
   - PLTA Grid Code Sumatera Skala Kecil: PLTA Batusangi
   - PLTA Grid Code Sulawesi: PLTA Bakaru

2. September 29, 2023, and October 6, 2023 – Subroto Award 2023 for Electrical Safety (K2)
   PLN NP won 12 (twelve) awards for Electrical Safety (K2) Subroto Award 2023 from the Ministry of Energy and Mineral Resources. The awards include:
   - HPP Grid Code Sumatra Large Scale: Tarahan HPP
   - HPP Grid Code Sumatra Large Scale: Belitung HPP
   - HPP Grid Code Kalimantan: Kaltim Teluk HPP
   - HPP Grid Code Sulawesi: Punagaya HPP Unit 1 and 2
   - HPP Grid Code Nusa Tenggara, Maluku, and Papua: Tidore HPP
   - CCPP Grid Code Sulawesi: Malea CCPP
   - Grid Code Java HPP, Madura, and Bali Large Scale: Sutani HPP
   - HPP Grid Code Java, Madura, and Bali Small Scale: Tulungagung HPP
   - HPP Grid Code Sumatra Large Scale: Kota Panjang HPP
   - HPP Grid Code Sumatra Medium Scale: Renun HPP
   - HPP Grid Code Sumatra Small Scale: Batusangi HPP
   - HPP Grid Code Sulawesi: Bakaru HPP

3. **27 Oktober 2023 – *Culture & Green Festival* PLN Group 2023**
   PLN NP meraih 5 (lima) penghargaan dalam ajang *Culture & Green Festival* PLN Group 2023. Berikut adalah penghargaan yang diterima:
   - Juara 2 Best Culture Implementor kategori Unit/SHAP PLN
   - Juara 2 Inspirative Story Budaya
   - Juara 3 *Best Performance on Ranger Bootcamp*
   - Juara 1 Lomba Review Buku
   - Juara 2 Jingle Competition

4. **1 Desember 2023 – Naker** Award 2023
   PLN NP mendapat penghargaan Juara Teladan 2 pada kategori Olimpiade Pengupahan Berbasis Produktivitas (OPBP) dalam Naker Award 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. PLN NP dinilai sebagai perusahaan skala besar yang telah menerapkan sistem pengupahan berbasis produktivitas melalui struktur dan skala upah oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

3. **October 27, 2023 – *Culture & Green Festival* PLN Group 2023**
   PLN NP won 5 (five) awards at the *Culture & Green Festival* PLN Group 2023. The awards received are:
   - 2nd Place for Best Culture Implementor in the Unit/SHAP PLN category
   - 2nd Place for Inspirational Cultural Story
   - 3rd Place for Best Performance in Ranger Bootcamp
   - 1st Place in Book Review Competition
   - 2nd Place in Jingle Competition

4. **December 1, 2023 – Naker Award 2023**
   PLN NP received the 2nd Place Exemplary Award in the Productivity-Based Wage Olympics (OPBP) category at the Naker Award 2023 organized by the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia. PLN NP was recognized as a large-scale company that has implemented a productivity-based wage system through a structured and scaled wage system by the Ministry of Manpower.

Biaya yang Dikeluarkan terkait Kegiatan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Costs Incurred for Employment, Safety, and Health (K3) Activities

Biaya yang dianggarkan oleh Perusahaan untuk kegiatan yang terkait dengan tanggung jawab terhadap ketenagakerjaan tahun 2023 adalah sebesar Rp2,92 triliun, dengan realisasi sebesar Rp3,01 triliun (102,98%) meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp1,48 triliun. Biaya yang dikeluarkan meliputi gaji dan tunjangan; bonus dan insentif karyawan; imbalan kerja; pendidikan dan pelatihan; tunjangan kesehatan; serta biaya kepegawaian lainnya.

The budget allocated by the Company for activities related to employment responsibility in 2023 was Rp2.92 trillion, with actual expenditures amounting to Rp3.01 trillion (102.98%), an increase compared to 2022's Rp1.48 trillion. The expenses include salaries and allowances; employee bonuses and incentives; employee benefits; education and training; health benefits; and other personnel costs.

Laporan Keberlanjutan
Sustainability Report

PLN NP telah menyusun Laporan Keberlanjutan (Sustainability Reporting) yang memuat informasi terkait dengan pengelolaan dan kinerja aspek keberlanjutan termasuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan PLN NP dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Pedoman penyusunan Laporan ini mengacu pada peraturan dan standar pelaporan keberlanjutan sebagai berikut:

- GRI Standards, dimana PLN Nusantara Power telah melaporkan sesuai (in accordance) dengan GRI Standards untuk periode 1 Januari – 31 Desember 2021, dan menyertakan Pengungkapan Sektor Utilitas Listrik (Electric Utilities Sector Disclosure);
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/ POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik;
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (SEOJK) No. 16/SEOJK.04/2021 Tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
- The International Financial Reporting Standards (IFRS) Sustainability Disclosure Standards:
  - IFRS S1 General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information;
  - IFRS S2 Climate-related Disclosures and Industry-based Guidance on implementing Climate-related Disclosures (Electric Utilities & Power Generators), serta
- The Sustainability Accounting Standards Board (SASB) Standards
  - Infrastructure Sector: Electric Utilities & Power Generators.

Untuk informasi lebih lengkap terkait Laporan Keberlanjutan, dapat dilihat dalam buku terpisah dari Buku Laporan Tahunan ini.

PLN NP prepared a Sustainability Report which contains information related to the management and performance of sustainability aspects, including the implementation of PLN NP's social and environmental responsibilities in supporting the achievement of sustainable development goals (SDGs). The Company prepared this report refer to the following sustainability reporting regulations and standards as the guidelines:

- GRI Standards, in which PLN Nusantara Power has reported in accordance with the GRI Standards for the period of 1 January – 31 December 2021, and including the Electric Utilities Sector Disclosure;
- Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 51/ POJK.03/2017 on the Application of Sustainable Finance by Financial Services Institutions, Issuers, and Publicly Listed Companies;
- Circular Letter of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia (SEOJK) No. 16 /SEOJK.04/2021 on the Form and Content of Annual Report of Issuers or Public Companies;
- The International Financial Reporting Standards (IFRS) Sustainability Disclosure Standards:
  - IFRS S1 General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information;
  - IFRS S2 Climate-related Disclosures and Industry-based Guidance on implementing Climate-related Disclosures (Electric Utilities & Power Generators); also
- The Sustainability Accounting Standards Board (SASB) Standards
  - Infrastructure Sector: Electric Utilities & Power Generators.

More complete information regarding the Sustainability Report is available separately from this Annual Report Book.

Laporan Keuangan Audit

Audited Financial Statements

PT PLN NUSANTARA POWER
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

31 DESEMBER 2023/
31 DECEMBER 2023

PLN
Nusantara Power

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG
BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT REGARDING

TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2025

THE RESPONSIBILITY FOR THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS AT 31 DECEMBER 2025
AND FOR THE YEAR THEN ENDED

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/ *AND ITS SUBSIDIARIES*

Atas nama Direksi, kami yang bertanda tangan di bawah ini: / *On behalf of the Board of Directors, we, the undersigned:*

Nama	Nizly Firmansyah	Name
Alamat Kantor	Jl. Kolonel Sugiono No. 11, Surabaya	Office Address
Alamat Domisili	Jalan Lapangan Rusa No.88 RT 003 RW 001, Pasiegan, Gondol Timur, Tanjungsari Sidoarjo	Address of Domicile
Telepon	(031) 8293100	Telephone
Jabatan	Direktur Utama/President Director	Position
Nama	Dwi Hadono	Name
Alamat Kantor	Jl. Kolonel Sugiono No. 11, Surabaya	Office Address
Alamat Domisili	Jalan Pulau Tondoboto Blok A2 No.13 RT 004 RW 010, Jelambar, Pondok Gede, Bekasi	Address of Domicile
Telepon	(031) 8293100	Telephone
Jabatan	Direktur Keuangan/Finance Director	Position

Menyatakan bahwa:

1. Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT PLN Nusantara Power dan entitas anaknya ("Grup").
2. Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi pada laporan keuangan konsolidasian Grup telah dimuat secara lengkap dan benar.
   b. Laporan keuangan konsolidasian Grup tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material lain.
4. Direksi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Grup.

Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas nama dan mewakili Direksi:

Hereby that:

1. *The Board of Directors is responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT PLN Nusantara Power and its subsidiaries (the "Group").*
2. *The Group's consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*
3. *a. All information has been fully and correctly disclosed in the Group's consolidated financial statements.*
   b. The Group's consolidated financial statements do not contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts.
4. *The Board of Directors is responsible for the Group's internal control system.*

This statement is made truthfully.

For and on behalf of the Board of Directors:

Surabaya, 8 April 2026

Nizly Firmansyah
Direktur Utama
President Director

Dwi Hadono
Direktur Keuangan
Finance Director

PT PLN NUSANTARA POWER
Kantor Pusat : Jl. Kolonel Sugiono No.11, Surabaya - Indonesia 60231 ☎ 62-31-8293100 (hunting) Fax: 62-31-8293193
Kantor Jakarta : Gedung Office 18 Park, Lantai 2 KBCD-3, TB Simatupang No. 18, Jakarta Selatan DKI Jakarta 12530
Email : info@plnnusantarapower.co.id Website : www.plnnusantarapower.co.id

pwc

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
TO THE SHAREHOLDERS OF

PT PLN NUSANTARA POWER

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT PLN Nusantara Power dan entitas anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam paragraf "Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian" pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT PLN Nusantara Power and its subsidiaries (the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as at 31 December 2023, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the accompanied financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at 31 December 2023, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the "Auditors' responsibilities for the audit of the consolidated financial statements" paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of management and those charged with governance for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan
WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia
T. +62 21 5289 4000 / 5289 4001, F. +62 21 5289 2000 / 5289 2001, www.pwc.com/id

pwc

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan konsisnya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki niat untuk melikuidasi Grup atau menghentikan usaha, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melakukannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diharapkan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, merancang dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak mendeteksi kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan konsu, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau penyimpangan pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan keadaannya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan pengendalian internal Grup.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Auditors' responsibilities for the audit of the consolidated financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*

pwc

- Mengevaluasi kebijakan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang disusun oleh manajemen.
- Menyimpulkan kelayakan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kelangsungan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus mempertimbangkan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian menggambarkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi dan pelaksanaan audit grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*
- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan waktu yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

JAKARTA,
8 April 2024

Yadi, S.E., Ak., M.Ak., CPA
Izin Akuntan Publik Pengganti Kantor Akuntan Publik No. AP.0911

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 3/1 Schedule

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali nilai nominal dan data saham)

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, except for par value and share data)

	Catatan / Notes	31 Desember / December 2023	31 Desember / December 2022	1 Januari / January 2022	
ASET					ASSETS
ASET LANCAR					CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Cash and cash equivalents
Deposito berjangka	8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Time deposits
Piutang usaha pihak ketiga - setelah dikurangi penyisihan - bagian lancar	9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Receivables from third parties - net of allowance - current portion
Piutang usaha	9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Trade receivables
Piutang lain-lain - bagian lancar		[illegible]	[illegible]	[illegible]	Other receivables - current portion
Piutang kepada entitas terkait - bagian lancar	11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Receivables from joint venture - current portion
Persediaan	12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Inventories
Pajak dibayar di muka - bagian lancar	21a	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Prepaid taxes - current portion
Biaya dibayar di muka dan uang muka		[illegible]	[illegible]	[illegible]	Prepaid expenses and advances
Jumlah aset lancar		[illegible]	[illegible]	[illegible]	Total current assets
ASET TIDAK LANCAR					NON-CURRENT ASSETS
Aset tetap	13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Property, plant and equipment
Properti investasi	14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Investment properties
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama	10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Investments in associates and joint ventures
Piutang usaha pihak ketiga - setelah dikurangi penyisihan - bagian tidak lancar	9	[illegible]	[illegible]	-	Receivables from third parties - net of allowance - non-current portion
Aset pajak tangguhan - bersih	21e	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Deferred tax assets - net
Piutang kepada entitas terkait - bagian tidak lancar	11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Receivables from joint venture - non-current portion
Piutang lain-lain - bagian tidak lancar		[illegible]	[illegible]	[illegible]	Other receivables - non-current portion
Pajak dibayar di muka - bagian tidak lancar	21a	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Prepaid taxes - non-current portion
Aset tidak lancar lain		[illegible]	[illegible]	[illegible]	Other non-current assets
Jumlah aset tidak lancar		[illegible]	[illegible]	[illegible]	Total non-current assets
JUMLAH ASET		[illegible]	[illegible]	[illegible]	TOTAL ASSETS

*) Disajikan kembali (Lihat Catatan 2)

*) As restated (refer to Note 2)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 1/2 Schedule

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA 1 JANUARI, 31 DESEMBER 2021
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali nilai nominal dan data saham)

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2021
(Expressed in millions of Rupiah, except for par value and share data)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 2021	31 Desember/ December 2020	1 Januari/ January 2020	
EKUITAS DAN LIABILITAS					EQUITY AND LIABILITIES
LIABILITAS					LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK					CURRENT LIABILITIES
Utang usaha	18	1,771,303	1,427,117	10,812,084	Trade payables
Utang lain-lain	17	1,271,967	470,042	739,021	Other payables
Utang pajak lainnya	21c	182,833	121,888	128,121	Other taxes payable
Utang pajak penghasilan badan		3,833	61,024	19,338	Corporate income tax payable
Bagian masih harus dibayar		127,966	71,447	27,347	Contract expenses
Pinjaman dari pemegang saham - bagian jangka pendek	22a	387,314	391,332	330,878	Loans from a shareholder - short-term portion
Liabilitas sewa - bagian jangka pendek	19	214,331	165,918	12,333	Lease liabilities - short-term portion
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	19	849,394	795,388	702,193	Short-term employee benefits liabilities
Jumlah liabilitas jangka pendek		5,191,937	3,511,157	12,671,391	Total current liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG					NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	21d	10,320,010	10,038,408	10,360,342	Deferred tax liabilities - net
Pinjaman dari pemegang saham - bagian jangka panjang	22a	1,897,710	2,276,052	2,169,036	Loans from a shareholder - long-term portion
Liabilitas sewa - bagian jangka panjang	19	2,174,296	1,955,398	22,773	Lease liabilities - long-term portion
Liabilitas imbalan kerja	19	3,833,260	3,137,871	3,660,033	Employee benefits liabilities
Jumlah liabilitas jangka panjang		22,199,267	20,410,931	17,162,187	Total non-current liabilities
JUMLAH LIABILITAS		27,391,204	23,722,088	29,833,578	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS					EQUITY
Modal saham - nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham					Capital stock - par value of Rp500 (full amount) per share
Modal dasar - 31 Desember 2021: 1.334.000 (jutaan) saham; 31 Desember 2020 dan 1 Januari 2020: 34.000 (jutaan) saham					Authorized - 31 December 2021: 1,334,000 million shares; 31 December 2020 and 1 January 2020: 34,000 million shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 31 Desember 2021: 309,210 (jutaan) saham; 31 Desember 2020 dan 1 Januari 2020: 4,000 (jutaan) saham	23	154,605,248	2,000,000	2,000,000	Subscribed and fully paid - 31 December 2021: 309,210 million shares; 31 December 2020 and 1 January 2020: 4,000 million shares
Tambahan modal disetor	23	99,824,276	2,992,828	2,992,828	Additional paid-in capital
Ekuitas milik entitas induk		-	21,259,344	23,537,346	Equity of the parent entity
Selisih transaksi dengan kepentingan non-pengendali		93,713	93,713	93,713	Difference in transaction with non-controlling interest
Saldo laba					Retained earnings
Ditentukan penggunaannya		1,139,875	1,139,875	1,139,875	Appropriated
Tidak ditentukan penggunaannya		37,487,710	30,603,388	30,000,183	Unappropriated
Penghasilan komprehensif lain		21,382,411	21,384,805	21,088,333	Other comprehensive income
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik entitas induk		309,533,127	281,332,957	302,179,131	Equity attributable to owners of the parent
Kepentingan non-pengendali	25	388,697	376,176	312,163	Non-controlling interests
JUMLAH EKUITAS		309,922,824	281,709,133	302,491,294	TOTAL EQUITY
JUMLAH EKUITAS DAN LIABILITAS		337,314,028	305,431,221	332,324,872	TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

1 Disajikan kembali (lihat Catatan 2)

1 As restated (refer to note 2)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 2 Schedule

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022*	
PENDAPATAN USAHA				REVENUE
Penjualan tenaga listrik	31	87,897,148	73,993,175	Sales of electricity
Pendapatan usaha lainnya	32	3,370,459	3,216,313	Other operating revenue
Jumlah pendapatan usaha		91,273,607	75,209,488	Total revenue
BEBAN USAHA				OPERATING EXPENSES
Bahan bakar dan pelumas	33	(31,987,384)	(18,808,758)	Fuel and lubricants
Pemeliharaan	34	(3,888,751)	(3,230,140)	Maintenance
Penyusutan	13	(9,124,612)	(8,022,809)	Depreciation
Kepegawaian	35	(3,320,413)	(3,024,413)	Employee costs
Pembelian tenaga listrik	27	(947,168)	(1,398,399)	Purchased electricity
Lain-lain	36	(7,407,487)	(7,487,713)	Others
Jumlah beban usaha		(76,666,390)	(62,171,731)	Total operating expenses
LABA USAHA		14,607,221	13,038,813	OPERATING INCOME
Penghasilan keuangan		109,333	142,337	Finance income
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih		(77,862)	(889,862)	Gains (losses) on foreign exchange - net
Biaya keuangan		(382,772)	(372,488)	Finance costs
Bagian laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama	13	2,111,330	2,664,047	Share in net profit of associates and joint ventures
Beban (penghasilan) lain-lain - bersih		339,133	377,818	Other expenses/income - net
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		16,365,319	15,010,567	PROFIT BEFORE INCOME TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	21c	(2,722,696)	(2,538,479)	INCOME TAX EXPENSE
LABA TAHUN BERJALAN		13,642,623	12,472,118	PROFIT FOR THE YEAR
(Kerugian) penghasilan komprehensif lain tahun berjalan				Other comprehensive (loss)/income for the year
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				Items that may be reclassified subsequently to profit or loss
Bagian (kerugian) penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama	13	(153,027)	888,888	Share in other comprehensive (loss)/income from associates and joint ventures
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				Items that will not be reclassified to profit or loss
Revaluasi aset tetap	13	(1,334)	(7,334)	Revaluation of property, plant and equipment
Pengukuran kembali atas program manfaat pasti	19	27,196	884,334	Remeasurement of defined benefit plans
Beban manfaat pajak penghasilan terkait	21d	(5,440)	(176,867)	Related income tax expense/(benefit)
		16,419	703,133	
Kerugian penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak		(96,198)	(19,716)	Other comprehensive (loss)/income for the year after tax
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		13,546,425	12,452,402	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
Laba tahun berjalan diatribusikan kepada:				Profit for the year attributable to:
Pemilik entitas induk		13,610,588	12,433,618	Owners of the parent
Kepentingan non-pengendali		31,035	38,500	Non-controlling interests
LABA TAHUN BERJALAN		13,642,623	12,472,118	PROFIT FOR THE YEAR
Jumlah penghasilan komprehensif tahun yang dapat diatribusikan kepada:				Total comprehensive income for the year attributable to:
Pemilik entitas induk		13,515,137	12,413,911	Owners of the parent
Kepentingan non-pengendali		31,288	38,491	Non-controlling interests
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		13,546,425	12,452,402	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

* Disajikan kembali (lihat Catatan 2)

* As restated (refer to Note 2)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAK/ AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/ Schedule

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)	CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2023 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

[illegible]

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT PLN (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/PT PLN (PERSERO) AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 3.2 Schedule

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

PT PLN NUSANTARA POWER DAN SENTRAL ANAKPERUSAHAAN
Lampiran 4 Schedule

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)	31 Desember/ December 2022	31 Desember/ December 2021	CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	40,271,330	40,271,330	Cash receipts from customers
Pembayaran kas kepada pemasok, karyawan dan lainnya	(34,267,126)	(34,267,126)	Cash paid to suppliers, employees and others
Penerimaan bunga	212,897	212,897	Interest received
Pembayaran bunga	(333,843)	(333,843)	Interest expense paid
Pembayaran surat ketetapan pajak kurang bayar	(1,648)	-	Payments of tax assessment letter for underpayment
Penerimaan pengembalian atas surat ketetapan pajak kurang bayar	98,820	98,820	Receipts of refund tax assessment letter for underpayment
Penerimaan restitusi pajak penghasilan badan	313,779	313,779	Cash receipts for corporate income tax refund
Penerimaan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	103,314	103,314	Cash receipts for value added Taxes ("VAT") refund
Pembayaran pajak penghasilan badan dan pajak penghasilan final	(361,810)	(361,810)	Payments of corporate income tax and final income tax
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	3,734,713	3,734,713	Net cash provided by operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penerimaan dividen dari entitas asosiasi dan ventura bersama	188,820	188,820	Dividends received from associates and joint ventures
Penerimaan investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama	(10,000)	(10,000)	Additions of investments in associates and joint ventures
Penambahan piutang kepada ventura bersama	(1,000)	-	Additions of receivables from joint ventures
Penerimaan atas piutang kepada ventura bersama	1,000	1,000	Receipts of receivables from joint ventures
Perolehan aset tetap	(3,887,000)	(3,887,000)	Acquisition of property, plant and equipment
Perolehan aset takberwujud	(10,000)	(10,000)	Purchase of intangible assets
Pencairan deposito berjangka	10,000	10,000	Withdrawal of time deposits
Penempatan deposito berjangka	(10,000)	(10,000)	Placement of time deposits
Pencairan kewajiban bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	1,146	871	Withdrawal of restricted cash in banks and time deposits
Penempatan kewajiban bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	(1,146)	(871)	Placement of restricted cash in banks and time deposits
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(3,708,180)	(3,708,180)	Net cash used in investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan pinjaman dari pemegang saham	-	300,000	Proceeds of loans from a shareholder
Pembayaran pinjaman dari pemegang saham	(300,000)	(300,000)	Payments of loans from a shareholder
Penerimaan setoran modal dari kepentingan nonpengendali	7	-	Proceeds of capital injection from non-controlling interests
Pembayaran penambahan kepemilikan pada entitas anak dari kepentingan non-pengendali	-	(11,180)	Payments of additional ownership in a subsidiary from non-controlling interest
Penerimaan atas divestasi entitas anak	-	9,790	Receipts for divestments of a subsidiary
Pembayaran liabilitas sewa	(94,310)	(94,310)	Payments of lease liabilities
Kas (untuk) dari pendanaan (unum*)	-	(201,404)	Cash (paying for general funding activities*)
Pembayaran dividen oleh entitas anak kepada kepentingan non-pengendali	(1,890)	(79)	Payments of dividends by subsidiaries to non-controlling interests
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(396,193)	(296,193)	Net cash used in financing activities
(PENURUNAN)/KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(1,167,658)	1,310,410	NET (DECREASE)/INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	5,833,153	7,310,463	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	(5,211)	87,310	Effect of changes in foreign currency
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	4,660,304	5,833,153	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR

Untuk Catatan 33 untuk penyajian informasi arus kas Grup.

Refer to Note 33 for the presentation of the Group's cash flow information.

*) Disajikan sebagai Kas Neraca 3)
**) Kas yang untuk pendanaan umum yang tidak sehubungan dengan aktivitas dari bisnis atau fasilitas pengendali lagi atau pembiayaan lain

*) As stated note in Neraca 3)
**) Cash paying for general funding activities not in connection with activities of the business or financing facilities

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/1 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

PT PLN Nusantara Power ("Perusahaan") didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Notaris No. 16 tanggal 3 Oktober 1995, dari Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-12409-HT.01.01.TH.95 tanggal 3 Oktober 1995 serta diumumkan dalam Berita Negara No. 90 tanggal 10 November 1995, Tambahan No. 3299.

Anggaran Dasar Perusahaan terakhir diubah berdasarkan Akta Notaris No. 40 tanggal 29 Maret 2023, dari Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta, terkait dengan penambahan bidang usaha. Akta perubahan ini telah diterima dan dicatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-0020884.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 10 April 2023.

Perusahaan berdomisili di Surabaya dengan satuan-satuan usaha yang berlokasi di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Sumatra. Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Jl. Kalimalang Baru No. 11, Surabaya.

Pada tahun 2023, Perusahaan membentuk kantor strategis di Jakarta yang berlokasi di Gedung 18 Office Park lantai 2 dan 5, Jl. TB Simatupang No. 18, Kebagusan, Jakarta Selatan.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah untuk menyelenggarakan usaha kelistrikan berdasarkan prinsip industri dan niaga yang sehat yang mencakup aktivitas-aktivitas sebagai berikut:

a. Pembangkitan tenaga listrik;
b. Konstruksi bangunan elektrikal;
c. Pemasangan peralatan kelistrikan;
d. Pemeliharaan dan/atau pengoperasian peralatan kelistrikan; dan
e. Perdagangan dan/atau kegiatan usaha pendukung dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan termasuk memberikan penugasan kepada entitas anaknya.

Perusahaan tergabung dalam kelompok usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara ("PLN").

1. GENERAL

a. Establishment and general information

PT PLN Nusantara Power ("the Company") was established in Jakarta based on Notarial Deed No. 16 dated 3 October 1995 of Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notary in Jakarta. The deed of establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. C2-12409-HT.01.01.TH.95 dated 3 October 1995 and was published in State Gazette No. 90 dated 10 November 1995, Supplement No. 3299.

The Articles of Association of the Company were recently amended by Notarial Deed No. 40 dated 29 March 2023 of Muhammad Hanafi, S.H., Notary in Jakarta, regarding additional business activities. This change was received and recorded by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree Letter No. AHU-0020884.AH.01.02.TAHUN 2023 dated 10 April 2023.

The Company is domiciled in Surabaya with business units located in Java, Kalimantan, Sulawesi, Maluku and Sumatra. The Company's head office is located in Jl. Kalimalang Baru No. 11, Surabaya.

In 2023, the Company established a strategic office in Jakarta located at 18 Office Park Building, 2nd and 15th floor, Jl. TB Simatupang No. 18, Kebagusan, Jakarta Selatan.

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of its activities is to engage in the electric power industry business, based on the principles of competitive industry and commerce, consisting of the following activities:

a. Power plants;
b. Electrical buildings construction;
c. Installation of electrical equipments;
d. Maintenance and/or operation of electrical equipments; and
e. Sales and/or other supporting business activities in order to optimize the available resources of the Company, including delegating assignments to its subsidiaries.

The Company is one of the group of companies owned by Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara ("PLN").

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 6/2 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, jumlah karyawan tetap Perusahaan dan entitas anaknya (secara keseluruhan dirujuk sebagai "Grup") masing-masing sebanyak 12.674 karyawan (tidak diaudit) dan 10.082 karyawan (tidak diaudit).

b. Pembentukan struktur subholding

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") Republik Indonesia No. S-666/MBU/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 perihal Persetujuan Pembentukan Holding dan Subholding PLN Masa/Tahap Legal End-State serta Restrukturisasi dan Pengalihan Harta yang dituangkan dalam Akta Notaris No. 70 tanggal 30 Desember 2022 dari Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta, PLN membentuk empat subholding yang terdiri dari:

1. Dua subholding di bidang pembangkitan tenaga listrik, yaitu PT PLN Nusantara Power ("PNP") (sebelumnya Pembangkitan Jawa Bali) dan PT Indonesia Power atau disebut PLN Indonesia Power ("PIP"), nama merek yang digunakan;
2. Satu subholding di bidang penyediaan dan logistik energi primer, yaitu PT PLN Energi Primer Indonesia ("EPI") (sebelumnya PT PLN Batubara); dan
3. Satu subholding untuk kegiatan usaha di luar pembangkitan, transmisi, dan distribusi ketenagalistrikan (Beyond kWh), yaitu bernama PT Indonesia Comnet Plus ("ICON").

Sebagai tindak lanjut pembentukan subholding PLN tersebut sesuai dengan Akta Notaris No. 76 tanggal 30 Desember 2022, dari Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta tentang Persetujuan atas Pemisahan Kegiatan Usaha Pembangkitan Listrik PLN kepada Perusahaan, yang menyatakan bahwa sebagian aset dan liabilitas kegiatan usaha pembangkitan listrik PLN akan beralih secara hukum menjadi hak serta kewajiban dari Perusahaan yang menerima pemisahan sejak tanggal efektif pemisahan di 1 Januari 2023.

a. *Establishment and general information (continued)*

As at 31 December 2023 and 2022, the Company and its subsidiaries (collectively referred to as the "Group") had a total permanent number of employees of 12,674 (unaudited) and 10,082 (unaudited), respectively.

b. *Establishment of subholding structures*

Based on Decision Letter of the Minister of State-Owned Enterprise ("SOE") of the Republic of Indonesia No. S-666/MBU/12/2022 dated 30 December 2022, regarding the Approval for The Establishment of Holding and Subholding of PLN for the Legal End-State Period/Stage as well as the Restructuring and Transfer of Assets as stated in the Notarial Deed No. 70, dated 30 December 2022, of Muhammad Hanafi, S.H., Notary in Jakarta, PLN established four subholdings, consisting of:

1. *Two subholdings in the power generation sector, namely PT PLN Nusantara Power ("PNP") (formerly Pembangkitan Jawa Bali) and PT Indonesia Power or namely PLN Indonesia Power ("PIP"), the branding name used;*
2. *One subholding in the primary energy procurement and logistics sector, namely PT PLN Energi Primer Indonesia ("EPI") (formerly PT PLN Batubara); and*
3. *One subholding for business activities outside of power generation, transmission, and distribution (Beyond kWh), namely PT Indonesia Comnet Plus ("ICON").*

As a follow-up to the establishment of the PLN subholding in accordance with Notarial Deed No. 76 dated 30 December 2022, from Muhammad Hanafi, S.H., Notary in Jakarta regarding Approval of Separation of PLN's Power Generation Business Activities to the Company, it was stated that several assets and liabilities of PLN's power generation business activities will legally be transferred to become the rights and obligations of the Company that received the separation from the effective date of the separation on 1 January 2023.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 6/1 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

a. Susunan pengurus dan informasi lain

Susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

	2023	2022	
Komisaris Utama	Biy Hanjeti	Biy Hanjeti	President Commissioner
Komisaris	Kenedy	Kenedy(*)	Commissioners
	Ida Nuryatin Finahari(**)	Jaman P. Hutajulu	
	Hendra Iawahyudi	Hendra Iawahyudi	
	Emir Hasana Hardaka	Emir Hasana Hardaka	
	Begue Purwitia	Begue Purwitia	

(*) Berdasarkan Akta Notaris No. 3 tanggal 4 Januari 2023, dari Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta.
(**) Berdasarkan Akta Notaris No. 8 tanggal 10 Juli 2023, dari Shahreza Arnaz, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Susunan Direksi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2023	2022	
Direktur Utama	Ruly Firmansyah	Ruly Firmansyah	President Director
Direktur Sumber Daya Manusia dan Administrasi	Karyawan Aji	Karyawan Aji	Director of Human Resources and Administration
Direktur Pengembangan dan Niaga	Muhamad Reza	Muhamad Reza	Director of Development and Commerce
Direktur Keuangan	Dwi Hartono	Dwi Hartono	Director of Finance
Direktur Operasi Pembangkit Gas	Komang Permita(*)	M. Yossy Novel A.	Director of Operation Gas Power Plant
Direktur Operasi Pembangkit Batubara	Rachmanse Indarto	Rachmanse Indarto	Director of Operation Coal Power Plant

(*) Berdasarkan Akta Notaris No. 4 tanggal 31 Januari 2023, dari Shahreza Arnaz, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Susunan Komite Audit pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Ketua	Kenedy	Chairman
Sekretaris/Anggota	Sovianti Pahrizal	Secretary/Members
Anggota	Andi Hasanda	Members

1. GENERAL (continued)

c. Management and other information

The composition of the Company's Board of Commissioners was as follows:

The composition of the Company's Board of Directors as at 31 December 2023 and 2022 was as follows:

(*) Based on Notarial Deed No. 3 dated 4 January 2023, of Muhammad Hanafi, S.H., Notary in Jakarta.
(**) Based on Notarial Deed No. 8 dated 10 July 2023, of Shahreza Arnaz, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta.

(*) Based on Notarial Deed No. 4 dated 31 January 2023, of Shahreza Arnaz, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta.

The composition of the Company's Audit Committee as at 31 December 2023 and 2022 was as follows:

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/4 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("PSAK") BARU DAN AMANDEMEN

Penerapan dari amandemen terhadap standar akuntansi, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2023 tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Grup dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan konsolidasian pada tahun berjalan.

- Amandemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan - Pengungkapan Kebijakan Akuntansi"
- Amandemen PSAK No. 16, "Aset Tetap - Hasil Sebelum Penggunaan yang Dimaksudkan"
- Amandemen PSAK No. 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan - Definisi Estimasi Akuntansi"
- Amandemen PSAK No. 46, "Pajak Penghasilan - Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal"
- Amandemen PSAK No. 46, "Pajak Penghasilan - Reformasi Pajak Internasional - Ketentuan Model Pilar Dua"

Standar baru dan amandemen yang telah diterbitkan, namun berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023, tapi penerapan dini diperkenankan, adalah sebagai berikut:

- PSAK No. 74, "Kontrak Asuransi"
- Amandemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan - Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang"
- Amandemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan - Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan"
- Amandemen PSAK No. 2, "Laporan Arus Kas"
- Amandemen PSAK No. 10, "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing - Kekurangan Kelakukanan"
- Amandemen PSAK No. 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan - Pengaturan Pembiayaan Pemasok"
- Amandemen PSAK No. 73, "Sewa - Liabilitas Sewa dalam Jual dan Sewa-Balik"
- Amandemen PSAK No. 74, "Kontrak Asuransi terkait Penerapan Awal PSAK No. 74 dan PSAK No. 71 - Informasi Komparatif"

Standar baru dan amandemen di atas berlaku efektif mulai 1 Januari 2024, kecuali untuk PSAK No. 74, Amandemen PSAK No. 10 dan Amandemen PSAK No. 74 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2025, tetapi penerapan dini diperkenankan.

2. NEW AND AMENDMENTS STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARD ("SFAS")

The adoption of the following amendments to accounting standards which are effective from 1 January 2023 did not result in substantial changes to the Group's accounting policies and had no material effect on the amounts reported in the consolidated financial statements for the current year:

- Amendment to SFAS No. 1, "Presentation of Financial Statements - Disclosure of Accounting Policies"
- Amendment to SFAS No. 16, "Property, Plant, and Equipment - Proceeds before Intended Use"
- Amendment to SFAS No. 25, "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors - Definition of Accounting Estimates"
- Amendment to SFAS No. 46, "Income Taxes - Deferred Tax related to Assets and Liabilities Arising from a Single Transaction"
- Amendment to SFAS No. 46, "Income Taxes - International Tax Reform - Pillar Two Model Rules"

New standards and amendments issued but only effective for financial years beginning on or after 1 January 2023, but early adoption is permitted, are as follows:

- SFAS No. 74, "Insurance Contracts"
- Amendment to SFAS No. 1, "Presentation of Financial Statements - Classification of Liabilities as Current or Non-Current"
- Amendment to SFAS No. 1, "Presentation of Financial Statements - Non-Current Liabilities with Covenants"
- Amendment to SFAS No. 2, "Statement of Cash Flows"
- Amendment to SFAS No. 10, "The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates - Lack of Exchangeability"
- Amendment to SFAS No. 60, "Financial Instruments: Disclosure - Supplier Finance Arrangements"
- Amendment to SFAS No. 73, "Leases - Lease Liability in a Sale and Leaseback"
- Amendment to SFAS No. 74, "Insurance Contracts regarding Initial Application of SFAS No. 74 and SFAS No. 71 - Comparative Information"

The above new standard and amendments are effective beginning 1 January 2024, except for SFAS No. 74, Amendment to SFAS No. 10 and Amendment to SFAS No. 74 which are effective beginning 1 January 2025, but early adoption is permitted.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/5 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("PSAK") BARU DAN AMANDEMEN (lanjutan)

Pada tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, Grup sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru, amandemen dan revisi pada laporan keuangan konsolidasian Grup.

Mulai 1 Januari 2024, referensi terhadap masing-masing PSAK dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") akan diubah sebagaimana diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

2. NEW AND AMENDMENTS STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARD ("SFAS") (continue)

As at the completion date of these consolidated financial statements, the Group is evaluating the potential impact of these new standards, amendments and revisions to the Group's consolidated financial statements.

Beginning 1 January 2024, references to the individual SFAS and Interpretations of Financial Accounting Standards ("IFAS") will be changed as published by Indonesian Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi material yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup. Kebijakan ini telah diaplikasikan secara konsisten terhadap semua akun yang disajikan, kecuali dinyatakan lain.

a. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan ("SAK")

Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

b. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian adalah dasar akrual. Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha dan dengan pengukuran nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia memerlukan penggunaan estimasi dan asumsi akuntansi penting tertentu. Penyusunan laporan keuangan juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area-area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi, atau area dimana asumsi dan estimasi yang berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan dalam Catatan 4.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION

Presented below are the material accounting policies adopted in preparing the consolidated financial statements of the Group. These policies have been consistently applied to all of the years presented unless otherwise stated.

a. Compliance with the Financial Accounting Standards ("FAS")

The Group's consolidated financial statements have been prepared in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards.

b. Basis of preparation of the consolidated financial statements

The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, are prepared on the accrual basis of accounting. The preparation and presentation of the consolidated financial statements are based on a going concern assumption and the measurement basis is historical cost except for certain accounts that have been measured on the basis described in the related accounting policies.

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates and assumptions. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Group's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements are disclosed in Note 4.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAK/AND /TS SUBSIDIARIES

Lampiran 6/8 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

a. Prinsip-prinsip konsolidasian

1.1. Konsolidasi

Entitas anak merupakan semua entitas (termasuk entitas terstruktur), dimana Grup memiliki pengendalian. Grup mengendalikan suatu entitas ketika Grup memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan suatu entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas entitas tersebut.

Entitas anak dikonsolidasi sejak tanggal pengendalian beralih kepada Grup dan tidak lagi dikonsolidasi sejak tanggal hilangnya pengendalian.

Saldo, transaksi, penghasilan dan beban intra kelompok usaha dieliminasi. Keuntungan dan kerugian hasil dari transaksi intra kelompok usaha yang diakui dalam aset juga dieliminasi. Kebijakan akuntansi entitas anak telah diubah sepenuhnya untuk memastikan konsistensi penerapan kebijakan oleh Grup.

1.2. Akuisisi

Grup menerapkan metode akuisisi untuk mencatat setiap kombinasi bisnis. Imbalan yang dialihkan untuk mengakuisisi entitas anak adalah nilai wajar seluruh aset yang dialihkan, liabilitas yang diakui oleh pihak pengakuisisi kepada pemilik sebelumnya dari entitas yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup. Imbalan yang dialihkan termasuk nilai wajar setiap aset dan liabilitas yang dihasilkan dari suatu kesepakatan imbalan kontinjensi. Aset teridentifikasi, liabilitas dan liabilitas kontinjensi yang diambil alih, yang diperoleh dalam kombinasi bisnis diukur pada awalnya sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

a. Principles of consolidation

1.1. Consolidation

Subsidiaries are all entities (including structured entities), over which the Group has control. The Group controls an entity when the Group is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the entity.

Subsidiaries are consolidated from the date on which control is transferred to the Group and are de-consolidated from the date on which that control ceases.

Intragroup balances, transactions, income and expenses are eliminated. Profits and losses resulting from intragroup transactions that are recognised in assets are also eliminated. The accounting policies of subsidiaries have been amended where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.

1.2. Acquisition

The Group applies the acquisition method to account for business combinations. The consideration transferred for the acquisition of a subsidiary is the fair value of the assets transferred, the liabilities incurred to the former owners of the acquired entity and the equity interests issued by the Group. The consideration transferred is the fair value of any asset or liability resulting from a contingent consideration arrangement. Identifiable assets acquired, liabilities and contingent liabilities assumed in a business combination are measured initially at their fair values as at the acquisition date.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAK/AND /TS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/7 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

a. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

1.2. Akuisisi (lanjutan)

Grup mengakui kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi, baik sebesar nilai wajar atau sebesar bagian proporsional kepentingan non-pengendali atas aset neto teridentifikasi pihak yang diakuisisi. Kepentingan non-pengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Biaya terkait akuisisi dibebankan pada saat terjadinya.

Jika kombinasi bisnis dipercan secara bertahap, Grup akan mengukur kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki pada pihak yang diakuisisi sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan, jika ada, dalam laba rugi. Imbalan kontinjensi yang masih harus dialihkan oleh Grup diakui sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi. Perubahan selanjutnya atas nilai wajar imbalan kontinjensi yang diakui sebagai aset atau liabilitas dan dicatat dalam laba rugi. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas.

Selisih lebih antara imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan non-pengendali dalam pihak yang diakuisisi, dan nilai wajar pada tanggal akuisisi dari kepemilikan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi, dibandingkan dengan nilai wajar bagian Grup atas aset bersih teridentifikasi yang diakuisisi, dicatat sebagai goodwill. Jika jumlah tersebut lebih kecil dari nilai wajar atas aset bersih teridentifikasi entitas anak yang diakuisisi dan pengukuran atas seluruh jumlah tersebut telah ditelaah, dalam hal pembelian dengan diskon, selisih tersebut diakui secara langsung dalam laba rugi.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

a. Principles of consolidation (continued)

1.2. Acquisition (continued)

The Group recognises any non-controlling interest in the acquiree on an acquisition-by-acquisition basis, either at fair value or at the non-controlling interest's proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. Non-controlling interests are reported as equity in the consolidated statements of financial position, separate from the owners of the parent entity.

Acquisition-related costs are expensed as incurred.

If the business combination is achieved in stages, the Group will remeasure its previously held equity interest in the acquiree at its fair value at its acquisition date and recognise the resulting gain or loss, if any, in profit or loss. Any contingent consideration to be transferred by the Group is recognised at its fair value as at the acquisition date. Subsequent changes to the fair value of the contingent consideration that is deemed to be an asset or a liability are recognised in profit or loss. A contingent consideration that is classified as equity is not remeasured, and its subsequent settlement is accounted for within equity.

The excess of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interests in the acquiree and the acquisition-date fair value of any previous equity interest in the acquiree over the fair value of the Group's share of the identifiable net assets acquired is recorded as goodwill. If those amounts are less than the fair value of the net identifiable assets of the subsidiary acquired and the measurement of all amounts has been reviewed, in the case of a bargain purchase, the difference is recognised directly in profit or loss.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN SENTRAS ANAKPERUSAHAAN
Lampiran 5/6 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

ii. Perubahan kepemilikan atas entitas anak tanpa kehilangan pengendalian

Transaksi dengan kepentingan non-pengendali yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dibayarkan dan bagiannya atas jumlah tercatat aset neto yang diperoleh dicatat dalam ekuitas. Keuntungan atau kerugian atas pelepasan kepada kepentingan non-pengendali juga dicatat pada ekuitas.

iii. Pelepasan entitas anak

Ketika Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak, Grup menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap goodwill) dan liabilitas entitas anak pada nilai tercatatnya ketika pengendalian hilang. Jumlah yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain juga direklasifikasi ke laba rugi atau dialihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh PSAK lain.

Sisa investasi pada entitas anak tersebut diakui sebesar nilai wajarnya. Selisih perbedaan antara nilai tercatat atas investasi pada tanggal hilangnya pengendalian dan nilai wajarnya diakui dalam laba rugi.

iv. Akuntansi atas entitas asosiasi dan ventura bersama

Entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana Grup mempunyai pengaruh signifikan, tetapi tidak mengendalikan, dan biasanya Grup memiliki 20% atau lebih hak suara, tetapi tidak melebihi 50% hak suara. Investasi pada entitas asosiasi dicatat pada laporan keuangan konsolidasian menggunakan metode ekuitas dikurangi kerugian penurunan nilai, jika ada.

Ventura bersama merupakan pengaturan bersama antara beberapa pihak yang melakukan kesepakatan pengendalian bersama yang memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Ventura bersama ini menggunakan metode ekuitas dikurangi kerugian penurunan nilai, jika ada.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

c. Principles of consolidation (continued)

ii. Changes in ownership interest in subsidiaries without loss of control

Transactions with non-controlling interests that do not result in a loss of control are accounted for as equity transactions. The difference between the fair value of any consideration paid and the relevant share acquired of the carrying amount of net assets of the subsidiary is recorded in equity. Gains or losses on disposals to non-controlling interests are also recorded in equity.

iii. Disposal of subsidiaries

When the Group loses control of a subsidiary, the Group derecognises the assets (including any goodwill) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts as at the date on which control is lost. Amounts previously recognised in other comprehensive income are also reclassified to profit or loss or transferred directly to retained earnings if required under other SFAS.

Any investment retained in the former subsidiary is recognised at its fair value. The difference between the carrying amount of the investment retained at the date when the control is lost and its fair value is recognised in profit or loss.

iv. Accounting for associates and joint ventures

An associate is an entity over which the Group has significant influence, but not control, generally accompanied by a shareholding giving rise to voting rights of 20% or greater but not exceeding 50%. Investments in an associate are accounted for in the consolidated financial statements using the equity method less impairment losses, if any.

A joint venture is a joint arrangement in which the parties that share joint control have rights to the net assets of the arrangement. Joint ventures are accounted for using the equity method less impairment losses, if any.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN SENTRAS ANAKANYAIANG ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/0 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

iv. Akuntansi atas entitas asosiasi dan ventura bersama (lanjutan)

- Akuisisi

Investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diserahkan, instrumen ekuitas yang diterbitkan atau liabilitas yang timbul atau diambil alih pada tanggal akuisisi, ditambah biaya yang berhubungan langsung dengan akuisisi.

Goodwill pada akuisisi entitas asosiasi atau ventura bersama merupakan selisih lebih yang terlebih dahulu dengan biaya perolehan investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama dengan bagian Grup atas nilai wajar neto aset teridentifikasi dari entitas asosiasi atau ventura bersama dan dimasukkan dalam jumlah tercatat investasi.

- Metode ekuitas

Dalam menerapkan metode ekuitas, bagian Grup atas laba rugi entitas asosiasi atau ventura bersama setelah perolehan diakui dalam laba rugi, dan bagian Grup atas penghasilan komprehensif lain setelah tanggal perolehan diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Perubahan dari penerimaan distribusi dari entitas asosiasi atau ventura bersama setelah tanggal perolehan disesuaikan terhadap nilai tercatat investasi.

Jika bagian Grup atas rugi entitas asosiasi atau ventura bersama sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi atau ventura bersama, termasuk piutang tidak lancar tanpa jaminan, maka Grup menghentikan pengakuan bagiannya atas rugi lebih lanjut, kecuali Grup memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atau telah melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi atau ventura bersama.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

c. Principles of consolidation (continued)

iv. Accounting for associates and joint ventures (continued)

- Acquisitions

Investment in an associate or a joint venture is initially recognised at cost. The cost of an acquisition is measured at the fair value of the assets transferred, equity instruments issued or liabilities incurred or assumed as at the date of exchange, plus costs directly attributable to the acquisition.

Goodwill on the acquisition of an associate or a joint venture represents the excess of the cost of the acquisition of the associate or joint venture over the Group's share of the fair value of the identifiable net assets of the associate or joint venture and is included in the carrying amount of the investment.

- Equity method of accounting

In applying the equity method of accounting, the Group's share of its associate's or joint venture's post-acquisition profit or loss is recognised in profit or loss and its share of post-acquisition other comprehensive income is recognised in other comprehensive income.

These post-acquisition movements and distributions received from an associate or a joint venture are adjusted against the carrying amounts of the investment.

When the Group's share of the losses of an associate or a joint venture equals or exceeds its interest in the associate or joint venture, including any other unsecured, non-current receivables, the Group does not recognise further losses, unless it has obligations to make or has made payments on behalf of the associate or joint venture.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN SENTRAS ANAKPERUSAHAAN
Lampiran B 10 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

iv. Akuntansi atas entitas asosiasi dan ventura bersama (lanjutan)

- Metode ekuitas (lanjutan)

Keuntungan yang belum direalisasi atas transaksi antara Grup dengan entitas asosiasi atau ventura bersama dieliminasi sebesar bagian Grup dalam entitas asosiasi atau ventura bersama tersebut. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti penurunan nilai atas aset yang ditransfer. Kebijakan akuntansi entitas asosiasi atau ventura bersama akan disesuaikan, apabila diperlukan, agar konsisten dengan kebijakan akuntansi Grup.

Dividen yang akan diterima dari entitas asosiasi atau ventura bersama diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menentukan apakah terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai atas investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama. Jika bukti tersebut ada, maka Grup menghitung besarnya penurunan nilai sebagai selisih antara jumlah yang terpulihkan dan nilai tercatat atas investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama dan mengakui selisih tersebut pada laba rugi.

- Pelepasan

Investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama dihentikan pengakuannya apabila Grup tidak lagi memiliki pengaruh signifikan dan Grup mengukur investasi yang tersisa sebesar nilai wajar. Selisih antara jumlah tercatat investasi yang tersisa pada tanggal hilangnya pengaruh signifikan dan nilai wajarnya diakui dalam laba rugi.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

c. Principles of consolidation (continued)

iv. Accounting for associates and joint ventures (continued)

- Equity method of accounting (continued)

Unrealised gains on transactions between the Group and its associate or joint venture are eliminated to the extent of the Group's interest in the associate or joint venture. Unrealised losses are also eliminated unless the transaction provides evidence of impairment of the asset being transferred. The accounting policies of the associate or joint venture have been changed where necessary to ensure consistency with the accounting policies adopted by the Group.

Dividend receivables from an associate or a joint venture are recognised as reductions in the carrying amount of the investment.

At each reporting date, the Group determines whether there is any objective evidence that the investment in an associate or joint venture is impaired. If any such evidence exists, the Group calculates the amount of the impairment as the difference between the recoverable amount of the associate or the joint venture and its carrying amount and recognises the amount in profit or loss.

- Disposals

An investment in an associate or a joint venture is derecognised when the Group loses significant influence and any retained equity interest in the entity is remeasured at its fair value. The difference between the carrying amount of the retained interest at the date when significant influence is lost and its fair value is recognised in profit or loss.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN SENTRAS ANAKPERUSAHAAN/ AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5.11 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

iv. Akuntansi atas entitas asosiasi dan ventura bersama (lanjutan)

- Pelepasan (lanjutan)

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari pelepasan sebagian atau dilusi yang timbul pada investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama dimana pengaruh signifikan masih dipertahankan diakui dalam laba rugi dan hanya suatu bagian proporsional atas jumlah yang telah diakui sebelumnya pada penghasilan komprehensif lain yang direklasifikasi ke laba rugi.

d. Penjabaran mata uang asing

i. Mata uang fungsional dan penyajian

Akun-akun yang disertakan dalam laporan keuangan setiap entitas anggota Grup, diukur menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas tersebut beroperasi ("mata uang fungsional"). Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah Indonesia ("Rp"), yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan penyajian Grup.

ii. Transaksi dan saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan menjadi mata uang fungsional menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal pelaporan, setiap aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing menggunakan kurs yang berlaku pada akhir tahun pelaporan diakui dalam laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, kurs konversi yang digunakan Grup untuk mata uang Dolar Amerika Serikat ("US$") adalah masing-masing Rp15.439 dan Rp15.592.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

c. Principles of consolidation (continued)

iv. Accounting for associates and joint ventures (continued)

- Disposals (continued)

Gains and losses arising from the partial disposal or dilution of an investment in an associate and joint venture in which significant influence is retained are recognised in profit or loss and only a proportionate share of the amount previously recognised in other comprehensive income is reclassified to profit or loss, where appropriate.

d. Foreign currency transactions

i. Functional and presentation currency

Items included in the financial statements of each of the Group's entities are measured using the currency of the primary economic environment in which the relevant entity operates (the "functional currency"). The consolidated financial statements are presented in Indonesian Rupiah ("Rp"), which is the Company's functional currency and the Group's presentation currency.

ii. Transactions and balances

Foreign currency transactions are translated into the functional currency using the exchange rates prevailing as at the date of the transactions. As at the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currency are adjusted to reflect the prevailing exchange rates at such a date. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at year-end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognised in profit or loss.

The conversion rates used by the Group on 31 December 2023 and 2022 for United States Dollar ("US$") are Rp15.439 and Rp15.592, respectively.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN SENTRAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/12 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

a. Transaksi dengan pihak berelasi

Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sesuai yang didefinisikan oleh PSAK No. 7, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi" sebagai berikut:

(a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
  (i) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
  (ii) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
  (iii) Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

(b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
  (i) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
  (ii) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
  (iii) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
  (iv) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
  (v) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
  (vi) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a); atau
  (vii) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

a. Transactions with related parties

The Group has transactions with related parties as defined under PSAK No. 7, "Related Party Disclosures" as follows:

(a) A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:
  (i) Has control or joint control over the reporting entity;
  (ii) Has significant influence over the reporting entity; or
  (iii) A member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

(b) An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions apply:
  (i) The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);
  (ii) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);
  (iii) Both entities are joint ventures of the same third party;
  (iv) One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
  (v) The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of the employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;
  (vi) The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a); or
  (vii) A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity);

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ANAK PERUSAHAAN/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/13 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

a. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendaliakan bersama, atau dipengaruhi oleh Pemerintah. Pemerintah mengacu kepada instansi Pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah termasuk entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan yang relevan.

f. Aset keuangan

i. Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran

Grup mengklasifikasikan aset keuangan dalam kategori berikut ini:

- aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortasasi dan
- aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Klasifikasi tersebut tergantung pada model bisnis Grup untuk mengelola aset keuangan dan persyaratan kontraktual arus kas apakah penentuan arus kasnya semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Grup menentukan klasifikasi aset keuangan pada pengakuan awal.

(i) Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortasasi

Klasifikasi ini berlaku untuk instrumen utang yang dikelola dalam model bisnis 'dimiliki untuk mendapatkan arus kas' dan memiliki arus kas yang memenuhi kriteria 'semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga'.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

a. Transactions with related parties (continued)

A Government related entity is an entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by the Government. Government refers to Government agencies and similar bodies whether local, national or international.

Government-related entities include entities that are controlled or significantly influenced by the Ministry of Finance or Local Governments being the shareholders of the entity or an entity controlled by the Government of the Republic of Indonesia, represented by the Ministry of SOEs as shareholder's representative.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant Notes.

f. Financial assets

i. Classification, recognition and measurement

The Group classifies its financial assets into the following categories:

- financial assets measured at amortised cost and
- financial assets measured at fair value either through profit or loss ("FVTPL") or through other comprehensive income ("FVOCI").

The classification depends on the Group's business model and the contractual terms of the cash flows when determining whether their cash flows are solely payments of principal and interest ("SPPI").

The Group determines the classification of its financial assets at initial recognition.

(i) Financial assets measured at amortised cost

This classification applies to debt instruments which are held under a "hold to collect" business model and which have cash flows that meet the SPPI criteria.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran D14 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Aset keuangan (lanjutan)

i. Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

(i). Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

Pada pengakuan awal, piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan, diakui sebesar harga transaksi. Aset keuangan lainnya awalnya diakui sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi yang terkait. Aset keuangan ini selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan atau kerugian pada penghentian atau modifikasi aset keuangan yang diukur yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada laba rugi.

(ii). Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan tertentu. Dalam semua kasus, biaya transaksi dibebankan pada laba rugi.

- Instrumen utang yang tidak memiliki kriteria biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Keuntungan atau kerugian nilai wajar selanjutnya akan diakui pada laba rugi.

- Investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dimana pilihan penghasilan komprehensif lain tidak berlaku. Keuntungan atau kerugian nilai wajar dan penghasilan dividen terkait diakui pada laba rugi.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

f. Financial assets (continued)

i. Classification, recognition and measurement (continued)

(i). Financial assets measured at amortised cost (continued)

At initial recognition, trade receivables that do not have a significant financing component are recognised at their transaction price. Other financial assets are initially recognised at fair value plus related transaction costs. They are subsequently measured at amortised cost using the effective interest method. Any gains or losses on derecognition or modification of a financial asset held at amortised cost are recognised in profit or loss.

(ii). Financial assets measured at FVTPL

The classification applies to the following financial assets. In all cases, transaction costs are immediately expensed in profit or loss.

- Debt instruments that do not meet the criteria of amortised cost or FVOCI. Subsequent fair value gains or losses are recognised in profit or loss.

- Equity investments that are held for trading or where FVOCI election has not been applied. All fair value gains or losses and related dividend income are recognised in profit or loss.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN SENTRAS ANAKPERUSAHAAN / PT PLN NUSANTARA POWER AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5.15 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Aset keuangan (lanjutan)

i. Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

(c). Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (lanjutan)

- Derivatif yang bukan merupakan instrumen lindung nilai. Keuntungan atau kerugian nilai wajar selanjutnya diakui pada laba rugi.

- Aset keuangan dengan derivatif melekat dipertimbangkan secara keseluruhan aset. Menentukan apakah arus kasnya semata-mata merupakan pembayaran pokok dan bunga.

(d). Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan berikut ini.

- Instrumen utang yang dikelola dengan model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual dan di mana arus kasnya memenuhi kriteria "semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga".

Perubahan nilai wajar aset keuangan ini diakui pada penghasilan komprehensif lain, kecuali pengakuan keuntungan atau kerugian penurunan nilai, pendapatan bunga (termasuk biaya transaksi menggunakan metode suku bunga efektif), keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian dan keuntungan dan kerugian dari selisih kurs diakui pada laba rugi. Ketika aset keuangan dihentikan, keuntungan atau kerugian nilai wajar kumulatif yang sebelumnya diakui pada penghasilan komprehensif lain direklasifikasi pada laba rugi.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

f. Financial assets (continued)

i. Classification, recognition and measurement (continued)

(c). Financial assets measured at FVTPL (continued)

- Derivatives that are not designated as a hedging instrument. All subsequent fair value gains or losses are recognised in profit or loss.

- Financial assets with embedded derivatives are considered in their entirety when determining whether their cash flows are SPPI.

(d). Financial assets measured at FVOCI

This classification applies to the following financial assets:

- Debt instruments that are held under a business model where they are held for collection of contractual cash flows and also for sale ("collect and sell") and which have cash flows that meet the SPPI criteria.

All movements in the fair value of these financial assets are taken through other comprehensive income, except for the recognition of impairment gains or losses, interest revenue (including transaction costs by applying the effective interest method), gains or losses arising on derecognition and foreign exchange gains and losses that are recognised in profit or loss. When the financial asset is derecognised, the cumulative fair value gains or losses previously recognised in other comprehensive income are reclassified to profit or loss.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ANAK PERUSAHAAN / PT PLN NUSANTARA POWER AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/76 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Aset keuangan (lanjutan)

i. Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

(iii). Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (lanjutan)

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan berikut ini: (lanjutan)

- Investasi ekuitas di mana Grup telah memilih tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan keuntungan dan kerugian nilai wajar dari revaluasi pada penghasilan komprehensif lain.

Pilihan dapat dibuatkan pada investasi individu, namun, tidak berlaku pada investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan. Keuntungan atau kerugian nilai wajar dari revaluasi investasi ekuitas, termasuk komponen selisih kurs, diakui pada penghasilan komprehensif lain. Ketika investasi ekuitas dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian nilai wajar yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi pada laba rugi. Dividen diakui dalam laba rugi ketika hak untuk menerima pembayaran telah ditetapkan.

Grup mereklasifikasi investasi utang jika dan hanya jika model bisnis untuk mengelola aset tersebut berubah.

ii. Penghentian pengakuan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak untuk menerima arus kas dari investasi tersebut telah jatuh tempo atau telah ditransfer dan Grup telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset.

iii. Saling hapus antar instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan dikelompokkan dan jumlah netonya disajikan pada laporan posisi keuangan konsolidasian ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

f. Financial assets (continued)

i. Classification, recognition and measurement (continued)

(iii). Financial assets measured at FVOCI (continued)

This classification applies to the following financial assets: (continued)

- Equity investments where the Group has irrevocably elected to present fair value gains and losses on revaluation in other comprehensive income.

The election can be made for each individual investment. However, it is not applicable to equity investments held for trading. Fair value gains or losses on the revaluation of such equity investments, including any foreign exchange component, are recognized in other comprehensive income. When the equity investment is derecognized, there is no reclassification of fair value gains or losses previously recognized in other comprehensive income to profit or loss. Dividends are recognized in profit or loss when the right to receive payment is established.

The Group reclassifies debt investments if, and only if, the business model for managing those assets changes.

ii. Derecognition

Financial assets are derecognized when the rights to receive the cash flows from the investments have expired or have been transferred and the Group has transferred substantially all risks and rewards of ownership.

iii. Offsetting financial instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amounts are reported in the consolidated statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realize the asset and settle the liability simultaneously.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN SENTRAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/17 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Aset keuangan (lanjutan)

iv. Penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap tahun pelaporan, Grup menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Grup menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan dengan perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Grup membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada akhir tahun pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta keterandalan informasi yang tersedia pada akhir tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Grup menerapkan pendekatan umum dalam menghitung kerugian kredit ekspektasian untuk aset keuangan. Kerugian kredit ekspektasian dikenali dalam dua tahap. Untuk eksposur kredit yang belum ada peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal, kerugian kredit ekspektasian disediakan untuk kerugian kredit yang diakibatkan oleh peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam 12 bulan ke depan (kerugian kredit ekspektasian 12 bulan). Untuk eksposur kredit yang telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian dipertukan untuk kerugian kredit yang diperkirakan selama sisa umur eksposur, terlepas dari waktu default (kerugian kredit ekspektasian seumur hidup).

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

f. Financial assets (continued)

iv. Impairment of financial assets

At each reporting date, the Group assesses whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Group uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses. To make that assessment, the Group compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and considers reasonable and supportable information, which is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

The Group applies a general approach in calculating the expected credit losses ("ECLs") for financial assets. ECLs are recognised in two stages. For credit exposures for which there has not been a significant increase in the credit risk since initial recognition, ECLs are provided for credit losses that result from default events that are possible within the next 12-months (a 12-month ECL). For those credit exposures for which there has been a significant increase in the credit risk since initial recognition, a loss allowance is required for the credit losses that are expected over the remaining life of the exposure, irrespective of the timing of the default (a lifetime ECL).

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 6/10 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

g. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank, dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

Laporan arus kas konsolidasian disusun menggunakan metode langsung dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

h. Piutang usaha

Piutang usaha adalah jumlah terutang dari pelanggan atas listrik atau jasa yang diberikan dalam kegiatan usaha biasa. Piutang non-usaha merupakan jumlah terutang yang timbul dari transaksi di luar kegiatan usaha biasa. Jika piutang diperkirakan tertagih dalam satu tahun atau kurang, piutang tersebut diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang tersebut disajikan sebagai aset tidak lancar pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Piutang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, jika efek pendiskontoan signifikan, dikurangi dengan cadangan kerugian.

Kerugian penurunan nilai piutang disajikan sebagai bagian dari beban usaha pada laba rugi. Jumlah yang selanjutnya dapat dipulihkan kembali atas piutang yang sebelumnya telah dihapusbukukan, dikreditkan terhadap item baris yang sama.

Lihat Catatan 3f untuk informasi lebih lanjut mengenai kebijakan penentuan jumlah cadangan kerugian piutang Grup.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

g. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash on hand, cash in banks and time deposits with maturity periods of three months or less at the time of placement that are not used as collateral or are not restricted.

The consolidated statements of cash flows have been prepared using the direct method by classifying the cash flows on the basis of operating, investing and financing activities.

h. Trade receivables

Trade receivables are amounts due from customers for electricity sold or services performed in the ordinary course of business. Non-trade receivables are amounts arising from transactions outside of the ordinary course of business. If the collection of the receivables is expected within one year or less, they are classified as current assets. If not, they are presented as non-current assets in the consolidated statements of financial position.

Trade receivables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method, if the impact of discounting is significant, less any loss allowance.

Impairment losses on receivables are presented as part of operating expenses in profit or loss. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against the same line item.

See Note 3f for further information regarding the policy on the determination of the amount for the loss allowance on the Group's receivables.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

i. Persediaan

Persediaan suku cadang, bahan bakar, minyak pelumas, perlengkapan dan bahan pendukung dinilai dengan harga perolehan, dikurangi dengan provisi persediaan usang dan bergerak lambat. Harga perolehan ditentukan dengan metode rata-rata bergerak. Provisi persediaan usang dan bergerak lambat ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan pada masa mendatang. Bahan pendukung kegiatan pemeliharaan dicatat sebagai beban pemeliharaan pada periode digunakan.

j. Biaya dibayar dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortasi selama periode manfaat dengan menggunakan metode garis lurus.

k. Aset tetap

Grup menganalisis fakta dan keadaan untuk masing-masing jenis tanah dan hak atas tanah dalam menentukan akuntansi untuk masing-masing tanah dan hak atas tanah tersebut sehingga dapat merepresentasikan dengan tepat suatu kejadian atau transaksi ekonomi yang mendasarinya. Jika tanah dan hak atas tanah tersebut tidak mengalihkan pengendalian atas aset pendasar kepada Grup, melainkan mengalihkan hak untuk menggunakan aset pendasar, Grup menerapkan perlakuan akuntansi atas transaksi tersebut sebagai sewa berdasarkan PSAK No. 73, "Sewa". Jika tanah dan hak atas tanah secara substansi menyerupai pembelian tanah, maka Grup menerapkan PSAK No. 16, "Aset Tetap" yaitu tanah dan hak atas tanah diakui sebesar harga perolehan dan tidak disusutkan.

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang dimaksud agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

i. Inventories

Spare parts, fuel, lubricants, tools and supplies are valued at cost less a provision for obsolete and slow-moving inventory. Cost is determined based on the moving average method. A provision for obsolete and slow-moving inventory is determined on the basis of estimated future usage. Supplies of maintenance materials are charged to maintenance costs in the period in which they are used.

j. Prepaid expenses

Prepaid expenses are amortised over the periods benefited using the straight-line method.

k. Property, plant and equipment

The Group analyses the facts and circumstances for each type of land and land rights in determining the accounting for each of these land and land rights so that it can accurately represents an underlying economic event or transaction. If the land and land rights do not transfer control of the underlying assets to the Group, but give the rights to use the underlying assets, the Group applies the accounting treatment of these transactions as leases under SFAS No. 73, "Leases". If the land and land rights are substantially similar to land purchases, the Group applies SFAS No. 16, "Property, Plant and Equipment" under which land and land rights are recognised at cost and not depreciated.

Property, plant and equipment are initially recognised at cost, which comprises the purchase price and any cost directly attributable to bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 6/20 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

k. Aset tetap (lanjutan)

Setelah pengakuan awal, kelas-kelas aset berikut ini yang diukur menggunakan metode revaluasi:

- Tanah dan hak atas tanah;
- Bangunan umum, waduk dan prasarana;
- Instalasi dan mesin pembangkit;
- Perlengkapan transmisi;
- Perlengkapan distribusi;
- Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik; dan
- Material cadang utama.

Kelas aset di atas, disajikan sebesar nilai wajar dikurangi penyusutan dan penurunan nilai. Tanah dan hak atas tanah tidak disusutkan. Penilaian terhadap aset-aset tersebut dilakukan oleh penilai independen eksternal yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"). Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan nilai tercatatnya. Aset yang tidak mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan wajib direvaluasi paling kurang setiap 3 (tiga) tahun. Akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi dieliminasi terhadap nilai tercatat bruto aset, dan nilai netonya disajikan kembali sebesar nilai revaluasi aset tetap.

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi aset tetap yang menggunakan model revaluasi dikreditkan pada "surplus revaluasi aset" sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain. Penurunan yang menghapus nilai kenaikan sebelumnya atas aset yang sama dibebankan terhadap "surplus revaluasi aset" sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain termasuk aset yang ditransfer ke aset tidak digunakan dalam operasi; penurunan lainnya dibebankan pada laba rugi.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

k. Property, plant and equipment (continued)

After initial recognition, the following classes of assets are measured using the revaluation method:

- Land and land rights;
- Buildings, reservoirs and infrastructure;
- Installations and power plants;
- Transmissions equipment;
- Distribution equipment;
- Telecommunications and data processing equipment used for electricity supply; and
- Major spare parts.

The classes of asset above, are shown at fair value less subsequent depreciation and impairment losses. Land and land rights are not depreciated. The valuation of those assets is performed by external independent valuers that are registered with the Financial Services Authority (IFSA). The valuations are performed with sufficient regularity to ensure that the fair value of a revalued asset does not differ materially from its carrying amount. Assets that do not change significantly in fair value must be re-evaluated at least every 3 (three) years. Any accumulated depreciation at the date of revaluation is eliminated against the gross carrying amount of the asset and the net amount is restated to the revalued amount of the property, plant and equipment.

Increases in the carrying amount arising on revaluation of property, plant and equipment that use a revaluation model are credited to 'asset revaluation surplus' as part of other comprehensive income. Decreases that offset previous increases of the same asset are debited against 'asset revaluation surplus' as part of other comprehensive income including the assets that are transferred to assets not used in operations; all other decreases are charged to profit or loss.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

k. Aset tetap (lanjutan)

Aset tetap, disusutkan hingga mencapai estimasi nilai sisa dengan menggunakan metode garis lurus selama masa manfaatnya sebagai berikut:

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

k. Property, plant and equipment (continued)

Property, plant and equipment are depreciated to their residual values using the straight-line method over their expected useful lives as follows:

	Tahun/ Years	
Bangunan umum, waduk dan prasarana	10 - 50	*Buildings, reservoirs and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	12 - 40	*Installation and power plants*
Perlengkapan transmisi dan distribusi	40	*Transmissions and distribution equipment*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	10	*Telecommunications and data processing equipment*
Perlengkapan umum	5	*General equipment*
Kendaraan bermotor	5	*Motor vehicles*
Material cadang utama	20 - 40	*Major spare parts*

Masa manfaat ekonomis, nilai sisa dan metode penyusutan aset tetap ditelaah, jika diperlukan, setidaknya disesuaikan, pada setiap akhir tahun buku. Dampak dari setiap revisi diakui dalam laba rugi, ketika perubahan terjadi.

The useful lives, residual values and depreciation methods of property, plant and equipment are reviewed and adjusted, if appropriate, at the end of each financial year. The effects of any revisions are recognised in profit or loss, when the changes arise.

Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan apabila nilai tercatat aset lebih besar daripada estimasi jumlah yang dapat dipulihkan (Catatan 3.m).

An asset's carrying amount is written down immediately to its recoverable amount if the asset's carrying amount is greater than its estimated recoverable amount (Note 3.m).

Beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap diakui sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

The costs of repairs and maintenance are charged to profit or loss as incurred. Subsequent costs that are incurred in order to add, replace part of, or service an item of property, plant and equipment, are recognised as assets if and only if it is probable that the future economic benefits that are associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably.

Aset tetap yang tidak digunakan lagi atau dijual, nilai tercatatnya dikeluarkan dari kelompok aset tetap. Keuntungan atau kerugian dari penghapusan aset tetap tersebut diakui dalam laba rugi.

For property, plant and equipment that can no longer be utilised or sold, the carrying amounts are eliminated from the group of property, plant and equipment. The resulting gains or losses on disposals of property, plant and equipment are recognised in profit or loss.

Jika aset yang direvaluasi dijual, jumlah yang dicatat di dalam ekuitas dipindahkan ke saldo laba.

When revalued assets are disposed, the amounts included in equity are transferred to retained earnings.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/22 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2023
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

k. Aset tetap (lanjutan)

Aset tidak digunakan dalam operasi terdiri dari aset tetap yang akan dihapuskan dan aset tetap yang sedang dipertahankan. Aset tetap ini disusutkan dengan metode garis lurus dan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset tetap.

Aset dalam pembangunan merupakan biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan pembangunan aset tetap. Aset dalam pembangunan dinyatakan sebesar biaya perolehan, termasuk biaya pinjaman selama masa pembangunan dari pinjaman yang digunakan untuk pembangunan, beban penyusutan aset tetap yang digunakan dalam pelaksanan pembangunan dan biaya pengujian kelaik asetdapat berfungsi setelah dikurangi penjualan listrik kelaik masa uji coba. Aset dalam pembangunan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan. Penyusutan dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan tujuan yang dinginkan manajemen.

l. Properti investasi

Properti investasi adalah properti (tanah dan hak atas tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif, atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Properti investasi diakui sebagai aset jika, dan hanya jika, besar kemungkinan manfaat ekonomis masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas, dan biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

k. Property, plant and equipment (continued)

Assets not used in operations consist of property, plant and equipment that will be disposed of and property, plant and equipment that will be retained. These assets are depreciated using the straight-line method and based on the economic useful lives of the property, plant and equipment.

Construction in progress represents the costs directly attributable to the construction of property, plant and equipment. Construction in progress is stated at cost, which includes borrowing costs during construction on debts incurred to finance the construction, the depreciation of property, plant and equipment used in the construction and the cost of testing whether the asset is functioning properly after deducting sales of electricity during the commissioning period. Construction in progress is transferred to the respective property, plant and equipment account when completed and ready for use. Depreciation is charged from the date on which the assets are ready for use in the manner intended by management.

l. Investment properties

Investment properties are properties (land and land rights or a building or part of a building or both) held by the owner or the lessee under a finance lease to earn rentals or for capital appreciation or both, rather than for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes, or sale in the daily business activities.

Investment property is recognized as an asset when, and only when it is probable that the future economic benefits that are associated with the investment property will flow to the entity; and the cost of the investment property can be measured reliably.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN SENTRAS ANAKPERUSAHAAN / PT PLN NUSANTARA POWER AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran B/23 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2023
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

1. Properti investasi (lanjutan)

Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, meliputi harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung (biaya jasa hukum, pajak pengalihan properti, dan biaya transaksi lain). Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut.

Setelah pengakuan awal, Grup memilih menggunakan model nilai wajar dan mengukur seluruh properti investasi berdasarkan nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar properti investasi diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya.

Penentuan nilai wajar investasi didasarkan pada penilaian dan penilai independen yang mengunyai kualifikasi profesional yang telah diakui dan relevan serta memiliki pengalaman terkini di lokasi dan kategori properti investasi yang sinilai. Penilaian ini membentuk dasar untuk nilai tercatat pada laporan keuangan konsolidasian.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan (pada tanggal penerima mendapatkan kontrol) atau ketika tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari pelepasannya. Selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset diakui dalam laba rugi pada tahun terjadinya penghentian atau pelepasan. Dalam menentukan nilai pertimbangan dari pelepasan properti investasi, Grup mempertimbangkan dampak dari variabel pertimbangan, adanya komponen pembiayaan yang signifikan, dan pertimbangan utang ke pembeli (jika ada).

Pengalihan dilakukan ke (atau dari) properti investasi hanya ketika adanya perubahan pemakaian. Untuk pengalihan dari properti investasi menjadi properti yang ditempati pemilik, biaya yang dianggap untuk akuntansi selanjutnya adalah nilai wajar pada tanggal perubahan pemakaian tersebut. Jika properti yang ditempati pemilik menjadi properti investasi, Grup mengatur properti tersebut sesuai dengan kebijakan yang tercantum pada aset tetap sampai tanggal perubahan pemakaian.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

1. Investment properties (continued)

An investment property shall be measured initially at its cost, comprising its purchase price and any directly attributable expenditure (professional fees for legal services, property transfer taxes and other transaction costs). Transaction costs are included in the initial measurement.

After initial recognition, the Group chooses to use the fair value model and measure all of its investment properties at fair value. Any gain or loss arising from a change in the fair value of investment property is recognised in profit or loss for the period in which it arises.

The fair value of investment property is based on an annual valuation by an independent valuer who holds a recognised and relevant professional qualification and has recent experience in the location and category of the investment property being valued. These valuations form the basis for the carrying amounts in the consolidated financial statements.

Investment properties are derecognised either when they have been disposed of (i.e., at the date the recipient obtains control) or when they are permanently withdrawn from use and no future economic benefit is expected from their disposal. The difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset is recognised in profit or loss in the year of derecognition. In determining the amount of consideration from the derecognition of investment property, the Group considers the effects of variable consideration, existence of a significant financing component, non-cash consideration, and consideration payable to the buyer (if any).

Transfers are made to (or from) investment property only when there is a change in use. For a transfer from investment property to owner-occupied property, the deemed cost for subsequent accounting is the fair value at the date of change in use. If owner-occupied property becomes an investment property, the Group accounts for such property in accordance with the policy stated under property, plant and equipment up to the date of change in use.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN SENTRAS ANAKANYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran B24 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Penurunan nilai aset non-keuangan

Aset yang memiliki masa manfaat yang tidak terbatas, misalnya goodwill, tidak diamortisasi namun diuji penurunan nilainya setiap tahun atau lebih sering apabila terdapat peristiwa atau perubahan pada konsisi yang mengindikasikan kemungkinan penurunan nilai. Aset yang diamortisasi diuji ketika terdapat indikasi bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan. Penurunan nilai diakui jika nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan. Jumlah terpulihkan adalah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai aset. Dalam menentukan penurunan nilai, aset dikelompokkan pada tingkat yang paling rendah dimana terdapat arus kas yang dapat diidentifikasi. Aset non-keuangan selain goodwill yang mengalami penurunan nilai diuji setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pemulihan penurunan nilai.

Pembalikan rugi penurunan nilai untuk aset selain goodwill, diakui jika dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengakuan penurunan nilai terakhir kali dilakukan. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi. Pembalikan tersebut tidak boleh mengembalikan nilai tercatat aset melebihi biaya perolehan disusutkan sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pembalikan dilakukan. Rugi penurunan nilai yang diakui atas goodwill tidak dibalik lagi.

n. Utang usaha

Utang usaha adalah kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang telah diterima dalam kegiatan usaha normal dan berkesinambungan. Utang usaha diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek apabila pembayarannya jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang setelah tanggal pelaporan. Jika tidak, utang usaha tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Utang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

m. Impairment of non-financial assets

Assets that have an indefinite useful life, for example goodwill, are not subject to amortisation but are tested annually for impairment, or more frequently if events or changes in circumstances indicate that they might be impaired. Assets that are subject to amortisation are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognised for the amount by which the asset's carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's fair value less costs of disposal and its value-in-use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for which there are separately identifiable cash flows. Non-financial assets other than goodwill that suffer impairment are reviewed for a possible reversal of the impairment at each reporting date.

Reversal of impairment losses for assets other than goodwill would be recognised, if and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment test was carried out. Reversal of impairment losses will be immediately recognised in profit or loss. The reversal should not result in the carrying amount of an asset exceeding what the depreciated cost would have been had the impairment not been recognised as the date of which the impairment was reversed. Impairment losses relating to goodwill would not be reversed.

n. Trade payables

Trade payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired in the ordinary course of business from suppliers. Trade payables are classified as current liabilities if payment is due within one year of the reporting date. If not, they are presented as non-current liabilities.

Trade payables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Sewa

Grup sebagai pesewa

Ketika Grup bertindak sebagai pesewa, Grup akan mengklasifikasi masing-masing sewanya baik sewa operasi atau sewa pembiayaan.

Untuk mengklasifikasi masing-masing sewa, Grup membuat penilaian secara keseluruhan atas apakah sewa mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Jika penilaian membuktikan hal tersebut, maka sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan, jika tidak, maka diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Pendapatan sewa dari sewa operasi dimana Grup bertindak sebagai pesewa diakui sebagai pendapatan secara garis lurus selama masa sewa. Biaya langsung awal yang terjadi saat mendapatkan sewa operasi ditambahkan pada nilai tercatat aset pendasar dan diakui sebagai beban selama masa sewa dengan basis yang sama dengan pendapatan sewa. Aset tetap yang disewakan disajikan di laporan posisi keuangan berdasarkan sifatnya.

Grup sebagai penyewa

Penentuan apakah suatu perjanjian mengandung, atau mengandung, sewa didasarkan berdasarkan substansi perjanjian itu sendiri dan penilaian apakah pemenuhan atas perjanjian bergantung dari penggunaan aset tertentu atau aset, dan apakah perjanjian memberikan hak untuk menggunakan aset.

Grup menyewa aset tetap tertentu yang kontrak sewanya dibuat untuk periode tetap dari 1 hingga 12 tahun tetapi mungkin memiliki opsi ekstensi. Kontrak dapat berisi komponen sewa dan non-sewa berdasarkan harga relatif yang berdiri sendiri.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

c. Leases

The Group as a lessor

When the Group acts as a lessor, it will classify each of its leases as either an operating lease or a finance lease.

To classify each lease, the Group makes an overall assessment of whether the lease transfers substantially all of the risks and rewards incidental to the ownership of the underlying asset. If this is the case, then the lease is classified as a finance lease; if not, then it is classified as an operating lease.

Lease income from operating leases where the Group is a lessor is recognized in income on a straight-line basis over the lease term. Initial direct costs incurred in obtaining an operating lease are added to the carrying amount of the underlying asset and recognized as expense over the lease term on the same basis as lease income. The respective leased assets are included in the statement of financial position based on their nature.

The Group as a lessee

Determination of whether an arrangement is, or contains, a lease is made based on the substance of the arrangement and an assessment of whether the fulfilment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets, and the arrangement conveys a right to use the asset.

The Group leases certain property, plant and equipment, for which the rental contracts are typically made for fixed periods of 1 to 12 years but they may have extension options. Contracts may contain both lease and non-lease components based on their relative stand-alone prices.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 6/38 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

a. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Sewa diakui sebagai aset hak guna dan liabilitas terkait pada tanggal di mana aset sewaan tersedia untuk digunakan oleh Grup.

Aset dan liabilitas yang timbul dari sewa pada awalnya diukur dengan basis nilai kini. Liabilitas sewa termasuk nilai bersih sekarang dari pembayaran sewa berikut:

- pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi), dikurangi piutang insentif sewa;
- pembayaran sewa variabel yang didasarkan pada indeks atau tingkat, pada awalnya diukur menggunakan indeks atau tingkat pada tanggal mulai;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa berdasarkan jaminan nilai residu;
- harga pelaksanaan dari opsi pembelian jika penyewa cukup yakin untuk menggunakan opsi tersebut; dan
- pembayaran penalti karena penghentian awal sewa kecuali jika Grup cukup pasti untuk tidak menghentikan lebih awal.

Pembayaran sewa yang harus dilakukan berdasarkan opsi perpanjangan tertentu juga termasuk dalam pengukuran liabilitas.

Pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika tarif tidak dapat segera ditentukan, di mana hal tersebut secara umum terjadi pada sewa dalam Grup, suku bunga pinjaman incremental penyewa digunakan, yaitu tarif yang harus dibayar oleh penyewa untuk meminjam dana yang diperlukan untuk memperoleh aset dengan nilai yang sama dengan aset hak guna dalam lingkungan ekonomi serupa dengan syarat dan ketentuan yang serupa.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

a. Leases (continued)

The Group as a lessee (continued)

Leases are recognised as a right-of-use asset and a corresponding liability at the date on which the leased asset is available for use by the Group.

Assets and liabilities arising from a lease are initially measured on a present value basis. Lease liabilities include the net present value of the following lease payments:

- fixed payments (including in-substance fixed payments), less any lease incentives receivable;
- variable lease payments that are based on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;
- amounts expected to be payable by the lessee under residual value guarantees;
- the exercise price of a purchase option if the lessee is reasonably certain to exercise that option; and
- penalty payments for early termination of a lease unless the Group is reasonably certain not to terminate early.

Lease payments to be made under reasonably certain extension options are also included in the measurement of the liability.

The lease payments are discounted using the interest rate implicit in the lease. If the rate cannot be readily determined, which is generally the case for leases in the Group, the lessee's incremental borrowing rate is used, being the rate that the individual lessee would have to pay to borrow the funds necessary to obtain an asset of similar value to the right-of-use asset in a similar economic environment with similar terms, security and conditions.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

a. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Untuk menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Grup:

- jika memungkinkan, menggunakan pembiayaan pihak ketiga terkini yang diterima oleh penyewa individu sebagai titik awal, disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kondisi pembiayaan sejak pembiayaan pihak ketiga diterima;
- menggunakan pendekatan build-up yang dimulai dengan suku bunga bebas risiko yang disesuaikan dengan risiko kredit untuk sewa yang dimiliki oleh Grup, yang tidak memiliki pembiayaan pihak ketiga baru-baru ini; dan
- membuat penyesuaian spesifik untuk sewa, misalnya jangka waktu, mata uang dan keamanan.

Grup dihadapkan pada potensi kenaikan di masa depan dalam pembayaran sewa variabel berdasarkan indeks atau tarif, yang tidak termasuk dalam liabilitas sewa sampai diberlakukan. Ketika penyesuaian pembayaran sewa berdasarkan indeks atau suku bunga mulai berlaku, liabilitas sewa dinilai kembali dan disesuaikan dengan aset hak guna.

Pembayaran sewa dialokasikan antara biaya pokok dan keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laporan laba rugi selama masa sewa sehingga menghasilkan suku bunga periodik yang konstan atas sisa saldo liabilitas untuk setiap tahun.

Aset hak guna diukur pada biaya perolehan yang terdiri dari berikut ini:

- jumlah pengukuran awal liabilitas sewa;
- pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal dimulainya dikurangi insentif sewa yang diterima;
- biaya langsung awal; dan
- biaya restorasi.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

a. Leases (continued)

The Group as a lessee (continued)

To determine the incremental borrowing rate, the Group:

- where possible, uses recent third-party financing received by the individual lessee as a starting point, adjusted to reflect changes in financing conditions since third party financing was received;
- uses a build-up approach that starts with a risk-free interest rate adjusted for credit risk for leases held by the Group, which does not have recent third-party financing; and
- makes adjustments specific to the lease, e.g. term, currency and security.

The Group is exposed to potential future increases in variable lease payments based on an index or rate, which are not included in the lease liability until they take effect. When adjustments to lease payments based on an index or rate take effect, the lease liability is reassessed and adjusted against the right-of-use asset.

Lease payments are allocated between principal and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each year.

Right-of-use assets are measured at cost comprising the following:

- the amount of the initial measurement of the lease liability;
- any lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received;
- any initial direct costs; and
- restoration costs.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN SENTRAS ANAKANTAHAND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/28 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

a. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Aset hak guna umumnya disusutkan sepanjang waktu yang lebih pendek antara masa manfaat aset dan jangka waktu sewa menggunakan metode garis lurus. Jika Grup cukup yakin untuk melaksanakan opsi pembelian, aset hak guna disusutkan selama masa manfaat aset yang mendasarinya.

Aset hak guna juga mengalami penurunan nilai (Catatan 3.m).

Pembayaran terkait dengan sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah diakui atas dasar garis lurus sebagai beban dalam laporan laba rugi. Sewa jangka pendek adalah sewa dengan masa sewa 12 bulan atau kurang. Aset bernilai rendah terdiri dari perlengkapan umum.

Grup menyajikan aset hak guna sebagai bagian dari "Aset tetap" di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Opsi perpanjangan dan terminasi

Opsi perpanjangan dan terminasi termasuk dalam sejumlah sewa properti dan peralatan di seluruh Grup. Istilah-istilah ini digunakan untuk memaksimalkan fleksibilitas operasional dalam hal pengelolaan kontrak. Mayoritas opsi perpanjangan dan terminasi yang dimiliki hanya dapat dilaksanakan oleh Grup dan bukan oleh pembeli sewa masing-masing.

Modifikasi sewa

Grup mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:

- modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih; dan
- imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk mencerminkan kondisi kontrak tertentu.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

a. Leases (continued)

The Group as a lessee (continued)

Right-of-use assets are generally depreciated over the shorter of the asset's useful life and the lease term on a straight-line basis. If the Group is reasonably certain to exercise a purchase option, the right-of-use asset is depreciated over the underlying asset's useful life.

The right-of-use assets are also subject to impairment (Note 3.m).

Payments associated with short-term leases and leases of low-value assets are recognised on a straight-line basis as an expense in profit or loss. Short-term leases are leases with a lease term of 12 months or less. Low-value assets comprise general equipment.

The Group presents right-of-use assets as part of "Property, plant and equipment" in the consolidated statement of financial position.

Extension and termination options

Extension and termination options are included in a number of property and equipment leases across the Group. These terms are used to maximise operational flexibility in terms of managing contracts. The majority of the extension and termination options that are held are exercisable only by the Group and not by the respective lessor.

Lease modification

The Group accounts for a lease modification as a separate lease if both:

- the modification increases the scope of the lease by adding the right to use one or more underlying assets; and
- the consideration for the lease increases by an amount commensurate with the stand-alone price for the increase in scope and any appropriate adjustments to that stand-alone price to reflect the circumstances of the particular contract.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN SENTRAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/23 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

a. Sewa (lanjutan)

Modifikasi sewa (lanjutan)

Untuk modifikasi sewa yang tidak disajikan sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif modifikasi sewa, Grup:

- mengalokasikan imbalan kontrak modifikasian;
- menentukan masa sewa dari sewa modifikasian; dan
- mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskonkan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian. Tingkat diskonto revisian dilakukan sebagai suku bunga implisit dalam sewa untuk sisa masa sewa, jika dapat ditentukan, atau suku bunga pinjaman inkremental penyewa pada tanggal efektif modifikasi, jika suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan.

Untuk modifikasi sewa yang tidak disajikan sebagai sewa terpisah, penyewa mencatat pengukuran kembali liabilitas sewa dengan:

- menurunkan jumlah tercatat aset hak guna untuk mencerminkan pengakhiran parsial atau penuh sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa. Penyewa mengakui dalam laba rugi setiap keuntungan atau kerugian yang terkait dengan pengakhiran parsial atau penuh sewa tersebut;
- membuat penyesuaian terkait dengan aset hak guna untuk seluruh modifikasi sewa lainnya.

p. Biaya pinjaman

Biaya bunga dan biaya pinjaman lainnya, seperti biaya diskonto pinjaman baik yang secara langsung atau tidak langsung digunakan untuk pendanaan konstruksi aset kualifikasian, dikapitalisasi hingga aset tersebut selesai dikonstruksi. Untuk biaya pinjaman yang dapat dialokasikan secara langsung pada aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi dihitung dari biaya pinjaman aktual yang terjadi selama periode berjalan, dikurang penghasilan yang diperoleh dari investasi sementara atas dana hasil pinjaman tersebut. Untuk pinjaman yang tidak dapat dialokasikan secara langsung pada suatu aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi dihitung dengan mengalikan tingkat kapitalisasi terhadap jumlah yang dikeluarkan untuk mempersiapkan aset kualifikasian. Tingkat kapitalisasi dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang biaya pinjaman yang dibagi dengan jumlah pinjaman yang tersedia selama tahun berjalan, selain pinjaman yang secara spesifik diambil untuk tujuan mempersiapkan suatu aset kualifikasian.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

a. Leases (continued)

Lease modification (continued)

For a lease modification that is not accounted for as a separate lease, at the effective date of the lease modification, the Group:

- *allocates the consideration in the modified contract;*
- *determines the lease term of the modified lease; and*
- *remeasures the lease liability by discounting the revised lease payments using a revised discount rate. The revised discount rate is determined as the interest rate implicit in the lease for the remainder of the lease term, if that rate can be readily determined, or the lessee's incremental borrowing rate at the effective date of the modification, if the interest rate implicit in the lease cannot be readily determined.*

For a lease modification that is not accounted for as a separate lease, the lessee shall account for the remeasurement of the lease liability by:

- *decreasing the carrying amount of the right-of-use asset to reflect the partial or full termination of the lease for lease modifications that decrease the scope of the lease. The lessee shall recognise in profit or loss any gain or loss relating to the partial or full termination of the lease;*
- *making a corresponding adjustment to the right-of-use asset for all other lease modifications.*

p. Borrowing costs

Interest and other borrowing costs, such as discount fees on loans either directly or indirectly used in financing the construction of a qualifying asset, are capitalised up to the date when construction is complete. For borrowings that are directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined as the actual borrowing cost incurred during the period, less any income earned on the temporary investment of such borrowings. For borrowings that are not directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined by applying a capitalisation rate to the amount expended on the qualifying assets. The capitalisation rate is the weighted average of the total borrowing costs applicable to the total borrowings outstanding during the year, other than borrowings made specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset.

PT PLN (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/30 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2023
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Pinjaman

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurang dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi, selisih antara penerimaan (dikurang biaya transaksi) dan nilai pelunasan diakui pada laporan laba rugi selama periode pinjaman dengan menggunakan metode bunga efektif.

Biaya yang dibayar untuk memperoleh fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman sepanjang besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik. Dalam hal ini, biaya memperoleh pinjaman ditangguhkan sampai penarikan pinjaman terjadi. Sepanjang tidak terdapat bukti bahwa besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik, biaya memperoleh pinjaman dikapitalisasi sebagai pembayaran di muka untuk jasa likuiditas dan diamortisasi selama periode fasilitas yang terkait.

Biaya pinjaman akan dihentikan pengakuannya dari laporan posisi keuangan ketika kewajiban yang tertulis pada kontrak dibatalkan, atau sudah tidak berlaku. Selisih antara nilai tercatat dari liabilitas keuangan yang sudah berakhir atau dialihkan ke pihak lain dan imbalan yang dibayarkan, termasuk aset nonkas yang dialihkan atau liabilitas yang ditanggung, diakui dalam laba rugi sebagai pendapatan lain-lain atau biaya keuangan.

Ketika liabilitas keuangan dinegosiasikan kembali dan entitas mengeluarkan instrumen ekuitas kepada kreditur untuk menyelesaikan seluruh atau sebagian liabilitas (debt for equity swap), keuntungan atau kerugian diakui dalam laporan laba rugi yang dicatat sebagai selisih antara jumlah tercatat dari liabilitas keuangan.

Pinjaman diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek kecuali Grup memiliki hak tanpa syarat untuk menunda pembayaran liabilitas selama paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

e. Borrowings

Borrowings are recognised initially at fair value, net of transaction costs incurred. Borrowings are subsequently carried at amortised cost; any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the redemption value is recognised in profit or loss over the period of the borrowings using the effective interest method.

Fees paid on the establishment of loan facilities are recognised as transaction costs of the loan to the extent that it is probable that some or all of the facility will be drawn down. In this case, the fee is deferred until the drawn-down occurs. To the extent that there is no evidence that it is probable that some or all of the facility will be drawn down, the fee is capitalised as a pre-payment for liquidity services and amortised over the period of the facility to which it relates.

Borrowings are removed from the statement of financial position when the obligation specified in the contract is discharged, cancelled or expired. The difference between the carrying amount of a financial liability that has been extinguished or transferred to another party and the consideration paid, including any non-cash assets transferred or liabilities assumed, is recognised in profit or loss as other income or finance costs.

Where the terms of a financial liability are renegotiated and the entity issues equity instruments to a creditor to extinguish all or part of the liability (debt for equity swap), a gain or loss is recognised in profit or loss, which is measured as the difference between the carrying amount of the financial liability and the fair value of the equity instruments issued.

Loans are classified as current liabilities unless the Group has an unconditional right to defer payment of the liability for at least 12 months after the reporting date.

PT PLN (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/31 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 Desember 2023 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)	NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

a. Pinjaman (lanjutan)

Dampak reformasi acuan suku bunga

Kesepakatan praktis berlaku untuk pinjaman. Panduan praktis ini hanya berlaku untuk perubahan yang diperlukan oleh reformasi acuan tingkat suku bunga, yang terjadi jika, dan hanya jika, modifikasi diperlukan sebagai akibat langsung dari reformasi acuan suku bunga dan dasar baru untuk menentukan arus kas kontraktual yang secara ekonomis setara dengan dasar sebelumnya (yaitu, dasar yang mendahului perubahan).

Jika sebagian atau seluruh perubahan dalam dasar penentuan arus kas kontraktual instrumen keuangan tidak memenuhi criteria di atas, panduan praktis di atas pertama-tama diterapkan pada perubahan yang disyaratkan oleh reformasi acuan tingkat suku bunga, termasuk mengganti instrumen suku bunga efektif. Setiap perubahan tambahan dicatat dengan cara normal (yaitu, dinilai untuk modifikasi atau penghentian pengakuan, dengan keuntungan/kerugian modifikasi langsung diakui dalam laba rugi jika instrumen tidak dihentikan pengakuannya).

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, Grup telah menerapkan panduan praktis yang diberikan dalam reformasi acuan suku bunga - tahap 2 terhadap pinjaman dari pemegang saham. Grup menyimpulkan bahwa dasar baru yang digunakan untuk menentukan arus kas kontraktual secara ekonomis setara dengan dasar sebelumnya.

c. Provisi

Provisi diakui ketika Grup memiliki kewajiban kini (baik berdasar hukum maupun konstruksi) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Grup diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi diukur pada nilai kini dari estimasi terbaik manajemen atas pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir tahun pelaporan. Tingkat diskonto yang digunakan untuk menentukan nilai kini adalah tingkat diskonto sebelum pajak, yang mencerminkan penilaian pasar kini atas nilai waktu uang dan risiko yang terkait dengan liabilitas tersebut. Peningkatan provisi sehubungan dengan berlalunya waktu diakui sebagai beban keuangan.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continue)

a. Borrowings (continue)

Interest rate benchmark reform (note)

A practical guidance applies to borrowings. This practical guidance only applies to changes required by interest rate benchmark reform, which occur if, and only if, the modification is required as a direct result of the interest rate benchmark reform and a new basis for determining contractual cash flows that is economically equivalent to the previous basis (that is, the basis that precedes change).

If some or all of the changes in the basis for determining the contractual cash flows of financial liabilities do not meet the above criteria, the above practical guidance is first applied to the changes required by the interest rate benchmark reform, including updating the effective interest rate instrument. Any additional changes are recorded in the normal manner (i.e., assessed for modification or derecognition, with modification gains/losses recognized immediately in profit or loss if the instrument is not derecognized).

For the year ended 31 December 2023, the Group has applied the practical guidance provided in the interest rate benchmark reform - stage 2 to its loans from a shareholder. The Group concluded that the new basis for determining contractual cash flows is economically equivalent to the previous basis.

c. Provisions

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event and it is probable that the Group will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

The provision is measured at the present value of the management's best estimate of the expenditure required to settle the present obligation at the end of the reporting date. The discount rate used to determine the present value is a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the liabilities. The increase in the provision due to the passage of time is recognized as interest expense.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/32 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Provisi (lanjutan)

Jika sebagian atau seluruh pengeluaran untuk menyelesaikan provisi diganti oleh pihak ketiga, maka penggantian itu diakui hanya pada saat untuk kejelasan bahwa penggantian pasti akan diterima jika entitas menyelesaikan kewajiban. Penggantian tersebut diakui sebagai aset yang terpisah. Jumlah yang diakui sebagai penggantian tidak boleh melebihi nilai provisi.

e. Imbalan kerja

Imbalan pascakerja

Skema pensiun diklasifikasikan sebagai program iuran pasti atau program manfaat pasti, tergantung pada substansi ekonomi dan syarat dan kondisi utama program tersebut. Program iuran pasti adalah program pensiun yang mewajibkan Grup membayar sejumlah iuran tertentu kepada entitas terpisah. Grup tidak memiliki kewajiban hukum atau konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika entitas tersebut tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar seluruh imbalan atas jasa yang diberikan pekerja pada tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya. Program manfaat pasti adalah program pensiun yang bukan merupakan program iuran pasti. Program manfaat pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima karyawan pekerja pada saat pensiun, biasanya bergantung pada satu atau lebih faktor seperti usia, masa kerja, dan kompensasi.

Grup harus mendasarkan jumlah minimal imbalan pensiun sesuai dengan Peraturan Ketenagakerjaan atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan (PP), mana yang lebih tinggi. Karena Peraturan Ketenagakerjaan atau PKB menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya, program pensiun berdasarkan Peraturan Ketenagakerjaan atau PKB adalah program manfaat pasti.

Sehubungan dengan program manfaat pasti, liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian sesuai dengan nilai kini kewajiban manfaat pasti pada akhir tahun pelaporan dikurangi nilai wajar aset program. Kewajiban manfaat pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Imbalan pascakerja tertentu dari imbalan pesangon dan penghargaan jurnal jabatan.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

c. Provisions (continued)

Where some or all of the expenditure required to settle a provision is expected to be reimbursed by another party, the reimbursement shall be recognised when, and only when, it is virtually certain that reimbursement will be received if the entity settles the obligation. The reimbursement shall be treated as a separate asset. The amount recognised for the reimbursement shall not exceed the amount of the provision.

e. Employee benefits

Post-employment benefits

Pension schemes are classified as either defined contribution plans or defined benefit plans, depending on the economic substance of the plan as derived from its principal terms and conditions. A defined contribution plan is a pension plan under which the Group pays fixed contributions into a separate entity. The Group has no legal or constructive obligations to pay further contributions if the fund does not hold sufficient assets to pay all employees the benefits relating to employee service in the current and prior years. A defined benefit plan is a pension plan that is not a defined contribution plan. Typically, defined benefit plans define an amount of pension benefit that an employee will receive upon retirement, which is usually dependent on one or more factors such as age, years of service and compensation.

The Group is required to provide a minimum amount of pension benefit in accordance with Manpower Regulation or the Group's Collective Labour Agreement (the "CLA") or Company Regulation (the "CR"), whichever is higher. Since the Manpower Regulation or the CLA sets the formula for determining the minimum amount of benefits, in substance pension plans under the Manpower Regulation or the CLA represent defined benefit plans.

The liability recognized in the consolidated statement of financial position with respect to the defined benefit pension plans is equivalent to the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting year less the fair value of the plan's assets. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the Projected Unit Credit method. Post-employment benefits consist of severance benefits and employment awards.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

a. Imbalan kerja (lanjutan)

Imbalan pascakerja (lanjutan)

Nilai kini kewajiban manfaat pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga obligasi korporasi berkualitas tinggi dalam denominasi mata uang dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun. Apabila tidak terdapat pasar aktif untuk obligasi korporasi tersebut, digunakan bunga obligasi Pemerintah.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian suatu program manfaat pasti diakui pada saat kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

Pengukuran kembali yang timbul dari penyesuaian pengalaman dan perubahan asumsi-asumsi aktuaria dibebankan atau dikreditkan pada ekuitas dalam laporan penghasilan komprehensif lain pada tahun dimana beban tersebut terjadi. Akumulasi saldo pengukuran kembali dicatatkan di saldo laba.

Untuk program iuran pasti, Grup membayar iuran kepada dana pensiun yang dikelola oleh publik atau swasta, dengan dasar wajib, kontraktual dan sukarela. Grup tidak memiliki kewajiban membayar lebih lanjut jika iuran tersebut telah dibayarkan. Iuran tersebut diakui sebagai beban imbalan kerja ketika jatuh tempo. Iuran dibayar dimuka diakui sebagai aset sepanjang pengembalian dana atau pengurangan pembayaran masa depan dimungkinkan.

Imbalan pemeliharaan kesehatan

Grup menyediakan imbalan pemeliharaan kesehatan untuk karyawan yang berhak atas imbalan tersebut. Hak atas imbalan ini pada umumnya diberikan pada karyawan aktif dan pensiunan yang memenuhi masa kerja minimum tertentu atau berhenti bekerja karena cacat atau meninggal dunia. Perkiraan biaya imbalan ini dibebankan sepanjang masa kerja karyawan dengan menggunakan metode akuntansi yang sama dengan yang digunakan untuk program pensiun imbalan pasti. Keuntungan dan kerugian aktuaria yang timbul dari penyesuaian pengalaman dan perubahan asumsi aktuaria dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas di penghasilan komprehensif lain pada periode saat terjadinya.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

a. Employee benefits (continued)

Post-employment benefits (continued)

The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using the interest rates of high quality corporate bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid, and that have terms of maturity approximating the terms of the related pension obligations. When there is no deep market for such bonds, the market rates of Government bonds are used.

Past service costs are recognized immediately in profit or loss. Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognized when the curtailment or settlement occurs.

Remeasurements arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to equity in the statement of other comprehensive income in the year in which they arise. The accumulated remeasurements balance is reported in retained earnings.

For defined contribution plans, the Group pays contributions to public or private pension plans on a mandatory, contractual or voluntary basis. The Group has no further payment obligations once the contributions have been paid. The contributions are recognized as employee benefit expenses when they become due. Prepaid contributions are recognized as an asset to the extent that a cash refund or reduction in future payments is available.

Health care benefits

The Group provides health care benefits to its employees who are entitled to these benefits. The entitlement to these benefits is usually granted to both active and retired employees who have fulfilled the minimum service period or passed working due to disability or death. The expected costs of these benefits are accrued over the years of employment using the same accounting method as used for defined benefit pension plans. Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to equity in other comprehensive income in the period they arise.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN SEKUTU ANAK PERUSAHAAN
Lampiran 9/24 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Imbalan kerja (lanjutan)

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Grup memberikan imbalan pascakerja lainnya seperti uang cuti besar, tunjangan keselesaian dinas, bantuan kematian dan penghargaan kesetiaan kerja. Nilai imbalan yang diberikan didasari pada PKB.

Cuti besar diberikan kepada karyawan yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 tahun terus menerus. Tunjangan keselesaian dinas diberikan kepada karyawan yang mengalami kecelakaan dinas. Bantuan kematian diberikan kepada ahli waris bagi karyawan yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja maupun tidak. Penghargaan kesetiaan kerja diberikan setiap delapan tahun bagi pegawai yang telah bekerja selama 16 tahun terus menerus.

Perhitungan imbalan kerja jangka panjang dilakukan dengan menggunakan metode Projected Unit Credit. Jumlah yang diakui sebagai liabilitas imbalan kerja jangka panjang di laporan posisi keuangan konsolidasian merupakan nilai kini liabilitas imbalan kerja pasti.

Pesangon pemutusan kontrak kerja

Pesangon pemutusan kontrak kerja dibayarkan ketika pekerja diberhentikan, atau ketika pekerja menerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela. Grup mengakui pesangon pemutusan kontrak kerja pada tanggal yang lebih dahulu dari: (i) ketika Grup tidak bisa lagi membatalkan penawaran pesangon, dan (ii) ketika Grup mengakui biaya untuk restrukturasi yang berada dalam lingkup PSAK No. 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi" dan melibatkan pembayaran pesangon pemutusan kontrak kerja. Dalam hal penawaran pengunduran diri secara sukarela, pesangon pemutusan kontrak kerja diukur berdasarkan ekspektasi jumlah karyawan yang menerima penawaran tersebut. Pesangon pemutusan kontrak kerja yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan didiskontokan ke nilai kini.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

e. Employee benefits (continued)

Other long-term benefits

The Group provides other long-term employee benefits such as long leave allowance, disability benefit, death benefit and loyalty benefit. The benefits that are paid are based on the CLA.

Long leave allowance is given to employees who have worked for at least 6 years continuously. Disability benefit is provided to employees who have a work accident. Death benefit is provided to the heirs whether or not the employee passes away as a result of a work accident. Loyalty benefit is given every eight years for employees who have worked for 16 years continuously.

Long-term benefits are determined using the Projected Unit Credit method. The long-term employee benefits liabilities that are recognised in the consolidated statement of financial position represent the present value of the defined benefit obligation.

Termination benefits

Termination benefits are payable when employment is terminated by the Group before the normal retirement date, or when an employee accepts voluntary redundancy in exchange for certain benefits. The Group recognises termination benefits at the earlier of the following dates: (i) when the Group can no longer withdraw the offer of those benefits; and (ii) when the Group recognises costs for a restructuring that is within the scope of SFAS No. 57, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" that involve the payment of termination benefits. In the case of an offer made to encourage voluntary redundancy, the termination benefits are measured based on the number of employees who are expected to accept the offer. Benefits falling due more than 12 months after the reporting date are discounted to their present value.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN SEKUTU ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 9/28 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

i. Modal saham

Saham biasa diklasifikasikan sebagai ekuitas, dan biaya langsung yang berkaitan dengan penerbitan saham baru atau opsi disajikan sebagai pengurang ekuitas, setelah dikurangi pajak, dari jumlah yang diterima.

u. Pembagian dividen

Pembagian dividen kepada pemegang saham Perusahaan diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian dalam periode ketika pembagian dividen telah diumumkan.

v. Pengakuan pendapatan dan beban

Pengakuan pendapatan

Pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 (lima) langkah penilaian sebagai berikut:

i. Identifikasi kontrak dengan pelanggan;
ii. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji(-janji) dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan;
iii. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Grup membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak;
iv. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin; dan

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

i. Share capital

Ordinary shares are classified as equity, and incremental costs directly attributable to the issuance of new shares or options are shown in equity as a deduction, net of tax, from the proceeds.

u. Dividend distributions

Dividend distributions to the Company's shareholders are recognised as liabilities in the consolidated financial statements in the period when the dividends are declared.

v. Revenue and expense recognition

Revenue recognition

Revenue recognition has to fulfill 5 (five) steps of assessment as follows:

i. Identify contract(s) with a customer;
ii. Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct;
iii. Determine the transaction price. The transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer. If the consideration that is promised in a contract includes a variable amount, the Group estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee that will be paid during the contract period;
iv. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct good or service promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative standalone selling prices are estimated based on expected cost plus margin; and

PT PLN (PERSERO) DAN ANAK PERUSAHAAN
PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/26 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

v. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Pengakuan pendapatan (lanjutan)

Pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 (lima) langkah penilaian sebagai berikut: (lanjutan)

v. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu tertentu (umumnya yang untuk menyerahkan barang ke pelanggan), atau
- Sepanjang waktu (umumnya yang untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam sepanjang waktu, Grup memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Dalam hal kontrak harga tetap, pelanggan membayar jumlah tetap berdasarkan jadwal pembayaran. Jika jasa yang diberikan oleh Grup melebihi pembayaran, maka aset kontrak diakui. Jika pembayaran melebihi jasa yang diberikan, liabilitas kontrak diakui.

Penjualan tenaga listrik

Pendapatan penjualan listrik diakui berdasarkan pemakaian energi listrik (kWh) yang dipasok kepada PLN dengan menggunakan formula tarif yang disepakati dalam perjanjian jual beli tenaga listrik. Formula tarif mencakup perhitungan komponen harga kapasitas, harga tetap operasi dan pemeliharaan, harga bahan bakar, tingkat pasokan energi serta variabel lainnya.

Grup mengakui pendapatan atas kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dalam sepanjang waktu ketika listrik dikonsumsi oleh PLN.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

v. Revenue and expense recognition (continued)

Revenue recognition (continued)

Revenue recognition has to fulfill 5 (five) steps of assessment as follows: (continued)

v. Recognise revenue when the performance obligation is satisfied by transferring the promised good or service to the customer (which is when the customer obtains control of that good or those services).

A performance obligation may be satisfied at the following:

- A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer), or
- Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Group selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognised as the performance obligation is satisfied.

In the case of fixed-price contracts, the customer pays a fixed amount based on a payment schedule. If the services rendered by the Group exceed the payment, a contract asset is recognised. If the payments exceed the services rendered, a contract liability is recognised.

Sales of electricity

Revenue from sales of electricity is recognised based on electricity usage (kWh) to PLN using the tariff formula stipulated in the power purchase agreements. The tariff formula includes the calculation of the capacity component, the fixed cost for operations and maintenance components, the fuel costs, power supply levels and other variables.

The Group recognises revenue for a performance obligation satisfied over time when electricity is consumed by PLN.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

v. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Pengakuan pendapatan (lanjutan)

Pendapatan jasa pemeliharaan dan operasi, pembangunan pembangkit tenaga listrik dan jasa lainnya

Grup mengakui pendapatan atas kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dalam sepanjang waktu hanya jika Grup dapat mengukur dengan akurat atas penyelesaian kewajiban pelaksanaan. Dalam keadaan tertentu, Grup mungkin tidak dapat mengukur hasil atas kewajiban pelaksanaan secara wajar, tetapi Grup berekspektasi untuk memulihkan biaya yang timbul dalam memenuhi kewajiban pelaksanaan. Dalam keadaan tersebut, Grup mengakui pendapatan hanya sebatas biaya yang timbul sampai saat yang dapat mengukur hasil kewajiban pelaksanaan secara wajar.

Pendapatan jasa pemeliharaan dan operasi, pembangunan pembangkit tenaga listrik dan jasa lainnya diakui atas dasar penyerahan yang diselesaikan dalam sepanjang waktu pada saat jasa tersebut diberikan kepada pelanggan.

Komponen pembiayaan

Grup tidak mengantisipasi adanya kontrak di mana jangka waktu antara pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dan pembayaran oleh pelanggan melebihi satu tahun. Akibatnya, Grup tidak menyesuaikan harga transaksi apa pun dengan nilai waktu uang.

Pengakuan beban

Beban diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual.

w. Pajak penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laba rugi, kecuali jika pajak itu terkait dengan kejadian atau transaksi yang diakui di penghasilan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, beban pajak tersebut masing-masing diakui pada penghasilan komprehensif lain atau secara langsung dicatat ke ekuitas.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

v. Revenue and expense recognition (continued)

Revenue recognition (continued)

Rendering of services on maintenance and operation, power plant construction and other services

The Group recognises revenue for a performance obligation satisfied over time only if the Group can reasonably measure its progress towards the complete satisfaction of the performance obligation. In some circumstances, the Group may not be able to reasonably measure the outcome of a performance obligation, but the Group expects to recover the costs that have been incurred in satisfying the performance obligation. In those circumstances, the Group recognises revenue only to the extent of the costs that have been incurred until such a time that it can reasonably measure the outcome of the performance obligation.

Revenue from services on maintenance and operation, power plant construction and other services is recognised on the basis of the work that is completed over time as the services are rendered to the customers.

Financing component

The Group does not expect to have any contracts where the period between the transfer of the promised goods or services to the customer and the payment by the customer exceeds one year. As a consequence, the Group does not adjust any of the transaction prices for the time value of money.

Expense recognition

Expenses are recognised as incurred on an accrual basis.

w. Income tax

Tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognised in profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax expense is recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 6/38 Schedule

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

w. Pajak penghasilan (lanjutan)

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan dan dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang diambil dalam Surat Pemberitahuan Tahunan sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi atas peraturan pajak yang berlaku. Jika perlu, manajemen menentukan provisi diberikan berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar pada otoritas pajak.

Untuk pendapatan yang menjadi subjek pajak penghasilan final, beban pajak dikui secara proporsional dengan jumlah pendapatan akuntansi yang dikui dan disajikan dalam sebagai bagian dari akun beban operasional pada tahun berjalan dikarenakan pajak tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai pajak penghasilan.

Pajak penghasilan tangguhan dikui, dengan menggunakan metode liabilitas untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan konsolidasian. Namun, liabilitas pajak tangguhan tidak dikui jika timbul dari pengakuan awal goodwill; atau pada saat pengakuan awal suatu aset atau liabilitas yang timbul dari transaksi selain kombinasi bisnis yang pada saat transaksi tersebut tidak mempengaruhi laba rugi akuntansi maupun laba rugi kena pajak. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan menggunakan tarif (dan peraturan) pajak yang berlaku atau yang secara substansial telah berlaku pada akhir tahun pelaporan dan diharapkan diterapkan jika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasikan atau liabilitas pajak tangguhan diselesaikan.

Aset pajak penghasilan tangguhan dikui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat digunakan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

w. *Income tax (continued)*

The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws that have been enacted as at the reporting date and computed using the prevailing tax rates. Management periodically evaluates the positions taken in Annual Tax Returns with respect to situations in which the applicable tax regulations are subject to interpretation. It establishes a provision where appropriate on the basis of the amounts expected to be paid to the tax authorities.

For income that is subject to final tax, tax expenses are recognized proportionally with the accounting revenue that is recognized and presented as part of the operating expenses account in the current year as such tax does not satisfy the criteria of income tax.

Deferred income tax is recognized, using the liability method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the consolidated financial statements. However, deferred tax liabilities are not recognized if they arise from the initial recognition of goodwill; deferred income tax is not accounted for if it arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss. Deferred income tax is determined using the tax rates (and laws) that have been enacted or substantially enacted at the end of the reporting year and that are expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

Deferred income tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which the temporary differences can be utilised.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

w. Pajak penghasilan (lanjutan)

Liabilitas dan aset pajak tangguhan tidak diakui untuk perbedaan temporer antara nilai tercatat dan dasar pengenaan pajak atas investasi pada entitas anak, asosiasi dan ventura bersama dimana Grup dapat mengendalikan waktu pembalikan perbedaan temporer dan kemungkinan besar perbedaan tersebut tidak akan dibalik di masa mendatang.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus jika terdapat hak yang berkekuatan secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini.

x. Kombinasi bisnis entitas sepengendali

Kombinasi bisnis entitas sepengendali dibukukan menggunakan metode penyatuan kepemilikan (pooling-of-interests).

Selisih antara harga konsideasi yang diterima dengan nilai tercatat setiap transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali dibukukan sebagai bagian tambahan modal disetor dalam bagian ekuitas di laporan posisi keuangan konsolidasian.

3. *MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)*

w. *Income tax (continued)*

Deferred tax liabilities and assets are not recognised for temporary differences between the carrying amount and tax bases of investments in subsidiaries, associates and joint ventures where the Group is able to control the timing of the reversal of the temporary differences and it is probable that the differences will not be reversed in the foreseeable future.

Deferred income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities.

x. *Business combination of entities under common control*

Business combinations of entities under common control are accounted for using the pooling-of-interests method.

The difference between the consideration received and the carrying amount of each restructuring transaction among entities under common control is recorded as part of additional paid-in capital in the equity section of the consolidated statements of financial position.

4. PERTIMBANGAN AKUNTANSI PENTING DAN ESTIMASI AKUNTANSI SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi, pertimbangan dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal pelaporan, serta jumlah pendapatan dan beban selama tahun pelaporan. Estimasi, asumsi, dan pertimbangan tersebut dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lainnya, termasuk harapan peristiwa di masa datang yang dipahami wajar berdasarkan kondisi yang ada.

4. *CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES*

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires management to make estimates, judgements and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and the disclosure of contingent assets and liabilities at the reporting date and the reported amounts of revenue and expenses during the reporting year. Estimates, assumptions and judgements are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances.

PT PLN (PERSERO) DAN ANAK PERUSAHAAN / PT PLN (PERSERO) AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/40 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. PERTIMBANGAN AKUNTANSI PENTING DAN ESTIMASI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Grup telah mengidentifikasi hal-hal berikut dimana diperlukan pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan dan dimana hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut jika menggunakan asumsi dan kondisi yang berbeda dan dapat mempengaruhi secara material hasil keuangan atau posisi keuangan konsolidasian Grup yang disajikan dalam tahun mendatang.

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang dijelaskan dalam Catatan 2, Grup telah mengidentifikasi hal-hal berikut yang memerlukan pertimbangan signifikan:

Kepentingan dalam pengaturan bersama

Pertimbangan diperlukan untuk menentukan kapan Grup memiliki pengendalian bersama, yang membutuhkan penilaian mengenai aktivitas yang relevan dan kapan keputusan yang berkaitan dengan aktivitas tersebut membutuhkan persetujuan dengan suara bulat. Grup menentukan bahwa aktivitas yang relevan untuk pengaturan bersama adalah aktivitas yang berkaitan dengan operasi dan pengambilan keputusan dalam pengaturan tersebut.

Pertimbangan juga diperlukan untuk mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai pengendalian bersama atau ventura bersama. Mengklasifikasikan pengaturan tersebut mengharuskan Grup untuk menilai hak dan kewajiban yang timbul dari pengaturan tersebut. Secara khusus, Grup mempertimbangkan hal berikut ini:

- Struktur dari pengaturan bersama - apakah dibentuk melalui kendaraan terpisah.
- Ketika pengaturan tersebut terstruktur melalui kendaraan terpisah, Grup juga mempertimbangkan hak dan kewajiban yang timbul dari:
  - bentuk legal dari kendaraan terpisah,
  - persyaratan dari perjanjian kontraktual, dan
  - fakta dan kondisi lain (bila relevan).

Penilaian ini sering membutuhkan pertimbangan yang signifikan. Kesimpulan yang berbeda mengenai pengendalian bersama dan apakah suatu pengaturan adalah sebuah operasi bersama atau ventura bersama, dapat memiliki dampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Grup memiliki pengaturan bersama yang terstruktur melalui ventura bersama. Struktur dari penyataan dan perjanjian kontraktual mengindikasikan bahwa Grup memiliki hak atas aset bersih dari pengaturan bersama tersebut. Grup menilai fakta dan kondisi lain yang berkaitan dengan pengaturan ini dan kesimpulan final dari penilaian yang dilakukan adalah pengaturan tersebut merupakan ventura bersama (Catatan 15).

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES (continued)

The Group has identified the following matters under which significant judgements, estimates and assumptions are made and where actual results may differ from these estimates under different assumptions and conditions and may materially affect the consolidated financial results or financial position of the Group as reported in future years.

In the process of applying the accounting policies described in Note 2, the Group has identified the following matters under which significant judgements are made:

Interest in joint arrangements

Judgement is required to determine when the Group has joint control, which requires an assessment of the relevant activities and when the decisions in relation to those activities require unanimous consent. The Group has determined that the relevant activities for its joint arrangements are those relating to the operating and capital decisions of the arrangement.

Judgement is also required to classify a joint arrangement as either a joint operation or a joint venture. Classifying the arrangement requires the Group to assess its rights and obligations arising from the arrangement. Specifically, it considers the following:

- The structure of the joint arrangement - whether it is structured through a separate vehicle.
- When the arrangement is structured through a separate vehicle, the Group also considers the rights and obligations arising from:
  - the legal form of the separate vehicle,
  - the terms of the contractual arrangement, and
  - other facts and circumstances (when relevant).

This assessment often requires significant judgement. A different conclusion on joint control and also whether the arrangement is a joint operation or a joint venture, may materially impact the consolidated financial statements.

The Group has joint arrangements which are structured through joint ventures. These structures and the terms of the contractual arrangements indicate that the Group has rights to the net assets of the arrangements. The Group also assessed the other facts and circumstances relating to these arrangements and concluded that conclusions were that the arrangements are joint ventures (Note 15).

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/41 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. PERTIMBANGAN AKUNTANSI PENTING DAN ESTIMASI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Penentuan kombinasi bisnis atas transaksi pengalihan aset dan liabilitas kegiatan usaha pembangkitan tenaga listrik PLN ke Perusahaan

Pada tanggal 1 Januari 2023, sebagian aset dan liabilitas kegiatan usaha pembangkitan listrik PLN akan beralih secara hukum menjadi hak serta kewajiban dari Perusahaan.

Perusahaan menentukan apakah transaksi pengalihan aset dan liabilitas kegiatan usaha pembangkitan listrik ke Perusahaan merupakan suatu kombinasi bisnis dengan menerapkan definisi dalam PSAK No. 22, 'Kombinasi Bisnis', yang mensyaratkan bahwa aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil-alih merupakan suatu bisnis sebelum Perusahaan dapat menerapkan PSAK No. 22. Suatu bisnis terdiri dari input dan proses yang diterapkan pada input tersebut yang berkontribusi terhadap kemampuan untuk menghasilkan output.

Pertimbangan diperlukan dalam menentukan apakah pengalihan aset dan liabilitas usaha pembangkitan tenaga listrik kepada Perusahaan memenuhi definisi kombinasi bisnis entitas sepengendali dalam PSAK No. 22 dan PSAK No. 38. Perusahaan telah mempertimbangkan aset-aset yang dialihkan dan aktivitas usaha pembangkitan listrik yang diperoleh terdiri dari input dan proses substansial yang bersama-sama memberikan kontribusi signifikan kemampuan untuk memproduksi listrik.

Penentuan informasi keuangan kegiatan usaha pembangkitan listrik yang dialihkan

Penerapan PSAK No. 38 mensyaratkan untuk melakukan penyajian kembali laporan keuangan seolah-olah penggabungan bisnis telah dilakukan dari periode sebelumnya. Mempertimbangkan informasi keuangan kegiatan usaha pembangkitan listrik yang dialihkan tidak tersedia secara terpisah, maka manajemen menyusun informasi keuangan tersebut dengan menggunakan pendekatan berdasarkan identifikasi langsung atas aktivitas operasional seperti pendapatan dan produksi yang berkaitan dengan area bisnis unit pembangkit listrik yang dialihkan dan alokasi beban berdasarkan cost driver terkait.

Penentuan umur sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian mengandung unsur sewa membutuhkan pertimbangan yang material untuk menilai apakah perjanjian tersebut memberikan hak untuk mengendalikan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian dan hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian, karena jika hal tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit di perjanjian.

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES (continued)

Determination of the business combination for the transfer of assets and liabilities of PLN's power generation business to the Company

As of 1 January 2023, several assets and liabilities of PLN's power generation business activities were legally transferred to become the rights and obligations of the Company.

The Company shall determine whether the transfer of assets and liabilities of power generation business to the Company is a business combination by applying the definition in the SFAS No. 22, 'Business Combination', which requires that the assets acquired and liabilities assumed constitute a business before the Company can apply the SFAS No. 22. A business consists of inputs and processes applied to those inputs that have the ability to contribute to the creation of outputs.

Judgement is required to determine whether the transfer of assets and liabilities of power generation business to the Company meets the definition of business combination under common control under SFAS No. 22 and SFAS No. 38. the Company has considered the set of assets transferred and power generation activities acquired consists of an input and a substantive process that together significantly contribute to the ability to produce electricity.

Determination of financial information of power generation business activities being transferred

The implementation of SFAS No. 38 requires restatement of the financial statements as if the business combination had been carried out from the previous period. Considering that the financial information of the transferred power generation business activities is not available separately, management prepared the financial information using an approach based on direct identification of operational activities such as revenue and production related to the transferred power plant generating unit business area and allocation of expenses based on the related cost drivers.

Determining lease term

Determining whether an arrangement is or contains a lease requires careful judgement to assess whether the arrangement conveys a right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use and right to direct the use of the asset, even if the right is not explicitly specified in the arrangement.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAK/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 9/42 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. PERTIMBANGAN AKUNTANSI PENTING DAN ESTIMASI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Penentuan umur sewa (lanjutan)

Dalam menentukan jangka waktu sewa, Grup mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang menimbulkan insentif ekonomi untuk menggunakan opsi perpanjangan, atau tidak menggunakan opsi penghentian. Opsi perpanjangan (atau tahun setelah opsi penghentian kontrak kerja) hanya termasuk dalam jangka waktu sewa jika cukup pasti akan diperpanjang (atau tidak dihentikan). Umur sewa dinilai kembali ketika opsi sebenarnya diambil (atau tidak diambil) atau grup menjadi berkewajiban untuk mengambil (atau tidak mengambil) opsi tersebut. Penilaian kepastian yang wajar hanya direvisi ketika peristiwa signifikan atau perubahan signifikan terjadi, yang mempengaruhi penilaian ini, dan hal tersebut dalam pengendalian penyewa.

Sumber ketidakpastian estimasi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi lainnya pada akhir tahun pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan kewajiban dalam tahun pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini.

Provisi atas kerugian kredit ekspektasian piutang usaha dan aset keuangan lainnya

Dalam menentukan kerugian kredit ekspektasian piutang, manajemen diharuskan untuk melakukan pertimbangan dalam menentukan apa yang dianggap sebagai peningkatan risiko kredit yang signifikan dan dalam membuat asumsi dan estimasi untuk memasukkan informasi yang relevan tentang peristiwa masa lalu, kondisi saat ini dan prakiraan kondisi ekonomi. Pertimbangan telah diterapkan dalam menentukan umur dan titik pengakuan awal piutang.

Tingkat penyisihan tertentu dievaluasi oleh manajemen berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kolektibilitas akun. Dalam kasus ini, Grup menggunakan penilaian berdasarkan fakta dan keadaan terbaik yang tersedia, termasuk hubungan dengan status kredit pelanggan berdasarkan laporan kredit pihak ketiga dan faktor pasar yang diketahui, untuk menaksir cadangan khusus untuk pelanggan terhadap jumlah yang jatuh tempo dalam jumlah yang diharapkan dapat diklaim. Cadangan spesifik ini dievaluasi ulang dan disesuaikan karena informasi tambahan yang diterima mempengaruhi jumlah yang diestimasi.

4. *CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES (continued)*

Determining lease term (continued)

In determining the lease term, management considers all facts and circumstances that create an economic incentive to exercise an extension option, or not exercise a termination option. Extension options (or years after termination options) are only included in the lease term if the lease is reasonably certain to be extended (or not terminated). The lease term is reassessed if an option is actually exercised (or not exercised) or the group becomes obliged to exercise (or not exercise) it. The assessment of reasonable certainty is only revised if a significant event or a significant change in circumstances occurs, which affects this assessment, and that is within the control of the lessee.

Sources of estimation uncertainty

The key assumptions concerning the future and the other key sources of estimation at the end of the reporting year, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year, are discussed below.

Provision for expected credit losses of trade receivables and other financial assets

In determining ECL, management is required to exercise judgement in defining what is considered to be a significant increase in credit risk and in making assumptions and estimates to incorporate relevant information about past events, current conditions and forecasts of economic conditions. Judgement has been applied in determining the lifetime and point of initial recognition of receivables.

The level of a specific provision is evaluated by management on the basis of factors that affect the collectability of the accounts. In these cases, the Group uses judgement based on the best available facts and circumstances, including but restricting with the customers credits status based on third-party credit reports and known market factors, to record specific reserves for customers against amounts due in amounts that it expects to collect. These specific reserves are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts estimated.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN SENTRAS ANAKANYAIANG ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 3-K2 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. PERTIMBANGAN AKUNTANSI PENTING DAN ESTIMASI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Sumber ketidakpastian estimasi (lanjutan)

Sewa - estimasi suku bunga pinjaman inkremental

Karena Grup tidak dapat dengan mudah menentukan suku bunga implisit, manajemen menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup sebagai tingkat diskonto. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, yang banyak di antaranya memerlukan estimasi untuk dapat secara andal mengukur penyesuaian yang diperlukan untuk sampai pada tingkat diskonto akhir.

Dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Grup mempertimbangkan faktor-faktor utama berikut: nilai kredit korporat Grup, jangka waktu sewa, jangka waktu pembayaran sewa, lingkungan ekonomi, waktu di mana sewa dimasukkan, dan mata uang di mana pembayaran sewa ditentukan.

Taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap

Masa manfaat setiap aset tetap Grup, ditentukan berdasarkan periode kegunaan yang diharapkan dari aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direviu secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, kusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset, namun tanpa kemungkinan bahwa hasil operasi di masa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan beban yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Perubahan masa manfaat aset tetap dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui dan nilai tercatat aset tetap.

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES (continued)

Sources of estimation uncertainty (continued)

Leases - estimation of the incremental borrowing rate

Since the Group cannot readily determine the implicit rate, management uses the Group's incremental borrowing rate as a discount rate. There are a number of factors to consider in determining an incremental borrowing rate, many of which need estimation in order to be able to reliably quantify any necessary adjustments to arrive at the final discount rates.

In determining the incremental borrowing rate, the Group considers the following main factors: the Group's corporate credit rate, the lease term, the lease payment term, the economic environment, the time at which the lease is entered into, and the currency in which the lease payments are denominated.

Estimated useful lives of property, plant and equipment

The useful life of each item of the Group's property, plant and equipment is estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

A change in the estimated useful life of any item of property, plant and equipment would affect the recorded depreciation expense and the carrying values of property, plant and equipment.

PT PLN (PERSERO) DAN ANAK PERUSAHAAN / PT PLN (PERSERO) AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 3/44 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. PERTIMBANGAN AKUNTANSI PENTING DAN ESTIMASI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Sumber ketidakpastian estimasi (lanjutan)

Nilai wajar aset tetap dan properti investasi yang menggunakan model revaluasi

Dalam proses penilaian, manajemen, dengan bantuan penilai independen, menentukan data dan asumsi, menelaah metode penilaian serta berdiskusi dengan penilai. Pendekatan dan metode yang digunakan dalam melakukan revaluasi tergantung pada kelas aset. Walaupun data dan asumsi Grup dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada data input atau asumsi yang digunakan cepat berpengaruh secara signifikan terhadap nilai aset yang menggunakan model revaluasi.

Rincian dari pendekatan dan data input signifikan yang digunakan dalam melakukan revaluasi aset tetap dan properti investasi dungkapkan masing-masing dalam Catatan 13 dan 14.

Imbalan pascakerja

Nilai kini kewajiban pensiun tergantung pada sejumlah faktor yang ditentukan berdasarkan basis dari aktuaria dengan menggunakan sejumlah asumsi. Asumsi yang digunakan dalam menentukan beban/(pendapatan) bersih untuk pensiun termasuk tingkat diskonto, perubahan remuneasi masa depan, tingkat pengunduran karyawan, tingkat harapan hidup dan periode sisa yang diharapkan dari masa aktif karyawan. Setiap perubahan dalam asumsi-asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat atas kewajiban pensiun.

Grup menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada setiap akhir tahun. Tingkat suku bunga inilah yang digunakan untuk menentukan nilai kini dari estimasi arus kas keluar masa depan yang akan dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban pensiun. Dalam menentukan tingkat diskonto yang sesuai, Grup menggunakan tingkat suku bunga obligasi korporasi berkualitas tinggi jasa obligasi pemerintah, dengan pertimbangan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporasi berkualitas tinggi dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan memiliki waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo kewajiban pensiun yang bersangkutan.

Asumsi kunci kewajiban pensiun lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini.

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES (continued)

Sources of estimation uncertainty (continued)

Fair value of property, plant and equipment and investment properties under revaluation model

Management, with the assistance of an independent valuer, determines the data inputs and assumptions, assesses the valuation methods and holds discussions with the valuers as part of the valuation process. The approaches and methods used in the revaluation depend on the asset class. While it is believed that the Group's data and assumptions are reasonable and appropriate, significant changes in data inputs or significant changes in assumptions may materially affect the value of assets that use the revaluation model.

Details of the valuation approach and significant data inputs used in the revaluation of property, plant and equipment and investment properties are disclosed in Notes 13 and 14, respectively.

Post-employment benefits

The present value of the pension obligation depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost/(income) for pensions include the discount rate, future remuneration changes, employee attrition rates, life expectancy and the expected remaining service periods of employees. Any changes in these assumptions will have an impact on the carrying amount of the pension obligation.

The Group determines the appropriate discount rate at the end of each year. This is the interest rate used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the related pension obligations. In determining the appropriate discount rate, the Group considers the interest rates of high quality corporate bonds (or government bonds, if there is no deep market for high quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension obligation.

Other key assumptions for pension obligations are based in part on current market conditions.

PT PLN (PERSERO) DAN SENTRAS ANANTYAJAND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 3/45 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. PERTIMBANGAN AKUNTANSI PENTING DAN ESTIMASI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Sumber ketidakpastian estimasi (lanjutan)

Pajak penghasilan

Perhitungan beban pajak penghasilan Grup memerlukan pertimbangan dan asumsi dalam menentukan pengurangan beban tertentu selama proses pengestimasian. Semua pertimbangan dan estimasi yang dibuat manajemen dapat dipertanyakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sebagai akibatnya, terjadi ketidakpastian dalam penentuan pajak. Resolusi posisi pajak yang diambil oleh Grup, melalui negosiasi dengan otoritas pajak yang relevan dapat berlangsung bertahun-tahun dan sangat sulit untuk memprediksi hasil akhirnya. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan pajak tangguhan dalam tahun dimana penentuan pajak tersebut dibuat.

Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul dari rugi pajak dan perbedaan temporer, diakui apabila dianggap lebih mungkin daripada tidak bahwa mereka dapat diterima kembali, dimana hal ini tergantung pada kecukupan pembentukan laba kena pajak di masa depan. Asumsi atas pembentukan laba kena pajak sangat dipengaruhi oleh estimasi dan asumsi manajemen atas tingkat penjualan dan biaya-biaya tertentu yang berdapat risiko ketidakpastian, sehingga ada kemungkinan perubahan estimasi dan asumsi tersebut akan mengubah proyeksi laba kena pajak di masa mendatang.

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES (continued)

Sources of estimation uncertainty (continued)

Income taxes

The calculations of income tax expense for the Group require judgements and assumptions in determining the deductibility of certain expenses during the estimation process. All judgements and estimates made by management may be challenged by the Directorate General of Taxation. As a result, the ultimate tax determination becomes uncertain. The resolution of tax positions taken by the Group, through negotiations with the relevant tax authorities can take several years to complete and in some cases it is difficult to predict the ultimate outcome. Where the final outcome of these matters is different from the amounts initially recorded, such differences will have an impact on the income tax and deferred income tax provision in the year in which this determination is made.

Deferred tax assets, including those arising from tax losses carried forward and temporary differences, are recognized only where it is considered more likely than not that they will be recovered, which is dependent on the generation of sufficient future taxable profits. The assumptions about the generation of future taxable profits are heavily affected by the level of sales and the associated costs which are subject to risk and uncertainty and hence there is a possibility that changes in circumstances will alter the projected future taxable profits.

5. PENGALIHAN ASET DAN LIABILITAS KEGIATAN USAHA PEMBANGKITAN LISTRIK PLN

Pada tanggal 21 September 2022, Kementerian BUMN resmi meluncurkan Holding dan Subholding PLN. Perusahaan merupakan salah satu anak perusahaan PLN yang bertransformasi menjadi subholding PLN sebagai Generation Company 1.

Pengalihan ini dilaksanakan melalui Surat Keputusan Menteri BUMN Republik Indonesia No. S-666/MBU/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 perihal Persetujuan Pembentukan Holding dan Subholding PLN Maka/Tahap Legal End-State serta Restrukturisasi dan Pengalihan Hak yang dituangkan dalam Akta Notaris No. 10 tanggal 30 Desember 2022 dari Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta yang menyatakan bahwa sebagian aset dan liabilitas kegiatan usaha pembangkitan listrik PLN akan beralih secara hukum menjadi hak serta kewajiban Perusahaan.

5. TRANSFER OF ASSETS AND LIABILITIES OF PLN'S POWER GENERATION BUSINESS ACTIVITIES

On 21 September 2022, the Ministry of SOEs officially launched the Holding and Subholding of PLN. The Company is one of the subsidiaries of PLN which was transformed into PLN Subholding as Generation Company 1.

This transfer was formalized through Decision Letter of the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia No. S-666/MBU/12/2022 dated 30 December 2022, regarding the Approval for the Establishment of Holding and Subholding of PLN for the Legal End-State Period/Stage as well as the Restructuring and Transfer of Assets as stated in the Notarial Deed No. 10, dated 30 December 2022, of Muhammad Hanafi, S.H., Notary in Jakarta, which states that some of the assets and liabilities of PLN's power generation business activities will legally transfer to the rights and obligations of the Company.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAK/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 6/48 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

5. PENGALIHAN ASET DAN LIABILITAS KEGIATAN USAHA PEMBANGKITAN LISTRIK PLN (lanjutan)

Sesuai dengan PSAK No. 38, "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali", transaksi antar entitas sepengendali ini dibukukan dengan menggunakan metode seperti penyatuan kepemilikan ("*pooling of interest method*"). Dengan menggunakan metode ini, laporan keuangan konsolidasian Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 1 Januari 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah disajikan kembali sedemikian rupa sedemikian pengalihan aset dan liabilitas tersebut telah efektif sejak tanggal 1 Januari 2022, yang merupakan permulaan dari periode sajian paling awal. Selain itu, Grup juga telah menyesuaikan dampak eliminasi sehubungan dengan transaksi pendapatan dan beban, piutang dan utang terkait antara kedua belah pihak.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian telah disajikan kembali hanya untuk akun-akun yang terkena dampak atas pengalihan kegiatan usaha pembangkitan listrik PLN.

Jumlah penambahan modal saham yang diperoleh Perusahaan atas dampak dari pengalihan sebagian aset dan liabilitas dari PLN diukur berdasarkan nilai wajar bisnis yang dialihkan ke subholding berdasarkan Laporan Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP").

Perubahan nilai tambahan modal disetor Perusahaan dikabatkan adanya selisih antara nilai buku bisnis yang dialihkan dan nilai wajarnya termasuk di dalamnya adalah transfer surplus revaluasi aset tetap yang menjadi bagian dari bisnis yang diterima dari PLN. Perhitungan tambahan modal disetor pada tanggal pengalihan adalah sebagai berikut:

5. TRANSFER OF ASSETS AND LIABILITIES OF PLN'S POWER GENERATION BUSINESS ACTIVITIES (continued)

In accordance with SFAS No. 38, "Business Combinations of Entities Under Common Control", transactions between entities under common control are recorded using methods such as pooling of interest method. Using this method, the Company's consolidated financial statements as at 31 December 2022 and 1 January 2022 and for the year ended on those dates have been restated in such a way as if the transfer of assets and liabilities had been effective since 1 January 2022, which is the beginning of the earliest serving period. In addition, the Group has also adjusted for the impact of account eliminations in relation to related revenue and expenses, receivables and payables transactions between both parties.

The notes to the consolidated financial statements has been restated only for those accounts impacted by the transfer of PLN's power generation business activities.

The amount of additional paid in capital obtained by the Company as a result of the transfer of some assets and liabilities from PLN is measured based on the fair value of the business transferred to the subholding based on Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") Report.

The change in the value of the Company's additional paid-in capital is due to the difference between the book value of the business transferred and its fair value, including the transfer of the revaluation surplus of property, plant and equipment which are part of the business received from PLN. The calculation of additional paid-in capital on the transfer date is as follows:

	1 Januari/ *January 2023*	
Jumlah aset	159,135,099	*Total assets*
Jumlah liabilitas	(19,660,384)	*Total liabilities*
Jumlah akumulasi penghasilan komprehensif lainnya	(37,918,671)	*Total accumulated other comprehensive income*
Nilai buku aset bersih yang dialihkan	91,556,044	*Book value of net assets transferred*
Nilai imbalan yang dialihkan melalui penerbitan saham	(191,255,249)	*Considerations transferred through issuance of shares*
Selisih transaksi pengalihan aset dan liabilitas	(99,699,205)	*Difference in value from transfer assets and liabilities*

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 6/47 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

6. PENGALIHAN ASET DAN LIABILITAS KEGIATAN USAHA PEMBANGKITAN LISTRIK PLN (lanjutan)

Laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal 1 Januari dan 31 Desember 2022 disajikan kembali sebagai berikut:

6. TRANSFER OF ASSETS AND LIABILITIES OF PLN'S POWER GENERATION BUSINESS ACTIVITIES (continued)

The Group's consolidated financial statements as at 1 January and 31 December 2022, which has been restated is as follows:

	1 Januari/January 2022					
	Disajikan sebelumnya/ Previously presented	Dana Dan	Jumlah/ Total	Dikinsel/ Eliminated	Disajikan kembali/ As restated	
LAPORAN POSISI KEUANGAN						STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
ASET						ASSETS
ASET LANCAR						CURRENT ASSETS
Piutang usaha	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Trade receivables
Piutang lainnya - bagian lancar	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	Other receivables - current portion
Persediaan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	Inventories
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	Prepaid expenses and advance
ASET TIDAK LANCAR						NON-CURRENT ASSETS
Jaminan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	Property, plant and equipment
Jaminan lancar lain	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	Other non-current assets
EKUITAS DAN LIABILITAS						EQUITY AND LIABILITIES
LIABILITAS						LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK						CURRENT LIABILITIES
Utang usaha	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Trade payables
Utang lain-lain	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	Other payables
Beban masih harus dibayar	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	Accrued expenses
Liabilitas sewa - bagian jangka pendek	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	Lease liabilities - short-term portion
LIABILITAS JANGKA PANJANG						NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	Deferred tax liabilities - net
Liabilitas sewa - bagian jangka panjang	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	Lease liabilities - long-term portion
EKUITAS						EQUITY
Ekuitas mengikut entity	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	Equity of merging entity
Penghasilan komprehensif lain	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	Other comprehensive income

PT PLN (PERSERO) DAN ANAK PERUSAHAAN / PT PLN (PERSERO) AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/48 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

5. PENGALIHAN ASET DAN LIABILITAS KEGIATAN USAHA PEMBANGKITAN LISTRIK PLN (lanjutan)

5. TRANSFER OF ASSETS AND LIABILITIES OF PLN'S POWER GENERATION BUSINESS ACTIVITIES (continued)

Laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal 1 Januari dan 31 Desember 2022 disajikan kembali sebagai berikut: (lanjutan)

The Group's consolidated financial statements as at 1 January and 31 December 2022, which has been restated as as follows: (continued)

	31 Desember/December 2022					
	Disajikan sebelumnya/ Previously presented	Grup Dpt	Jumlah/ Total	Eliminasi/ Elimination	Disajikan kembali/ As restated	
LAPORAN POSISI KEUANGAN						STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
ASET						ASSETS
ASET LANCAR						CURRENT ASSETS
Piutang usaha	10.220.234	-	10.220.234	(1.664.237)	10.555.917	Trade receivables
Piutang lain-lain - bagian lancar	317.918	30.380	347.298	-	347.298	Other receivables - current portion
Persediaan	1.401.282	2.796.433	4.197.715	-	4.197.715	Inventories
ASET TIDAK LANCAR						NON-CURRENT ASSETS
Aset tetap	172.231.280	104.446.273	276.676.173	-	276.676.173	Property, plant and equipment
Aset tidak berwujud lain	203.848	85.157	289.287	-	289.287	Other non-current assets
EKUITAS DAN LIABILITAS						EQUITY AND LIABILITIES
LIABILITAS						LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK						CURRENT LIABILITIES
Utang usaha	5.257.910	8.899.201	8.257.110	(1.664.237)	7.257.110	Trade payables
Utang lain-lain	756.246	13.996	770.242	-	770.242	Other payables
Beban masih harus dibayar	98.026	15.275	113.301	-	113.301	Accrued expenses
Liabilitas sewa - bagian jangka pendek	19.217	143.039	162.256	-	162.256	Lease liabilities - short-term portion
LIABILITAS JANGKA PANJANG						NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	2.203.736	10.835.677	13.039.413	-	13.039.413	Deferred tax liabilities - net
Liabilitas sewa - bagian jangka panjang	32.284	1.402.884	1.435.168	-	1.435.168	Lease liabilities - long-term portion
EKUITAS						EQUITY
Ekuitas induk entitas	-	21.299.261	21.299.261	-	21.299.261	Equity of parent entity
Penghasilan komprehensif lain	10.219.234	27.241.627	37.460.861	-	37.460.861	Other comprehensive income

PT PLN (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/40 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

5. PENGALIHAN ASET DAN LIABILITAS KEGIATAN USAHA PEMBANGKITAN LISTRIK PLN (lanjutan)

Laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal 1 Januari dan 31 Desember 2022 disajikan kembali sebagai berikut: (lanjutan)

5. TRANSFER OF ASSETS AND LIABILITIES OF PLN'S POWER GENERATION BUSINESS ACTIVITIES (continued)

The Group's consolidated financial statements as at 1 January and 31 December 2022, which has been restated is as follows: (continued)

	31 Desember/December 2022					
	Disajikan sebelumnya/ Previously presented	Dampak/ Impact	Anak/ Subsidiary	Eliminasi/ Elimination	Disajikan kembali/ As restated	
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN						STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
PENDAPATAN USAHA						REVENUE
Penjualan tenaga listrik	21,882,076	2,107,702	23,989,778	-	23,989,778	Sales of electricity
Pendapatan usaha lainnya	2,216,701	8,127	2,224,828	2,211,080	13,748	Other operating revenue
BEBAN USAHA						OPERATING EXPENSES
Bahan bakar dan pelumas	(11,882,078)	(7,108,198)	(18,990,276)	2,211,080	(16,779,196)	Fuel and lubricants
Pembelian listrik	(2,288,087)	(1,198,217)	(3,486,304)	-	(3,486,304)	Purchases
Penyusutan	(3,203,282)	(3,739,217)	(6,942,499)	-	(6,942,499)	Depreciation
Kepegawaian	(1,471,388)	(713,123)	(2,184,511)	-	(2,184,511)	Employee costs
Pembelian tenaga listrik	(374,438)	(676,888)	(1,051,326)	-	(1,051,326)	Purchased electricity
Lainnya	(1,142,767)	(324,338)	(1,467,110)	-	(1,467,110)	Others
Kerugian kurs						Losses on foreign exchange - net
Mata uang asing - bersih	(1,313)	(87,479)	(88,792)	-	(88,792)	Foreign currencies
Beban keuangan	(3,487)	(284,202)	(271,188)	-	(271,188)	Finance costs
Penghasilan (beban) lainnya - bersih	348,824	(71,479)	277,345	-	277,345	Other income (expense) - net
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(1,123,317)	(1,916,462)	(3,039,479)	-	(3,039,479)	INCOME TAX EXPENSES
LAPORAN ARUS KAS						STATEMENTS OF CASH FLOW
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI						CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	41,338,377	19,931,352	61,271,729	-	61,271,729	Cash receipts from customers
Pembayaran kas kepada pemasok, karyawan dan lainnya	(19,380,473)	(15,738,278)	(35,091,751)	-	(35,091,751)	Cash paid to suppliers, employees and others
Pembayaran bunga	-	(246,202)	(246,202)	-	(246,202)	Interest expense paid
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI						CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Perolehan aset tetap	(1,184,398)	(1,303,217)	(2,788,103)	-	(2,788,103)	Purchase of property, plant and equipment
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN						CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Pembayaran liabilitas sewa	(35,318)	(35,786)	(68,103)	-	(68,103)	Payments of lease liabilities
Kas yang untuk pendanaan umum[1]	-	(203,808)	(203,808)	-	(203,808)	Cash used for general funding activities[1]

[1] Kas yang untuk pendanaan umum yang tidak dikaitkan dengan aktivitas tertentu dan untuk arus keluar pengeluaran lagi atas utang perbangkan Grup.

[1] Cash used for general funding not attributable to specified activities and for cash flows from public financial institutions borrowings.

6. ENTITAS ANAK

Perusahaan memiliki saham entitas anak, baik langsung maupun tidak langsung sebagai berikut:

6. SUBSIDIARIES

The Company has ownership interests directly or indirectly in the following subsidiaries:

Induk usaha/ Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Jenis usaha/ Nature of business	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership 31 Dec 2023	31 Dec 2022	1 Jan 2022	Tahun operasi komersial/ Year of commercial operations	Jumlah aset sebelum eliminasi/ Total assets before elimination 31 Desember/December 2023	31 Desember/December 2022	1 Januari/January 2022
PT PLN Energi Primer Indonesia, PT Pembangkitan Jawa-Bali, Nusantara Power, dan PLN Nusantara Power, and its subsidiary	Indonesia	Pengelola dan pengembang pembangkit listrik/ Operation and development of power plant and electricity/ Pembangkit dan transmisi listrik/ Power plant and transmission/ Pembangkit dan transmisi listrik/ Power plant and transmission	99.99	99.99	99.99	2011	177,934	138,888	141,110
PT [illegible]	Indonesia	Jasa lainnya/ Other services	99.99	99.99	99.99	2008	80,177	71,180	14,000

PT PLN NUSANTARA POWER DAN SENTRAS ANAKPERUSAHAAN
Lampiran 5/50 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

6. SENTRAS ANAK (lanjutan)

Perusahaan memiliki saham entitas anak, baik langsung maupun tidak langsung sebagai berikut: (lanjutan)

6. SUBSIDIARIES (continued)

The Company has ownership interests directly or indirectly in the following subsidiaries: (continued)

Entitas anak / Subsidiaries	Domisili / Domicile	Jenis usaha / Nature of business	Persentase kepemilikan / Percentage of ownership			Tahun operasi komersial / Year commercial operations	Jumlah aset sebelum eliminasi / Total assets before eliminations		
			31 Des. / Dec. 2023	31 Des. / Dec. 2022	Tahun / Year 2021		31 Desember / December 2023	31 Desember / December 2022	1 Januari / January 2022
PT PLN Nusantara Power Services (PLN NPS) (eks/ex PT Pembangkitan Jawa-Bali Investasi sebelumnya/ previously)	Jakarta	Bidang pengelola dan konsultasi, dan operasi dan pemeliharaan serta operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik / Managing, consultation and operation and maintenance of electricity assets	99,01	99,01	99,01	2001	3.140.024	1.932.143	1.127.322
PT Nusantara Power Investasi (NPI) [1]	Jakarta	Bidang pengelola dan konsultasi, dan operasi dan pemeliharaan serta operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik / Managing, consultation and operation and maintenance of electricity assets	100,00	100,00	-	2016	102.788	100.000	-
PT Nusantara Energi Service (NES) [1]	Jakarta	Bidang dan konsultasi / Supervision and consultation	-	-	99,00	2012	-	-	12.000
PT Energi Indonesia (EI)	Palembang	Pertambangan batubara, perdagangan dan jasa / Trade, construction, mining and agriculture	75,07	75,07	75,07	2005	480.017	480.000	480.173
PT PLN Nusantara Renewables (PLN NR) (eks/ex PT Pembangkitan Jawa-Bali Investasi sebelumnya/ previously)	Jakarta	Investasi pembangkitan / Investment in electricity	100,00	100,00	100,00	2016	4.230.234	4.230.176	4.130.000
PT Pembangkitan Jawa-Bali Unit Pelaksana Proyek (PJBUP) [1] (eks/ex PT Pembangkitan Jawa-Bali Investasi sebelumnya/ previously)	Jakarta	Pembangkit listrik dan pengelola fasilitas / Investment in electricity (pass-through)	100,00	100,00	100,00	2005	67.100	64.000	17.964
PT Pembangkitan Jawa-Bali Services (PJBS) [1]	Jakarta	Pembangkit listrik dan jasa pemeliharaan / Providing integrated services	100,00	100,00	100,00	2005	340.000	100.000	100.100
PT Pikit Jawa Timur Sun Energy (PJBE)	Jakarta	Pembangkit listrik dan jasa konsultasi, serta operasi dan pemeliharaan / Generation and service, including engineering, supervision, consultation and operation and maintenance of electricity assets	51,00	51,00	51,00	2016	811.100	770.000	500.000

[1] Perusahan dikendalikan melalui subsidiary

Berdasarkan Akta Notaris No. 38 tanggal 27 April 2022 dari Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan mengadakan perjanjian jual beli saham untuk membeli saham PLN NPS dari Yayasan Kesejahteraan PT Pembangkitan Jawa-Bali (YK PJB), dimana Perusahaan membeli sebagian kepemilikan saham PLN NPS atau setara dengan 1% kepemilikan atas PLN NPS dengan nilai pengalihan sebesar Rp11.104. Nilai buku bersih PLN NPS untuk porsi kepemilikan YK PJB adalah sebesar Rp9.812.

Pada tahun 2022, Perusahaan melakukan penambahan penyertaan modal sebesar Rp65.384 sehingga nilai penyertaan pada PLN NPC menjadi Rp112.729.

Pada tahun 2022, PLN NPC, entitas anak, melakukan akuisisi PRN dan divestasi REC dengan entitas sepengendali. Lihat Catatan 32 untuk informasi terkait nilai transaksi.

Based on Notarial Deed No. 38 dated 27 April 2022 of Lenny Janis Ishak, S.H., Notary in Jakarta, the Company entered into a share sale and purchase agreement to purchase shares of PLN NPS from Yayasan Kesejahteraan PT Pembangkitan Jawa-Bali (YK PJB), under which the Company purchased a part of shares or equivalent to 1% ownership of PLN NPS with a total transaction value of Rp11,104. The net book value of the YK PJB's ownership portion in PLN NPS was Rp9,812.

In 2022, the Company made additional investments amounting to Rp65.384, therefore, the carrying amount of investments in PLN NPC amounting to Rp112.729.

In 2022, PLN NPC, a subsidiary, acquired PRN and divested REC with an entity under common control. Refer to Note 32 for information regarding the transaction value.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN SENTRAS ANAKANYAHAND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/31 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

6. SENTRAS ANAK (lanjutan)

Pada tahun 2023, PLN NR, entitas anak, melakukan penambahan penyertaan modal sebesar AS$7.925.400 (setara dengan Rp114.916) sehingga nilai penyertaan pada PJB Investindo menjadi Rp207.677.

Pada tahun 2023, PJB Investindo, entitas anak tidak langsung, melakukan penambahan penyertaan modal sebesar AS$7.925.625 (setara dengan Rp119.573) sehingga nilai penyertaan pada PJBIC menjadi Rp245.571.

6. SUBSIDIARIES (continued)

In 2023, PLN NR, a subsidiary, made additional investments amounting to US$7,925,400 (equivalent to Rp114,916), therefore, the carrying amount of investments in PJB Investindo amounting to Rp207,677.

In 2023, PJB Investindo, an indirect subsidiary, made additional investments amounting to US$7,925,625 (equivalent to Rp119,573), therefore, the carrying amount of investments in PJBIC amounting to Rp245,571.

7. KAS DAN SETARA KAS

7. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	31 Desember December 2023	31 Desember December 2022	
Kas	2.082	1.473	Cash on hand
Bank			Cash in banks
Pihak berelasi (Catatan 32)			Related parties (Note 32)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")			PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")
Rupiah	2.461.040	2.557.781	Rupiah
AS$	56.939	97.266	US$
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")			PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")
Rupiah	928.948	928.448	Rupiah
AS$	14.466	469.301	US$
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")			PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")
Rupiah	2.339.845	4.969.399	Rupiah
AS$	17.124	26.581	US$
PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI")	35.487	13.008	PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI")
Sub-jumlah	6.360.388	9.016.413	Sub-total
Pihak ketiga			Third parties
PT Bank China Hoa Tbk ("Bank China Hoa")			PT Bank China Hoa Tbk ("Bank China Hoa")
Rupiah	74.093	88.334	Rupiah
AS$	16	125	US$
PT Bank KB Bukopin Tbk ("Bank Bukopin")	338	784	PT Bank KB Bukopin Tbk ("Bank Bukopin")
Sub-jumlah	74.447	89.243	Sub-total
Jumlah bank	6.434.835	9.105.656	Total cash in banks

PT PLN NUSANTARA POWER DAN SENTRAS ANAKPERUSAHAAN
Lampiran B82 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

7. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan) / 7. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022	
Deposito berjangka			Time deposits
Pihak berelasi (Catatan 32)			Related parties (Note 32)
Bank Mandiri	30,000	85,000	Bank Mandiri
BRI			BRI
Rupiah	105,000	135,000	Rupiah
AS$	54,272	18,557	US$
BNI			BNI
Rupiah	20,000	15,384	Rupiah
AS$	189,829	288,244	US$
Sub-jumlah	409,101	541,215	Sub-total
Pihak ketiga			Third party
Bank DKI Nega	1,12	1,12	Bank DKI Nega
Jumlah deposito berjangka	409,213	541,327	Total time deposits
Jumlah	5,846,488	5,156,156	Total
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun			Interest rates per annum on time deposits
Rupiah	2.25% - 4.75%	2.25% - 5.00%	Rupiah
AS$	1.75% - 4.25%	0.25% - 1.75%	US$
Jangka waktu	1 - 3 bulan/ months	1 - 3 bulan/ months	Maturity

Lihat Catatan 32 untuk informasi saldo dan transaksi-transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 32 for the balances and transactions with related parties.

8. DEPOSITO BERJANGKA / 8. TIME DEPOSITS

	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022	
Pihak berelasi (Catatan 32)			Related parties (Note 32)
BRI			BRI
Rupiah	125,000	360,000	Rupiah
AS$	388,408	37,431	US$
BNI			BNI
AS$	50,692	31,482	US$
Bank Mandiri			Bank Mandiri
Rupiah	100	100	Rupiah
AS$	318,501	162,213	US$
Jumlah, bersih	882,702	491,226	Total, net
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun			Interest rates per annum on time deposits
Rupiah	2.25% - 5.50%	2.25% - 5.50%	Rupiah
AS$	4.50% - 5.00%	2.00% - 2.00%	US$
Jangka waktu	6 - 12 bulan/ months	6 - 12 bulan/ months	Maturity

Lihat Catatan 32 untuk informasi saldo dan transaksi-transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 32 for the balances and transactions with related parties.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 8.02 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

9. HASIL BANK DAN DEPOSITO BERJANGKA DIBATASI PENGGUNAANNYA

9. RESTRICTED CASH IN BANKS AND TIME DEPOSITS

	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022	
Jaminan bank garansi			Bank guarantees
Pihak berelasi (Catatan 33)			Related parties (Note 33)
Bank Mandiri			Bank Mandiri
ASB	39,369	112,363	USD
BRI			BRI
Rupiah	19,808	19,880	Rupiah
ASB	31,002	181,784	USD
BNI	2,594	1,127	BNI
Sub-jumlah	92,803	394,713	Sub-total
Pihak ketiga			Third party
Bank OCBC Nisp	50,326	43,938	Bank OCBC Nisp
Jumlah	142,129	338,651	Total
Dikurangi: bagian lancar	(89,005)	(301,420)	Less: current portion
Bagian tidak lancar	53,124	37,231	Non-current portion

Jaminan bank garansi merupakan rekening bank dan deposito berjangka yang digunakan untuk jaminan pelaksanaan proyek dan pemberian jasa oleh Grup.

Bank guarantees represent cash in banks and time deposits were used as collateral for projects and services provided by the Group.

Pada tanggal 23 Desember 2022, PLN NR dan PJBIC memberikan jaminan berupa Standby Letter of Credit ("SBLC") kepada Bank Mandiri sebesar AS$2,550,000 (setara dengan Rp39,369) (2022: Rp39,760) untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya ("PLTS") Cirata di Kabupaten Purwakarta yang dilaksanakan oleh PT Pembangkitan Jawa Bali Masdar Solar Energy ("PMSE").

As at 23 December 2022, PLN NR and PJBIC provided guarantee in form of Standby Letter of Credit ("SBLC") to Bank Mandiri amounting to US$2,550,000 (equivalent to Rp39,369) (2022: Rp39,760) for Solar Powerplants ("PLTS") Cirata project in Purwakarta Regency which is developed by PT Pembangkitan Jawa Bali Masdar Solar Energy ("PMSE").

Lihat Catatan 33 untuk informasi saldo dan transaksi-transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 33 for the balances and transactions with related parties.

10. PIUTANG USAHA

10. TRADE RECEIVABLES

	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022*	1 Januari/ January 2022*	
Pihak berelasi (Catatan 33)	28,740,900	18,811,038	20,304,399	Related parties (Note 33)
Pihak ketiga	148,017	131,219	39,948	Third parties
Subjumlah	28,888,947	18,942,255	20,344,347	Sub-total
Cadangan kerugian kredit ekspektasian	(47,648)	(36,338)	(33,597)	Allowance for expected credit losses
Jumlah, bersih	28,841,299	18,905,917	20,310,750	Total, net

* Disajikan kembali (lihat Catatan 3)

* As restated (refer to Note 3)

PT PLN NUSANTARA POWER DAN SEKUTU AS ANAKPERUSAHAAN/ PT PLN NUSANTARA POWER AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/54 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

10. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Pergerakan cadangan kerugian kredit ekspektasian adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022	
Saldo awal tahun	39.108	35.667	Balance at beginning of year
Penambahan	9.601	33.641	Additions
Pembalikan cadangan kerugian	(12.281)	-	Reversal of loss allowance
Saldo akhir tahun	37.428	69.308	Balance at end of year

Berdasarkan kesepakatan antara Perusahaan dan PLN, piutang usaha Perusahaan diselinghapuskan terhadap utang usaha terkait pembelian energi primer dan utang bunga atas pinjaman dari pemegang saham (Catatan 34a).

Manajemen berpendapat bahwa cadangan atas kerugian kredit ekspektasian untuk piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 1 Januari 2022 yang dibentuk cukup untuk menutupi risiko kerugian kredit dari piutang usaha.

Lihat Catatan 33 untuk informasi saldo dan transaksi-transaksi dengan pihak berelasi.

10. TRADE RECEIVABLES (continued)

The movement of the allowance for expected credit losses is as follows:

Based on the agreement between the Company and PLN, the trade receivables of the Company were offset with trade payables related to the purchase of primary energy and interest payable on loans from a shareholder (Note 34a).

Management is of the opinion that the established allowance for expected credit losses of trade receivables as at 31 December 2023, 2022 and 1 January 2022 is adequate to cover the credit loss risk of trade receivables.

Refer to Note 33 for the balances and transactions with related parties.

11. PIUTANG KEPADA VENTURA BERSAMA

	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022	
PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali ("SGPJB")	936.940	873.434	PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali ("SGPJB")
PUSE	132.398	12.318	PUSE
Jumlah	969.338	885.752	Total
Dikurangi: bagian lancar	(96.874)	(87.752)	Less: current portion
Bagian tidak lancar	872.464	798.000	Non-current portion

Pada tanggal 20 November 2018, PLN NR, entitas anak, melakukan perjanjian pinjaman jangka panjang dengan SGPJB, dimana PLN NR memberikan pinjaman jangka panjang sebesar AS$56.516.733 dengan suku bunga LIBOR 6 bulan + 4%. Pinjaman akan jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2033. Bunga akan jatuh tempo setiap tanggal 15 Januari dan 15 Juli. PLN NR dan SGPJB telah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan perubahan acuan suku bunga dari LIBOR menjadi SOFR, berlaku efektif pada tanggal 12 Mei 2023.

11. RECEIVABLES FROM JOINT VENTURES

On 20 November 2018, PLN NR, a subsidiary, entered into a long-term loan with SGPJB, whereby PLN NR agreed to provide long-term loans to SGPJB amounting to US$56.516.733 with an interest rate of LIBOR 6 month + 4%. The loan will mature on 15 December 2033. The interest will be due every 15 January and 15 July. PLN NR and SGPJB obtained approval from the General Meeting of Shareholders to change the interest rate benchmark from LIBOR to SOFR, was effective from 12 May 2023.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN SEKUTU AKANTARA AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran B/55 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

11. PIUTANG KEPADA VENTURA BERSAMA (lanjutan)

Selama tahun 2023, SGPJB melakukan pembayaran pinjaman sebesar AS$17.389.784 (setara dengan Rp264.603) (2022: AS$4.347.441 (setara dengan Rp64.720)). Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, saldo terutang atas seluruh pinjaman ini adalah masing-masing sebesar AS$34.779.525 (setara dengan Rp526.980) dan AS$52.169.292 (setara dengan Rp812.424).

Pada tanggal 20 Mei 2021, PJBIC memberikan pinjaman jangka panjang sebesar AS$663.000 (setara dengan Rp9.532) kepada PVGE dengan suku bunga tahunan sebesar 4,7%. Selama tahun 2023, PVGE melakukan penarikan pinjaman sebesar AS$7.825.400 (setara dengan Rp118.608). Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, saldo terutang atas seluruh pinjaman ini adalah masing-masing sebesar AS$8.588.400 (setara dengan Rp132.398) dan AS$663.000 (setara dengan Rp10.428).

Bunga pinjaman kepada SGPJB dan PVGE yang belum dibayarkan masing-masing sebesar AS$2.848.839 (setara dengan Rp41.707) dan AS$225.192 (setara dengan Rp4.041) disajikan sebagai piutang lain-lain.

Berdasarkan penilaian penyisihan kerugian kredit ekspektasian, manajemen Grup berpendapat bahwa penyisihan atas kerugian kredit ekspektasian atas piutang kepada ventura bersama tidak material, sehingga penyisihan atas kerugian kredit ekspektasian dianggap tidak diperlukan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Lihat Catatan 32 untuk informasi saldo dan transaksi-transaksi dengan pihak berelasi.

11. RECEIVABLES FROM JOINT VENTURES (continued)

During 2023, SGPJB made loan payments of US$17.389.784 (equivalent to Rp264.603) (2022: US$4.347.441 (equivalent to Rp64.720)). As at 31 December 2023 and 2022, the total outstanding balances of the loans were US$34.779.525 (equivalent to Rp526.980) and US$52.169.292 (equivalent to Rp812.424), respectively.

On 20 May 2021, PJBIC granted a long-term loan to PVGE amounting to US$663.000 (equivalent to Rp9.532) with an annual interest rate of 4.7%. During 2023, PVGE made loan withdrawal amounting to US$7.825.400 (equivalent to Rp118.608). As at 31 December 2023 and 2022, the total outstanding balances of the loans were US$8.588.400 (equivalent to Rp132.398) and US$663.000 (equivalent to Rp10.428), respectively.

Unpaid interest on receivables from SGPJB and PVGE amounting to US$2.848.839 (equivalent to Rp41.707) and US$225.192 (equivalent to Rp4.041) were recorded as other receivables, respectively.

Based on the assessment of allowance for expected credit losses, the management of the Group is of the opinion that the provision for expected credit losses of receivables from joint ventures is not material, therefore, a provision for expected credit losses is considered not necessary as at 31 December 2023 and 2022.

Refer to Note 32 for the balances and transactions with related parties.

12. PERSEDIAAN

12. INVENTORIES

	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022*	1 Januari/ January 2022*	
Batubara, bahan bakar dan pelumas	3.317.480	4.109.329	3.435.049	Coal, fuel and lubricants
Material pemeliharaan	869.833	632.417	751.977	Maintenance materials
Subjumlah	4.187.313	4.741.746	3.914.876	Subtotal
Cadangan penurunan nilai persediaan dan persediaan usang	(19.313)	(19.289)	(26.287)	Allowance for decline in value of inventories and inventory obsolescence
Jumlah, bersih	4.167.910	4.722.457	3.888.589	Total, net

* Disajikan kembali (lihat Catatan 2)

* As restated (refer to Note 2)

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 8.06 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

12. PERSEDIAAN (lanjutan)

Pergerakan cadangan penurunan nilai persediaan dan persediaan usang adalah sebagai berikut:

12. INVENTORIES (continued)

The movement of the allowance for the decline in the value of inventories and inventory obsolescence is as follows:

	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022*	
Saldo awal tahun	48.000	38.597	Balance at beginning of year
Penambahan	3.241	9.608	Additions
Pembalikan	(108)	(194)	Reversal
Saldo akhir tahun	51.133	48.000	Balance at end of year

*) Disajikan kembali (lihat Catatan 2)

*) As restated (refer to Note 2)

Manajemen berpendapat bahwa cadangan penurunan nilai persediaan dan persediaan usang yang dibentuk pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 1 Januari 2022 adalah cukup untuk menutupi risiko kerugian penurunan nilai persediaan dan persediaan usang.

Management is of the opinion that the allowance for decline in value of inventories and inventory obsolescence as at 31 December 2023, 2022 and 1 January 2022 is adequate to cover the possible losses on the decline in the value of inventories and inventory obsolescence.

Jumlah pemakaian persediaan yang diakui sebagai beban usaha dalam laporan laba rugi konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp24.616.626 dan Rp25.386.163.

The total amount of inventories used recognized as operating expenses in profit or loss for the years ended 31 December 2023 and 2022 amounted to Rp24.616.626 and Rp25.386.163, respectively.

13. ASET TETAP

13. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

	31 Desember/December 2023					
	1 Januari/ January 2023	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember/ December 2023	
Biaya perolehan:						Cost:
Pemilikan langsung:						Direct ownership:
Tanah dan hak atas tanah	17.000.000	24.000	-	-	17.072.713	Land and land rights
Bangunan untuk kantor dan pembangkit	38.001.000	13.871	-	17.000	38.031.000	Buildings, mainland and infrastructure
Instalasi dan mesin pembangkit	330.444.774	9.147	-	3.340.000	331.133.126	Installations and power plants
Perlengkapan kantor dan distribusi	1.222.110	32.121	-	30.000	1.260.000	Furniture and distribution equipment
Perlengkapan pengolahan air dan laboratorium	17.724	1.000	-	-	18.724	Water processing and laboratory equipment
Perlengkapan umum	1.714.000	172.000	-	100.000	2.100.000	General equipment
Kendaraan bermotor	634.000	24.000	-	1.000	711.000	Motor vehicles
Aset tetap sewa pembiayaan	999.000	300.000	-	-	999.000	Right of use assets
Jumlah	390.034.000	1.000.000	-	3.510.000	392.324.000	Subtotal

PT PLN NUSANTARA POWER DAN SEKUTU AS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5.07 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

13. ASET TETAP (lanjutan)

13. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (continued)

	31 Desember/December 2023					
	1 Januari/January 2023	Penambahan/Additions	Pengurangan/Deductions	Reklasifikasi/Reclassifications	31 Desember/December 2023	
Biaya perolehan (lanjutan)						Acquisition cost (continued)
Dari hak guna						Right-of-use assets
Tanah	1,276	1,216,411	-	-	1,217,712	Land
Bangunan	77,971	10,189	(712)	-	88,448	Buildings
Instalasi dan mesin pembangkit	127,797	-	(14,126)	-	113,671	Installations and power plants
Perlengkapan kantor dan kendaraan	1,383,273	-	(33,212)	-	1,350,061	Transportation and office equipment
Perlengkapan umum	371	180	(371)	-	180	General equipment
Kendaraan bermotor	38,273	17,200	(33,453)	-	22,020	Motor vehicles
Sub-jumlah	3,028,958	1,264,011	(81,874)	-	4,211,095	Subtotal
Dari aset pembangunan	1,351,407	1,408,210	(38,794)	(1,345,463)	1,374,360	Construction in progress
Dari aset digunakan dalam sewa	3,331,758	-	(148,347)	2,126,371	5,309,781	Assets for use in operations
Jumlah	202,210,223	1,671,198	(268,015)	(21)	203,613,427	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Dari hak langsung						Direct acquisition
Bangunan untuk aset dan prasarana	387,833	87,875	-	3,333	479,041	Buildings, materials and infrastructure
Instalasi dan mesin pembangkit	7,433,338	7,302,216	-	87,333	14,822,916	Installations and power plants
Perlengkapan kantor dan kendaraan	333,333	333,216	-	216	333,333	Transportation and office equipment
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	7,216	3,333	-	-	11,333	Telecommunications and data processing equipment
Perlengkapan umum	1,213,833	343,216	-	168	1,333,797	General equipment
Kendaraan bermotor	333,777	33,333	-	-	333,333	Motor vehicles
Kendaraan sewa guna	3,867	31,373	-	-	11,213	Right-of-use assets
Sub-jumlah	10,213,133	8,333,333	-	33,867	23,333,333	Subtotal
Dari hak guna						Right-of-use assets
Tanah	799	133,333	-	-	133,333	Land
Bangunan	11,333	3,337	(712)	-	13,733	Buildings
Instalasi dan mesin pembangkit	37,113	11,333	(3,133)	-	33,733	Installations and power plants
Perlengkapan kantor dan kendaraan	1,733	133,333	-	-	137,373	Transportation and office equipment
Perlengkapan umum	13	13	33	-	13	General equipment
Kendaraan bermotor	13,213	13,373	33,333	-	11,333	Motor vehicles
Sub-jumlah	13,333	333,377	33,373	-	371,333	Subtotal
Dari aset digunakan dalam sewa	3,213,213	33,333	133,333	33,867	3,373,333	Assets for use in operations
Jumlah	13,733,833	8,333,337	133,333	-	23,373,733	Total
Penyisihan penurunan nilai	333,733	-	-	-	333,733	Provision for impairment losses
Jumlah tercatat	373,373,373				373,333,333	Net carrying value

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/38 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

13. ASET TETAP (lanjutan)

13. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (continued)

	31 Desember/December 2022					
	Saldo awal/ January 2022	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember/ December 2022	
Nilai perolehan						Acquisition cost
Pemilikan langsung						Direct acquisition
Tanah dan hak atas tanah	17.132.833	-	-	-	17.132.833	Land and land rights
Bangunan, rumah, jalan dan prasarana	28.151.241	153.345	-	32.241	28.321.282	Buildings, residence and infrastructure
Instalasi dan mesin pembangkit	333.114.588	3.187.888	(183.877)	1.888.387	338.946.771	Installation and power plants
Perlengkapan transmisi dan distribusi	1.347.327	848	-	8.938	1.359.113	Transmission and distribution equipment
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	38.138	8.231	-	488	47.758	Telecommunications and data processing equipment
Perlengkapan umum	1.208.271	113.234	(833)	33.208	1.354.080	General equipment
Kendaraan bermotor	381.381	3.848	(8.387)	848	381.687	Motor vehicles
Aset tetap sewa pembiayaan	288.231	13.838	(1.358)	(8.738)	288.141	Finance lease plants
Jumlah	382.338.833	3.743.873	(188.453)	1.748.387	388.338.730	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Tanah	(1.483)	(13)	(3)	-	(1.273)	Land
Bangunan	(8.387)	(8.478)	(1.488)	-	(18.353)	Buildings
Instalasi dan mesin pembangkit	-	(27.787)	-	-	(27.787)	Installation and power plants
Perlengkapan transmisi dan distribusi	-	(1.883.273)	-	-	(1.883.273)	Transmission and distribution equipment
Perlengkapan umum	(13)	(113)	(317)	-	(443)	General equipment
Kendaraan bermotor	(188.873)	(31.738)	(33.338)	-	(188.173)	Motor vehicles
Jumlah	(191.387)	(2.138.847)	(37.188)	-	(2.088.888)	Total
Nilai aset pembangunan	7.131.888	1.313.888	(88.888)	(1.888.738)	1.888.387	Construction in progress
Nilai tetap dipinjamkan dalam agunan	3.841.888	43.737	(188.338)	(31.487)	3.381.738	Assets fixed used in agreements
Jumlah	388.138.388	3.183.388	(473.388)	-	388.348.388	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Pemilikan langsung						Direct acquisition
Bangunan, rumah, jalan dan prasarana	-	87.848	-	(1.848)	887.888	Buildings, residence and infrastructure
Instalasi dan mesin pembangkit	-	7.488.888	(13.273)	3.888	7.488.388	Installation and power plants
Perlengkapan transmisi dan distribusi	-	138.138	-	(113)	138.388	Transmission and distribution equipment
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	-	3.338	-	(1.388)	7.218	Telecommunications and data processing equipment
Perlengkapan umum	3.883.738	371.888	(33)	(33.888)	4.213.888	General equipment
Kendaraan bermotor	338.138	38.148	(317)	(3.813)	388.177	Motor vehicles
Aset tetap sewa pembiayaan	-	13.837	-	(8.178)	5.687	Finance lease plants
Jumlah	4.188.818	8.011.188	(13.788)	(38.138)	12.818.188	Total
Nilai tetap dipinjamkan dalam agunan	881	888	-	-	788	Fixed used in agreements
Bangunan	3.783	7.381	(1.888)	-	11.188	Buildings
Instalasi dan mesin pembangkit	-	37.148	-	-	37.148	Installation and power plants
Perlengkapan transmisi dan distribusi	-	1.788	-	-	1.788	Transmission and distribution equipment
Perlengkapan umum	133	123	(317)	-	33	General equipment
Kendaraan bermotor	88.738	18.838	(31.388)	-	78.138	Motor vehicles
Jumlah	92.138	88.871	(33.318)	-	128.888	Total
Nilai tetap dipinjamkan dalam agunan	3.888.818	388.888	(138.338)	38.138	3.818.818	Assets fixed used in agreements
Jumlah	8.318.387	8.388.888	(331.388)	-	12.738.888	Total
Penyisihan penurunan nilai	388.878	-	-	(3.888)	388.738	Provision for impairment losses
Nilai tercatat	388.138.878				378.878.878	Net carrying value

1) Disajikan kembali/ See Section 2)

1) As restated/ refer to Note 2)

PT PLN NUSANTARA POWER DAN SENTRAS ANAKANYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/50 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

13. Aset Tetap* (lanjutan)

13. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT* (continued)

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation expense was allocated to the following:

	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022*	
Beban usaha	9.454.502	9.202.509	Operating expenses
(Beban)/penghasilan lain-lain - bersih	53.605	261.880	Other (expenses)/income - net
Jumlah	9.508.107	9.464.389	Total

* Disajikan kembali (lihat Catatan 2)

* As restated (refer to Note 2)

Grup memiliki beberapa bidang tanah dengan hak legal berupa Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan ("HGB"). Hak Pakai tidak mempunyai jangka waktu, sedangkan HGB akan jatuh tempo antara tahun 2025 sampai dengan 2053, tetapi dapat diperpanjang oleh Grup. Grup juga mempunyai beberapa bidang tanah yang sedang dalam proses perpanjangan HGB dan pengurusan balik nama menjadi atas nama Grup.

The Group owns several pieces of land with Rights to Use and Building Use Rights ("HGB"). Rights to Use have no expiration date, while HGB will expire from 2025 to 2053, but they are renewable by the Group. The Group also has several pieces of land rights that are still in the extension process and in the process of transfer of certificates to the name of the Group.

Aset tetap, kecuali tanah dan kendaraan bermotor, diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan kemungkinan risiko lainnya (termasuk machinery breakdown) kepada PT Asuransi Central Asia ("ACA") dan PT Asuransi Petrosa Listrik Nasional ("APLN"), dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar AS$9,8 miliar dan Rp196.297 pada 31 Desember 2023. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut cukup untuk menutup kerugian aset.

The property, plant and equipment, except land and motor vehicles, has been insured against fire and other possible risks (including machinery breakdown) with PT Asuransi Central Asia ("ACA") and PT Asuransi Petrosa Listrik Nasional ("APLN"), with the coverage amounting to US$9.8 billion and Rp196.297 as at 31 December 2023. Management is of the opinion that the sum insured is adequate to cover the possible losses on the assets.

Pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 1 Januari 2022, jumlah tercatat bruto aset tetap yang telah disusutkan penuh namun masih digunakan masing-masing sebesar Rp4.066.808, Rp3.332.014 dan Rp2.978.404.

As at 31 December 2023, 2022 and 1 January 2022, the gross carrying amount of property, plant and equipment that had been fully depreciated but was still in use amounted to Rp4,066.808, Rp3,332.014 and Rp2,978.404, respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2021, Grup melakukan penilaian kembali atas nilai wajar aset tetap, yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Rengganis, Hamid & Rekan (KJPP RHR) dalam laporan No. 00113/2.0013-00/PI/02/0008/1/III/2022 tanggal 30 Maret 2022, penilai independen yang telah terdaftar di Kementerian Keuangan dengan nomor izin usaha No. 2.09.0012 dan OJK.

On 31 December 2021, the Group performed a revaluation of the fair value of its property, plant and equipment which was performed by Kantor Jasa Penilai Publik Rengganis, Hamid & Rekan ("KJPP RHR") in report No. 00113/2.0013-00/PI/02/0008/1/III/2022 dated 30 March 2022, an independent valuer registered in the Ministry of Finance, with license permit no. 2.09.0012 and FSA.

Aset tetap Grup merupakan aset yang tidak mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan, sehingga aset tersebut wajib direvaluasi paling kurang setiap 3 (tiga) tahun. Manajemen tidak mengidentifikasi adanya perubahan signifikan yang mengharuskan dilakukannya jasa revaluasi untuk tahun 2023.

The Group's property, plant and equipment are assets that do not change significantly in fair value, thereof they must be revaluated at least every 3 (three) years. Management did not identify any significant changes in circumstances which would require a revaluation exercise to be performed for 2023.

PT PLN (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/50 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2023
(Dinyatakan dalam Miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

13. ASET TETAP (lanjutan)

13. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (continued)

Tabel di bawah ini menganalisis aset tetap yang dicatat pada nilai wajar berdasarkan hierarki nilai wajar sesuai dengan PSAK No. 68 berdasarkan valuasi tanggal 31 Desember 2021. Perbedaan tingkatan nilai wajar dijelaskan sebagai berikut:

The table below analyses the property, plant and equipment that have been recorded at fair value, based on the fair value hierarchy in SFAS No. 68 based on valuation as at 31 December 2021. The different levels of fair value are defined as follows:

	Pengukuran nilai wajar 31 Desember 2021 menggunakan / Fair value measurements as at 31 December 2021 using				
	Tingkat 1 / Level 1	Tingkat 2 / Level 2	Tingkat 3 / Level 3	Jumlah / Total	
Tanah dan hak atas tanah	-	980,919	16,070,190	17,051,109	Land and land rights
Bangunan untuk kantor dan prasarana	-	394,154	37,356,107	38,140,241	Buildings, warehouse and infrastructure
Instalasi dan mesin pembangkit	-	-	330,110,386	330,110,386	Installation and power plant
Perlengkapan transmisi dan distribusi	-	-	4,297,027	4,297,027	Transmission and distribution equipment
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	-	-	65,145	65,145	Telecommunications and data processing equipment
Aset-aset tidak lancar lainnya	-	-	248,247	248,247	Other plant plans
Jumlah	-	1,374,773	390,146,247	391,520,999	Total

1) Bagian lainnya (lihat halaman 6)

1) See separate table (on page 6)

- Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
- Input selain harga yang kuotasian dari pasar yang diamatian pada Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung (yaitu sebagai sebuah harga) atau secara tidak langsung (yaitu sebagai turunan dari harga) (Tingkat 2); dan
- Input untuk aset atau liabilitas yang tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi (informasi yang tidak dapat diobservasi) (Tingkat 3).

- Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (Level 1);
- Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (that is, as prices) or indirectly (that is, derived from prices) (Level 2); and
- Inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (that is, unobservable inputs) (Level 3).

Tidak terdapat aset tetap yang bisa digolongkan ke dalam nilai wajar Tingkat 1.

There were no property, plant and equipment which could be classified at Level 1 fair value.

Tidak terdapat transfer antara Tingkat 1 dan Tingkat 2 selama tahun berjalan.

There were no transfers between Levels 1 and 2 during the year.

Nilai wajar Tingkat 2 dari tanah dan hak atas tanah dihitung dengan menggunakan pendekatan pasar dan pendekatan pendapatan tergantung dari kondisi tertentu, sedangkan untuk bangunan umum, dan instalasi dan mesin pembangkit menggunakan pendekatan biaya. Input yang diperoleh dari pasar yaitu antara lain:

The Level 2 fair value of land and land rights is calculated using the market approach and income approach depends on certain circumstances, building, and installation and power plant is calculated using the cost approach. Data inputs were obtained from the market that consists of, among others, the following:

a. Harga jual atau harga sewa per meter persegi;
b. Tingkat hunian;
c. Tingkat pertumbuhan;
d. Tingkat diskonto dan kapitalisasi;
e. Biaya pembuatan baru per meter persegi;
f. Tingkat depresiasi;
g. Biaya operasional;
h. Keuntungan pengembang; dan
i. Indeks kemahalan konstruksi.

a. Sale or rental price per square metre;
b. Occupancy rate;
c. Growth rate;
d. Discount and capitalisation rate;
e. Replacement cost new per square metre;
f. Depreciation rate;
g. Operational expense;
h. Developer margin; and
i. Construction Cost index.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/51 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

12. ASET TETAP (lanjutan)

Penyesuaian dilakukan berdasarkan ukuran, kapasitas, usia, lokasi, bentuk dan spesifikasi, hak atas tanah dan elemen pembandingan lainnya.

Nilai wajar Tingkat 3 dihitung dengan menggunakan pendekatan pasar, pendekatan pendapatan, dan pendekatan biaya dengan menggunakan input yang tidak dapat diobservasi.

Selain menggunakan input yang berasal dari pasar, KUPP Bmlt juga menggunakan input yang tidak dapat diobservasi dari pasar dan menggunakan asumsi khusus terkait dengan jenis aset yang tergolong sebagai properti khusus, seperti pembangkit listrik, jaringan, transmisi dan distribusi, gardu listrik dan lainnya.

Informasi mengenai pengukuran nilai wajar yang menggunakan informasi signifikan yang tidak dapat diobservasi (Tingkat 3) adalah sebagai berikut:

12. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (continued)

Adjustments were made based on size, capacity, age, location, shapes and specifications, land rights and other comparison elements.

The Level 3 fair value is calculated through the market approach, income approach, and cost approach by using unobservable inputs.

Other than the data inputs observed from the market, KUPP Bmlt also used unobservable market data inputs and used special assumptions related to the assets classified as specialized property, such as power plants, transmission and distribution networks, substations and others.

Information about fair value measurements using significant unobservable inputs (Level 3) are as follows:

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PT PLN NUSANTARA POWER DAN SENTRAS ANAKNYA AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/62 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

13. ASET TETAP (lanjutan)

Informasi mengenai pengukuran nilai wajar yang menggunakan informasi signifikan yang tidak dapat diobservasi (Tingkat 3) adalah sebagai berikut (lanjutan):

13. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (continued)

Information about fair value measurements using significant unobservable inputs (Level 3) are as follows (continued):

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

Surplus revaluasi, dikurang dengan pajak penghasilan tangguhan terkait, telah dikreditkan pada penghasilan komprehensif lain dan disajikan sebagai surplus revaluasi aset tetap pada laporan perubahan ekuitas konsolidasian.

Selain yang menggunakan model revaluasi, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai wajar aset tetap dengan nilai tercatatnya.

Pergerakan surplus revaluasi aset tetap adalah sebagai berikut:

The revaluation surplus, net of applicable deferred income taxes, was credited to other comprehensive income and presented in property, plant and equipment revaluations surplus in the consolidated statements of changes in equity.

There is no significant difference between the fair value and the carrying value of the property, plant and equipment other than the assets that have applied the revaluation model.

The movements of property, plant and equipment revaluation surplus are as follows:

	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022*	1 Januari/ January 2022*	
Saldo awal tahun	211,179,403	211,184,426	213,194,001	Balance at beginning of year
Reviluasi aset tetap	-	-	(2,709,640)	Revaluation of property, plant and equipment
Reklasifikasi surplus revaluasi ke saldo laba atas penghapusan aset tidak digunakan dalam operasi	(4,364)	(7,024)	(12,425)	Reclassification on revaluation surplus from disposals of assets not used in operations
Sub-jumlah	(4,364)	(7,024)	(2,709,217)	Sub-total
Manfaat pajak terkait	2	2	793,173	Related income tax benefit
Saldo akhir tahun	211,177,421	211,179,403	211,184,426	Balance at end of year

* Disajikan kembali (lihat Catatan 2)

* Restated (refer to Note 2)

Jika Grup tidak menerapkan model revaluasi, nilai tercatat bersih aset tetap pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 1 Januari 2022 masing-masing sebesar Rp148,857,134, Rp148,040,120 dan Rp131,828,883.

If the Group did not apply the revaluation model, the net carrying value of the property, plant and equipment as at 31 December 2023, 2022 and 1 January 2022 would have amounted to Rp148,857,134, Rp148,040,120 and Rp131,828,883, respectively.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN SENTRAS ANAKNYA AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/63 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

13. ASET TETAP (lanjutan) / 13. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (continued)

Aset dalam pembangunan

Akun ini mengakui biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan pembangunan dan renovasi perbaikan sarana kelistrikan, sebagai berikut:

Construction in progress

This account represents the costs that have been incurred in relation to the construction and renovation/repairs of power supply facilities, as follows:

	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022*	1 Januari/ January 2022*	
Pembangkit listrik				Power plants
Tenaga gas uap (PLTGU)	1,314,914	3,333,379	3,775,110	Steam gas power plant (PLTGU)
Tenaga uap (PLTU)	347,409	339,472	1,091,472	Steam power plant (PLTU)
Tenaga gas (PLTG)	206,818	136,316	93,130	Gas power plant (PLTG)
Tenaga air (PLTA)	116,898	93,801	33,600	Hydro power plant (PLTA)
Tenaga diesel (PLTD)	14,801	30,439	13,669	Diesel power plant (PLTD)
PLTS	-	-	34,436	PLTS
Fungsi pendukung	14,499	93,380	13,379	Supporting function
Jumlah	1,715,698	3,661,337	7,061,806	Total

* Disajikan kembali (lihat Catatan 2)

* Restated (refer to Note 2)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, biaya pinjaman yang dikapitalisasi ke aset dalam pembangunan masing-masing sebesar Rp112,888 dan Rp88,223.

For the years ended 31 December 2023 and 2022, the borrowing costs that were capitalized to construction in progress were Rp112,888 and Rp88,223, respectively.

Aset tidak digunakan dalam operasi

Aset tidak digunakan dalam operasi merupa aset tetap yang yang sementara belum digunakan dalam operasi dan aset tetap akan diperbaiki.

Berdasarkan penelaahan manajemen, tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap secara signifikan pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 1 Januari 2022.

Assets not used in operations

Assets not used in operations comprised property, plant and equipment temporarily not in use in operations, and those to be repaired.

Based on management's assessment, there were no events or changes in circumstances that may significantly impair the value of the property, plant and equipment as at 31 December 2023, 2022, and 1 January 2022.

14. PROPERTI INVESTASI / 14. INVESTMENT PROPERTIES

	31 Desember/December 2023				
	Saldo awal/ Beginning balance	Penurunan nilai wajar/ Change in fair value	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance	
Pemilikan langsung					Direct acquisition
Tanah dan bangunan	1,277,137	32,601	21	1,309,759	Land and buildings

	31 Desember/December 2022				
	Saldo awal/ Beginning balance	Penurunan nilai wajar/ Change in fair value	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance	
Pemilikan langsung					Direct acquisition
Tanah dan bangunan	1,163,386	113,751	-	1,277,137	Land and buildings

PT PLN NUSANTARA POWER DAN SEKITAR ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran B99 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. PROPERTI INVESTASI (lanjutan)

Properti investasi merupakan tanah milik Perusahaan yang terletak di Paiton - Jawa Timur, Bekasi - Jawa Barat, Pluit - Jakarta Utara, Cigeulondjo - Bandung Barat dan Asahan - Sumatra Utara dengan hak legal berupa HGB berjangka waktu dari 30 sampai 40 tahun, jatuh tempo pada 2032, yang disewakan kepada PLN, PT Paiton Energy, PT Jawa Power, PT Pertamina (Persero), SNI, PT Anugerah Mega Energi, PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java ("PHE ONWJ"), PT Nusantara Regas ("NR"), PT Cirata Karya Lestari, SUT Sinohydro Corporation Limited dan PT Bajradaya Sentranusa ("BDSN").

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan melakukan penilaian kembali atas nilai wajar properti investasi, yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Mulyagin Bambang Purwanto Rozak Lisnatun dan Rekan ("KJPP MBPRL") dalam laporan No. 01041/MBPRL-JKT/SE/MTD/I/2024 tanggal 1 April 2024 dan laporan No. 00119/2.0031-00/PI/11/0186/1/III/2023 tanggal 30 Maret 2023, penilai independen yang telah terdaftar di Kementerian Keuangan dan OJK.

Nilai wajar properti investasi diklasifikasikan sebagai Tingkat 2 dalam hirarki nilai wajar.

Nilai wajar Tingkat 2 dari tanah dihitung dengan menggunakan pendekatan pasar dan pendekatan pendapatan. Input yang diperoleh dari pendekatan pasar yaitu:

a. Harga jual atau harga sewa per meter persegi;
b. Tingkat hunian;
c. Tingkat pertumbuhan;
d. Tingkat diskonto;
e. Biaya operasional; dan
f. Keuntungan pengembang.

Penyesuaian dilakukan berdasarkan ukuran, lokasi, bentuk dan spesifikasi, tanah dan hak atas tanah, dan elemen perbandingan lainnya.

Grup juga mencatat perubahan nilai wajar yang disajikan sebagai bagian dari beban/penghasilan lain-lain - bersih dalam laporan laba rugi konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Berdasarkan penilaian manajemen, tidak ada kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai properti investasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

14. INVESTMENT PROPERTIES (continued)

Investment properties pertain to pieces of land that are owned by the Company located in Paiton - East Java, Bekasi - West Java, Pluit - North Jakarta, Cigeulondjo - West Bandung and Asahan - North Sumatra with HGB for periods between 30 to 40 years, which will be expired in 2032, which are leased to PLN, PT Paiton Energy, PT Jawa Power, PT Pertamina (Persero), SNI, PT Anugerah Mega Energi, PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java ("PHE ONWJ"), PT Nusantara Regas ("NR"), PT Cirata Karya Lestari, SUT Sinohydro Corporation Limited and PT Bajradaya Sentranusa ("BDSN").

As at 31 December 2023 and 2022, the Company performed a revaluation of the fair value of its investment properties which was performed by Kantor Jasa Penilai Publik Mulyagin Bambang Purwanto Rozak Lisnatun and Partners ("KJPP MBPRL") in report No. 01041/MBPRL-JKT/SE/MTD/I/2024 dated 1 April 2024 and report No. 00119/2.0031-00/PI/11/0186/1/III/2023 dated 30 March 2023, independent valuers registered with the Ministry of Finance and FSA.

The fair values of the investment properties are within Level 2 of the fair value hierarchy.

The Level 2 fair value of the land is calculated using the market approach and the income approach. Data inputs were obtained from the market approach that consists of:

a. Sale or rental price per square meter;
b. Occupancy rate;
c. Growth rate;
d. Discount rate;
e. Operational expense; and
f. Developer margin.

Adjustments were made based on size, location, shapes and specifications, land and land rights, and other comparison elements.

The Group also recorded the changes in fair value were presented as part of other expenses/income - net in the consolidated statements of profit or loss for the years ended 31 December 2023 and 2022.

Based on management's assessment, there are no events or changes in circumstances that indicate any impairment in the value of the investment properties as at 31 December 2023 and 2022.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/55 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

15. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA

Rincian investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama adalah sebagai berikut:

15. INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURES

Details of the investments in associates and joint ventures are as follows:

Nama entitas asosiasi dan ventura bersama / Name of associates and joint ventures	Domisili / Domicile	Jenis usaha / Nature of business	Persentase kepemilikan / Percentage of ownership	2023	2022
Investasi pada entitas asosiasi / Investments in associates					
PT Sumber Segara Primadaya (SSP)	Cilegon	Pembangkit listrik tenaga uap / Steam gas electricity power plant	10.00	10.00	10.00
PT Rantau Dedap Harmoni (RDH)	Jakarta	Pembangkit listrik tenaga uap / Steam gas electricity power plant	20.00	10.00[1]	10.00[1]
PT Bumiapadi Energy Sam Parari (BE Parari)	Jakarta	Pembangkit listrik tenaga uap / Steam gas electricity power plant	-	10.00[1]	10.00[1]
Investasi pada entitas ventura bersama / Investments in joint ventures					
PT Bumi Pembangkit Indonesia (BPI)	Palembang	Pembangkit listrik tenaga uap / Steam gas electricity power plant	20.00	10.00	10.00
PT Energi Pembangkitan Jawa Bali (EPJB)	Jagore	Jasa operasi dan pemeliharaan / Operation and maintenance	20.00	10.00	10.00
ECPE	Jakarta	Pembangkit listrik tenaga uap / Steam gas electricity power plant	20.00	20.00	20.00
EDAL	Jakarta	Pembangkit listrik tenaga air / Hydro electricity power plant	20.00	20.00	20.00
PT Nusa Bumiapa Hydro Energy (NBHE)	Jakarta	Pembangkit listrik tenaga air / Hydro electricity power plant	-	20.00	20.00
PT Cahaya Tanjung Pembangkitan Jawa Bali (CTPJB)	Jakarta	Jasa operasi dan pemeliharaan / Operation and maintenance	20.00	20.00	20.00
PLSB	Jakarta	Pembangkit listrik tenaga surya / Solar electricity power plant	-	21.00	21.00
PT Sumatera Sembayu Solar Energy (NSSE)	Jakarta	Pembangkit listrik tenaga surya / Solar electricity power plant	-	21.00	-

1) Dalam proses pengembangan / Under development stage
2) Perusahaan patungan Bright Power & Hydro Energy Nusantara / Joint venture company of Bright Power & Hydro Energy Nusantara

NSSE

Berdasarkan Akta Notaris No. 1 tanggal 31 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Nina Ng, S.H., Notaris di Jakarta, PLN NR dan PT Sembcorp Renewables Indonesia ("Sembcorp") mendirikan ventura bersama dengan kepemilikan saham masing-masing sebesar 51% dan 49%. Pada Januari 2024, para pemegang saham telah menempatkan dan menyetor penuh modal dasar NSSE.

NSSE

Based on Notarial Deed No. 1 dated 31 December 2022 made before Nina Ng, S.H., Notary in Jakarta, PLN NR and PT Sembcorp Renewables Indonesia ("Sembcorp") established a joint venture with shares ownership of 51% and 49%, respectively. In January 2024, shareholders have issued and fully paid share capital of NSSE.

Pergerakan investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama adalah sebagai berikut:

The movements in the investments in associates and joint ventures are as follows:

	31 Desember/December 2023						
	Saldo awal / Beginning balance 1 Januari/January 2023	Penambahan / Additions	Dividen / Dividends	Bagian atas laba/(rugi) bersih / Share in net profit/(loss)	Bagian atas penghasilan/(rugi) komprehensif lain / Share in other comprehensive income/(loss)	Saldo akhir / Ending balance 31 Desember/December 2023	
Pembagian laba / Profit sharing							Jasa operasi / Operation and maintenance
SSP	4,753,41	-	(88,31)	1,180,04	(1,70)	1,843,04	
RDH	27,00	-	-	(1,72)	-	43,28	RDH
BE Parari	24,57	(3,28)	-	3,00	-	24,31	BE Parari
Rugi penuh	4,804,91	(3,28)	(88,31)	1,181,68	(1,70)	1,914,63	Subtotal
Rugi/(laba) rugi / Profit/(loss) sharing							Jasa operasi / Operation and maintenance
BPI	(1,96,07)	-	3,31	10,48	(17,00)	(1,83,07)	BPI
ECPE	72,00	-	3,40	2,00	-	73,72	ECPE
EDAL	(1,07,00)	-	(17,00)	(30,71)	(2,00)	(1,53,07)	EDAL
EDAL	(1,07,00)	-	(17,00)	(30,71)	(2,00)	(1,53,07)	EDAL
NBHE	(1,07,00)	-	-	(16,70)	(11,00)	(1,34,70)	NBHE
CTPJB	3,00	-	(1)	2,72	-	3,71	CTPJB
PLSB	(3,00)	-	-	(7,00)	-	(7,00)	PLSB
Rugi penuh	(3,07,00)		(31,29)	(68,00)	(31,00)	(3,93,71)	Subtotal
Jumlah	(6,11,01)	(3,28)	(88,31)	1,11,68	(33,00)	(1,93,43)	Total

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/66 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

15. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan)

Pergerakan investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama adalah sebagai berikut: (lanjutan)

15. INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURES (continued)

The movements in the investments in associates and joint ventures are as follows: (continued)

	31 Desember/December 2022						
	Saldo awal 1 Januari 2022 / Beginning balance 1 January 2022	Penambahan/ Additions	Dividen/ Dividends	Bagian atas laba/(rugi) tahun berjalan/ Share of net profit/(loss)	Bagian atas penghasilan komprehensif lainnya/ Share of other comprehensive income	Saldo akhir 31 Desember 2022 / Ending balance 31 December 2022	
Bersama/Jointly							
[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]
Ventura bersama/Joint ventures							
[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Seluruh entitas asosiasi dan ventura bersama dicatat oleh Grup dengan menggunakan metode ekuitas. Seluruh entitas adalah entitas tertutup dan tidak tersedia harga pasar yang dikutip yang tersedia untuk sahamnya.

All the associates and joint ventures are recorded by the Group using the equity method. They are private entities and there is no quoted market price available for their shares.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat pembatasan dan risiko signifikan yang terkait dengan investasi pada asosiasi dan ventura bersama.

As at 31 December 2023 and 2022, management believes that there is no significant restriction and risk regarding the investments in associates and joint ventures.

Berikut ini adalah ringkasan informasi keuangan entitas asosiasi dan ventura bersama pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas.

The following tables contain the summarized financial information for the associates and joint ventures as at 31 December 2023 and 2022, that have been accounted for using the equity method.

Entitas asosiasi:

Associates

	31 Desember/December 2022			
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/57 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

15. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan)

15. INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURES (continued)

Entitas asosiasi (lanjutan)

Associates (continued)

	31 Desember/December 2023				
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Pendapatan	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	Revenue
Beban pokok pendapatan	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	Cost of revenue
Depresiasi dan amortisasi	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	Depreciation and amortization
Pendapatan keuangan	[illegible]	-	-	[illegible]	Finance income
Beban keuangan	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	Finance costs
Beban operasi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Operating expenses
Pendapatan (beban) lain-lain – bersih	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Other income (expenses) – net
Beban pajak penghasilan	[illegible]	-	-	[illegible]	Income tax expense
Laba tahun berjalan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Profit for the year
% kepemilikan	[illegible]	[illegible]	[illegible]		% of ownership
Bagian Grup atas laba bersih tahun berjalan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	The Group's share in net profit for the year of associates
Penghasilan komprehensif lainnya	[illegible]	-	-	[illegible]	Other comprehensive income
Bagian Grup atas penghasilan komprehensif lainnya	[illegible]			[illegible]	The Group's share of other comprehensive income of associates
Dividen yang diterima dari asosiasi	[illegible]			[illegible]	Dividends received from associates

	31 Desember/December 2022				
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Kas dan setara kas	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Cash and cash equivalents
Aset lancar lainnya	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Other current assets
Jumlah aset lancar	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Total current assets
Aset tidak lancar	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Non-current assets
Utang usaha	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	Trade payables
Liabilitas lancar lainnya	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Other current liabilities
Jumlah liabilitas lancar	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Total current liabilities
Liabilitas keuangan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Financial liabilities
Liabilitas lainnya	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Other liabilities
Jumlah liabilitas tidak lancar	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Total non-current liabilities
Aset bersih	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Net assets
% kepemilikan	[illegible]	[illegible]	[illegible]		% of ownership
Bagian Grup atas aset bersih asosiasi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	The Group's share of net assets of associates
Penyesuaian nilaian wajar	-	-	-	-	Adjustment of fair value
Jumlah tercatat	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Total carrying value
Pendapatan	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	Revenue
Beban pokok pendapatan	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	Cost of revenue
Depresiasi dan amortisasi	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	Depreciation and amortization
Pendapatan keuangan	[illegible]	-	-	[illegible]	Finance income
Beban keuangan	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	Finance costs
Beban operasi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Operating expenses
Pendapatan (beban) lain-lain – bersih	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Other income (expenses) – net
Beban (manfaat) pajak penghasilan	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	Income tax (expense) benefit
Laba tahun berjalan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Profit for the year
% kepemilikan	[illegible]	[illegible]	[illegible]		% of ownership
Bagian Grup atas laba bersih tahun berjalan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	The Group's share in net profit for the year of associates
Penghasilan komprehensif lainnya	-	[illegible]	-	[illegible]	Other comprehensive income
Bagian Grup atas penghasilan komprehensif lainnya		[illegible]		[illegible]	The Group's share of other comprehensive income of associates
Dividen yang diterima dari asosiasi	[illegible]			[illegible]	Dividends received from associates

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/69 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

15. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan)

15. INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURES (continued)

Ventura bersama / Joint ventures

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/60 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

15. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan)

Ventura bersama (lanjutan)

15. INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURES (continued)

Joint ventures (continued)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Investasi pada entitas diatas diperoleh terutama untuk tujuan potensi pertumbuhan jangka panjang, karena seluruh entitas tersebut bergerak dalam industri ketenagalistrikan yang sama dengan industri Grup. Manajemen meyakini bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai.

The investments in the above entities are held primarily for long-term growth potential, since these entities are engaged in the same electricity industry as the Group. Management believes that there are no indications of impairment.

16. UTANG USAHA

Akun ini merupakan liabilitas sehubungan dengan pembelian bahan bakar, barang dan jasa sebagai berikut:

16. TRADE PAYABLES

This account represents the payables arising from purchases of fuel, goods and services as follows:

	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022*	1 Januari/ January 2022*	
Pihak ketiga	1,495,195	3,223,107	1,284,648	Third parties
Pihak berelasi (Catatan 33)	2,776,339	4,124,210	8,731,613	Related parties (Note 33)
Jumlah	4,271,534	7,347,317	10,016,261	Total

*Disajikan kembali (lihat Catatan 2)

*As restated (refer to Note 2)

Lihat Catatan 33 untuk informasi saldo dan transaksi-transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 33 for the balances and transactions with related parties.

17. UTANG LAIN-LAIN

Akun ini merupakan liabilitas sehubungan dengan kegiatan diluar usaha sebagai berikut:

17. OTHER PAYABLES

This account represents liabilities in connection with non-business activities as follows:

	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022*	1 Januari/ January 2022*	
Pihak ketiga	1,217,103	699,843	691,103	Third parties
Pihak berelasi (Catatan 33)	344,759	313,399	141,218	Related parties (Note 33)
Jumlah	1,571,862	1,013,242	832,321	Total

*Disajikan kembali (lihat Catatan 2)

*As restated (refer to Note 2)

Lihat Catatan 33 untuk informasi saldo dan transaksi-transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 33 for the balances and transactions with related parties.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN SEKUTU AMANAH/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/70 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

18. LIABILITAS SEWA

Grup menandatangani beberapa perjanjian sewa yang berkaitan dengan sewa tanah, bangunan, instalasi dan mesin pembangkit, peralatan umum dan kendaraan bermotor. Perjanjian sewa biasanya memiliki periode tetap berkisar dari 1 sampai dengan 13 tahun. Ketentuan sewa dinegosiasikan secara individu dan mengandung syarat dan ketentuan yang berbeda.

Nilai kini pembayaran minimum atas utang sewa tersebut pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 1 Januari 2022 adalah sebagai berikut:

18. LEASE LIABILITIES

The Group entered into several lease agreements related to the rental of land, buildings, installation and power plants, general equipment and motor vehicles. Rental agreements are typically made for fixed periods ranging from 1 to 13 years. Lease terms are negotiated on an individual basis and contain a wide range of different terms and conditions.

The present value of minimum lease payments for such lease liabilities as at 31 December 2023, 2022 and 1 January 2022 is as follows:

	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022*	1 Januari/ January 2022*	
Pembayaran jatuh tempo dalam waktu:				Minimum lease payments due:
Tidak lebih dari satu tahun	216,224	346,169	60,430	No later than one year
Lebih dari satu tahun sampai tiga tahun	742,671	270,241	61,471	Later than one year and no later than three years
Lebih dari tiga tahun sampai lima tahun	1,119,811	480,660	-	Later than three years and no later than five years
Lebih dari lima tahun	1,028,213	1,974,046	-	More than five years
Jumlah	3,107,719	3,070,221	121,901	Total
Dikurangi: bunga	(1,671,969)	(1,102,717)	(36,888)	Less: interest
Nilai kini pembayaran sewa nisa datang	1,435,750	2,117,504	85,013	Present value of future minimum lease payments
Dikurangi: bagian jangka pendek	(216,084)	(643,240)	(12,239)	Less: short-term portion
Bagian jangka panjang	1,219,666	1,474,264	72,774	Long term portion

* Disajikan kembali (Ref Catatan 2)

* Restated (refer to Note 2)

Jumlah pengeluaran kas untuk sewa selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp619,413 (2022: Rp314,309).

Beban bunga dan keuangan terkait utang sewa pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp202,919 dan Rp7,165.

Lihat Catatan 34 untuk informasi nilai wajar dari liabilitas sewa pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

The total cash outflow for leases for the year ended 31 December 2023 was Rp619,413 (2022: Rp314,309).

Interest expense and financial charges related to lease liabilities for the years ended 31 December 2023 and 2022, amounted to Rp202,919 and Rp7,165, respectively.

Refer to Note 34 for information on the fair value of the lease liabilities as at 31 December 2023 and 2022.

PT PLN (PERSERO) DAN ANAK PERUSAHAAN / PT PLN (PERSERO) AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/71 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

19. LIABILITAS IMBALAN KERJA / 19. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES

	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022	
Program pensiun manfaat pasti	-	33,471	Defined benefit pension program
Imbalan pascakerja lainnya	1,359,691	1,168,147	Other post-employment benefits
Imbalan pemeliharaan kesehatan	2,479,703	2,391,406	Health care benefits
Imbalan jangka panjang lainnya	121,232	89,686	Other long-term benefits
Jumlah	3,959,626	3,682,710	Total
Bagian jangka panjang	(3,439,626)	(3,107,871)	Non-current portion
Bagian jangka pendek	339,999	339,791	Current portion
Bonus dan insentif pekerja tetap	339,999	339,497	Bonus and performance incentives
Bagian jangka pendek	679,998	702,988	Current portion

	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022	
Beban diakui di laba rugi (Catatan 28):			Expense recognized in profit or loss (Note 28):
Program pensiun manfaat pasti	7,187	9,609	Defined benefit pension program
Imbalan pascakerja lainnya	171,413	117,871	Other post-employment benefits
Imbalan pemeliharaan kesehatan	316,049	196,309	Health care benefits
Imbalan jangka panjang lainnya	34,262	33,609	Other long-term benefits
Jumlah	528,911	371,398	Total
Pengukuran kembali program manfaat pasti diakui di penghasilan (kerugian) komprehensif lain:			Remeasurement on defined benefit plan recognized in other comprehensive income/(loss):
Program pensiun manfaat pasti	19,276	39,957	Defined benefit pension program
Imbalan pascakerja lainnya	(62,109)	(16,977)	Other post-employment benefits
Imbalan pemeliharaan kesehatan	70,031	(343,380)	Health care benefits
Jumlah	27,198	(320,390)	Total

Liabilitas imbalan pascakerja karyawan

Program pensiun manfaat pasti

Grup menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti untuk semua karyawan tetap yang memenuhi syarat. Program pensiun ini memberikan imbalan berdasarkan penghasilan dasar pensiun dan masa kerja karyawan.

Dana pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun PLN ("DPPLN"), pihak terkait, yang akta pendirianya telah disahkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. KEP-254/KM.17/1997 tanggal 15 Mei 1997.

DPPLN telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. KEP-8/NB.1/2016 tanggal 11 Februari 2016 atas peningkatan manfaat pasti pensiun yang disediakan Grup dalam program dana pensiun.

Post-employment benefit obligations

Defined benefit pension program

The Group has established a defined benefit pension program covering all of its eligible permanent employees. This plan provides benefits based on the basic pension income and the period of employment.

The pension plan is managed by Dana Pensiun PLN ("DPPLN"), a related party, whose deed of establishment was approved by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. KEP-254/KM.17/1997 dated 15 May 1997.

DPPLN has obtained an approval from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. KEP-8/NB.1/2016 dated 11 February 2016 in relation to the increase in the defined pension benefits that are provided by the Group's pension plan.

PT PLN (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 8/72 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

19. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Liabilitas imbalan pascakerja karyawan (lanjutan)

Program pensiun manfaat pasti (lanjutan)

Pendanaan DP-PLN terutama berasal dari iuran karyawan dan pemberi kerja masing-masing sebesar 8,00% dan 17,77% dari penghasilan dasar pensiun.

Imbalan pascakerja lainnya

Selain dari program dana pensiun dan imbalan pemeliharaan kesehatan, Grup menyediakan imbalan pesangon dan penghargaan purna jabatan tanpa pendanaan bagi pegawai yang memenuhi syarat.

PLN IVPS melakukan pendanaan dana pensiun yang dikelola bank lokal sebesar 4% dari penghasilan dasar.

UKP serta PLN IVPC, memberikan imbalan pascakerja manfaat pasti tanpa pendanaan kepada karyawan yang memenuhi syarat sesuai dengan CP.

Entitas lainnya memberikan imbalan pascakerja kepada karyawan sesuai dengan PKB.

Imbalan pemeliharaan kesehatan

Selain program pensiun yang dikelola oleh DP-PLN, Grup menyediakan imbalan program kesehatan tanpa pendanaan bagi pensiunan dan tanggungannya yang memenuhi persyaratan.

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Grup memberikan imbalan kerja jangka panjang lainnya berupa cuti besar, tunjangan keselesaian dinas, bantuan kematian dan pemakaman dan manfaat penghargaan ulangan bagi karyawan yang memenuhi persyaratan.

Perhitungan aktuaria atas program pensiun manfaat pasti, imbalan pascakerja lainnya, imbalan pemeliharaan kesehatan dan imbalan kerja jangka panjang lainnya untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, dihitung oleh kantor konsultan aktuaria terdaftar, Kantor Konsultan Aktuaria (KKA) Tulaguna Syafrial dan Armen Hangesan dalam laporannya masing-masing tertanggal 27 Maret 2024 dan 29 Maret 2023.

19. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Post-employment benefit obligations (continued)

Defined benefit pension program (continued)

DP-PLN is mainly funded by contributions from both the employees and the employer which are 8.00% and 17.77% from the basic pension income, respectively.

Other post-employment benefits

In addition to the pension plan and health care benefits, the Group also provides unfunded severance benefits and completion of employment awards for eligible employees.

PLN IVPS provides a funded pension plan that is managed by local banks at 4% of the basic income.

UKP and PLN IVPC, provided the unfunded post-employment benefits for their qualifying employees under the CP.

Other entities provided the post-employment benefits for the qualifying employees under the CLA.

Health care benefits

In addition to the pension plan managed by DP-PLN, the Group also provides unfunded health care benefit plans for their pensioners and their eligible dependents.

Other long-term benefits

The Group provides other long-term employee benefits such as long service leave, work accident, death and funeral allowances and an eighty-year service awards for the qualifying employees.

The actuarial calculations of the defined benefit pension program, other post-employment benefits, health care benefits and other long-term benefits for the years ended 31 December 2023 and 2022 were calculated by a registered actuarial consulting firm, Kantor Konsultan Aktuaria (KKA) Tulaguna Syafrial dan Armen Hangesan based on its report dated 27 March 2024 and 29 March 2023, respectively.

PT PLN (PERSERO) DAN ANAK PERUSAHAAN / PT PLN (PERSERO) AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 57.2 / Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

19. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Liabilitas imbalan pascakerja karyawan (lanjutan)

Asumsi aktuarial utama yang digunakan dalam perhitungan liabilitas imbalan kerja:

Tabel mortalita	CSO-58	Mortality table
Usia pensiun normal	58 tahun/years old	Normal retirement age

Asumsi yang berhubungan dengan pengalaman mortalitas masa depan ditentukan berdasarkan saran aktuaris menurut statistik yang telah diterbitkan dan pengalaman Grup. Asumsi mortalitas yang digunakan adalah tabel mortalita CSO-58 yang dikenakan dalam penghitungan liabilitas kerja jangka panjang yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pada tahun 2020, Grup melakukan studi untuk menilai tabel mortalitas mana yang paling sesuai dengan profil mortalitas pegawai dan pensiunan Grup. Dalam melakukan studi, Grup telah mempertimbangkan CSO-58, GAM-71, AIVN-49, GAM-83, TMI-2011 dan TMI-2019. Dari studi tersebut, Grup memutuskan bahwa tabel mortalitas yang paling sesuai dengan profil mortalitas pegawai dan pensiunan Grup adalah CSO-58.

Program pensiun manfaat pasti

Jumlah yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian ditentukan sebagai berikut:

19. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Post-employment benefit obligations (continued)

The principal actuarial assumptions that have been used in the calculations of the employment benefits obligation:

The assumptions regarding the future mortality experience are based on actuarial advice in accordance with published statistics and experiences by the Group. The mortality assumptions that have been used are based on the CSO-58 mortality table which was applied when calculating the long-term benefits liability recognized within the consolidated statement of financial position.

In 2020, the Group conducted a study to determine which mortality tables best suited most of the Group's employees' and pensioners' mortality profile. In the study, the Group considered CSO-58, GAM-71, AIVN-49, GAM-83, TMI-2011 and TMI-2019. Based on the study, the Group decided that the mortality table that best suited the mortality profile of the Group's employees and pensioners was CSO-58.

Defined benefit pension program

The amounts recognized in the consolidated statements of financial position were determined as follows:

	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022	
Nilai kini kewajiban yang dicanai	571,097	546,453	Present value of funded obligations
Nilai wajar aset program	(600,088)	(525,582)	Fair value of plan assets
Jumlah	(28,991)	20,871	Total
Perubahan dampak batas atas aset	28,991	-	Changes in effect of asset ceiling
Liabilitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian	-	20,871	Liability in the consolidated statements of financial position

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAK/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/14 *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

18. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) / *18. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)*

Liabilitas imbalan pasca kerja karyawan (lanjutan)

Postemployment benefit obligations (continued)

(Program pensiun manfaat pasti (lanjutan)

Defined benefit pension program (continued)

Pergerakan liabilitas program pensiun manfaat pasti selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movements in the defined benefit pension program obligations during the years were as follows:

	31 Desember / December 2023	31 Desember / December 2022	
Pada awal tahun	549,483	544,574	*At beginning of the year*
Dibebankan ke laba rugi:			*Charged to profit or loss:*
Biaya jasa kini	10,984	7,910	*Current service cost*
Biaya bunga	38,131	36,604	*Interest expense*
	49,115	44,514	
Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain:			*Charged to other comprehensive income:*
Kerugian/(keuntungan) dari penyesuaian atas pengalaman	3,149	(388)	*Losses/(gains) from experience adjustments*
Kerugian/(keuntungan) aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	5,387	(5,689)	*Losses/(gains) from changes in financial assumptions*
Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi demografik	-	433	*Loss from changes in demographic assumptions*
Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi lainnya	-	27	*Loss from changes in other assumptions*
	8,716	(5,495)	
Pembayaran manfaat	(35,297)	(34,430)	*Benefit payments*
Pada akhir tahun	571,997	549,483	*At end of the year*

Pergerakan nilai wajar aset program selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movements in the fair value of the plan assets during the years were as follows:

	31 Desember / December 2023	31 Desember / December 2022	
Pada awal tahun	525,792	450,203	*At beginning of year*
Imbalan hasil aset program	37,115	32,751	*Return on plan assets*
Iuran dari pemberi kerja	14,560	10,652	*Contribution from employers*
Iuran pekerja	4,500	2,134	*Contribution from employees*
Keuntungan aktuarial yang diakui	53,355	33,482	*Recognised actuarial gains*
Pembayaran manfaat	(35,297)	(34,430)	*Benefit payments*
Pada akhir tahun	600,025	525,792	*At end of the year*

PT PLN NUSANTARA POWER DAN DENGAN ANAK PERUSAHAAN / PT PLN NUSANTARA POWER AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/15 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

19. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) / 19. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Liabilitas imbalan pasca kerja lainnya (lanjutan) / Postemployment benefit obligations (continued)

Program pensiun manfaat pasti (lanjutan) / Defined benefit pension program (continued)

Pergerakan program pensiun manfaat pasti selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movements in the defined benefit pension program during the years were as follows:

	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022	
Pada awal tahun	22,671	64,671	At beginning of the year
Biaya jasa kini	10,954	7,910	Current service cost
Biaya bunga	26,131	36,604	Interest expense
Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain			Charged to other comprehensive income:
Kerugian/(keuntungan) dari penyesuaian atas pengalaman	3,149	(356)	Losses/(gains) from experience adjustments
Kerugian/(keuntungan) aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	5,587	(5,669)	Losses/(gains) from changes in financial assumptions
Kerugian aktuaria yang timbul dari perubahan asumsi demografik	-	433	Loss from changes in demographic assumptions
Kerugian aktuaria yang timbul dari perubahan asumsi lainnya	-	27	Loss from changes in other assumptions
Imbalan hasil aset program	(27,115)	(32,751)	Return on plan assets
Iuran dari pemberi kerja	(14,590)	(10,652)	Contribution from employers
Iuran pekerja	(4,500)	(3,134)	Contribution from employees
Keuntungan aktuaria yang diakui	(33,369)	(23,462)	Recognised actuarial gains
Perubahan dampak batas atas aset	28,291	-	Changes in effect of asset ceiling
Pada akhir tahun	-	22,671	At end of the year

Aset program tersebut dari:

The plan assets comprise the following:

	31 Desember/ December 2023		31 Desember/ December 2022		
	Jumlah/ Total	%	Jumlah/ Total	%	
Instrumen utang	349,205	61.63	325,889	61.38	Debt instruments
Instrumen ekuitas	115,887	19.25	88,873	16.59	Equity instruments
Properti	65,376	10.69	61,533	11.51	Property
Kas dan setara kas	36,312	6.06	20,106	3.84	Cash and cash equivalents
Lainnya	37,468	6.24	33,984	6.22	Others
Jumlah	600,268	100.00	525,790	100.00	Total

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/7/8 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

19. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) / 19. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Liabilitas imbalan pascakerja lainnya (lanjutan)

Post-employment benefit obligations (continued)

Program pensiun manfaat pasti (lanjutan)

Defined benefit pension program (continued)

Asumsi aktuaria utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

The principal actuarial assumptions that were used as follows:

	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022	
Tingkat diskonto	6.65%	7.17%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji per tahun	5.00%	5.00%	Salary increase rate per annum

Sensitivitas dari liabilitas program pensiun manfaat pasti terhadap perubahan asumsi aktuaria utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the defined benefits pension program obligations to changes in the weighted principal assumptions is as follows:

	Perubahan asumsi/ Change in assumption	Dampak atas liabilitas imbalan pascakerja/ Impact on liabilities: Kenaikan asumsi/ Increase in assumption	Penurunan asumsi/ Decrease in assumption	
Tingkat diskonto	1%	(10,660)	12,198	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	1%	11,877	(10,711)	Salary increase rate

Imbalan pascakerja lainnya

Other post-employment benefits

Jumlah yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian dihitungkan sebagai berikut:

The amounts recognized in the consolidated statements of financial position were determined as follows:

	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022	
Nilai kini kewajiban yang didanai	1,440,713	1,257,488	Present value of funded obligations
Nilai wajar aset program	(50,050)	(68,321)	Fair value of plan assets
Liabilitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian	1,390,663	1,189,167	Liability in the consolidated statements of financial position

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/77 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

19. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

19. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Liabilitas imbalan pascakerja karyawan (lanjutan)

Post-employment benefit obligations (continued)

Imbalan pascakerja lainnya (lanjutan)

Other post-employment benefits (continued)

Pergerakan liabilitas imbalan pascakerja lainnya selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movements of the other post-employment benefits obligations during the years were as follows:

	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022	
Pada awal tahun	1,257,485	1,191,275	At beginning of the year
Dibebankan ke laba rugi:			Charged to profit or loss:
Biaya jasa kini	77,073	77,073	Current service cost
Biaya bunga	93,509	88,538	Interest expense
Biaya jasa lalu	-	(38,083)	Past service cost
	171,412	127,688	
Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain:			Charged to other comprehensive income:
Kerugian (keuntungan) aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	42,291	(14,104)	Losses/(gains) from changes in financial assumptions
Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi demografik	-	3,459	Losses from changes in demographic assumptions
Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi lainnya	-	507	Losses/(gains) from changes in other assumptions
Kerugian (keuntungan) dari penyesuaian atas pengalaman	23,055	(16,186)	Losses/(gains) from experience adjustments
	65,446	(26,324)	
Pembayaran manfaat	(93,603)	(35,115)	Benefit payments
Pada akhir tahun	1,440,719	1,257,485	At end of the year

Pergerakan nilai wajar aset program selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movements in the fair value of the plan assets during the years were as follows:

	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022	
Pada awal tahun	88,331	102,318	At beginning of year
Imbalan hasil aset program	-	9,884	Return on plan assets
Iuran dari pemberi kerja	13,731	13,755	Contribution from employers
Kerugian aktuarial yang diakui	-	(15,321)	Recognized actuarial losses
Pembayaran manfaat	-	(1,625)	Benefit payments
Pada akhir tahun	92,062	88,331	At end of the year

PT PLN NUSANTARA POWER DAN SEKUTU DAN ANAK PERUSAHAN
Lampiran 57G Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

19. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Liabilitas imbalan pascakerja karyawan (lanjutan)

Imbalan pascakerja lainnya (lanjutan)

Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022	
Tingkat diskonto	6.75% - 7.45%	7.13% - 7.45%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji per tahun	1.00% - 7.13%	1.00% - 7.13%	Salary increase rate per annum

Sensitivitas dari liabilitas imbalan pascakerja lainnya terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

	Dampak atas liabilitas/ Impact on liabilities		
	Perubahan asumsi/ Change in assumption	Kenaikan asumsi/ Increase in assumption	Penurunan asumsi/ Decrease in assumption	
Tingkat diskonto	1%	(12.0%)	(10.9%)	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	1%	12.0%	(11.7%)	Salary increase rate

Imbalan pemeliharaan kesehatan

Grup memiliki beberapa skema imbalan pemeliharaan kesehatan pascakerja. Metode akuntansi, asumsi dan frekuensi penilaian adalah sama dengan yang digunakan dalam skema pensiun manfaat pasti.

Pergerakan liabilitas imbalan pemeliharaan kesehatan selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

19. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Post-employment benefit obligations (continued)

Other post-employment benefits (continued)

The principal actuarial assumptions that were used are follows:

Sensitivity of the other post-employment benefits obligations to changes in the weighted principal assumptions is as follows:

Health care benefits

The Group has a number of post-employment health care benefit schemes. The accounting method, assumptions and frequency of the valuations are similar to those used for the defined benefit pension schemes.

The movements of the health care benefits obligations during the years were as follows:

	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022	
Pada awal tahun	2.291.908	1.807.882	At beginning of the year
Dibebankan ke laba rugi			Charged to profit or loss
Biaya jasa kini	52.660	49.092	Current service cost
Biaya bunga	173.386	116.236	Interest expense
	226.046	165.328	
Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain			Charged to other comprehensive income
Kerugian aktuaria yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	109.151	5.022	Losses from changes in financial assumptions
Keuntungan aktuaria yang timbul dari perubahan asumsi lainnya	-	(2.808)	Gains from changes in other assumptions
Kerugian aktuaria yang timbul dari perubahan asumsi demografis	-	617.348	Losses from changes in demographic assumptions
(Keuntungan)/kerugian dari penyesuaian atas pengalaman	(215.215)	32.020	(Gains)/losses from experience adjustments
	(106.064)	654.582	
Pembayaran manfaat	(92.157)	(46.782)	Benefit payments
Pada akhir tahun	2.479.733	2.291.908	At end of the year

PT PLN NUSANTARA POWER DAN SEKUTU AS ANAKPERUSAHAAN
Lampiran 57/1 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

19. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

19. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Liabilitas imbalan pascakerja karyawan (lanjutan)

Post-employment benefit obligations (continued)

Imbalan pemeliharaan kesehatan (lanjutan)

Health care benefits (continued)

Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

The principal actuarial assumptions that were used as follows:

	31 Desember December 2023	31 Desember December 2022	
Tingkat diskonto	6.50%	7.38%	Discount rate
Tingkat kenaikan biaya kesehatan di masa depan	5.28%	5.28%	Future health cost increase rate

Sensitivitas dari kewajiban pemeliharaan kesehatan terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the health care benefits obligations to changes in the weighted principal assumptions is as follows:

	Dampak atas kewajiban / Impact on liabilities			
	Perubahan asumsi / Change in assumption	Kenaikan asumsi / Increase in assumption	Penurunan asumsi / Decrease in assumption	
Tingkat diskonto	1%	(30,394)	36,130	Discount rate
Tingkat kenaikan biaya kesehatan di masa depan	1%	34,139	(30,224)	Future health cost increase rate

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Other long-term employee benefits

Pergerakan kewajiban imbalan kerja jangka panjang lainnya selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movements of the other long-term employee benefits obligations during the years were as follows:

	31 Desember December 2023	31 Desember December 2022	
Pada awal tahun	89,088	118,575	At beginning of the year
Dibebankan ke laba rugi:			Charged to profit or loss:
Biaya jasa kini	30,142	(17,730)	Current service cost
Biaya bunga	1,289	5,108	Interest expense
Kerugian (keuntungan) aktuaria yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	311	(1,905)	Losses/(gains) from changes in financial assumptions
Keuntungan aktuaria yang timbul dari perubahan asumsi lainnya	-	(12)	Gains from changes in other assumptions
Kerugian aktuaria yang timbul dari perubahan asumsi demografis	-	378	Losses from changes in demographic assumptions
Kerugian (keuntungan) dari penyesuaian atas pengalaman	72,574	(9,487)	Losses/(gains) from experience adjustments
	94,322	(23,648)	
Pembayaran manfaat	(82,295)	(22,923)	Benefit payments
Pada akhir tahun	101,115	89,088	At end of the year

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/80 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

19. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) / 19. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan)

Other long-term employee benefits (continued)

Asumsi aktuaria utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

The principal actuarial assumptions used that were as follows:

	31 Desember/ December 2022	31 Desember/ December 2023	
Tingkat diskonto	6.38% - 6.41%	6.38% - 6.60%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji per tahun	7.12%	7.12%	Salary increase rate per annum

Sensitivitas dari liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya terhadap perubahan asumsi aktuaria utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the other long-term employee benefits obligations to changes in the weighted principal assumptions were as follows:

	Dampak atas liabilitas/ Impact on liabilities			
	Perubahan asumsi/ Change in assumption	Kenaikan asumsi/ Increase in assumption	Penurunan asumsi/ Decrease in assumption	
Tingkat diskonto	1%	(1.96)	2.42	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	1%	2.42	(1.96)	Salary increase rate

Grup terekspos dengan beberapa risiko melalui program pensiun manfaat pasti dan program kesehatan pascakerja. Risiko yang paling signifikan adalah sebagai berikut:

The Group is exposed to a number of risks through its defined benefit pension program and post-employment medical plans. The most significant risks are as follows:

Volatilitas aset

Asset volatility

Liabilitas program dihitung menggunakan tingkat diskonto yang merujuk kepada Zero Coupon Bond dari Indonesia Government Securities Yield Curve ("IGSYC"). Jika imbal hasil aset program lebih rendah, maka akan menghasilkan defisit program.

Investasi didiversifikasi dengan baik, sehingga kinerja buruk satu investasi tidak akan memberikan dampak material bagi seluruh keseluruhan aset. Proporsi terbesar aset investasi diamankan pada instrumen utang, meskipun Grup juga berinvestasi pada instrumen ekuitas, properti, kas dan setara kas dan lain-lain. Grup meyakini bahwa instrumen utang memberikan imbal hasil yang paling baik dalam jangka panjang pada tingkatan risiko yang cukup diterima.

The plan liabilities are calculated using a discount rate set with reference to Zero Coupon Bond from Indonesia Government Securities Yield Curve ("IGSYC"). If the plan assets underperform this yield, this will create a deficit.

Investments are well-diversified, such that the failure of any single investment would not have a material impact on the overall level of assets. The largest proportion of assets is invested in debt instruments, although the Group also invests in equity instruments, property, cash and cash equivalents and others. The Group believes that debt instruments offer the best returns over the long term with an acceptable level of risk.

Harapan umur hidup

Life expectancy

Sebagian besar dari liabilitas program menjadikan manfaat seumur hidup, sehingga kenaikan harapan umur hidup akan mengakibatkan kenaikan liabilitas program.

Rata-rata durasi adalah masing-masing 10.82 tahun untuk program pensiun manfaat pasti, 14.07 - 26.09 tahun untuk imbalan pascakerja lainnya, 17.55 tahun untuk imbalan pemeliharaan kesehatan dan 3.45 - 3.79 tahun untuk imbalan jangka panjang lainnya.

The majority of the plans' obligations are to provide lifetime benefits, so the increase in life expectancy will result in an increase in the plans' liabilities.

The weighted average durations are 10.82 years for defined benefit pension program, 14.07 - 26.09 years for other post-employment benefits, 17.55 years for health care benefits, and 3.45 - 3.79 years for other long-term benefits, respectively.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN SENTRAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/51 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

19. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Analisa jatuh tempo yang diharapkan dari imbalan pascakerja dan imbalan jangka panjang lainnya yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

19. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

The expected maturity analysis of the undiscounted post-employment benefits and other long-term benefits is as follows:

	Kurang dari 1 tahun / Less than 1 year	Antara 1-2 tahun / Between 1-2 years	Antara 2-5 tahun / Between 2-5 years	Lebih dari 5 tahun / More than 5 years	Jumlah / Total	
Program pensiun manfaat pasti	34,606	37,408	139,015	3,036,610	3,247,639	Defined benefit pension program
Imbalan pascakerja lainnya	147,886	161,242	641,718	13,687,123	14,637,969	Other post-employment benefits
Imbalan penelitian kesehatan	80,848	88,801	353,614	21,206,433	21,729,696	Health care benefits
Imbalan jangka panjang lainnya	33,882	35,027	87,873	80,743	237,525	Other long-term benefits
Jumlah	296,282	322,487	1,221,219	37,710,910	39,852,898	Total

Manajemen Grup berpendapat bahwa liabilitas imbalan pascakerja cukup untuk menutupi semua imbalan yang diatur dalam Peraturan Ketenagakerjaan atau PKB atau PP.

The Group's management is of the opinion that the post-employment benefit obligation is adequate to cover all benefits provided for in the Manpower Regulation or CLA or CR.

20. MODAL SAHAM

Berdasarkan Akta Notaris No. 70 tanggal 20 Desember 2022 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PLN Nusantara Power yang juga mengenai persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000008.AH.01.02.TAHUN 2023, dampak pembentukan struktur subholding (Catatan 1b) terhadap komposisi modal saham Perusahaan yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Komposisi pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2023, setelah transaksi diatas, adalah sebagai berikut:

20. CAPITAL STOCK

Based on Notarial Deed No. 70 dated 20 December 2022 concerning Amendments to the Articles of Association of PT PLN Nusantara Power which obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-0000008.AH.01.02.TAHUN 2023, the impact of establishing subholding structures (Note 1b) on the composition of the Company's share capital effective on 1 January 2023.

The shareholders composition of the Company as at 31 December 2023, after the above transactions, was as follows:

Pemegang saham	Jumlah saham / Number of shares	Persentase pemilikan / Percentage of ownership %	Jumlah modal disetor / Total paid-up capital	Shareholder
PLN	303,311,987,999	100	130,333,316	PLN
Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero)	1	-	-	Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero)
Jumlah	303,311,988,000	100	130,333,316	Total

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 8B2 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

20. MODAL SAHAM (lanjutan)

Modal saham diterbitkan dan disetor penuh Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 1 Januari 2022 adalah sebagai berikut:

Pemegang saham	Jumlah saham/ Number of shares	Persentase pemilikan/ Percentage of ownership %	Jumlah modal disetor/ Total paid-up capital	Shareholders
PLN	2,999,999,999	100	3,000,000	PLN
Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero)	1	-	-	Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero)
Jumlah	3,000,000,000	100	3,000,000	Total

Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Perusahaan diharuskan untuk membuat penyisihan cadangan wajib hingga sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Tidak ada batasan waktu untuk membentuk cadangan tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 1 Januari 2022, Perusahaan belum membentuk cadangan umum sesuai dengan Undang-Undang tersebut.

20. CAPITAL STOCK (continued)

The Company's issued and fully paid share capital as at 31 December 2022 and 1 January 2022 were as follows:

Under Indonesian Limited Company Law, the Company is required to establish a statutory reserve amounting to at least 20% of the Company's subscribed and paid-up capital. There is no time limit on the establishment of this reserve. As at 31 December 2023, 2022 and 1 January 2022, the Company had not yet established its general reserve in accordance with the Limited Liability Company Law.

21. DIVIDEN DAN CADANGAN UMUM

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 13 Juni 2023, pemegang saham memberi kuasa kepada pemegang saham mayoritas untuk menetapkan saldo laba, cadangan umum dan tujuan serta dividen atas laba Perusahaan tahun 2022. Berdasarkan surat PLN tanggal 2 Agustus 2023, pembagian dividen untuk tahun buku 2022 ditetapkan sebesar Rp6.848.477 atau Rp1.091 (nilai penuh) per lembar saham.

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 29 Juni 2022, pemegang saham memberi kuasa kepada pemegang saham mayoritas untuk menetapkan saldo laba, cadangan umum dan tujuan serta dividen atas laba Perusahaan tahun 2021. Berdasarkan surat PLN tanggal 6 September 2022, pembagian dividen untuk tahun buku 2021 ditetapkan sebesar Rp5.810.033 atau Rp968 (nilai penuh) per lembar saham.

Pada tahun 2023 dan 2022, pembayaran dividen kepada PLN dilakukan dengan pengurangan terhadap piutang usaha dari pihak berelasi (Catatan 10 dan 32).

21. DIVIDENDS AND GENERAL RESERVE

Based on the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders dated 13 June 2023, the shareholders granted the authority to the majority shareholder to determine the Company's retained earnings, appropriation of general reserves and dividends for the 2022 net income. Based on the letter from PLN dated 2 August 2023, the distribution of dividends for the year 2022 amounted to Rp6.848.477 or Rp1.091 (full amount) per share.

Based on the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders dated 29 June 2022, the shareholders granted the authority to the majority shareholder to determine the Company's retained earnings, appropriation of general reserves and dividends for the 2021 net income. Based on the letter from PLN dated 6 September 2022, the distribution of dividends for the year 2021 amounted to Rp5.810.033 or Rp968 (full amount) per share.

In 2023 and 2022, the dividend payments to PLN were made through deduction of the trade receivables from related parties (Notes 10 and 32).

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/83 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

22. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Tambahan modal disetor sebesar Rp2.870.998 berasal dari nilai pengalihan aset tetap, termasuk dana rehabilitasi PLTU Gresik Unit 1 dan 2 (berdasarkan Surat Direktur Utama PLN No. 1311/023/DIRUT/2001 tanggal 19 Maret 2001), dan material pemeliharaan sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2000 yang diterima dari PLN.

Berdasarkan Akta Notaris No. 101 tanggal 28 Juli 2022, dari Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta, PLN NPC mengadakan perjanjian jual beli saham dengan PT PLN Enjiniring ("PLNE") yang merupakan entitas sepengendali, untuk mengakuisisi 125.074.553 lembar saham biasa atau setara dengan 100% kepemilikan atas PPN dengan mengalihkan 20.411.338 lembar saham biasa atau setara dengan 99,8% kepemilikan atas RSC. Selisih sebesar Rp24.275 antara nilai pengalihan dan nilai buku bersih yang diterima dicatat dalam akun ekuitas sebagai tambahan modal disetor.

Tambahan modal disetor sebesar Rp99.599.203 berasal dari selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan nilai buku bersih yang diterima dari PLN (Lihat Catatan 5).

22. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

Additional paid-in capital amounting to Rp2,870,998 represents the transferred property, plant and equipment, including the funds that were provided for the rehabilitation of Gresik PLTU Unit 1 and 2 (based on Letter No. 1311/023/DIRUT/2001 dated 19 March 2001 from the President Director of PLN), and the maintenance materials from 1998 to 2000 that were received from PLN.

Based on Notarial Deed No. 101 dated 28 July 2022, of Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notary in Jakarta, PLN NPC entered into a share sale and purchase agreement with PT PLN Enjiniring ("PLNE") which is an entity under common control, to acquire 125,074,553 shares of common stock or equivalent to 100% ownership on PPN by transferring 20,411,338 common shares or equivalent to 99.8% ownership in RSC. The difference of Rp24,275 between the transfer value and the net book value received is recorded in the equity account as additional paid-in capital.

Additional paid-in capital amounting to Rp99,599,203 derives from the difference between the consideration transferred and the net assets received from PLN (Refer to Note 5).

23. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI

23. NON-CONTROLLING INTERESTS

	31 Desember 2023/31 December 2023							
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	-	-	-	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	-	-	-	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	-	-	-	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]
Jumlah	[illegible]	1		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Total

	[illegible]							
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	-	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	-	-	-	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	-	-	-	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]
Jumlah	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Total

PT PLN (PERSERO) DAN ANAK PERUSAHAAN
Lampiran 5/84 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

24. PENJUALAN TENAGA LISTRIK / 24. SALES OF ELECTRICITY

Akun ini menyajikan penjualan tenaga listrik kepada PLN.

This account represents the sales of electricity to PLN.

Lihat Catatan 32 untuk informasi saldo dan transaksi-transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 32 for the balances and transactions with related parties.

25. PENDAPATAN USAHA LAINNYA / 25. OTHER OPERATING REVENUE

Akun ini menyajikan pendapatan jasa pemeliharaan, konstruksi dan lainnya yang diperoleh dari pihak berelasi dan pihak ketiga, dengan rincian sebagai berikut:

This account represents the operating revenues from maintenance services, constructions and others, which were obtained from related parties and third parties, with details as follows:

	31 Desember December 2023	31 Desember December 2022*	
Jasa operasi dan pemeliharaan	1,149,710	986,343	Operation and maintenance services
Konstruksi	1,040,606	942,101	Constructions
Lain-lain	27,822	285,168	Others
Jumlah	2,218,138	2,213,612	Total

* Disajikan kembali (lihat Catatan 2) / * As restated (refer to Note 2)

Lihat Catatan 32 untuk informasi saldo dan transaksi-transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 32 for the balances and transactions with related parties.

26. BEBAN BAHAN BAKAR DAN PELUMAS / 26. FUEL AND LUBRICANTS EXPENSES

	31 Desember December 2023	31 Desember December 2022*	
Bahan bakar minyak			Fuel oils
Solar high Speed Diesel (HSD)	3,847,365	3,434,732	High Speed Diesel (HSD)
Biodesel	849,609	39,309	Biodesel
Fuel Marine Oil (MFO)	239,219	116,021	Fuel Marine Oil (MFO)
Sub-jumlah	5,936,193	3,590,062	Sub-total
Bahan bakar non-minyak			Non-oil fuels
Gas alam	19,232,116	31,276,128	Natural gas
Batubara	10,879,198	16,277,812	Coals
Air	393,314	311,196	Water
Biomassa	256,366	195,196	Biomass
Bahan kimia dan bahan lainnya	99,133	36,884	Chemicals and other materials
Pajak air permukaan	43,842	29,273	Surface water tax
Sub-jumlah	30,904,069	48,921,433	Sub-total
Minyak pelumas	117,138	105,404	Lubricants
Biaya layanan bahan bakar	277,808	-	Fuel services charge
Jumlah	31,307,208	49,026,736	Total

* Disajikan kembali (lihat Catatan 2) / * As restated (refer to Note 2)

Lihat Catatan 32 untuk informasi saldo dan transaksi-transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 32 for the balances and transactions with related parties.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/65 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

27. BEBAN PEMBELIAN TENAGA LISTRIK

Akun ini merupakan biaya pemakaian tenaga listrik dari auxiliary equipment mesin pembangkit.

Lihat Catatan 32 untuk informasi saldo dan transaksi-transaksi dengan pihak berelasi.

27. PURCHASED ELECTRICITY EXPENSES

This account represents the cost of using electricity from auxiliary equipment of generating machineries.

Refer to note 32 for the balances and transactions with related parties.

28. BEBAN PEMELIHARAAN

Akun ini merupakan beban yang timbul dari pemakaian material pemeliharaan dan jasa borongan untuk kegiatan pemeliharaan. Rincianya adalah sebagai berikut.

28. MAINTENANCE EXPENSES

This account represents the maintenance materials used and the contracted services for maintenance purposes. The details are as follows:

	31 Desember/ December 2023*	31 Desember/ December 2022*	
Pemakaian material pemeliharaan	4,139,571	5,377,909	Maintenance materials used
Jasa borongan	1,710,287	1,871,291	Contracted services
Jumlah	5,849,784	7,249,192	Total

* Disajikan kembali (Post Reclass 2) — * As restated (refer to Note 2)

Lihat Catatan 32 untuk informasi saldo dan transaksi-transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to note 32 for the balances and transactions with related parties.

29. BEBAN KARYAWAN

	31 Desember/ December 2023*	31 Desember/ December 2022*	
Gaji dan tunjangan	1,847,073	1,446,980	Salaries and allowances
Imbalan kerja (Catatan 16)	666,049	671,100	Employee benefits (Note 16)
Tunjangan kesehatan	660,060	665,203	Medical allowances
Bonus dan insentif karyawan	233,279	261,382	Employee bonus and incentives
Pendidikan dan pelatihan	107,708	77,380	Education and trainings
Lain-lain	49,403	47,430	Others
Jumlah	3,563,573	3,170,473	Total

* Disajikan kembali (Post Reclass 2) — * As restated (refer to Note 2)

29. EMPLOYEE COSTS

30. BEBAN USAHA LAIN-LAIN

	31 Desember/ December 2023*	31 Desember/ December 2022*	
Beban konstruksi	866,033	701,307	Construction cost
Asuransi (Catatan 33)	308,266	35,801	Insurance (Note 33)
Honorarium	136,266	106,784	Honorarium
Perjalanan dinas	87,666	62,403	Business travelling
Pajak dan kontribusi lainnya	70,261	31,313	Taxes and other contribution
Jasa profesional	43,560	17,108	Professional fees
Konsumsi	32,110	43,082	Meals consumption
Pajak final	31,175	33,471	Final tax
Lain-lain	119,336	365,538	Others
Jumlah	1,617,467	1,401,713	Total

* Disajikan kembali (Post Reclass 2) — * As restated (refer to Note 2)

Lihat Catatan 32 untuk informasi saldo dan transaksi-transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to note 32 for the balances and transactions with related parties.

30. OTHER OPERATING EXPENSES

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAK/AND /TS SUBSIDIARIES

Lampiran 6/38 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember/December 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

31. PERPAJAKAN / 31. TAXATION

a. Pajak dibayar di muka / a. Prepaid taxes

	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022	
Pajak Penghasilan Badan ("PPh Badan")			Corporate Income Taxes ("CIT")
2023	181.829	-	2023
2022	150.245	150.245	2022
2021	4.753	259.319	2021
Pembayaran dimuka atas Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar	88.960	197.067	Prepayment of Tax Assessment Letter for Underpayment
PPN	457.672	324.193	VAT
Jumlah	881.252	930.942	Total
Dikurangi: bagian lancar	(424.139)	(731.463)	Less: current portion
Bagian tidak lancar	457.113	199.479	Non-current portion

b. Utang pajak lainnya / b. Other taxes payable

	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022	
Pajak lainnya			Other income taxes
Pasal 21	51.573	35.191	Article 21
Pasal 22	33.032	9.943	Article 22
Pasal 23	36.194	9.994	Article 23
Pasal 4(2)	88.283	62.881	Article 4(2)
PPN	13.700	13.841	VAT
Lain-lain	2.742	609	Others
Jumlah	194.523	121.959	Total

c. Beban pajak penghasilan / c. Income tax expense

	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022*	
Beban pajak kini			Current tax
Perusahaan			The Company
Tahun berjalan	143.429	-	Current year
Entitas anak			Subsidiaries
Tahun berjalan	84.583	121.291	Current year
Tahun sebelumnya	10.797	-	Prior year
Subjumlah	238.809	121.291	Subtotal

* Disajikan kembali (lihat Catatan 2)

* As restated (refer to Note 2)

31. PERPAJAKAN (lanjutan) / 31. TAXATION (continued)

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan) / c. Income tax expense (continued)

	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022*	
Beban (manfaat) pajak tangguhan			Deferred tax expense (benefit)
Perusahaan	2.488.420	2.927.008	The Company
Entitas anak	827	(5.215)	Subsidiaries
Sub-jumlah	2.487.597	2.915.793	Sub-total
Beban pajak penghasilan konsolidasian	2.725.888	3.039.873	Consolidated income tax expense

* Disajikan kembali (lihat Catatan 2) / * As restated (refer to Note 2)

Pajak atas laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian berbeda dengan jumlah teoritis yang dihitung menggunakan rata-rata tertimbang tarif pajak yang berlaku atas laba masing-masing entitas anak yang dikonsolidasi sebagai berikut:

The tax on consolidated profit before income tax differs from the theoretical amount that would arise using the weighted average tax rate applicable to profits of the consolidated subsidiaries as follows:

	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022*	
Laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian	16.292.519	5.510.597	Consolidated profit before income tax
Beban pajak dengan tarif pajak yang berlaku 22%	3.608.374	1.212.231	Tax expense at prevailing tax rate of 22%
Penghasilan keuangan telah dikenakan pajak final	(19.754)	(27.598)	Finance income subject to final tax
Penghasilan lain tidak dapat dikurangkan	(436.642)	(165.231)	Other non-deductible income
Utilisasi rugi fiskal yang dibawa ke masa depan	(424.212)	-	Utilisation of prior year's tax loss carry forward
Aset pajak tangguhan yang tidak diakui	-	1.980.303	Unrecognized deferred tax assets
Beban pajak penghasilan konsolidasian	2.725.888	3.039.873	Consolidated income tax expense

* Disajikan kembali (lihat Catatan 2) / * As restated (refer to Note 2)

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan.

The taxable income resulting from the reconciliation will become the basis for filing the Annual Corporate Income Tax Return.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/95 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

31. PERPAJAKAN (lanjutan) / 31. TAXATION (continued)

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan) / c. Income tax expense (continued)

Pajak penghasilan sehubungan dengan penghasilan komprehensif lain selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The income tax relating to other comprehensive income during the year is as follows:

	[illegible]			[illegible]			
	Sebelum pajak/ Before tax	Pajak/ Tax	Setelah pajak/ After tax	Sebelum pajak/ Before tax	Pajak/ Tax	Setelah pajak/ After tax	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

d. Pajak tangguhan / d. Deferred tax

Pergerakan pajak tangguhan Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The movements in the Group's deferred tax for the years ended 31 December 2023 and 2022 is as follows:

	31 Desember/December 2023				
	31 Desember/ December 2022*)	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laba rugi/ Credited/ (charged) to profit or loss	(Dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain/ (Charged) to other comprehensive income	31 Desember/ December 2023	
Aset pajak tangguhan					Deferred tax assets
Entitas anak					Subsidiaries
Liabilitas imbalan kerja	21,152	1,440	-	22,592	Employee benefits liabilities
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	41,480	(602)	-	40,880	Short-term employee benefits liabilities
Provisi untuk persediaan usang	799	-	-	799	Provision for obsolete inventories
Provisi untuk penurunan nilai piutang	8,079	-	-	8,079	Provision for impairment of receivables
Liabilitas sewa	2,768	(1,267)	-	1,501	Lease liabilities
Aset tetap	(399)	(173)	-	(569)	Property, plant and equipment
Jumlah aset pajak tangguhan - bersih	73,554	(625)	-	72,929	Total of deferred tax assets - net
Liabilitas pajak tangguhan					Deferred tax liabilities
Perusahaan					The Company
Liabilitas imbalan kerja	763,264	45,245	(3,463)	805,046	Employee benefits liabilities
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	85,488	(8,480)	-	78,081	Short-term employee benefits liabilities
Provisi untuk persediaan usang	4,418	802	-	5,220	Provision for obsolete inventories
Provisi untuk penurunan nilai piutang	5,079	-	-	5,079	Provision for impairment of receivables
Liabilitas sewa	160,[illegible]	113,862	-	274,[illegible]	Lease liabilities
Aset tetap	(14,383,[illegible])	(3,640,037)	-	(17,322,880)	Property, plant and equipment
Jumlah liabilitas pajak tangguhan - bersih	(13,409,[illegible])	(3,486,[illegible])	(3,463)	(16,[illegible])	Total of deferred tax liabilities - net
Beban pajak tangguhan		(3,487,[illegible])	(3,463)		Deferred tax expenses

*) Disajikan kembali (Lihat Catatan 2) / *) As restated (refer to Note 2)

PT PLN NUSANTARA POWER DAN SENTRAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/93 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

31. PERPAJAKAN (lanjutan)

31. TAXATION (continued)

d. Pajak tangguhan (lanjutan)

d. Deferred tax (continued)

	31 Desember/December 2022*				
	31 Desember/ December 2021*	Dibebankan (Manfaatkan) ke laba rugi/ Credited (charged) to profit or loss	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/ Credited to other comprehensive income	31 Desember/ December 2022	
Aset pajak tangguhan					Deferred tax assets
Entitas anak					Subsidiaries
Liabilitas imbalan kerja	11,727	(8,143)	18,270	21,853	Employee benefits liabilities
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	10,484	(1,277)	-	11,202	Short term employee benefits liabilities
Provisi untuk penurunan nilai piutang	434	(12)	-	766	Provision for receivables impairment
Provisi untuk penurunan nilai piutang	5,127	2,766	-	8,174	Provision for inventories impairment
Liabilitas sewa	3,837	29	-	3,866	Lease liabilities
Sewa aset	(3,840)	3,453	-	(387)	Property, plant and equipment
Jumlah aset pajak tangguhan - bersih	27,779	3,216	18,270	51,232	Total of deferred tax assets - net
Liabilitas pajak tangguhan					Deferred tax liabilities
Perusahaan					The Company
Liabilitas imbalan kerja	973,943	38,333	124,712	1,136,988	Employee benefits liabilities
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	88,186	(8,290)	-	80,896	Short term employee benefits liabilities
Provisi untuk penurunan nilai piutang	3,135	39	-	3,174	Provision for receivables impairment
Provisi untuk penurunan nilai piutang	3,798	(93)	-	3,705	Provision for inventories impairment
Liabilitas sewa	2,198	101,811	-	103,909	Lease liabilities
Sewa aset	(1,087,125)	(1,317,379)	-	(2,404,503)	Property, plant and equipment
Jumlah liabilitas pajak tangguhan - bersih	(16,863,243)	(3,647,489)	124,712	(20,385,998)	Total of deferred tax liabilities - net
Beban pajak tangguhan		(3,815,780)	142,982		Deferred tax expense

* Disajikan kembali (lihat Catatan 2)

* As restated (refer to Note 2)

Manajemen Grup berpendapat bahwa liabilitas pajak tangguhan akan diselesaikan setelah 12 bulan.

Management of the Group is of the opinion that deferred tax liabilities will be settled after 12 months.

e. Surat ketetapan pajak

e. Tax assessment letters

Perusahaan

The Company

Jenis pajak/Tax type	Tahun pajak/ Fiscal year	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022	Status
Pajak penghasilan (PPh) 22 Income Tax Art 22)	2017	-	7,765	Pengajuan kembali/Judicial review
PPh 22 (Income Tax Art 22*)	2018	-	163,945	Pengajuan kembali/Judicial review
PPh 22 (Income Tax Art 22)	2019	135,172	135,172	Banding/Appeal
PPh Badan/CIT	2019	18,888	18,888	Banding/Appeal
Jumlah		154,727	325,440	Total
Provisi		(67,774)	(169,154)	Provision
Jumlah, bersih		86,953	156,287	Total, net

* Telah dikembalikan saat masih dalam proses peninjauan kembali oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

* Has been refunded but still ongoing judicial review by the Directorate General of Taxes (DJP)

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ANAK PERUSAHAAN / PT PLN NUSANTARA POWER AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/30 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

31. PERPAJAKAN (lanjutan)

a. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

Pada tahun 2022, Perusahaan telah menerima pengembalian atas lebih bayar PPh Badan tahun 2021 senilai Rp243.779 dan kurang bayar PPh 22 atas bulan Desember 2017 dan tahun 2018 masing-masing sebesar Rp8.909 dan Rp182.941. Sisa pengembalian sebesar Rp884 dihapuskan dari provisi.

Pada tahun 2022, Perusahaan telah menerima pengembalian atas kurang bayar PPh 22 tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp207.089 dan 143.106. Sisa pengembalian sebesar Rp21.848 dihapuskan dari provisi.

Pada tanggal 28 April 2022, Perusahaan menerima Surat Kelebihan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") atas PPN bulan Desember 2020 sebesar Rp265.984 yang telah diterima oleh Perusahaan pada Mei 2022.

f. Administrasi

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, perusahaan-perusahaan di dalam Grup yang berdomisili di Indonesia menghitung dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. DJP dapat menetapkan atau mengubah pajak dalam batas waktu lima tahun sejak terutangnya pajak.

g. Tarif pajak

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("UU HPP") telah disahkan. UU HPP menetapkan tarif pajak penghasilan badan bagi Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap dari tahun pajak 2022 tetap sebesar 22%.

31. TAXATION (continued)

a. Tax assessment letters (continued)

In 2022, the Company received a refund of overpayment of CIT for year 2021 amounting to Rp243,779 and underpayment income tax art 22 for December 2017 and year 2018 amounting to Rp8,909 and Rp182,941, respectively. The remaining balance amounting to Rp884 has been written off from the provision.

In 2022, the Company received a refund of underpayment income tax art 22 for 2018 and 2017 amounting to Rp207,089 and Rp143,106, respectively. The remaining balance amounting to Rp21,848 has been written off against the provision.

On 28 April 2022, the Company received a Overpayment Tax Assessment Letter ("SKPLB") for its VAT of December 2020 amounting to Rp265,984 which was received by the Company in May 2022.

f. Administration

Under the Taxation Laws of Indonesia, companies within the Group which are domiciled in Indonesia calculate and pay tax on the basis of self assessment. The DGT may assess or amend taxes within five years of the time the tax becomes due.

g. Tax rate

On 29 October 2021, Law No. 7 Year 2021 on Harmonization of Tax Regulations (the "HPP Law") was issued. The HPP Law stipulates that the corporate income tax rate for Corporate Tax Payers and Permanent Establishments from fiscal year 2022 remains at 22%.

32. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Sifat hubungan berelasi

Berikut ini adalah daftar pihak berelasi yang memiliki transaksi dengan Grup:

32. THE BALANCE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Nature of related parties

Below is the list of the related parties that engage in transactions with the Group:

Pihak-pihak berelasi / Related parties	Sifat hubungan / Nature of relationship	Sifat transaksi / Nature of transaction
BRI	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia / Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan rekening bank, deposito berjangka, dan bank garansi / Placement of cash in banks, time deposits, and restricted cash in banks
BNI	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia / Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan rekening bank, deposito berjangka, dan bank garansi / Placement of cash in banks, time deposits, and restricted cash in banks

PT PLN NUSANTARA POWER DAN SENTRAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/51 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

32. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

32. THE BALANCE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Sifat hubungan berelasi (lanjutan)

Nature of related parties (continued)

Berikut ini adalah daftar pihak berelasi yang memiliki transaksi dengan Grup: (lanjutan)

Below is the list of the related parties that engage in transactions with the Group: (continued)

Pihak-pihak berelasi Related parties	Sifat hubungan Nature of relationship	Sifat transaksi Nature of transaction
Bank Mandiri	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan rekening bank, deposito berjangka, dan kas giralan Placement of cash in bank, time deposits, and restricted cash in bank
BSI	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan rekening bank Placement of cash in bank
PT Pertamina (Persero) ("Pertamina")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian bahan bakar dan minyak pelumas Purchase of fuel and lubricants
PT Pertamina Gas Negara Tbk ("PGN")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian bahan bakar gas Purchase of gas fuel
PT Pertamina Rene Kaga ("Rene Kaga")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian bahan bakar gas Purchase of gas fuel
PT Pertamina Hulu Energi ("PHE")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian bahan bakar gas Purchase of gas fuel
PT Pertamina EP Cepu ("PEPC")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian bahan bakar gas Purchase of gas fuel
PT Pertamina Gas ("Perragas")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian bahan bakar gas Purchase of gas fuel
PT Bukit Asam Tbk ("PTBA")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian batu bara Purchase of coal
KB	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi asuransi kendaraan Registration services
PT Surveyor Indonesia ("SI")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pekerjaan teknik, survei dan pengukuran lapangan Engineering services, survey and coal measurement

PT PLN (PERSERO) DAN ANAK PERUSAHAAN
Lampiran 5/32 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

32. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

32. THE BALANCE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Sifat hubungan berelasi (lanjutan)

Nature of related parties (continued)

Berikut ini adalah daftar pihak berelasi yang memiliki transaksi dengan Grup: (lanjutan)

Below is the list of the related parties that engage in transactions with the Group: (continued)

Pihak yang berelasi Related parties	Sifat hubungan Nature of relationship	Sifat transaksi Nature of transaction
PT Hutama Karya (Persero) ("HK")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi jasa konstruksi Construction services
PT Jasamarga Jasa Indonesia (Persero) ("Jasindo")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Jaminan hasil dan mesin pembangkit, dan peralatan jaringan Insurance services for transformer and power plants and transmission equipment
Perum Jasa Tirta ("Jasa Tirta")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian air Purchase of water
PT KPI (Persero)	Entitas induk pengendali Controlling parent entity	Transaksi penjualan tenaga listrik Sales of electricity
Yayasan Pendidikan dan Kesehatan PT PLN (Persero)	Pemegang saham minoritas Minority shareholder	Penyertaan modal Paid-in capital
AS	Entitas segendali Entity under common control	Transaksi penjualan barang dan jasa Sales of goods and services
PT KPI Batam ("KPI Batam")	Entitas segendali Entity under common control	Transaksi penjualan barang dan jasa Sales of goods and services
BPI	Entitas segendali Entity under common control	Transaksi pembelian bahan bakar Purchase of fuel
PT KPI Bojonegoro Gas ("KPI BGG")	Entitas segendali Entity under common control	Transaksi sewa Floating Storage Regasification Unit Lease of Floating Storage Regasification Unit
PT Haleyora Power ("HP")	Entitas segendali Entity under common control	Transaksi pembelian barang dan jasa Purchase of goods and services
ICON	Entitas segendali Entity under common control	Transaksi pembelian barang dan jasa Purchase of goods and services
PLNE	Entitas segendali Entity under common control	Transaksi pembelian barang dan jasa Purchase of goods and services
PT KPI Tarakan ("KPI Tarakan")	Entitas segendali Entity under common control	Transaksi pembelian barang dan jasa Purchase of goods and services
PT Energi Management Indonesia (Persero) ("EMI")	Entitas segendali Entity under common control	Transaksi pembelian barang dan jasa Purchase of goods and services
PT Vientiane Cipta Tenaga Kualanta ("VCTK")	Entitas segendali Entity under common control	Transaksi pembelian barang dan jasa Purchase of goods and services
PT Pelayaran Bahtera Lestari ("BLS")	Entitas segendali Entity under common control	Jasa pengangkutan batubara Coal transport services
JPLH	Pihak berelasi lainnya Other related parties	Jaminan bangunan dan peralatan umum Insurance for buildings and general equipment
EP	Entitas asosiasi/asosiasi	Jasa operasi dan pemeliharaan Operation and maintenance services
EDU	Entitas asosiasi/asosiasi	Transaksi jasa proyek Project services
SDSI	Ventura bersama/joint venture	Jasa operasi dan pemeliharaan Operation and maintenance services
SPI	Ventura bersama/joint venture	Jasa operasi dan pemeliharaan Operation and maintenance services

PT PLN (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/33 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

32. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

32. THE BALANCE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Sifat hubungan berelasi (lanjutan)

Nature of related parties (continued)

Berikut ini adalah daftar pihak berelasi yang memiliki transaksi dengan Grup (lanjutan):

Below is the list of the related parties that engage in transactions with the Group (continued):

Pihak-pihak berelasi / Related parties	Sifat hubungan / Nature of relationship	Sifat transaksi / Nature of transaction
BOPJB	Ventura bersama / Joint venture	Piutang kepada ventura bersama / Receivables from joint venture
RUGE	Ventura bersama / Joint venture	Piutang kepada ventura bersama / Receivables from joint venture
KSPE	Ventura bersama / Joint venture	Piutang lain-lain / Other receivables
KPJB	Ventura bersama / Joint venture	Jasa operasi dan pemeliharaan dan piutang dividen / Operation and maintenance services and dividend receivables
DPPLN	Pihak berelasi lainnya / Other related parties	Pengelola dana pensiun / Pension fund manager
Pegawai manajemen kunci / Key management personnel	Komisaris, Direksi dan Kepala Divisi / Commissioners, Directors and Division heads	Uang muka karyawan / Salaries and advances

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi:

The balances and transactions with related parties

	31 Desember / December 2023	31 Desember / December 2022	
Kas dan setara kas (Catatan 7)			Cash and cash equivalents (Note 7)
Bank Mandiri	3,317,479	2,731,039	Bank Mandiri
BRI	2,036,409	1,842,309	BRI
BNI	738,233	1,148,034	BNI
BSI	22,187	13,032	BSI
Jumlah	6,114,307	5,734,413	Total
Deposito berjangka (Catatan 8)			Time deposits (Note 8)
BRI	650,128	387,421	BRI
Bank Mandiri	213,403	193,174	Bank Mandiri
BNI	50,402	21,082	BNI
Jumlah	913,733	601,677	Total
Kas dan setara kas dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya (Catatan 8)			Restricted cash in banks and time deposits (Note 8)
BRI	32,210	191,914	BRI
Bank Mandiri	28,398	112,583	Bank Mandiri
BNI	2,294	1,197	BNI
Jumlah	62,902	305,694	Total

	31 Desember / December 2023	31 Desember / December 2022	1 Januari / January 2022	
Piutang usaha (Catatan 10)				Trade receivables (Note 10)
PLN	33,203,486	18,881,101	33,154,148	PLN
PLN Batam	119,247	-	34	PLN Batam
IPP	43,878	93,237	38,240	IPP
BUMN	14,038	13,880	33,711	BUMN
BPI	13,074	97,173	98,453	BPI
Lain-lain	13,219	8,271	8,703	Others
Jumlah	33,406,942	19,093,636	33,334,088	Total

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/34 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

32. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

32. THE BALANCE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

The balances and transactions with related parties (continued)

	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022*	1 Januari/ January 2022*	
Piutang lain-lain				Other receivables
BGR/B	41,707	32,440	82,041	BGR/B
KPJB	6,491	-	-	KPJB
PIJBE	4,041	782	200	PIJBE
NSHE	-	19,705	-	NSHE
Jumlah	52,239	53,127	82,241	Total

* Disajikan kembali (lihat Catatan 2)

* Restated (refer to Note 2)

	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022	
Piutang kepada ventura bersama (Catatan 11)			Receivables from joint ventures (Note 11)
BGR/B	336,440	313,431	BGR/B
PIJBE	132,389	13,428	PIJBE
Jumlah	468,829	326,859	Total

	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022*	1 Januari/ January 2022*	
Utang usaha (Catatan 16)				Trade payables (Note 16)
BPI	1,403,826	266,423	364,170	BPI
Pihak Ketiga	273,865	387,880	-	Pihak Ketiga
Pertamina	214,110	31,126	2,409,291	Pertamina
PEPC	166,072	-	-	PEPC
PHE	114,090	-	27,110	PHE
KIE	79,730	107,808	71,223	KIE
KE	62,477	82,368	232,887	KE
Jasa Tirta	33,041	207,302	187,132	Jasa Tirta
Perategas	-	3,138,790	1,797,471	Perategas
PLN Batam	-	73,211	102,640	PLN Batam
PTBJ	-	413,139	187,924	PTBJ
Lainnya	117,842	302,387	208,731	Others
Jumlah	2,775,232	5,131,215	5,721,610	Total

	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022*	1 Januari/ January 2022*	
Utang lain-lain (Catatan 17)				Other payables (Note 17)
PLN	200,200	192,949	19,942	PLN
PIP	31,793	993	1,997	PIP
IGCN	12,715	4,179	14,808	IGCN
HP	8,408	3,413	3,881	HP
BUG	-	8,200	113,318	BUG
PLNE	12,690	11,243	8,058	PLNE
Jumlah	265,756	212,988	161,908	Total

* Disajikan kembali (lihat Catatan 2)

* Restated (refer to Note 2)

	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022	
Pinjaman dari pemegang saham (Catatan 22a)			Loans from a shareholder (Note 22a)
PLN	2,864,734	2,107,983	PLN

PT PLN NUSANTARA POWER DAN SENTRAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/35 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

32. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

32. THE BALANCE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

The balances and transactions with related parties (continued)

	31 Desember/ December 2022	31 Desember/ December 2023	
Penjualan tenaga listrik (Catatan 26)			Sales of electricity (Note 26)
PLN	47,831,108	71,586,176	PLN
Pendapatan usaha lainnya (Catatan 25)			Other operating revenue (Note 25)
PLN	1,848,477	881,887	PLN
PLN Batam	308,833	8,143	PLN Batam
PIP	127,401	300,600	PIP
BDKN	82,477	82,009	BDKN
BPI	79,666	80,103	BPI
Lain-lain	71,289	33,397	Others
Jumlah	2,546,747	1,285,843	Total
Pembelian tenaga listrik (Catatan 27)			Purchased electricity (Note 27)
PLN	917,198	1,085,283	PLN
Beban bahan bakar dan pelumas (Catatan 30)			Fuel and lubricants expenses (Note 30)
Pertamina	8,820,403	8,446,727	Pertamina
BPI	3,790,273	2,886,833	BPI
PTBJ	3,128,376	1,417,869	PTBJ
PGN	1,081,208	2,201,720	PGN
UR	277,296	2,388,481	UR
Jaya Tirta	343,273	374,021	Jaya Tirta
PLNSG	189,734	103,273	PLNSG
PLNE	123,903	261,195	PLNE
Jumlah	23,136,735	23,081,781	Total
Beban pemeliharaan (Catatan 28)			Maintenance expenses (Note 28)
PLN Tarakan	191,343	172,173	PLN Tarakan
PLN Batam	143,887	72,383	PLN Batam
PIP	139,103	288,287	PIP
PLNE	89,849	33,174	PLNE
Lain-lain	83,171	151,283	Others
Jumlah	649,473	719,099	Total
Beban usaha lain-lain (Catatan 29)			Other operating expenses (Note 29)
Jasinfo	48,123	23,333	Jasinfo
JPLN	-	1,499	JPLN
Jumlah	48,123	24,831	Total
Beban keuangan			Finance costs
PLNSG	143,488	1,187	PLNSG
PLN	33,233	-	PLN
Jumlah	243,721	1,187	Total

*) Dan dan normal/ And Section 3)

*) Dan dan normal/ And Section 3)

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/98 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

32. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

a. Pinjaman dari pemegang saham

Pada tanggal 20 Maret 2018, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dengan PLN sebesar AS$250.000.000 dengan tingkat bunga tahunan LIBOR USD enam bulan dengan marjin 0,95%. Pinjaman ini digunakan untuk membiayai proyek add-on PLTGU Muara Tawar Blok 2, 3 dan 4. Jangka waktu perjanjian efektif sejak ditandatangannya perjanjian ini dan akan berakhir pada tanggal 5 Mei 2032. Pada tanggal 31 Oktober 2023, perjanjian ini telah diamandemen untuk mengubah suku bunga dari LIBOR menjadi SOFR.

Saldo pinjaman ini pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp2.284.744 (setara dengan AS$147.355.245) dan Rp2.667.053 (setara dengan AS$171.054.541), dengan porsi jangka pendek masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp287.014 dan Rp291.080.

b. Kompensasi manajemen kunci

Jumlah kompensasi Dewan Komisaris Perusahaan untuk 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp13.630 dan Rp13.977.

Jumlah kompensasi Direksi Perusahaan untuk 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp28.294 dan Rp28.535.

Seluruh kompensasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan merupakan imbalan kerja jangka pendek.

32. THE BALANCE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

a. Loans from a shareholder

On 20 March 2018, the Company entered into a loan agreement with PLN amounted to US$250,000,000 with an annual interest rate of LIBOR USD six-month with 0.95% margin. The loan will be used to fund the add-on project of PLTGU Muara Tawar Block 2, 3 and 4. The terms of this agreement is effective since the loan is signed and will be expired on 5 May 2032. On 31 October 2023, the agreement has been amended to change the interest rate from LIBOR to SOFR.

The outstanding balances of this loan as at 31 December 2023 and 2022 amounted to Rp2,284,744 (equivalent to US$147,355,245) and Rp2,667,053 (equivalent to US$171,054,541), respectively, with the current portion as at 31 December 2023 and 2022 amounted to Rp287,014 and Rp291,080, respectively.

b. Key management compensation

The total remuneration of the Company's Board of Commissioners in 31 December 2023 dan 2022 amounted to Rp13,630 and Rp13,977 respectively.

The total remuneration of the Company's Directors in 31 December 2023 dan 2022 amounted to Rp28,294 and Rp28,535, respectively.

All of the compensation to the Company's Boards of Commissioners and Directors are short-term employee benefits.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/37 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

33. IKATAN DAN KONTINJENSI

Pada tanggal 31 Desember 2023, Grup memiliki perikatan penting dan kontinjensi sebagai berikut:

a. Perjanjian Pengadaan Bahan Bakar

1. Batubara

33. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

As at 31 December 2023, the Group had significant commitments and contingencies as follows:

a. Fuel Supply Agreements

1. Coal

Pemasok / Supplier	Jenis Perjanjian / Type of Agreement	Periode Berakhir / Ended Period	Periode Berakhir / Ended Period	Volume / Volume
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

Pada tanggal 31 Desember 2021, Direktur Jenderal Minerba dan Batubara untuk dan atas nama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia ("KESDM") menerbitkan surat No. B-1605/MB.05/DJB.B/2021 ("Surat No. B-1605") yang antara lain mengatur bahwa seluruh pemegang PKP2B, IUP, IUPK Operasi Produksi, IUPK Kelanjutan Kontrak/Perjanjian Operasi, dan pemegang izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara (a) dilarang melakukan penjualan batubara ke luar negeri sejak tanggal 1 sampai dengan 31 Januari 2022; (b) wajib memasok seluruh produksi batubaranya untuk memenuhi kebutuhan listrik untuk kepentingan umum sesuai kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri ("DMO") dan/atau penugasan dari Pemerintah kepada perusahaan dan/atau konsisten dengan PLN dan Independent Power Producer ("IPP"), dan (c) dalam hal sudah tersepat batubara di pelabuhan muat dan/atau telah dimuat di kapal, harus segera dikirim ke PLTU milik Grup PLN dan IPP yang pelaksanaannya agar segera disesuaikan dengan PLN. Dalam Surat B-1605 juga tersebut informasi bahwa larangan ekspor batubara akan dievaluasi dan dinilai berdasarkan realisasi pasokan batubara untuk pembangkit listrik tenaga batubara PLN dan IPP.

Pada tanggal 19 Januari 2022, KESDM mengeluarkan Keputusan Menteri No. 13.K/HK.02/MEM.B/2022 yang mengatur tentang pedoman pengenaan sanksi administrasi, larangan ekspor batubara, pengenaan denda dan pemberian dana kompensasi untuk memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri.

On 31 December 2021, the Director General of Mineral and Coal for and on behalf of Ministry of Energy and Mineral Resources ("MoEMR") issued letter No. B-1605/MB.05/DJB.B/2021 ("Letter No. B-1605") which, among others, stipulated that all holders of COA/CCoW, IUP, IUPK Operation Production, IUPK for the Continuation of Contract/Agreement Operation, and holders of Coal Transportation and Sales Permit (a) are prohibited from selling coal overseas from 1 to 31 January 2022; (b) must supply all of its coal production to meet electricity needs for public interests in accordance with Domestic Market Obligation ("DMO") fulfilment and/or assignment from the Government to companies and/or contracts with PLN and Independent Power Producer ("IPP"), and (c) in the event that coal is already available at the loading port and/or has been loaded on a ship, it must immediately be sent to the PLTU belonging to PLN Group and IPP, the implementation of which will be concluded with PLN. There is also information in Letter B-1605 that the prohibition on coal exports will be evaluated and reviewed based on the realization of coal supply for coal fired power plants of PLN and IPP.

On 19 January 2022, MoEMR issued Ministerial Decree No. 13.K/HK.02/MEM.B/2022 which regulates guidelines for the imposition of administrative sanctions, bans on coal exports, imposition of fines and provision of compensation funds to meet domestic coal needs.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/58 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

33. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

33. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

a. Perjanjian Pengadaan Bahan Bakar (lanjutan)

a. *Fuel Supply Agreements (continued)*

i. Batubara (lanjutan)

i. Coal (continued)

Selama tahun 2023, harga dasar batubara di tempat penyerahan stockpile unit berkisar antara Rp270.507 (nilai penuh) sampai dengan Rp1.231.154 (nilai penuh) per ton, yang disesuaikan terhadap nilai kalori, kadar abu, sulfur, air, Ash Fusion Temperature ("AFT"), Hardgrove Grindability Index ("HGI") dan ukuran batubara.

In 2023, the stockpile price of coal ranges from Rp270.507 (full amount) to Rp Rp1.231.154 (full amount) per ton, which is adjusted against calorific value, ash content, sulphur, water, Ash Fusion Temperature ("AFT"), Hardgrove Grindability Index ("HGI") and coal size.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 07 tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara, seluruh harga dasar kontrak diatas akan ditinjau secara periodik setiap 3 (tiga) bulanan untuk disesuaikan dengan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang AS$, dan harga dasar bahan bakar minyak HSD untuk industri.

Based on the Regulation of Minister of Energy and Mineral Resources of Indonesia No. 07 year 2017 regarding the Procedures of Coal and Metal Sales Pricing, the base prices in all contracts above will be reviewed quarterly to justify the price with the exchange rate from Rupiah to US$, and the HSD basic price for industries.

Sehubungan dengan perjanjian jual beli batubara, pemasok diwajibkan untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan.

In relation to the coal sales and purchase agreement, suppliers are obliged to submit their performance guarantees.

ii. Gas

ii. Gas

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Harga realisasi pembelian gas pipa pada titik penyerahan di tahun 2023 berkisar antara AS$4,10 sampai dengan AS$26,27 dan Rp83.420 sampai dengan Rp449.465 per Million British Thermal Unit ("MMBTU")/Million Standard Cubic Feet ("MSCF").

The gas pipe purchase prices at the point of delivery range in 2023 from US$4.10 to US$26.27, and Rp83.420 (full amount) to Rp449.465 (full amount) per Million British Thermal Unit ("MMBTU")/Million Standard Cubic Feet ("MSCF").

33. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

a. Perjanjian Pengadaan Bahan Bakar (lanjutan)

ii. Bahan Bakar Minyak ("BBM")

Perusahaan melalui PLN dan Pertamina mengadakan Perjanjian Induk Jual Beli Bahan Bakar Minyak No. 071.PJ/060/DIR/2001 tanggal 8 Oktober 2001. Perjanjian ini telah diadendum pada tanggal 16 Mei 2007, dimana PLN dan Pertamina menyepakati antara lain: (i) penggunaan harga bahan bakar bulanan ditetapkan oleh Pertamina untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 April 2007 dan harga bahan bakar 109,8% dari Mid Oil Platts Singapore ("MOPS") ditambah PPN untuk periode 1 Mei 2007 sampai dengan 31 Desember 2007; (ii) harga bahan bakar setelah tanggal 31 Desember 2007 akan ditetapkan oleh kedua belah pihak setiap tahun; (iii) jangka waktu pembayaran berikut pengenaan denda keterlambatan pembayaran sebesar tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia bulanan ditambah 1,3%, (iv) efektif mulai 1 Mei 2007, sisa utang yang belum dibayar atas pembelian bahan bakar sampai dengan 30 April 2007 dikenakan bunga sebesar tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia per tahun ditambah 1,3%, sampai diselesaikan dengan menerbitkan obligasi PLN paling lambat tanggal 31 Agustus 2007; (v) utang kepada Pertamina, termasuk obligasi yang akan diterbitkan maksimum sebesar Rp18 triliun (jangka penuh); (vi) perjanjian ini berlaku untuk 5 tahun sejak tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011; dan (vii) Sucofindo ditunjuk sebagai surveyor independen.

Perjanjian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan. Berdasarkan Addendum VIII tertanggal 5 Februari 2022, kesepakatan harga jual beli bahan bakar minyak (HSD dan IFO) sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2022 antara Pertamina dan Perusahaan adalah sebagai berikut:

a. Terhitung sejak 1 September 2021, seluruh tanggung jawab, hak dan kewajiban Pertamina berdasarkan perjanjian dialihkan kepada PT Pertamina Patra Niaga.

33. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

a. *Fuel Supply Agreements* (continued)

ii. *Fuel*

The Company through PLN and Pertamina entered into a Fuel Sell and Purchase Agreement No. 071.PJ/060/DIR/2001 dated 8 October 2001. This agreement has been amended on 16 May 2007, whereby PLN and Pertamina agreed among others: (i) the monthly fuel price to be used for the period from 1 January until 30 April 2007 was determined by Pertamina and, that the fuel price of 109.8% from Mid Oil Platts Singapore ("MOPS") plus VAT was used for the period from 1 May 2007 until 31 December 2007; (ii) the fuel price subsequent to 31 December 2007 will be determined by both parties every year; (iii) the terms of payment and penalty charges on late payments with a rate of monthly Certificate of Bank Indonesia plus 1.3%; (iv) effective from 1 May 2007, the unpaid balances of payables for purchases of fuel until 30 April 2007 will bear interest at a rate per annum of Certificate of Bank Indonesia plus 1.3%, until settled by the issuance of PLN Bonds, which is no later than 31 August 2007; (v) the maximum payables to Pertamina, including the bonds which will be issued amounting to Rp18 trillion (full amount); (vi) this agreement is valid for 5 years which is from 1 January 2007 until 31 December 2011; and (vii) that Sucofindo is assigned as an independent surveyor.

The agreement has been amended several times. Based on Amendment VIII dated 5 February 2022, the agreement on the sale and purchase price of fuel oil (HSD and IFO) from 1 January 2021 to 31 December 2022 between Pertamina and the Company is as follows:

a. As at 1 September 2021, all of Pertamina's responsibilities, rights and obligations under the agreement have been transferred to PT Pertamina Patra Niaga.

PT PLN (PERSERO) DAN ANAK PERUSAHAAN / PT PLN (PERSERO) AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5100 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

33. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

a. Perjanjian Pengadaan Bahan Bakar (lanjutan)

i. Bahan Bakar Minyak ("BBM") (lanjutan)

a. Perubahan formulasi harga bahan bakar minyak yang berlaku sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2023.

b. Penyerahan BBM pada tanggal 1 hingga akhir bulan, MOPS, Jakarta Interbank Spot Dollar ("JISDOR") dan Jakarta Interbank Offered Rate ("JIBOR") yang berlaku adalah rata-rata tengah MOPS, rata-rata JISDOR dan rata-rata JIBOR selama 1 bulan, yang terbit sejak tanggal 25 pada 2 bulan sebelumnya sampai dengan tanggal 24 pada 1 bulan sebelum bulan penyerahan BBM.

Perusahaan telah menyelesaikan pembelian HSD, Biosolar, dan MFO selama tahun 2023 berdasarkan harga tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 1 Januari 2022, saldo utang usaha atas pembelian bahan bakar kepada Pertamina adalah masing-masing sebesar Rp214.110, Rp24.455 dan Rp33.450.

33. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

a. *Fuel Supply Agreements* (continued)

i. Fuel (continued)

a. Changes in the formulation of fuel prices are effective from 1 January 2022 to 31 December 2023.

b. Fuel delivery on the 1st to the end of the month, MOPS, Jakarta Interbank Spot Dollar ("JISDOR") and Jakarta Interbank Offered Rate ("JIBOR") that apply are the middle average of MOPS, JISDOR average and 1-month JIBOR average, which are issued from the 25th of the previous 2 months to the 24th of the 1st month prior to the month of fuel delivery.

The Company has recorded purchases of HSD, Biosolar and MFO for the year 2023 based on those prices.

As at 31 December 2023, 2022 and 1 January 2023, the trade payables outstanding for purchases of fuel from Pertamina amounted to Rp214.110, Rp24.455 and Rp33.450, respectively.

b. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik ("PJBTL")

Perusahaan memiliki sejumlah PJBTL dengan PLN. Dalam perjanjian tersebut, PLN membayar pasokan tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan formula pembayaran. Pembayaran tersebut mencakup komponen biaya kapasitas, energi, operasional dan pemeliharaan yang tergantung pada tingkat pasokan energi serta variabel lain yang ditentukan dalam perjanjian.

Pada tanggal 30 Desember 2023, PLN dan Perusahaan telah menandatangani amandemen dan penyelesaian kembali PJBTL untuk periode kontrak dari tahun 2023 sampai dengan 2032. Perjanjian ini telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir pada tanggal 28 Desember 2023 terkait dengan perluasan wilayah.

Pada tanggal 31 Desember 2023, amandemen dan penyelesaian kembali PJBTL terdiri dari: 8 Buku PJBTL atas wilayah Jawa-Bali, 7 Buku PJBTL atas wilayah Sumatra, 4 atas Buku PJBTL atas wilayah Kalimantan, 1 Buku PJBTL atas wilayah Maluku dan 5 Buku PJBTL atas wilayah Sulawesi.

b. *Power Purchase Agreements ("PPA")*

The Company has various PPAs with PLN. Under those agreements, PLN will pay the Company for the supply of electricity at the amount determined based on the payment formula. Such a payment formula includes the cost of capacity, energy, as well as operations and maintenance components which depends on the level of energy supplied and other variables as stipulated in the agreement.

On 30 December 2023, PLN and the Company signed amendments and restatements of the PPA for the contract period from 2023 to 2032. This agreement has been amended several times with the latest amendment on 28 December 2023 related to the area expansion.

On 31 December 2023, the amendments and restatements of the PPA consisted of: 8 books of PPA for the Java-Bali area, 7 books of PPA for the Sumatra area, 4 books of PPA for the Kalimantan area, 1 book of PPA for the Maluku area and 5 books of PPA for the Sulawesi area.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5101 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

33. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

c. Perjanjian Operasi dan Pemeliharaan

Perusahaan memiliki beberapa Perjanjian Jasa Operasi dan Pemeliharaan sampai dengan 31 Mei 2025. Sebagai tindak lanjut pembentukan subholding yang dijelaskan pada Catatan 2b, manajemen berkeyakinan bahwa beberapa Perjanjian Jasa Operasi dan Pemeliharaan terkait aset kegiatan usaha pembangkitan listrik yang dialihkan akan diterminasi sejak 1 Januari 2023.

Saat ini, Perusahaan masih memiliki 3 Perjanjian Jasa Operasi dan Pemeliharaan dengan unit pembangkit PLN yaitu PLTU Bolok-Ropa, PLTU Sambelia, PLTU Bangka-Belitung, PLTU Kendari Unit 3 dan PLTU Fidore.

d. Penyelesaian barang modal

Pada tanggal 19 Desember 2017, Perusahaan telah menandatangani perjanjian novasi dengan PLN, Konsorsium Doosan Sinergity Co. Ltd dan HK sehubungan dengan Perjanjian Kontrak No. 0128.PJ/DAN.02.01/DIR/2017, tertanggal 29 Maret 2017 untuk proyek ass sn PLTGU Muara Tawar Blok 2, 3 dan 4. Perjanjian tersebut terakhir diubah yaitu Addendum IV, pada tanggal 31 Agustus 2023 terkait kerja tambah untuk switchyard 500 kV diameter 6, 11 dan 12 serta kerja tambah untuk renaturasi blok 2.

Pada tanggal 29 Maret 2023, Perusahaan dengan Konsorsium Mitsubishi Corporation dan PT Wijaya Karya (Persero) telah menandatangani kesepakatan bersama penerimaan pengalihan kontrak No. 1255.PJ/DAN.02.01/DIR/2018, tertanggal 28 Agustus 2018 terkait proyek PLTGU Muara Karang sebagai akibat pembentukan subholding. Perjanjian tersebut terakhir diubah yaitu Addendum IV, pada tanggal 12 Juni 2023 terkait perubahan pihak dalam kontrak dan nilai kontrak dikarenakan perubahan PPN, serta penambahan ketentuan tentang klaim biaya overhead di dalam kontrak.

33. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

c. Operation and Maintenance Agreements

The Company has several Operation and Maintenance Service Agreements up to 31 May 2025. As a follow-up to the establishment of subholding described in Note 2b, management believes that the Operation and Maintenance Service Agreement related to assets of power generation business activities transferred will be terminated from 1 January 2023.

Currently, the Company still has 3 Operation and Maintenance Service Agreements with PLN units, namely PLTU Bolok-Ropa, PLTU Sambelia, PLTU Bangka-Belitung, PLTU Kendari Unit 3 and PLTU Fidore.

d. Capital expenditures

On 19 December 2017, the Company signed a novation agreement with PLN, Consortium of Doosan Sinergity Co. Ltd and HK which entered into an agreement with Trade Agreement No. 0128.JP/DAN.02.01/DIR/2017, dated 29 March 2017 for the addition project of PLTGU Muara Tawar Block 2, 3 and 4. The latest amendment, Amendment IV dated 31 August 2023 related to variations order for switchyard 500 kV diameter 6, 11, and 12, as well as additional work for renaturation block 2.

On 29 March 2023, the Company and Consortium of Mitsubishi Corporation and PT Wijaya Karya (Persero) entered into an agreement to transfer contract No. 1255.PJ/DAN.02.01/DIR/2018, dated 28 August 2018 regarding the PLTGU Muara Karang project as a result of the establishment of subholding. The latest amendment, Amendment IV, dated 12 June 2023 related to changes in parties to the contract and contract value due to changes in VAT, as well as additional provisions regarding overhead cost claims in the contract.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5.102 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

33. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

d. Perolehan barang modal (lanjutan)

Sehubungan dengan perjanjian diatas dan kegiatan pembangun lainnya, Perusahaan memperoleh fasilitas SBLC dengan rincian sebagai berikut:

33. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

d. Capital expenditures (continued)

In relation to the above agreements and other power plant activities, the Company has SBLC facilities with the following details:

Bank penerbit / Issuing Bank	Penerima manfaat / Beneficiary	Mata uang / Currency	Jumlah / Total (*)
Mandiri	Mitsubishi Corporation	JPY	741,394,000
	Mitsubishi Corporation	JPY	17,472,516
	Mitsubishi Corporation Machinery	JPY	33,391,338
	Mitsubishi Corporation Machinery	JPY	16,999,440
	Doosan Enerbility Co. Ltd.	KRW	2,276,024,121
	Doosan Enerbility Co. Ltd.	USD	3,601,088
	Doosan Enerbility Co. Ltd.	EUR	3,601,440
	SE Global Parts and Products GmbH	EUR	1,060,067
	SE Global Parts and Products GmbH	EUR	3,104,288

(*) dalam jumlah penuh

(*) In full amount

e. Litigasi

Grup dari waktu ke waktu terlibat dalam berbagai tuntutan hukum yang dapat mempengaruhi kegiatan bisnis Grup. Grup berkeyakinan bahwa keputusan yang telah menguntungkan sehubungan dengan tuntutan hukum yang sedang berjalan, atau kewajiban untuk membayar kerugian ganti rugi dari tuntutan hukum tersebut, kemungkinan besar tidak akan mempengaruhi kondisi keuangan atau hasil operasi konsolidasian secara material.

e. Litigation

From time to time, the Group is involved in various legal proceedings as a normal consequence of the Group's business. The Group is of the opinion that adverse decisions in any pending or threatened proceedings or any amounts it may be required to pay by reason thereof, are unlikely to have a material adverse effect on its financial condition or the consolidated results of operations.

34. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL

a. Kategori dan klasifikasi instrumen keuangan

Pada tanggal 31 Desember 2022, Grup mengklasifikasikan kas dan setara kas, deposito berjangka, piutang usaha, piutang lain-lain, rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya dan piutang kepada ventura bersama sebesar Rp44.722.144 (31 Desember 2022: Rp29.920.641 dan 1 Januari 2022: Rp22.272.555) sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

34. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT

a. Categories and classes of financial instruments

As at 31 December 2022, the Group classified its cash and cash equivalents, time deposits, trade receivables, other receivables, restricted cash in banks and time deposits and receivables from joint ventures amounting to Rp44.722.144 (31 December 2022: Rp29.920.641 and 1 January 2022: Rp22.272.555) as financial assets at amortised cost.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/103 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

34. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

a. Kategori dan kelas/kelas instrumen keuangan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2022, Grup mengklasifikasikan utang usaha, utang lain-lain, beban masih harus dibayar, liabilitas sewa dan pinjaman dari pemegang saham sebesar Rp14.372.541 (31 Desember 2022: Rp13.298.917 dan 1 Januari 2022: Rp14.428.035) sebagai kewajiban keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Grup adalah untuk memastikan tersedia sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko liquiditas. Grup beroperasi dengan kebijakan yang telah ditentukan oleh Dewan Direksi.

Dalam melaksanakan aktivitas manajemen risiko, Grup telah memiliki panduan dalam bentuk Pedoman Umum Manajemen Risiko. Pedoman ini mengatur keseimbangan antara fungsi operasional bisnis dengan pengelolaan risiko keuangan.

Risiko keuangan utama Grup adalah pada risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit, dan risiko liquiditas. Manajemen menelaah dan mengeluarkan kebijakan untuk mengelola masing-masing risiko. Grup menerapkan kebijakan manajemen risiko yang bertujuan untuk meminimalisasi pengaruh dari ketidakpastian risiko keuangan terhadap kinerja keuangan Grup. Berikut ini ringkasan kebijakan dan pengelolaan manajemen risiko tersebut.

i. Manajemen risiko mata uang asing

Grup memiliki eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar yang timbul dari transaksi dengan pelanggan maupun pemasok yang dikenominasi dalam mata uang asing, sehingga Grup terekspos terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing.

Kebijakan Grup untuk mengelola eksposur mata uang asing dalam batas yang dapat diterima.

34. *FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT* (continued)

a. *Categories and classes of financial instruments* (continued)

As at 31 December 2022, the Group classified its trade payables, other payables, accrued expenses, lease liabilities and loans from a shareholder amounting to Rp14,372,541 (31 December 2022: Rp13,298,917 and 1 January 2022: Rp14,428,035) as financial liabilities carried at amortised cost.

b. *Financial risk management objectives and policies*

The objectives and policies of the Group's financial risk management are to ensure that adequate financial resources are available for the operation and development of their business, while managing their exposure to market risks (including foreign currency risks and interest rate risks), credit risks and liquidity risks. The Group operates within defined policies approved by the Board of Directors.

In performing the risk management, the Group has established guidance in the form of a Risk Management General Manual. This manual provides guidance to manage the harmonisation between the business's operational function and financial risk management.

The main financial risks of the Group are market risks (including foreign currency risks and interest rate risks), credit risks, and liquidity risks. The management evaluates and establishes policies for managing each of these risks. The Group applies the financial risk management policies to minimise the impact of the financial risks unpredictability on the Group's financial performance. The summary of the financial risk management policies is as follows:

i. *Foreign currency risk management*

The Group has foreign currency exposures arising from transactions with customers and suppliers which are denominated in foreign exchange, therefore the Group is exposed to exchange rate fluctuations.

The Group's policy is to maintain foreign currency exposure within acceptable limits.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ANAK PERUSAHAAN / PT PLN NUSANTARA POWER AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran B104 / Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

34. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

i. Manajemen risiko mata uang asing (lanjutan)

Sensitivitas mata uang asing

Tabel di bawah ini menjelaskan model sensitivitas Grup untuk setiap 10% kenaikan dan penurunan Rupiah terhadap mata uang asing yang relevan. 10% kenaikan dan penurunan menggambarkan penilaian manajemen terhadap perubahan yang rasional pada nilai tukar setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini. Analisis sensitivitas ini hanya mencakup saldo item moneter setelah pajak dalam mata uang asing dan menyesuaikan translasi pada akhir tahun untuk 10% perubahan dalam nilai tukar mata uang asing.

34. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT (continued)

b. Financial risk management objectives and policies (continued)

i. Foreign currency risk management (continued)

Foreign currency sensitivity

The following table explains the details of the Group's sensitivity to a 10% increase and decrease in Rupiah against the relevant foreign currencies. 10% increase or decrease represents the management's assessment of the reasonably possible changes in foreign currency rates after considering the current economic conditions. The sensitivity analysis includes only after tax outstanding foreign denominated monetary items and adjusts their translation at the end of the year for a 10% change in foreign currency rates.

	Dampak pada laba sebelum pajak dalam AS$ / Effect of profit before tax in US$				
	31 Desember/December 2023		31 Desember/December 2022		
	+10%	-10%	+10%	-10%	
Aset keuangan					Financial assets
Kas dan setara kas	36,880	(36,880)	66,376	(66,376)	Cash and cash equivalents
Deposito berjangka	36,398	(36,398)	16,012	(16,012)	Time deposits
Piutang lain dan deposito berjangka diluar penggunaannya	3,408	(3,408)	31,408	(31,408)	Restricted cash in banks and time deposits
Piutang lainnya	1,283	(1,283)	1,681	(1,681)	Other receivables
Piutang kepada ventura bersama	81,513	(81,513)	80,417	(80,417)	Receivables from joint ventures
Sub-jumlah	159,483	(159,483)	176,897	(176,897)	Subtotal
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Pinjaman dari pemegang saham	(177,488)	177,488	(206,110)	206,110	Loans from a shareholder
Utang usaha	(3,403)	3,403	(20,208)	20,208	Trade payables
Sub-jumlah	(180,891)	180,891	(226,318)	226,318	Subtotal
Jumlah	(21,391)	21,391	(49,420)	49,420	Total

ii. Manajemen risiko tingkat suku bunga

Pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 1 Januari 2022, manajemen percaya risiko tingkat suku bunga adalah minimal dikarenakan Grup hanya terekspos risiko tingkat suku bunga melalui saldo kas di bank, piutang kepada ventura bersama dan pinjaman dari pemegang saham.

ii. Interest rate risk management

As at 31 December 2023, 2022 and 1 January 2022, management believes that the exposure from interest rate risk is minimal because the Group is exposed interest rate risk only from cash in banks, receivables from joint ventures and loans from a shareholder.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN SENTRAS ANAKPERUSAHAAN/ AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran B105 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

34. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

i. Manajemen risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

Sensitivitas tingkat suku bunga

Analisa sensitivitas berikut telah ditentukan berdasarkan eksposur Grup terhadap tingkat suku bunga untuk saldo instrumen keuangan terutang setelah pajak pada tanggal pelaporan. Analisa ini disusun dengan mengasumsikan jumlah saldo aset dan liabilitas terutang pada akhir periode pelaporan, berlaku sepanjang tahun. Analisa sensitivitas ini menggunakan asumsi kenaikan dan penurunan sebesar 50 basis poin ("bp") pada tingkat bunga yang relevan dengan variabel lain dianggap konstan. Kenaikan dan penurunan sebesar 50 bp menurutkan penilaian manajemen atas kemungkinan perubahan yang rasional terhadap tingkat bunga setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini.

Pada tanggal 31 Desember 2023, jika tingkat suku bunga atas pinjaman dan pemegang saham 50 bp lebih tinggi/lebih rendah, dengan asumsi semua variabel lain konstan, laba setelah pajak untuk tahun berjalan akan menjadi lebih rendah/tinggi sebesar Rp8.530 (31 Desember 2022: Rp10.287 dan 1 Januari 2022: Rp9.411).

ii. Manajemen risiko kredit

Pada tanggal 31 Desember 2023, nilai maksimum eksposur dari risiko kredit adalah Rp44.730.092 (31 Desember 2022: Rp29.892.183 dan 1 Januari 2022: Rp29.271.754). Risiko kredit terutama berasal dari rekening bank, deposito berjangka, piutang usaha, piutang lain-lain, rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya dan piutang kepada ventura bersama.

Semua rekening bank, deposito berjangka, dan rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya ditempatkan di bank lokal yang memiliki reputasi.

34. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT (continued)

b. Financial risk management objectives and policies (continued)

i. Interest rate risk management (continued)

Interest rate sensitivity

The sensitivity analysis below has been determined based on the Group's exposure to interest rates for financial instruments after tax at the reporting date. The analysis has been prepared by assuming that the amounts of assets and liabilities that were outstanding at the end of the reporting period were outstanding for the whole year. The sensitivity analysis uses an assumption of a 50 basis point ("bp") increase and decrease in the relevant interest rates with all other variables being held constant. A 50 bp increase or decrease represents management's assessment of the reasonably possible changes in interest rates after considering the current economic conditions.

As at 31 December 2023, if interest rates on loans from a shareholder had been 50 bp higher/lower with all other variables being held constant, the positive profit for the year would have been Rp8.530 (31 December 2022: Rp10.287 and 1 January 2022: Rp9.411) lower/higher.

ii. Credit risk management

As at 31 December 2023, the total maximum exposure from credit risk was Rp44.730.092 (31 December 2022: Rp29.892.183 and 1 January 2022: Rp29.271.754). Credit risk arises from cash in banks, time deposits, trade receivables, other receivables, restricted cash in banks and time deposits and receivables from joint ventures.

All of the cash in banks, time deposits and restricted cash in banks and time deposits are placed in reputable local banks.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN SEKUTU AS ANANTA AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/106 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

34. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

34. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT (continued)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

b. Financial risk management objectives and policies (continued)

iii. Manajemen risiko kredit (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 1 Januari 2022, PLN memberikan kontribusi masing-masing sebesar 99,05%, 99,51% dan 99,07% dari seluruh nilai piutang usaha. Manajemen berkeyakinan bahwa risiko kredit terbatas karena risiko kegagalan kredit dari PLN rendah dimana Grup telah secara legal terikat dalam perjanjian dengan PLN untuk penjualan listrik dan jasa lainnya.

Aset keuangan tertentu dinilai secara individu untuk penurunan nilai dan jika ditemukan terjadi penurunan nilai, rugi penurunan nilai harus dialokasikan secara individu.

Pada setiap akhir tahun pelaporan, Grup diharuskan untuk menilai penyisihan kerugian kredit ekspektasian untuk semua piutang. Grup telah mencatat penambahan atas penyisihan kerugian kredit sebesar Rp3.901 pada tanggal 31 Desember 2023 (31 Desember 2022: Rp32.641 dan 1 Januari 2022: Rp nil). Tidak ada pergerakan lain dalam penyisihan kerugian kredit selain dari penambahan cadangan kerugian sebesar Rp12.901 pada tanggal 31 Desember 2023.

iii. Credit risk management (continued)

As at 31 December 2023, 2022 and 1 January 2022, PLN gave a contribution of 99.05%, 99.51% and 99.07% from the total trade receivables, respectively. Management believes that the credit risk is limited because the credit default of PLN is low since the Group has legally binding agreement with PLN for sales of electricity and other services transactions.

Certain financial assets are individually assessed for impairment and, if found to be impaired, have an impairment loss assigned to them on an individual basis.

At the end of each reporting date, the Group is required to assess an allowance for ECLs for all receivables. The Group has recorded an addition of credit loss allowance amounting to Rp3.901 as at 31 December 2023 (31 December 2022: Rp32.641 and 1 January 2022: Rp nil). There are no other movements within the credit loss allowance other than reversal of loss allowance amounting to Rp12.901 as at 31 December 2023.

iv. Manajemen risiko likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko bahwa Grup akan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban terkait dengan liabilitas keuangan yang diselesaikan dengan pembayaran kas atau aset keuangan lainnya. Tanggung jawab utama manajemen risiko likuiditas terletak pada Direksi, yang telah membangun kerangka manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk persyaratan manajemen likuiditas dan pendanaan Grup. Grup mengelola risiko likuiditas dengan menjaga kecukupan kas dan cadangan fasilitas pinjaman dengan terus menerus memantau perkiraan dan realisasi arus kas aktual dan mencocokkan profil jatuh tempo liabilitas keuangan.

iv. Liquidity risk management

Liquidity risk is defined as the risk that the Group will encounter difficulty in meeting its obligations associated with financial liabilities that are settled by delivering cash or other financial assets. The ultimate responsibility for liquidity risk management rests in the Directors, who have built an appropriate liquidity risk management framework for the management of the Group's funding and liquidity management requirements. The Group manages its liquidity risk by maintaining adequate cash and reserve borrowing facilities by continuously monitoring the forecast and actual cash flows and by matching the maturity profiles of financial liabilities and assets.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN SEKUTU AS ANANTA AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/107 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

34. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

iv. Manajemen risiko likuiditas (lanjutan)

Tabel dibawah ini menganalisa liabilitas keuangan Grup pada tanggal pelaporan berdasarkan kelompok jatuh temponya dan sisa periode hingga tanggal jatuh tempo kontraktual. Jumlah yang ditunjukkan dalam tabel ini adalah nilai arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto termasuk estimasi pembayaran bunga.

34. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT (continued)

b. Financial risk management objectives and policies (continued)

iv. Liquidity risk management (continued)

The table below analyses the Group's financial liabilities at the reporting date into relevant maturity groupings based on the remaining period to the contractual maturity date. The amounts disclosed in the table represent contractual undiscounted cash flows including estimated interest payments.

31 Desember/December 2023						
	Kurang dari satu tahun / Less than one year	Lebih dari satu tahun sampai dengan lima tahun / More than one year but not exceeding five years	Lebih dari lima tahun / More than five years	Lebih dari lima tahun / More than five years	Jumlah / Total	
Utang usaha	[illegible]	-	-	-	[illegible]	Trade payables
Liab/Sewa	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Lease liabilities
Utang lain-lain	[illegible]	-	-	-	[illegible]	Other payables
Beban masih harus dibayar	[illegible]	-	-	-	[illegible]	Accrued expenses
Pinjaman dari pemegang saham	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Loans from a shareholder
Jumlah	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Total

31 Desember/December 2022						
	Kurang dari satu tahun / Less than one year	Lebih dari satu tahun sampai dengan lima tahun / More than one year but not exceeding five years	Lebih dari lima tahun / More than five years	Lebih dari lima tahun / More than five years	Jumlah / Total	
Utang usaha	[illegible]	-	-	-	[illegible]	Trade payables
Liab/Sewa	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Lease liabilities
Utang lain-lain	[illegible]	-	-	-	[illegible]	Other payables
Beban masih harus dibayar	[illegible]	-	-	-	[illegible]	Accrued expenses
Pinjaman dari pemegang saham	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Loans from a shareholder
Jumlah	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Total

*) Disajikan kembali (Ref Catatan 2)

*) As restated (refer to Note 2)

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/108. Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

34. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

c. Manajemen modal

Grup mengelola rasio modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan kelangsungan usaha dan untuk memastikan pemenuhan batasan rasio kesulitan modal. Struktur modal Grup terdiri ekuitas pemegang saham induk, yang terdiri dari modal saham, tambahan modal disetor dan saldo laba.

Dewan Direksi Grup secara berkala melakukan tinjauan struktur permodalan Grup. Sebagai bagian dari tinjauan ini, Dewan Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

Grup berusaha untuk meminimalkan biaya modal sehingga dapat memaksimalkan nilai Grup. Oleh karena itu, kebijakan Grup dalam mencari pendanaan akan selalu memperhitungkan risiko keuangan yang mungkin timbul di masa depan.

d. Estimasi nilai wajar

Pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 1 Januari 2022, nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan mendekati nilai wajarnya sebagai berikut:

1. Kas dan setara kas, deposito berjangka, rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya, piutang usaha dan piutang lain-lain merupakan aset keuangan jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, sehingga nilai tercatat aset keuangan tersebut kurang lebih telah mencerminkan nilai wajarnya.

2. Nilai tercatat dari piutang ventura bersama mendekati nilai wajarnya karena merupakan bunga pinjaman mengambang yang pada awalnya diakui pada nilai wajar berdasarkan tingkat bunga pasar pada saat tanggal pengakuan awal.

3. Utang usaha, utang lain-lain, dan beban masih harus dibayar merupakan liabilitas jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sehingga nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut kurang lebih telah mencerminkan nilai wajarnya.

4. Pinjaman dari pemegang saham merupakan pinjaman yang memiliki suku bunga variabel sehingga nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut telah mendekati nilai wajar.

34. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT (continued)

c. Capital management

The Group manages capital risk to ensure that it will be able to continue as a going concern and to ensure compliance with the covenants of the capital adequacy ratio. The Group's capital structure consists of equity shareholders that consist of capital stock, additional paid-in capital and retained earnings.

The Board of Directors of the Group periodically reviews the Group's capital structure. As part of this review, the Board of Directors considers the cost of capital and related risks.

The Group aims to minimize the cost of capital, in order to maximize its value. Therefore, the Group's policy in seeking the funding that will always take into account the financial risks that may arise in the future.

d. Fair value estimation

As at 31 December 2023, 2022 and 1 January 2022, the carrying amounts of the financial assets and liabilities approximate their fair values as follows:

1. Cash and cash equivalents, time deposits, restricted cash in banks and time deposits, trade receivables and other receivables are due within 12 months, thus the carrying values of the financial assets approximate their fair values.

2. The carrying amount of the receivables from joint ventures approximates its fair value as they are floating interest receivables which were initially recognized at fair value based on market rates at the initial recognition date.

3. Trade payables, other payables, and accrued expenses are due within 12 months, thus the carrying values of the financial liabilities approximate their fair values.

4. Loans from a shareholder comprises liabilities with floating interest rates where the carrying values of the financial liabilities approximate their fair values.

PT PLN NUSANTARA POWER DAN SENTRAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/100 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

34. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

34. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT (continued)

e. Saling hapus aset dan kewajiban keuangan

Aset dan kewajiban keuangan saling hapus dan jumlah neto-nya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian ketika Grup memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut, dan terdapat niat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan kewajiban secara bersamaan.

Aset dan kewajiban keuangan berikut ini tunduk kepada saling hapus, tunduk pada pengaturan induk untuk penyelesaian secara neto yang sejenis kesepakatan atau perjanjian serupa pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

e. Offsetting financial assets and liabilities

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the consolidated statements of financial position when the Group currently has a legally enforceable right to offset the recognised amounts, and there is an intention to settle on a net basis or realize the asset and settle the liability simultaneously.

The following financial assets and liabilities are subject to offsetting, enforceable master netting arrangements and similar agreements as at 31 December 2023 and 2022:

	Jumlah bruto yang telah diakui	Jumlah bruto yang telah diakui dan dihapus dengan jumlah bruto yang telah diakui	Jumlah neto yang disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian	Jumlah yang tunduk pada master netting arrangements	Jumlah bruto yang telah diakui dan dihapus dengan jumlah yang tunduk pada master netting arrangements	Jumlah neto	
31 Desember 2023							31 December 2023
Aset keuangan							Financial assets
Piutang usaha	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Trade receivables
Liabilitas keuangan							Financial liabilities
Utang usaha	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	Trade payables
Pinjaman dan utang kepada pihak berelasi	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Loans from shareholder and related parties
31 Desember 2022							31 December 2022
Aset keuangan							Financial assets
Piutang usaha	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Trade receivables
Liabilitas keuangan							Financial liabilities
Utang usaha	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	Trade payables
Pinjaman dan utang kepada pihak berelasi	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Loans from shareholder and related parties

PT PLN NUSANTARA POWER DAN SEKUTU ANAK PERUSAHAAN
PT PLN NUSANTARA POWER AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran B110 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

35. INFORMASI ARUS KAS

35. CASH FLOW INFORMATION

a. Transaksi non-kas

a. Non-cash transactions

Pengungkapan tambahan atas aktivitas investasi dan pendanaan non-kas:

Supplemental disclosures on non-cash investing and financing activities:

	31 Desember December 2023	31 Desember December 2022*	
Aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak mempengaruhi arus kas:			Non-cash investing and financing activities:
Saling hapus piutang usaha dengan utang usaha	6,154,219	5,163,162	Offsetting trade receivables with trade payables
Saling hapus piutang usaha dengan utang bunga	140,994	80,931	Offsetting trade receivables with interest payables
Pembayaran dividen dengan memperhitungkan piutang usaha	5,346,477	5,310,033	Dividend payments through trade receivables offset
Penambahan deposito jangka panjang dengan reklasifikasi dari rekening bank dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	346,595	-	Placement of long-term time deposits through reclassification from restricted cash in banks and time deposits
Penambahan aset tetap dari fasilitas sewa	1,284,841	2,128,947	Additions of property, plant and equipment through lease facility
Perolehan aset tetap melalui utang usaha	1,274,931	1,752,392	Additions of property, plant and equipment through trade payables
Perolehan aset tetap melalui kapitalisasi biaya pinjaman	112,565	86,223	Additions of property, plant and equipment through capitalization of borrowing costs
Penambahan properti investasi yang berasal dari reklasifikasi aset tetap	31	-	Additions of investment property from reclassification of property, plant and equipment
Penambahan nilai properti investasi melalui hasil revaluasi nilai wajar	83,284	116,588	Additions of carrying amount of investment properties through revaluation of assets
Dividen dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang belum diterima	8,451	-	Dividends from associates and joint ventures that have not been received
Penempatan modal saham melalui pengalihan aset dan liabilitas kegiatan usaha pembangkitan tenaga listrik PLN	151,255,349	-	Placement of share capital through transfer of assets and liabilities of PLN's power generation business activities

* Disajikan kembali (Hal Catatan 2)

* As restated (refer to Note 2)

PT PLN NUSANTARA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 8/111 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

35. INFORMASI ARUS KAS (lanjutan)

b. Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan

Tabel di bawah ini menunjukan rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

35. CASH FLOW INFORMATION (continued)

b. Reconciliation of liabilities arising from financing activities

The below table set out the reconciliation of the liabilities arising from financing activities for the years ended 31 December 2023 and 2022 as follows:

	31 Desember/December 2023						
	Arus kas dari aktivitas pendanaan / Cash flows from financing activities			Perubahan lain-lain / Changes other			
	Saldo awal / January 2023	Penerimaan / Receipts	Pembayaran / Payments	Perubahan nilai wajar / Changes in fair value	Perubahan nilai tukar / Changes in foreign exchange rate	Saldo akhir / December 2023	
Pinjaman jangka panjang / Long term loans	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	Lainnya / Others
Liabilitas sewa / Lease liabilities	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	Lainnya / Others

	31 Desember/December 2022						
	Arus kas dari aktivitas pendanaan / Cash flows from financing activities			Perubahan lain-lain / Changes other			
	Saldo awal / January 2022	Penerimaan / Receipts	Pembayaran / Payments	Perubahan nilai wajar / Changes in fair value	Perubahan nilai tukar / Changes in foreign exchange rate	Saldo akhir / December 2022	
Pinjaman jangka panjang / Long term loans	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	Lainnya / Others
Liabilitas sewa / Lease liabilities	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	Lainnya / Others

* Termasuk pinjaman dalam yang mata uang mata uang asing dan pinjaman mata uang asing dan pinjaman mata uang asing

36. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 5 April 2024.

36. MANAGEMENT'S RESPONSIBILITY AND APPROVAL OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The preparation and fair presentation of the consolidated financial statements were the responsibilities of the management and were approved by the Directors and authorized for issue on 5 April 2024.

2023

Laporan Tahunan
Annual Report

LEADING THE ENERGY TRANSITION TOWARDS SUSTAINABLE FUTURE

Memimpin Transisi Energi Menuju Masa Depan Berkelanjutan

PLN
Nusantara Power

Kantor Pusat
Head Office
Jl. Ketintang Baru No. 11
Surabaya 60231
Jawa Timur, Indonesia

Kantor Strategis Jakarta
Jakarta Strategic Office
Inc Office Park Lt. 7 ABCD
Jl. TB Simatupang No. 36
CBD Jakarta, Indonesia

+62 31-8283 860
+62 31-8283 861
info@plnnusantarapower.co.id
www.plnnusantarapower.co.id